PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT NOMOR 28 TAHUN 2023 TENTANG RKPD TAHUN 2024

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT
TAHUN 2023



BUPATI PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR 28 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Barat tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

16. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2005-2025 (Periode Efektif 2016-2025) (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 15);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 76);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 32);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 72);

21. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 15);

22. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021 Nomor 330), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022 Nomor 348);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2024.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Barat.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Pesisir Barat.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
6. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rapat Koordinasi Teknis Pembangunan Daerah selanjutnya disingkat Rakortekbang adalah rapat koordinansi teknis antara kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian dan daerah untuk mencapai target pembangunan nasional.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.

BAB II
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

(1) RKPD Tahun 2024 merupakan Penjabaran dari RPJMD.
(2) RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
    1) rancangan kerangka ekonomi daerah;
    2) prioritas pembangunan daerah;
    3) rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
    4) hasil kesepakatan Rakortekbang Tahun 2023;
(3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RKP Tahun 2024, program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan RKPD Provinsi serta memuat penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik daerah.
(4) Tahapan penyusunan RKPD Tahun 2024 dilaksanakan dengan memanfaatkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Pasal 3

RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, digunakan sebagai bahan evaluasi dan menjadi dasar penyusunan KUA, PPAS dan bahan sinkronisasi penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2024.

Pasal 4

(1) Rancangan Akhir RKPD Tahun 2024 dijadikan sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD Tahun 2024.

(2) Rancangan peraturan daerah tentang RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Bupati kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi untuk difasilitasi.

Pasal 5

(1) Penjabaran RPJMD sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) meliputi tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, kinerja dan program yang dituangkan dalam RKPD.

(2) Selain penjabaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) RKPD memuat kegiatan dan sub kegiatan yang berasal dari seluruh Rencana Kerja Perangkat Daerah yang mempedomani pada Rencana Strategis Perangkat Daerah.

(3) Penyusunan Nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Pasal 6

(1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB VII : PENUTUP

(2) RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 3 Juli 2023

BUPATI PESISIR BARAT,

ttd

AGUS ISTIQLAL

Diundangkan di Krui
pada tanggal 3 Juli 2023

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT,

ttd

JON EDWAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2023 NOMOR 452

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL .....
PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT NOMOR 28 TAHUN 2023
TENTANG RKPD TAHUN 2024.....
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iv
DAFTAR GAMBAR/GRAFIK xvi

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan I-8
1.3 Hubungan Antar Dokumen I-10
1.4 Maksud dan Tujuan I-18
1.4.1 Maksud..... I-18
1.4.2 Tujuan I-18
1.5 Sistematika Dokumen RKPD I-19

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah..... II-1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi II-1
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat..... II-27
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum..... II-55
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah II-203
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai tahun berjalanan dan Realisasi RPJMD II-212
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah..... II-305
2.3.1 Permasalahan Daerah yang berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah..... II-305
2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah II-307
2.4 Capaian Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) II-313

BAB III. KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah..... III-1
3.1.1 Kinerja Makro Ekonomi Daerah..... III-5
3.1.2 Kinerja Sosial Ekonomi Daerah III-19
3.1.3 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah.. III-28

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah III-47
3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan III-52
3.2.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah III-68
3.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah III-74
3.2.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah III-85

BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan IV-2
4.2 Prioritas dan Sasaran Pembanguanan Tahun 2024 ..... IV-13
4.2.1 Program Prioritas Daerah IV-37
4.2.2 Dukungan Terhadap Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainnable Development Goals (TPB/SDGs) IV-49
4.2.3 Dukungan Terhadap Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) IV-54
4.3 Pembanguann Kewilayahan Kabupaten Pesisir Barat IV-58

BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1 Program dan Kegiatan Prioritas Daerah V-18
5.2 Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pendanaan V-31

BAB VI. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

6.1 Indikator Kinerja Utama VI-2
6.2 Indikator Kinerja Daerah VI-6
6.3 Inovasi Daerah VI-37
6.3.1 Latar Belakang VI-37
6.3.2 Keterkaitan Inovasi yang dikembangkan dengan Tema RKP 2024 ..... VI-38
6.3.3 Relevansi dengan Konsep Perencanaan Berbasis Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS) . VI-38
6.3.4 Ruang Lingkup Inovasi VI-39
6.3.5 Tujuan dan Sasaran VI-39
6.3.6 Kebaruan Inovasi (Novelty) dari Inovasi yang dikembangkan VI-39
6.3.7 Rencana Inovasi VI-40

BAB VII. PENUTUP

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Pesisir Barat	II-3
Tabel 2.2.	Nama Gunung dan Tingginya di Kabupaten Pesisir Barat	II-5
Tabel 2.3.	Tinggi Wilayah dan Jarak ke Ibukota Menurut Kecamatan Kabupaten Pesisir Barat	II-5
Tabel 2.4.	Data Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Pesisir Barat Berdasarkan Kecamatan	II-7
Tabel 2.5.	Pengamatan Unsur Iklim Menurut Bulan Kabupaten Pesisir Barat	II-9
Tabel 2.6.	Jumlah Curah Hujan Menurut Bulan Kabupaten Pesisir Barat	II-10
Tabel 2.7.	Kawasan Lindung dan Konservasi Kabupaten Pesisir Barat	II-17
Tabel 2.8.	Jumlah penduduk Kabupaten Pesisir Barat Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2022(Semester I)	II-23
Tabel 2.9.	Jumlah penduduk Kabupaten Pesisir Barat Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Tahun 2021-2022	II-25
Tabel 2.10.	PDRB ADHB dab PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022 (miliar rupiah)	II-30
Tabel 2.11.	Laju PDRB ADHK Seri 2010 Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018- 2022 (dalam persen)	II-31
Tabel 2.12.	Distribusi PDRB ADHB Seri 2010 Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018- 2022 (dalam persen)	II-33
Tabel 2.13.	PDRB ADHK Menurut Pengeluaran Kabupaten Pesisir Barat 2018-2022 (Juta Rupiah)	II-35
Tabel 2.14.	PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Kabupaten Pesisir Barat 2018-2022 (Juta Rupiah)	II-36
Tabel 2.15.	Laju PDRB ADHK Menurut Pengeluaran Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022(Dalam Persen)	II-37
Tabel 2.16.	Inflasi Kota Bandar Lampung dan Kota Metro Tahun 2018-2022	II-38
Tabel 2.17.	Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022	II-40
Tabel 2.18.	Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022	II-41
Tabel 2.19.	Angka Kesakitan Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020-2022	II-43

Tabel 2.20. Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2018-2022 ..... II-43
Tabel 2.21. Harapan Lama Sekolah Tahun 2018-2022 ..... II-44
Tabel 2.22. Pengeluaran Riil Perkapita Tahun 2018 - 2022 ..... II-45
Tabel 2.23. Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Untuk Makanan dan Non Makanan Kabupaten Pesisir Barat Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2022 ..... II-46
Tabel 2.24. Persentase Kelulusan dan Persentase Putus Sekolah Tahun 2018-2022 ..... II-46
Tabel 2.25. Angka Partisipasi Murni Kabupaten Pesisir Barat tahun 2018- 2022 ..... II-46
Tabel 2.26. Angka Partisipasi Kasar kabupaten pesisir barat tahun 2018- 2022 ..... II-47
Tabel 2.27. Lokasi Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2022 ..... II-51
Tabel 2.28. Seni dan Budaya Kabupaten Pesisir Barat Menurut Kecamatan Tahun 2022 ..... II-52
Tabel 2.29. Jumlah Organisasi Kabupaten Pesisir Barat Berdasarkan Kecamatan Tahun 2021-2022 ..... II-53
Tabel 2.30. Jumlah Pemuda yang mendapatkan Pelatihan Keterampilan Kewirausahaan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022 ..... II-53
Tabel 2.31. Jumlah Pemuda yang Berwirausaha Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022 II-54
Tabel 2.32. Perkembangan Olahraga Kabupaten Pesisir Barat Berdasarkan Kecamatan Tahun 2021 ..... II-54
Tabel 2.33. Persatuan Cabang Olahraga Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022 ..... II-55
Tabel 2.34. Data Pendidikan Tingkat PAUD Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2022 ..... II-56
Tabel 2.35. Data Pendidikan Tingkat SD sederajat Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2022 ..... II-56
Tabel 2.36. Data Pendidikan Tingkat SMP Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2022 ..... II-57
Tabel 2.37. Angka Buta Huruf Tahun 2018-2022 ..... II-58
Tabel 2.38. Angka Melek Huruf Tahun 2018-2022 ..... II-59
Tabel 2.39. Angka Partisipasi Sekolah Tahun 2018-2022 ..... II-59
Tabel 2.40. Jumlah Anak Putus Sekolah Kabupaten Pesisir Barat Berdasarkan Kecamatan Tahun 2021-2022 ..... II-60
Tabel 2.41. Indikator Pendidikan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2022 ..... II-60

Tabel 2.42. Analisis Faktor Determinan AKI Dan AKB Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022 ..... II-62
Tabel 2.43. Data Pelayanan TB Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022 ..... II-64
Tabel 2.44. Data Kasus HIV Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022 ..... II-64
Tabel 2.45. Jumlah Sarana Kesehatan di Kecamatan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022 ..... II-65
Tabel 2.46. Jumlah Tenaga Kesehatan di Kecamatan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021 ..... II-65
Tabel 2.47. Pencapaian Indikator Kinerja Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022 ..... II-67
Tabel 2.48. Jumlah Kunjungan Rawat Jalan dan Rawat Inap Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2022 ..... II-69
Tabel 2.49. Vaksinasi Covid-19 Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2022 ..... II-70
Tabel 2.50. Data Situasi Covid-19 Kabupaten Pesisir Barat 2022 ..... II-70
Tabel 2.51. Data Ketersediaan Infranstruktur Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022 ..... II-71
Tabel 2.52. Kondisi Jalan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018 – 2022 ..... II-73
Tabel 2.53. Kondisi Jalan Kabupaten Pesisir Barat per Kecamatan Tahun 2020- 2022 ..... II-73
Tabel 2.54. Penerima Manfaat Layanan SPAM Kabupaten Pesisir Barat per Kecamatan Tahun 2022 ..... II-76
Tabel 2.55. Jumlah Rumah Layak Huni Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020-2022 ..... II-76
Tabel 2.56. Jumlah Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017-2022 ..... II-77
Tabel 2.57. Data Kawasan Kumuh Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2022 ..... II-78
Tabel 2.58. Delineasi Kawasan Kumuh Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021/2022 ..... II-79
Tabel 2.59. Konflik Sosial dan Pelanggaran Perda Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022 ..... II-80
Tabel 2.60. Kondisi Daerah Rawan Bencana di Kabupaten Pesisir Barat II-81
Tabel 2.61. Data Kejadian Bencana di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022 ..... II-81
Tabel 2.62. Jumlah Sarana dan Prasarana Mitigasi Bencana Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022 ..... II-92
Tabel 2.63. Respon Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022 ..... II-93

Tabel 2.64. Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2019-2021 ..... II-94
Tabel 2.65. Data Jumlah Penduduk Lansia dan Penyandang Disabilitas Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2022.. II-95
Tabel 2.66. Data Pekerja Sosial Profesional Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2022 ..... II-95
Tabel 2.67. Pencapaian Indikator Kinerja Sosial Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022 ..... II-96
Tabel 2.68. Jumlah Tenaga Kerja Per Sektor Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022 ..... II-98
Tabel 2.69. Jumlah Pencari Kerja AK-1 Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022 ..... II-99
Tabel 2.70. Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020 ..... II-101
Tabel 2.71. Jumlah Perempuan Sebagai Kepala Keluarga Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020 ..... II-101
Tabel 2.72. Jumlah Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2022 ..... II-103
Tabel 2.73. Jumlah Tenaga Rehabilitasi Sosial Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020 ..... II-103
Tabel 2.74. Jumlah Kasus terhadap Perempuan dan Anak Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020-2022 ..... II-103
Tabel 2.75. Perkembangan tingkat capaian ketersediaan energi, protein dan skor PPH ketersediaan tahun 2018-2022 ... II-105
Tabel 2.76. Komoditas Pangan di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021 ..... II-106
Tabel 2.77. Konsumsi energi setiap kelompok pangan di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021 ..... II-106
Tabel 2.78. Konsumsi Penduduk terhadap Bahan Pangan di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021 ..... II-107
Tabel 2.79. Cadangan pangan di Kabupaten Pesisir Barat tahun 2018-2022 ..... II-107
Tabel 2.80. Pencapaian Indikator Kinerja pertanahan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022 ..... II-108
Tabel 2.81. Kesesuaian Penggunaan Tanah terhadap Pola Ruang Kabupaten Pesisir Barat II-109
Tabel 2.82. Segmen Batas Kabupaten Pesisir Barat II-109
Tabel 2.83. Pencapaian Indikator Kinerja Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022 ..... II-110
Tabel 2.84. Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022 ..... II-111

Tabel 2.85. Data Badan Usaha/Instansi terkait Izin Pembuangan Limbah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020-2022 ..... II-112
Tabel 2.86. Kondisi Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022 ..... II-112
Tabel 2.87. Jumlah Penduduk, Kepadatan dan Sex Ratio Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022 ..... II-114
Tabel 2.88. Jumlah Layanan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022 ..... II-114
Tabel 2.89. Jumlah Pekon tertinggal Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022 ..... II-115
Tabel 2.90. Status desa kabupaten Pesisir Barat tahun 2022 ..... II-116
Tabel 2.91. Jumlah BUMDes Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021/2022 ..... II-119
Tabel 2.92. Potensi Desa Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021/2022 ..... II-123
Tabel 2.93. Lembaga Kemasyarakat Desa Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022 ..... II-124
Tabel 2.94. Jumlah Peserta Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022 ..... II-126
Tabel 2.95. Angka Kelahiran dan Kematian Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020 ..... II-127
Tabel 2.96. Tim Pendamping Keluarga Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022 ..... II-128
Tabel 2.97. Lokasi Stunting Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2022 ..... II-128
Tabel 2.98. Lintasan Trayek Perhubungan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022 ..... II-129
Tabel 2.99. Perkembangan Urusan Perhubungan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020-2021 ..... II-130
Tabel 2.100. Sarana dan Prasarana Perhubungan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021 ..... II-131
Tabel 2.101. Perkembangan Jumlah Fasilitas Kelengkapan Jalan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022 ..... II-131
Tabel 2.102. Pencapaian Indikator kinerja perhubungan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022 ..... II-132
Tabel 2.103. Sarana Telekomunikasi dan Informasi Kabupaten Pesisir Barat II-133
Tabel 2.104. Data Ketersediaan Telekomunikasi dan Informasi Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021/2022 ..... II-134
Tabel 2.105. Alamat Internet Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.... II-135
Tabel 2.106. Layanan Publik Yang di selenggarakan Secara Online dan Terpadu Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022 ..... II-137
Tabel 2.107. Data Koperasi Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021..... II-138

Tabel 2.108. Jumlah Koperasi Aktif Kabupaten Pesisir Barat Berdasarkan Kecamatan Tahun 2019-2022 ..... II-144
Tabel 2.109. Jenis Usaha Koperasi Aktif Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan Kecamatan Tahun 2022..... II-144
Tabel 2.110. Jumlah Industri Kecil Menengah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021..... II-145
Tabel 2.111. Jumlah Industri Kecil Mengah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022 ..... II-146
Tabel 2.112. Pencapaian Indikator Kinerja Penanaman Modal Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022 ..... II-148
Tabel 2.113. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun keatas menurut Kategori Pekerja di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022..... II-149
Tabel 2.114. Jumlah Pemuda Yang Menjadi Anggota Organisasi Kepemudaan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022..... II-149
Tabel 2.115. Pencapaian Indikator Kinerja Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022..... II-149
Tabel 2.116. Atlet Berprestasi dan Pelatih Bersertifikasi Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022 ..... II-150
Tabel 2.117. Kerjasama Statistik Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dengan BPS Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020-2022..... II-151
Tabel 2.118. Pelaksanaan Urusan Persandian Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022..... II-153
Tabel 2.119. Sebaran Potensi Wisata Religi dan Budaya Kabupaten Pesisir Barat II-154
Tabel 2.120. Warisan Budaya tak Benda Kabupaten Pesisir Barat II-155
Tabel 2.121. Warisan Budaya Kabupaten Pesisir Barat..... II-155
Tabel 2.122. Data Urusan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022..... II-156
Tabel 2.123. Data Urusan Kearsipan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022..... II-158
Tabel 2.124. Jumlah Produksi Hasil Perikanan Tangkap Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021/2022..... II-158
Tabel 2.125. Jumlah Produksi Hasil Perikanan Budidaya Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021/2022..... II-159
Tabel 2.126. Sebaran Potensi Wisata Bahari Kabupaten Pesisir Barat II-161
Tabel 2.127. Pelaksanaan Krui Surfing International Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017-2022 ..... II-162
Tabel 2.128. Sebaran Potensi Ekowisata Kabupaten Pesisir Barat..... II-163
Tabel 2.129. Nama dan Luas Lokasi Suaka Alam dan Cagar Budaya di Kabupaten Pesisir Barat..... II-163

Tabel 2.130. Akomodasi Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan Kecamatan Tahun 2022 ..... II-163
Tabel 2.131. Sumber Daya Manusia Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2022 ..... II-164
Tabel 2.132. Jumlah Wisatawan Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan Kecamatan Tahun 2018-2022 ..... II-164
Tabel 2.133. Luas Lahan Pertanian di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022 ..... II-166
Tabel 2.134. Prasarana Pertanian Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022 ..... II-167
Tabel 2.135. Jumlah Produksi Tanaman Pangan di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022 ..... II-167
Tabel 2.136. Jumlah Produksi Sayuran Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2022(kuintal) II-168
Tabel 2.137. Jumlah Produksi Tanaman Biofarmaka Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2022(Kg) II-169
Tabel 2.138. Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2022(ton)(i) II-171
Tabel 2.139. Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2022(ii) II-171
Tabel 2.140. Jumlah Populasi Ternak Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022 ..... II-172
Tabel 2.141. Kasus Penyakit Hewan Ternak Menular Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2022 ..... II-173
Tabel 2.142. Jumlah Pasar Desa di Kabupaten Pesisir Barat Berdasarkan Kecamatan Tahun 2022 ..... II-175
Tabel 2.143. Jumlah Pasar Milik Pemerintah Daerah di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022 ..... II-175
Tabel 2.144. Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kabupaten Pesisir Barat Berdasarkan Kecamatan Tahun 2022(ton) II-176
Tabel 2.145. Data Pemasaran Industri Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022 ..... II-177
Tabel 2.146. Pencapaian Indikator Kinerja Perindustrian Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022 ..... II-179
Tabel 2.147. Daerah Transmigrasi Kabupaten Pesisir Barat..... II-181
Tabel 2.148. Pembangkit Listrik Tenaga Micro Hydro (PLTMH) di Kabupaten Pesisir Barat..... II-181
Tabel 2.149. Potensi Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTM) Kabupaten Pesisir Barat..... II-182
Tabel 2.150. Jumlah Pelanggan Listrik PT PLN Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan Kecamatan Tahun 2018-2022..... II-183
Tabel 2.151. Pencapaian Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022..... II-184

Tabel 2.152. Data Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2019-2024 berdasarkan Fraksi II-186
Tabel 2.153. Pencapaian Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022 ..... II-186
Tabel 2.154. Pencapaian Indikator Kinerja Perencanaan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022 ..... II-187
Tabel 2.155. Pencapaian Indikator Kinerja Keuangan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022 ..... II-190
Tabel 2.156. Pencapaian Indikator Kinerja Kepegawaian Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022 ..... II-191
Tabel 2.157. Pencapaian Indikator Kinerja Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022 ..... II-192
Tabel 2.158. Jumlah PNS Kabupaten Pesisir Barat yang Memiliki Sertifikat Kompetensi Tahun 2022 ..... II-193
Tabel 2.159. Pencapaian Indikator Kinerja Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022 ..... II-197
Tabel 2.160. Dokumen Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022 ..... II-198
Tabel 2.161. Pencapaian Indikator Kinerja Pengawasan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022 ..... II-200
Tabel 2.162. Pencapaian Indikator Kinerja Kewilayahan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022 ..... II-201
Tabel 2.163. Pencapaian Indikator Kinerja Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022 ..... II-202
Tabel 2.164. PDRB ADHB 2010 Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022 (dalam miliar Rupiah) . II-204
Tabel 2.165. PDRB ADHB Seri 2010 Menurut Pengeluaran Pesisir Barat Tahun 2018-2022 (dalam miliar Rupiah) II-205
Tabel 2.166. PDRB ADHK Seri 2010 Menurut Lapangan Usaha Pesisir Barat Tahun 2018-2022 (dalam miliar Rupiah) II-206
Tabel 2.167. PDRB ADHK Seri 2010 Menurut Pengeluaran Pesisir Barat Tahun 2018-2022 (dalam miliar Rupiah) II-207
Tabel 2.168. Produk Domestik Regional Bruto Perkapita Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022 (dalam miliar rupiah) .. II-208
Tabel 2.169. Akses Bandara M. Taufik Kemas Kabupaten Pesisir Barat..... II-209
Tabel 2.170. Fasilitas Bandara M. Taufik Kemas Kabupaten Pesisir Barat..... II-209
Tabel 2.171. Jumlah ASN Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Pesisir Barat 2022 ..... II-210
Tabel 2.172. Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022 ..... II-214

Tabel 2.173. Capaian Kinerja Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022 . II-215
Tabel 2.174. Capaian Kinerja Urusan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022 ..... II-216
Tabel 2.175. Capaian Kinerja Urusan Pilihan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022..... II-217
Tabel 2.176. Capaian Kinerja Urusan Pendukung Urusan Pemerintahan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022 ..... II-217
Tabel 2.177. Capaian Kinerja Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022 ..... II-217
Tabel 2.178. Capaian Kinerja Unsur Pengawasan Pemerintahan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022..... II-218
Tabel 2.179. Capaian Kinerja Unsur Kewilayahan Pemerintahan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022..... II-218
Tabel 2.180. Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Umum Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022..... II-219
Tabel 2.181. Realisasi RKPD dengan Kriteria Sangat Rendah pada RKPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022 ..... II-219
Tabel 2.182. Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026 untuk Tahun 2022..... II-228
Tabel 2.183. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026 Untuk Tahun 2022 ..... II-229
Tabel 2.184. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Sampai dengan Tahun Berjalan Kabupaten Pesisir Barat..... II-244
Tabel 2.185. Permasalahan Pembangunan Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 II-307
Tabel 2.186. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan Kabupaten Pesisir Barat 2018-2022..... II-313
Tabel 2.187. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat 2018-2022..... II-314
Tabel 2.188. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Barat 2018-2022..... II-315
Tabel 2.189. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pesisir Barat 2018-2022..... II-316
Tabel 2.190. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Ketertiban dan Ketentraman Umum serta Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pesisir Barat 2018-2022..... II-316
Tabel 2.191. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Sosial Kabupaten Pesisir Barat 2018-2022..... II-317

Tabel 3.1. PDRB ADHB dan PDRB ADHK Kabupaten Pesisir Barat Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022 (dalam miliar rupiah) III-6

Tabel 3.2. Distribusi PDRB ADHB Kabupaten Pesisir Barat Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2018-2022 (dalam %) III-9

Tabel 3.3. PDRB ADHB Menurut Jenis Pengeluaran Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022 (dalam miliar rupiah) .. III-10

Tabel 3.4. PDRB ADHK Menurut Jenis Pengeluaran Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022 (dalam miliar rupiah) .. III-11

Tabel 3.5. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pesisir Barat Menurut Lapangan Usaha (PDRB ADHK) Tahun 2018-2022 ..... III-15

Tabel 3.6. Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022 ..... III-16

Tabel 3.7. Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022 ..... III-22

Tabel 3.8. Kontribusi PDRB ADHB Kabupaten/ Kota se Provinsi Lampung Tehadap Total PDRB Tahun 2018 – 2022 (Persen) III-25

Tabel 3.9. Realisasi Pendapatan Daerah dalam APBD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022 ..... III-57

Tabel 3.10. Perkembangan PAD dan Proporsinya Terhadap Pendapatan APBD Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2015-2023 ..... III-62

Tabel 3.11. Struktrur Pendapatan pada APBD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2015-2022(data Realisasi) III-64

Tabel 3.12. Kontribusi Pajak dan Retribusi terhadap PAD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2015-2023(data realisasi) III-65

Tabel 3.13. Dana Perimbangan dan Proporsinya terhadap Pendapatan APBD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2015-2023(data realisasi) III-66

Tabel 3.14. Jumlah Lain- Lain Pendapatan Yang sah Dan Proporsinya Tehadap Pendapatan APBD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2015-2021 ..... III-67

Tabel 3.15. Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022 s.d 2025 ..... III-73

Tabel 3.16. Realisasi Belanja Daerah dalam APBD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022 ..... III-77

Tabel 3.17. Struktur Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-2023 ..... III-78

Tabel 3.18. Proporsi Belanja Pegawai Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2015-2023(data realisasi) III-79

Tabel 3.19. Realisasi Dana Proyeksi /Target Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021 s.d Tahun 2025.... III-84

Tabel 3.20. Realisasi Pembiayaan Daerah dalam APBD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022 ..... III-88

Tabel 3.21. Realisasi dan Proyeksi /Target Pembiayaan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020 s.d Tahun 2025 ..... III-91

Tabel 3.22. Kebijakan Keuangan Daerah yang Dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat yang berkaitan dengan standar Pelayanan Minimal Tahun 2024 ..... III-92

Tabel 4.1. Matrik Hubungan Antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026..... IV-7

Tabel 4.2. Tujuan Dan Sasaran RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024 ..... IV-11

Tabel 4.3. Program Kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026 ..... IV-13

Tabel 4.4. Matrik Sandingan Antara Tema dan Prioritas Pembangunan Tahun 2024 dengan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026 ..... IV-17

Tabel 4.5. Tema dan Prioritas Pembangunan Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung dan Pemerintah Pusat IV-21

Tabel 4.6. Sinkronisasi Tema dan Prioritas Pembangunan Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung dan Pemerintah Pusat IV-22

Tabel 4.7. Keselarasan Target Sasaran Makro Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024..... IV-23

Tabel 4.8. Daftar Proyek Strategis Nasional Di Provinsi Lampung. IV-24

Tabel 4.9. Hubungan antara Misi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026 dengan Prioritas RKPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024..... IV-29

Tabel 4.10. Isu Strategis dan Strategi Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024 ..... IV-32

Tabel 4.11. Program Prioritas RKPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024 Sesuai RPJMD Kabuapaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026..... IV-37

Tabel 4.12. Sinkronisasi RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026 terhadap Pencapaian Tujuan SDGs Kabupaten Pesisir Barat..... IV-50

Tabel 4.13. Sinkronisasi RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026 terhadap Pencapaian SPM Kabupaten Pesisir Barat IV-56

Tabel 4.14. Arah Pemanfaatan Ruang dan Indikasi Program Pembangunan RTRW Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017-2037 ..... IV-61
Tabel 5.1. Pagu Indikatif Urusan Daerah dan Program Prioritas Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024 ..... V-1
Tabel 5.2. Sinkronisasi Program Kabupaten Pesisir Barat dengan Program Prioritas Nasional Tahun 2024 ..... V-13
Tabel 5.3. Sinkronisasi Program Kabupaten Pesisir Barat Untuk Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2024 ..... V-15
Tabel 5.4. Sinkronisasi Program Kabupaten Pesisir Barat dengan Program Prioritas Provinsi Lampung Tahun 2024 ..... V-16
Tabel 5.5. Program dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024 ..... V-19
Tabel 5.6. Prioritas Daerah, Sasaran Daerah dan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024 ..... V-31
Tabel 5.7. Program Kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024 ..... V-32
Tabel 5.8. Rekapitulasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024 ..... V-34
Tabel 6.1. Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024 ..... VI-3
Tabel 6.2. Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024 ..... VI-7
Tabel 6.3. Indikator Kinerja *Sustainnable Depelopment Goals* Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020-2025 ..... VI-29
Tabel 6.4. Kerangka Kerja Logis PITIT CUPING Inspektorat Kabupaten Pesisir Barat VI-40

DAFTAR GAMBAR/GRAFIK

Gambar 1.1.	Bagan Alur Penyusunan RKPD Kabupaten Pesisir Barat	I-5
Gambar 1.2.	Hubungan Dokumen RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	1-11
Gambar 2.1.	Peta Administratif Kabupaten Pesisir Barat	II-2
Gambar 2.2.	Luas Wilayah per-Kecamatan Kabupaten Pesisir Barat	II-3
Gambar 2.3.	Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Pesisir Barat	II-5
Gambar 2.4.	Peta Hidrologi Kabupaten Pesisir barat	II-6
Gambar 2.5.	Peta Geologi Kabupaten Pesisir Barat	II-9
Gambar 2.6.	Peta Curah Hujan Kabupaten Pesisir Barat	II-10
Gambar 2.7.	Peta Resiko Tsunami di Kabupaten Pesisir Barat	II-11
Gambar 2.8.	Peta Ancaman Longsor dikabupaten Pesisir Barat	II-12
Gambar 2.9.	Peta Ancaman Gempa di Kabupaten Pesisir Barat	II-13
Gambar 2.10.	Peta Resiko Banjir di Kabupaten Pesisir Barat	II-14
Gambar 2.11.	Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Pesisir Barat	II-16
Gambar 2.12.	Peta Pola Ruang Kabupaten Pesisir Barat	II-16
Gambar 2.13.	Peta Kawasan strategis di Kabupaten Pesisir Barat	II-17
Gambar 2.14.	Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) Kabupaten Pesisir Barat	II-21
Gambar 2.15.	Jumlah Penduduk Kabupaten Pesisir Barat tahun 2018-2022 Berdasarkan Data BPS Kabupaten Pesisir Barat	II-24
Gambar 2.16.	Persentase Penduduk Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022 Berdasarkan Kecamatan	II-24
Gambar 2.17.	Gambaran Penduduk Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022	II-25
Gambar 2.18.	Jumlah Penduduk yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022	II-26
Gambar 2.19.	Perbandingan Penduduk yang Bekerja Pengangguran Dengan Angkatan Kerja Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022	II-27
Gambar 2.20.	Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022	II-28
Gambar 2.21.	Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Kecamatan di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022	II-28
Gambar 2.22.	Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022	II-29
Gambar 2.23.	Inflasi Gabungan Kota Bandar Lampung dan Kota Metro Tahun 2018-2022	II-38

Gambar 2.24. PDRB Perkapita Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022 ..... II-40
Gambar 2.25. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022 ..... II-41
Gambar 2.26. Angka Harapan Hidup Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022 ..... II-42
Gambar 2.27. Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2018-2022 ..... II-43
Gambar 2.28. Harapan Lama Sekolah Tahun 2018-2022 ..... II-44
Gambar 2.29. Pengeluaran Riil Perkapita Tahun 2018-2022 ..... II-45
Gambar 2.30. Jumlah Gizi Buruk Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022 ..... II-48
Gambar 2.31. Garis kemiskinan (Rupiah/Kapita/Bulan) di kabupaten pesisir barat 2018-2022 ..... II-49
Gambar 2.32. Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Di Kabupaten Pesisir Barat tahun 2018-2022 ..... II-49
Gambar 2.33. Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Pesisir barat tahun 2018-2022 ..... II-50
Gambar 2.34. Kondisi Bangunan Ruang Kelas PAUD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2019-2022 ..... II-57
Gambar 2.35. Kondisi Bangunan Ruang Kelas SD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022 ..... II-58
Gambar 2.36. Kondisi Bangunan Ruang Kelas SMP Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022 ..... II-58
Gambar 2.37. Angka Partisipasi Sekolah Tahun 2018-2022 ..... II-59
Gambar 2.38. Kematian Ibu Melahirkan di kabupaten pesisir barat tahun 2018-2022 ..... II-61
Gambar 2.39. Kematian bayi di kabupaten pesisir barat 2018-2022 ..... II-62
Gambar 2.40. Penyakit Menular dan Tidak Menular Kabupaten Pesisir Barat 2018-2022 ..... II-63
Gambar 2.41. Rasio Jumlah Tenaga Kesehatan Di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022 ..... II-66
Gambar 2.42. Perkembangan Anggaran Urusan Kesehatan kabupaten pesisir barat Tahun 2018-2022 ..... II-67
Gambar 2.43. Cakupan Pelayanan Kunjungan Baru Ibu Hamil (K1) dan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (K4) Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022 ..... II-67
Gambar 2.44. Persentase Persalinan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022 ..... II-68
Gambar 2.45. Cakupan Deteksi Dini Ibu Hamil Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022 ..... II-68
Gambar 2.46. Cakupan Pemberian Asi Eklusif di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022 ..... II-69

Gambar 2.47. Kunjungan Rawat Jalan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022 ..... II-70
Gambar 2.48. Kondisi Jalan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018 - 2022 ..... II-73
Gambar 2.49. Kondisi Jalan Rusak Berat Kabupaten Pesisir Barat per Kecamatan Tahun 2020 - 2022 ..... II-74
Gambar 2.50. Target Jalan Mantap Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022 – 2026 ..... II-75
Gambar 2.51. Kondisi Irigasi Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018 – 2022 ..... II-75
Gambar 2.52. Jumlah Rumah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020 – 2022 ..... II-78
Gambar 2.53. Lokasi Bencana per Kecamatan di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022 ..... II-91
Gambar 2.54. Kejadian Bencana Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022 II-92
Gambar 2.55. Angka Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022 ..... II-94
Gambar 2.56. Jumlah Keluarga Penerima Manfaat di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022 (Kepala Keluarga) II-97
Gambar 2.57. Tingkat Partipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022 ..... II-97
Gambar 2.58. Angkatan Kerja di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022 ..... II-98
Gambar 2.59. Klasifikasi Bukan Angkatan Kerja di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2022 ..... II-99
Gambar 2.60. Pelaku Usaha dan Klasifikasi Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022 ..... II-100
Gambar 2.61. Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022 ..... II-102
Gambar 2.62. Anggaran Ramah Gender Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020-2022(Persen) II-102
Gambar 2.63. Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022 ..... II-105
Gambar 2.64. Indeks Kualitas Air, Kualitas Udara, Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022 ..... II-111
Gambar 2.65. Jumlah Timbunan Sampah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022(Meter) II-111
Gambar 2.66. Diagram Penduduk berdasarkan Kelompok Usia Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022 ..... II-113
Gambar 2.67. Jumlah Pemeluk Agama Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2022 ..... II-115
Gambar 2.68. Status Desa kabupaten Pesisir Barat tahun 2020-2022. II-116
Gambar 2.69. Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022 ..... II-125

Gambar 2.70. Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Pesisir Barat Berdasarkan Kecamatan Tahun 2022 ..... II-125
Gambar 2.71. Peserta Keluarga Berencana Aktif Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022 ..... II-126
Gambar 2.72. Angka Kelahiran Total Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022 ..... II-127
Gambar 2.73. Rasio Konektivitas Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020-2022 ..... II-132
Gambar 2.74. Indeks SPBE Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2019-2022 ..... II-133
Gambar 2.75. Jangkauan Layanan Telekomunikasi Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022 ..... II-134
Gambar 2.76. Persentase Koperasi Aktif Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022 ..... II-143
Gambar 2.77. Perkembangan Realisasi PMDN dan PMA Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020-2022 (dalam triliun rupiah).. II-147
Gambar 2.78. Penggunaan Data Statistik dalam Perencanaan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022 ..... II-152
Gambar 2.79. Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022(ton) II-159
Gambar 2.80. Nilai Tukar Nelayan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-2020 ..... II-160
Gambar 2.81. Angka Konsumsi Ikan (AKI) Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022 ..... II-160
Gambar 2.82. Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Domestik Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022 ..... II-165
Gambar 2.83. Rata-rata Belanja Wisatawan Mancanegara dan Domestik Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2021 (juta rupiah) II-165
Gambar 2.84. Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara dan Domestik Kabupaten Pesisir Barat 2018-2022(hari) II-166
Gambar 2.85. Produksi Padi Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022(ton) II-168
Gambar 2.86. Luas Panen Tanaman Sayuran dan Buah-buahan Semumis Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2019-2022(Ha) II-170
Gambar 2.87. Nilai Tukar Petani Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022 ..... II-173
Gambar 2.88. Jenis Sarana Perdagangan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2019-2022 ..... II-176
Gambar 2.89. Jumlah Industri Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022 ..... II-177
Gambar 2.90. Kontribusi Industri Pengolahan Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2022 ..... II-179

Gambar 2.91. Nilai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah yang Menggunakan Produksi Dalam Negeri Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2022 ..... II-180
Gambar 2.92. Rasio Elektrifikasi dan Energi Baru Terbarukan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022 ..... II-182
Gambar 2.93. Nilai SAKIP Kabupaten Pesisir Barat 2018-2022..... II-184
Gambar 2.94. Nilai Reformasi Birokrasi Kabupaten Pesisir Barat 2021-2022..... II-184
Gambar 2.95. Jumlah Perda Inisiasi DPRD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022..... II-187
Gambar 2.96. Pencapaian Indikator Perencanaan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022 ..... II-188
Gambar 2.97. Perbandingan PAD Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022(dalam juta rupiah) II-189
Gambar 2.98. Persentase PNS Kabupaten Pesisir Barat Berdasarkan Jenjang Pendidikan (tidak termasuk guru dan tenaga Kesehatan) Tahun 2022 ..... II-191
Gambar 2.99. Jumlah PNS Kabupaten Pesisir Barat Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2021-2022 ..... II-192
Gambar 2.100. Nilai Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Pesiisr Barat Tahun 2020-2022 ..... II-195
Gambar 3.1. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022..... III-13
Gambar 3.2. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/ Kota se Provinsi Lampung Tahun 2021-2022..... III-13
Gambar 3.3. PDRB Per Kapita ADHB Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022 (dalam juta rupiah)..... III-16
Gambar 3.4. PDRB Per Kapita Kabupaten/ Kota se Provinsi Lampung Tahun 2021-2022..... III-17
Gambar 3.5. Tingkat Kemiskinan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022..... III-20
Gambar 3.6. Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022..... III-20
Gambar 3.7. Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung Tahun 2021-2022..... III-21
Gambar 3.8. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022..... III-22
Gambar 3.9. IPM Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung Tahun 2021-2022..... III-23
Gambar 3.10. Indeks Gini Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022 III-24
Gambar 3.11. Indeks Gini Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung Tahun 2022 ..... III-25
Gambar 3.12. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022..... III-27

Gambar 3.13. TPT Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung Tahun 2021-2022 ..... III-27
Gambar 3.14. Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022 (dalam juta rupiah) III-58
Gambar 3.15. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022 (dalam juta rupiah) III-60
Gambar 3.16. Presentase Pendapatan Asli Daerah Terhadap pendapatan daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2019-2023 ..... III-63
Gambar 3.17. Perkembangan Pendapatan Transfer Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2023(dalam juta rupiah) III-64
Gambar 3.18. Persentase Pendapatan Transfer Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2023 ..... III-66
Gambar 3.19. Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2023 (dalam juta rupiah) III-78
Gambar 3.20. Struktur Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022 (dalam juta rupiah) III-79
Gambar 3.21. Perbandingan Belanja Pegawai Dengan Total Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2023 (dalam juta rupiah) III-80
Gambar 3.22. Perkembangan Pembiayaan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2023 (dalam juta rupiah) III-86
Gambar 3.23. Perkembangan SilPA Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022 (dalam juta rupiah) III-87
Gambar 3.24. Perkembangan Penyertaan Modal Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022 (dalam juta rupiah) III-87
Gambar 4.1 Hubungan Visi, Misi serta Sasaran dan Arah Kebijakan Pembangunan IV-6

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR : 28 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan yang baik dan berkualitas menjadi salah satu faktor dalam keberhasilan pembangunan, baik dalam skala nasional maupun daerah. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. UU Nomor 25 Tahun 2004 membagi ruang lingkup perencanaan secara sistematis dan terintegrasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Makna terintegrasi dapat diartikan sebagai keselarasan perencanaan pembangunan antar ruang (waktu) maupun antar level pemerintahan. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota secara akumulatif harus dapat berdampak pada kinerja Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat. Seluruh dokumen perencanaan harus saling terintegrasi dan saling mendukung pencapaian satu sama lain. Setiap tahunnya pemerintah daerah menyusun dokumen Perencanaan RKPD sebagai bentuk dokumen perencanaan satu tahunan (rencana jangka pendek). RKPD disusun sebagai penjabaran arah kebijakan tahunan selama 5 (lima) tahun yang ada dalam RPJMD, sesuai dengan program tahunan yang ada dalam RPJMD. RKPD berisi rencana kerja dari seluruh Perangkat Daerah pada tahun bersangkutan, yang didasarkan pada arahan dan program prioritas yang telah dirumuskan pada RPJMD dengan tetap mengacu pada Renstra masing-masing Perangkat Daerah. Sehingga dari masing-masing Perangkat Daerah memiliki arahan yang jelas setiap tahunnya.

Penyusunan RKPD ini selain mengacu kepada UU Nomor 25 Tahun 2004 dan juga mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, untuk RKPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024 ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor -- Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Terkait dengan amanat peraturan perundang-undangan tentang perencanaan daerah tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat menyusun RKPD Tahun 2024. Penyusunan RKPD bertujuan untuk memberikan panduan kepada seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah serta berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif, *bottom-up* dan *top-down* dengan tetap memperhatikan kewenangan urusan pemerintahan daerah. Sehingga nantinya setelah RKPD tersebut ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, masing-masing Perangkat Daerah dapat segera menetapkan juga Renjanya dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Hal-hal yang menjadi perhatian dalam penyusunan dokumen ini adalah capaian hasil kinerja dari tahun sebelumnya, isu-isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan RKPD serta sinergitas antar sektor dan antar wilayah serta penjaringan yang mengemuka sebagai hasil dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD daerah.

Dokumen ini juga memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaan indikatifnya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dalam hal ini, RKPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024 disusun berdasarkan pada RPJPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2005-2025, RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026, RPJMN Tahun 2020-2024, RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, RKP Nasional Tahun 2024 dan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2024.

Penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam RKPD Tahun 2024 mengacu pada:

a. Arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi dan Program Prioritas Nasional dalam RKP Tahun 2024;

b. Evaluasi capaian kinerja RKPD Tahun 2022 dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022;

c. Pencapaian target pada RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026 dan Renstra Tahun 2021-2026;

Dalam perencanaan dalam RKPD ini juga tidak lepas dari kondisi masing-masing daerah, dalam hal ini yang paling berpengaruh adalah capaian/data terkait kondisi terakhir daerah yang berpengaruh terhadap permasalahan daerah, isu strategis daerah, arah kebijakan dan juga kemampuan fiskal dari daerah. Data-data tersebut merupakan dasar bagi pelaksanaan pendekatan teknokratik dan kerangka berfikir ilmiah, yang mana dilakukan dengan cara berdiskusi, konsultasi dan juga koordinasi dengan pakar dan/atau ahli untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah termasuk dalam proyeksi struktur kerangka pendanaan indikatif daerah.

Proses partisipatif dilakukan dengan cara mengikutsertakan seluruh *stakeholders* pembangunan di Kabupaten Pesisir Barat yang dilakukan antara lain melalui Forum Konsultasi Publik dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Proses *bottom to up* dilakukan secara berjenjang dari tingkat Dukuh, Pekon, Kecamatan dan Kabupaten serta Provinsi. Sementara itu *top to down* antara lain diimplementasikan dalam bentuk prioritas pembangunan (program-program unggulan pemerintah daerah) dan juga sinergitas program pusat dan pemerintah provinsi (*mandatory spending*).

Substansi penting dalam RKPD ini merupakan gambaran intervensi dan inventarisir Pemerintah Daerah yang dalam penjabarannya diinteraksikan dengan komponen sumber daya yang lain, seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer berupa: Dana Bagi Hasil (DBH); Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID), Dana Desa serta Pendaparan Lainnya yang dibenarkan oleh Peraturan Perundang-undangan. Dokumen RKPD ini merupakan dokumen publik, sehingga diharapkan dokumen ini dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan baik dalam kapasitas untuk melaksanakan, pengawasan serta pengendalian dan evaluasi.

Dengan demikian RKPD mempunyai kedudukan, peran, dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat:

1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;

2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan KUA dan PPAS yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (R-APBD);

3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta Pemerintah Daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah; dan

4. Secara faktual, menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan RKPD berpedoman pada arah kebijakan pembangunan nasional, arah kebijakan pembangunan daerah, tahapan dan tata cara penyusunan, tahapan dan tata cara penyusunan perubahan, pengendalian dan evaluasi, serta konsistensi perencanaan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

RKPD sebagaimana dimaksud di atas, disusun dengan tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan Penyusunan RKPD

Pada tahapan ini meliputi pembentukan tim penyusun RKPD, orientasi mengenai substansi RKPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan data-data capaian hasil pembangunan daerah.

2. Penyusunan Rancangan Awal RKPD

Tahapan ini diawali dengan perumusan rancangan awal RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun rancangan kerja Perangkat Daerah dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan pendekatan teknokratis dan partisipatif dengan memperhatikan dokumen perencanaan daerah dan perangkat daerah.

3. Penyusunan Rancangan RKPD

Pada tahap ini dokumen rancangan awal RKPD dirumuskan menjadi rancangan RKPD. Perumusan Rancangan RKPD pada dasarnya adalah menyempurnakan rancangan awal melalui proses pengintegrasian dan harmonisasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum dalam rancangan Renja Perangkat Daerah dengan tetap memperhatikan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah.

4. Pelaksanaan Musrenbang RKPD

Pelaksanaan Musrenbang sangat berguna untuk perumusan rancangan akhir RKPD, pada tahapan ini dilakukan proses identifikasi dan evaluasi terhadap prioritas dan sasaran pembangunan nasional, provinsi, dan daerah yang bersinergi berdasarkan peraturan yang berlaku.

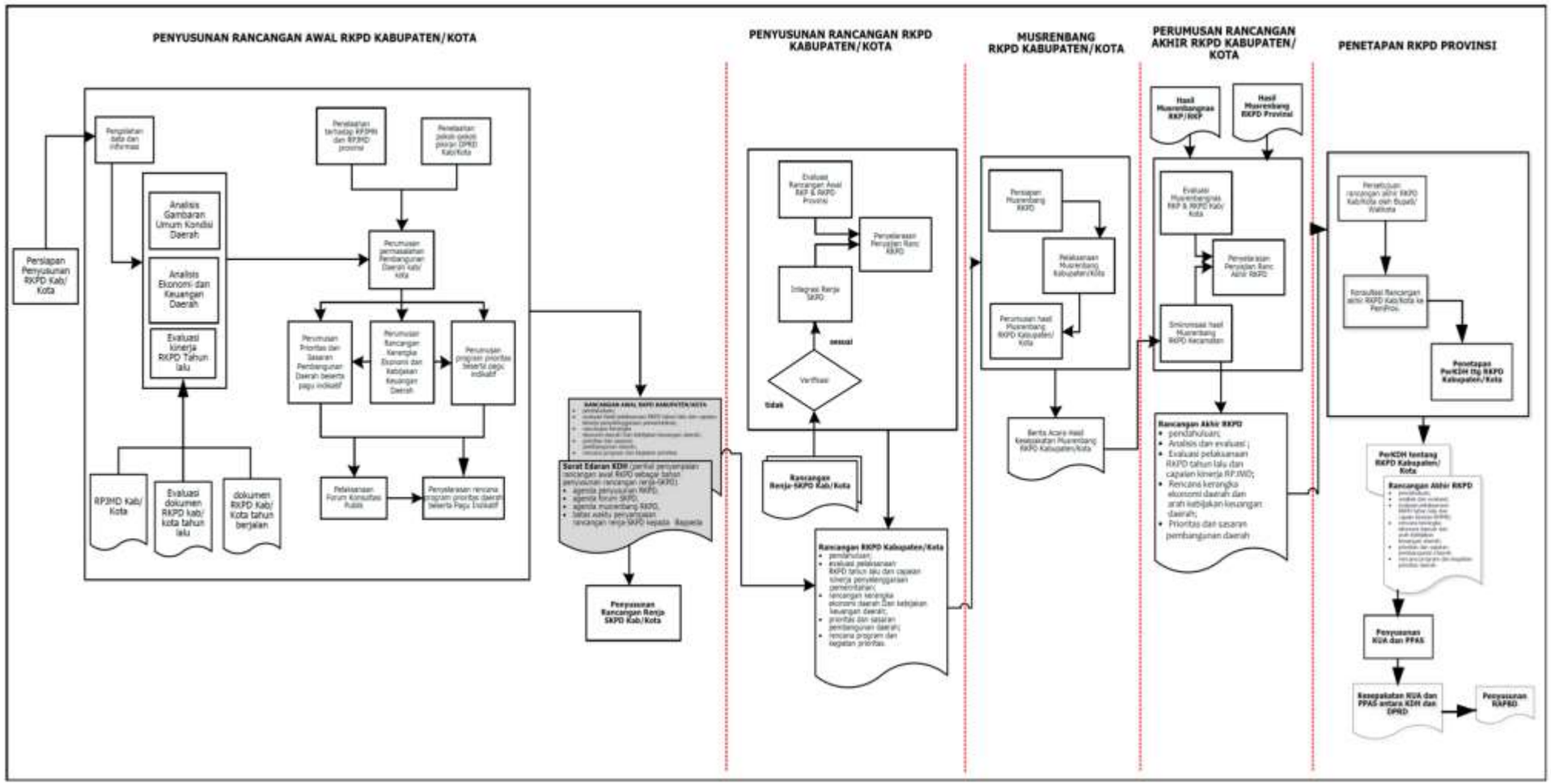
5. Perumusan Rancangan Akhir RKPD

Pada tahapan ini hasil musrenbang nasional serta musrenbang provinsi dievaluasi serta disinkronisasi dengan hasil musrenbang tingkat daerah sampai tingkat kecamatan untuk penyelarasan penyajian rancangan akhir RKPD. Pada tahapan ini juga dilanjutkan dengan pelaksanaan fasilitasi Rancangan Akhir RKPD yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Lampung selaku wakil pemerintah pusat.

6. Penetapan RKPD

Penetapan RKPD dilakukan setelah rancangan akhir RKPD kabupaten hasil fasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Lampung sebagai wakil pemerintah pusat ditindaklanjuti. Kemudian baru dilakukan penetapan Peraturan Bupati Pesisir Barat tentang RKPD kabupaten Pesisir Barat.

Gambar 1.1 Bagan Alur Penyusunan RKPD Kabupaten Pesisir Barat



Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017(diolah)

Pada proses penyusunan Dokumen Perencanaan Tahun 2024 yang dilakukan pada akhir tahun 2022 dan awal tahun 2023 ini semerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah masih berada dalam kondisi memulihkan ekonomi daerah pasca Bencana Nasional Non Alam, Pandemi Covid-19 serta pengendalian inflasi akibat kenaikan harga BBM serta kondisi perekonomian global yang tidak stabil. RKPD Tahun 2024 ini diarahkan untuk terus memacu upaya-upaya dalam rangka memulihkan ekonomi masyarakat sekaligus meneruskan reformasi struktural pada semua sektor pemerintahan.

Sebagai implementasi dari prinsip *Money Follow Priority*, alokasi pagu indikatif pada Renja Perangkat Daerah tahun 2024 diarahkan untuk mencapai *output* dan/atau *outcome* pencapaian Visi dan Misi pada RPJMD sekaligus hasil dari Program, Kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi prioritas daerah dengan tetap memperhatikan harmonisasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Lampung dengan arah kebijakan pada Pemantapan Ekonomi Masyarakat dan Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia serta Meningkatkan Kualitas Infrastruktur. Upaya memantapkan ekonomi masyarakat dilakukan dengan revitalisasi sektor pertanian dan pemantapan daya saing sektor pariwisata unggulan Daerah yang berpijak pada kearifan lokal. Peningkatan kualitas SDM diarahkan untuk menyediakan manusia yang berkualitas sebagai faktor produksi untuk pembangunan daerah terutama sektor pertanian dan pariwisata serta ekonomi kreatif. Pada tahun 2024 ini juga kembali fokus pembangunan untuk penyelesaian beberapa proyek strategis daerah dalam menunjang pelayanan umum kepada masyarakat.

Arah kebijakan tahun 2024 tersebut diarahkan pada pencapaian: (i) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia secara Berkeadilan, Maju dan Berdaya Saing; (ii) Mengembangkan Infrastruktur Wilayah dengan Konsep Pembangunan Inklusif Untuk Konektivitas Antar Wilayah dengan Memperhatikan Aspek Mitigasi Bencana dan Berwawasan Lingkungan; (iii) Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan Melalui Peningkatan Produktivitas Sektor Pertanian dan Perikanan; (iv) Mengembangkan Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah yang Berpijak Pada Kearifan Lokal; (v) Menyelenggarakan Pelayanan Publik yang Berkualitas Melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Produktif serta Penguatan Sinergitas Antar Lembaga. Kelima pencapaian tersebut dalam prosesnya diarahkan melalui kebijakan prioritas pembangunan daerah:

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia;
2. Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan;
3. Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat;
4. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas;
5. Harmonisasi kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat;

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum atau peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai pedoman dan rujukan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024 ini, adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

16. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);

17. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 388);

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2005-2025 (Periode Efektif 2016-2025) (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 15);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 76);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 32);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 72);

23. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 15);

24. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021 Nomor 330), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022 Nomor 348);

1.3 Hubungan Antar Dokumen

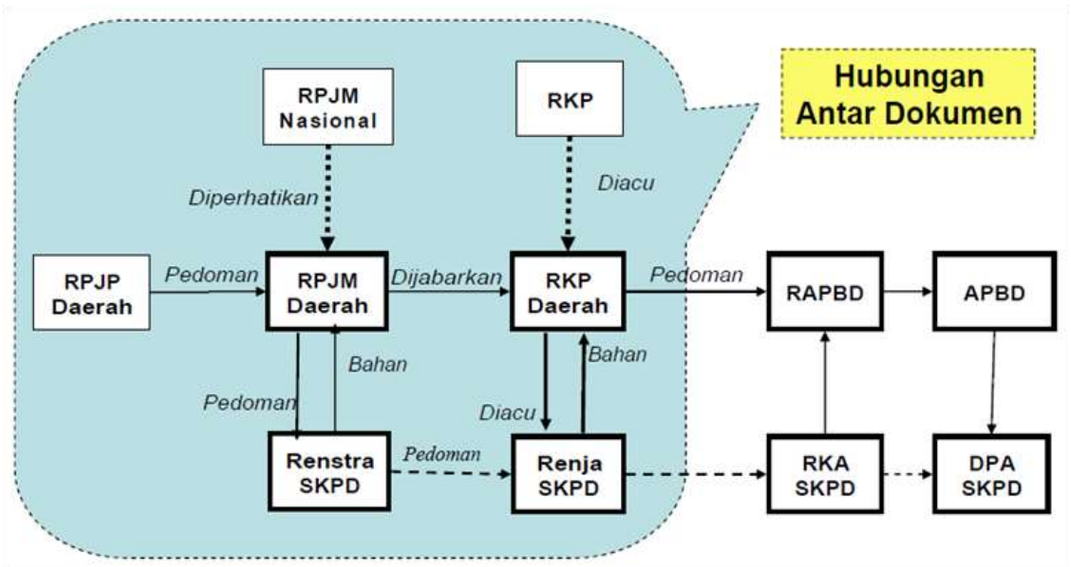
RKPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan teknis operasional Kabupaten Pesisir Barat dalam periode 1 (satu) tahun yang nantinya akan menjadi penjabaran tahun ketiga dari RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026 dan RPJPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2005-2025, RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, RKPD Provinsi Lampung Tahun 2024 serta RPJMN Pemerintah Pusat Tahun 2020-2024 dan RKP Tahun 2024. Hal ini dimaksudkan untuk menyelaraskan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan daerah Kabupaten Pesisir Barat dengan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan pemerintah Provinsi Lampung serta prioritas pembangunan nasional dalam Renstra K/L (kementerian/lembaga). Keberadaan RKPD Tahun 2024 ini juga sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah untuk penyusunan dan penetapan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024.

RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan jangka menengah daerah untuk periode 5 (lima) tahunan, yang dijabarkan lebih lanjut menjadi rencana tahunan melalui RKPD dan Renja. Rencana Kerja tahunan pada tingkat nasional dinamakan RKP dan pada tingkat daerah disebut RKPD. Hubungan Renstra K/L dengan RKP dan Renstra Perangkat Daerah dengan RKPD adalah bersifat mengikat, yaitu penyusunan Rencana tahunan harus berpedoman pada rencana lima tahunan. Sedangkan hubungan antara Renstra K/L dengan Renstra Perangkat Daerah adalah bersifat konsultatif, yaitu penyusunan Renstra Perangkat Daerah harus memperhatikan Renstra K/L. Demikian juga dalam penyusunan RKPD harus menyesuaikan dengan RKP sebagai upaya harmonisasi kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

RKPD Tahun 2024 ini disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2024 yang juga terdiri dari KUA dan PPAS serta Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD. Mengingat adanya keselarasan sistem perencanaan dan sistem penganggaran, maka RKPD harus dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan RAPBD. Oleh karena itu, dalam penyusunan RKPD Tahun 2024 ini perlu dilakukan secara lebih rinci dengan tekanan utama pada penetapan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Penetapan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut harus pula mencakup indikator dan target kinerja serta perkiraan kebutuhan dana untuk mendukung pelaksanaan masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut.

Hubungan RKPD dan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 1.2 Hubungan Dokumen RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (diolah)

Secara garis besar Penyusunan RKPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024 berpedoman pada sejumlah dokumen perencanaan dari tingkat nasional maupun tingkat daerah, yaitu sebagai berikut:

1. RPJMN Tahun 2020-2024

RPJM Nasional yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 berlampirkan 4 (empat) dokumen, yaitu: (i) Lampiran I yang memuat Narasi RPJMN Tahun 2020-2024; (ii) Lampiran II yang memuat Proyek Prioritas Strategis RPJMN Tahun 2020-2024; (iii) Lampiran III yang memuat Matrik Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024; (iv) Lampiran IV yang memuat Arah Pembangunan Wilayah RPJMN Tahun 2020-2024.

RPJM Nasional tersebut menjadi acuan awal dalam penyusunan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Pesisir Barat, khususnya dalam menjabarkan program-program sektoral dan program kewilayahan/regional. Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

RPJMN 2020-2024 telah mengarusutamakan Sustainable Development Goals (SDGs). Target-target dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 7 agenda pembangunan Indonesia ke depan.

2. RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024

RPJMD Provinsi Lampung yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 adalah merupakan penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan oleh kepala daerah terpilih pada saat kampanye yang secara garis besar menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi dan arah kebijakan pembangunan di Provinsi Lampung sehingga dapat menjadi pedoman penyusunan RKPD serta perencanaan penganggaran Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.

Visi RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 diarahkan untuk menuju Rakyat Lampung Berjaya dengan tujuan pembangunan menciptakan Aman, Berbudaya, Maju, Berdaya Saing, dan Sejahtera. Visi tersebut didukung dengan 6 Misi Pembangunan, yaitu:

1. Menciptakan Kehidupan yang Religius (Agamis), Berbudaya, Aman dan Damai;

2. Mewujudkan "*Good Governance*" untuk Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pelayanan Publik;

3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Mengembangkan Upaya Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan, dan Kaum Difabel;

4. Mengembangkan Infrastruktur guna Meningkatkan Efisiensi Produksi dan Konektivitas Wilayah;

5. Membangun Kekuatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian dan Wilayah Pedesaan yang Seimbang dengan Wilayah Perkotaan;

6. Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Bersama.

Secara umum Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung diarahkan untuk menyusun perencanaan untuk: (i) menciptakan kehidupan yang aman dan damai; (ii) mewujudkan good governance dan pelayanan publik; (iii) meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan mengupayakan perlindungan anak, perempuan dan penyandang disabilitas; (iv) mengembangkan infrastruktur dan konektivitas wilayah; (v) membangunan ekonomi masyarakat; dan (vi) mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

3. RPJPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2005-2025

RPJPD Kabupaten Pesisir Barat adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Pesisir Barat yang merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Kabupaten Pesisir Barat dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan daerah untuk masa 20 tahun ke depan yang mencakup kurun waktu mulai dari Tahun 2005 hingga Tahun 2025. Pelaksanaan RPJPD 2005-2025 terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periodesasi perencanaan pembangunan jangka menengah daerah 5 (lima) tahunan. Visi pembangunan jangka panjang daerah (20 tahun) Kabupaten Pesisir Barat yang dituangkan dalam RPJPD Kabupaten Pesisir Barat tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut "Pesisir Barat Madani dan Sejahtera 2025". Dalam mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut ditempuh melalui 6 (enam) misi pembangunan daerah RPJPD Tahun 2005-2025 sebagai berikut:

1. Membangun Prasarana, Sarana, dan Utilitas Dasar Wilayah dalam Skala Mantab, Tanggap Bencana, dan Berwawasan Lingkungan.

2. Membangun Struktur Perekonomian yang Kuat dan Berkelanjutan Berbasis Sumber Daya dan Kearifan Lokal.

3. Membangun Pesisir Barat yang Asri dan Lestari.

4. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas, Produktif, dan Berdaya Saing.

5. Membangun Kehidupan Masyarakat yang Agamis, Demokratis, Berbudaya, dan Tentram dengan Mengedepankan Supremasi Hukum.

6. Membangun Pemerintahan yang Baik dan Bersih (*good and clean governance*).

RPJPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2005-2025 diarahkan pada pencapaian:

a. Membangun prasaran, sarana & utilitas dasar wilayah dalam skala mantap, tanggap bencana dan berwawasan lingkungan;

b. Membangun infrastruktur perekonomian yang kuat dan berkelanjutan berbasis pariwisata, sumber daya alam dan kearifan lokal;

c. Membangun pesisir barat yang asri dan lestari;

d. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, produktif dan berdaya saing;

e. Membangun kehidupan masyarakat yang agamis, demokratis, berbudaya dan tentram dengan mengedepankan supremasi hukum;

4. RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026

RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan komprehensif lima tahunan dan merupakan penjabaran dari periode kedua RPJPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2005-2025, yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Barat dan sebagai acuan bagi seluruh *stakeholders* di Kabupaten Pesisir Barat dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 2021-2026.

RPJMD disusun berdasarkan Visi dan Misi Bupati Kabupaten Pesisir Barat, sekaligus berfungsi sebagai dokumen perencanaan yang mengakomodasi berbagai aspirasi masyarakat yang ada dalam lingkup wilayah Kabupaten Pesisir Barat dengan setidaknya dapat menjawab empat pertanyaan dasar (1) kemana Kabupaten Pesisir Barat akan diarahkan pengembangannya dan tujuan yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang; (2) bagaimana cara mencapai tujuan yang hendak dicapai; (3) langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai; (4) mekanisme pengendalian dan evaluasi RPJMD 2021-2026.

Visi RPJMD Tahun 2021-2026 adalah "Terwujudnya Pesisir Barat Yang Amanah, Maju Dan Sejahtera" dapat diformulasikan dengan misi-misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia secara Berkeadilan, Maju dan Berdaya Saing.

2. Mengembangkan Infrastruktur Wilayah dengan Konsep Pembangunan Inklusif Untuk Konektivitas Antar Wilayah dengan Memperhatikan Aspek Mitigasi Bencana dan Berwawasan Lingkungan.

3. Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan Melalui Peningkatan Produktivitas Sektor Pertanian dan Perikanan.

4. Mengembangkan Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah yang Berpijak Pada Kearifan Lokal.

5. Menyelenggarakan Pelayanan Publik yang Berkualitas Melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Produktif serta Penguatan Sinergitas Antar Lembaga.

5. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017-2037

Dalam proses penyusunan RKPD wajib melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan indikasi program pada RTRW Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017-2037. Sinkronisasi perlu dijaga dalam upaya mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan yang sesuai dengan pola ruang. Sehingga tidak terjadi pelanggaran dalam proses penggunaan lahan serta dalam upaya menjaga keseimbangan pertumbuhan wilayah sehingga mampu mengurangi kesenjangan antar wilayah di daerah.

Penataan ruang Kabupaten Pesisir Barat bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten Pesisir Barat sebagai destinasi pariwisata berbasis industri pertanian dan kelautan yang memperhatikan aspek kearifan lokal dan kelestarian lingkungan dengan kebijakan penataan ruang, terdiri atas :

a. pengembangan pariwisata berbasis wisata alam dan budaya dengan pembangunan pariwisata yang terintegrasi dan berkelanjutan;

b. pengembangan sistem permukiman yang berhirarki dan terpadu antara sistem perdesaan dan perkotaan dan pengembangan sistem prasarana wilayah;

c. pengembangan kawasan minapolitan dengan pengelolaan sumber daya lokal berbasis pengelolaan komoditas unggulan melalui proses industrialisasi modern yang ramah lingkungan;

d. pengembangan kawasan pertanian dalam mewujudkan agroindustri yang kompetitif dan terintegrasi antar sektor;

e. perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup melalui pengembangan kawasan lindung sesuai fungsi masing–masing dengan memperhatikan kearifan lokal; dan

f. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan negara.

Proses sinkronisasi termasuk dalam mengintegrasikan sasaran dan arah kebijakan dengan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) yang memuat rencana:

1. Pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
2. Pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
3. Pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
4. Adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

6. Rencana Pembangunan Sektoral

RKPD perlu memperhatikan berbagai dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya yang menjadi suplemen dan/atau readliness bagi perangkat daerah dalam pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan, Beberapa dokumen perencanaan sektoral antara lain dokumen (i) Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (RAD SDG's), (ii) Pengaturan dan penetapan mengenai Standar Pelayanan Minimal (SPM) dari Kementerian/Lembaga dan diterapkan pada Perangkat Daerah di Kabupaten Pesisir Barat yang melaksanakan 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, (iii) Stategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2025, (iv) Rencana induk Kelitbangan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022-2026 dan (v) dokumen perencanaan sektoral lainnya yang dapat memberikan panduan dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

7. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran dari seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Pesisir Barat selama kurun waktu 5 (lima) tahun dan disusun berdasarkan pada RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026. Renstra Perangkat daerah berisi program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah

dalam lima tahun demi menunjang visi, misi dan arah kebijakan dari Bupati Pesisir Barat tahun 2021-2026.

Renstra juga menjadi dokumen perencanaan yang memuat target-target kinerja dari masing-masing perangkat daerah yang dirumuskan dalam penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang disusun berdasarkan pada RPJMD Tahun 2021-2026 dan menjawab target-target pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan.

8. Renja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024

Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja Perangkat Daerah definitif. Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan basis data bahan penyusunan Rancangan RKPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024. Prinsip-prinsip di dalam penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah, adalah sebagai berikut :

a. Mengacu pada Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 yang digunakan sebagai acuan perumusan program, kegiatan, sub kegiatan indikator kinerja dan pagu indikatif dalam Renja Perangkat Daerah Tahun 2024, sesuai dengan rencana program prioritas pada Rancangan Awal RKPD Tahun 2024;

b. Mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan periode sebelumnya (tahun 2022), sebagai acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra Perangkat Daerah berdasarkan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya;

c. Untuk memecahkan masalah yang dihadapi, sebagai acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam rancangan Renja Perangkat Daerah, serta dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah;

d. Memasukkan usulan hasil Pokok-pokok Pikiran Anggota DPRD berdasarkan pada hasil Reses DPRD dan penjaringan aspirasi masyarakat yang terkait dengan percepatan pembangunan daerah;

e. Memasukkan usulan kegiatan hasil Musrenbang RKPD di Kecamatan serta yang terkait dengan Perangkat Daerah, sebagai acuan perumusan kegiatan dalam rancangan Renja Perangkat Daerah mengakomodir usulan masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam Rancangan Awal RKPD;

f. Memasukkan kesepakatan hasil *Focus Group Discussion* (FGD) dan/atau Forum Perangkat Daerah terhadap program unggulan dan intervensi yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait pada tahun 2024.

1.4 Maksud dan Tujuan

1.4.1 Maksud

Penyusunan Dokumen RKPD dimaksudkan untuk menghasilkan suatu dokumen rencana tahunan yang menitikberatkan pada pembahasan sinkronisasi rencana kegiatan Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing dan usulan masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah, sebagai pedoman dalam penyusunan Penetapan RKPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024, KUA dan PPAS APBD Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2024, yang selanjutnya KUA dan PPAS tersebut akan disepakati bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat dan DPRD Kabupaten Pesisir Barat, sebagai acuan dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Pesisir Barat TA 2024.

Oleh karena itu, RKPD Tahun 2024 ini akan memuat beberapa pembahasan antara lain Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun n-2 perencanaan (tahun 2022), Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Beserta Kerangka Pendanaan, Program dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2024, rencana program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah Tahun 2024.

1.4.2 Tujuan

Sedangkan tujuan dari penyusunan RKPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. Mencapai keterpaduan perencanaan tahunan daerah secara efesien dan efektif serta untuk mempertajam prioritas pembangunan berdasarkan isu strategis dan masalah mendesak daerah saat ini, juga sebagai acuan dalam rangka penyusunan RAPBD TA 2023.

b. Terwujudnya keselarasan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan.

c. Sebagai acuan resmi bagi seluruh jajaran Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menentukan prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBD dan sumber pembiayaan lainnya.

d. Mensinergikan komitmen pemerintah terhadap tujuan-tujuan pembangunan global, nasional dan provinsi.

e. Sebagai salah satu instrument evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah terhadap keterkaitan perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan serta pengawasan daerah.

Selanjutnya untuk dapat mencapain tujuan-tujuan tersebut dilakukan dengan melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Memberikan jaminan kepastian kebijakan sebagai komitmen pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan melalui penjabaran rencana strategis ke rencana operasional dan memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;

b. Memberikan gambaran mengenai proyeksi Rencana Kerangka Ekonomi Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024 sebagai patokan dalam penyusunan rencana pendapatan yang akan digunakan untuk mendanai belanja dan pembiayaan pembangunan daerah;

c. Mengarahkan kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan daerah dalam merumuskan, menyusun perencanaan pembangunan dan memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah tahun 2024;

d. Menyatukan tujuan kegiatan semua Perangkat Daerah melalui penetapan target Perjanjian Kinerja dalam rangka pencapaian tema dan tujuan pembangunan Kabupaten Pesisir Barat sehingga RKPD ini bisa menjadi instrumen bagi Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dalam menyusun Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pesisir Barat, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Pesisir Barat dan Kabupaten Pesisir Barat serta Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Pesisir Barat.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

RKPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024 disusun berdasarkan sistematika yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan dokumen RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal. Dalam hal ini kalau di daerah telah diterbitkan Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang perencanaan dan penganggaran ataupun tentang tata cara penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan musrenbang, perlu dicantumkan.

Pada sub bab ini tidak perlu semua peraturan perundang-undangan dicantumkan, melainkan cukup pada peraturanperundang-undangan yang memuat ketentuan secara langsung terkait dengan penyusunan RKPD.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Bagian ini menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPJMD Prov/Kab/Kota, RKP/program strategis nasional, dan RKPD Provinsi untuk penyusunan RKPD Kab/kota.

1.4. Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD bagi daerah yang bersangkutan dan sasaran penyusunan dokumen RKPD bagi daerah yang bersangkutan.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan.

2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah

Bagian ini sangat penting untuk menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Sub bab ini memuat beberapa bahasan dibawah ini:

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Diisi sesuai dengan kondisi umum geografis mengenai kondisi geografi daerah, potensi pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Diisi sesuai dengan kondisi umum kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Indikator yang telah diolah dalam tahap perumusan dapat ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar yang disertai dengan penjelasan dan analisis, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut dijelaskan tentang fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial, fokus seni budaya dan olahraga.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Diisi sesuai dengan kondisi umum aspek pelayanan umum sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Indikator yang telah diolah dalam tahap perumusan dapat ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar yang disertai dengan penjelasan dan analisis, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek pelayanan umum. Lebih lanjut dijelaskan tentang fokus urusan layanan wajib dan pilihan, serta fungsi penunjang urusan pemerintahan.

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Diisi sesuai dengan kondisi umum aspek daya saing daerah sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Indikator yang telah diolah dalam tahap

perumusan dapat ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar yang disertai dengan penjelasan dan analisis, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek daya saing daerah. Lebih lanjut dijelaskan tentang fokus kemampuan ekonomi daerah, fokus fasilitas wilayah/infrastruktur, fokus iklim berinvestasi, dan fokus sumberdaya manusia.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD.

Mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah dan/atau dari laporan pertanggung jawaban APBD menurut tahun-tahun yang berkenaan.

Mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun lalu. Evaluasi meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah, menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD.

Telaahan hasil evaluasi mencakup:

1. Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.

2. Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.

3. Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RPJMD dan kinerja pembangunan daerah.

6. Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

2.3.1. Permasalahan Daerah yang berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran pembangunan daerah

Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan pada RPJMD di tahun rencana serta prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori.

2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi tiap Perangkat Daerah. Identifikasi permasalahan menjelaskan apa yang menjadi masalah dimasa lalu dan masa mendatang serta gambaran solusi yang ditawarkan. Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah harus konsisten dengan permasalahan yang dijabarkan dalam permasalahan perangkat daerah pada Renja Perangkat Daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Mengemukakan tentang arahan nasional dibidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP (Nasional), juga kebijakan dibidang ekonomi dalam dokumen RPJMD provinsi/kabupaten/kota. Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta permasalahan daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Pada bab ini mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD.

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024

Suatu prioritas pembangunan daerah tahun (n) pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) tahun rencana (n).

4.3. Pembangunan Kewilayahan Kabupaten Pesisir Barat

Memberikan gambaran mengenai perencanaan pembangunan daerah berdasarkan pada dokumen RTRW. Pendekatan kewilayahan tersebut dilakukan guna mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah, dengan penanganan secara lintas sektoral pada setiap wilayahnya.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Pada bab ini mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat**.**

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Pada bab ini akan memberikan gambaran terhadap capaian IKU yang sebagai target kinerja yang akan dicapai pada tahun berkenan.

6.1. Indikator Kinerja Utama

Berisi target pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Daerah yang terangkum dalam RPJMD (target capaian kinerja kepala daerah) dalam tahun berkenan.

6.2. Indikator Kinerja Daerah

Berisi target pencapaian Indikator kinerja Daerah yang terangkum dalam Renstra Perangkat Daerah (target kinerja Urusan Pemerintahan Daerah) dalam tahun berkenan.

6.3 Inovasi Daerah

Berisikan rencana inovasi daerah yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan melalui sub kegiatan perangkat daerah. Rencana inovasi daerah diarahkan untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi dari masing-masing perangkat daerah.

BAB VII PENUTUP

Berisi penegasan bahwa dalam melaksanakan RKPD diperlukan sinergisitas dan sinkronisasi yang profesional dan proposional di jajaran pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, DPRD, pihak swasta dan seluruh lapisan masyarakat.

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah

Kabupaten Pesisir Barat dengan ibukota Krui adalah salah satu dari lima belas kabupaten/kota di wilayah Provinsi Lampung. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 (Lembaran Negara Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5364) tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung tertanggal 16 November 2012 dan diundangkan pada tanggal 17 November 2012.

Analisis pada aspek geografi di Kabupaten Pesisir Barat perlu dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, dan kerentanan wilayah terhadap bencana. Sedangkan gambaran kondisi demografi, antara lain mencakup perubahan penduduk, komposisi dan populasi masyarakat secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu di Kabupaten Pesisir Barat.

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Gambaran umum pada aspek geografis akan menjelaskan tentang luas dan batas wilayah administrasi, letak dan kondisi geografis, topografi, geologi, hidrologi, klimatologi dan penggunaan lahan di Kabupaten Pesisir Barat.

2.1.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Kabupaten Pesisir Barat secara administratif terletak di ujung bagian Barat Provinsi Lampung yang bagian barat wilayahnya merupakan garis pantai Samudera Hindia dengan letak wilayah bagian Utara berbatasan dengan Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu dan Kabupaten Lampung Barat, wilayah bagian Timur dan Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tanggamus dan wilayah bagian barat merupakan garis pantai Samudera Hindia. Kabupaten Pesisir Barat Letak administratif ini menjadikan Kabupaten Pesisir Barat sebagai lalu lintas penghubung antara Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu - Kabupaten Pesisir Barat - Kabupaten Lampung Barat - Kabupaten Tanggamus.

Kabupaten Pesisir Barat merupakan kabupaten yang berada di ujung bagian barat Provinsi Lampung yang terletak pada koordinat :4°, 40’, 0” - 6°, 0’, 0” Lintang Selatan dan 103°, 30’, 0” - 104°, 50’, 0” Bujur Timur. Wilayah Kabupaten Pesisir Barat memiliki luas ± 2.939,598 Km^2 (data berdasarkan Kepmendagri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau Tahun 2022) atau 11,21% dari luas wilayah Provinsi Lampung, serta memiliki garis pantai 221,5 Km (daratan dan garis pulau-pulau) dan garis pantai daratan 210 Km (*berdasarkan Peta Rupa Bumi Indonesai, 2017*).

Batas wilayah administratif Kabupaten Pesisir Barat sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung :

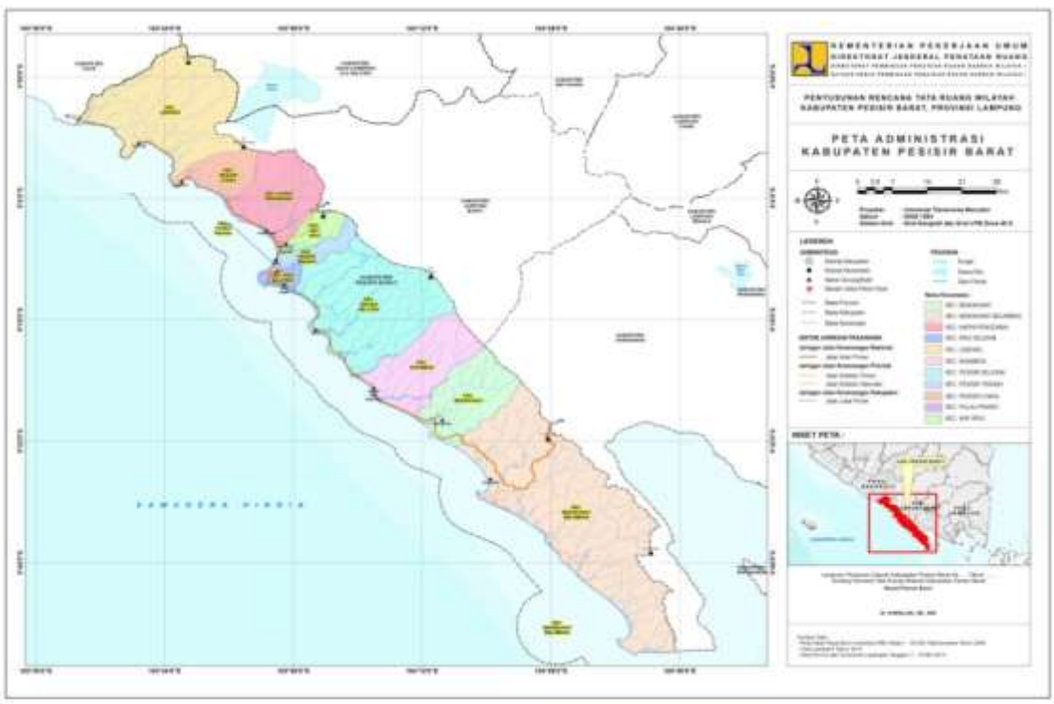
a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Ujung Rembun, Desa Pancur Mas, Desa Sukabanjar Kecamatan Lumbok Seminung, Desa Kubu Prahu Kecamatan Balik Bukit, Desa Kutabesi, Desa Sukabumi Kecamatan Batu Brak, Desa Sukamarga, Desa Ringinsari, Desa Sumber Agung, Desa Tuguratu, Desa Banding Agung Kecamatan Suoh, Desa Hantatai, Desa Tembelang, Desa Gunung Ratu Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat, Desa Gunung Doh Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Desa Ngarit, Desa Rejosari, Desa Petekayu, Desa Sirnagalih Kecamatan Ulu Belu, Desa Datar Lebuay Kecamatan Naningan Kabupaten Tanggamus, Desa Way Beluah, dan Desa Melaya Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan;

b. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Tampang Tua Kecamatan Pematang Sawa, Desa Sedayu, Desa Sidomulyo Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus;

c. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia; dan

d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Tebing Rambutan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu.

Gambar 2.1. Peta Administratif Kabupaten Pesisir Barat



Sumber : Perda Kabupaten Pesisir Barat No 8 Tahun 2017

Wilayah Kabupaten Pesisir Barat secara administratif terdiri dari 11 kecamatan dengan 116 desa (di Pesisir Barat disebut Pekon) dan 2 kelurahan, dengan kecamatan terluas adalah Kecamatan Bangkunat dengan luas 943,70 Km^2 dan yang terkecil adalah Kecamatan Krui Selatan dengan luas 36,25 Km^2.

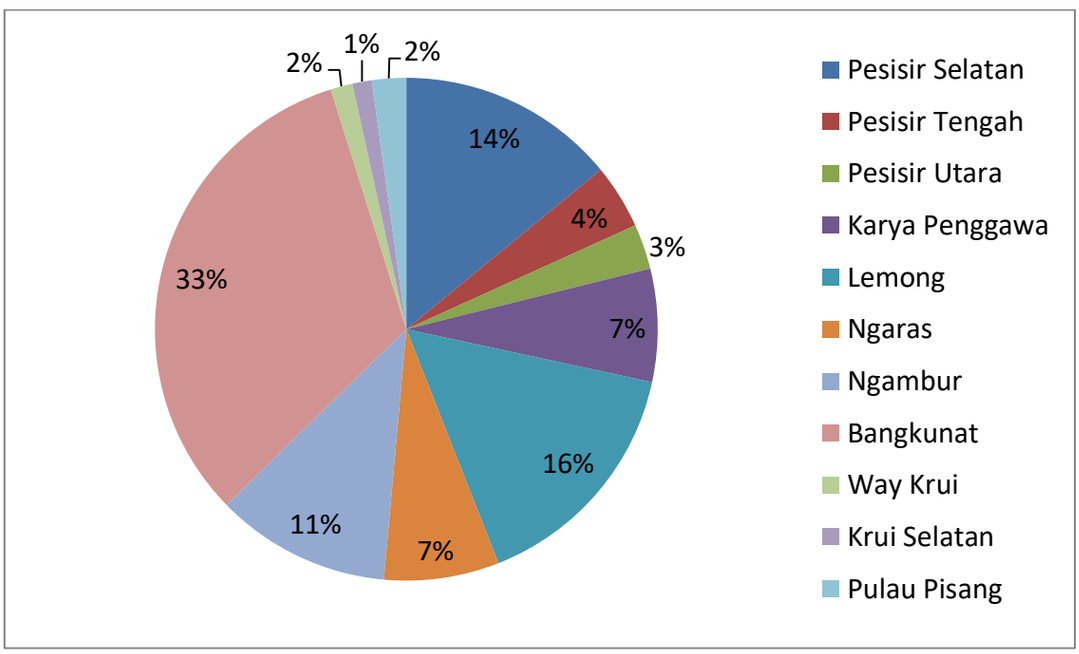
Tabel 2.1. Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Pesisir Barat

No	Kecamatan	Luas(Km^2)	Persentase (%)
1	Pesisir Selatan	409,17	14,07
2	Pesisir Tengah	120,64	4,15
3	Pesisir Utara	84,27	2,9
4	Karya Penggawa	211,11	7,26
5	Lemong	454,97	15,65
6	Ngaras	215,03	7,4
7	Ngambur	327,17	11,25
8	Bangkunat	943,7	32,46
9	Way Krui	40,92	1,41
10	Krui Selatan	36,25	1,25
11	Pulau Pisang	64	2,2

Sumber : Perda Kabupaten Pesisir Barat No 8 Tahun 2017

Sementara itu, luas wilayah Kabupaten Pesisir Barat secara administratif per kecamatan adalah sebagai berikut:

Gambar 2.2. Luas Wilayah per-KecamatanKabupaten Pesisir Barat



Sumber : Perda Kabupaten Pesisir Barat No 8 Tahun 2017

2.1.1.2. Kondisi Topografi

Secara topografi daerah, Kabupaten Pesisir Barat dibagi menjadi 3 (tiga) wilayah yaitu:

1. Daerah dataran rendah (ketinggian 0 sampai 600 meter dari permukaan laut);
2. Daerah berbukit (ketinggian 600 sampai 1.000 meter dari permukaan laut);
3. Daerah pegunungan (daerah ketinggian 1.000 sampai dengan 2.000 meter dari permukaan laut). Keadaan wilayah sepanjang Pantai Pesisir Barat umumnya datar sampai berombak dengan kemiringan berkisar 3% sampai 5%. Di bagian Barat Laut Kabupaten Pesisir Barat terdapat gunung-gunung dan bukit, yaitu diantaranya Gunung *Pugung (1.964 m).* Dengan kondisi topografi tersebut, maka kawasan permukiman pada umumnya berlokasi di daerah yang relatif datar, tetapi dengan kondisi luas lahan yang terbatas ada kemungkinan arah pengembangan pemukiman ke daerah-daerah yang bertopografi dan kolektor kontur tajam.

Secara umum kemiringan lereng bervariasi dari datar sampai sangat terjal. Sebagian besar wilayah Pesisir Barat berlereng miring sampai sangat terjal sebesar 70 % dari seluruh luasan wilayah Pesisir Barat. Wilayah ini memanjang dari utara ke selatan di sepanjang Patahan Semangka. Wilayah terjal sampai sangat terjal dengan kemiringan 25% – 40% dan >40% terdapat di Kecamatan Lemong (Pekon Lemong, Malaya, Bandar Pugung, Pagar Dalam, Hutan, Balam), sebagian besar wilayah Kecamatan Karya Penggawa, dan Kecamatan Ngaras (Pekon Marang, Biha, Mon, Gedung Cahya, Kota Baru). Wilayah dengan kemiringan lahan antara datar (0 – 0,2%) sampai landai (0,2 – 2%) terdapat di pantai barat Kecamatan Pesisir Selatan dan Ngaras.

Secara fisiografis daerah Pesisir Barat dibedakan atas 3 (tiga) bagian yakni daerah pesisir di bagian barat dengan kemiringan 0 sampai dengan 15 persen, daerah pegunungan yang merupakan daerah Bagian Tengah dengan kemiringan 15 sampai dengan atau lebih dari 40 persen, daerah bergelombang dengan kemiringan lahan 2 sampai 40 persen. Ketinggian wilayah Kabupaten Pesisir Barat, dibedakan menjadi 3 wilayah yaitu:

a. Dataran rendah dengan ketinggian 0 – 200 meter dpl
b. Daerah perbukitan dengan ketinggian 200 - 1000 meter dpl,
c. Daerah pegunungan dengan ketinggian 1000 – 2000 meter dpl

Kecamatan Pesisir Utara, Pesisir Tengah dan Pesisir Selatan pada umumnya mempunyai ketinggian berkisar antara 0 – 500 meter dpl. Bentuk bentang alam sepanjang pesisir barat datar sampai berombak dengan kemiringan berkisar antara 3 – 5 persen. Di beberapa wilayah Kabupaten Pesisir Barat Barat terdapat gunung-gunung dan bukit.

Gambar 2.3. Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Pesisir Barat



Sumber : Perda Kabupaten Pesisir Barat No 8 Tahun 2017

Tabel 2.2. Nama Gunung dan Tingginya di Kabupaten Pesisir Barat

No	Kecamatan	Tinggi (m)	Letak
1	Gunung Pugung	1.964	Pesisir Utara

Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Barat, 2023

Kecamatan tertinggi adalah Way Krui dengan ketinggian 39 mdpl dan terendah adalah Karya Penggawa dengan data -0,28 mdpl. Sementara untuk Kecamatan terjauh dari Ibukota Kabupaten Krui yang berada di Kecamatan Pesisir Tengah adalah Kecamatan Bangkunat di sisi selatan dengan jarak 64 Km dan Kecamatan Lemong di sisi utara dengan jarak tempuh 54 km.

Tabel 2.3. Tinggi Wilayah dan Jarak ke Ibukota menurut Kecamatan Kabupaten Pesisir Barat

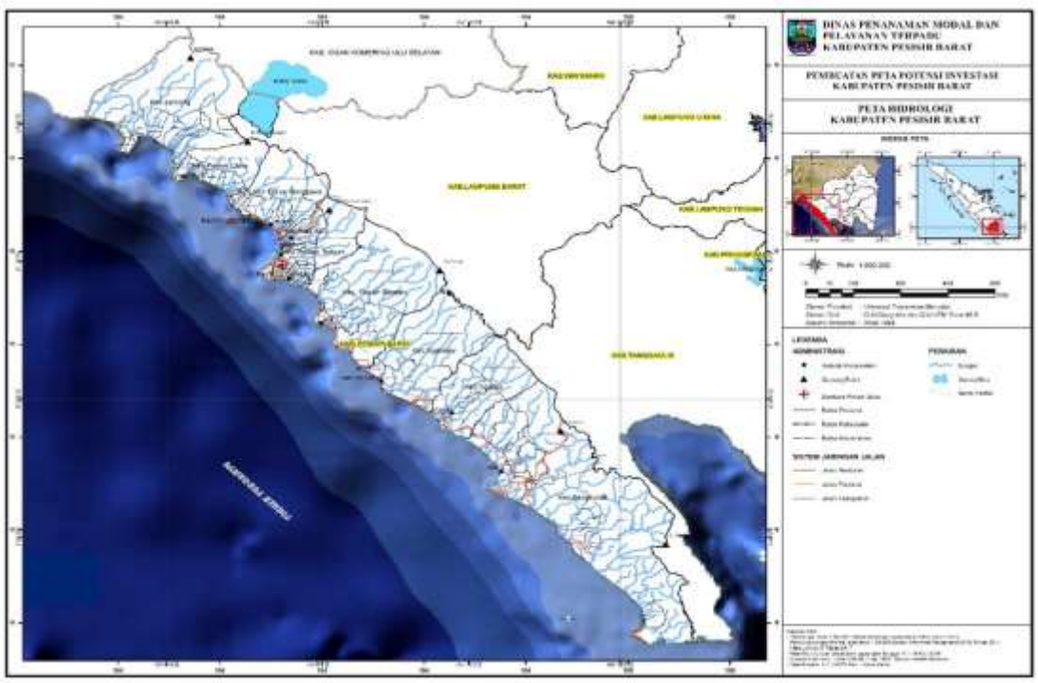
No	Kecamatan	Tinggi Wilayah (mdpl)	Jarak ke Ibukota Kabupaten (Km)
1	Pesisir Selatan	7	25,00
2	Pesisir Tengah	1	1,00
3	Pesisir Utara	4	28,50
4	Karya Penggawa	-0,28	10,00
5	Lemong	58	54,00
6	Ngaras	5	64,20
7	Ngambur	11	46,50
8	Bangkunat	13	64,00
9	Way Krui	39	10,00
10	Krui Selatan	14	8,50
11	Pulau Pisang	0,1	15,00

Sumber : Bagian Pemerintahan Setdakab, 2023

2.1.1.3. Kondisi Hidrologi

Wilayah Pesisir Barat di bagian barat mempunyai sungai-sungai yang mengalir pendek dengan pola aliran dendritik yang menyebabkan daerah ini ditandai dengan jarangnya banjir sebab pada saat musim hujan datang bersamaan air tidak terkonsentrasi dan timing lagnya menjadi lambat. Delta marine ditandai dengan agregat kasar hasil endapan aluvial vulkanik, hal ini menyebabkan bila air besar muara sungai sering berpindah (meander). Sungai – sungai yang berukuran pendek dan mengalir di lereng terjal seperti ini sukar dikembangkan untuk irigasi, kecuali yang sudah mengalir di daerah delta pantai, umumnya mudah dikembangkan walaupun masih terkena pengaruh pasang surut laut.

Gambar 2.4. Peta Hidrologi Kabupaten Pesisir Barat



Sumber : Perda Kabupaten Pesisir Barat No 8 Tahun 2017

Pada bagian timur Pesisir Barat merupakan daerah tangkapan air (*catchment area*) sungai-sungai besar yang mengalir ke arah timur antara lain : Way Besai, Way Seputih dan sebagainya. Proses erosi yang sudah lanjut, besarnya material yang terangkut (*sediment load*) menyebabkan makin cepatnya daerah ini mengalami kemiskinan unsur hara tanah. Dengan berkurangnya flora penutup tanah dan sifat drainase tanah yang baik (terdiri dari lempung pesiran bergeluh) praktis daya simpan air daerah ini sangat kecil, ini menyebabkan fluktuasi aliran permukaan (*run off*) makin besar, sungai-sungai yang mengalir ke sebelah timur menjadi terganggu kestabilannya. Umumnya sungai-sungai yang mengalir ke sebelah barat masih stabil karena didukung oleh banyaknya flora penutup tanah dan belum terganggunya air tanah dangkal sebagai sumber mata air.

Tabel 2.4. Data Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Pesisir Barat Berdasarkan Kecamatan

No	Kecamatan	Nama DAS
1	Lemong	1. DAS Selayan; 2. DAS Mengkudu; 3. DAS Halami; 4. DAS Simpang Balak; 5. DAS Amaisano; 6. DAS Atau; 7. DAS Walur.
2	Pesisir Utara	1. DAS Tanjung Alur; 2. DAS Bayuk; 3. DAS Balam; 4. DAS Batu Lawang; 5. DAS Nata; 6. DAS Gedau; 7. DAS Way Kendaway; 8. DAS Way Pemancar.
3	Karya Penggawa	1. DAS Tembakak; 2. DAS Kebuduk; 3. DAS Kebuduk Tunggal; 4. DAS Karwi; 5. DAS Nukak; 6. DAS La Ay; 7. DAS Hanuan.
4	Way Krui	1. DAS Way Krui; 2. DAS Toulunik; 3. DAS Way Ngison,
5	Pesisir Tengah	1. DAS Mahnai; 2. DAS Way Batu; 3. DAS Way Tuwok.
6	Pesisir Selatan	1. DAS Tanjung Jati; 2. DAS Biha; 3. DAS Way Tenumbang; 4. DAS Marang.
7	Ngambur	1. DAS Ngambur Bunak; 2. DAS Temuli; 3. DAS Sumber Agung; 4. DAS Ngambur.
8	Ngaras	1. DAS Ngaras; 2. DAS Surabalak; 3. DAS Titan; 4. DAS Titan Kanan.

No	Kecamatan	Nama DAS
9	Bangkunat	1. DAS Bambang; 2. DAS Ceringin; 3. DAS Heni. 4. DAS Pemerihan; 5. DAS Cangup; 6. DAS Babuta; 7. DAS Napaliut; 8. DAS Manangakiri; 9. DAS Betung; 10. DAS Nipah; 11. DAS Paya; 12. DAS Panagon Hilir; 13. DAS Pariago; 14. DAS Kawat Kiri; 15. DAS Kawat Kecil; 16. DAS Haru; 17. DAS Belimbing; 18. DAS Sleman; 19. DAS Balak; 20. DAS Kejadian; 21. DAS Tirompedaka; 22. DAS Asahan; 23. DAS Cangi; 24. DAS Kaur Gading; 25. DAS Muaratanco; 26. DAS Belambang; 27. DAS Way Pintau; 28. DAS Tampang.

Sumber : Dinas PU dan PR (data diolah)

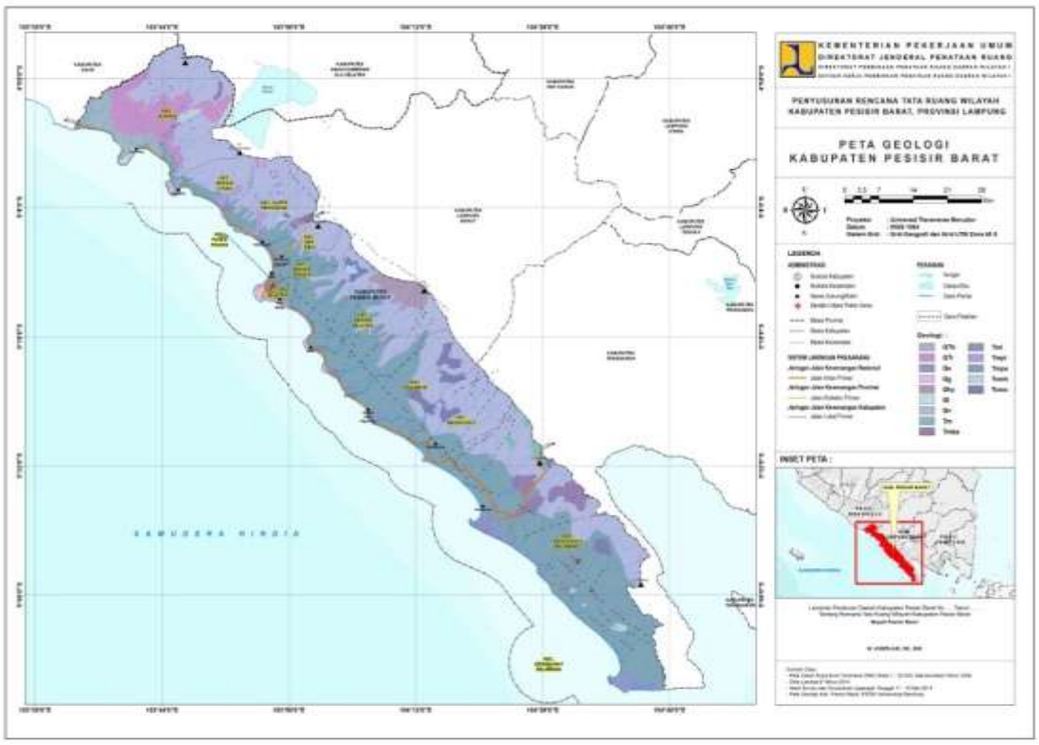
2.1.1.4. Kondisi Geologi

Batuan yang umum dijumpai di Kabupaten Pesisir Barat adalah endapan gunung api, batu pasir neogen, granit batu gamping, metamorf, tufa Lampung, dan alluvium. Formasi tufa masam dari debu gunung api di sekitar Bukit Barisan. Sedangkan endapan gunung api menutupi sebagian besar wilayah dan kadang-kadang dijumpai endapan emas dan perak serta mineral logam lainnya sebagai mineral ikutan.

Berdasarkan peta geologi Provinsi Lampung skala 1:250.000 yang disusun oleh S. Gafoer, TC Amin, Andi Mangga (1989) dalam Bakosurtanal (2004), Pesisir Barat terdiri dari batuan Vulkan Tua (Old Quarternary Young), Formasi Simpang Aur, Formasi Ranau, Formasi Bal, dan Batuan Intrusive. Litologi yang dominan adalah jenis vulkanik, seperti Andesit – Basaltik. Jenis batuan ini menyebar hampir di semua kecamatan, kecuali di Kecamatan Karya Penggawa yang mempunyai jenis batuan gamping. Batuan sedimen (alluvium) menyebar di sepanjang pantai Barat, yaitu di kaki lereng Bukit Barisan.

Sedangkan berdasarkan peta geologi Provinsi Lampung skala 1 : 250.000 yang disusun oleh S. Gafoer, TC Amin, Andi Mangga (1989), Pesisir Barat terdiri dari batuan vulkan tua (Old Quarternary Young), Formasi simpang aur, formasi ranau, formasi bal, atuan intrusive sebagaimana dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.5. Peta Geologi Kabupaten Pesisir Barat



Sumber : Perda Kabupaten Pesisir Barat No 8 Tahun 2017

2.1.1.5. Kondisi Klimatologi

Menurut Oldeman, Irsal L Darwis (1979), akibat pengaruh dari rantai pegunungan Bukit Barisan, maka Pesisir Barat memiliki 2 (dua) zone iklim yaitu:

1. Zone A (Jumlah bulan basah > 9 Bulan) terdapat di bagian barat Taman Bukit Barisan Selatan (TNBBS) Termasuk Krui dan Bintuhan.
2. Zone BL (Jumlah bulan basah 7 - 9 bulan) terdapat di bagian timur Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS).

Tabel 2.5. Pengamatan Unsur Iklim menurut Bulan Kabupaten Pesisir Barat

No	Bulan	Suhu			Kelembaban		
		Min	Rata-rata	Maks	Min	Rata-rata	Maks
1	Januari	22.0	27.8	99.99	56.0	82.6	100
2	Februari	19.4	28.5	99.99	55.0	81.3	98.0
3	Maret	22.2	29.1	99.99	56.0	79.5	100
4	April	22.2	30.0	99.99	56.0	78.2	98.0
5	Mei	21.6	30.3	99.99	58.0	80.2	98.0
6	Juni	21.6	29.7	99.99	58.0	79.4	100
7	Juli	19.8	29.8	99.99	51.0	75.9	98.0
8	Agustus	22.0	29.6	99.99	53.0	77.9	100
9	September	20.8	29.3	99.99	56.0	79.8	100
10	Oktober	22.0	30.5	99.99	51.0	75.7	100
11	November	18.4	29.2	99.99	59.0	81.3	100
12	Desember	22.6	28.6	99.99	58.0	83.9	100

Sumber : BPS Pesisir Barat, 2021

Secara umum Kabupaten Pesisir Barat beriklim tropis humid dengan angin laut lembab yang bertiup dari Samudera Indonesia dengan 2 (dua) angin/musim setiap tahunnya. Pada bulan November sampai dengan bulan Maret angin bertiup dari arah barat dan barat laut, bulan Juli sampai dengan Agustus angin bertiup dari arah timur dan tenggara dengan kecepatan angin rata-rata 70 km/hari. Temperatur udara maksimum 33°C dan temperatur minimum 22°C. Rata-rata kelembaban udara sekitar 80-88 persen, akan semakin tinggi pada daerah yang lebih rendah.

Berdasarkan curah hujan dari Badan Meteorologi dan Geofisika, curah hujan Pesisir Barat berkisar antara 2.500–3.500 milimeter per tahun atau 140–221 milimeter per bulan. Tinggi curah hujan di Kabupaten Pesisir Barat terbagi atas:

a. Curah hujan antara 2500 – 3000 mm per tahun

b. Curah hujan antara 3000 – 3500 mm per tahun

Gambar 2.6. Peta Curah Hujan Kabupaten Pesisir Barat



Sumber : Perda Kabupaten Pesisir Barat No 8 Tahun 2017

Tabel 2.6. Jumlah Curah Hujan menurut Bulan Kabupaten Pesisir Barat

No	Bulan	Jumlah Curah Hujan (mm)	Jumlah Hari Hujan (hari)	Penyinaran Matahari (%)
1	Januari	282.9	22	20.4
2	Februari	280.5	19	37.9
3	Maret	439.3	22	48.1
4	April	230.2	7	49.5
5	Mei	138.8	13	50.6
6	Juni	65.1	9	49.2
7	Juli	14.3	6	49.0
8	Agustus	50.8	7	47.1
9	September	156.8	14	43.4

10	Oktober	69.6	13	49.2
11	November	236.6	18	30.0
12	Desember	351.9	20	53.1

Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Barat, 2023

2.1.1.6. Kondisi Kebencanaan

Rawan bencana adalah suatu wilayah yang memiliki kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi yang untuk jangka waktu tertentu tidak dapat atau tidak mampu mencegah, meredam, mencapai kesiapan, sehingga mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu (Tondobala, 2012). Rawan bencana yang dimaksud adalah daerah yang memiliki kemungkinan suatu bahaya akan terjadi, bahaya tersebut akibat dari kondisi geografis, geologis, demografis ataupun karena ulah manusia. Contoh daerah rawan bencana adalah seperti kawasan rawan gempa, kawasan rawan tsunami, kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang ekstrim, dan lain sebagainya.

Gambar 2.7. Peta Resiko Tsunami di Kabupaten Pesisir Barat



Sumber : Hasil Analisis Data Perda Kabupaten Pesisir Barat No 8 Tahun 2017, 2020

Gambar 2.8. Peta Ancaman Longsor kabupaten Pesisir Barat

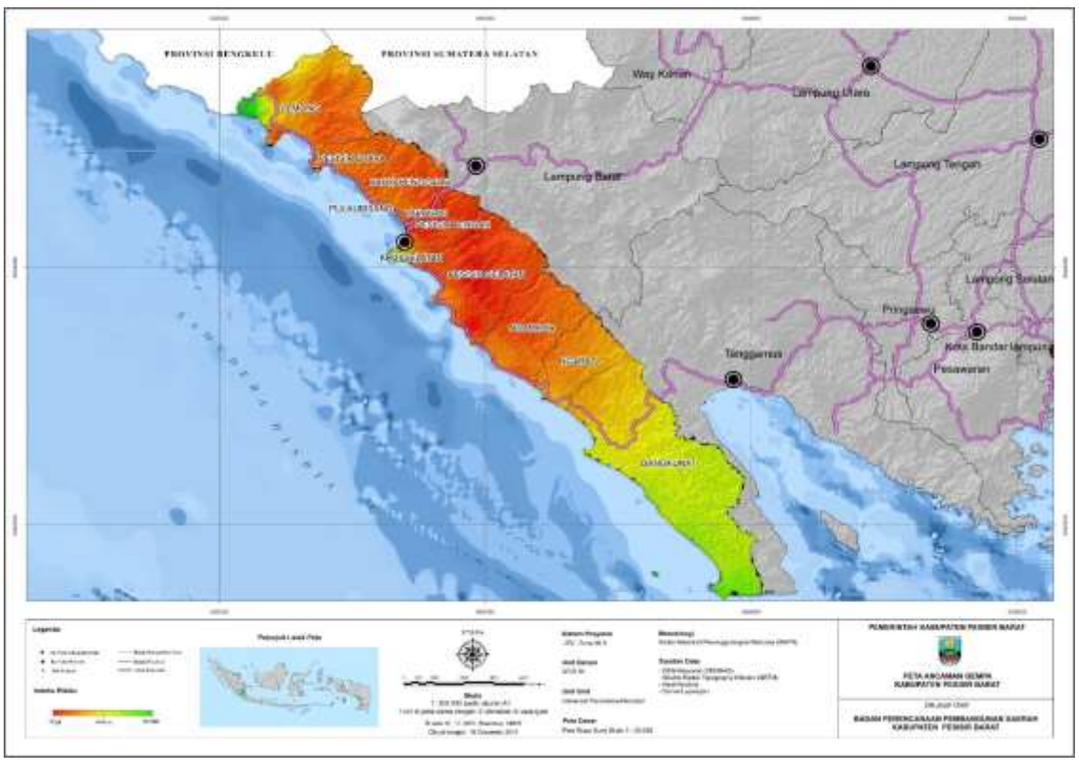


Sumber : Hasil Analisis Data Perda Kabupaten Pesisir Barat No 8 Tahun 2017, 2020

Tanah longsor adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah atau material campuran tersebut, bergerak ke bawah atau keluar lereng. Proses terjadinya tanah longsor dapat diterangkan sebagai berikut: air yang meresap ke dalam tanah akan menambah bobot tanah. Jika air tersebut menembus sampai tanah kedap air yang berperan sebagai bidang gelincir, maka tanah menjadi licin dan tanah pelapukan di atasnya akan bergerak mengikuti lereng dan keluar lereng (Dwiyanto, 2002).

Tanah longsor terjadi disebabkan oleh adanya gerakan tanah sebagai akibat dari bergeraknya masa tanah atau batuan yang bergerak kesepanjang lereng atau di luar lereng karena faktor gravitasi. Hal ini sejalan dengan pendapat Juhadi, dkk (2018) “bahwasanya penyebab terjadinya tanah longsor adalah adanya gerakan tanah pada kondisi tanah yang labil, tipe tanah longsor sering dipicu oleh tingginya curah hujan”. Wilayah yang memiliki kerentanan tanah longsor adalah yang berbatasan dengan perbukitan hal ini sesuai dengan keadaan Pesisir Barat yang rentan akan bencana longsor karena didominasi oleh tebing Pegunungan Bukit Barisan Selatan.

Gambar 2.9. Peta Ancaman Gempa di Kabupaten Pesisir Barat



Sumber : Hasil Analisis Data Perda Kabupaten Pesisir Barat No 8 Tahun 2017, 2020

Gempa bumi merupakan sebuah guncangan hebat yang menjalar ke permukaan bumi yang disebabkan oleh gangguan di dalam litosfir (kulit bumi). Gangguan ini terjadi karena di dalam lapisan kulit bumi dengan ketebalan 100 km terjadi akumulasi energi akibat dari pergeseran kulit bumi itu sendiri. Lapisan kulit bumi mempunyai temperatur relatif jauh lebih rendah dibandingkan lapisan di bawahnya (mantel dan inti bumi) sehingga terjadi aliran konvektif, yaitu massa dengan suhu tinggi mengalir ke daerah bersuhu lebih rendah. Massa bersuhu tinggi ini berada di lapisan astenosfir yang bersifat sangat kental yang mengalir secara perlahan. Akibat gerakan-gerakan ini, maka kulit bumi terpecah-pecah menjadi bagian-bagian berupa lempengan yang saling bergerak satu sama lain, yang kemudian disebut dengan lempeng tektonik.

Gambar 2.10. Peta Resiko Banjir di Kabupaten Pesisir Barat



Sumber : Hasil Analisis Data Perda Kabupaten Pesisir Barat No 8 Tahun 2017, 2020

Wilayah Kabupaten Pesisir Barat memiliki curah hujan yang tinggi. Kemungkinan yang terjadi akibat tingginya curah hujan adalah meluapnya air di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) salah satunya adalah DAS Biha. Keadaan ini dapat menjadi semakin parah karena ekosistem suatu daerah itu rusak sehingga terjadi pendangkalan dan penyempitan aliran sungai.

Kerentanan banjir (*flood susceptibility*) adalah tingkat kemudahan suatu daerah untuk terkena banjir (Dibyosaputro,1984). Daerah yang sangat terpengaruh adanya banjir adalah daerah dengan relief datar dan landai seperti dataran aluvial, teras sungai erosional, teras marin, dan dataran nyaris. Bentuk lahan yang berbukit jarang mengalami banjir karena memiliki kemiringan lereng yang relatif curam sehingga sebagian besar air hujan langsung mengalir menjadi aliran permukaan. Akan tetapi, aliran permukaan ini tidak menyebabkan banjir karena hanya mengalir ke daerah-daerah yang lebih rendah. Selain itu, sebagian kecil air hujan mengalami infiltrasi masuk ke dalam tanah.

2.1.1.7. Penggunaan Lahan

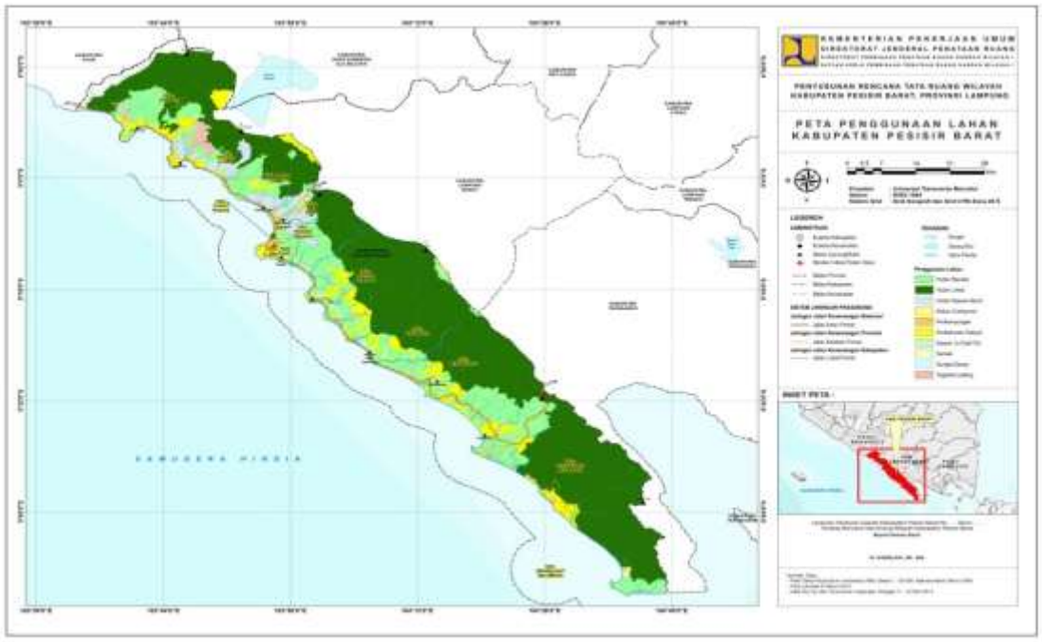
Kabupaten Pesisir Barat lebih dari 60% luas wilayahnya adalah kawasan hutan lebat yang merupakan Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) 192.575 Ha, Hutan Lindung Pesisir 9.360 Ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) 33.358 Ha, hal ini menunjukan Kabupaten Pesisir Barat mempunyai peranan penting sebagai Daerah Tampung Air (*catchment area*). Sementara itu rencana pola ruang wilayah kabupaten meliputi pada (a) kawasan lindung dan (b) kawasan budidaya.

Pola pemanfaatan ruang pada kawasan lindung secara garis besar mencakup pada 5 (lima) fungsi perlindungan, sebagai berikut:

1. Kawasan Hutan Lindung, dengan luas kurang lebih 9.580 Ha, meliputi Kecamatan Bangkunat dengan luas kurang lebih 4.803 Ha; Kecamatan Ngaras dengan luas kurang lebih 1.389 Ha; Kecamatan Ngambur dengan luas kurang lebih 681 Ha; Kecamatan Pesisir Selatan dengan luas kurang lebih 398 Ha; Kecamatan Pesisir Tengah dengan luas kurang lebih 775 Ha; Kecamatan Way Krui dengan luas kurang lebih 156 Ha; Kecamatan Pesisir Utara dengan luas kurang lebih 484 Ha; dan Kecamatan Lemong dengan luas kurang lebih 894 Ha.
2. Kawasan yang memberikan perlindungan bawahannya adalah kawasan resapan air yang berada dalam kawasan hutan lindung dengan luas kurang lebih 6.030 Ha, meliputi Kecamatan Bangkunat dengan luas kurang lebih 1.539 Ha; Kecamatan Ngaras dengan luas kurang lebih 74Ha; Kecamatan Pesisir Selatan dengan luas kurang lebih 398 Ha; Kecamatan Krui Selatan dengan luas kurang lebih 15 Ha; Kecamatan Way Krui dengan luas kurang lebih 120 Ha; Kecamatan Karya Penggawa dengan luas kurang lebih 1.110 Ha; Kecamatan Pesisir Utara dengan luas kurang lebih 26 Ha; dan h. Kecamatan Lemong dengan luas kurang lebih 1.300 Ha.
3. Kawasan Perlindungan Setempat, meliputi : (a) kawasan sempadan pantai; (b) kawasan sempadan sungai; (c) kawasan sekitar danau/waduk; dan (d) kawasan ruang terbuka hijau.
4. Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya, terdiri atas: (a) Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan dengan luasan kurang lebih 186.565 Ha, tersebar di Kabupaten Pesisir Barat; (b) kawasan Cagar Alam Laut dengan luasan kurang lebih 8.878 Ha, terdapat di Kecamatan Bangkunat dan Kecamatan Lemong; (c) cagar budaya terdapat di seluruh Kabupaten Pesisir Barat.
5. Kawasan Rawan Bencana Alam, terdiri atas (a) Kawasan rawan bencana longsor diantaranya di Kecamatan Lemong, Kecamatan Pesisir Utara, Kecamatan Karya Penggawa dan Kecamatan Way Krui; (b) Kawasan rawan bencana tsunami/gelombang pasang air laut ditetapkan di seluruh wilayah pesisir kabupaten; (c) Kawasan rawan bencana banjir diantaranya di Kecamatan Karya Penggawa, Kecamatan Way Krui, Kecamatan Pesisir Tengah, Kecamatan Krui Selatan, Kecamatan Pesisir Selatan, Kecamatan Ngambur, Kecamatan Ngaras dan Kecamatan Bangkunat; (d) Kawasan rawan bencana gempa bumi ditetapkan di seluruh wilayah kabupaten.

Sementara itu, arahan pola ruang untuk Kawasan Budidaya terdiri atas 8 (delapan) pembagian, yaitu (1) kawasan peruntukan hutan produksi; (2) kawasan peruntukan pertanian; (3) kawasan peruntukan perikanan; (4) kawasan peruntukan pertambangan; (5) kawasan peruntukan industri; (6) kawasan peruntukan pariwisata; (7) kawasan peruntukan permukiman; dan (8) kawasan peruntukan lainnya.

Gambar 2.11. Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Pesisir Barat

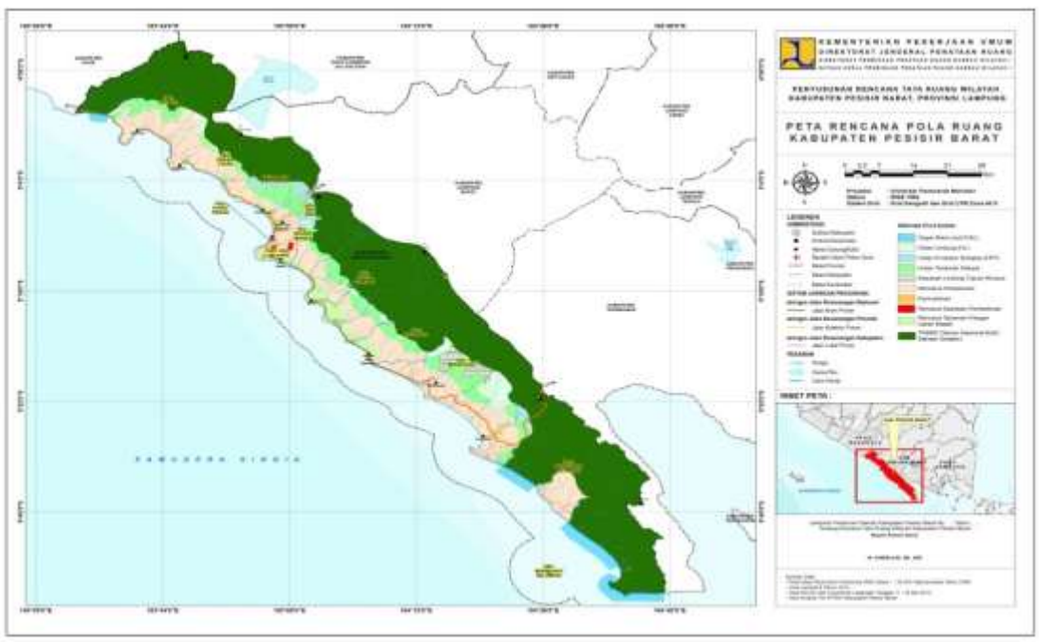


Sumber : Perda Kabupaten Pesisir Barat No 8 Tahun 2017

2.1.1.8. Potensi Pengembangan Wilayah

Dari aspek geografis daerah Kabupaten Pesisir Barat yang berada pada sisi terluar Provinsi Lampung yang berbatasan dengan Provinsi Bengkulu memiliki nilai strategis dan wajib untuk terus dikembangkan. Sebagaimana telah disebutkan di atas, Kabupaten Pesisir Barat membagi pola ruang menjadi 5 (lima) bagian, yaitu (1) kawasan hutan lindung; (2) kawasan yang memberikan perlindungan bawahannya; (3) kawasan perlindungan setempat; (4) kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya; dan (5) kawasan rawan bencana alam.

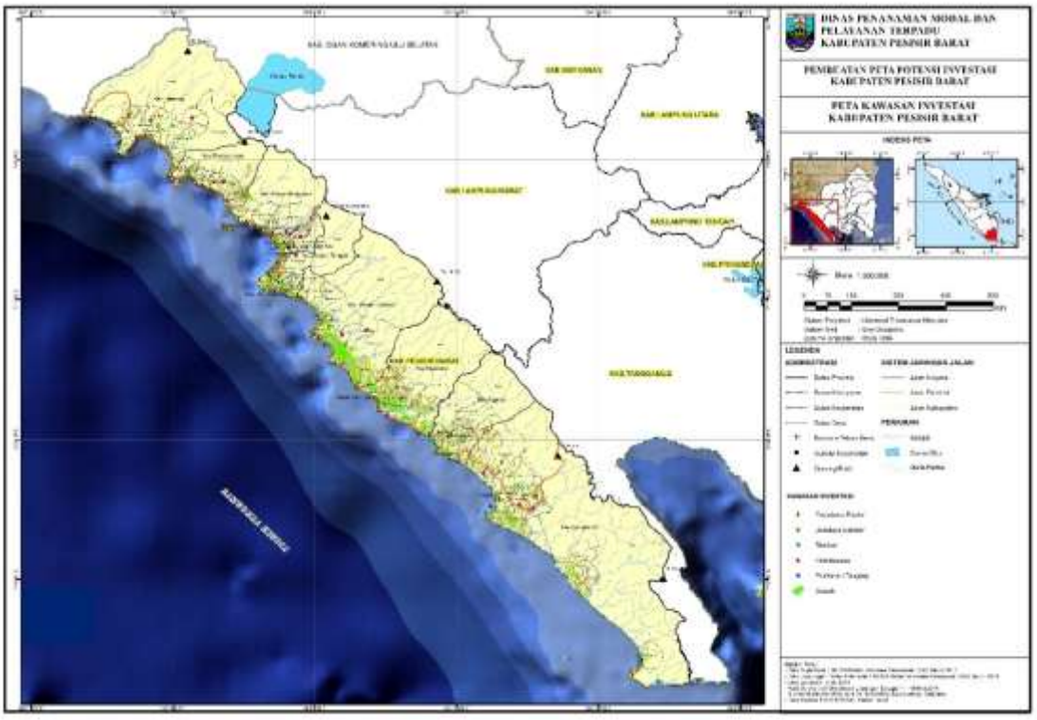
Gambar 2.12. Peta Pola Ruang Kabupaten Pesisir Barat



Sumber : Perda Kabupaten Pesisir Barat No 8 Tahun 2017

Kondisi alam Kabupaten Pesisir Barat secara umum dibatasi oleh kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) yang membentang dari wilayah selatan berbatasan dengan Kabupaten Tanggamus sebelah Barat dengan Kabupaten Lampung Barat, sebelah Utara dengan Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu dan sebelah Timur dengan Samudera Hindia.

Gambar 2.13. Peta Kawasan Strategis di Kabupaten Pesisir Barat



Sumber : Perda Kabupaten Pesisir Barat No 8 Tahun 2017

Tabel 2.7. Kawasan Lindung dan Konservasi Kabupaten Pesisir Barat

No	Jenis Hutan	Luas (Ha)
1	Hutan TNBBS (Taman Nasional Bukit Barisan Selatan)	192.575
2	Hutan Lindung Pesisir	9.360
3	Hutan Produksi Terbatas	33.358
Total		**235.293**

Sumber : Perda Kabupaten Pesisir Barat No 8 Tahun 2017

Selain kawasan lindung berupa hutan terdapat juga kawasan lindung berupa Cagar Alam Laut (CAL) yaitu Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) di Pekon Muara Tambulih (Kecamatan Ngambur), merupakan tempat konservasi penyu langka antara lain Penyu Lekang, Penyu Belimbing, Penyu Sisik dan Penyu Hijau.

Sebagai perwujudan perencanaan pembangunan Kabupaten Pesisir Barat pengambangan kawasan budidaya diarahkan untuk tidak merusak kultur dan kontur serta lingkungan yang ada. Pengembangan wilayah di Kabupaten Pesisir Barat diharapkan dapat terarah dan merata di setiap unit wilayah kabupaten pesisir barat sehingga dapat meratakan pembangunan Kabupaten Pesisir Barat. Rencana pengambangan potensi wilayah di Kabupaten Pesisir Barat direncanakan pada:

1. Arahan Kawasan Peruntukan Hutan Produksi terdiri atas hutan produksi terbatas dengan luas kurang lebih 29.257Ha yang tersebar di Kecamatan Lemong, Kecamatan Pesisir Utara, Kecamatan Karya Penggawa, Kecamatan Way Krui, Kecamatan Pesisir Tengah, Kecamatan Pesisir Selatan, Kecamatan Ngambur, Kecamatan Ngaras, Kecamatan Bangkunat. kawasan dikembangkan dengan pola kerjasama dalam rangka meningkatkan produktivitas hasil hutan berupa kayu maupun non kayu.
2. Arahan Kawasan Peruntukan Pertanian dengan luasan kurang lebih 57.207Ha, dikembangkan dengan sistem agropolitan dan terpadu serta berkelanjutan, terdiri atas:
    a. Kawasan pertanian tanaman pangan terdiri atas sawah dan non sawah dikembangkan di Kecamatan Pesisir Utara, Kecamatan Karya Penggawa, Kecamatan Way Krui, Kecamatan Pesisir Tengah, Kecamatan Krui Selatan, Kecamatan Pesisir Selatan, Kecamatan Ngambur;
    b. Kawasan pertanian holtikultura, dikembangkan di Kecamatan Pesisir Utara, Kecamatan Karya Penggawa, Kecamatan Way Krui, Kecamatan Pesisir Tengah, Kecamatan Krui Selatan, Kecamatan Pesisir Selatan, Kecamatan Ngambur;
    c. Kawasan perkebunan dikembangkan di Kabupaten Pesisir Barat;
    d. Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dikembangkan di Kabupaten Pesisir Barat.
3. Arahan Kawasan Peruntukan Perikanan, dengan luasan kurang lebih 3.798 Ha dikembangkan dengan pola minapolitan, terdiri atas:
    a. Kawasan peruntukan perikanan tangkap meliputi Kecamatan Bangkunat, Kecamatan Ngaras, Kecamatan Ngambur, Kecamatan Pesisir Selatan, Kecamatan Krui Selatan, Kecamatan Pesisir Tengah, Kecamatan Karya Penggawa, Kecamatan Pesisir Utara, Kecamatan Lemong dan Kecamatan Pulau Pisang.
    b. Kawasan peruntukan budidaya perikanan meliputi (i) budidaya air tawar dikembangkan di Kabupaten Pesisir Barat; (ii) budidaya air laut dikembangkan di Kabupaten Pesisir Barat; dan (iii) budidaya air payau dikembangkan di Kecamatan Bangkunat dan Kecamatan Ngaras.
    c. Kawasan peruntukan pengolahan ikan meliputi Kecamatan Bangkunat, Kecamatan Ngaras, Kecamatan Pesisir Selatan, Kecamatan Pesisir Tengah, Kecamatan Karya Penggawa, Kecamatan Lemong dan Kecamatan Pulau Pisang.
4. Arahan Kawasan Peruntukan Pertambangan, dengan luasan sekitar 20 Ha, dikembangkan di Kabupaten Pesisir Barat.
5. Arahan Kawasan Peruntukan Industri, dengan luasan sekitar 78 Ha, terdiri atas:
    a. Kawasan peruntukan industri besar dikembangkan di Kecamatan Bangkunat dan/atau Kecamatan Pesisir Selatan.

b. Kawasan peruntukan industri menengah di Kabupaten Pesisir Barat.

c. Kawasan peruntukan industri kecil dikembangkan di permukiman (industri rumah tangga) dan kawasan wisata (sentra industri kerajinan tangan) di Kabupaten Pesisir Barat.

6. Kawasan Peruntukan Pariwisata, dengan luasan kurang lebih 438 Ha, terdiri atas:

a. Kawasan peruntukan pariwisata budaya, dikembangkan pada daerah yang memiliki potensi daya tarik wisata budaya di Kabupaten Pesisir Barat, antara lain Makam Abang Kunat, Goa Matu, Makam Gajah Mada, Makam Syeikh Aminullah, Kampung Wisata, Makam Tokoh Adat dan Sumur Puteri.

b. Kawasan peruntukan pariwisata alam, dikembangkan pada daerah yang memiliki potensi daya tarik wisata alam di Kabupaten Pesisir Barat, antara lain Kawasan Tambling, Pantai Ujung Bangkunat, Pantai Teluk Ngaras, Way Cangkuk, Pantai Curup Indah, Rhino Camp, Pantai Sukanegara, Pantai Siging, Pantai Sumber Agung, Pantai Tanjung Setia, Pantai Way Jambu, Pantai Pasar Senin, Pantai Melasti, Pantai Biha, Pantai Marang, Pantai Mandiri, Pantai Lintik, Pantai Walur, Pantai Ilahan, Pantai Labuhan Jukung, Pantai Way Redak, Pantai Serai, Bukit Selalaw, Pantai Muara Way La'ay, Pantai Harapan Kita, Pantai Way Sindi, Pantai pasir Hitam, Pantai Tembakak, Pantai Penengahan, Batu Lawang, Pantai Walur Pesisir Utara, Air Terjun Rata Agung, Air Terjun Way Nyercik, Pantai Pugung dan Pulau Pisang.

c. Kawasan peruntukan pariwisata buatan, dikembangkan di Kabupaten Pesisir Barat, antara lain: Penakaran Penyu Muara Tembulih, Bendungan Way Biha, Pelabuhan Kuala Stabas, Kawasan Labuhan Jukung dan Kawasan Tanjung Setia.

7. Kawasan Peruntukan Permukiman dengan luasan sekitar 5.058 Ha, terdiri atas:

a. Kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: Kecamatan Bangkunat, Kecamatan Pesisir Selatan, Kecamatan Pesisir Tengah, dan Kecamatan Lemong.

b. Kawasan peruntukan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: Kecamatan Pulau Pisang, Kecamatan Ngaras, Kecamatan Ngambur, Kecamatan Krui Selatan, Kecamatan Way Krui, Kecamatan Karya Penggawa, Kecamatan Pesisir Utara.

8. Kawasan Peruntukan Lainnya, meliputi :

a. Kawasan pertahanan keamanan adalah pembangunan dan peningkatan kawasan pertahanan keamanan di masing–masing kecamatan, meliputi (i) Kodim di Kabupaten Pesisir Barat; (ii) Polres di Kabupaten Pesisir Barat; (iii) Koramil di setiap kecamatan pada wilayah Kabupaten Pesisir Barat; (iv) Polsek di setiap kecamatan pada wilayah Kabupaten Pesisir Barat.

b. Kawasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana terdiri dari (i) wilayah pesisir tersebar di Kabupaten Pesisir Barat; dan (ii) pulau–pulau kecil meliputi Pulau Pisang dan Pulau Betuah.

2.1.1.9. Wilayah Rawan Bencana

Wilayah rawan bencana merupakan kawasan yang diidentifikasi berpotensi tinggi mengalami bencana. Kabupaten Pesisir Barat dengan karakteristik wilayah tersebut berpotensi terhadap terjadinya bencana alam dengan dominasi bencana tsunami, banjir, tanah longsor, Gempa dan kebakaran hutan akibat kekeringan. Bila ditelaah lebih jauh, kelima macam bencana di Kabupaten Pesisir Barat ini saling terkait, dengan sebab baik karena kondisi awal alamnya maupun karena dampak pembangunan, perusakan lingkungan dan perambahan hutan.

Pengembangan kawasan di daerah kawasan rawan bencana perlu ada pengkajian dan penelitian yang akurat agar tidak menimbulkan kerugian dan kerusakan alam lebih jauh. Secara umum Kawasan Rawan Bencana diklasifikasikan menjadi:

1. Wilayah Pesisir/Pantai, Untuk Kabupaten Pesisir Barat kawasan yang berpotensi tinggi sebagai kawasan rawan bencana adalah daerah garis pantai yang merupakan kawasan rawan bencana tsunami, luas kawasan rawan bencana tsunami ±25.283 Ha meliputi 11 wilayah kecamatan di Kabupaten Pesisir Barat dan merupakan salah satu kawasan rawan banjir karena kawasan tersebut merupakan dataran rendah dimana ketinggian muka tanahnya lebih rendah atau sama dengan ketinggian muka air laut pasang rata-rata (*Mean Sea Level, MSL*), dan menjadi tempat bermuaranya sungai-sungai. Di samping itu, kawasan pesisir/pantai dapat menerima dampak dari gelombang pasang yang tinggi, sebagai akibat dari badai angin topan atau gempa yang menyebabkan tsunami.
2. Wilayah Dataran Banjir (*Flood Plain Area*), Adalah daerah dataran rendah di kiri dan kanan alur sungai, yang kemiringan muka tanahnya sangat landai dan relatif datar. Aliran air dari kawasan tersebut menuju sungai sangat lambat, yang mengakibatkan potensi banjir menjadi lebih besar, baik oleh luapan air sungai maupun karena hujan lokal. Kabupaten Pesisir Barat memiliki Daerah Aliran Sungai (DAS) pendek yang langsung bermuara ke laut Kawasan ini umumnya terbentuk dari endapan sedimen yang sangat subur, dan terdapat di bagian hilir sungai. Daerah Aliran Sungai (DAS) atau Daerah Sempadan Sungai seringkali merupakan daerah pengembangan kota, seperti permukiman, pusat kegiatan ekonomi, perdagangan, industri dan lain sebagainya. Kawasan ini memiliki potensi bencana banjir yang cukup besar juga, karena debit banjir yang cukup besar yang dapat terbawa oleh sungai tersebut. Potensi bencana banjir akan lebih besar lagi apabila terjadi hujan cukup besar di daerah hulu dan hujan lokal di daerah tersebut, disertai pasang air laut.

Gambar 2.14. Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) Kabupaten Pesisir Barat



Sumber : Perda Kabupaten Pesisir Barat No 8 Tahun 2017

3. Wilayah Penggunungan dan Perbukitan, secara topologi Kabupaten Pesisir Barat juga memiliki kawasan berpotensi mengalami bencana tanah longsor terutama daerah-daerah yang berbukit dan berada di lereng-lereng gunung. Daerah lereng pegunungan dan perbukitan secara umum memiliki struktur tanah yang tidak stabil ini dapat menimbulkan bencana tanah longsor, apalagi pemanfataan pengembangan budidaya pemukiman, pertanian, perkebunan dan lainnya tidak memperhatikan pelestarian lingkungan. Pemicu adanya bencana tanah longsor umumnya disebabkan oleh gempa dan curah hujan yang tinggi dan dapat diperparah jika terjadi perusakan lingkungan seperti penggundulan hutan di kawasan pegunungan dan perbukitan.
4. Wilayah Hutan dan Padang Rumput, kawasan ini juga merupakan kawasan rawan bencana terutama pada saat musim kemarau yaitu bencana kebakaran hutan. Luasnya kawasan hutan dan padang rumput dapat menyebakan kebakaran hutan yang dipicu panas akibat kekeringan dan pembakaran hutan yang dilakukan oleh perambah hutan.
5. Wilayah yang dilalui Lajur Patahan dan Penujaman (Palung Samudera Indonesia). Berdasarkan Peta Seismotektonik Indonesia, secara regional wilayah Kabupaten Pesisir Barat terletak pada zona sumber gempa bumi Samudera Indonesia. Lajur penunjaman (Palung Samudera Indonesia) yang terletak di sebelah barat wilayah Pesisir Barat menjadikan wilayah ini rawan bencana gempa bumi. Kemungkinan akumulasi energi yang terjadi pada jalur penunjaman dapat menjadi pemicu terjadinya gempa bumi akibat pelepasan energi akumulatif tersebut. Selanjutnya energi ini akan merambat lebih cepat melalui patahan-patahan yang terletak pada satu sistem dengan episentrum. Pola struktur di wilayah Kabupaten Pesisir Barat yang berarah tenggara-barat

laut dan timurlaut-barat daya sangat berpotensi menjadi zona lemah. Untuk itu zona sepanjang patahan-patahan dalam sistem ini harus diwaspadai sebagai daerah bahaya gempa bumi merusak. Kondisi geologi wilayah Kabupaten Pesisir Barat merupakan salah satu variabel utama dalam menentukan tingkat kerawanan bencana di wilayah ini. Sistem patahan dan kondisi litologi merupakan media yang mampu menghantarkan gelombang gempa ke wilayah-wilayah di sekitar titik episentrum. Daerah-daerah yang harus diwaspadai terkait dengan bencana gempa bumi adalah daerah-daerah pada sisten patahan terutama pada daerah yang ditutupi oleh batuan yang bersifat lepas (*unconsolidated*), yang pada umumnya berumur kuarter.

2.1.1.10. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk di Kabupaten Pesisir Barat pada tiap kecamatan relatif stabil walaupun dipengaruhi oleh beberapa faktor penambah dan pengurang jumlah penduduk antara lain penduduk pindah, datang, lahir dan meninggal. Secara umum, dengan perkembangan daerah Kabupaten Pesisir Barat jumlah pendudukn juga semakin semakin berkembang dikarenakan lebih meratanya pembangunan daerah, dengan berkembangnya suatu daerah diiringi juga bertambahnya jumlah penduduk baik itu bertambah secara alami maupun adanya migrasi dari daerah luar.

Komposisi Penduduk Kabupaten Pesisir Barat terdiri dari 16,60% Post Generasi Z (Penduduk yang lahir tahun 2013 dst, dengan perkiraan usia 0 sampai dengan 7 tahun), 28,47% Generasi Z (Penduduk yang lahir tahun 1997-2012 dengan perkiraan usia sekarang 8 sampai 23 tahun), 24,64% milenial (Penduduk yang lahir tahun 1981-1996 dengan perkiraan usia sekarang 24 sampai 39 tahun), 18,36% Generasi X (Penduduk yang lahir tahun 1965-1980 dengan perkiraan usia sekarang 40 sampai 55 tahun), 10,51% Baby Boomer (Penduduk yang lahir tahun 1946-1964 dengan perkiraan usia sekarang 56 sampai 74 tahun), serta 1,42% Generasi *Pre Boomer* (Penduduk yang lahir sebelum tahun 1945 dengan perkiraan usia sekarang ≥ 75 tahun).

Jumlah penduduk Kabupaten Pesisir Barat tahun 2022 (hingga Semester I Tahun 2022) perhitungan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah 167.339 jiwa yang terdiri dari 86.887 laki-laki dan 80.452 perempuan dan 48.348 kepala keluarga (dengan rasio jenis kelamin sebesar 108.64). Dengan luas wilayah 2.907,23 km2, Pesisir Barat memiliki rata-rata kepadatan penduduk sekitar 55-57 orang per kilometer per segi. Kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar adalah Kecamatan Bangkunat sementara jumlah penduduk terendah di Kecamatan Pulau Pisang.

Jumlah penduduk Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2022 ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.8. Jumlah Penduduk Kabupaten Pesisir Barat Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2022 (Semester I)

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk			Jumlah Kepala Keluarga
		Laki-Laki	Perempuan	Total	
1	Pesisir Tengah	10.409	9.939	20.384	5.882
2	Pesisir Selatan	14.248	13.385	27.633	7.863
3	Lemong	6.811	6.098	12.909	3.759
4	Pesisir Utara	4.451	4.162	8.613	2.529
5	Karya Penggawa	8.250	7.613	15.863	4.417
6	Pulau Pisang	859	800	1.659	549
7	Way Krui	4.738	4.413	9.151	2.647
8	Krui Selatan	5.667	5.345	11.012	3.076
9	Ngambur	11.589	10.908	22.497	6.621
10	Ngaras	5.238	4.738	9.976	2.809
11	Bangkunat	14.627	13.051	27.678	8.196
	Jumlah	**86.887**	**80.452**	**167.339**	**48.339**

Sumber : Dinas Dukcapil, 2023

Penduduk Kabupaten Pesisir Barat tersebar dalam 11 kecamatan dengan kepadatan yang berbeda pada setiap kecamatan. Penduduk di Kecamatan Bangkunat (27.678 jiwa) dan Kecamatan Pesisir Selatan (27.633 jiwa) merupakan penyumbang penduduk terbesar pada Kabupaten Pesisir Barat, sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil adalah di Kecamatan Pulau Pisang dengan jumlah penduduk 1.659 Jiwa.

a. Jumlah Penduduk

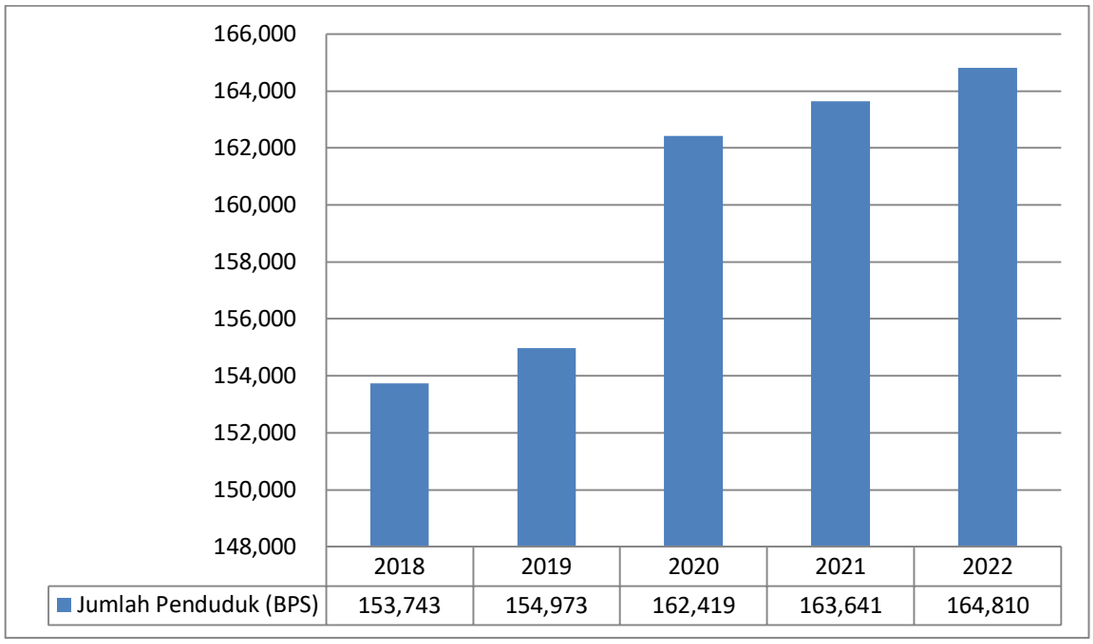
Pada tahun 2022 hingga Semester I jumlah penduduk Kabupaten Pesisir Barat adalah 167.339 jiwa yang terdiri dari 86.887 laki-laki dan 80.452 perempuan dan 48.339 kepala keluarga (berdasarkan data Disdukcapil). Penduduk Kabupaten Pesisir Barat pada umumnya menempati wilayah yang memiliki pelayanan yang lebih baik dibandingkan wilayah lain dan menempati daerah yang nyaman. Tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Pesisir Barat menunjukkan trend yang meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk di Kabupaten Pesisir Barat yang meningkat. Kepadatan penduduk menunjukkan tingkat perbandingan antara jumlah penduduk dan luas lahan di Kabupaten Pesisir Barat, semakin tinggi kepadatan penduduk mengindikasikan pada tingkat kerapatan penggunaan lahan untuk kawasan terbangun, sehingga bisa dikatakan semakin tinggi beban lingkungan hidup.

Berdasarkan struktur umur penduduk, penduduk Kabupaten Pesisir Barat tergolong penduduk *early intermediate*. Struktur umur penduduk tipe ini menunjukkan tingkat kelahiran bayi sudah mulai dapat dikendalikan dan angka kematian mulai menurun. Rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Pesisir Barat sebesar 111 menerangkan bahwa setiap 100 perempuan terdapat 111 laki-laki.

Pada tahun 2022 piramida penduduk Kabupaten Pesisir Barat masih mencirikan piramida ekspansif (piramida penduduk muda) dimana angka

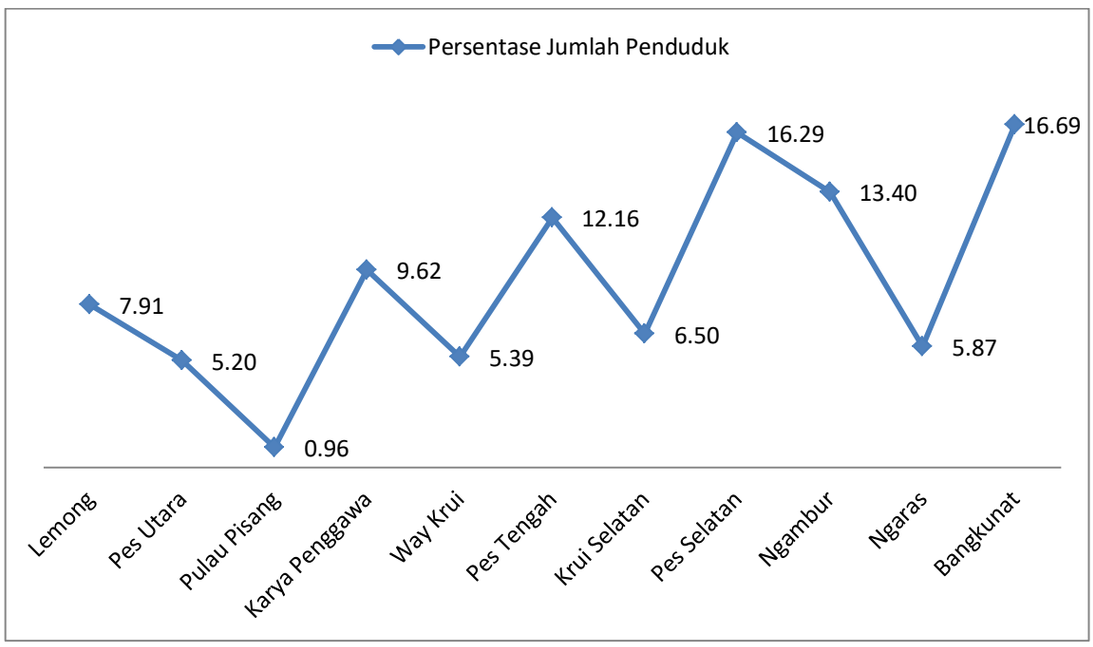
kelahiran masih tinggi dan kelompok terbesar adalah penduduk usia muda. Bila berdasarkan pada data BPS, jumlah penduduk Pesisir Barat sebanyak 152.529 jiwa (2017), 153.743 jiwa (2018), 154.973 jiwa (2019), 162.419 (2020), 163.641 jiwa (2021), 164.810 jiwa (2022) angka ini terus meningkat setiap tahunnya.

Gambar 2.15. Jumlah Penduduk Kabupaten Pesisir Barat tahun 2018-2022 berdasarkan data BPS Kabupaten Pesisir Barat



Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Barat, 2023

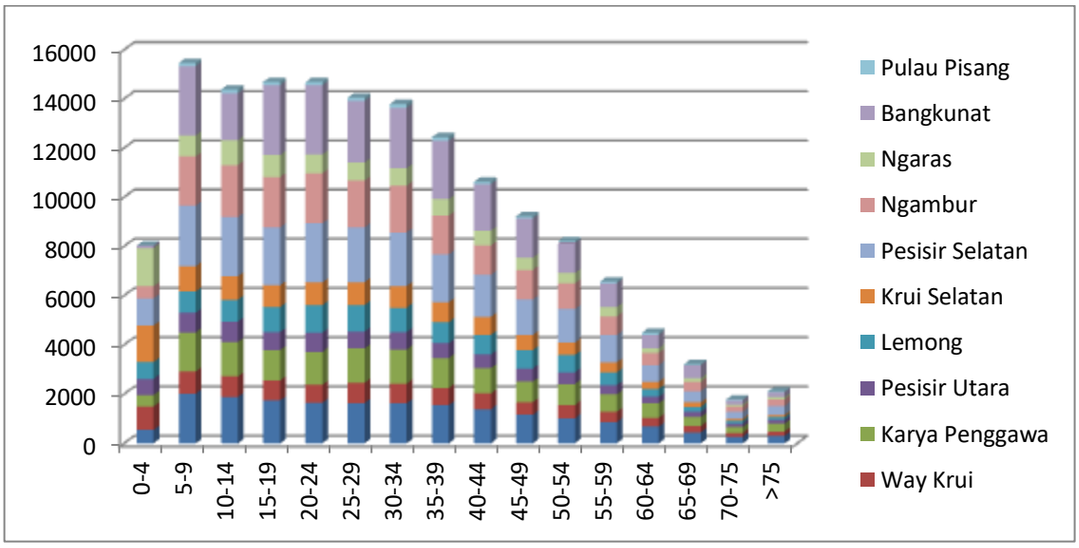
Gambar 2.16. Persentase Penduduk Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022 berdasarkan Kecamatan



Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Barat, 2023

Berdasarkan data pada gambar diatas, dapat dilihat bahwa terjadi pertambuhan jumlah penduduk di Kabupaten Pesisir Barat sejak Tahun 2018-2022, pertumbuhan penduduk yang terjadi di Kabupaten Pesisir Barat masih relatif sedikit, sejak tahun 2018-2022 pertumbuhan penduduk hanya 11.000an jiwa dengan rata-rata pertumbuhan 0.60-0.80%.

Gambar 2.17. Gambaran Penduduk Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022



Sumber : Dinas Dukcapil, 2023

b. Ketenagakerjaan

Jumlah penduduk di Kabupaten Pesisir Barat secara garis besar masih didominasi oleh lapangan pekerjaan pertanian, kehutanan, perkebunan dan perikanan dan pertambangan dan penggalian. Hal ini tentunya harus menjadi perhatian bersama, karena tidak mungkin selamanya bergantung pada sektor pertanian, pengembangan daerah harus bertumpu pada sektor manufaktur dan jasa/*service*. Data dimaksud dilihat dari sisi distribusi PDRB menurut lapangan pekerjaan.

Tabel 2.9. Jumlah Penduduk Kabupaten Pesisir Barat yang Bekerja menurut Status Pekerjaan Tahun 2021-2022

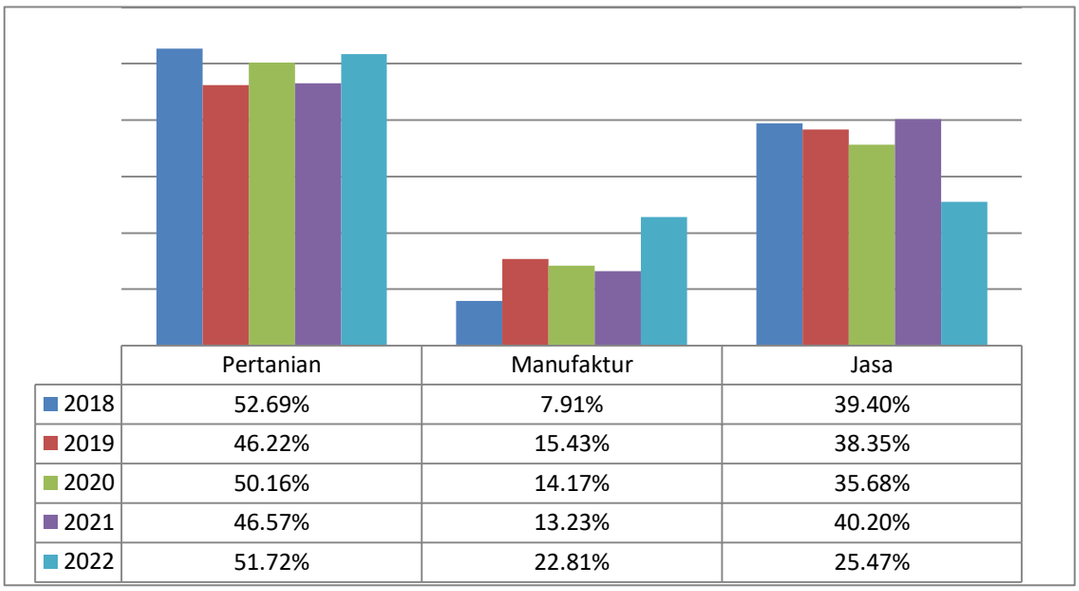
No	Status Pekerjaan Utama	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022
1	Berusaha Sendiri	12.927	14.432	3.948	5.195	16.875	19.627
2	Berusaha dibantu Buruh Tidak Tetap	11.031	16.330	3.189	2.884	14.220	19.174
3	Berusaha dibantu Buruh Tetap	1.285	886	0	150	1.285	1.036
4	Buruh/Karyawan/ Pegawai	7.815	5.556	6.872	6.126	14.687	11.682
5	Pekerja Bebas	12.132	8.612	4.263	2.503	16.395	11.115
6	Pekerja Keluarga	5.435	4.362	13.175	11.790	18.610	16.152
	Jumlah	**50.625**	**50.178**	**31.447**	**28.608**	**82.072**	**78.786**

Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Barat, 2023

Berdasarkan pada data diatas terlihat bahwa kondisi penduduk yang bekerja lebih banyak berusaha sendiri dibandingkan dengan bekerja yang dibantu oleh buruh tetap/karyawan. Hal ini dapat memberikan gambaran singkat tentang kondisi pekerjaan di daerah yang sederhana, konvensional dan mampu dikerjakan secara mandiri/keluarga. Gambaran ini masih terkait dengan pola jenis pekerjaan di daerah yang masih didominasi pada sektor pertanian.

Sektor pertanian tentunya masih menjadi sektor yang memberikan lapangan pekerjaan terluas di daerah, dari tahun 2018-2022 selalu menjadi sektor penopangan perekonomian daerah. Sementara itu sektor jasa kecenderungannya mengalami kenaikan walaupun secara bertahap, hal yang juga dialami oleh sektor manufaktur daerah.

Gambar 2.18. Jumlah Penduduk yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022



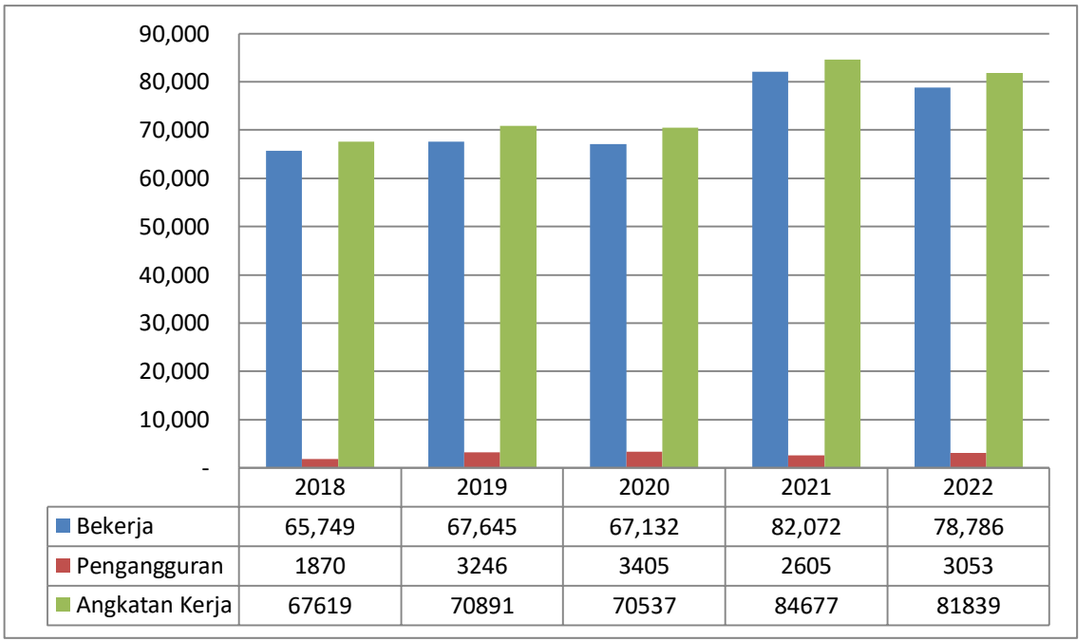
	Pertanian	Manufaktur	Jasa
2018	52.69%	7.91%	39.40%
2019	46.22%	15.43%	38.35%
2020	50.16%	14.17%	35.68%
2021	46.57%	13.23%	40.20%
2022	51.72%	22.81%	25.47%

Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Barat – Dinas Dukcapil, 2023 (diolah)

Jumlah penduduk yang bekerja dibandingkan dengan jumlah penduduk yang tidak bekerja pada tahun 2021 adalah 96,92% dimana terdapat 82.072 orang penduduk yang bekerja dari total angkatan kerja sebesar 84.677 orang. Pada tahun 2022 terjadi perbaikan persentase menjadi 96,27% yang terdiri dari 78.786 orang yang bekerja dari jumlah angkatan kerja sebesar 81.839 orang angkatan kerja. Sebelumnya jumlah penduduk yang bekerja pada tahun 2018 sebanyak 65,749 orang dan terus naik pada tahun 2019 sebanyak 67,645 orang. Tahun 2019 jumlah yang bekerja kembali naik menjadi 67,132 orang.

Naiknya jumlah orang yang bekerja diiringi dengan meningkatnya jumlah pengangguran di daerah. Pada tahun 2018 jumlah pengangguran yang tercatat sebanyak 1.870 orang. Naik drastis pada tahun 2019 menjadi 3.246 orang. Tahun 2020 ketika terjadi Bencana Covid-19 kembali naik menjadi sebanyak 3.405 orang. Tahun 2021, jumlah pengangguran mengalami penurunan menjadi 2.605 orang. Data terakhir untuk tahun 2022 tercatat sebanyak 3.053 orang pengangguran di daerah.

Gambar 2.19. Perbandingan Penduduk yang Bekerja, Pengangguran dengan Angkatan Kerja Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022



	2018	2019	2020	2021	2022
Bekerja	65,749	67,645	67,132	82,072	78,786
Pengangguran	1870	3246	3405	2605	3053
Angkatan Kerja	67619	70891	70537	84677	81839

Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Barat, 2023

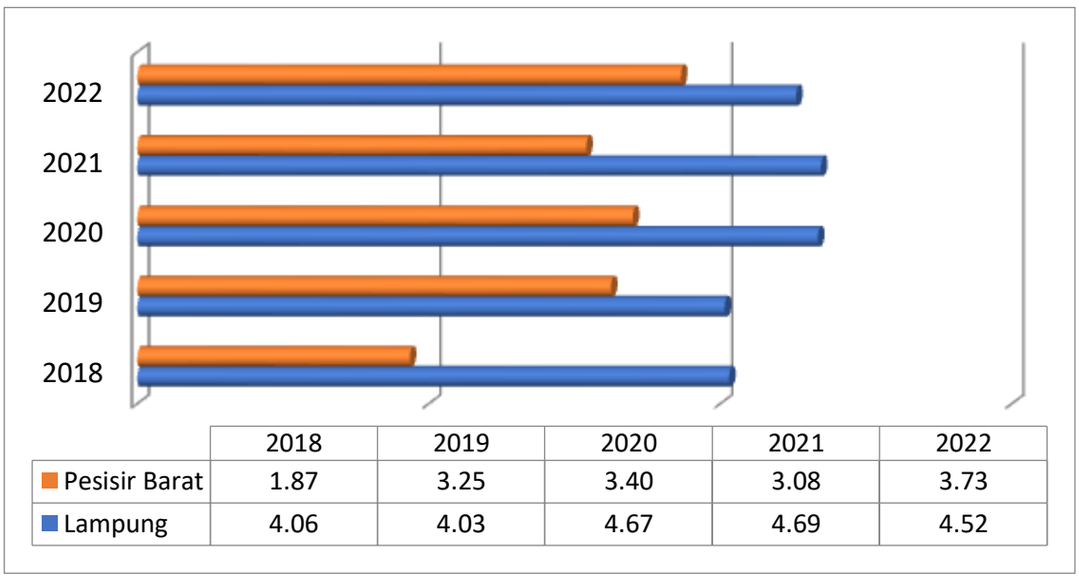
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat merupakan isu penting dan strategis dalam RPJPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2005-2025 disamping penguatan perekonomian dan peningkatan derajat pengetahuan baik secara materil dan spiritual. Terlebih kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tujuan dari bernegara.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pesisir Barat secara umum mengalami kinerja perbaikan dalam 5 (lima) tahun terakhir. Hal ini berkaca dari persentase pada tahun 2018 yang berada pada angka 1.90%. Namun demikian, pada tahun 2019 dan 2020 mengalami penurunan walaupun belum melebihi angka pada tahun 2018, yaitu pada tahun 2019 TPT Kabupaten Pesisir Barat berada pada 3,26% dan pada tahun 2020 menurun menjadi 3.40%. Peningkatan TPT pada tahun 2020 dipengaruhi oleh efek Pandemi Covid-19 yang terjadi di seluruh wilayah. Tahun 2021, TPT membaik menjadi 3.08%. Kinerja pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 3.73%. kemunduran ini mengindikasikan semakin menyempitnya lapangan pekerjaan daerah.

Angka capaian pada tahun 2020 dan 2021 sebesar 3,40% dan 3.08% secara umum masih lebih baik dari TPT Provinsi Lampung yang pada tahun 2020 tercatat pada angka 4,67% dan 4.69% pada tahun 2021. Tahun 2022, Provinsi Lampung mencapai 4.52% pengangguran terbuka. Diharapkan pada tahun-tahun mendatang Kabupaten Pesisir Barat dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menciptakan banyak lapangan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakatnya sehingga jumlah pengangguran terbuka dapat terus ditekan dan diminimalisir.

Gambar 2.20. Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022

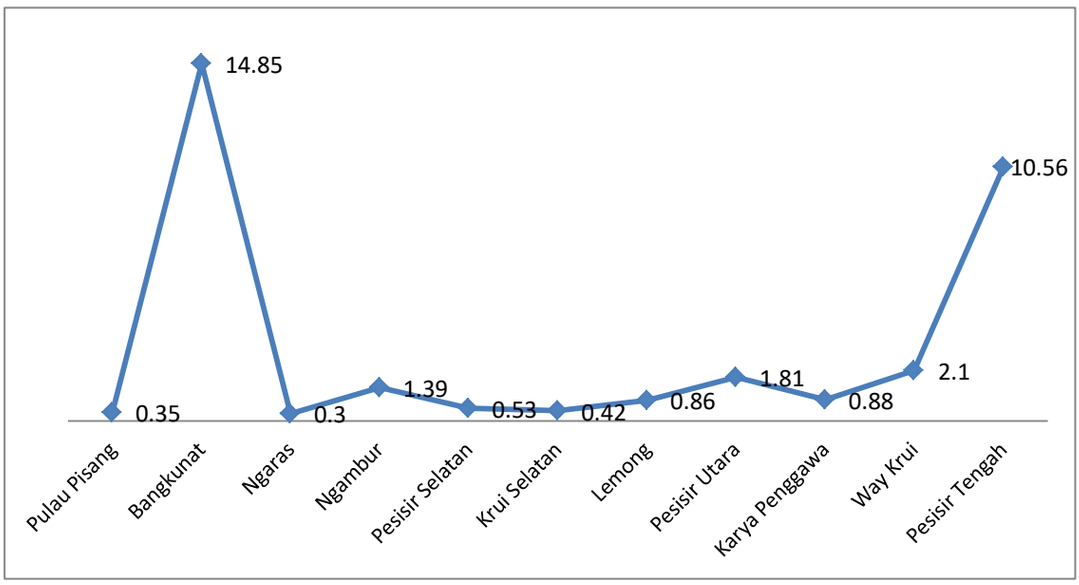


	2018	2019	2020	2021	2022
Pesisir Barat	1.87	3.25	3.40	3.08	3.73
Lampung	4.06	4.03	4.67	4.69	4.52

Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Barat,2023

Ditingkat kecamatan, TPT tertinggi berada di Kecamatan Bangkunat 14,40% dan Kecamatan Pesisir Tengah dengan angka 10,24%. Berikutnya TPT terendah berada di Kecamatan Krui Selatan dengan TPT 0,41% dan Kecamatan Pesisir Selatan dengan angka 0,44%. Berdasarkan pada hal tersebut di atas dapat dilihat bahwa TPT di perkotaan masih lebih tinggi bila dibandingkan dengan daerah perdesaan.

Gambar 2.21. Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Kecamatan di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022



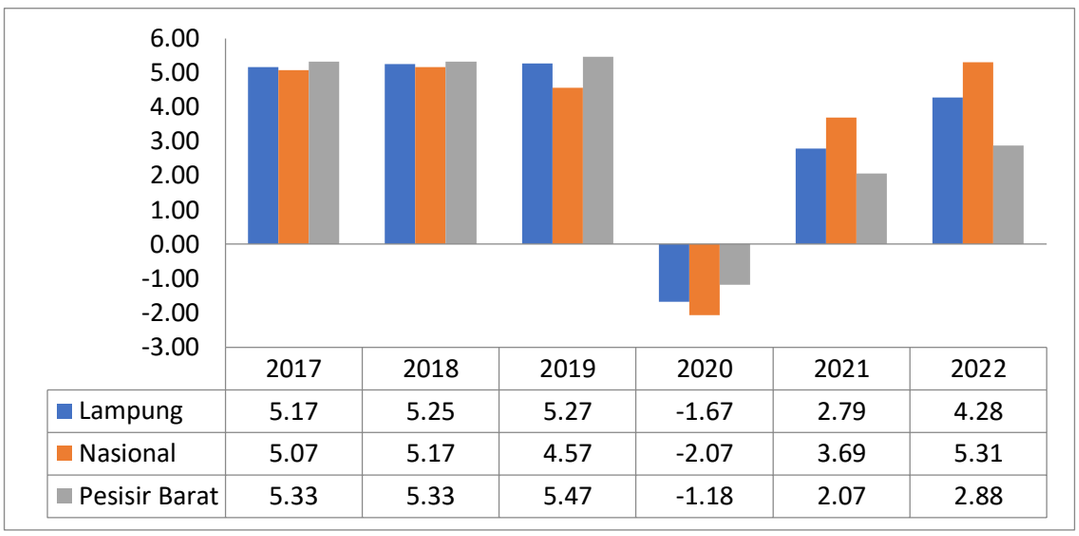
Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Barat, PBDA, 2022

2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Tingkat pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang bisa menggambarkan perkembangan kinerja ekonomi suatu daerah selama dalam kurun periode tertentu. Angka pertumbuhan ekonomi menunjukkan laju capaian nilai tambah riil daerah yang menggambarkan kemajuan perkekonomian yang dihasilkan. Pertumbuhan ekonomi selama 5 (lima) tahun terakhir dapat digambarkan sebagai berikut, ekonomi Kabupaten Pesisir Barat pada tahun 2018 berada pada angka 5,35% atau naik stagnan 0,02 dari tahun 2017. Data pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi berada pada 5.37% atau naik 0,04. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 yang lalu mengalami pertumbuhan negatif untuk pertama kalinya, yaitu sebesar (1,17%). Angka ini lebih baik dari pencapaian Provinsi Lampung yang berada pada angka (1,67%). Pertumbuhan negatif ini disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang mengubah pola ekonomi masyarakat global secara menyeluruh. Pencapaian ini merupakan indikator dari masih lemahnya sistem kesehatan daerah dan kemampuan daya beli masyarakat.

Sementara itu, data untuk pencapaian tahun 2021 terjadi perbaikan kinerja menjadi 2.07%. hal ini menandakan pulihnya perekenomian daerah dan nasional. Tahun 2022, capaian pertumbuhan ekonomi menjadi 2.88%, masih berada dibawah Provinsi Lampung yang berada pada angka 4.28% terlebih catatan nasional yang mencapai 5.31%.

Gambar 2.22. Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022



	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Lampung	5.17	5.25	5.27	-1.67	2.79	4.28
Nasional	5.07	5.17	4.57	-2.07	3.69	5.31
Pesisir Barat	5.33	5.33	5.47	-1.18	2.07	2.88

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2023

2.1.2.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Tahun 2018 PDRB ADHB sebesar 4.282,38 (dalam miliar rupiah) dinilai mengalami kenaikan pertumbuhan sebesar 9%. Selanjutnya pada tahun 2019 PDRB ADHB Kabupaten Pesisir Barat berada pada angka 4.687,39 (dalam miliar rupiah) dan pada tahun 2020 kembali meningkat minor dan berada pada angka 4.677,54 (dalam miliar rupiah). Capaian pada tahun 2021 berada pada angka 4.896,56 (dalam miliar rupiah) dan terus meningkat menjadi 5.349,44 (dalam miliar rupiah) pada tahun 2022.

Berikutnya, secara konstan selama kurun waktu tahun 2018 sampai dengan 2022 PDRB ADHK Kabupaten Pesisir Barat fluktuatif pada beberapa sektor terjadi penurunan dan kenaikan dengan nilai rata-rata pertumbuhan sebesar 4,00-5,00%. Pada tahun 2018 PDRB ADHK sebesar 2.944,88 (dalam miliar rupiah) dinilai mengalami kenaikan pertumbuhan sebesar 5,33% dibandingkan tahun 2017. Pada tahun 2019 PDRB ADHK Kabupaten Pesisir Barat berada pada angka 3.106,11 (dalam miliar rupiah) atau mengalami pertumbuhan sebesar 5,37%. Berikutnya pada tahun 2020, PDRB ADHK mengalami penurunan (1,17%) dengan capaian menjadi 3.069,60 (dalam miliar rupiah). Tahun 2021 terjadi pertumbuhan positif menjadi 3.133,19 (dalam miliar rupiah) atau naik 2.07%. Capaian tahun 2022 mengalami kenaikan 2.88% sehingga berada pada angka 3.223,12 (dalam miliar rupiah).

Lebih lanjut bila dilihat dari persentase kontribusi sektor-sektor dalam PDRB ADHB dan PDRB ADHK Kabupaten Pesisir Barat tahun 2018 sampai dengan 2022 atau selama 5 (lima) tahun terakhir tidak banyak mengalami perubahan. Hal ini lebih disebabkan oleh kebijakan dalam pembiayaan daerah selama kurun waktu tersebut juga tidak banyak mengalami perubahan yang signifikan mampu merubah persentase per sektor pada perhitungan PDRB. Pada tahun 2018-2022 sektor yang memberikan kontribusi paling tinggi terhadap PDRB Kabupaten Pesisir Barat adalah sektor pertanian, yaitu rata-rata diatas 49-50,00%, sedangkan sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor berada di urutan kedua yaitu di atas 10,00-12,00%. Sedangkan untuk sektor pertambangan dan penggalian, sektor administasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib serta sektor konstruksi mampu memberikan sumbangan di atas 5,00-6,00%. Sedangkan sektor lain yang kontribusinya masing-masing berada di bawah 5,00%.

Terhadap sektor-sektor PDRB yang secara distribusi dinilai masih kecil terus diusahakan untuk dapat ditingkatkan karena pada dasarnya semua sektor penunjang PDRB Kabupaten Pesisir Barat merupakan potensi yang layak dikembangkan dan menjadi penunjang perekonomian daerah Kabupaten Pesisir Barat pada masa-masa yang akan datang. Secara umum kondisi perekonomian Kabupaten Pesisir Barat dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.10. PDRB ADHB dan PDRB ADHK menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022 (miliar rupiah)

Tahun	PDRB	
	Atas Dasar Harga Berlaku	Atas Dasar Harga Konstan
2018	4.282,38	2.944,88
2019	4.687,39	3.106,11
2020	4.677,54	3.069,60
2021*	4.896,56	3.133,19
2022**	5.349,44	3.223,12

Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Barat, 2023
**angka sementara*
***angka sangat sementara*

Secara konstan selama kurun waktu tahun (2018-2022) PDRB tumbuh antara 0,20 hingga 0,30%, kecuali pada tahun 2020 dan 2021 yang mengalami kontraksi. Kuatnya sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor perdagangan besar dan

eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, sektor konstruksi, sektor pertambangan dan penggalian serta sektor Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib dalam struktur perekonomian Kabupaten Pesisir Barat merupakan indikasi bahwa sektor ini merupakan sektor yang sangat layak dikembangkan menjadi strategi pembangunan Kabupaten Pesisir Barat. Sementara itu sektor jasa pendidikan dan sektor real estate perlahan namun pasti diprediksi akan semakin menguat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kabupaten Pesisir Barat.

Ada tiga kelompok sektor dalam PDRB menurut lapangan usaha, yaitu kelompok sektor Primer, kelompok Sektor Sekunder dan kelompok Sektor Tersier. Kelompok Sektor Primer terdiri dari 2 (dua) sektor, yaitu sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan serta sektor Pertambangan, Kelompok sektor Sekunder terdiri dari 3 (tiga) sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih serta sektor konstruksi, sedangkan kelompok sektor tersier terdiri dari 4 (empat) sektor lainnya yaitu sektor perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan serta sektor jasa-jasa lainnya.

Ketimpangan dalam perkembangan sektor primer dengan sektor sekunder dan tersier pada dasarnya mengindikasikan adanya pertumbuhan ekonomi yang riil di Kabupaten Pesisir Barat. Secara umum dapat dikatakan bahwa efisiensi dan produktivitas lebih dominan terjadi pada sektor primer dan sekunder. Kelompok sektor Primer memegang dominasi paling kuat dalam struktur ekonomi Kabupaten Pesisir Barat atau dapat dikatakan struktur ekonomi daerah adalah struktur ekonomi yang masih pada sektor tradisional, pada urutan kedua penyumbang terbesar ada pada sektor Tersier dan menunjukan angka yang stabil. Ini merupakan potensi bagi daerah untuk meningkatkan perekonomian di sektor Tersier dan mulai mengembangkan potensi ekonomi modern yang tidak lagi berbasis atau mengandalkan sektor Primer atau Tradisional.

Tabel 2.11. Laju PDRB ADHK Seri 2010 Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018- 2022 (dalam persen)

Kategori	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021*	2022**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,99	0,71	0,02	-0,03	-3,32
B	Pertambangan dan Penggalian	7,66	6,37	0,00	-5,76	5,70
C	Industri Pengolahan	1.54	-0,10	-12,49	2,32	-0,85
D	Pengadaan Listrik dan Gas	17,60	26,56	5,08	7,99	4,31
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,59	1,71	5,02	5,94	2,17
F	Konstruksi	13,85	28,50	-2,03	9,63	6,73
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,86	9,11	-4,01	6,97	16,11
H	Transportasi dan Pergudangan	6,45	7,50	-4,73	2,56	22,29
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,81	26,89	-4,54	-3,32	15,64

Kategori	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021*	2022**
J	Informasi dan Komunikasi	8,64	9,09	2,99	10,78	2,88
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,24	2,98	0,29	3,69	-3,25
L	Real Estate	6,15	6,25	-3,80	3,44	6,69
M,N	Jasa Perusahaan	3,87	8,47	-1,81	1,30	4,20
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8,83	8,90	1,34	3,22	6,55
P	Jasa Pendidikan	8,94	9,48	4,09	3,42	4,66
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,20	8,60	9,53	3,89	2,76
R,S,T,U	Jasa lainnya	9,96	8,20	-4,49	-1,09	24,65
	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK	**5,33**	**5,47**	**-1,18**	**2,07**	**2,88**

Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Barat, 2023
**angka sementara*
***angka sementara*

Pada tahun 2018 sektor yang memberikan kontribusi terbesar pada PDRB ADHB adalah sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan persentase 51,00% disusul dengan Sektor Perdagangan Besar, Eceran, Reparasi Mobil dan Reparasi Motor dengan persentase 11,30%. Berikutnya pada tahun 2019 sektor yang memberikan kontribusi paling tinggi terhadap PDRB ADHB kembali sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yaitu sebesar 48,47% dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 12,96%. Pada tahun 2020 sektor yang memberikan kontribusi paling tinggi terhadap PDRB ADHB adalah sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yaitu sebesar 49,29% dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 12,54%. Kembali pada tahun 2021 sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan memberikan kontribusi sebesar 48,86% dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 12,86%. Tahun 2022, walaupun mengalami penurunan, namun sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan masih mampu memberikan kontribusi sebesar 46,41% disusul oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 14,68% yang naik dibandingkan dengan tahun 2021.

Penurunan kontribusi dari sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan serta dari tahun ke tahun dipengaruhi oleh mulai meningkatnya perkembangan sektor-sektor lainnya, khususnya sektor Konstruksi dan pertambangan. Peningkatan kontribusi dari beberapa sektor lainnya. Sektor utama yang mengalami peningkatan dari tahun 2018 hingga tahun 2021 adalah sektor Konstruksi yang pada tahun 2018 sebesar 5,90% pada tahun 2019 berada pada angka 7,01% dan dan pada tahun 2020 memberikan kontribusi sebesar 6,83% dan 7.53% pada tahun 2021. Tahun 2022, sektor konstruksi memberikan capaian 8,04%. Pesatnya perkembangan sektor konstruksi disebabkan pembangunan daerah yang membutuhkan banyak bangunan baru, baik dari sisi pemerintah dan/atau swasta.

Sementara itu untuk sektor pertambangan dan penggalian juga terus memberikan kontribusi signifikan pada distribusi PDRB ADHB. Pada tahun 2018 sempat mengalami penurunan minor dan berada pada angka 5,80%. Pada tahun 2019 sempat mengalami penurunan menjadi 5,64% dan data tahun 2020 menjadi 5,74% serta pada tahun 2021 berada pada angka 5,21%. Lebih lanjut, sektor ini kembali naik menjadi 5,22% pada tahun 2022. Perkembangan sektor konstruksi dan pertambangan dan penggalian ini dipengaruhi oleh pembangunan fisik di segala bidang yang terus digalakkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.

Sedangkan sektor lain yang kontribusinya terhadap PDRB ADHB dinilai masih relatif kecil akan terus ditingkatkan karena pada dasarnya semua sektor penunjang PDRB Kabupaten Pesisir Barat merupakan potensi yang layak dikembangkan dan menjadi penunjang perekonomian daerah Kabupaten Pesisir Barat. Sektor terkecil adalah Sektor jasa Perusahaan yang dari tahun 2018-2022 masih berada pada angka 0,15% dari keseluruhan PDRB ADHB.

Keseluruhan gambaran distribusi PDRB ADHB ini menunjukkan bahwa sebagai daerah pemekaran baru Kabupaten Pesisir Barat masyarakatnya masih berorientasi pada agraris, sektor-sektor industri dan jasa belum sepenuhnya berkembang dan perlu dukungan investasi dan intervensi kebijakan dari pemerintah daerah.

Distribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022 terlihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 2.12. Distribusi PDRB ADHB Seri 2010 Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022 (dalam persen)

Kategori	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021*	2022**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	51,00	48,47	49,29	48,86	46,41
B	Pertambangan dan Penggalian	5,80	5,64	5,74	5,21	5,22
C	Industri Pengolahan	4,88	4,49	3,98	4,11	3,76
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
F	Konstruksi	5,90	7,01	6,83	7,53	8,04
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11,30	12,96	12,54	12,86	14,68
H	Transportasi dan Pergudangan	1,01	1,00	0,97	0,96	1,25
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,73	2,03	1,95	1,81	1,98
J	Informasi dan Komunikasi	2,24	2,24	2,29	2,38	2,27
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,45	1,39	1,38	1,43	1,38
L	Real Estate	3,74	3,69	3,61	3,58	3,62
M,N	Jasa Perusahaan	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

Kategori	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021*	2022**
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,12	5,11	5,23	5,12	5,17
P	Jasa Pendidikan	3,52	3,62	3,79	3,78	3,73
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,07	1,07	1,18	1,19	1,15
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,04	1,06	1,00	0,95	1,13
	Distribusi PDRB	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Barat, 2023
**angka sementara*
***angka sementara*

PDRB harga berlaku suatu daerah digunakan untuk menunjukkan kemampuan sumber-sumber ekonomi dalam suatu wilayah daerah tersebut. Dalam konteks PDRB yang sangat familiar (menurut lapangan usaha), sumber-sumber ekonomi/sektor-sektor/lapangan usaha tersebut terdiri dari 17 (tujuh belas) kategori. Besar kecilnya PDRB dalam 17 (tujuh belas) kategori tersebut di atas sangat mungkin dipengaruhi oleh kondisi geografis, ketersediaan SDA, Infrastruktur, SDM yang memadai dan lain sebagainya. Ke-duapuluh satu kategori tersebut adalah sebagai berikut: (1) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; (2) Pertambangan dan Penggalian; (3) Industri Pengolahan; (4) Pengadaan Listrik dan Gas; (5) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; (6) Konstruksi; (7) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; (8) Transportasi dan Pergudangan; (9) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; (10) Informasi dan Komunikasi; (11) Jasa Keuangan dan Asuransi; (12) Real Estate; (13) Jasa Perusahaan; (14) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; (15) Jasa Pendidikan; (16) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan (17) Jasa Lainnya.

Walaupun kondisi laju pertumbuhan berfluktuasi, namun dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir tidak ada kecenderungan pergeseran peran masing-masing sector sebagai penyumbang pertumbuhan PDRB. Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan masih menjadi penyumbang terbesar PDRB, dengan sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tetap menjadi primadona sebagai penyumbang PDRB. Persentase kontribusi sektor-sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) tahun 2018 s.d 2022 selama 5 (lima) tahun terakhir cukup seimbang artinya dari nilai kontribusi masing-masing sektor terhadap PDRB.

Dari 9 (sembilan) sektor yang ada dalam komponen perhitungan PDRB, sektor Primer, kelompok Sektor Sekunder dan kelompok Sektor Tersier. Kelompok Sektor Primer terdiri dari 3 (tiga) sektor yaitu: (1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, (2) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, dan (3) Konstruksi; kelompok sektor sekunder terdiri dari 5 (lima) sektor, yaitu: (1) Pertambangan dan Penggalian, (2) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, (3) Industri Pengolahan, (4) Jasa Pendidikan dan (5) Real Estate. Sementara untuk sektor tersier terdiri dari 9 (sembilan) kelompok, yaitu: (1) Informasi dan Komunikasi, (2) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, (3) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, (4) Jasa Keuangan dan Asuransi, (5)

Transportasi dan Pergudangan, (6) Jasa lainnya, (7) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, (8) Pengadaan Listrik dan Gas dan (9) Jasa Perusahaan.

Dibawah ini adalah perhitungan untuk PDRB ADHK Menurut Pengeluaran untuk tahun 2018-2022:

Tabel 2.13. PDRB ADHK Menurut Pengeluaran Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022 (Juta Rupiah)

Kategori	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021*	2022**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.183,97	2.272,17	2.297,92	2.386,88	2.482,93
B	Pertambangan dan Penggalian	248,19	264,47	269,26	256,21	279,47
C	Industri Pengolahan	208,79	210,49	186,82	195,00	201,04
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,57	0,75	0,79	0,89	0,94
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,15	2,19	2,31	2,47	2,54
F	Konstruksi	252,84	328,72	320,31	370,67	430,18
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	483,81	607,25	588,48	632,77	785,43
H	Transportasi dan Pergudangan	43,35	46,88	45,32	48,01	66,82
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	73,95	95,32	91,45	89,18	106,02
J	Informasi dan Komunikasi	95,74	105,02	107,66	117,07	121,19
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	62,19	65,06	64,95	70,58	73,88
L	Real Estate	160,18	172,73	169,55	176,26	193,40
M,N	Jasa Perusahaan	6,30	6,94	7,01	7,17	7,91
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	219,47	239,49	245,29	252,11	276,41
P	Jasa Pendidikan	150,63	169,79	177,81	185,92	199,28
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	45,69	50,37	55,52	58,47	61,39
R,S,T,U	Jasa lainnya	44,56	49,71	47,09	46,87	60,60
	PDRB ADHB	**4.282,38**	**4.687,39**	**4.677,54**	**4.896,56**	**5.349,44**

Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Barat, 2023
**angka sementara*
***angka sementara*

Berikutnya adalah perhitungan untuk PDRB ADHK Menurut Pengeluaran untuk tahun 2018-2022:

Tabel 2.14. PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022 (Juta Rupiah)

Kategori	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021*	2022**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.183,97	2.272,17	2.297,92	2.386,88	2.482,93
B	Pertambangan dan Penggalian	248,19	264,47	269,26	256,21	279,47
C	Industri Pengolahan	208,79	210,49	186,82	195,00	201,04
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,57	0,75	0,79	0,89	0,94
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,15	2,19	2,31	2,47	2,54
F	Konstruksi	252,84	328,72	320,31	370,67	430,18
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	483,81	607,25	588,48	632,77	785,43
H	Transportasi dan Pergudangan	43,35	46,88	45,32	48,01	66,82
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	73,95	95,32	91,45	89,18	106,02
J	Informasi dan Komunikasi	95,74	105,02	107,66	117,07	121,19
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	62,19	65,06	64,95	70,58	73,88
L	Real Estate	160,18	172,73	169,55	176,26	193,40
M,N	Jasa Perusahaan	6,30	6,94	7,01	7,17	7,91
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	219,47	239,49	245,29	252,11	276,41
P	Jasa Pendidikan	150,63	169,79	177,81	185,92	199,28
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	45,69	50,37	55,52	58,47	61,39
R,S,T,U	Jasa lainnya	44,56	49,71	47,09	46,87	60,60
	PDRB ADHB	**4.282,38**	**4.687,39**	**4.677,54**	**4.896,56**	**5.349,44**

Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Barat, 2023
**angka sementara*
***angka sementara*

Laju pertumbuhan nilai PDRB ADHK Kabupaten Pesisir Barat bila melihat dari sisi Pengeluaran berdasarkan pada data BPS, didapatkan nilai 5,47 (tahun 2019), -1,18 (2020) dan 2,07 (2021) serta 2,88 (2022). Komponen yang paling besar memberikan kontribusi adalah Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTB), disusul Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga

(LNPRT), Konsumsi Rumah Tangga serta Konsumsi Pemerintah. Sedangkan untuk komponen Perubahan Inventori dan Net Ekspor Barang dan Jasa belum memberikan kontribusi.

Laju PDRB ADHK Menurut Pengeluaran Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2019-2022 terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.15. Laju PDRB ADHK Menurut Pengeluaran Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022 (%)

No	Komponen Pengeluaran	2019	2020*	2021*	2022**
1	Konsumsi Rumah Tangga	5.92	-1.85	0.49	4.70
2	Konsumsi LNPRT	10.87	0.78	1.41	1.76
3	Konsumsi Pemerintah	2.14	-2.51	0.61	-2,89
4	PMTB	11.37	-7.83	4.76	4.35
5	Perubahan Inventori	-	-	-	-
6	Net Ekspor Barang dan Jasa	-	-	-	-
	Total PDRB	**5.47**	**-1.18**	**2.07**	**2.88**

Sumber : BPS Pesisir Barat, PBDA, 2023
**angka sementara*
***angka sementara*

2.1.2.1.2. Inflasi

Perkembangan inflasi di Kabupaten Pesisir Barat mengikuti perkembangan inflasi di Kotamadya Bandar Lampung dan Kota Metro, sehingga data yang digunakan merujuk pada data dua daerah tersebut.

Pada November 2022, terjadi inflasi years on years (yoy) gabungan dua kota di Lampung sebesar 5,89 persen, dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 113,97. Inflasi yoy Kota Bandar Lampung sebesar 5,90 persen, dengan IHK sebesar 113,92 dan inflasi yoy Kota Metro sebesar 5,75 persen dengan IHK sebesar 114,37. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks (inflasi) kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman dan tembakau 5,88 persen; kelompok pakaian dan alas kaki 4,54 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar Lainnya 2,38 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga 2,58 persen; kelompok kesehatan 4,84 persen; kelompok transportasi 15,62 persen; kelompok rekreasi, olahraga dan budaya 5,63 persen; kelompok pendidikan 9,23 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran 2,98 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya 6,48 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan 1,28 persen.

Komoditas utama penyumbang inflasi yoy pada November 2022, antara lain bensin, angkutan udara, rokok kretek filter, beras, sekolah menengah atas, angkutan dalam kota dan daging ayam ras. Perkembangan harga berbagai komoditas pada November 2022 di dua kota IHK Lampung secara umum menunjukkan adanya kenaikan. Berdasarkan hasil pemantauan BPS, pada November 2022 terjadi inflasi yoy sebesar 5,89 persen atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 107,63 pada November 2021 menjadi 113,97

pada November 2022. Tingkat inflasi mtm tercatat inflasi sebesar 0,01 persen dan tingkat inflasi ytd sebesar 4,85 persen.

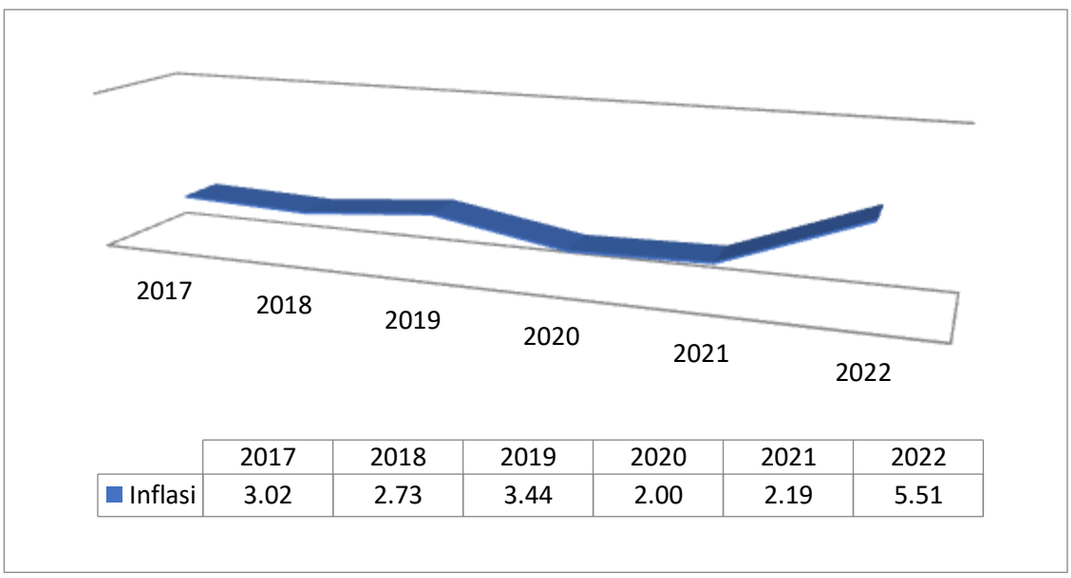
Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran yaitu: kelompok transportasi memberikan andil sebesar 2,07 persen; kelompok makanan, minuman dan tembakau memberikan andil sebesar 1,72 persen; kelompok pendidikan memberikan andil sebesar 0,48 persen; kelompok perumahan, air, listrik, bahan bakar rumah tangga memberikan andil sebesar 0,42 persen; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya memberikan andil sebesar 0,36 persen; kelompok pakaian dan alas kaki memberikan andil sebesar 0,27 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran memberikan andil sebesar 0,26 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga memberikan andil sebesar 0,14 persen; kelompok kesehatan memberikan andil sebesar 0,12 persen; dan kelompok rekreasi, olahraga dan budaya memberikan andil sebesar 0,11 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan memberikan andil sebesar 0,06 persen.

Tabel 2.16. Inflasi Kota Bandar Lampung dan Kota Metro Tahun 2018-2022

Kota Bandar Lampung		**Kota Metro**	
Tahun	**Inflasi**	**Tahun**	**Inflasi**
2018	2,92	2018	1,64
2019	3,53	2019	2,97
2020	1,93	2020	2,53
2021	2.13	2021	2,74
2022	5.52	2022	5.37

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2022

Gambar 2.23. Inflasi Gabungan Kota Bandar Lampung dan Kota Metro Tahun 2018-2022



	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Inflasi	3.02	2.73	3.44	2.00	2.19	5.51

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2023

Tingkat inflasi Provinsi Lampung dan juga Kota Madya Bandar Lampung dan Kota Metro. Dari data series 5 (lima) tahun terkhir terlihat inflasi Lampung mempunyai tren di bawah atau sama dengan inflasi nasional. Penekanan dan pengendalian inflasi perlu dilakukan oleh berbagai pihak yang yang memiliki kewenangan dan sebagai stakeholder di semua sektor kehidupan masyarakat.

2.1.2.1.3. PDRB Perkapita Kabupaten Pesisir Barat

Pembangunan tidak hanya cukup pada pencapaian pertumbuhan ekonomi saja. Akan tetapi terdapat banyak dimensi yang dicakup dan target yang ingin dicapai dengan tujuan utama mewujudkan kesejahteraan yang lebih baik bagi masyarakat. Pertumbuhan hanyalah sasaran antara (syarat perlu) bagi tercapainya kesejahteraan. Tanpa pertumbuhan, tujuan pembangunan akan sulit terwujud. Ukuran kesejahteraan memang sulit tercakup dalam satu indikator yang komprehensif karena masalah aspek multidimensi yang melatarbelakanginya. Namun demikian, banyak literatur dan kajian akademik yang menggunakan berbagai alternatif, diantaranya adalah dengan pendekatan variabel PDRB perkapita. PDRB perkapita diperoleh dengan membagi nilai PDRB dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun pada waktu tertentu. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB ADHB per kapita Kabupaten Pesisir Barat sejak tahun 2018 hingga 2022 cenderung meningkat. Pada tahun 2018, PDRB ADHB per kapita tercatat sebesar 27,85 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2019, yaitu mencapai 30,25 juta rupiah. Kemudian, menurun menjadi 28,89 juta rupiah pada 2020 dan mencapai angka 30,06 juta rupiah pada tahun 2021. Data pada tahun 2022 PDRB ADHB per kapita berada pada angka 32,46 juta rupiah. Angka PDRB ADHB per kapita yang cukup tinggi ini masih dipengaruhi oleh faktor inflasi.

PDRB per Kapita Kabupaten Pesisir Barat secara riil mengalami kenaikan dari tahun 2018 hingga tahun 2022. Untuk perhitungan PDRB Perkapita ADHB pada tahun 2018 sebesar 27,85 juta rupiah dan pada tahun 2022 tercatat sebesar 32,46 juta rupiah. Sementara untuk PDRB Perkapita ADHK pada tahun 2018 tercatat sebesar 19,15 juta rupiah dan sebesar 19,65 pada data tahun 2022.

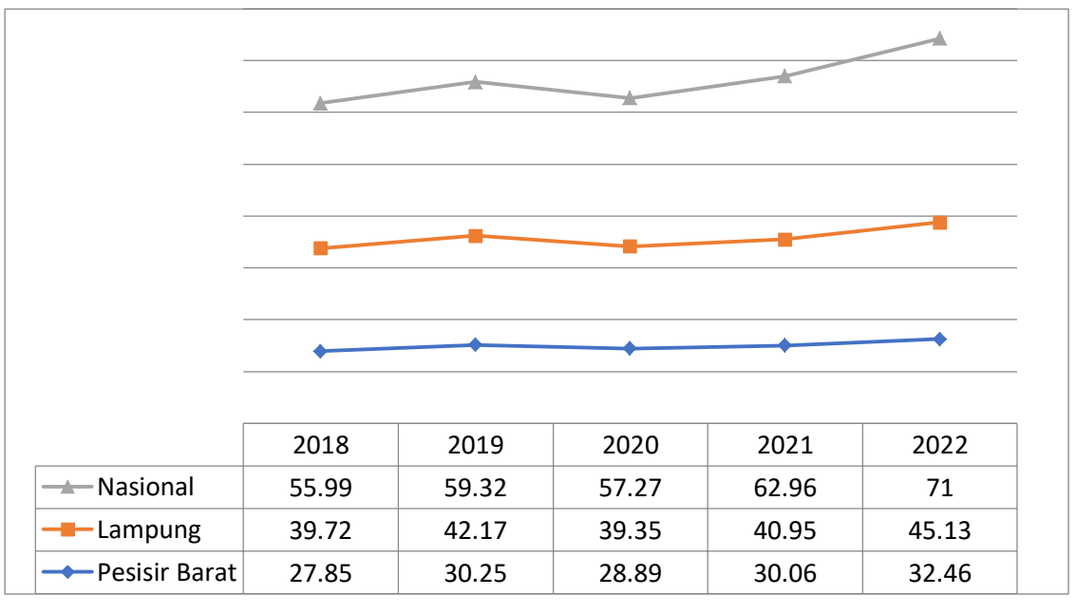
Tabel 2.17. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Per Kapita Kabupaten Kabupaten Pesisir Barat, 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021*	2021**
Nilai PDRB/GRDP Value (miliar rupiah):					
Atas Dasar Harga Berlaku	4.282	4.687	4.692	4.919	5.349
Atas Dasar Harga Konstan	2.945	3.106	3.070	3.133	3.223
PDRB Per Kapita/Per Capita GRDP (juta rupiah):					
Atas Dasar Harga Berlaku	27,85	30,25	28,89	30,06	32,46
Atas Dasar Harga Konstan	19,15	20,04	18,90	19,15	19,65
Pertumbuhan PDRB per kapita ADHK	4,49	4,63	-5,71	1,30	1,50
Jumlah Penduduk/ Population (orang)	153.743	154.973	162.419	163.641	164.810
Pertumbuhan Jumlah Penduduk	0,80	0,80	4,80	0,75	0,72

Sumber : BPS Pesisir Barat, 2023 (data diolah)
**angka sementara*
***angka sementara*

Selanjutnya, berdasarkan pada perhitungn BPS Provinsi Lampung, PDRB Perkapita menggunakan data PDRB ADHB sebagaimana grafik di bawah ini:

Gambar 2.24. PDRB Perkapita Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022



	2018	2019	2020	2021	2022
Nasional	55.99	59.32	57.27	62.96	71
Lampung	39.72	42.17	39.35	40.95	45.13
Pesisir Barat	27.85	30.25	28.89	30.06	32.46

Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Barat, 2023

2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

2.1.2.2.1. Indeks Pembangunan Manusia

Perkembangan IPM yang selama lima tahun terakhir tentunya tidak terlepas dari hasil kinerja pemerintah yang menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu dan juga peningkatan anggaran bagi sektor-sektor yang mendukung dalam peningkatan angka IPM. Hal ini tercermin dari peningkatan tiga komponen utama IPM dengan metode baru yaitu, Angka Harapan Hidup (AHH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Pengeluaran Riil per Kapita (PRK) secara rinci terdapat dalam tabel sebagai berikut :

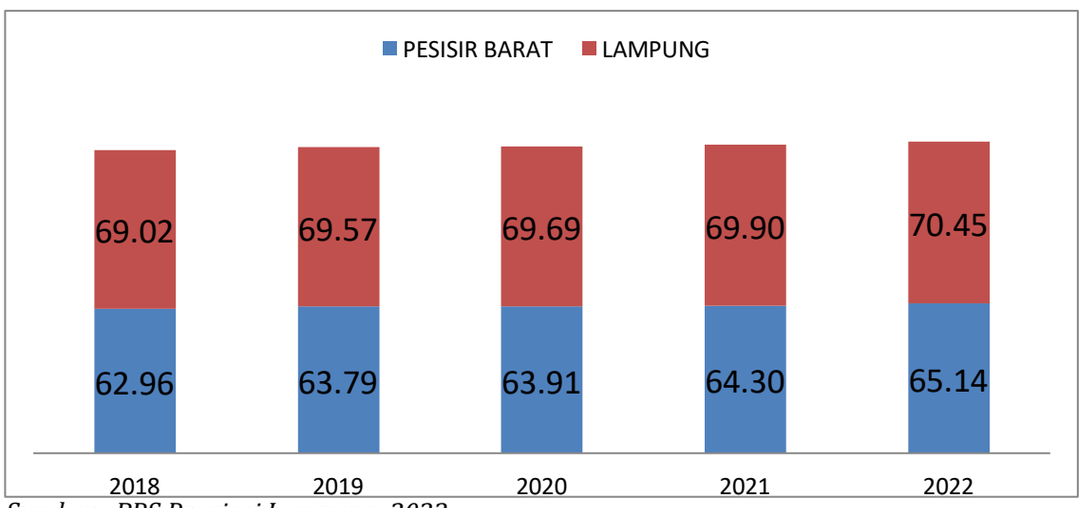
Tabel 2.18. Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022

No	Komponen	2018	2019	2020	2021	2022
1	Angka Harapan Hidup (tahun)	62,85	63,27	63,50	63,66	63,99
2	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	7,59	7,82	8,01	8,19	8,53
3	Harapan Lama Sekolah (tahun)	11,97	11,98	11,99	12,00	12,13
4	Pengeluaran Riil per Kapita (000 Rp.)	8.355	8.652	8.457	8.533	8.663

Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Barat, 2023

Perkembangan IPM Kabupaten Pesisir Barat pada tahun 2018 sebesar 62,96 poin. Untuk tahun 2019 meningkat menjadi 63,79 poin atau naik 0,83 poin. Tahun 2020 IPM Kabupaten Pesisir Barat tercatat sebesar 63,91 poin atau naik 0,18. Berikutnya pada tahun 2021 capaian IPM kembali meningkat menjadi 0,39 menjadi 64,30 poin. Pada tahun 2022, berdasarkan data capaian IPM telah menjadi sebesar 65,14, atau mengalami kenaikan 0,84 poin. Kenaikan ini disatu sisi memberikan gambaran keberhasilan, namun disisi lain angka 65,14 poin masih tertinggal dari pencapaian Provinsi Lampung yang tercatat sebesar 70,45.

Gambar 2.25. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022

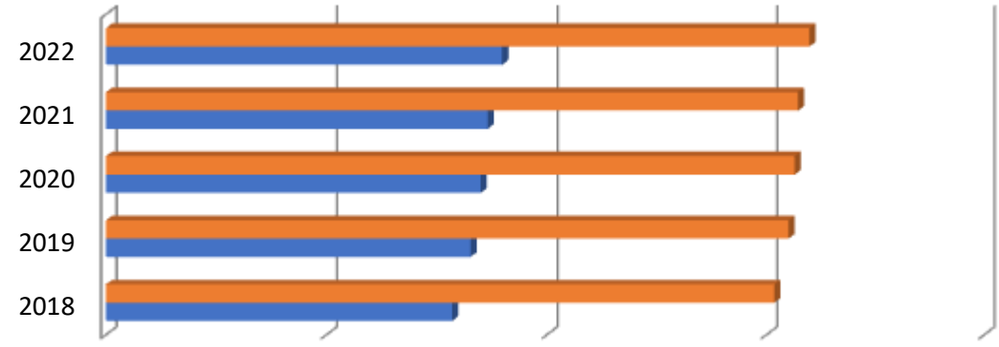


Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2023

a. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup bisa berbeda dari masa ke masa, bahkan juga berbeda pada tiap daerah maupun negara. Perbedaan angka harapan hidup ini dipengaruhi oleh banyak faktor, mulai dari lingkungan, status kesehatan, hingga status ekonomi. Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Pada dasarnya, cara memperpanjang angka harapan hidup suatu wilayah tidak hanya bergantung pada otoritas pemerintah setempat, tetapi juga didukung oleh perilaku masyarakat untuk selalu menerapkan pola hidup sehat. Angka Harapan Hidup Kabupaten Pesisir Barat ditampilkan dalam gambar berikut.

Gambar 2.26. Angka Harapan Hidup Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022



	2018	2019	2020	2021	2022
LAMPUNG	70.18	70.51	70.65	70.73	70.99
PESISIR BARAT	62.85	63.27	63.50	63.66	63.99

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2023

Berdasarkan pada gambar di atas, Angka Harapan Hidup di Kabupaten Pesisir Barat terus mengalami peningkatan sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, peningkatan yang terjadi tidak lebih dari 1,00 poin, Angka Harapan Hidup Kabupaten Pesisir Barat masih berada di bawah Angka Harapan Hidup Provinsi Lampung dan berada pada urutan ke 14 diantara 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung.

Salah satu indikator yang dapat menggambarkan kondisi Angka Harapan Hidup adalah gambaran angka kesakitan penduduk. Angka kesakitan adalah persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan merasa terganggu dalam aktivitas sehari-hari, yang mana keluhan kesehatan yang menyebabkan terganggungnya aktivitas kegiatan sehari-hari dikategorikan menjadi menderita sakit. Secara umum, persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan yang menimbulkan terganggunya aktivitas sehari-hari dalam sebulan terakhir selama kurun waktu tahun 2020 dan 2021 terus mengalami peningkatan. Tahun 2020 sebesar 8,99% dengan artian hampir 9 dari 100 orang yang berada di Kabupaten Pesisir Barat mengalami keluhan kesehatan. Data tahun 2021 meningkat menjadi 10,35%. Untuk tahun 2022 telah ada peningkatan capaian, dimana sebesar 8,74% angka kesakitan atau mengalami penurunan 1,66%.

Tabel 2.19. Angka Kesakitan Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020-2022

No	Jenis Kelamin	2020	2021	2022
1	Laki-laki	8,63	10,66	9,12
2	Perempuan	9,38	10,02	8,32
3	Total	8,99	10,35	8,74

Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Barat, 2023

b. Rata-Rata Lama Sekolah

Lamanya sekolah atau *years of schooling* merupakan ukuran akumulasi investasi pendidikan individu. Rata-rata lama sekolah merupakan salah indikator dalam penghitungan nilai IPM. Setiap tahun tambahan sekolah diharapkan akan membantu meningkatkan pendapatan individu tersebut. Rata-rata lama sekolah dapat dijadikan ukuran akumulasi modal manusia suatu daerah. Rata-rata Lama Sekolah dari tahun 2016-2021 secara umum terus mengalami peningkatan 0,50-0,90 per tahun. Peningkatan masih tergolong stagnan, namun masih dalam koridor meningkat, sehingga harapan untuk terus mengalami peningkatan diharapkan semakin meningkat pada tahun berikutnya.

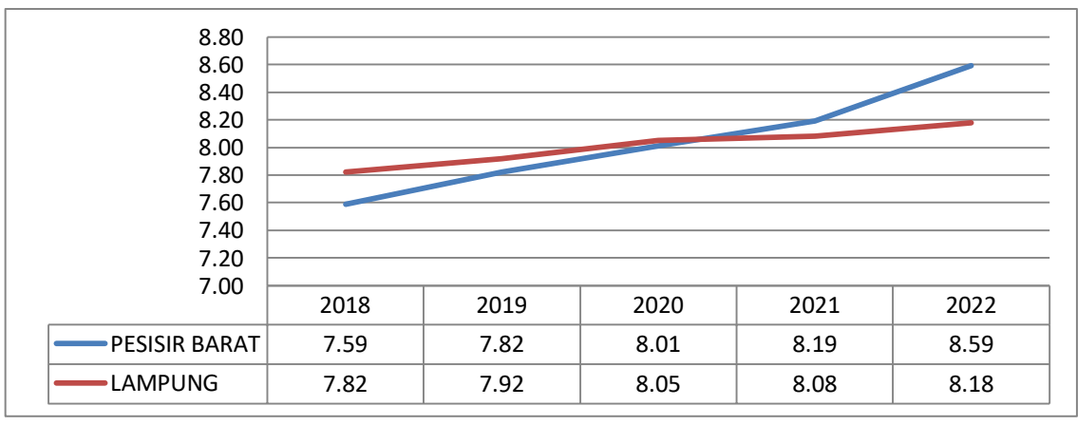
Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Pesisir Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.20. Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Rata-rata Lama Sekolah	7,59	7,82	8,01	8,19	8,53

Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Barat, 2023

Gambar 2.27. Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2018-2022



Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Barat, 2023

Berdasarkan pada gambar di atas, Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Pesisir Barat masih berada di bawah Provinsi Lampung pada periode 2018-2020, namun pada tahun 2021 dan 2022 mampu berada di atas Provinsi Lampung. Walaupun demikian, angka dibawah 9 tahun masih berada dibawah minimal

pendidikan dasar (SD dan SMP). Sehingga indikator ini memberikan gambaran bahwa masih ada masyarakat usia sekolah yang tidak menyelesaikan pendidikan hingga tingkat SMP. Tentunya hal ini memberikan gambaran masih jauhnya kualitas pendidikan daerah dibandingkan dengan kondisi ideal yang diharapkan.

c. Harapan Lama Sekolah

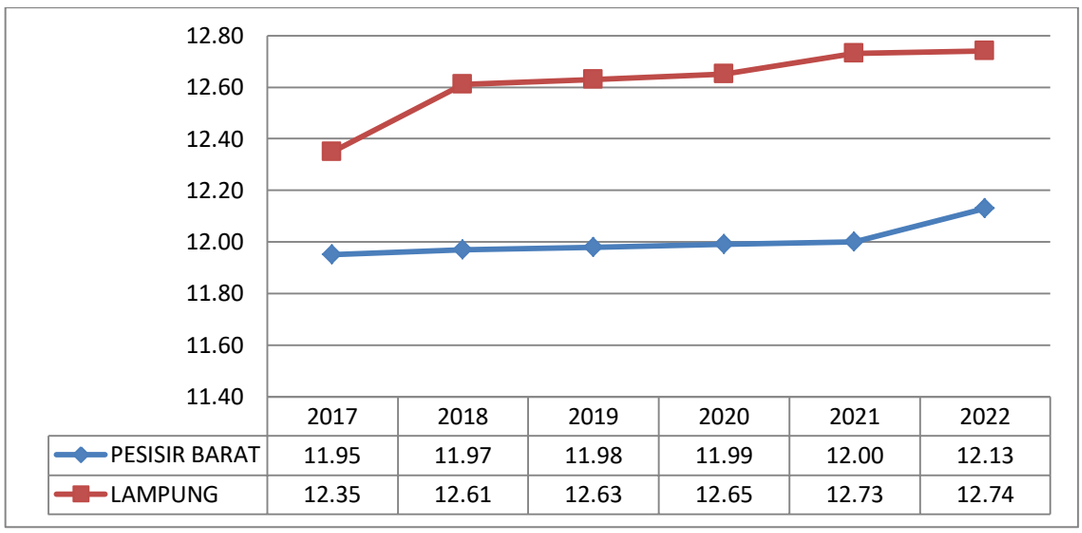
Harapan Lama Sekolah merupakan ukuran bagi seorang individu yang berada pada jenjang pendidikan untuk dapat menikmati fasilitas pendidikan yang ada disuatu daerah. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga ketersediaan guru pengajar adalah beberapa hal mendasar yang membantu dalam pencapaian indikator ini. Harapan Lama Sekolah Kabupaten Pesisir Barat dari tahun 2018-2022 secara umum terus mengalami peningkatan 0,01-0,10 tahun. Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Pesisir Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.21. Harapan Lama Sekolah Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Harapan Lama Sekolah	11,97	11,98	11,99	12,00	12,13

Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Barat, 2023

Gambar 2.28. Harapan Lama Sekolah Tahun 2018-2022



Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2022

Berdasarkan pada gambar di atas, Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Pesisir Barat masih berada di bawah Provinsi Lampung pada periode 2018-2022 dan tidak pernah melebihi capaian dari Provinsi Lampung, dan berada pada posisi 13 diantara 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Hal ini dapat memberikan indikasi bahwa secara umum kabupaten/kota lain di Provinsi Lampung dapat memberikan jaminan pelayanan pendidikan bagi masyarakatnya dibandingkan di Pesisir Barat. Keterbatasan sarana prasarana, mutu pelayanan dan kemudahan akses masih menjadi kendala utama peningkatan kualitas pendidikan daerah.

d. Pengeluaran Riil Per Kapita

Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli. Data pengeluaran dapat mengungkap tentang pola konsumsi rumaht angga secara umum menggunakan indikator proporsi pengeluaran untuk makanan dan non makanan. Komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk, makin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran makin membaik tingkat kesejahteraan.

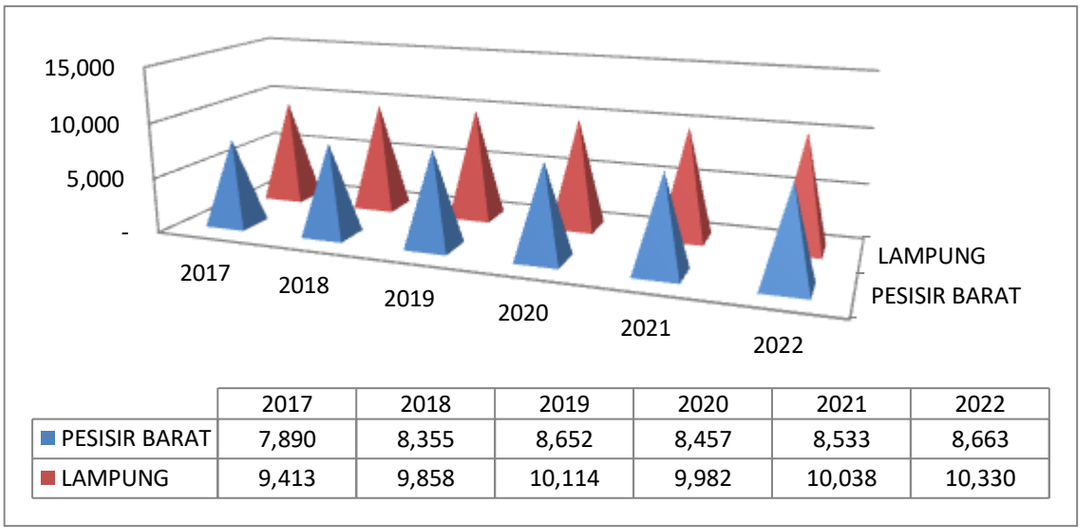
Pengeluaran Riil Per Kapita Kabupaten Pesisir Barat dari tahun 2018-2022 secara umum terus mengalami peningkatan 1.000-1.500 rupiah. Angka Pengeluaran Riil Perkapita di Kabupaten Pesisir Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.22. Pengeluaran Riil Perkapita Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Pengeluaran Riil Perkapita	8.335	8.652	8.457	8.533	8.663

Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Barat, 2023

Gambar 2.29. Pengeluaran Riil Perkapita Tahun 2018-2022



	2017	2018	2019	2020	2021	2022
PESISIR BARAT	7,890	8,355	8,652	8,457	8,533	8,663
LAMPUNG	9,413	9,858	10,114	9,982	10,038	10,330

Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Barat, 2023

Berdasarkan pada gambar di atas, Pengeluaran Perkapita di Kabupaten Pesisir Barat masih berada di bawah Provinsi Lampung pada periode 2018-2022, dan berada pada posisi 12 diantara 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung.

Ditinjau dari distribusi kelompok pengeluaran pada tahun 2022, rumah tangga dengan pengeluaran 40% kebawah dan 40% menengah adalah rumah tangga dengan pemberian pengeluaran perkapita sebulan untuk makanan lebih besar dari pada pengeluaran non makanan. Sedangkan untuk rumah tangga dengan pengeluaran 20% ke atas, pengeluaran untuk non makanan lebih besar bila dibandingkan dengan pengeluaran untuk makanan.

Tabel 2.23. Rata-rata Pengeluaran Perkapita sebulan untuk Makanan dan Non Makanan Kabupaten Pesisir Barat menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2022

No	Uraian	Kelompok Pengeluaran			Total Pengeluaran
		40% terbawah	40% tengah	20% teratas	
1	Pengeluaran Per Kapita Sebulan untuk Makanan	2,40	1,61	3,59	2,80
2	Pengeluaran Per Kapita Sebulan untuk Non Makanan	2,88	2,34	4,92	3,70
	Rata-rata	2.23	1.28	3,70	3,03

Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Barat, 2023

Persentase Kelulusan SD dan SMP secara umum dari tahun 2017-2021 telah mencapai 100%. Selanjutnya untuk persentase putus sekolah SD dan SMP juga terus menurun menuju 0.00%. Beberapa hal yang menjadi penyebab putus sekolah peserta didik adalah: (i) faktor ekonomi keluarga dan (ii) akses pendidikan yang jauh.

Tabel 2.24. Persentase Kelulusan dan Persentase Putus Sekolah Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase Kelulusan SD	100	100	100	100	100
2	Persentase Kelulusan Sekolah SMP	100	100	100	100	100
3	Persentase Putus Sekolah SD	0,01	0,02	0,02	0,02	0,22
4	Persentase Putus Sekolah SMP	0,25	0,20	0,20	0,26	1,55

Sumber : Dinas P dan K, 2023

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok umurnya terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Berikut data Angka Partisipasi Murni Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022 ditampilkan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.25. Angka Partisipasi Murni Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022

No	Tingkat	APM				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	SD	78,97	78,81	79,77	81,27	100
2	SMP	69,57	68,65	70,25	68,87	81.48

Sumber : Dinas P dan K, 2023

APM disuatu jenjang pendidikan didapat dengan membagi jumlah siswa atau penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang sekolah tersebut. Berdasarkan data pada tabel di atas APM tingkat pendidikan sekolah dasar di tahun 2022 sebesar

100 atau meningkat dibandingkan dengan capain tahun 2021 sebesar 81,27. Sedangkan untuk tingkat sekolah menengah pertama tahun 2022 mencapai 81,48 atau mengalami peningkatan pada tahun 2022 menjadi 81,48.

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Misal, APK SD sama dengan jumlah siswa yang duduk di bangku SD dibagi dengan jumlah penduduk kelompok usia 7 sampai 12 tahun. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Untuk meningkatkan Angka Partisipasi Kasar yang belum mencapai target dapat dilakukan, Misalnya dengan menambah fasilitas pendidikan, kemampuan pendidik serta peningkatan anggaran pendidikan yang berasal dari daerah maupun pusat. Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022 ditampilkan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.26. Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022

No	Tingkat	APK				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	SD	92,6	91,10	91,07	90,62	108,85
2	SMP	97,0	94,94	92,08	82,47	100

Sumber : Dinas P dan K, 2023

APK didapat dengan membagi jumlah penduduk yang sedang bersekolah (atau jumlah siswa), tanpa memperhitungkan umur, pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tersebut. Berdasarkan tabel diatas Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020 untuk tingkat sekolah dasar sebesar 91,07 dan angka ini turun pada tahun 2021 menjadi 90,62% namun pada tahun 2022 meningkat menjadi 108,85%. APK SMP tahun 2021 sebesar 82,47% atau mengalami penurunan dibandingkan data pada tahun 2020 sebesar 92,08% namun pada tahun 2022 telah mampu mencapai 100%.

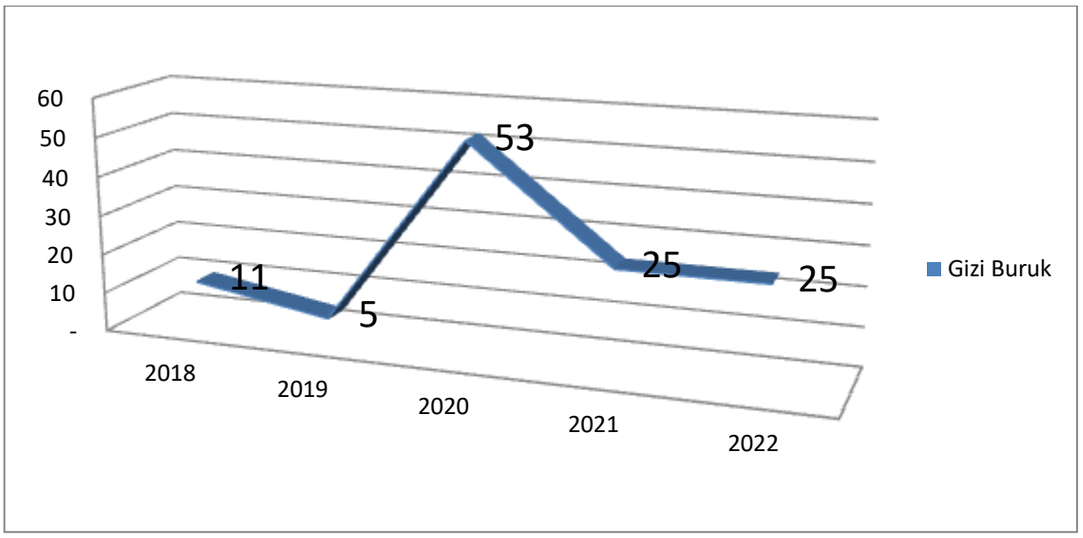
2.1.2.2.2. Gizi Buruk

Gizi buruk atau malnutrisi adalah kondisi serius yang terjadi ketika asupan makanan seseorang tidak sesuai dengan jumlah nutrisi yang dibutuhkan. Nutrisi yang didapat bisa terlalu sedikit atau terlalu banyak. Kondisi ini dapat menyebabkan banyak masalah kesehatan seperti stunting, gangguan mata, diabetes, dan penyakit jantung.

Gizi buruk dapat disebabkan oleh pola makan yang kurang baik, status ekonomi yang rendah, sulit medapatkan makanan, serta berbagai kondisi medis dan kesehatan mental. Bila seorang anak pada masa 1000 hari pertama kehidupan tidak mendapatkan nutrisi yang adekuat/seimbang, maka seorang anak dapat mengalami kekurangan kalori dan protein. Gejala gizi buruk dapat berupa anak kurang aktif, perkembangan terganggu dan penurunan berat badan.

Penatalaksanaan gizi buruk dilakukan dengan memberikan tambahan nutrisi yang kurang dan mengobati penyebab yang mendasarinya/penyakit.

Gambar 2.30. Jumlah Gizi Buruk Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022



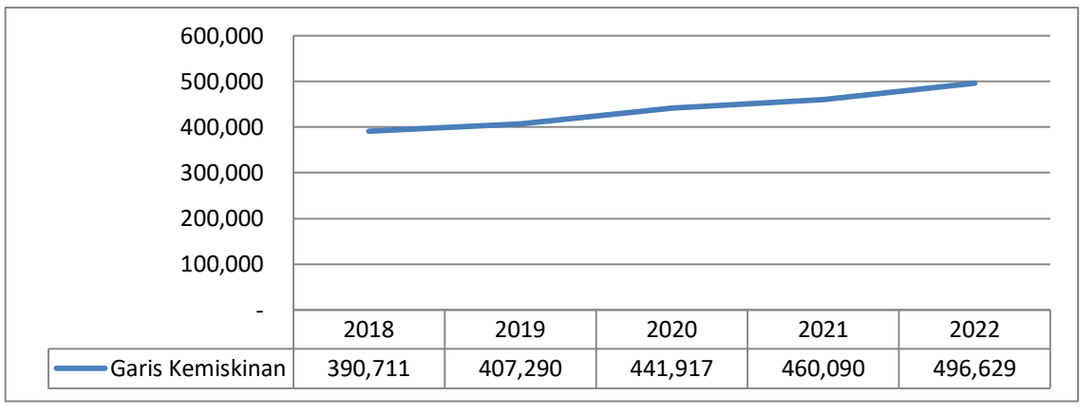
Sumber : Dinas Kesehatan, 2022

Status Gizi Buruk sampai dengan data pada tahun 2022 sebanyak 25 kasus. Tahun 2021 sebanyak 25 kasus, atau turun 28 kasus bila dibadingkan dengan data tahun 2020. Data tahun 2020 sebanyak 53 kasus (pendek dan sangat pendek), meningkat bila dibandingkan dengan data pada tahun 2019 sebanyak 5 kasus, sebelumnya pada tahun 2018 sebanyak 11 kasus, pada tahun 2017 terjadi 19 kasus sementara pada tahun 2016 sebanyak 6 kasus. Masalah utama dari status gizi buruk ini adalah malnutrisi/kekurangan kalori, protein, Anemia Zat Besi, Vitamin A dan gangguan akibat kekurangan Yodium.

2.1.2.2.3. Kemiskinan

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK).

Gambar 2.31. Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan) Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022

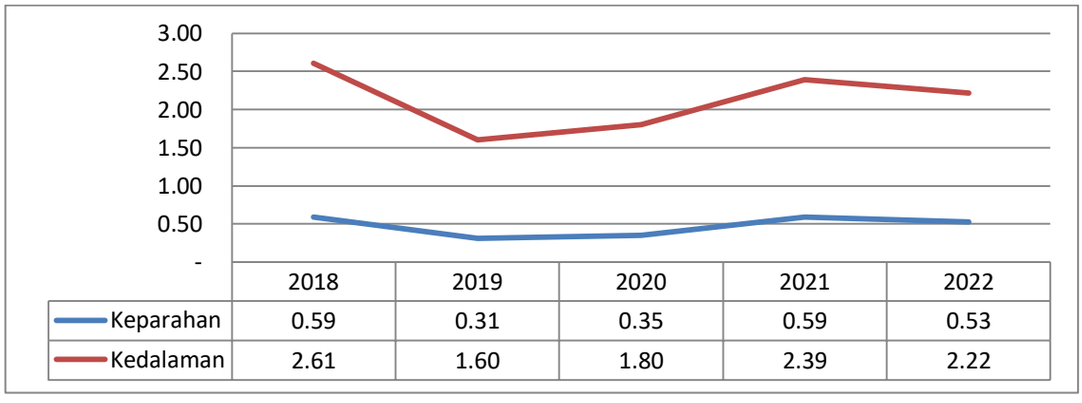


	2018	2019	2020	2021	2022
Garis Kemiskinan	390,711	407,290	441,917	460,090	496,629

Sumber BPS Provinsi Lampung, 2023

Berdasarkan data pada gambar di atas terdapat peningkatan garis kemiskinan di Kabupaten Pesisir Barat tahun 2018-2022, garis kemiskinan Kabupaten Pesisir Barat tahun 2018 sebesar 390.711 menjadi 407.290 tahun 2019. Angka sebesar 441.917 di tahun 2020 atau mengalami peningkatan lagi. Tahun 2021, peningkatan kembali terjadi dengan nilai sebesar 460.090. Untuk tahun 2022, garis kemiskinan kembali naik berada pada angka 496.629. Data ini berbanding lurus dengan peningkatan angka kemiskinan daerah di Kabupaten Pesisir Barat.

Gambar 2.32. Indeks Kedalamam Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Pesisir Barat 2018-2022

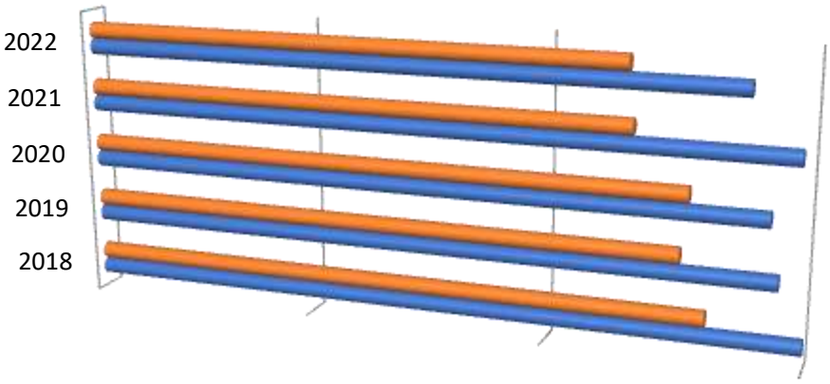


	2018	2019	2020	2021	2022
Keparahan	0.59	0.31	0.35	0.59	0.53
Kedalaman	2.61	1.60	1.80	2.39	2.22

Sumber BPS Provinsi Lampung, 2023

Persentasi penduduk miskin di Kabupaten Pesisir Barat di tampilkan dalam gambar berikut:

Gambar 2.33. Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022



	2018	2019	2020	2021	2022
LAMPUNG	13.14	12.62	12.76	11.67	11.57
PESISIR BARAT	14.98	14.48	14.29	14.81	13.84

Sumber : BPS Lampung, 2023

Berdasarkan data pada gambar di atas menunjukkan persentase penduduk miskin di Kabupaten Pesisir Barat sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Pesisir Barat di tahun 2018 sebesar 14,98. Pada tahun 2020 persentase penduduk miskin di Kabupaten Pesisir Barat adalah sebesar 14,29 %. Tahun 2021 yang masih berada dalam masa pandemi Covid-19, jumlah penduduk miskin bertambah 0,52% menjadi 14,81%. Tahun 2022, ada perbaikan kinerja sehingga menjadi 13.84% jumlah penduduk miskin di daerah.

Kemiskinan ekstrem didefinisikan sebagai kondisi dimana kesejahteraan masyarakat berada di bawah garis kemiskinan ekstrem. Agar kemiskinan ekstrem (*extreme poverty*) pada 2024 dapat mencapai 0%, maka diperlukan upaya percepatan penanganan kemiskinan ekstrem yang harus dilakukan secara terintegrasi melalui kolaborasi intervensi, serta upaya validasi data dan mempertajam basis data untuk mencapai ketepatan target dan upaya percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem. Tahun 2022, kemiskinan ekstrem Kabupaten Pesisir Barat sebesar 2,98%, atau berada pada urutan 12 dari kabupaten/kota di Provinsi Lampung.

Tabel 2.27. Lokasi Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2022

No	Kecamatan	No	Pekon
1	Bangkunat	1	Bandar Dalam
		2	Kota Jawa
		3	Pagar Bukit
		4	Suka Marga
		5	Way Haru
2	Lemong	1	Lemong
		2	Malaya
		3	Penengahan
		4	Rata Agung
		5	Suka Mulya
3	Ngambur	1	Bumi Ratu
		2	Gedung Cahya Kuningan
		3	Pekon Mon
		4	Suka Banjar
		5	Ulok Mukti
4	Pesisir Utara	1	Balam
		2	Baturaja
		3	Kuripan
		4	Pemancar
		5	Walur
5	Pesisir Selatan	1	Biha
		2	Marang
		3	Paku Negara
		4	Tanjung Setia
		5	Way Jambu

Sumber : Bappeda Provinsi Lampung, 2023

2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

2.1.2.3.1. Seni Budaya

Pembangunan seni dan budaya yang merupakan cerminan peradaban manusia, dan ditujukan untuk melestarikan dan mengembangkan seni dan kebudayaan daerah serta mempertahankan jati diri dan nilai-nilai budaya daerah di tengah- tengah semakin derasnya arus informasi dan pengaruh negatif budaya global. Disisi lain, pengembangan seni budaya di Kabupaten Pesisir Barat diselenggarakan secara terintegrasi dengan pembangunan kepariwisataan, yang sekaligus berperan sebagai salah satu sektor yang memberikan kontribusi terhadap perkembangan perekonomian Kabupaten Pesisir Barat.

Integralitas pembangunan seni budaya dan pariwisata merupakan sesuatu yang lazim berlaku di Indonesisa dan perkembangannya ke masa depan, berhubungan erat dengan kualitas kondisi alam dan lingkungan, politik dan keamanan, serta sarana dan prasarana. Berikut sarana dan prasarana seni dan budaya berdasarkan kecamatan di Kabupaten Pesisir Barat tahun 2022:

Tabel 2.28. Seni dan Budaya Kabupaten Pesisir Barat Menurut Kecamatan Tahun 2022

No	Nama Sanggar	Alamat	Jenis Kesenian
I	**Kecamatan Bangkunat**		
1	Tari Hadra	Pekon Sukamaju	Tari Daerah
2	Tunas Jaya Perkasa	Pekon Kotajawa	Jaran Kepang
3	Pronggo Budoyo	Pekon Kotajawa	Jaran Kepang
II	**Kecamatan Ngaras**		
4	SLTP Bandar Agung	Ngaras	Tari Lampung
5	Serindu Sehati	Ngaras	Tari Daerah
III	**Kecamatan Pesisir Selatan**		
6	Tari Lampung	Tanjung Setia, Pesisir Selatan	Tari /Lagu Lampung
7	Paguyuban	Marang, Pesisir Selatan	Tari Bali
8	Gita Kusuma	Marang, Pesisir Selatan	Tari Bali
9	Paguyuban Marang	Marang, Pesisir Selatan	Tari Bali
IV	**Kecamatan Pesisir Tengah**		
10	Alam Gemisikh	Pesisir Tengah	Tari Lampung
11	Tembilung	Pesisir Tengah	Tari Lampung
12	Teluk Stabas	Kampung Jawa, Pesisir Tengah	Tari Lampung
13	Sai Betik	Rawas, Pesisir Tengah	Tari Daerah
V	**Kecamatan Karya Penggawa**		
14	Al Hidayah	Karya Penggawa	Qosidah
VI	**Kecamatan Pesisir Utara**		
15	Saguntala	Pesisir Utara	Hadra /Bedikekh
16	Pangkong	Pesisir Utara	Reog
17	Jejala	Pesisir Utara	Orkes Lampung

Sumber : Dinas P dan K, 2022

Gedung kesenian sebagai sarana untuk mengapresiasikan seni para seniman sama sekali tidak terdapat di tiap-tiap kecamatan, bahkan di pusat pemerintahan belum terdapat gedung kesenian yang sangat dibutuhkan oleh para seniman sebagai tempat berekspresinya para seniman Pesisir Barat. Selain belum adanya gedung kesenian, minimnya sarana prasarana dan infastruktur pendukung pengembangan sektor kebudayaan juga menjadi masalah kurang berkembangnya sektor wisata budaya di Kabupaten Pesisir Barat.

Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat terus memfasilitasi pengembangan dan pelestarian budaya daerah melalui kegiatan-kegiatan promosi dan/atau festival kebudayaan. Peran serta dan juga dukungan dari seluruh masyarakat merupakan kunci dari keberhasilan pengembangan dan pelestarian budaya daerah.

2.1.2.3.2. Pemuda dan Olahraga

Peningkatan kualitas hidup masyarakat salah satunya dapat dilakukan dengan peningkatan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia pemuda dan pemudi serta pengembangan olahraga di kalangan pelajar dan masyarakat (baik olahraga prestasi maupun olahraga non prestasi).

Pemerintah daerah terus berusaha untuk dapat meningkatan fasilitas pendukung pengembangan kepemudaan, melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan *hardskill* dan *softskill* serta bantuan stimulan alat-alat produksi.

Pada tahun 2016, jumlah organisasi kepemudaan yang mendapatkan pembinaan dari pemerintah daerah sebanyak 10%, angka terus berkembang dari tahun ke tahun walaupun tidak signifikan, pada tahun 2017 (15%); tahun 2018 (20%); tahun 2019 (25%); tahun 2019 dan tahun 2020 (25%). Tahun 2021, angka persenstase organisasi kepemudaan yang mendapatkan pembinaan meningkat sebesar 40%. Sementara itu untuk penyelenggaraan kegiatan olahraga yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah pada tahun 2016-2021 stagnan pada angka 60%.

Tabel 2.29. Jumlah Organisasi Kabupaten Pesisir Barat Berdasarkan Kecamatan Tahun 2021-2022

No	Kecamatan	Organisasi Keolahragaan		Organisasi Kepemudaan	
		2021	2022	2021	2022
1	Pesisir Tengah	21	21	21	15
2	Pesisir Selatan	2	2	2	2
3	Lemong	0	0	0	0
4	Pesisir Utara	0	0	0	0
5	Karya Penggawa	0	0	4	4
6	Pulau Pisang	0	0	0	0
7	Way Krui	0	0	0	0
8	Krui Selatan	1	1	3	3
9	Ngambur	0	1	6	6
10	Ngaras	0	0	0	0
11	Bangkunat	0	1	1	1
	Jumlah	**24**	**26**	**37**	**26**

Sumber : Dinas Pora, 2023

Tabel 2.30. Jumlah Pemuda yang Mendapatkan Pelatihan Keterampilan Kewirausahaan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022

No	Kecamatan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pesisir Tengah	0	0	2	2	2
2	Karya Penggawa	0	0	1	1	1
3	Pesisir Selatan	0	0	1	2	2
4	Ngaras	0	0	1	1	1
5	Lemong	0	0	1	1	1
6	Pesisir Utara	0	0	1	0	1
7	Bangkunat	0	0	1	0	1
8	Ngambur	20	0	0	0	1
9	Krui Selatan	0	0	2	2	2

10	Way Krui	0	0	1	3	2
11	Pulau Pisang	0	0	1	3	2
	Jumlah	**20**	**0**	**12**	**15**	**14**

Sumber : Dinas Pora, 2023

Tabel 2.31. Jumlah Pemuda yang Berwirausaha Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022

No	Kecamatan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pesisir Tengah	12	10	31	34	59
2	Karya Penggawa	10	7	19	20	47
3	Pesisir Selatan	5	4	16	17	42
4	Ngaras	9	9	18	19	0
5	Lemong	8	8	5	5	0
6	Pesisir Utara	3	3	6	6	2
7	Bangkunat	3	3	21	23	0
8	Ngambur	10	10	0	4	0
9	Krui Selatan	5	3	10	11	20
10	Way Krui	9	9	5	5	19
11	Pulau Pisang	5	5	2	2	1
	Jumlah	**79**	**71**	**133**	**146**	**190**

Sumber : Dinas Pora, 2023

Secara umum dapat dijelaskan bahwa pelatihan keterampilan kewirausahaan yang diberikan oleh pemerintah daerah disesuaikan dengan kondisi di daerah, pelatihan yang dikembangkan antara lain adalah: perbengkelan, pembuatan kerajinan tangan/souvenir dari bahan-bahan ramah lingkungan, dan pelatihan diversifikasi produk tapis. Sementara itu untuk bidang olahraga terus dikembangkan dan dilaksanakan penyelenggaraan kejuaraan dari masing-masing cabang olahraga yang difasilitasi oleh pemerintah daerah.

Tabel 2.32. Perkembangan Olahraga Kabupaten Pesisir Barat Berdasarkan Kecamatan Tahun 2021

No	Kecamatan	Voli	Biliard	Lapangan Terbuka	Basket
1	Pesisir Tengah	8	7	2	7
2	Pesisir Selatan	7	5	4	5
3	Lemong	6	3	0	4
4	Pesisir Utara	4	2	0	4
5	Karya Penggawa	5	4	1	2
6	Pulau Pisang	2	1	0	1
7	Way Krui	3	3	0	1
8	Krui Selatan	6	4	3	2
9	Ngambur	7	4	5	4
10	Ngaras	5	3	1	3
11	Bangkunat	8	3	1	4
	Jumlah	**61**	**39**	**17**	**37**

Sumber : SIPD Kabupaten Pesisir Barat, 2022

Selanjutnya, hingga tahun 2022 telah ada 24 persatuan cabang olahraga yang berada di bawah naungan KONI. Ke-24 persatuan cabang olahraga tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.33. Persatuan Cabang Olahraga Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022

No	Nama Persatuan Cabang Olahraga
1	Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI)
2	Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI)
3	Perasatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI)
4	Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI)
5	Persatuan Sepak Takraw Indonesia (PSTI)
6	Persatuan Atletik Indonesia (PASI)
7	Persatuan Olahraga Beladiri Tarung Derajat
8	Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI)
9	Persatuan Catur Seluruh Indonesia (PERCASI)
10	Federasi Olahraga Karate-do Indonesia (FORKI)
11	Taekwondo Indonesia (TI)
12	Persaudaraan Bela Diri Kempo Indonesia (PERKEMI)
13	Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (PERBASI)
14	Persatuan Senam Indonesia (PERSANI)
15	Wushu Indonesia (WI)
16	Persatuan Olahraga Layar Seluruh Indonesia (PORLASI)
17	Ikatan Motor Indonesia (IMI)
18	Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PRSI)
19	Perwosi
20	Muangthai
21	Woodball
22	Hapkido
23	PBSA
24	ISSI

Sumber : Dinas Pora, 2023

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib

2.1.3.1.1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Pendidikan memiliki peranan yang penting dalam pembangunan di suatu daerah, tidak terkecuali Kabupaten Pesisir Barat yang masih dalam taraf awal pembangunan. Pemerintah daerah telah melakukan berbagai intervensi dalam pembangunan pendidikan ini, melalui banyak program dan kegiatan yang diharapkan dapat meningkatkan taraf pendidikan masyarakat yang mengarah pada perbaikan kualitas taraf hidup masyarakat.

Tabel 2.34. Data Pendidikan Tingkat PAUD Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2022

No	Kecamatan	Sekolah		Guru		Peserta Didik		Ruang Belajar	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
1	Pesisir Tengah	21	21	51	50	617	645	33	33
2	Bangkunat	17	17	38	41	520	514	32	32
3	Pesisir Selatan	14	14	31	33	513	448	25	25
4	Ngambur	13	13	12	12	138	106	11	11
5	Lemong	14	14	19	21	320	299	19	19
6	Ngaras	7	7	26	13	344	191	9	9
7	Karya Penggawa	10	10	13	24	235	317	24	24
8	Pesisir Utara	7	8	12	11	151	25	13	15
9	Krui Selatan	6	7	11	12	222	190	9	11
10	Way Krui	8	7	10	12	165	137	13	11
11	Pulau Pisang	1	1	3	3	26	27	2	2
Jumlah		**118**	**119**	**226**	**232**	**3.251**	**2.899**	**190**	**192**

Sumber : Dinas P dan K, 2023

Berdasarkan pada data di atas, beberapa kecamatan masih belum memiliki rasio ideal antara guru dan murid, atau rata-rata 1:14 dari idealnya 1:10. Hampir disemua kecamatan kecuali kecamatan Krui Selatan (1:9) dan Pulau Pisang (1:7) memiliki rasio guru dan murid yang belum ideal. Kecamatan yang perlu mendapatkan perhatian lebih adalah Kecamatan Pesisir Utara (1:17), Kecamatan Ngaras (1:17) dan Kecamatan Lemong (1:16).

Tabel 2.35. Data Pendidikan Tingkat SD sederajat Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2022

No	Kecamatan	Sekolah		Guru		Peserta Didik	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022
1	Pesisir Tengah	19	19	186	184	2.729	2.759
2	Bangkunat	17	17	261	262	3.107	3.051
3	Pesisir Selatan	17	17	218	221	2.895	2.116
4	Ngambur	14	15	171	169	2.342	2.131
5	Lemong	12	12	148	151	1.307	865
6	Ngaras	12	12	123	115	1.663	894
7	Karya Penggawa	12	12	111	122	112	884
8	Pesisir Utara	9	9	127	120	112	943
9	Krui Selatan	8	8	84	84	961	687
10	Way Krui	5	5	55	53	523	516
11	Pulau Pisang	2	2	20	21	115	73
Jumlah		**127**	**128**	**1.504**	**1.502**	**15.886**	**14.919**

Sumber : Dinas P dan K, 2023

Sementara itu, untuk pendidikan dasar, rasio antara guru dan murid secara umum berada pada angka 1:12. Kecamatan yang sudah mencukupi ketersediaan guru dibandingkan dengan murid adalah kecamatan Pesisir Utara (1:8), Kecamatan Lemong (1:8), Kecamatan Ngaras (1:9), Kecamatan Way Krui (1:10) dan Kecamatan

Pulau Pisang (1:6). Sementara itu Kecamatan yang belum ideal rasio guru dan muridnya Pesisir Tengah (1:15) dan Kecamatan Karya Penggawa (1:14).

Tabel 2.36. Data Pendidikan Tingkat SMP Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2022

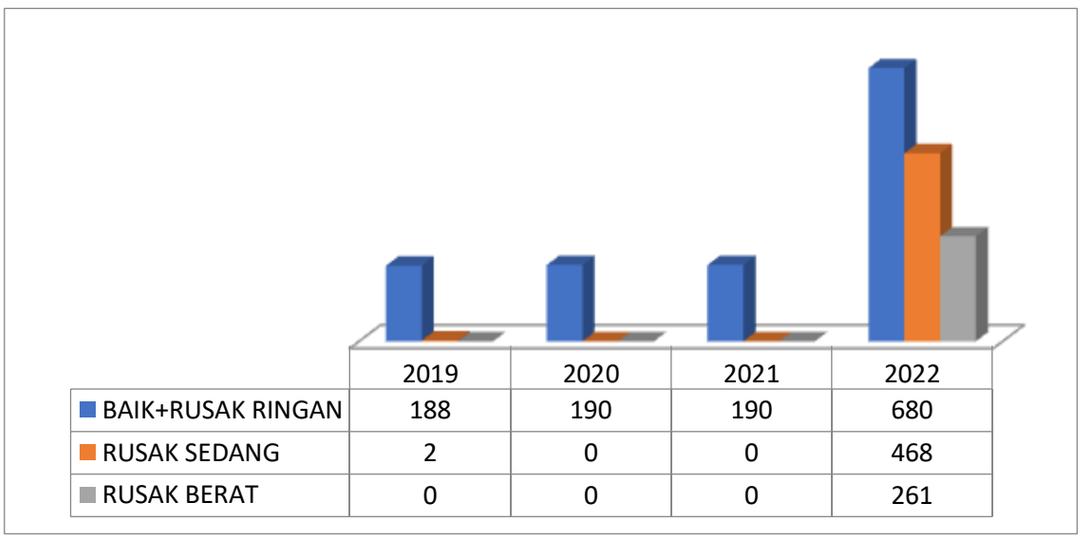
No	Kecamatan	Sekolah		Guru		Peserta Didik	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022
1	Pesisir Tengah	6	6	157	151	1.620	1.710
2	Bangkunat	5	5	115	107	883	849
3	Pesisir Selatan	7	7	132	125	1.077	1.035
4	Ngambur	3	3	96	93	813	780
5	Lemong	1	1	86	82	511	516
6	Ngaras	5	5	37	65	271	267
7	Karya Penggawa	2	2	66	39	378	325
8	Pesisir Utara	4	4	42	41	310	308
9	Krui Selatan	1	1	30	34	358	334
10	Way Krui	1	1	36	36	196	188
11	Pulau Pisang	1	1	11	11	71	66
Jumlah		**36**	**36**	**808**	**784**	**6.448**	**6.378**

Sumber : Dinas P dan K, 2023

Berdasarkan pada data pendidikan tingka SMP di Kabupaten Pesisir Barat, disemua kecamatan rata-rata rasio siswa dan murid berada pada 1:7 dengan Kecamatan Ngaras yang memiliki rasio terbaik 1:4 serta sKecamatan Pesisir Tengah dengan rasio terendah dengan angka 1:10. Sementara itu, kecamatan lain berada pada posisi ideal dengan angka 1:5-1:8.

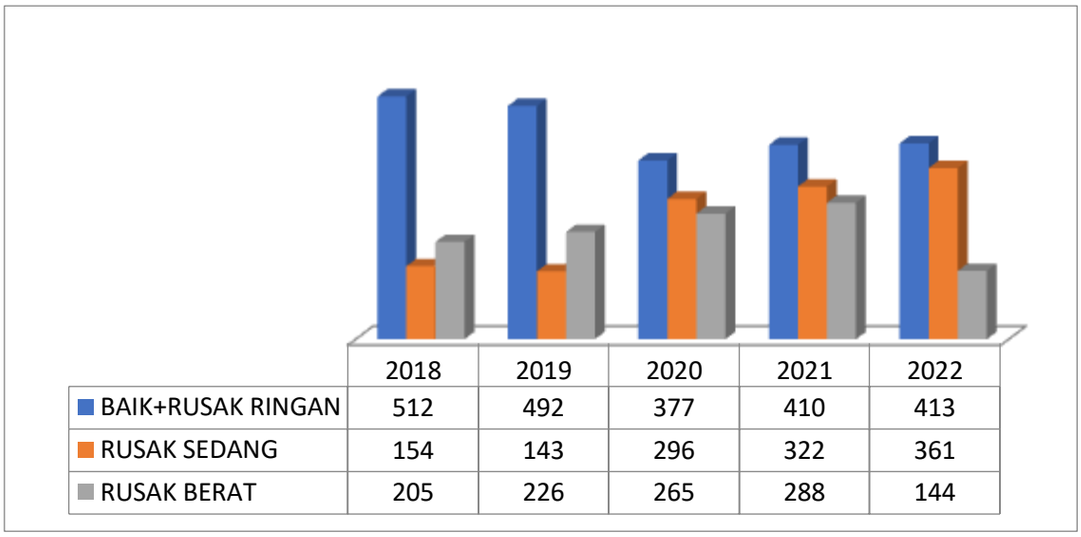
Sektor pendidikan di Kabupaten Pesisir Barat masih terkendala dengan masih banyak ruang kelas yang dalam kondisi rusak, baik ringan, sedang maupun berat. Di bawah ini tabel kondisi ruang kelas PAUD, SD dan SMP.

Gambar 2.34. Kondisi Bangunan Ruang Kelas PAUD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2019-2022



Sumber : Disdikbud, 2023

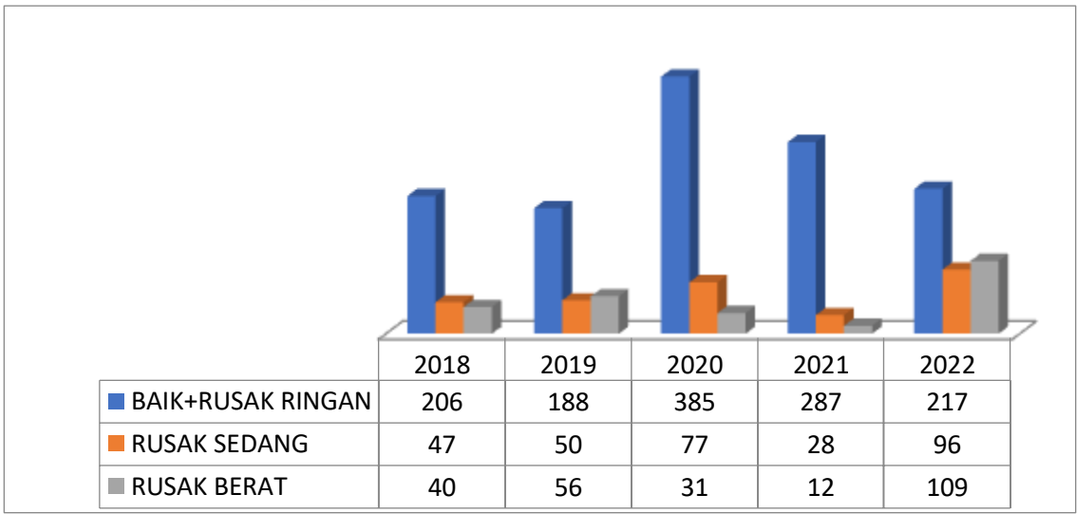
Gambar 2.35. Kondisi Bangunan Ruang Kelas SD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022



	2018	2019	2020	2021	2022
BAIK+RUSAK RINGAN	512	492	377	410	413
RUSAK SEDANG	154	143	296	322	361
RUSAK BERAT	205	226	265	288	144

Sumber : Disdikbud, 2023

Gambar 2.36. Kondisi Bangunan Ruang Kelas SMP Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022



	2018	2019	2020	2021	2022
BAIK+RUSAK RINGAN	206	188	385	287	217
RUSAK SEDANG	47	50	77	28	96
RUSAK BERAT	40	56	31	12	109

Sumber : Disdikbud, 2023

Angka Melek Huruf

Kesejahteraan sosial dengan beberapa indikator keberhasilan dalam upaya peningkatan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Pesisir Barat, terdapat perkembangan angka melek huruf dan penurunan buta aksara setiap tahunnya, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.37. Angka Buta Huruf Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Angka Buta Huruf	9,71	2,49	2,48	2,47	2,19

Sumber : Dinas P dan K, 2023

Tabel 2.38. Angka Melek Huruf Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Angka Melek Huruf	90,29	97,51	97,52	97,53	97,81

Sumber : Dinas P dan K, 2022

Pada tabel di atas, Angka Melek Huruf (AMH) Kabupaten Pesisir Barat dari tahun-tahun cenderung mengalami peningkatan, tahun 2021 sebesar 97,53% dan tahun 2022 sebesar 97,81%, sedangkan Angka Buta Huruf (ABH) terus mengalami penurunan dimana pada tahun 2021 sebesar 2,47% dan tahun 2022 turun menjadi 2,19%. Capaian terhadap indikator di atas masih belum maksimal, dikarenakan angka AMH yang belum mencapai 100% serta perkembangan dari tahun ke tahun yang cenderung stagnan. Hal ini bila dibandingkan dengan capaian nilai AMH dan APS menunjukkan pelaksanaan program dan kegiatan belum menyeluruh hingga seluruh lapisan masyarakat. Masih terdapat kelompok masyarakat pingggiran dan marginal yang belum memperoleh akses terhadap pendidikan yang murah, mudah dan terjangkau dari sisi biaya dan akomodasi.

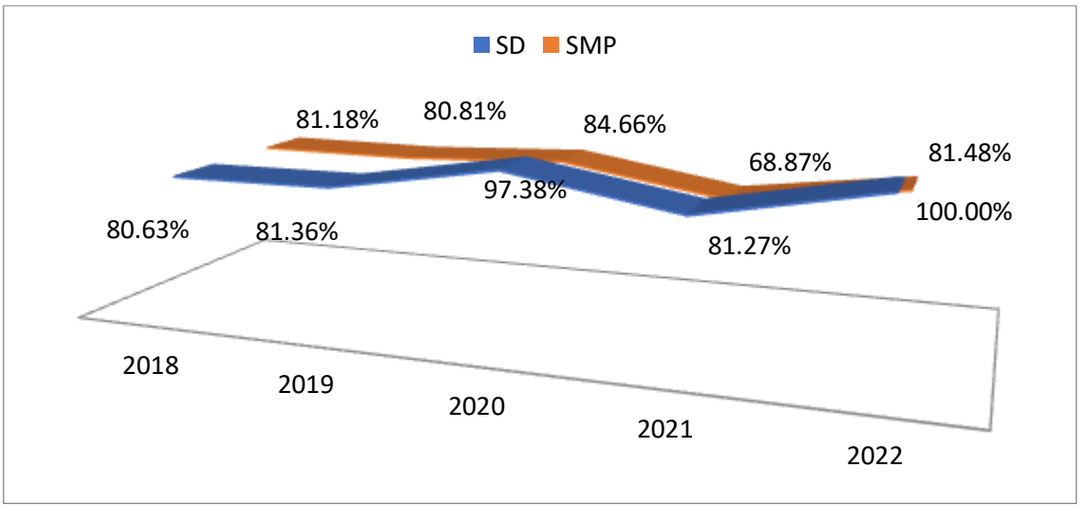
Sementara itu bila melihat pada data Angka Partisipasi Sekolah (APS) baik tingkat pendidikan dasar dan/atau pendidikan menengah pertama terus mengalami peningkatan dari tahun 2018-2020. Namun pada tahun 2021 mengalami penurunan signifikan. Tahun 2022 kembali APS SD naik mencapai 100%. Sementara itu, APS SMP belum bisa mencapai angka 100%.

Tabel 2.39. Angka Partisipasi Sekolah Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Angka Partisipasi Sekolah SD	80,63	81,36	97,38	81,27	100
Angka Partisipasi Sekolah SMP	81,18	80,81	84,55	68,87	81,48

Sumber : Dinas P dan K, 2023

Gambar 2.37. Angka Partisipasi Sekolah Tahun 2018-2022



Sumber : Dinas P dan K, 2023

Terkait dengan data anak usia sekolah yang putus sekolah (tidak sekolah), pada tahun 2021 didapatkan data bahwa sebanyak 19 orang pada tingkat SD sementara pada tingkatan SMP sebanyak 8 orang. Sementara pada tahun 2022 sebanyak 49 orang pada tingkat SD dan 6 orang pada tingkat SMP. Atau bila dijumlahkan sebanyak 68 orang pada tahun 2021 anak usia sekolah pendidikan dasar SD dan SMP yang tidak melanjutkan pendidikan ke pendidikan menengah dan 14 orang pada tahun 2022.

Tabel 2.40. Jumlah Anak Putus Sekolah Kabupaten Pesisir Barat Berdasarkan Kecamatan Tahun 2021-2022

No	Kecamatan	SD		SMP	
		2021	2022	2021	2022
1	Ngaras	1	11	1	0
2	Bangkunat	9	15	0	1
3	Karya Penggawa	0	1	0	0
4	Krui Selatan	2	0	0	0
5	Lemong	0	0	0	0
6	Ngambur	2	1	0	0
7	Pesisir Selatan	0	2	0	0
8	Pesisir Tengah	3	11	1	5
9	Pesisir Utara	2	6	0	0
10	Pulau Pisang	0	0	0	0
11	Way Krui	0	2	6	0
	Jumlah	**19**	**49**	**8**	**6**

Sumber : Dinas P dan K, 2023

Berikutnya adalah beberapa data indikator pendidikan sesuai dengan Permendagri 59 tahun 2021 dan Kemendikbud Ristek nomor 311 tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 2.41. Indikator Pendidikan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2022

No	Indikator	Capaian	
		2021	2022
1	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini	60.70	59.47
2	Jumlah anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	96.06	95.18
3	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (Paket A/B/C)	2.19	1.84
4	Rerata kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	40.77	44.30
5	Rerata kemampuan Numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	30.23	34.14
6	Rerata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	56.90	62.22
7	Rerata kompetensi Numeransi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	52.81	53.56
8	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang mendapatkan minimal Akreditasi B	58.33	53.57

9	Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal Akreditasi B	58.33	53.57
10	Pertumbuhan pendidik PAUD yang memiliki kualifikasi akade mik paling rendah D-IV/S1	30.91	32.30
11	Indeks iklim keamanan SD	63.68	78.56
12	Indeks iklim kebhinekaan SD	63.06	78.34
13	Indeks Inklusivitas SD	63.81	71.26
14	Indeks iklim keamanan SMP	69.39	78.40
15	Indeks iklim kebhinekaan SMP	58.97	75.53
16	Indeks Inklusivitas SMP	66.45	73.93

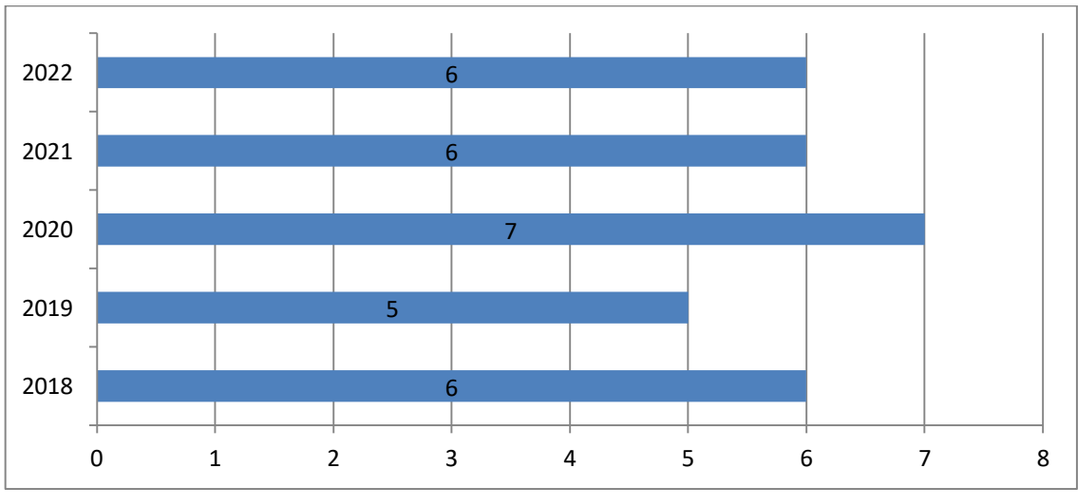
Sumber : Dinas P dan K, 2023

2. Kesehatan

Pembangunan kesehatan tetap dititikberatkan pada peningkatan pelayanan dan penyuluhan kepada masyarakat, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, perbaikan gizi masyarakat, pengembangan lingkungan sehat, pencegahan dan pemberantasan penyakit menular. Selain itu upaya lain yang dilakukan adalah mengoptimalkan peningkatan kualitas SDM dan sarana prasarana yang ada serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat dan fungsi pelayanan kesehatan.

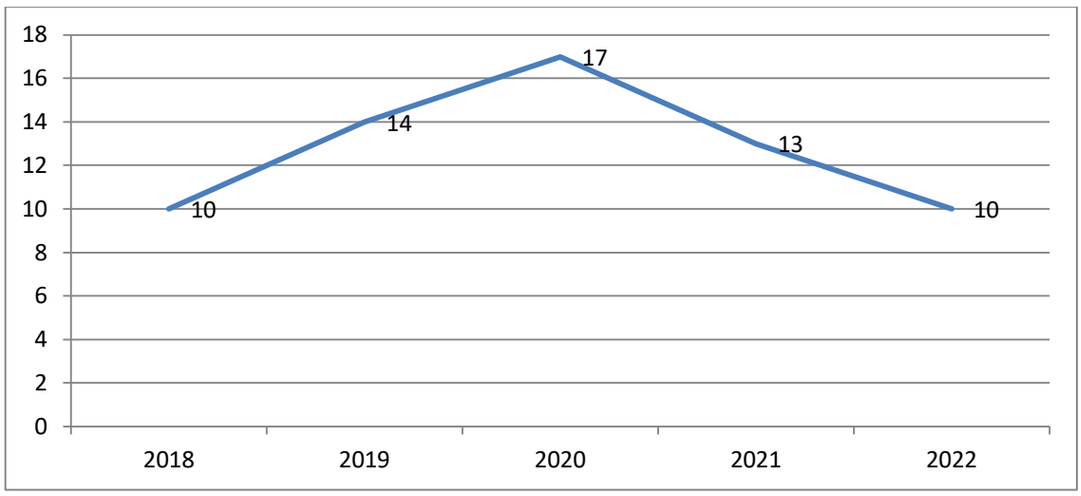
Berikut beberapa indikator pelayanan kesehatan di Kabupaten Pesisir Barat pada Tahun 2018-2022:

Gambar 2.38. Kematian Ibu Melahirkan di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022



Sumber : Dinas Kesehatan, 2023

Gambar 2.39. Kematian Bayi di Kabupaten Pesisir Barat 2018-2022



Sumber : Dinas Kesehatan, 2023

a. Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Pesisir Barat pada tahun 2022 sebanyak 6 kasus setelah pada tahun 2021 sebanyak 6 kasus, tahun 2020 sebanyak 7 kasus. tahun 2019 sebanyak 8 kasus, tahun 2018 sebanyak 6 kasus tahun 2017 dengan jumlah 8 kasus.

b. Angka Kematian Bayi, data pada tahun 2022 sebanyak 10 kematian. Pada tahun 2021 sebanyak 13 kasus atau menurun 4 kasus dibandingkan data tahun 2020. Tahun 2020 sebanyak 17 atau meningkat bila dibandingkan dengan data pada tahun 2019 tercatat sebanyak 14 kasus kematian, angka ini mengalami peningkatan dari sebelumnya tahun 2018 sebanyak 10 kasus. Angka ini terus membaik bila dibandingkan dengan tahun 2017 sebanyak 15 kasus dan pada tahun 2016 sebanyak 26 kasus serta pada tahun 2015 sebanyak 21 kasus. Penurunan ini disebabkan sudah membaiknya penanganan medis dan semakin tersedianya jumlah tenaga medis dan perawat di Puskesmas dan Puskesmas Pembantu di Kabupaten Pesisir Barat.

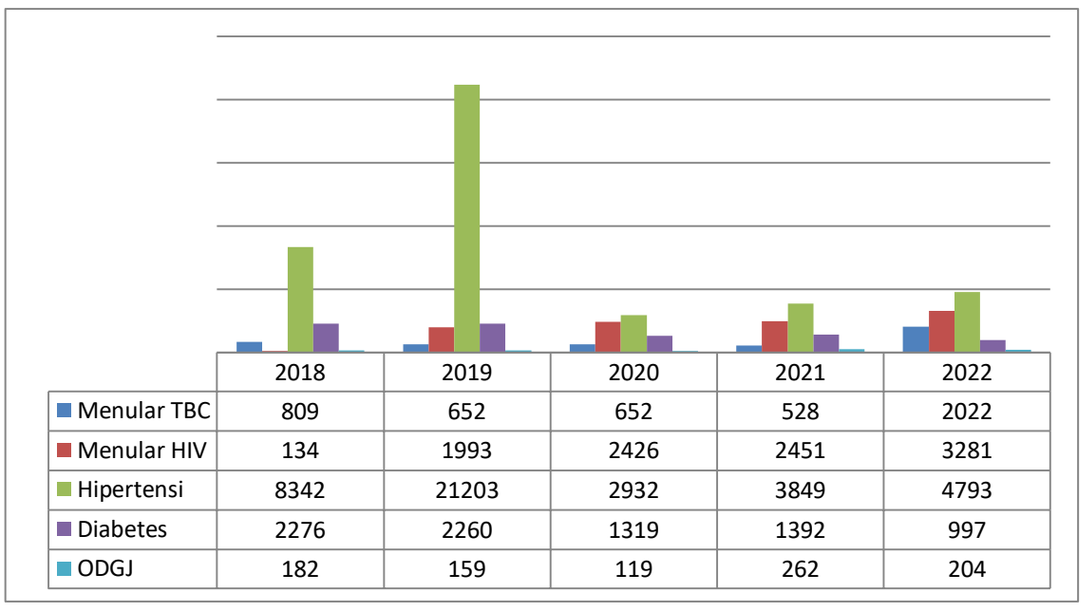
Tabel 2.42. Analisis Faktor Determinan AKI dan AKB Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022

Masalah	**Faktor Determinan**			
	Perilaku	**Pelayanan Kesehatan**	**Lingkungan**	**Genetik**
Masih Tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) & Angka Kematian Bayi (AKB)	Input: a. Informasi tentang 3T (terlambat mengenal tanda bahaya dan mengambil keputusan, terlambat mencapai fasilitas pelayanan	Input: a. Adanya SDM nakes (bidan) b. Ketersediaan Partus Kit Proses: a. Nakes yang menolong persalinan kurang kompeten	Lingkungan Fisik: a. Lingkungan kotor Proses: a. Penyediaan makanan bagi ibu hamil/ bersalin/ nifas tidak higienis	Input: a. Pernah menderita penyakit komorbid dan memiliki kelainan bawaan

Masalah	Faktor Determinan			
	Perilaku	Pelayanan Kesehatan	Lingkungan	Genetik
	kesehatan, terlambat mendapatkan pertolongan di fasilitas kesehatan) yang belum tersosialisasi menyeluruh di Masyarakat b. Cenderung untuk bersalin pada bukan nakes Proses: a. Persalinan oleh bukan nakes	 Output: a. Masih adanya kasus kematian ibu hamil/bersalin /nifas b. Masih adanya kematian bayi Outcome: a. Status derajat kesehatan rendah b. Berdampak lebih luas penyebab krisis kesehatan suatu daerah	b. Mengkonsumsi gizi tidak seimbang Output: a. Gangguan kesehatan pada ibu hamil/bersalin/nifas b. Ibu menderita anemia Proses: a. Menunda jadwal pemeriksaan rutin triwulan ibu hamil	

Sumber : Dinas Kesehatan, 2023

Gambar 2.40. Penyakit Menular dan Tidak Menular Kabupaten Pesisir Barat 2018-2022



	2018	2019	2020	2021	2022
Menular TBC	809	652	652	528	2022
Menular HIV	134	1993	2426	2451	3281
Hipertensi	8342	21203	2932	3849	4793
Diabetes	2276	2260	1319	1392	997
ODGJ	182	159	119	262	204

Sumber : Dinas Kesehatan, 2023

Pada tahun 2022, kondisi morbiditas penyakit TB dan HIV AIDS dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.43. Data Pelayanan TB Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022

No	Puskesmas	Jumlah Terduga Tuberkulosis Yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kasus Tuberkulosis Anak 0-14 Tahun
1	Lemong	140	2
2	Pugung Tampak	115	1
3	Pulau Pisang	27	1
4	Karya Penggawa	180	0
5	Way Krui	122	1
6	Krui	262	3
7	Krui Selatan	159	1
8	Biha	272	1
9	Ngambur	277	3
10	Bengkunat	124	0
11	Bengkunat Belimbing	344	4
	Jumlah	**2.022**	**17**

Sumber : Dinas Kesehatan, 2023

Berdasarkan pada tabel di atas, bahwa pada tahun 2022 untuk penderita TB yang terdata sebanyak 2.155 orang. Sementara yang telah mendapatkan layanan sebanyak 2.022 orang atau telah mencapai 93.80%. Sedangkan untuk kasus pada anak 0-14 tahun jumlah persentase penemuan kasus sebanyak 25.3%.

Untuk kasus HIV pada tahun 2022, sebanyak 8 kasus yang ada, dengan catatan 6 kasus pada rentang kelompok umur 25-49 tahun atau 83.3% dan 16.7% pada rentang kelompok umur ≥50 tahun dengan data 2 kasus.

Tabel 2.44. Data Kasus HIV Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022

No	Kelompok Umur	Kasus H I V			
		Laki-laki	Perempuan	Total	Proporsi Kelompok Umur
1	≤ 4 Tahun	0	0	0	0.0
2	5 - 14 Tahun	0	0	0	0.0
3	15 - 19 Tahun	0	0	0	0.0
4	20 - 24 Tahun	0	0	0	0.0
5	25 - 49 Tahun	6	4	10	83.3
6	≥ 50 Tahun	2	0	2	16.7
Jumlah		**8**	**4**	**12**	**100**

Sumber : Dinas Kesehatan, 2023

Di Kabupaten Pesisir Barat hingga tahun 2022, tersedia 1 RSUD, 11 Puskesmas dan 17 Puskesmas pembantu, 4 Klinik, 177 Posyandu, 30 Pos Kesehatan Desa, 11 Puskesmas Keliling yang tersebar di 11 kecamatan. Rincian kinerja pelayanan kesehatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.45. Jumlah Sarana Kesehatan di Kecamatan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022

No	Kecamatan	RSUD	Pusk. Induk	Pustu	Klinik	Posyandu	Poskesdes	Pusling
1	Lemong		1	2	0	21	5	1
2	Pesisir Utara		1	2	0	14	2	1
3	Pulau Pisang		1	0	0	6	0	1
4	Karya Penggawa		1	1	0	13	5	1
5	Pesisir Tengah		1	0	3	13	1	1
6	Way Krui		1	1	1	10	0	1
7	Krui Selatan	1	1	2	0	10	1	1
8	Pesisir Selatan		1	2	0	24	4	1
9	Ngambur		1	3	0	24	6	1
10	Ngaras		1	0	0	14	1	1
11	Bangkunat		1	4	0	28	5	1
	Jumlah	**1**	**11**	**17**	**4**	**177**	**30**	**11**

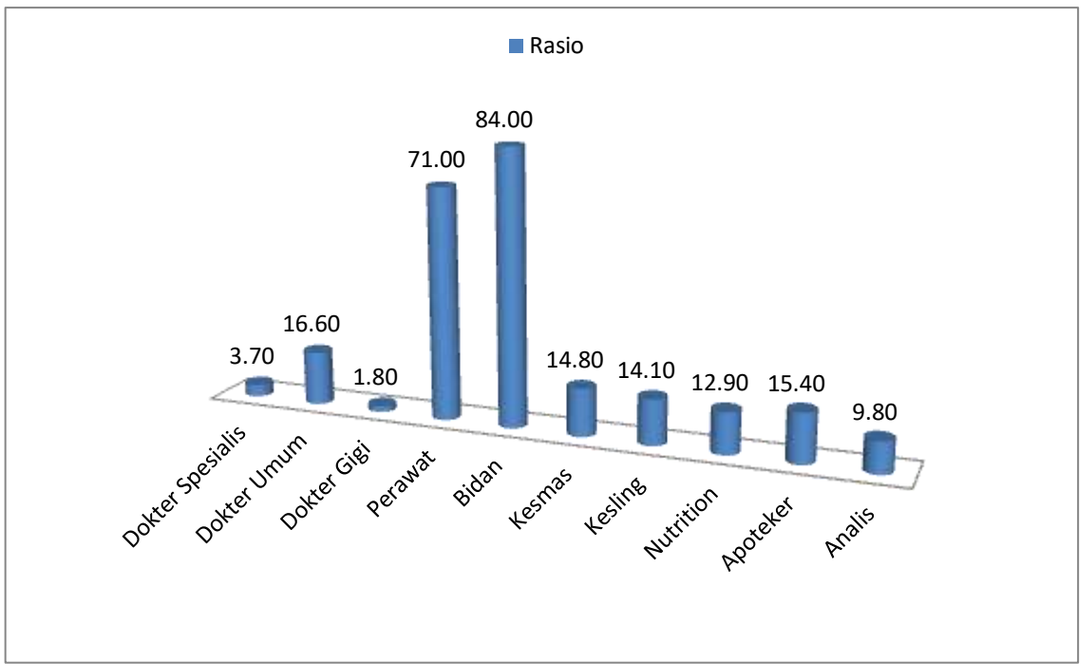
Sumber : Dinas Kesehatan, 2022

Tabel 2.46. Jumlah Tenaga Kesehatan di Kecamatan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021

Kec.	Dok Spes	Dr	Drg	Bidan	Perawat	Apt	Kesmas	Analis	Nutrisionis	Kesling
Lemong		2		2	10	2	2	1	2	1
Pesisir Utara		2		17	10	2	2	1	1	2
Pulau Pisang		1		13	6	2	2	1	1	2
Karya Penggawa		2		27	11	2	2	1	1	2
Way Krui		1		24	7	1	1	1	2	1
Pesisir Tengah		4	1	40	27	3	4	1	1	3
Krui Selatan		1		28	9	2	1	2	1	2
Pesisir Selatan		2		51	19	2	3	1	2	2
Ngambur		2	1	42	22	3	1	1	3	1
Ngaras		2		26	19	2	2	1	2	2
Bangkunat		2	1	47	22	2	2	2	2	2
RSUD	6	6	0	36	36	3	2	3	3	3
Jumlah	**6**	**27**	**3**	**372**	**198**	**25**	**24**	**16**	**21**	**23**

Sumber : Dinas Kesehatan, 2022

Gambar 2.41. Rasio Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022



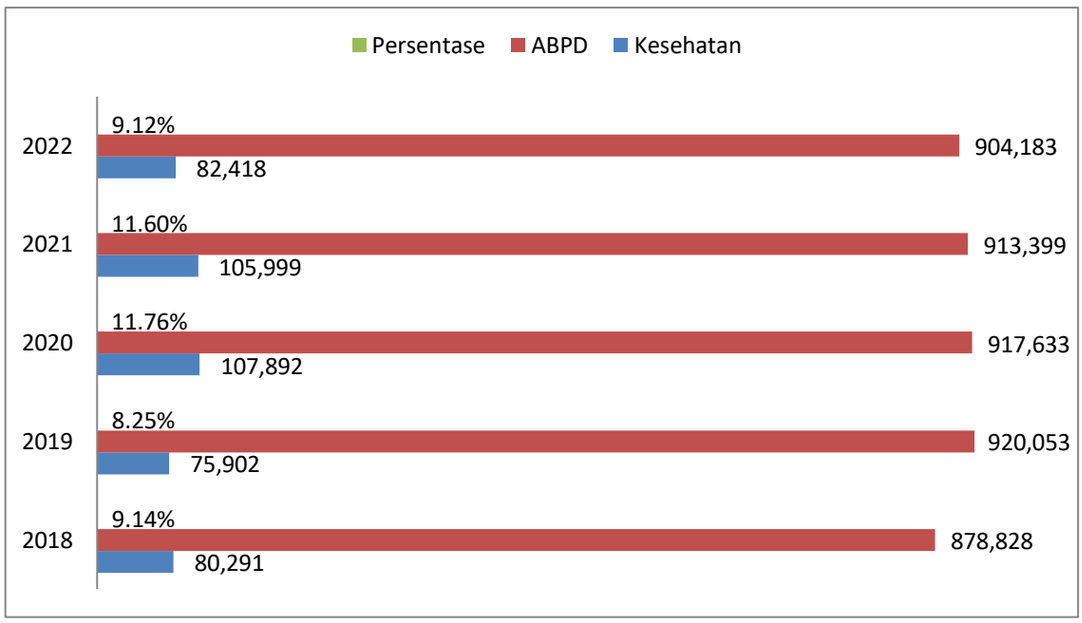
Sumber : Dinas Kesehatan, 2023 (data diolah)

Berdasarkan pada data rasio nakes pada tahun 2022 tersebut di atas, tampak bahwa hanya bidan dan perawat yang rasionya telah berada di atas 100. Sementara tenaga kesehatan lainnya masih jauh berada di bawah. Khusus untuk dokter umum, dokter spesialis dan dokter gigi nilainya paling rendah dan berada di bawah 4. Selanjutnya, untuk dokter umum, tenaga kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan, ahli nutrisi, apoteker dan analis berada pada rasio rentang 10-15. Sehingga secara umum dapat disimpulkan bahwa jumlah tenaga kesehatan belum mencukupi bila dibandingkan dengan jumlah masyarakat Kabupaten Pesisir Barat.

Lebih lanjut, merujuk pada amanat dari UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengamanatkan penganggaran Urusan Kesehatan 10% dari APBD. Secara umum, penganggaran untuk kesehatan terus mengalami perbaikan dan menuju pada pencapaian amanat undang-undang. Tahun 2018 angggaran mencapai 9,14%, 2019 sebesar 8,25%. Tahun 2020 mencapai 11,76% dan 2021 berada pada angka 11,60%. Pada tahun 2022, terjadi penurunan minor menjadi hanya 9,12%. Pemenuhan mandatory spending urusan kesehatan menjadi kewajiban seluruh daerah, hal ini telah disadari sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat dan akan terus dijaga konsistensinya untuk pemenuhan minimal 10% sebagaimana diatur oleh Peraturan Perundang-undangan.

Secara lebih jelas data dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Gambar 2.42. Perkembangan Anggaran Urusan Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022



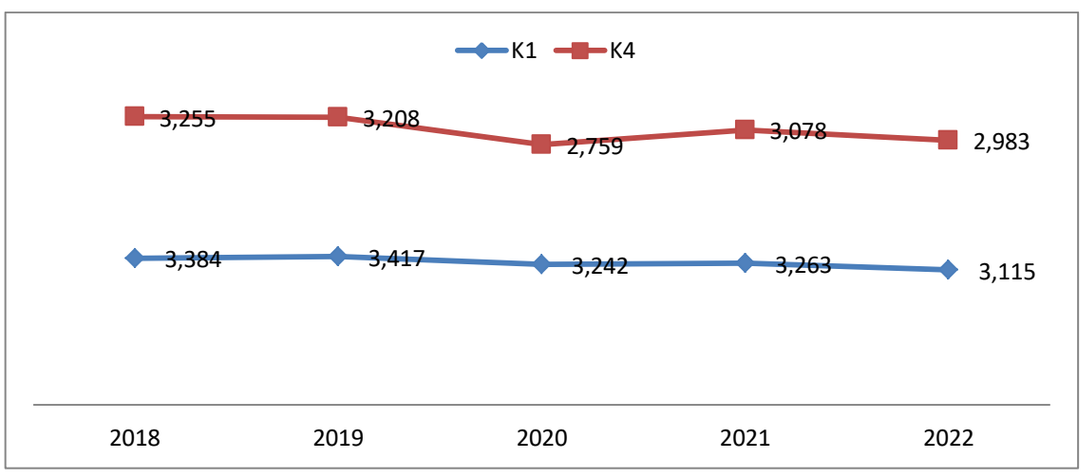
Sumber : Dinas Kesehatan, 2023

Tabel 2.47. Pencapaian Indikator Kinerja Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022

Indikator Kinerja Utama	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	62,85	63,27	63,50	63,66	63,99
Jumlah Kematian Bayi	Kasus	10	14	17	13	10
Jumlah Kematian Ibu Melahirkan	Kasus	6	4	7	6	6

Sumber : Dinas Kesehatan, 2023

Gambar 2.43. Cakupan Pelayanan Kunjungan Baru Ibu Hamil (K1) dan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (K4) Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022

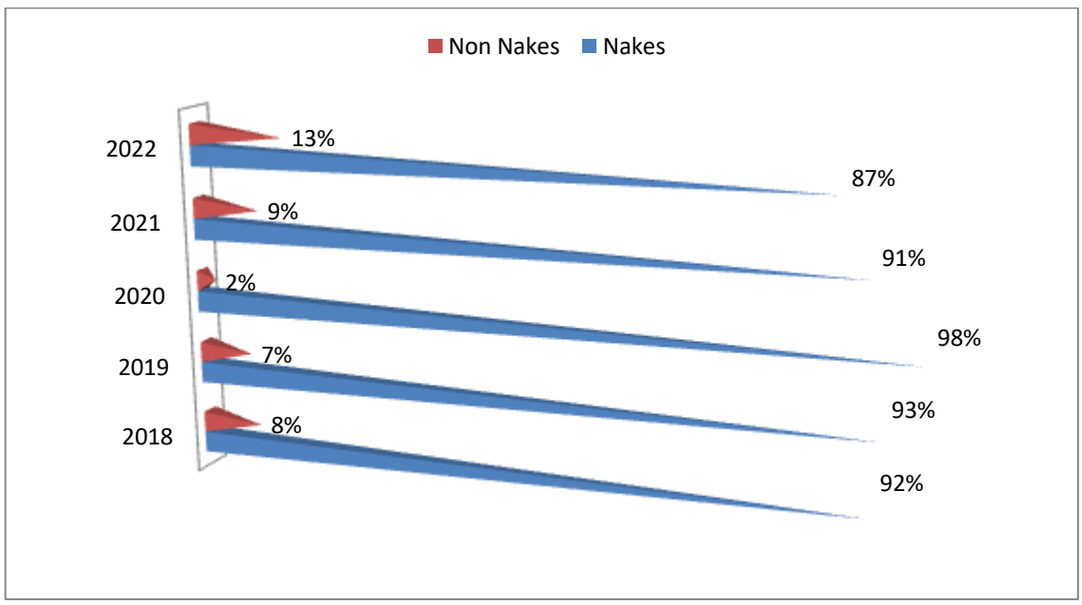


Sumber : Dinas Kesehatan, 2023

Data pelayanan kunjungan ibu hamil (K1) dan pelayanannya (K4) dari tahun 2018-2022 terus mengalami penurunan, hal ini tentunya menjadi kemunduran daerah dalam hal pelayanan kesehatan. Dimana pada tahun 2018 jumlah K1 sebanyak 3.384 orang dan tahun 2022 sebanyak 3.115 orang. Sementara itu untuk data K4 pada tahun 2018 terdata sebanyak 3.225 orang dan capaian pada tahun 2022 sebanyak 2.983 orang.

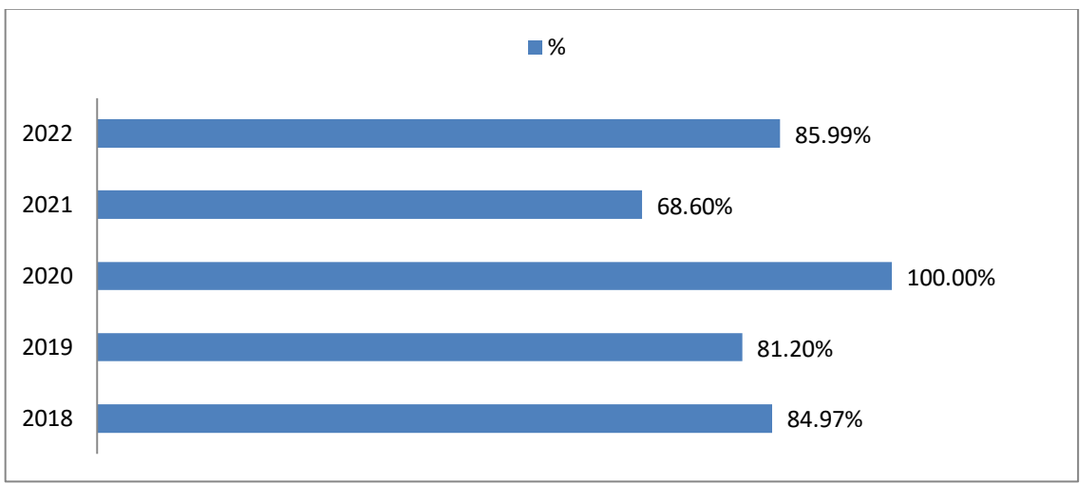
Selanjutnya untuk data persentase persalinan yang dibantu oleh tenaga kesehatan di Kabupaten Pesisir Barat pada periode tahun 2018-2022 juga terus mengalami penurunan. Dimana pada tahun 2018 sebesar 92% dan terus mengalami penurunan menjadi 87% pada tahun 2022.

Gambar 2.44. Persentase Persalinan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022



Sumber : Dinas Kesehatan, 2023

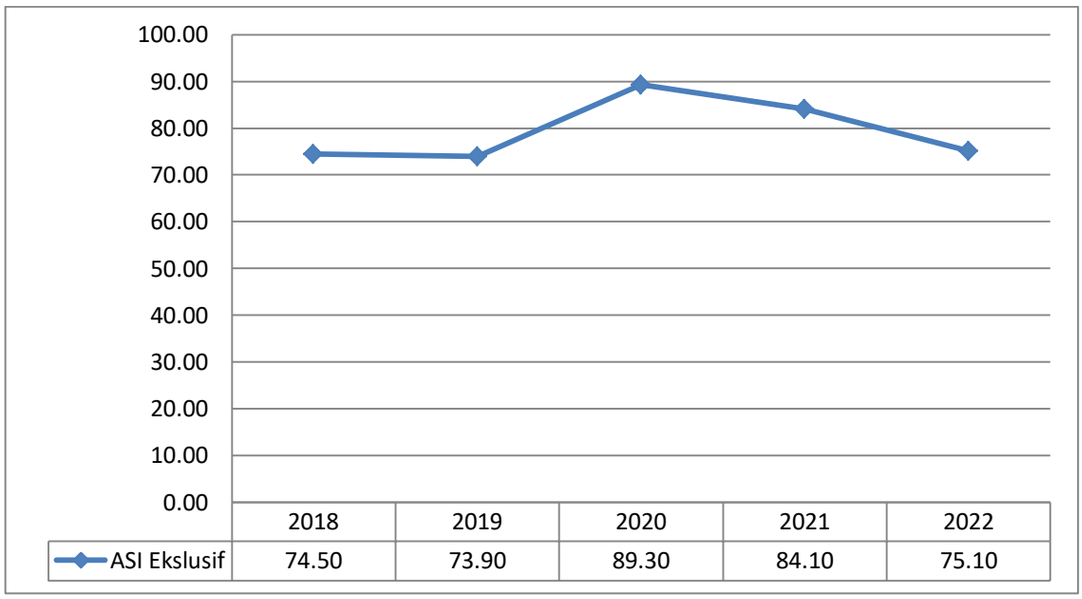
Gambar 2.45. Cakupan Deteksi Dini Ibu Hamil Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022



Sumber : Dinas Kesehatan, 2023

Data cakupan bayi yang mendapatkan ASI Ekslusif dari tahun 2018-2022 cenderung meningkat. Dimulai pada tahun 2018 (74,50%), turun minr pada tahun 2019 (73,90%); kembali naik pada tahun 2020 (89,30%) dan kembali turun pada tahun 2021 (84,10%). Data tahun 2022 mengalami penurunan menjadi sebanyak (75,10%).

Gambar 2.46. Cakupan Pemberian Asi Ekslusif di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022



Sumber : Dinas Kesehatan, 2023

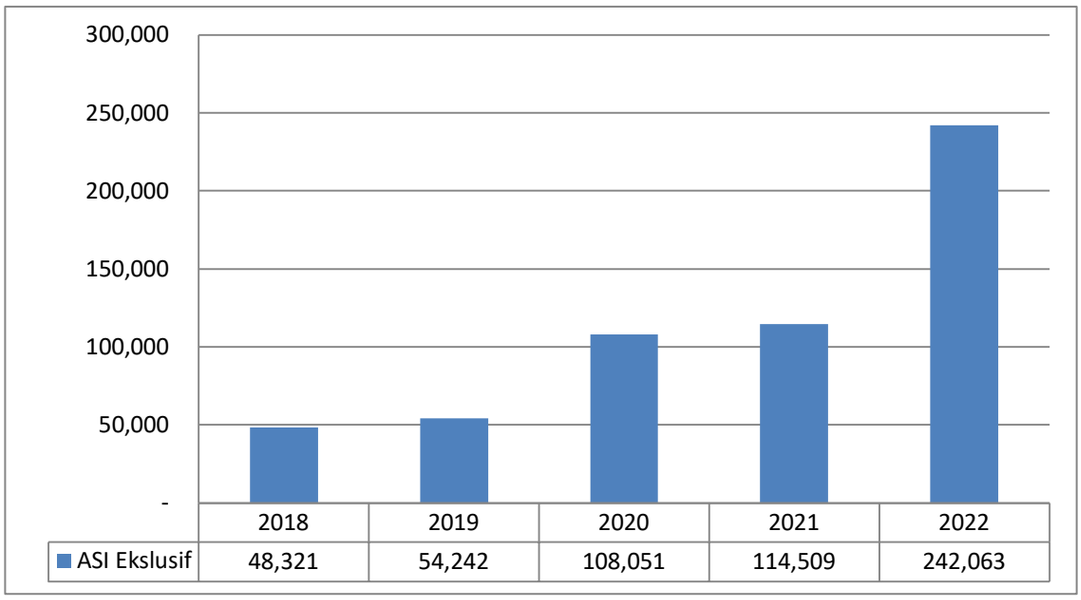
Upaya kesehatan perorangan dapat dilakukan oleh pemerintah maupun swasta untuk menyembuhkan, memulihkan maupun merehabilitasi kesehatan perorangan. Pelayanan rawat jalan serta rawat inap pada tahun 2021 sebanyak 6,35% dengan perbandingan pada 93,65%. Sementara pada tahun 2022 sebesar 97,83% dan persentase rawat inap sebesar 2,17%.

Tabel 2.48. Jumlah Kunjungan Rawat Jalan dan Rawat Inap Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2022

Fasilitas Kesehatan	2021		2022	
	Rawat Jalan	Rawat Inap	Rawat Jalan	Rawat Inap
Lemong	2,134	258	20,101	
Pesisir Utara	4,576	0	3,068	0258
Pulau Pisang	1,077	0	698	0
Karya Penggawa	1,714	0	2,804	0
Way Krui	2,094	0	1,384	0
Pesisir Tengah	6,165	583	27,054	42
Krui Selatan	9,682	0	1,039	0
Pesisir Selatan	50,988	163	13,903	343
Ngambur	29,621	305	7,546	890
Ngaras	3,203	342	3,589	260
Bangkunat	313	6,016	4,212	348
RSUD	2,942	108	2,483	244
Jumlah	**114,509**	**7,775**	**242,063**	**5,372**

Sumber : Dinas Kesehatan, 2023

Gambar 2.47. Kunjungan Rawat Jalan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022



Sumber : Dinas Kesehatan, 2023

Tabel 2.49. Vaksinasi Covid-19 Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2022

Kecamatan	2021				2022			
	Dosis 1		Dosis 2		Dosis 1		Dosis 2	
	Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%
Lemong	9.135	100,27	8.080	88,69	8.379	79.61	6.886	65.43
Pesisir Utara	9.820	162,72	8.698	144,13	5.379	79.68	4.746	65.35
Pulau Pisang	1.054	96,34	1.109	101,37	1.127	79.59	926	65.40
Karya Penggawa	14.640	123,41	8.622	72,68	10.143	79.60	8.550	65.36
Way Krui	8.090	124,54	6.218	95,72	6.139	79.60	5.040	65.35
Pesisir Tengah	13.426	102,16	10.874	82,74	12.937	79.59	10.623	65.36
Krui Selatan	7.704	105,51	5.371	73,56	6.730	79.60	5.5.27	65.37
Pesisir Selatan	18.415	99,37	14.935	80,59	16.801	79.59	13.796	65.36
Ngambur	15.260	98,51	12.491	80,63	14.006	79.59	11.502	65.36
Ngaras	7.420	110,50	5.999	89,34	6.160	79.60	5.058	65.36
Bangkunat	17.979	92,70	12.716	65,56	17.999	79.60	14.780	65.37
Jumlah	**122.943**	**106,74**	**95.113**	**82,58**	**106.477**	**79.60**	**87.434**	**65.37**

Sumber : Dinas Kesehatan, 2023

Tabel 2.50. Data Situasi Covid-19 Kabupaten Pesisir Barat 2022

No	Kecamatan	Kasus Konfirmasi	Sembuh	Meninggal	Angka Kesembuhan (RR)	Angka Kematian (CTR)
1	Lemong	20	20	0	100	0
2	Pesisir Utara	22	22	0	100	0
3	Pulau Pisang	4	4	0	100	0
4	Karya Penggawa	61	60	1	98	2
5	Way Krui	27	27	0	100	0

6	Pesisir Tengah	235	233	2	99	1
7	Krui Selatan	47	47	0	100	0
8	Pesisir Selatan	58	58	0	100	0
9	Ngambur	45	45	0	100	0
10	Ngaras	21	20	1	95	5
11	Bangkunat	72	72	0	100	0
	Jumlah	**612**	**608**	**4**	**99**	**1**

Sumber : Dinas Kesehatan, 2023

Kematian akibat Covid-19 pada tahun 2021 berjumlah 42 orang yang tersebar hampir di seluruh Kecamatan di Kabupaten Pesisir Barat. Berdasarkan pada data CFR didapatkan jumlah sebanyak 31 orang yang meninggal dengan komorbid seperti penyakit (i) diabetes mellitus, (ii) hipertensi, (iii) asma, (iv) jantung kronis/gagal jantung, (v) gangguan ginjal kronis. Sedangkan sebanyak 11 orang pasien Covid-19 yang meninggal tanpa komorbid. Sementara untuk data tahun 2022 sebanyak 4 orang dengan komorbid yang sama.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Infrastruktur merupakan unsur utama dalam perkembangan ekonomi suatu wilayah. Jalan merupakan salah satu penggerak ekonomi utama bagi suatu wilayah. Keterkaitan dan kelancaran perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain dapat terhubung dengan adanya jalan. Demi mendukung perkembangan ekonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat memberikan perhatian yang besar terhadap pembangunan infrastruktur di daerah.

Ketersediaan jalan nasional yang ada di Kabupaten Pesisir Barat sepanjang 205,45 km. Sedangkan ketersediaan jalan provinsi sepanjang 11.996 km, ketersediaan jalan kabupaten sepanjang 644,08 km dan jalan desa/lokal sepanjang 463,34 km. Berikut adalah fasilitas sarana pendukung transportasi yang ada di Kabupaten Pesisir Barat:

Tabel 2.51. Data Ketersediaan Infranstruktur Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022

No	Jenis Data	Uraian
1	Panjang Jalan Berdasarkan Kelas:	
	a. Jalan Nasional	205,45 Km – 7 Ruas Jalan (Baik – Sedang – Rusak Ringan)
	b. Jalan Provinsi	11.996 Km – 4 Ruas Jalan (Baik)
	c. Jalan Kabupaten	644,08 Km – 141 Ruas Jalan (Baik – Sedang – Rusak Ringan – Rusak Berat)
	c. Jalan Desa/Lokal	463,34 Km (Sedang)
2	Kondisi Jalan Kabupaten:	
	a. Aspal	297,685 Km
	b. Pengerasan Beton	55,860 Km
	c. Kerikil	124,561 Km

No	Jenis Data	Uraian
	d. Tanah	165,974 Km
3	Panjang Jalan Kabupaten Berdasarkan Kondisi:	
	a. Jalan Baik	198,63 (30,83%)
	b. Jalan Sedang	55,97 (8,68%)
	c. Jalan Rusak Ringan	44,40 (6,89%)
	d. Jalan Rusak Berat	345,06 (53,57%)
4	Jembatan	105 Buah
	Panjang	7,68 Km
5	Terminal Darat	1 Buah
6	Panjang Jalan Berdasarkan Fungsi: Kolektor	208,13 Km
7	Irigasi:	
	a. Primer	104,7 Km
	b. Sekunder	3,3 Km
	c. Tersier	9,15 Km

Sumber : Dinas PU dan PR, 2023

Panjang jalan baik kabupaten pada tahun 2017 sepanjang 135,83km, tahun 2018 meningkat 60,8km menjadi 196,63km. pada tahun 2019 penurunan jumlah sebanyak 26,86km sehingga menjadi 169,77km. pada tahun 2020 jumlah panjang jalan baik meningkat menjadi 182,66km dengan perhitungan penambahan sebanyak 12,89km. beriutnya pada tahun 2021 tercatat jumlah panjang jalan kabupaten dengan kondisi baik sepanjang 183,30km, atau naik 0,7km. Pada tahun 2022, panjang jalan baik sepanjang 198,63km atau bertambah 15,33km.

Berikutnya untuk kategori rusak berat tahun 2017 sepanjang 328,19 km dan turun 39,77km menjadi 288,42km pada tahun 2018. Data tahun 2019 meningkat menjadi 315,92km dengan kenaikan sepanjang 27,5km. Selanjutnya pada tahun 2020 tercatat sepanjang 357,38km atau kembali naik 41,46km. Pada tahun 2021, tercatat jalan rusak sepanjang 318,75km atau turun 38,63km. Data tahun 2022, jalan rusak berat bertambah 26,31km atau menjadi 345,06km.

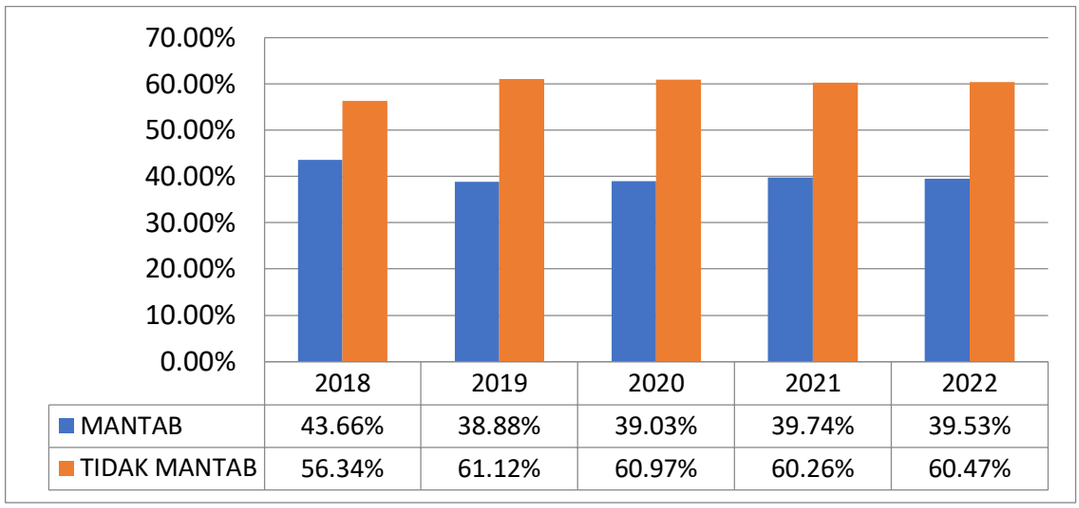
Penurunan yang terjadi terlihat minor, namun hal ini disebabkan oleh konsentrasi penanganan jalan tidak hanya fokus pada peningkatan tapi juga pemeliharaannya. Terdapat beberapa hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam penanganan infrastruktur jalan antara lain kondisi struktur tanah yang labil mengakibatkan sering terjadi longsor ketika terjadi hujan deras, kondisi demografi Kabupaten Pesisir Barat (jarak antar desa yang cukup jauh terpisah), kendaraan yang melintas melebihi tonase yang diizinkan serta terbatasnya dana pemeliharaan jalan. Untuk lebih lengkapnya rincian kondisi jalan Kabupaten Pesisir Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.52. Kondisi Jalan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022

Kondisi Jalan	2018	2019	2020	2021	2022
Baik	196.63	169.77	182.66	183.30	198,63
Sedang	84.59	80.67	68.75	72.68	55,97
Rusak Ringan	74.43	77.70	35.29	69.35	44,40
Rusak Berat	288.42	315.92	357.38	318.75	345,06
Jumlah (Km)	**644.08**	**644.08**	**644.08**	**644.08**	**644.08**

Sumber : Dinas PU dan PR, 2023

Gambar 2.48. Kondisi Jalan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022



Sumber : Dinas PU dan PR, 2023

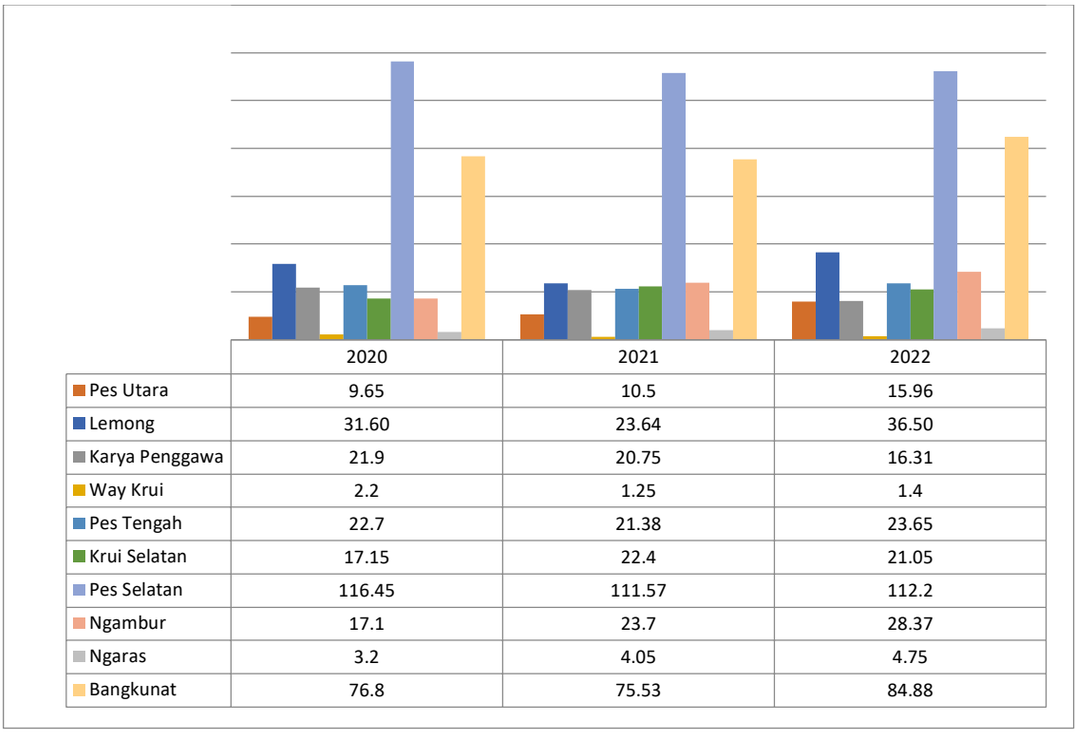
Tabel 2.53. Kondisi Jalan Kabupaten Pesisir Barat per Kecamatan Tahun 2020-2022

No	Kecamatan	Panjang (Km)	Aspal			Tanah			Rusak Berat		
			20	21	22	20	21	22	20	21	22
1	Lemong	63,30	24,60	23,73	25,71	23,40	14,86	22,04	31,60	23,64	36,50
2	Pesisir Utara	44,25	25.20	22,85	23,98	5,80	6,45	6,87	9,65	10,50	15,96
3	Karya Penggawa	38,30	10,80	11,10	15,87	17,30	16,25	12,51	21,90	20,75	16,31
4	Way Krui	6,40	1,40	0,00	0.00	2,20	1,25	0,96	2,20	1,25	1,40
5	Pesisir Tengah	64,38	42,85	40,16	38,27	10,40	16,70	15,68	22,70	21,38	23,65
6	Krui Selatan	52,20	27,50	30,02	32,25	9,80	13,00	12,10	17,15	22,40	21,05
7	Pesisir Selatan	177,30	47,25	55,46	59,61	60,60	62,85	63,51	116,45	111,57	112,20
8	Ngambur	58,40	34,10	30,65	36,60	10,60	9,12	5,66	17,10	23,7	28,37
9	Ngaras	31,70	24,00	26,05	26,45	0,80	1,05	1,55	3,20	4,05	4,75
10	Bangkunat	107,85	22,70	41,63	38,94	72,70	69,30	25,10	76,80	75,53	84,88

Sumber : Dinas PU dan PR, 2023

Bila diperhatikan pada tabel di atas, terlihat bahwa pada Kecamatan Pesisir Selatan dengan Panjang Jalan 177,30 Km^2 dengan kondisi jalan rusak sepanjang 112,20 Km^2. Berikunya adalah Kecamatan Bangkunat dengan Panjang jalan terpanjang 107,85 Km^2 memiliki kondisi jalan rusak berat terbanyak dengan 84,88 Km^2. Sementara untuk Kecamatan Way Krui dengan Panjang Jalan 6,40 Km^2 ruas jalan yang rusak berat sepanjang 1,40 Km^2.

Gambar 2.49. Kondisi Jalan Rusak Berat Kabupaten Pesisir Barat per Kecamatan Tahun 2020-2022

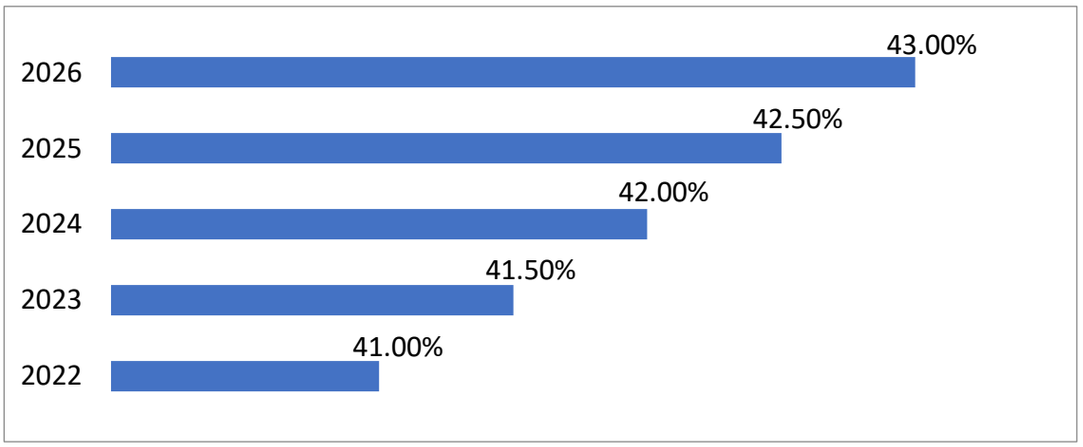


	2020	2021	2022
Pes Utara	9.65	10.5	15.96
Lemong	31.60	23.64	36.50
Karya Penggawa	21.9	20.75	16.31
Way Krui	2.2	1.25	1.4
Pes Tengah	22.7	21.38	23.65
Krui Selatan	17.15	22.4	21.05
Pes Selatan	116.45	111.57	112.2
Ngambur	17.1	23.7	28.37
Ngaras	3.2	4.05	4.75
Bangkunat	76.8	75.53	84.88

Sumber : Dinas PU dan PR, 2023

Berdasarkan pada data di atas, secara umum kondisi jalan mantab terus meningkat dari tahun 2016-2021. Walaupun bila dilihat dari peningkatan yang tidak signifikan. Kenaikan yang cenderung lambat ini dikarenakan proses peningkatan jalan menuju kondisi jalan mantab tidak berbanding lurus dengan penurunan jumlah jalan rusak. Pada tahun 2020, target jalan mantab yang ditetapkan adalah 63,66% namun baru mampu tercapai 39,93% atau hanya mampu mencapai 63,61% dari target yang ditetapkan. Sedangkan tahun 2021, target cukup tinggi pada angka 70% dan baru tercapai 39,74%.

Gambar 2.50. Target Jalan Mantab Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022-2026

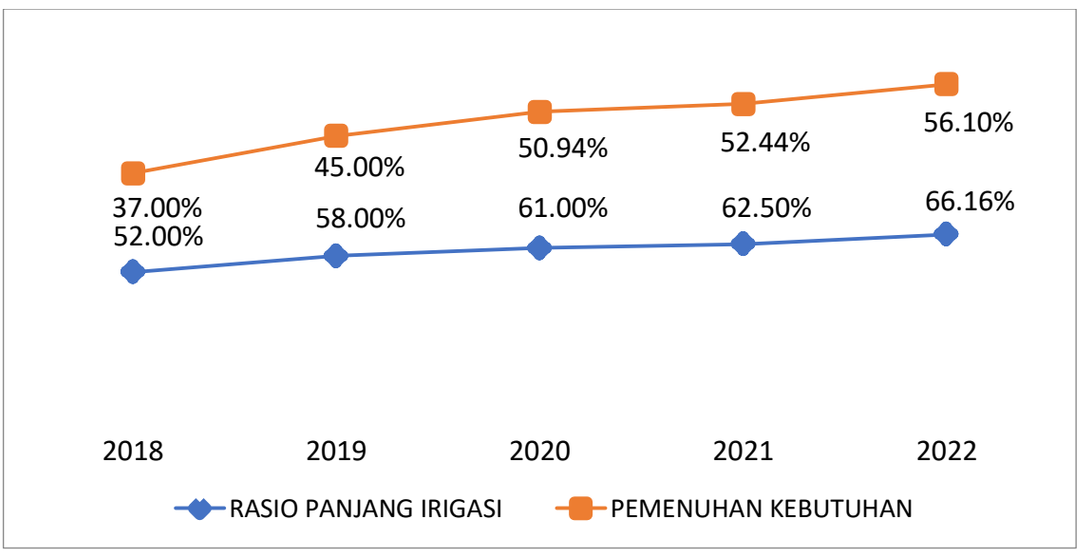


Sumber : RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026

Berdasarkan pada data target jalan mantab di atas, target yang ditetapkan selama kurun waktu 2022-2026 cenderung meningkat landai, dalam artian target tersebut dibuat dengan mempertimbangkan kondisi eksisting dengan kemampuan pendanaan daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Sebagaimana dipahami, sebagai daerah baru dan juga tertinggal, ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur daerah sangat kurang di Kabupaten Pesisir Barat. Sementara pendanaan tidak mungkin dialokasikan seluruhnya pada sektor jalan. Sehingga dapat disampaikan, bahwa permasalahan utama rendahanya capaian kondisi jalan mantab adalah pada pendanaan yang tersedia tidak berbanding lurus dengan panjang jalan yang daerah yang menjadi kewenangan.

Irigasi yang menjadi kewenangan daerah adalah 2.507Ha dan pada tahun 2022, luasan area irigasi yang dipelihara oleh Kabupaten sebesar 2.315Ha.

Gambar 2.51. Kondisi Irigasi Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022



Sumber : Dinas PU dan PR, 2023

Penyediaan Sistem Pelayanan Air Minum (SPAM) hingga tahun 2022 terus dilakukan secara bertahap dan diharapkan dapat menjangkau seluruh kecamatan yang ada. Dimana layanan diberikan melalui SPAM IKK (Ibu kota Kecamatan) dan SPAM Perdesaan.

Tabel 2.54. Penerima Manfaat Layanan SPAM Kabupaten Pesisir Barat per Kecamatan Tahun 2022

No	Kecamatan	Jumlah Layanan SPAM			
		IKK		Perdesaan	
		Perpipaan (jiwa)	Non Perpipaan (jiwa)	Perpipaan (jiwa)	Non Perpipaan (jiwa)
1	Pesisir Selatan	3.337	6.786	6.898	10.347
2	Pesisir Tengah	750	19.599	-	-
3	Pesisir Utara	2.646	-	1.256	20.183
4	Karya Penggawa	-	12.165	1.250	3.918
5	Lemong	653	1.877	4.290	6.021
6	Ngaras	-	5.268	-	4.670
7	Ngambur	-	9.139	-	13.032
8	Bangkunat	1.100	10.344	600	14.654
9	Krui Selatan	4.347	6.520	-	-
10	WayKrui	-	4.352	1.575	3.254
11	Pulau Pisang	-	1.614	-	-
	Jumlah	**12.833**	**77.664**	**14.744**	**76.079**

Sumber : Dinas PU dan PR, 2023

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Perumahan kumuh masih merupakan salah satu hal sub urusan yang perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah. Hingga tahun 2020, jumlah kawasan kumuh di Kabupaten Pesisir Barat sebanyak 14,-15% dari keseluruhan luas wilayah. Beberapa upaya dan usaha dari pemerintah daerah untuk mengurangi jumlah kawasan dan rumah kumuh terus digalakkan. Intervensi program lintas sektoral diharapkan mampu menekan angka ini.

Hingga pada tahun 2020, Kecamatan Bangkunat merupakan daerah yang paling banyak memiliki jumlah rumah tidak layak huni dengan jumlah rumah 332 unit dan menjadi 1.960 pada tahun 2021, berikutnya Kecamatan Ngambur dengan jumlah sebanyak 112 (2020) dan 1.445 (2021) unit rumah tidak layak huni dan Kecamatan Pesisir Selatan dengan dengan jumlah 101 (2020) dan 572 (2021) unit.

Tabel 2.55. Jumlah Rumah Layak Huni Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020-2022

No	Kec	Jumlah Rumah (Unit)								
		Layak Huni			Tidak Layak Huni			Total Rumah		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	Pesisir Tengah	5.499	5,499		41	27		5.540	5,526	
2	Pesisir Selatan	6.534	6,534		101	572		6.635	7,106	
3	Lemong	2.925	2,925		105	335		3.030	3,260	
4	Pesisir Utara	2.202	2,202		206	181		2.408	2,383	

No	Kec	Jumlah Rumah (Unit)								
		Layak Huni			Tidak Layak Huni			Total Rumah		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
5	Karya Penggawa	3.997	3,997		117	204		4.114	4,201	
6	Pulau Pisang	404	404		28	20		432	424	
7	Way Krui	2.375	2,375		74	211		2.449	2,586	
8	Krui Selatan	2.604	2,604		113	127		2.717	2,731	
9	Ngambur	4.695	4,695		112	1,445		4.807	6,140	
10	Ngaras	2.292	2,292		50	175		2.342	2,467	
11	Bangkunat	5.849	5,849		332	1,960		6181	7,809	
	Jumlah	**39.376**	**39,376**	**37.106**	**2.530**	**5,191**	**8.242**	**41.906**	**44.633**	**45.348**

Sumber : Dinas PR dan KP, 2023 (data diolah)

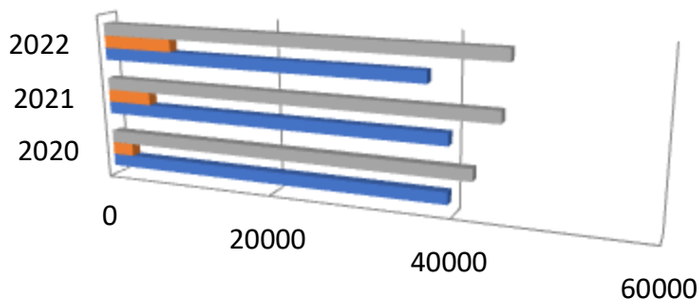
Jumlah rumah di Kabupaten Pesisir Barat terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2022 sebanyak 45.348 rumah terdata dari sebelumnya 44.633 rumah. Sayangnya, kenaikan jumlah rumah ini juga diiringi dengan kenaikan jumlah RTLH dari 5.191 rumah menjadi 8.242 rumah dan menurunnya jumlah rumah layak huni dari 39.376 rumah menjadi 37.106 rumah. Terlebih, pada tahun 2022, pemerintah daerah tidak menganggarkan bantuan untuk penanganan RTLH.

Tabel 2.56. Jumlah Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017-2022

No	Kecamatan	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pesisir Tengah	0	0	66	218	0	0
2	Pesisir Selatan	0	0	455	0	0	0
3	Lemong	0	281	99	0	0	0
4	Pesisir Utara	0	78	6	0	0	0
5	Karya Penggawa	174	18	9	0	0	0
6	Pulau Pisang	0	46	0	0	0	0
7	Way Krui	0	0	8	0	0	0
8	Krui Selatan	0	164	9	0	0	0
9	Ngambur	214	0	10	47	60	0
10	Ngaras	0	0	0	250	0	0
11	Bangkunat	0	322	6	0	0	0
	Jumlah	**987**	**909**	**668**	**515**	**60**	**0**

Sumber : Dinas PR dan KP, 2023

Gambar 2.52. Jumlah Rumah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020-2022



	2020	2021	2022
Total	41906	44633	45348
Tidak Layak	2530	5191	8242
Layak	39376	39376	37106

Sumber : Dinas PR dan KP, 2023

Sementara untuk data luasan wilayah kumuh secara total untuk Kabupaten Pesisir Barat sebanyak 110 Ha dengan sebaran titik kawasan permukiman sebanyak 61 titik dan tersebar di 3 kecamatan (lokasi yang sudah ditetapkan yaitu Kecamatan Pesisir Tengah, Pesisir Utara dan Bangkunat). Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020-2021:

Tabel 2.57. Data Kawasan Kumuh Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2022

No	Kecamatan	Kawasan Kumuh Kabupaten	
		Kawasan Permukiman (Titik)	Luas Kawasan Permukiman (Ha)
1	Pesisir Tengah	12	28,26
2	Pesisir Selatan	0	0,00
3	Lemong	0	0,00
4	Pesisir Utara	17	27,65
5	Karya Penggawa	0	0,00
6	Pulau Pisang	0	0,00
7	Way Krui	0	0,00
8	Krui Selatan	0	0,00
9	Ngambur	0	0,00
10	Ngaras	0	0,00
11	Bangkunat	32	54,79
	Jumlah	**61**	**110,7**

Sumber : Dinas PR dan KP, 2023

Lebih lengkap, data kawasan kumuh sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Bupati Pesisir Barat dengan SK Nomor: B/138/KPTS/V/01/HK-PSB/2021 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2021 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.58. Delineasi Kawasan Kumuh Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021/2022

Luas (Ha)	RT/RW/Dusun	Pekon	Kecamatan	Nilai kekumuhan	Tingkat kekumuhan
9.75	Sidodadi	Pagar Bukit	Bengkunat	79	Tinggi
2.43			Bengkunat	79	Tinggi
2.14	Sukamaju		Bengkunat	88	Tinggi
1.30	Talang Gisting	Tanjung Rejo	Bengkunat	85	Tinggi
0.32	Tanjung Rejo II		Bengkunat	81	Tinggi
3.17	Tanjung Rejo I		Bengkunat	73	Tinggi
0.44			Bengkunat	73	Tinggi
2.52			Bengkunat	73	Tinggi
0.67			Bengkunat	73	Tinggi
1.40	Dusun I	Pagar Bukit Induk	Bengkunat	65	Sedang
3.62	Dusun IV		Bengkunat	79	Tinggi
0.69	Sukoharjo I	Pemerihan	Bengkunat	83	Tinggi
0.35	Rejomukti		Bengkunat	89	Tinggi
1.08	Sukoharjo II		Bengkunat	65	Sedang
3.05			Bengkunat	63	Sedang
3.26	Srimulyo I		Bengkunat	63	Sedang
0.65			Bengkunat	63	Sedang
1.42			Bengkunat	63	Sedang
0.95			Bengkunat	63	Sedang
0.49	Gunung Sari		Bengkunat	84	Tinggi
2.28	Srimulyo II		Bengkunat	73	Tinggi
1.32	Way Heni	Penyandingan	Bengkunat	83	Tinggi
1.69	Sumberjo IV		Bengkunat	59	Sedang
1.96	Sumberejo III	Sumberejo	Bengkunat	70	Sedang
1.45	Sumberejo I	Sumberjo	Bengkunat	75	Tinggi
2.86	Rejosari	Penyandingan	Bengkunat	79	Tinggi
0.43	Pemangku 4	Kota Jawa	Bengkunat	69	Sedang
0.75			Bengkunat	83	Tinggi
0.87	Pemangku III	Sukanegeri	Bengkunat	69	Sedang
0.76			Bengkunat	69	Sedang
0.42			Bengkunat	69	Sedang
0.30			Bengkunat	69	Sedang
0.71	Pasar Ulu I	Kel.Pasar Kota Krui	Pesisir Tengah	56	Sedang
2.29			Pesisir Tengah	56	Sedang
2.88	Pahmungan	Pahmungan	Pesisir Tengah	51	Sedang
1.14			Pesisir Tengah	51	Sedang
5.75	Way Batu	Kel.Pasar Kota Krui	Pesisir Tengah	59	Sedang
4.23			Pesisir Tengah	59	Sedang
2.05	Tanah Lapang	Kampung Jawa	Pesisir Tengah	57	Sedang
2.34	Pemangku III		Pesisir Tengah	59	Sedang
3.72	Seray	Seray	Pesisir Tengah	47	Sedang
0.76	Sukatani	Rawas	Pesisir Tengah	75	Tinggi
1.54	Sukatani		Pesisir Tengah	75	Tinggi
0.85	Way Redak	Way Redak	Pesisir Tengah	57	Sedang
0.44	Pemancar	Pemancar	Pesisir Utara	67	Sedang
0.30			Pesisir Utara	67	Sedang
0.40	Gedau	Gedau	Pesisir Utara	66	Sedang
0.73			Pesisir Utara	66	Sedang
0.91			Pesisir Utara	66	Sedang
0.47	Batu Raja	Batu Raja	Pesisir Utara	62	Sedang
0.34	Kota Karang	Kota Karang	Pesisir Utara	67	Sedang
2.03			Pesisir Utara	67	Sedang
1.79	Way Narta	Way Narta	Pesisir Utara	59	Sedang

2.98	Kerbang Dalam	Kerbang Dalam	Pesisir Utara	62	Sedang
2.48	Balam	Balam	Pesisir Utara	66	Sedang
3.35	Kerbang Langgar	Kerbang Langgar	Pesisir Utara	67	Sedang
0.79	Negeri Ratu	Negeri Ratu	Pesisir Utara	65	Sedang
1.87			Pesisir Utara	65	Sedang
1.47	Kuripan	Kuripan	Pesisir Utara	63	Sedang
3.51	Padang Rindu	Padang Rindu	Pesisir Utara	61	Sedang
3.79	Walur	Walur	Pesisir Utara	49	Sedang

Sumber : Dinas PR dan KP, 2023

5. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Sehubungan dengan adanya kondisi ketentraman dan ketertiban, maka perlu diadakan pembinaan terhadap ketentraman dan ketertiban di daerah secara terencana dan terpadu. Kondisi ketentraman dan ketertiban yang mantap dalam masyarakat akan mendorong terciptanya stabilitas nasional dan akan menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di daerah maupun pelaksanaan pembangunan daerah. Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seirama dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketentraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh lapisan masyarakat.

Demi tercapainya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dan adil bagi setiap warga masyarakat dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, maka dalam menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum harus didukung oleh aparatur negara. Salah satu aparatur negara di daerah ialah Satuan Polisi Pamong Praja atau yang sering disingkat dengan Satpol PP. Satpol PP di Kabupaten Pesisir Barat dalam nomenklaturnya bergabung dengan Satuan Pemadam Kebakaran dengan tugas utama untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Fungsi utamanya adalah dengan memastikan penegakan perda dan peraturan kepala daerah termasuk konflik sosial yang terjadi. Berdasarkan pada data terkait dengan konflik sosial, di Kabupaten Pesisir Barat pada dasarnya konflik sosial yang terjadi masih bersifat lokal dan tidak membawa isu SARA (Suku, Agama dan RAS).

Tabel 2.59. Konflik Sosial dan Pelanggaran Perda Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
I	**Konflik Sosial**					
1	Jumlah Kejadian	0	1	0	0	1
2	Penyelesaian Kejadian	0	1	0	0	1
II	**Pelanggaran Perda**					
1	Jumlah Kejadian	21	33	4	35	6
2	Penyelesaian Kejadian	13	24	3	35	6

Sumber : Satpol PP dan Damkar, 2023

Kabupaten Pesisir Barat tidak luput dari kejadian bencana, baik bencana alam maupun bencana non-alam. Hal ini dapat dilihat dari sisi topografi dan geografi daerah yang tergolong ke dalam daerah rawan bencana.

Tabel 2.60. Kondisi Daerah Rawan Bencana di Kabupaten Pesisir Barat

No	Kecamatan	Rawan Banjir	Rawan Gunung Meletus	Rawan Longsor	Rawan Gempa Bumi	Rawan Tsunami
1	Pesisir Tengah	6	0	5	1	1
2	Pesisir Selatan	14	0	15	1	1
3	Lemong	2	0	13	1	1
4	Pesisir Utara	3	0	11	1	1
5	Karya Penggawa	12	0	0	1	1
6	Pulau Pisang	0	0	1	1	1
7	Way Krui	8	0	6	1	1
8	Krui Selatan	9	0	8	1	1
9	Ngambur	4	0	3	1	1
10	Ngaras	8	0	7	1	1
11	Bangkunat	5	0	8	1	1

Sumber : BPBD, 2023

Berdasarkan pada data tahun 2022, kejadian bencana yang sering terjadi di Kabupaten Pesisir Barat hampir semuanya masih bersifat lokal/kecamatan dan/atau maksimal kabupaten. Hal ini dapat dilihat dari kejadian yang telah lalu, dimana daerah-daerah yang terkena bencana sifatnya kecil (lokal) dalam lingkup desa/pekon hingga maksimal beberapa desa/pekon atau kecamatan sebab tidak sampai mangakibatkan adanya evakuasi penduduk secara masif. Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat melalui dinas/instansi terkait (Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Satpol PP dan Damkar, Dinas Sosial dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) secara umum masih mampu untuk menangani bencana-bencana dimaksud.

Pada tahun 2022 setidaknya telah terjadi 70 kasus bencana, yang secara lebih lengkap dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.61. Data Kejadian Bencana di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022

No	Kejadian Bencana	Lokasi	Keterangan
1	14 Januari 2022, Gempa Bumi	Pusat gempa di sebelah barat daya Kota Pandeglang, Banten	Terjadi gempa bumi dengan skala 6,6 SR, berpusat di laut arah barat daya Jota Pandeglang, Banten yang turut drasakan getarannya di sebagian wilayah Pesisir Barat
2	5 Februari 2022, Banjir	Pekon Sukarame, Tenumbang, Kec. Pesisir Selatan	Terjadi kejadian banjir luapan di titik wilayah pekon - pekon terdampak. Tak ada korban jiwa dalam kejadian ini hanya saja rumah tergenang.

No	Kejadian Bencana	Lokasi	Keterangan
3	5 Februari 2022, Tanah Longsor	KM 20 Jalan lintas Liwa-Krui	Terjadi kejadian tanah longsor yang menyebabkan longsoran menutupi badan jalan dengan ketinggian 3 meter sepanjang 10 meter.
4	6 Februari 2022, Cuaca Ekstrim	Jalan lintas barat sedayu bangkunat	Terjadi kejadian pohon tumbang diwilayah Jalur Sedayu – Bangkunat yang menyebabkan lumpuh total alur lalu lintas. Petugas BPBD melakukan pembersihan dan evakuasi badan jalan
5	7, Februari 2022, Cuaca Ekstrim	Way Sindi Asahan, Karya Penggawa	Terhadi pohon tumbang yang mengakibatkan arus lalu lintas terhambat.
6	17 Februari 2022, Kebakaran	Pekon Negeri Ratu Ngambur, Ngambur	Terjadi kebakaran 1 unit rumah atas nama Bapak Murzaidi
7	22 Februari 2022, Cuaca Ekstrim	Jalan lintas Liwa – Krui	Terjadi kejadian pohon tumbang di jalur lintas Liwa Krui yang menyebabkan terganggunya alur lalu lintas. Petugas BPBD melakukan pembersihan badan jalan.
8	28 Februari 2022, Kebakaran	Pekon Gedung Cahaya Kuningan, Ngambur	Terjadi kejadian kebakaran 2 unit rumah a.n Misnan dan Katini dengan total kerugian mencapai 90 jt
9	20 Maret 2022, Gelombang Pasang/Abrasi	Pekon Marang, Pesisir Selatan	Terjadi peristiwa kapal nelayan hanyut di tengah laut akibat mati mesin. Petugas BPBD bersama dengan pihak terkait melakukan penyelamatan.
10	20 Maret 2022, Cuaca Ekstrim	Km 9 Jalur Liwa – Krui	Terjadi kejadian pohon tumbang diwilayah Jalur Liwa – Krui yang menyebabkan lumpuh total alur lalu lintas. Petugas BPBD melakukan pembersihan dan evaukuasi badan jalan hinga akhirnya jalan kembali normal.
11	10 April 2022, Gelombang Pasang/Abrasi	Pekon Way Batang, Lemong	Terjadi peristiwa 1 korban tenggelam di laut dan meninggal dunia
12	4 Mei 2022, Gelombang Pasang/Abrasi	Pekon Walur, Pesisir Utara	Terjadi peristiwa 2 korban tenggelam di pantai benawang pekon walur kecamatan pesisir utara dan meninggal dunia

No	Kejadian Bencana	Lokasi	Keterangan
13	26 Mei 2022, Gelombang Pasang/Abrasi	Bangkunat, Muara Tamiyang	Terjadi peristiwa 1 korban terseret arus ombak dan tenggelam, diketemukan mengapung meninggal dunia
14	25 Juni 2022, Cuaca Ekstrim	Pal 6 jalur liwa krui	Terjadi peristiwa pohon tumbang mengakibatkan arus lalu lintas sempat terhenti. Petugas BPBD melakukan pembersihan
15	29 Juni 2022, Cuaca Ekstrim	Pekon waysindi, karya penggawa	Terjadi peristiwa pohon tumbang mengakibatkan arus lalu lintas sempat terhenti. Petugas BPBD melakukan pembersihan
16	6 Juli 2022, Gelombang Pasang/Abrasi	Laut Siging, Kec. Bangkunat	Terjadi peristiwa 1 korban tenggelam dan meninggal dunia
17	12 Juli 2022, Gempa Bumi	Barat Daya Tangamus, Lampung	Terjadi gempabumi dengan skala 5,1 SR, berpusat di laut arah Barat Daya Tangamus, Lampung yang getarannya dirasakan sebagian wilayah Pesisir Barat
18	20 Juli 2022, Gempa Bumi	Barat Daya Seluma, Bengkulu	Terjadi gempabumi dengan skala 5,1 SR, berpusat di laut arah Barat Daya Seluma, Bengkulu yang getarannya dirasakan sebagian wilayah Pesisir Barat
19	25 Juli 2022, Kebakaran	Dusun Citta Mulya, Pekon Way Haru, Kec, Bangkunat	Terjadi kebakaran 1 unit rumah atas nama Bapak Hendri
20	31 Juli 2022, Cuaca Ekstrim	Jalan Lintas Liwa Krui, Pal 9, Dusun 4 Pekon Labuhan Mandi	pohon tumbang akibat angin kencang menimpa kabel listrik PLN di Jalan Lintas Liwa Krui, Pal 9, Dusun 4 Pekon Labuhan Mandi
21	13 Agustus 2022, Cuaca Ekstrim	Jalan Liwa-Krui Pal 7 Pekon Labuhan Mandi.	Hujan lebat yg terjadi di sekitar Kab. Pesisir Barat khususnya lokasi terdampak pohon tumbang di Jalan Liwa-Krui Pal 7 Pekon Labuhan Mandi menyebabkan Pohon Tumbang. Sempat terjadi macet total disekitar lokasi.
22	23 Agustus 2022, Gempa Bumi	Barat Daya Kaur, Bengkulu	Terjadi gempabumi dengan skala 6,5 SR, berpusat di laut arah Barat Daya Kaur, Bengkulu yang getarannya dirasakan sebagian wilayah Pesisir Barat

No	Kejadian Bencana	Lokasi	Keterangan
23	24 Agustus 2022, Gempa Bumi	Barat Daya Pesisir Barat, Lampung	Terjadi gempabumi dengan skala 5,0 SR, berpusat di laut arah Barat Daya Pesisir Barat, Lampung
24	29 Agustus 2022, Tanah Longsor	Jalan Liwa-Krui Dusun 3 Pekon Labuhan Mandi Kec. Way Krui Kab. Pesisir Barat, Lampung	Hujan tidak kunjung reda di sekitar lokasi menyebabkan terjadi Longsor dan Pohon Tumbang hingga menutup jalan.
25	4 September 2022, Gempa Bumi	Barat Daya Pesisir Barat, Lampung	Terjadi gempabumi dengan skala 5,1 SR, berpusat di 49km Barat Daya Pesisir Barat, Lampung
26	5 September 2022, Gempa Bumi	Barat Daya Pesisir Barat, Lampung	Terjadi gempabumi dengan skala 4,6 SR, berpusat di 63km Barat Daya Pesisir Barat, Lampung
27	9 September 2022, Gelombang Pasang/Abrasi	Pantai Karang Nyimbor, Pekon Tanjung Setia, Kec. Pesisir Selatan	1 Nelayan sedang mencari ikan terbawa arus pada saat Gelombang Tinggi dan meninggal dunia
28	13 September 2022, Gempa Bumi	Barat Daya Tangamus, Lampung	Terjadi gempabumi dengan skala 4,9 SR, berpusat di 53km Barat Daya Tangamus, Lampung yang getarannya dirasakan sebagian wilayah Pesisir Barat
29	15 September 2022, Kebakaran	Pekon Penggawa Lima Ilir, Kec. Way Krui	kebakaran disebabkan konsleting listrik dan menimpa 3 rumah warga atas nama Aprizal, Amrul Haq dan Arifin
30	21 September 2022, Tanah Longsor	Jalan Liwa-Krui Dusun 3 Pekon Labuhan Mandi Kec. Way Krui	Hujan deras dengan durasi lama dan disertai angin menyebabkan Tanah Longsor bekas Longsoran sebelumnya
31	24 September 2022, Banjir	Pekon Negeri Ratu Ngaras, Pekon Rajabasa, Pekon Bandarjaya, Pekon Mulangmaya, Pekon Pardasuka, Kec. Ngaras	dipicu hujan intensitas tinggi dan durasi lama menyebabkan banjir yang mengenangi 191 Rumah Warga dari 5 Pekon di Kec. Ngaras dengan ketinggian air sekitar 100cm
32	5 Oktober 2022, Banjir	Pekon Walur, Kec. Krui Selatan	Genangan dan Saluran drainase belum memadai, tinggi mencapai 20 cm - 40 cm yang menutupi bahu jalan utama wisata walur mengakibatkan 30 Rumah Warga terendam. Banjir juga menghambat akses jalan wisata.

No	Kejadian Bencana	Lokasi	Keterangan
33	5 Oktober 2022, Cuaca Ekstrim	Jl. Lintas Barat Km 28 Hutan Kawasan Sedayu, Kec. Bangkunat	Hujan yg melanda dari Malam hingga Dini hari menyebabkan Pohon Tumbang yg menutupi bahu jalan dan menghambat akses jalan.
34	6 Oktober 2022, Cuaca Ekstrim	Pekon Padang Dalam, Kec. Ngaras	Hujan deras dengan durasi lama dan disertai angin menyebabkan Pohon Tumbang yg menutup akses jalan hingga macet
35	6 Oktober 2022, Tanah Longsor	Pal 10 dan Pal 11 Pekon Labuhan Mandi, Kec. Way Krui	Hujan deras dengan durasi lama dan disertai angin menyebabkan Longsor dan Pohon Tumbang yg menutup akses jalan hingga macet
36	12 Oktober 2022, Banjir	Pekon Sukarame, Tenumbang, Kec. Pesisir Selatan	Hujan deras dengan durasi lama dan disertai menyebabkan meluapnya Way Tenumbang hingga menggenangi 20 rumah warga dan bahu jalan, banjir setinggi 100 cm -150 cm
37	12 Oktober 2022, Banjir	Pekon Suka Mulya, Kec. Lemong	Hujan lebat yang terjadi sejak pagi hingga sore menyebabkan banjir dan amblasnya jembatan di pemangku 4 simpang lunik sehingga lumpuhnya aktifitas masyarakat.
38	14 Oktober 2022, Banjir	Pekon Kota Batu, Pekon Negeri Ratu Ngaras, Pekon Rajabasa, Pekon Bandarjaya, Pekon Mulangmaya, Pekon Pardasuka, Kec. Ngaras	Hujan deras dengan durasi lama dan disertai menyebabkan meluapnya Way Ngaras diperkirakan ratusan rumah warga tinggi banjir sekitar 100 cm -150 cm
39	14 Oktober 2022, Banjir	Pekon Sukabanjar, Kec. Ngambur	Hujan deras dengan durasi lama dan disertai menyebabkan meluapnya Way Ngambur dan diperkirakan puluhan rumah warga dan 1 sekolah tergenang, tinggi banjir sekitar 100 cm -150 cm

No	Kejadian Bencana	Lokasi	Keterangan
40	17 Oktober 2022, Banjir	Pekon Tembakak Way Sindi, Kec. Karya Penggawa	Hujan deras dengan durasi lama dan disertai menyebabkan debit air Way Tembakak menjadi tinggi dan meluap sehingga terjadi abrasi. 2 Perahu Nelayan, 14 rumah, 1 Masjid, 2 Sekolah, 1 Balai Pekon, 1 Gardu PLN dan 4 Jembatan terdampak.
41	17 Oktober 2022, Banjir	Pekon Laay, Kec. Karya Penggawa	Hujan deras dengan durasi lama dan disertai menyebabkan debit air Way Laay menjadi tinggi dan meluap sehingga terjadi abrasi sungai dan amblasnya sebagian Jalan Jembatan Way Laay (Ruas Jalan Nasional)
42	17 Oktober 2022, Banjir	Pekon Gedau, Kec. Pesisir Utara	Hujan deras dengan durasi lama menyebabkan meluapnya Way Gedau sehingga menyebabkan banjir bandang. Banjir menyebabkan saluran pipa air bersih terputus, saluran irigasi rusak dan menggenang area persawahan.
43	20 Oktober 2022, Banjir	Pekon Baturaja dan Pekon Kerbang Langgar, Kec. Pesisir Utara	Hujan dengan intensitas tinggi dan durasi lama mengakibatkan banjir bandang pada sejumlah aliran sungai di Pekon Baturaja dan Pekon Kerbang Langgar. Debit air juga mengikis pondasi jembatan di Pekon Baturaja
44	22 Oktober 2022, Tanah Longsor	Jalan Liwa-Krui Pal 5 Pekon Labuhan Mandi, Kec. Way Krui	Hujan deras dengan durasi lama dan disertai angin menyebabkan Longsor dan Pohon Tumbang yg menutup akses jalan hingga macet.
45	25 Oktober 2022, Tanah Longsor	Pekon Bandar Pugung, Kecamatan Lemong	Hujan deras dengan durasi lama dan disertai angin menyebabkan Longsor dan Pohon Tumbang yg menutup akses jalan hingga macet
46	26 Oktober 2022, Cuaca Ekstrim	Pekon Seray, Kec. Pesisir Tengah	Hujan deras dengan durasi lama dan disertai angin menyebabkan Pohon Tumbang yg menutup bahu jalan di sekitar jalur wisata pekon walur.

No	Kejadian Bencana	Lokasi	Keterangan
47	26 Oktober 2022, Cuaca Ekstrim	Jalan Liwa-Krui Pal 5 Pekon Labuhan Mandi, Kec. Way Krui	Hujan deras dengan durasi lama dan disertai angin menyebabkan Pohon Tumbang yg menutup bahu jalan
48	27 Oktober 2022, Cuaca Ekstrim	Jalan Lintas Barat KM 23, Kec. Bangkunat	Hujan deras dengan durasi lama dan disertai angin menyebabkan Pohon Tumbang yg menutup bahu jalan
49	27 Oktober 2022, Tanah Longsor	Jalan Lintas Barat KM 18, Pekon Pemerihan, Kec. Bangkunat	Hujan deras dengan durasi lama dan disertai angin menyebabkan Longsor dan Pohon Tumbang yg menutup akses jalan hingga macet
50	27 Oktober 2022, Tanah Longsor	Jalan Lintas Barat KM 20 Kec. Bangkunat	Hujan deras dengan durasi lama dan disertai angin menyebabkan Longsor dan Pohon Tumbang yg menutup akses jalan hingga macet
51	27 Oktober 2022, Cuaca Ekstrim	Jalan Liwa-Krui Pal 5 Pekon Labuhan Mandi, Kec. Way Krui	Hujan deras dengan durasi lama dan disertai angin menyebabkan Pohon Tumbang yg menutup bahu jalan
52	27 Oktober 2022, Banjir	Pekon Padang Raya dan Pekon Balai Kencana, Kec. Krui Selatan	Hujan deras yang tak kunjung reda serta belum memadainya saluran drainase menyebabkan terjadinya Genangan banjir. Beberapa rumah warga, kebun dan sawah terdampak banjir.
53	10 November 2022, Cuaca Ekstrim	Tanjakan Kapur, Jalan Lintas Barat Kota Agung-Krui, Kec. Bangkunat	Dipicu oleh intensitas curah hujan yang cukup tinggi disertai angin menyebabkan Pohon Tumbang yg menutupi bahu jalan pada pagi hari
54	12 November 2022, Cuaca Ekstrim	Jalan Lintas Liwa-Krui Pal 8, Pekon Labuhan Mandi, Way Krui	Dipicu oleh intensitas curah hujan yang cukup tinggi disertai angin menyebabkan Pohon Tumbang yg menutupi bahu jalan pada pagi hari
55	13 November 2022, Cuaca Ekstrim	Jalan Lintas Liwa-Krui Pal 8, Pal 9, dan Pal 11 Pekon Labuhan Mandi, Way Krui	Dipicu oleh intensitas curah hujan yang cukup tinggi disertai angin menyebabkan Pohon Tumbang di 3 titik di Pekon Labuhan Mandi

No	Kejadian Bencana	Lokasi	Keterangan
56	13 November 2022, Banjir	Pekon Baturaja Kec. Pesisir Utara	Dipicu oleh Hujan dengan Intensitas Tinggi dan Durasi Lama mengakibatkan banjir bandang pada aliran sungai di Way Singarupa Pekon Baturaja. Jembatan Way Singarupa yang sebelumnya pondasinya terkikis oleh abrasi kembali terkikis oleh banjir bandang sehingga sebagian bahu jalan harus ditutupi rambu-rambu lalu lintas. Akses lalu lintas hanya bisa dilewati kendaraan bermotor dan pejalan kaki sedangkan kendaraan R4 dan R6 dilarang melintas.
57	13 November 2022, Banjir	Pekon Tenumbang Kec. Pesisir Utara	Hujan dengan intensitas tinggi dan durasi lama mengakibatkan banjir bandang pada aliran sungai Way Tenumbang
58	13 November 2022, Banjir	Pekon Penengahan dan Pekon Laay, Kec. Karya Penggawa	Curah hujan dengan intensitas tinggi dan durasi yang lama mengakibatkan debit air Way La'ay menjadi tinggi dan meluap hingga terjadi banjir bandang yang berdampak pada kerusakan dan kerugian yang dialami warga.
59			**Pekon Penengahan:** *kerusakan tanggul daerah aliran sungai sepanjang 125 meter *5 Unit Rumah Warga mengalami Rusak Ringan karena terseret arus banjir **Pekon Laay:** *Jembatan La'ay terputus dan menghambat akses jalan lalu lintas *7 unit Warung/Kios Warga Hanyut, 3 Unit Rumah Rusak Berat, 3 Unit Rumah Rusak Ringan, 1 Unit Fasilitas Umum (Masjid AL-MUHAJIRIN), dan merendam 60 Rumah Warga serta Sawah milik warga seluas 5 Hektar

No	Kejadian Bencana	Lokasi	Keterangan
60	13 November 2022, Tanah Longsor	Dusun Way Karwi, Pekon Way Sindi Tembakak, Kec. Karya Penggawa	Curah hujan yang deras beserta angin kencang mengakibatkan tebing yang berada di sekitar lokasi kejadian longsor hingga menimbun bahu jalan dan menimpa 1 Unit Rumah Warga. 3 korban tewas akibat tertimpa reruntuhan bangunan.
61	13 November 2022, Tanah Longsor	Pekon Penengahan, Kec. Lemong	Dipicu oleh hujan dengan intensitas tinggi dan durasi lama menyebabkan longsor di yg menutupi akses jalan raya +- 20 meter dan ketinggian longsoran tanah 3 meteran. Longsor juga menimpa 1 Unit Rumah dengan kondisi Rusak Berat dan 1 Unit Kendaraan R4 yang sedang melewat
62	13 November 2022, Tanah Longsor	Pekon Malaya, Kec. Lemong	Dipicu intensitas hujan tinggi dengan durasi yang lama mengakibatkan banjir dan tanah longsor yang menimpa 1 Unit Rumah Warga atas nama Bpk. RADAM yang berada di Pemangku 04 Batu Bulan dengan kondisi Rusak Berat
63	11 Desember 2022, Cuaca Ekstrim	Jalan Ilahan Kecamatan Way Krui	Dipicu oleh angin kencang disertai hujan menyebabkan 4 Pohon Damar tumbang dan mengakibatkan akses jalan petani menuju ilahan tersendat. Pada pukul 12.00 TRC BPBD berhasil mengevakuasi Pohon
64	11 Desember 2022, Cuaca Ekstrim	Jalan Lintas Liwa-Krui Pal 6 Pekon Labuhan Mandi, Way Krui	Dipicu oleh angin kencang disertai hujan menyebabkan Pohon Tumbang di Pekon Labuhan Mandi pada sore hari sekitar pukul 16.00 menutup bahu jalan sehingga menyebabkan terhambatnya akses jalan, sekitar pukul 17.00 Tim Satlak telah berhasil mengevakuasi pohon Tumbang yang menutup bahu jalan

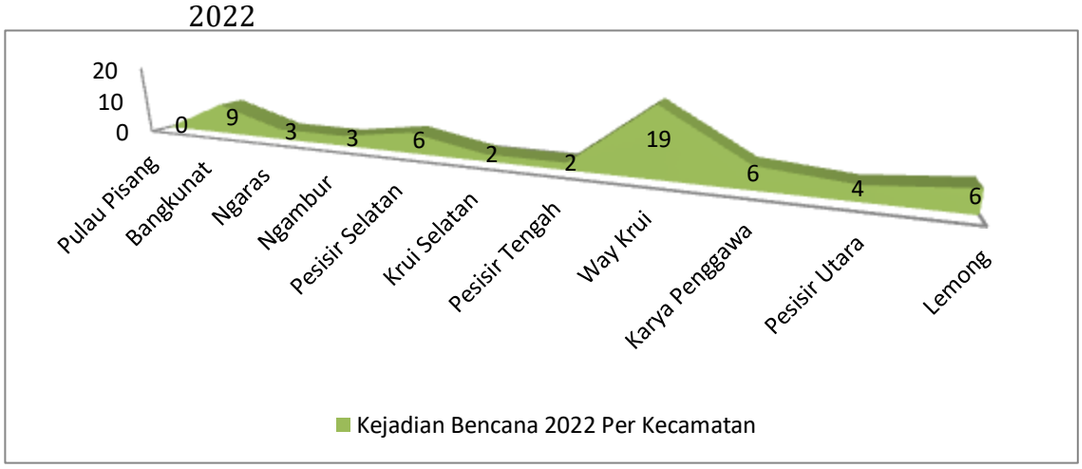
No	Kejadian Bencana	Lokasi	Keterangan
65	12 Desember 2022, Gelombang Pasang/Abrasi	Penggilingan Marang Pekon Bandar Jaya, Kec. Pesisir Selatan	1 korban nelayan tewas tenggelam akibat perahu terbalik dihantam gelombang pasang. Korban ditemukan oleh warga sekitar dalam kondisi kritis dan segera dibawa ke Puskesmas Biha, namun korban meninggal dunia
66	14 Desember 2022, Tanah Longsor	Jalan Lintas Barat Pekon Bambang, Kec. Lemong	Dipicu oleh intensitas curah hujan yang cukup tinggi disertai angin kencang mengakibatkan tanah longsor serta pohon tumbang yang menutupi akses bahu jalan hingga terjadi macet total selama 3 jam dari jam 23.00 WIB sampai pukul 02.00 WIB bisa kembali dilintasi kendaraan umum dan direncanakan besok (15/12/2022) untuk dilanjutkan pembersihan sisa longsoran menggunakan Exsapator
67	17 Desember 2022, Gempa Bumi	Barat Daya SUMUR-BANTEN	Terjadi gempa bumi dengan skala 5,2 SR, berpusat di 75Km Barat Daya SUMUR, Banten yang getarannya dirasakan sebagian wilayah Pesisir Barat
68	19 Desember 2022, Gempa Bumi	Barat Daya TANGGAMUS-LAMPUNG	Terjadi gempa bumi dengan skala 5,3 SR, berpusat di 47Km Barat Daya TANGGAMUS-LAMPUNG yang getarannya dirasakan sebagian wilayah Pesisir Barat
69	22 Desember 2022, Cuaca Ekstrim	Jalan Lintas Liwa-Krui Pal 8 Pekon Labuhan Mandi, Way Krui	Dipicu oleh angin kencang disertai hujan menyebabkan Pohon Tumbang di Pekon Labuhan Mandi pada sore hari sekitar pukul 17.45 menutup bahu jalan sehingga menyebabkan terhambatnya akses jalan, sekitar pukul 18.20 Tim Satlak telah berhasil mengevakuasi pohon Tumbang yang menutup bahu jalan

No	Kejadian Bencana	Lokasi	Keterangan
70	28 Desember 2022, Cuaca Ekstrim	Seluruh Daerah Pesisir Barat	Angin Kencang disertai hujan lebat melanda Pesisir Barat yang mengakibatkan beberapa kerusakan yang dialami masyarakat hingga koridor yang ada di Kompleks Kantor Bupati pecah dihantam Tenda yang dibawa angin kencang, gelombang laut pun ikut menghantam sebagian rumah/kios/warung masyarakat yg ada di sekitaran pantai
71	30 Desember 2022, Cuaca Ekstrim	Jalan Lintas Liwa-Krui Pal 9 Pekon Labuhan Mandi, Way Krui	Dipicu oleh angin kencang disertai hujan menyebabkan Pohon Tumbang di Pekon Labuhan Mandi pada sore hari sekitar pukul 15.20 menutup bahu jalan sehingga menyebabkan terhambatnya akses jalan, sekitar pukul 16.00 Tim Satlak telah berhasil mengevakuasi pohon Tumbang yang menutup bahu jalan

Sumber : BPBD, 2023

Berdasarkan pada data di atas, dapat dilihat bahwa kejadian bencana terbanyak pada tahun 2022 berada pada Kecamatan Way Krui dengan 19 kejadian bencana. Sementara itu Kecamatan Pulau Pisang tidak ada kejadian bencana. Jumlah terbanyak di Kecamatan Way Krui sangat dipengaruhi dengan kondisi geografis wilayahnya yang terdapat hutan TNBBS serta DAS besar yang berhulu di TNBSS. Bahwa sering terjadi tanah longsor dan pohon tumbang pada ruas jalan nasional Krui-Liwa yang membelah area TNBBS.

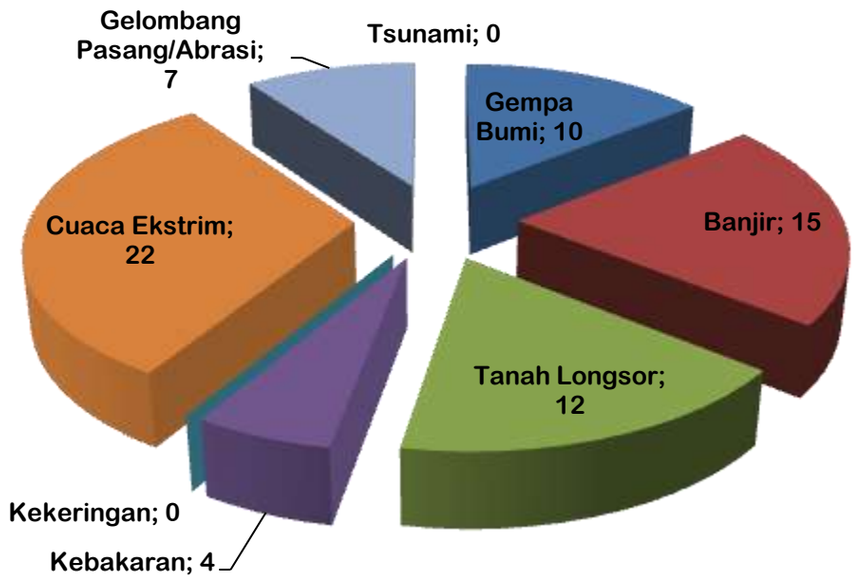
Gambar 2.53. Lokasi Bencana per Kecamatan di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022



Sumber : BPBD, 2023

Sementara itu, pada tahun 2022 kejadian bencana terbanyak adalah cuaca ekstrim sebanyak 22 kejadian yang pada akhirnya berujung pada kejadian banjir dan gelombang pasang. Berikut adalah data kejadian bencana pada tahun 2022.

Gambar 2.54. Kejadian Bencana Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022



Sumber : BPBD, 2023

Kesiapan suatu daerah dalam pencegahan dan penaggulangan bencana erat kaitannya dengan ketersediaan sarana dan prasarana. Harus diakui bahwa jumlah sarana dan prasarana pendukung mitigasi bencana di Kabupaten Pesisir Barat sangat minim, terlebih bila dibandingkan dengan luasan wilayah. Keterbatasan dana merupakan penyebab utama dari minimnya sarana dan prasarana dimaksud. Berikut ketersediaan sarana dan prasarana mitigasi bencana di Kabupaten Pesisir Barat:

Tabel 2.62. Jumlah Sarana dan Prasarana Mitigasi Bencana Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Keterangan
1	Sistem Elektronik Peringatan Dini Bencana	1 Unit	Baik
2	Sistem Elektronik Peringatan Dini Tsunami	1 Unit	Baik
3	Kendaraan Roda 2	4 Unit	Baik
4	Kendaraan Roda 4	2 Unit	1 Unit Truk Kurang Baik; 1 Unit Mobil Rescue Rusak
5	Perahu Karet	3 Unit	2 Unit Baik; 1 Unit Rusak

Sumber : BPBD, 2023

Respon time (waktu tanggap) pelayanan bencana kebakaran di Kabupaten Pesisir Barat rata-rata selama 15 menit dan masuk dalam kategori cepat, hal ini dapat dilihat pada data di bawah ini:

Tabel 2.63. Respon Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022

No	Kejadian	Respon Time (menit)	Tingkat Pelayanan
1	17 Januari 2022 Pekon Sukanegara, Kecamatan Pesisir Tengah	13	Cepat
2	19 Januari 2022 Pekon Serai, Kecamatan Pesisir Tengah	5	Cepat
3	6 Februari 2022 Pekon Kampung Jawa, Kecamatan Pesisir Tengah	10	Cepat
4	17 Februari 2022 Pekon Negeri Cahya Kuningan, Kecamatan Ngambur	10	Cepat
5	17 April 2022 Kelurahan Pasar Krui, Kecamatan Pesisir Tengah	15	Cepat
6	26 April 2022 Pekon Sukanegara, Kecamatan Way Krui	10	Cepat
7	30 Juni 2022 Pekon Padang Raya, Kecamatan Krui Selatan	15	Cepat
8	15 September 2022 Pekon Penggawa Lima Ilir, Kecamatan Way Krui	15	Cepat

Sumber : Satpol PP Damkar, 2023

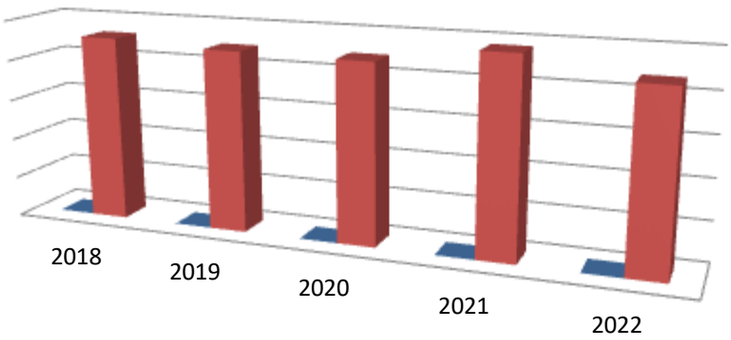
6. Sosial

Kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi di mana masyarakat tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Definisi kemiskinan ini beranjak dari pendekatan berbasis hak yang mengakui bahwa masyarakat miskin, mempunyai hak-hak dasar yang sama dengan anggota masyarakat lainnya.

Jumlah penduduk miskin Kabupaten Pesisir Barat pada tahun 2022 telah menurun dibandingkan dengan data pada tahun 2021 sebanyak 21.850 jiwa. Sebelumnya pada tahun 2021 sebanyak 24.235 jiwa atau mengalami peningkatan dibandingkan data 2020. Tahun 2020 sebanyak 22.241 jiwa penduduk miskin dan pada tahun 2019 sebanyak 23.293 jiwa, angka ini naik bila dibandingkan kondisi pada tahun 2018 yang memiliki sebanyak 22.980 jiwa penduduk miskin atau naik 313 jiwa. Data tahun 2018 bila dibandingkan dengan data tahun 2017 turun 780 jiwa bila yang sebanyak 23.760 jiwa.

Berikutnya untuk data keparahan kemiskinan Kabupaten Pesisir Barat pada tahun 2018-2022 berada pada indeks 0,40-0,50%.

Gambar 2.55. Angka Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022



	2018	2019	2020	2021	2022
Angka Kemiskinan	14.98	14.48	14.29	14.81	13.84
Jumlah Penduduk Miskin	22980	22380	22241	24235	21850

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2023

Tabel 2.64. Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2019-2021

No	Jenis-jenis PPKS	Jumlah PPKS			
		2019	2020	2021	2022
1	Anak Balita Terlantar (ABT)	6	5	8	0
2	Anak Terlantar (AT)	4	6	6	207
3	Anak yang Berhadapan dengan Hukum	6	8	5	10
4	Anak Jalanan	0	0	3	0
5	Anak dengan Kedisabilitasan (ADK)	35	0	47	28
6	Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan/ diperlakukan Salah	23	32	28	39
7	Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	0	0	0	1
8	Lanjut Usia	4562	8133	3574	2390
9	Penyandang Disabilitas	1876	259	2014	566
10	Tuna sosial	33	0	40	0
11	Gelandangan	2	2	1	0
12	Pengemis	3	2	2	0
13	Pemulung	6	13	13	0
14	Kelompok Minoritas	0	0	1	0
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)	188	232	232	0
16	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	4	2	2	17
17	Korban Penyalahgunaan NAPZA	15	16	19	60
18	Korban traficking	9	0	20	0
19	Korban tindak kekerasan	8	7	12	42
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	3	55	1	0

No	Jenis-jenis PPKS	Jumlah PPKS			
		2019	2020	2021	2022
21	Korban bencana alam	35	41	4	44
22	Korban bencana sosial	84	58	14	0
23	Perempuan rawan sosial ekonomi	98	116	127	3586
24	Fakir Miskin	89562	83327	83327	116.296
25	Keluarga masalah sosial Psikologis	0	0	0	274
26	Komunitas adat terpencil	0	0	0	0
	Jumlah	**96,562**	**92,314**	**91,799**	**123,560**

Sumber : Dinas Sosial, 2023

Hingga tahun 2022, di Kabupaten Pesisir Barat belum memiliki panti sosial, baik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan/atau swasta. Sehingga data yang disajikan seluruhnya merupakan data PPKS yang berada di luar panti.

Tabel 2.65. Data Jumlah Penduduk Lansia dan Penyandang Disabilitas Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2022

No	Kecamatan	Lansia		Penyandang Disabilitas	
		2021	2022	2021	2022
1	Lemong	865	230	1	1
2	Pesisir Utara	697	142	0	0
3	Pulau Pisang	234	40	0	0
4	Karya Penggawa	747	236	102	102
5	Way Krui	761	171	0	0
6	Pesisir Tengah	913	219	62	62
7	Krui Selatan	489	160	14	14
8	Pesisir Selatan	820	265	117	117
9	Ngambur	804	342	91	91
10	Ngaras	325	162	11	11
11	Bangkunat	1.478	423	42	42
Total		**9.233**	**2.390**	**440**	**440**

Sumber : Dinas Sosial, 2023

Tabel 2.66. Data Pekerja Sosial Profesional Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2022

No	Jenis	Tahun	
		2021	2022
1	Tenaga Kesejahternaan Sosial Kecamatan (TKSK)	11	11
2	Pekerja Sosial Kecamatan (PSM)	118	118
3	Taruna Siaga Bencana (Tagana)	16	16
4	Koordinator Kabupaten Pendamping PKH	1	1
5	Operator PKH	3	2
6	Pendamping PKH	33	34
7	Pendamping Disabilitas	1	1
8	Satuan Bakti Pekerja Sosial	1	1
Total		**184**	**184**

Sumber : Dinas Sosial, 2023

Kabupaten Pesisir Barat sebagai daerah tertinggal yang pada struktur ekonomi masyarakatnya masih bergantung pada kekayaan alam dikategorikan pada golongan daerah pedesaan. Perlu upaya dari berbagai *stake holder* dalam pengentasan kemiskinan dengan peningkatan pembangunan di daerah – daerah yang tergolong daerah tertinggal di Kabupaten Pesisir Barat dengan cara peningkatan infrastruktur dan akses juga penyediaan sarana prasarana pendidikan, kesehatan dan pertanian. Lebih lanjut indikator kinerja bidang sosial dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

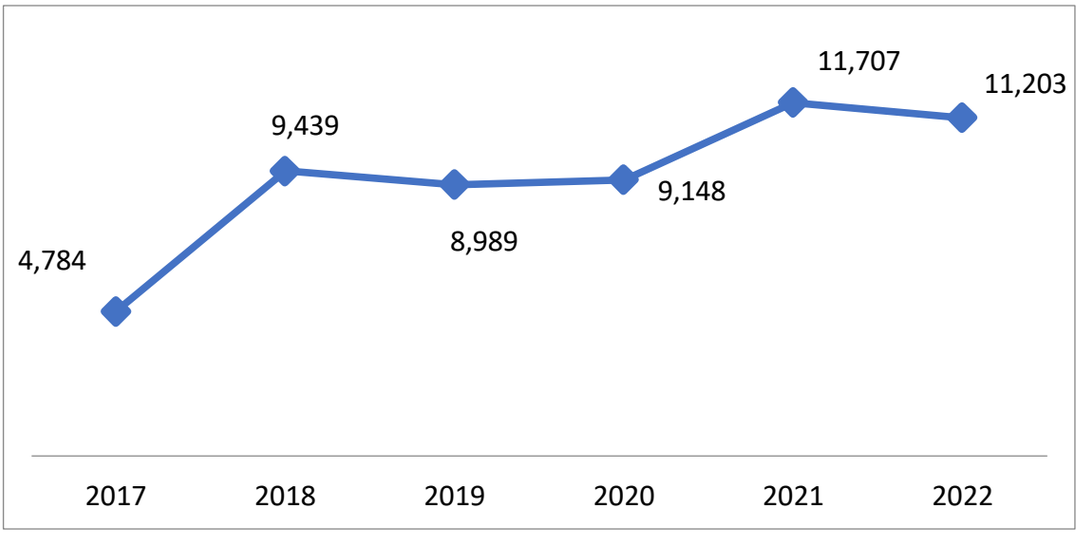
Tabel 2.67. Pencapaian Indikator Kinerja Sosial Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022

Indikator Kinerja Utama	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Tingkat Kemiskinan	Persen	14,98	14,48	14,29	14,81	13,84
Jumlah Penduduk Miskin	Jiwa	22.980	23.293	22.241	24.235	21.850
Tingkat Kedalaman Kemiskinan	Poin	0,59	0,31	0,35	0.59	0.53
Tingkat Keparahan Kemiskinan	Poin	2,61	1,60	1,80	2.39	2.22

Sumber : BPS Kabupaten, 2023

Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat terus berupaya melakukan penurunan angka kemiskinan daerah. Baik intervensi dalam bentuk program/kegiatan atau pemberian bantuan atau jaringan pengaman sosial kepada masyarakat yang membutuhkan, baik bantuan yang pendanaannya melalui pemerintah pusat dan/atau daerah. Pemerintah melalui Program Keluarga Harapan terus berupaya untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari jumlah penerima manfaat PKH dimaksud. Pada tahun 2016 jumlah Keluarga Penerima Manfaat sebanyak 4.865 orang , angka ini terkoreksi pada tahun 2017 yang berada pada jumlah 4.784 orang. Pada tahun 2018 terjadi peningkatan jumlah KPM diangka 9.439 orang namun kembali terkoreksi menjadi pada tahun 2019 menjadi 8.989 orang. Berikutnya pada tahun 2020 dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 9.149 orang. Pada tahun 2021, jumlah penerima manfaat dari PKH sebanyak 11.707 orang. Data pada tahun 2022, sebanyak 11.203 orang penerima manfaat.

Gambar 2.56. Jumlah Keluarga Penerima Manfaat di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022 (Kepala Keluarga)



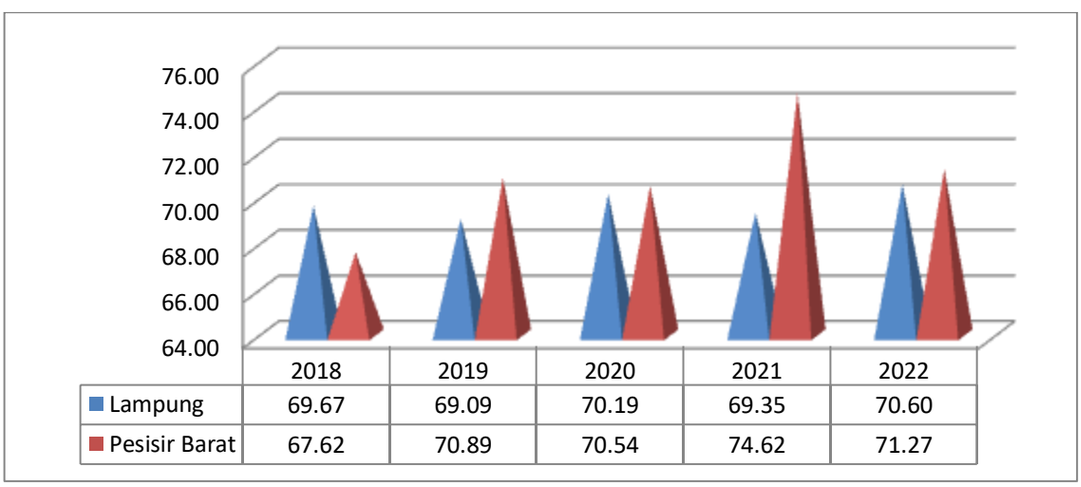
Sumber : Dinas Sosial, 2023

2.1.3.1.2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Data ketenagakerjaan untuk Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TAPK) pada tahun 2018 dengan capaian 67,62% dan tahun 2019 dengan capaian TPAK menjadi 70,89%. Pada tahun 2020 TPAK Kabupaten Pesisir Barat menurun menjadi 70,54%. Angka 70,54% ini sedikit diatas Provinsi Lampung dengan nilai TPAK 70,19%. Tahun 2021, nilai TPAK Kabupaten Pesisir Barat mencapai 74.62% atau meningkat 4,1%, capaian ini lebih baik dari Provinsi Lampung dengan nilai 69.35. pada tahun 2022, nilai TAPK daerah mengalami penurunan menjadi 71,27% dengan nilai TAPK Provinsi Lampung yang naik menjadi 70,60%. Penurunan TAPK daerah diiringi dengan kenaikan jumlah pengangguran daerah.

Gambar 2.57. Tingkat Partipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022

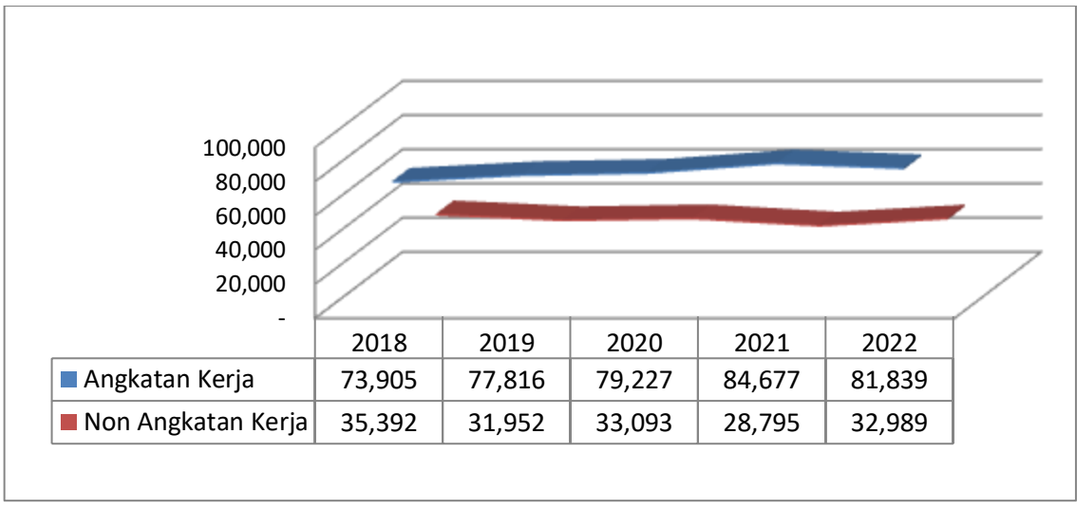


	2018	2019	2020	2021	2022
Lampung	69.67	69.09	70.19	69.35	70.60
Pesisir Barat	67.62	70.89	70.54	74.62	71.27

Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Barat, 2023

Naik turunnya data angkatan kerja akan berbanding terbalik dengan nilai bukan angkatan kerja, Kabupaten Pesisir Barat memiliki potensi angkatan kerja yang besar, berdasarkan data pada tahun 2018 sebanyak 73.905 orang (67,62%) dan meningkat menjadi 77.861 orang (70,89%) pada tahun 2019. Jumlah ini kembali meningkat pada tahun 2020 menjadi 79.227 orang (70,54%). Data tahun 2021 menunjukkan perbaikan, dengan capaian 84.677 orang atau (74.62%). Tahun 2022, jumlah Angkatan Kerja di daerah mengalami penurunan sehingga menjadi 81.839 orang (71,63%).

Gambar 2.58. Angkatan Kerja di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022



Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Barat, 2023

Jumlah penduduk yang bekerja pada tahun 2021 sebanyak 84.677 orang, dengan jumlah laki-laki sebanyak 51.762 orang dan perempuan sebanyak 32.951 orang. Data tahun 2022 sejumlah 78.786 orang, dengan jumlah laki-laki 50.178 orang dan perempuan 28.608 orang. Bila dibandingkan antara tenaga kerja laki-laki dan perempuan cenderung berimbang atau dengan perhitungan tenaga kerja laki-laki sebanyak 62-63% dan perempuan 37-38%.

Tabel 2.68. Jumlah Tenaga Kerja Persektor Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022

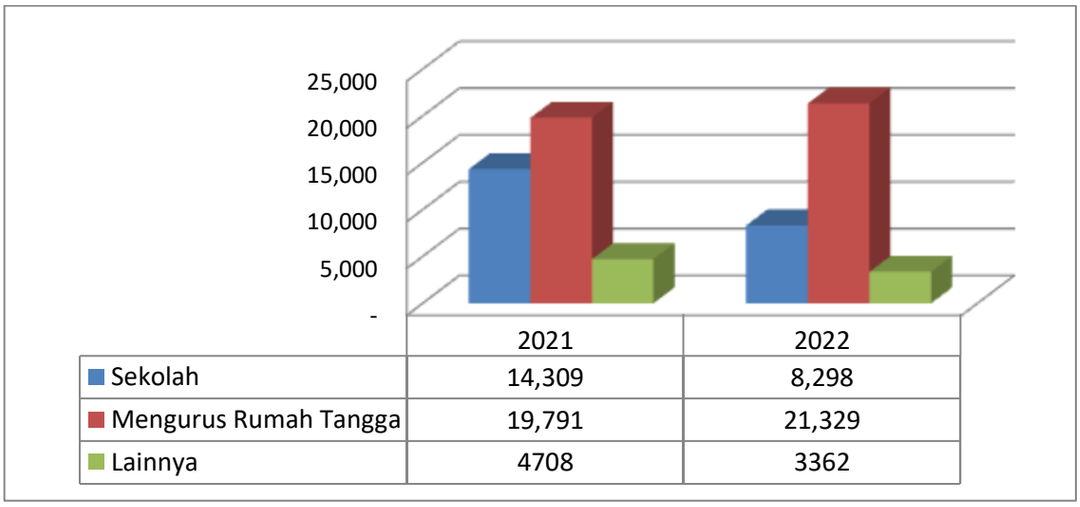
No	Sektor Pekerjaan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Pertanian	38,213	34,801	38,385	38,220	37,284
2	Manufaktur	5,739	11,618	10,842	10,856	10,818
3	Jasa	28,571	28,871	27,302	32,996	30,684
	Jumlah	**72,523**	**75,290**	**76,529**	**82.072**	**78.786**

Sumber : Dinas Trans Naker dan Perindustrian, 2023 (diolah)

Berdasarkan pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa tenaga kerja pada sektor pertanian masih mendominasi sektor pekerjaan di Kabupaten Pesisir Barat dari tahun 2018-2022. Secara umum sektor pertanian menyumbang 46-50% jumlah tenaga kerja, berikutnya sektor jasa dengan sumbangan 34-39%. Sementara itu untuk sektor manufaktur memberikan sumbangan 13-14% dari total sektor pekerjaan.

Lebih lanjut, dibawah ini adalah gambaran tentang Bukan Angkatan Kerja Kabupaten Pesisir Barat, dimana jumlah terbesar dari kelompok ini adalah orang tua yang mengurus rumah tangga, siswa/siswi atau mahasiswa/mahasiswi yang ketiga adalah bagian lainnya.

Gambar 2.59. Klasifikasi Bukan Angkatan Kerja di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2022



Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Barat, 2023

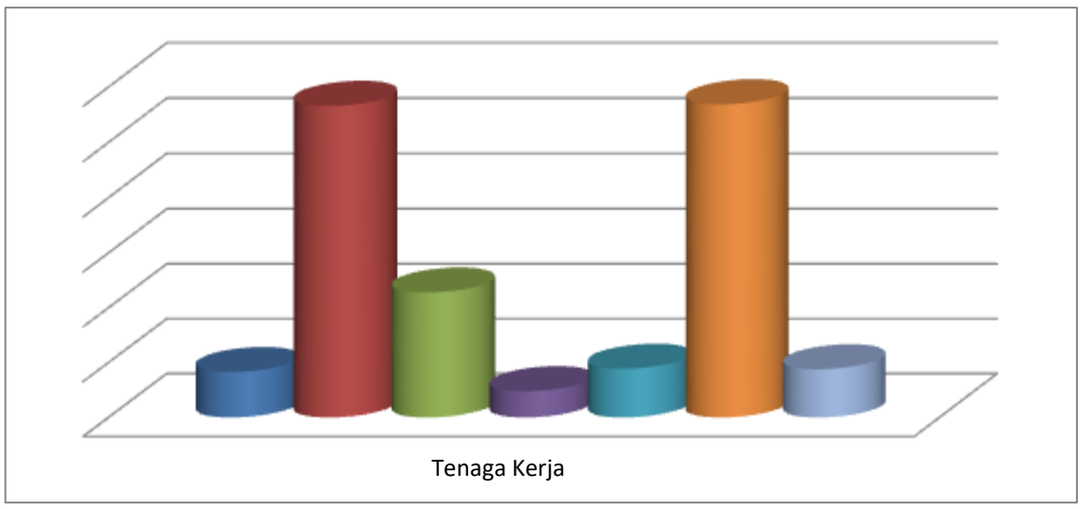
Terkait dengan data pencari kerja yang terdaftar pada pemerintah daerah melalui dinas terkait didapatkan data bahwa sebanyak 803 pencari kerja pada tahun 2022. Dari 803 orang tersebut sebanyak 643 orang telah mendapatkan pekerjaan (ditempatkan tersebar). Lebih lengkap dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.69. Jumlah Pencari Kerja AK-1 Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022

No	Bulan	Jenis Kelamin		Pendidikan				
		Laki-laki	Perempuan	SD	SMP	SMA	Diploma	Sarjana
1	Januari	22	35	1	1	53	2	0
2	Februari	8	10	0	1	14	2	1
3	Maret	9	12	0	0	19	0	2
4	April	15	30	0	4	35	0	6
5	Mei	79	109	0	6	172	3	7
6	Juni	44	36	0	1	75	0	4
7	Juli	42	69	0	0	101	1	9
8	Agustus	44	51	0	2	87	0	6
9	September	31	32	0	0	62	0	1
10	Oktober	20	41	0	1	58	0	2
11	November	19	19	0	2	30	2	4
12	Desember	13	13	0	0	21	1	4
	Jumlah	**346**	**457**	**1**	**18**	**727**	**11**	**46**

Sumber : Dinas Trans Naker dan Perindustrian, 2023

Gambar 2.60. Pelaku Usaha dan Klasifikasi Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022



Sumber : Dinas Trans Naker dan Perindustrian, 2023

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan Perempuan adalah usaha sistematis dan terencana untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Pemberdayaan perempuan ”sebagai sumber daya insani, potensi yan dimiliki perempuan dalam hal kuantitas maupun kualitas tidak dibawah laki-laki. Namun kenyataannya masih dijumpai bahwa status perempuan dan peranan permpuan dalam masyarakat masih bersifat subordinatif dan belum sebagai mitra sejajar dengan laki-laki. Tujuan pembangunan pemberdayaan perempuan untuk meningkatkan status, posisi dan kondisi perempuan agar dapat mencapai kemajuan yang setara dengan laki-laki, untuk membangun anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, dan bertaqwa serta terlindungi.

Realisasi pemberdayaan perempuan dilakukan dengan usaha-usaha: (i) Meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan di berbagai bidang kehidupan; (ii) Meningkatkan peran perempuan sebagai pengambil keputusan dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender; (iii) Meingkatkan kualitas perandan kemandirian organisasi perempuan dengan mempertahankan nilai persatuan dan kesatuan; (iv) Meningkatkan komitmen dan kemampuan semua lembaga yang memperjuangkan kesetaraan dan kaeadilan gender; (v) Mengembangkan usaha pemeberdayaan perempuan, kesejahteraan keluarga dan masyarakat serta perlindungan anak.

Sedangkan kebijakan Dasar Pemberdayaan Perempuan adalah sebagai berikut: (i) Pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasioanal dilakukan melalui “*one door policy*” atau kebijakan satu pintu; (ii) Peningkatan kualitas SDM perempuan; (iii) Pembaharuan hukum dan peraturan perundang-undangan; (iv) Penghapusan kekerasan terhadap perempuan; (v) Penegakkan hak asasi manusia (HAM) bagi perempuan, (vi) Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak; (vii) Pemampuan lembaga pemerintah dalam pemberdayaan perempuan; (viii) Peningkatan peran serta masyarakat; (ix) Perluasan jangkauan pemberdayaan perempuan; (x) Peningkatan penerapan komitmen internasional.

Tabel 2.70. Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020

No	Kecamatan	Bidang			
		Politik	Hukum	Sosial	Ekonomi
1	Pesisir Tengah	21	0	4	152
2	Pesisir Selatan	15	0	5	260
3	Lemong	10	0	4	174
4	Pesisir Utara	12	0	3	203
5	Karya Penggawa	17	0	5	301
6	Pulau Pisang	13	0	2	8
7	Way Krui	15	0	3	40
8	Krui Selatan	11	0	2	246
9	Ngambur	13	0	4	34
10	Ngaras	15	0	2	1
11	Bangkunat	11	0	3	139
	Jumlah	**153**	**0**	**37**	**1558**

Sumber : Dinas PP, PA dan KB, 2022

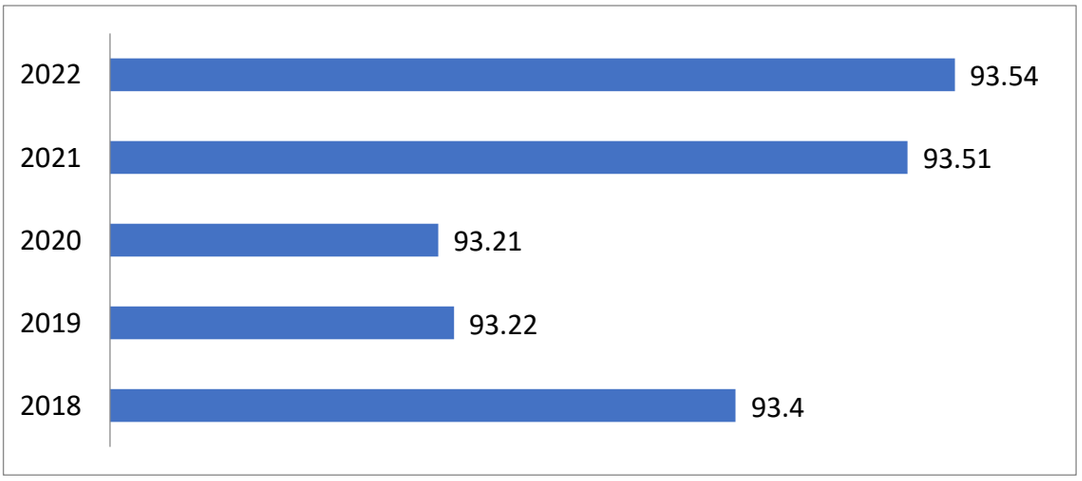
Tabel 2.71. Jumlah Perempuan Sebagai Kepala Keluarga Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020

No	Kecamatan	Kepala Keluarga		Persentase
		Perempuan	Total	
1	Pesisir Tengah	453	4,465	9.86
2	Pesisir Selatan	465	5,785	12.44
3	Lemong	202	3,049	15.09
4	Pesisir Utara	224	2,238	9.99
5	Karya Penggawa	315	3,667	11.64
6	Pulau Pisang	52	430	8.27
7	Way Krui	226	2,064	9.13
8	Krui Selatan	218	2,257	10.35
9	Ngambur	300	4,275	14.25
10	Ngaras	100	2,083	20.83
11	Bangkunat	341	5,394	15.82
	Jumlah	**2,896**	**35,707**	**12,32**

Sumber : Dinas PP PA dan KB, 2022

Perkembangan Pembangunan Gender di Kabupaten Pesisir Barat dari tahun 2018 sebesar 92,96, dan pada tahun 2019 menurun kembali sebanyak (0,07) menjadi 92.89, dan pada tahun 2020 capaian berada pada angka 93.21. tahun 2021 capaian meningkat 0,30 menjadi 93.51. Data capaian pada tahun 2022 berhasil naik menjadi 93.54.

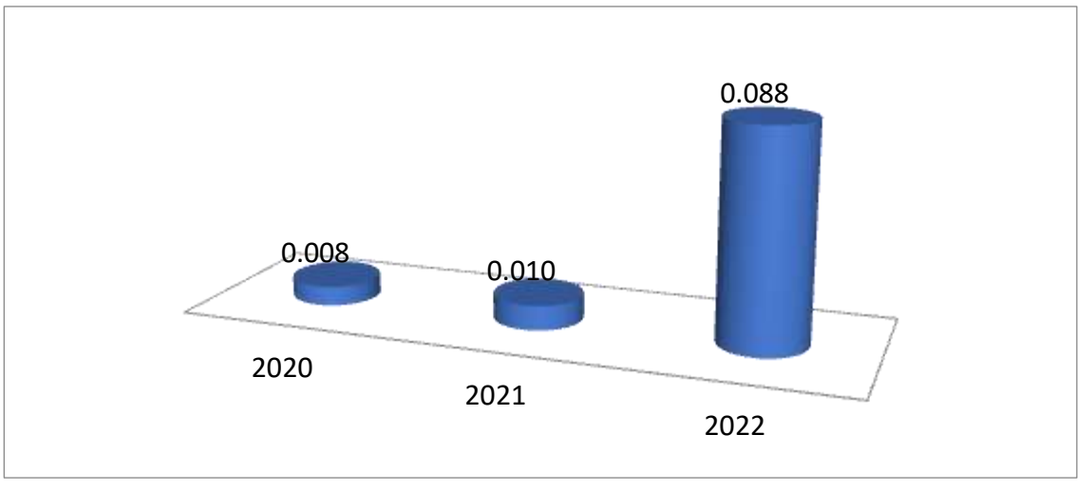
Gambar 2.61. Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022



Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2023

Terkait dengan *share* belanja daerah untuk Anganggaran Ramah Gender pada tahun 2020 sebesar 0,009% dari total APBD. Pada tahun 2020 naik menjadi 0,010%. Tahun 2022 berhasil naik drastis dengan nilai 0,088% dari total APBD.

Gambar 2.62. Anggaran Ramah Gender Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020-2022 (persen)



Sumber : Dinas PPPA dan KB, 2023

Perlindungan perempuan dan anak masih menjadi isu strategis di Kabupaten Pesisir Barat. Hal ini dapat dilihat dari belum adanya lembaga khusus yang menangani perlindungan perempuan dan anak termasuk sangat minimnya tenaga pendampingnya. Data tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.72. Jumlah Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2022

No	Lembaga Perlindungan	2021	2022
1	Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA)	1	1
2	Pusat Krisis Terpadu (PKT)	0	0
3	Pusat Pemberdayaan Perempuan/Ibu	5	5
4	Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC)	0	0
5	Satgas Perlindungan TKI Bermasalah	0	0
6	UPT Dinas Sosial	0	0

Sumber : Dinas PP PA dan KB, 2023

Tabel 2.73. Jumlah Tenaga Rehabilitasi Sosial Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020

No	Kecamatan	Psikolog	Konselor	Rohaniawan	Nakes	APH	Tenaga Reintegrasi
1	Pesisir Tengah	1	1	0	1	2	0
2	Pesisir Selatan	0	0	0	0	0	0
3	Lemong	0	0	0	0	0	0
4	Pesisir Utara	0	0	0	0	0	0
5	Karya Penggawa	0	0	0	0	0	0
6	Pulau Pisang	0	0	0	0	0	0
7	Way Krui	0	0	0	0	0	0
8	Krui Selatan	0	0	0	0	0	0
9	Ngambur	0	0	0	0	0	0
10	Ngaras	0	0	0	0	0	0
11	Bangkunat	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	**1**	**1**	**0**	**1**	**2**	**0**

Sumber : Dinas PP PA dan KB, 2022

Sementara itu, terkait dengan data kasus terhadap perempuan dan anak, pada tahun 2022 terjadi 42 kasus. Kasus terbanyak adalah ABH sebanyak 10 kasus dan tidak ada kasus penelantaran terdahap perempuan dan anak.

Tabel 2.74. Jumlah Kasus terhadap Perempuan dan Anak Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020-2022

No	Jenis Kasus	2020	2021	2022
1	Penelantaran	0	0	0
2	Kekerasan terhadap Perempuan (Psikis)	1	1	1
3	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	5	5	6
4	Pelecehan Seksual	0	0	4
5	Bulliying	0	0	1
6	Pencabulan	3	0	3
7	Kekerasan Psikis	0	0	1
8	Penganiayaan	0	0	1

No	Jenis Kasus	2020	2021	2022
9	Kekerasan Seksual	0	0	1
10	Perebutan Hak Asuh Anak	0	0	1
11	Kekerasan Fisik	0	0	2
12	Persetubahan Anak	0	0	6
13	Anak berhadapan dengan Hukum (ABH)	9	8	10
14	Perkelahian	1	1	2
15	Eksploitasi Anak	1	1	1
16	AMPK	2	2	2
	Jumlah	**22**	**18**	**42**

Sumber : Dinas PP PA dan KB, 2023 (data diolah)

3. Pangan

Pangan merupakan komoditas penting dan strategis bagi bangsa Indonesia mengingat pangan adalah kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah dan masyarakat secara bersama-sama. Pemerintah menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan, sementara masyarakat menyelenggarakan proses produksi dan penyediaan, perdagangan, distribusi serta berperan sebagai konsumen yang berhak memperoleh pangan yang cukup dalam jumlah dan mutu, aman, bergizi, beragam, merata, dan terjangkau oleh daya beli mereka.

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, pangan disebutkan sebagai segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

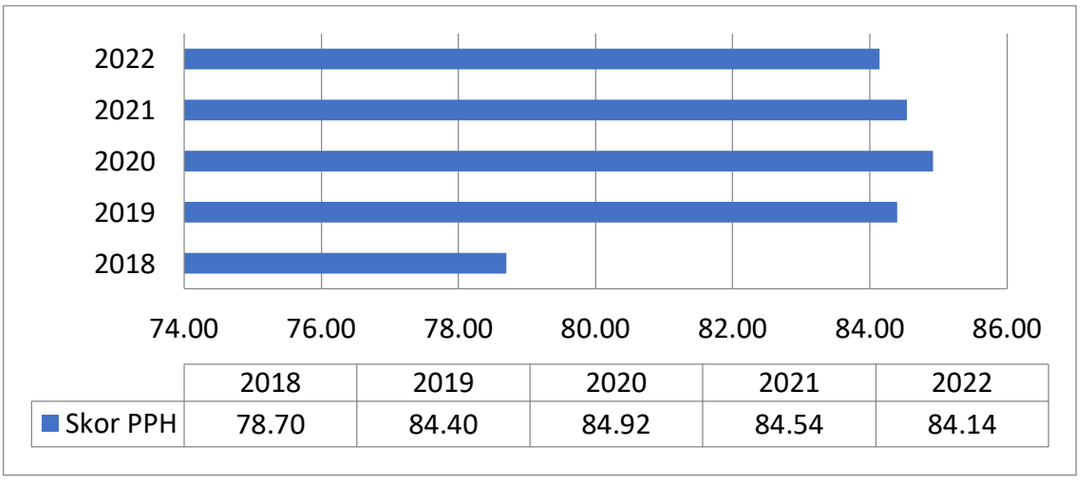
Selanjutnya, kedaulatan pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Kemandirian Pangan adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi Pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan Pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat.

Masalah krisis pangan dan gizi di Indonesia seharusnya dapat ditanggulangi secara mendasar dan berkesinambungan melalui program pengembangan produksi dalam pemanfaatan sumber daya hasil pertanian pangan lokal, dengan cara meningkatkan pemberdayaan industri pangan dan masyarakat petani.

Berdasarkan pada data Skor Pola Pangan Harapan (PPH) selama tahun 2018-2022 di Kabupaten Pesisir Barat terus mengalami peningkatan. Dimulai pada tahun 2018 dengan 78.70. Kenaikan 6.0% pada tahun 2018 menjadi 84.7%. berikutnya, pada tahun 2020 Skor PPH naik kembali 0,54 menjadi 84.92%. tahun 2021, skor

PPH Kabupaten Pesisir Barat mengalami penurun sebesar (0.38) sehingga menjadi 84.54. pada tahun 2022, nilai Skor PPH mengalami penurunan (0.36) dengan nilai 84.18.

Gambar 2.63. Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022



Sumber : Dinas KP dan Pertanian, 2023

Masalah krisis pangan dan gizi di Indonesia seharusnya dapat ditanggulangi secara mendasar dan berkesinambungan melalui program pengembangan produksi dalam pemanfaatan sumber daya hasil pertanian pangan lokal, dengan cara meningkatkan pemberdayaan industri pangan dan masyarakat petani.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat telah melakukan uapaya dalam pembangunan di Bidang Pangan antara lain:

a. Aspek Ketersediaan

Berdasarkan Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) X Tahun 2012, rekomendasi angka kecukupan gizi (AKG) pada tingkat konsumsi adalah 2.150 kal/kap/hr untuk energi dan 57 gr/kap/hr untuk protein. Rekomendasi pada tingkat ketersediaan adalah 2.400 kal/kap/hr untuk energi dan 63 gr/kap/hr untuk protein. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, untuk mengukur keberhasilan upaya pemenuhan kecukupan gizi dengan mempertimbangkan keberagaman pangan dalam produksi, ketersediaan dan konsumsi pangan penduduk diperlukan suatu parameter, salah satunya adalah Pola Pangan Harapan (PPH).

Data Ketersediaan Energi dan Protein didapat dari Kegiatan Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM), adapun Perkembangan Tingkat Capaian Ketersediaan Energi, Protein dan Skor PPH Ketersediaan pada kurun waktu tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel dibawah :

Tabel 2.75. Perkembangan Tingkat Capaian Ketersediaan Energi, Protein dan Skor PPH Ketersediaan Tahun 2018-2022

Tahun	Energi (Kalori/Hari)	Protein (Gram/Hari)	Skor PPH Ketersediaan
2018	3.622,14	99,41	78,80
2019	4.821	266,08	80,60

2020	2.107,32	58,23	84,92
2021	2.036,95	55,21	84,54
2022	2.400,00	63,00	84,18

Sumber : Dinas KP dan Pertanian, 2023

Tabel 2.76. Komoditas Pangan di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021

No	Jumlah Produksi Komoditas Pangan	Jumlah	Satuan
A	**Nabati**		
1	Beras	94.052,92	Ton
2	Jagung	22.652,20	Ton
3	Kedelai	561,01	Ton
4	Kacang Tanah	186,56	Ton
5	Ubi Kayu	3.961,91	Ton
6	Ubi Jalar	914,66	Ton
7	Sayur	19.378,95	Ton
8	Buah buahan	4.494,79	Ton
B	**Hewani**		
1	Daging Sapi / Kerbau	11,85	Ton
2	Daging Ayam	6,00	Ton
3	Telur	10,62	Ton
4	Ikan	5.824,97	Ton

Sumber : Dinas KP dan Pertanian, 2022

b. Aspek Konsumsi

Gambaran pemenuhan kuantitas konsumsi pangan diketahui dari tingkat konsumsi energi dan protein, yaitu proporsi konsumsi energi atau protein aktual terhadap Angka Kecukupan Gizi/AKG (rekomendasi Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi/WNPG XI Tahun 2014, yaitu Angka Kecukupan Energi/AKE 2.150 kkal/kapita/hari, dan Angka Kecukupan Protein/AKP sebesar 57 gram/kapita/hari). Berdasarkan perhitungan kajian pada Buku Pola Konsumsi Pangan tahun 2021, konsumsi pada setiap kelompok bahan pangan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.77. Konsumsi Energi Setiap Kelompok Pangan di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021

No	Kelompok Bahan Makanan	Kalori (kkl)	Protein (gram)
1	Padi-padian	885,67	20.78
2	Umbi-umbian	39,16	0.38
3	Ikan/udang/cumi/kerang	53,34	9.03
4	Daging	39,06	2.4
5	Telur dan susu	44,07	2.51
6	Sayur-sayuran	58,68	3.61
7	Kacang-kacangan	49,63	4.74
8	Buah-buahan	55,41	0.51
9	Minyak dan kelapa	328,41	0.7
10	Bahan minuman	113,23	1.95

11	Bumbu-bumbuan	6,27	0.26
12	Konsumsi lainnya	53,50	1.01
13	Makanan dan minuman jadi	300,51	7.34
	Total	**2.036,95**	**55,21**

Sumber : Dinas KP dan Pertanian, 2022

Pada tahun 2021 angka kecukupan energi sebesar 2.036,95 kkal/kapita/hari dan angka kecukupan protein sebesar 55,21 gram/kapita/hari. Angka kecukupan energi belum tercapai dari 2.150 yang diharapkan baru, sama dengan angka Kecukupan Protein juga belum melampui dari target sebesar 57 gram/kapita/hari.

Tabel 2.78. Konsumsi Penduduk terhadap Bahan Pangan di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021

No	Kelompok Pangan	Nilai	Satuan
1	Padi-padian	71,00	Kg
2	Umbi-umbian	17,10	Kg
3	Pangan hewani	96,33	Kg dan liter
4	Minyak dan lemak	31,40	Liter
5	Buah/biji berminyak	15,89	Kg
6	Kacang-kacangan	17,30	Kg
7	Gula	10,69	Kg
8	Sayur dan buah	126,80	Kg
	Jumlah	**386,51**	

Sumber : Dinas KP dan Pertanian, 2022

c. Aspek Kerawanan Pangan

Penanganan daerah rawan pangan yang dilakukan oleh Kabupaten Pesisir Barat adalah adalah memberikan bantuan pangan berupa beras pada masyarakat yang terdampak *Covid19* di 11 kecamatan di tahun 2020. Selain itu, rekomendasi dari masyarakat dan beberapa OPD Penanganan daerah rawan yang berkaitan dengan akses jalan, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat telah membangun akses jalan menuju menuju Pekon Way Haru dan Pekon Bandar Dalam. Upaya yang berkesinambungan dalam penanganan rawan pangan dan aspek ketersediaan pangan, Kabupaten Pesisir Barat memiliki cadangan pangan berupa beras, yang sewaktu-waktu apabila ada keadaan darurat yang berkaitan dengan kerawanan pangan dapat disalurkan kepada Masyarakat.

Tabel 2.79. Cadangan Pangan di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022

Tahun	Pengadaan (Kg)	Penyaluran (Kg)	Sisa (kg)
2018	15.000	12.000	16.000
2019	15.000	0	31.000
2020	25.820	30.820	25.000
2021	9.000	0	35.007
2022	0	758	34.249

Sumber : Dinas KP dan Pertanian, 2022

Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut CBPK adalah persediaan beras yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah Daerah kabupaten/kota. Perhitungan CBPK sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/PERMENTAN/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah dihitung berdasarkan pada 80% (dikali) dengan cadangan beras total provinsi (dikali) dengan jumlah penduduk kabupaten/kota.

Kondisi cadangan pangan di Kabupaten Pesisir Barat berada pada rentang 25.000-30.0000kg, dengan catatan pada tahun 2022 sebanyak 34,249 Kg dimana posisi tersebut merupakan akumulasi dari proses pengadaan dan penyaluran dari tahun 2018-2022. Kondisi ideal cadangan pangan pertahun di Kabupaten Pesisir Barat adalah 35.000kg. Masih perlu dilakukan peningkatan untuk pengadaan dan penyaluran pangan dimaksud sehingga didapatkan selisih yang memenuhi target.

4. Pertanahan

Kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan urusan pertanahan berdasarkan pada UU No. 23 Tahun 2014 meliputi: (i) penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah kabupaten; (ii) penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah; (iii) penetapan subjek dan objek retribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam daerah kabupaten; (iv) penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam daerah kabupaten dan inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam daerah kabupaten; (v) penerbitan izin membuka tanah; dan (vi) perencanaan pembangunan tanah yang hamparannya dalam daerah.

Tabel 2.80. Pencapaian Indikator Kinerja Pertanahahan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022

Indikator Kinerja Utama	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase rumusan kebijakan dan produk hukum penataan wilayah administrasi dan penegasan batas daerah, toponimi, dan pertanahan yang diselesaikan secara tepat waktu dan taat peraturan perundang-undangan	Persen	72,00	75,00	75,00	100	100
Titik luas lahan bersertifikat	Lokasi	68	75	78	115	115
Penyelesaian kasus tanah Negara	Persen	0	0	0	100	0
Penyelesaian izin lokasi	Lokasi	9	13	26	17	10

Sumber : Dinas PR dan KP, 2023

Urusan pertanahan erat kaitannya dengan pembangunan daerah dimana dalam pelaksanaan pembangunan tersebut harus merujuk pada pola ruang daerah yang telah diatur dalam Perda RTRW. Hingga tahun 2022, persentase kesesuaian penggunaan lahan dengan pola ruang RTRW mencapai 87,02%, sebagai berikut:

Tabel 2.81. Kesesuaian Penggunaan Tanah terhadap Pola Ruang Kabupaten Pesisir Barat

No	Pola Ruang RTRW	Sesuai		Tidak Sesuai	
		Luas (Ha)	%	Luas (Ha)	%
1	Budidaya Perikanan	798,59	24,73	2.478,70	75.63
2	Hutan Lindung	9.770,61	99,80	19,25	0.20
3	Hutan Produksi Terbatas	11.545,07	39,92	17.373,92	60.08
4	Industri	0,00	0,00	77,54	100.00
5	Pariwisata Alam	31,92	7,70	382,52	92.30
6	Pengolahan Ikan	83,62	19,94	335,64	80.06
7	Perkebunan dan Peternakan	41,799,72	85,07	7.334,02	14.93
8	Permukiman Perdesaan	763,01	37,70	1.260,71	62.30
9	Permukiman Perkotaan	1.185,29	39,19	1.839,18	60.81
10	Pertambangan	0,00	0,00	19,97	100.00
11	Resapan Air	3.570,90	59,11	2.469,80	40.89
12	Taman Nasional	186.739,05	99,92	142,11	0.08
13	Tanaman Pangan dan Holtikultura	2.890,64	37,09	4.902,33	62.91
	Total	**259.973,59**	**87.02**	**38.790,30**	**12.98**

Sumber : Dinas PR dan KP, 2023

Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat secara periodik terus melakukan perbaikan dalam hal pengelolaan batas wilayah kabupaten. Hal ini untuk menjamin tertib batas wilayah dan tata ruang di daerah sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah dengan tetap merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2017-2037. Batas wilayah Kabupaten Pesisir Barat sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 2.82. Segmen Batas Kabupaten Pesisir Barat

No	Kabupaten/Kota	Provinsi	Dasar Hukum
1	Kaur	Bengkulu	Permendagri Nomor 73 Tahun 2012
2	Ogan Komering Ulu Selatan	Sumatera Selatan	Permendagri Nomor 67 Tahun 2018
3	Tanggamus	Lampung	Permendagri Nomor 3 Tahun 2022
4	Lampung Barat	Lampung	Permendagri Nomor 51 Tahun 2022

Sumber : Setdakab, 2022

Jumlah desa/pekon di Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan Kepmendagri No. 050-145 Tahun 2022 adalah sebanyak 116 desa. Dalam rangka pemenuhan amanat Perpres No. 23 Tahun 2021 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada tingkat ketelitian peta skala 1 : 50.000, Ditjen Bina Pemerintahan Desa melakukan percepatan penegasan batas desa. Berdasarkan data Ditjen Bina Pemerintahan Desa tahun (per-Juni 2022), sudah ada 63 desa yang melaporkan

baik Peraturan Bupati maupun data digital batas desa kepada Kemendagri (Ditjen Bina Pemerintahan Desa). **Sisa Pekon yang belum memiliki Peraturan Bupati maupun data digital batas pekon** sebanyak 53 Pekon dan 2 kelurahan, dengan rincian sebagai berikut :

a. 16 Pekon dan 2 Kelurahan sudah memiliki data digital dan peta batas wilayah, tetapi belum memiliki peraturan Bupati karena masih belum ada kesepakatan bersama antara pekon-pekon yang berbatasan;

b. 37 pekon belum memiliki data digital atau peta batas wilayah dan peraturan Bupati.

5. Lingkungan Hidup

Urusan lingkungan hidup diserahkan dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan arahan agar kondisi dan kualitas lingkungan hidup di daerah dapat terjaga dan dapat terus mendukung ekosistem lingkungan. Ada beberapa sub bidang yang menjadi urusan pemerintah kabupaten antara lain pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah kabupaten/kota, pengelolaan sampah, penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta, pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah kabupaten/kota, dll

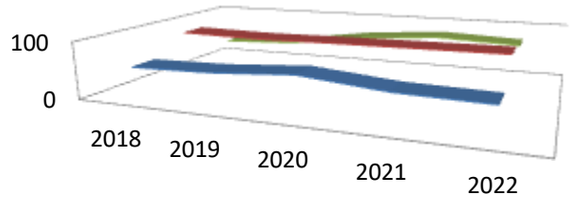
Tabel 2.83. Pencapaian Indikator Kinerja Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022

Indikator Kinerja Utama	Satuan	2018	2019	2020	2021	2021
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	68,5	68,5	68,5	71.56	71.06
Rasio Ruang Terbuka Hijau	Persen	1,5	4,52	4,52	4.52	4.36

Sumber : Dinas LH, 2023

Berdasarkan pada perhitungan indeks kualitas air, udara dan kualitas tutupan lahan di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022 terus mengalami perbaikan kualitas. Bahwa pada tahun 2018 Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Air berada pada angka 52,50 dan menjadi 52,86 pada tahun 2021. Tahun 2022 tercatat penurunan kualitas air dengan nilai 50,00. Selanjutnya untuk Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Udara pada tahun 2018 berada pada angka 84,15 dan meningkat minor pada tahun 2021 menjadi 87,63. Catatan pada tahun 2022 meningkat menjadi sebesar 89,06 Berikutnya untuk Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Tutupan Lahan pada tahun 2018 tercatat 42,05 dan menjadi 79,39 pada tahun 2021. Data pada tahun 2022 adalah sebesar 73,93.

Gambar 2.64. Indeks Kualitas Air, Kualitas Udara, Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022



	2018	2019	2020	2021	2022
Air	52.5	55.67	65.6	52.86	50
Udara	86.15	84.07	86.11	87.63	89.06
Tutupan Lahan	42.05	48.07	68.2	79.39	73.93

Sumber : Dinas LH, 2023

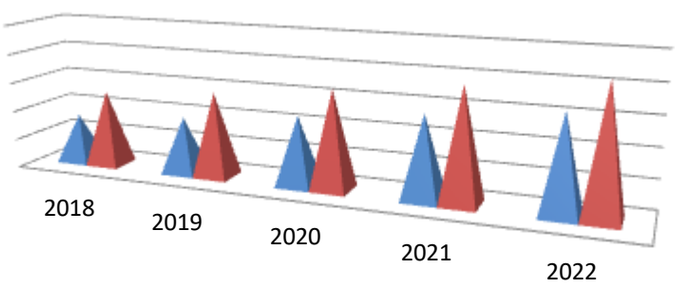
Pengelolaan persampahan di Kabupaten Pesisir Barat masih belum maksimal, dimana pada tahun 2021 dan 2022 tercatat hanya 15,80% area yang mampu dikelola timbunan sampahnya setelah sebelumnya data pada tahun 2020 sebesar 14,45%.

Tabel 2.84. Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022

No	Sarana dan Prasarana	Kapasitas	Jumlah
1	Tempat Pembuangan Akhir	24.482 M^3	1
2	Tempat Pembuangan Sementara (Bak Kontainer)	10 M^3	8
3	Tempat Pembuangan Sementara Reduce Reuse Recycle (TPS3R)	1.6 M^3	1

Sumber : Dinas LH, 2023

Gambar 2.65. Jumlah Timbunan Sampah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022 (Meter^3)



	2018	2019	2020	2021	2022
Sampah Rumah Tangga	2730.77	2786.50	2872.68	2961.53	3053.12
Sampah Non Rumah Tangga	2919.13	2978.70	3070.82	3165.80	3263.71

Sumber : Dinas LH, 2023 (data diolah)

Terkait pengelolaan pembuangan air limbah, pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup telah mengeluarkan rekomendasi untuk kegiatan usaha/lainnya. Berikut jumlah badan usaha/instansi yang melakukan pembuangan air limbah di Kabupaten Pesisir Barat.

Tabel 2.85. Data Badan Usaha/Instansi terkait Izin Pembuangan Limbah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020-2022

No	Uraian	Jumlah Badan Usaha/Instansi		
		2020	2021	2022
1	Sudah Memperoleh Izin Pembuangan Limbah	14	2	7
2	Belum Memperoleh Izin Pembuangan Limbah	12	0	4

Sumber : Dinas LH, 2023

Berikutnya terkait dengan kondisi lingkungan hidup, khususnya pada kondusi lahan pada dasarnya masih berada pada taraf yang baik. Berdasarkan data tercatat pada tahun 2020, Kabupaten Pesisir Barat memiliki Kawasan Suaka Alam seluas 192.575,00 Ha dan Kawasan Taman Nasional 186.926,00 Ha. Dari kedua luasan kawasan tersebut dapat tergambar kondisi geografis dan administratif Kabupaten Pesisir Barat yang berbatasan dengan kawasan TNBBS Bukit Barisan Selatan. Secara lebih lengkap, hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.86. Kondisi Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022

No	Kawasan	Luasan Lahan (Ha)	Keterangan
1	Luas Kawasan Resapan Air	6.032,00	Kondisi Baik
2	Luas Sempadan Pantai	7.400,00	Kondisi Baik
3	Luas Sempadan Sungai	19.890,00	Kondisi Baik
4	Luas Kawasan Suaka Alam	192.575,00	Kondisi Baik
5	Luas Kawasan Suaka Alam Laut dan Perairan	14.866,87	Kondisi Baik
6	Luas Kawasan Pantai Berhutan Bakau	7,60	Kondisi Baik
7	Luas Taman Nasional	186.926,00	Kondisi Baik
8	Luas Taman Wisata Alam	1.222,13	Kondisi Baik
9	Luas Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan	0,02	Kondisi Baik

Sumber : Dinas LH, 2023

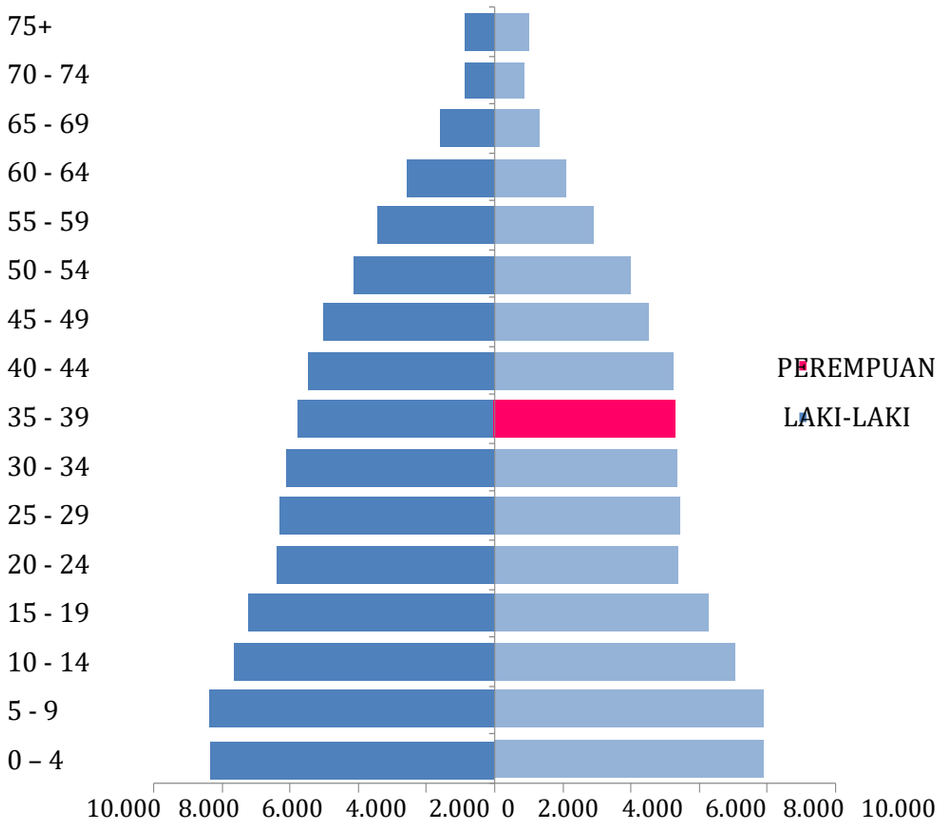
6. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil memiliki peranan yang besar dalam rangka pengendalian penduduk dan pencatatannya. Data yang dihasilkan dapat memberikan gambaran mengenai perkembangan demografi di suatu daerah. Selain berdasarkan jenis kelamin, struktur penduduk juga dapat dilihat berdasarkan umur. Struktur umur penduduk sangat penting untuk menjadi dasar perencanaan pemerintah dalam segala bidang pembangunan termasuk dalam bidang bisnis. Pengetahuan mengenai struktur umur penduduk di suatu wilayah

diharapkan dapat menjadi dasar atau acuan yang pasti agar tidak terjadi kesalahan dalam pengambilan kebijakan. Selain itu juga kita dapat melihat angka beban ketergantungan suatu wilayah. Angka beban ketergantungan adalah rasio antara jumlah penduduk non produktif dengan jumlah penduduk produktif.

Angka beban kertergantungan menunjukkan besar benban tanggungan penduduk usia produktif atas penduduk usia non produktif. Semakin besar angka keetrgantungan semakin besar beban penduduk usia produktif. Secara ekonomi, hal ini juga menggambarkan beban ekonomi penduduk yang bekerja terhadap penduduk yang belum bekerja atau tidak bekerja lagi. Piramida Penduduk Kabupaten Pesisir Barat Berdasarkan Jenis Kelamin Per Semester I Tahun 2022.

Gambar 2.66. Diagram Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022



Sumber : Dinas Dukcapil, 2023

Dari perbandingan penduduk usia produktif (15-64 tahun) dengan penduduk non produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas), maka didapat angka ketergantungan Kabupaten Pesisir Barat pada tahun 2022 yaitu sebesar 54 persen. Artinya dari seratus penduduk yang produktif harus menanggung beban 54 penduduk non produktif. Selain itu, angka ini menunjukkan juga bahwa Kabupaten Pesisir Barat belum memasuki masa bonus demografi.

Tabel 2.87. Jumlah Penduduk, Kepadatan dan Sex Ratio Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Kepala Keluaga	Kepadatan (per Km²)	*Sex Ratio*
1	Pesisir Tengah	20.384	5.882	166.16	105.67
2	Pesisir Selatan	27.633	7.863	65.62	106.75
3	Lemong	12.909	3.759	28.67	110.97
4	Pesisir Utara	8.613	2.529	101.73	108.89
5	Karya Penggawa	15.863	4.417	75.10	107.47
6	Pulau Pisang	1.659	549	24.59	113.86
7	Way Krui	9.151	2.647	217.23	107.20
8	Krui Selatan	11.012	3.076	295.75	106.89
9	Ngambur	22.497	6.621	67.53	107.10
10	Ngaras	9.976	2.809	44.99	110.99
11	Bangkunat	27.678	8.196	29.14	111.82
	Jumlah	**167.339**	**48.339**	**56.69**	**108.35**

Sumber : Dinas Dukcapil, 2023

Sebagai salah satu unsur pelayanan publik, urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil terus berupaya memberikan pelayanan untuk penyediaan dokumen kependudukan dan akta-akta kepada seluruh lapisan masyarakat yang memerlukannya. Perbandingan jumlah penduduk yang memiliki akta dengan yang belum setiap tahunnya selalu berkurang, hal ini menunjukkan perbaikan kinerja dan juga kesadaran dari masyarakat untuk memiliki dokumen kependudukan dan pencatatan sipil. Data-data terkait hal dimaksud dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.88. Jumlah Layanan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022

No	Kecamatan	Elektronik KTP		Akta Kelahiran		Kartu Identitas Anak	
		Sudah	Belum	Sudah	Belum	Sudah	Belum
1	Pesisir Tengah	13,754	172	6,697	53	2,637	3,964
2	Pesisir Selatan	18,658	156	9,191	122	3,258	5,794
3	Lemong	9,016	84	3,986	56	2.118	1,797
4	Pesisir Utara	5,942	57	2,778	29	1.451	1,259
5	Karya Penggawa	10,818	139	5,108	27	3,104	1,943
6	Pulau Pisang	1,162	16	509	5	104	394
7	Way Krui	6,353	75	2,853	20	1,479	1,321
8	Krui Selatan	7,296	98	3,748	42	1,479	2,242
9	Ngambur	15,294	140	7,397	96	1,556	5,700
10	Ngaras	6,655	69	3,413	53	1,316	2,036
11	Bangkunat	18,360	203	9,432	180	1,792	7,573
	Jumlah	**113,308**	**1,209**	**55,112**	**683**	**20,294**	**34,023**

Sumber : Dinas Dukcapil, 2023

Penduduk Kabupaten Pesisir Barat sebagian besar atau mayoritas adalah Islam dengan jumlah pemeluk sebanyak 98.79%; sementara itu agama Hindu sebanyak 0.95%; agama Protestan dengan jumlah 0,19%; agama Katolik dengan jumlah 0.06, lebih lengkap dapat dilihat pada data di bawah ini:

Gambar 2.67. Jumlah Pemeluk Agama Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2022



Sumber : Dinas Dukcapil, 2023

7. Pembedayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa saat ini sudah merupakan suatu hal mutlat bagi setiap kabupaten. Masyarakat dan desa harus mampu berkembang dan mampu sejahtera dan swadaya dalam pengembangan ekonomi dan taraf hidup masyarakatnya, baik secara finansial maupun secara kualitas SDM. Dana Desa yang disediakan oleh pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah harus dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat dan desa. Hal utama adalah bagaimana desa bisa mandiri, sementara itu untuk Kabupaten Pesisir Barat dikarenakan masih banyak desa (pekon) tertinggal maka untuk jangka pendek dan menengah adalah bagaimana pekon-pekon tersebut dapat keluar dari ketertinggalan dan kemiskinan.

Tabel 2.89. Jumlah Pekon Tertinggal Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022

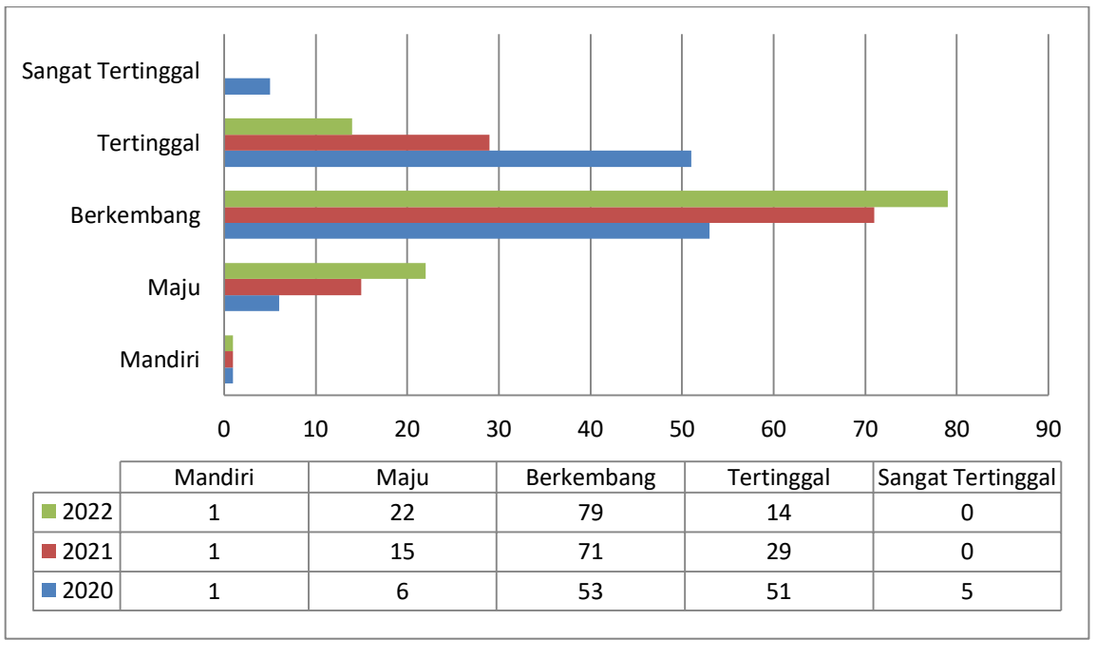
No	Kecamatan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Bangkunat	11	9	11	4	4
2	Ngaras	6	6	7	9	7
3	Ngambur	6	2	2	0	0
4	Pesisir Selatan	15	6	6	3	1
5	Krui Selatan	4	2	1	0	0
6	Pesisir Tengah	2	0	0	0	0
7	Way Krui	8	5	5	0	2
8	Karya Penggawa	3	0	0	5	0
9	Pesisir Utara	12	11	7	6	0

10	Lemong	7	9	6	2	0
11	Pulau Pisang	5	6	6	0	0
	Jumlah	**79**	**56**	**51**	**29**	**14**

Sumber : Dinas PMP, 2023

Berdasarkan pada data di atas, terlihat bahwa jumlah desa tertinggal di Kabupaten Pesisir Barat terus mengalami penurunan. Keberhasilan dalam pencapaian hal ini dipengaruhi oleh komitmen bersama antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan juga desa/pekon. Khususnya dalam sinergitas pembangunan dan pemanfaatan dana desa/alokasi dana desa sesuai dengan kewenangan yang bermanfaat langsung terhadap masyarakat dan pembangunan. Tahun 2018 (79 pekon); tahun 2019 (56 pekon); tahun 2020 (51 pekon) tahun 2021 (29 pekon) serta tahun 2022 (14 pekon). Terlebih mulai pada tahun 2021 sudah tidak ada pekon yang masuk kategori sangat tertinggal.

Gambar 2.68. Status Desa Kabupaten Pesisir Barat tahun 2020-2022



	Mandiri	Maju	Berkembang	Tertinggal	Sangat Tertinggal
2022	1	22	79	14	0
2021	1	15	71	29	0
2020	1	6	53	51	5

Sumber : Dinas PMP, 2023

Berdasarkan data pada gambar di atas dapat dilihat bahwa berdasarkan data tahun 2022, jumlah desa mandiri di Kabupaten Pesisir Barat 1, desa maju 22, desa sangat tertinggal 0, desa tertinggal 14, dan desa berkembang 79, untuk lebih jelas mengenai sebaran status desa, ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel 2.90. Status Desa Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022

No	Kecamatan	Pekon	Status
1	Pesisir Tengah	Kampung Jawa	Berkembang
2	Pesisir Tengah	Pahmungan	Berkembang
3	Pesisir Tengah	Rawas	Maju
4	Pesisir Tengah	Serai	Maju
5	Pesisir Tengah	Suka Negara	Maju
6	Pesisir Tengah	Way Redak	Berkembang
7	Pesisir Selatan	Bangun Negara	Berkembang

8	Pesisir Selatan	Biha	Berkembang
9	Pesisir Selatan	Marang	Tertinggal
10	Pesisir Selatan	Negeri Ratu Tenumbang	Berkembang
11	Pesisir Selatan	Pagar Dalam	Berkembang
12	Pesisir Selatan	Paku Negara	Berkembang
13	Pesisir Selatan	Pelita Jaya	Berkembang
14	Pesisir Selatan	Sukarame	Berkembang
15	Pesisir Selatan	Sumur Jaya	Maju
16	Pesisir Selatan	Tanjung Jati	Berkembang
17	Pesisir Selatan	Tanjung Raya	Berkembang
18	Pesisir Selatan	Tanjung Setia	Berkembang
19	Pesisir Selatan	Tulung Bamban	Tertinggal
20	Pesisir Selatan	Ulok Manik	Tertinggal
21	Pesisir Selatan	Way Jambu	Berkembang
22	Lemong	Bambang	Berkembang
23	Lemong	Bandar Pugung	Berkembang
24	Lemong	Cahaya Negeri	Berkembang
25	Lemong	Lemong	Mandiri
26	Lemong	Malaya	Berkembang
27	Lemong	Pagar Dalam	Maju
28	Lemong	Parda Haga	Berkembang
29	Lemong	Penengahan	Berkembang
30	Lemong	Rata Agung	Berkembang
31	Lemong	Sukamulya	Berkembang
32	Lemong	Tanjung Jati	Berkembang
33	Lemong	Tanjung Sakti	Berkembang
34	Lemong	Way Batang	Berkembang
35	Pesisir Utara	Balam	Berkembang
36	Pesisir Utara	Batu Raja	Berkembang
37	Pesisir Utara	Gedau	Berkembang
38	Pesisir Utara	Kerbang Dalam	Berkembang
39	Pesisir Utara	Kerbang Langgar	Berkembang
40	Pesisir Utara	Kota Karang	Berkembang
41	Pesisir Utara	Kuripan	Berkembang
42	Pesisir Utara	Negeri Ratu	Berkembang
43	Pesisir Utara	Padang Rindu	Tertinggal
44	Pesisir Utara	Pemancar	Tertinggal
45	Pesisir Utara	Walur	Berkembang
46	Pesisir Utara	Way Narta	Berkembang
47	Karya Penggawa	Asahan Way Sindi	Maju
48	Karya Penggawa	Kebuayan	Maju
49	Karya Penggawa	Laay	Maju
50	Karya Penggawa	Menyancang	Berkembang
51	Karya Penggawa	Penengahan	Berkembang
52	Karya Penggawa	Penggawa V Tengah	Maju
53	Karya Penggawa	Penggawa V Ulu	Maju
54	Karya Penggawa	Tembakak Way Sindi	Maju
55	Karya Penggawa	Way Nukak	Berkembang
56	Karya Penggawa	Way Sindi	Maju
57	Karya Penggawa	Way Sindi Hanuan	Maju
58	Karya Penggawa	Way Sindi Utara	Berkembang

59	Pulau Pisang	Bandar Dalam	Berkembang
60	Pulau Pisang	Labuhan	Berkembang
61	Pulau Pisang	Pasar Pulaupisang	Berkembang
62	Pulau Pisang	Pekon Lok	Berkembang
63	Pulau Pisang	Suka Marga	Berkembang
64	Pulau Pisang	Sukadana	Berkembang
65	Way Krui	Banjar Agung	Berkembang
66	Way Krui	Bumi Waras	Tertinggal
67	Way Krui	Gunung Kemala	Berkembang
68	Way Krui	Gunungkemala Timur	Berkembang
69	Way Krui	Labuhan Mandi	Berkembang
70	Way Krui	Pajar Bulan	Tertinggal
71	Way Krui	Penggawa Lima	Berkembang
72	Way Krui	Penggawa V Ilir	Berkembang
73	Way Krui	Suka Baru	Berkembang
74	Way Krui	Ulu Krui	Berkembang
75	Krui Selatan	Balai Kencana	Maju
76	Krui Selatan	Lintik	Berkembang
77	Krui Selatan	Mandiri Sejati	Maju
78	Krui Selatan	Padang Haluan	Maju
79	Krui Selatan	Padang Raya	Berkembang
80	Krui Selatan	Pemerihan	Maju
81	Krui Selatan	Suka Jadi	Maju
82	Krui Selatan	Walur	Maju
83	Krui Selatan	Way Napal	Berkembang
84	Krui Selatan	Way Suluh	Maju
85	Ngambur	Bumi Ratu	Berkembang
86	Ngambur	Gedung Cahya Kuningan	Berkembang
87	Ngambur	Muara Tembulih	Maju
88	Ngambur	Negeri Ratu Ngambur	Maju
89	Ngambur	Pekon Mon	Berkembang
90	Ngambur	Suka Banjar	Berkembang
91	Ngambur	Suka Negara	Berkembang
92	Ngambur	Sumber Agung	Berkembang
93	Ngambur	Ulok Mukti	Berkembang
94	Ngaras	Bandar Jaya	Tertinggal
95	Ngaras	Kota Batu	Tertinggal
96	Ngaras	Mulang Maya	Tertinggal
97	Ngaras	Negeri Ratu Ngaras	Tertinggal
98	Ngaras	Padang Alam	Tertinggal
99	Ngaras	Pardasuka	Tertinggal
100	Ngaras	Rajabasa	Tertinggal
101	Ngaras	Suka Maju	Berkembang
102	Ngaras	Sukarame	Berkembang
103	Bangkunat	Bandar Dalam	Tertinggal
104	Bangkunat	Kota Jawa	Berkembang
105	Bangkunat	Pagar Bukit	Berkembang
106	Bangkunat	Pagar Bukit Induk	Berkembang
107	Bangkunat	Pemerihan	Berkembang
108	Bangkunat	Penyandingan	Berkembang
109	Bangkunat	Siring Gading	Tertinggal
110	Bangkunat	Suka Marga	Berkembang

111	Bangkunat	Suka Negeri	Berkembang
112	Bangkunat	Sumberejo	Berkembang
113	Bangkunat	Tanjung Kemala	Berkembang
114	Bangkunat	Tanjung Rejo	Berkembang
115	Bangkunat	Way Haru	Tertinggal
116	Bangkunat	Way Tias	Tertinggal

Sumber : Dinas PMP, 2022

Badan Usaha Milik Desa adalah Lembaga Usaha Desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan di bentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal, Bidang usaha yang dijalankan berdasarkan pada potensi dan informasi pasar dan keuntungan yang di peroleh ditunjukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (Penyetara Modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa difasilitasi oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan pemerintahaan desa.

Adapun operasionalisasi dikontrol secara bersama oleh LHP, pemerintah desa dan anggota BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari pemerintah desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga. Hingga tahun 2022, tidak terdapat BUMDes Bersama yang merupakan salah bentu kerjasama antar desa/pekon.

Tabel 2.91. Jumlah BUMDes Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021/2022

No	Kecamatan	Nama Desa	Nama Bumdes	No. Perdes	Jenis Usaha
1	Pulau Pisang	Pasar Pulau Pisang	Pujama	141/15/2001/psr/2016	Tangkap nelayan
		Bandar Dalam	Minjak Bakhong	141/54/7.11/03/2016	Home Stay
		Pekon Lok	Anak Delok	140/131/18.13.06/2004/2016	Tangkap nelayan
		Sukamarga	Bah Kaluweh	No 5 Tahun 2020	Perikanan
		Labuhan	Sehaluan	No 8 Tahun 2018	Tenun Tapis
		Sukadana	Batu Guri	NO 440/07/13.06.05/2018	Penginapan
2	Ngaras	Suka maju	Parda jaya	08.TH.2018	Ternak ayam Kampung
		Pardasuka	Maju Jaya	03.TH.2018	Jasa sewa tarup dan layar tancap
		Mulang Maya	Bina Tani		Jual beli hasil bumi dan jasa sewa
		Negeri Ratu	Usaha		Jual beli hasil
		Ngaras	Jejama		bumi & jasa sewa

No	Kecamatan	Nama Desa	Nama Bumdes	No. Perdes	Jenis Usaha
		Padang Dalam	Pemula		Penggemukan sapi
3	Karya Penggawa	Way Sindi	Way Ulok	08 TH 2016	Sulam tapis, batako, simpan pinjam dan peternakan
		Asahan Way Sindi	Harapan Jaya	140/10/13.05/ 10/wsu/2017	Jasa perdagangan
		Way Sindi Utara	Bum-Pekon Way Sindi Utara	14 Tahun 2017	Ternak sapi dan sarana pertanian
4	Pesisir Tengah	Way Redak	Harapan Jaya	141/02/7.06.01 /KPTS/2017	Ternak kambing
		Seray	Maju jejama	400/01/7.06.Fe b-2017	Simpan pinjam
		Kampung Jawa	Sewawangan	02 TH 2017	Usaha jasa dan perdagangan
		Rawas	Selajokhan	518/6/VII.06.4. 2016	Pemecah batu, jasa sewa, pasar pekon
		Suka Negara	Pujama	Peraturan PekonNo 04 Tahun 2017	Jasa sewa
		Pahmungan	Nekhamdo	100/03/706/17	Jasa sewa
5	Ngambur	Negeri Ratu Ngambur	BUM-Pekon	140 Th 20216	Primadona beton
		Ngambur	Busemaya		Perdagangan umum
		Suka Banjar	Barokah Bersama	No 5 Tahun 2018	Galian Sumur Bor
		Bumi Ratu	Bumi Berkah Abadi	No 4 Tahun 2019	Pembuatan Batu bata, Pertanian
		Gedung Cahya Kuningan	Harapan Jaya	No 92/KPTS-Perdes Bum-pe/2019	
		Pekon Mon	Seuyun Sekhukun	No 1 Tahun 2019	
		Muara Tembulih	Muara Harapan	No 2 Tahun 2017	
6	Pesisir Selatan	Tulung Bamban	Bamban Jaya	13 TH.2017	Pertanian dan perdagangan
		Negeri Ratu Tenumbang	Bumi Lebu	36 TH 2017	Pertanian, perdagangan, peternakan
		Sukarame	Sukarame	Peraturan Pekon No 2/2017	Pertambangan dan perdagangan, Perikanan
		Pelita jaya	Berkah Jaya	Peraturan Pekon No 21/2017	Pertanian, perkebunan, pertambangan
		Sumur jaya	Sumur Jaya Jejama	Peraturan Pekon No 6/2017	Perikananan, pertanian
		Tanjung jati	Sinar Harapan	peraturan pkn 17 Tahun 2017	Perdagangan, peternakan, pertanian

No	Kecamatan	Nama Desa	Nama Bumdes	No. Perdes	Jenis Usaha
		Pagar Dalam	Harapan Jaya	Peraturan Pekon No. 5/2017	Nelayan, pertanian
		Tanjung Setia	Permata Jaya	Peraturan Pekon 16/2017	Jasa, pertanian, perdagangan
		Biha	Biha Jejama	Peraturan Pekon No 1/2017	Perdagangan, perikanan, pertanian
		Ulok Manik	Ulok Manik Sejahtera	Peraturan Pekon No. 27/2017	Pertanian, perdagangan
		Paku Negara	Pakor Sejahtera	Peraturan Pekon No. 10/2017	Pertanian, perdagangan
		Way Jambu	Usaha Khamdo	Peraturan Pekon No. 9/2017	Pertanian dan nelayan
		Bangun Negara	Haga maju	Peraturan Pekon No. 8/2017	Pertanian dan perdagangan
		Tanjung Raya	Haga jaya	Peraturan Pekon No. 05/2017	Pertanian dan perdagangan
		Marang	Marang Bebarong	Peraturan Pekon No. 20/2017	Pertaniaan, perdagangan dan Perikanan
	BUMdes bersama	Biha, Ulok manik, Paku Negara	Mebatin Baghong	peraturan Pekon No 01 Tahun 2017	Pelayanan Jasa Perdagangan Dan Pertanian, IKM
	BUMdes bersama	Bangun negara	Kalau	peraturan pkn	Penggilingan
		Tanjung raya	Selajoran	TH.2017	Padi
		Tanjung Setia	Permata Jaya	No 4 Tahun 2016	Perdagangan Sembako, Sablon, Pertanian
7	Pesisir Utara	Batu Raja	Sariwonan	3 Tahun 2017	Jualan Pupuk Obat-Obatan, Bahan Pertanian
		Way Narta	Harapan jaya	144/19/VII.09.08/2018	SPP, Pertanian dan Dagang
		Gedau	Karya Bersama	141/150/VII.09.2012/2018	Pertanian
		Kerbang Dalam	Seandanan	141/1/VII.06.2012/2018	Angkutan Matrial
		Walur	Titian Jaya	140/85/VII.09.2010/2018	Perdagangan
		Balam	Maju Bersama	476/008/04.2006/2018	Sewa panggung, tarub
		Negeri Ratu	Karya Makmur	141/59/VII.09.2013/2018	Jual obat pertanian
		Kerbang Langgar	Kekalau Merawan	460/32/VII.08.2008/2018	Jual alat pertanian
		Kota Karang	Batu Tihang	140/032/VII.09.08.2012/2018	Jual alat pertanian
		Padang Rindu	Maju Bersama	141/32/VII.09.2003/2018	Sewa panggung dan kursi
		Kuripan	Kuripan	141/07/VII.03.2001/2016	Sembako

No	Kecamatan	Nama Desa	Nama Bumdes	No. Perdes	Jenis Usaha
		Pemancar	Kubang Liman	135/18.13.04.2011/2018	Jasa dan perdagangan
8	Krui Selatan	Mandiri Sejati	Mandiri Jejama	Perdes No.04 TH.2016 141/10 V.08.2008/2016	Pariwisata
		Balai Kencana	Keberamaan	Perdes No 03 TH.2016 141/10 V.08.2008/2016	Sewa tarup
		Padang Raya	Bunga Mekar	Perdes No.01 TH.2017 141/10 V.08.2009/2017	Sewa tarup
		Way Suluh	Maju Bersama	Perdes No.14 TH.2017 140/14 V.08.2002/WS/2017	Sewa tarup
		Way Napal	Guwai Jejama	Perdes No.01 TH.2017 140/09 V.08.2004/2017	Sewa tarup
		Padang Haluan	Bunga Cempaka	Perdes No.01 TH.2017 141/01 V.08.2004/2017	Sewa tarup
		Lintik	Mujor Tepor	Perdes No.04 TH.2016 141/08 V.08.2005/2016	Sewa tarup
		Suka Jadi	Suka Jadi	Perdes No.04 TH.2016 412/100 BUMDES/2016	Sewa tarup
		Walur	Harapan Jaya	Perdes NO.08 TH.2016 141/02 V.08.2007/2017	Sewa tarup
		Pemerihan	Pemerihan	Perdes No.03 TH.2017 141/10 V.08.2007/2017	Sewa tarup
9	Way Krui	Labuhan Mandi	Helauni Kik Barong	No.047/01/7.07.10/2016	Jual beli damar
		Gunung Kemala Timur	Parda Maju	No.900/31/KPTS/X/07/13/2017	Jual beli hasil bumi
		Ulu Krui	Parda Ngangon	No.141/01/7.07/2017	Pelayanan jasa perdagangan
		Suka Baru	Kawokan	No.900/04/7.07.06/2018	Sewa alat-alat pesta, perdagangan dan peternakan
		Penggawa Lima Ilir	Maju Bersama	No.141/004/v.24.04/7/07/2017	Sewa alat-alat pesta, peternakan bebek
		Banjar Agung	Agung Sukses	No.140/010/07.05/2018	Sewa tarup, kursi panggung
		Bumi Waras	Jambat Mupakat	No.140/8/KPTS/02/2017	Sewa tarup
		Pajar Bulan	Harapan Jaya	No.140/17/KPTS/7.07/01/2016	Alat-alat pesta

No	Kecamatan	Nama Desa	Nama Bumdes	No. Perdes	Jenis Usaha
10	Bangkunat	Tanjung Rejo	Way Pintau	141/44/13.11.12.KPTS/2018	Pengelolaan air bersih
		Penyandingan	Kili Andan	141/035/KPTS/III/2017	Pertanian, perdagangan
		Way Haru	Jaya Usaha	141/05/KPTS/I/2018	Perternakan
		Kota Jawa	Maju Karya		Pengembangan ikan sidat
11	Lemong	Suka Mulya	Jejama Senang	140/125/KPTS/18.13.03.12/17	Biro jasa, pertanian, perdagangan
		Rata Agung	Beguai Bebarong	474/040/13.03.11/2017	Simpan pinjam
		Tanjung Jati	Helauni Kik Barong	141/026/KPTS/18.13.01/2017	Perikanan, pertanian, simpan pinjam
		Lemong	Muloh Tungga	820/77/18.13.03.2004/2017	Simpan pinjam
		Way Batang	Mujor Tepor	900/02/KPTS-BUM/13.03.03/2017	Sewa alat pesta, simpan, pinjam, toserba
		Lemong	Muloh Tangga		
		Parda Haga	Parda Haga	No 6 Tahun 20216	Sewa Alat Pesta, dan Pertanian
		Pagar Dalam	Pepahan Maju	No 1 Tahun 2020	
		Malaya	Karya Mulya Mandiri		

Sumber : Dinas PMP, 2023

Pemberdayaan masyarakat dan desa perlu dilakukan secara terpadu dan saling berkaitan antar sektor pembangunan dengan mengedepankan prinsip kemandiran dan potensi unggulan dari masing-masing desa. Pengembangan potensi ekonomi di satu desa diharapkan dapat saling melengkapi dengan desa lainnya, sehingga tidak ada desa yang tidak berkembang. Secara umum walaupun berada di pinggir pantai, ada 39 desa/pekon di Kabupaten Pesisir Barat yang fokus pada pengembangan perikanan. Angka ini sangat kecil bila dibandingkan dengan desa/pekon agraris yang cocok untuk pertaninan dan produk turunannya sebanyak 116 desa. Sementara itu ada 39 desa/pekon yang menjadikan pariwisata sebagai unggulan daerah. Untuk desa yang memiliki potensi pengembangan industri sebanyak 5 desa/pekon.

Tabel 2.92. Potensi Desa Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021/2022

No	Kecamatan	Pertanian	Perikanan	Pariwisata	Industri
1	Pesisir Tengah	6	2	5	5
2	Pesisir Selatan	15	4	6	13
3	Lemong	13	7	3	7
4	Pesisir Utara	12	5	5	1
5	Karya Penggawa	12	3	5	2
6	Pulaupisang	6	5	4	4
7	Way Krui	10	3	2	1

8	Krui Selatan	10	4	3	9
9	Ngambur	9	2	2	6
10	Ngaras	9	2	2	1
11	Bangkunat	14	2	2	4
	Jumlah	**116**	**39**	**39**	**53**

Sumber : Dinas PMP, 2023

Pemberdayaan masyarakat dan desa juga perlu melakukan pembinaan terhadap kualitas sumber daya manusia, baik dilakukan secara individu maupun secara komunal. Bagaimana desa mampu memberdayakan masyarakatnya sehingga mampu mandiri secara ekonomi dengan tetap mengedepankan unsur kearifan lokal dan juga potensi unggulan daerah.

Tabel 2.93. Lembaga Kemasyarakat Desa Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022

No	Kecamatan	Karang Taruna	PKK	Posyandu	LSM	LKMD	Lembaga Adat
1	Pesisir Tengah	6	6	6	27	6	11
2	Pesisir Selatan	14	15	15	77	15	23
3	Lemong	11	13	13	96	13	30
4	Pesisir Utara	11	11	12	38	12	12
5	Karya Penggawa	12	12	12	69	12	29
6	Pulau Pisang	6	6	6	26	6	5
7	Wai Krui	8	8	10	32	10	5
8	Krui Selatan	10	10	10	74	10	18
9	Ngambur	9	9	9	52	9	16
10	Ngaras	9	9	9	29	9	9
11	Bangkunat	11	14	14	53	14	17
	Jumlah	**107**	**113**	**116**	**573**	**116**	**175**

Sumber : Dinas PMP, 2023

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

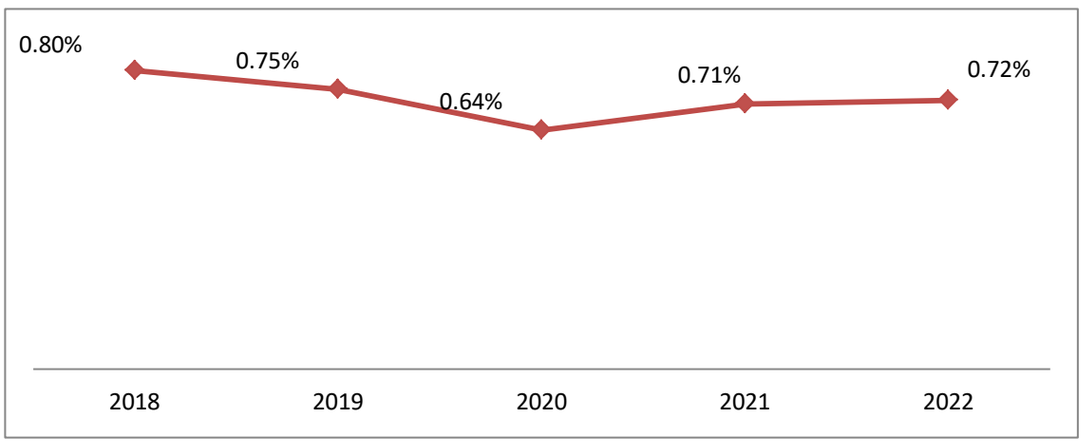
Setiap tahun jumlah penduduk di dunia termasuk di Indonesia mengalami pertambahan yang cukup signifikan. Bahwa pertumbuhan penduduk cenderung melampui pertumbuhan persediaan makanan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah penduduk semakin banyak sedangkan lahan yang ada tidak mengalami penambahan. Dengan bertambahnya penduduk pasti akan membutuhkan tambahan berbagai fasilitas seperti perumahan, sekolah, rumah sakit, pasar/pusat perbelanjaan dan lain–lain dengan pemenuhan berbagai fasilitas tersebut akan berdampak pada lahan untuk bercocok tanam menjadi semakin berkurang sehingga penyediaan makanan/hasil pertanian turut berkurang pula. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, apakah pengendalian penduduk perlu dilakukan secara merata di semua wilayah Indonesia termasuk di Kabupaten Pesisir Barat, jawabannya harus dilakukan agar tercipta keseimbangan antara manusia dan alam.

Salah satu usaha dalam proses pengendalian penduduk adalah dengan peningkatan kesehatan ibu, yang mana, salah satunya caranya adalah dengan Program Keluarga Berencana. Keluarga berencana memiliki makna yang strategis, komprehensif, dan fundamental dalam mewujudkan manusia Indonesia yang sehat

dan sejahtera. UU Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga menyebutkan bahwa keluarga berencana adalah upaya untuk mengatur kelahiran anak, jarak antara kelahiran, usia ideal ibu untuk hamil dan melahirkan, yang mana semuanya itu dilakukan melalui aktifitas promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.

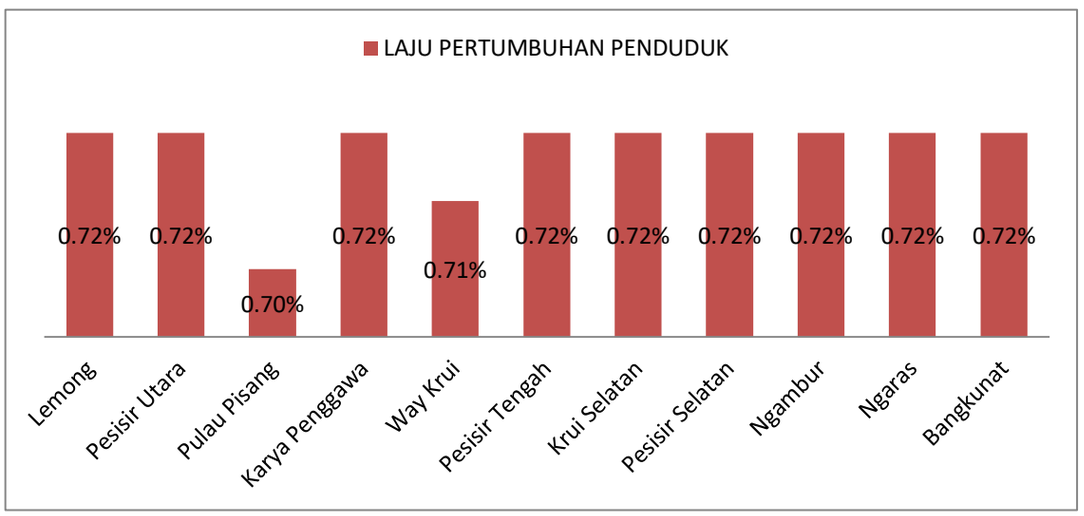
Pada tahun 2018 laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,80%. Selanjutnya tahun 2019 laju pertumbuhan penduduk mencapai 0,75% serta pada tahun 2020 menjadi 0,64%. Pada tahun 2021, laju pertumbuhan penduduk tercatat mencapai angka 0,71%. Tahun 2022, laju pertumbuhan penduduk stabil pada angka di 0,72% atau mengalami penurunan minor 0,01%. Capaian dibawah angka 1% ini menunjukkan keberhasilan pelaksanaan program pengendalian penduduk dan keluarga berencana di daerah.

Gambar 2.69. Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022



Sumber : Dinas PP PA dan KB, 2023

Gambar 2.70. Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan kecamatan Tahun 2022



Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Barat, 2023

Bila dilihat dari sisi kecamatan, rata-rata laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,72%, kecuali pada Kecamatan Pulau Pisang dengan laju 0,70% dan Kecamatan Way Krui dengan nilai laju 0,71%.

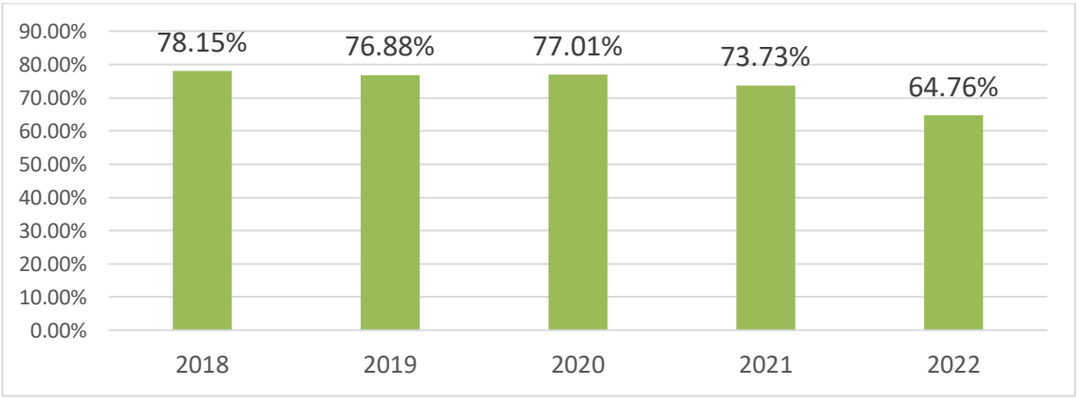
Berdasarkan pada data yang ada, laju pertumbuhan penduduk juga diiringi dengan kenaikan jumlah peserta Keluarga Berencana (KB) aktif daerah. Hal ini menunjukkan bahwa laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Pesisir Barat pada tahun 2016-2021 lebih banyak dipengaruhi oleh angka kelahiran dari keluarga baru. Pada Tahun 2016 jumlah KB aktif di Kabupaten Pesisir Barat sebesar 71,96% dan terus meningkat pada tahun 2017 menjadi 76,95% atau naik 4,99%. Berikutnya pada tahun 2018 kembali meningkat sebesar 1,20 menjadi sebesar 78,15%. Selanjutnya tahun 2019 peserta KB aktif menurun menjadi 76,88% dan kembali meningkat pada tahun 2020 menjadi sebesar 77,01%. Tahun 2021 terjad penurunan jumlah peserta KB sebesar 3,28% menjadi 77.77%. Fluktuasi dan perkembangan ini tetap berada pada range yang normal. Peningkatan ini diharapkan dapat terus stabil untuk menjamin kemampuan daerah dalam menyediakan kebutuhan dari penduduk.

Tabel 2.94. Jumlah Peserta Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022

No	Kecamatan	Usia Subur Peserta KB	
		Pasangan Usia Subur	Wanita Usia Subur
1	Pesisir Tengah	3,252	4,930
2	Pesisir Selatan	3,522	6,712
3	Lemong	1,444	2,001
4	Pesisir Utara	2,100	3,189
5	Karya Penggawa	2,165	3,680
6	Pulau Pisang	269	344
7	Wai Krui	1,535	2,088
8	Krui Selatan	1,684	2,556
9	Ngambur	4,228	2,438
10	Ngaras	1,540	458
11	Bangkunat	4,530	6,950
	Jumlah	**26,269**	**40,562**

Sumber : Dinas PP PA dan KB, 2023

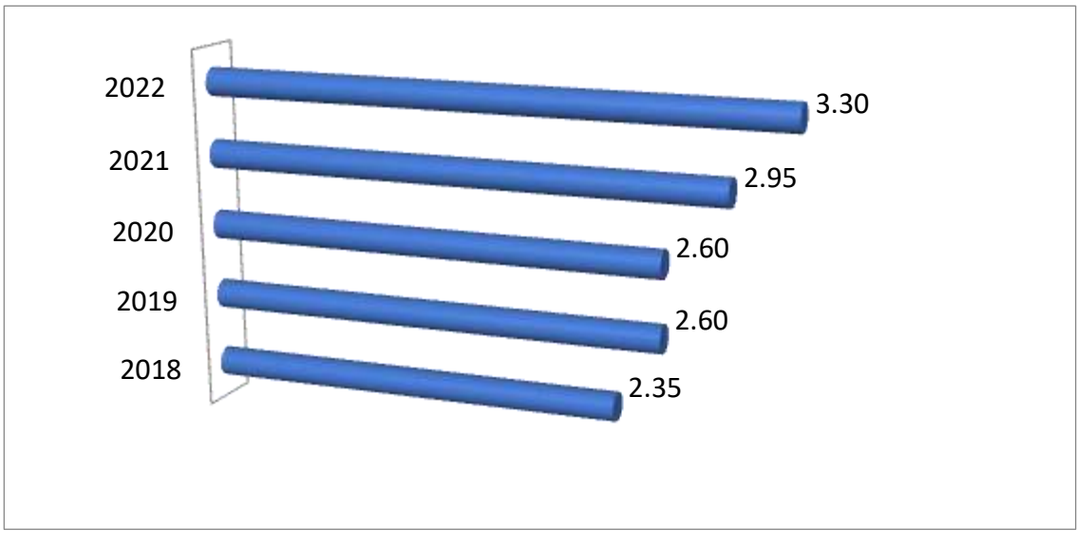
Gambar 2.71. Peserta Keluarga Berencana Aktif Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022



Sumber : Dinas PP PA dan KB, 2023

Lebih lanjut laju pertumbuhan penduduk erat kaitannya dengan kondisi angka kelahiran total, selain daripada pertumbuhan penduduk dari perpindahan. Angka kelahiran total di Kabupaten Pesisir Barat terus mengalami penurunan yang positif. Bila dilihat pada tahun 2018 berada pada angka 2.35. Namun, pada tahun 2019 naik sebanyak 0,25 menjadi 2,60. Angka 2,60 ini bertahan hingga tahun 2020. Lebih lanjut, angka kelahiran total (total fertility rate) pada tahun 2021 turun menjadi 2,29%. Tahun 2022, TFR naik drastis menjadi 3.30. kenaikan ini, disatu sisi menunjukkan kegagalan dalam program pengendalian penduduk dan keluarga berencana namun perlu dilihat juga bahwa, laju pertumbuhan penduduk yang masih berada dibawah 1,00. Kenaikan ini harus tetap menjadi catatan bagi daerah dalam usaha untuk menyelenggarakan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Gambar 2.72. Angka Kelahiran Total Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022



Sumber : Dinas PP PA dan KB, 2023

Tabel 2.95. Angka Kelahiran dan Kematian Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020

No	Kecamatan	Rata-rata Kelahiran (Jiwa/Bulan)	Jumlah Kelahiran (Jiwa)	Jumlah Kematian (Jiwa)
1	Pesisir Tengah	21	259	24
2	Pesisir Selatan	33	442	28
3	Lemong	18	215	27
4	Pesisir Utara	12	149	37
5	Karya Penggawa	24	28	2
6	Pulau Pisang	1	12	3
7	Way Krui	14	165	35
8	Krui Selatan	13	159	10
9	Ngambur	36	430	23
10	Ngaras	14	172	26
11	Bangkunat	41	495	26
	Jumlah	**232**	**2786**	**241**

Sumber : Dinas Kesehatan, 2021

Dalam rangka pencapaian target penurunan stunting menjadi 14% pada tahun 2024, maka dilakukan berbagai upaya percepatan penurunan stunting. Salah satu upayanya adalah dengan membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dari tingkat Pusat, Provinsi,Kabupaten/Kota dan Tingkat Kecamatan. Pembentukan TPPS tingkat kabupaten di Kabupaten Pesisir Barat dikukuhkan melalui Keputusan Bupati Pesisir Barat Nomor B/93/KPTS/IV.08/HK-PSB/2022. Sementara itu, pembentukan TPPS di tingkat kecamatan dikukuhkan melalui Keputusan Bupati Pesisir Barat Nomor B/213/KPTS/IV.08/HK-PSB/2022. Berdasarkan data rekapitulasi lini lapangan, di Kabupaten Pesisir Barat sudah terbentuk 11 TPPS tingkat Kecamatan dan 118 TPPS tingkat Desa.

Tabel 2.96. Tim Pendamping Keluarga Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022

No	Kecamatan	Jumlah TPK	Jumlah Anggota TPK
1	Krui Selatan	10	30
2	Pulau Pisang	6	18
3	Pesisir Tengah	11	33
4	Pesisir Utara	12	36
5	Lemong	15	45
6	Pesisir Selatan	19	57
7	Ngambur	11	33
8	Karya Penggawa	15	45
9	Way Krui	10	30
10	Bangkunat	16	48
11	Ngaras	9	27
	Jumlah	**134**	**402**

Sumber : Dinas PPPA dan KB, 2023

Berikutnya, terkait dengan penanganan stunting, berikut adalah data lokasi kasus stunting di Kabupaten Pesisir Barat.

Tabel 2.97. Lokasi Stunting Kabupaten Pesisir Barat 2021-2022

2021				2022		
No	**Kecamatan**	**Pekon**	**Kasus**	**No**	**Kecamatan**	**Kasus**
1	Karya Penggawa	Menyancang	9	1	Karya Penggawa	9 (setelah diintervensi menjadi 5)
2		Way Sindi		2	Ngambur	9 (setelah diintervensi tetap 9)
3	Ngambur	Gedung Cahaya Kuningan	9	3	Ngaras	5 (setelah diintervensi menjadi 2)
4		Sumber Agung		4	Biha	1 (setelah diintevensi menjadi 0)
5		Pekon Mon		5	Krui	1 (setelah diitevensi menjadi 0)
6		Negara Ngambur				25 (setelah intervensi menjadi 16)

7		Suka Banjar		
8	Ngaras	Suka Maju	5	
9		Suka Rame		
10		Negeri Ratu Ngaras		
11	Pesisir Tengah	Way Redak	1	
12	Pesisir Selatan	Ulok Manik	1	
			25	

Sumber : Dinas Kesehatan, 2023

Beberapa intervensi pemerintah daerah yang telah dilakukan dalam rangka penanggulangan stunting, antara lain:

a. Pemantauan tumbuh kembang anak melalui kegiatan Posyandu;

b. Pembagian vitamin A setiap 6 bulan sekali;

c. Pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) pada remaja putri, calon pengantin perempuan dan ibu hamil;

d. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pada Balita Kurang Energi Protein (KEP) dan ibu hamil KEP;

e. Kesehatan Reproduksi kepada calon pengantin;

f. Imunisasi balita secara berkesinambungan;

g. Kesehatan lingkungan (penyediaan air bersih, Open Defecation Free/ODF, Sanitasi Total Berbasis Masyarakat/STBM);

h. Promosi Kesehatan (Edukasi gizi, Perilaku Hidup Bersih Sehat/PHBS. Gerakan Hidup Sehat/Germas)

9. Perhubungan

Urusan perhubungan merupakan urusan wajib yang dikelola oleh pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten dengan membagi kewenangan berdasarkan pada beban. Perhubungan terkait dengan mobilitas manusia maupun barang baik dalam rangka perpindahan, aktivitas maupun distribusi. Pelaksanaan urusan perhubungan di Kabupaten Pesisir Barat turut berkembang seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan terbukanya simpul-simpul transportasi dan akses masyarakat.

Tabel 2.98. Lintasan Trayek Perhubungan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022

No	Uraian	Trayek Perhubungan	
		No	Keterangan
I	**Angkutan Jalan**		
	Lintasan Trayek	1	Liwa (Lampung Barat) – Terminal Way Batu (Kec. Pesisir Tengah) – Way Heni (Kec. Bangkunat)
		2	Way Heni (Kec. Bangkunat) – Terminal Way Batu (Kec. Pesisir Tengah) – Liwa (Lampung Barat)

II	**Angkutan Penyeberangan**		
	Lintasan Trayek	1	Koala Stabas (Kec. Pesisir Tengah) – Pulau Pisang
		2	Tembakak (Kec. Karya Penggawa) – Pulau Pisang
		3	Kota Jawa (Kec. Bangkunat) - Pemekahan

Sumber : Dinas Perhubungan, 2023

Tabel 2.99. Perkembangan Urusan Perhubungan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020-2021

No	Uraian	2020		2021	
		Jumlah	Keterangan	Jumlah	Keterangan
I	**Transportasi Darat**				
A	kendaraan pribadi				
	Roda 4	4.188	Unit	4.255	Unit
	Roda 2	6.007	Unit	6.179	Unit
B	Truk Barang	400	Unit	423	Unit
C	Truk Tangki	6	Unit	8	Unit
D	Bus	14	Unit	16	Unit
E	Angkutan Kota	30	Unit	32	Unit
F	Ojek Sepeda Motor	200	Unit	211	Unit
G	Becak	20	Unit	18	Unit
H	Pengguna Layanan Terminal Tipe C		Terminal Way Batu		Terminal Way Batu
	Masuk	9.000	Orang	9.250	Orang
	Keluar	11.000	Orang	11.600	Orang
II	**Transportasi Laut**				
A	Kapal	1	Unit	Unit	
B	Perahu/sampan	275	Unit	Unit	
C	Pengguna Layanan Pelabuhan		Pelabuhan Koala Stabas		Pelabuhan Koala Stabas
	Keluar	9.000	Orang	9.700	Orang
	Masuk	9.000	Orang	9.700	Orang
III	**Transportasi Udara**				
A	Jumlah Maskapai	1	(Wings Air) Lion Air Group	1	(Wings Air) Lion Air Group
B	Jumlah Pengguna Layanan		Bandara M. Taufik Kiemas		Bandara M. Taufik Kiemas
	Penumpang	1.337	Orang	1.568	Orang
	Barang	5.371	Kg	5.623	Kg

Sumber : Dinas Perhubungan, 2022

Tabel 2.100. Sarana dan Prasarana Perhubungan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021

No	Jenis Sarana/ Prasarana	Nama Sarana/ Prasarana	Jumlah	Lokasi	Keterangan
1	Terminal	Terminal Way Batu	1 Unit	Jl. Pasar Way Batu Terminal Kota Krui Kelurahan Pasar Krui Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat Kode Pos 34874	Tipe C
2	Bandara	Bandara M. Taufik Kiemas	1 Unit	Pekon Seray, Kec. Pesisir Tengah, Kab. Pesisir Barat Kode Pos 34874	Bandara
3	Dermaga	Dermaga Pulau Pisang	1 Unit	Pasar Pulau Pisang, Kec. Pesisir Utara, Kab. Pesisir Barat Kode Pos 34878	Butuh Perbaikan
		Dermaga Koala Stabas	1 Unit	Jl. Merdeka (Pasar Krui), Kelurahan Pasar Krui, Kec. Pesisir Tengah, Kab. Pesisir Barat	Pelabuhan Yang Tidak Diusahakan
		Pelabuhan Nusantara	1 Unit	Pekon Kota Jawa, Bangkunat, Kab. Pesisir Barat	Pelabuhan Perikanan

Sumber : Dinas Perhubungan, 2021

Untuk tetap mendukung kelancaran dan keselamatan transportasi angkutan penumpang dan barang di jalan, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat telah berupaya melengkapi fasilitas penunjang lalu-lintas di jalan antara lain melalui pengadaan marka jalan, rambu-rambu lalu-lintas, rambu-rambu pendahulu penunjuk jalan/jurusan (RPPJ), patok *delineator*, halte, dan lampu peringatan di jalan (*warning light*). Adapun perkembangan jumlah fasilitas kelengkapan jalan dalam rangka mendukung kelancaran dan keselamatan lalu-lintas angkutan penumpang dan barang di jalan dari tahun 2017-2022 sebagai berikut:

Tabel 2.101. Perkembangan Jumlah Fasilitas Kelengkapan Jalan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022

No	Jenis	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Rambu Lalu-lintas	305	403	410	410	415
2	RPPJ	50	55	57	57	78
3	Halte	9	9	9	9	9
4	Warning Light	2	3	3	3	4

Sumber : Dinas Perhubungan, 2023

Tabel 2.102. Pencapaian Indikator Kinerja Perhubungan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022

Indikator Kinerja Utama	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah arus penumpang angkutan umum	Orang	22.680	28.560	19.320	33,170	33,770
Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	Orang	21.600	27.200	18.400	30,150	30,750
Jumlah uji KIR angkutan umum	Unit	47	47	50	65	60
Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	lokasi	5	5	5	5	5
Pemasangan Rambu rambu	Unit	305	403	410	410	415

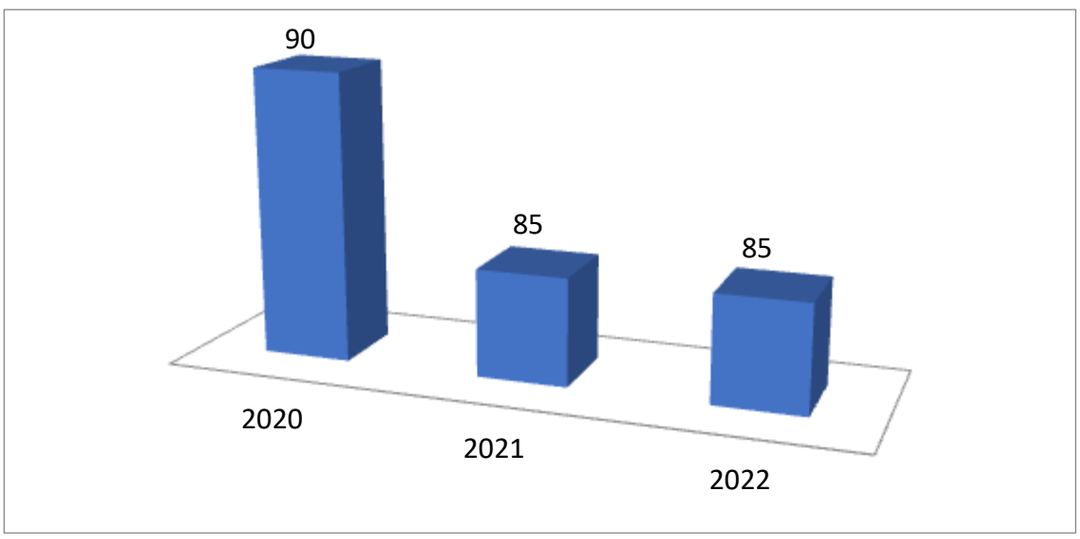
Sumber : Dinas Perhubungan, 2022

Berdasarkan pada pencapaian indikator urusan perhubungan secara umum terus mengalami perbaikan kinerja. Hal ini dapat dilihat dari jumlah arus penumpang angkutan umum pada tahun 2018 sebanyak 22.680 orang meningkat menjadi 28.680 orang pada tahun 2019. Tahun 2020 mengalami penurunan akibat Pandemi Covid-19 menjadi sebanyak 19.320 orang. Data pada tahun 2021 sebesar 33.170 orang serta pada tahun 2022 meningkat menjadi 33.770 orang.

Berikutnya untuk jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum pada tahun 2018 sebanyak 21.600 orang dan menjadi 27.200 orang pada tahun 2021. Tahun 2020 mengalami penurunan menjadi hanya 18.400 orang, data tahun 2021 sebesar 30.150. Pada tahun 2022 meningkat menjadi 30.750 orang.

Perkembangan rasio konektivitas daerah berdasarkan pada perhitungan trayek moda transportasi yang ada dibandingkan dengan kebutuhan adalah pada tahun 2020 sebesar 90%. Menurun pada tahun 2021 dan 2022 menjadi 85%.

Gambar 2.73. Rasio Konektivitas Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020-2022

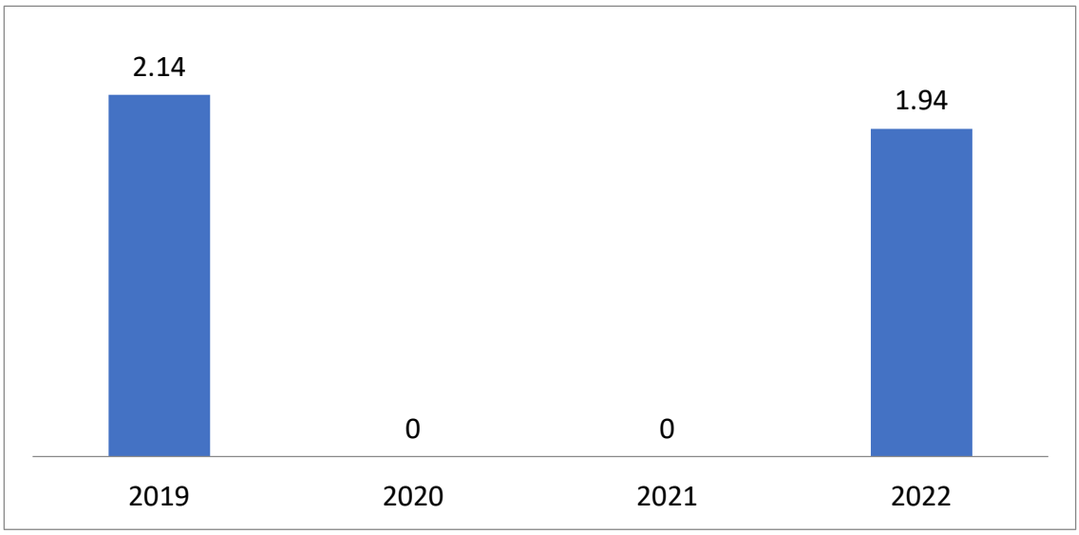


Sumber : Dinas Perhubungan, 2023

10. Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Pesisir Barat terus berusaha untuk mengejar ketertinggalan dari daerah lainnya, dimana pembangunan dilakukan secara bertahap dalam kerangka mencapai seluruh amanat peraturan perundang-undangan serta mencapai tujuan akhir pembangunan yaitu kesejahteraan masyarakat. Pada bidang urusan komunikasi dan informatika, kebutuhan akan penggunaan teknologi informasi masih belum sepenuhnya terpenuhi. Hal ini dapat dilihat dari nilai Indeks SPBE daerah pada tahun 2019 sebesar 2,14. Lalu pada tahun 2020 dan 2021 tidak dilakukan evaluasi. Berikutnya pada tahun 2022 dengan nilai 1.94. Penurunan nilai indeks tentu saja merupakan kemunduran pemerintah daerah dalam upaya menyediakan layanan informasi pemerintahan yang berkualitas, murah, mudah dan cepat bagi masyarakat.

Gambar 2.74. Indeks SPBE Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2019-2022



Sumber : Dinas Kominfotik dan Persandian

Fasilitas pemerintah yang bergerak di bidang komunikasi dan informatika disediakan oleh PT. Telekomunikasi Indonesia dan PT. Pos Indonesia. Sementara itu provider telekomunikasi swasta yang membuka cabang di Kabupaten Pesisir Barat adalah Telkomsel, yang memiliki kantor di Kecamatan Pesisir Tengah, sebagai ibukota Kabupaten.

Tabel 2.103. Sarana Telekomunikasi dan Informasi Kabupaten Pesisir Barat

Kecamatan	Kantor PT. Pos Indonesia	Kantor Telkomunikasi Indonesia	Kantor Provider Telekomunikasi (internet)
Pesisir Tengah	1	1	1
Ngambur	1	0	0
Pesisir Selatan	1	0	0
Bangkunat	1	0	0
Jumlah	**3**	**1**	**1**

Sumber : Dinas Kominfo Statistik dan Persandian, 2023

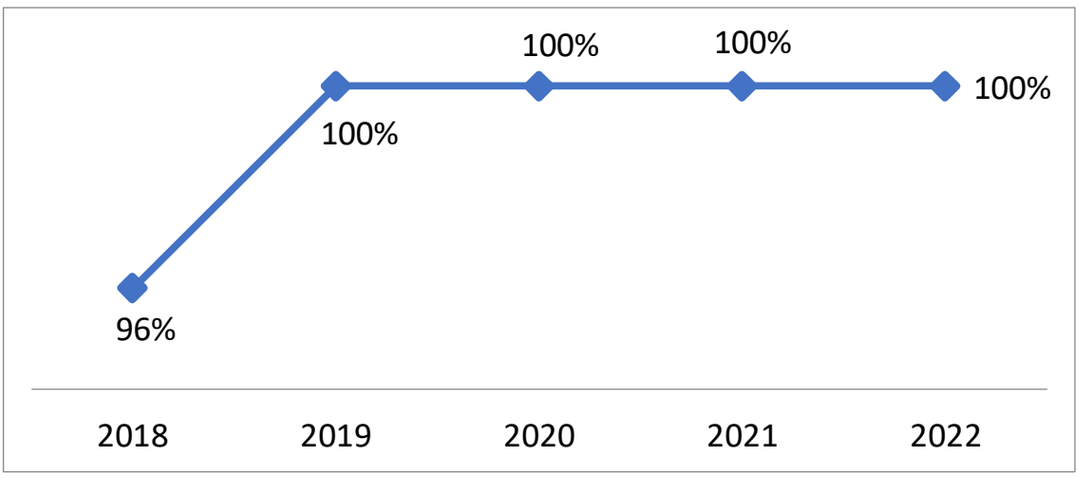
Khusus untuk penyediaan sarana komunikasi dan informatika dari pihak swasta, selain Telkomsel yang telah menyediakan kantor cabang untuk pelayanan pelanggan di Kecamatan Pesisir Tengah, secara umum seluruh ibukota kecamatan yang ada di Kabupaten Pesisir Barat telah mendapatkan fasilitas komunikasi 3G dan 4G yang disediakan oleh: Telkomsel, Indosat dan XL. Diharapkan pada tahun mendatang seiring dengan perkembangan daerah akan lebih banyak provider lain yang hadir, dan juga provider yang telah ada mampu melakukan pengembangan dan perluasan cakupan jangkauan pelayanan hingga ke daerah-daerah terluar.

Tabel 2.104. Data Ketersediaan Telekomunikasi dan Informasi Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021/2022

No	Kecamatan	Jumlah Desa Terlayani	Jumlah Desa Belum Terlayani	Jumlah BTS	Jumlah Provider
1	Pesisir Tengah	8	0	5	5
2	Pesisir Selatan	15	0	7	7
3	Lemong	13	0	6	6
4	Pesisir Utara	12	0	4	4
5	Karya Penggawa	12	0	5	5
6	Pulau Pisang	6	0	0	0
7	Wai Krui	10	0	2	2
8	Krui Selatan	10	0	5	5
9	Ngambur	9	0	6	6
10	Ngaras	9	0	5	5
11	Bangkunat	14	0	6	6
	Jumlah	**118**	**0**	**51**	**54**

Sumber : Dinas Kominfotik dan Persandian, 2023

Gambar 2.75. Jangkauan Layanan Telekomunikasi Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022



Sumber : Dinas Kominfo Statistik dan Persandian, 2023

Jangkauan telekomunikasi di Kabupaten Pesisir Barat telah mencapai 100% pada tahun 2019. Perhitungan ini berdasarkan pada lokasi ibu kota kecamatan dan ibu kota kelurahan/pekon/desa. Jangkauan telekomunikasi khususnya pada

layanan jaringan telepon dan internet. Pada tahun 2016 capaian masih berada pada 50%, tahun 2017 sebanyak 70% wilayah telah terlayani. Angka ini terus meningkat pada tahun 2018 menjadi 96%. Tahun 2019 hingga 2022 telah mencapai 100%.

Terkait dengan kewenangan daerah untuk mengelola jaringan komunikasi dan informasi daerah yang mudah diakses dalam rangka meningkatkan layanan kepada masyarat, Kabupaten Pesisir Barat telah menyediakan domain dan sub domain pemerintah daerah untuk berkomunikasi melalui internet. Sementara itu, hingga tahun 2022, tercatat 4 perangkat daerah dari 39 perangkat daerah yang mendapatkan akses langsung jaringan internet intra pemerintah daerah yang disediakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Pesisir Barat, yaitu: (1) Dinas kominfotik dan Persandian; (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; (3) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon; dan (4) Sekretariat Daerah.

Tabel 2.105. Alamat Internet Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat

No	Domain/ Sub Domain	Keterangan	Perangkat Daerah
A	**pesisirbaratkab.go.id**		
1	www.pesisirbaratkab.go.id	Portal Utama Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah	Dinas Kominfotik dan Persandian
2	jdih.pesisirbaratkab.go.id	Portal Informasi dan Dokumentasi Hukum	Bagian Hukum Setdakab
3	lpse.pesisirbaratkab.go.id	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Bagian LPSE/PBJ Setdakab
4	ppid.pesisirbaratkab.go.id	Portal Layanan Informasi Publik Pemerintah	Dinas Kominfotik dan Persandian
5	covid19.pesisirbaratkab.go.id	Portal Informasi Penanganan Kasus dan Vaksinasi Corona Virus Desease 2019 (Covid-19)	Dinas Kesehatan
6	spbe.pesisirbaratkab.go.id	Portal Pemantauan dan Evaluasi SPBE	Dinas Kominfotik dan Persandian
7	inspektorat.pesisirbaratkab.go.id	Portal Informasi dan Komunikasi Publik inspektorat	Inspektorat
8	satpolpp-damkar.pesisirbaratkab.go.id	Portal Informasi dan Komunikasi Publik Satuan Polisi Pamong Peraja dan Pemadam Kebakaran	Satpol PP dan Damkar
9	disdikbud.pesisirbaratkab.go.id	Portal Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas P danK
10	dinkes.pesisirbaratkab.go.id	Portal Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
11	dpupr.pesisirbaratkab.go.id	Portal Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas PU dan PR
12	dprkp.pesisirbaratkab.go.id	Portal Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Dinas PR dan KP

13	dinsos.pesisirbaratkab.go.id	Portal Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Sosial	Dinas Sosial
14	disnakertrans.pesisirbarat kab.go.id	Portal Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian	Dinas Trans, Naker dan Perindustrian
15	dpppakb.pesisirbaratkab. go.id	Portal Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Dinas PP PA dan KB
16	dkp.pesisirbaratkab.go.id	Portal Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas KP dan Pertanian
17	dlh.pesisirbaratkab.go.id	Portal Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Lingkungan Hidup	Dinas LH
18	disdukcapil.pesisirbaratkab. go.id	Portal Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Duk Capil
19	dpmp.pesisirbaratkab.go.id	Portal Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Dinas PMP
20	dishub.pesisirbaratkab.go.id	Portal Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
21	diskoperindag.pesisirbarat kab.go.id	Portal Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan
22	dpmptsp.pesisirbaratkab. go.id	Portal Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas PM dan PTSP
23	dispora.pesisirbaratkab. go.id	Portal Informasidan Komunikasi Publik Dinas Pemuda dan Olahraga	Dinas Pora
24	diskominfo.pesisirbaratkab. go.id	Portal Informasidan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi Informatika,Statistik dan Persandian	DInas Kominfotik dan Persandian
25	dp.pesisirbaratkab.go.id	Portal Informasidan Komunikasi Publik Dinas Perikanan	Dinas Perikanan
26	bapenda.pesisirbaratkab. go.id	Portal Informasidan Komunikasi Publik Badan Pendapatan Daerah	Bapenda
27	bkad.pesisirbaratkab.go.id	Portal Informasidan Komunikasi Publik Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	BPKAD
28	bapelitbangda.pesisirbarat kab.go.id	Portal Informasi dan Komunikasi Publik Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Bappelitbang da
29	kesbangpol.pesisirbaratkab. go.id	Portal Informasi dan Komunikasi Publik Badan Kesatuan Badan Politik	Badan Kesbangpol
30	bkpsdm.pesisirbaratkab. go.id	Portal Informasi dan Komunikasi Publik Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumberdaya Manusia	BKPSM
31	bpbd.pesisirbaratkab.go.id	Portal Informasi dan Komunikasi Publik Badan Penanggulangan Bencana	BPDB

32	data.pesisirbaratkab.go.id	Portal Open Data Kabupaten Pesisir Barat	Dinas Kominfotik dan Persandian
33	bangkunat.pesisirbaratkab.go.id	Portal Informasi dan Komunikasi Publik Kecamatan Bangkunat	Kecamatan Bangkunat
34	ngaras.pesisirbaratkab.go.id	Portal Informasi dan Komunikasi Publik Kecamatan Ngaras	Kecamatan Ngaras
35	ngambur.pesisirbaratkab.go.id	Portal Informasi dan Komunikasi Publik Kecamatan Ngambur	Kecamatan Ngambur
36	pesisirselatan.pesisirbaratkab.go.id	Portal Informasi dan Komunikasi Publik Kecamatan Pesisir Selatan	Kecamatan Pesisir Selatan
37	pesisirtengah.pesisirbaratkab.go.id	Portal Informasi dan Komunikasi Publik Kecamatan Pesisir Tengah	Kecamatan Pesisir Tengah
38	waykrui.pesisirbaratkab.go.id	Portal Informasi dan Komunikasi Publik Kecamatan Way Krui	Kecamatan Way Krui
39	karyapenggawa.pesisirbaratkab.go.id	Portal Informasi dan Komunikasi Publik Kecamatan Karya Penggawa	Kecamatan Karya Penggawas
40	kruiselatan.pesisirbaratkab.go.id	Portal Informasi dan Komunikasi Publik Kecamatan Krui Selatan	Kecamatan Krui Selatan
41	pesisirutara.pesisirbaratkab.go.id	Portal Informasi dan Komunikasi Publik Kecamatan Pesisir Uatara	Kecamatan Pesisir Utara
42	lemong.pesisirbaratkab.go.id	Portal Informasi dan Komunikasi Publik Kecamatan Lemong	Kecamatan Lemong
43	pulaupisang.pesisirbaratkab.go.id	Portal Informasi dan Komunikasi Publik Kecamatan Pulau Pisang	Kecamatan Pulau Pisang
B	**dprd-pesisirbaratkab.go.id**		
1	www.dprd-pesisirbaratkab.go.id	Portal Informasi dan Komunikasi Publik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Sekretariat DPRD
2	jdih.dprd-pesisirbaratkab.go.id	Layanan Informasi dan Dokumentasi Produk Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Sekretariat DPRD
3	sekretariat.dprd-pesisirbaratkab.go.id	Portal Informasi dan Komunikasi Publik Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Sekretariat DPRD

Sumber : Dinas Kominfotik dan Persandian, 2023

Tabel 2.106. Layanan Publik yang diselenggarakan Secara Online dan Terpadu Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022

No	Nama Layanan Publik	Perangkat Daerah
1	SP4N Lapor	Dinas Kominfotik dan Persandian
2	Sicantik	Dinas PM dan PTSP
3	OSS	Dinas PM dan PTSP
4	SIAK	Dinas Dukcapil
5	PPID	Dinas Kominfotik dan Persandian
6	JDIH	Bagian Hukum Setdakab
7	Srikandi	Bagian Umum Setdakab
8	LPSE	Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setdakab

Sumber : Dinas Kominfotik dan Persandian, 2023

11. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Koperasi dapat diartikan sebagai badan usaha yang mempunyai anggota di mana setiap anggota memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Setiap anggota mempunyai hak suara yang sama dalam setiap keputusan yang akan diambil. Peran koperasi dalam perekonomian khususnya di Kabupaten Pesisir Barat paling tidak dapat dilihat dari kedudukannya sebagai salah satu pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor, sebagai penyedia lapangan kerja cukup besar, dan juga sebagai pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan koperasi secara terstruktur dan berkelanjutan diharapkan akan mampu menyelaraskan struktur perekonomian daerah, mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengurangi tingkat pengangguran terbuka, menurunkan tingkat kemiskinan, mendinamisasi sektor riil, dan memperbaiki pemerataan pendapatan masyarakat. Pemberdayaan koperasi juga akan dapat meningkatkan pencapaian sasaran indikator kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, koperasi sebagai sokoguru perekonomian di Kabupaten Pesisir Barat akan lebih ditingkatkan lagi. Hal ini sesuai dengan tupoksi Dinas Koperindag yang berkaitan dengan perkoperasian, yakni menumbuhkembangkan masyarakat untuk berkoperasi. Selain itu, banyak usaha-usaha mikro, kecil, dan menengah dengan berbagai macam usaha yang berpotensi untuk dijadikan badan usaha yang berbadan hukum koperasi.

Tabel 2.107.Data Koperasi Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021

No	IDKOP	Nama Koperasi	Nomor Badan Hukum	Pekon	Kecamatan	Sektor Usaha
1	1813030060001	Koperasi Lampung Mandiri Jaya	013433/BH/M.KUKM.2/V/2019	Negeri Ratu	Ngambur	Jasa Lainnya
2	1813030080001	Koperasi KPM-PKH Mandiri Sejahtera Bersama	010083/BH/M.KUKM.2/X/2018	Ketapang	Ngambur	Jasa Lainnya
3	1813030090001	Koperasi Pemasaran Prasojo Jaya Abadi	AHU-0013857.AH.01.26.TAHUN 2021	Sumber Agung	Ngambur	Jasa Lainnya
4	1813020010008	Koperasi Pondok Pesantren Ittihad	18/BH/KDK.7.5/IV/1999	Negeri Ratu Ngambur	Ngambur	Lain-Lain
5	1813030010002	Koperasi Sumber Alam Sejahtera (SAS)	518/BH/05/III.8/2/2015		Ngambur	Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan
6	1813020050001	Koperasi Ngaras Jaya Sejahtera	010576/BH/M.KUKM.2/XI/2018	Negeri Ratu Ngaras	Ngaras	Jasa Lainnya

No	IDKOP	Nama Koperasi	Nomor Badan Hukum	Pekon	Kecamatan	Sektor Usaha
7	1813020010012	Koperasi Perkebunan Pematang Jaya	518/BH/02/III.08/2015	Pekon Kota Batu	Ngaras	Jasa Lainnya
8	1813120020004	Koperasi Unit Desa Sinar Selatan	685.a/BH/7/90	Desa Padang Dalam	Ngaras	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
9	1813120010011	Koperasi Produsen Siging Utama Jaya	AHU-0004431.AH.01.26.TAHUN 2020	Kota Batu	Ngaras	Jasa Lainnya
10	1813020010009	Koperasi Serba Usaha Multi Guna	08/BH/KDK.7.5/XII/1999	Parda Suka	Ngaras	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
11	1813010040002	Koperasi Unit Desa Karya Mandiri	873/BH/7/1995	Pekon Pagar Bukit	Bangkunat	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
12	1813010040001	KSU.Bina Usaha Lestari	518/BH/13/III.08/11/2015	Pekon Pagar Bukit	Bangkunat	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
13	1813010110001	Koperasi Bina Karya	166/BH/X.4/III.09/IV/2013	Desa Tanjung Rejo	Bangkunat	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
14	1813010010009	Koperasi Wanita Kakap Merah	101/BH/III.09/IX/2007	Kota Jawa	Bengkunat Belimbing	Lain-Lain
15	1813100100005	Koperasi Jaya Bersama	146/BH/X.4/III.09/III/2011	Desa Rata Agung	Lemong	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
16	1813100110001	Koperasi Mulya Jaya	134/BH/X.4/III.06/XI/2010	Suka Mulya	Lemong	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
17	1813100010003	Koperasi Unggul Jaya	147/BH/X.4/III.09/III/2011	Malaya	Lemong	Jasa Lainnya
18	1813100010001	Koperasi Koperasi Pertanian Berkah	25/BH/KDK.7.5/V/1999	Lemong	Lemong	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
19	1813090010011	Koperasi Bina Hutan Utara	146/BH/X.4/III.09/IV/2011	Kota Karang	Pesisir Utara	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

No	IDKOP	Nama Koperasi	Nomor Badan Hukum	Pekon	Kecamatan	Sektor Usaha
20	1813090070010	Koperasi Pegawai Negeri Persatuan Guru Republik Indonesia Sangonan	136/BH/PAD/X.4/II.09/XI/2011	Kota Karang	Pesisir Utara	Jasa Keuangan dan Asuransi
21	1813090010001	Koperasi Pemuda Taruna Jaya	39/BH/KDK.7.5/III/1999	Batu Raja	Pesisir Utara	Jasa Lainnya
22	1813090010005	Koperasi Pertanian Pemancar Indah	06/BH/KDK.7.5/XI/1998	Batu Raja	Pesisir Utara	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
23	1813090010008	Koperasi Perikanan Mina Karya	51/Bh/KDK.7.5/VIII/1999	Pugung Tampak	Pesisir Utara	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
24	1813090010009	Koperasi Pegawai Negeri Mufakta	199/BH/PAD/KWK.7/VIII/1996	Pugung Tampak	Pesisir Utara	Jasa Lainnya
25	1813090010006	Koperasi Pertanian Andan Sangon	17/BH/KDK.7.5/III/1999	Kota Karang	Pesisir Utara	Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan
26	1813090010002	Koperasi Perikanan Mina Kelumbai Gading	35/BH/KDK.7.5/V/1999	Penengahan	Pesisir Utara	Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan
27	1813080110001	Koperasi Kerudung Sakti	518/BH/12/III.08/10/2015	Pekon Ulok Pandan	Karya Penggawa	Industri Pengolahan
28	1813080050018	Koperasi Pegawai Negeri Sang Muarian	08/BH/KDK.7.5/XII/1998	Menyancang	Karya Penggawa	Jasa Keuangan dan Asuransi
29	1813080010005	Koperasi Wanita Tani Lestari	14/BH/KDK.7.5/III/1999		Karya Penggawa	Lain-Lain
30	1813080010013	Koperasi Perkebunan Damar Penggawa Lima	02/BH/PAD/KDK.7.5/IX/1998		Karya Penggawa	Lain-Lain
31	1813080010004	Koperasi Serba Usaha Karya Tani	08/BH/KDK.7.5/XII/1999	Laay	Karya Penggawa	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
32	1813080010002	Koperasi Perkebunan Nila Karya	61/BH/KDK.7.4/X/1999	Way Sindi	Karya Penggawa	Lain-Lain

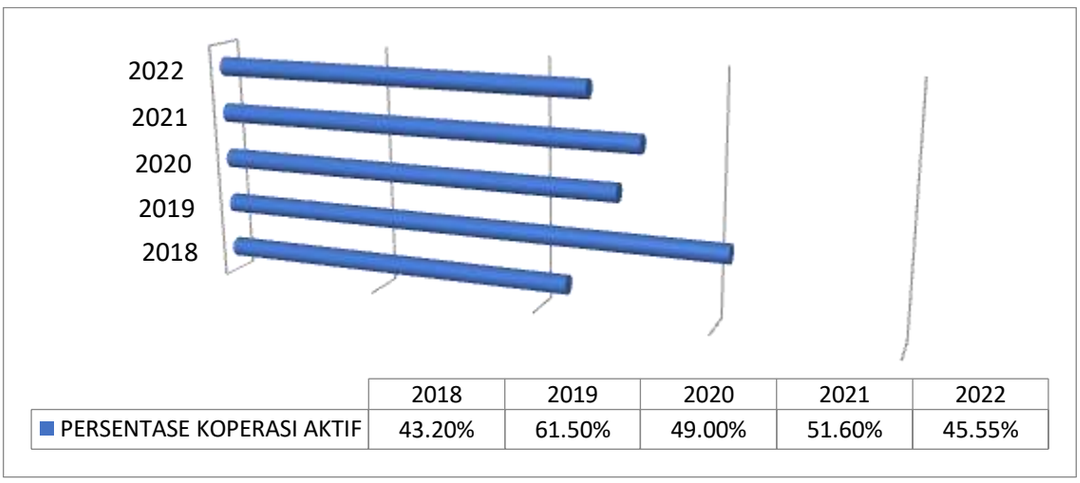
No	IDKOP	Nama Koperasi	Nomor Badan Hukum	Pekon	Kecamatan	Sektor Usaha
33	1813080010003	Koperasi Koperasi Pondok Pesantren Nidaul Islam	9/BH/PAD/KWK.7/IX/1995	Way Nukak	Karya Penggawa	Jasa Lainnya
34	1813110040001	Koperasi Batu Inton	01/BH/KDK/7.5/IX/1998	Pasar Pulau Pisang	Pulau Pisang	
35	1813070040001	Koperasi Krui Tani Sejahtera	522.11/82/4.01/2014	Gunung Kemala	Way Krui	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
36	1813060030002	Koperasi Pegawai Negeri Tut Wuri Handayani	pesi	Kelurahan Pasar Krui	Pesisir Tengah	Jasa Keuangan dan Asuransi
37	1813060100016	Koperasi Pondok Pesantren Miftahuroh man	108/BH/X.4/II.07/IV/2008	Pekon Seray	Pesisir Tengah	Jasa Keuangan dan Asuransi
38	1813060030001	Koperasi Simpan Pinjam Pasar Way Batu	800/89/BH/5-03/III/2014	Kelurahan Pasar Krui	Pesisir Tengah	Jasa Keuangan dan Asuransi
39	1813060020001	Koperasi Produsen Mina Makmur Lestari Krui	AHU-0002271.AH.01.26.TAHUN 2020	Kota Pasar krui	Pesisir Tengah	Jasa Lainnya
40	1813060020004	Koperasi Produsen Wanita Krui Kreatif	AHU-0013829.AH.01.26.TAHUN 2021	Kota Pasar krui	Pesisir Tengah	Jasa Lainnya
41	1813060020002	Koperasi Simpan Pinjam Krui Rezeki Ronatama	AHU-0010800.AH.01.26.TAHUN 2021	Kota Pasar krui	Pesisir Tengah	Jasa Lainnya
42	1813060030003	Koperasi Labuwai Lestari	133/BH/X.4/II.06/XI/2010	Kelurahan Pasar Krui	Pesisir Tengah	Jasa Keuangan dan Asuransi
43	1813060030006	Koperasi Jasa Pesona Wisata Krui	AHU-0013816.AH.01.26.TAHUN 2021	Pasar Krui	Pesisir Tengah	Jasa Lainnya
44	1813060020003	Koperasi Konsumen Batin Pertiwi Sejahtera	AHU-0013819.AH.01.26.TAHUN 2021	Pasar Kota Krui	Pesisir Tengah	Jasa Lainnya

No	IDKOP	Nama Koperasi	Nomor Badan Hukum	Pekon	Kecamatan	Sektor Usaha
45	1813060030007	Koperasi Konsumen Santri Mandiri Sentosa	AHU-0013830.AH.01.26.TAHUN 2021	Pasar Krui	Pesisir Tengah	Jasa Lainnya
46	1813060010001	Koperasi Pondok Pesantren Al-Maarif	511/BH/KWK.7/I/1996	Pasar Krui	Pesisir Tengah	Jasa Lainnya
47	1813060070001	Koperasi Konsumen Pegawai Negeri Global Usaha Angkasa	AHU-0007413.AH.01.26.TAHUN 2020	Desa Seray	Pesisir Tengah	Jasa Lainnya
48	1813060030005	Koperasi Bintang Seroja Krui	013615/BH/M.KUKM.2/V/2019		Pesisir Tengah	Jasa Lainnya
49	1813060010012	Koperasi Perikanan Mitra Mina Mandiri	85/BH/IV.09/VIII/2004		Pesisir Tengah	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
50	1813060010017	Koperasi Pegawai Negeri Pengayoman	206/BH/PAD/KWK.7/VIII/1996		Pesisir Tengah	Jasa Lainnya
51	1813060010019	Koperasi Pasar Beguai Jejama	50/BH/KWK.7/X/1997		Pesisir Tengah	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
52	1813060010020	Koperasi Serba Usaha Kemala Jaya	08/BH/KDK.7.4/XII/2002	Gunung Kemala	Pesisir Tengah	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
53	1813060010021	Koperasi Wanita Delima	104/BH/III.09/XI/2007	Seray	Pesisir Tengah	Jasa Lainnya
54		Koperasi Pesantren Pondok Al-Falah	111/BH/X.4/III.07/IX/2008	Pagar Baru	Pesisir Tengah	Jasa Lainnya
55	1813040030005	Koperasi Serba Usaha	518/BH/03/III.8/4/2015	Desa Marang	Pesisir Selatan	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
56	1813040030013	Koperasi Produsen Tanera Maju Bersama	AHU-0006475.AH.01.26.TAHUN 2020	Desa Marang	Pesisir Selatan	Jasa Lainnya
57	1813040060001	Koperasi Produsen Serba Usaha Pakor Makmur	AHU-0003055.AH.01.26.TAHUN 2020	Desa Paku Negara	Pesisir Selatan	Jasa Lainnya

No	IDKOP	Nama Koperasi	Nomor Badan Hukum	Pekon	Kecamatan	Sektor Usaha
58	1813040010008	Koperasi Serba Usaha Karya Bakti Mandiri	518/BH/09/III.8/4/2015	Marang	Pesisir Selatan	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
59	1813040010009	Koperasi Pertanian Biha Abadi	518/BH/07/III.8/2/2015	Biha	Pesisir Selatan	Jasa Lainnya
60	1813040010010	Koperasi Serai Serumpun	152/BH/X.4/III.09/XII/2011	Tanjung Raya	Pesisir Selatan	Jasa Lainnya
61	1813040010011	Koperasi Cahaya Bersama	153/BH/X.4/III.09/XII/2011	Sukarame	Pesisir Selatan	Jasa Lainnya
62	1813040010004	Koperasi Pegawai Negeri Usaha Jejama	267/BH/PAD/KWK.7/VIII/1996	Biha	Pesisir Selatan	Jasa Lainnya
63	1813050010004	Koperasi Pondok Pesantren Bina Islami	97/BH/IV.09/XI/2006	Balai Kencana	Krui Selatan	Jasa Lainnya
64	1813050070001	Koperasi Pemerihan Seangkonan	518/BH/03/III.8/03/2016	Pemerihan	Krui Selatan	Jasa Lainnya

Sumber : Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan, 2022

Gambar 2.76. Persentase Koperasi Aktif Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022



	2018	2019	2020	2021	2022
PERSENTASE KOPERASI AKTIF	43.20%	61.50%	49.00%	51.60%	45.55%

Sumber : Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan, 2023

Jumlah persentase koperasi aktif di Kabupaten Pesisir Barat secara umum terus mengalami peningkatan dari tahun 2018-2022. Pada tahun 2018 persentase sebesar 43.20% dan kembali meningkat pada tahun 2019 menjadi 61.50%. Namun demikian pada tahun 2020 angka ini turun menjadi 49,00%. Penurunan lebih disebabkan pada efek domino dari Pandemi Covid-19 yang menyerang seluruh segala sektor kehidupan masyarakat termasuk pada sisi ekonomi. Tahun 2021, dalam upaya perbaikan ekonomi masyarakat jumlah koperasi aktif meningkat 2,6%

menjadi 51,6%. Pada tahun 2022, jumlah koperasi aktif kembali turun menjadi 45.55% atau hanya sebanyak 30 koperasi yang melakukan operasional dari jumlah keseluruhan koperasi terdata sebanyak 64 koperasi. Hal ini disebabkan mulai menurunnya pemberdayaan ekonomi masyarakat yang mulai bergeser meninggalkan sistem perkoperasian.

Tabel 2.108.Jumlah Koperasi Aktif Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan Kecamatan Tahun 2019-2022

No	Kecamatan	2019	2020	2021	2022
1	Lemong	2	2	2	2
2	Pesisir Utara	2	1	2	1
3	Pulau Pisang	1	1	1	0
4	Karya Penggawa	4	4	2	3
5	Way Krui	1	1	1	0
6	Pesisir Tengah	6	6	10	10
7	Krui Selatan	1	1	1	1
8	Pesisir Selatan	5	4	2	3
9	Ngambur	3	2	2	3
10	Ngaras	2	2	4	4
11	Bangkunat	4	4	3	3
	Jumlah	**31**	**28**	**30**	**30**

Sumber : Dinas Koperasi, IKM dan Perdagangan, 2023

Tabel 2.109. Jenis Usaha Koperasi Aktif Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan Kecamatan Tahun 2022

No	Kecamatan	Jenis Koperasi					Jumlah
		Koperasi Unit Desa	Koperasi Pegawai Republik Indonesia	Koperasi Karyawan	Koperasi Pedagang Pasar	Lainnya	
1	Lemong				1	1	
2	Pesisir Utara					1	
3	Pulau Pisang						
4	Karya Penggawa		1			2	
5	Way Krui						0
6	Pesisir Tengah	1	1			8	
7	Krui Selatan					1	
8	Pesisir Selatan					3	
9	Ngambur	1				2	
10	Ngaras	1				3	
11	Bangkunat	1				2	
	Jumlah	**4**	**2**	**0**	**1**	**23**	**0**

Sumber : Dinas Koperasi, IKM dan Perdagangan, 2023

Berikutnya, berdasarkan pada klasifikasi Industri Kecil Menengah (IKM), pada tahun 2021 terdapat 31 jenis IKM dan pada tahun 2022 terjadi perkembangan jenis IKM sebanyak terdapat 42 jenis. Pada tahun 2021, industri kain sulaman/bordir menjadi IKM dengan serapan Tenaga kerja terbesar sebanyak 340

orang dan pada tahun 2022 industri kain sulaman/bordir menyerap hampir 800 tenaga kerja. Sedangkan untuk nilai produksi terbesar pada tahun 2021 dan tahun 2022 adalah industri penggulingan padi dan penyosohan beras dengan nilai Rp.18.606.000.000,- dan Rp.19.206.000.000,-.

Tabel 2.110.Jumlah Industri Kecil Menengah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021

No	Jenis Usaha	Jumlah Unit Usaha	Tenaga Kerja	Nilai Investasi (juta Rp.)	Nilai Produksi (juta Rp.)
1	Penggaraman/Pengeringan Ikan	6	38	75	135
2	Pengasapan/Pemanggangan Ikan	8	17	40	336
3	Berbasis Daging Lumatan dan Surimi	11	25	110	936
4	Tempe Kedelai	43	124	4	3
5	Tahu Kedelai	29	67	385	1.877
6	Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras	76	207	7.460	18.606
7	Produk Roti dan Kue	17	34	175	768
8	Gula Merah	20	59	100	906
9	Makanan dan Masakan Olahan	19	32	185	985
10	Pengolahan Kopi	33	67	460	1.022
11	Pengolahan The	1	8	15	24
12	Kue Basah	5	9	30	72
13	Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya	44	114	645	3.090
14	Produk Makanan Lainnya	3	5	20	48
15	Air Minum dan Air Mineral	13	29	385	87
16	Kain Tenun Ikat	3	6	60	144
17	Kain Sulaman/Bordir	86	340	2.290	6.192
18	Barang Jadi Tekstil Sulaman	1	2		
19	Penjahitan dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan	3	16	45	
20	Barang Bangunan dari Kayu	9	34	300	792
21	Barang Anyaman dari Rotandan Bambu	17	36	265	108
22	Kerajinan Ukiran dari Kayu Bukan Mebeler	59	138	950	4.620
23	Batu Bata dari Tanah Liat/Keramik	41	147	2.400	3.133
24	Barang Logam Lainnya	1	1	10	84
25	Furnitur dari Kayu	29	56	655	1.656
26	Furnitur dari Rotan/Bambu	4	7	90	187
27	Permata	4	8	40	240
28	Kerajinan YTDL	16	34	170	759
29	Besi dan Baja Dasar	3	6	30	151
30	Jasa Industri Untuk Pengerjaan Khusus	119	269	5.900	4.885
31	Perlengkapan dan Peralatan Rumah	3	9	15	136
	Jumlah	**726**	**1.944**	**23.080**	**50.581**

Sumber : Dinas Trans Naker dan Perindustrian, 2023

Tabel 2.111.Jumlah Industri Kecil Menengah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022

No	Jenis Usaha	Jumlah Unit Usaha	Tenaga Kerja	Nilai Investasi (juta Rp.)	Nilai Produksi (juta Rp.)
1	Perlengkapan Rumah Tangga dari Tanah Liat/Keramik	1	2	5	9
2	Barang dari Kapur	3	6	30	67
3	Furnitur dari Kayu	63	110	1.235	4.411
4	Kerajinan YDTL	1	1	5	9
5	Penggaraman/Pengeringan Ikan	6	38	75	1.350
6	Pengasapan/Pemanggangan Ikan	8	17	40	336
7	Berbasis Daging Lumatan dan Surimi	11	25	110	936
8	Tempe Kedelai	44	126	455	3.868
9	Tahu Kedelai	26	59	370	1.753
10	Penggilingan Padi dan Penyosongan Beras	69	190	7.230	19.206
11	Produk Roti dan Kue	17	34	185	777
12	Gula Merah	20	59	100	906
13	Makanan dan Masakan Olahan	17	28	177	999
14	Pengolahan Kopi	30	60	445	950
15	Pengolahan Teh	1	8	15	24
16	Kue Basah	5	9	35	120
17	Kerupuk, Keripik dan Sejenisnya	40	95	580	2.820
18	Produk Makanan Lainnya	2	4	20	48
19	Minuman Ringan	1	1	15	12
20	Air Minum dan Air Mineral	13	29	435	111
21	Kain Tenun Ikat	3	6	60	144
22	Kain Sulaman	600	800	12.530	14.112
23	Barang dari Tali	44	44	110	525
24	Penjahitan dan Pembuatan Pakaian sesuai Pesanan	5	18	65	120
25	Perlengkapan Pakaian dari Tekstil	1	3	5	10
26	Pakaian Jadi dan Barang dari Kulit Berbulu	1	2	10	48
27	Barang Bangunan dari Kayu	8	28	255	672
28	Barang Lainnya dari Kaui	5	5	25	32
29	Barang Anyaman dari Rotan/Bambu	66	98	887	864
30	Barang Anyaman dari Tanaman bukan Rotan/Bambu	28	42	113	515
31	Kerajinan Ukiran dari Rotan/Bambu	60	129	950	4.041
32	Percetakan Umum	1	1	15	4
33	Batu Bata dari Tanah Liat/Keramik	57	202	3.175	3.308
34	Genteng dari Tanah Liat/Keramik	1	4	50	45
35	Barang dari Semen dan Kapur untuk Konstruksi	2	4	45	465
36	Alat Potong dan Perkakas Tangan Pertukangan	4	8	20	192
37	Barang Logam lainnya YTDL	7	16	55	372

38	Furnitur dari Rotan/Bambu	4	7	90	187
39	Permata	5	7	35	138
40	Kerajinan YTDL	31	41	240	737
41	Pengolahaan Lainnya YTDL	1	1	20	6
42	Jasa Industri untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam dan Barang dari Logam	120	273	5.970	4.969
	Jumlah	**1.432**	**2.640**	**36.288**	**70.224**

Sumber : Dinas Trans Naker dan Perindustrian, 2023

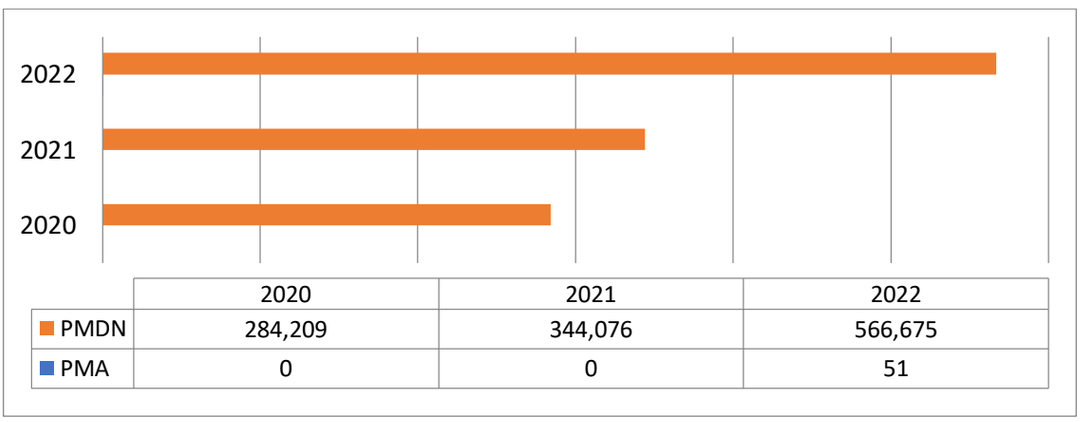
12. Penanaman Modal

Penanaman modal merupakan salah satu urusan yang menjadi wewenang pemerintah daerah, dengan harapan dapat mempercepat dan mempermudah proses perizinan berusaha bagi masyarakat level daerah. Pemerintah daerah menjadi ujung tombak dalam menjaring para pengusaha/investor untuk menanamkan modal usaha di daerahnya dalam upaya memberdayakan berbagai potensi unggulan daerah dan membuka lapangan pekerjaan.

Berdasarkan data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, pada tahun 2020 jumlah PMDN (berdasarkan pada data OSS RBA) di berbagai sektor usaha di Kabupaten Pesisir Barat mencapai Rp.284.209.050.110,00. Tahun 2021 terdapat peningkatan nilai invstasi PMDN menjadi sebesar Rp.334.076.689.383,00. Pada tahun 2022, nilai investasi naik 64,53% menjadi sebesar Rp.566.675.434.618,00.

Bila melihat pada data yang NSWI, untuk tahun 2020 tidak ada realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) di Kabupaten Pesisir Barat, begitu juga pada capaian tahun 2021 tidak terdapat investasi di daerah berdasarkan pada PMA. Lebih lanjut pada tahun 2022, sebesar 51 juta rupiah investasi berasal dari PMA. Kecilnya nilai PMA dan dibandingkan dengan nilai PMDN tentunya menjadi catatan penting dalam perkembangan dunia usaha di Kabupaten Pesisir Barat.

Gambar 2.77. Perkembangan Realisasi PMDN dan PMA Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020-2022 (dalam juta rupiah)



	2020	2021	2022
PMDN	284,209	344,076	566,675
PMA	0	0	51

Sumber : Dinas PM dan PTSP, 2023

Tabel 2.112.Pencapaian Indikator Kinerja Penanaman Modal Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022

Indikator Kinerja Utama	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Perusahaan/ Orang	61	417	729	868	1456
Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (juta)	Rupiah	301.541	379.635	284.209	334.076	617.775
Daya serap tenaga kerja	Orang	82	139	186	3378	8121

Sumber : Dinas PM dan PTSP, 2023

Berdasarkan pada pencapaian kinerja urusan penanaman modal Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) pada tahun 2020 mencapai 254 perusahaan/orang dengan nilai investasi mencaoai 344.158 (juta rupiah). Capaian ini meningkat bila dibandingkan dengan data pada tahun 2018 sebanyak 61 perusahaan/orang investor dengan nilai investasi berada pada angka 301.541 (juta rupiah). Pada tahun 2022, sebanyak 1.456 investor yang hadir di daerah dengan nilai investasi mencapai total 617.775 (juta rupiah).

Berikutnya untuk rasio daya serap tenaga kerja pada tahun 2018 sebanyak 82 orang yang terdata, tahun 2019 sebanyak 139 orang dan tahun 2020 sebanyak 186 orang pekerja. Tahun 2021 capaian investasi yang masuk memberikan kemungkinan daya serap tenaga kerja sebanyak 3.378 orang dan terus meningkat pada tahun 2022 menjadi 8.121 orang.

13. Pemuda dan Olahraga

Fasilitasi bagi generasi muda untuk dapat mengembangkan diri dan kompetensi secara positif merupakan salah satu langkah dari Pemerintah Daerah dalam mengembangkan Sumber Daya Manusia yang berkompeten dan berkualitas pada usia kerja dan produktif. Pemuda sebagaimana diatur pada UU Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, adalah warga negara yang memasuki periode penting dan perkembangan yang berusia 16-30 tahun. Pemuda sebagai calon penerus kepemimpinan di daerah dan negara harus dikelola untuk dapat dipersiapkan dengan baik, khususnya dari sisi kompetensi dalam bidang ekonomi dan kepemimpinan.

Berdasarkan pada data kependudukan di Kabupaten Pesisir Barat, jumlah angkatan kerja cukup besar sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.113. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Kategori Pekerja Kabupaten Pesisir Barat, 2018-2022

Kategori	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Angkatan kerja	73.905	77.816	79.227	84.677	81.839
Bukan angkatan kerja	35.392	31.952	33.093	28.795	32.989
Jumlah/ Total	**109.297**	**109.768**	**112.320**	**113.472**	**114.828**

Sumber : BPS Pesisir Barat, 2023

Besarnya angkatan kerja di Kabupaten Pesisir Barat dari Tahun 2018-2022 yang berkisar antara 73.000-85.000 orang harus menjadi perhatian daerah untuk dapat mengelola dan mempersiapkan pemuda yang dapat berprestasi dalam seluruh bidang pembangunan. Terlebih tidak semua angkatan kerja dimaksud terserap seluruhnya dalam dunia usaha.

Jumlah pemuda yang masuk sebagai anggota organisasi kepemudaan pada tahun 2022 sebanyak 13.368 orang dengan jumlah organisasi kepemudaan sebanyak 86 organisasi.

Tabel 2.114. Jumlah Pemuda yang Menjadi Anggota Organisasi Kepemudaan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022

No	Kecamatan	Usia		
		16-19	20-24	25-30
1	Pesisir Tengah	425	620	750
2	Pesisir Selatan	500	790	852
3	Lemong	320	450	425
4	Pesisir Utara	130	125	190
5	Karya Penggawa	315	415	500
6	Pulau Pisang	24	36	25
7	Way Krui	180	270	300
8	Krui Selatan	345	300	280
9	Ngambur	500	900	709
10	Ngaras	132	321	200
11	Bangkunat	689	677	709
	Jumlah	**3.560**	**4.904**	**4.940**

Sumber : Dinas Pora, 2023

Tabel 2.115. Pencapaian Indikator Kinerja Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022

Indikator Kinerja Utama	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase organisasi kepemudaan yang memenuhi kualifikasi berdasarkan standar organisasi kepemudaan	Jumlah	20	25	25	40	86
Persentase penyelenggaraan kejuaraan/ perlombaan olahraga skala kabupaten yang difasilitasi pemda	Persen	60	60	60	60	60

Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	Orang	2	4	4	8	15
Cakupan pembinaan atlet muda	Orang	10	15	33	34	40
Jumlah atlet berprestasi	Orang	17	17	22	50	79

Sumber : Dinas Pora, 2023

Berdasarkan pada data di atas, dapat dilihat bahwa Kabupaten Pesisir Barat dalam pengembangan urusan kepemudaan dan olahraga terus berusaha untuk dapat meningkatkan peranan pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari indikator persentase organisasi kepemudaan yang memenuhi kualifikasi berdasarkan standar organisasi kepemudaan pada tahun 2018 sebesar 20 organisasi dan terus meningkat menjadi 25 organisasi pada tahun 2019 dan tahun 2020. Pada tahun 2021 sebanyak 40 organisasi. Berikutnya pada tahun 2022 sebanyak 86 organisasi kepemudaan yang aktif dan memenuhi standard kualitfikasi. Berikutnya untuk sisi olahraga setidaknya pemerintah daerah selama 1 tahun terus berusaha untuk dapat menyelenggarakan kejuaraan/perlombaan olahraga skala kabupaten sebesar 60%.

Lebih lanjut, jumlah cakupan Pelatih yang bersertifikasi masih terasa minim dengan jumlah 4 orang di tahun 2020 dan 8 orang pada tahun 2021 serta 15 orang pada tahun 2022. Hal ini sejalan dengan jumlah atlet berprestasi sebanyak 22 orang pada tahun 2020, lalu 50 orang pada tahun 2021 dan meningkat pada tahun 2022 sebanyak 79 atlet berprestasi.

Tabel 2.116. Atlet Berprestasi dan Pelatih Bersertifikasi Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022

No	Cabang Olahraga	Atlet Berprestasi	No	Cabang Olahraga	Pelatih Bersertifikasi
1	Taekwondo	4	1	Sepak Bola	5
2	Hapkindo	11	2	Karate	1
3	Pencak Silat	1	3	Taekwondo	1
4	Tarung Derajat	14	4	Pencak Silat	1
5	Kick Boxing	10	5	Senam	5
6	Wushu	13	6	Tarung Derajat	1
7	Kempo	11	7	Bulu Tangkis	1
8	Bridge	2			
9	Atletik	2			
10	Muangthai	11			
	Jumlah	**79**		**Jumlah**	**15**

Sumber : Dinas Pora, 2023

14. Statistik

Ketersediaan data statistik dalam perencanaan pembangunan di suatu daerah merupakan suatu hal yang mutlak dan wajib ada. Data statistik dipergunakan sebagai salah satu alat ukur dalam menilai keberhasilan suatu program/kegiatan dan juga sebagai patokan dalam pengambilan sebuah kebijakan. Hingga saat ini, Kabupaten Pesisir Barat belum memiliki kantor resmi Badan Pusat Statistik (BPS). Kebutuhan data masih disediakan oleh BPS Kabupaten Lampung Barat yang juga

menjadi Kabupaten Pesisir Barat sebagai wilayah kerjanya. BPS sebagai lembaga yang menyediakan data sekunder sangat diharapkan mampu memberikan fasilitas pelayanan kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat melalui ketersediaan dan kecepatan data, karena belum banyak dokumen dan/atau data yang mampu disediakan oleh BPS Lampung Barat dan/atau BPS Pesisir Barat bagi Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.

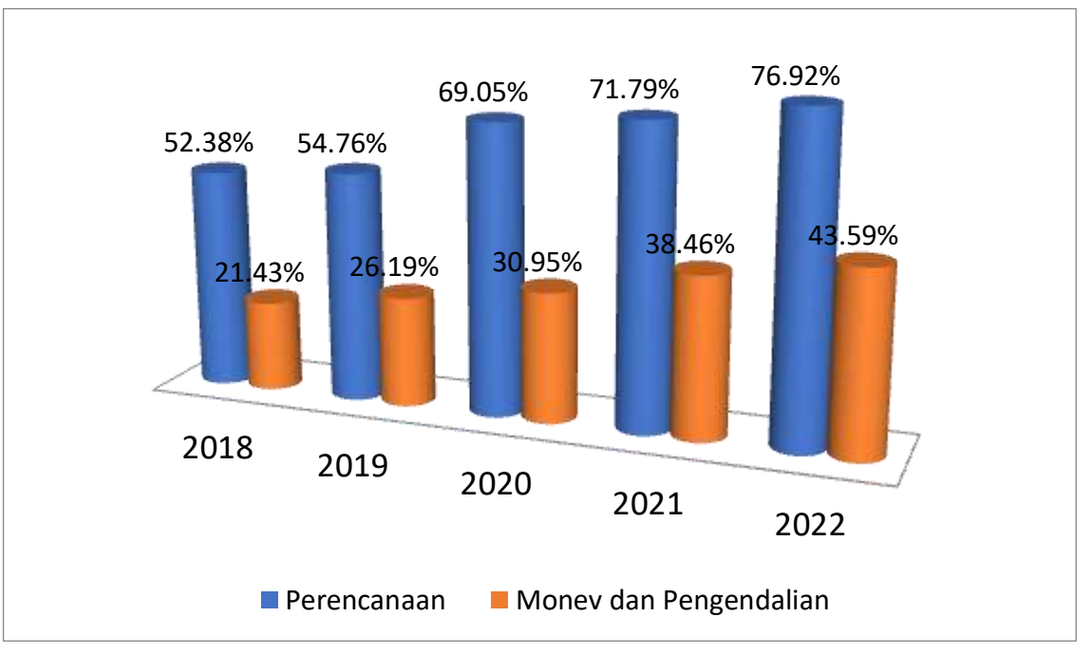
Tabel 2.117.Kerjasama Statistik Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dengan BPS Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020-2022

Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
1	Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020	1	Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021	1	Statistik Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022
2	PDRB Kabupaten Pesisir Barat Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020	2	Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021	2	Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022
3	PDRB Kabupaten Pesisir Barat Menurut Pengeluaran Tahun 2016-2020	3	PDRB Kabupaten Pesisir Barat Menurut Pengeluaran Tahun 2017-2021	3	Pesisir Barat Dalam Angka (PBDA) Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022
4	Pesisir Barat Dalam Angka (PBDA) Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020	4	PDRB Kabupaten Pesisir Barat Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021	4	Kecamatan Pesisir Tengah Dalam Angka 2022
5	Kecamatan Pesisir Tengah Dalam Angka 2020	5	Pesisir Barat Dalam Angka (PBDA) Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021	5	Kecamatan Pesisir Selatan Dalam Angka 2022
6	Kecamatan Pesisir Selatan Dalam Angka 2020	6	Kecamatan Pesisir Tengah Dalam Angka 2021	6	Kecamatan Pesisir Utara Dalam Angka 2022
7	Kecamatan Pesisir Utara Dalam Angka 2020	7	Kecamatan Pesisir Selatan Dalam Angka 2021	7	Kecamatan Krui Selatan Dalam Angka 2022
8	Kecamatan Krui Selatan Dalam Angka 2020	8	Kecamatan Pesisir Utara Dalam Angka 2021	8	Kecamatan Lemong Dalam Angka 2022
9	Kecamatan Lemong Dalam Angka 2020	9	Kecamatan Krui Selatan Dalam Angka 2021	9	Kecamatan Karya Penggawa Dalam Angka 2022

10	Kecamatan Karya Penggawa Dalam Angka 2020	10	Kecamatan Lemong Dalam Angka 2021	10	Kecamatan Way Krui Dalam Angka 2022
11	Kecamatan Way Krui Dalam Angka 2020	11	Kecamatan Karya Penggawa Dalam Angka 2021	11	Kecamatan Ngambur Dalam Angka 2022
12	Kecamatan Ngambur Dalam Angka 2020	12	Kecamatan Way Krui Dalam Angka 2021	12	Kecamatan Ngaras Dalam Angka 2022
13	Kecamatan Ngaras Dalam Angka 2020	13	Kecamatan Ngambur Dalam Angka 2021	13	Kecamatan Bangkunat Dalam Angka 2022
14	Kecamatan Bangkunat Dalam Angka 2020	14	Kecamatan Ngaras Dalam Angka 2021	14	Kecamatan Pulau Pisang Dalam Angka 2022
15	Kecamatan Pulau Pisang Dalam Angka 2020	15	Kecamatan Bangkunat Dalam Angka 2021		
		16	Kecamatan Pulau Pisang Dalam Angka 2021		

Sumber : BPS Pesisir Barat , 2023

Gambar 2.78. Penggunaan Data Statistik dalam Perencanaan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022



Sumber : Bappelitbangda, 2023

15. Persandian

Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kripto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodelogis dan konsisten serta terkait pada etika profesi sandi. Urusan persandian pada dasarnya adalah kegiatan pengamanan kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh intern pemerintah daerah dalam pelayanan kedinasan pimpinan daerah. Hingga saat ini, Kabupaten Pesisir Barat dalam kaitannya dengan pelaksanaan urusan persandian fokus pada menjaga informasi yang wajib dilindungi agar salama masa berlakunya informasi yang wajib dilindungi tersebut/dikecualikan tetap dapat terjaga kerahasiannya, keutuhan dan keasliannya, untuk menjaga stabilitas daerah. Informasi dimaksud terpisah dengan informasi yang dapat diakses oleh publik/masyarakat.

Hingga saat ini, Kabupaten Pesisir Barat baru memiliki 1 (satu) orang ASN yang memiliki sertifikasi sebagai sandiman. Sementara itu hingga tahun 2019-2021, perangkat daerah yang mempergunakan persandian dalam mengelola informasi sebanyak 2019 (2%); 2020 (2%); 2021 (2%); dan 2022 (2%) dari keseluruhan jumlah perangkat daerah. Untuk data persentase pengamanan informasi daerah yang terselenggara dengan baik tahun 2019 (65%); 2020 (65%); 2021 (70%); dan 2022 (100%). Secara bertahap urusan persandian akan ditingkatkan baik dari sisi SDM maupun sarana dan prasarana pendukung kegiatan.

Tabel 2.118. Pelaksanaan Urusan Persandian Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022

No	Jenis	Jumlah	Keterangan
1	Kegiatan Strategis yang telah diamankan melalui pengamanan sinyal	2 Kegiatan Strategis	Terlaksana dengan baik
2	Sistem Elektronik yang Menerapkan SMKI dan diamankan	3 Sistem Elektronik	Terlaksana dengan baik, diamankan sertifikat elektronik atau aplikasi persandian
3	Sistem Elektronik atau aset informasi yang telah diaudit	3 Sistem Elektronik	Terlaksana dengan baik dengan resiko kategori rendah
4	Penerapan Titik Komunikasi pada Pemerintah Daerah	3 Titik Komunikasi	Terlaksana dengan baik dengan 3 titik komunikasi berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi

Sumber : Dinas Kominfotik dan Persandian, 2023

16. Kebudayaan

Sebagai bentuk dari upaya untuk mempromosikan kebudayaan daerah, Kabupaten Pesisir Barat selalu berupaya untuk dapat mengikuti dan/atau melaksanakan kegiatan/event promosi kebudayaan. Kegiatan rutin yang diikuti setidaknya adalah (1) pementasan di TMII; (2) pementasan di Pameran Pembangunan Provinsi; (3) Pementasan di Pameran Pembangunan Kabupaten.

Pengembangan kebudayaan daerah diarahkan bersamaan dengan pengembangan pariwisata daerah. Hal ini dikarenakan Kabupaten Pesisir Barat merupakan daerah yang memiliki banyak atraksi budaya khas yang merupakan salah satu magnet bagi wisatawan untuk berkunjung ke daerah.

Bermacam kegiatan adat istiadat masyarakat asli Lampung Krui masih tetap ada dan lestari, sehingga dapat dijadikan sebagai potensi wisata budaya. Adapun daya tarik yang ditawarkan seperti upacara adat serta berbagai kesenian daerah. Selain itu, tempat-tempat bersejarah juga banyak dijumpai yang berguna untuk apresiasi seni dan budaya, penelitian sejarah serta ziarah. Obyek-obyek wisata budaya/religi tersebut diantaranya:

Tabel 2.119. Sebaran Potensi Wisata Religi dan Budaya Kabupaten Pesisir Barat

No	Nama Obyek Wisata	Kecamatan	Daya Tarik
1	Makam Abang Kunat	Ngaras	Makam Bersejarah
2	Goa Matu	Karya Penggawa	Goa Wisata
3	Makam Gajah Mada	Pesisir Utara	Makam Bersejarah
4	Makam Syekh Aminullah	Lemong	Makam Bersejarah
5	Tenun Tapis	Pulau Pisang	Praktek Tenun Tapis Lampung

Sumber : Dinas Pariwisata, 2023

Selanjutnya Kabupaten Pesisir Barat juga memiliki beberapa kegiatan/event budaya yang rutin diselenggarakan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan, antara lain sebagai berikut:

- *Festival Teluk Stabas,* merupakan salah satu festival ragam budaya yang ada di daerah Pesisir Barat. Pelaksanaannya merupakan rangkaian kegiatan perayaan Hari Ulang Tahun Kabupaten Pesisir Barat. Dalam kegiatan Teluk Stabas ini diadakan perlombaan budaya dan olahraga lain: kebut Pesagi, Kebut Jukung (sampan), Pawai Budaya, dan lomba tarian adat tradisional.
- *Ngumbai Lawok*, merupakan pesta rakyat yang bermakna sedekah laut (ruwat laut). Pesta ini dilakukan biasanya setahun sekali di Krui.
- *Krui Fair,* merupakan event pameran pembangunan Kabupaten Pesisir Barat yang rutin dilaksanakan setiap tahun. Pameran ini dalam pelaksanaannya bersanding dengan kegiatan Festivas Teluk Stabas.
- *Pentas Budaya Pesisir Barat*, merupakan event atraksi seni dan budaya Kabupaten Pesisir Barat dan. Pada acara ini juga menampilkan beberapa atraksi kesenian dari daerah lain, selain itu pada acara ini juga memberikan penghargaan dan/atau tali asih kepada seniman daerah yang berjasa dalam pengembangan kesenian asli.

Berikutnya, berdasarkan data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2021 telah ada pencatatan 9 Warisan Budaya Tak benda milik pemerintah daerah yang sudah ditetapkan, sebagai berikut:

Tabel 2.120. Warisan Budaya Tak Benda Kabupaten Pesisir Barat

No	Tahun Penetapan	Nomor Penetapan	Nama Karya Budaya
1	2015	201500211	Gulai Taboh
2	2016	201600335	Kakiceran
3	2017	201700486	Nyambai
4	2018	201800656	Nyuncun Pahakh
5	2019	201900887	Hadra Ugan
6	2019	201900888	Ngunduh Damakh
7	2019	201900889	Ngejalang Kubokh
8	2019	201900890	Tari Dibingi
9	2020	202001155	Gulai Bebat

Sumber : Dinas P dan K, 2023

Penetapan cagar budaya melalui Peraturan Daerah menjadi salah satu indikator kinerja yang ingin segera dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Penetapan cagar budaya ini akan memudahkan daerah dalam mengembangkan kebudayaan yang terarah dan terukur. Kabupaten Pesiisr Barat telah memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pelestarian Budaya Tradisional Dan Pemajuan Kebudayaan. Proses penyusunan Perda tentang Cagar Budaya akan menjadi perhatian daerah.

Tabel 2.121. Warisan Budaya Kabupaten Pesisir Barat

No	Nama Warisan Budaya	Keterangan
1	Goa Matu	Merupakan goa yang terbentuk secara alami yang berada pada Pantai Way Sindi Hanuan, Karya Penggawa
2	Lamban Gedung Penengahan	Merupakan istana bagi Kepaksian Penengahan. Luas lahan 438m^2, luas bangunan 192m^2 dan didalamnya terdapat beberapa benda pusaka
3	Makam Syek Aminullah	Merupakan makam ahli agama yang berada pada wilayah TNBBS pada Pekon Pugung Tanjung Jaoh, Pugung
4	Lamban Gedung Marga Bangkunat	Merupakan istana bagi Marga Bangkunat, berdiri sejak 200 tahun yang lalu
5	Makam Syek Raja Makdum	Merupakan makam keramat bagi warga Pekon Kota Jawa, Bangkunat yang diperkirakan telah ada ratusan tahun lalu
6	Makam Bangkunat	Merupakan makam keramat Abang Kunat, pendiri daerah Bangkunat
7	Sumur Tua Kunat	Merupakan salah satu sumber air bersih pertama berusia ratusan tahun di daerah
8	Makam Gajah Mada	Merupakan makam yang dipercaya sebagai petilasan dari Patih Majapahit, Gajah Mada pada Pekon Pugung, Pesisir Utara
9	Goa Buyung	Merupakan goa yang terbentuk secara alami dan terdapat banyak Stalaktis dan Stalagmit berusia ribuan tahun dan berada pada Pekon Pahmungan, Krui Selatan

10	Keramat Ngambur Pekon Mon Pedanginan Tempat Muara Tembulih	Merupakan makam tua warga Pekon Mon, Ngambur
11	Keramat Karang Padung Sakti Singanom Jaganiti	Merupakan makam tua warga Ngambur
12	Lamban Gedung	Pekon Negeri Ratu Ngambur, Ngambur dan didalamnya terdapat bebebrapa pusaka
13	Lamban Gedung Marga Ulu Krui	Bangunan Adat Marga Ulu Krui, Way Krui
14	Lamban Dalom Marga Ulu Krui	Bangunan Adat Marga Ulu Krui, Way Krui
15	Keramat Tambak Balak Hirau Biha	Merupakan makam tua warga di Pesisir Selatan
16	Keramat Selalau Pekon Biha Tuha	Merupakan makam tua warga di Pesisir Selatan dan didalamnya terdapat beberapa pusaka
17	Lamban Adat Pekon Marang	Merupakan bangunan adat Marga Pekon Marang dan didalamnya terdapat beberapa pusaka

Sumber : Dinas P dan K, 2023

17. Perpustakaan

Kabupaten Pesisir Barat hingga saat ini telah memiliki gedung/bangunan khusus perpustakaan daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan walaupun masih dalam bentuk bangunan sederhana yang dikondisikan sebagai perpustakaan. Koleksi buku beberapa juga masih berada tersebar di masing-masing perangkat daerah. Pengembangan perpustakaan sebagai urusan wajib non pelayanan dasar sedang direncanakan secara bertahap dalam upaya meningkatkan mutu dan kualitas literasi daerah.

Pada tahun 2022, nilai indeks literasi masyarakat tercatat sebesar 6.23. angka ini didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur unsur pembangunan literasi masyarakat dan juga aspek masyarakat. Dimana jumlah pengunjung perpustkaan sebanyak 335 orang/tahun dengan nilai rasio 0,002 bila dibandingkan dengan jumlah penduduk.

Tabel 2.122. Data Urusan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Perpustakaan Kabupaten	1	1	1	1	1
a	Perpustakaan Kecamatan	10	10	10	10	10
b	Perpustakaan Desa	23	23	23	23	23
c	Perpustakaan SMP	26	26	26	26	26
d	Perpustakaan SD	45	45	45	45	45
e	Perpustakaan TK/PAUD	0	0	0	0	0
2	Jumlah Buku	3.237 Buku	3.345 Buku	3.350 Buku	3.350 Buku	9.836 Buku

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
3	Jenis Buku	9 Jenis Buku	9 Jenis Buku	9 Jenis Buku	9 Jenis Buku	9 Jenis Buku
4	Jumlah Judul Buku	385 Judul	570 Judul	575 Judul	575 Judul	1.544 Judul
5	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	50	70	150	157	335
6	Jumlah Pustakawan Daerah	0	0	1	1	2

Sumber : Setdakab, 2023

Jumlah buku di perpustakaan daerah pada tahun 2018 sebanyak 3.237 buku (385 judul), meningkat pada tahun 2019 menjadi 3.345 buku (570 judul) dan pada tahun 2020 menjadi 3.350 buku (575 judul) dan tahun 2021 data tetap pada 3.350 buku (575 judul). Pada tahun 2022 terjadi peningkatan dengan jumlah koleksi buku sebanyak 9.836 Buku (1.544 judul). Jumlah koleksi buku tersebut memiliki rasio 0.06 bila dibandingkan dengan jumlah penduduk.

Sementara itu untuk jumlah pustakawan di daerah hingga tahun 2022 sebanyak 2 (dua) orang pustakawan setelah sebelumnya hanya 1 (satu) orang pada tahun 2021. Namun demikian, bila dihitung dengan keseluruhan perpustakaan baik daerah dan juga perpustakaan kecamatan dan sekolah terdapat 178 tenaga perpustakaan yang tersebar di 105 perpustakaan atau dengan rasio hanya 0,01 dibandingkan dengan jumlah penduduk.

Pengembangan urusan perpustakaan masih menjadi tantangan bagi daerah, baik dari sisi penyediaan sarana dan prasarana pendukung, jumlah SDM, hingga upaya-upaya dalam meningkatkan minat baca dan literasi dari penduduk. Idealnya, urusan perpustakaan juga diarahkan untuk memperkuat perannya dalam peningkatan kualitas SDM masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan mengurangi kesenjangan akses informasi diantara penduduk.

18. Kearsipan

Penyelenggaraan kearsipan daerah adalah keseluruhan kegiatan dalam upaya meliputi kebijakan, pengelolaan, pembinaan serta pengawasan kerarsipan dalam suatu sistem kearsipan yang didukung oleh SDM, sarana dan prasarana, pendanaan serta sumber daya lainnya yang relevan. Sebagai daerah baru, jumlah arsip statis dan arsip dinamis yang berasal dari perangkat daerah belum dikelola secara optimal.

Hingga tahun 2022, terdapat 353 arsip yang telah disimpan oleh Sekretariat Daerah sebagai pelaksana urusan kearsipan. Dari jumlah 353 arsip tersebut sebanyak 342 arsip termasuk kedalam klasifikasi arsip statis daerah dan sebanyak 28 arsip yang telah dibuatkan dalam daftar arsip.

Sementara itu, hingga saat ini di Kabupaten Pesisir Barat jumlah ASN yang memiliki sertifikat sebagai arisparis masih 0 (nol). Hal ini tentu saja menjadikan pengembangan urusan kearsipan memiliki tantangan yang besar karena minimnya dukungan sumber daya, baik keuangan dan juga manusia.

Tabel 2.123. Data Urusan Kearsipan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Arsip / Dokumen Yang Dipelihara	55 Arsip Vital	55 Arsip Vital	55 Arsip Vital	55 Arsip Vital	342 Arsip Vital
2	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	15%	15%	15%	16,30%	39,00%
3	Jumlah Arsiparis Daerah	0	0	0	0	1 (belum bersertifikat)

Sumber : Setdakab, 2023

2.1.3.2. Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Perikanan

Potensi Perikanan di Kabupaten Pesisir Barat tersebar di seluruh wilayah yang terdiri dari potensi perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Untuk perikanan tangkap berada di sepanjang ± 210 km dari garis pantai Kabupaten Pesisir Barat atau 19% dari panjang garis pantai Provinsi Lampung, yang langsung berhadapan dengan Samudera Hindia. Sejauh 0-4 mil (±168.941 Ha) adalah merupakan wilayah tangkap yang dikelola Kabupaten Pesisir Barat dengan Jumlah nelayan mencapai ±15.100 orang.

Potensi ikan tangkap di peraian Kabupaten Pesisir Barat mencapai ±140.000 ton/tahun dengan total hasil tangkapan baru mencapai rata-rata ±14.000 ton/tahun atau rata-rata hanya 10,00% dari potensi yang ada. Potensi ikan bernilai ekonomis diantaranya ikan Tuhuk/Blue Marlin sebesar 1.600-1.800 ton/tahun, ikan tongkol total tangkapan 3.000-3.500 ton/tahun, berikutnya ikan kakap tangakapan 600-700 ton/tahun.

Tabel 2.124.Jumlah Produksi Hasil Perikanan Tangkap Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021/2022

No	Kec	Jenis Ikan (ton)										
		Tongkol	Layur	Tuhuk	Lobster	Tuna	Tengiri	Layang	Simba	Kakap	Gurita	Lain-lain
1	Bangkunat	452	300	0	300	0	174	100	134	100	126	200
2	Ngaras	350	75	0	0	0	25	0	0	0	0	250
3	Ngambur	435	0	150	0	0	40	0	0	0	0	50
4	Pesisir Selatan	379	250	275	0	225	0	0	0	50	0	350
5	Krui Selatan	0	175	0	0	0	147	0	0	75	0	215
6	Pesisir Tengah	530	450	650	300	741	300	200	150	239	300	722
7	Way Krui	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Karya Penggawa	0	175	0	0	0	125	0	0	0	0	225
9	Pesisir Utara	400	0	378	0	0	217	0	0	50	0	250
10	Lemong	428	250	0	0	200	200	350	0	50	50	268

11	Pulau Pisang	378	0	275	0	184	75	61	0	100	50	193
Jumlah		3.034	1.202	1.604	599	1.350	961	801	603	692	531	2.296

Sumber : Dinas Perikanan, 2022

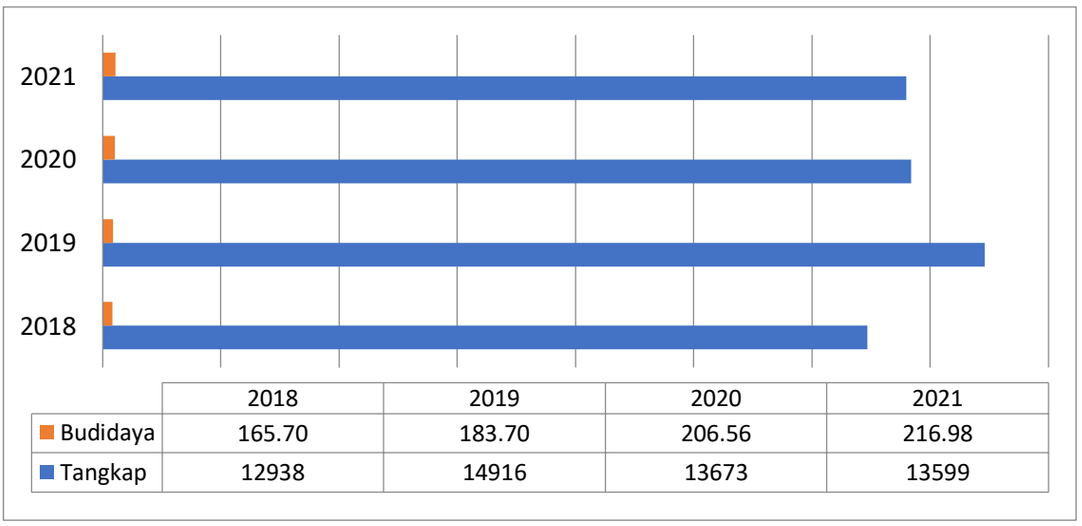
Produksi perikanan budidaya air tawar di Kabupaten Pesisir Barat yang paling banyak dibudidayakan adalah ikan nila dengan total produksi 100-110 ton/tahun, ikan lele dengan total produksi mencapai 30-35 ton/tahun. Budidaya perikanan air tawar ini tersebar di hampir seluruh kecamatan kecuali pada Kecamatan Pulau Pisang.

Tabel 2.125. Jumlah Produksi Hasil Perikanan Budidaya Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021/2022

No	Kec	Potensi (Ha)	Pemanfaatan (Ha)	Produksi (Ton)			
				Mas	Gurame	Lele	Nila
1	Lemong	2.800	2	2,24	2,24	0,44	1,68
2	Karya Penggawa	1.100	3	4,15	1,45	2,24	16,26
3	Pesisir Utara	2.100	1	3,36	2,69	2,46	15,70
4	Way Krui	800	3	1,68	3,02	5,61	15,03
5	Pesisir Tengah	2.000	3	2,24	4,15	4,48	19,07
6	Krui Selatan	2.100	2	2,24	1,68	4,48	5,61
7	Pesisir Selatan	1.500	4	3,14	3,36	5,61	8,97
8	Ngambur	1.700	3	5,61	2,80	4,48	13,46
9	Ngaras	2.700	1	1,12	3,02	3,36	5,61
10	Bangkunat	3.400	2	1,68	1,68	2,58	15,70
11	Pulau Pisang	-	-	-	-	-	-
Jumlah		**20.200**	**1,043**	**27,49**	**26,14**	**35,79**	**117,14**

Sumber : Dinas Perikanan, 2023

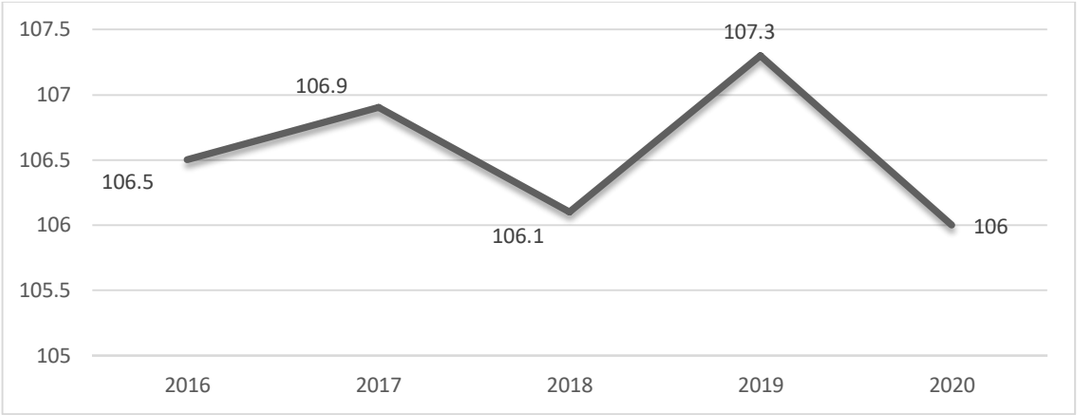
Gambar 2.79. Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022 (ton)



	2018	2019	2020	2021
Budidaya	165.70	183.70	206.56	216.98
Tangkap	12938	14916	13673	13599

Sumber : Dinas Perikanan, 2023

Gambar 2.80. Nilai Tukar Nelayan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-2020



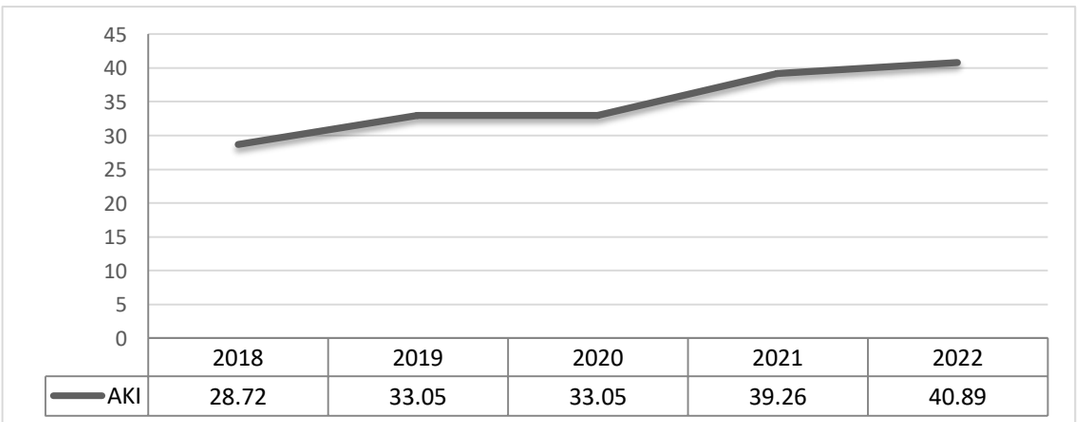
Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2021

Perkembangan NTN di Kabupaten Pesisir Barat secara umum tidak berkembangan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari data pada tahun 2016 NTN berada pada angka 106.5, tahun 2017 naik sedikit menjadi 106.9 dan pada tahun 2018 turun menjadi 106.1. Pada tahun 2019 sempat naik keangka 107.3. namun kembali turun pada tahun 2020. Covid-19 yang menjangkit Indonesia sejak 2020 memberikan dampak terhadap daya beli masyarakat, sehingga mempengaruhi berbagai sektor, diantarnya sektor perikanan, Kabupaten Pesisir Barat yang memiliki banyak nelayan juga merasakan dampak dari hal tersebut, dapat dilihat penurunan NTN Kabupaten Pesisir Barat tahun 2019 menuju tahun 2020.

Beberapa faktor yang menyebabkan NTP pada tahun 2020 mengalami penurunan antara lain :

1. Kemampuan daya beli masyarakat akibat Pandemi Covid-19;
2. Produktivitas Perikanan Tangkap dan Budidaya akibat Pandemi Covid-19 yang membatasi pergerakan manusia dan barang.

Gambar 2.81. Angka Konsumsi Ikan (AKI) masyarakat Kabupaten Pesisir Barat tahun 2018-2022



	2018	2019	2020	2021	2022
AKI	28.72	33.05	33.05	39.26	40.89

Sumber : Dinas Perikanan, 2023

Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan bahwa terjadi peningkatan konsumsi ikan oleh masyarakat kabupaten Pesisir Barat berdasarkan pada data Angka Konsumsi Ikan (AKI), rata rata peningkatan yang terjadi sebesar 8,59 persen. Pada tahun 2018 tercatat AKI sebesar 28.72. Pada tahun 2019 kembali naik menjadi 33.05 dan terus bertahan pada angka 33.05 di tahun 2020. Tahun 2021, kembali naik 6,21 sehingga capaian AKI berada pada angka 39.26. Pada tahun 2022, AKI terdata sebesar 40.89 atau naik sebanyak 1.63.

2. Pariwisata

Kabupaten Pesisir Barat yang dianugerahi garis pantai sepanjang 210 km yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia memiliki banyak sekali obyek wisata pantai yang potensial untuk dikembangkan. Dimana pada umumnya, pesona dan aktivitas yang ditawarkan pada obyek wisata pantai adalah snorkeling, surfing, menyelam, berenang, berlayar, berperahu motor, memancing, berjemur matahari, spooning nooks, menikmati panorama alam, fotografi, upacara adat pada saat tertentu, berkemah, trekking dan bersepeda. Untuk sektor Pariwisata di Kabupaten Pesisir Barat memiliki 49 Wisata Pantai, dengan lahan seluas 213,5 Ha.

Berikut ini disajikan objek wisata bahari pada Kabupaten Pesisir Barat yang dirinci berdasarkan tiap Kecamatan.

Tabel 2.126. Sebaran Potensi Wisata Bahari Kabupaten Pesisir Barat

No	Nama Obyek Wisata	Kecamatan	Daya Tarik
1	Pantai Ujung Belimbing	Bangkunat	Panorama Alam Pantai
2	Pantai Teluk Bengkunat	Bangkunat	Panorama Alam Pantai
3	Tampang Belimbing	Bangkunat	Panorama Alam Pantai
4	Way Canguk	Bangkunat	Panorama Alam Pantai
5	Pantai Pelabuhan Nusantara	Bangkunat	Panorama Alam Pantai
6	Pantai Curup Indah	Bangkunat	Panorama Alam Pantai
7	Pantai Suka Negara	Ngaras	Panorama Alam Pantai
8	Pantai Siging	Ngaras	Panorama Alam Pantai
9	Way Cangkuk	Ngaras	Panorama Alam Pantai
10	Pantai Tanjung Setia	Pesisir Selatan	Panorama Alam Pantai, Surfing
11	Pantai Way Jambu	Pesisir Selatan	Panorama Alam Pantai
12	Pantai Pasar Senin	Pesisir Selatan	Panorama Alam Pantai
13	Pantai Melasti	Pesisir Selatan	Panorama Alam Pantai
14	Pantai Karang Nyimbur	Pesisir Selatan	Panorama Alam Pantai
15	Pantai Biha	Pesisir Selatan	Panorama Alam Pantai
16	Pantai Marang	Pesisir Selatan	Panorama Alam Pantai
17	Pantai Negeri Ratu	Ngambur	Panorama Alam Pantai
18	Pantai Sumber Agung	Ngambur	Panorama Alam Pantai
19	Pantai Way Batang	Ngambur	Panorama Alam Pantai
20	Labuhan Bakhu	Ngambur	Panorama Alam Pantai
21	Pantai Mandiri	Krui Selatan	Panorama Alam Pantai
22	Pantai Lintik	Krui Selatan	Panorama Alam Pantai
23	Pantai Walur	Krui Selatan	Panorama Alam Pantai
24	Pantai Berandai Mahenai	Krui Selatan	Panorama Alam Pantai
25	Pantai Ilahan	Krui Selatan	Panorama Alam Pantai
26	Pantai Labuhan Jukung	Pesisir Tengah	Panorama Alam Pantai
27	Pelabuhan Laut Kuala Stabas	Pesisir Tengah	Pelabuhan Nelayan
28	Pantai Way Redak	Pesisir Tengah	Panorama Alam Pantai

No	Nama Obyek Wisata	Kecamatan	Daya Tarik
29	Pantai Seray	Pesisir Tengah	Panorama Alam Pantai
30	Bukit Pantai Selalau	Pesisir Tengah	Panorama Alam Pantai
31	Muara Way La'ay	Karya Penggawa	Muara Sungai
32	Pantai Harapan Kita	Karya Penggawa	Panorama Alam Pantai
33	Pantai Way Sindi	Karya Penggawa	Panorama Alam Pantai
34	Pantai Pasir Hitam	Karya Penggawa	Panorama Alam Pantai
35	Pantai Tembakak	Karya Penggawa	Panorama Alam Pantai
36	Pantai Penengahan	Pesisir Utara	Panorama Alam Pantai
37	Batu Lawang	Pesisir Utara	Formasi Batuan Pantai
38	Pantai Walur	Pesisir Utara	Panorama Alam Pantai
39	Pantai Pulang Pisang	Pulau Pisang	Panorama Alam Pantai
40	Pantai Parda Haga	Lemong	Panorama Alam Pantai
41	Pantai Bambang	Lemong	Panorama Alam Pantai
42	Pantai Tanjung Jati	Lemong	Panorama Alam Pantai
43	Pantai Batu Mirau	Lemong	Panorama Alam Pantai
44	Pantai Way Utong	Lemong	Panorama Alam Pantai
45	Pantai Tahawang	Lemong	Panorama Alam Pantai
46	Pantai Pugung Penengahan	Lemong	Panorama Alam Pantai

Sumber : Dinas Pariwisata, 2023

Sebagai daerah yang mengandalkan wisatawan pantai, Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat sejak tahun 2017-2022 (terkecuali pada tahun 2020-2021 akibat pandemic Covid-19) telah melaksanakan event Krui Surfing Internasional. Dimana selain sebagai bentuk promosi panorama alam pantai, gelaran ini juga diharapkan mampu menjadi ajang pengenalan budaya lokal daerah yang otentik dan merupakan kebanggaan dari Provinsi Lampung dan juga Nusantara kepada wisatawan internasional dan juga nasional.

Tabel 2.127. Pelaksanaan Krui Surfing International Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017-2022

No	Tahun	Event	Peserta	Lokasi
1	2017	Krui Pro QS 1000	86 Atlet (8 Negara)	Pantai Tanjung Setia, Kecamatan Pesisir Selatan
2	2018	Krui Pro QS 1500	96 Atlet (17 Negara)	Pantai Tanjung Setia, Kecamatan Pesisir Selatan
3	2019	Krui Pro QS 3000	133 Atlet (24 Negara)	Pantai Tanjung Setia, Kecamatan Pesisir Selatan
4	2022	Krui Pro QS 5000	218 Atlet (17 Negara)	Pantai Tanjung Setia, Kecamatan Pesisir Selatan

Sumber : Dinas Pariwisata, 2023

Selain mengandalkan objek wisata bahari, Kabupaten Pesisir Barat juga memiliki potensi ekowisata dan suaka alam – cagar budaya yang dapat diandalkan untuk menarik wisatawan hadir berkunjung. Selain itu, terdapat juga atraksi seni dan budaya yang khas dan tidak dimiliki oleh daerah-daerah lain.

Tabel 2.128. Sebaran Potensi Ekowisata Kabupaten Pesisir Barat

No	Nama Obyek Wisata	Kecamatan	Daya Tarik
1	Ekowisata Pemerihan	Bangkunat	Ekowisata TNBBS
2	Rhino Camp	Bangkunat	Ekowisata TNBBS
3	Penangkaran Penyu Muara Tembulih	Ngambur	Penangkaran Penyu
4	Repong Damar	Way Krui	Panen Getah Damar Tradisional

Sumber : Dinas Pariwisata, 2023

Tabel 2.129. Nama dan Luas Lokasi Suaka Alam dan Cagar Budaya di Kabupaten Pesisir Barat

No	Kawasan	Luas (km^2)
1	Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS)	1.846,08
2	Cagar Alam Laut (CAL) Bukit Barisan Selatan	93,44
	Jumlah	**1.940,52**

Sumber : Dinas Pariwisata, 2023

Kemampuan ekonomi daerah kaitannya dengan daya saing daerah adalah bahwa kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik (*attractiveness*) bagi pelaku ekonomi yang telah berada dan akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan *multiplayer effect* bagi peningkatan ekonomi daerah. Kemampuan daerah dalam menyediakan akomodasi wisata erat kaitannya dengan peluang daerah mendapatkan kunjungan wisatawan, dengan efek lama tinggal yang lebih lama dan *spending money* yang lebih besar.

Tabel 2.130. Akomodasi Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat Berdasarkan Kecamatan Tahun 2022

No	Kecamatan	Rumah Makan	Hotel/Penginapan
1	Pesisir Tengah	21	29
2	Pesisir Selatan	13	23
3	Lemong	0	-
4	Pesisir Utara	2	2
5	Karya Penggawa	1	1
6	Pulau Pisang	0	13
7	Way krui	0	-
8	Krui Selatan	4	14
9	Ngambur	1	1
10	Ngaras	2	-
11	Bangkunat	8	-
	Jumlah	**52**	**83**

Sumber : Dinas Pariwisata, 2023

Dari data akomodasi pariwisata di atas, secara umum akomodasi belum menyebar secara merata. Khusus untuk daerah Lemong dan Way Krui hingga saat ini belum ada hotel/losmen yang dikelola oleh swasta ataupun Pemerintah Pusat. Khusus untuk Kecamatan Ngaras dan Bangkunat diarahkan untuk kawasan

pengembangan budidaya perikanan. Selanjutnya dari total 135 akomodasi pariwisata (52 rumah makan dan 83 hotel/penginapan) hingga saat ini belum ada Sumber Daya Pariwisata Profesional yang bersertifkat. Untuk paket pariwisata yang dikelola juga langsung oleh pihak pemilik akomodasi wisata.

Tabel 2.131. Sumber Daya Manusia Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2022

No	Kecamatan	SDM Pariwisata		Pokdarwis
		Profesional	Non Profesional	
1	Pesisir Tengah	30	125	5
2	Pesisir Selatan	16	150	6
3	Lemong	0	75	3
4	Pesisir Utara	0	125	5
5	Karya Penggawa	0	125	5
6	Pulau Pisang	0	100	4
7	Way krui	0	50	2
8	Krui Selatan	15	75	3
9	Ngambur	0	50	2
10	Ngaras	0	50	2
11	Bangkunat	3	75	3
	Jumlah	**64**	**1.000**	**40**

Sumber : Dinas Pariwisata, 2022

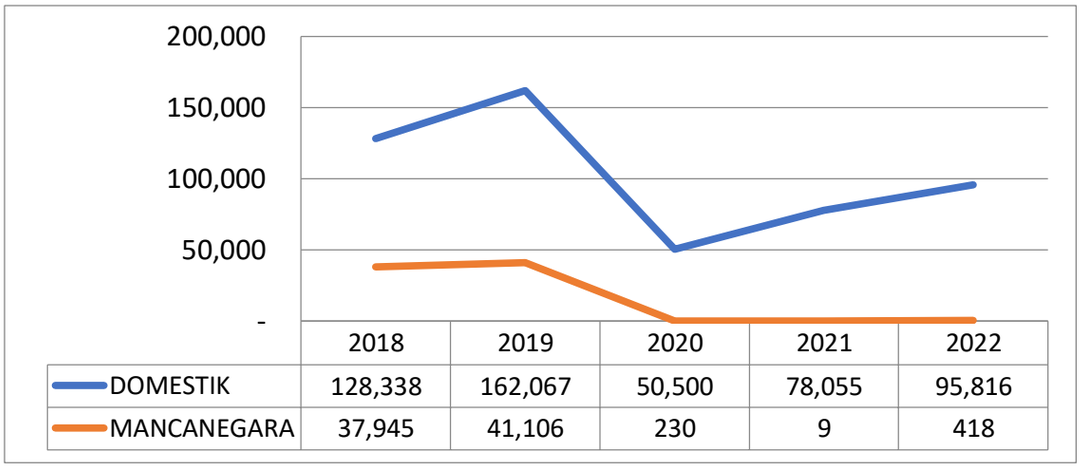
Jumlah wisatawan yang hadir di Kabupaten Pesisir Barat secara umum masih didominasi oleh wisatawan lokal dengan perbandingan dengan wisatawan luar negeri 3:1 (2017-2019). Pada tahun 2018 kunjungan wisatawan sebesar 166,283 orang. Pada tahun 2019 merupakan kunjungan tertinggi dengan jumlah wisatawan yang hadir sebanyak 203.173 orang. Namun demikian, pada tahun 2020 jumlah tercatat hanya sebanyak 50,730 orang. Pandemi Covid-19 menjadi penyebab penurunan drastis jumlah ini. Tahun 2021 jumlah kunjungan wisatawan mengalami peningkatan minor menjadi sebanyak 78.064 orang. Data 2021 lebih baik dari capaian 2020 namun belum kembali seperti sebelum pandemi Covid-19. Tahun 2022 terdapat peningkatan jumlah kunjungan hingga 30%, dimana total ada sekitar 96.234 orang yang hadir ke Kabupaten Pesisir Barat.

Tabel 2.132. Jumlah Wisatawan Kabupaten Pesisir Barat Berdasarkan Kecamatan Tahun 2018-2022

Kec	2018		2019		2020		2021		2022	
	Luar	Lokal	Luar	Lokal	Luar	Lokal	Luar	Lokal	Luar	Lokal
Lemong	3.414	1.342	145	3.678	0	0	0	37	0	30
Pesisir Utara	4.527	1.222	1.103	6.003	0	0	0	163	0	160
Karya Penggawa	3.181	1.994	555	12.780	0	0	0	185	0	175
Way Krui	1.736	893	170	1.301	0	0	0	159	0	154
Pesisir Tengah	5.439	43.404	11.788	103.400	173	50.500	0	75,717	0	91.641
Pesisir Selatan	5.556	41.869	2.067	2.543	57	0	3	1,100	394	2.500
Krui Selatan	3.437	2.333	22.589	11.349	0	0	6	453	24	513
Ngambur	3.622	1.225	123	3.077	0	0	0	95	0	93
Ngaras	1.681	858	87	354	0	0	0	21	0	17
Bangkunat	1.740	809	178	1.780	0	0	0	28	0	13
Pulau Pisang	3.612	32.439	2.301	15.802	0	0	0	97	0	102
Total	**37.945**	**128.338**	**41.106**	**162.067**	**230**	**50.500**	**9**	**78.055**	**418**	**95.398**

Sumber : Dinas Pariwisata, 2023

Gambar 2.82. Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Domestik Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022



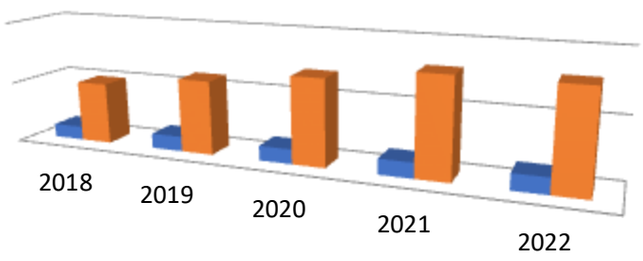
	2018	2019	2020	2021	2022
DOMESTIK	128,338	162,067	50,500	78,055	95,816
MANCANEGARA	37,945	41,106	230	9	418

Sumber : Dinas Pariwisata, 2023

Penurunan jumlah wisatawan pada tahun 2020 hingga 2021 lalu murni disebabkan oleh bencana non alam Covid-19 yang membatasi pergerakan orang dan membatasi jumlah orang untuk berkumpul. Hal ini tentu saja sangat memukul sektor pariwisata Kabupaten Pesisir Barat yang baru akan berkembang. Namun demikian, harapannya dengan kebijakan yang tepat pada tahun-tahun mendatang dapat kembali mengundang wisatawan untuk dapat hadir di Kabupaten Pesisir Barat.

Jumlah kunjungan wisatawan erat kaitannya dengan pembangunan ekonomi daerah. Suatu daerah diharapkan mampu memberikan pelayanan dan fasilitas yang dibutuhkan oleh wisatawan sehingga mempengaruhi rata-rata lama tinggal dan juga rata-rata pengeluaran yang dikeluarkan selama berada di tempat atau daerah tujuan wisata. Rata-rata belanja wisatawan mancanegara pada periode tahun 2018-2022 sebesar 5-8jt dalam sekali kunjungan/orang (rata-rata lama tinggal 7-8 hari), sedangkan untuk wisatawan domestik sebesar 1-1.3jt dalam sekali kunjungan/orang (rata-rata lama tinggal 3-4 hari).

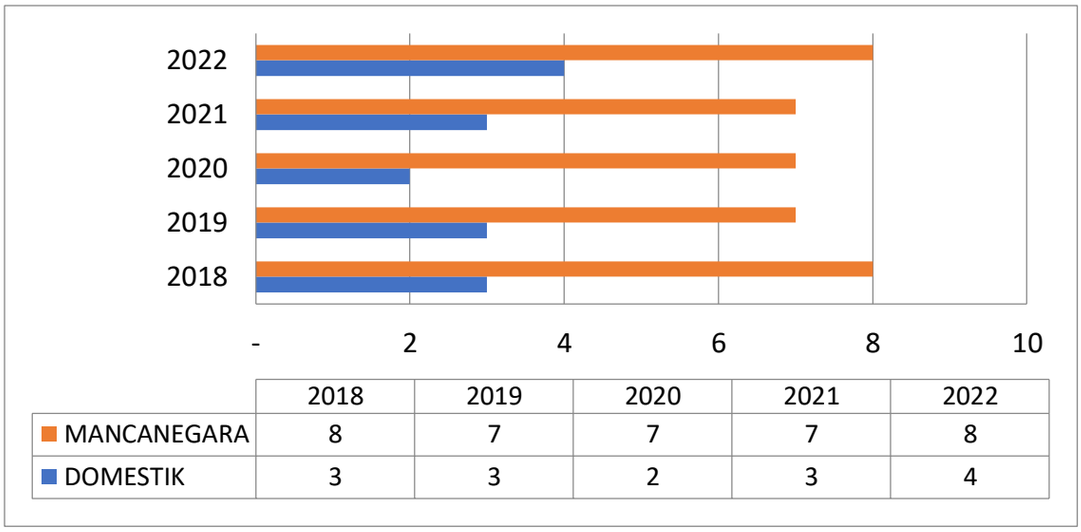
Gambar 2.83. Rata-rata Belanja Wisatawan Mancanegara dan Domestik Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2021 (juta rupiah)



	2018	2019	2020	2021	2022
DOMESTIK	1,100,000	1,200,000	1,200,000	1,250,000	1,300,000
MANCANEGARA	5,000,000	6,000,000	7,000,000	8,000,000	8,000,000

Sumber : Dinas Pariwisata, 2023

Gambar 2.84. Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara dan Domestik Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022 (hari)



	2018	2019	2020	2021	2022
MANCANEGARA	8	7	7	7	8
DOMESTIK	3	3	2	3	4

Sumber : Dinas Pariwisata, 2023

3. Pertanian

Kabupaten Pesisir Barat terdapat sektor pertanian yang masih merupakan salah satu pilar utama bagi perkembangan wilayah dan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap PDRB Kabupaten Pesisir Barat. Dukungan sektor pertanian terhadap PDRB dicapai melalui peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura. Data dari Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Barat, Luas lahan pertanian pangan mencapai mencapai ±16.434 Ha. Dari luas lahan tersebut tanaman padi sawah, jagung dan padi ladang didaulat menjadi komoditas unggulan dari sektor pertanian, disamping ubi kayu dan ubi jalar.

Tabel 2.133. Luas Lahan Pertanian di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022

No	Kecamatan	Lahan Pertanian Sawah (Ha)		Lahan Kering (Ha)	
		Irigasi	Tadah Hujan	Kebun	Ladang
1	Pesisir Tengah	414.00	74.00	6,345.00	80.00
2	Pesisir Selatan	160.00	224.37	1,806.20	448.80
3	Lemong	-	-	200.00	11.00
4	Pesisir Utara	286.00	381.48	210.00	2876.00
5	Karya Penggawa	211.00	13.44	-	1143.00
6	Pulau Pisang	64.00	161.65	-	1498.00
7	Way krui	278.00	247.95	959.00	729.00
8	Krui Selatan	1,445.00	987.12	1,670.00	2778.00
9	Ngambur	1,216.00	546.24	4,915.00	3752.00
10	Ngaras	329.00	300.00	2,625.00	2590.00
11	Bangkunat	525.00	723.30	8,174.00	5145.00
	Jumlah	**4,928.00**	**3,659.55**	**26,904.20**	**21,050.80**

Sumber : Dinas KP dan Pertanian, 2023

Tabel 2.134. Prasarana Pertanian Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022

No	Kecamatan	Prasarana Pertanian	
		Jalan Pertanian (ruas)	Irigasi (km)
1	Lemong	0	16
2	Pesisir Utara	1	15
3	Pulau Pisang	0	0
4	Karya Penggawa	0	9
5	Way Krui	1	7
6	Pesisir Tengah	2	12
7	Krui Selatan	1	6
8	Pesisir Selatan	8	30
9	Ngambur	4	17
10	Ngaras	4	20
11	Bangkunat	5	8
	Jumlah	**26**	**140**

Sumber : Dinas KP dan Pertanian, 2023

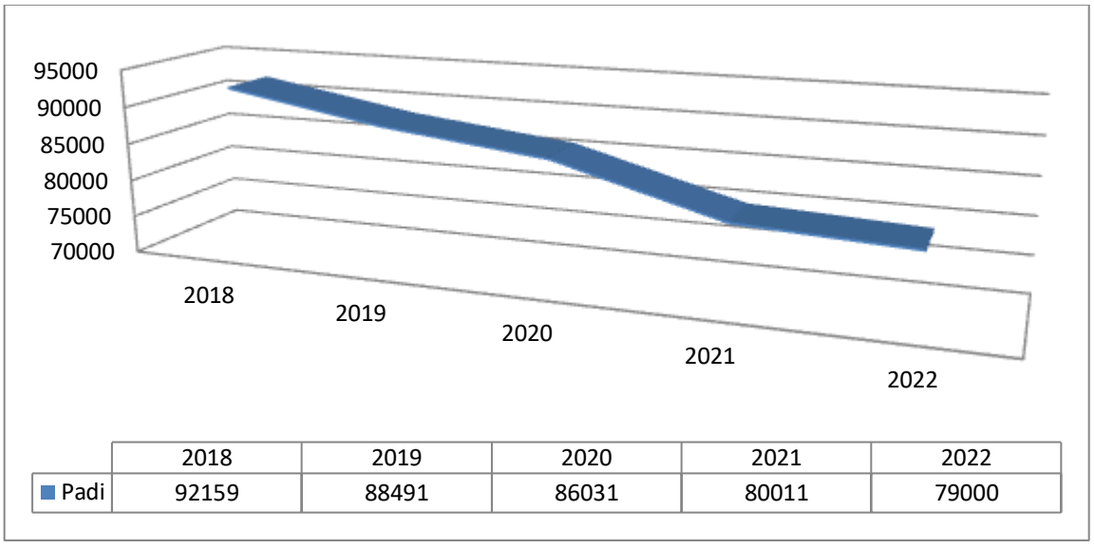
Hasil produksi tanaman padi sawah kabupaten pesisir barat tiap tahunnya rata-rata mencapai 80.000-90.000 ton/tahun, dimana pada tahun 2021 sebanyak 26,01% (23.760 ton/tahun) produksinya terdapat di Kecamatan Pesisir Selatan, disusul Kecamatan Ngambur dengan hasil mencapai 15.415 ton/tahun atau 18,20% dari total produksi Kabupaten. Jika produksi tersebut dikonversi ke beras maka akan menjadi ±53.976 ton/tahun dengan asumsi rendemen saat giling sebesar 62.74%.

Tabel 2.135. Jumlah Produksi Tanaman Pangan di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022

No	Kec	Produksi (Ton/Tahun)						
		Padi	Jagung	Kedelai	Kacang Tanah	Ubi Kayu	Ubi Jalar	Kacang Hijau
1	Lemong	4,902.52	-	16.80	-	106.36	-	-
2	Pesisir Utara	4,063.56	-	-	1.47	79.77	15.77	-
3	Pulau Pisang	-	-	-	5.88	186.13	16.77	3.82
4	Karya Penggawa	6,916.94	21.20	-	-	53.18	-	1.43
5	Way Krui	2,182.68	-	-	-	-	-	-
6	Pesisir Tengah	2,350.11	26.50	5.60	8.81	159.54	-	-
7	Krui Selatan	5,433.00	360.40	22.40	20.57	372.26	-	1.91
8	Pesisir Selatan	25,219.85	31.80	23.52	33.79	398.85	256.32	7.63
9	Ngambur	16,418.96	5,191.35	39.20	32.32	319.08	142.93	6.20
10	Ngaras	7,847.47	3,074.00	-	2.94	-	-	-
11	Bangkunat	10,169.11	6,519.00	35.95	48.48	1,861.30	528.41	16.22
	Jumlah	**85,504.19**	**15,224.25**	**143.47**	**154.25**	**3,536.47**	**960.20**	**37.21**

Sumber : Dinas KP dan Pertanian, 2023

Gambar 2.85. Produksi Padi Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022 (ton)



	2018	2019	2020	2021	2022
Padi	92159	88491	86031	80011	79000

Sumber : Dinas KP dan Pertanian, 2023

Meskipun Kabupaten Pesisir Barat bukan merupakan sentra dari produksi tanaman padi di Provinsi Lampung, tetapi mampu memberikan kontrisbusi yang cukup signifikan dalam mendukung program pemerintah Provinsi Lampung dalam hal ketahanan pangan dan kemandirian pangan menuju kedaulatan pangan. Pada subsektor hortikultura, Kabupaten Pesisir Barat juga penghasil tanaman sayuran dan buah-buahan, dengan komoditas utama adalah cabai besar, cabai keriting, cabai rawit dan tomat. Sementara tanaman sayuran lainnya kurang menjadi primadona bagi petani.

Sentra produksi sayuran daerah adalah Kecamatan Bangkunat dengan produksi 2.880 kuintal pada tahun 2021 dan 2.515 kuintal pada tahun 2022. Berikuntnya adalah Kecamatan Ngambur dengan capaian produksi tahun 2021 sebesar 2.070 kuintal dan 2.052 kuintal pada tahun 2022. Sementara itu pada Kecamatan Way Krui tidak ada petani sayuran (produksi nihil untuk komoditas cabai dan tomat).

Tabel 2.136. Jumlah Produksi Sayuran Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2022 (Kuintal)

No	Kecamatan	Cabai Besar		Cabai Keriting		Cabai Rawit		Tomat	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
1	Lemong	0	0	421	187	267	235	0	0
2	Pesisir Utara	13	35	233	170	119	122	77	60
3	Pulau Pisang	0	0	0	0	0	0	34	17
4	Karya Penggawa	5	0	22	15	25	20	14	10
5	Way Krui	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Pesisir Tengah	145	393	0	0	74	632	0	0
7	Krui Selatan	0	0	759	319	1.067	447	189	131
8	Pesisir Selatan	0	0	268	448.8	99	343,4	302	366
9	Ngambur	677	525	367	513	618	484	408	530

10	Ngaras	0	0	102	92	13,6	7,4	44	0
11	Bangkunat	0	0	1.070	1.010	820	775	990	730
Jumlah		**840**	**953**	**3.242**	**2.754,8**	**3.102,8**	**3.065,8**	**2.058**	**1.844**

Sumber : Dinas KP dan Pertanian, 2023

Tabel 2.137. Jumlah Produksi Tanaman Biofarmaka Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2022 (Kg)

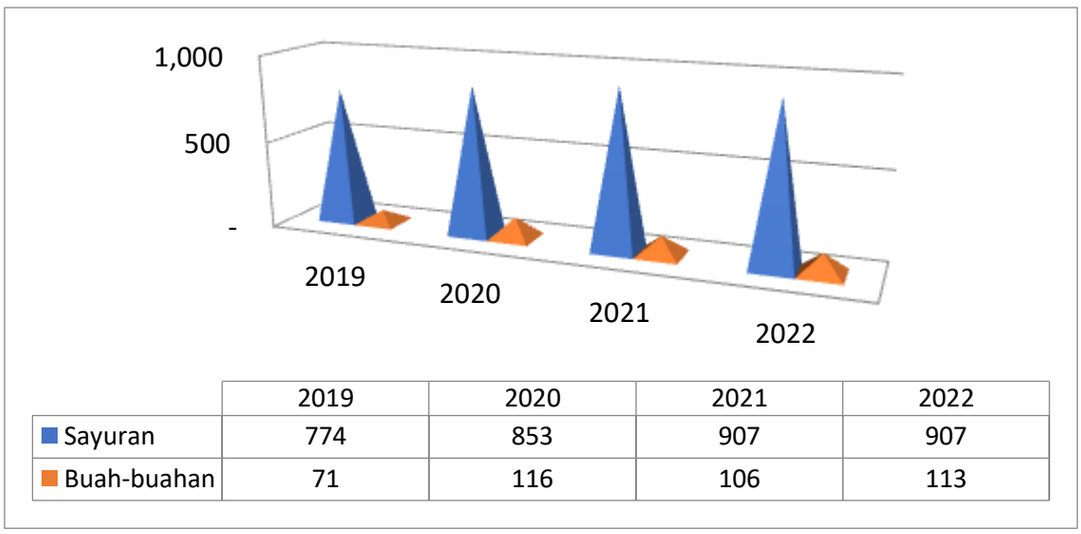
No	Kecamatan	Jahe		Laos/Lengkuas		Kencur		Kunyit	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
1	Lemong	30.400	22.000	0	0	0	0	0	0
2	Pesisir Utara	8.693	6.341	2.132	2,515	125	248	1.098	1.177
3	Pulau Pisang	2.794	780	1.700	60	1.540	310	2.045	700
4	Karya Penggawa	705	815	1.946	1.895	270	259	730	705
5	Way Krui	0	71	0	6	0	22	0	47
6	Pesisir Tengah	1.475	153.466	1.781	4.941	95	476	520	1.023
7	Krui Selatan	2.500	3.750	3.625	3.125	186	1.290	175	740
8	Pesisir Selatan	8.298	21.791	6.283	11.721	3.125	2.571	6.756	8.548
9	Ngambur	24.780	25.321	40.258	109.278	18.153	20.290	24.064	26.826
10	Ngaras	850	2.000	1.750	750	1.200	500	1.100	320
11	Bangkunat	460.000	345.000	60.500	51.500	65.000	48.000	75.000	47.000
Jumlah		**540.495**	**581.335**	**119.975**	**185.791**	**89.694**	**73.966**	**111.488**	**87.086**

Sumber : Dinas KP dan Pertanian, 2023

Untuk tanaman biofarmaka yang terdiri dari jahe, laos/lengkuas, kencur dan kunyit produksinya secara total pada tahun 2021 sebanyak 861.652 Kg dan mengalami peningkatan pada tahun 2022 menjadi 928.178 Kg. komoditas terbanyak adalah Jahe dengan catatan 540.495 Kg pada tahun 2021 dan meningkat menjadi 581.335 Kg pada tahun 2022. Kecamatan yang menjadi pusat produksi adalah Kecamatan Bangkunat dengan data tahun 2021 sebesar 660.500 Kg dan tahun 2022 sebesar 491.500 Kg. Kecamatan Way Krui adalah kecamatan dengan produksi paling minim dengan data tahun 2021 0 Kg dan tahun 2022 adalah 146 Kg.

Bila dibandingkan dengan luasan panen untuk tanaman sayuran dan jauh lebih besar dibandingkan dengan tanaman buah-buahan serta luasannya pun terus meningkat. Pada tahun 2019 tercatat 774 Ha, 2020 sebesar 853 Ha, pada tahun 2021 dan tahun 2020 meningkat menjadi 907 Ha. Sementara itu, pada komoditas buah-buahan data pada tahun 2019 seluas 71 Ha dan meningkat tajam pada tahun 2020 dengan capaian 116 Ha. Pada tahun 2021, luasan panen buah-buahan menurun menjadi 106 Ha namun pada tahun 2022 dapat kembali naik menjadi 113 Ha.

Gambar 2.86. Luas Panen Tanaman Sayuran dan Buah-buahan Semumis Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2019-2022 (Ha)



	2019	2020	2021	2022
Sayuran	774	853	907	907
Buah-buahan	71	116	106	113

Sumber : Dinas KP dan Pertanian, 2023

Berdasarkan data, luas lahan perkebunan kabupaten pesisir barat mencapai 24.487 Ha dengan total hasil produksi tanaman perkebunan rata-rata sebesar 25.000-30.000 ton/tahun. Dimana berdasarkan luas dan jumlah hasil produksi yang menjadi komoditas unggulan sektor perkebunan Kabupaten Pesisir Barat pada tahun 2022 antara lain:

1. Kelapa sawit memiliki lahan produksi 8.235,00 Ha dengan produksi 19.899,68 ton, Kecamatan Ngambur sebagai daerah tertinggi produksi dengan capaian sebesar 8.850,00 ton;
2. Kelapa dengan luasan lahan sebesar 6.430 Ha dan capaian produksi sebesar 6.666,07 ton. Kecamatan Ngambur adalah kecamatan dengan produksi tertinggi sebanyak 2.203 ton;
3. Karet luasan lahan total adalah 630 Ha dengan total produksi sebesar 301,15 ton serta Kecamatan Pesisir Selatan dengan produksi tertinggi sebesar 142,50 ton
4. Kopi memiliki luasan lahan sebesar 5.470 Ha dengan capaian produksi 3.031,08 ton dan Kecamatan Lemong sebagai sentra produksi sebesar 1.045,00 ton;
5. Kakao dengan luasan lahan adalah 802,00 Ha dan capaian produksinya adalah 493,10 ton, dengan Kecamatan Bangkunat sebagai penghasil tertinggi dengan nilai 190 ton;
6. Jambu Mete dengan luasan lahan 6 Ha dan capaian produksi pertahun 1,40 ton;
7. Pala memiliki luas lahan sebesar 112 Ha dengan produksi sebanyak 19,84 ton/tahun;
8. Lada dengan besaran lahan 2.829 Ha dengan capaian produksi adalah 1.059,70 ton/tahun;

9. Tembakau memiliki luasan lahan sebesar 12 Ha dan capaian produksi adalah 4,44 ton/tahun.
10. Damar dengan produksi 5,272 ton/tahun. Yang menjadi sentra produksi adalah Kecamatan Way Krui dengan produksi 2,072 ton/tahun.

Tabel 2.138. Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2022 (ton) (i)

No	Kecamatan	Kelapa Sawit		Kelapa		Karet	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022
1	Lemong	18,00	23,00	675,00	615,00	10,00	6,00
2	Pesisir Utara	6,50	5.50	695,60	692,00	1,70	1,75
3	Pulau Pisang	0,00	0,00	216,00	48,00	0.00	0,00
4	Karya Penggawa	4,00	4,00	487,00	46,00	1,60	1,60
5	Way Krui	0,00	0,00	262,00	263,00	0,00	0,00
6	Pesisir Tengah	85,00	85,10	414,00	362,00	0,00	0,00
7	Krui Selatan	52,00	52,96	401,00	398,07	0,00	0,00
8	Pesisir Selatan	1.277,20	5.779,12	2.105,60	2.203,00	135,10	142,50
9	Ngambur	8.688,00	8.850,00	1.241,00	811,00	53,30	14,30
10	Ngaras	2.260,00	2.051,00	540,00	552,00	82,00	116,00
11	Bangkunat	3.060,00	3.049,00	831,00	656,00	19,00	19,00
Jumlah		**15.450,70**	**19.899,66**	**7.868,20**	**8.666,07**	**302,70**	**301,15**

Sumber : Dinas KP dan Pertanian, 2023

Tabel 2.139. Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2022 (ii)

No	Kecamatan	Kopi		Kakao		Damar	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022
1	Lemong	1.038,00	1.045,00	82,00	71,00	109	100.98
2	Pesisir Utara	690,00	620,00	23,00	24,00	115	114.99
3	Pulau Pisang	0,00	0,00	1,00	0,00	-	-
4	Karya Penggawa	150,00	101,00	41,20	0,00	422	370.44
5	Way Krui	10,30	7,20	32,00	25,00	2,072	2,169.00
6	Pesisir Tengah	7,00	7,00	32,00	16,00	1,622	1,559.06
7	Krui Selatan	6,80	13,78	17,50	15,80	8	8.25
8	Pesisir Selatan	305,00	61,10	39,10	47,50	473	402.50
9	Ngambur	250,00	250,00	66,30	39,80	95	87.12
10	Ngaras	247,00	258,00	64,00	64,00	333	314.40
11	Bangkunat	668,00	668,00	209.00	190,00	23	-
Jumlah		**3.372,10**	**3.031,08**	**607,10**	**493,10**	**5,272**	**5,126,74**

Sumber : Dinas KP dan Pertanian, 2023

Populasi ternak besar di Kabupaten Pesisir Barat untuk ternak sapi pada tahun 2022 mencapai 10.126 ekor, kerbau 558 ekor, kambing 7.259 ekor dan domba 1.214 ekor. Populasi ternak kecil di Kabupaten Pesisir Barat untuk ternak ayam ras dengan jumlah 1.836 ekor, ayam buras dengan capaian populasi 76.658 ekor, ternak itik sebanyak 16.258 ekor dan bebek sebanyak 4.212 ekor.

Sentra populasi ternak sapi ada di Kecamatan Pesisir Selatan dengan jumlah populasi mencapai 3.027 ekor, berikutnya pada Kecamatan Ngambur dengan jumlah populasi sebesar 1.805 ekor dan Kecamatan Bangkunat dengan jumlah 1.373 ekor. Sementara populasi kerbau terbesar ada di Kecamatan Lemong yang mencapai 102 ekor dan Pesisir Selatan 78 ekor. Untuk ternak kambing populasi terbesar ada di Kecamatan Ngambur 1.474 ekor dan Kecamatan Lemong dengan populasi 1.383 ekor. Untuk ternak domba populasi tertinggi ada di Kecamatan Bangkunat dengan populasi 393 ekor dan Kecamatan Karya Penggawa 259 ekor.

Berikutnya untuk sentra populasi ternak Ayam Buras ada di Kecamatan Pesisir Selatan dengan jumlah 28.468 ekor dan Kecamatan Bangkunat dengan jumlah populasi 14.949 ekor. Selanjutnya untuk ternak bebek ada di Kecamatan Bangkunat dengan populasi 3.220 ekor dan Kecamatan Pesisir Selatan dengan populasi 2.064 ekor. Sedangkan ternak itik ada di Kecamatan Pesisir Selatan 1.078 ekor dan Kecamatan Bangkunat dengan populasi 972 ekor.

Untuk lebih detail populasi hewan ternak di Kabupaten Pesisir Barat pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.140. Jumlah Populasi Ternak Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022

No	Kecamatan	Populasi (Ekor)							
		Sapi	Kerbau	Kambing	Domba	Ayam Ras	Ayam Buras	Bebek	Itik
1	Lemong	389	102	1,383	-	374	10,013	231	290
2	Pesisir Utara	439	63	191	35	-	1,222	544	232
3	Pulau Pisang	143	-	78	-	-	984	155	-
4	Karya Penggawa	452	77	532	259	-	8,403	5,317	401
5	Way Krui	351	75	158	71	-	1,802	494	191
6	Pesisir Tengah	591	49	275	131	-	3,029	1,332	256
7	Krui Selatan	1,085	24	567	43	510	3,561	1,054	292
8	Pesisir Selatan	3,027	78	1,059	204	-	28,468	2,064	1,078
9	Ngambur	1,805	-	1,494	38	-	3,148	1,678	387
10	Ngaras	471	54	228	40	452	1,079	169	113
11	Bangkunat	1,373	36	1,294	393	500	14,949	3,220	972
Jumlah		**10.126**	**558**	**7.259**	**1,214**	**1,836**	**76,658**	**16,258**	**4,212**

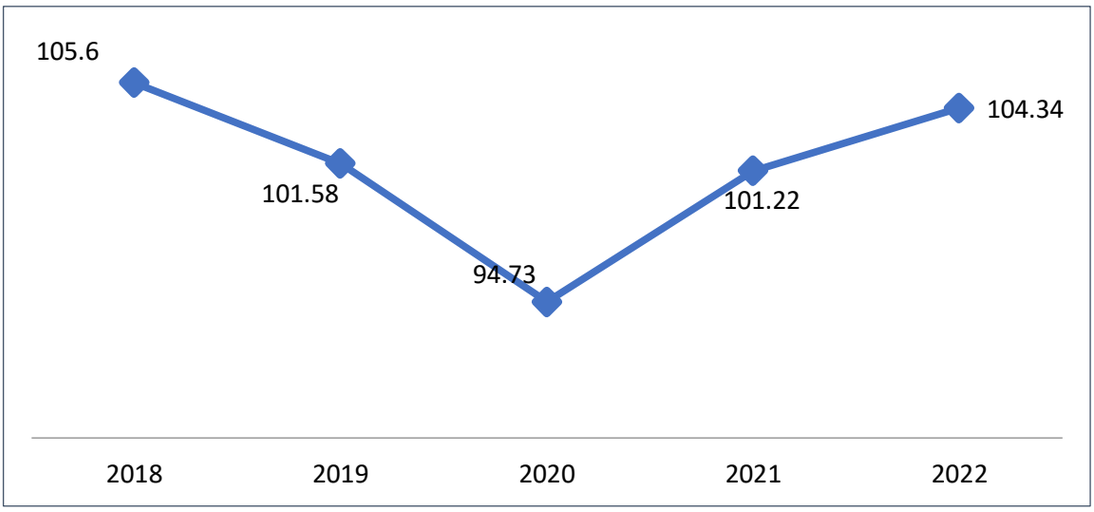
Sumber : Dinas KP dan Pertanian, 2022

Tabel 2.141. Kasus Penyakit Hewan Ternak Menular Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2022

No	Kecamatan	2021	2022
1	Lemong	3	0
2	Pesisir Utara	7	124
3	Pulau Pisang	0	0
4	Karya Penggawa	8	0
5	Way Krui	8	0
6	Pesisir Tengah	23	0
7	Krui Selatan	36	0
8	Pesisir Selatan	123	0
9	Ngambur	89	0
10	Ngaras	19	0
11	Bangkunat	25	0
Jumlah		**341**	**124**

Sumber : Dinas KP dan Pertanian, 2023

Gambar 2.87. Nilai Tukar Petani Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022



Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2023

Nilai Tukar Petani (NTP) adalah rasio antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani yang dinyatakan dalam persentase. Nilai tukar petani merupakan salah satu indikator dalam menentukan tingkat kesejahteraan petani. Sehingga semakin tinggi NTP maka diasumsikan semakin sejahtera nelayan. Bila melihat dari data NTP di Kabupaten Pesisir Barat, terjadi fluktuasi dengan kecenderungan menurun.

Angka NTP pada tahun 2018 ke angka 105,6. Namun demikian kembali turun menjadi 101,58 pada tahun 2019. Tidak stabilnya nilai NTP ini dikarenakan masih belum stabilnya harga produk pertanian, sementara itu biaya produksi untuk menghasilkan produk memiliki kecenderungan naik dari tahun ke tahun.

Petani di Kabupaten Pesisir Barat pada umumnya tidak memiliki modal besar. Dengan usaha tani berskala kecil, akses petani terhadap sumber permodalan menjadi terbatas. Kondisi ini ditambah dengan petani kurang memiliki fasilitas

penyimpanan hasil pasca panen, sementara produk pertanian bersifat mudah rusak. Akibatnya banyak petani terlibat ke dalam sistem ijon dan/atau tengkulak. Pada tahun 2020 Nilai Tukar Petani mengalami penurunan bahkan dibawah 100 yaitu berkisar diangka 94,73 hal ini menandakan bahwa biaya hidup yang harus dikeluarkan oleh petani lebih besar jika dibandingkan dengan perolehan hasil panen petani. Namun demikian, data capaian tahun 2021, NTP kembali meningkat di angka 101,22. Tahun 2022, NTP naik kembali menjadi sebesar 104,34.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan NTP mengalami fluktuasi penurunan antara lain :

1. Harga Jual Produk Pertanian turun (biasanya di musim panen raya);
2. Produktivitas pertanian yang masih sangat rendah (belum optimal);
3. Meningkatnya daya beli/daya konsumsi petani namum pendapatan tidak mengalami peningkatan bahkan mengalami penurunan pada periode tertentu.

Terkait hal diatas maka Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan NTP adalah :

1. mengendalikan pasokan dan harga pangan pokok, khususnya pada saat hari raya keagamaan
2. Memberikan bantuan benih unggul, pupuk bersubsidi, maupun alat dan mesin pertanian
3. Bekerja sama dengan BULOG agar mereka mau membeli gabah/beras milik petani pada saat harga dibawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP)
4. Memberikan bantuan sosial kepada petani untuk mengurangi biaya pengeluaran petani.

4. Perdagangan

Selama tahun 2018–2022 perekonomian daerah masih didominasi oleh sektor primer yaitu sektor pertanian. Sedangkan perdagangan selama tahun 2018–2022 merupakan penyumbang kedua PDRB ADHB Kabupaten Pesisir Barat yaitu rata-rata sebesar 11–14%. Kawasan perdagangan di Kabupaten Pesisir Barat terpusat berada di pasar-pasar yang ada di setiap kecamatan dan merupakan pasar besar (pasar kota). Kondisi saat ini sebagian besar pemerintah desa kurang berdaya dalam mengelola aset desa, hal ini disebabkan keterbatasan pendanaan dan juga kemampuan manajerial yang dimiliki sehingga pada akhirnya pemerintah desa dan masyarakat belum dapat memanfaatkan secara optimal semua aset yang ada untuk membangun perekonomian desa.

Oleh karenanya, dengan adanya kemauan dan keinginan yang kuat masyarakat di perdesaan untuk memperbaiki tingkat kesejahteraannya serta adanya komitmen dan dukungan keberpihakan semua pihak-pihak yang berkompeten terhadap pemberdayaan desa, merupakan peluang untuk meningkatkan perekonomian desa sekaligus membangun sistem ekonomi perdesaan melalui pengembangan aset desa secara efektif Perlu adanya perhatian khusus dan penataan pasar-pasar yang merupakan aset desa dan aset Pemerintah

Daerah yang bisa menjadi BUMDesa (Badan Usaha Milik Desa) dapat menambah sumber Pendapatan Asli Desa/Daerah. Pada Tabel di bawah adalah daftar Pasar Desa yang ada di Kabupaten Pesisir Barat.

Tabel 2.142. Jumlah Pasar Desa di Kabupaten Pesisir Barat Berdasarkan Kecamatan Tahun 2022

No	Kecamatan	Nama Pasar
1	Pesisir Selatan	Pasar Biha, Pasar Sumur Jaya, Pasar Senen
2	Bangkunat	Pasar pintau, Pasar Way Heni
3	Ngambur	Pasar Way Batang, Pasar Lansak, Pasar Cahaya Kuningan, Pasar Sumber Agung
4	Pesisir Utara	Pasar Kerbang Langgar, Pasar Gedau, Pasar Rata Agung
5	Lemong	Pasar Lemong, Pasar Melesom
6	Karya Penggawa	Pasar Ulok Pandan, Pasar Menyancang, Pasar Penengahan, Pasar Kebuayan, Pasar Laay
7	Krui Selatan	Pasar Mandiri, Pasar Way Napal,
8	Ngaras	Pasar Bandar Agung,
9	Pesisir Tengah	Pasar Way Batu, Pasar Pagi, Pasar Klewer

Sumber : Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan, 2023

Tabel 2.143. Jumlah Pasar Milik Pemerintah Daerah di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022

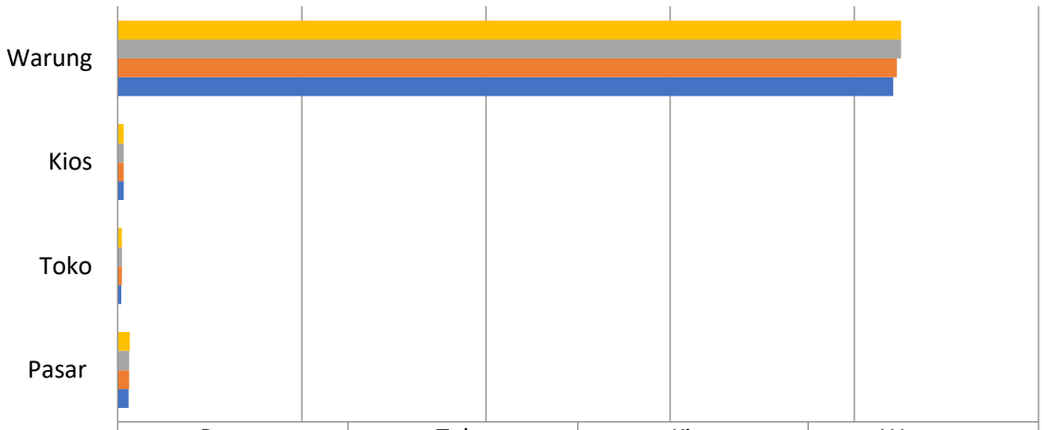
No	Kecamatan	Pekon/ Kelurahan	Jumlah			
			Los	Kios	Hamparan	Pedagang
1	Karya Penggawa	Pekon Kebuayaan :				
		Pasar Kebuayaan	4		50	54
2	Pesisir Tengah	Kelurahan Pasar Krui				
		Pasar Lama	65			120
		Pasar Way Batu 1	34		197	
		Pasar Way Batu 2	35		165	
3	Pesisir Selatan	Pekon Biha:				
		Pasar Biha 1	12		48	60
		Pasar Biha 2	10			Baru
4	Ngambur	Pekon Gedung Cahya Kuningan				
		Pasar Gedung Cahya Kuningan 1	16		64	80
		Pasar Gedung Cahya Kuningan 2	28			Baru
		Pasar Minggu	10			Baru
5	Bangkunat	Pekon Pagar Bukit				
		Pasar Pintau	24	14	73	80

Sumber : Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan, 2023

Hingga tahun 2022, Kabupaten Pesisir Barat memiliki 10 Pasar yang berada di 5 kecamatan. Kondisi pasar-pasar tersebut dalam kondisi baik dan mampu menjadi wadah bagi roda perekonomian pada tataran kecamatan hingga kabupaten. Revitalisasi beberapa pasar dan juga pembangunan pasar-pasar baru yang lebih modern diperlukan untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas ekonomi masyarakat daerah.

Berdasarkan pada data, jumlah sarana perdagangan terbanyak dari tahun 2019 hingga tahun 2022 adalah warung yang ada di masyarakat sebanyak 2.127 warung yang tersebar di 11 Kecamatan. Sementara itu, jumlah kios dari tahun 2019-2022 tidak berubah sebanyak 17 kios. Jumlah toko pada tahun 2019 sebanyak 11 buah dan menjadi 13 buah toko pada tahun 2022. Jumlah pasar pada tahun 2019 sebanyak 31 pasar, pada tahun 2020 dan 2021 sebanyak 32 pasar dan pada tahun 2022 sebanyak 34 pasar.

Gambar 2.88. Jenis Sarana Perdagangan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2019-2022



	Pasar	Toko	Kios	Warung
2022	34	13	17	2127
2021	32	13	17	2127
2020	32	13	17	2115
2019	31	11	17	2106

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan, 2023

Urusan perdagangan juga memiliki kewajiban dalam hal terkait dengan penyaluran pupuk bersubsidi bagi petani yang berhak. Dimana, pemerintah daerah berkewajiban menjaga pendistribusian pupuk bersubsidi yang tepat sasaran. Data pada tahun 2022, pupuk bersubsidi 8.225 ton yang terbagi dalam 5 jenis pupuk, yaitu pupuk Urea, SP36, ZA, NPK dan organic telah mencapai 100% dan dibagian kepada seluruh kelompok petani terdata di 10 Kecamatan (Kecamatan Pulau Pisang tidak memiliki lahan pertanian).

Tabel 2.144. Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kabupaten Pesisir Barat Berdasarkan Kecamatan Tahun 2022 (ton)

No	Kecamatan	Jenis Pupuk				
		Urea	SP36	ZA	NPK	Organik
1	Bangkunat	786	32	5	786	0
2	Ngaras	371	0	0	368	0
3	Ngambur	904	0	0	1.299	0
4	Pesisir Selatan	764	0	0	946	18
5	Krui Selatan	72	2	0	126	0
6	Pesisir Tengah	45	6	0	70	0
7	Way Krui	76	0	0	90	0
8	Karya Penggawa	230	8	0	378	0

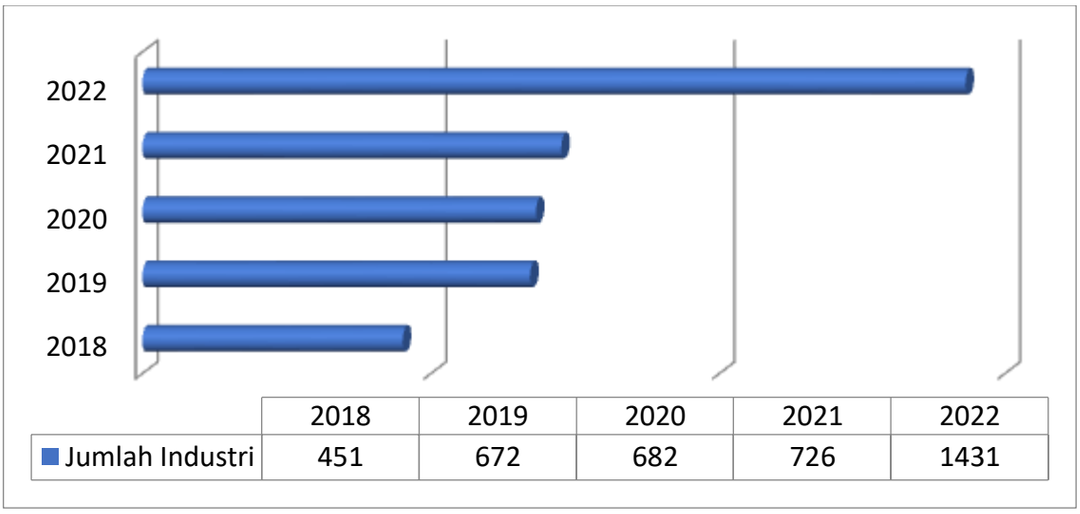
9	Pesisir Utara	111	0	4	180	0
10	Lemong	141	0	0	407	0
11	Pulau Pisang	0	0	0	0	0
	Jumlah	**3.500**	**48**	**9**	**4.650**	**18**

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan, 2023

5. Perindustrian

Dari sektor perindustrian, Kabupaten Pesisir Barat masih tergolong dalam daerah yang belum maju. Hal ini dapat dilihat dari jenis industri di Kabupaten Pesisir Barat yang masih fokus pada pengembangan industri kecil, yaitu sektor industri pengolahan pangan, industri pengolahan kayu dan industri pariwisata. Untuk sektor industri menunjukkan pertumbuhan yang relatif tetap. Besaran kontribusi tersebut terutama ditentukan oleh besarnya peran aktif sektor swasta dalam mendukung pengembangan perekonomian, walaupun kinerja belum mencapai optimal.

Gambar 2.89. Jumlah Industri Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022



Sumber : Dinas Trans Naker dan Perindustrian, 2023

Permasalahan permodalan dan/atau fasilitasi serta pemasaran untuk IKM di daerah masih tergolong minim. Keterbatasan kapasitas fiskal daerah merupakan faktor penghambat dari upaya pemerintah untuk mengembangkan sektor ini. Diperlukan kreatifitas dari pemilik IKM untuk dapat memanfaatkan peluang, khususnya pada pemasaranan melalui *e-commerce* yang saat ini sedang berada pada masa *booming*.

Tabel 2.145. Data Pemasaran Industri Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022

No	Jenis Usaha	Jumlah Unit Usaha	Pemasaran Tradisional	Pemasaran e-commerce
1	Perlengkapan Rumah Tangga dari Tanah Liat/Keramik	1	1	0
2	Barang dari Kapur	3	3	0
3	Furnitur dari Kayu	63	63	20
4	Kerajinan YDTL	1	1	0
5	Penggaraman/Pengeringan Ikan	6	6	0

6	Pengasapan/Pemanggangan Ikan	8	8	0
7	Berbasis Daging Lumatan dan Surimi	11	11	0
8	Tempe Kedelai	44	44	0
9	Tahu Kedelai	26	26	0
10	Penggilingan Padi dan Penyosongan Beras	69	69	0
11	Produk Roti dan Kue	17	17	11
12	Gula Merah	20	20	5
13	Makanan dan Masakan Olahan	17	17	17
14	Pengolahan Kopi	30	30	27
15	Pengolahan The	1	1	1
16	Kue Basah	5	5	2
17	Kerupuk, Keripik dan Sejenisnya	40	40	23
18	Produk Makanan Lainnya	2	2	2
19	Minuman Ringan	1	1	1
20	Air Minum dan Air Mineral	13	13	7
21	Kain Tenun Ikat	3	3	2
22	Kain Sulaman	600	600	200
23	Barang dari Tali	44	44	22
24	Penjahitan dan Pembuatan Pakaian sesuai Pesanan	5	5	0
25	Perlengkapan Pakaian dari Tekstil	1	1	0
26	Pakaian Jadi dan Barang dari Kulit Berbulu	1	1	1
27	Barang Bangunan dari Kayu	8	8	2
28	Barang Lainnya dari Kayu	5	5	2
29	Barang Anyaman dari Rotan/Bambu	66	66	45
30	Barang Anyaman dari Tanaman bukan Rotan/Bambu	28	28	28
31	Kerajinan Ukiran dari Rotan/Bambu	60	60	50
32	Percetakan Umum	1	1	1
33	Batu Bata dari Tanah Liat/Keramik	57	57	0
34	Genteng dari Tanah Liat/Keramik	1	1	0
35	Barang dari Semen dan Kapur untuk Konstruksi	2	2	0
36	Alat Potong dan Perkakas Tangan Pertukangan	4	4	0
37	Barang Logam lainnya YTDL	7	7	0
38	Furnitur dari Rotan/Bambu	4	4	4
39	Permata	5	5	5
40	Kerajinan YTDL	31	31	0
41	Pengolahaan Lainnya YTDL	1	1	0
42	Jasa Industri untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam dan Barang dari Logam	120	120	0
	Jumlah	**1.432**	**1.432**	**478**

Sumber : Dinas Trans Naker dan Perindustrian, 2023 (data diolah)

Tabel 2.146. Pencapaian Indikator Kinerja Perindustrian Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022

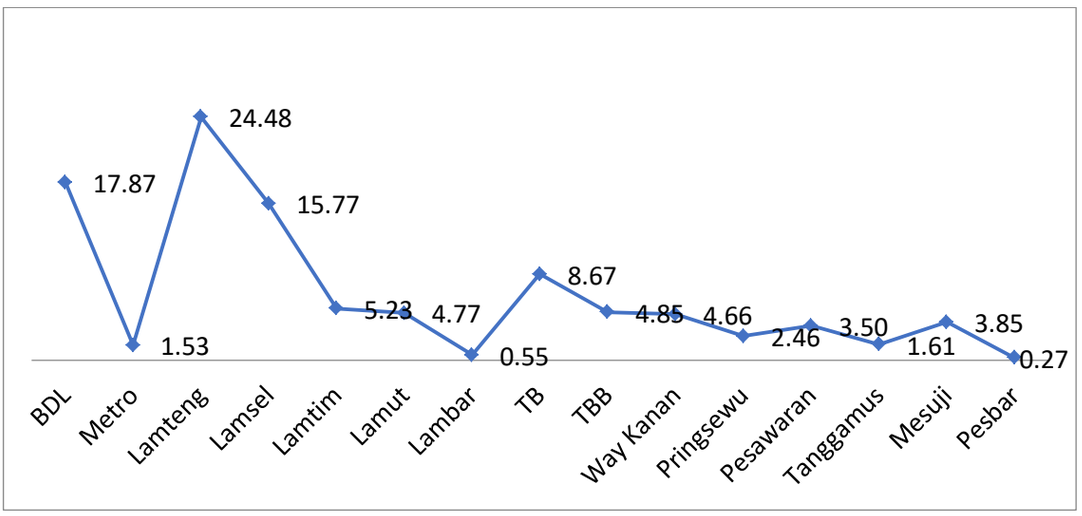
Indikator Kinerja Utama	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	Persen	4.88	4.49	3.98	4.11	3.76
Kontribusi Sektor Jasa Lainnya	Persen	1.04	1.06	1.00	0.95	1.13

Sumber : BPS Pesisir Barat, 2023

Berdasarkan pada target kinerja urusan perindustrian, didapatkan gambaran bahwa untuk perkembangan sektor ini terhadap PDRB terus menurun. Hal ini memang disebabkan belum berkembangan sektor industri menengah dan besar di Kabupaten Pesisir Barat. Industri masih terfokus pada IKM atau industri skala rumah. Fokus dari pemerintah daerah untuk mengembangkan industri pengolahan juga belum optimal dikarenakan kondisi geografis daerah yang belum representatif untuk jalur produksi dan distribusi. Pada tahun 2018 industri pengolahan menyumbang persentase sebesar 4,88% pada tahun 2019 turun menjadi 4,49%. Tahun 2022 kembali turun menjadi 3,98%. Kenaikan terjadi pada tahun 2021 menjadi 4,11% namun demikian pada tahun 2022 kembali turun menjadi 3,76%.

Bila dibandingkan dengan 14 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Lampung, Kabupaten Pesisir barat menjadi daerah dengan nilai *share* terkecil dalam kurun waktu 5 tahun pada periode 2018-2022. Sementara Kabupaten Lampung Tengah (24,48%), Kota Bandar Lampung (17,87%) dan Kabupaten Lampung Selatan (15,77%) adalah daerah dengan *share* terbesar. Rendahnya nilai 0,27% nilai share dari Kabupaten Pesisir Barat sejalan dengan narasi tidak adanya industri skala menengah dan besar di daerah.

Gambar 2.90. Kontribusi Industri Pengolahan Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2022

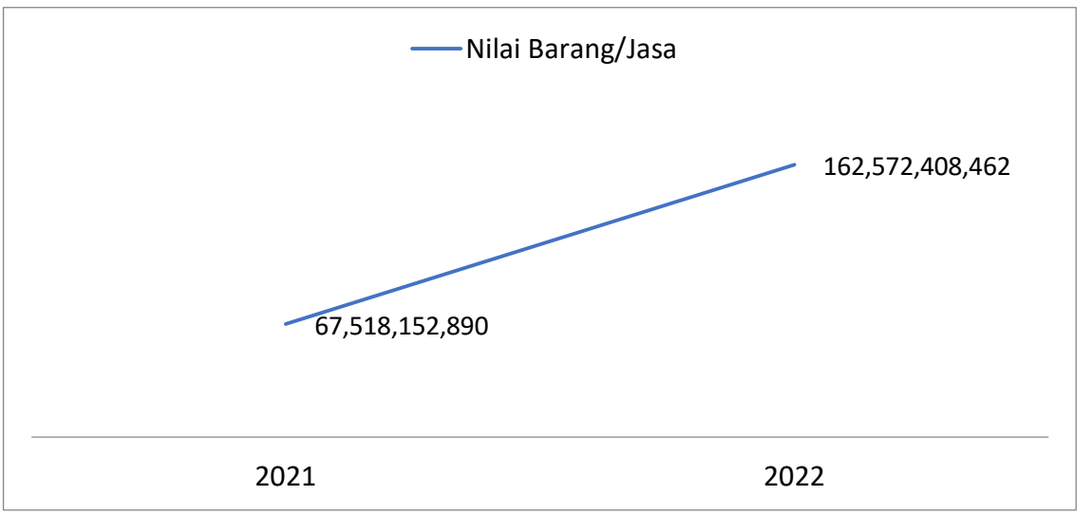


Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2023

Pada sisi jasa lainnya (industri IKM dikategorikan pada sektor ini) tidak banyak mengalami perubahan, dimana data pada tahun 2018 sebesar 1,04%, tahun 2019 naik menjadi 1,06%, tahun 2020 turun menjadi 1,00%, tahun 2021 kembali turun menjadi 0,95% dan tahun 2022 naik menjadi 1,13%.

Terkait dengan kebijakan penggunaan produk dalam negeri dalam proses pengadaan barang dan jasa oleh Pemerintah Daerah, pada tahun 2022 tercatat sebesar Rp.162.572.408.462,00. Dimana dari nilai tersebut naik bila dibandingkan pada tahun 2021 sebesar Rp.67.518.152.890,00.

Gambar 2.91. Nilai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah yang Menggunakan Produksi Dalam Negeri Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2022



Sumber : Sekretariat Daerah Kab, 2023

6. Transmigrasi

Transmigrasi merupakan program pemerintah dalam rangka pemerataan penyebaran penduduk dan pendayagunaan lahan. Efek lain dari transmigrasi mencakup juga pembukaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Di Provinsi Lampung, Kabupaten Pesisir Barat merupakan salah satu daerah yang menjadi *pilot project* pengembangan transmigrasi. Sebagaimana dipahami, wilayah transmigrasi tidak menyebar di seluruh daerah. Dari awal pelaksanaan program hingga tahun 2022, pemukiman transmigrasi hanya terdapat di Kecamatan Ngambur dan berada pada 4 Pekon dengan sebaran rumah tinggal sebanyak 1.139 unit yang ditinggali oleh 3.476 Kepala keluarga. Dengan luas lahan sebanyak 557,1 Ha.

Tabel 2.147. Daerah Transmigrasi Kabupaten Pesisir Barat

No	Kecamatan	Pekon	Penduduk		
			Laki-laki	Perempuan	Total
1	Ngambur	Pekonmon	760	94	854
		Gedung Cahya Kuningan	883	156	1.039
		Ulok Mukti	781	140	921
		Bumi Ratu	579	83	662
		Jumlah	**3.003**	**473**	**3.476**

Sumber : Dinas Trans Naker dan Perindustrian, 2023

Perbaikan sarana dan prasarana publik, seperti jalan dan jembatan menuju lokasi transmigrasi, serta pengembangan pemberdayaan masyarakat merupakan kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dalam upaya mengembangkan kawasan dan pengembangan SDM.

7. Energi

Daerah Pesisir Barat cukup kaya akan berbagai sumber daya energi seperti gas bumi/panas bumi, tenaga air (air terjun, air deras dan gelombang laut, tenaga angin dan sebagainya). Perlu diadakan penelitian dan pengembangan lebih lanjut terhadap sumber energi tersebut agar dapat digunakan sebagai energi alternatif yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pada Tabel di bawah ini menunjukan pemanfaatan energi alternatif sebagai sumber listrik.

Tabel 2.148. Pembangkit Listrik Tenaga Micro Hydro (PLTMH) di Kabupaten Pesisir Barat

Sumber Energi	Produksi	Lokasi	
		Desa	Kecamatan
PLTMH	3.22 MW	Tanjung Rejo	Bangkunat
	2-2.5 MW	Way Ngambur	Ngaras
	2-2.5 MW	Way Tembulih	Ngambur
	69 KW	Ulok Mukti	Ngambur
	4.57 MW	Way Simpang Kanan, Laay	Karya Penggawa
	8-20 MW	Way Simpang Kiri, Laay	Karya Penggawa
	7.21 MW	Way Simpang Balak	Pesisir Utara
	3.81 MW	Way Simpang Lunik	Pesisir Utara
	1.25 MW	Khampang Kota Karang	Pesisir Utara
	2-2.5 MW	Way Malaya	Lemong
	4.20 MW	Way Melesom	Lemong
	2x1.15 MW	Way Melesom 2	Lemong
	2.13 MW	Way Halami	Lemong

Sumber : Bappelitbangda, 2022

Jaringan listrik di Kabupaten Pesisir Barat dikelola oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD). Untuk memenuhi kebutuhan listrik, PT PLN telah melayani hampir seluruh ibukota

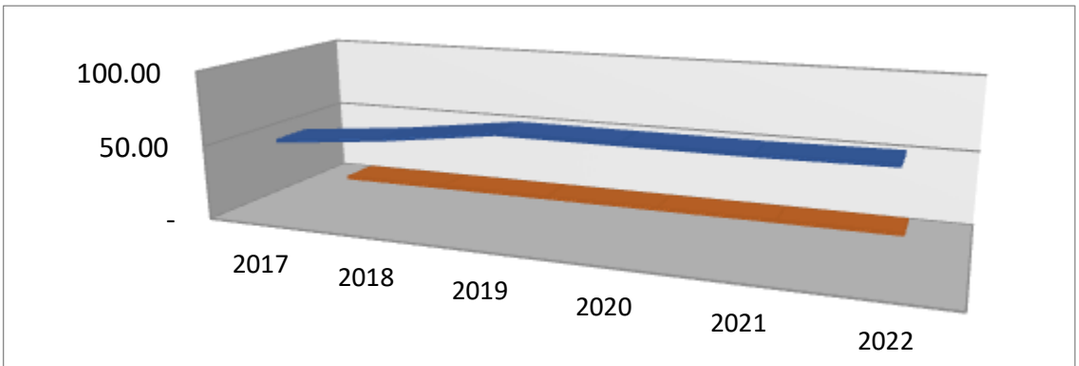
Kecamatan dan hampir seluruh desa di Kabupaten Pesisir Barat. Salah satu potensi pembangkit listrik di Kabupaten Pesisir Barat adalah pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Mini dan/atau Mikro hidro (PLTMH) yang terletak di Kecamatan Bangkunat, Karya Penggawa, Pesisir Utara dan Lemong.

Tabel 2.149. Potensi Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTM) Kabupaten Pesisir Barat

No	Kecamatan	Pekon	Potensi Produksi	Keterangan
1	Bangkunat	Tanjung Rejo	4 MW	Koperasi Bina Karya dan PT. Mara Makmur
2	Bengkunat	Way Ngambur	2.25 MW	-
3	Ngambur	Way Tembulih	2.25 MW	-
		Ulok Mukti	6.9 MW	-
4	Karya Penggawa	Way Simpang Kanan, Laay	4.57 MW	-
		Way Simpang Kiri, Laay	8.20 MW	-
5	Pesisir Utara	Way Simpang Balak	7.21 MW	-
		Way Simpang Lunik	3.81 MW	-
		Way Khua Pampang, Kota Karang	1.25 MW	-
6	Lemong	Way Malaya	6 MW	Tahap Usulan Perizinan
		Way Melesom	4.20 MW	-
		Way Halami	2.31 MW	-

Sumber : PT. PLN Rayon Lampung Barat, 2018

Gambar 2.92. Rasio Elektrifikasi dan Energi Baru Terbarukan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022



	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Elektrifikasi	51.80	58.96	68.95	68.95	68.95	70.11
Energi Baru Terbarukan	6.10	6.23	6.24	6.27	6.29	6.30

Sumber : Sekretariat Daerah, 2023

Pada pengembangan sektor energi di Kabupaten Pesisir Barar, baik dari sisi rasio elektrifikasi atau listrik dari PLN serta penggunaan energi baru terbarukan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini dapat dilihat dari data rasio elektrifikasi yang terus meningkat dari tahun 2018 (58,96%), tahun 2019 sampai

dengan tahun 2021 stagnan pada capaian (68,95%) dan tahun 2022 telah mencapai (70,11%). Sementara itu, untuk rasio desa berlistrik pada tahun 2021 sebanyak 96,61% dan tahun 2022 sebanyak 98,27%.

Data ini menunjukkan komitmen dari pemerintah daerah dalam memfasilitasi masyarakat untuk dapat menikmati layanan dari PLN. Namun demikian, hingga saat ini masih terdapat 4 (empat) pekon yang belum mendapatkan fasilitasi listrik PLN, yaitu: (1) Pekon Bandar Dalam; (2) Pekon Way Haru; (3) Pekon Way Tiyas; dan (4) Pekon Siring Gading, keempat pekon dimaksud berada di Kecamatan Bangkunat.

Tabel 2.150. Jumlah Pelanggan Listrik PT PLN Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan Kecamatan Tahun 2018-2022

No	Kecamatan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Lemong	1.706	2.331	3.004	2.708	2.936
2	Pesisir Utara	433	570	1.097	773	889
3	Pulau Pisang	131	555	1.025	585	594
4	Karya Penggawa	185	331	890	562	633
5	Way Krui	73	367	879	477	530
6	Pesisir Tengah	14.249	15.233	9.524	16.736	17.620
7	Krui Selatan	409	614	1.360	909	1.073
8	Pesisir Selatan	4.337	4.751	5.489	5.951	6.385
9	Ngambur	269	1.534	5.094	2.731	3.115
10	Ngaras	668	923	1.735	1.202	1.385
11	Bangkunat	809	1.387	1.585	2.511	2.997
	Jumlah	**23.269**	**28.596**	**31.682**	**35.145**	**38.157**

Sumber : Sekretariat Daerah, 2023

Sementara itu disisi lainnya, yaitu penggunaan energi baru terbarukan oleh masyarakat juga meningkat. Hal ini menggambarkan kesadaran dari masyararakt untuk memanfaatkan potensi-potensi sumber daya alam yang dapat diperbaharui, khususnya sinar matahari dan tenaga air. Berdasarkan data pada tahun 2016 (4,14%), tahun 2017 (6,10%), tahun 2018 (6,23%), tahun 2019 (6,24%) dan tahun 2020 dengan capaian mencapai 6,27%. Capaian tahun 2021 pada angka 6,29%. Tahun 2022 sebanyak 6,30% masyarakat telah menggunakan energi baru terbarukan.

2.1.3.3. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1. Sekretariat Daerah

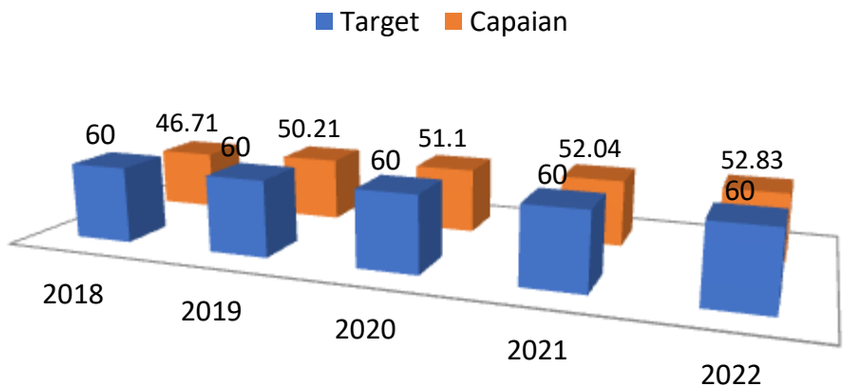
Sekretariat Daerah adalah unsur pembantu pimpinan pemerintah daerah, yang dipimpin oleh sekretaris daerah, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Sekretariat Daerah Kabupaten bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administrasi kepada Kepala Daerah dan wakil kepala daerah dan seluruh Perangkat Daerah Kabupaten.

Tabel 2.151. Pencapaian Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022

Indikator Kinerja Utama	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Terlaksananya Kegiatan Keprotokolan	Persen	100	100	100	100	100
Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur sesuai Standar Kualitas yang Baik	Persen	73,30	73,30	73.30	80,00	82,00
Persentase Dokumen Administrasi Perkantoran yang diselesaikan tepat waktu	Persen	75,00	80,00	80,00	85,00	92,00
Persentase Perda Bermasalah yang dibatalkan	Persen	0	0	0	0	0
Persentase Prolegda yang terealisasi	Persen	85,00	85,00	55,00	46.40	
Nilai Sakip	Skor	C	CC	CC	CC	CC
Nilai Reformasi Birokrasi	Skor	n/a	n/a	n/a	C	C

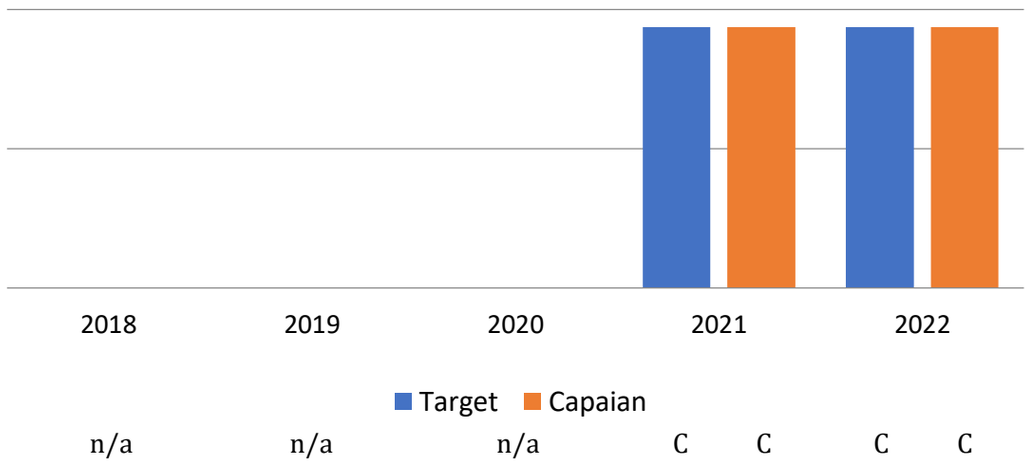
Sumber : Sekretariat Daerah, 2023

Gambar 2.93. Nilai SAKIP Kabupaten Pesisir Barat 2018-2022



Sumber : Sekretariat Daerah, 2023

Gambar 2.94. Nilai Reformasi Birokrasi Kabupaten Pesisir Barat 2021-2022



Sumber : Sekretariat Daerah, 2023

Sekretariat Daerah yang melaksanakan unsur pendukung pemerintahan daerah dan fokus pada pelayanan kedinasan kepada kepala daerah dalam penetapan kinerja setidaknya melaksanakan sektor program/kegiatan yang berkaitan dengan fasilitasi keagamaan, keprotokolan pimpinan daerah, penyediaan sarana dan prasarana aparatur, penyusunan dokumen administrasi perkantoran termasuk penatausahaan kegiatan, penyusunan dokumen pelaporan daerah, hukum dan peraturan perundang-undangan daerah. Berdasarkan pada data tahun 2018-2022. Untuk Kegiatan Keprotokolan kepada pimpinan daerah juga konsisten pada angka 100% (tahun 2018-2022).

Berikutnya untuk indikator Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur sesuai Standar Kualitas yang Baik berdasarkan pada tahun 2018 capaian pada angka 73,30% dan tahun 2019 mencapai angka 73,30% dan tetap hingga tahun 2020. Tahun 2021 capaian sebesar 80%. Capaian pada tahun 2022 sebesar 82,00%. Belum optimalnya pencapaian indikator ini dikarenakan kebutuhan pendanaan untuk mencukupi sarana dan prasarana seluruh aparatur daerah dianggarkan secara bertahap.

Untuk indikator Dokumen Administrasi Perkantoran yang diselesaikan tepat waktu berdasarkan data tahun 2018 sebesar 75,00% dan kembali naik pada tahun 2019 dan 2020 pada angka 80,00%. Capaian pada tahun 2021 sebesar 85% dan menjadi 92% pada tahun 2022. Dari sisi pelaksanaan hukum dan peraturan perundang-undangan, Persentase Perda Bermasalah yang dibatalkan data dari tahun 2018-2022 konsisten pada capaian 0%. Angka ini dikarenakan berdasarkan pada data 2018-2022 belum ada perda yang dibatalkan dikarenakan bermasalah oleh Kementerian Dalam Negeri.

2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dibentuk untuk mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas pokok DPRD dalam rangka meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja lembaga perwakilan rakyat Daerah. Sekretariat DPRD yang dipimpin oleh sekretaris dewan mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya.

Jumlah anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat untuk periode Tahun 2019-2024 hasil Pemilihan Legislatif Tahun 2019 adalah 25 orang yang terdiri dari 4 Daerah Pemilihan. Partai politik yang memiliki kursi adalah sebanyak 9 Partai, yaitu: (1) Partai Nasional Demokrat (7 Anggota); (2) Partai PDI-Perjuangan (5 Anggota); (3) Partai PKB (3 Anggota); (4) Partai Demokrat (3 Anggota); (5) Partai Golkar (2 Anggota); (6) Partai PAN (2 Anggota); (7) Partai Gerindra (1 Anggota); (8) Partai Perindo (1 Anggota); (9) Partai PBB (1 Anggota).

Tabel 2.152. Data Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2019-2024 berdasarkan Fraksi

No	Nama Fraksi	Nama Anggota	
I	Fraksi Nasional Demokrat	1	HARIYADI
		2	HENDRIK GUNAWAN
		3	AGUS CIK
		4	YETI HERLINA
		5	NAZRUL ARIF
		6	FAIZAL
		7	RENDI RINALDI
II	Fraksi PDI Perjuangan	1	A. ZULKIPLI ROHMAN
		2	RIPZON EFENDI, S.Sos.
		3	PIDDINURI, S.H.
		4	ERWIN GOESTOM
		5	MAD. MUHIZAR, S.E.
III	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	1	RIZA PAHLEVI, S.T.
		2	H. LISWANDI
		3	ALI YUDIEM, S.H
IV	Fraksi Demokrat	1	M. TOWIL
		2	KHOIRIL ISWAN
		3	ARIS IKHWANDA
		4	FADLI AHMADI, A.Md
V	Fraksi Amanat Indonesia Raya	1	ROHAN EFENDI
		2	Drs. A.E. WARDHANA KASUMA
		3	HERMANSYAH
VI	Fraksi Golkar-Perindo	1	M. SYAHRUDDIN
		2	AHD. MUHYAN
		3	GUSTI KADE ARTAWAN

Tabel 2.153. Pencapaian Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022

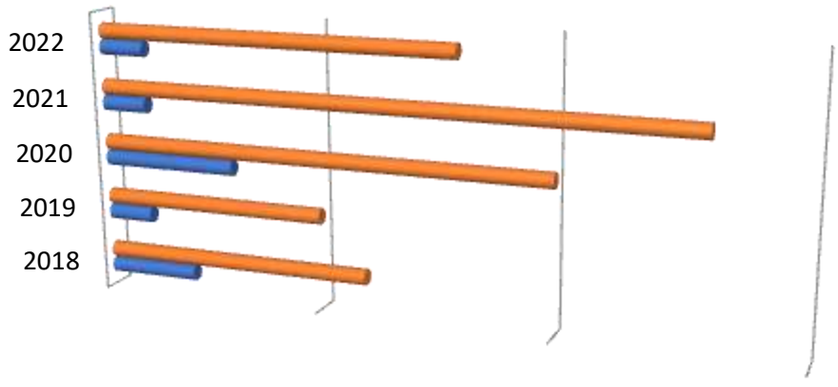
Indikator Kinerja Utama	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Peningkatan Peran dan Fungsi Politik Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persen	87,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Persentase Ranperda dibahas	Persen	100	100	100	100	100

Sumber : Sekretariat DPRD, 2022

Sekretariat DPRD yang melaksanakan unsur staf pendukung pimpinan dan anggota DPRD dalam menjalankan peran dan fungsinya pada tahun 2018-2022 telah memenuhi target 100% indikator persentase ranperda dibahas bersama dengan pemerintah daerah. Sedangkan untuk indikator peningkatan peran dan fungsi politik lembaga DPRD dalam track positif, tahun 2018 dengan 87%. Selanjutnya persentase mencapai 90% pada tahun 2019 dan bertahan diangka yang sama pada tahun 2020, 2021 dan 2022.

Terkait dengan salah satu fungsi DPRD sebagai organ pembentuk peraturan daerah, pada tahun 2022, terdapat 8 Perda yang dibentuk bersama-sama dengan pihak eksekutif. Jumlah tersebut turun dibandingkan dengan tahun 2021 sebanyak 13 Perda. Tahun 2020 jumlah perda yang ditetapkan sebanyak 10 Perda setelah sebelumnya tahun 2019 hanya terdapat 5 Perda. Bahwa diantara perda tersebut sebagian merupakan inisitif dari DPRD sebagaimana data dibawah ini:

Gambar 2.95. Jumlah Perda Inisiasi DRPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022



	2018	2019	2020	2021	2022
Total	6	5	10	13	8
Inisiatif	2	1	3	1	1

Sumber : Sekretariat DPRD, 2023

2.1.3.4. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan

Perencanaan daerah merupakan kewenangan dari kepala daerah dan merupakan unsur penunjang dalam proses pembangunan daerah. Kewenangan dari kepala daerah dalam perencanaan daerah setidaknya dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah, yaitu RPJPD, RPJMD dan RKPD. Berdasarkan pada dokumen perencanaan tersebut akan disusun dokumen penganggaran dan juga dokumen penunjang pembangunan lainnya.

Perencanaan daerah yang optimal dan taat asas serta peraturan perundang-undangan sebagai salah satu syarat menjamin arah dan tujuan pembangunan daerah yang mengarah pada pencapaian target pembangunan yaitu kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, perencanaan yang baik akan menghasilkan penganggaran yang proposional dan sesuai dengan kebutuhan.

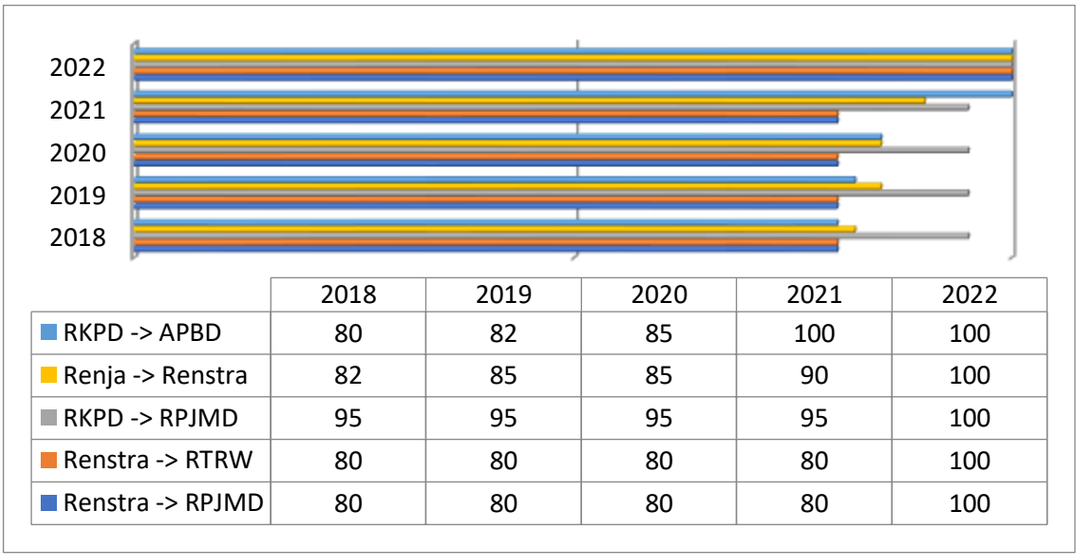
Tabel 2.154. Pencapaian Indikator Kinerja Perencanaan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022

Indikator Kinerja Utama	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Penjabaran Konsistensi Program RJPMD ke dalam RKPD	Persen	80,54	85,00	87,43	89,80	91,08

Indikator Kinerja Utama	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD	Persen	80,00	82,00	85,00	100	100
Persentase Pencapaian Target Program Pembangunan Daerah	Persen	76,50	77,00	77,78	91,78	92,36

Sumber : Bappelitbangda, 2023

Gambar 2.96. Pencapaian Indikator Perencanaan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022



	2018	2019	2020	2021	2022
RKPD -> APBD	80	82	85	100	100
Renja -> Renstra	82	85	85	90	100
RKPD -> RPJMD	95	95	95	95	100
Renstra -> RTRW	80	80	80	80	100
Renstra -> RPJMD	80	80	80	80	100

Sumber : Bappelitbangda, 2023

Unsur penunjang perencanaan daerah dalam pencapaian target Perangkat Daerah yang muatan Renstra-nya sesuai dengan RPJMD dari tahun 2018-2021 telah mencapai 80%. Pada tahun 2022, capaian telah mencapai 100%. Berikutnya, Persentase Perangkat Daerah yang muatan Renstra-nya sesuai dengan RTRW Kabupaten pada tahun 2017-2021 telah mencapai 80% dan mencapai 100% pada tahun 2022.

Selanjutnya, untuk Tingkat Kesesuaian antara Muatan RKPD dengan RPJMD pada tahun 2018-2021 yang berada pada angka 95%. Tahun 2022 telah mencapai 100%. Kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD merupakan salah satu indikator keberhasilan dalam menjaga konsistensi arah pembangunan.

Sementara itu untuk capaian Persentase Muatan Renja Perangkat Daerah yang sesuai dengan Renstra Perangkat Daerah dan RKPD juga masih belum mencapai nilai optimal, pada tahun 2018 capaian 82%. Pada data tahun 2019-2020 capaian sedikit meningkat menjadi 85%. Tahun 2021, seiring dengan perbaikan kinerja capaian meningkat menjadi 90%. Data pada tahun 2022 telah mencapai 100%.

Berikutnya, untuk data konsistensi RKPD dengan APBD pada tahun 2018 sebesar 80%. Tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 82% dan 85% pada tahun 2020. Data pada tahun 2021 dan 2022 telah mencapai 100%.

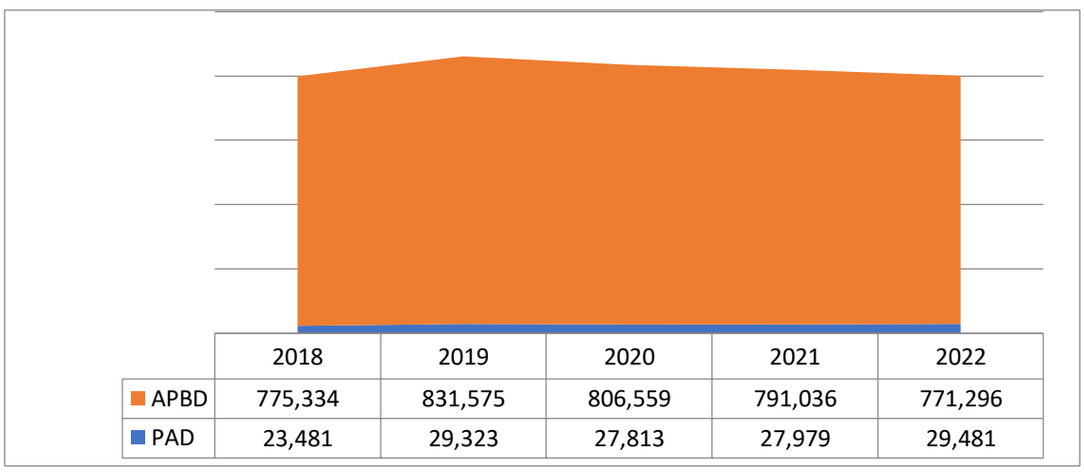
Keberhasilan pencapaian konsistensi pada tahun 2022 dipengaruhi oleh penggunaan aplikasi terintegrasi antara perencanaan dan penganggaran yang mulai dipergunakan pada tahun 2021.

2. Keuangan

Keuangan daerah mencakup kewenangan daerah dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah yang diwujudkan dalam APBD. Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemampuan keuangan daerah atau kemampuan fiskal daerah adalah kemampuan keuangan daerah dalam mebiayai urusan-urusan rumah tangganya, khususnya yang berasal dari pendapatan asli daerah.

Gambar 2.97. Perbandingan PAD terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022 (dalam juta rupiah)



	2018	2019	2020	2021	2022
APBD	775,334	831,575	806,559	791,036	771,296
PAD	23,481	29,323	27,813	27,979	29,481

Sumber : Bapenda, 2023

Kemampuan keuangan daerah erat kaitannya dengan bagaimana daerah mampu membiayai pengeluarannya sendiri. Dalam hal ini adalah bagaimana daerah bisa terus meningkatkan nilai Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan pada data tahun 2018-2022 nilai persentase PAD terhadap APBD cenderung terus mengalami peningkatan, walaupun tidak signifan terhadap keseluruh dari pendapatan daerah. Hal ini dikarenakan Kabupaten Pesisir Barat masih masuk dalam daerah yang memiliki kapasitas fiskal rendah dan lebih banyak mengandalkan pendapatan dari transfer pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

Data PAD pada tahun 2018 (3,03%), tahun 2019 (3,53%) dan tahun 2020 (3,45%). Tahun 2021 sedikit meningkat menjadi sebesar (3,54%). Capaian pada tahun 2022 telah menjadi 3.82% nilai PAD dibandingkan dengan jumlah pendapatan daerah secara keseluruhan.

Secara persentase atau rasio nilai PAD terlihat terus mengalami peningkatan, namun demikian bila melihat dari sisi nominal angka PAD masih relatif kecil bila dibandingkan dengan kebutuhan belanja daerah. Diperlukan usaha lebih giat dalam optimalisasi peningkatan nilai PAD pada tahun mendatang.

Tabel 2.155. Pencapaian Indikator Kinerja Keuangan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022

Indikator Kinerja Utama	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Opini BPK atas LKPD	Predikat	WDP	WTP	WTP	WTP	Belum Rilis
Rasio PAD terhadap Total Penerimaan Daerah	Persen	3,03	3,53	3.45	3.54	3.82

Sumber : BPKAD dan Bapenda, 2023

Opini BPK atas LKPD sebagai indikator yang menunjukkan nilai akuntabilitas daerah dalam melakukan penatausahaan keuangan daerah pada tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021 telah berhasil mencapai WTP, yang mana sebelumnya pada tahun 2014 dan 2015 dengan predikat disclaimer. Pada tahun 2016, tahun 2017 dan 2018 nilai predikat LKPD dapat naik dengan predikat WDP.

Tahun 2021 kembali Kabupaten Pesisir Barat mendapatkan predikat WTP untuk ketiga kalinya. Sementara untuk data capaian tahun 2022 belum dirilis. Pencapaian nilai WTP ini wajib dipertahankan untuk tahun-tahun mendatang sebagai bentuk komitmen dari pemerintah daerah menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan sesuai dengan Standar Akuntasi Pemerintah yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

3. Kepegawaian

Unsur penunjang kepegawaian daerah dilakukan untuk meningkatkan manajemen pengelolaan dari ASN daerah dan dilakukan dalam upaya peningkatan kualitas dari aparatur. Managemen kepegawaian merupakan bagian dari hukum administrasi dan manajemen. Manajemen kepegawaian mendasarkan fungsi pada serangkaian upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan derajat profesionalime yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, dan penggajian, kesejahteraan, dan pemberhentian pegawai negeri sipil. Manajemen pegawai negeri sipil diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Tabel 2.156. Pencapaian Indikator Kinerja Kepegawaian Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022

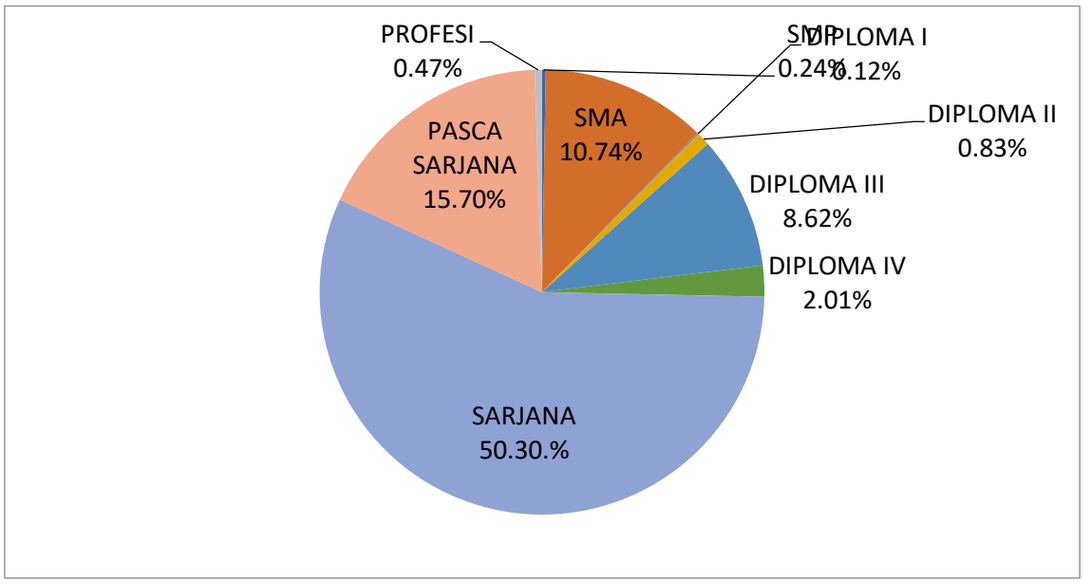
Indikator Kinerja Utama	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Orang	34	32	33	22	29
Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Orang	149	146	152	383	558
Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Orang	1.231	1.610	1.559	1.836	1.783

Sumber : BKPSDM, 2023

Berdasarkan pada indikator capaian kinerja, jumlah JPTP (Eselon II) terus mengalami peningkatan, dimulai pada tahun 2018 sebanyak 34 orang dan menjadi 32 dan 33 orang pejabat pada tahun 2019 dan tahun 2020. Berdasarkan pada cata pada tahun 2021 sebanyak 22 orang JPTP dan 29 orang pada tahun 2022 yang lalu. Berikutnya pada indikator jumlah jabatan administrasi (Eselon III, IV, V dan Fungsional Umum) juga mengalami peningkatan, pada tahun 2018 sebanyak 149 jabatan. Pada tahun 2019 jumlah jabatan administrasi menjadi 146 dan terakhir pada tahun 2020 sebanyak 152 jabatan. Tahun 2021 jumlah pejabat administrasi yang tercatat sebanyak 383 orang dan bertambah menjadi 558 orang pada tahun 2022. Sementara itu untuk posisi Jabatan Fungsional Tertentu (Guru, Kesehatan, Non Guru dan Kesehatan) pada tahun 2018 sebanyak 1.241 jabatan dan pada tahun 2020 sebanyak 1.559 jabatan fungsional dan bertambah menjadi 1.836 orang pada tahun 2021. Pada tahun 2022 terdapat 1.783 orang PNS yang menjadi JFT.

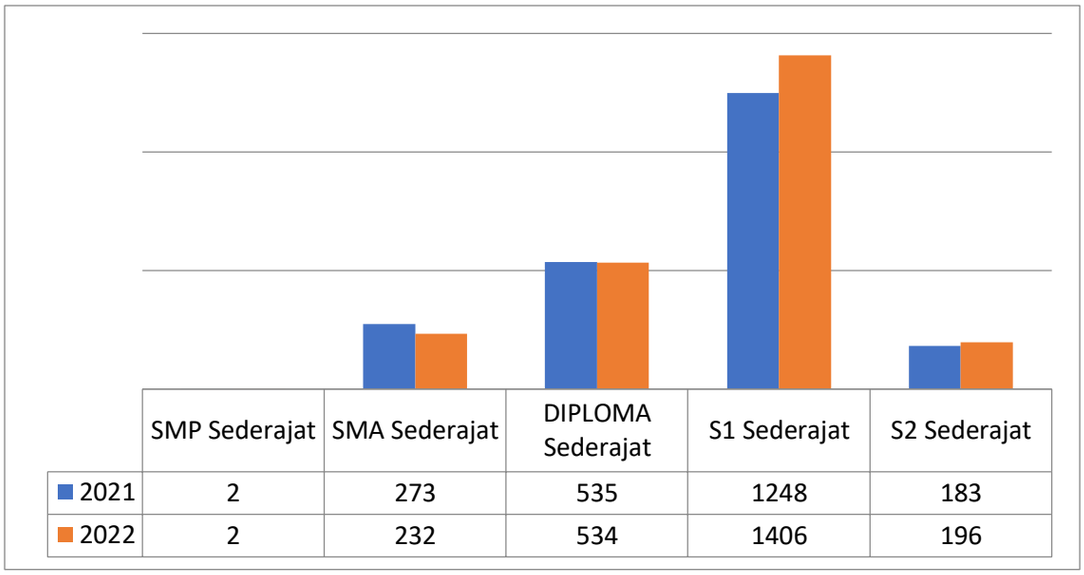
Bila dilihat dari komposisi berdasarkan pada jenjang pendidikan, sebanyak 50,30% adalah lulusan Sarjana Strata S1. Sementara jumlah lulusan Pasca Sarjana Strata 2 dan 3 hanya 15.70%. komposisi paling kecil adalah lulusan Diploma I sebanyak 0,12% dan lulusan SMP sebanyak 0,24%.

Gambar 2.98. Persentase PNS Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan Jenjang Pendidikan (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Tahun 2022



Sumber : BKPSDM, 2023

Gambar 2.99. Jumlah PNS Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2021-2022



	SMP Sederajat	SMA Sederajat	DIPLOMA Sederajat	S1 Sederajat	S2 Sederajat
2021	2	273	535	1248	183
2022	2	232	534	1406	196

Sumber : BKPSDM, 2023

Berikutnya terkait dengan persentase Instansi yang menerapkan kebijakan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) di Kabupaten Pesisir Barat, secara umum hingga tahun 2022 belum mampu mencapai angka 100%. Data capaian pada tahun 2016 hingga 2021 masih sebesar 90%. 2016 (80%); 2017 (80%); 2018 (85%); 2019 (85%); 2020 (90%); 2021 (90%). Namun demikian, pada tahun 2022 capain telah mencapai 93% dari seluruh instansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat telah menerapkan kebijakan SKP sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam proses penilaian kinerja pegawai.

4. Pendidikan dan Pelatihan

Unsur penunjang pendidikan dan pelatihan terhadap ASN daerah dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas dari ASN daerah dan dilakukan dengan suatu sistem managemen kepegawaian terstruktur dan terbuka. Pendikan dan pelatihan dilakukan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kompetensi dari ASN dalam bentuk pendidikan, pelatihan, pembinaan dan pengembangan aparatur hingga pada penegakan disiplin aparatur.

Tabel 2.157. Pencapaian Indikator Kinerja Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022

Indikator Kinerja Utama	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Persen	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Persen	81.00	92.00	15.00	8.32	11.70

Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan structural	Persen	31.00	17.00	15.00	22.92	36.72

Sumber : BKPSDM, 2023

Berdasarkan pada indikator capaian kinerja, jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal pada tahun 2018 sebesar 81% dan 92% pada tahun 2019. Namun pada tahun 2020 hanya 15% ASN yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan formal. Angka ini turun pada tahun 2021 menjadi hanya 8.32% ASN yang mengikuti pendidikan formal. Pada tahun 2022, sebanyak 11,70 ASN telah mengikuti diklat formal dalam upaya peningkatan kapasitas.

Penurunan capaian kinerja juga terjadi pada jumlah pejabat yang mendapatkan pelatihan, dari tahun 2018 sebesar 31% turun pada tahun 2019 menjadi 17%. Pada tahun 2020 kembali turun menjadi hanya 15%. Tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi sebesar 22.92% pejabat yang mengikuti pelatihan. Tahun 2022, komitmen daerah dalam peningkatan kapasitas ASN ditunjukan dengan peningkatan jumlah pejabat yang mengikuti diklat struktural sebanyak 36,72%.

Tabel 2.158. Jumlah PNS Kabupaten Pesisir Barat yang memiliki Sertifkat Kompetensi Tahun 2022

No	PNS	Jumlah
1	Guru	633
2	Tenaga Kesehatan	306
3	Penyuluh Pertanian	15
4	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa	3
5	Auditor dan P2UPD	8
	Total	**965**

Sumber : BKPSDM, 2023

5. Penelitian dan Pengembangan

Di Kabupaten Pesisir Barat, hingga tahun 2021 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Penelitian dan Pengembangan diampu oleh setingkat Pengawas (Kasi) pada Bappeda Kabupaten Pesisir Barat, dan belum memiliki fungsional peneliti. Sementara itu, mulai pada tahun 2022, fungsi penunjang penelitian dan pengembangan telah diampu oleh setingkat Kepala Bidang atau pejabat administrastor.

Selama ini belum pernah melakukan kerjasama dengan DRD terkait kajian atau riset yang dilakukan terkait kelitbangan, sedangkan untuk dengan perguruan tinggi Kabupaten Pesisir Barat telah beberapa kali melakukan kerjasama terkait kajian/penelitian program perencanaan pembangunan daerah.

Penelitian dan pengembangan daerah merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis baik yang bersifat epistemologi maupun bersifat empiris dalam memperoleh informasi, data dan atau pembuktian terhadap kebenaran yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan. Peran Litbang

dalam tata kelola pemerintahan adalah mengidentifikasi setiap permasalahan baik yang bersifat aktual maupun prediktif yang berkembang di daerah. Penelitian dan pengembangan daerah saat ini erat kaitannya dengan inovasi daerah.

Inovasi daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaran pemerintahan daerah. Inovasi di pemerintahan daerah dapat berbentuk inovasi tata kelola pemerintahan daerah yang merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen. Inovasi pelayanan publik juga merupakan bentuk dari inovasi di pemerintahan daerah yang menyangkut pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik, inovasi jenis dan bentuk barang. Selain itu, inovasi daerah lainnya merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Tata kelola pemerintahan yang baik sebagai cerminan dari reformasi birokrasi tentunya menjadi harapan semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat. Keberadaan birokrasi yang diharapkan diantaranya harus memiliki kinerja yang baik didasarkan pada perwujudan perilaku aparatur birokrasi yang berintegritas, profesional, dinamis dan inovatif. Hal ini diperlukan karena dinamika perubahan lingkungan serta tantangan lainnya menuntut adanya responsibilitas yang tinggi dari Pemerintah. Salah satu isu nasional terkait dengan penyelenggaraan birokrasi adalah masalah akuntabilitas keuangan negara dan daerah, dimana kualitasnya masih perlu banyak pembenahan termasuk dalam penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah, harapan ideal dari setiap pemerintah daerah mengharapkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dalam mewujudkan hal tersebut di atas Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat telah menyusun roadmap *roadmap* SIDa Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-2021 sebagai acuan pengembangan potensi unggulan daerah Kabupaten Pesisir Barat pada tahun 2016 sebagai hasil kerjasama antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Barat dengan Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi Lampung. Essensi dari isi roadmap SIDa ini merupakan peta rencana pendekatan pembangunan ekonomi melalui penerapan kerangka sistem inovasi. Dokumen roadmap ini menjadi acuan bagi seluruh program dan kegiatan-kegiatan kolaboratif di Kabupaten Pesisir Barat yang melibatkan berbagai pihak dengan peran dan fungsi masing-masing.

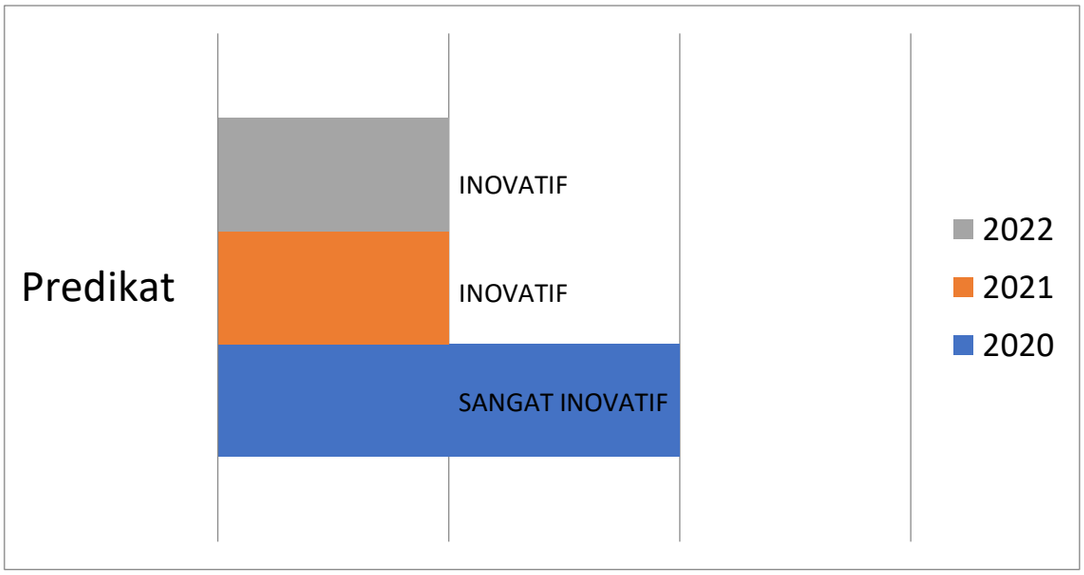
Nilai Skor IID Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020 dengan Kategori Sangat Inovatif. Tahun 2021, nilai IID turun menjadi inovatif. Data tahun 2022, nilai IID belum mampu mencapai data pada tahun 2020 dengan kembali mencapai nilai inovatif. Namun demikian, beberapa tantangan yang masih dihadapi untuk meningkatkan nilai dan kriteria IID untuk Kabupaten Pesisir Barat :

a. Keterbatasan jumlah SDM kelitbangan yang dimiliki;

b. Ketersediaan Anggaran yang masih minim;

c. Sarana prasana yang belum optimal.

Gambar 2.100. Nilai Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020-2022



Sumber : Bappelitbangda, 2023

Rencana Inovasi yang akan dilakukan atau telah dilakukan untuk mendukung lomba IID yang digelar setiap tahun oleh kemendagri adalah dengan meningkatkan kapasitas dan kemampuan SDM yang ada, dengan melakukan berbagai pelatihan / bimtek terkait inovasi semua sektor, sehingga pada akhirnya dapat memunculkan ide-ide inovatif dan kreatif dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat baik itu dalam bentuk inovasi pelayanan publik, inovasi tata kelola pemerintahan atau inovasi daerah lainnya.

Salah satu masalah yang dialami terkait kelitbangan di Kabupaten Pesisir Barat adalah belum optimalnya koordinasi yang dilakukan, hal ini dikarenakan keterbatasan jumlah SDM kelitbangan yang dimiliki, termasuk juga ketersediaan anggaran yang masih minim. Selanjutnya guna mempermudah dan menajamkan pelaksanaan evaluasi pada *roadmap* SIDa, maka ditetapkan 2 (dua) indikator kinerja sebagai obyek pengukuran dari evaluasi pelaksanaan inovasi tersebut, yaitu: (1) Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah; (2) Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.

Dalam melaksanakan fungsi penunjang penelitian pengembangan khususnya dalam hal inovasi daerah, sebagaimana yang tertuang dalam *roadmap* SIDa di atas, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat telah melaksanakan berbagai program kegiatan dalam rangka mendukung pengembangan inovasi diantaranya sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) dengan stakeholder terkait dengan strategi terus berupaya untuk melaksanakan semua program/kegiatan/sub kegiatan yang telah direncanakan dalam SIDA/Renstra/Rinduk sesuai dengan ketentuan waktu. Selanjutnya dari hasil program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan akan diberdayakan dan dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk kepentingan kabupaten pesisir barat.

2. Melakukan dan menjalin komunikasi yang intensif dengan beberapa daerah khususnya daerah yang telah berhasil mendapatkan nominasi penilaian inovasi terbaik di tingkat nasional.
3. Menjalin komunikasi dengan Balitbang Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ikut mulai berperan serta dalam ajang Penilaian dan Pemberian Penghargaan Indeks Inovasi Daerah (IID) tahun 2020.
4. Ikut berpartisipasi pada Lomba Inovasi Daerah Dalam Penyiapan dan Rencana Pelaksanaan Tatanan Kehidupan Normal Baru Produktif dan Aman Covid-19 yang diselenggarakan oleh Badan Litbang Kemendagri Republik Indonesia, dan telah berhasil meraih juara 3 pada Sektor Pasar Tradisional (Pasar Tradisional C-19).
5. Pada ajang Innovative Government Award (IGA) Tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, di mana Kabupaten Pesisir Barat telah berhasil menyampaikan dan melaporkan sebanyak 57 inovasi daerah di mana 13 diantaranya merupakan inovasi tata kelola pemerintahan, 30 inovasi pelayanan publik dan 14 inovasi bentuk lainnya, dan telah berhasil meraih predikat sebagai Daerah Terinovatif pada Klaster Daerah Tertinggal.
6. Tahun 2021, untuk ajang Innovative Government Award (IGA) Tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat telah melaporkan sebanyak 56 inovasi daerah, di mana 7 diantaranya merupakan inovasi tata kelola pemerintahan, 30 inovasi pelayanan publik dan 19 inovasi bentuk lainnya, dan telah berhasil meraih predikat sebagai Daerah Inovatif pada Klaster Daerah Tertinggal.
7. Tahun 2022, untuk ajang Innovative Government Award (IGA) Tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat telah melaporkan sebanyak 56 inovasi daerah, di mana 7 diantaranya merupakan inovasi tata kelola pemerintahan, 30 inovasi pelayanan publik dan 19 inovasi bentuk lainnya, dan telah berhasil meraih predikat sebagai Daerah Inovatif pada Klaster Daerah Tertinggal.
8. Terkait pelaporan dan pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kabupaten Pesisir Barat pada tahun 2018 s/d 2020 yang dilaksanakan pada tahun 2021, berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/725/VI.06/HK2021 Tanggal 27 Desember 2021, Kabupaten Pesisir Barat untuk tahun 2018 berada pada nilai 51,9475, dengan kategori perlu perbaikan pada klaster rendah, untuk tahun 2019 berada pada nilai 58,7238, dengan kategori perlu perbaikan pada klaster rendah, dan untuk tahun 2020 berada pada nilai 58,4835, dengan kategori perlu perbaikan pada klaster rendah.

Beberapa hal yang yang masih menjadi kelemahan pada nilai IPKD Kabupaten Pesisir Barat, antara lain pada dimensi :

No	Dimensi	Permasalahan	Solusi
1	Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Sinergitas dan Sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada dokumen RKPD, KUA PPAS dan APBD	Konsistensi penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran oleh Perangkat Daerah
2	Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	Penyebarluasan informasi pada website Pemerintah Daerah	Penayangan dokumen APBD pada website pemerintah daerah secara berkala dan update
3	Kondisi Daerah	Ketergantungan fiskal daerah pada Pendapatan Transfer	Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah

Tabel 2.159. Pencapaian Indikator Kinerja Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022

Indikator Kinerja Utama	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	Persen	66.70	85.70	85.70	85.70	87.50
Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	Persen	80	80	80	80	82
Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah	Persen	100	100	100	100	100
Persentase Kebijakan Inovasi Yang Diterapkan Di Daerah	Persen	85	85	90	90	90

Sumber : Bappelitbangda, 2022

9. Nilai Pencapaian Indikator Kinerja Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022, dapat dijelaskan sebagai berikut:

   - Persentase implementasi rencana kelitbangan diperoleh dari seberapa banyaknya rencana program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam SIDa yang terlaksana pada setiap tahun berjalan oleh perangkat daerah. Capaian yang belum 100% lebih disebabkan pada keterbatasan pada masing-masing perangkat daerah dalam penyusunan inovasi sesuai dengan kondisi perangkat daerah.
   - Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan nilainya diperoleh dari seberapa banyaknya hasil dari program kegiatan yang terlaksana yang telah dimanfaatkan. Nilainya stagnan dan belum mencapai 100%

dikarenakan keterbatasan anggaran yang dimiliki dalam mengimplementasikan hasil kelitbangan oleh perangkat daerah terkait.

- Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah nilainya diperoleh dari seberapa banyaknya perangkat daerah yang difasilitasi dalam hal ini semua perangkat daerah telah terfasilitasi oleh Bappelitbangda dalam setiap proses penyusunan inovasi di Perangkat Daerah.
- Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah data ini diperoleh dari banyak kebijakan inovasi yang telah diterapkan di daerah berdasarkan rencana inovasi yang telah ditetapkan pada setiap tahunnya. Capaian belum 100% dikarenakan pada pendanaan.

Kelitbangan sebagai salah satu instrumen pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah melalui pembinaan umum dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan. Dalam hal ini untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah harus dilakukan penguatan kelembagaan Penelitian dan Pengembangan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Dalam kaitannya dengan fungsi kelitbangan dalam proses perencanaan pembangunan daerah, dalam menyediakan dokumen/kajian untuk materi penyusunan dokumen perencanaan Kabupaten Pesisir Barat melalui Bappeda dari tahun 2018-2022 telah melakukan penyusun dokumen kelitbangan sebagai berikut:

Tabel 2.160. Dokumen Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022

No	2018	2019	2020	2021	2022
1	Updating Data Potensi Ekonomi Kabupaten Pesisir Barat	RAD Program Pemberantasan Korupsi	RAD Sustainable Development Goals	Road Map Pembangunan Sumber Daya Manusia	Roadmap Sistem Inovasi Daerah (SIDA)
2	Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RP3KP	RAD Sustainable Development Goals	RAD Pangan dan Gizi	RAD Pangan dan Gizi	
3	Pengembangan Master Plan Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Pesisir Barat	RAD Pangan dan Gizi	Kajian Potensi Pengembangan Energi Baru Terbarukan Kabupaten Pesisir Barat	Laporan Data Terpadu Potensi Ekonomi Daerah	
4	Indikator Kesejahteraan Kabupaten Pesisir Barat	Updating Data Potensi Ekonomi Kabupaten Pesisir Barat	Rencana Induk Pengembangan Wilayah Kawasan Bandara M. Taufik Kiemas	Reviu Rencana Induk Pengembangan Air Minum	
5	‘	Indeks Rasio Gini Kabupaten Pesisir Barat	Masterplan e Goverment Kabupaten Pesisir Barat	Kajian Pengembangan Industri Kecil Menengah	

No	2018	2019	2020	2021	2022
6	Indeks Rasio Gini Kabupaten Pesisir Barat	Masterplan Agropolitan Kabupaten Pesisir Barat	Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Pesisir Barat	Rencana Induk Kelitbangan Daerah	
7	Roadmap Inflasi Kabupaten Pesisir Barat	Grand Design Kependudukan Kabupaten Pesisir Barat	Masterplan Pendidikan Kabupaten Pesisir Barat		
8	Updating Informasi dan Profil Daerah	Roadmap Potensi Bencana dan Strategi Peningkatan Ketahanan Bencana	Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SKPD) Kabupaten Pesisir Barat		
9		Rencana Pengembangan Kawasan Perdesaan Kabupaten Pesisir Barat	Updating Data Potensi Ekonomi Kabupaten Pesisir Barat		
10		Indikator Kesejahteraan Kabupaten Pesisir Barat			
11		Indeks Pembangunan manusia Kabupaten Pesisir Barat			
12		Peta Potensi Investasi Kabupaten Pesisir Barat			
13		Dokumen Perencanaan Teknis dan Manajemen Persampahan			
14		Survey Harga Konsumen Pengendalian Inflasi			

Sumber : Bappelitbangda, 2022

2.1.3.5. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

1. Inspektorat Daerah

Pengawasan pada hakekatnya merupakan fungsi yang melekat pada seorang leader atau top manajemen dalam setiap organisasi, sejalan dengan fungsi-fungsi dasar manajemen lainnya yaitu perencanaan dan pelaksanaan. Demikian halnya dalam organisasi pemerintah, fungsi pengawasan merupakan tugas dan tanggung jawab seorang kepala pemerintahan, seperti di lingkup pemerintah provinsi merupakan tugas dan tanggung jawab gubernur sedangkan di pemerintah kabupaten daerah dan kota merupakan tugas dan tanggung jawab Kepala Daerah.

Namun karena katerbatasan kemampuan seseorang, mengikuti prinsip-prinsip organisasi, maka tugas dan tanggung jawab pimpinan tersebut diserahkan kepada pembantunya yang mengikuti alur *distribution of power* sebagaimana yang diajarkan dalam teori-teori organisasi modern. Oleh karena itu, tugas dan fungsi pengawasan dilaksanakan oleh Inspektorat.

Tabel 2.161. Pencapaian Indikator Kinerja Pengawasan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022

Indikator Kinerja Utama	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Predikat SPIP	Level Maturitas	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 2 (2.4425)/ Berkembang
Penilaian APIP	Level Entitas	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
Persentase Penurunan Tingkat Pelanggaran Disiplin ASN	Persen	87	90	90	95	97

Sumber : Inspektorat, 2023

Untuk indikator Skor capaian SPIP, di Kabupaten Pesisir Barat pada tahun 2016-2017 belum dilakukan penilaian oleh BPKP Provinsi Lampung, sedangkan untuk penilaian mandiri pada tahun 2018-2021 mendapatkan nilai pada level 3. Tahun 2022, nilai SPIP dapat naik ke level 2 dengan nilai maturitas sebesar 2,4425. Berikutnya untuk penilaian level entitas kapabilitas APIP, pada tahun 2018-2022 tetap pada level 3.

Selanjutnya pada indikator penurunan pelanggaran disiplin PNS, terdapat kenaikan dari tahun ke tahun, dengan data awal pada tahun 2018 sebesar 87% dan meningkat menjadi 90% pada tahun 2019 dan 2020. Tahun 2021 terdapat perbaikan kinerja menjadi sebesar 95%. Tahun 2022, tercatat sebanyak 97% penurunan disiplin pelanggaran oleh ASN dengan nilai pendampingan dan asistensi APIP sebesar 100%.

2.1.3.6. Unsur Kewilayahan

1. Kecamatan

Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten atau kota yang dipimpin oleh camat. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota. Daerah kabupaten/kota dibagi atas kecamatan dan ecamatan dibagi atas kelurahan dan/atau Desa. Berdasarkan uraian tersebut di atas, pengertian kecamatan memiliki konteks 'kewilayahan'.

Kecamatan juga dipandang sebagai Perangkat Daerah dari Kabupaten/Kota (Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah), berdasarkan ketentuan Pasal 209 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Jadi

berdasarkan uraian-uraian tersebut, dapat dipahami bahwa dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia posisi Kecamatan berkedudukan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota sekaligus penyelenggara pemerintahan umum. Sebagai perangkat daerah, Camat melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan dan sebagai penyelenggara pemerintahan umum, Camat secara berjenjang melaksanakan tugas Pemerintah Pusat di Wilayah Kecamatan

Tabel 2.162. Pencapaian Indikator Kinerja Kewilayahan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017-2022

Indikator Kinerja Utama	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Kecamatan	Nilai	72,50	75,00	75.00	75.00	79.95

Sumber : Sekretariat Daerah, 2022

Indeks kepuasan masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik, dalam hal ini di kecamatan. Tujuan dari pengukuran IKM Kecamatan ini adalah sebagai tolok ukur/evaluasi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pada tingkatan kecamatan apakah sudah semakin baik atau tidak.

Berdasarkan pada data tahun 2016 nilai IKM sebesar 72,50% pada tahun 2018. Sedangkan pada tahun 2019 kembali meningkat di angka 75,00% dan bertahan dengan angka yang sama 75,00% pada tahun 2020. Tahun 2021, capaian IKM kecamatan tetap pada angka 75.00%. pencapaian IKM pada tahun 2022 meningkat menjadi 79,95%.

2.1.3.6. Unsur Pemerintahan Umum

1. Kesatuan Bangsa dan Politik

Daerah selain berstatus sebagai daerah juga merupakan Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi kepala daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah daerah. Presiden dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum di daerah melimpahkan kepada gubernur sebagai kepala pemerintahan provinsi dan kepada bupati/wali kota sebagai kepala pemerintahan kabupaten/kota.

Urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh Bupati Pesisir Barat meliputi yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai berikut:

a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;

c. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemanan lokal, regional, dan nasional;

d. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah kabupaten untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman aerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan

g. Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

Tabel 2.163. Pencapaian Indikator Kinerja Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022

Indikator Kinerja Utama	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya Persentase Partisipasi Politik masyarakat dalam Pemilu dan Pemilukada	Persen	68,97	80,00	84.08	n/a	n/a
Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persen	60,00	65,00	67,00	67,00	82.70
Persesentase SDM yang mempunyai kemampuan Deteksi Dini, Cegah Dini dan Tangkap Dini terhadap Kerawanan Konflik Sosial	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	100

Sumber : Badan Kesbangpol, 2023

Berdasarkan pada data tahun 2016 dan 2017 partisipasi politik masyarakat dalam pemilu dan pemilukada tidak dihitung dikarenakan tidak ada pelaksanaan pemilu dan/atau pemilukada. Selanjutnya pada tahun 2018 yang dilaksanakan Pemilukada Gubernur Lampung mencapai angka 68,97%. Berikutnya pada tahun 2019 yang dilaksanaksan Pemilu Pilpres dan Pileg angka capaian adalah 80%. Angka ini naik menjadi 84.08% pada saat pelaksanaan Pemilukada Serentak Tahun 2020. Tahun 2021 dan 2022, kembali tidak dihitung dikarenakan tidak adanya pelaksanaan pemilu dan/atau pemilukada.

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah menunjukkan kemampuan suatu wilayah menciptakan nilai tambah suatu produk barang/jasa untuk mencapai kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik, regional, nasional dan internasional.

2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

a. PDRB dan PDRB Perkapita

1) Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB)

Pada tahun 2018 PDRB ADHB sebesar 4.282,38 (dalam miliar rupiah). Pada tahun 2019 PDRB ADHB mencapai 4.687,39 (dalam miliar rupiah) dan kembali meningkat pada tahun 2020 menjadi sebesar 4.677,54 (dalam miliar rupiah). Tahun 2021, capaian PDRB ADHB Kabupaten Pesisir Barat meningkat dengan capaian 4.896,56 (dalam miliar rupiah). Tahun 2022, PDRB ADHB mengalami penurunan menjadi sebesar 5.349,44 (dalam miliar rupiah). Dalam kurun waktu lima tahun, hanya pada tahun 2020 terjadi penurunan nilai PDRB ADHB, Covid-19 merupakan penyebab utama dari penurunan dimaksud.

Penyumbang tertinggi PDRB ADHB Kabupaten Pesisir Barat adalah disektor pertanian dengan nilai PDRB tahun 2018 sebesar 2.183,97 (dalam miliar rupiah) atau naik 2,99% bila dibandingkan pada tahun 2017. Pada tahun 2019 nilai sektor ini pada tahun 2019 menjadi 2.272,17 (dalam miliar rupiah) dengan pertumbuhan 0,71% dan naik kembali menjadi 2.297,92 (dalam miliar rupiah) pada tahun 2020 dengan perhitungan pertumbuhan 0,02%. Pada tahun 2021, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan masih memberikan porsi terbesar dari PDRB ADHB dengan nilai 2.386,88 (dalam miliar rupiah) walaupun dari sisi pertumbuhan mengalami deficit -0,03. Tahun 2022, laju sektor ini kembali turun -3,32 dan tercatat dengan nilai 2.482,93 (dalam miliar rupiah). Dalam kurun waktu 5 tahun terakhit terjadi penurunan nilai pada sektor pertanian deengan mengalami penurunan minor.

Penurunan laju pertumbuhan sektor pertanian ini dipengaruhi oleh perkembangan sektor-sektor lainnya dan juga kecenderungan masyarakat yang mulai meninggalkan sektor dimaksud. Namun demikian, penurunan ini dibarengi dengan peningkatan pada sektor-sektor lainnya. Sehingga nilai PDRB ADHB Kabupaten Pesisir Barat tahun 2018-2022 secara umum terus meningkat dengan rata-rata nilai laju pertumbuhan sebesar 2,00-3,00% pertahun.

Pada level kedua penyumbang PDRB Tahun 2018 sampai dengan 2022 tetap sama yaitu sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, serta sektor Industri Pengolahan tingginya sektor ini sebagai penyumbang PDRB terbesar di pengaruhi oleh meningkatnya pemenuhan kebutuhan sekunder dari masyarakat Pesisir Barat. Laju pertumbuhan pada sektor ini bila diratakan berada pada angka 9-15%. Tahun 2018 PDRB ADHB sektor ini sebesar 483,81 (dalam miliar rupiah) dinilai mengalami kenaikan pertumbuhan sebesar 9,86%. Data pada tahun 2019 nilai PDRB sektor perdagangan besar dan eceran kembali

meningkat sebesar 9,11% dengan nilai 607,25 (dalam miliar rupiah), namun pada tahun 2020 angka ini terkoreksi menjadi 588,48 (dalam miliar rupiah) atau dengan capaian laju sebesar -4,73%. Pada tahun 2021, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor PDRB ADHB meningkat kembali menjadi sebesar 632,78 (dalam miliar rupiah) atau mengalami laju pertumbuhan dengan nilai 6,97%. Tahun 2022, sektor ini tercatat memiliki laju pertumbuhan sebesar 16,11% dengan nilai PDRB ADBH sebesar 785,43 (dalam miliar rupiah).

Tabel 2.164. PDRB ADHB 2010 Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022 (dalam miliar Rupiah)

Kategori	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021*	2022**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.183,97	2.272,17	2.297,92	2.386,88	2.482,93
B	Pertambangan dan Penggalian	248,19	264,47	269,26	256,21	279,47
C	Industri Pengolahan	208,79	210,49	186,82	195,00	201,04
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,57	0,75	0,79	0,89	0,94
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,15	2,19	2,31	2,47	2,54
F	Konstruksi	252,84	328,72	320,31	370,67	430,18
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	483,81	607,25	588,48	632,77	785,43
H	Transportasi dan Pergudangan	43,35	46,88	45,32	48,01	66,82
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	73,95	95,32	91,45	89,18	106,02
J	Informasi dan Komunikasi	95,74	105,02	107,66	117,07	121,19
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	62,19	65,06	64,95	70,58	73,88
L	Real Estate	160,18	172,73	169,55	176,26	193,40
M,N	Jasa Perusahaan	6,30	6,94	7,01	7,17	7,91
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	219,47	239,49	245,29	252,11	276,41
P	Jasa Pendidikan	150,63	169,79	177,81	185,92	199,28
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	45,69	50,37	55,52	58,47	61,39
R,S,T,U	Jasa lainnya	44,56	49,71	47,09	46,87	60,60
	PDRB ADHB	**4.282,38**	**4.687,39**	**4.677,54**	**4.896,56**	**5.349,44**

Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Barat, 2023
**angka sementara*
***angka sangat sementara*

Laju pertumbuhan PDRB menurut harga berlaku selama lima tahun terakhir cenderung berfluktuasi, hampir disemua sektor. Walapun PDRB dari tahun ketahun cenderung naik tetapi pada lajunya terlihat stagnan. Hal ini di pengaruhi banyak faktor terutama faktor-faktor eksternal seperti kondisi politik nasional dan regional. Walaupun kondisi laju pertumbuhan berfluktuasi, namun dalam kurun lima tahun terakhir tidak ada kecenderungan pergeseran peran. Pertanian, kehutanan dan perikanan serta perdagangan nesa dam eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dan jasa lainnya tetap menjadi primadona sebagai penyumbang PDRB.

Selanjutnya, bila melihat pada PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022 sejalan dengan kondisi perekonomian daerah yang terus meningkat. Penyumbang persentase terbesar selama kurun waktu 5 tahun terakhir tidak mengalami perubahan dengan komponen pengeluaran adalah (i) Konsumsi Rumah Tangga; (ii) PMTB; (iii) Net Ekspor Barang dan Jasa (iv) Konsumsi Pemerintahan; (v) Konsumsi LNPRT dan (vi) Perubahan Inventori.

Konsumsi Pemerintah masih lebih kecil bila dibandingkan dengan Konsumsi rumah tangga, dengan perbandingan ± 2.000,00–3.000,00 (dalam miliar rupiah). Konsumsi pemerintah pada tahun 2018 sebesar 142,73 (dalam miliar rupiah) dan sebesar 147,14 (dalam miliar rupiah) pada tahun 2019. Berikutnya pada tahun 2020 mengalami penurunan minor dan berada pada angka 146,50 (dalam miiar rupiah), dimana penurunan akibat refocusing anggaran pemerintah daerah dalam upaya mengatasi pandemi Covid-19. Tahun 2021, tercatat nilai Konsumsi Pemerintah meningkat menjadi 149,45 (dalam miliar rupiah). Berikutnya pada tahun 2022, tercatat sebesar 147,23 (dalam miliar rupiah), penurunan nilai ini lebih disebabkan pada kemampuan fiskal daerah yang secara umum juga mengalami penurunan sehingga menyebabkan kemampuan belanja barang/jasa pengeluaran pemerintah daerah juga menurun.

Secara umum, PDRB ADHB menurut pengeluaran dari tahun 2018-2022 rata-rata berada pada kisaran angka 4.000,00–5.000,00 (dalam miliar rupiah), perhitungan ini berdasarkan pada data tahun 2018 pada angka 4.282,38 (dalam miliar rupiah) dan di tahun 2019 masih terus meningkat menjadi sebesar 4.687,39 (dalam miliar rupiah). Pada tahun 2020 tetap meningkat namun dengan margin yang tidak terlalu besar sehingga berada pada angka 4.692,20 (dalam miliar rupiah). Tahun 2021 capaian kembali naik menjadi sebesar 4.919,53 (dalam miliar rupiah). Data tahun 2022 tercatat sebesar 5.349,44 (dalam miliar rupiah) atau mengalami peningkatan sebanyak 429,91 (dalam miliar rupiah).

Tabel 2.165. PDRB ADHB Seri 2010 Menurut Pengeluaran Pesisir Barat Tahun 2018-2022 (dalam miliar rupiah)

No	PDRB ADHB Kategori Pengeluaran	2018	2019	2020	2021*	2022**
1	Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	3.009,36	3.285,05	3.283,83	3.373,76	3.717,25
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	75,19	84,65	87,02	90,20	96,19

3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	142,73	147,14	146,50	149.45	147,23
4	Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	933,61	1.068,19	1.017,88	1.110,62	1.205,95
5	Perubahan Inventori	63,79	18,96	11,08	7,17	7,46
6	Net Ekspor Barang dan Jasa	57,70	83,40	145,88	188,33	175,36
	PDRB	**4.282,38**	**4.687,39**	**4.692,20**	**4.919.53**	**5.349,44**

Sumber : BPS Pesisir Barat, 2023
**angka sementara*
***angka sangat sementara*

2) Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK)

Secara konstan selama kurun waktu tahun 2018 PDRB ADHK sebesar 2.944,88 (dalam miliar rupiah) dinilai mengalami kenaikan pertumbuhan sebesar 5,35%. Pada tahun 2019 pertumbuhan mengalami peningkatan menjadi 5,37% dengan nilai PDRB ADHB mencapai 3.106,00 (dalam miliar rupiah). Baru pada tahun 2020 pertumbuhan mengalami penurunan menjadi (-1,17%) dengan nilai 3.069,60 (dalam miliar rupiah). Tahun 2021 kembali naik 2,07% sehingga nilai PDRB ADHK menurut lapangan usaha berada pada angka 3.113,19 (dalam miliar rupiah). Pada tahun 2022, laju PDRB ADHK meningkat sebesar 2.88%, sehingga secara keseluruhan angka PDRB ADHK tercatat sebesar 3.223,12 (dalam miliar rupiah).

Tabel 2.166. PDRB ADHK Seri 2010 Menurut Lapangan Usaha Pesisir Barat Tahun 2018-2022 (dalam miliar rupiah)

No	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021*	2022**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.486,37	1.496,95	1.497,31	1.496,80	1.446,43
B	Pertambangan dan Penggalian	161,22	171,48	171,48	161,61	170,83
C	Industri Pengolahan	147,17	147,703	128,66	131,65	130,53
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0	0,55	0,58	0,63	0.65
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,41	1,44	1,51	1,60	1,63
F	Konstruksi	176,62	226,95	222,35	243,77	260,17
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	362,01	394,99	379,17	405,61	470,97
H	Transportasi dan Pergudangan	30,38	32,66	31,12	31,91	39,64
I	Penyediaan	46,53	59,03	56,35	54,48	63,01

No	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021*	2022**
J	Akomodasi dan Makan Minum					
	Informasi dan Komunikasi	68,87	75,12	77,37	85,71	88,18
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	41,86	43,10	43,23	44,82	43,37
L	Real Estate	115,06	122,25	117,61	121,66	129,79
M,N	Jasa Perusahaan	3,96	4,29	4,22	4,27	4,45
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	136,80	148,97	150,96	155,82	166,03
P	Jasa Pendidikan	102,62	112,35	116,94	120,94	126,58
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	32,33	35,11	38,45	39,95	41,05
R,S,T,U	Jasa lainnya	31,25	33,81	32,29	31,94	39,82
	PDRB ADHK	**2.944,88**	**3.106,11**	**3.069,60**	**3.133,19**	**3.223,12**

Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Barat, 2023
**angka sementara*
***angka sangat sementara*

Berikutnya disampaikan PDRB ADHK Menurut Pengeluaran Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022 sebagai berikut:

Tabel 2.167. PDRB ADHK Seri 2010 Menurut Pengeluaran Pesisir Barat Tahun 2018-2022 (dalam miliar rupiah)

No	PDRB ADHK Kategori Pengeluaran	2018	2019	2020	2021*	2022**
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	2.112,13	2.237,12	2.195,72	2.206,58	2.310,06
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	46,45	51,49	51,90	52,63	53,55
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	96,50	98,57	96,10	96,69	93,89
4	Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	652,79	727,03	670,11	702,02	732,58
5	Perubahan Inventori	37,13	8,29	14,61	4,29	4,40
6	Net Ekspor Barang dan Jasa	-0,11	-16,40	41,17	70,98	28,64
	PDRB	**2.944.88**	**3.106.11**	**3.069.60**	**3.133,19**	**3.223,12**

Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Barat, 2023
**angka sementara*
***angka sangat sementara*

3) PDRB Perkapita

Dilihat dari jumlah PDRB Per Kapita Kabupaten Pesisir Barat mengalami pertumbuhan yang cukup baik, pada tahun 2018 sebesar 27.85 (dalam miliar rupiah). Pada tahun 2019 PDRB Perkapita berada pada angka 30,25 (dalam miliar rupiah). Pada tahun 2020, PDRB Perkapita turun mengikuti pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesisir Barat yang berada pada minus 1,18% dengan nilai 28.89 (dalam miliar rupiah). Tahun 2021, seiring dengan perbaikan kinerja ekonomi daerah, PDRB perkapita berhasil naik 1,30% sehingga menjadi sebesar 30.06 (dalam miliar rupiah). Tahun 2022, tercatat nilai PDRB Perkapita daerah kembali mengalami kenaikan 2,40 poin dengan catatan nilai sebesar 32.46 (dalam miliar rupiah).

Tabel 2.168. Produk Domestik Regional Bruto Perkapita Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022 (dalam miliar rupiah)

Tahun	PDRB ADHB	Jumlah Penduduk (berdasarkan BPS)	PDRB Perkapita (PPK)
2018	4,282.38	153,743	27.85
2019	4,687.39	154,973	30.25
2020	4,677.54	162,419	28.89
2021*	4,896,56	163,641	30.06
2022**	5,349,44	164,810	32,46

Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Barat, 2023
**angka sementara*
** *angka sangat sementara*

2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

a) Perkembangan Konektivitas Wilayah

Indikator utama pelaksanaan pembangunan dalam pengembangan konektivitas suatu wilayah adalah terwujudnya kelancaran dan keselamatan transportasi baik angkutan penumpang maupun barang. Untuk mencapai sasaran indikator tersebut beberapa upaya telah dilaksanakan. Upaya yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung kelancaran dan keselamatan lalu-lintas angkutan penumpang dan barang antara lain adalah meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan.

Kemudian, salah satu keunggulan Kabupaten Pesisir Barat adalah memiliki ketersediaan Bandar Udara sebagai salah satu pendukung transportrasi udara menuju Kabupaten Pesisir Barat dan wilayah sekitar. Pada Bulan November 2016 telah dilaksanakan serah terima aset Bandar Udara M. Taufik Kiemas antara Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat dengan Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Total luas area Bandara sebesar 75,624Ha dengan Panjang run way saat Ini adalah 1.700 meter dan lebar 23 meter, serta apron yang ada pada Bandara berukuran 91 X 55 meter dengan kapasitas untuk 2 (dua) pesawat. Mulai tahun 2019, Maskapai Wings Air telah membuka jalur penerbangan Krui-Bandar Lampung. Berikutnya tahun 2020 hingga tahun 2021 terjadi penurunan penerbangan dikarenakan efek dari Covid-19 yang membatasi pergerakan orang dan barang.

Untuk fasilitas Bandara Muhammad Taufiq Kiemas yang ada sekarang ini adalah sebagai berikut:

- Gedung Terminal Luas 400 M2, Kapasitas 20 Penumpang.
- Kantor Bandara
- Power House
- Rumah Pompa Air
- Pos Keamanan
- Operasial Housing

Berikut adalah akses lokasi Bandar Udara M. Taufik Kiemas, Kabupaten Pesisir Barat

Tabel 2.169. Akses Bandara M. Taufik Kemas Kabupaten Pesisir Barat

No	Menuju Lokasi	Jarak (Km)
1	Tanjung Setia	± 29,5
2	Labuhan Jukung	± 3
3	Pasar Krui	± 3,8
4	Kantor Bupati Pesisir Barat	± 3,6
5	Liwa	±35,8
6	Kota Agung	±156,3
7	Kaur	±126,4
8	Bandar Lampung (Via Liwa)	± 275
9	Bandar Lampung (Via Kota Agung)	± 247,8
10	Bandar Udara Radin Intan Ii (Via Liwa)	± 243

Sumber : Dinas Perhubungan, 2022

Tabel 2.170. Fasilitas Bandara M. Taufik Kemas Kabupaten Pesisir Barat

No	Fasilitas	Keterangan
1	Panjang Landasan	1.700 m X 23 m
2	Apron	91 m X 55 m
3	Jalur Taksi (Taxy Way)	98 m X 18 m
4	Ruang Istirahat (Rest Area)	90 m X 46 m
5	Jalan akses Bandara Seray	1.800 m X 25 m
6	Gedung Administrasi	2 Unit
7	Rumah Dinas	3 Unit

Sumber : Dinas Perhubungan, 2022

2.1.4.3. Fokus Iklim Investasi

Di Indonesia ada dua jenis investasi, yang pertama adalah Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan yang kedua adalah Penanaman Modal Asing (PMA). Menurut Panjaitan, Penanaman Modal Asing adalah satu kegiatan penanaman modal yang didalamnya terdapat unsur asing (foreign element) yang ditentukan oleh adanya kewarganegaraan yang berbeda, asal modal, dan sebagainya. Dalam penanaman modal asing, modal yang ditanam merupakan modal milik asing

maupun modal patungan antara modal milik asing dengan modal dalam negeri. Sedangkan pengertian penanaman modal dalam negeri (PMDN) menurut UU No.6 tahun 1968 adalah penggunaan modal dalam negeri (yang merupakan bagian dari kekayaan masyarakat Indonesia termasuk hak-haknya dan benda-benda baik yang dimiliki oleh negara maupun swasta nasional atau swasta asing yang berdomisili di Indonesia yang disisihkan atau disediakan guna menjalankan usaha) bagi usaha-usaha yang mendorong pembangunan ekonomi pada umumnya.

Iklim investasi dalam pengertian konsepsional dan kontestual adalah sebuah kondisi yang tercipta dari berbagai demensi yang saling tarik-menarik. Iklim Investasi merupakan salah satu yang paling esensial namun paling sulit diukur secara kuantitatif. Namun pada kenyataannya dalam laporan Survey Iklim Investasi, dalam dunia nyata seorang investor yang akan menanamkan modalnya pada suatu bidang usaha tertentu akan selalu memperhatikan faktor-faktor keamanan lingkungan, ketertiban umum, kepastian hukum, status lahan investasi dan dukungan pemerintah menjamin keberlangsungan investasi.

Penegakan hukum adalah faktor yang dominan mempengaruhi iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi. Kuatnya penegakan hukum akan memperkuat kepercayaan invenstor yang berujung pada kepastian atas keamanan investasinya. Begitupun sebaliknya. Akibat dari lemahnya penegakan hukum dapat menimbulkan korupsi, kolusi, nepotisme dan persaingan yang tidak sehat yang membuat para investor melarikan modalnya ke negara lain.

Memperkuat penegakan hukum pada sektor penanaman modal berarti memberikan jaminan serta perlindungan hukum kepada para investor. Jaminan terhadap perlindungan dan penegakan hukum akan menghindari penanam modal dari berbagai risiko politik dan sosial yang dapat membawa kerugian besar bagi penanam modal.

2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah individu produktif yang bekerja sebagai penggerak organisasi, baik organisasi pemerintah, perusahaan, yang memiliki fungsi sebagai asset. Oleh karena itu, individu tersebut harus dikembangkan dan dilatih kemampuannya. Berikut data ASN Kabupaten Pesisir barat ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.171. Jumlah ASN Menurut Tingkat Pendidikan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022

No	Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Pendidikan					Jumlah PNS	Jumlah Non PNS
		SLTP	SLTA	Diploma	S1	S2		
1	Sekretariat Daerah	0	2	6	33	15	56	127
2	Sekretariat DPRD	0	0	0	11	5	16	37
3	Inspektorat	0	0	1	6	12	19	17
4	Bappelitbangda	0	0	0	13	6	19	25
5	Badan Pendapatan Daerah	0	1	0	7	4	12	36
6	BKPSDM	0	0	3	11	3	17	24

7	Satpol PP dan Damkar	0	1	2	11	1	15	260
8	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	0	0	1	14	7	22	32
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0	2	0	11	2	15	11
10	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0	0	0	5	3	8	13
11	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0	3	7	133	7	150	48
11.1	TK/SD/SMP	0	0	173	807	17	999	1.053
12	Dinas Pemuda dan Olahraga	0	2	0	6	4	12	24
13	Dinas Kesehatan	0	13	252	76	40	381	356
13.1	Rumah Sakit Umum Daerah Krui	0	2	41	12	10	67	55
14	Dinas Sosial	0	2	3	7	5	17	25
15	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	0	0	5	7	6	18	43
16	Dinas Perhubungan	0	0	5	7	6	18	26
17	Dinas Pariwisata	0	0	1	10	4	17	16
18	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0	0	1	20	4	25	46
19	Dinas Koperasi,UKM dan Perdagangan	0	1	1	8	3	13	20
20	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0	10	4	37	2	53	60
21	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	0	0	1	11	1	13	13
22	Dinas Perikanan	0	2	2	7	5	16	20
23	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	0	3	0	12	2	17	18
24	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian	0	0	0	10	2	12	20
25	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	0	1	11	16	6	34	41

26	Dinas Lingkungan Hidup	0	0	3	10	3	16	18
27	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0	0	1	14	1	16	19
28	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	0	0	1	9	3	13	29
29	Kecamatan Bangkunat	0	3	1	6	2	12	24
30	Kecamatan Ngaras	0	2	3	5	0	10	12
31	Kecamatan Ngambur	0	4	0	5	2	11	14
32	Kecamatan Pesisir Selatan	0	5	0	6	1	12	20
33	Kecamatan Krui Selatan	0	1	1	9	0	11	13
34	Kecamatan Way Krui	0	1	3	5	0	9	12
45	Kecamatan Karya Penggawa	0	4	1	4	1	10	14
36	Kecamatan Pulau Pisang	0	0	0	3	1	4	9
37	Kecamatan Pesisir Utara	0	8	0	5	1	14	8
38	Kecamatan Lemong	0	3	0	8	1	12	9
39	Kecamatan Pesisir Tengah	0	4	0	5	0	9	12
39.1	Kelurahan Pasar Kota	0	2	0	0	0	2	6
39.2	Kelurahan Pasar Krui	0	0	0	2	0	2	5
	Total	**2**	**232**	**534**	**1.406**	**196**	**2.370**	**2.687**

Sumber : BKPSDM, 2023

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Evaluasi kinerja pembangunan tahun lalu, yang dalam hal ini adalah evaluasi kinerja Pelaksanaan RKPD Tahun 2022. Laporan evaluasi ini bersumber dari telaahan evaluasi hasil pelaksanaan Renja masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat tahun 2022 dan realisasi Renstra Perangkat Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah dan/atau dari laporan pertanggungjawaban APBD tahun 2022.

Evaluasi dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan pembangunan yang telah ditentukan dalam kurun waktu satu tahun anggaran (tahun 2022). Banyak hal yang perlu dinilai untuk mengetahui seberapa besar pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang telah dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dapat memberikan hasil dan capaian yang baik dalam pembangunan di Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan pada target-target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, baik dalam dokumen RPJMD Tahun 2021-2026; dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022.

Dengan dasar tersebut, beberapa komponen indikator menjadi alat ukur dalam melakukan evaluasi yang dimaksud. Evaluasi kinerja pembangunan ini dilakukan terhadap indikator sektoral, realisasi keuangan daerah dan indikator kinerja tahun 2022. Tujuan dilakukan evaluasi ini adalah untuk: (1) Memastikan kesesuaian program/kegiatan/sub kegiatan, indikator, target, dan pagu antara RKPD dan APBD tahun 2022; (2) Menilai capaian target kinerja RKPD tahun 2022; dan (3) Merumuskan rekomendasi hasil evaluasi RKPD.

Dari hasil evaluasi RKPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022 yang telah dilaksanakan dapat dirumuskan beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, urusan pemerintahan daerah diklasifikasikan kepada 2 (dua) urusan, yaitu urusan absolut dan urusan konkuren. Urusan absolut dilaksanakan oleh pemerintah pusat (6 urusan). Urusan konkuren dibagi menjadi 8 (delapan) yaitu urusan wajib (urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar), urusan pilihan, unsur pendukung urusan pemerintahan, unsur penunjang urusan pemerintahan, unsur pengawasan urusan pemerintahan, unsur kewilayahan dan unsur pemerintahan umum.

   Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat pada tahun 2022 melaksanakan 40 bidang urusan pemerintah daerah dan dilaksanakan oleh 39 perangkat daerah berdasarkan pada Perda Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 2021 serta Perbup Pesisir Barat Nomor 118 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Pesisir Barat Nomor 4 Tahun 2022.

2. Dokumen RKPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022 memuat 140 program dan dokumen APBD Kabupaten Pesisir Barat TA 2022 juga memuat 140 program, yang terdiri dari 399 kegiatan dan 1.080 sub kegatan. Tidak terdapat perbedaan baik dari jumlah program maupun kesesuaian program antara kedua dokumen.

Tabel 2.172. Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah			Perangkat Daerah
		Prog	Keg	Sub Keg	
1	Pendidikan	2	11	29	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Kesehatan	5	12	30	Dinas Kesehatan
3	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	10	23	45	Dinas PU dan PR
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	4	11	23	Dinas PR dan KP
5	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	3	6	18	Satpol PP dan Damkar
		2	8	29	BPBD
6	Sosial	5	11	29	Dinas Sosial
7	Tenaga Kerja	3	8	21	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5	8	8	Dinas PPPA dan KB
9	Pangan	4	10	25	Dinas KP dan Pertanian
10	Pertanahan	2	2	2	Dinas PR dan KP
11	Lingkungan Hidup	3	7	19	Dinas Lingkungan Hidup
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3	8	22	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4	9	24	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pekon
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4	11	32	Dinas PPPA dan KB
15	Perhubungan	3	12	25	Dinas Perhubungan
16	Komunikasi dan Informatika	3	7	23	Dinas Kominfotik dan Persandian
17	Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	4	9	22	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
18	Penanaman Modal	5	11	27	Dinas PM dan PTSP
19	Kepemudaan dan Olahraga	3	13	32	Dinas Pemuda dan Olahraga
20	Statistik	1	1	1	Dinas Kominfotik dan Persandian
21	Persandian	1	1	1	Dinas Kominfitik dan Persandian
22	Kebudayaan	1	1	1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
23	Perpustakaan	1	2	3	Sekretariat Daerah
24	Kearsipan	1	1	2	Sekretariat Daerah
25	Kelautan dan Perikanan	5	12	30	Dinas Perikanan
26	Pariwisata	4	9	25	Dinas Pariwisata
27	Pertanian	5	9	12	Dinas KP dan Pertanian
28	Perdagangan	2	4	6	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan

29	Perindustrian	2	3	5	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian
30	Transmigrasi	1	1	1	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian
31	Sekretariat Daerah	3	20	62	Sekretariat Daerah
32	Sekretariat DPRD	2	13	32	Sekretariat DPRD
33	Perencanaan	3	13	48	Bappelitbangda
34	Keuangan	3	12	43	BPKAD
		2	8	28	Bapenda
35	Kepegawaian	2	10	30	BKPSDM
36	Pendidikan dan Pelatihan	1	2	2	BKPSDM
37	Penelitian dan Pengembangan	1	2	2	Bappelitbangda
38	Pengawasan	3	11	34	Inspektorat
39	Kewilayahan	13	57	202	11 Kecamatan
40	Pemerintahan Umum	6	10	25	Badan Kesbangpol
		140	**399**	**1.080**	

Sumber : Bappelitbangda, 2023

3. Pelaksanaan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah bersifat mutlak bagi daerah. Hal ini dipertegas dengan kewajiban daerah dalam pencapaian target Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada 6 urusan wajib pelayanan dasar. Urusan wajib pelayanan dasar merupakan kebutuhan primer dari setiap lapisan masyarakat. Secara umum, alokasi anggaran dari 6 urusan tersebut selayaknya mendapatkan porsi lebih besar dibandingkan dengan urusan lainnya.

Tabel 2.173. Capaian Kinerja Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022

No	**Urusan**	**Capaian (%)**			
		Kinerja	**Ket.**	**Keuangan**	**Ket.**
1	Pendidikan	97.47	ST	86.94	T
2	Kesehatan	98.50	ST	82.50	T
3	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	90.00	ST	82.59	T
4	Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	100	ST	73.41	S
5	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	100	ST	88.24	T
6	Sosial	99.17	ST	67.40	S
	Rata-rata Capaian	**97.52**	**ST**	**80.18**	**T**

Sumber : Bappelitbangda, 2023

4. Pelaksanaan dan pemenuhan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar adalah bentuk dari kewajiban dan juga kewenangan dari pemerintah daerah dalam mengemban amanat dari rakyat. Urusan wajib memiliki konsekuensi untuk dilaksanakan oleh pemerintah daerah, walaupun

tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, pada urusan ini pemerintah daerah perlu menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan yang tepat sasaran bagi masyarakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kemudahan dalam mendapatkan pelayanan publik.

Tabel 2.174. Capaian Kinerja Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022

No	Urusan	Capaian (%)			
		Kinerja	Ket.	Keuangan	Ket.
1	Tenaga Kerja	100	ST	60.29	R
2	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	58.75	ST	24.90	SR
3	Pangan	100	ST	80.31	T
4	Pertanahan	82.00	T	71.95	S
5	Lingkungan Hidup	100	ST	90.54	ST
6	Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	100	ST	84.48	T
7	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	100	ST	87.81	T
8	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	97.89	ST	81.46	T
9	Perhubungan	100	ST	93.32	ST
10	Komunikasi Dan Informatika	93.48	ST	90.54	ST
11	Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	100	ST	85.27	ST
12	Penanaman Modal	100	ST	86,55	T
13	Pemuda Dan Olahraga	89.55	T	68,97	S
14	Statistik	100	ST	91,19	ST
15	Persandian	100	ST	93,13	ST
16	Kebudayaan	100	ST	99.76	ST
17	Perpustakaan	100	ST	83,22	T
18	Kearsipan	100	ST	100	ST
	Rata-rata Capaian	**95.64**	**ST**	**81.87**	**T**

Sumber : Bappelitbangda, 2023

5. Pada Tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat telah melaksanakan beberapa Urusan Pilihan Pemerintah Daerah sesuai dengan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dengan sebaik mungkin dengan tetap memperhatikan potensi daerah (tidak semua urusan pilihan dilaksanakan). Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Barat yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Berdasarkan pada karakteristik daerah, Kabupaten Pesisir Barat melaksanakan 6 (enam) Urusan Pilihan.

Tabel 2.175. Capaian Kinerja Urusan Pilihan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022

No	Urusan	Capaian (%)			
		Kinerja	Ket.	Keuangan	Ket.
1	Kelautan dan Perikanan	96.10	ST	65.20	S
2	Pariwisata	89,00	T	83,97	T
3	Pertanian	83,30	T	72,82	S
4	Perdagangan	100	ST	93,95	ST
5	Perindustrian	64,31	R	23.06	R
6	Transmigrasi	99,38	ST	39,87	SR
	Rata-rata Capaian	**88.68**	**T**	**63,15**	**R**

Sumber : Bappelitbangda, 2023

6. Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat telah melaksanakan 2 (dua) Unsur Pendukung Pemerintah Daerah sesuai dengan yang diamanatkan oleh PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan perubahannya, yang mana unsur pendukung adalah unsur Pelaksanaan Dukungan terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah serta pimpinan DPRD dan anggota DPRD melalui Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD

Tabel 2.176. Capaian Kinerja Urusan Pendukung Urusan Pemerintahan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022

No	Urusan	Capaian (%)			
		Kinerja	Ket.	Keuangan	Ket.
1	Sekretariat Daerah	99.55	ST	81.54	T
2	Sekretariat DPRD	96.88	ST	94.69	ST
	Rata-rata Capaian	**98.21**	**ST**	**88.12**	**ST**

Sumber: Bappelitbangda, 2023

7. Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat telah melaksanakan 5 (lima) Unsur Penunjang Pemerintah Daerah sesuai dengan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mana unsur penunjang adalah urusan yang bukan urusan wajib dan urusan pilihan pemerintah daerah namun diperlukan dalam rangka menunjang pelaksanaan pemerintahan daerah. Unsur pendukung ini hampir menjadi suatu urusan yang mutlak ada dalam pemerintahan daerah.

Tabel 2.177. Capaian Kinerja Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022

No	Urusan	Capaian (%)			
		Kinerja	Ket.	Keuangan	Ket.
1	Perencanaan	95.83	ST	88.03	T
2	Keuangan	97.47	ST	88.14	T
3	Kepegawaian	92.23	ST	84.51	T
4	Pendidikan dan Pelatihan	100	ST	41.30	SR
5	Penelitian dan Pengembangan	100	ST	97.50	ST
	Rata-rata Capaian	**97.10**	**ST**	**79.89**	**S**

Sumber: Bappelitbangda, 2023

8. Pada Tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat telah melaksanakan unsur pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah atau Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Kabupaten Pesisir Barat. Unsur pengawasan diarahkan untuk menjamin pengendalian, evaluasi dan tindak lanjut dari hasil pemeriksaan yang dilakukan secara intern dari pemerintah daerah terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Tabel 2.178. Capaian Kinerja Unsur Pengawasan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022

No	Urusan	Capaian (%)			
		Kinerja	Ket.	Keuangan	Ket.
1	Inspektorat	100	ST	79.44	T
	Rata-rata Capaian	**100**	**ST**	**79.44**	**T**

Sumber : Bappelitbangda, 2023

9. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten atau kota yang dipimpin oleh camat. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota. Daerah kabupaten/kota dibagi atas kecamatan dan kecamatan dibagi atas kelurahan dan/atau Desa. Berdasarkan uraian tersebut di atas, pengertian kecamatan memiliki konteks 'kewilayahan'.

   Kecamatan juga dipandang sebagai Perangkat Daerah dari Kabupaten/Kota (Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah), berdasarkan ketentuan Pasal 209 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Posisi Kecamatan berkedudukan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota sekaligus penyelenggara pemerintahan umum. Sebagai perangkat daerah, Camat melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan dan sebagai penyelenggara pemerintahan umum, Camat secara berjenjang melaksanakan tugas Pemerintah Pusat di Wilayah Kecamatan.

Tabel 2.179. Capaian Kinerja Unsur Kewilayahan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022

No	Urusan	Capaian (%)			
		Kinerja	Ket.	Keuangan	Ket.
1	Kecamatan	96.66	ST	90.91	S
	Rata-rata Capaian	**96.66**	**ST**	**90.91**	**S**

Sumber : Bappelitbangda, 2023

10. Pelaksanaan Unsur Pemerintahan Umum, Daerah selain berstatus sebagai daerah juga merupakan Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi kepala daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah daerah. Presiden dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum di daerah melimpahkan kepada gubernur sebagai kepala pemerintahan provinsi dan kepada bupati/wali kota sebagai kepala pemerintahan kabupaten/kota.

Tabel 2.180. Capaian Kinerja Unsur Pemerintahan Umum Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022

No	Urusan	Capaian (%)			
		Kinerja	Ket.	Keuangan	Ket.
1	Kesatuan Bangsa dan Politik	97.33	ST	67.89	S
	Rata-rata Capaian	**97.33**	**ST**	**67.89**	**S**

Sumber : Bappelitbangda, 2023

11. Berikut adalah rangkuman realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi (dengan kriteria sangat rendah ≤ 50) target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan:

Tabel 2.181. Realisasi RKPD dengan kriteria Sangat Rendah pada RKPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022

No	Bidang Urusan/ Perangkat Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Permasalahan
1	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar/ Pendidikan/ Dinas P & K**				
	Sub Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	Meningkatkan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	100%	50%	Pembayaran Beasiswa untuk SMA Kebangsaan ditunda Pembayarannya
	Program Pengelolaan Pendidikan	Cakupan Pemenuhan Spm Bidang Pendidikan	100%	64.08%	Keterbatasan Penganggaran untuk Melaksanakan Seluruh Indikator SPM
	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (Paud)	Angka Partispasi Kasar Paud	71.00%	54%	Keterbatasan Penganggaran dalam Mencapai Target RPJMD
2	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar/ Kesehatan/ Dinas Kesehatan**				
	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Media Promosi Kesehatan Yang Di Gunakan	420 Unit Media	220 Unit Media	Keterbatasan Waktu Pelaksanaan Kegiatan (DID Tambahan TA 2022)
	Sub Kegiatan Pembinaan Dan Pengawasan Sumberdaya Manusia Kesehatan	Tersedianya Dana Hibah Untuk Organisasi	3 Organisasi	1 Organisasi	Keterbatasan Penganggaran dalam Mencapai Target RPJMD

3	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar/ Pekerjaan Umum & Penataan Ruang/ Dinas Pu & Pr**				
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Cakupan Sarana Dan Prasarana Sumber Daya Air Daerah	30%	18.06%	Keterbatasan Penganggaran dalam Mencapai Target RPJMD
	Kegiatan Pengelolaan Sda Dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai (Ws) Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Sarana Dan Prasarana Sumber Daya Air Daerah	30%	18.06%	Keterbatasan Penganggaran dalam Mencapai Target RPJMD
	Kegiatan Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer Dan Sekunder Pada Daerah Irigasi Yang Luasnya Dibawah 100 Ha Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Cakupan Sarana Dan Prasarana Sumber Daya Air Daerah	30%	18.06%	Keterbatasan Penganggaran dalam Mencapai Target RPJMD
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Penduduk Yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Daya Air Yang Sehat Dan Aman	37.5%	18.06%	Keterbatasan Penganggaran dalam Mencapai Target RPJMD
	Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Spam) Di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Daya Air Yang Sehat Dan Aman	37.5%	18.06%	Keterbatasan Penganggaran dalam Mencapai Target RPJMD
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tangga Yang Menempati Hunian Dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak Dan Aman	65.3%	18.06%	Keterbatasan Penganggaran dalam Mencapai Target RPJMD
	Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Tangga Yang Menempati Hunian Dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak Dan Aman	63.3%	18.06%	Keterbatasan Penganggaran dalam Mencapai Target RPJMD
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Pelayanan Sanitasi Sub Sektor Drainase Lingkungan	25%	9.75%	Keterbatasan Penganggaran dalam Mencapai Target RPJMD

4	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar/ Sosial/ Dinas Sosial**				
	Program Rehabilitasi Sosial	Cakupan Pemenuhan Spm Bidang Sosial	100%	56%	Keterbatasan Penganggaran dalam Mencapai Target SPM
	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Pmks) Lainnya Bukan Korban Hiv/Aids Dan Nafza Di Luar Panti Sosial	Persentase Pmks Yang Tertangani	100%	56%	Keterbatasan Waktu Pelaksanaan Kegiatan (DID Tambahan TA 2022)
	Sub Kegiatan Kerjasama Antar Lembaga Dan Kemitraan Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kab/Kota	Tersedianya Hibah Bantuan Sosial	1.247 Paket	948 Paket	Keterbatasan Waktu Pelaksanaan Kegiatan (DID Tambahan TA 2022)
	Sub Kegiatan Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan Yang Berbadan Hukum Indonesi	Tersedianya Hibah	18 Paket	10 Paket	Keterbatasan Waktu Pelaksanaan Kegiatan (DID Tambahan TA 2022)
	Sub Kegiatan Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu	Tersedianya Bantuan Sosial	1.229 Pakte	938 Paket	Keterbatasan Waktu Pelaksanaan Kegiatan (DID Tambahan TA 2022)
5	**Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar/ Pemberdayaan Perempuan & Anak/ Dinas Pppa & Kb**				
	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Perempuan Yg Melaksanakan Perencanaan Pembangunan Yg Responship Gender	100%	9.93%	Keterbatasan Waktu Pelaksanaan Kegiatan (DID Tambahan TA 2022)
	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan Dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan Dan Politik, Hukum, Sosial Dan Ekonomi	Jumlah Dok Hasil Advokasi Kebijakan & Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam PUG Kewenangan Kab/Kota	15 Dok	-	Keterbatasan Waktu Pelaksanaan Kegiatan (DID Tambahan TA 2022)

	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Pembentukan Kelompok Usaha Rumahan Dengan Memanfaatkan Limbah Rumah Tangga	20 Kel	0	Keterbatasan Waktu Pelaksanaan Kegiatan (DID Tambahan TA 2022)
	Kegiatan Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kg Dan Hak Anak Yang Wilayah Kerjanya Dalam Daerah Kab/Kota	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kab/Kota	100%	0	Keterbatasan Waktu Pelaksanaan Kegiatan (DID Tambahan TA 2022)
	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kab/Kota	Terbinanya 15 Kelompok Usaha Peningkatan Pendapat Keluarga Akseptor	15 Kel	0	Keterbatasan Waktu Pelaksanaan Kegiatan (DID Tambahan TA 2022)
6	**Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar/ Pertanahan/ Dinas Pr & Kp**				
	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Rasio Luas Tanah Yang Disediakan Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	10Ha	2.13Ha	Keterbatasan Penganggaran dalam Mencapai Target RPJMD
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Luas Tanah	10Ha	2.13Ha	Keterbatasan Penganggaran dalam Mencapai Target RPJMD
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah Sertifikat	100 Berkas	64 Berkas	Keterbatasan Penganggaran dalam Mencapai Target RPJMD
7	**Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar/ Pengendalian Penduduk & KB/ Dinas PPPA & KB**				
	Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional Bagi Pengelola Dan Pelaksana (Kader) Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga Dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Uppks)	Jumlah Tim Pendamping Keluarga Yg Mendapatkan Biaya Operasional	402 Orang	130 Orang	Keterlambatan Pelaksanaan Kegiatan

8	**Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar/ Kepemudaan & Olahraga/ Dinas Pora**				
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90%	62%	Keterbatasan Penganggaran dalam Mencapai Target RPJMD
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90%	85%	Keterbatasan Penganggaran dalam Mencapai Target RPJMD
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Cakupan Pemenuhan Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	50%	19%	Keterbatasan Penganggaran dalam Mencapai Target RPJMD
	Kegiatan Penyadaraan, Pemberdayaan Dan Pengembangan Pemuda Dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Terhadap Pemuda Pelopor	Persentase penyadaran, pemberdayaan & pengembangan pemuda pelopor	50%	19%	Keterbatasan Penganggaran dalam Mencapai Target RPJMD
	Sub Kegiatan Koordinasi,Sikronisasi Dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor	14 Orang	12 Orang	Keterbatasan Penganggaran dalam Mencapai Target RPJMD
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi Dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Pemuda Yg Difasilitasi Sebagai Kader Kewirausahaan	20 Orang	12 Orang	Keterbatasan Penganggaran dalam Mencapai Target RPJMD
	Sub Kegiatan Peningkatan Kepemimpinan , Kepoloporan Dan Kesukarelawan Pemuda	Jumlah Pemuda Yg Difasilitasi Dalam Peningkatan Wawasan Kebangsaan, Perdamaian dan Lingkungan Hidup	16 Orang	8 Orang	Keterbatasan Penganggaran dalam Mencapai Target RPJMD
	Kegiatan Pemberdayaan Dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kab/Kota	Persentase Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan	50%	19%	Keterbatasan Penganggaran dalam Mencapai Target RPJMD

	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemuda Dan Organisasi Kepemudaan Kab / Kota	Persentase Organisasi Kepemudaan Yang Memenuhi Kualifikasi Berdasarkan Standar Organisasi Kepemudaan	16%	12%	Keterbatasan Penganggaran dalam Mencapai Target RPJMD
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi Dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Olahraga	Jumlah Sarana Dan Prasarana Olahraga	20 Unit	12 Unit	Keterbatasan Penganggaran dalam Mencapai Target RPJMD
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event Dan Single Event Tingkat Kab/Kota	Persentase Penyelenggaraan Kejuaraan/ Perlombaan Olahraga Skala Kab Yang Di Fasilitasi Pemerintah Daerah	10%	4%	Pengurangan Jumlah Cabor yang diperlombakan
9	**Pilihan/ Perikanan/ Dinas Perikanan**				
	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Terpenuhinya Prasarana Penangkapan Ikan	13 Paket	3 Paket	Keterbatasan Waktu Pelaksanaan Kegiatan (DID Tambahan TA 2022)
	Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Terpenuhinya Sarana Penangkapan Ikan	10 Paket	6 Paket	Keterbatasan Waktu Pelaksanaan Kegiatan (DID Tambahan TA 2022)
	Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kemampuan Nelayan Penangkap Ikan	220 Orang	110 Orang	Keterbatasan Waktu Pelaksanaan Kegiatan (DID Tambahan TA 2022)
	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Meningkatkan Kemampuan Nelayan Secara Individu	117 Orang	110 Orang	Keterbatasan Waktu Pelaksanaan Kegiatan (DID Tambahan TA 2022)
10	**Pilihan/ Pariwisata/ Dinas Pariwisata**				
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana DanPrasarana Pendukung Kinerja	100%	33.33%	Keterlambatan Proses Pengadaan

	Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap	8 Unit	2 Unit	Keterlambatan Proses Pengadaan
	Program Pemasaran Pariwisata	Kunjungan Wisatawan (Orang)	286.376 Orang	96.234 Orang	Belum Pulihnya Pariwisata Daerah akibat Pandemi Covid-19
	Sub Kegiatan Peningkatan Kerja Sama Dan Kemitraan Pariwisata Dalam Dan Luar Negeri	Terdapat Pertukaran Kegiatan Pariwisata	1 Kegiatan	0 Kegiatan	Keterlambatan Proses Pelaksanaan Kegiatan
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Cakupan Fasilitasi Pengembangan Sdm Pariwisata	20 Orang	0 Orang	Keterlambatan Proses Pelaksanaan Kegiatan
	Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Cakupan Desa Wisata	10%	0%	Keterlambatan Proses Pelaksanaan Kegiatan
	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah Pelatihan Sdm	1 Keg	0 Keg	Keterlambatan Proses Pelaksanaan Kegiatan
11	**Pilihan/ Pertanian/ Dinas Kp & Pertanian**				
	Kegiatan : Pengendalian Dan Pengawasan Penyediaan Dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, Dan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya Dari Daerah Kab/Kota Lain	Peningkatan Populasi Ternak	3%	0%	Keterbatasan Waktu Pelaksanaan Kegiatan (DID Tambahan TA 2022)
	Sub Kegiatan Pengadaan Benih /Bibit Ternak Yang Sumbernya Dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Bibit Ternak	1600 Bibit	0 Bibit	Keterbatasan Waktu Pelaksanaan Kegiatan (DID Tambahan TA 2022)
	Kegiatan : Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase Prasarana Pertanian Yang Terbangun Dan Berkondisi Baik	80%	0%	Keterbatasan Waktu Pelaksanaan Kegiatan (DID Tambahan TA 2022)
	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani Yg Dibangun, Direhabilitasi, Dan Dipelihara	2 Unit	0 Unit	Keterbatasan Waktu Pelaksanaan Kegiatan (DID Tambahan TA 2022)

12	**Pilihan/ Perindustrian/ Dinas Trans, Naker Dan Perindustrian**				
	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	35%	2.34%	Keterbatasan Penganggaran dalam Mencapai Target RPJMD
	Kegiatan Penyusunan Dan Evaluasi Rencana Pembangunan Sarana Dan Prasarana Industri	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	35%	2.34%	Keterbatasan Penganggaran dalam Mencapai Target RPJMD
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	35%	0%	Keterbatasan Waktu Pelaksanaan Kegiatan (DID Tambahan TA 2022)
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana Dan Prasana Industri	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	35%	2.34%	Keterbatasan Penganggaran dalam Mencapai Target RPJMD
13	**Pendukung/ Setda**				
	Pelaksaan Kebijakan, Evaluasi, Dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Terlaksananya Pelaksaan Kebijakan, Evaluasi, Dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	32 Kegiatan	23 Kegiatan	Keterlambatan Proses Pelaksanaan Kegiatan
14	**Pendukung/ Setwan**				
	Fasilitasi Fraksi Dprd	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan Pada Setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/ Kota	24 Kali	0	Keterlambatan Proses Pelaksanaan Kegiatan
15	**Penunjang/ Bappelitbangda**				
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Prasarana Dan Prasarana Pendukung Kinerja	100%	0%	Tidak dilaksanakan untuk efisiensi anggaran
	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Dan Mesin	2 Unit	0 Unit	Tidak dilaksanakan untuk efisiensi anggaran
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap	2 Unit	0 Unit	Tidak dilaksanakan untuk efisiensi anggaran

16	**Penunjang/ Bpkad**				
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Fgd Pengelola Keuangan Se-Provinsi Lampung	1 Keg	0 Keg	Keterlambatan Pelaksanaan Kegiatan
17	**Penunjang/ Bkpsdm**				
	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian Dan Informasi Kepegawaian Asn	Tercapainya Pengadaan, Pemberhentian, Dan Informasi Kepegawaian Asn	1,429 Orang	1,348 Orang	Penyesuaian dengan Kondisi Proses Pengadaan Pegawai
	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen	100 Dok	19 Dok	Penyesuaian dengan Kondisi Pengajuan Dokumen Kepegawaian
	Kegiatan Penilaian Dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Tercapainya Penilaian Evaluasi Kinerja ASN	1,307 Orang	1,276 Orang	Penyesuaian dengan Kondisi Jumlah Pegawai
18	**Pemerintahan Umum/ Badan Kesbangpol**				
	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Masyarakat Yang Aktif	70%	39.13%	Penyesuaian dengan Pengajuan Dana Hibah oleh Ormas
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	70%	39.13%	Penyesuaian dengan Pengajuan Dana Hibah oleh Ormas

Sumber: Bappelitbangda, 2023

12. Berdasarkan evaluasi hasil RPJMD Tahun 2022 yang merupakan tahun pertama dalam pelaksanaan serta upaya pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026, secara umum pencapaian sasaran melalui indikator-indikator sasaran menunjukkan keberhasilan untuk mencapai misi dan tujuan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 7 Tahun 2021 tentang RPJMD Tahun 2021-2026. Mengacu pada aturan tersebut, maka dalam usaha untuk pencapaian sasaran dalam rangka mencapai Visi, Misi dan Tujuan dari Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat adalah sebagai berikut:

Tabel 2.182. Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026 untuk Tahun 2022

Visi **Terwujudnya Pesisir Barat yang Amanah, Maju dan Sejahtera**				
Indikator Kinerja Utama	**Satuan**	**Tahun 2022**		
		Target	**Realisasi**	**Capaian (%)**
Misi 1	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Secara Berkeadilan, Maju Dan Berdaya Saing			
Indeks Pembangunan Manusia	Angka	64.17	65.14	100
Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	2.80	3.73	81.08
Indeks Pembangunan Gender	Angka	93.82	93.54	99.70
Misi 2	Mengembangkan Infrastruktur Wilayah Dengan Konsep Pembangunan Inklusif Untuk Konektivitas Antar Wilayah Dengan Memperhatikan Aspek Mitigasi Bencana Dan Berwawasan Lingkungan			
Tingkat Kemantapan Jalan	Persen	41.00	39.53	96.41
Persentase Penduduk yang Memiliki Akses terhadap Sumber Daya Air yang Sehat dan Aman	Persen	37.50	18.06	48.16
Rasio Jaringan Irigasi	Persen	52.00	56.10	100
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	73.54	71.06	96.62
Indeks Resiko Bencana	Angka	180.94	189.70	95.38
Misi 3	Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan Melalui Peningkatan Produktivitas Sektor Pertanian Dan Perikanan			
Pertumbuhan Ekonomi	Persen	3.20	2.88	90
PDRB Perkapita	Juta Rupiah	28.81	32.46	100
Nilai Tukar Petani	Angka	100.25	104.34	100
Indeks Gini	Angka	0.30	0.29	100
Tingkat Kemiskinan Daerah	Persen	13.95	13.84	100
Misi 4	Mengembangkan Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah Yang Berpijak Pada Kearifan Lokal			
Pertumbuhan Wisatawan Nusantara dan Mancanegara	Persen	20	23.28	100
Misi 5	Menyelenggarakan Pelayanan Publik Yang Berkualitas Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Dan Produktif Serta Penguatan Sinergitas Antar Lembaga			
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Angka	76.00	79.95	100
Nilai SAKIP	Predikat	CC	CC	100
Opini BPK	Predikat	WTP	*belum rilis*	n/a
Indeks Desa Membangun	Angka	0.6700	0.6636	99.04

Sumber : Bappelitbangda, 2023

13. Berdasarkan pada evaluasi hasil RKPD Tahun 2022 juga didapatkan perhitungan terhadap Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang merupakan indikator pelaksanaan urusan pemerintahan daerah. Dimana Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat melaksanakan 40 Urusan Pemerintahan Daerah dan dilaksanakan oleh 39 Perangkat Daerah. Capaian IKD tersebut disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.183. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026 untuk Tahun 2022

No	Urusan Pemerintahan Daerah/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	**Pendidikan**				
1	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8.05	8.53	100.00
2	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12.03	12.13	100.00
3	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	Persen	71.00	54.00	76.06
4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	Persen	92.08	86.81	94.28
5	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	Persen	70.25	81.48	100.00
6	Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan dasar	Persen	80.27	100.00	100.00
7	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Dasar	Persen	91.57	108.85	100.00
8	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Persen	57.70	43.97	76.20
9	Tingkat Partisipasi Anak Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan SD	Persen	98.36	100.00	100.00
10	Tingkat Partisipasi Anak Usia 13-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan SMP	Persen	88.83	81.48	91.73
11	Angka Putus Sekolah	Persen	0.22	1.55	14.19
12	Angke Melek Huruf (AMH)	Persen	92.05	97.81	100.00
13	Rasio Guru SD terhadap Siswa	Rasio	1 : 13	1 : 12	98.63
14	Rasio Guru SMP terhadap Siswa	Rasio	1 : 13	1 : 8	93.15
2	**Kesehatan**				
1	Angka Harapan Hidup	Tahun	63.62	63.99	100.00
2	Prevalensi Stunting pada Anak Baduta (Bawah Dua Tahun)	Persen	6.50	0.75	100.00
3	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Kasus	13	10	76.92
4	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	Kasus	6	6	100.00
5	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persen	100	94.65	94.65
6	Pelayanan Kesehatan Balita	Persen	100	73.9	73.90
7	Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan	Persen	100	98.4	98.40
8	Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Apotek dan Toko Obat) yang Memenuhi Standar dan Persyaratan Perizinan	Persen	42.86	100	100.00
9	Angka Kematian Ibu (AKI)	Kasus	7	6	85.71

10	Angka Kematian Bayi (AKB)	Kasus	13	10	76.92
11	Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persen	85.03	83.30	97.97
12	Prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada Balita	Persen	0.45	0.49	91.84
13	Insidensi TB per 100.000 penduduk	Persen	21.16	115.04	21.16
14	Temuan kasus TB baru menggunakan indikator SPM (terduga TB)	Persen	23.00	94.00	100.00
15	*Treatment coverage* pada pasien TB	Persen	100	40	39.66
16	Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan	Persen	100	98	98.40
17	Jumlah Puskesmas melaksanakan layanan Upaya Berhenti Merokok (UBM)	Unit	11	1	9.09
18	Implementasi KTR pada 9 tempat (pendidikan, transportasi, kesehatan, dll)	Persen	100	35	35.00
19	Persentase Sarana Produksi UKOT	Persen	100	47	47.00
20	Rasio Dokter Umum per 100.000 penduduk	Angka	1.33	0.16	12.03
21	Rasio Perawat per 100.000 penduduk	Angka	11.13	12.30	100.00
22	Rasio Bidan per 100.000 penduduk	Angka	12.13	22.80	100.00
3	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**				
1	Persentase Ruang Terbuka Lahan Hijau	Persen	4.50	4.36	96.89
2	Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai RTRW	Persen	54.65	75	100.00
3	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	Km	644.08	197.83	30.72
4	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	Persen	65.30	18.06	27.66
5	Panjang jaringan irigasi primer kewenangan daerah yang dibangun	Km	35.00	1.00	2.86
6	Luas jaringan daerah irigasi permukaan kewenangan daerah yang direhabilitasi	Persen	60.00	32.60	54.33
7	Panjang Infrastruktur pengendali banjir wilayah sungai kewenangan daerah yang dibangun	Persen	0.00	0.93	93.00
8	Rasio Prasarana, Sarana dan Utilitas Dasar (PSU) Perkantoran pemerintahan Daerah dalam Skala Mantap	Persen	55.00	69.00	100.00
9	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak	Persen	37.50	18.06	48.16

10	Persentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan	Persen	25.00	18.06	72.24
11	Ketersediaan Dokumen Tata Ruang Wilayah (RTRW) melalui Peta Analog dan Peta Digital	Dok	1	1	100.00
12	Ketersediaan dokumen RDTR Kecamatan	Dok	0	1	100.00
4	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**				
1	Jumlah Titik Kawasan Kumuh	Lokasi	60	28	100.00
2	Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan Prasarana Sarana Umum	Persen	35.00	86.07	100.00
3	Persentase Rumah Susun Sewa Terpelihara	Persen	100.00	100.00	100.00
4	Persentase warga negara korban bencana kabupaten yang memperoleh rumah layak huni	Persen	100	0	0.00
5	Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Persen	14.00	18.18	77.03
6	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Persen	100	100	100.00
7	Luas Kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	Ha	0.5	0.0	0.00
8	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana Sarana Umum	Persen	33.00	77.77	100.00
5	**Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**				
1	Persentase Konflik Sosial, Keagamaan dan RAS yang Tertangani	Persen	100	100	100.00
2	Persentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persen	100	100	100.00
3	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	Persen	100	90	90.00
4	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	100	90	90.00
5	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Menit	15	15	100.00
6	Persentase pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran	Persen	100	75	75.00

7	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persen	100	100	100.00
8	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	100	97.65	97.65
9	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban Bencana	Persen	100	90.75	90.75
10	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	100	100	100.00
11	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan akibat Penegakan Hukum Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Daerah	Persen	100	100	100.00
6	**Sosial**				
1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	Persen	22.53	24.77	100.00
2	Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	Persen	6.04	95.65	100.00
3	Persentase (%) Lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	Persen	100	23.07	23.07
4	Jumlah Warga Negara/Gelandangan dan Pengemis yang memperoleh Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial di Luar Panti	Persen	100	0	0.00
5	Persentase (%) korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Persen	100	100	100.00
6	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani	Persen	84.94	97.00	100.00
1	**Tenaga Kerja**				
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	72.71	71.21	97.94
2	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenaga kerjaan)	Persen	60.00	60.00	100.00
2	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**				
1	Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Predikat	Madya	Pratama	50.00

2	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Persen	1.01	0.79	78.22
3	Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	Persen	0.035	0.294	100.00
4	Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang Tertangani	Persen	46.84	40	85.40
5	Partisipasi angkatan kerja perempuan	Persen	0.086	0.367	100.00
6	Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan	Persen	100	53.3	53.30
7	Cakupan Anak korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan	Persen	100	100	100.00
8	Persentase ARG pada Belanja APBD	Persen	0.011	0.088	100.00
9	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	Persen	100	100	100.00
3	**Pangan**				
1	Skor Pola Pangan Harapan	Skor (Angka)	84.95	84.18	99.09
2	Ketersediaan Pangan Utama	Ton	28.000	28.342	100.00
3	Ketersedian Energi per kapita	(kkal/ kap/ hari)	2,400.00	2,621.12	100.00
4	Ketersedian Protein per kapita	(gr/kap/ hari)	63.00	66.98	100.00
5	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	Persen	60.00	83.53	100.00
4	**Pertanahan**				
1	Persentase luas lahan bersertifikat	Persen	50.00	50.63	100.00
2	Persentase penerbitan Izin lokasi	Persen	100	100	100.00
3	Jumlah Kepala Keluarga penerima akses Reformasi Agraria	Kepala Keluarga	5.000	0.000	0.00
4	Realisasi Luas Tanah yang disediakan bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Kepentingan Lainnya	Ha	10.00	2.13	21.30
5	**Lingkungan Hidup**				
1	Hasil pengukuran Indeks Kualitas Air	Angka	87.47	50	57.16
2	Hasil pengukuran Indeks Kualitas Udara	Angka	58.44	89.06	100.00
3	hasil pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Angka	73.7	73.93	100.00

4	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100	21.43	21.43
5	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota	Persen	3.00	75.00	100.00
6	Persentase cakupan area pelayanan persampahan	Persen	49.61	36.00	72.57
7	Persentase jumlah pengurangan timbulan sampah	Persen	5.00	5.00	100.00
8	Persentase jumlah penanganan timbulan sampah	Persen	18.23	15.8	86.67
9	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah	Persen	4.70	4.36	92.77
6	**Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil**				
1	Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	Persen	100	100	100.00
2	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Status	Sudah	sudah	100.00
3	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Persen	97.00	99.32	100.00
4	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun	Persen	93.00	98.78	100.00
5	Persentase penduduk yang ber-Kartu Keluarga (KK)	Persen	60.00	92.83	100.00
6	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Persen	30.00	36.82	100.00
7	**Pemberdayaan Masyarakat Desa**				
1	Persentase PKK Aktif	Persen	100	100	100.00
2	Persentase Posyandu Aktif	Persen	100	100	100.00
3	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Aktif	BUMDes	88	73	82.95
4	Persentase desa yang mendapatkan fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset daerah	Persen	100	100	100.00
5	Persentase Desa/Pekon yang muatan RPJMDes-nya sesuai dengan RPJMD Kabupaten	Persen	100	100	100.00
6	Persentase Desa Tertinggal	Persen	45.94	12.07	26.27
7	Persentase Desa Mandiri	Persen	1.72	0.86	50.00
8	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**				
1	Total Fertility Rate (TFR)	Persen	2.21	3.30	66.96

2	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	Persen	76.53	62.7	81.93
3	Persentase tingkat putus pakai pemakaian kontrasepsi (Drop Out KB)	Persen	18.45	13.83	74.96
4	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	Persen	81.73	85.04	100.00
5	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Angka	54.38	65.00	119.53
6	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	1.01	0.72	71.29
7	Indeks Pembangunan Keluarga	Angka	56.50	52.36	92.67
8	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persen	76.40	62.70	82.07
9	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persen	11.09	15.11	73.40
10	Persentase masyarakat yang terjangkau program bangga kencana	Persen	40.00	38.90	97.25
11	Angka Kelahiran Remaja umur 15-49 tahun (age spicific fertility rate /ASFR 15-19)	Angka	25	28.6	87.41
12	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	Tahun	22.00	20.00	90.91
13	Persentase Bayi Umur Dua Tahun yang Stunting	Persen	25.00	0.49	1.96
14	Persentase Keluarga Balita dan Anak yang Ikuti BKB	Persen	25.00	71.18	284.72
9	**Perhubungan**				
1	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik sektor transportasi	Predikat	sangat baik	baik	75.00
2	Jumlah rekomendasi uji KIR angkutan umum	Jumlah	55	60	100.00
3	Persentase prasarana yang memenuhi standar dalam kondisi baik	Persen	75.00	50.00	66.67
4	Persentase Penggunaan Moda Transportasi Umum	Persen	70.00	78.00	100.00
5	Persentase sarana perhubungan dalam kondisi baik	Persen	35.00	60.00	100.00
6	Rasio konektivitas kabupaten/kota	Persen	90.00	85.00	94.44
7	Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan Roda 4	Persen	17.00	100.00	100.00
10	**Komunikasi dan Informatika**				
1	Persentase Informasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah yang Terpublikasi	Persen	95.00	80.10	84.32

2	Presentase aplikasi IT dan aplikasi E -government yang mendukung smart city dan layanan publik yang berfungsi baik	Persen	80.00	100.00	100.00
3	Persentase Infrastruktur IT yang Berfungsi Baik	Persen	90.00	100.00	100.00
4	Persentase OPD yang memiliki akses internet dan terhubung dengan jaringan intra pemerintah	Persen	0.00	10.20	10.20
5	Persentase layanan publik (G2B) yang diselenggarakan secara online dan terhubung dengan sistem penghubung layanan	Persen	70.00	12.00	17.14
6	Persentase layanan administrasi pemerintahan (G2G) yang diimplementasikan	Persen	70.00	21.00	30.00
11	**Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah**				
1	Persentase Koperasi Akfif	Persen	50.00	45.55	91.10
2	Jumlah UKM non BPR/LKM aktif	Jumlah	270	6,283	100.00
12	**Penanaman Modal**				
1	Pertumbuhan Nilai Investasi (PMDN)	Persen	15.99	64.53	100.00
2	Pertumbuhan Nilai Investasi (PMA)	Persen	5.05	100	100.00
3	Jumlah/nilai investasi PMA dan PMDN	Juta Rupiah (Rp)	361.589	617,775	100.00
4	Rasio daya serap tenaga kerja	Orang/ Per usahaan	186 orang/ per usahaan	196 orang/Per usahana	100.00
5	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	Persen	20.50	27.36	100.00
6	Rasio tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan perizinan	Persen	80.00	100.00	100.00
7	Persentase terpenuhinya regulasi/kebijakan penanaman modal dan pelayanan perizinan serta penerapan Online Single Submission (OSS)	Persen	100	100	100.00
8	Persentase penerbitan persetujuan bangunan gedung (PBG)	Persen	100	100	100.00
9	Persentase penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman berakohol (SIUP MB)	Persen	80.00	100.00	100.00
10	Rasio jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100.00
11	Jumlah data laporan perizinan dan non perizinan	Laporan	5 Laporan	5.00	100.00
13	**Kepemudaan dan Olahraga**				
1	Jumlah Atlet Berpestasi Tingkat Provinsi	Orang	4	79	100.00

2	Persentase organisasi pemuda yang aktif	Persen	33	86	100.00
3	Persentase wirausaha muda	Persen	1.10	19.00	100.00
4	Peningkatan pelatih yang Bersertifikasi	Persen	14.57	75.00	100.00
5	Atlet Berprestasi	Jumlah	22	79	100.00
6	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen	1.10	0.22	20.00
7	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persen	42.74	15	35.10
8	Jumlah Wirausahan Muda Mandiri	Jumlah	140	190	100.00
9	Peningkatan prestasi olahraga	Persen	6.80	7.00	100.00
14	**Statistik**				
1	Data dan Infirmasi Statistik Daerah yang Tersusun dengan Baik	Dok	2	1	50.00
2	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen	100	100	100.00
3	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persen	100	100	100.00
15	**Persandian**				
1	Presentase Pengamanan Informasi Daerah yang Terselenggara Baik	Persen	100	100	100.00
16	**Kebudayaan**				
1	Persentase Kesenian Budaya yang Dilestarikan	Persen	7.50	100	100.00
17	**Perpustakaan**				
1	Rasio Pengunjung Perpustakaan per Tahun	Angka	0.04	0.002	5.00
2	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	Rasio	2.27	0.06	2.65
3	Jumlah Pengunjung Perpustakaan per tahun	Jumlah	156	335	100.00
18	**Kearsipan**				
1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	Persen	20.00	39.00	195.00
2	Jumlah arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi	Arsip	51	342	100.00
3	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Persen	70.00	25.00	35.71

4	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Persen	80.00	50.00	62.50
1	**Kelautan dan Perikanan**				
1	Produksi perikanan tangkap	Ton	13.859	13.599	98.12
2	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	218.64	216.98	99.24
3	Angka konsumsi ikan	Kg/kap/ Th	40.05	40.89	100.00
4	Cakupan bina kelompok nelayan	Jumlah	220	216	98.18
2	**Pariwisata**				
1	Kontribusi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB	Persen	1.73	1.98	100.00
2	Lama kunjungan Wisata	Hari	8	8	100.00
3	Kontribusi PAD sektor pariwisata	Persen	2.58	2.58	100.00
4	Rata-rata Belanja Wisatawan Domestik	Rupiah/ Kunjungan	1.300.000	1.300.000	100.00
5	Rata-rata Belanja Wisatawan Mancanegara	Rupiah/ Kunjungan	8.000.000	8,000,000	100.00
6	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	Orang	276	418	100.00
7	Jumlah wisatawan domestik	Orang	286,100	95,816	33.49
8	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan domestik	Persen	20,00	22,75	100.00
9	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara	Persen	20.00	4544,44	100.00
10	Jumlah akomodasi pariwisata (hotel/losmen)	Jumlah	68	82	100.00
3	**Pertanian**				
1	Presentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT	Persen	82.00	99.00	100.00
2	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	Persen	82.00	81.82	99.78
3	Jumlah Produksi Tanaman Pangan	Ton/ Tahun	109.808	105.560	96.13
4	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan	Ton/ Tahun	35.610	31.931	89.67
5	Jumlah Produksi Hewan Ternak	Ekor/ Tahun	106.042	119.401	100.00
4	**Perdagangan**				
1	Persentase Jumlah UTTP Yang Ditera/Tera Ulang	Persen	70.00	n/a	0.00
2	Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB	Persen	11.54	14.68	100.00

5	**Perindustrian**				
1	Cakupan bina kelompok pengrajin	Persen	35.00	37.00	100.00
2	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	Persen	3.98	3.76	94.47
3	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam yang ditetapkan dalam RPIK	Persen	20.00	20.00	100.00
4	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri	Persen	1.95	1.13	57.95
5	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Persen	70.00	85.00	100.00
6	**Transmigrasi**				
1	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang Dibina	Lokasi	1	4	100.00
1	**Sekretariat Daerah**				
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	C	CC	50.00
2	Tingkat Layanan Administrasi Umum	Persen	100	92	92.00
3	Persentase Produk Hukum dan Informasi Hukum Daerah yang Berkualitas	Persen	100	100	100.00
4	Rasio Elektritifikasi	Persen	82.00	70.11	85.55
5	Persentase Desa Teraliri Listrik	Persen	98.00	98.27	100.28
2	**Sekretariat DPRD**				
1	Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Rencana Tahunan (RKPD) yang Terintegrasi dengan Program- Program Kerja DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda dan Anggaran	Status	Tersedia	Tersedia	100.00
2	Perencanaan dan Anggaran Setwan DPRD yang Terintegrasi dengan Program-Program DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda dan Anggaran	Status	Tersedia	Tersedia	100.00
3	Tersedianya Rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD Kabupaten	Status	Tersedia	Tidak Tersedia	0.00
1	**Perencanaan**				
1	RPJPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah	Status	Tersedia	Tersedia	100.00
2	RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah	Status	Tersedia	Tersedia	100.00
3	RKPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah	Status	Tersedia	Tersedia	100.00
4	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	Persen	100	91.08	91.08

5	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	Persen	100	100	100.00
6	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	Persen	100	100	100.00
7	Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan (RPJMD, RKPD, Renstra)	Persen	100	100	100.00
8	Persentase pencapaian target program pembangunan daerah	Persen	100	92.36	92.36
2	**Keuangan**				
1	Persentase ketepatan waktu penyusunan RAPBD dan Perubahan RAPBD	Persen	100	100	100.00
2	Persentase Kesesuaian Data Rincian Total BMD dengan Aktiva Tetap di Neraca Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100.00
3	Persentase ketercapaian target pendapatan daerah	Persen	95.37	85.29	89.43
4	Rasio PAD terhadap Pendapatan daerah	Persen	3.18	3.82	100.00
5	Rasio belanja modal terhadap total belanja Daerah	Persen	30.27	28.34	93.62
3	**Kepegawaian**				
1	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis	Persen	9.15	11.70	100.00
2	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pelatihan kepemimpinan	Persen	21.98	36.72	100.00
3	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Persen	70.00	70.50	100.00
4	**Pendidikan dan pelatihan**				
1	Persentase CASN yang Lulus Pelatihan Dasar Formasi Umum	Persen	100	100	100.00
5	**Penelitian dan Pengembangan**				
1	Indeks Inovasi Pemerintah daerah	Predikat	Sangat Inovatif	Inovatif	50.00
2	Persentase Implementasi Rencana kelitbangan	Persen	85.70	87.50	100.00
3	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	Persen	80.00	82.00	100.00
4	Persentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah	Persen	100	100	100.00
5	Persentase kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah	Persen	90.00	90.00	100.00
1	**Inspektorat**				
1	Persentase Tindak Lanjut Temuan	Persen	90.00	97.00	100.00
2	Persentase Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan pada objek pemeriksaan	Persen	75.00	100.00	100.00
3	Persentase Pendampingan dan Asistensi APIP	Persen	100	100	100.00

4	Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti	persen	100	100	100.00
1	**Kecamatan**				
1	Presentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat serta Pelayanan Administrasi di tingkat Kecamatan dan Kelurahan/Pekon	Persen	100	99	99.00
2	Presentase Peran dan Partisipasi Lembaga dan Organisasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan/Pekon	Persen	80.00	99.00	100.00
3	Presentase Linmas (Perlindungan Masyarakat) dan Masyarakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal	Persen	100	90	90.00
1	**Kesatuan Bangsa dan Politik**				
1	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persen	46.00	82.70	100.00
2	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu	Persen	84.08	84.08	100.00
3	Persentase SDM yang Mempunyai Kemampuan Deteksi Dini, Cegah Dini dan Tangkal Dini terhadap Kerawanan Konflik Sosial	Persen	70.00	100.00	100.00

Sumber: Bappelitbangda, 2023

14. Berdasarkan pada pencapaian evaluasi RKPD Tahun 2022, beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam proses penyusunan evaluasi, antara lain:

    a. Perlunya menjaga konsistensi antara dokumen perencanaan dan penganggaran RKPD dengan Renja Perangkat Daerah, hingga nantinya pada dokumen penganggaran daerah dan perangkat daerah;

    b. Dalam penetapan target kinerja yang akan dicapai pada setiap program, kegiatan, sub kegiatan pada Renja perangkat daerah agar memperhatikan satuan output pada dokumen perencanaan tahunan maupun lima tahunan, Renja Perangkat Daerah maupun Renstra Perangkat Daerah. Termasuk penentuan output yang terukur dan saling terkait dengan dokumen perencanaan pembangunan yang lainnya;

    c. Asumsi dan proyeksi pendapatan daerah baik berupa transfer pusat, pendapatan asli daerah dan sumber pendapatan lainnya pada periode mendatang sebaiknya dapat diukur secermat mungkin dengan memperhatikan berbagai faktor yang mempengaruhinya. Dengan demikian, penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran dapat lebih akurat, efektif dan efisien;

d. Penyusunan dan/atau penambahan belanja program, kegiatan dan sub kegiatan pada perangkat daerah untuk percepatan pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan;

f. Sebagai salah satu bagian dalam siklus manajemen, tahap pengendalian evaluasi menjadi hal yang penting untuk diperhatikan agar terwujud satu kesatuan manajemen perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan program-program pembangunan yang efektif dan efisien dengan tujuan akhir terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

15. Berdasarkan pada permasalahan hasil RKPD Tahun 2022 yang telah dipaparkan di atas serta berbagai kendala yang dihadapi, beberapa rekomendasi yang dapat disampaikan sebagai berikut:

a. Perlunya menjaga konsistensi antara dokumen perencanaan dan penganggaran RKPD dengan Renja Perangkat Daerah, hingga nantinya pada dokumen penganggaran daerah dan perangkat daerah;

b. Dalam penetapan target kinerja yang akan dicapai pada setiap program, kegiatan, sub kegiatan pada Renja perangkat daerah agar memperhatikan satuan *output* pada dokumen perencanaan tahunan maupun lima tahunan, Renja Perangkat Daerah maupun Renstra Perangkat Daerah. Termasuk penentuan *output* yang terukur dan saling terkait dengan dokumen perencanaan pembangunan yang lainnya;

c. Asumsi dan proyeksi pendapatan daerah baik berupa transfer pusat, pendapatan asli daerah dan sumber pendapatan lainnya pada periode mendatang sebaiknya dapat diukur secermat mungkin dengan memperhatikan berbagai faktor yang mempengaruhinya. Dengan demikian, penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran dapat lebih akurat, efektif dan efisien;

d. Penyusunan dan/atau penambahan belanja program, kegiatan dan sub kegiatan pada perangkat daerah untuk percepatan pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan;

e. Sebagai salah satu bagian dalam siklus manajemen, tahap pengendalian evaluasi menjadi hal yang penting untuk diperhatikan agar terwujud satu kesatuan manajemen perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan program-program pembangunan yang efektif dan efisien dengan tujuan akhir terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

16. Dalam rangka peningkatan kemampuan pendanaan daerah, beberapa hal yang dapat dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai berikut:

a. Peningkatan kinerja perangkat daerah yang memiliki kewajiban dalam pemungutan pendapatan asli daerah, khususnya pajak daerah dan retribusi daerah;

b. Peningkatan koordinasi, konsultasi dan fasilitasi dalam upaya meningkatkan sumber pendapatan dari pendapatan transfer pemerintah pusat dan pemerintah provinsi;

c. Mencari sumber pendapatan lain di luar APBD Kabupaten, khususnya investasi rill dunia usaha.

17. Dalam rangka pelaksanaan evaluasi hasil RKPD, seluruh perangkat daerah diharapkan dapat melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin atas capaian kinerja dan penyerapan anggaran pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah tahun berjalan, serta perlu koordinasi dan pengawasan Kepala Perangkat Daerah kepada staf yang bertanggungjawab terkait pelaporan evaluasi renja di tiap triwulannya. Karena evaluasi hasil RKPD adalah salah satu bagian penting pada proses perencanaan, apabila tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam menyampaikan laporan evaluasi renja rendah, akan menghambat proses perencanaan kedepannya;

18. Agar pada saat penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran menjaga konsistensi indikator kinerja yang telah ditetapkan pada RPJMD dan Renstra serta berpedoman pada Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

19. Beberapa kendala dalam pencapaian kinerja program/kegiatan/sub kegiatan yang disampaikan oleh masing-masing perangkat daerah diharapkan menjadi acuan tindak lanjut serta dasar perencanaan pembangunan daerah tahun berikutnya.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022 disajikan secara lengkap pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.184 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Pesisir Barat

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
I		**Urusan Wajib Pelayanan Dasar**																	
1		**Pendidikan**			859,729,287,255		151,613,506,094		181,695,566,985		157,972,030,380		86.94%		157,972,030,380		18.37%	Dinas P dan K	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	95%	645,100,091,127	90%	115,482,936,645	90%	140,007,420,725	90.00%	117,388,512,085	100.00%	83.84%	90.0%	117,388,512,085	94.74%	18.20%	Dinas P dan K	
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	100%	32,877,747	100%	6,400,000	100%	6,400,000	100%	6,400,000	100.00%	100.00%	100.0%	6,400,000	100.00%	19.47%	Dinas P dan K	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	7,192,007	2 Dokumen	1,400,000	2 Dokumen	1,400,000	2 Dokumen	1,400,000	100.00%	100.00%	2 Dokumen	1,400,000	20.00%	19.47%	Dinas P dan K	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	10 Dokumen	25,685,740	2 Dokumen	5,000,000	2 Dokumen	5,000,000	2 Dokumen	5,000,000	100.00%	100.00%	2 Dokumen	5,000,000	20.00%	19.47%	Dinas P dan K	
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu	100%	619,542,934,116	100%	113,630,219,422	100%	134,421,242,725	100%	114,226,217,512	100.00%	84.98%	100%	114,226,217,512	100.00%	18.44%	Dinas P dan K	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	60 Bulan	619,514,679,802	14 Bulan	113,624,719,422	14 Bulan	134,415,742,725	14 Bulan	114,220,717,512	100.00%	84.98%	1 Dokumen	114,220,717,512	1.67%	18.44%	Dinas P dan K	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Laporan Akhir Tahun	5 Dokumen	12,842,870	1 Dokumen	2,500,000	1 Dokumen	2,500,000	1 Dokumen	2,500,000	100.00%	100.00%	2 Dokumen	2,500,000	40.00%	19.47%	Dinas P dan K	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran	10 Dokumen	10,274,296	2 Dokumen	2,000,000	2 Dokumen	2,000,000	2 Dokumen	2,000,000	100.00%	100.00%	1 Dokumen	2,000,000	10.00%	19.47%	Dinas P dan K	
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersusunnya Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	5 Dokumen	5,137,148	1 Dokumen	1,000,000	1 Dokumen	1,000,000	1 Dokumen	1,000,000	100.00%	100.00%	2 Urusan	1,000,000	40.00%	19.47%	Dinas P dan K	
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah bidang urusan yang dilaksanakan	2 Urusan	22,449,336,607	2 Urusan	1,319,050,000	2 Urusan	4,885,000,000	2 Urusan	2,468,100,000	100.00%	50.52%	.5 Tahun	2,468,100,000	25.00%	10.99%	Dinas P dan K	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Meningkatkan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	5 Tahun	22,449,336,607	1 Tahun	1,319,050,000	1 Tahun	4,885,000,000	.5 Tahun	2,468,100,000	50.00%	50.52%	.5 Tahun	2,468,100,000	10.00%	10.99%	Dinas P dan K	
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja	100%	2,201,822,715	100%	368,214,650	100%	524,556,000	100%	523,454,373	100.00%	99.79%	100%	523,454,373	100.00%	23.77%	Dinas P dan K	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik Bangunan Kantor	5 Tahun	8,424,923	1 Tahun	1,640,000	1 Tahun	1,640,000	1.0 Tahun	1,606,500	100.00%	97.96%	1 Tahun	1,606,500	20.00%	19.07%	Dinas P dan K	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Jasa Propaganda, Pameran dan Publikasi	5 Kali	436,657,577	1 Kali	-	1 Kali	85,000,000	1 Kali	84,900,000	100.00%	99.88%	1 Kali	84,900,000	20.00%	19.44%	Dinas P dan K	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya Barang catak dan Pengadaan Serta terpenuhinya Kebutuan Alat tulis kantor Rutin	60 Bulan	354,298,821	12 Bulan	124,408,000	12 Bulan	94,916,000	12 Bulan	94,391,520	100.00%	99.45%	12 Bulan	94,391,520	20.00%	26.64%	Dinas P dan K	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	60 Bulan	61,645,776	12 Bulan	12,000,000	12 Bulan	12,000,000	12 Bulan	12,000,000	100.00%	100.00%	12 Bulan	12,000,000	20.00%	19.47%	Dinas P dan K	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Makanan dan minum Kantor	55 Bulan	56,508,628	11 Bulan	11,000,000	11 Bulan	11,000,000	11 Bulan	11,000,000	100.00%	100.00%	11 Bulan	11,000,000	20.00%	19.47%	Dinas P dan K	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi Dalam dan Luar Daerah	60 Bulan	1,284,286,991	12 Bulan	219,166,650	12 Bulan	320,000,000	12 Bulan	319,556,353	100.00%	99.86%	12 Bulan	319,556,353	20.00%	24.88%	Dinas P dan K	
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Layanan Pendukung	100%	430,914,246	100%	73,962,573	100%	84,142,000	100%	78,295,200	100.00%	93.05%	100%	78,295,200	100.00%	18.17%	Dinas P dan K	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	60 Bulan	110,962,396	12 Bulan	11,680,573	12 Bulan	21,600,000	12 Bulan	15,753,200	100.00%	72.93%	12 Bulan	15,753,200	20.00%	14.20%	Dinas P dan K	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Sewa Gedung Kantor, Rumah Dinas dan Kendaraan Dinas	60 Bulan	292,817,434	12 Bulan	57,000,000	12 Bulan	57,000,000	12 Bulan	57,000,000	100.00%	100.00%	12 Bulan	57,000,000	20.00%	19.47%	Dinas P dan K	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terciptanya Kebersihan Kantor	60 Bulan	27,134,416	12 Bulan	5,282,000	12 Bulan	5,542,000	12 Bulan	5,542,000	100.00%	100.00%	12 Bulan	5,542,000	20.00%	20.42%	Dinas P dan K	
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dalam kondisi baik	100%	442,205,697	100%	85,090,000	100%	86,080,000	100%	86,045,000	100.00%	99.96%	100%	86,045,000	100.00%	19.46%	Dinas P dan K	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	60 Bulan	436,657,577	12 Bulan	84,990,000	12 Bulan	85,000,000	12 Bulan	84,965,000	100.00%	99.96%	12 Bulan	84,965,000	20.00%	19.46%	Dinas P dan K	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	60 Bulan	5,548,120	12 Bulan	100,000	12 Bulan	1,080,000	12 Bulan	1,080,000	100.00%	100.00%	12 Bulan	1,080,000	20.00%	19.47%	Dinas P dan K	
		Program Pengelolaan Pendidikan	Cakupan Pemenuhan SPM Bidang Pendidikan	100%	214,629,196,127	54.92%	36,130,569,449	100%	41,688,146,260	64.08%	40,583,518,295	64.08%	97.35%	64.08%	40,583,518,295	64.08%	18.91%	Dinas P dan K	
		Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka partisipasi kasar SD	93.57%	122,132,228,108	91.05%	21,006,361,357	91.57%	28,158,429,260	108.85%	27,240,707,766	100.00%	96.74%	100.00%	27,240,707,766	100.00%	22.30%	Dinas P dan K	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang direhab	25 Ruang	23,750,598,720	1 Ruang	4,166,057,557	5 Ruang	8,663,527,010	5 Ruang	8,659,843,920	100.00%	99.96%	5 Ruang	8,659,843,920	20.00%	36.46%	Dinas P dan K	
		Pengadaan Perlengkapan Siswa	Tersedianya perlengkapan Siswa SD	17,963 Siswa	929,585,250			17,963 Siswa	929,585,250	17,963 Siswa	915,624,406	100.00%	98.50%	17,963 Siswa	915,624,406	100.00%	98.50%	Dinas P dan K	
		Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Kegiatan	20 Kali	556,782,452	4 Kali	155,917,800	4 Kali	133,218,000	4 Kali	131,594,000	100.00%	98.78%	4 Kali	131,594,000	20.00%	23.63%	Dinas P dan K	
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Murni SD	82.27%	96,895,261,687	79.77%	16,684,386,000	80,27%	18,432,099,000	99,87%	17,533,645,440	100.00%	95.13%	99,87%	17,533,645,440	99,87%	18.10%	Dinas P dan K	
		Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka partisipasi kasar SMP	92.16%	80,589,030,949	92.08%	12,962,100,368	92.08%	10,929,108,000	86.81%	10,742,284,729	94.28%	98.29%	86,81%	10,742,284,729	86,81%	13.33%	Dinas P dan K	
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah dibangun	25 Ruang	45,341,727,818	1 Ruang	5,434,163,368	5 Ruang	2,507,820,000	5 Ruang	2,505,847,330	100.00%	99.92%	5 Ruang	2,505,847,330	20.00%	5.53%	Dinas P dan K	
		Pengadaan Perlengkapan Siswa	Tersedianya perlengkapan Siswa SMP	6,364 Siswa	329,337,000			6,364 Siswa	329,337,000	6,364 Siswa	324,390,899	100.00%	98.50%	6,364 Siswa	324,390,899	100.00%	98.50%	Dinas P dan K	
		Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Kegiatan	20 Kali	485,169,369	4 Kali	142,770,000	4 Kali	96,840,000	4 Kali	95,668,000	100.00%	98.79%	4 Kali	95,668,000	20.00%	19.72%	Dinas P dan K	
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Murni SMP	70.75%	34,432,796,762	70.25%	7,385,167,000	70.25%	7,995,111,000	81.48%	7,816,378,500	100.00%	97.76%	81.48%	7,816,378,500	81.48%	22.70%	Dinas P dan K	
		Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka partisipasi kasar PAUD	75.00%	10,682,989,624	70.00%	1,917,607,724	71.00%	2,327,609,000	54%	2,327,525,800	76.58%	100.00%	54,37%	2,327,525,800	54,37%	21.79%	Dinas P dan K	
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah dibangun	10 Ruang	1,487,617,261	1 Ruang	82,207,724	2 Ruang	283,839,000	2 Ruang	283,755,800	100.00%	99.97%	2 Ruang	283,755,800	20.00%	19.07%	Dinas P dan K	
		Pengelolaan Dana BOP PAUD	Angka Partisipasi Kasar PAUD	75.00%	9,195,372,363	70.00%	1,835,400,000	71.00%	2,043,770,000	54.37%	2,043,770,000	76.58%	100.00%	54%	2,043,770,000	77%	22.23%	Dinas P dan K	
		Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Warga negara dalam pendidikan kesetaraan	325 Orang	1,224,947,446	325 Orang	244,500,000	325 Orang	273,000,000	325 Orang	273,000,000	100.00%	100.00%	325 Orang	273,000,000	100.00%	22.29%	Dinas P dan K	
		Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal /Kesetaraan	Jumlah PKBM	2 PKBM	1,224,947,446	2 PKBM	244,500,000	2 PKBM	273,000,000	2 PKBM	273,000,000	100.00%	100.00%	2 PKBM	273,000,000	100.00%	22.29%	Dinas P dan K	
2	1.1.02	**Kesehatan**																	
	1.1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Dinas Kesehatan (%) Kesehatan	95	172,418,626,579	95	137,389,706,518	90	33,050,219,200	90	25,633,038,436	100.00%	77.56%	90	25,633,038,436	94.74	14.87	Dinas Kesehatan	
	1.1.02.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Pada Dinas Kesehatan (%)	95	131,528,439	95	130,070,000	90	28,909,000	90	28,909,000	100.00%	100.00%	90	28,909,000	94.74	21.98	Dinas Kesehatan	
	1.1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD (dokumen)	5	40,311,411	5	40,014,000	1	12,005,600	1	12,005,600	100.00%	100.00%	1	12,005,600	20.00	29.78	Dinas Kesehatan	
	1.1.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (laporan)	5	25,322,308	5	25,000,000	1	3,892,200	1	3,892,200	100.00%	100.00%	1	3,892,200	20.00	15.37	Dinas Kesehatan	
	1.1.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Akuntabilitas SKPD Dokumen Perjanjian Kinerja SKPD Dokumen Rencana Kerja Tahunan dokumen Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan (laporan)	20	65,894,720	20	65,056,000	1	13,011,200	1	13,011,200	100.00%	100.00%	1	13,011,200	5.00	19.75	Dinas Kesehatan	
	1.1.02.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Pada Dinas Kesehatan (%)	95	166,635,424,996	95	132,671,644,228	90	31,843,437,600	90	24,527,935,839	100.00%	77.03%	90	24,527,935,839	94.74	14.72	Dinas Kesehatan	
	1.1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Layanan Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS (bulan)	70	166,607,567,926	70	132,644,144,228	14	31,837,937,600	14	24,522,435,839	100.00%	77.02%	14	24,522,435,839	20.00	14.72	Dinas Kesehatan	
	1.1.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan (laporan)	5	12,663,687	5	12,500,000	1	2,500,000	1	2,500,000	100.00%	100.00%	1	2,500,000	20.00	19.74	Dinas Kesehatan	
	1.1.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan bulanan/ triwulan /semesteran SKPD (laporan)	10	10,128,922	10	10,000,000	2	2,000,000	2	2,000,000	100.00%	100.00%	2	2,000,000	20.00	19.75	Dinas Kesehatan	
	1.1.02.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran (laporan)	5	5,064,461	5	5,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	100.00%	100.00%	1	1,000,000	20.00	19.75	Dinas Kesehatan	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.1.02.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	95	2,955,060,156	95	2,929,506,579	90	493,052,600	90	492,720,139	100.00%	99.93%	90	492,720,139	94.74	16.67	Dinas Kesehatan	
	1.1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik (bulan)	60	28,188,794	60	26,658,600	12	5,566,000	12	5,534,800	100.00%	99.44%	12	5,534,800	20.00	19.63	Dinas Kesehatan	
	1.1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Kegiatan (kegiatan)	5	126,611,536	4	100,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	100.00%	100.00%	1	25,000,000	20.00	19.75	Dinas Kesehatan	
	1.1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah ATK, Cetak dan Penggandaan (bulan)	60	554,490,661	60	520,490,482	12	144,486,600	12	144,486,600	100.00%	100.00%	12	144,486,600	20.00	26.06	Dinas Kesehatan	
	1.1.02.01.2.06.07	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah SKHU (bulan)	60	822,655,512	60	457,095,296	12	12,000,000	12	12,000,000	100.00%	100.00%	12	12,000,000	20.00	1.46	Dinas Kesehatan	
	1.1.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Layanan Jasa Penyediaaan Makanan dan Minuman (bulan)	55	55,709,075	55	54,976,000	11	11,000,000	11	10,976,000	100.00%	99.78%	11	10,976,000	20.00	19.70	Dinas Kesehatan	
	1.1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi di luar kantor (dalam daerah dan Luar Daerah) (bulan)	60	1,367,404,578	60	1,770,286,201	12	295,000,000	12	294,723,339	100.00%	99.91%	12	294,723,339	20.00	21.55	Dinas Kesehatan	
	1.1.02.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	95	1,717,672,860	95	1,485,690,207	90	339,162,000	90	252,444,458	100.00%	74.43%	90	252,444,458	94.74	14.70	Dinas Kesehatan	
	1.1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Tagihan (bulan)	60	624,954,536	60	335,737,751	12	123,400,000	12	61,682,458	100.00%	49.99%	12	61,682,458	20.00	9.87	Dinas Kesehatan	
	1.1.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Sewa Kantor/Gudang/ Rumah Dinas/Kendaraan Operasional dan Kendaraan Dinas/Operasional (bulan)	60	1,048,343,511	60	1,108,000,000	12	207,000,000	12	182,000,000	100.00%	87.92%	12	182,000,000	20.00	17.36	Dinas Kesehatan	
	1.1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Alat Kebersihan Kantor (bulan)	60	44,374,813	60	41,952,456	12	8,762,000	12	8,762,000	100.00%	100.00%	12	8,762,000	20.00	19.75	Dinas Kesehatan	
	1.1.02.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	95	2,257,017,740	90	1,446,005,960	90	345,658,000	90	331,029,000	100.00%	95.77%	90	331,029,000	94.74	14.67	Dinas Kesehatan	
	1.1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang Dipelihara (unit)	75	2,071,658,452	75	1,322,747,960	15	309,058,000	15	295,029,000	100.00%	95.46%	15	295,029,000	20.00	14.24	Dinas Kesehatan	
	1.1.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor (%)	100	185,359,288	100	123,258,000	100	36,600,000	100	36,600,000	100.00%	100.00%	100	36,600,000	100.00	19.75	Dinas Kesehatan	
	1.1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Terlaksananya Cakupan Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan (%)	100	272,680,510,604	100	176,725,763,501	100	50,053,356,082	100	42,864,953,401	100.00%	85.64%	100	42,864,953,401	100.00	15.72	Dinas Kesehatan	
	1.1.02.02.2.01	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Terlaksananya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (%)	100	63,283,896,095	100	71,455,704,290	100	13,423,698,400	100	11,777,932,811	100.00%	87.74%	100	11,777,932,811	100.00	18.61	Dinas Kesehatan	
	1.1.02.02.2.01.10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana, Prasarana fasilitas kesehatan yang dipelihara (%)	100	8,179,926,700	100	23,540,368,357	100	4,677,809,000	100	4,620,077,350	100.00%	98.77%	100	4,620,077,350	100.00	56.48	Dinas Kesehatan	
	1.1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah prasarana yang dibeli (%)	100	10,445,328,237	100	8,045,441,215	100	3,739,920,400	100	2,698,148,000	100.00%	72.14%	100	2,698,148,000	100.00	25.83	Dinas Kesehatan	
	1.1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan dan alat penunjang yang tersedia sesuai dengan kebutuhan (%)	100	19,373,746,149	100	17,281,383,182	100	482,831,000	100	479,167,229	100.00%	99.24%	100	479,167,229	100.00	2.47	Dinas Kesehatan	
	1.1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah obat dan vaksin yang tersedia sesuai dengan kebutuhan (faskes)	12	12,783,039,863	12	10,407,173,177	12	3,216,724,898	12	2,739,048,940	100.00%	85.15%	12	2,739,048,940	100.00	21.43	Dinas Kesehatan	
	1.1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah bahan habis pakai yang tersedia sesuai dengan kebutuhan (Fasyankes)	12	12,501,855,146	12	12,181,338,359	12	1,306,413,102	12	1,241,491,292	100.00%	95.03%	12	1,241,491,292	100.00	9.93	Dinas Kesehatan	
	1.1.02.02.2.02	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (%)	100	206,797,209,111	100	104,414,097,937	100	36,242,022,782	100	30,851,891,750	100.00%	85.13%	100	30,851,891,750	100.00	14.92	Dinas Kesehatan	
	1.1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah peserta pelatihan penurunan AKI dan AKB dan Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) (DAK Non Fisik) (RTK / Kasus)	20	6,729,853,902	19	3,506,777,508	4	369,582,000	4	293,487,900	100.00%	79.41%	4	293,487,900	20.00	4.36	Dinas Kesehatan	
	1.1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Peningkatan Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap, Imunisasi Lanjutan, dan Investigasi KIPI (%)	100	347,769,201	100	342,682,220	100	75,591,400	100	71,908,400	100.00%	95.13%	100	71,908,400	100.00	20.68	Dinas Kesehatan	
	1.1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah peserta pelatihan (petugas)	165	161,042,543	165	139,645,540	33	29,679,000	33	27,604,000	100.00%	93.01%	33	27,604,000	20.00	17.14	Dinas Kesehatan	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Kasus Gizi Buruk,Balita KEP,Bumil KEK,Bumil Anemia Berat Ditemukan Serta Di Tanggulangi (kasus)	75	664,351,634	73	456,716,200	15	469,034,900	15	414,651,900	100.00%	88.41%	15	414,651,900	20.00	62.41	Dinas Kesehatan	
	1.1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah desa dengan rumah yang memiliki Jamban Sendiri (Pekon)	100	1,565,926,625	95	1,093,986,330	20	37,812,000	20	34,136,760	100.00%	90.28%	20	34,136,760	20.00	2.18	Dinas Kesehatan	
	1.1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Media Promosi Kesehatan yang di gunakan (unit media)	1025	820,846,530	1070	1,426,141,100	420	126,997,400	220	33,750,000	52.38%	26.58%	220	33,750,000	21.46	4.11	Dinas Kesehatan	
	1.1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Sampel yang menjadi locus wabah/ KLB (%)	100	270,954,530	5	187,638,300	1	172,236,400	1	156,664,480	100.00%	90.96%	1	156,664,480	1.00	57.82	Dinas Kesehatan	
	1.1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	jumlah jemaah haji (orang)	365	1,987,110,075	343	774,664,122	73	94,749,000	73	75,371,900	100.00%	79.55%	73	75,371,900	20.00	3.79	Dinas Kesehatan	
	1.1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	jumlah Penderita Penyakit Menular Bersumber Hewan, Penyakit Menular Lainnya dan PTM (%)	100	1,402,965,481	100	4,804,548,998	100	393,987,800	100	371,688,550	100.00%	94.34%	100	371,688,550	100.00	26.49	Dinas Kesehatan	
	1.1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Peserta PBI, Peserta Monev, Anggaran INA-CBGs, dan Non Kapitasi (bulan)	60	119,762,188,779	60	43,382,359,649	12	21,146,926,719	12	18,208,668,956	100.00%	86.11%	12	18,208,668,956	20.00	15.20	Dinas Kesehatan	
	1.1.02.02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah biaya operasional RS (%)	100	27,525,422,080	100	17,353,654,738	100	4,100,000,000	100	3,320,512,316	100.00%	80.99%	100	3,320,512,316	100.00	12.06	Dinas Kesehatan	
	1.1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	jumlah biaya Operasional Puskesmas dan kegiatan BOK (Puskesmas)	11	38,596,290,908	11	28,167,306,456	11	8,679,255,363	11	7,552,034,285	100.00%	87.01%	11	7,552,034,285	100.00	19.57	Dinas Kesehatan	
	1.1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah lokasi pendistribusian obat (fasyankes)	12	510,556,789	12	353,235,718	12	267,896,000	12	252,896,253	100.00%	94.40%	12	252,896,253	100.00	49.53	Dinas Kesehatan	
	1.1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah RSUD dan Puskesmas yang akan dilakukan akredtiasi/Reakreditasi (Fasyankes)	30	6,239,984,829	16	1,954,577,558	6	239,214,800	6	2,291,200	100.00%	0.96%	6	2,291,200	20.00	0.04	Dinas Kesehatan	
	1.1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah kasus Wabah (dokumen)	5	211,945,205	5	470,163,500	1	39,060,000	1	36,224,850	100.00%	92.74%	1	36,224,850	20.00	17.09	Dinas Kesehatan	
	1.1.02.02.2.03	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi (%)	100	2,599,405,398	100	855,961,274	100	387,634,900	100	235,128,840	100.00%	60.66%	100	235,128,840	100.00	9.05	Dinas Kesehatan	
	1.1.02.02.2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Tersedianya Penyusunan Data Cakupan Pelayanan Kesehatan Kabupaten Dalam Profil Kesehatan dan ASPAK (dokumen)	225	928,630,379	260	683,698,000	45	173,408,000	45	104,263,800	100.00%	60.13%	45	104,263,800	20.00	11.23	Dinas Kesehatan	
	1.1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Tersedianya Data Kesehatan Secara Terintegrasi di Tingkat Puskesmas dan Pustu Berdasarkan Aplikasi (dokumen)	50	1,670,775,019	10	172,263,274	10	214,226,900	10	130,865,040	100.00%	61.09%	10	130,865,040	20.00	7.83	Dinas Kesehatan	
	1.1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan (%)	100	24,624,814,815	100	16,613,612,878	100	115,602,600	100	95,511,800	100.00%	82.62%	100	95,511,800	100.00	0.39	Dinas Kesehatan	
	1.1.02.03.2.01	Kegiatan Pemberian Izin Praktek Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Tersedianya Izin Praktek Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota (%)	100	230,566,071	100	200,942,884	100	29,308,000	100	29,250,800	100.00%	99.80%	100	29,250,800	100.00	12.69	Dinas Kesehatan	
	1.1.02.03.2.01.01	Pengedalian Perizinan Praktek Tenaga Kesehatan	jumlah Perizinan Tenaga Kesehatan yang diperiksa (Dokumen)	1175	230,566,071	1135	200,942,884	235	29,308,000	235	29,250,800	100.00%	99.80%	235	29,250,800	20.00	12.69	Dinas Kesehatan	
	1.1.02.03.2.02	Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Tersedianya Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota (%)	100	24,394,248,744	100	16,412,669,994	100	86,294,600	100	66,261,000	100.00%	76.78%	100	66,261,000	100.00	0.27	Dinas Kesehatan	
	1.1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Analisis Jabatan dan Beban Kerja serta penyedian tenaga kontrak (Dokumen)	5	24,029,704,237	4	16,342,669,994	1	46,294,600	1	46,261,000	100.00%	99.93%	1	46,261,000	20.00	0.19	Dinas Kesehatan	
	1.1.02.03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumberdaya Manusia Kesehatan	Tersedianya Dana Hibah Untuk Organisasi PPNI, IBI dan YJI (organisasi)	10	364,544,507	2	70,000,000	2	40,000,000	1	20,000,000	50.00%	50.00%	1	20,000,000	10.00	5.49	Dinas Kesehatan	
	1.1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Tingkat Pengawasan dan Tindaklanjut terhadap Perizinan Usaha (%)	100	1,648,312,598	100	432,255,480	100	235,231,000	100	224,830,282	100.00%	95.58%	100	224,830,282	100.00	13.64	Dinas Kesehatan	
	1.1.02.04.2.01	Kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Terlaksanany Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (%)	100	20,075,904	100	39,862,000	100	19,931,000	100	17,829,000	100.00%	89.45%	100	17,829,000	100.00	88.81	Dinas Kesehatan	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.1.02.04.2.01.01	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang didperiksa (apotek/toko obat)	70	20,075,904	11	39,862,000	14	19,931,000	14	17,829,000	100.00%	89.45%	14	17,829,000	20.00	88.81	Dinas Kesehatan	
	1.1.02.04.2.03	Kegiatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Terlaksananya Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga (%)	100	1,051,085,558	0	-	100	50,000,000	100	48,444,000	100.00%	96.89%	100	48,444,000	100.00	4.61	Dinas Kesehatan	
	1.1.02.04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Terlaksananya Pengawasan dan Keamanan Makanan dan Minuman (PIRT)	125	1,051,085,558	0	-	25	50,000,000	25	48,444,000	100.00%	96.89%	25	48,444,000	20.00	4.61	Dinas Kesehatan	
	1.1.02.04.2.04	Kegiatan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Terlaksnanya Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) (%)	100	577,151,136	100	392,393,480	100	165,300,000	100	158,557,282	100.00%	95.92%	100	158,557,282	100.00	27.47	Dinas Kesehatan	
	1.1.02.04.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Sampel Sumber Air Sesuai Baku Mutu Kesehatan (sampel)	300	577,151,136	280	392,393,480	60	165,300,000	60	158,557,282	100.00%	95.92%	60	158,557,282	20.00	27.47	Dinas Kesehatan	
	1.1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Puskesmas/Fasilitas Kesehatan yang Melaksanakan Kegiatan Promotif dan Preventif (%)	100	10,566,763,146	100	5,856,325,446	100	350,243,000	100	300,649,500	100.00%	85.84%	100	300,649,500	100.00	2.85	Dinas Kesehatan	
	1.1.02.05.2.02	Kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas/Fasilitas Kesehatan yang Melaksanakan Kegiatan Promotif dan Preventif (%)	100	10,566,763,146	100	5,856,325,446	100	350,243,000	100	300,649,500	100.00%	85.84%	100	300,649,500	100.00	2.85	Dinas Kesehatan	
	1.1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Terlaksananya Upaya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) (DAK Non Fisik BOK Kabupaten) (%)	100	10,566,763,146	100	5,856,325,446	100	350,243,000	100	300,649,500	100.00%	85.84%	100	300,649,500	100.00	2.85	Dinas Kesehatan	
			Terlaksananya Akselerasi Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) (DAK Non Fisik BOK Kabupaten) (%)																
			Terlaksananya Upaya Kesehatan Lanjut Usia (DAK Non Fisik BOK Kabupaten) (%)																
3		**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**																	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95	27,806,086,122	90	21,385,479,121	90	5,240,526,047	90	4,616,890,032	100.00%	88.10%		26,002,369,153		93.51	Dinas PU dan PR	
		KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	95	117,184,869	90	37,009,000	90	19,109,000	90	19,108,390	100.00%	100.00%		56,117,390		47.89	Dinas PU dan PR	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	61,410,000	3	17,900,000	1	10,000,000	1	9,999,950	100.00%	100.00%	1	27,899,950	20	45.43	Dinas PU dan PR	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	55,774,869	3	19,109,000	1	9,109,000	1	9,108,440	100.00%	99.99%	1	28,217,440	20	50.59	Dinas PU dan PR	
		KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	95	16,304,908,808	90	16,843,823,105	90	2,688,154,300	90	2,099,226,588	100.00%	78.09%		18,943,049,693		116.18	Dinas PU dan PR	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Layanan Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS	70	16,237,752,708	62	16,821,823,105	14	2,677,154,300	14	2,088,226,588	100.00%	78.00%	14	18,910,049,693	20	116.46	Dinas PU dan PR	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	30,525,500	3	10,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	100.00%	100.00%	1	15,000,000	20	49.14	Dinas PU dan PR	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10	24,420,400	4	8,000,000	2	4,000,000	2	4,000,000	100.00%	100.00%	2	12,000,000	20	49.14	Dinas PU dan PR	
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5	12,210,200	3	4,000,000	4	2,000,000	4	2,000,000	100.00%	100.00%	4	6,000,000	80	49.14	Dinas PU dan PR	
		KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	95	759,763,234	90	126,318,500	90	127,802,000	90	127,185,000	100.00%	99.52%		253,503,500		33.37	Dinas PU dan PR	
		Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	jumlah dokumen Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	60	759,763,234	12	126,318,500	12	127,802,000	12	127,185,000	100.00%	99.52%	12	253,503,500	20	33.37	Dinas PU dan PR	
		KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	95	864,761,160	90	101,900,000	90	200,000,000	90	198,500,000	100.00%	99.25%		300,400,000		34.74	Dinas PU dan PR	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti peningkatan kapasitas	60	500,000,000	24	101,900,000	12	200,000,000	12	198,500,000	100.00%	99.25%	12	300,400,000	20	60.08	Dinas PU dan PR	
		KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	95	2,441,304,251	90	1,785,040,402	90	816,929,747	90	813,060,943	100.00%	99.53%		2,598,101,345		106.42	Dinas PU dan PR	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik	60	49,634,463	60	23,498,000	12	18,126,000	12	18,126,000	100.00%	100.00%	12	41,624,000	20	83.86	Dinas PU dan PR	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	60	488,844,374	12	80,071,477	12	79,613,747	12	79,613,747	100.00%	100.00%	12	159,685,224	20	32.67	Dinas PU dan PR	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Aktivitas	60	604,510,000	60	156,310,360	12	25,000,000	12	24,999,500	100.00%	100.00%	12	181,309,860	20	29.99	Dinas PU dan PR	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	60	553,315,414	60	289,040,680	12	95,990,000	12	95,740,000	100.00%	99.74%	12	384,780,680	20	69.54	Dinas PU dan PR	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	60	150,000,000	60	148,617,000	12	360,000,000	12	357,080,000	100.00%	99.19%	12	505,697,000	20	337.13	Dinas PU dan PR	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi di luar kantor	60	595,000,000	60	1,087,502,885	12	238,200,000	12	237,501,696	100.00%	99.71%	12	1,325,004,581	20	222.69	Dinas PU dan PR	
		KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	95	1,404,477,090	90	357,584,000	90	400,000,000	90	375,800,000	100.00%	93.95%		733,384,000		52.22	Dinas PU dan PR	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin	37	498,212,000	37	357,584,000	15	400,000,000	15	375,800,000	100.00%	93.95%	15	733,384,000	40.54	147.20	Dinas PU dan PR	
		KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	95	2,379,421,008	90	683,020,380	90	468,731,000	90	468,285,000	100.00%	99.90%		1,151,305,380		48.39	Dinas PU dan PR	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Tagihan	60	427,357,000	60	223,103,000	12	106,200,000	12	105,754,000	100.00%	99.58%	72	328,857,000	120	76.95	Dinas PU dan PR	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60	1,582,516,200	44	268,000,000	12	262,000,000	12	262,000,000	100.00%	100.00%	56	530,000,000	93.333333	33.49	Dinas PU dan PR	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tagihan Jasa Pelayanan Umum Kantor	60	369,547,808	60	191,917,380	12	100,531,000	12	100,531,000	100.00%	100.00%	72	292,448,380	120	79.14	Dinas PU dan PR	
		KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	95	3,534,265,700	90	1,450,783,734	90	519,800,000	90	515,724,111	100.00%	99.22%		1,966,507,845		55.64	Dinas PU dan PR	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan	60	1,813,214,700	60	762,803,734	12	285,800,000	12	285,724,111	100.00%	99.97%	12	1,048,527,845	20	57.83	Dinas PU dan PR	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar	60	1,660,000,000	60	687,980,000	12	234,000,000	12	230,000,000	100.00%	98.29%	12	917,980,000	20	55.30	Dinas PU dan PR	
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Cakupan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air Daerah	50	45,269,103,738	27	26,249,958,692	30	7,327,363,007	18.06	6,399,172,223	60.20%	87.33%		32,649,130,915		72.12	Dinas PU dan PR	
		KEGIATAN PENGELOLAAN SDA DAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI PADA WILAYAH SUNGAI (WS) DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air Daerah	50	22,634,551,869	27	24,101,990,625	30	6,127,363,007	30	5,200,457,007	100.00%	84.87%		29,302,447,632		129.46	Dinas PU dan PR	
		Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Tersedianya Prasarana Pengaman Pantai	45	10,424,351,869	7	7,254,881,455	5	5,441,707,860	5	4,514,801,860	100.00%	82.97%	5	11,769,683,315	11.111111	112.91	Dinas PU dan PR	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Tersedianya Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	5	6,105,100,000	41	16,847,109,170	2	685,655,147	2	685,655,147	100.00%	100.00%	2	17,532,764,317	40	287.18	Dinas PU dan PR	
		KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DAERAH IRIGASI YANG LUASNYA DIBAWAH 100 Ha DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN / KOTA	Cakupan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air Daerah	50	22,634,551,869	27	2,147,968,067	30	1,200,000,000	30	1,198,715,216	100.00%	99.89%		3,346,683,283		14.79	Dinas PU dan PR	
		Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan	60	9,157,650,000	16	2,147,968,067	12	1,200,000,000	12	1,198,715,216	100.00%	99.89%	12	3,346,683,283	20	36.55	Dinas PU dan PR	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Penduduk yang Memiliki Akses terhadap Sumber Daya Air yang Sehat dan Aman	45	11,898,748,636	33	5,975,658,760	37.5	1,326,099,000	18.06	1,300,841,265	48.16%	98.10%		7,276,500,025		61.15	Dinas PU dan PR	
		KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penduduk yang Memiliki Akses terhadap Sumber Daya Air yang Sehat dan Aman	45	11,898,748,636	33	5,975,658,760	37.5	1,326,099,000	18.06	1,300,841,265	48.16%	98.10%		7,276,500,025		61.15	Dinas PU dan PR	
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Tersusunnya Dokumen Perencanaan PDAM	5	1,898,748,636	2	945,817,400	1	229,369,000	1	227,256,065	100.00%	99.08%	1	1,173,073,465	20	61.78	Dinas PU dan PR	
		Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Air Minum	3,850	10,000,000,000	478	5,029,841,360	375	1,096,730,000	375	1,073,585,200	100.00%	97.89%	375	6,103,426,560	9.7402597	61.03	Dinas PU dan PR	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman	80	10,257,421,636	63.3	2,400,867,000	65.3	5,866,328,000	18.06	5,805,244,040	27.66%	98.96%		8,206,111,040		80.00	Dinas PU dan PR	
		KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman	80	10,257,421,636	63.3	2,400,867,000	63.3	5,866,328,000	63.3	5,805,244,040	100.00%	98.96%		8,206,111,040		80.00	Dinas PU dan PR	
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah kabupaten /Kota	Tersedianya Laporan DED SPAL	5	2,406,572,920	2	450,000,000	3	949,159,000	3	938,762,040	100.00%	98.90%	3	1,388,762,040	60	57.71	Dinas PU dan PR	
		Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	Tersedianya Sistem Pengolahan Air Limbah dan MCK	1,500	7,850,848,716	125	1,950,867,000	475	4,917,169,000	475	4,866,482,000	100.00%	98.97%	475	6,817,349,000	31.666667	86.84	Dinas PU dan PR	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Pelayanan Sanitasi Sub Sektor Drainase Lingkungan	45	13,686,151,479	8	3,407,609,300	25	738,819,400	9.75	290,719,300	39.00%	39.35%		3,698,328,600		27.02	Dinas PU dan PR	
		KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE YANG TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN SUNGAI DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Sanitasi Sub Sektor Drainase Lingkungan	45	13,686,151,479		3,407,609,300	25	738,819,400	25	290,719,300	100.00%	39.35%		3,698,328,600		27.02	Dinas PU dan PR	
		Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Tersedianya Drainase Untuk Mengalirkan Genangan Air	113	13,686,151,479	17	3,407,609,300	2	738,819,400	2	290,719,300	100.00%	39.35%	2	3,698,328,600	1.7699115	27.02	Dinas PU dan PR	
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio Prasarana, Sarana dan Utilitas Dasar (PSU) Perkantoran Pemerintahan Daerah dalam Skala Mantap	90	513,119,588,315	51	228,981,149,870	55	93,112,206,992	69	86,167,662,690	100.00%	92.54%		315,148,812,560		61.42	Dinas PU dan PR	
		KEGIATAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DI WILAYAH DAERAH KABUPATEN/KOTA, PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG	Rasio Prasarana, Sarana dan Utilitas Dasar (PSU) Perkantoran Pemerintahan Daerah dalam Skala Mantap	90	513,119,588,315	51	228,981,149,870	55	93,112,206,992	55	86,167,662,690	100.00%	92.54%		315,148,812,560		61.42	Dinas PU dan PR	
		Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Bangunan Gedung Pemerintah	90	513,119,588,316	51	228,981,149,870	100	93,112,206,992	100	86,167,662,690	100.00%	92.54%	100	315,148,812,560	111.11111	61.42	Dinas PU dan PR	
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Rasio Kawasan yang Memiliki Ruang Terbuka Hijau (RTH)	5.5	19,191,194,876	4.52	509,078,000	4.70	2,851,487,662	4.36	307,319,650	92.77%	10.78%		816,397,650		4.25	Dinas PU dan PR	
		KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rasio Kawasan yang Memiliki Ruang Terbuka Hijau (RTH)	5.5	19,191,194,876	4.52	509,078,000	4.70	2,851,487,662	4.70	307,319,650	100.00%	10.78%		816,397,650		4.25	Dinas PU dan PR	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penataan Bangunan dan Lingkungan	Tersedianya Ruang Terbuka Hijau dan Tugu Batas	15	16,791,194,876	4	509,078,000	3	2,851,487,662	3	307,319,650	100.00%	10.78%	3	816,397,650	20	4.86	Dinas PU dan PR	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan	43	67,037,660,955	39.03	204,739,690,338	41	118,583,916,607	39.53	88,970,284,716	96.41%	75.03%		293,709,975,054		438.13	Dinas PU dan PR	
		KEGIATAN PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kemantapan Jalan	43	67,037,660,955	39.03	204,739,690,338	41	118,583,916,607	41	88,970,284,716	100.00%	75.03%		293,709,975,054		438.13	Dinas PU dan PR	
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaaraan Jalan dan Jembatan	Tersedianya Dokumen Perencanaan Jalan dan Jembatan	5	4,273,570,000	5	771,544,800	1	3,518,694,000	1	2,309,437,400	100.00%	65.63%	1	3,080,982,200	20	72.09	Dinas PU dan PR	
		Pembangunan Jalan	Tersedianya Ruas Jalan Untuk Transportasi Masyarakat	32	11,891,280,954	2	3,511,224,797	5	26,773,238,677	5	13,389,723,075	100.00%	50.01%	5	16,900,947,872	15.9375	142.13	Dinas PU dan PR	
		Rekonstruksi Jalan	Tersedianya Ruas Jalan Dalam Kondisi Mantap	50	12,500,000,000	80	160,794,395,733	35	56,472,390,680	35	53,778,971,459	100.00%	95.23%	35	214,573,367,192	69	1716.59	Dinas PU dan PR	
		Pemeliharaan Berkala Jalan	Terpeliharanya Jalan Dalam Kondisi Mantap	50	12,500,000,000	18	33,246,024,757	14	29,008,800,500	14	17,769,972,633	100.00%	61.26%	14	51,015,997,390	28	408.13	Dinas PU dan PR	
		Pembangunan Jembatan	Tersedianya Jembatan Untuk transportasi Masyarakat	19	11,500,000,000	5	6,416,500,251	5	1,138,199,650	5	1,116,824,649	100.00%	98.12%	5	7,533,324,900	26.315789	65.51	Dinas PU dan PR	
		Rehabilitasi Jembatan	Tersedianya Jembatan Untuk transportasi Masyarakat	17	11,022,300,000			3	1,672,593,100	3	605,355,500	100.00%	36.19%	3	605,355,500	17.647059	5.49	Dinas PU dan PR	
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Jasa Kontruksi yang Handal dan dapat Diandalkan	50	2,473,753,067		3,685,906,986	20	1,115,673,120	20	954,307,620	100.00%	85.54%	20	2,040,674,620	40	82.49	Dinas PU dan PR	
		KEGIATAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN TENAGA TERAMPIL KONSTRUKSI	JASA KONSTRUKSI Persentase Jasa Kontruksi yang Handal dan dapat Diandalkan	50	580,000,000		169,986,000	20	250,000,000	20	220,970,000	100.00%	88.39%	20	390,956,000	40	67.41	Dinas PU dan PR	
		Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Terlatihnya Tenaga Terampil Konstruksi	170	670,000,000	50	169,986,000	30	250,000,000	30	220,970,000	100.00%	88.39%	30	390,956,000	17.647059	58.35	Dinas PU dan PR	
		KEGIATAN PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI JASA KONSTRUKSI CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	JASA KONSTRUKSI Persentase Jasa Kontruksi yang Handal dan dapat Diandalkan	50	1,225,000,000		599,191,600	20	369,459,120	20	368,470,120	100.00%	99.73%	20	967,661,720	40	78.99	Dinas PU dan PR	
		Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	Tersedianya Dokumen Basic Price/Satuan Harga	5	590,000,000	5	398,395,000	1	119,459,120	1	118,546,120	100.00%	99.24%	1	516,941,120	20	87.62	Dinas PU dan PR	
		Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	Tersedianya Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi, WEB SIPIAKKI, dan Laporan SPAM	60	635,000,000	24	200,796,600	1	250,000,000	1	249,924,000	100.00%	99.97%	1	450,720,600	1.6666667	70.98	Dinas PU dan PR	
		KEGIATAN PENGAWASAN TERTIB USAHA, TERTIB PENYELENGGARAAN DAN TERTIB PEMANFAATAN JASA KONSTRUKSI	JASA KONSTRUKSI Persentase Jasa Kontruksi yang Handal dan dapat Diandalkan	50	668,753,066		2,916,729,386	20	496,214,000	20	364,867,500	100.00%	73.53%	20	682,056,900	40	101.99	Dinas PU dan PR	
		Pengawasan dan evaluasi tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	Terlaksananya Pengawasan dan Evaluasi Pekerjaan Fisik Kabupaten	60	668,753,066	12	317,189,400	12	496,214,000	12	364,867,500	100.00%	73.53%	12	682,056,900	20	101.99	Dinas PU dan PR	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Cakupan Informasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten beserta Rinciannya melalui Peta Digital dan Peta Analog	50	1,641,374,395		2,599,539,986	20	4,500,388,000	20	3,962,946,460	100.00%	88.06%	20	6,562,486,446	40	399.82	Dinas PU dan PR	
		KEGIATAN PENETAPAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DAN RENCANA RINCI TATA RUANG (RRTR) KABUPATEN/KOTA	Cakupan Informasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten beserta Rinciannya melalui Peta Digital dan Peta Analog	50	410,343,597		173,841,050	20	65,000,000	20	61,200,950	100.00%	94.16%	20	235,042,000	40	57.28	Dinas PU dan PR	
		Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	500	410,343,597	400	173,841,050	125	65,000,000	125	61,200,950	100.00%	94.16%	125	235,042,000	25	57.28	Dinas PU dan PR	
		KEGIATAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN TATA RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Informasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten beserta Rinciannya melalui Peta Digital dan Peta Analog	50	410,343,597		819,705,156	20	2,074,680,000	20	1,585,420,460	100.00%	76.42%		2,405,125,616		5.86	Dinas PU dan PR	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Tersusunnya Kajian dan Peta Potensi Wilayah Tata Guna Lahan	5	410,343,597	1	819,705,156	5	2,074,680,000	5	1,585,420,460	100.00%	76.42%	5	2,405,125,616	100	5.86	Dinas PU dan PR	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		KEGIATAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMANFAATAN RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Informasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten beserta Rinciannya melalui Peta Digital dan Peta Analog	50	410,343,603		729,659,950	20	314,008,000	20	297,201,000	100.00%	94.65%		1,026,860,950		2.50	Dinas PU dan PR	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Optimal Kinerja Dalam Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Sesuai dengan Perda RTRW Kabupaten Pesisir Barat	60	205,171,802	12	303,914,000	12	260,008,000	12	243,560,750	100.00%	93.67%	12	547,474,750	20	2.67	Dinas PU dan PR	
		Sistem Informasi Penataan Ruang	Tersedianya Web SITARU	60	205,171,802	12	425,745,950	12	54,000,000	12	53,640,250	100.00%	99.33%	12	479,386,200	20	2.34	Dinas PU dan PR	
		KEGIATAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Informasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten beserta Rinciannya melalui Peta Digital dan Peta Analog	50	410,343,597		876,333,830	20	2,046,700,000	20	2,019,124,050	100.00%	98.65%	20	2,895,457,880		7.06	Dinas PU dan PR	
		Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Tersedianya Dokumen Kajian Wilayah Cepat Tumbuh dan Peta Investasi	5	410,343,597	2	876,333,830	1	2,046,700,000	1	2,019,124,050	100.00%	98.65%	1	2,895,457,880	20	7.06	Dinas PU dan PR	
4		**Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**																	
	1.04.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95	20,160,733,730	90	1,926,173,044	90.00	2,142,650,748	90.00	1,869,681,043	100.00%	87.26%	90.00	1,869,681,043	94.74	9.27	Dinas PR dan KP	
	1.04.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Pengangaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	95	22,500,000	90	3,449,080	90.00	4,398,000	90.00	4,397,850	100.00%	100.00%	90.00	4,397,850	94.74	19.55	Dinas PR dan KP	
	1.04.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	10	5,000,000	2	994,040	2.00	898,000	2.00	897,960	100.00%	100.00%	2.00	897,960	20.00	17.96	Dinas PR dan KP	
	1.04.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian kinerja	20	17,500,000	4	2,455,040	4.00	3,500,000	4.00	3,499,890	100.00%	100.00%	4.00	3,499,890	20.00	20.00	Dinas PR dan KP	
	1.04.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu	95	17,152,477,730	90	1,358,998,207	90.00	1,536,122,100	90.00	1,276,669,612	100.00%	83.11%	90.00	1,276,669,612	94.74	7.44	Dinas PR dan KP	
	1.04.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Layanan Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS	70	17,119,977,730	14	1,356,095,557	14.00	1,529,822,100	14.00	1,270,374,362	100.00%	83.04%	14.00	1,270,374,362	20.00	7.42	Dinas PR dan KP	
	1.04.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	5	10,000,000	1	1,441,200	1.00	2,000,000	1.00	1,998,900	100.00%	99.95%	1.00	1,998,900	20.00	19.99	Dinas PR dan KP	
	1.04.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	60	17,500,000	12	999,850	12.00	3,500,000	12.00	3,496,750	100.00%	99.91%	12.00	3,496,750	20.00	19.98	Dinas PR dan KP	
	1.04.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Optimalnya pelaporan prognosis realisasi anggaran	10	5,000,000	2	461,600	2.00	800,000	2.00	799,600	100.00%	99.95%	2.00	799,600	20.00	15.99	Dinas PR dan KP	
	1.04.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Aparatur yang Berkinerja Baik	95	100,000,000	1	31,500,000	0.90	20,000,000	0.90	20,000,000	100.00%	100.00%	0.90	20,000,000	0.95	20.00	Dinas PR dan KP	
	1.04.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Yang Mengikuti peningkatan kapasitas	60	100,000,000	12	31,500,000	12.00	20,000,000	12.00	20,000,000	100.00%	100.00%	12.00	20,000,000	20.00	20.00	Dinas PR dan KP	
	1.04.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja	95	1,402,000,000	90	273,706,555	90.00	307,749,648	90.00	307,543,298	100.00%	99.93%	90.00	307,543,298	94.74	21.94	Dinas PR dan KP	
	1.04.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik	60	50,000,000	12	10,894,200	12.00	9,066,200	12.00	9,066,200	100.00%	100.00%	12.00	9,066,200	20.00	18.13	Dinas PR dan KP	
	1.04.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Aktivitas	5	125,000,000	0	-	1.00	25,000,000	1.00	24,999,850	100.00%	100.00%	1.00	24,999,850	20.00	20.00	Dinas PR dan KP	
	1.04.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah ATK	60	250,000,000	12	37,560,610	12.00	50,160,248	12.00	50,145,498	100.00%	99.97%	12.00	50,145,498	20.00	20.06	Dinas PR dan KP	
	1.04.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah SKHU	720	72,000,000	120	12,000,000	144.00	14,400,000	144.00	14,400,000	100.00%	100.00%	144.00	14,400,000	20.00	20.00	Dinas PR dan KP	
	1.04.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Layanan Jasa Penyediaan Makanan dan Minuman	55	55,000,000	11	7,600,000	11.00	11,000,000	11.00	11,000,000	100.00%	100.00%	11.00	11,000,000	20.00	20.00	Dinas PR dan KP	
	1.04.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi Diluar Kantor	60	850,000,000	12	205,651,745	12.00	198,123,200	12.00	197,931,750	100.00%	99.90%	12.00	197,931,750	20.00	23.29	Dinas PR dan KP	
	1.04.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Prasarana dan Sarana Pendukung Kinerja	95	287,756,000	90	14,400,000	90.00	20,000,000	90.00	20,000,000	100.00%	100.00%	90.00	20,000,000	94.74	6.95	Dinas PR dan KP	
	1.04.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin	60	287,756,000	12	14,400,000	12.00	20,000,000	12.00	20,000,000	100.00%	100.00%	12.00	20,000,000	20.00	6.95	Dinas PR dan KP	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.04.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Pendukung	95	621,000,000	90	165,369,202	90.00	170,361,000	90.00	162,798,888	100.00%	95.56%	90.00	162,798,888	94.74	26.22	Dinas PR dan KP	
	1.04.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Tagihan	60	156,000,000	12	43,674,202	12.00	48,000,000	12.00	40,437,888	100.00%	84.25%	12.00	40,437,888	20.00	25.92	Dinas PR dan KP	
	1.04.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bangunan dan Kantor Dinas	60	415,000,000	12	113,000,000	12.00	113,000,000	12.00	113,000,000	100.00%	100.00%	12.00	113,000,000	20.00	27.23	Dinas PR dan KP	
	1.04.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tagihan	60	50,000,000	12	8,695,000	12.00	9,361,000	12.00	9,361,000	100.00%	100.00%	12.00	9,361,000	20.00	18.72	Dinas PR dan KP	
	1.04.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang milik Daerah yang dalam Kondisi Baik	95	575,000,000	90	78,750,000	90.00	84,020,000	90.00	78,271,395	100.00%	93.16%	90.00	78,271,395	94.74	13.61	Dinas PR dan KP	
	1.04.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan	10	320,000,000	2	60,800,000	2.00	63,000,000	2.00	60,511,395	100.00%	96.05%	2.00	60,511,395	20.00	18.91	Dinas PR dan KP	
	1.04.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah pemeliharaan mebel	60	5,000,000	0	-	12.00	1,000,000	12.00	1,000,000	100.00%	100.00%	12.00	1,000,000	20.00	20.00	Dinas PR dan KP	
	1.04.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor	60	250,000,000	12	17,950,000	12.00	20,020,000	12.00	16,760,000	100.00%	83.72%	12.00	16,760,000	20.00	6.70	Dinas PR dan KP	
	1.04.02	Program Pengembangan Perumahan	Rasio Rumah Layak Huni	90	8,337,134,479	86	141,770,418	86.00	156,109,608	81.82	156,079,398	95.14%	99.98%	81.82	156,079,398	90.91	1.87	Dinas PR dan KP	
	1.04.02.2.06	Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau	90	8,337,134,479	86	141,770,418	86.00	156,109,608	86.00	156,079,398	100.00%	99.98%	86.00	156,079,398	95.56	1.87	Dinas PR dan KP	
	1.04.02.2.06.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan	15	843,660,162	86	141,770,418	3.00	156,109,608	3.00	156,079,398	100.00%	99.98%	3.00	156,079,398	20.00	18.50	Dinas PR dan KP	
	1.04.03	Program Kawasan Permukiman	Rasio Permukiman Layak Huni	50	6,385,368,182	0	-	35.00	196,697,324	77.77	192,762,627	100.00%	98.00%	77.77	192,762,627	155.54	3.02	Dinas PR dan KP	
	1.04.03.2.02	Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Luas Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	6	552,836,718	0	-	1.00	104,752,766	1.00	100,914,700	100.00%	96.34%	1.00	100,914,700	16.67	18.25	Dinas PR dan KP	
	1.04.03.2.02.08	Penyusunan Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Laporan	6	552,836,718	0	-	1.00	104,752,766	1.00	100,914,700	100.00%	96.34%	1.00	100,914,700	16.67	18.25	Dinas PR dan KP	
	1.04.03.2.03	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan	2	450,969,103	0		1.00	91,944,558	1.00	91,847,927	100.00%	99.89%	1.00	91,847,927	50.00	20.37	Dinas PR dan KP	
	1.04.03.2.03.07	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan	2	450,969,103	0	-	1.00	91,944,558	1.00	91,847,927	100.00%	99.89%	1.00	91,847,927	50.00	20.37	Dinas PR dan KP	
	1.04.05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	60	5,034,872,948	0	230,243,270	35.00	1,544,000,000	77.77	746,926,400	100.00%	48.38%	77.77	746,926,400	129.62	14.84	Dinas PR dan KP	
	1.04.05.2.01	Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase Perumahan Yang Sudah dilengkapi PSU	60	5,034,872,948	0	230,243,270	35.00	1,544,000,000	35.00	746,926,400	100.00%	48.38%	35.00	746,926,400	58.33	14.84	Dinas PR dan KP	
	1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah PSU Perumahan yang dibangun	60	5,034,872,948	0	230,243,270	4.00	1,544,000,000	4.00	746,926,400	100.00%	48.38%	4.00	746,926,400	6.67	14.84	Dinas PR dan KP	
5		**Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**																	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH KABUPATE N/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95%	11,952,839,750	100%	1,701,006,572	90	2,197,112,400	90.00	1,914,667,119	100.00%	87.14%	90	1,914,667,119	94.74	16.02	Satpol PP dan Damkar	
	1 05 01 2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu	100	9,569,018,936	100	1,402,526,958	100	1,807,045,400	100	1,534,586,096	100.00%	84.92%	100	1,534,586,096	100.00	16.04	Satpol PP dan Damkar	
	1 05 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	tersedia gaji dan tunjangan asn	70	9,569,018,936	14	1,402,526,958	14	1,807,045,400	14	1,534,586,096	100.00%	84.92%	14	1,534,586,096	20.00	16.04	Satpol PP dan Damkar	
	1 05 01 2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja	100	621,820,814	100	45,530,180	100	134,942,000	100	134,740,650	100.00%	99.85%	100	134,740,650	100.00	21.67	Satpol PP dan Damkar	
	1 05 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedia bahan logistik pameran	5	125,000,000	0	-	1	25,000,000	1	25,000,000	100.00%	100.00%	1	25,000,000	20.00	20.00	Satpol PP dan Damkar	
	1 05 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetak ,penggandaan dan alat tulis kantor	60	87,820,814	12	24,900,000	12	14,942,000	12	14,942,000	100.00%	100.00%	12	14,942,000	20.00	17.01	Satpol PP dan Damkar	
	1 05 01 2.06 09	Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Belanja SPPD Luar Daerah dan Dalam Daerah	60	409,000,000	12	20,630,180	12	95,000,000	12	94,798,650	100.00%	99.79%	12	94,798,650	20.00	23.18	Satpol PP dan Damkar	
	1 05 01 2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Layanan Pendukung	100	717,000,000	100	119,529,434	100	111,897,000	100	109,120,373	100.00%	97.52%	100	109,120,373	100.00	15.22	Satpol PP dan Damkar	
	1 05 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Belanja listrik dan internet	60	58,000,000	12	7,367,434	12	9,600,000	12	6,823,373	100.00%	71.08%	12	6,823,373	20.00	11.76	Satpol PP dan Damkar	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1 05 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapa n Kantor	tersedia sewa gedung kantor, sewa rumah dinas dan sewa mobil dinas sekretaris	60	630,000,000	12	107,000,000	12	101,000,000	12	101,000,000	100.00%	100.00%	12	101,000,000	20.00	16.03	Satpol PP dan Damkar	
	1 05 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	peralatan kebersihan dan iuran kebersihan kantordan sewa mobil dinas sekretaris	60	29,000,000	12	5,162,000	12	1,297,000	12	1,297,000	100.00%	100.00%	12	1,297,000	20.00	4.47	Satpol PP dan Damkar	
	1 05 01 2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dalam kondisi baik	100	1,045,000,000	100	133,420,000	100	143,228,000	100	136,220,000	100.00%	95.11%	100	136,220,000	100.00	13.04	Satpol PP dan Damkar	
	1 05 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Belanja pemelihaaraan kendaraan dinas	60	1,045,000,000	12	133,420,000	12	143,228,000	12	136,220,000	100.00%	95.11%	12	136,220,000	20.00	13.04	Satpol PP dan Damkar	
	2	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	100	11,305,381,808	100	1,931,502,200	100	1,245,684,200	90.00	1,223,617,150	90.00%	98.23%	90.00	1,223,617,150	90.00	10.82	Satpol PP dan Damkar	
	1 05 02 2.01	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus Gangguan	100	10,505,000,000	100	1,843,078,000	100	1,190,237,200	100	1,168,417,200	100.00%	98.17%	100	1,168,417,200	100.00	11.12	Satpol PP dan Damkar	
	1 05 02 2.01 01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan (Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran)	Terlaksana Piket Pengamanan Kantor /rumah dinas, pengawalan pejabat vvip dan pengamanan trantibum	60	10,407,000,000	12	1,835,526,000	12	1,177,137,200	12	1,155,417,200	100.00%	98.15%	12	1,155,417,200	20.00	11.10	Satpol PP dan Damkar	
	1 05 02 2.01 07	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terlaksana pengamanan Idul fitri dan Natal Tahun Baru	40	68,000,000	4	7,552,000	8	8,000,000	8	8,000,000	100.00%	100.00%	8	8,000,000	20.00	11.76	Satpol PP dan Damkar	
	1 05 02 2.01 10	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Tersedia ganti rugi atas dampak penegakan perda dan perkada	5	30,000,000	0	-	1	5,100,000	1	5,000,000	100.00%	98.04%	1	5,000,000	20.00	16.67	Satpol PP dan Damkar	
	1 05 02 2.02	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	persentase gangguan tribum yang terselesaikan	100	490,000,000	100	78,922,100	100	46,297,000	100	46,188,000	100.00%	99.76%	100	46,188,000	100.00	9.43	Satpol PP dan Damkar	
	1 05 02 2.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	pengawasan dan monitoring atas penegakan perda	60	490,000,000	12	78,922,100	12	46,297,000	12	46,188,000	100.00%	99.76%	12	46,188,000	20.00	9.43	Satpol PP dan Damkar	
	1 05 02 2.02	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	persentase gangguan tribum yang terselesaikan	100	310,381,808	100	9,502,100	100	9,150,000	100	9,011,950	100.00%	98.49%	100	9,011,950	100.00	2.90	Satpol PP dan Damkar	
	1 05 02 2.02	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	terlaksana operasional dan kesekretariatan PPNS	60	310,381,808	12	9,502,100	12	9,150,000	12	9,011,950	100.00%	98.49%	12	9,011,950	20.00	2.90	Satpol PP dan Damkar	
	3	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase pelayanan pemadam dan penyelamatan kebakaran	100	3,661,688,861	83.67	663,260,684	100	542,780,000	100	541,549,335	100.00%	99.77%	100	541,549,335	100.00	14.79	Satpol PP dan Damkar	
	1 05 02 2.01	Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	persentase pelayanan pemadam dan penyelamatan kebakaran	100	3,661,688,861	83.67	663,260,684	100	542,780,000	100	541,549,335	100.00%	99.77%	100	541,549,335	100.00	14.79	Satpol PP dan Damkar	
	1 05 02 2.01 01	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	terlaksana operasional pemadaman kebakaran	60	3,661,688,861	12	663,260,684	12	542,780,000	12	541,549,335	100.00%	99.77%	12	541,549,335	20.00	14.79	Satpol PP dan Damkar	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95%	9.548.310.409	99%	19,417,769,946	90%	2,281,457,100	100%	1,889,978,780	90.00%	82.84%	100%	1,889,978,780	35%	17%	BPBD	
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase penyediaan dokumen pperencanaan dan evaluasi tepat waktu	100%	31.697.123	100%	41,283,950	100%	5,800,000	100%	5,800,000	100.00%	100.00%	100%	5,800,000	36%	17%	BPBD	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	10	7,500,000	10	19,473,700	2	1,500,000	2	1,500,000	100.00%	100.00%	2	1,500,000	20%	20%	BPBD	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD	5	3,700,000	-	-	1	700,000	1	700,000	100.00%	100.00%	1	700,000	20%	19%	BPBD	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD	5	3,700,000	-	-	1	700,000	1	700,000	100.00%	100.00%	1	700,000	20%	19%	BPBD	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Koordinasi dan Penyusunan dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD	5	3,700,000	-	-	1	700,000	1	700,000	100.00%	100.00%	1	700,000	20%	19%	BPBD	
		Koordinasi dan Penyusunan perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA SKPD	5	3,500,000	-	-	1	700,000	1	700,000	100.00%	100.00%	1	700,000	20%	20%	BPBD	
		Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	10	9,597,123	10	21,810,250	2	1,500,000	2	1,500,000	100.00%	100.00%	2	1,500,000	20%	16%	BPBD	
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase layanan keuangan perangkat daerah sesuai peraturan yanga ada	100%	5.592.364.628	100%	7,119,256,970	100%	1,771,659,500	100%	1,422,572,563	100.00%	80.30%	100%	1	20%	21%	BPBD	
		Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah bulan pembayaran gaji dan tunjangan ASN	70	5,578,664,628	70	7,096,417,570	14	1,768,909,500	14	1,419,822,563	100.00%	80.27%	14	1,419,822,563	20%	25%	BPBD	
		Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	5	5,000,000	5	10,370,000	1	1,000,000	1	1,000,000	100.00%	100.00%	1	1,000,000	20%	20%	BPBD	
		Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	80	3,700,000	10	8,276,800	16	750,000	16	750,000	100.00%	100.00%	16	750,000	20%	20%	BPBD	
		Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Jumlah laporan analisis prognosis realisasi anggaran	5	5,000,000	5	4,192,600	1	1,000,000	1	1,000,000	100.00%	100.00%	1	1,000,000	20%	20%	BPBD	
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase layanan administrasi umum perangkat daerah tepat waktu	100%	1.024.000.000	97%	1,010,464,893	100%	191,269,600	100%	186,935,440	100.00%	97.73%	100%	186,935,440	21%	18%	BPBD	
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah bulan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	60	54,000,000	11	59,000,000	12	8,178,040	12	8,178,040	100.00%	100.00%	12	8,178,040	20%	15%	BPBD	
		Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah kali pameran Krui Fair	5	125,000,000	4	55,756,000	1	25,000,000	1	21,000,000	100.00%	84.00%	1	21,000,000	20%	17%	BPBD	
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	60	75,000,000	60	116,874,680	12	13,873,000	12	13,873,000	100.00%	100.00%	12	13,873,000	20%	18%	BPBD	
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang--undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	50	60,000,000	60	78,800,000	12	12,000,000	12	12,000,000	100.00%	100.00%	12	12,000,000	24%	20%	BPBD	
		Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah bulan fasilitasi kunjungan tamu	55	55,000,000	55	45,600,000	11	11,000,000	11	11,000,000	100.00%	100.00%	11	11,000,000	20%	20%	BPBD	
		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah bulan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	60	640,000,000	60	654,434,213	12	121,218,560	12	120,884,400	100.00%	99.72%	12	120,884,400	20%	19%	BPBD	
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	611.898.658	100%	628,029,160	100%	115,828,000	100%	101,970,777	100.00%	88.04%	100%	101,970,777	20%	15%	BPBD	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60	83,844,000	60	57,015,160	12	12,960,000	12	9,602,777	100.00%	74.10%	12	9,602,777	20%	11%	BPBD	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	60	460,000,000	60	523,000,000	12	92,000,000	12	81,500,000	100.00%	88.59%	12	81,500,000	20%	18%	BPBD	
		Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	60	68,054,658	60	48,014,000	12	10,868,000	12	10,868,000	100.00%	100.00%	12	10,868,000	20%	16%	BPBD	
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara	100%	1.755.350.000	100%	909,850,000	100%	196,900,000	100%	172,700,000	100.00%	87.71%	100%	172,700,000	80%	12%	BPBD	
		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah unit kendaraan dinas jabatan	1	272,500,000	60	158,300,000	1	40,500,000	1	40,500,000	100.00%	100.00%	1	40,500,000	100%	15%	BPBD	
		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan	14	1,143,600,000	60	646,550,000	14	123,400,000	14	99,200,000	100.00%	80.39%	14	99,200,000	100%	9%	BPBD	
		Pemeliharaan peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah bulan peralatan dan mesin lainnya	60	154,250,000	-	-	12	18,000,000	12	18,000,000	100.00%	100.00%	12	18,000,000	20%	12%	BPBD	
		Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya	2	135,000,000	60	105,000,000	2	15,000,000	2	15,000,000	100.00%	100.00%	2	15,000,000	100%	11%	BPBD	
		Program Penanggulangan Bencana	Cakupan Penanggulangan Bencana Daerah	100%	5.958.062.496	100%	1,937,132,500	100%	411,490,200	100%	398,727,900	100.00%	96.90%	100%	398,727,900	51%	55%	BPBD	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Presentase pelayanan informasi rawan bencana kabupaten	100%	421.948.200	100%	-	100%	150,000,000	100%	146,370,200	100.00%	97.58%	100%	146,370,200	100%	146%	BPBD	
		Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen KRB yang dilegalisasi	1	100,000,000	-	-	1	150,000,000	1	146,370,200	100.00%	97.58%	1	146,370,200	100%	146%	BPBD	
		Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Presentase pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	3.134.518.496	100%	699,613,650	100%	170,937,000	100%	168,654,500	100.00%	98.66%	100%	168,654,500	34%	12%	BPBD	
		Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah kawasan yang ditingkatkan kapasitasnya	25	722,350,400	17	699,613,650	12	122,289,000	12	122,289,000	100.00%	100.00%	12	122,289,000	48%	17%	BPBD	
		Penanganan Pascabencana Kab/Kota	Jumlah bulan penyediaan paket material logistik	60	627,498,400	-	-	12	48,648,000	12	46,365,500	100.00%	95.31%	12	46,365,500	20%	7%	BPBD	
		Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Presentase penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	1.526.362.400	100%	1,237,518,850	100%	90,553,200	100%	83,703,200	100.00%	92.44%	100%	83,703,200	20%	6%	BPBD	
		Respon Cepat Darurat Bencana Kab/Kota	Jumlah waktu respon cepat darurat bencana (jumlah dokumen SK penetapan status darurat bencana)	60	469,659,200	-	-	12	30,413,200	12	30,413,200	100.00%	100.00%	12	30,413,200	20%	6%	BPBD	
		Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kab/Kota	Jumlah pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana (jumlah orang yang berhasil ditemukan ditolong dievakuasi)	15	460,890,000	24	635,590,500	3	30,140,000	3	23,290,000	100.00%	77.27%	3	23,290,000	20%	5%	BPBD	
		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kab/Kota	Jumlah bulan penyediaan paket logistik makanan (jumlah korban yang dapat distribusi logistic)	60	595,813,200	60	601,928,350	12	30,000,000	12	30,000,000	100.00%	100.00%	12	30,000,000	20%	5%	BPBD	
6		**Sosial**																	
	1.06.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95%	10,394,954,768	100%	8,759,273,079	90%	2,079,147,850	90%	1,749,294,956	100.00%	84.14%	84%	1,749,294,956	88%	16.83	Dinas Sosial	
	1.06.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	100%	32,000,000	100%	27,180,650	100%	6,400,000	100%	6,400,000	100.00%	100.00%	100%	6,400,000	100%	20.00	Dinas Sosial	
	1.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja	10	7,000,000	10	5,140,000	2	1,400,000	2	1,400,000	100.00%	100.00%	100%	1,400,000	10%	20.00	Dinas Sosial	
	1.06.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	10	25,000,000	10	22,040,650	2	5,000,000	2	5,000,000	100.00%	100.00%	100%	5,000,000	10%	20.00	Dinas Sosial	
	1.06.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu	100%	8,703,221,754	100%	8,006,492,119	100%	1,571,940,600	100%	1,242,275,690	100.00%	79.03%	79%	1,242,275,690	79%	14.27	Dinas Sosial	
	1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Layanan Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS	70	8,675,721,754	70	7,983,399,919	14	1,566,440,600	14	1,236,775,690	100.00%	78.95%	79%	1,236,775,690	1%	14.26	Dinas Sosial	
	1.06.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	5	12,500,000	5	10,492,600	1	2,500,000	1	2,500,000	100.00%	100.00%	100%	2,500,000	20%	20.00	Dinas Sosial	
	1.06.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	tersusunnya laporan keuangan semester	5	10,000,000	10	8,400,000	1	2,000,000	1	2,000,000	100.00%	100.00%	100%	2,000,000	20%	20.00	Dinas Sosial	
	1.06.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5	5,000,000	5	4,199,600	1	1,000,000	1	1,000,000	100.00%	100.00%	100%	1,000,000	20%	20.00	Dinas Sosial	
	1.06.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja	100%	400,231,014	100%	294,150,810	100%	228,672,250	100%	228,546,761	100.00%	99.95%	100%	228,546,761	100%	57.10	Dinas Sosial	
	1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik	60	28,230,000	60	27,808,360	12	2,443,000	12	2,443,000	100.00%	100.00%	100%	2,443,000	2%	8.65	Dinas Sosial	
	1.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Aktivitas	5	125,000,000	3	68,678,450	1	25,000,000	1	24,987,600	100.00%	99.95%	0%	24,987,600	0%	19.99	Dinas Sosial	
	1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah ATK	60	187,001,014	60	141,284,000	12	38,229,250	12	38,229,250	100.00%	100.00%	100%	38,229,250	2%	20.44	Dinas Sosial	
	1.06.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah SKHU	60	60,000,000	60	56,380,000	12	12,000,000	12	12,000,000	100.00%	100.00%	100%	12,000,000	2%	20.00	Dinas Sosial	
	1.06.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Layanan Jasa Penyediaaan Makanan dan Minuman	55	55,000,000	55	49,400,000	11	11,000,000	11	11,000,000	100.00%	100.00%	100%	11,000,000	2%	20.00	Dinas Sosial	
	1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi di luar kantor	60	845,000,000	60	806,354,947	12	140,000,000	12	139,886,911	100.00%	99.92%	100%	139,886,911	2%	16.55	Dinas Sosial	
	1.06.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Layanan Pendukung	100%	453,000,000	100%	12,000,000	100%	15,000,000	100%	15,000,000	100.00%	100.00%	100%	15,000,000	100%	3.31	Dinas Sosial	
	1.06.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin	58	453,000,000	5	12,000,000	2	15,000,000	2	15,000,000	100.00%	100.00%	100%	15,000,000	2%	3.31	Dinas Sosial	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.06.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Layanan Pendukung	100%	924,225,000	180	376,164,648	100%	173,501,000	100%	173,481,986	100.00%	99.99%	100%	173,481,986	100%	18.77	Dinas Sosial	
	1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Tagihan	60	120,000,000	60	87,479,238	12	13,800,000	12	13,780,986	100.00%	99.86%	100%	13,780,986	2%	11.48	Dinas Sosial	
	1.06.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bangunan dan Kendaraan Dinas	60	785,000,000	60	271,668,160	12	157,000,000	12	157,000,000	100.00%	100.00%	100%	157,000,000	2%	20.00	Dinas Sosial	
	1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tagihan	60	19,225,000	60	17,017,250	12	2,701,000	12	2,701,000	100.00%	100.00%	100%	2,701,000	2%	14.05	Dinas Sosial	
	1.06.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dalam kondisi baik	100%	806,502,000	100%	419,449,500	100%	83,634,000	100%	83,590,519	100.00%	99.95%	100%	83,590,519	100%	10.36	Dinas Sosial	
	1.06.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan	10	398,792,000	10	202,804,000	2	53,464,000	2	53,420,519	100.00%	99.92%	100%	53,420,519	10%	13.40	Dinas Sosial	
	1.06.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan	20	335,960,000	20	184,120,000	4	22,420,000	4	22,420,000	100.00%	100.00%	100%	22,420,000	5%	6.67	Dinas Sosial	
	1.06.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor	60	71,750,000	60	32,525,500	12	7,750,000	12	7,750,000	100.00%	100.00%	100%	7,750,000	2%	10.80	Dinas Sosial	
	1.06.02	Program Pemberdayaan Sosial	Terdatanya Potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS)	100%	1,553,029,692	100%	1,182,772,160	100%	191,715,000	100%	191,212,500	100.00%	99.74%	100%	191,212,500	100%	12.31	Dinas Sosial	
	1.06.02.2.03	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan kapasitas bagi PSKS	100%	1,553,029,692	100%	1,182,772,160	100%	191,715,000	100%	191,212,500	100.00%	99.74%	100%	191,212,500	100%	12.31	Dinas Sosial	
	1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PSM dan TKSK Yang dilatih	645	1,553,029,692	645	1,182,772,160	129	191,715,000	129	191,212,500	100.00%	99.74%	100%	191,212,500	0%	12.31	Dinas Sosial	
	1.06.04	Program Rehabilitasi Sosial	Cakupan Pemenuhan SPM bidang Sosial	100%	16,951,568,200	100%	2,896,917,734	100%	4,329,884,300	56%	2,437,600,300	56.00%	56.30%	56%	2,437,600,300	56%	14.38	Dinas Sosial	
	1.06.02.2.04.2.01	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase PMKS yang menerima bantuan	100%	473,315,000	100%	684,214,380	100%	54,340,000	100%	54,290,000	100.00%	99.91%	100%	54,290,000	100%	11.47	Dinas Sosial	
	1.06.02.2.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	Jumlah anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan nya diluar panti	130	216,870,000	145	490,839,780	26	20,596,000	26	20,571,000	100.00%	99.88%	100%	20,571,000	1%	9.49	Dinas Sosial	
	1.06.02.2.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	285	256,445,000	115	193,374,600	12	33,744,000	12	33,719,000	100.00%	99.93%	100%	33,719,000	0%	13.15	Dinas Sosial	
	1.06.02.2.04.2.02	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan Korban HIV/Aids dan Nafza di Luar Panti sosial	Persentase PMKS yang tertangani	100%	16,478,253,200	100%	2,212,703,354	100%	4,275,544,300	56%	2,383,310,300	56.00%	55.74%	56%	2,383,310,300	56%	14.46	Dinas Sosial	
	1.06.02.2.04.2.01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah pelayanan data	5000	1,520,836,000	650	209,748,104	500	102,285,000	500	102,235,000	100.00%	99.95%	100%	102,235,000	0%	6.72	Dinas Sosial	
	1.06.02.2.04.2.02	Pemberian Layanan Kedaruratan	Tersedianya Fasilitas Santunan Kematian	12	90,417,200	12	31,035,750	12	5,859,300	12	5,859,300	100.00%	100.00%	100%	5,859,300	8%	6.48	Dinas Sosial	
	1.06.02.2.04.2.07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah ODGJ yang dilayani dengan Bimbingan Sosial	50	180,000,000	0	-	10	10,000,000	10	9,696,000	100.00%	96.96%	97%	9,696,000	2%	5.39	Dinas Sosial	
	1.06.02.2.04.2.14	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	tersedianya Hibah bantuan sosial	6235	14,687,000,000	1218	1,971,919,500	1247	4,157,400,000	948	2,265,520,000	76.02%	54.49%	54%	2,265,520,000	0%	15.43	Dinas Sosial	
		Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesi	tersedianya Hibah	90	3,025,000,000	23	605,000,000	18	605,000,000	10	515,000,000	55.56%	85.12%	54%	2,265,520,000	1%	74.89	Dinas Sosial	
		Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	tersedianya bantuan sosial	6145	11,662,000,000	1195	1,366,919,500	1229	3,552,400,000	938	1,750,520,000	76.32%	49.28%	54%	2,265,520,000	0%	19.43	Dinas Sosial	
	1.06.05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	cakupan perlindungan dan jaminan perlindungan sosial daerah	100%	2,118,183,115	100%	2,491,510,696	100%	194,213,800	97%	188,003,620	97.00%	96.80%	97%	188,003,620	97%	8.88	Dinas Sosial	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.06.05.2.02	Kegiatan Pengelolaan Data fakir miskin cakupan Daerah Kabupaten /Kota	Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran dan data terpadu penangulangan kemiskinan	100%	2,118,183,115	100%	2,491,510,696	100%	194,213,800	97%	188,003,620	97.00%	96.80%	97%	188,003,620	97%	8.88	Dinas Sosial	
	1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota	tersedianya laporan data fakir miskin	5	1,281,805,382	15	691,260,860	1	107,910,000	1	107,895,000	100.00%	99.99%	100%	107,895,000	20%	8.42	Dinas Sosial	
	1.06.05.2.02.01.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Tersedianya Operasional Program Keluarga Harapan (PKH)	60	836,377,733	60	1,800,249,836	12	86,303,800	12	80,108,620	100.00%	92.82%	93%	80,108,620	2%	9.58	Dinas Sosial	
	1.06.06	Program Penanganan Bencana	Cakupan pemenuhan pasca Bencana	100%	573,625,420	100%	782,457,255	100%	41,687,000	100%	41,687,000	100.00%	100.00%	100%	41,687,000	100%	7.27	Dinas Sosial	
	1.06.06.2.02	Kegiatan Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota	jumlah warga masyarakat rawan bencana alam yang mendapatkan kesiapsiagaan dan mitigasi	100%	573,625,420	100%	782,457,255	100%	41,687,000	100%	41,687,000	100.00%	100.00%	100%	41,687,000	100%	7.27	Dinas Sosial	
	1.06.06.2.02.02	koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Meningkatnya Fungsi Taruna Siaga Bencana	60	573,625,420	60	782,457,255	12	41,687,000	12	41,687,000	100.00%	100.00%	100%	41,687,000	2%	7.27	Dinas Sosial	
II	2	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**																	
1		**Tenaga Kerja**																Dinas Tran, Naker dan Perindustrian	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95%	11,560,364,628	90%	1,394,724,763	90%	1,894,821,575	90%	1,517,513,894	100.00%	80.09%	90%	1,517,513,894	90%	270	Dinas Tran, Naker dan Perindustrian	
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	100%	50,750,000	100%	6,649,950	100%	7,500,000	100%	7,499,900	100.00%	100.00%	100%	7,499,900	40	29	Dinas Tran, Naker dan Perindustrian	
	01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	10	20,750,000	2	1,649,950	2	2,500,000	2	2,499,900	100.00%	100.00%	2	2,499,900	20	12.05	Dinas Tran, Naker dan Perindustrian	
	06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	10	30,000,000	2	5,000,000	2	5,000,000	2	5,000,000	100.00%	100.00%	2	5,000,000	20	16.67	Dinas Tran, Naker dan Perindustrian	
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	100%	7,546,754,500	100%	1,019,276,490	100%	1,506,359,575	100%	1,154,559,225	100.00%	76.65%	100%	1,154,559,225	100%	70	Dinas Tran, Naker dan Perindustrian	
	01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	70	7,492,254,500	14	1,013,776,590	14	1,496,359,575	14	1,144,559,225	100.00%	76.49%	14	1,144,559,225	20	15.28	Dinas Tran, Naker dan Perindustrian	
	05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	5	19,500,000	1	2,500,000	1	2,500,000	1	2,500,000	100.00%	100.00%	1	2,500,000	20	12.82	Dinas Tran, Naker dan Perindustrian	
	07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	5	18,500,000	1	1,999,900	1	5,000,000	1	5,000,000	100.00%	100.00%	1	5,000,000	20	27.03	Dinas Tran, Naker dan Perindustrian	
	08	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	5	16,500,000	1	1,000,000	1	2,500,000	1	2,500,000	100.00%	100.00%	1	2,500,000	20	15.15	Dinas Tran, Naker dan Perindustrian	
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	100%	1,277,434,124	100%	183,761,501	100%	179,194,000	100%	178,750,506	100.00%	99.75%	100%	178,750,506	100%	83	Dinas Tran, Naker dan Perindustrian	
	01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	60	36,630,181	12	5,063,000	12	5,063,000	12	5,062,600	100.00%	99.99%	12	5,062,600	20	13.82	Dinas Tran, Naker dan Perindustrian	
	04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	5	168,000,000	1	-	1	25,000,000	1	24,987,600	100.00%	99.95%	1	24,987,600	20	14.87	Dinas Tran, Naker dan Perindustrian	
	05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	60	154,803,943	12	32,191,500	12	26,131,000	12	25,853,500	100.00%	98.94%	12	25,853,500	20	16.70	Dinas Tran, Naker dan Perindustrian	
	06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	50	114,000,000	10	12,000,000	10	12,000,000	10	12,000,000	100.00%	100.00%	10	12,000,000	20	10.53	Dinas Tran, Naker dan Perindustrian	
	08	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	55	82,000,000	11	10,999,000	11	11,000,000	11	11,000,000	100.00%	100.00%	11	11,000,000	20	13.41	Dinas Tran, Naker dan Perindustrian	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	60	722,000,000	12	123,508,001	12	100,000,000	12	99,846,806	100.00%	99.85%	12	99,846,806	20	13.83	Dinas Tran, Naker dan Perindustrian	
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	100%	140,000,000	100%	30,000,000	100%	25,000,000	100%	24,761,000	100.00%	99.04%	100%	24,761,000	20	17.69	Dinas Tran, Naker dan Perindustrian	
	07	Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	20	140,000,000	4	30,000,000	4	25,000,000	4	24,761,000	100.00%	99.04%	4	24,761,000	20	17.69	Dinas Tran, Naker dan Perindustrian	
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	100%	666,736,194	100%	94,071,692	100%	111,018,000	100%	92,655,633	100.00%	83.46%	100%	92,655,633	100%	38	Dinas Tran, Naker dan Perindustrian	
	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	60	112,700,194	12	12,053,692	12	15,000,000	12	10,637,633	100.00%	70.92%	12	10,637,633	20	9.44	Dinas Tran, Naker dan Perindustrian	
	03	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	60	524,000,000	12	78,000,000	12	92,000,000	12	78,000,000	100.00%	84.78%	12	78,000,000	20	14.89	Dinas Tran, Naker dan Perindustrian	
	04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	60	30,036,000	12	4,018,000	12	4,018,000	12	4,018,000	100.00%	100.00%	12	4,018,000	20	13.38	Dinas Tran, Naker dan Perindustrian	
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	100%	471,250,000	100%	60,965,130	100%	65,750,000	100%	59,287,630	100.00%	90.17%	100%	59,287,630	100	33	Dinas Tran, Naker dan Perindustrian	
	01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	10	365,000,000	2	50,715,130	2	55,500,000	2	49,037,630	100.00%	88.36%	2	49,037,630	20	13.43	Dinas Tran, Naker dan Perindustrian	
	06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	60	51,250,000	12	5,250,000	12	5,250,000	12	5,250,000	100.00%	100.00%	12	5,250,000	20	10.24	Dinas Tran, Naker dan Perindustrian	
	10	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	60	55,000,000	12	5,000,000	12	5,000,000	12	5,000,000	100.00%	100.00%	12	5,000,000	20	9.09	Dinas Tran, Naker dan Perindustrian	
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,21	227,000,000	3%	-	3%	745,000,000	3.73%	44,288,750	80.43%	5.94%	4%	44,288,750	3.73%	19.51	Dinas Tran, Naker dan Perindustrian	
		Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,21	227,000,000	3%	-	3%	745,000,000	3.73%	44,288,750	80.43%	5.94%	4%	44,288,750	3.73%	19.51	Dinas Tran, Naker dan Perindustrian	
	01	Kegiatan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,21	227,000,000	3%	-	3%	745,000,000	3.73%	44,288,750	80.43%	5.94%	0.0373	44,288,750	3.73%	19.51	Dinas Tran, Naker dan Perindustrian	
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Tingkat Partisipasi Kerja	75,51	425,000,000	72.71%	74,448,000	72.71%	75,000,000	71.21%	74,999,439	97.94%	100.00%	71.21%	74,999,439	71.21%	17.65	Dinas Tran, Naker dan Perindustrian	
		Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Tingkat Partisipasi Kerja	75,51	425,000,000	72.71%	74,448,000	72.71%	75,000,000	72.71%	74,999,439	100.00%	100.00%	72.71%	74,999,439	72.71%	17.65	Dinas Tran, Naker dan Perindustrian	
	02	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Tingkat Partisipasi Kerja	75,51	425,000,000	72.71%	74,448,000	72.71%	75,000,000	72.71%	74,999,439	100.00%	100.00%	72.71%	74,999,439	72.71%	17.65	Dinas Tran, Naker dan Perindustrian	
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Cakupan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	80%	802,093,538	100%	140,430,800	60%	89,890,600	59.63%	89,432,350	99.38%	99.49%	59.63%	89,432,350	59.63%	22	Dinas Tran, Naker dan Perindustrian	
		Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri	80%	423,747,266	100%	93,438,000	60%	41,737,000	59.35%	41,284,500	98.92%	98.92%	59.35%	41,284,500	59.35%	9.74	Dinas Tran, Naker dan Perindustrian	
	03	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Cakupan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri	80%	423,747,266	100%	93,438,000	60%	41,737,000	59.35%	41,284,500	98.92%	98.92%	59.35%	41,284,500	59.35%	9.74	Dinas Tran, Naker dan Perindustrian	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri	80%	378,346,272	100%	46,992,800	60%	48,153,600	59.9%	48,147,850	99.83%	99.99%	59.9%	48,147,850	59.90%	12.73	Dinas Tran, Naker dan Perindustrian	
	04	Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri	80%	378,346,272	100%	46,992,800	60%	48,153,600	59.9%	48,147,850	99.83%	99.99%	59.90%	48,147,850	59.90%	12.73	Dinas Tran, Naker dan Perindustrian	
2	2.08	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**																Dinas PPPA dan KB	
	2.08.02	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Perempuan yang Melaksanakan Perencanaan Pembangunan yang Responship Gender	100	1,244,485,000		93,477,600	100	850,000,000	100	84,445,550	100.00%	9.93%	100	177,923,150	100	14	Dinas PPPA dan KB	
	2.08.02.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Meningkatnya Keterampilan dan Perekonomian 15 Kelompok Usaha Kepala Rumah Tangga Perempuan di Kabupaten Pesisir Barat	100	1,098,075,000		93,477,600	100	750,000,000	100	-	100.00%	0.00%	100	93,477,600	100	9	Dinas PPPA dan KB	
	2.08.02.2.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Pengarusutamaan Gender (PUG) kewenangan Kabupaten/Kota	15	1,098,075,000	5	93,477,600	15	750,000,000	-	-	0.00%	0.00%	5	93,477,600	33	9	Dinas PPPA dan KB	
	2.08.02.2.03	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Perempuan yang Terbentuk Dalam Kelompok Usaha Rumahan	100	146,410,000		59,517,000	100	100,000,000	100	84,445,550	100.00%	84.45%	100	143,962,550	100	98	Dinas PPPA dan KB	
	2.08.02.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pembentukan kelompok Usaha Rumahan dengan Memanfaatkan Limbah Rumah Tangga	20	146,410,000	10	59,517,000	20	100,000,000	20	84,445,550	100.00%	84.45%	30	143,962,550	150	98	Dinas PPPA dan KB	
	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan	100	289,505,278		-	100	197,736,000	100	112,486,000	100.00%	56.89%	100	112,486,000	100	39	Dinas PPPA dan KB	
	2.08.03.2.02	Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Informasi Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan	100	139,719,063		-	100	95,430,000	100	13,216,000	100.00%	13.85%	100	13,216,000	100	9	Dinas PPPA dan KB	
	2.08.03.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan yang Terlayani dan Mendapatkan Pendampingan	10	139,719,063			10	95,430,000	7	13,216,000	70.00%	13.85%	7	13,216,000	70	9	Dinas PPPA dan KB	
	2.08.03.2.03	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Data Serta Layanan Perlindungan Perempuan dan Ank Korban Kekerasan dan TPPO	100	149,786,215		273,778,000	100	102,306,000	100	99,270,000	100.00%	97.03%	100	373,048,000	100	249	Dinas PPPA dan KB	
	2.08.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya SDM yang Mendapatkan Pelatihan SIMFONI PPA dan Manjemen Kasus	2	149,786,215			2	102,306,000	2	99,270,000	100.00%	97.03%	2	99,270,000	100	66	Dinas PPPA dan KB	
	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Cakupan Perempuan Sebagai Tenaga Profesional	50	1,098,075,000		273,778,000	30	750,000,000	36.7	-	100.00%	0.00%	36.7	273,778,000	73.4	25	Dinas PPPA dan KB	
	2.08.04.2.02	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak yang wilayah kerjanya dalam daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100	1,098,075,000		273,778,000	100	750,000,000		-	0.00%	0.00%	0	273,778,000	0	25	Dinas PPPA dan KB	
	2.08.04.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan peningkatan Kualitas Keluarga TingkaT Daerah Kabupaten/Kota	Terbinanya 15 Kelompok Usaha Peningkatan Pendapat Keluarga Akseptor	15	1,098,075,000			15	750,000,000	-	-	0.00%	0.00%	0	-	0	-	Dinas PPPA dan KB	
	2.08.06	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Cakupan Lembaga Penyedia Layanan Terhadap Anak	100	146,410,000		273,778,000	100	100,000,000	100	93,632,000	100.00%	93.63%	100	367,410,000	100	251	Dinas PPPA dan KB	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.08.06.2.02	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Meningkatnya Pengetahuan tentang Pemenuhan Hak Anak Menuju Kabupaten Layak Anak	100	146,410,000		273,778,000	100	100,000,000	100	93,632,000	100.00%	93.63%	100	367,410,000	100	251	Dinas PPPA dan KB	
	2.08.06.2.02.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Nilai Evaluasi Layak Anak	800	146,410,000	1	273,778,000	800	100,000,000	800	93,632,000	100.00%	93.63%	801	367,410,000	100	251	Dinas PPPA dan KB	
	2.08.07	Program Perlindungan Khusus Anak	Cakupan Pendampingan Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus	100	220,273,845		-	100	404,064,000	100	282,555,600	100.00%	69.93%	100	282,555,600	100	128	Dinas PPPA dan KB	
	2.08.07.2.01	Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tersampaikannya Informasi tentang Kekerasan Terhadap Anak	100	220,273,845		-	100	150,450,000	100	150,450,000	100.00%	100.00%	100	150,450,000	100	68	Dinas PPPA dan KB	
	2.08.07.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Informasi tentang Kekerasan Terhadap Anak	700	220,273,845			700	150,450,000	700	150,450,000	100.00%	100.00%	700	150,450,000	100	68	Dinas PPPA dan KB	
	2.08.07.2.02	Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengaduan Kasus Anak yang Terlayani	100	371,316,257		-	100	253,614,000	100	132,105,600	100.00%	52.09%	100	132,105,600	100	36	Dinas PPPA dan KB	
	2.08.07.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan anak Yang memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Menjadi Pemdamping Pengaduan Pada Taingkat Pekon dan Kelurahan	560	371,316,257			560	253,614,000	560	132,105,600	100.00%	52.09%	560	132,105,600	100	36	Dinas PPPA dan KB	
3	2.09	**Pangan**	Nilai Tukar Petani	102.3	5,304,902,899	101.2	625,661,115	97.25	1,000,000,000	106.7	744,048,500	100.00%	74.40%	106.7	744,048,500	104%	14%	Dinas KP dan Pertanian	
	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95	37,623,488,678	90	5,952,188,407	90	6,530,936,800	90	5,304,112,968	100.00%	81.22%	90	5,304,112,968	19%	14%	Dinas KP dan Pertanian	
	3.27.01.2.01	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	100	57,998,450	100	7,500,000	100	9,500,000	100	9,500,000	100.00%	100.00%	100	9,500,000	20%	16%	Dinas KP dan Pertanian	
	3.27.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	15,262,750	3	2,500,000	2	2,500,000	2	2,500,000	100.00%	100.00%	2	2,500,000	20%	16%	Dinas KP dan Pertanian	
	3.27.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10	30,525,500	4	5,000,000	2	5,000,000	2	5,000,000	100.00%	100.00%	2	5,000,000	20%	16%	Dinas KP dan Pertanian	
	3.27.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	12,210,200	0		1	2,000,000	1	2,000,000	100.00%	100.00%	1	2,000,000	20%	16%	Dinas KP dan Pertanian	
	3.27.01.2.02	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu (Persen)	100	33,422,204,878	100	5,319,638,503	100	5,716,596,800	79	4,530,852,968	79.00%	79.26%	79	4,530,852,968	16%	14%	Dinas KP dan Pertanian	
	3.27.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Layanan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	70	33,388,626,828	14	5,314,138,503	14	5,711,096,800	14	4,525,352,968	100.00%	79.24%	14	4,525,352,968	20%	14%	Dinas KP dan Pertanian	
	3.27.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	15,262,750	1	2,500,000	1	2,500,000	1	2,500,000	100.00%	100.00%	1	2,500,000	20%	16%	Dinas KP dan Pertanian	
	3.27.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Lapor Koordinasi Penyusunan Lapor Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	10	12,210,200	2	2,000,000	2	2,000,000	2	2,000,000	100.00%	100.00%	2	2,000,000	20%	16%	Dinas KP dan Pertanian	
	3.27.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5	6,105,100	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	100.00%	100.00%	1	1,000,000	20%	16%	Dinas KP dan Pertanian	
	3.27.01.2.06	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja	100	2,508,950,080	100	383,290,786	100	531,590,000	100	513,941,196	100.00%	96.68%	100	513,941,196	20%	20%	Dinas KP dan Pertanian	
	3.27.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	10,989,180	1	1,800,000	1	1,770,000	1	1,770,000	100.00%	100.00%	1	1,770,000	20%	16%	Dinas KP dan Pertanian	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	3.27.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sewa Kantor, Rumah dinas, Gudang Pertanian dan Kendaraan Operasional	60	306,230,000	12	104,500,000	12	167,000,000	12	149,500,000	100.00%	89.52%	12	149,500,000	20%	49%	Dinas KP dan Pertanian	
	3.27.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Aktivitas	10	244,204,000	0	-	2	25,000,000	2	25,000,000	100.00%	100.00%	2	25,000,000	20%	10%	Dinas KP dan Pertanian	
	3.27.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5	280,834,600	1	45,990,000	1	49,820,000	1	49,820,000	100.00%	100.00%	1	49,820,000	20%	18%	Dinas KP dan Pertanian	
	3.27.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60	73,261,200	12	12,000,000	12	12,000,000	12	12,000,000	100.00%	100.00%	12	12,000,000	20%	16%	Dinas KP dan Pertanian	
	3.27.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Layanan Jasa Penyediaan Makanan dan Minuman	55	67,156,100	11	11,000,000	11	11,000,000	11	11,000,000	100.00%	100.00%	11	11,000,000	20%	16%	Dinas KP dan Pertanian	
	3.27.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi di Luar Kantor	60	1,526,275,000	12	208,000,786	12	265,000,000	12	264,851,196	100.00%	99.94%	12	264,851,196	20%	17%	Dinas KP dan Pertanian	
	3.27.01.2.08	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Pendukung	100	170,942,800	100	20,803,720	100	75,500,000	100	62,698,804	100.00%	83.04%	100	62,698,804	20%	37%	Dinas KP dan Pertanian	
	3.27.01.2.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Tagihan	60	146,522,400	12	16,803,720	12	72,000,000	12	59,198,804	100.00%	82.22%	12	59,198,804	20%	40%	Dinas KP dan Pertanian	
	3.27.01.2.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tagihan	60	24,420,400	12	4,000,000	12	3,500,000	12	3,500,000	100.00%	100.00%	12	3,500,000	20%	14%	Dinas KP dan Pertanian	
	3.27.01.2.09	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dalam kondisi baik	100	1,463,392,470	100	220,955,398	100	197,750,000	100	187,120,000	100.00%	94.62%	100	187,120,000	20%	13%	Dinas KP dan Pertanian	
	3.27.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5	235,046,350	1	37,685,398	1	39,000,000	1	38,300,000	100.00%	98.21%	1	38,300,000	20%	16%	Dinas KP dan Pertanian	
	3.27.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	143	923,091,120	28	141,320,000	28	120,750,000	28	111,020,000	100.00%	91.94%	28	111,020,000	20%	12%	Dinas KP dan Pertanian	
	3.27.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	188	305,255,000	35	41,950,000	35	38,000,000	35	37,800,000	100.00%	99.47%	35	37,800,000	19%	12%	Dinas KP dan Pertanian	
	2.09.03	PROGRAM PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan Pangan Utama (Ton)	28,000	4,202,340,624	27,752	625,661,115	28,000	787,145,400	28,342	634,545,900	100.00%	80.61%	28342	634,545,900	20%	15%	Dinas KP dan Pertanian	
	2.09.03.2.01	Kegiatan : Penyediaan Dan Penyaluran Pangan Pokok Atau Pangan Lainnya Sesuai Dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Stabilisasi Pasokan Dan Harga Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH Ketersediaan)	85.4	296,496,624	84.92	42,340,900	84.85	48,565,400	84.85	48,074,400	100.00%	98.99%	85	48,074,400	20%	16%	Dinas KP dan Pertanian	
	2.09.03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Buku Neraca Bahan Makanan	5	296,496,624	1	42,340,900	1	48,565,400	1	48,074,400	100.00%	98.99%	1	48,074,400	20%	16%	Dinas KP dan Pertanian	
	2.09.03.2.04	Kegiatan : Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Skor Pola Pangan Harapan (PPH Konsumsi)	87.90	3,905,844,000	87.8	583,320,215	87.8	738,580,000	87.8	586,471,500	100.00%	79.41%	88	586,471,500	20%	15%	Dinas KP dan Pertanian	
	2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	4	3,663,060,000	1	518,557,715	1	700,000,000	1	552,032,500	100.00%	78.86%	1	552,032,500	25%	15%	Dinas KP dan Pertanian	
	2.09.03.2.04.03	Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan evaluasi konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah laporan pemantauan konsumsi pangan	5	242,784,000	2	64,762,500	2	38,580,000	2	34,439,000	100.00%	89.27%	2	34,439,000	40%	14%	Dinas KP dan Pertanian	
	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	5	982,082,275	7	-	7	194,374,600	7	91,352,100	100.00%	47.00%	7	91,352,100	28%	9%	Dinas KP dan Pertanian	
	2.09.04.2.01	Kegiatan : Penyusunan Peta Kerentanan Dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Cakupan Informasi Daearah Rawan Pangan	100	219,478,345	0	-	100	35,949,800	100	35,244,800	100.00%	98.04%	100	35,244,800	100%	16%	Dinas KP dan Pertanian	
	2.09.04.2.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Terupdatenya Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	5	219,478,345	0	-	1	35,949,800	1	35,244,800	100.00%	98.04%	1	35,244,800	20%	16%	Dinas KP dan Pertanian	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.09.04.2.02	Kegiatan : Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Penanganan Daerah Rawan Pangan	4	762,603,930	0	-	1	158,424,800	1	56,107,300	100.00%	35.42%	1	56,107,300	25%	7%	Dinas KP dan Pertanian	
	2.09.04.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dalam rangka Penanganan Kerawanan Pangan	15	762,603,930	0	-	2	158,424,800	2	56,107,300	100.00%	35.42%	2	56,107,300	13%	7%	Dinas KP dan Pertanian	
	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar asal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan	60.00	120,480,000	n/a	-	60	18,480,000	83.53	18,150,500	100.00%	98.22%	84	18,150,500	28%	15%	Dinas KP dan Pertanian	
	2.09.05.2.01	Kegiatan : Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	100.00	120,480,000		-	100	18,480,000	100	18,150,500	100.00%	98.22%	100	18,150,500	20%	15%	Dinas KP dan Pertanian	
	2.09.05.2.01.04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi Pengujian mutu dan keamanan pangan	10	120,480,000	0	-	2	18,480,000	2	18,150,500	100.00%	98.22%	2	18,150,500	20%	15%	Dinas KP dan Pertanian	
4	2.10	**Pertanahan**																	
	2.10.05	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Rasio Luas Tanah yang disediakan bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan lainnya	11.50	33,123,112,050	9.43	5,658,514,820	10.00	13,091,369,000	2.13	9,651,896,350	21.30%	73.73%	2.13	9,651,896,350	#VALUE!	29.14	Dinas PR dan KP	
	2.10.05.2.01	Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penyelesaian Kerugian	11.50	33,123,112,050	9.43	5,658,514,820	10.00	13,091,369,000	10.00	9,651,896,350	100.00%	73.73%	10.00	9,651,896,350	#VALUE!	29.14	Dinas PR dan KP	
	2.10.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Luas Tanah	11.50	33,123,112,050	9.43	5,658,514,820	10.00	13,091,369,000	10.00	9,651,896,350	100.00%	73.73%	10.00	9,651,896,350	#VALUE!	29.14	Dinas PR dan KP	
	2.10.08	Program Pengelolaan Tanah Kosong	Cakupan Pemanfaatan Tanah Kosong	9.50	1,752,548,326	-	127,138,870	0.80	513,431,600	#VALUE!	136,671,950	#VALUE!	26.62%	#VALUE!	136,671,950	#VALUE!	7.80	Dinas PR dan KP	
	2.10.08.2.02	Kegiatan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Persentase Luas Lahan Bersertifikat	9.50	1,752,548,326	-	127,138,870	0.80	513,431,600	#VALUE!	136,671,950	#VALUE!	26.62%	#VALUE!	136,671,950	#VALUE!	7.80	Dinas PR dan KP	
	2.10.08.2.02.01	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah Sertifikat	235.00	1,752,548,326	123.00	127,138,870	100.00	513,431,600	64.00	136,671,950	64.00%	26.62%	64.00	136,671,950	27.23	7.80	Dinas PR dan KP	
5	2.11	**Lingkungan Hidup**																	
	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95	16,960,069,162	100	15,762,442,911	90%	2,701,923,185	90%	2,314,152,165	100.00%	85.65%	100%	2,314,152,165	105%	14%	Dinas LH	
	2.11.01.2.01	KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu	100	65,051,961	100	42,923,500	100	6,717,760	100%	6,717,760	100.00%	100.00%	100%	6,717,760	20%		Dinas LH	
	2.11.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan	10	11,339,530	10	20,245,600	2	1,717,760	2	1,717,760	100.00%	100.00%	2	1,717,760	20%	15%	Dinas LH	
	2.11.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya laporan kinerja SKPD	10	26,236,766	10	22,677,900	2	5,000,000	2	5,000,000	100.00%	100.00%	2	5,000,000	20%	19%	Dinas LH	
	2.11.01.2.02	KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu	100	11,241,252,394	100	7,579,882,465	100	1,854,647,825	100%	1,487,995,692	100.00%	80.23%	100%	1,487,995,692	20%	18%	Dinas LH	
	2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	70	11,207,302,020	84	7,556,700,765	14	1,849,147,825	14	1,482,495,692	100.00%	80.17%	14	1,482,495,692	20%	13%	Dinas LH	
	2.11.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun	5	13,118,383	5	10,305,500	1	2,500,000	1	2,500,000	100.00%	100.00%	1	2,500,000	20%	19%	Dinas LH	
	2.11.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Tersedianya laporan keuangan semesteran	90	10,494,706	10	8,330,000	18	2,000,000	18	2,000,000	100.00%	100.00%	18	2,000,000	20%	19%	Dinas LH	
	2.11.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya laporan prognosis realisasi anggaran	5	5,247,353	5	4,546,200	1	1,000,000	1	1,000,000	100.00%	100.00%	1	1,000,000	20%	19%	Dinas LH	
	2.11.01.2.06	KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Persentase Pemenuhan sarana dan prsarana pendukung kinerja	100	1,423,374,966	86	1,084,118,301	100	277,971,600	100%	273,182,155	100.00%	98.28%	100%	273,182,155	19%	23%	Dinas LH	
	2.11.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik untuk pameran	6	113,183,828	3	64,978,500	1	25,000,000	1	25,000,000	100.00%	100.00%	1	25,000,000	17%	22%	Dinas LH	
	2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya alat tulis kantor dan barang cetakan dan penggandaan	60	141,358,445	59	243,145,570	12	49,971,600	12	49,965,600	100.00%	99.99%	12	49,965,600	20%	35%	Dinas LH	
	2.11.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya informasi media massa	50	62,968,237	60	57,600,000	10	12,000,000	10	12,000,000	100.00%	100.00%	10	12,000,000	20%	19%	Dinas LH	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.11.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu	55	57,720,884	49	42,288,500	11	11,000,000	11	11,000,000	100.00%	100.00%	11	11,000,000	20%	19%	Dinas LH	
	2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat konsultasi dan koordinasi ke luar daerah dan dalam daerah	60	970,760,325	58	676,105,731	12	180,000,000	12	175,216,555	100.00%	97.34%	12	175,216,555	20%	18%	Dinas LH	
	2.11.01.2.08	KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan layanan pendukung	100	696,370,984	95	4,018,463,827	100	121,600,000	100%	119,943,456	100.00%	98.64%	100%	119,943,456	40%	17%	Dinas LH	
	2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik	60	50,374,590	60	3,466,463,827	12	9,600,000	12	7,943,456	100.00%	82.74%	12	7,943,456	20%	16%	Dinas LH	
	2.11.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya sewa gedung kantor, rumah dinas dan kendaraan dinas	20	600,821,931	60	552,000,000	12	112,000,000	12	112,000,000	100.00%	100.00%	12	112,000,000	60%	19%	Dinas LH	
	2.11.01.2.09	KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase barang miliki daerah yang dalam kondisi baik	100	2,947,648,136	99	3,037,054,818	100	440,986,000	100%	426,313,102	100.00%	96.67%	100%	426,313,102	75%	16%	Dinas LH	
	2.11.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan dinas jabatan	10	264,466,597	60	255,990,148	2	51,200,000	2	50,040,030	100.00%	97.73%	2	50,040,030	20%	19%	Dinas LH	
	2.11.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan dinas operasional/lapangan	65	1,970,800,881	60	2,211,156,570	13	332,460,000	13	318,947,472	100.00%	95.94%	13	318,947,472	20%	16%	Dinas LH	
	2.11.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Tersedianya jasa pemeliharaan alat besar	5	598,219,244	60	543,897,600	12	45,200,000	12	45,200,000	100.00%	100.00%	12	45,200,000	240%	8%	Dinas LH	
	2.11.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	60	61,687,883	24	26,010,500	12	12,126,000	12	12,125,600	100.00%	100.00%	12	12,125,600	20%	20%	Dinas LH	
	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	74.86	1,834,747,681	100	556,848,606	73.54%	52,175,000	71.06%	38,506,100	96.63%	73.80%	71%	38,506,100	10%	10%	Dinas LH	
	2.11.03.2.01	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	cakupan pencegahan pencemaran lingkungan hidup	100	1,641,742,831	100	556,848,606	100	52,175,000	100%	38,506,100	100.00%	73.80%	100%	38,506,100	10%	10%	Dinas LH	
	2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	jumlah dokumen Hasil Pengukuran IKA, IKD, dan IKTL	15	1,540,161,331		556,848,606	3	52,175,000	3	38,506,100	100.00%	73.80%	3	38,506,100	20%	3%	Dinas LH	
	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase cakupan area pelayanan persampahan	60	10,782,132,298	100	8,768,364,093	49.61%	1,876,984,000	36%	1,840,112,000	72.57%	98.04%	100%	1	10%	10%	Dinas LH	
	2.11.11.2.01	KEGIATAN PENGELOLAAN SAMPAH	Persentase jumlah sampah yang tertangani	22.98	10,782,132,298	100	8,768,364,093	100	1,876,984,000	100%	1,840,112,000	100.00%	98.04%	100%	1	10%	10%	Dinas LH	
	2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Terlaksananya penanganan sampah	60	7,721,499,000	60	8,768,364,093	12	1,876,984,000	12	1,840,112,000	100.00%	98.04%	12	1,840,112,000	20%	24%	Dinas LH	
6		**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**																	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	95%	15,813,919,039	100%	3,206,819,717	90%	3,076,277,975	90%	2,510,985,411	100.00%	81.62%	90%	2,510,985,411	94.74%	15.88%	Dinas Dukcapil	
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	100%	73,261,200	100%	246,411,460	100%	136,178,750	100%	133,678,500	100.00%	98.16%	100%	6,407,500	100.00%	8.75%	Dinas Dukcapil	
	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	10	61,051,000	12	12,070,700	2	4,407,500	2	4,407,500	100.00%	100.00%	2	4,407,500	20.00%	7.22%	Dinas Dukcapil	
	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20	12,210,200	12	13,714,850	4	2,000,000	4	2,000,000	100.00%	100.00%	4	2,000,000	20.00%	16.38%	Dinas Dukcapil	
	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Kegiatan Pencapaian Target Kepemilikan Akta Kematian	1	457,882,500	1	220,625,910	1	129,771,250	1	127,271,000	100.00%	98.07%	1	127,271,000	100.00%	27.80%	Dinas Dukcapil	
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu	100%	11,285,155,859	100%	1,566,501,123	100%	1,938,074,425	100%	1,545,723,623	100.00%	79.76%	100%	1,545,723,623	100.00%	13.70%	Dinas Dukcapil	
	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Layanan Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS	60	11,251,577,809	12	1,549,939,223	12	1,932,574,425	12	1,540,435,223	100.00%	79.71%	12	1,540,435,223	20.00%	13.69%	Dinas Dukcapil	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	5	15,262,750	3	6,175,750	1	2,500,000	1	2,500,000	100.00%	100.00%	1	2,500,000	20.00%	16.38%	Dinas Dukcapil	
	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen laporan keuangan bulanan, laporan triwulan dan laporan semester	20	12,210,200	8	6,386,600	4	2,000,000	4	1,788,400	100.00%	89.42%	4	1,788,400	20.00%	14.65%	Dinas Dukcapil	
	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	10	6,105,100	10	3,999,550	2	1,000,000	2	1,000,000	100.00%	100.00%	2	1,000,000	20.00%	16.38%	Dinas Dukcapil	
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang berkinerja baik	100%	2,928,777,611	100%	1,431,765,375	100%	67,316,000	100%	40,790,000	100.00%	60.59%	100%	40,790,000	100.00%	1.39%	Dinas Dukcapil	
	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta sosialisasi	100	358,530,511	825	185,810,942	59	67,316,000	59	40,790,000	100.00%	60.59%	59	40,790,000	59.00%	11.38%	Dinas Dukcapil	
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja	100%	1,929,211,600	100%	942,411,333	100%	614,905,000	100%	489,903,915	100.00%	79.67%	100%	489,903,915	100.00%	25.39%	Dinas Dukcapil	
	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	60	48,840,800	14	12,486,800	12	3,745,000	12	3,745,000	100.00%	100.00%	12	3,745,000	20.00%	7.67%	Dinas Dukcapil	
	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Aktivitas	5	152,627,500	1	47,544,500	1	25,000,000	1	24,956,000	100.00%	99.82%	1	24,956,000	20.00%	16.35%	Dinas Dukcapil	
	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetak, penggandaan dan kebutuhan ATK	60	366,306,000	14	104,401,800	12	32,910,000	12	31,382,000	100.00%	95.36%	12	31,382,000	20.00%	8.57%	Dinas Dukcapil	
	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan media cetak	60	73,261,200	36	139,110,000	12	12,000,000	12	12,000,000	100.00%	100.00%	12	12,000,000	20.00%	16.38%	Dinas Dukcapil	
	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Layanan Jasa Penyediaaan Makanan dan Minuman	55	67,156,100	11	19,435,000	11	14,250,000	11	12,435,000	100.00%	87.26%	11	12,435,000	20.00%	18.52%	Dinas Dukcapil	
	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi di luar kantor	60	1,221,020,000	36	619,433,233	12	527,000,000	12	405,385,915	100.00%	76.92%	12	405,385,915	20.00%	33.20%	Dinas Dukcapil	
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Layanan Pendukung	100%	1,520,169,900	100%	325,689,561	100%	194,423,800	100%	177,411,323	100.00%	91.25%	100%	177,411,323	100.00%	11.67%	Dinas Dukcapil	
	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60	378,516,200	36	115,142,141	12	61,200,000	12	44,188,323	100.00%	72.20%	12	44,188,323	20.00%	11.67%	Dinas Dukcapil	
	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan rumah dinas, gedung kantor dan kendaraan dinas	60	787,557,900	12	127,000,000	12	129,000,000	12	129,000,000	100.00%	100.00%	12	129,000,000	20.00%	16.38%	Dinas Dukcapil	
	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	60	354,095,800	12	83,547,420	12	4,223,800	12	4,223,000	100.00%	99.98%	12	4,223,000	20.00%	1.19%	Dinas Dukcapil	
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dalam kondisi baik	100%	1,006,120,480	100%	125,806,240	100%	125,380,000	100%	123,478,050	100.00%	98.48%	100%	123,478,050	100.00%	12.27%	Dinas Dukcapil	
	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan	60	340,664,580	12	57,305,240	12	55,800,000	12	55,450,250	100.00%	99.37%	12	55,450,250	20.00%	16.28%	Dinas Dukcapil	
	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	60	280,834,600	12	41,752,000	12	43,300,000	12	42,782,800	100.00%	98.81%	12	42,782,800	20.00%	15.23%	Dinas Dukcapil	
	11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	60	384,621,300	12	26,749,000	12	26,280,000	12	25,245,000	100.00%	96.06%	12	25,245,000	20.00%	6.56%	Dinas Dukcapil	
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan Penerbitan Kartu Identitas	100%	249,000,000	100%	-	100%	597,558,200	99%	584,575,448	99.32%	97.83%	99%	584,575,448	99.32%	234.77%	Dinas Dukcapil	
		Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Presentase Pelayanan Pendaftaran Penduduk	100%	249,000,000	100%	-	100%	597,558,200	100%	584,575,448	100.00%	97.83%	100%	584,575,448	100.00%	234.77%	Dinas Dukcapil	
	04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan	4	249,000,000	0	-	1	597,558,200	1	584,575,448	100.00%	97.83%	1	584,575,448	25.00%	234.77%	Dinas Dukcapil	
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan	100%	35,000,000	100%	-	100%	100,000,000	100%	92,595,550	100.00%	92.60%	100%	92,595,550	100.00%	264.56%	Dinas Dukcapil	
		Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terlaksananya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100%	35,000,000	100%	-	100%	100,000,000	100%	92,595,550	100.00%	92.60%	100%	92,595,550	100.00%	264.56%	Dinas Dukcapil	
	04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Pemanfaatan Data Kependudukan	1	35,000,000	0	-	4	100,000,000	4	92,595,550	100.00%	92.60%	4	92,595,550	400.00%	264.56%	Dinas Dukcapil	
7		**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**																	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH KABUPATE N/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95	14,913,405,801	100	1,829,112,992	90	2,412,000,175	90.00	1,958,299,794	100.00%	81.19%	90.00	1,958,299,794	90.00	13%	Dinas PMP	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	100	39,072,640	100	6,400,000	100	6,400,000	100	6,400,000	100.00%	100.00%	1	12,800,000	1	33%	Dinas PMP	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja	5	8,547,140	1	1,400,000	1	1,400,000	1	1,400,000	100.00%	100.00%	2	2,800,000	40	33%	Dinas PMP	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja	5	30,525,500	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	100.00%	100.00%	2	10,000,000	40	33%	Dinas PMP	
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu	100	11,645,604,626	100	1,410,548,014	100	1,919,693,925	100.00	1,488,212,409	100.00%	77.52%	1	2,898,760,423	1	25%	Dinas PMP	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Layanan Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS	70	11,612,026,576	14	1,405,366,614	14	1,914,193,925	14	1,482,712,409	100.00%	77.46%	28	2,888,079,023	40	25%	Dinas PMP	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	5	15,262,750	1	2,500,000	1	2,500,000	1	2,500,000	100.00%	100.00%	2	5,000,000	40	33%	Dinas PMP	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tri wulanan/Se mest eran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	10	12,210,200	2	2,000,000	2	2,000,000	2	2,000,000	100.00%	100.00%	4	4,000,000	40	33%	Dinas PMP	
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5	6,105,100	1	681,400	1	1,000,000	1	1,000,000	100.00%	100.00%	2	1,681,400	40	28%	Dinas PMP	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja	100	1,589,141,661	100	166,951,395	100	234,220,250	100.00	231,586,560	100.00%	98.88%	1	398,537,955	1	25%	Dinas PMP	
		Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik	60	19,878,206	12	3,256,000	12	3,256,000	12	3,256,000	100.00%	100.00%	24	6,512,000	40	33%	Dinas PMP	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Aktivitas	5	152,627,500	0	-	1	25,000,000	1	25,000,000	100.00%	100.00%	1	25,000,000	20	16%	Dinas PMP	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah ATK dan barang cetakan	60	158,379,725	12	24,822,320	12	25,942,200	12	24,396,200	100.00%	94.04%	24	49,218,520	40	31%	Dinas PMP	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah SKHU	50	73,261,200	12	12,000,000	12	12,000,000	12	12,000,000	100.00%	100.00%	24	24,000,000	48	33%	Dinas PMP	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Layanan Jasa Penyediaaan Makanan dan Minuman	55	67,156,100	11	11,000,000	11	11,000,000	11	11,000,000	100.00%	100.00%	1	22,000,000	181.82%	33%	Dinas PMP	
		Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi di luar kantor	60	1,117,838,930	12	115,873,075	12	157,022,050	12	155,934,360	100.00%	99.31%	1	271,807,435	1.6666667	24%	Dinas PMP	
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Prasarana dan prasarana pendukung kinerja	100	304,500,000	100	47,700,000	100	34,500,000	100	33,700,000	100.00%	97.68%	1	81,400,000	1	27%	Dinas PMP	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin	26	304,500,000	6	47,700,000	2	34,500,000	2	33,700,000	100.00%	97.68%	8	81,400,000	30.769231	27%	Dinas PMP	
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Layanan Pendukung	100	884,225,240	100	134,521,185	100	143,336,000	100	129,687,850	100.00%	90.48%	1	264,209,035	1	30%	Dinas PMP	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Tagihan	60	197,805,240	12	21,021,185	12	32,400,000	12	18,751,850	100.00%	57.88%	24	39,773,035	40	20%	Dinas PMP	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapa n Kantor	Jumlah Bangunan dan Kendaraan Dinas	15	641,035,500	12	105,000,000	12	105,000,000	12	105,000,000	100.00%	100.00%	24	210,000,000	160	33%	Dinas PMP	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tagihan	60	45,384,500	12	8,500,000	12	5,936,000	12	5,936,000	100.00%	100.00%	24	14,436,000	40	32%	Dinas PMP	
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dalam kondisi baik	100	450,861,635	100	62,992,398	100	73,850,000	100	68,712,975	100.00%	93.04%	1	131,705,373	1	29%	Dinas PMP	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas labatan	Jumlah Kendaraan	10	359,895,645	2	50,355,500	2	58,950,000	2	54,852,975	100.00%	93.05%	4	105,208,475	40	29%	Dinas PMP	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor	60	90,965,990	12	12,636,898	12	14,900,000	12	13,860,000	100.00%	93.02%	24	26,496,898	40	29%	Dinas PMP	
	Meningkatnya Pembangunan Desa	PROGRAM PENATAAN DESA	Jumlah Desa Berkembang	70	6,240,000,000	71	748,382,000	55	1,200,000,000	79	1,199,772,300	100.00%	99.98%	1.00	1,948,154,300	1.43	31%	Dinas PMP	
		Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Desa Berkembang	100	6,240,000,000	100	748,382,000	100	1,200,000,000	100	1,199,772,300	100.00%	99.98%	1	1,948,154,300	1	31%	Dinas PMP	
		Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Pekon	5	6,240,000,000	1	748,382,000	1	1,200,000,000	1	1,199,772,300	100.00%	99.98%	2	1,948,154,300	40	31%	Dinas PMP	
	Meningkatnya Pembangunan Desa	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pekon Tertib Administrasi	100	14,041,013,140	83.67	162,429,752,631	100	4,334,540,020	100	3,747,554,789	100.00%	86.46%	1	166,177,307,420	1	1184%	Dinas PMP	
		Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Cakupan Pekon Tertib Administrasi	100	14,041,013,140	83.67	162,429,752,631	100	4,334,540,020	100	3,747,554,789	100.00%	86.46%	1	166,177,307,420	1	1184%	Dinas PMP	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi yang Diberikan	60	7,048,568,680	12	877,203,381	12	1,093,795,960	12	1,020,000,580	100.00%	93.25%	24	1,897,203,961	40	27%	Dinas PMP	
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Pekon	580	1,029,254,000	116	161,281,067,250	116	107,554,000	116	103,681,250	100.00%	96.40%	232	161,384,748,500	40	15680%	Dinas PMP	
		Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah aparatur dan pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola pemdes	110	5,963,190,460	6	271,482,000	68	3,133,190,060	68	2,623,872,959	100.00%	83.74%	74	2,895,354,959	67.272727	49%	Dinas PMP	
	Meningkatnya Pembangunan Desa	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Cakupan Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	116	12,379,295,430	100	1,654,207,617	90	1,804,995,430	114	1,657,169,496	100.00%	91.81%	1	3,311,377,113	40	26.75	Dinas PMP	
		Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	100	12,379,295,430	100	1,654,207,617	100	1,804,995,430	100	1,657,169,496	100.00%	91.81%	1	3,311,377,113	40	26.75	Dinas PMP	
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah kader Posyandu yang dibina	4500	6,933,300,000	900	954,593,500	900	900,000,000	900	900,000,000	100.00%	100.00%	1800	1,854,593,500	40.00	26.75	Dinas PMP	
		Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah fasilitasi yang dilaksanakan	60	5,445,995,430	12	699,614,117	12	904,995,430	12	757,169,496	100.00%	83.67%	24	1,456,783,613	40	26.75	Dinas PMP	
8	2.14	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**			10,608,318,464		7,227,189,139		7,134,819,250		5,811,848,785		81.46%	0	13,039,037,924		123	Dinas PPPA dan KB	
	2.14.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95	5,655,591,291	100	4,156,543,487	90	3,752,039,950	90	3,083,112,210	100.00%	82.17%	190	7,239,655,697	200	128	Dinas PPPA dan KB	
	2.14.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	100	9,370,240	100	27,400,000	100	6,400,000	100	6,400,000	100.00%	100.00%	200	33,800,000	200	361	Dinas PPPA dan KB	
	2.14.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja	2	2,049,740	2	17,400,000	2	1,400,000	2	1,400,000	100.00%	100.00%	4	18,800,000	200	917	Dinas PPPA dan KB	
	2.14.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	2	7,320,500	2	10,000,000	2	5,000,000	2	5,000,000	100.00%	100.00%	4	15,000,000	200	205	Dinas PPPA dan KB	
	2.14.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan keuangan Tepat Waktu	100	4,693,993,544	100	3,054,385,762	100	3,206,060,750	100	2,555,113,450	100.00%	79.70%	200	5,609,499,212	200	120	Dinas PPPA dan KB	
	2.14.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Layanan Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS	14	4,685,940,994	14	3,043,385,762	14	3,200,560,750	14	2,549,613,450	100.00%	79.66%	28	5,592,999,212	200	119	Dinas PPPA dan KB	
	2.14.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	1	3,660,250	1	5,000,000	1	2,500,000	1	2,500,000	100.00%	100.00%	2	7,500,000	200	205	Dinas PPPA dan KB	
	2.14.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	18	2,928,200	2	4,000,000	18	2,000,000	18	2,000,000	100.00%	100.00%	20	6,000,000	111	205	Dinas PPPA dan KB	
	2.14.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	1,464,100	1	2,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	100.00%	100.00%	2	3,000,000	200	205	Dinas PPPA dan KB	
	2.14.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja	100	240,977,976	100	437,997,425	100	164,591,200	100	163,508,920	100.00%	99.34%	200	601,506,345	200	250	Dinas PPPA dan KB	
	2.14.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik	100	6,185,823	100	8,725,000	100	4,225,000	100	4,225,000	100.00%	100.00%	200	12,950,000	200	209	Dinas PPPA dan KB	
	2.14.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Aktivitas	1	36,602,500	1	-	1	25,000,000	1	25,000,000	100.00%	100.00%	2	25,000,000	200	68	Dinas PPPA dan KB	
	2.14.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah ATK	12	37,138,653	12	84,561,000	12	25,366,200	12	25,366,200	100.00%	100.00%	24	109,927,200	200	296	Dinas PPPA dan KB	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.14.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah SKHU	10	17,569,200	10	24,000,000	10	12,000,000	10	12,000,000	100.00%	100.00%	20	36,000,000	200	205	Dinas PPPA dan KB	
	2.14.01.2.06.08	Fasilitasi kunjungan Tamu	Jumlah Layanan Jasa Penyediaaan Makanan dan Minuman	11	16,105,100	11	22,000,000	11	11,000,000	11	11,000,000	100.00%	100.00%	22	33,000,000	200	205	Dinas PPPA dan KB	
	2.14.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi di luar kantor	12	127,376,700	12	298,711,425	12	87,000,000	12	85,917,720	100.00%	98.76%	24	384,629,145	200	302	Dinas PPPA dan KB	
	2.14.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Pendukung	100	248,733,021	100	287,820,300	100	169,888,000	100	169,888,000	100.00%	100.00%	200	457,708,300	200	184	Dinas PPPA dan KB	
	2.14.01.2.08.02	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Tagihan	12	28,110,720	12	38,132,300	12	19,200,000	12	19,200,000	100.00%	100.00%	24	57,332,300	200	204	Dinas PPPA dan KB	
	2.14.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bangunan dan Kendaraan Dinas	28	215,222,700	28	239,000,000	28	147,000,000	28	147,000,000	100.00%	100.00%	56	386,000,000	200	179	Dinas PPPA dan KB	
	2.14.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tagihan	12	5,399,601	12	10,688,000	12	3,688,000	12	3,688,000	100.00%	100.00%	24	14,376,000	200	266	Dinas PPPA dan KB	
	2.14.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang Milik Daerah yang Dalam Kondisi Baik	100	462,516,511	100	348,940,000	100	205,100,000	100	188,201,840	100.00%	91.76%	200	537,141,840	200	116	Dinas PPPA dan KB	
	2.14.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan	28	290,038,210	28	316,690,000	28	198,100,000	28	181,201,840	100.00%	91.47%	56	497,891,840	200	172	Dinas PPPA dan KB	
	2.14.01.2.09.11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Pra Sarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor	12	10,248,700	12	32,250,000	12	7,000,000	12	7,000,000	100.00%	100.00%	24	39,250,000	200	383	Dinas PPPA dan KB	
	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Laju pertumbuhan Penduduk	0.92	162,229,601		-	1.01	110,805,000	0.71	91,207,600	100.00%	82.31%	0.71	91,207,600	77.173913	56	Dinas PPPA dan KB	
	2.14.02.2.02	Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian penduduk Cakupan Daerah kabipaten/ Kota	Tersedianya Indikator Program bangga Kencana Dalam Kebijakan Pembangunan	100	162,229,601		-	100	110,805,000	100	91,207,600	100.00%	82.31%	100	91,207,600	100	56	Dinas PPPA dan KB	
	2.14.02.2.02.11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Tersedianya Indikator Program bangga Kencana Dalam Kebijakan Pembangunan	11	4,106,801	11	-	11	2,805,000	11	2,805,000	100.00%	100.00%	22	2,805,000	200	68	Dinas PPPA dan KB	
	2.14.02.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengelohan dan Pelaporan Data pengendalian lapangan dan Pelayanan KB	11	158,122,800	11	-	11	108,000,000	11	88,402,600	100.00%	81.85%	22	88,402,600	200	56	Dinas PPPA dan KB	
	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Total Fertility Rate	2.1	3,571,107,247	100	3,070,645,652	2.21	2,439,114,300	3	2,388,188,975	73.67%	97.91%	103	5,458,834,627	4904.7619	153	Dinas PPPA dan KB	
	2.14.03.2.01	Kegiatan Pelaksanaan advokasi,komukasi,informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal	Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat tentang Program KKBPK	100	1,049,196,022	100	673,044,645	100	716,615,000	100	716,453,000	100.00%	99.98%	200	1,389,497,645	200	132	Dinas PPPA dan KB	
	2.14.03.2.01.01	Advokasi Program KKBPK Kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, kependudukan, dan Keluarga Berencana)	2	6,405,438			2	4,375,000	2	4,375,000	100.00%	100.00%	2	4,375,000	100	68	Dinas PPPA dan KB	
	2.14.03.2.01.02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat tentang Program KKBPK	550	36,602,500			550	25,000,000	550	25,000,000	100.00%	100.00%	550	25,000,000	100	68	Dinas PPPA dan KB	
	2.14.03.2.01.04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga kencana (Pembangunan Keluarga, kependudukan, dan Keluarga Berencana) melalui Media Massa, Cetak dan Elektronik serta media Luar Ruang	11	103,424,024	11	167,215,200	11	70,640,000	11	70,640,000	100.00%	100.00%	22	237,855,200	200	230	Dinas PPPA dan KB	
	2.14.03.2.01.06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah laporan Mekanisme Opeasional Program bangga kencana (Pembangunan Keluarga, kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya	11	251,239,560			11	171,600,000	11	171,551,000	100.00%	99.97%	11	171,551,000	100	68	Dinas PPPA dan KB	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.14.03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai penyuluhan Bangga kencana (Pembangunan Keluarga, kependudukan, dan Keluarga Berencana)	10	592,960,500	10	505,829,445	10	405,000,000	10	405,000,000	100.00%	100.00%	20	910,829,445	200	154	Dinas PPPA dan KB	
	2.14.03.2.01.08	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	11	58,564,000			11	40,000,000	11	39,887,000	100.00%	99.72%	11	39,887,000	100	68	Dinas PPPA dan KB	
	2.14.03.2.02	Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Tercapainya Operasional dan Terbinanya Kader PPKBD Kabupaten Pesisir Barat		829,266,240		566,400,000		566,400,000		566,400,000		100.00%	0	1,132,800,000		137	Dinas PPPA dan KB	
	2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah kader yang mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat pedesaan (IMP)	100	829,266,240	11	566,400,000	100	566,400,000	100	566,400,000	100.00%	100.00%	111	1,132,800,000	111	137	Dinas PPPA dan KB	
	2.14.03.2.03	Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Pengetahuan Masyarakat tentang program Keluarga Berencana untuk Pelayanan KB yang Berkualitas serta Pencatatan dan pelapporan From F2KB dari Faskes atau klinik	12	985,484,685	100	1,557,730,007	12	673,099,300	12	622,398,575	100.00%	92.47%	112	2,180,128,582	933	221	Dinas PPPA dan KB	
	2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Terwujudnya Pendistribusian Alkon Ke Fasilitas Kesehatan	12	7,906,140	12	27,948,000	12	5,400,000	12	4,200,000	100.00%	77.78%	24	32,148,000	200	407	Dinas PPPA dan KB	
	2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi jangka Panjang (MKJP)	11	327,317,563	11	590,920,000	11	223,562,300	11	208,506,200	100.00%	93.27%	22	799,426,200	200	244	Dinas PPPA dan KB	
	2.14.03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	9	640,597,922	10	938,862,007	9	437,537,000	9	403,120,125	100.00%	92.13%	19	1,341,982,132	211	209	Dinas PPPA dan KB	
	2.14.03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Meningkatnya pengetahuan Masyarakat tentang Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	550	9,663,060	11	-	550	6,600,000	550	6,572,250	100.00%	99.58%	561	6,572,250	102	68	Dinas PPPA dan KB	
	2.14.03.2.04	Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Kader dan Kelompok Kerja (POKJA) yang Terbentuk dan Terbina di Kampung KB	100	707,160,300	100	273,471,000	100	483,000,000	100	482,937,400	100.00%	99.99%	200	756,408,400	200	107	Dinas PPPA dan KB	
	2.14.03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Terlaksananya pembentukan Kelompok Kerja dan Pembeinaan Kader Pokja di Kampung KB	28	707,160,300	100	273,471,000	28	483,000,000	28	482,937,400	100.00%	99.99%	128	756,408,400	457	107	Dinas PPPA dan KB	
	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Indeks Pembangunan Keluarga	64	1,219,390,326		-	56.5	832,860,000	52.36	249,340,000	92.67%	29.94%	52.36	249,340,000	81.8125	20	Dinas PPPA dan KB	
	2.14.04.2.01	Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluaraga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Forum Generasi Berencana, Kelompok BKB-HI, Forum Asosiasi Kelompok UPPKS dan Kader Poktan PKB dan PPKBD yang Mendapatkan pembinaan tentang Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga serta Tim pendamping Keluarga yang Mendapatkan Biaya Operasional	100	1,219,390,326		-	100	832,860,000	100	249,340,000	100.00%	29.94%	100	249,340,000	100	20	Dinas PPPA dan KB	
	2.14.04.2.01.05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Tim pendamping keluarga (TPK) yang mendapatkan Biaya Operasional	100	1,219,390,326		-	402	832,860,000	130	249,340,000	32.34%	29.94%	130	249,340,000	130	20	Dinas PPPA dan KB	
9		**Perhubungan**																	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	95%	9,726,857,125	90%	1,397,250,408	90%	1,945,371,425	90%	1,769,167,130	100.00%	90.94%	90%	1,769,167,130	95%	18	Dinas Perhubungan	
	5 . 15 . 01 . 2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	32,000,000	100%	6,400,000	100%	6,400,000	100%	6,400,000	100.00%	100.00%	100%	6,400,000	100%	20	Dinas Perhubungan	
	2 . 15 . 01 . 2.01 . 01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen dan Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan SKPD	10 dokumen	7,000,000	2 dokumen	1,400,000	2 dokumen	1,400,000	2 dokumen	1,400,000	100.00%	100.00%	2 dokumen	1,400,000	20%	20	Dinas Perhubungan	
	2 . 15 . 01 . 2.01 . 06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	10 laporan	25,000,000	2 laporan	5,000,000	2 laporan	5,000,000	2 laporan	5,000,000	100.00%	100.00%	2 laporan	5,000,000	20%	20	Dinas Perhubungan	
	5 . 15 . 01 . 2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	7,049,312,125	100%	913,607,871	100%	1,409,862,425	100%	1,235,019,212	100.00%	87.60%	100%	1,235,019,212	100%	18	Dinas Perhubungan	
	2 . 15 . 01 . 2.02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	65 bulan	7,021,812,125	8 bulan	908,107,871	14 bulan	1,404,362,425	14 bulan	1,229,519,212	100.00%	87.55%	14 bulan	1,229,519,212	22%	18	Dinas Perhubungan	
	2 . 15 . 01 . 2.02 . 05	Sub Kegiatan koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun SKPD	5 laporan	12,500,000	1 laporan	2,500,000	1 laporan	2,500,000	1 laporan	2,500,000	100.00%	100.00%	1 laporan	2,500,000	20%	20	Dinas Perhubungan	
	2 . 15 . 01 . 2.02 . 07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesreran SKPD	Tersedianya laporan keuangan semesteran	10 laporan	10,000,000	2 laporan	2,000,000	2 laporan	2,000,000	2 laporan	2,000,000	100.00%	100.00%	2 laporan	2,000,000	20%	20	Dinas Perhubungan	
	2 . 15 . 01 . 2.02 . 08	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	5 dokumen	5,000,000	1 dokumen	1,000,000	1 dokumen	1,000,000	1 dokumen	1,000,000	100.00%	100.00%	1 dokumen	1,000,000	20%	20	Dinas Perhubungan	
	5 . 15 . 01 . 2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	1,500,000,000	100%	10,000,000	100%	300,000,000	100%	300,000,000	100.00%	100.00%	100%	300,000,000	100%	20	Dinas Perhubungan	
	2 . 15 . 01 . 2.05 . 09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terpenuhinya pembiayaan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai	66 orang	1,500,000,000	13 orang	10,000,000	13 orang	300,000,000	13 orang	300,000,000	100.00%	100.00%	13 orang	300,000,000	20%	20	Dinas Perhubungan	
	5 . 15 . 01 . 2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	523,045,000	100%	254,342,537	100%	104,609,000	100%	103,752,920	100.00%	99.18%	100%	103,752,920	100%	20	Dinas Perhubungan	
	2 . 15 . 01 . 2.06 . 01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instaslasi listrik	60 paket	5,000,000	12 paket	2,000,000	12 paket	1,000,000	12 paket	1,000,000	100.00%	100.00%	12 paket	1,000,000	20%	20	Dinas Perhubungan	
	2 . 15 . 01 . 2.06 . 04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya pameran	60 paket	125,000,000	12 paket		12 paket	25,000,000	12 paket	25,000,000	100.00%	100.00%	12 paket	25,000,000	20%	20	Dinas Perhubungan	
	2 . 15 . 01 . 2.06 . 05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya alat tulis kantor, penggandaan dan barang cetak	60 paket	125,045,000	12 paket	25,008,560	12 paket	25,009,000	12 paket	24,152,920	100.00%	96.58%	12 paket	24,152,920	20%	19	Dinas Perhubungan	
	2 . 15 . 01 . 2.06 . 06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan	50 dokumen	60,000,000	10 dokumen	12,000,000	10 dokumen	12,000,000	10 dokumen	12,000,000	100.00%	100.00%	10 dokumen	12,000,000	20%	20	Dinas Perhubungan	
	2 . 15 . 01 . 2.06 . 08	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Tersedianya makanan dan minuman	55 laporan	55,000,000	11 laporan	11,000,000	11 laporan	11,000,000	11 laporan	11,000,000	100.00%	100.00%	11 laporan	11,000,000	20%	20	Dinas Perhubungan	
	2 . 15 . 01 . 2.06 . 09	Sub Kegiatan Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya rapat koordinasi dan konsultasi	60 laporan	153,000,000	12 laporan	204,333,977	12 laporan	30,600,000	12 laporan	30,600,000	100.00%	100.00%	12 laporan	30,600,000	20%	20	Dinas Perhubungan	
	5 . 15 . 01 . 2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	400,000,000	100%	95,900,000	100%	80,000,000	100%	79,500,000	100.00%	99.38%	100%	79,500,000	100%	20	Dinas Perhubungan	
	2 . 15 . 01 . 2.08 . 02	Sub Kegiatan Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Terpenuhinya pembiayaan listrik, telpon dan internet	60 laporan	90,000,000	12 laporan	20,400,000	12 laporan	18,000,000	12 laporan	17,500,000	100.00%	97.22%	12 laporan	17,500,000	20%	19	Dinas Perhubungan	
	2 . 15 . 01 . 2.08 . 03	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya pembiayaan sewa kantor, sewa rumah dinas dan sewa kendaraan dinas	5 laporan	285,000,000	1 laporan	70,500,000	2 laporan	57,000,000	2 laporan	57,000,000	100.00%	100.00%	2 laporan	57,000,000	40%	20	Dinas Perhubungan	
	2 . 15 . 01 . 2.08 . 04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya kebersihan kantor	60 laporan	25,000,000	12 laporan	5,000,000	12 laporan	5,000,000	12 laporan	5,000,000	100.00%	100.00%	12 laporan	5,000,000	20%	20	Dinas Perhubungan	
	5 . 15 . 01 . 2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	222,500,000	100%	117,000,000	100%	44,500,000	100%	44,494,998	100.00%	99.99%	100%	44,494,998	100%	20	Dinas Perhubungan	
	2 . 15 . 01 . 2.09 . 02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya pembiayaan pemeliharaan kendaraan dinas dan pembiayaan pajak kendaraan dinas	25 unit	210,000,000	5 unit	99,500,000	5 unit	42,000,000	5 unit	41,994,998	100.00%	99.99%	5 unit	41,994,998	20%	20	Dinas Perhubungan	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2 . 15 . 01 . 2.09 . 09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpenuhinya Pembiayaan Pemeliharaan Gedung Kantor	5 unit	12,500,000	1 unit	17,500,000	1 unit	2,500,000	1 unit	2,500,000	100.00%	100.00%	1 unit	2,500,000	20%	20	Dinas Perhubungan	
	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Pelayanan Angkutan Darat	75%	5,953,821,800	100%	1,043,649,972	70%	1,190,764,360	70%	1,179,539,676	100.00%	99.06%	70%	1,179,539,676	93%	20	Dinas Perhubungan	
	2.15.02.2.02	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	100%	3,912,100,000	100%	845,387,372	100%	782,420,000	100%	782,401,676	100.00%	100.00%	100%	782,401,676	100%	20	Dinas Perhubungan	
	2.15.02.2.02.02	Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Biaya Rehabilitasi dan pemeliharaan Perlengkapan Jalan	100 unit	3,912,100,000	20 unit	845,387,372	20 unit	782,420,000	20 unit	782,401,676	100.00%	100.00%	20 unit	782,401,676	20%	20	Dinas Perhubungan	
	2.15.02.2.06	Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	100%	85,000,000	100%	20,162,600	100%	17,000,000	100%	17,000,000	100.00%	100.00%	100%	17,000,000	100%	20	Dinas Perhubungan	
	2.15.02.2.06.01	Sub Kegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jalan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya biaya pelaksanaan operasi ketupat, operasi tahun baru dan operasi lilin	15 laporan	85,000,000	3 laporan	20,162,600	3 laporan	17,000,000	3 laporan	17,000,000	100.00%	100.00%	3 laporan	17,000,000	20%	20	Dinas Perhubungan	
	2.15.02.2.09	Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	100%	716,801,400	100%	178,100,000	100%	143,360,280	100%	143,138,000	100.00%	99.84%	100%	143,138,000	100%	20	Dinas Perhubungan	
	2.15.02.2.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Biaya Operasional dan Pemeliharaan Bus Sekolah	35 unit	404,000,000	7 unit	39,700,000	7 unit	80,800,000	7 unit	80,700,000	100.00%	99.88%	7 unit	80,700,000	20%	20	Dinas Perhubungan	
	2.15.02.2.09.02	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Biaya Operasional dan Pemeliharaan Kendaraan Transportasi teknis milih dinas	35 unit	312,801,400	7 unit	138,400,000	7 unit	62,560,280	7 unit	62,438,000	100.00%	99.80%	7 unit	62,438,000	20%	20	Dinas Perhubungan	
	2.15.02.2.16	Kegiatan Penetapan tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penetapan tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota	100%	1,239,920,400	0%	-	100%	247,984,080	100%	237,000,000	100.00%	95.57%	100%	237,000,000	100%	19	Dinas Perhubungan	
	2.15.02.2.16.03	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota	Terpenuhinya Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang	1160 orang	1,239,920,400	orang	-	235 orang	247,984,080	232 orang	237,000,000	98.72%	95.57%	232 orang	237,000,000	20%	19	Dinas Perhubungan	
	3	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Cakupan Wilayah yang terlayani Angkutan Laut	65%	829,393,000	100%	108,690,000	50%	165,878,600	50%	132,585,000	100.00%	79.93%	50%	132,585,000	77%	16	Dinas Perhubungan	
	2.15.03.2.06	Kegiatan Penetapan Lintas Penyeberangan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota Yang Terletak Pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penetapan Lintas Penyeberangan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota Yang Terletak Pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	100%	544,550,000	100%	108,690,000	100%	108,910,000	100%	107,085,000	100.00%	98.32%	100%	107,085,000	100%	20	Dinas Perhubungan	
	2.15.03.2.06.02	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya biaya operasional dan pemeliharaan kapal teknis milik pemerintahan daerah kabupaten pesisir barat	25 unit	544,550,000	5 unit	108,690,000	5 unit	108,910,000	5 unit	107,085,000	100.00%	98.32%	5 unit	107,085,000	20%	20	Dinas Perhubungan	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.15.03.2.09	Kegiatan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	284,843,000	0%	-	100%	56,968,600	100%	25,500,000	100.00%	44.76%	100%	25,500,000	100%	9	Dinas Perhubungan	
	2.15.03.2.09.03	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi	85 orang	284,843,000	orang	-	17 orang	56,968,600	17 orang	25,500,000	100.00%	44.76%	17 orang	25,500,000	20%	9	Dinas Perhubungan	
10	2.16	**Komunikasi dan Informatika**																Dinas Kominfotik dan Persandian	
	2.16.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95%	20,075,529,617	90%	2,420,759,786	90.00%	3,228,580,075	90.00%	2,831,910,366	100.00%	87.71%	90.00%	2,831,910,366	20.00%	14.11%	Dinas Kominfotik dan Persandian	
	2.16.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	95%	34,233,341	100%	6,400,000	90.00%	2,835,000	100.00%	2,835,000	100.00%	100.00%	100.00%	2,835,000	20.00%	8.28%	Dinas Kominfotik dan Persandian	
	2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja	10 Dokumen	7,488,543	2 Dokumen	1,400,000	2 Dokumen	960,000	2 Dokumen	960,000	100.00%	100.00%	2 Dokumen	960,000	20.00%	12.82%	Dinas Kominfotik dan Persandian	
	2.16.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	10 Laporan	26,744,798	2 Laporan	5,000,000	2 Laporan	1,875,000	2 Laporan	1,875,000	100.00%	100.00%	2 Laporan	1,875,000	20.00%	7.01%	Dinas Kominfotik dan Persandian	
	2.16.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu	95%	9,117,721,557	100%	1,083,490,458	90.00%	1,526,576,475	100.00%	1,139,232,085	100.00%	74.63%	100.00%	1,139,232,085	20.00%	12.49%	Dinas Kominfotik dan Persandian	
	2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	70 bulan	9,088,302,279	14 Bulan	1,077,990,458	14 bulan	1,523,380,075	14 bulan	1,136,035,685	100.00%	74.57%	14 bulan	1,136,035,685	20.00%	12.50%	Dinas Kominfotik dan Persandian	
	2.16.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	5 Laporan	13,372,399	1 Laporan	2,500,000	1 Laporan	1,200,000	1 Laporan	1,200,000	100.00%	100.00%	1 Laporan	1,200,000	20.00%	8.97%	Dinas Kominfotik dan Persandian	
	2.16.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	10 Laporan	10,697,919	2 Laporan	2,000,000	2 Laporan	1,350,000	2 Laporan	1,350,000	100.00%	100.00%	2 Laporan	1,350,000	20.00%	12.62%	Dinas Kominfotik dan Persandian	
	2.16.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5 Laporan	5,348,960	12 Bulan	1,000,000	1 Laporan	646,400	1 Laporan	646,400	100.00%	100.00%	1 Laporan	646,400	20.00%	12.08%	Dinas Kominfotik dan Persandian	
	2.16.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja	95.00%	10,000,879,186	85.71%	1,190,142,825	90.00%	1,584,707,850	100.00%	1,578,665,705	100.00%	99.62%	100.00%	1,578,665,705	19.57%	15.79%	Dinas Kominfotik dan Persandian	
	2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik	300 Buah	29,954,174	12 bulan	5,600,000	60 Buah	2,978,000	51 buah	2,978,000	100.00%	100.00%	51 buah	2,978,000	17.00%	9.94%	Dinas Kominfotik dan Persandian	
	2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bangunan dan Kendaraan Dinas	10 unit	877,229,377	12 Bulan	90,500,000	2 unit	93,000,000	2 unit	91,250,000	100.00%	98.12%	2 unit	91,250,000	20.00%	10.40%	Dinas Kominfotik dan Persandian	
	2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Pameran Pembangunan Pesisir Barat	5 kali	133,723,990	-	-	1 kali	25,000,000	1 kali	25,000,000	100.00%	100.00%	1 kali	25,000,000	20.00%	18.70%	Dinas Kominfotik dan Persandian	
	2.16.01.2.06.05	Peneyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya Barang Cetak, Penggandaan dan Kebutuhan ATK	60 Bulan	1,617,133,844	12 bulan	270,991,800	12 bulan	254,836,600	12 bulan	254,836,600	100.00%	100.00%	12 bulan	254,836,600	20.00%	15.76%	Dinas Kominfotik dan Persandian	
	2.16.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	60 Bulan	6,588,634,495	12 Bulan	686,770,000	12 Bulan	910,160,000	12 Bulan	906,160,000	100.00%	99.56%	12 Bulan	906,160,000	20.00%	13.75%	Dinas Kominfotik dan Persandian	
	2.16.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Layanan Jasa Penyediaan Makanan dan Minuman	55 Bulan	58,838,556	11 bulan	11,000,000	11 Bulan	21,000,000	11 Bulan	21,000,000	100.00%	100.00%	11 Bulan	21,000,000	20.00%	35.69%	Dinas Kominfotik dan Persandian	
	2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi Di Luar Kantor	60 Bulan	695,364,750	12 Bulan	125,281,025	12 Bulan	277,733,250	12 Bulan	277,441,105	100.00%	99.89%	12 Bulan	277,441,105	20.00%	39.90%	Dinas Kominfotik dan Persandian	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.16.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Pendukung	95%	363,729,254	100%	48,611,459	90%	37,674,000	75%	34,415,826	75.00%	91.35%	75%	34,415,826	15.00%	9.46%	Dinas Kominfotik dan Persandian	
	2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Tagihan	60 Bulan	336,984,456	12 bulan	43,611,459	12 Bulan	33,800,000	9 Bulan	30,541,826	75.00%	90.36%	9 Bulan	30,541,826	15.00%	9.06%	Dinas Kominfotik dan Persandian	
	2.16.01.2.08.04	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tagihan	60 Bulan	26,744,798	12 bulan	5,000,000	12 Bulan	3,874,000	9 Bulan	3,874,000	75.00%	100.00%	9 Bulan	3,874,000	15.00%	14.49%	Dinas Kominfotik dan Persandian	
	2.16.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Dalam Kondisi Baik	95%	558,966,279	100%	92,115,044	90%	76,786,750	100%	76,761,750	100.00%	99.97%	100%	76,761,750	20.00%	13.73%	Dinas Kominfotik dan Persandian	
	2.16.01.2.09.01	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya Kendaraan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Jabatan	60 bulan	290,181,059	12 Bulan	40,490,250	12 bulan	43,297,500	12 bulan	43,297,500	100.00%	100.00%	12 bulan	43,297,500	20.00%	14.92%	Dinas Kominfotik dan Persandian	
	2.16.01.2.09.02	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya Kendaraan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	60 bulan	177,852,907	12 Bulan	30,915,794	12 bulan	17,156,250	12 bulan	17,156,250	100.00%	100.00%	12 bulan	17,156,250	20.00%	9.65%	Dinas Kominfotik dan Persandian	
	2.16.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kelancaran Operasional Kantor	60 bulan	90,932,313	12 Bulan	20,709,000	12 bulan	16,333,000	12 bulan	16,308,000	100.00%	99.85%	12 bulan	16,308,000	20.00%	17.93%	Dinas Kominfotik dan Persandian	
	2.16.02	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Peningkatan Desiminasi Informasi dan Komunikasi Publik	85%	12,557,842,972	78%	2,259,381,980	80%	1,169,830,500	80.10%	1,138,441,770	100.00%	97.32%	80%	1,138,441,770	20.00%	9.07%	Dinas Kominfotik dan Persandian	
	2.16.02.2.01	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat yang Menerima Informasi Publik dari Saluran Resmi Pemerintahan Daerah	85%	12,557,842,972	1000 orang	2,259,381,980	80.00%	1,169,830,500	100%	1,138,441,770	100.00%	97.32%	100%	1,138,441,770	20.00%	9.07%	Dinas Kominfotik dan Persandian	
	2.16.02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaaan Media Komunikasi Publik	Persentase Konten Informasi Terkait Program dan Kebijakan Pemerintah Daerah, termasuk program prioritas nasional yang termasuk isu strategis pemerintah daerah yang didesiminasikan sesuai strategi komunikasi	100%	1,783,072,568	12 Bulan	297,618,262	100%	245,553,000	100%	242,050,400	100.00%	98.57%	100%	242,050,400	20.00%	13.57%	Dinas Kominfotik dan Persandian	
	2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Persentase Informasi Publik yang disediakan dan diumumkan oleh dins provinsi dan kab/kota sesuai amanat UU No. 14 Tahun2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	100%	3,019,594,232	12 Bulan	468,568,718	100%	72,800,000	100%	67,713,870	100.00%	93.01%	100%	67,713,870	20.00%	2.24%	Dinas Kominfotik dan Persandian	
	2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Persentase Pelayanan Informasi Publik di Kabupaten Pesisir Barat	100%	309,867,265	12 Bulan	57,045,000	100%	13,477,500	100%	13,477,500	100.00%	100.00%	100%	13,477,500	20.00%	4.35%	Dinas Kominfotik dan Persandian	
	2.16.02.2.01.07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Media yang Bekerjasama	500 Media	7,445,308,907	12 Bulan	1,436,150,000	100 Media	838,000,000	114 Media	815,200,000	100.00%	97.28%	114 Media	815,200,000	20.00%	10.95%	Dinas Kominfotik dan Persandian	
	2.16.03	Program Aplikasi Informatika	Persentase Peningkatan Layanan Informasi dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	85%	109,135,521	77%	107,763,438	80%	129,100,000	100%	129,062,100	100.00%	99.97%	100%	129,062,100	20.00%	118.26%	Dinas Kominfotik dan Persandian	
	2.16.03.2.02	Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Pemerintah Secara Digital	80%	109,135,521	80%	107,763,438	80%	129,100,000	100%	129,062,100	100.00%	99.97%	100%	129,062,100	20.00%	118.26%	Dinas Kominfotik dan Persandian	
	2.16.03.2.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Derah	Operasional Pengelolaan Data	60 bulan	109,135,521	12 Bulan	107,763,438	12 bulan	129,100,000	12 bulan	129,062,100	100.00%	99.97%	12 bulan	129,062,100	20.00%	118.26%	Dinas Kominfotik dan Persandian	
11		**Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah**																	
	2.17 . 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95	-	0	-	90	2,385,803,750	90	1,640,079,014	100.00%	68.74%	69	1,640,079,014	72.631579	0	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	
	2.17 . 01 . 2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan	95	-	0	-	90	7,000,000	100	6,999,800	100.00%	100.00%	100	6,999,800	105.26316	0	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	10	-	0	-	2	2,000,000	2	2,000,000	100.00%	100.00%	2	2,000,000	20	0	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	60	-	0	-	12	5,000,000	12	4,999,800	100.00%	100.00%	12	4,999,800	20	0	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	
	2.17 . 01 . 2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan	95	-	0	-	90	1,901,932,350	62	1,181,858,490	68.89%	62.14%	62	1,181,858,490	65.26	0	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	60	-	0	-	12	1,896,432,350	12	1,176,358,490	100.00%	62.03%	12	1,176,358,490	20	0	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun	60	-	0	-	12	2,500,000	12	2,500,000	100.00%	100.00%	12	2,500,000	20	0	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	60	-	0	-	12	2,000,000	12	2,000,000	100.00%	100.00%	12	2,000,000	20	0	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersusunnya Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	60	-	0	-	12	1,000,000	12	1,000,000	100.00%	100.00%	12	1,000,000	20	0	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	
	2.17 . 01 . 2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan	95	-	0	-	90	10,000,000	100	9,990,000	100.00%	99.90%	100	9,990,000	105.26316	0	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Meningkatnya Kapasitas Sumberdaya Aparatur	60	-	0	-	12	10,000,000	12	9,990,000	100.00%	99.90%	12	9,990,000	20	0	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	
	2.17 . 01 . 2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan	95	-	0	-	90	244,376,400	99	242,831,733	100.00%	99.37%	99	242,831,733	104.21053	0	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik Bangunan Kantor	60	-	0	-	12	2,840,000	12	2,840,000	100.00%	100.00%	12	2,840,000	20	0	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Keikutsertaan pada Krui Fair	4	-	0	-	1	25,000,000	1	25,000,000	100.00%	100.00%	1	25,000,000	25	0	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya Kebutuhan ATK, Barang Cetak dan Penggandaan	60	-	0	-	12	33,536,400	12	33,535,540	100.00%	100.00%	12	33,535,540	20	0	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	60	-	0	-	12	12,000,000	12	10,600,000	100.00%	88.33%	12	10,600,000	20	0	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianyan Makan dan Minum Kantor	55	-	0	-	11	11,000,000	11	10,967,000	100.00%	99.70%	11	10,967,000	20	0	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi Ke Dalam dan Luar Daerah	60	-	0	-	12	160,000,000	12	159,889,193	100.00%	99.93%	12	159,889,193	20	0	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	
	2.17 . 01 . 2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan	95	-	0	-	90	126,745,000	85	108,401,386	94.44%	85.53%	85	108,401,386	89.47	0	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Air dan Listrik	60	-	0	-	12	19,350,000	12	18,506,386	100.00%	95.64%	12	18,506,386	20	0	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya biaya Sewa Gedung Kantor, Rumah Dinas dan Kendaraan Dinas	60	-	0	-	12	102,000,000	12	84,500,000	100.00%	82.84%	12	84,500,000	20	0	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tercapainya Kebersihan Kantor	60	-	0	-	12	5,395,000	12	5,395,000	100.00%	100.00%	12	5,395,000	20	0	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	
	2.17 . 01 . 2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan	95	-	0	-	90	95,750,000	94	89,997,605	100.00%	93.99%	94	89,997,605	98.95	0	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas / Operasional	60	-	0	-	12	85,500,000	12	79,997,605	100.00%	93.56%	12	79,997,605	20	0	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	60	-	0	-	12	10,250,000	12	10,000,000	100.00%	97.56%	12	10,000,000	20	0	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	
	2.17 . 03	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif	55	-	0		50	227,993,950	45.45	223,487,500	90.90%	98.02%	50	223,487,500	90.91	0	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	
	2.17 . 03 . 2.01	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Koperasi Aktif	55	-	0	-	50	227,993,950	45.45	223,487,500	90.90%	98.02%	50	223,487,500	90.91	0	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	
		Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Koperasi Aktif	55	-	0	-	11	227,993,950	11	223,487,500	100.00%	98.02%	11	223,487,500	20.00	0	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	
	2.17 . 05	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase Pengurus Koperasi Berkompeten	60	-	0	-	45	479,391,000	45	465,971,000	100.00%	97.20%	45	465,971,000	75	0	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	
	2.17 . 05 . 2.01	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengurus Koperasi Berkompeten	60		0	-	45	479,391,000	45	465,971,000	100.00%	97.20%	45	465,971,000	75	0	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	
		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Terlaksananya Pelatihan Tentang Perkoperasian dan UMKM	20	-	0	-	4	479,391,000	5	465,971,000	100.00%	97.20%	5	465,971,000	25	0	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	
	2.17 . 07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Kontribusi UMKM terhadap PDRB	2.29	-	0	-	1.71	2,107,038,835	1.0	2,104,730,900	55.56%	99.89%	1.0	2,104,730,900	41.48	0	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	
	2.17 . 07 . 2.01	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Kontribusi UMKM terhadap PDRB	2.29	-	0	-	1.71	2,107,038,835	1.0	2,104,730,900	55.56%	99.89%	1.0	2,104,730,900	41.48	0	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	
		Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Tersedianya Bantuan Peralatan bagi UMKM	100	-	0	-	20	198,580,400	20	197,068,500	100.00%	99.24%	20	197,068,500	20	0	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	
		Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Tersedianya Hibah dan Bantuan Sosial	5	-	0	-	1	1,908,458,435	1	1,907,662,400	100.00%	99.96%	1	1,907,662,400	20	0	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	
12		**Penanaman Modal**																	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95%	14,412,914,145	100%	5,267,759,725	90%	2,716,459,050	90%	2,126,044,043	100.00%	78.27%	90%	2,126,044,043	18.57%	19.91%	Dinas PM dan PTSPS	
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Dokumen Perencanaan	100%	66,327,101	100%	101,383,400	100%	7,680,000	99%	7,641,000	100.00%	99.47%	99%	7,641,000	20.00%	12.67%	Dinas PM dan PTSPS	
	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja	10	39,582,302	10	63,178,400	2	2,680,000	2	2,664,000	100.00%	99.40%	2	2,664,000	20.00%	6.73%	Dinas PM dan PTSPS	
	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	10	26,744,799	10	38,205,000	2	5,000,000	2	4,977,000	100.00%	99.54%	2	4,977,000	20.00%	18.61%	Dinas PM dan PTSPS	
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketertiban admistrasi Keuangan	100%	10,068,414,084	100%	1,255,411,497	100%	1,890,834,050	100%	1,307,720,836	100.00%	91.89%	100%	1,307,720,836	20.00%	17.19%	Dinas PM dan PTSPS	
	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Layanan Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS	70	10,037,368,720	14	1,212,176,997	14	1,885,030,050	14	1,301,951,836	100.00%	69.07%	14	1,301,951,836	20.00%	12.97%	Dinas PM dan PTSPS	
	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	5	13,372,400	5	20,257,500	1	2,500,000	1	2,500,000	100.00%	100.00%	1	2,500,000	20.00%	18.70%	Dinas PM dan PTSPS	
	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	90	12,324,004	90	15,336,000	18	2,304,000	18	2,269,000	100.00%	98.48%	18	2,269,000	20.00%	18.41%	Dinas PM dan PTSPS	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5	5,348,961	5	7,641,000	1	1,000,000	1	1,000,000	100.00%	100.00%	1	1,000,000	20.00%	18.70%	Dinas PM dan PTSPS	
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terciptanya peningkatan SDM yang Berdaya saing	100%	125,000,000	100%	294,000,000	100%	10,000,000	100%	10,000,000	100.00%	100.00%	100%	10,000,000	20.00%	8.00%	Dinas PM dan PTSPS	
	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti peningkatan kapasitas	10	125,000,000	10	294,000,000	2	10,000,000	2	10,000,000	100.00%	100.00%	2	10,000,000	20.00%	8.00%	Dinas PM dan PTSPS	
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi perangkat daerah	100%	3,008,490,247	100%	2,014,803,483	100%	573,944,000	100%	571,557,171	100.00%	99.58%	100%	571,557,171	16.67%	15.59%	Dinas PM dan PTSPS	
	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Aktivitas	5	133,723,991	5	275,000,000	1	25,000,000	1	24,985,000	100.00%	99.94%	1	24,985,000	20.00%	18.68%	Dinas PM dan PTSPS	
	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah ATK	60	344,708,354	60	298,554,520	12	64,444,000	12	63,294,000	100.00%	98.22%	12	63,294,000	20.00%	18.36%	Dinas PM dan PTSPS	
	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah SKHU	50	64,187,516	50	193,600,000	10	12,000,000	10	12,000,000	100.00%	100.00%	10	12,000,000	20.00%	18.70%	Dinas PM dan PTSPS	
	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Layanan Jasa Penyediaaan Makanan dan Minuman	55	58,838,557	55	75,800,000	11	11,000,000	11	11,000,000	100.00%	100.00%	11	11,000,000	20.00%	18.70%	Dinas PM dan PTSPS	
	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi di luar kantor	60	2,407,031,828	60	1,171,848,963	12	461,500,000	12	460,278,171	100.00%	99.74%	12	460,278,171	20.00%	19.12%	Dinas PM dan PTSPS	
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya barang milik daerah	100%	53,489,597	100%	163,560,000	100%	30,000,000	100%	30,000,000	100.00%	100.00%	100%	30,000,000	20.00%	56.09%	Dinas PM dan PTSPS	
	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin	5	53,489,597	45	163,560,000	1	30,000,000	1	30,000,000	100.00%	100.00%	1	30,000,000	20.00%	56.09%	Dinas PM dan PTSPS	
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	749,127,146	100%	1,156,931,400	100%	140,051,000	100%	136,087,166	100.00%	95.55%	100%	136,087,166	20.00%	17.86%	Dinas PM dan PTSPS	
	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Tagihan	60	160,468,789	60	97,125,400	12	30,000,000	12	26,041,166	100.00%	86.80%	12	26,041,166	20.00%	16.23%	Dinas PM dan PTSPS	
	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bangunan dan Kendaraan Dinas	15	572,338,680	15	958,000,000	3	107,000,000	3	107,000,000	100.00%	100.00%	3	107,000,000	20.00%	18.70%	Dinas PM dan PTSPS	
	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tagihan	60	16,319,677	60	101,806,000	12	3,051,000	12	3,046,000	100.00%	99.84%	12	3,046,000	20.00%	18.66%	Dinas PM dan PTSPS	
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya barang milik daerah	100%	342,065,969	100%	281,669,945	100%	63,950,000	100%	63,037,870	100.00%	95.99%	100%	63,037,870	13.33%	11.96%	Dinas PM dan PTSPS	
	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan	20	330,833,153	20	279,493,550	4	61,850,000	4	61,080,000	100.00%	98.76%	4	61,080,000	20.00%	18.46%	Dinas PM dan PTSPS	
	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah izin Kendaraan	20	11,232,816	20	2,176,395	4	2,100,000	4	1,957,870	100.00%	93.23%	4	1,957,870	20.00%	17.43%	Dinas PM dan PTSPS	
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Pertumbuhan Nilai Investasi PMA	7%	3,814,576,076	100%	3,046,085,269	5.05%	1,631,279,000	100%	1,617,429,117	100.00%	99.15%	100%	1,617,429,117	20.00%	42.40%	Dinas PM dan PTSPS	
		Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah minat Investasi	100%	3,814,576,076	100%	3,046,085,269	100%	1,631,279,000	100%	1,617,429,117	100.00%	99.15%	100%	1,617,429,117	20.00%	42.40%	Dinas PM dan PTSPS	
	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal	10	3,814,576,076	15	3,046,085,269	2	1,631,279,000	2	1,617,429,117	100.00%	99.15%	2	1,617,429,117	20.00%	42.40%	Dinas PM dan PTSPS	
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Pertumbuhan Nilai Investasi PMDN	17.49%	3,303,251,813	100%	2,122,955,810	15.99%	363,438,480	64.53%	352,235,780	100.00%	96.92%	100%	352,235,780	20.00%	12.29%	Dinas PM dan PTSPS	
		Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	6,105	3,303,251,813	100%	2,122,955,810	100%	363,438,480	100%	352,235,780	100.00%	97.36%	100%	352,235,780	20.00%	12.29%	Dinas PM dan PTSPS	
	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	jumlah izin yang dikeluarkan	3000	655,240,457	3000	804,386,250	600	149,762,000	600	148,250,800	100.00%	98.99%	600	148,250,800	20.00%	22.63%	Dinas PM dan PTSPS	
	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Rekomendasi	3000	695,963,870	3000	398,832,100	600	55,309,000	600	54,470,000	100.00%	98.48%	600	54,470,000	20.00%	7.83%	Dinas PM dan PTSPS	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Pengaduan yang Ditindak Lanjuti	50	390,294,053	50	294,901,800	10	47,500,000	10	47,456,000	100.00%	99.91%	10	47,456,000	20.00%	12.16%	Dinas PM dan PTSPS	
	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Laporan	55	1,561,753,433	55	624,835,660	11	110,867,480	11	102,058,980	100.00%	92.05%	11	102,058,980	20.00%	6.53%	Dinas PM dan PTSPS	
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Rasio Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha terhadap Ketentuan Perizinan	90%	3,529,074,244	100%	1,203,457,000	80%	484,525,000	100%	386,125,000	100.00%	79.69%	100%	386,125,000	20.00%	10.48%	Dinas PM dan PTSPS	
		Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	15	3,529,074,244	100%	1,203,457,000	100%	484,525,000	100%	386,125,000	100.00%	77.74%	100%	386,125,000	20.00%	10.48%	Dinas PM dan PTSPS	
	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Laporan pemantauan pelaksanaan penanaman modal	5	925,357,921	5	461,853,600	1	109,309,000	1	56,309,000	100.00%	51.51%	1	56,309,000	20.00%	6.09%	Dinas PM dan PTSPS	
	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Laporan pembinaan pelaksanaan penanaman modal	5	1,637,560,006	5	680,748,900	1	251,456,000	1	206,641,000	100.00%	82.18%	1	206,641,000	20.00%	12.62%	Dinas PM dan PTSPS	
	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Laporan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	5	966,156,317	5	60,854,500	1	123,760,000	1	123,175,000	100.00%	99.53%	1	123,175,000	20.00%	12.75%	Dinas PM dan PTSPS	
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah Data Laporan Perizinan dan Non Perizinan	25	1,604,711,994	5	490,615,200	5	127,446,000	5	125,557,000	100.00%	98.52%	100%	125,557,000	20.00%	7.82%	Dinas PM dan PTSPS	
		Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan	1885	1,604,711,994	100%	490,615,200	100%	127,446,000	100%	125,557,000	100.00%	98.52%	100%	125,557,000	20.00%	7.82%	Dinas PM dan PTSPS	
	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen	5	1,604,711,994	5	490,615,200	1	127,446,000	1	125,557,000	100.00%	98.52%	1	125,557,000	20.00%	7.82%	Dinas PM dan PTSPS	
13		**Kepemudaan dan Olahraga**																	
		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	95%	21,414,233,270	100%	5,631,328,022	90%	6,972,356,520	90%	4,808,508,131	100.00%	68.97%	100%	4,808,508,131	100%	95%	Dinas Pora	
	2.13.2.13.01.01.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		95%	32,000,000	100%	6,400,000	100%	6,400,000	90%	6,400,000	90.00%	100.00%	100%	6,400,000			Dinas Pora	
	2.13.2.13.01.01.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja	19	7,000,000	4	1,400,000	4	1,400,000	4	1,400,000	100.00%	100.00%	4	1,400,000	100%	100%	Dinas Pora	
	2.13.2.13.01.01.01.02	koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA- SKPD	24	25,000,000	4	5,000,000	4	5,000,000	4	5,000,000	100.00%	100.00%	4	5,000,000	100%	100%	Dinas Pora	
	2.13.2.13.01.01.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah		85%	9,168,301,000	100%	1,161,334,696	90%	1,833,460,200	90%	1,088,029,005	100.00%	59.34%	100%	1,088,029,005			Dinas Pora	
	2.13.2.13.01.01.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan pns	65	9,082,580,000	13	1,144,390,496	13	1,816,516,000	13	1,071,396,805	100.00%	58.98%	13	1,071,396,805	100%	92%	Dinas Pora	
	2.13.2.13.01.01.02.02	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas asn	Jumlah alat tulis kantor	72	57,221,000	12	11,444,200	13	11,444,200	12	11,132,200	92.31%	97.27%	12	11,132,200	100%	99%	Dinas Pora	
	2.13.2.13.01.01.02.05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan SKPD	5	12,500,000	1	2,500,000	1	2,500,000	1	2,500,000	100.00%	100.00%	1	2,500,000	100%	100%	Dinas Pora	
	2.13.2.13.01.01.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / triwulan/semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulnan/triwulan	12	10,000,000	2	2,000,000	2	2,000,000	2	2,000,000	100.00%	100.00%	2	2,000,000	100%	100%	Dinas Pora	
	2.13.2.13.01.01.02.08	Penyusunan Peloporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan analis prognosis realisasi anggaran skpd	6	6,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	100.00%	100.00%	1	1,000,000	100%	100%	Dinas Pora	
	2.13.2.13.01.01.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	50,000,000	100%	9,000,000	100%	13,500,000	100%	13,500,000	100.00%	100.00%	100%	13,500,000			Dinas Pora	
	2.13.2.13.01.01.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Jumlah aparatur SDM yang mengikuti Diklat/Bimtek/Kursus/Pelatihan	5	50,000,000	1	9,000,000	1	13,500,000	1	13,500,000	100.00%	100.00%	1	13,500,000	100%	98%	Dinas Pora	
	2.13.2.13.01.01.06	Kegiatan Administrasi umum Perangkat Daerah		90%	1,071,179,000	100%	238,431,000	80%	319,431,000	100%	318,838,920	100.00%	99.81%	100%	318,838,920			Dinas Pora	
	2.13.2.13.01.01.06.01	Penyediaan Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik	6	25,020,000	1	5,004,000	1	5,004,000	1	5,004,000	100.00%	100.00%	1	5,004,000	100%	100%	Dinas Pora	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.13.2.13.01.01.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah aktifitas	10	75,000,000	0	-	1	25,000,000	1	25,000,000	100.00%	100.00%	1	25,000,000	100%	100%	Dinas Pora	
	2.13.2.13.01.01.06.05	Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	Jumlah ATK	72	72,255,000	12	14,451,000	12	14,451,000	12	14,451,000	100.00%	100.00%	12	14,451,000	100%	100%	Dinas Pora	
	2.13.2.13.01.01.06.06	Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Jumlah SKHU	60	60,000,000	12	12,000,000	12	12,000,000	12	12,000,000	100.00%	100.00%	12	12,000,000	100%	100%	Dinas Pora	
	2.13.2.13.01.01.06.08	Fasilitas kunjungan tamu	Jumlah layanan jasa penyediaan makan dan minum	120	55,000,000	12	11,000,000	12	12,000,000	12	12,000,000	100.00%	100.00%	12	12,000,000	100%	100%	Dinas Pora	
	2.13.2.13.01.01.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi diluar kantor	72	783,904,000	12	195,976,000	12	250,976,000	12	250,383,920	100.00%	99.76%	12	250,383,920	100%	100%	Dinas Pora	
	2.13.2.13.01.01.08	Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100%	591,740,000	100%	110,309,572	90%	118,348,000	100%	113,467,844	100.00%	95.88%	100%	113,467,844			Dinas Pora	
	2.13.2.13.01.01.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran tagihan	72	78,000,000	12	7,561,572	14	15,600,000	12	10,719,844	85.71%	68.72%	12	10,719,844	100%	89%	Dinas Pora	
	2.13.2.13.01.01.08.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bangunan dan kendaraan dinas	72	485,000,000	60	97,000,000	12	97,000,000	12	97,000,000	100.00%	100.00%	12	97,000,000	100%	100%	Dinas Pora	
	2.13.2.13.01.01.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah tagihan	72	28,740,000	60	5,748,000	12	5,748,000	12	5,748,000	100.00%	100.00%	12	5,748,000	100%	100%	Dinas Pora	
	2.13.2.13.01.01.09	Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		95%	432,610,000	100%	84,872,000	90%	110,122,000	100%	110,122,000	100.00%	100.00%	100%	110,122,000			Dinas Pora	
	2.13.2.13.01.01.09.01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan	Jumlah kendaraan	72	273,500,000	60	53,200,000	12	66,872,000	12	66,872,000	100.00%	100.00%	12	66,872,000	100%	99%	Dinas Pora	
	2.13.2.13.01.01.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas	Jumlah pajak	72	10,750,000	60	2,000,000	12	4,650,000	12	4,650,000	100.00%	100.00%	12	4,650,000	100%	98%	Dinas Pora	
	2.13.2.13.01.01.09.06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin	72	93,360,000	60	18,672,000	12	27,600,000	12	27,600,000	100.00%	100.00%	12	27,600,000	100%	100%	Dinas Pora	
	2.13.2.13.01.01.09.09	Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana kantor	72	25,000,000	60	5,000,000	12	5,000,000	12	5,000,000	100.00%	100.00%	12	5,000,000	100%	100%	Dinas Pora	
	2.13.2.13.01.01.09.10	Pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor lainnya	Jumlah sarana dan prasarana kantor	72	30,000,000	60	6,000,000	12	6,000,000	12	6,000,000	100.00%	100.00%		6,000,000	100%	100%	Dinas Pora	
	B	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Cakupan pemenuhan pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan (persen)	60%	4,224,500,000	50%	1,973,924,050	50%	2,087,600,000	19%	1,487,644,068	38.00%	71.26%					Dinas Pora	
	2.13.2.13.01.01.15	Kegiatan Penyadaraan, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor terhadap pemuda pelopor		60%	4,224,500,000	50%	840,212,450	50%	844,900,000	100%	632,644,068	100.00%	74.88%	100%	632,644,068			Dinas Pora	
	2.13.2.13.01.01.15.01	Koordinasi,sikronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing pemuda pelopr	Jumlah pemuda pelopor	15	316,900,000	12	61,502,000	14	63,380,000	12	49,335,000	85.71%	77.84%	12	49,335,000	100%	99%	Dinas Pora	
	2.13.2.13.01.01.15.02	Koordinasi,sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing wira usaha pemula	Jumlah pemuda yang difasilitasi sebagai kader kewirausahaan	12	282,600,000	12	55,895,800	20	56,520,000	12	16,500,000	60.00%	29.19%	12	16,500,000	100%	99%	Dinas Pora	
	2.13.2.13.01.01.15.08	Peningkatan Kepemimpinan , kepoloporan dan kesukarelawan pemuda	Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam peningkatan wawasan kebangsaan,perdamaian,dan lingkungan hidup	28	3,625,000,000	8	722,814,650	16	725,000,000	8	566,809,068	50.00%	78.18%	8	566,809,068	100%	99%	Dinas Pora	
	2.13.2.13.01.01.16	Kegiatan Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah kab / kota		60%	1,242,700,000	50%	1,133,711,600	50%	1,242,700,000	100%	855,000,000	100.00%	68.80%	100%	855,000,000			Dinas Pora	
	2.13.2.13.01.01.16.02	Peningkatan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan kab / kota	Persentase organisasi kepemudaan yang memenuhi kualifikasi berdasarkan standar organisasi kepemudaan	30	1,242,700,000	12	1,133,711,600	16	1,242,700,000	12	855,000,000	75.00%	68.80%	12	855,000,000	100%	91%	Dinas Pora	
	C	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Cakupan pemenuhan pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan (persen)	60%	4,601,203,270	45%	2,047,056,704	45%	2,483,495,320	75%	1,670,506,294	100.00%	67.26%	0.75				Dinas Pora	
	2.13.2.13.01.01.17	Kegiatan Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenanagan kab/kota		60%	745,000,000	45%	94,486,000	100%	149,000,000	100%	79,990,000	100.00%	53.68%	100%	79,990,000			Dinas Pora	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.13.2.13.01.01.17.03	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana olahraga	Jumlah sarana dan prasarana olahraga	60	745,000,000	12	94,486,000	20	149,000,000	12	79,990,000	60.00%	53.68%	12	79,990,000	100%	92%	Dinas Pora	
	2.13.2.13.01.01.18	Kegiatan Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah kab / kota		40%	822,856,900	50%	161,901,430	100%	164,571,380	100%	61,106,400	100.00%	37.13%	100%	61,106,400			Dinas Pora	
	2.13.2.13.01.01.18.01	Penyelenggaraan kejuaraan olahraga multi event dan single event tingkat kab / kota	Persentase penyelenggaraan kejuaraan/perlombaan olahraga skala kabupaten yang di fasilitasi pemerintah daerah	10	822,856,900	4	161,901,430	10	164,571,380	4	61,106,400	40.00%	37.13%	4	61,106,400	100%	99%	Dinas Pora	
	2.13.2.13.01.01.19	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi		80%	776,429,770	40%	155,285,954	100%	265,000,000	100%	264,485,954	100.00%	99.81%	100%	264,485,954			Dinas Pora	
	2.13.2.13.01.01.19.03	Pembinaan dan pengembangan atlet berprestasi kab / kota	Persentase olahragawan andalan yang di bina	60	776,429,770	12	155,285,954	14	265,000,000	12	264,485,954	85.71%	99.81%	12	264,485,954	100%	100%	Dinas Pora	
	2.13.2.13.01.01.20	Kegiatan Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga		60%	1,805,000,000	45%	1,545,000,000	100%	1,805,000,000	100%	1,165,000,000	80.00%	64.54%	100%	1,165,000,000			Dinas Pora	
	2.13.2.13.01.01.20.02	Pengembangan organisasi keolahragaan	Jumlah organisasi keolahragaan yang difasilitasi dalam memenuhi kualifikasi berdasarkan standar organisasi keolahragaan	20	1,805,000,000	12	1,545,000,000	15	1,805,000,000	12	1,165,000,000	80.00%	64.54%	12	1,165,000,000	100%	85%	Dinas Pora	
	2.13.2.13.01.01.21	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan olahraga rekreasi		60%	451,916,600	45%	90,383,320	100%	99,923,940	100%	99,923,940	100.00%	100.00%	100%	99,923,940			Dinas Pora	
	2.13.2.13.01.01.21.01	Penyelenggaraan, pengembangan dan pemasalan festival dan olahraga rekreasi	Jumlah perlombaan olahraga massal	6	451,916,600	12	90,383,320	12	99,923,940	12	99,923,940	100.00%	100.00%	12	99,923,940	100%	100%	Dinas Pora	
14	2.20	**Statistik**																Dinas Kominfotik dan Persandian	
	2.20.02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Data dan Informasi Statistik Daerah yang Tersusun dengan Baik	10 Dokumen	308,234,965	2 Dokumen	37,605,750	1 Dokumen	41,545,000	1 Dokumen	37,884,100	100.00%	91.19%	1 Dokumen	37,884,100	20.00%	12.29%	Dinas Kominfotik dan Persandian	
	2.20.02.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pengelolaan Data Statistik Sektoral	10 Dokumen	308,234,965	2 Dokumen	37,605,750	1 Dokumen	41,545,000	1 Dokumen	37,884,100	100.00%	91.19%	1 Dokumen	37,884,100	20.00%	12.29%	Dinas Kominfotik dan Persandian	
	2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen	5 Dokumen	308,234,965	12 Bulan	37,605,750	1 Dokumen	41,545,000	1 Dokumen	37,884,100	100.00%	91.19%	1 Dokumen	37,884,100	20.00%	12.29%	Dinas Kominfotik dan Persandian	
15	2.21	**Persandian**																Dinas Kominfotik dan Persandian	
	2.21.02	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase Pengamanan Informasi Daerah yang Terselenggara Baik	100%	395,918,036	100%	22,407,500	100%	76,800,000	100%	71,520,161	100.00%	93.13%	100%	71,520,161	20.00%	18.06%	Dinas Kominfotik dan Persandian	
	2.21.02.2.02	Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Keamanan Informasi Daerah	100%	395,918,036	12 Bulan	22,407,500	100%	76,800,000	100%	71,520,161	100.00%	93.13%	100%	71,520,161	20.00%	18.06%	Dinas Kominfotik dan Persandian	
	2.21.02.2.02.01	Operasional Jaring Komunikasi Sandi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Operasi Jaringan Sandi Komunikasi Informasi Pemerintah Daerah Melalui Menara Telekomunikasi Selular dan Radio	60 bulan	395,918,036	12 Bulan	22,407,500	12 bulan	76,800,000	12 bulan	71,520,161	100.00%	93.13%	12 bulan	71,520,161	20.00%	18.06%	Dinas Kominfotik dan Persandian	
16		**Kebudayaan**			483,374,437				267,000,000		266,351,000		99.76%		266,351,000			Dinas P dan K	
		Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya dan Wisata Budaya yang Direvitalisasi dan Inventarisasi	40	483,374,437	0	-	20	267,000,000	20	266,351,000	100.00%	99.76%	2000%	266,351,000	50.0%	55.10%	Dinas P dan K	
		Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten /Kota	Jumlah Objek Terdaftar	10 Objek	483,374,437	.0 Objek	-	2 Objek	267,000,000	2 Objek	266,351,000	100.00%	99.76%	2.0 Objek	266,351,000	20.00%	55.10%	Dinas P dan K	
		Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang ditetapkan	10 Objek	483,374,437	.0 Objek	-	2 Objek	267,000,000	2 Objek	266,351,000	100.00%	99.76%	2.0 Objek	266,351,000	20.00%	55.10%	Dinas P dan K	
17		**Perpustakaan**																	
	04:01:02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah Perpustakaan Daerah yang dikelola (Lokasi)	1	427,885,361	1	-	1	250,351,700	1	208,334,000	100.00%	83.22%	100%	208,334,000	100%	49%	Sekretariat Daerah	
	4.01.02.2.02	Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/kota		100%	340,152,661	100%	-	100%	162,619,000	100%	130,143,800	100.00%	80.03%	100%	130,143,800	20%	38%	Sekretariat Daerah	
	'4.01.02.2.01.04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar diseluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Harga Nasional Perpustakaan	Terlaksanannya Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar diseluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Harga Nasional Perpustakaan	5	81,090,380	00:00	-	1.00	114,928,000	1 kegiatan	93,984,450	100.00%	81.78%	1 kegiatan	93,984,450	20%	116%	Sekretariat Daerah	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	'4.01.02.1.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahn Pustaka	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Bahn Pustaka	5	259,062,281	00:00	-	100%	47,691,000	1 kegiatan	36,159,350	100.00%	75.82%	1 kegiatan	36,159,350	20%	14%	Sekretariat Daerah	
		Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca tingkat daerah kab.kota	Terlaksananya Pembudayaan Gemar Membaca	5	87,732,700	00:00	-	1.00	87,732,700	100%	78,190,200	100.00%	89.12%	100%	78,190,200	20%	100%	Sekretariat Daerah	
		Pengembangan dan Literasi Berbasis Inklusi Sosisal	terlaksanannya Pengembangan dan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	5	87,732,700	00:00	-	1.00	87,732,700	1 kegiatan	78,190,200	100.00%	89.12%	1 kegiatan	78,190,200	20%	89%	Sekretariat Daerah	
18		**Kearsipan**																	
	4.01.24.2	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara Baku (Persen)	100%	69,344,013	100%	-	100%	8,510,400	100%	8,510,400	100.00%	100.00%	50%	8,510,400	13%	12%	Sekretariat Daerah	
	4.01.24.2.24	Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Arsip	100%	46,229,342	100%	-	100%	8,510,400	100%	8,510,400	100.00%	100.00%	100%	8,510,400	13%	18%	Sekretariat Daerah	
	4.01.24.2.24.01	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Terlaksananya Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	60	23,114,671	12.00	-	12.00	4,255,200	12.00	4,255,200	100.00%	100.00%	12.00	4,255,200	20%	18%	Sekretariat Daerah	
	4.01.24.2.24.02	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/kota	Terlaksananya Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/kota	60	23,114,671	12.00	-	12.00	4,255,200	12.00	4,255,200	100.00%	100.00%	12.00	4,255,200	20%	18%	Sekretariat Daerah	
III		**Urusan Pilihan**																	
1	3 25	**Perikanan**		90	5,766,584,781	90	3,648,346,483	90	4,443,458,500	90	2,897,101,261	100.00%	65.20%	90	2,897,101,261	18	########	Dinas Perikanan	
	3 25 01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95	16,668,615,527	90	1,745,782,483	90	2,419,483,500	90	1,919,147,016	100.00%	79.32%	90	1,919,147,016	18	12%	Dinas Perikanan	
	3 25 01 2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	terpenuhinya dokumen perencanaan, evaluasi kinerja perangkat daerah	100	34,470,214	100	6,400,000	100	6,400,000	100	6,399,950	100.00%	100.00%	100	6,399,950	100%	19%	Dinas Perikanan	
	3 25 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Tersusunnya Dokumen Renja	12	7,808,218	1	1,400,000	1	1,400,000	1	1,400,000	100.00%	100.00%	1	1,400,000	8%	18%	Dinas Perikanan	
	3 25 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya RKA SKPD	6	26,661,995	1	5,000,000	1	5,000,000	1	4,999,950	100.00%	100.00%	1	4,999,950	17%	19%	Dinas Perikanan	
	3 25 01 2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	terpenuhinya adminstrasi keuangan	100	11,788,399,704	100	1,130,758,885	100	1,643,310,400	100	1,196,172,336	100.00%	72.79%	100	1,196,172,336	100%	10%	Dinas Perikanan	
	3 25 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	tersedianya gaji dan tunjangan pns	42	11,736,530,926	12	1,121,458,885	12	1,645,421,100	12	1,196,172,336	100.00%	72.70%	12	1,196,172,336	29%	10%	Dinas Perikanan	
	3 25 01 2.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	4	13,943,146	1	2,500,000	1	2,500,000	1	2,500,000	100.00%	100.00%	1	2,500,000	25%	18%	Dinas Perikanan	
	3 25 01 2.02 05	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun	4	18,405,086	1	3,300,000	1	3,000,000	1	3,000,000	100.00%	100.00%	1	3,000,000	25%	16%	Dinas Perikanan	
	3 25 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	11,154,598	3	2,000,000	3	2,000,000	3	2,000,000	100.00%	100.00%	3	2,000,000	17%	18%	Dinas Perikanan	
	3 25 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Tersusunnya Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	4	8,365,948	1	1,500,000	1	1,500,000	1	1,500,000	100.00%	100.00%	1	1,500,000	25%	18%	Dinas Perikanan	
	3.25.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi pegawai	100	301,250,962	Rp -	-	100	15,000,000	100	15,000,000	100.00%	100.00%	100	15,000,000	100%	5%	-	
	3.25.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terselenggaranya pelatihan pegawai	10	301,250,962	Rp -	-	2	15,000,000	2	15,000,000	100.00%	100.00%	2	15,000,000	20%	5%	-	
	3.25.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tercapainya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional Kantor	100	1,926,734,919	100	313,457,571	100	321,808,100	100	321,808,100	100.00%	100.00%	100	321,808,100	100%	17%	Dinas Perikanan	
	3.25.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan	72	22,197,649	12	3,980,000	12	2,623,000	12	2,623,000	100.00%	100.00%	12	2,623,000	17%	12%	Dinas Perikanan	
	3.25.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya Pembiayaan Advetorial dan Pameran	72	139,432,470	12	-	12	25,000,000	12	25,000,000	100.00%	100.00%	12	25,000,000	17%	18%	Dinas Perikanan	
	3.25.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya Barang Cetakan dan Biaya Fotocopy	72	182,582,644	12	33,350,453	12	30,349,100	12	30,329,100	100.00%	99.93%	12	30,329,100	17%	17%	Dinas Perikanan	
	3.25.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya Bahan Bacaan dan Buku-buku	60	63,421,255	12	12,000,000	12	12,000,000	12	12,000,000	100.00%	100.00%	12	12,000,000	20%	19%	Dinas Perikanan	
	3.25.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terpenuhinya Kebutuhan Makan Minum Rapat	55	58,136,150	11	10,985,000	11	11,000,000	11	11,000,000	100.00%	100.00%	11	11,000,000	20%	19%	Dinas Perikanan	
	3.25.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya Pembiayaan Rapat dan Konsultasi Luar Daerah	60	1,460,964,750	12	253,143,571	12	240,836,000	12	240,516,200	100.00%	99.87%	12	240,516,200	20%	16%	Dinas Perikanan	
	3.25.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah	Tercapainya Pemenuhan Sarana dan Prasarana SDM	100	216,689,288	100	30,416,000	100	30,000,000	100	30,000,000	100.00%	100.00%	100	30,000,000	100%	14%	Dinas Perikanan	
	3.25.01.2.07.10	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung Gedung Kantor	Terpenuhinya Peralatan Kantor	15	216,689,288	5	12,320,000	5	30,000,000	5	30,000,000	100.00%	100.00%	5	30,000,000	33%	14%	Dinas Perikanan	
	3.25.01.2.08	Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tercapainya Jasa Penunjang Kantor	100	393,297,363	100	76,978,027	100	131,200,000	100	127,669,780	100.00%	97.31%	100	127,669,780	100%	32%	Dinas Perikanan	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	3.25.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Pembayaran Rekening Listrik dan Telepon	72	79,276,569	12	14,978,027	12	19,200,000	12	19,169,780	100.00%	99.84%	12	19,169,780	17%	24%	Dinas Perikanan	
	3.25.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Pembiayaan Sewa Rumah Dinas dan kendaraan	72	286,134,300	12	57,000,000	12	57,000,000	12	53,500,000	100.00%	93.86%	12	53,500,000	17%	19%	Dinas Perikanan	
	3.25.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Pembiayaan Kebersihan Kantor	72	27,886,494	12	5,000,000	12	55,000,000	12	55,000,000	100.00%	100.00%	12	55,000,000	17%	197%	Dinas Perikanan	
	3.25.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	100	2,007,773,078	100	187,772,000	100	271,765,000	100	222,096,850	100.00%	81.72%	100	222,096,850	100%	11%	Dinas Perikanan	
	3.25.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhinya Pemeliharan Gedung Kantor	72	110,987,196	12	21,000,000	12	36,000,000	12	35,698,000	100.00%	99.16%	12	35,698,000	17%	32%	Dinas Perikanan	
	3.25.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	72	1,521,844,493	12	104,872,000	12	157,929,000	12	142,398,850	100.00%	90.17%	12	142,398,850	17%	9%	Dinas Perikanan	
	3.25.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpenuhinya Pemeliharaan gedung kantor	72	157,784,547	12	33,000,000	12	20,000,000	12	20,000,000	100.00%	100.00%	12	20,000,000	17%	13%	Dinas Perikanan	
	3.25.01.2.09.10	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Terpenuhinya Pemeliharaan Peralatan Kantor	72	217,156,842	12	28,900,000	12	24,000,000	12	24,000,000	100.00%	100.00%	12	24,000,000	17%	11%	Dinas Perikanan	
	3 25 03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	15002	3,345,565,485	13859	630,300,000	13859	1,058,135,000	13900	537,740,000	100.00%	50.82%	13900	537,740,000	93%	16%	Dinas Perikanan	
	3 25 03 2.01	Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	meningkatnya produksi perikanan tangkap di danau sungai waduk, rawa, genangan air lainnya	15002	1,972,629,088	13859	410,300,000	14136	650,000,000	13900	149,640,000	98.33%	23.02%	13900	149,640,000	93%	8%	Dinas Perikanan	
	3 25 03 2.01 02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	terpenuhinya psarana penangkapan ikan	60	874,662,414	10	142,800,000	13	350,000,000	3	50,000,000	23.08%	14.29%	3	50,000,000	5%	6%	Dinas Perikanan	
	3 25 03 2.01 03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	terpenuhinya sarana penangkapan ikan	78	1,097,966,674	10	267,500,000	10	300,000,000	6	99,640,000	60.00%	33.21%	6	99,640,000	8%	9%	Dinas Perikanan	
	3 25 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	meningkatnya kemampuan nelayan penangkap ikan	360	1,372,936,397	220	267,500,000	220	408,135,000	110	388,100,000	50.00%	95.09%	110	388,100,000	31%	28%	Dinas Perikanan	
	3 25 03 2.02 01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Meningkatkan kemampuan nelayan secara individu	30	400,000,000	0	50,000,000	117	373,135,000	117	353,100,000	100.00%	94.63%	117	353,100,000	390%	88%		
	3.25.03.2.02.03	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	jumlah pembentukan dan pembinaan kelompok	360	972,936,397	220	267,500,000	50	35,000,000	50	35,000,000	100.00%	100.00%	50	35,000,000	14%	4%	Dinas Perikanan	
	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	19790	2,221,562,646	210	870,739,000	18646	774,840,000	18647	250,414,000	100.00%	32.32%	18647	250,414,000	94%	11%	Dinas Perikanan	
	3.25.04.2.04	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	meningkatnya Sarana prasarana Perikanan Budidaya	5	2,221,562,646	1	780,472,000	1	774,840,000	1	250,414,000	100.00%	32.32%	1	250,414,000	20%	11%	Dinas Perikanan	
	3.25.04.2.04. 02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	tersedianya prasarana pembudidayaan ikan	75	2,221,562,646	10	780,472,000	1	774,840,000	1	250,414,000	100.00%	32.32%	1	250,414,000	1%	11%	Dinas Perikanan	
	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Proporsi Tangkapan Ikan yang Berada dalam Batas Biologis yang Aman (Angka)	0.033	774,567,115	0	-	0.031	120,000,000	0.033	120,000,000	100.00%	100.00%	0.033	120,000,000	100%	15%	Dinas Perikanan	
	3.25.05.2.01	Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	terlaksananya kegiatan pengawasan sumberdaya kelautan	0.33	774,567,115	0	-	0.033	120,000,000	0.033	120,000,000	100.00%	100.00%	0.033	120,000,000	10%	15%	Dinas Perikanan	
	3.25.05.2.01.01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	terlaksananya kegiatan pengawasan sumberdaya kelautan	0.033	387,283,558	0	-	1	78,800,000	1	78,800,000	100.00%	100.00%	1	78,800,000	3030%	20%	Dinas Perikanan	
	3.25.05.2.01.02	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	terlaksananya kegiatan pengawasan sumberdaya kelautan	0.033	387,283,558	0.0006	-	1	41,200,000	1	41,200,000	100.00%	100.00%	1	41,200,000	3030%	11%	Dinas Perikanan	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Nilai Tukar Nelayan (Angka)	105	512,387,600	109.56	401,525,000	102	71,000,000	105.78	69,800,245	100.00%	98.31%	105.78	69,800,245	101%	14%	Dinas Perikanan	
	3.25.06.202	Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	terselenggaranya kegiatan gelar produk dan pemasaran hasil perikanan	5	512,387,600	1	-	1	71,000,000	1	69,800,245	100.00%	98.31%	1	69,800,245	20%	14%	Dinas Perikanan	
	3.25.06.202.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	terselenggaranya kegiatan gelar produk dan pemasaran hasil perikanan	5	512,387,600	1	-	1	71,000,000	1	69,800,245	100.00%	98.31%	1	69,800,245	20%	14%	Dinas Perikanan	
2	03.26	**Pariwisata**																	
	03.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95	16,479,443,825	100	12,073,682,634	90	3,462,093,575	90.00	2,648,491,948	100.00%	76.50%	90.00	2,648,491,948	94.736842	16.07		
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penggangaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	100	111,884,535	100	58,854,700	100	20,729,595	100.00	20,622,350	100.00%	99.48%	100.00	20,622,350	100	18.43	Dinas Pariwisata	
	2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja	10	49,365,460	12	31,854,800	2	6,931,780	2	6,931,780	100.00%	100.00%	2.00	6,931,780	20.00	14.04	Dinas Pariwisata	
	2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah DokumenPerubahan DPA-SKPD	5	37,519,075	6		1	8,797,815	1	8,690,570	100.00%	98.78%	1.00	8,690,570	20.00	23.16	Dinas Pariwisata	
	2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	10	25,000,000	72	26,999,900	2	5,000,000	2	5,000,000	100.00%	100.00%	2.00	5,000,000	20.00	20.00	Dinas Pariwisata	
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PersentasePelaporan Keuangan Tepat Waktu	100	9,592,366,510	100	7,877,169,805	100	1,816,803,405	100	1,181,595,762	100.00%	65.04%	100.00	1,181,595,762	100.00	12.32	Dinas Pariwisata	
	2.02.01	Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Layanan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	84	9,409,976,000	84	7,734,880,805	14	1,786,548,375	14	1,159,785,732	100.00%	64.92%	14.00	1,159,785,732	16.67	12.33	Dinas Pariwisata	
	2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Layanan Pembayaran Gaji dan Administrasi Perkantoran UPTD	72	154,890,510	72	110,789,000	12	24,755,030	12	16,310,030	100.00%	65.89%	12.00	16,310,030	16.67	10.53	Dinas Pariwisata	
	2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	5	12,500,000	6	14,500,000	1	2,500,000	1	2,500,000	100.00%	100.00%	1.00	2,500,000	20.00	20.00	Dinas Pariwisata	
	2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran	90	10,000,000	12	7,000,000	18	2,000,000	18	2,000,000	100.00%	100.00%	18.00	2,000,000	20.00	20.00	Dinas Pariwisata	
	2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5	5,000,000	12	10,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	100.00%	100.00%	1.00	1,000,000	20.00	20.00	Dinas Pariwisata	
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja	100	2,198,206,045	100	1,268,889,311	100	647,738,175	100	640,934,335	100.00%	98.95%	100.00	640,934,335	100	29.16	Dinas Pariwisata	
	2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	60	14,577,000	72	56,244,500	12	1,557,000	12	1,557,000	100.00%	100.00%	12.00	1,557,000	20.00	10.68	Dinas Pariwisata	
	2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Aktivitas	8	323,850,000	4	-	1	25,000,000	1	24,931,000	100.00%	99.72%	1.00	24,931,000	12.50	7.70	Dinas Pariwisata	
	2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Alat Tulis Kantor (ATK)	60	353,029,045	72	203,948,000	12	82,681,175	12	82,681,175	100.00%	100.00%	12.00	82,681,175	20.00	23.42	Dinas Pariwisata	
	2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah SKHU	60	60,000,000	72	69,790,000	12	12,000,000	12	11,900,000	100.00%	99.17%	12.00	11,900,000	20.00	19.83	Dinas Pariwisata	
	2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Layanan Jasa Penyediaan Makanan dan Minuman	55	101,750,000	66	61,400,000	11	16,500,000	11	16,500,000	100.00%	100.00%	11.00	16,500,000	20.00	16.22	Dinas Pariwisata	
	2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi di Luar Kantor	5	1,345,000,000	6	877,506,811	1	510,000,000	1	503,365,160	100.00%	98.70%	1.00	503,365,160	20.00	37.42	Dinas Pariwisata	
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja	100	506,309,535	100	558,737,749	100	241,110,000	33.33	134,505,000	33.33%	55.79%	100.00	134,505,000	100	26.57	Dinas Pariwisata	
	2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel	7	142,960,000	5	39,720,000	1	40,980,000	1	40,000,000	100.00%	97.61%	1.00	40,000,000	14.29	27.98	Dinas Pariwisata	
	2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap	18	363,349,535	20	519,017,749	8	200,130,000	2	94,505,000	25.00%	47.22%	2.00	94,505,000	11.11	26.01	Dinas Pariwisata	
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Pendukung	100	3,149,927,200	100	1,671,224,899	100	540,412,400	100	489,114,275	100.00%	90.51%	100.00	489,114,275	100	15.53	Dinas Pariwisata	
	2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Tagihan	60	751,800,000	72	132,532,099	12	138,000,000	12	97,701,875	100.00%	70.80%	12.00	97,701,875	20.00	13.00	Dinas Pariwisata	
	2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bangunan dan Kendaraan	60	475,000,000	72	477,500,000	12	67,000,000	12	67,000,000	100.00%	100.00%	12.00	67,000,000	20.00	14.11	Dinas Pariwisata	
	2.08.04	Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tagihan	60	1,923,127,200	72	1,061,192,800	12	335,412,400	12	324,412,400	100.00%	96.72%	12.00	324,412,400	20.00	16.87	Dinas Pariwisata	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dalam Kondisi Baik	100	920,750,000	100	638,806,170	100	195,300,000	100.00	181,720,226	100.00%	93.05%	100.00	181,720,226	100	19.74	Dinas Pariwisata	
	2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan	26	509,500,000	30	536,306,170	4	136,050,000	4	123,970,226	100.00%	91.12%	4.00	123,970,226	15.38	24.33	Dinas Pariwisata	
	2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor	60	411,250,000	72	102,500,000	12	59,250,000	12	57,750,000	100.00%	97.47%	12.00	57,750,000	20.00	14.04	Dinas Pariwisata	
	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI WISATA	Kontribusi PAD Sektor Wisata (Persen)	3.38	1,910,452,000	100	915,176,800	2.58	462,866,000	2.58	397,143,960	100.00%	85.80%	2.58	397,143,960	76.33	20.79	Dinas Pariwisata	
		Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		15	1,910,452,000	3	915,176,800	3	462,866,000	3	397,143,960	100.00%	85.80%	3.00	397,143,960	20.00	20.79	Dinas Pariwisata	
	2.03.04	Pengadaan / Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Terbangun	5	1,910,452,000	5	915,176,800	1	462,866,000	1	397,143,960	100.00%	85.80%	1.00	397,143,960	20.00	20.79	Dinas Pariwisata	
	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Kunjungan Wisatawan (Orang)	780748	30,950,000,000	78064	-	286376	4,050,000,000	96234	3,818,932,918	33.60%	94.29%	96234.00	3,818,932,918	12.33	12.34	Dinas Pariwisata	
		Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan	100	30,950,000,000	100	-	100	4,050,000,000	100	3,818,932,918	100.00%	94.29%		3,818,932,918			Dinas Pariwisata	
	2.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Terpilihnya Duta Wisata Muli Mekhanai	11	28,500,000,000	5	-	1	4,000,000,000	1	3,818,932,918	100.00%	95.47%	1.00	3,818,932,918	9.09	13.40	Dinas Pariwisata	
	2.01.04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Terdapat Pertukaran Kegiatan Pariwisata	14	2,450,000,000	0	-	1	50,000,000	0	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00	-	Dinas Pariwisata	
	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Cakupan Fasilitasi Pengembangan SDM Pariwisata	50	838,000,000	0	-	20	200,000,000	0	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00		Dinas Pariwisata	
		Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Cakupan Desa Wisata		838,000,000	0	-		200,000,000	0	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00		Dinas Pariwisata	
	2.01.06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah Pelatihan SDM	4	838,000,000	1	-	1	200,000,000	0	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00	-	Dinas Pariwisata	
3		**Pertanian**	Nilai Tukar Petani	102.3	13,708,380,000	101.2		97.25	2,351,973,220	106.7	1,712,742,120	100.00%	72.82%	107	1,712,742,120	104%	12%	Dinas KP dan Pertanian	
	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Nilai Tukar Petani	102.3	7,784,002,500	101.2		97.25	1,569,909,400	106.7	948,208,200	100.00%	60.40%	107	948,208,200	104%	12%	Dinas KP dan Pertanian	
	3.27.02.2.01	Kegiatan : Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan Produktivitas Pertanian	0.3	915,765,000	0.3	65,468,500	0.3	161,540,200	0.3	156,690,700	100.00%	97.00%	0	156,690,700	100%	17%	Dinas KP dan Pertanian	
	3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Laporan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi	5.00	610,930,000	0	0	1	22,290,200	1	22,228,700	100.00%	99.72%	1	22,228,700	20%	4%	Dinas KP dan Pertanian	
	3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Laporan KP3 dan Pendampingan Sarana Pendukung Pertanian	10.00	915,765,000	4	65,468,500	2	139,250,000	2	134,462,000	100.00%	96.56%	2	134,462,000	20%	15%	Dinas KP dan Pertanian	
	3.27.02.2.02	Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Produksi Komoditi Pertanian	0,5	6,868,237,500	0.5	1,236,205,300	0.5	1,408,369,200	0.5	791,517,500	100.00%	56.20%	1	791,517,500	20%	12%	Dinas KP dan Pertanian	
	3.27.02.2.02.01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah bibit komoditi perkebunan	81,000	2,747,295,000	10000	569,126,900	2000	499,656,000	2000	198,332,500	100.00%	39.69%	2000	198,332,500	2%	7%	Dinas KP dan Pertanian	
	3.27.02.2.02.02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Luas areal Pengembangan Komoditi Tanaman Pangan/Benih Padi unggul	100	1,984,157,500	10	124,265,000	10	220,438,200	10	211,504,500	100.00%	95.95%	10	211,504,500	10%	11%	Dinas KP dan Pertanian	
	3.27.02.2.02.03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Luasan Pengembangan Hortikultura	450	2,136,785,000	95	542,813,400	30	688,275,000	30	381,680,500	100.00%	55.45%	30	381,680,500	7%	18%	Dinas KP dan Pertanian	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	3.27.02.2.06	Kegiatan : Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Peningkatan Populasi Ternak	3.00	2,339,938,000	0	-	3	400,000,000	0	-	0.00%	0.00%	0	-	0%	0%	Dinas KP dan Pertanian	
	3.27.02.2.06.01	Pengadaan Benih /Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota lain	Jumlah Bibit Ternak	5,250	1,851,530,000	0	-	1600	400,000,000	0	-	0.00%	0.00%	0	-	0%	0%	Dinas KP dan Pertanian	
	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Produksi Sektor Pertanian	151,322	361,665,000	134,172	93,624,650	145,418	30,205,000	137,491	29,674,500	94.55%	98.24%	137491	29,674,500	91%	8%	Dinas KP dan Pertanian	
	3.27.03.2.01	Kegiatan : Pengembangan Prasarana Pertanian	Cakupan data, informasi dan kajian lingkup pertanian	100	361,665,000	100	93,624,650	100	30,205,000	100	29,674,500	100.00%	98.24%	100	29,674,500	20%	8%	Dinas KP dan Pertanian	
	3.27.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah Dokumen	5	361,665,000	2	93,624,650	1	30,205,000	1	29,674,500	100.00%	98.24%	1	29,674,500	20%	8%	Dinas KP dan Pertanian	
	3.27.03.2.02	Kegiatan : Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase Prasarana Pertanian yang terbangun dan berkondisi baik	85	13,718,500,000	n/a	-	80	575,000,000	0	-	0.00%	0.00%	0	-	0%	0%	Dinas KP dan Pertanian	
	3.27.03.2.02.01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani y ang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	14	3,090,500,000	0	-	2	300,000,000	0	-	0.00%	0.00%	0	-	0%	0%	Dinas KP dan Pertanian	
	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	90	947,630,000	80	143,213,500	82	299,077,820	81.82	297,432,920	99.78%	99.45%	82	297,432,920	91%	31%	Dinas KP dan Pertanian	
	3.27.04.2.01	Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terproteksinya ternak dan HPR dari penyakit hewan menular	90	755,900,000	80	143,213,500	82	255,373,420	82	253,978,020	100.00%	99.45%	82	253,978,020	91%	34%	Dinas KP dan Pertanian	
	3.27.04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Persentase Terproteksinya ternak dan HPR dari penyakit hewan menular	15,000	755,900,000	3000	143,213,500	4000	255,373,420	4000	253,978,020	100.00%	99.45%	4000	253,978,020	27%	34%	Dinas KP dan Pertanian	
	3.27.04.2.04	Kegiatan : Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengawasan Hewan dan Produk Hewan	100	191,730,000	100	32,505,000	100	43,704,400	100	43,454,900	100.00%	99.43%	100	43,454,900	32%	23%	Dinas KP dan Pertanian	
	3.27.04.2.04.02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Sampel daging dan Produk Hewan	1,500	191,730,000	250	32,505,000	260	43,704,400	260	43,454,900	100.00%	99.43%	260	43,454,900	17%	23%	Dinas KP dan Pertanian	
	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT	90	1,409,905,000	80	190,610,500	82	71,659,000	99	70,166,000	100.00%	97.92%	99	70,166,000	110%	5%	Dinas KP dan Pertanian	
	3.27.05.2.01	Kegiatan : Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Penurunan persentase gangguan OPT/ Kegagalan panen pada komoditi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	10	1,409,905,000	10	190,610,500	10	71,659,000	10	70,166,000	100.00%	97.92%	10	70,166,000	100%	5%	Dinas KP dan Pertanian	
	3.27.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Gerakan Pengendalian OPT komoditi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	75	1,409,905,000	10	190,610,500	8	71,659,000	8	70,166,000	100.00%	97.92%	8	70,166,000	11%	5%	Dinas KP dan Pertanian	
	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan Bina Kelompok Tani	995	3,205,177,500	945	620,179,799	955	381,122,000	955	367,260,500	100.00%	96.36%	955	367,260,500	96%	11%	Dinas KP dan Pertanian	
	3.27.072.01	Kegiatan : Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Kualitas SDM Penyuluh dan Kelembagaan Pertanian yang ditingkatkan	90	3,205,177,500	70	620,179,799	70	381,122,000	70	367,260,500	100.00%	96.36%	70	367,260,500	78%	11%	Dinas KP dan Pertanian	
	3.27.072.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Penyuluh Pertanian yang ditingkatkan kualitas SDM	11	2,136,785,000	11	422,570,049	11	366,122,000	11	352,260,500	100.00%	96.21%	11	352,260,500	100%	16%	Dinas KP dan Pertanian	
	3.27.072.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Petani dan Kelembagaan Petani yang ditingkatkan kualitas SDM	11	1,068,392,500	11	197,609,750	11	15,000,000	11	15,000,000	100.00%	100.00%	11	15,000,000	100%	1%	Dinas KP dan Pertanian	
4		**Perdagangan**																	
	3.30 . 03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB	11.59	-	0	-	11.54	900,568,215	12.9	860,144,000	100.00%	95.51%	12.9	860,144,000	110.96	0	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	
	3.30 . 03 . 2.01	Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB	11.59	-	0		11.54	900,568,215	12.9	860,144,000	100.00%	95.51%	12.9	860,144,000	110.96	0	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Tersedianya Bantuan untuk Pedagang	4	-	0	-	1	158,688,000	1	158,488,000	100.00%	99.87%	1	158,488,000	25	0	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	
		Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Terlaksananya kegiatan pelayanan pasar	60	-	0	-	12	741,880,215	12	701,656,000	100.00%	94.58%	12	701,656,000	20	0	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	
	3.30 . 04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan harga Barang Kebutuhan Pokok	70	-	0	-	30	1,139,946,000	30	1,056,899,000	100.00%	92.71%	30	1,056,899,000	42.857143	0	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	
	3.30 . 04 . 2.01	Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan harga Barang Kebutuhan Pokok	70	-	0	-	30	19,951,000	30	19,943,500	100.00%	99.96%	30	19,943,500	42.857143	0	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Terlaksananya Monitoring dan Sosialisasi Distribusi BBM dan BBG	60	-	0	-	12	19,951,000	12	19,943,500	100.00%	99.96%	12	19,943,500	20	0	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	
	3.30 . 04 . 2.02	Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan harga Barang Kebutuhan Pokok	70	-	0	-	30	1,105,195,000	30	1,022,155,500	100.00%	92.49%	30	1,022,155,500	42.86	0	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	
		Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Terlaksananya Monitoring Evaluasi	260	-	0	-	52	722,380,000	52	645,458,000	100.00%	89.35%	52	645,458,000	20	0	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	
		Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Terlaksananya penjualan sembako dengan harga murah	20	-	0	-	4	382,815,000	4	376,697,500	100.00%	98.40%	4	376,697,500	20	0	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	
	3.30 . 04 . 2.03	Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan harga Barang Kebutuhan Pokok	70	-	0	-	30	14,800,000	30	14,800,000	100.00%	100.00%	30	14,800,000	42.86	0	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	
		Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Terjaganya ketersediaan pupuk dan pestisida	60	-	0	-	12	14,800,000	12	14,800,000	100.00%	100.00%	12	14,800,000	20	0	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	
5		**Perindustrian**	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	45%	2,941,421,772	0%	-	35%	878,193,880	2.34%	133,816,263	6.69%	58.64%	2.34%	133,816,263	2.34%	4.55	Dinas Tran, Naker dan Perindustrian	
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	45%	2,941,421,772	0%	-	35%	878,193,880	2.34%	133,816,263	6.69%	58.64%	2.34%	133,816,263	2.34%	4.55	Dinas Tran, Naker dan Perindustrian	
		Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	45%	2,941,421,772	0%	-	4%	878,193,880	2.34%	133,816,263	58.50%	58.64%	2.34%	133,816,263	2.34%	4.55	Dinas Tran, Naker dan Perindustrian	
	03	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	45%	1,470,710,886	0%	-	4%	650,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0.00	Dinas Tran, Naker dan Perindustrian	
	04	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasana Industri	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	45%	1,470,710,886	0%	-	4%	228,193,880	2.34%	133,816,263	58.50%	58.64%	2.34%	133,816,263	2.34%	9.10	Dinas Tran, Naker dan Perindustrian	
6		**Transmigrasi**																	
		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Nilai Rata-rata Indeks Perkembangan 100 Kawasan Transmigrasi Prioritas Kementerian yang Direvitalisasi	44,00%	503,420,314	42,03%	338,440,500	42.03%	584,501,500	41.77%	233,052,000	99.38%	39.87%	41.77%	233,052,000	41.77%	46.29	Dinas Tran, Naker dan Perindustrian	
		Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kontribusi Transmigrasi Terhadap PDRB	44,00%	503,420,314	42,03%	338,440,500	42.03%	584,501,500	41.77%	233,052,000	99.38%	39.87%	41.77%	233,052,000	41.77%	46.29	Dinas Tran, Naker dan Perindustrian	
	06	Sub Kegiatan Pelatihan Transmigrasi	Kontribusi Transmigrasi Terhadap PDRB	44,00%	503,420,314	42,03%	338,440,500	42.03%	584,501,500	41.77%	233,052,000	99.38%	39.87%	41.77%	233,052,000	41.77%	46.29	Dinas Tran, Naker dan Perindustrian	
IV		**Unsur Pendukung**																	
	04:01	**Sekretariat Daerah**																	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	04:01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persen)	95%	267,451,395,533	100%	41,686,471,222	90%	50,160,500,460	90%	41,904,855,208	99.98%	83.54%	148%	41,904,855,208	326%	45%	Sekretariat Daerah	
	04.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	138,577,500	100%	18,722,800	100%	25,000,000	100%	15,000,000	100.00%	60.00%	100%	33,722,800	12%	24%	Sekretariat Daerah	
	04.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perncanaan Perangkat Daerah	5	27,715,500	1 Dokumen	4,940,000	1.00	5,000,000	1 Dokumen	-	100.00%	0.00%	1 Dokumen	4,940,000	20%	18%	Sekretariat Daerah	
	04.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	27,715,500	1 Dokumen	2,775,600	1.00	5,000,000	1 Dokumen	-	100.00%	0.00%	1 Dokumen	2,775,600	20%	10%	Sekretariat Daerah	
	04.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	27,715,500	1 Dokumen	5,000,000	1.00	5,000,000	1 Dokumen	5,000,000	100.00%	100.00%	1 Dokumen	10,000,000	0%	36%	Sekretariat Daerah	
	04.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5	27,715,500	1 Dokumen	2,895,000	1.00	5,000,000	1 Dokumen	5,000,000	100.00%	100.00%	1 Dokumen	7,895,000	20%	28%	Sekretariat Daerah	
	04.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	5	27,715,500	1 Dokumen	3,112,200	1.00	5,000,000	1 Dokumen	5,000,000	100.00%	100.00%	1 Dokumen	8,112,200	0%	29%	Sekretariat Daerah	
	04.01.01.2.01	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Tertib Administrasi Keuangan, Monev dan Pembuatan Laporan	100%	126,190,336,159	100%	14,252,879,079	100%	22,579,172,220	100%	17,269,593,516	100.00%	76.48%	100%	31,522,472,595	3527%	25%	Sekretariat Daerah	
	04.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Penyediaan Gaji Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran	60	126,185,740,603	12.00	14,200,085,839	12.00	22,578,326,220	12.00	17,268,747,516	100.00%	76.48%	12.00	31,468,833,355	25%	25%	Sekretariat Daerah	
	04.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	60	1,531,852	12.00	17,651,080	12.00	282,000	12.00	282,000	100.00%	100.00%	12.00	17,933,080	1171%	1171%	Sekretariat Daerah	
	04.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Terlaksananya Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	60	1,531,852	12.00	17,571,080	12.00	282,000	12.00	282,000	100.00%	100.00%	12.00	17,853,080	1165%	1165%	Sekretariat Daerah	
	04.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognisis Realisasi Anggaran	Terlaksananya Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognisis Realisasi Anggaran	60	1,531,852	12.00	17,571,080	12.00	282,000	12.00	282,000	100.00%	100.00%	12.00	17,853,080	1165%	1165%	Sekretariat Daerah	
	04.01.01.2.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Tertib Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	100%	3,014,815,500	100%	663,825,416	100%	615,000,000	100%	613,749,609	99.80%	99.80%	42%	1,277,575,025	42%	42%	Sekretariat Daerah	
	04.01.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Belanja Premi Asuransi untuk Kendaraan Dinas	60	3,014,815,500	12.00	663,825,416	12.00	615,000,000	12.00	613,749,609	100.00%	99.80%	12.00	1,277,575,025	42%	42%	Sekretariat Daerah	
	04.01.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Tertib Administrasi Kepegawaian Pada Perangkat Daerah	100%	2,039,264,661	100%	235,055,000	100%	425,410,000	100%	408,712,000	100.00%	96.07%	30%	643,767,000	0%	0%	Sekretariat Daerah	
	04.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	1050	1,930,622,661	100 stel	165,275,000	210.00	355,410,000	210 stel	338,712,000	100.00%	95.30%	210 stel	503,987,000	20%	20%	Sekretariat Daerah	
	04.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	60	108,642,000	12.00	69,780,000	12.00	70,000,000	12.00	70,000,000	100.00%	100.00%	12.00	139,780,000	20%	20%	Sekretariat Daerah	
	04.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	5,806,463,871	100%	2,822,154,658	100%	1,992,937,370	100%	1,863,814,962	100.00%	93.52%	13%	4,685,969,620	13%	103%	Sekretariat Daerah	
	04.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	60	80,514,586	12.00	167,862,000	12.00	29,644,000	12.00	26,193,000	100.00%	88.36%	12.00	194,055,000	25%	241%	Sekretariat Daerah	
	04.01.01.2.06.02	Penyediaan Bahan Logistik	Terpenuhinya Penyediaan Bahan Logistik	60	135,802,500	12.00	-	12.00	25,000,000	12.00	25,000,000	100.00%	100.00%	12.00	25,000,000	25%	18%	Sekretariat Daerah	
	04.01.01.2.06.05	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60	188,846,792	12.00	168,150,936	12.00	116,957,380	12.00	113,216,194	100.00%	96.80%	12.00	281,367,130	25%	149%	Sekretariat Daerah	
	04.01.01.2.06.09	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	60	458,088,993	12.00	220,215,000	12.00	84,330,000	12.00	51,214,000	100.00%	60.73%	12.00	271,429,000	25%	59%	Sekretariat Daerah	
	04.01.01.2.06.09	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Fasilitasi Kunjungan Tamu Pemda	60	2,770,371,000	12.00	1,577,531,000	12.00	1,170,000,000	12.00	1,133,136,150	100.00%	96.85%	12.00	2,710,667,150	25%	98%	Sekretariat Daerah	
	04.01.01.2.07	Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	2,172,840,000	12.00	688,395,722	12.00	567,005,990	12.00	515,055,618	100.00%	90.84%	12.00	1,203,451,340	25%	55%	Sekretariat Daerah	
	04.01.01.2.07.01	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	100	523,958,637	100%	371,241,289	100%	191,456,000	100%	158,016,000	100.00%	82.53%	25%	529,257,289	25%	101%	Sekretariat Daerah	
	04.01.01.2.07.02	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Terpenuhinya Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	60	523,958,637	12.00	371,241,289	12.00	191,456,000	12.00	158,016,000	100.00%	82.53%	12.00	529,257,289	25%	101%	Sekretariat Daerah	
	04.01.01.2.07.05	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	60	95,137,756,105	12.00	17,001,994,663	12 Bulan	17,434,492,030	12.00	16,463,664,073	100.00%	94.43%	12.00	33,465,658,736	25%	32%	Sekretariat Daerah	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	04.01.01.2.07.06	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60	3,618,821,725	12.00	675,019,663	12.00	701,192,030	12.00	475,414,073	100.00%	67.80%	12.00	1,150,433,736	25%	32%	Sekretariat Daerah	
	04.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Volume Penyediaan Rumah Dinas, Gedung Kantor dan Kendaraan Dinas	60	3,324,445,200	12.00	545,600,000	12.00	497,500,000	12.00	355,000,000	100.00%	71.36%	12.00	900,600,000	25%	27%	Sekretariat Daerah	
	04.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Administrasi Keuangan Terlaksana dengan Baik	60	88,194,489,180	12.00	15,781,375,000	12.00	16,235,800,000	12.00	15,633,250,000	100.00%	96.29%	12.00	31,414,625,000	25%	36%	Sekretariat Daerah	
	04.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	11,161,335,870	100%	1,781,026,490	100%	2,148,950,000	100%	1,286,667,194	100.00%	59.87%	25%	3,067,693,684	25%	78%	Sekretariat Daerah	
	04.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorang Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorang Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	60	6,094,816,200	12.00	717,460,327	12.00	1,122,000,000	12.00	610,026,227	100.00%	54.37%	12.00	1,327,486,554	25%	22%	Sekretariat Daerah	
	04.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemiliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemiliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	60	4,182,173,790	12.00	817,786,328	12.00	844,900,000	12.00	548,142,467	100.00%	64.88%	12.00	1,365,928,795	25%	33%	Sekretariat Daerah	
	04.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	60	851,753,280	12.00	189,255,835	12.00	146,050,000	12.00	113,170,000	100.00%	77.49%	12.00	302,425,835	25%	36%	Sekretariat Daerah	
	04.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	60	32,592,600	12.00	56,524,000	12.00	36,000,000	12.00	15,328,500	100.00%	42.58%	12.00	71,852,500	25%	220%	Sekretariat Daerah	
	04.01.01.2.11	Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya Tertib Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	100%	2,980,180,973	100%	518,788,977	100%	550,485,860	100%	539,400,432	100.00%	97.99%	20%	1,058,189,409	20%	36%	Sekretariat Daerah	
	04.01.01.2.11.01	Penyedian Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	Terpenuhinya Penyedian Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	60	933,800,261	0.00	143,688,977	12.00	173,765,860	12.00	167,400,432	100.00%	96.34%	12.00	311,089,409	20%	33%	Sekretariat Daerah	
	04.01.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	140	416,750,712	28 stel	85,100,000	28.00	76,720,000	28 stel	72,000,000	100.00%	93.85%	28 stel	157,100,000	20%	38%	Sekretariat Daerah	
	04.01.01.2.11.03	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	Terpenuhinya Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	60	1,629,630,000	12.00	290,000,000	12.00	300,000,000	12.00	300,000,000	100.00%	100.00%	12.00	590,000,000	20%	36%	Sekretariat Daerah	
	04.01.01.2.11.02	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Terlaksananya Tertib Administrasi dalam Proses Fasilitasi Kerumah Tangga Sekretariat Daerah	100	8,190,206,400	100%	1,487,998,500	100%	1,539,078,200	100%	1,332,582,000	100.00%	86.58%	20%	2,820,580,500	20%	35%	Sekretariat Daerah	
	04.01.01.2.11.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	60	3,788,573,600	12.00	718,288,400	12.00	708,053,600	12.00	641,248,000	100.00%	90.56%	12.00	1,359,536,400	20%	36%	Sekretariat Daerah	
	04.01.01.2.11.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga wakil Kepala Daerah	Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga wakil Kepala Daerah	60	2,783,635,100	12.00	468,917,000	12.00	448,053,600	12.00	343,613,000	100.00%	76.69%	12.00	812,530,000	20%	29%	Sekretariat Daerah	
	04.01.01.2.12	Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	60	1,617,997,700	12.00	300,793,100	12.00	382,971,000	12.00	347,721,000	100.00%	90.80%	12.00	648,514,100	20%	40%	Sekretariat Daerah	
	04.01.01.2.12.01	Penataan Organisasi	Terlaksananya Penataan Organisasi	100%	3,462,708,437	100%	445,768,250	100%	637,453,000	100%	350,381,720	100.00%	54.97%	100%	796,149,970	100%	19%	Sekretariat Daerah	
	04.01.01.2.12.02	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	250	1,025,483,733	50 buku	185,160,700	50.00	188,782,190	50 buku	120,927,040	100.00%	64.06%	50 buku	306,087,740	20%	30%	Sekretariat Daerah	
	04.01.01.2.12.03	Fasilitasi Pelayan Publik dan Tata Laksana	Terlaksananya Fasilitasi Pelayan Publik dan Tata Laksana	250	1,720,717,570	50 buku	224,679,350	50.00	316,768,390	50 buku	147,247,750	100.00%	46.48%	50 buku	371,927,100	20%	22%	Sekretariat Daerah	
	04.01.01.2.13	Kegiatan Peningakatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Terlaksananya Peningakatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	275	303,449,164	50 buku	35,928,200	55.00	55,862,220	50 buku	39,167,930	100.00%	70.12%	50 buku	75,096,130	18%	25%	Sekretariat Daerah	
	04.01.01.2.13.01	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	5	304,415,970		-	1.00	56,040,200	1 buku	31,872,000	100.00%	56.87%	1 buku	31,872,000	20%	10%	Sekretariat Daerah	
	04.01.01.2.13.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintaha Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintaha Daerah	60	108,642,000		-	12.00	20,000,000	12 bulan	11,167,000	100.00%	55.84%	12.00	11,167,000	20%	10%	Sekretariat Daerah	
	04.01.01.2.14	Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Terlaksananya Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	100%	8,805,791,420	100%	2,087,016,100	100%	2,021,065,780	100%	1,603,273,702	100.00%	79.33%	100%	3,690,289,802	100%	39%	Sekretariat Daerah	
	04.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan	5	3,928,276,348	1 kegiatan	1,121,810,004	1.00	923,159,800	1 kegiatan	870,324,343	100.00%	94.28%	1 kegiatan	1,992,134,347	20%	51%	Sekretariat Daerah	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	04.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	5	3,074,057,872	1 kegiatan	670,213,766	1.00	765,905,980	1 kegiatan	579,994,609	100.00%	75.73%	1 kegiatan	1,250,208,375	20%	41%	Sekretariat Daerah	
	04.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Terlaksananya Pendokumentasian Tugas Pimpinan	5	1,803,457,200	1 kegiatan	294,992,330	1.00	332,000,000	1 kegiatan	152,954,750	100.00%	46.07%	1 kegiatan	447,947,080	20%	25%	Sekretariat Daerah	
		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Cakupan Penyelenggaraan Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Persen)	100%	41,401,178,118	100%	10,041,272,529	100%	7,583,396,960	100%	5,704,039,115	100.00%	75.22%	100%	15,745,311,644	18%	57%	Sekretariat Daerah	
	04.01.02.2.01	Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	Terlaksananya Administrasi Tata Pemerintahan	100%	4,361,017,533	100%	1,020,979,115	100%	1,055,823,500	100%	889,822,691	100.00%	84.28%	100%	1,910,801,806	15%	43%	Sekretariat Daerah	
	04.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Terlaksananya Penataan Administrasi Pemerintahan	130	2,810,533,230	26 Kegiatan	736,855,297	26.00	577,783,500	26 Kegiatan	539,492,150	100.00%	93.37%	26 Kegiatan	1,276,347,447	4%	45%	Sekretariat Daerah	
	04.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	20	711,876,705	4 Laporan	136,923,642	4.00	306,660,000	4 Laporan	187,335,129	100.00%	61.09%	4 Laporan	324,258,771	20%	46%	Sekretariat Daerah	
	04.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	100	838,607,598	20 buku	147,200,176	20.00	171,380,000	20 buku	162,995,412	100.00%	95.11%	20 buku	310,195,588	20%	37%	Sekretariat Daerah	
	04.01.02.2.02	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100%	32,600,730,547	100%	6,972,260,140	100%	5,661,496,760	100%	3,980,748,285	90.63%	70.31%	100%	10,953,008,425	18%	34%	Sekretariat Daerah	
	04.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	20	8,512,109,390	4 kegiatan	187,824,540	4.00	1,507,001,600	4 kegiatan	1,292,234,044	100.00%	85.75%	4 kegiatan	1,480,058,584	20%	17%	Sekretariat Daerah	
	04.01.02.2.02.02	Pelaksaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Terlaksananya Pelaksaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	160	23,735,993,127	23 Kegiatan	6,746,360,000	32.00	4,089,579,560	23 Kegiatan	2,663,147,560	71.88%	65.12%	23 Kegiatan	9,409,507,560	14%	40%	Sekretariat Daerah	
	04.01.02.2.02.03	Pelaksaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Terlaksananya Pelaksaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	5	352,628,030	1 kegiatan	38,075,600	1.00	64,915,600	1 kegiatan	25,366,681	100.00%	39.08%	1 kegiatan	63,442,281	20%	18%	Sekretariat Daerah	
	04.01.02.2.03	Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi hukum	100%	3,879,815,096	100%	1,637,323,349	100%	751,056,700	100%	736,925,484	100.00%	98.12%	100%	2,374,248,833	20%	61%	Sekretariat Daerah	
	04.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	15	2,470,828,165	3 laporan	891,419,632	3.00	454,856,900	3 laporan	446,069,988	100.00%	98.07%	3 laporan	1,337,489,620	20%	54%	Sekretariat Daerah	
		Fasilitasi Bantuan Hukum	Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum	750	949,194,433	150 peserta	450,451,335	150.00	211,556,200	150 peserta	207,590,505	100.00%	98.13%	150 peserta	658,041,840	20%	69%	Sekretariat Daerah	
		Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	10	459,792,498	2 dokumen	295,452,382	2.00	84,643,600	2 dokumen	83,264,991	100.00%	98.37%	2 dokumen	378,717,373	20%	82%	Sekretariat Daerah	
	04.01.02.2.04	Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah	Terlaksananya Fasilitasi Kerjasama Daerah	100%	559,614,942	100%	410,709,925	100%	115,020,000	100%	96,542,655	100.00%	83.94%	100%	507,252,580	20%	91%	Sekretariat Daerah	
		Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Terlaksananya Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	5	559,614,942	1 kegiatan	410,709,925	1.00	115,020,000	1 kegiatan	96,542,655	100.00%	83.94%	1 kegiatan	507,252,580	20%	91%	Sekretariat Daerah	
	04:01	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Cakupan Penyelengaraan Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan	100%	20,079,693,791	100%	2,598,276,914	100%	3,981,014,600	100%	2,714,003,438	100.00%	68.17%	100%	5,312,280,352	0%	26%	Sekretariat Daerah	
	04.01.03.2.01	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Terlaksananya Kebijakan Perekonomian	100%	6,649,525,952	100%	461,953,060	100%	1,184,117,000	100%	686,783,084	100.00%	58.00%	100%	1,148,736,144	20%	17%	Sekretariat Daerah	
	04.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	5	578,913,019	1 kegiatan	44,230,160	1.00	202,922,600	1 kegiatan	22,618,878	100.00%	11.15%	1 kegiatan	66,849,038	20%	12%	Sekretariat Daerah	
	04.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	5	5,237,569,979	1 kegiatan	297,381,880	1.00	827,838,800	1 kegiatan	596,801,806	100.00%	72.09%	1 kegiatan	894,183,686	20%	17%	Sekretariat Daerah	
	04.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Terlaksananya Operasional Tim Monitoring dan Evaluasi KUR	5	833,042,954	1 kegiatan	120,341,020	1.00	153,355,600	1 kegiatan	67,362,400	100.00%	43.93%	1 kegiatan	187,703,420	20%	23%	Sekretariat Daerah	
	04.01.03.2.02	Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Terlaksananya Administrasi Pembangunan	100%	8,211,236,235	100%	976,365,209	100%	1,761,613,600	100%	1,097,474,458	100.00%	62.30%	100%	2,073,839,667	3%	25%	Sekretariat Daerah	
	04.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	15	3,918,831,014	3 dokumen	137,952,400	3.00	821,421,000	3 dokumen	576,668,628	100.00%	70.20%	3 dokumen	714,621,028	0%	18%	Sekretariat Daerah	
	04.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	15	2,769,632,234	3 dokumen	523,020,800	3.00	509,864,000	3 dokumen	141,721,500	100.00%	27.80%	3 dokumen	664,742,300	0%	24%	Sekretariat Daerah	
	04.01.03.2.02.03	Pengelolan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksaan Pembangunan	Terlaksananya Pengelolan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksaan Pembangunan	20	1,522,772,987	4 Dokumen	315,392,009	4.00	430,328,600	4 Dokumen	379,084,330	100.00%	88.09%	4 Dokumen	694,476,339	10%	46%	Sekretariat Daerah	
	04.01.03.2.03	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	100%	4,190,624,569	100%	1,046,396,285	100%	805,982,000	100%	786,760,796	100.00%	97.62%	100%	1,833,157,081	0%	44%	Sekretariat Daerah	
	04.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1300	960,029,762	300 Paket	450,119,817	300.00	211,259,000	300 Paket	202,559,317	100.00%	95.88%	100%	652,679,134	0.00	68%	Sekretariat Daerah	
	04.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Terlaksananya Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1300	2,344,597,569	300 Paket	288,496,268	300.00	431,619,000	300 Paket	424,311,985	100.00%	98.31%	100%	712,808,253	0.00	30%	Sekretariat Daerah	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	04.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	150	885,997,238	0.00	307,780,200	10.00	163,104,000	10 peserta	159,889,494	100.00%	98.03%	10 peserta	467,669,694	0.00	53%	Sekretariat Daerah	
	04.01.03.2.04	Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Terlaksananya Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	100%	1,028,307,035	100%	113,562,360	100%	229,302,000	100%	142,985,100	100.00%	62.36%	100%	256,547,460	13%	25%	Sekretariat Daerah	
	04.01.03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	60	590,055,560	12.00	113,562,360	12.00	128,623,840	12.00	82,721,290	100.00%	64.31%	12.00	196,283,650	13%	33%	Sekretariat Daerah	
	4.01.03.2.04.02	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan,Kelauatan dan Perikanan	TerlaksananyanKoordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan,Kelauatan dan Perikanan	60	226,676,180	12.00	-	12.00	51,729,080	12.00	39,993,980	100.00%	77.31%	12.00	39,993,980	13%	18%	Sekretariat Daerah	
	4.01.03.2.04.03	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	60	211,575,295	12.00	-	12.00	48,949,080	12.00	20,269,830	100.00%	41.41%	12.00	20,269,830	13%	10%	Sekretariat Daerah	
2	4.02	**Sekretariat DPRD**																	
	4.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pemenuhan penunjang kinerja perangkat daerah	95	94,234,911,615	90	24,030,547,434	90	20,436,870,503	90.00	19,033,338,405	100.00%	93.13%	90	19,033,338,405	95%	20%	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.01	Kegiatan Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu.	100	32,000,000	4	12,760,730	100	6,400,000	100	6,350,000	100.00%	99.22%	100	6,350,000	100%	20%	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja	10	7,000,000	2	4,628,800	2	1,400,000	2	1,400,000	100.00%	100.00%	2	1,400,000	0.2	20%	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD	10	25,000,000	2	8,131,930	2	5,000,000	2	4,950,000	100.00%	99.00%	2	4,950,000	20%	20%	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaporan keuangan tepat waktu	100	75,223,221,500	90	11,514,924,327	100	15,044,644,300	100	13,914,564,523	100.00%	92.49%	100	13,914,564,523	100%	18%	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan PNS	5	75,195,721,500	14	11,504,174,477	14	15,039,144,300	14	13,909,064,523	100.00%	92.49%	14	13,909,064,523	280%	18%	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan	5	12,500,000	1	4,787,000	1	2,500,000	1	2,500,000	100.00%	100.00%	1	2,500,000	20%	20%	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan	10	10,000,000	2	3,971,050	2	2,000,000	2	2,000,000	100.00%	100.00%	2	2,000,000	20%	20%	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan analisis prognosis realisasi anggaran	5	5,000,000	1	1,991,800	1	1,000,000	1	1,000,000	100.00%	100.00%	1	1,000,000	20%	20%	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang berkinerja baik	100	3,650,000,000	90	870,712,720	100	730,000,000	100	653,050,000	100.00%	89.46%	100	653,050,000	100%	18%	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.05.02	Pengadaaan pakaian dinas beserta perlengkapaanya	Jumlah pakian dinas yang tersedia	1500	1,500,000,000	300	509,067,000	125	300,000,000	125	298,550,000	100.00%	99.52%	125	298,550,000	8%	20%	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Meningkatnya Kemampuan/Skil Sumber daya Aparatur	60	2,150,000,000	12	361,645,720	12	430,000,000	12	354,500,000	100.00%	82.44%	12	354,500,000	20%	16%	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja	100	7,509,831,115	90	4,502,461,819	100	1,501,966,223	100	1,485,073,000	100.00%	98.88%	100	1,485,073,000	100%	20%	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen intalasi Listrik /Penerangan bangunan kantor	Tercapainya Kondisi Listrik yang baik di Kantor	60	135,764,500	12	41,496,500	12	27,152,900	12	27,152,900	100.00%	100.00%	12	27,152,900	20%	20%	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	60	91,600,000	12	40,824,500	12	18,320,000	12	18,230,000	100.00%	99.51%	12	18,230,000	20%	20%	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.06.04	Penyediaan bahan logistrik kantor	Jumlah Aktivitas	60	228,400,000	12	9,300,000	12	45,680,000	12	45,680,000	100.00%	100.00%	12	45,680,000	20%	20%	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Jumlah ATK	60	1,175,573,500	12	588,485,600	12	235,114,700	12	229,274,700	100.00%	97.52%	12	229,274,700	20%	20%	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang - Undangan	Meningkatnya Informasi melalui bahan bacaan dan Perundang-undangan	60	2,500,000,000	12	2,812,525,000	12	500,000,000	12	499,700,000	100.00%	99.94%	12	499,700,000	20%	20%	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah layanan jasa penyediaan makanan dan minuman	55	1,737,500,000	11	546,810,000	11	347,500,000	11	341,416,000	100.00%	98.25%	11	341,416,000	20%	20%	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.06.09	Penyelengaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi di luar kantor	60	1,640,993,115	12	463,020,219	12	328,198,623	12	323,619,400	100.00%	98.60%	12	323,619,400	20%	20%	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Persentase pemenuhan prasarana dan prasarana pendukung kinerja	100	811,250,000	90	2,679,630,131	100	162,250,000	100	155,885,000	100.00%	96.08%	100	155,885,000	100%	19%	Sekretariat DPRD	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	4.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin	160	353,000,000	32	2,141,000,600	32	70,600,000	32	68,390,000	100.00%	96.87%	32	68,390,000	20%	19%	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	5	458,250,000	1	538,629,531	12	91,650,000	12	87,495,000	100.00%	95.47%	12	87,495,000	240%	19%	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan layanan pendukung	100	3,261,115,000	90	1,393,161,514	100	652,223,000	100	617,886,739	100.00%	94.74%	100	617,886,739	100%	19%	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran tagihan	60	1,440,000,000	12	238,305,356	12	288,000,000	12	254,332,989	100.00%	88.31%	12	254,332,989	20%	18%	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	60	285,000,000	12	704,495,258	12	57,000,000	12	57,000,000	100.00%	100.00%	12	57,000,000	20%	20%	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.08.04	Peyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tagihan	60	1,536,115,000	12	450,360,900	12	307,223,000	12	306,553,750	100.00%	99.78%	12	306,553,750	20%	20%	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dalam kondisi baik	100	5,656,109,000	90	1,503,093,813	100	1,131,221,800	100	1,065,980,766	100.00%	94.23%	100	1,065,980,766	100%	19%	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.09.01	Peyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas labatan	Jumlah kendaraan	35	1,078,500,000	12	381,416,100	7	215,700,000	7	208,800,000	100.00%	96.80%	7	208,800,000	20%	19%	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor	60	3,791,750,000	12	944,148,663	12	758,350,000	12	708,889,766	100.00%	93.48%	12	708,889,766	20%	19%	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana kantor	60	785,859,000	12	177,529,050	12	157,171,800	12	148,291,000	100.00%	94.35%	12	148,291,000	20%	19%	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.15	Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	100	1,352,500,000	90	269,004,200	100	270,500,000	100	263,930,437	100.00%	97.57%	100	263,930,437	100%	20%	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Anggota DPRD	125	1,352,500,000	25	269,004,200	25	270,500,000	25	263,930,437	100.00%	97.57%	25	263,930,437	20%	20%	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.16	Kegiatan Layanan Administrasi DPRD	Persentase layanan administrasi DPRD yang terpenuhi	100	4,688,325,900	90	1,284,798,180	100	937,665,180	100	870,617,940	100.00%	92.85%	100	870,617,940	100%	19%	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD Provinsi/kab/kota	120	332,105,400	12		24 Kali	66,421,080	0	-		0	0	-	0	-	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD Provinsi/kab/kota	300	4,356,220,500	12	1,284,798,180	60	871,244,100	60	870,617,940	100.00%	99.93%	60	870,617,940	20%	20%	Sekretariat DPRD	
	4.02.02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Tersusun dan Terintegrasinya Program-program kerja DPRD untuk Melaksanakan fungsi Pengawasan, fungsi Pembentukan perda, dan Fungsi anggaran dalam Dokumen Rencana lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) (Persen)	100	53,984,646,000		16,131,657,810	100	10,796,929,200	100	10,540,416,886	100.00%	97.62%	100	10,540,416,886	100%	20%	Sekretariat DPRD	
	4.02.02.2.01	Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Cakupan pembentukan perda dan peraturan DPRD yang sesuai regulasi	100	2,500,000,000	90	1,174,210,280	100	500,000,000	100	422,878,460	100.00%	84.58%	100	422,878,460	100%	17%	Sekretariat DPRD	
	4.02.02.2.01.02	Pembahansan Rancangan Perda	Tersusunya dan terintergrasinya program=program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen rencana lima (RPJM) maupun dokumen rencana Tahunan (RKPD)	20	2,500,000,000	3	1,174,210,280	4	500,000,000	4	422,878,460	100.00%	84.58%	4	422,878,460	20%	17%	Sekretariat DPRD	
	4.02.02.2.04	Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase layanan peningkatan kapasitas DPRD	100	11,539,415,500	90	4,818,289,450	100	2,307,883,100	100	2,267,402,200	100.00%	98.25%	100	2,267,402,200	100%	20%	Sekretariat DPRD	
	4.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	Tersusunya dan terintergrasinya program=program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen rencana lima (RPJM) maupun dokumen rencana Tahunan (RKPD)	30	9,803,063,000	6	4,305,962,930	6	1,960,612,600	6	1,920,233,700	100.00%	97.94%	6	1,920,233,700	20%	20%	Sekretariat DPRD	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Tersusunya dan terintergrasinya program=program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen rencana lima (RPJM) maupun dokumen rencana Tahunan (RKPD)	30	1,736,352,500	12	512,326,520	6	347,270,500	6	347,168,500	100.00%	99.97%	6	347,168,500	20%	20%	Sekretariat DPRD	
	4.02.02.2.05	Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Cakupan pokir yang terealisasi	100	5,195,230,500	90	2,303,815,500	100	1,039,046,100	100	1,020,314,140	100.00%	98.20%	100	1,020,314,140	100%	20%	Sekretariat DPRD	
	4.02.02.2.05.01	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Tersusunya dan terintergrasinya program=program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen rencana lima (RPJM) maupun dokumen rencana Tahunan (RKPD).	180	550,000,000	12	677,897,500	36	110,000,000	36	91,314,140	100.00%	83.01%	36	91,314,140	20%	17%	Sekretariat DPRD	
	4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	Tersusunya dan terintergrasinya program=program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen rencana lima (RPJM) maupun dokumen rencana Tahunan (RKPD).	15	4,645,230,500	3	1,625,918,000	3	929,046,100	3	929,000,000	100.00%	100.00%	3	929,000,000	20%	20%	Sekretariat DPRD	
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Terintergrasinya program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan perda dan anggaran kedalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran Setwan DPRD.	100	34,750,000,000	90	7,835,342,580	100	6,950,000,000	100	6,829,822,086	100.00%	98.27%	100	6,829,822,086	100%	20%	Sekretariat DPRD	
	4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Tersusunya dan terintergrasinya program=program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen rencana lima (RPJM) maupun dokumen rencana Tahunan (RKPD).	140	34,750,000,000	12	7,835,342,580	28	6,950,000,000	28	6,829,822,086	100.00%	98.27%	28	6,829,822,086	20%	20%	Sekretariat DPRD	
V		**Unsur Penunjang**																	
1	05.01	**Perencanaan**																	
	05.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95%	19,121,625,653	90	18,244,954,080	90	3,736,397,595	77.14	3,082,972,579	85.71%	82.51%	77.14	3,082,972,579	81.203008	16.1	Bappelitbangda	
	05.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase dokumen perencanaan penganggran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu	100	183,013,000	100	178,067,340	100	28,693,600	100.00	28,693,600	100.00%	100.00%	100.00	28,693,600	100	15.68	Bappelitbangda	
	05.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen renja	10	31,310,000	10	72,293,420	2	4,025,600	2	4,025,600	100.00%	100.00%	2	4,025,600	20	12.86	Bappelitbangda	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen RKA-SKPD	5	19,156,000	5	-	1	4,106,000	1	4,106,000	100.00%	100.00%	1	4,106,000	20	21.43	Bappelitbangda	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD	5	18,524,000	5	-	1	4,106,000	1	4,106,000	100.00%	100.00%	1	4,106,000	20	22.17	Bappelitbangda	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	jumlah dokumen DPA-SKPD	5	24,976,000	5	-	1	4,106,000	1	4,106,000	100.00%	100.00%	1	4,106,000	20	16.44	Bappelitbangda	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD	5	24,800,000	5	-	1	4,106,000	1	4,106,000	100.00%	100.00%	1	4,106,000	20	16.56	Bappelitbangda	
	5.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunaan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10	40,122,000	10	74,055,820	2	4,152,000	2	4,152,000	100.00%	100.00%	2	4,152,000	20	10.35	Bappelitbangda	
	5.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan LAKIP SKPD	5	24,125,000	5	31,718,100	1	4,092,000	1	4,092,000	100.00%	100.00%	1	4,092,000	20	16.96	Bappelitbangda	
	5.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	13,718,695,570		12,127,048,200	100	2,668,783,275	100.00	2,090,328,246	100.00%	78.33%	100	2,090,328,246	100	15.24	Bappelitbangda	
	5.01.01.2.02.01	Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Layanan Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS	70	13,626,433,570	70	12,002,238,760	14	2,654,746,075	14	2,076,291,046	100.00%	78.21%	14	2,076,291,046	20	15.24	Bappelitbangda	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	5.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan SKPD	5	27,580,000	5	36,901,000	1	4,130,400	1	4,130,400	100.00%	100.00%	1	4,130,400	20	14.98	Bappelitbangda	
	5.01 .01.2.05.09	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keungan Bulanan /Triuwan /Semester SKPD	90	37,412,000	10	47,390,960	18	5,834,400	18	5,834,400	100.00%	100.00%	18	5,834,400	20	15.59	Bappelitbangda	
	5.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran SKPD	5	27,270,000	5	40,517,480	1	4,072,400	1	4,072,400	100.00%	100.00%	1	4,072,400	20	14.93	Bappelitbangda	
	5.01.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Aparatur yang Berkinerja Baik	100%	285,000,000		292,518,586	100	15,000,000	100	13,846,500	100.00%	92.31%	100	13,846,500	100	4.86	Bappelitbangda	
	5.01 .01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas	5	200,000,000	5	292,518,586	1	15,000,000	1	13,846,500	100.00%	92.31%	1	13,846,500	20	6.92	Bappelitbangda	
	5.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja	100%	2,568,662,083	100	2,386,600,960	100	493,843,000	100.00	492,786,200	100.00%	99.79%	100	492,786,200	100	19.18	Bappelitbangda	
	5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik	5	24,188,966	5	43,002,660	1	4,058,000	1	3,918,000	100.00%	96.55%	1	3,918,000	20	16.20	Bappelitbangda	
	5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Aktfitas	5	159,661,457	5	72,600,000	1	25,000,000	1	24,982,000	100.00%	99.93%	1	24,982,000	20	15.65	Bappelitbangda	
	5.01.01.2.06 .05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah ATK	60	752,490,057	60	782,526,480	12	134,785,000	12	134,764,000	100.00%	99.98%	12	134,764,000	20	17.91	Bappelitbangda	
	5.01 .01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah SKHU	60	428,484,421	60	215,730,000	12	84,000,000	12	84,000,000	100.00%	100.00%	12	84,000,000	20	19.60	Bappelitbangda	
	5.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Layanan Jasa Penyediaan Makan dan Minum	55	56,111,055	55	89,200,000	11	11,000,000	11	11,000,000	100.00%	100.00%	11	11,000,000	20.00	19.60	Bappelitbangda	
	5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi Diluar Kantor	60	1,147,726,127	60	1,183,541,820	12	235,000,000	12	234,122,200	100.00%	99.63%	12	234,122,200	20	20.40	Bappelitbangda	
	5.01 . 01 . 2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Prasarana dan Prasarana Pendukung kinerja	100%	96,500,000	100	1,902,692,500	100	18,200,000	0	-	0.00%	0.00%	0	-	0	0.00	Bappelitbangda	
	5.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin	2	62,500,000	63	1,090,174,500	2	8,200,000	0	-	0.00%	0.00%	0	-	0	0.00	Bappelitbangda	
	5.01.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap	1	34,000,000	17	812,518,000	2	10,000,000	0	-	0.00%	0.00%	0	-	0	0.00	Bappelitbangda	
	5.01 . 01 . 2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pesentase Pemenuhan Layanan Pendukung	100%	1,424,995,000	100	718,172,129	100	324,954,000	100	285,596,559	100.00%	87.89%	100	285,596,559	100	20.04	Bappelitbangda	
	5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Tagihan	60	150,000,000	60	152,808,709	12	34,800,000	12	22,442,559	100.00%	64.49%	12	22,442,559	20	14.96	Bappelitbangda	
	5.01 .01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bangunan Dan Kendaraan Dinas	34	1,250,000,000	35	500,000,000	4	286,000,000	4	259,000,000	100.00%	90.56%	4	259,000,000	11.76	20.72	Bappelitbangda	
	5.01 .01.2.08 .04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tagihan	60	24,995,000	60	65,363,420	12	4,154,000	12	4,154,000	100.00%	100.00%	12	4,154,000	20	16.62	Bappelitbangda	
	5.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase Barang Milik Daerah Yang Dalam Kondisi Baik	100%	844,760,000	100	639,854,365	100	186,923,720	100.00	171,721,474	100.00%	91.87%	100	171,721,474	100	20.33	Bappelitbangda	
	5.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan	25	709,110,000	25	639,854,365	5	173,250,000	5	158,051,474	100.00%	91.23%	5	158,051,474	20	22.29	Bappelitbangda	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin	5	60,650,000	0	-	1	8,520,000	1	8,520,000	100.00%	100.00%	1	8,520,000	20	14.05	Bappelitbangda	
	5.01 .01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana Dan Prasarana Kantor	60	75,000,000	0	-	1	5,153,720	1	5,150,000	100.00%	99.93%	1	5,150,000	1.6666667	6.87	Bappelitbangda	
	5.01 . 02	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Cakupan Konsistensi Dokumen Perencanaan terhadap Dokumen Penganggaran	100%	15,939,179,519	100	7,976,097,448	100	1,442,975,440	100.00	1,368,331,312	100.00%	94.83%	100	1,368,331,312	100	8.58	Bappelitbangda	
	5.01 . 02 . 2.01	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	100%	8,736,127,618	100	5,084,631,601	100	894,777,600	100.00	842,769,700	100.00%	94.19%	100	842,769,700	100	9.65	Bappelitbangda	
	5.01.02.2.01.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen LKPJ Bupati Pertahun	5	1,058,427,934	5	555,249,040	1	93,179,200	1	93,179,200	100.00%	100.00%	1	93,179,200	20	8.80	Bappelitbangda	
	5.01.02.2.01.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Terlaksanany Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah dan Perangkat Daerah	5	1,481,760,339	5	446,604,000	1	105,469,600	1	102,869,600	100.00%	97.53%	1	102,869,600	20	6.94	Bappelitbangda	
	5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Pelaporan Capaian Pembangunan Daerah Yang Dilaksanakan	5	725,577,155	5	383,820,237	1	67,097,200	1	47,947,200	100.00%	71.46%	1	47,947,200	20	6.61	Bappelitbangda	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Musrembang RKPD Yang Dilaksanakan	5	1,643,589,723	5	1,323,877,580	1	217,671,600	1	196,830,300	100.00%	90.43%	1	196,830,300	20	11.98	Bappelitbangda	
	5.01.02.2.01.06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Tersedianya LAKIP Kabupaten Pertahun	5	1,022,312,818	5	669,035,304	1	104,572,000	1	103,224,400	100.00%	98.71%	1	103,224,400	20	10.10	Bappelitbangda	
	5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedia nya Dokumen Perencanaan ; RKPD Yang Telah Ditetapkan Oleh PerKada	10	2,082,250,649	10	1,706,045,440	2	306,788,000	2	298,719,000	100.00%	97.37%	2	298,719,000	20	14.35	Bappelitbangda	
	5.01 . 02 . 2.02	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan Data Dan informasi Pembangunan Daerah	100%	2,716,647,087	100	1,362,810,469	100	322,797,520	100	308,864,230	100.00%	95.68%	100	308,864,230	10000	11.37	Bappelitbangda	
	5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunaan Daerah	Tersedia nya Sistem Data Dan Statistik Yang terintrergrasi	5	1,101,851,769	5	488,053,000	1	151,279,760	1	145,445,800	100.00%	96.14%	1	145,445,800	20	13.20	Bappelitbangda	
	5.01.02.2.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Persentase Organisasi Perangkat Daerah Yang Menggunakan Data Statistik dalam Manyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	5	785,820,840	5	569,571,359	1	88,432,160	1	82,198,250	100.00%	92.95%	1	82,198,250	20	10.46	Bappelitbangda	
	5.01.02.2.02.03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Statistik dalam Melakukan evaluasi Pembangunan Daerah	10	670,147,594	9	305,186,110	2	83,085,600	2	81,220,180	100.00%	97.75%	2	81,220,180	20	12.12	Bappelitbangda	
	5.01 . 02 . 2.03	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Penjabaran Konsisitensi Program RPJMD Kedalam RKPD	100%	2,821,433,199	100	1,528,655,378	100	225,400,320	100	216,697,382	100.00%	96.14%	100	216,697,382	10000	7.68	Bappelitbangda	
	5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Usulan DAK	5	852,954,632	3	163,867,600	1	117,894,560	1	114,299,731	100.00%	96.95%	1	114,299,731	20	13.40	Bappelitbangda	
	5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan DAK Fisik dan Evaluasi RKPD, Evaluasi RENSTRA, Evaluasi RPIMD	10	1,968,478,567	10	1,364,787,778	2	107,505,760	2	102,397,651	100.00%	95.25%	2	102,397,651	20	5.20	Bappelitbangda	
	5.01 . 03	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan Konsistensi Keselarasan Program Prioritas Daerah Terhadap Program Prioritas Pusat	95%	15,676,460,485	95	7,342,081,210	80	1,493,359,560	80.00	1,422,718,376	100.00%	95.27%	80	1,422,718,376	8421.0526	9.08	Bappelitbangda	
	5.01 . 03 . 2.01	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Rata Rata capaian Kinerja Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	70%	8,862,167,840	70	3,118,576,577	70	799,999,880	70	757,785,476	100.00%	94.72%	70	757,785,476	100	8.55	Bappelitbangda	
	5.01 .03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen RAD SDGS	5	858,792,804	4	752,566,900	1	144,055,620	1	136,988,100	100.00%	95.09%	1	136,988,100	20	15.95	Bappelitbangda	
	5.01.03.2.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Koordinasi Lintas Sektoral PDT Dan Transmigrasi	60	856,065,700	60	431,216,093	12	127,585,160	12	119,580,404	100.00%	93.73%	12	119,580,404	20	13.97	Bappelitbangda	
	5.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Pelaksana Penaggulangan Kemiskinan Daerah(LP2KD)	5	941,759,035	5	265,501,467	1	150,019,360	1	137,367,550	100.00%	91.57%	1	137,367,550	20	14.59	Bappelitbangda	
	5.01.03.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen RAN HAM	5	718,894,403	5	458,718,960	1	116,198,160	1	111,729,000	100.00%	96.15%	1	111,729,000	20	15.54	Bappelitbangda	
	5.01.03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Pelaksana RAD-PG	5	731,610,046	5	663,527,650	1	138,680,260	1	130,552,000	100.00%	94.14%	1	130,552,000	20	17.84	Bappelitbangda	
	5.01.03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Koordinasi Lintas Sektoral Pemerintahan dan Sosial Budaya	60	811,082,701	60	547,045,507	12	123,461,320	12	121,568,422	100.00%	98.47%	12	121,568,422	20	14.99	Bappelitbangda	
	5.01 . 03 . 2.02	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Rata Rata Capaian Kinerja Bidang Perekonomian SDA (Sumber daya Alam)	70%	1,438,901,548	70	876,855,905	70	270,339,520	70.00	256,943,800	100.00%	95.04%	70	256,943,800	100	17.86	Bappelitbangda	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah Dokumen Updating Potensi Ekonomi Daerah	5	719,882,879	5	545,554,192	1	135,916,320	1	127,759,800	100.00%	94.00%	1	127,759,800	20	17.75	Bappelitbangda	
	5.01.03.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Keoordinasi Lintas Sektoral Kerjasama Dunia Usaha dan Lembaga	60	719,018,669	60	331,301,713	12	134,423,200	12	129,184,000	100.00%	96.10%	12	129,184,000	20	17.97	Bappelitbangda	
	5.01.03.2.03	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Rata Rata Capaian Kinerja Bidang Insfatruktur Dan Kewilayahan	70%	5,375,391,097	70	3,346,648,728	70	423,020,160	70	407,989,100	100.00%	96.45%	70	407,989,100	100	7.59	Bappelitbangda	
	5.01 .03.2.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Koordinasi Lintas Sektoral Program air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL)	60	1,027,066,230	60	495,373,478	12	148,729,760	12	142,259,800	100.00%	95.65%	12	142,259,800	20	13.85	Bappelitbangda	
	5.01.03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Koordinasi Bidang Pembangunan Bidang Sarana Dan Prasarana Wilayah	60	877,630,047	60	357,059,400	12	139,623,200	12	134,329,500	100.00%	96.21%	12	134,329,500	20	15.31	Bappelitbangda	
	5.01.03.2.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Keoordinasi Bidang Kewilayahan	60	761,455,947	60	2,494,215,850	12	134,667,200	12	131,399,800	100.00%	97.57%	12	131,399,800	20	17.26	Bappelitbangda	
2		**Keuangan**		90%	79,975,209,957	90%	19,577,756,030	90%	164,342,060,570	90%	144,775,290,596	100.00%	88.09%	90%	144,775,290,596	100	181	BPKAD	
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95%	46,167,101,824	100%	9,631,311,449	90%	12,291,425,650	90%	10,908,868,538	100.00%	88.75%	100%	10,908,868,538	105	24	BPKAD	
	5.02.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, & Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	100%	32,500,000	100%	6,500,000	100%	6,500,000	100%	6,500,000	100.00%	100.00%	100%	6,500,000	100	20	BPKAD	
	5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPA dan DPPA BPKAD	10	7,500,000	2	1,500,000	2	1,500,000	2	1,500,000	100.00%	100.00%	2	1,500,000	20	20	BPKAD	
	5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Peyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja BPKAD	60	25,000,000	12	5,000,000	12	5,000,000	12	5,000,000	100.00%	100.00%	12	5,000,000	20	20	BPKAD	
	5.02.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu	100%	32,622,472,750	100%	6,522,494,550	100%	10,150,891,850	100%	8,888,676,052	100.00%	87.57%	100%	8,888,676,052	100	27	BPKAD	
	5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN BPKAD	60	32,584,650,750	12	6,516,930,150	12	10,145,327,450	12	8,883,111,652	100.00%	87.56%	12	8,883,111,652	20	27	BPKAD	
	5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun BPKAD	5	15,822,000	1	2,564,400	1	2,564,400	1	2,564,400	100.00%	100.00%	1	2,564,400	20	16	BPKAD	
	5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Semesteran BPKAD	10	15,000,000	2	2,000,000	2	2,000,000	2	2,000,000	100.00%	100.00%	2	2,000,000	20	13	BPKAD	
	5.02.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran BPKAD	5	7,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	100.00%	100.00%	1	1,000,000	20	14	BPKAD	
	5.02.01.2.05	Kegiatan Adminisitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yg berkinerja baik	100%	1,498,950,000	100%	499,650,000	100%	428,000,000	100%	427,380,000	100.00%	99.86%	100%	427,380,000	100	29	BPKAD	
	5.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Meningkatnya Pengetahuan dan Kompetensi SDM Aparatur BPKAD	60	1,498,950,000	12	499,650,000	12	428,000,000	12	427,380,000	100.00%	99.86%	12	427,380,000	20	29	BPKAD	
	5.02.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja	100%	6,520,590,765	100%	1,665,925,153	100%	880,637,800	100%	871,417,582	100.00%	98.95%	100%	871,417,582	100	13	BPKAD	
	5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bahan/Material Instalasi Listrik	60	100,000,000	12	66,646,800	12	15,637,800	12	15,637,800	100.00%	100.00%	12	15,637,800	20	16	BPKAD	
	5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kegiatan Pameran Pembangunan	5	125,000,000	0	-	1	25,000,000	1	25,000,000	100.00%	100.00%	1	25,000,000	20	20	BPKAD	
	5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan dan Penggandaan, ATK Beserta Dokumen Cek	60	3,000,000,000	12	883,160,200	12	387,000,000	12	386,750,000	100.00%	99.94%	12	386,750,000	20	13	BPKAD	
	5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	60	600,000,000	12	177,000,000	12	17,000,000	12	17,000,000	100.00%	100.00%	12	17,000,000	20	3	BPKAD	
	5.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Makanan dan Minuman Pegawai, Rapat dan Tamu	55	1,140,305,000	11	228,061,000	11	150,000,000	11	141,166,000	100.00%	94.11%	11	141,166,000	20	12	BPKAD	
	5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah dan Dalam Daerah	60	1,555,285,765	12	311,057,153	12	286,000,000	12	285,863,782	100.00%	99.95%	12	285,863,782	20	18	BPKAD	
	5.02.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Prasarana dan prasarana pendukung kinerja	100%	2,560,500,000	100%	256,050,000	100%	45,000,000	100%	43,833,599	100.00%	97.41%	100%	43,833,599	100	2	BPKAD	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	5.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kamera, Drone, Laptop dan Printer	70	2,560,500,000	24	256,050,000	24	45,000,000	24	43,833,599	100.00%	97.41%	24	43,833,599	34	2	BPKAD	
	5.02.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Layanan Pendukung	100%	1,839,281,684	100%	492,496,421	100%	560,876,000	100%	497,255,197	100.00%	88.66%	100%	497,255,197	100	27	BPKAD	
	5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Tagihan Rekening Telepon, Rekening Listrik dan Biaya Air	60	267,486,772	12	66,871,693	12	96,000,000	12	55,106,469	100.00%	57.40%	12	55,106,469	20	21	BPKAD	
	5.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Rumah Dinas, Gedung Kantor dan Kendaraan Dinas	30	1,441,090,912	6	360,272,728	6	433,000,000	6	410,272,728	100.00%	94.75%	6	410,272,728	20	28	BPKAD	
	5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpeliharanya Kebersihan Kantor	60	130,704,000	12	65,352,000	12	31,876,000	12	31,876,000	100.00%	100.00%	12	31,876,000	20	24	BPKAD	
	5.02.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dalam kondisi baik	100%	1,092,806,625	100%	188,195,325	100%	219,520,000	100%	173,806,108	100.00%	79.18%	100%	173,806,108	100	16	BPKAD	
	5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas BPKAD	60	561,401,625	12	112,280,325	12	140,350,000	12	108,216,108	100.00%	77.10%	12	108,216,108	20	19	BPKAD	
	5.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor	60	531,405,000	12	75,915,000	12	79,170,000	12	65,590,000	100.00%	82.85%	12	65,590,000	20	12	BPKAD	
	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Cakupan tata kelola keuangan daerah sesuai aturan (Persen)	100%	28,154,524,767	100%	8,302,395,102	100%	150,336,495,320	100%	132,357,174,543	100.00%	88.04%	100%	132,357,174,543	100	470	BPKAD	
	5.02.02.2.01	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Cakupan Dokumen penganggaran daerah tepat waktu	100%	11,839,041,748	100%	3,504,102,028	100%	2,575,000,000	100%	2,449,166,044	100.00%	95.11%	100%	2,449,166,044	100	21	BPKAD	
	5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Tersedianya Dokumen KUA dan PPAS	2	383,970,488	2	383,970,488	2	276,212,000	2	258,814,000	100.00%	93.70%	2	258,814,000	100	67	BPKAD	
	5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS	Tersedianya Dokumen Perubahan KUA dan PPAS	2	332,169,200	2	332,169,200	2	276,132,800	2	249,306,800	100.00%	90.29%	2	249,306,800	100	75	BPKAD	
	5.02.02.2.01.03	Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen RKA SKPD Kabupaten Pesisir Barat	4	248,857,980	2	82,952,660	2	72,065,060	2	71,972,060	100.00%	99.87%	2	71,972,060	50	29	BPKAD	
	5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA SKPD Kabupaten Pesisir Barat	1	93,385,660	1	93,385,660	1	70,315,060	1	68,411,060	100.00%	97.29%	1	68,411,060	100	73	BPKAD	
	5.02.02.2.01.05	Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Tersusunnya DPA SKPD Kabupaten Pesisir Barat	1	66,534,220	1	66,534,220	1	37,507,580	1	36,670,420	100.00%	97.77%	1	36,670,420	100	55	BPKAD	
	5.02.02.2.01.06	Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya DPPA SKPD Kabupaten Pesisir Barat	1	71,361,200	1	71,361,200	1	20,547,500	1	19,413,500	100.00%	94.48%	1	19,413,500	100	27	BPKAD	
	5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Tentang APBD Kabupaten Pesisir Barat	10	4,159,691,000	2	831,938,200	2	827,344,000	2	805,610,900	100.00%	97.37%	2	805,610,900	20	19	BPKAD	
	5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Perubahan APBD Kabupaten Pesisir Barat	10	4,883,072,000	2	976,614,400	2	815,008,000	2	759,715,304	100.00%	93.22%	2	759,715,304	20	16	BPKAD	
	5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Perkada Tentang Standar Biaya dan Pedoman Penyusunan RKA, Pedoman Pelaksanaan APBD Serta Terlaksananya Sosialisasi	10	1,600,000,000	4	665,176,000	4	179,868,000	4	179,252,000	100.00%	99.66%	4	179,252,000	40	11	BPKAD	
	5.02.02.2.02	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Cakupan tata kelola keuangan daerah sesuai aturan (Persen)	100%	3,307,675,680	100%	923,633,736	100%	775,000,000	100%	735,653,485	100.00%	94.92%	100%	735,653,485	100	22	BPKAD	
	5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Tersedianya Laporan Rekonsiliasi Kasda, Dokumen SP2D Daftar Gaji Pemerintah Daerah	60	1,117,329,690	12	223,465,938	12	275,729,400	12	275,146,576	100.00%	99.79%	12	275,146,576	20	25	BPKAD	
	5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Tersedianya Laporan Sinkronisasi Pendapatan Daerah	60	1,690,345,990	12	338,069,198	12	396,909,120	12	370,032,209	100.00%	93.23%	12	370,032,209	20	22	BPKAD	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Tersedianya Laporan Konsinyering dan Rekonsiliasi Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan	36	500,000,000	12	362,098,600	12	102,361,480	12	90,474,700	100.00%	88.39%	12	90,474,700	33	18	BPKAD	
	5.02.02.2.03	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Cakupan tata kelola keuangan daerah sesuai aturan (Persen)	100%	4,495,417,717	100%	840,273,716	100%	1,099,860,400	100%	913,042,362	100.00%	83.01%	100%	913,042,362	100	20	BPKAD	
	5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Laporan Realisasi APBD Per Semester	10	328,524,300	2	82,131,075	2	60,841,000	2	60,606,600	100.00%	99.61%	2	60,606,600	20	18	BPKAD	
	5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tersedianya laporan Keuangan Pemerintah Daerah	5	3,230,406,017	1	496,985,541	1	561,144,400	1	557,795,879	100.00%	99.40%	1	557,795,879	20	17	BPKAD	
	5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	10	799,748,400	2	199,937,100	2	193,535,000	2	193,267,100	100.00%	99.86%	2	193,267,100	20	24	BPKAD	
	5.02.02.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Peraturan Kepala Daerah Tentang Kebijakan Akuntansi dan Bagan Akun Standar	2	36,047,000	2	36,047,000	2	47,611,000	2	46,191,000	100.00%	97.02%	2	46,191,000	100	128	BPKAD	
	5.02.02.2.03.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tersusunnya Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	2	100,692,000	1	25,173,000	1	36,729,000	1	36,149,000	100.00%	98.42%	1	36,149,000	50	36	BPKAD	
	5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya FGD Pengelola Keuangan Se-Provinsi Lampung	3	600,000,000	0	-	1	200,000,000	0	19,032,783	0.00%	9.52%	0	19,032,783	0	3	BPKAD	
	5.02.02.2.04	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Cakupan pemenuhan penunjang pengelolaan keuangan daerah	100%	8,512,389,622	100%	3,034,385,622	100%	145,886,634,920	100%	128,259,312,652	100.00%	87.92%	100%	128,259,312,652	100	1507	BPKAD	
	5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Terkelolanya Belanja Tak Terduga	12	6,394,699,000	12	2,213,824,000	12	4,042,537,820	12	-	100.00%	0.00%	12	-	100	0	BPKAD	
	5.02.02.2.04.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Terkelolanya Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten Pesisir Barat	12	2,117,690,622	12	820,561,622	12	141,844,097,100	12	128,259,312,652	100.00%	90.42%	12	128,259,312,652	100	6057	BPKAD	
	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Cakupan tata kelola barang milik daerah sesuai aturan (Persen)	100%	5,653,583,366	100%	1,644,049,479	100%	1,714,139,600	100%	1,509,247,515	100.00%	88.05%	100%	1,509,247,515	100	27	BPKAD	
	5.02.03.2.01	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Cakupan pencatatan aset daerah	100%	5,653,583,366	100%	1,644,049,479	100%	1,714,139,600	100%	1,509,247,515	100.00%	88.05%	100%	1,509,247,515	100	27	BPKAD	
	5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	Tersedianya Standar Satuan Harga Barang Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021	5	1,680,984,708	1	480,281,345	1	452,205,600	1	423,830,895	100.00%	93.73%	1	423,830,895	20	25	BPKAD	
	5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Tersusunnya LBMD Pemerintah Daerah dan LBMD SKPD	10	2,835,142,196	2	708,785,549	2	701,924,000	2	681,584,120	100.00%	97.10%	2	681,584,120	20	24	BPKAD	
	5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Laporan Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah	5	1,137,456,463	1	454,982,585	1	260,010,000	1	237,004,500	100.00%	91.15%	1	237,004,500	20	21	BPKAD	
	5.02.03.2.01.11	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengawasan Barang Milik Daerah	5	1,500,000,000	0	-	1	300,000,000	1	166,828,000	100.00%	55.61%	1	166,828,000	20	11	BPKAD	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95%	20,501,615,171	90	14,583,036,875	90	3,638,433,935	88	2,860,767,044	97.74%	78.63%	88	2,860,767,044	93	14%	Bapenda	
		Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah	90%	74,777,320	90	46,511,720	90	13,150,760	90	13,150,760	100.00%	100.00%	90	13,150,760	100	18%	Bapenda	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja	10	38,516,600	4	25,616,840	2	7,703,320	2	7,703,320	100.00%	100.00%	2	7,703,320	0	20%	Bapenda	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	10	36,260,720	10	20,894,880	2	5,447,440	2	5,447,440	100.00%	100.00%	2	5,447,440	0	15%	Bapenda	
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90%	13,109,791,480	90	10,460,431,612	90	2,366,729,535	90	1,733,088,771	100.00%	73.23%	90	1,733,088,771	100	13%	Bapenda	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terdsedianya Gaji dan Tunjangan PNS	60	12,947,010,280	56	10,437,875,372	14	2,360,281,375	14	1,726,640,611	100.00%	73.15%	14	1,726,640,611	0	13%	Bapenda	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Ahir Tahun	5	40,772,000	4	8,154,400	1	2,628,200	1	2,628,200	100.00%	100.00%	1	2,628,200	0	6%	Bapenda	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Semesteran	10	46,791,000	5	9,358,200	2	2,436,200	2	2,436,200	100.00%	100.00%	2	2,436,200	0	5%	Bapenda	
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5	75,218,200	5	5,043,640	1	1,383,760	1	1,383,760	100.00%	100.00%	1	1,383,760	0	2%	Bapenda	
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah	90%	495,000,000	90	428,275,735	90	125,000,000	90	125,000,000	100.00%	100.00%	90	125,000,000	100	25%	Bapenda	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas	60	495,000,000	60	428,275,735	10	125,000,000	10	125,000,000	100.00%	100.00%	10	125,000,000	0	25%	Bapenda	
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah	90%	2,104,918,200	90	1,193,112,292	90	498,983,640	90	376,371,341	100.00%	75.43%	90	376,371,341	100	18%	Bapenda	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik	60	38,100,000	60	32,134,080	12	7,620,000	12	7,620,000	100.00%	100.00%	12	7,620,000	0	20%	Bapenda	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Kegiatan Propaganda/Pameran	5	181,000,000	3	83,400,000	1	25,000,000	1	25,000,000	100.00%	100.00%	1	25,000,000	0	14%	Bapenda	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah ATK	60	411,818,200	60	401,748,600	12	117,363,640	12	117,363,640	100.00%	100.00%	12	117,363,640	0	28%	Bapenda	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah SKHU	60	100,000,000	60	92,400,500	10	12,000,000	10	11,160,000	100.00%	93.00%	10	11,160,000	0	11%	Bapenda	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Layanan Jasa Penyediaaan Makanan dan Minuman	55	164,000,000	55	185,252,000	11	22,000,000	11	22,000,000	100.00%	100.00%	11	22,000,000	0	13%	Bapenda	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi di luar kantor	60	1,210,000,000	60	398,177,112	12	315,000,000	12	193,227,701	100.00%	61.34%	12	193,227,701	0	16%	Bapenda	
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah	40	1,237,431,539	4	408,756,000	26	102,000,000	26	102,000,000	100.00%	100.00%	26	102,000,000	1	8%	Bapenda	
		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap	40	1,237,431,539	4	408,756,000	26	102,000,000	26	102,000,000	100.00%	100.00%	26	102,000,000	1	8%	Bapenda	
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah	90%	1,611,420,000	90	653,495,958	90	305,320,000	84	293,360,682	93.33%	96.08%	84	293,360,682	93	18%	Bapenda	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Tagihan	60	214,820,000	60	70,202,138	12	36,000,000	10	24,040,682	83.33%	66.78%	10	24,040,682	0	11%	Bapenda	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bangunan dan Kendaraan Dinas	30	1,342,500,000	30	509,500,000	6	263,500,000	6	263,500,000	100.00%	100.00%	6	263,500,000	0	20%	Bapenda	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tagihan	60	54,100,000	60	73,793,820	12	5,820,000	12	5,820,000	100.00%	100.00%	12	5,820,000	0	11%	Bapenda	
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah	90%	1,868,276,632	90	1,392,453,558	90	227,250,000	83	217,795,490	92.45%	95.84%	83	217,795,490	92	12%	Bapenda	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan	15	854,660,782	15	464,060,388	5	105,450,000	3	98,650,000	60.00%	93.55%	3	98,650,000	0	12%	Bapenda	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Peralatan Kantor	60	42,615,850	60	8,523,170	12	2,800,000	12	2,145,490	100.00%	76.62%	12	2,145,490	0	5%	Bapenda	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor	60	351,000,000	60	60,200,000	12	10,000,000	10	8,000,000	83.33%	80.00%	10	8,000,000	0	2%	Bapenda	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	60	150,000,000	12	75,000,000	12	15,000,000	12	15,000,000	100.00%	100.00%	12	15,000,000	0	10%	Bapenda	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor	60	470,000,000	60	784,670,000	12	94,000,000	12	94,000,000	100.00%	100.00%	12	94,000,000	0	20%	Bapenda	
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rasio PAD Terhadap Pendapatan Daerah (Persen)	5.08%	8,193,533,400	90	2,920,810,639	3	1,490,747,400	4	1,478,137,010	100.00%	99.15%	4	1,478,137,010	75	18%	Bapenda	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya Penyusunan Anggaran Pendapatan TA selanjutnya, Terlaksananya Penyusunan Angaran Perubahan Pendapatan Tahun Angaran Berjalan	90%	8,193,533,400	90	2,920,810,639	90	1,490,747,400	83.08	1,478,137,010	92.31%	99.15%	83	1,478,137,010	92	18%	Bapenda	
		Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Anggaran Pendapatan Asli Daerah	10	907,882,440	10	586,486,740	2	30,966,600	1	30,651,600	50.00%	98.98%	1	30,651,600	0	3%	Bapenda	
		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Dokumen	5	894,590,000	5	382,024,879	1	278,918,000	1	277,151,400	100.00%	99.37%	1	277,151,400	0	31%	Bapenda	
		Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Cakupan Pengelolaan Pajak Daerah	55	4,443,108,000	55	683,366,200	11	735,794,000	9	732,352,000	81.82%	99.53%	9	732,352,000	0	16%	Bapenda	
		Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Objek Pajak Daerah	60	1,027,658,960	12	1,060,065,600	12	148,938,000	12	148,609,750	100.00%	99.78%	12	148,609,750	0	14%	Bapenda	
		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan	1	140,090,000	0	-	1	140,090,000	1	133,994,260	100.00%	95.65%	1	133,994,260	1	96%	Bapenda	
		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan	60	780,204,000	12	208,867,220	12	156,040,800	12	155,378,000	100.00%	99.58%	12	155,378,000	0	20%	Bapenda	
3		**Kepegawaian**																	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Badan Kepegawaian Daerah	95.00	13,339,424,497	90.00	10,993,699,254	90.00	2,411,164,150	88.56	1,676,128,689	98.40%	69.52%	88.56	1,676,128,689	88.56	12.57	BKPSDM	
	5.03 . 01 . 2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	95.00	47,000,000	90.00	55,394,200	90.00	7,000,000	90.00	6,991,000	100.00%	99.87%	90.00	6,991,000	90.00	14.87	BKPSDM	
	5.03 . 01 . 2.01 . 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	10	22,000,000	34	25,483,600	2	2,000,000	2	1,997,000	100.00%	99.85%	2	1,997,000	20.00	9.08	BKPSDM	
	5.03 . 01 . 2.01 . 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan	20	25,000,000	24	29,910,600	4	5,000,000	4	4,994,000	100.00%	99.88%	4	4,994,000	20.00	19.98	BKPSDM	
	5.03 . 01 . 2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	95.00	9,176,561,900	90.00	7,716,338,082	90.00	1,765,349,250	100.00	1,391,376,979	100.00%	78.82%	100.00	1,391,376,979	100.00	15.16	BKPSDM	
	5.03 . 01 . 2.02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Layanan Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS	70	9,137,416,400	70	7,683,933,882	14	1,759,849,250	14	1,385,885,979	100.00%	78.75%	14	1,385,885,979	20.00	15.17	BKPSDM	
	5.03 . 01 . 2.02 . 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	5	16,423,000	6	14,950,000	1	2,500,000	1	2,497,000	100.00%	99.88%	1	2,497,000	20.00	15.20	BKPSDM	
	5.03 . 01 . 2.02 . 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	10	13,602,500	12	11,965,600	2	2,000,000	2	1,997,000	100.00%	99.85%	2	1,997,000	20.00	14.68	BKPSDM	
	5.03 . 01 . 2.02 . 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	10	9,120,000	6	5,488,600	2	1,000,000	2	997,000	100.00%	99.70%	2	6,485,600	20.00	71.11	BKPSDM	
	5.03 . 01 . 2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tercapainya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	95.00	370,000,000	90.00	88,236,882	90.00	10,000,000	100.00	630,000	100.00%	6.30%	100.00	630,000	100.00	0.17	BKPSDM	
	5.03 . 01 . 2.05 . 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti peningkatan kapasitas	41	370,000,000	14	88,236,882	1	10,000,000	1	630,000	100.00%	6.30%	1	630,000	2.44	0.17	BKPSDM	
	5.03 . 01 . 2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah	95.00	1,987,779,870	90.00	1,844,766,359	90.00	363,536,900	100.00	82,225,000	100.00%	22.62%	100.00	82,225,000	100.00	4.14	BKPSDM	
	5.03 . 01 . 2.06 . 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik	60	12,802,500	72	14,358,000	12	1,200,000	12	1,200,000	100.00%	100.00%	12	1,200,000	20.00	9.37	BKPSDM	
	5.03 . 01 . 2.06 . 01	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Aktivitas	5	125,000,000	4	80,000,000	1	21,000,000	1	21,000,000	100.00%	100.00%	1	21,000,000	20.00	16.80	BKPSDM	
	5.03 . 01 . 2.06 . 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah ATK	60	293,560,070	72	267,126,100	12	48,084,400	12	48,025,000	100.00%	99.88%	12	48,025,000	20.00	16.36	BKPSDM	
	5.03 . 01 . 2.06 . 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah SKHU	60	79,261,200	72	69,600,000	12	12,000,000	12	12,000,000	100.00%	100.00%	12	12,000,000	20.00	15.14	BKPSDM	
	5.03 . 01 . 2.06 . 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Layanan Jasa Penyediaaan Makanan dan Minuman	55	67,156,100	67	61,400,000	11	11,000,000	11	11,000,000	100.00%	100.00%	11	11,000,000	20.00	16.38	BKPSDM	
	5.03 . 01 . 2.06 . 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi di luar kantor	60	1,410,000,000	72	1,352,282,259	12	270,252,500	12	265,446,228	100.00%	98.22%	12	265,446,228	20.00	18.83	BKPSDM	
	5.03. 01. 2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang	70.00	457,400,000	40.00	129,300,000	7.00	40,080,000	7.00	40,080,000	100.00%	100.00%	7.00	40,080,000	10.00	8.76	BKPSDM	
	5.03. 01. 2.07. 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah komputer/laptop dan peralatan kantor	70	457,400,000	40	129,300,000	7	40,080,000	7	40,080,000	100.00%	100.00%	7	40,080,000	10.00	8.76	BKPSDM	
	5.03 . 01 . 2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa	95.00	1,294,232,359	90.00	1,020,859,332	90.00	146,992,000	90.00	126,415,270	100.00%	86.00%	90.00	126,415,270	90.00	9.77	BKPSDM	
	5.03 . 01 . 2.08 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Tagihan	60	183,153,000	72	153,278,732	12	30,000,000	12	29,431,270	100.00%	98.10%	12	29,431,270	20.00	16.07	BKPSDM	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	5.03 . 01 . 2.08 . 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bangunan dan Kendaraan Dinas	60	1,080,602,700	72	840,000,000	12	112,000,000	12	92,000,000	100.00%	82.14%	12	92,000,000	20.00	8.51	BKPSDM	
	5.03 . 01 . 2.08 . 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tagihan	60	30,476,659	72	27,580,600	12	4,992,000	12	4,984,000	100.00%	99.84%	12	4,984,000	20.00	16.35	BKPSDM	
	5.03 . 01 . 2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	95.00	463,850,368	90.00	268,104,399	90.00	78,206,000	100.00	68,490,440	100.00%	87.58%	100.00	68,490,440	100.00	14.77	BKPSDM	
	5.03 . 01 . 2.09 . 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan	5	336,391,010	6	194,510,399	1	59,100,000	1	50,762,440	100.00%	85.89%	1	50,762,440	20.00	15.09	BKPSDM	
	5.03 . 01 . 2.09 . 03	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan	5	114,629,358	-	-	1	17,276,000	1	15,898,000	100.00%	92.02%	1	15,898,000	20.00	13.87	BKPSDM	
	5.03 . 01 . 2.09 . 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor	5	12,830,000	6	73,594,000	1	1,830,000	1	1,830,000	100.00%	100.00%	1	1,830,000	20.00	14.26	BKPSDM	
	5.03 . 02	Program Kepegawaian Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	77.27	16,175,706,700	15,184	6,446,453,493	70	939,260,230	70.50	905,133,349	100.00%	96.37%	2,631	905,133,349	3,404.94	5.60	BKPSDM	
	5.03 . 02 . 2.01	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Tercapainya Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian ASN	7,511	7,957,872,600	7,966	2,665,832,174	1,429	265,570,880	1,348	249,980,528	94.33%	94.13%	1,348	249,980,528	17.95	3.14	BKPSDM	
	5.03 . 02 . 2.01 . 03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Orang	6,681	6,176,707,800	6,778	1,943,209,253	1255	92,771,800	1,255	90,153,128	100.00%	97.18%	1,255	90,153,128	18.78	1.46	BKPSDM	
	5.03 . 02 . 2.01 . 06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah SK Pemberhentian	260	296,986,000	351	250,847,224	60	36,989,000	60	35,568,000	100.00%	96.16%	60	35,568,000	23.08	11.98	BKPSDM	
	5.03 . 02 . 2.01 . 08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Operasonal Sekretariat KORPRI	60	363,392,000	36	91,307,631	12	55,023,280	12	44,545,400	100.00%	80.96%	12	44,545,400	20.00	12.26	BKPSDM	
	5.03 . 02 . 2.01 . 10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan	10	431,774,000	18	204,149,969	2	39,774,000	2	38,766,000	100.00%	97.47%	2	38,766,000	20.00	8.98	BKPSDM	
	5.03 . 02 . 2.01 . 11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen	500	689,012,800	783	176,318,097	100	41,012,800	19	40,948,000	19.00%	99.84%	19	40,948,000	3.80	5.94	BKPSDM	
	5.03 . 02 . 2.02	Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	Tercapainya Mutasi dan Promosi ASN	44	5,846,740,000	28	1,986,668,751	7	377,694,000	7	367,202,421	100.00%	97.22%	7	367,202,421	15.91	6.28	BKPSDM	
	5.03 . 02 . 2.02 . 01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Promosi	30	2,266,740,000	21	539,408,940	6	70,894,000	6	61,292,500	100.00%	86.46%	6	61,292,500	20.00	2.70	BKPSDM	
	5.03 . 02 . 2.02 . 03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Kegiatan	14	3,580,000,000	7	1,447,259,811	1	306,800,000	1	305,909,921	100.00%	99.71%	1	305,909,921	7.14	8.54	BKPSDM	
	5.03 . 02 . 2.04	Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Tercapainya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	5,835	2,371,094,100	7,190	1,793,952,568	1,307	295,995,350	1,276	287,950,400	97.63%	97.28%	1,276	287,950,400	21.87	12.14	BKPSDM	
	5.03 . 02 . 2.04 . 03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Rapat	60	499,393,000	42	420,205,098	12	84,393,000	12	76,565,000	100.00%	90.72%	12	76,565,000	20.00	15.33	BKPSDM	
	5.03 . 02 . 2.04 . 04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN	5,750	1,446,611,000	7,119	1,251,616,665	1290	176,511,000	1,259	176,334,500	97.60%	99.90%	1,259	176,334,500	21.90	12.19	BKPSDM	
	5.03 . 02 . 2.04 . 07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah Laporan	25	425,090,100	29	122,130,805	5	35,091,350	5	35,050,900	100.00%	99.88%	5	35,050,900	20.00	8.25	BKPSDM	
4	5.04	**Pendidikan dan Pelatihan**																	
	5.04. 02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Pengembangan Sumber Daya Manusia	797	10,005,573,686	-	-	54	465,369,400	54	326,953,862	100.00%	70.26%	54	326,953,862	6.78	3.27	BKPSDM	
	5.04. 02. 2.01	Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis	Tercapainya Pengembangan Kompetensi Teknis	1,800	3,520,000,000	-	-	40	69,517,500	40	-	100.00%	0.00%	40	-	2.22	-	BKPSDM	
	5.04. 02. 2.01. 03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Orang	1,800	3,520,000,000	-	-	40	69,517,500	40	-	100.00%	0.00%	40	-	2.22	-	BKPSDM	
	5.04. 02. 2.02	Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Tercapainya Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	797	10,005,573,686	-	-	54	395,851,900	54	326,953,862	100.00%	82.59%	54	326,953,862	6.78	3.27	BKPSDM	
	5.04. 02. 2.02. 07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Orang	797	10,005,573,686	-	-	54	395,851,900	54	326,953,862	100.00%	82.59%	54	326,953,862	6.78	3.27	BKPSDM	
5	5.05	**Penelitian dan Pengembangan**																	
	5.05 . 02	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Sangat Inovatif	4,054,043,290	Inovatif	523,461,400	Inovatif	493,879,200	Inovatif	481,527,969	50.00%	97.50%	Inovatif	481,527,969	#VALUE!	11.88	Bappelitbangda	
	5.05 . 02 . 2.01	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Bidang Peyelenggaran Pemerintah Dan Pengkajian Peraturan	80	3,029,152,790	80	156,435,400	80	148,901,600	80	145,834,634	100.00%	97.94%	80	145,834,634	100	4.81	Bappelitbangda	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	5.05.02.2.01.02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Koordinasi Lintas Sektoral Kelitbangan	60	839,513,713	60	156,435,400	12	148,901,600	12	145,834,634	100.00%	97.94%	12	145,834,634	20	17.37	Bappelitbangda	
	5.05 . 02 . 2.04	Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Perangakat Daerah Ysng di Fasilitasi Dalam Penerapan sIDA	100%	1,024,890,500	100	367,026,000	100	344,977,600	100	335,693,335	100.00%	97.31%	100	335,693,335	10000	32.75	Bappelitbangda	
	5.05.02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	JumLah Laporan Penguatan Kapasitas Inovasi Daerah	5	1,024,890,500	1	367,026,000	1	344,977,600	1	335,693,335	100.00%	97.31%	1	335,693,335	20	32.75	Bappelitbangda	
VI	6	**Unsur Pengawasan**																	
1	6.01	**Inspektorat**																	
	6.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95	31,282,150,775	100	3,299,477,552	90	4,623,393,940	90	3,349,453,149	100.00%	72.45%	100	3,349,453,149	105%	11%	Inspektorat	
	6.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen penyusunan perangkat daerah	100	37,510,956	100	6,327,000	100	6,342,000	100	6,342,000	100.00%	100.00%	100	6,342,000	100%	17%	Inspektorat	
	6.01.01.2.01	Sub Keg Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan SKPD	5	9,305,956	1	1,339,000	1	1,342,000	1	1,342,000	100.00%	100.00%	1	1,342,000	20%	14%	Inspektorat	
	6.01.01.2.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya lap. Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi	5	28,205,000	1	4,988,000	1	5,000,000	1	5,000,000	100.00%	100.00%	1	5,000,000	20%	18%	Inspektorat	
	6.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100	23,724,213,549	100	2,159,614,349	100	3,641,621,940	100	2,373,864,303	100.00%	65.19%	100	2,373,864,303	100%	10%	Inspektorat	
	6.01.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	70	23,693,560,355	14	2,154,189,849	14	3,636,187,940	14	2,368,430,303	100.00%	65.13%	14	2,368,430,303	20%	10%	Inspektorat	
	6.01.01.2.02.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	5	14,102,500	1	2,497,000	1	2,500,000	1	2,500,000	100.00%	100.00%	1	2,500,000	20%	18%	Inspektorat	
	6.01.01.2.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersusun laporan keuangan bulan/triwulan/semesteran SKPD	10	10,909,694	2	1,930,500	2	1,934,000	2	1,934,000	100.00%	100.00%	2	1,934,000	20%	18%	Inspektorat	
	6.01.01.2.02.08	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersusunnya laporan prognosis dan realisasi anggaran	5	5,641,000	1	997,000	1	1,000,000	1	1,000,000	100.00%	100.00%	1	1,000,000	20%	18%	Inspektorat	
	6.01.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	968,200,000		131,920,274	100	40,000,000	100%	39,930,800	100.00%	99.83%	1	39,930,800	100%	4%	Inspektorat	
	6.01.01.2.05.09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Meningkatnya Pengetahuan SDM Aparatur Pengawas	60	968,200,000	12	43,528,774	12	40,000,000	12	39,930,800	100.00%	99.83%	12	39,930,800	20%	4%	Inspektorat	
	6.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	2,450,206,661		529,516,249	100	393,218,000	100%	392,936,766	100.00%	99.93%	1	392,936,766	100%	16%	Inspektorat	
	6.01.01.2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Listrik	60	31,583,959	12	5,599,000	12	5,599,000	12	5,599,000	100.00%	100.00%	12	5,599,000	20%	18%	Inspektorat	
	6.01.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan Administrasi Perkantoran	60	618,218,009	12	149,960,200	12	118,619,000	12	118,619,000	100.00%	100.00%	12	118,619,000	20%	19%	Inspektorat	
	6.01.01.2.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya Langganan 10 Buah Surat Kabar	60	67,692,000	12	12,000,000	12	12,000,000	12	12,000,000	100.00%	100.00%	12	12,000,000	20%	18%	Inspektorat	
	6.01.01.2.06.08	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Makan dan Minum tamu	55	124,102,000	11	22,000,000	11	22,000,000	11	22,000,000	100.00%	100.00%	11	22,000,000	20%	18%	Inspektorat	
	6.01.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Dalam Daerah	60	1,608,610,693	12	339,957,049	12	235,000,000	12	234,718,766	100.00%	99.88%	12	234,718,766	20%	15%	Inspektorat	
	6.01.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	741,450,167	100	133,668,000	100	113,650,000	100%	113,650,000	100.00%	100.00%	1	113,650,000	100%	15%	Inspektorat	
	6.01.01.2.07.05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Tersedianya barang penunjang urusan perkantoran	18	147,600,000	19	27,256,000	5	23,300,000	5	23,300,000	100.00%	100.00%	5	23,300,000	28%	16%	Inspektorat	
	6.01.01.2.07.06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Sarana Komputer/laptop/notebook, printer dan proyektor	90	565,000,167	11	79,760,000	10	61,500,000	10	61,500,000	100.00%	100.00%	10	61,500,000	11%	11%	Inspektorat	
	6.01.01.2.07.10	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharannya Secara Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	60	28,850,000	12	26,652,000	12	28,850,000	12	28,850,000	100.00%	100.00%	12	28,850,000	20%	100%	Inspektorat	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	6.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100	1,708,629,142	100	249,273,000	100	300,262,000	100	294,730,100	100.00%	98.16%	100	294,730,100	100%	17%	Inspektorat	
	6.01.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Kebutuhan Belanja Jasa Telpon/internet, Sumber Daya Air dan Listrik	60	16,800,000	12	16,322,000	12	16,800,000	10	14,768,100	83.33%	87.91%	10	14,768,100	17%	88%	Inspektorat	
	6.01.01.2.08.03	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Kantor/ Rumah Dinas dan Tersedianya Kendaraan Dinas Oprasional	60	1,644,095,000	12	224,500,000	12	275,000,000	12	271,500,000	100.00%	98.73%	12	271,500,000	20%	17%	Inspektorat	
	6.01.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpeliharanya Kebersihan Kantor	60	47,734,142	12	8,451,000	12	8,462,000	12	8,462,000	100.00%	100.00%	12	8,462,000	20%	18%	Inspektorat	
	6.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	1,651,940,300	100	89,158,680	100	128,300,000	100	127,999,180	100.00%	99.77%	100	127,999,180	100%	8%	Inspektorat	
	6.01.01.2.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	terpelihara Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan terbayarnya pajak kendaraan	60	224,511,800	12	23,366,840	12	39,800,000	12	39,800,000	100.00%	100.00%	12	39,800,000	20%	18%	Inspektorat	
	6.01.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan dan terbayarnya kendaraan dinas milik daerah di inspektorat	60	1,422,428,500	12	60,791,840	12	83,500,000	12	83,199,180	100.00%	99.64%	12	83,199,180	20%	6%	Inspektorat	
	6.01.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharannya Secara Rutin/ Berkala Gedung Kantor	12	5,000,000	12	5,000,000	12	5,000,000	12	5,000,000	100.00%	100.00%	12	5,000,000	100%	100%	Inspektorat	
	6.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Cakupan Konsistensi Perencanaan, Pengelolaan Pelaksanaan dan Pelaporan Anggaran terhadap Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan	100	8,720,033,728	100	1,239,579,207	100	1,077,661,900	100	1,073,538,743	100.00%	99.62%	100	1,073,538,743	100%	12%	Inspektorat	
	6.01.02.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal		100	6,892,284,283	100	1,022,463,307	100	751,948,900	100	750,119,593	100.00%	99.76%	100	750,119,593	100%	11%	Inspektorat	
	6.01.02.2.01.01	Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	tersusunnya laporan hasil pengawasan kinerja (internal berkala 70 LHP dan Evaluasi LPPD 1 Laporan hasil)	355	723,121,934	71	134,008,000	71	80,000,000	71	79,605,250	100.00%	99.51%	71	79,605,250	20%	11%	Inspektorat	
	6.01.02.2.01.02	Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	tersusunnya laporan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Kas opname 60 LHP dan Monev dana BOS 30 LHP)	420	720,898,895	120	146,431,250	60	80,000,000	60	79,852,850	100.00%	99.82%	60	79,852,850	14%	11%	Inspektorat	
	6.01.02.2.01.03	Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja	tersusunnya laporan hasil reviu laporan kinerja	20	312,360,559	1	99,768,500	1	32,977,000	1	32,891,000	100.00%	99.74%	1	32,891,000	5%	11%	Inspektorat	
	6.01.02.2.01.04	Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan	tersusunnya laporan hasil reviu keuangan (Reviu LKPD 1 Laporan dan reviu penyerapan PBJ 4 laporan)	40	469,584,253	5	131,463,800	5	32,713,000	5	32,568,400	100.00%	99.56%	5	32,568,400	13%	7%	Inspektorat	
	6.01.02.2.01.05	Sub Kegiatan Pengawasan Desa	tersusunannya laporan hasil pengawasan dana desa/pekon	580	852,874,927	116	212,842,100	116	153,258,100	116	153,167,100	100.00%	99.94%	116	153,167,100	20%	18%	Inspektorat	
	6.01.02.2.01.06	Sub Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal	terjalinnya kerjasama pengawasan dengan pihak APH dalam rangka pencegahan dan pembrantasan praktik pungutan liar	60	2,337,785,011	12	157,374,000	12	149,224,000	12	148,865,250	100.00%	99.76%	12	148,865,250	20%	6%	Inspektorat	
	6.01.02.2.01.07	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	tersusunnya laporan hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut	60	1,475,658,704	12	140,575,657	12	223,776,800	12	223,169,743	100.00%	99.73%	12	223,169,743	20%	15%	Inspektorat	
	6.01.02.2.02	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		100	1,827,749,445	100	217,115,900	100	325,713,000	100	323,419,150	100.00%	99.30%	100	323,419,150	100%	18%	Inspektorat	
	6.01.02.2.02.01	Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	terlaksananya penanganan penyelesaian kerugian negara/daerah	60	402,282,995	12	48,503,800	12	108,995,000	12	108,603,150	100.00%	99.64%	12	108,603,150	20%	27%	Inspektorat	
	6.01.02.2.02.02	Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	tersusunnya laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu (penanganan kasus pengaduan masyarakat)	135	1,425,466,450	30	168,612,100	15	216,718,000	15	214,816,000	100.00%	99.12%	15	214,816,000	11%	15%	Inspektorat	
	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Cakupan Konsistensi Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi terhadap Kepatuhan Peraturan perundang-undangan	100	2,578,851,896	100	533,259,336	100	599,015,980	100	581,656,400	100.00%	97.10%	100	581,656,400	100%	23%	Inspektorat	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	6.01.03.2.01	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		100	293,707,580	100	147,814,536	100	61,657,580	100	61,587,500	100.00%	99.89%	100	61,587,500	100%	21%	Inspektorat	
	6.01.03.2.01.01	Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	terlaksananya perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan	60	293,707,580	100%	147,814,536	100%	61,657,580	100%	61,587,500	100.00%	99.89%	1	61,587,500	2%	21%	Inspektorat	
	6.01.03.2.02	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi		100	2,285,144,316	100	385,444,800	100	537,358,400	100	520,068,900	100.00%	96.78%	100	520,068,900	100%	23%	Inspektorat	
	6.01.03.2.02.01	Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	terlaksananya pendampingan dan asistensi urusan pemerintah daerah	60	1,643,972,516	100%	283,711,000	100%	411,898,400	100%	394,858,500	100.00%	95.86%	1	394,858,500	2%	24%	Inspektorat	
	6.01.03.2.02.02	Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi,Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	terlaksananya kegiatan pendampingan, asistensi, dan verifikasi, serta penilaian reformasi birokrasi	12	331,000,000	12	101,733,800	12	125,460,000	12	125,210,400	100.00%	99.80%	12	125,210,400	100%	38%	Inspektorat	
	6.01.03.2.02.03	Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	60	310,171,800	12	101,733,800	12	125,460,000	12	125,210,400	100.00%	99.80%	12	125,210,400	20%	40%	Inspektorat	
VIII	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**																	
1	8.01	**Kesatuan Bangsa dan Politik**							4,651,464,455		3,157,693,130								
	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	95%	14,023,279,669	90%	2,649,972,284	90%	2,294,000,885	90%	1,618,662,916	100.00%	70.56%	90%	1,618,662,916	95%	12%	Badan Kesbangpol	
	8.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	95%	23,936,042	90%	4,000,000	90%	1,340,400	90%	1,340,400	100.00%	100.00%	90%	1,340,400	95%	6%	Badan Kesbangpol	
	8.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	10	12,274,042	2	2,000,000	2	787,200	2	787,200	100.00%	100.00%	2.00	787,200	20%	6%	Badan Kesbangpol	
	8.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	10	11,662,000	2	2,000,000	2	553,200	2	553,200	100.00%	100.00%	2.00	553,200	20%	5%	Badan Kesbangpol	
	8.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu	95%	7,868,833,516	90%	1,472,748,900	90%	1,514,539,625	90%	860,353,302	100.00%	56.81%	90%	860,353,302	95%	11%	Badan Kesbangpol	
	8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Layanan Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS	70	7,839,733,516	14	1,467,248,900	14	1,513,188,225	14	859,001,902	100.00%	56.77%	14.00	859,001,902	20%	11%	Badan Kesbangpol	
	8.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	5	12,800,000	1	2,500,000	1	490,600	1	490,600	100.00%	100.00%	1.00	490,600	20%	4%	Badan Kesbangpol	
	8.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	10	10,300,000	2	2,000,000	2	488,200	2	488,200	100.00%	100.00%	2.00	488,200	20%	5%	Badan Kesbangpol	
	8.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5	6,000,000	1	1,000,000	1	372,600	1	372,600	100.00%	100.00%	1.00	372,600	20%	6%	Badan Kesbangpol	
	8.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja	95%	2,005,673,663	90%	359,405,860	90%	185,174,860	90%	185,158,965	100.00%	99.99%	90%	185,158,965	95%	9%	Badan Kesbangpol	
	8.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik	60	58,792,000	1	11,758,400	1	820,000	1	820,000	100.00%	100.00%	1.00	820,000	2%	1%	Badan Kesbangpol	
	8.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Aktivitas	5	283,560,000	0	-	1	25,000,000	1	25,000,000	100.00%	100.00%	1.00	25,000,000	20%	9%	Badan Kesbangpol	
	8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah ATK	60	436,297,100	12	99,006,898	12	18,031,080	12	18,031,080	100.00%	100.00%	12.00	18,031,080	20%	4%	Badan Kesbangpol	
	8.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah SKHU	50	120,000,000	12	24,000,000	12	24,000,000	12	24,000,000	100.00%	100.00%	12.00	24,000,000	24%	20%	Badan Kesbangpol	
	8.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Layanan Jasa Penyediaaan Makanan dan Minuman	55	275,000,000	11	55,000,000	11	22,000,000	11	22,000,000	100.00%	100.00%	11.00	22,000,000	20%	8%	Badan Kesbangpol	
	8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi di luar kantor	60	832,024,563	12	169,640,562	12	95,323,780	12	95,307,885	100.00%	99.98%	12.00	95,307,885	20%	11%	Badan Kesbangpol	
	8.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Layanan Pendukung	95%	3,106,413,543	90%	613,611,524	90%	496,596,000	90%	481,717,549	100.00%	97.00%	90%	481,717,549	95%	16%	Badan Kesbangpol	
	8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Tagihan	60	1,718,376,000	12	339,445,664	12	254,400,000	12	239,521,549	100.00%	94.15%	12.00	239,521,549	20%	14%	Badan Kesbangpol	
	8.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bangunan dan Kendaraan Dinas	30	1,310,540,000	6	259,000,000	6	239,000,000	6	239,000,000	100.00%	100.00%	6.00	239,000,000	20%	18%	Badan Kesbangpol	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tagihan	60	77,497,543	12	15,165,860	12	3,196,000	12	3,196,000	100.00%	100.00%	12.00	3,196,000	20%	4%	Badan Kesbangpol	
	8.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dalam kondisi baik	95%	1,018,422,905	90%	200,206,000	90%	96,350,000	90%	90,092,700	100.00%	93.51%	90%	90,092,700	95%	9%	Badan Kesbangpol	
	8.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan	15	498,459,750	3	97,500,000	3	72,500,000	3	66,242,700	100.00%	91.37%	3.00	66,242,700	20%	13%	Badan Kesbangpol	
	8.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor	60	519,963,155	12	102,706,000	12	23,850,000	12	23,850,000	100.00%	100.00%	12.00	23,850,000	20%	5%	Badan Kesbangpol	
	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER BANGSAAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Wawasan Kebangsaan (Persen)	53%	500,009,468	46%	80,380,450	46%	57,100,000	46%	54,378,656	100.00%	95.23%	46%	54,378,656	87%	11%	Badan Kesbangpol	
	8.01.02.2.01	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase pelaksanaan pemantapan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	53%	500,009,468	46%	80,380,450	46%	57,100,000	46%	54,378,656	100.00%	95.23%	46%	54,378,656	87%	11%	Badan Kesbangpol	
	8.01.02.2.02.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	jumlah rakor	12	500,009,468	1	80,380,450	1	57,100,000	1	54,378,656	100.00%	95.23%	1.00	54,378,656	8%	11%	Badan Kesbangpol	
	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu (Persen)	84.92%	34,258,366,793	84.08	396,997,610	84.08	407,860,130	82.70	404,054,448	98.36%	99.07%	8270%	404,054,448	#VALUE!	1%	Badan Kesbangpol	
	8.01.03.2.01	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik	84.92%	34,258,366,793	84.08	396,997,610	84.08	407,860,130	84.08	404,054,448	100.00%	99.07%	8408%	404,054,448	#VALUE!	1%	Badan Kesbangpol	
	8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	jumlah Partai politik yang mendapat kursi di pemilihan legislatif tahun 2019	45	33,534,227,768	9	333,637,130	9	333,637,130	9	333,637,130	100.00%	100.00%	9.00	333,637,130	20%	1%	Badan Kesbangpol	
	8.01.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	jumlah laporan	10	724,139,025	2	63,360,480	2	74,223,000	2	70,417,318	100.00%	94.87%	2.00	70,417,318	20%	10%	Badan Kesbangpol	
	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi Masyarakat yang Aktif (Persen)	77.5%	6,562,559,479	70	839,412,000	70	1,737,053,440	39.13	926,632,310	55.90%	53.35%	3913%	926,632,310	#VALUE!	14%	Badan Kesbangpol	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9= 8/7*100%		10= 6+8		11=10/5*100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	8.01.04.2.01	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	77.5%	6,562,559,479	70	839,412,000	70	1,737,053,440	39.13	926,632,310	55.90%	53.35%	3913%	926,632,310	#VALUE!	14%	Badan Kesbangpol	
	8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	jumlah organisasi masyarakat yang mendapatkan hibah tahun 2022	105	6,165,970,743	21	765,000,000	21	1,705,000,000	7	895,000,000	33.33%	52.49%	7.00	895,000,000	7%	15%	Badan Kesbangpol	
	8.01.04.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	jumlah rakor	10	396,588,736	2	74,412,000	2	32,053,440	2	31,632,310	100.00%	98.69%	2.00	31,632,310	20%	8%	Badan Kesbangpol	
	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya (Persen)	74.86%	365,066,280	73.87	54,132,610	65	49,175,000	73.87	48,319,500	100.00%	98.26%	7387%	48,319,500	#VALUE!	13%	Badan Kesbangpol	
	8.01.05.2.01	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Pemantapan pelaksanaan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama	74.86	365,066,280	73.87	54,132,610	73.87	49,175,000	73.87	48,319,500	100.00%	98.26%	73.87	48,319,500	99%	13%	Badan Kesbangpol	
	8.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	jumlah kegiatan	5	365,066,280	a	54,132,610	1	49,175,000	1	48,319,500	100.00%	98.26%	1.00	48,319,500	20%	13%	Badan Kesbangpol	
	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Koordinasi dan Peran Lembaga dan Elemen Masyarakat dalam Pencegahan terjadinya Konflik Sosial (Persen)	74.86	946,432,754	73.87%	129,360,550	70	106,275,000	73.87	105,645,300	100.00%	99.41%	74	105,645,300	99%	11%	Badan Kesbangpol	
	8.01.06.2.01	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase koordinasi, pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	74.86	946,432,754	73.87%	129,360,550	73.87	106,275,000	73.87	105,645,300	100.00%	99.41%	73.87	105,645,300	99%	11%	Badan Kesbangpol	
	8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	jumlah rakor	10	527,441,400	2	61,087,150	2	69,131,000	2	68,576,500	100.00%	99.20%	2.00	68,576,500	20%	13%	Badan Kesbangpol	
	8.01.06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	jumlah laporan	10	418,991,354	2	68,273,400	2	37,144,000	2	37,068,800	100.00%	99.80%	2.00	37,068,800	20%	9%	Badan Kesbangpol	

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat telah melaksanakan pembangunan dan pelayanan pada seluruh aspek kehidupan bermasyarakat dengan target dan capaian yang secara ideal mengarah kepada perbaikan kualitas kehidupan masyarakat, hal ini dapat dilihat dari capaian beberapa indikator yang masuk dalam kategori baik dan sangat baik. Identifikasi berbagai permasalahan merupakan isu pokok permasalahan dan tantangan pembangunan daerah yang selanjutnya ditetapkan sebagai prioritas dalam rencana kerja pemerintah tahun 2024 dengan tetap mensinkronkan rencana pembangunan daerah dengan prioritas pembangunan provinsi maupun nasional.

2.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

RKPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024 merupakan gambaran rencana prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024 dan menjadi tahun ketiga perencanaan pada RPJMD Tahun 2021-2026 dengan tetap berdasarkan pada evaluasi capaian hasil pembangunan tahun sebelumnya. Evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan pembangunan yang telah dilaksanakan untuk kemudian dibuat analisisnya sebagai bahan perencanaan pembangunan pada tahun selanjutnya.

Perencanaan pembangunan yang telah disusun ini tidak mungkin seluruhnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di Kabupaten Pesisir Barat, namun demikian, melalui program/kegiatan/sub kegiatan yang telah direncanakan diharapkan dapat mengurangi permasalahan-permasalahan pembangunan terutama permasalahan pembangunan yang terkait dengan kebutuhan dasar masyarakat. RKPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024 disusun berdasarkan hasil analisis untuk kemudian disusun isu strategis dan prioritas pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian Tema Pembangunan Daerah serta prioritas-prioritas Kabupaten Pesisir Barat.

Secara umum permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat belum banyak berubah, hal ini dikarenakan kemampuan fiskal Pemerintah Daerah yang sangat terbatas dalam penganggaran pembangunan yang pada akhirnya mempengaruhi waktu dalam pelaksanaan dan penyelesaian permasalahan pembangunan di daerah. Keterbatasan pendanaan juga mengakibatkan pelaksanaan pembangunan tidak dapat dilaksanakan secara komprehensif dan simultan.

1. Sampai dengan tahun 2022 capaian pertumbuhan ekonomi mulai bangkit setelah pandemi covid-19 pada angka 2.88% dari sebelumnya 2.07%. Capaian ini memang masih rendah bila dibandingkan dengan capaian dari kabupaten/kota di provinsi lampung, provinsi lampung dan nasional. Namun setidaknya memberikan sinyal positif bagi perkembangan perekonomian daerah;

2. PDRB Perkapita tahun 2022 sebesar 32.46 juta rupiah, angka ini didapatkan dari perhitungan PDRB ADHB dibagi dengan jumlah penduduk. Capaian kabupaten masih lebih rendah bila dibandingkan dengan provinsi lampung dan nasional namun lebih baik bila dibandingkan dengan beberapa daerah di provinsi lampung;

3. IPM belum bergerak dari urutan ke-14 dari 15 kabupaten/kota di provinsi lampung dengan nilai 65.14. Secara umum telah ada perbaikan dari sisi angka harapan hidup, rata-rata dan harapan lama sekolah serta pengeluaran riil perkapita masyarakat. Namun kenaikannya memang masih jauh tertinggal dari daerah lainnya;

4. TPT tahun 2022 mengalami kemunduran dan berada pada posisi 3.78% dari sebelumnya 3.08%. Bertambahnya jumlah pengangguran menunjukan kenaikan angkatan kerja daerah yang tidak terserap di dunia kerja;

5. Tingkat kemiskinan daerah mengalami penurunan bila dibandingkan tahun 2021, realisasi tahun 2022 sebesar 13.84% berada pada urutan ke-12 diantara kabupaten/kota di provinsi lampung. Perhitungan 13.84% berada di bawah provinsi lampung dan nasional. Kabupaten pesisir barat yang masih mengandalkan sektor pertanian, perkebunan dan perikanan sebagai penopang ekonomi daerah disatu sisi memberikan peluang lapangan pekerjaan daerah yang luas, namun disatu sisi juga sektor tersebut tidak banyak memberikan *feedback* atau kesejahteraan secara ekonomi bagi pelakunya;

6. Tingkat kemantapan jalan daerah yang baru mencapai 39.53% tentu saja merupakan salah satu indikator yang dapat memberikan gambaran tentang kondisi infrastruktur daerah secara umum masih perlu penanganan dan peningkatan;

7. Akses terhadap Sumber Daya Air yang Sehat dan Aman sebesar 18.06% menunjukkan kondisi kualitas permukiman daerah yang berada di bawah standar;

8. Panjang jaringan irigasi sebesar 56.10% belum mampu memenuhi kebutuhan seluruh wilayah persawahan. Hal ini disebabkan kondisi jaringan irigasi yang tidak seluruhnya dalam kondisi baik;

9. Indeks Desa Membangun hingga tahun 2022 adalah 0.6636 atau masuk status berkembang. Dengan hanya 3 dari 11 Kecamatan yang masuk dalam kategori Maju, yaitu Kecamatan Pesisir Tengah, Krui Selatan dan Karya Penggawa;

10. Kabupaten Pesisir Barat merupakan daerah dengan resiko bencana yang berada pada zona merah. Hampir seluruh skor indeks resiko per ancaman berada pada kelas resiko tinggi, seperti banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, tanah longsor, gelombang ekstrim dan abrasi. Bahkan pada ancaman bencana cuaca ekstrim Kabupaten Pesisir Barat merupakan salah

satu Kabupaten dengan skor indeks resiko tertinggi di Indonesia dengan nilai capaian tahun 2022 sebesar 189.70;

11. Nilai SAKIP pada tahun 2022 adalah CC, yang menunjukkan masih belum efektif dan efisiennya penganggaran daerah bila dibandingkan dengan rencana dalam pencapaian target kinerja (*outcomes*);

12. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik berada pada 79.95%, nilai capaian ini tentu saja memberikan gambaran masih belum meratanya pelayanan kepada masyarakat;

2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Permasalahan pembangunan di Kabupaten Pesisir Barat yang dihadapi pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.185. Permasalahan Pembangunan Kabupaten Pesisir Barat Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2024

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Permasalahan	
I	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar**		
1	Pendidikan	A	Kondisi Sarana dan Prasarana yang belum optimal;
		B	Pencapaian SPM di bidang pendidikan belum optimal;
2	Kesehatan	A	Rasio tenaga Kesehatan per penduduk masih belum ideal;
		B	Belum Terpenuhinya 9 Jenis Profesi Tenaga Kesehatan pada setiap fasilitas kesehatan;
		C	Belum meratanya distribusi tenaga Kesehatan;
		D	Masih adanya kasus Stunting di daerah;
		E	Pencapaian SPM di bidang kesehatan belum optimal;
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	A	Jumlah jalan dalam kondisi baik yang belum memadai;
		B	Pembangunan jaringan jalan, jembatan dan drainase belum dilakukan secara integratif dan komprehensif;
		C	Jumlah jaringan irigasi dalam kondisi baik yang belum memadai;
		D	Belum optimalnya pengendalian penataan ruang daerah;
		E	Pencapaian SPM di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang belum optimal;
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	A	Masih rendahnya jumlah jaringan air minum dari sumber air ke rumah tangga dan hunian;
		B	Masih rendahnya jaringan limbah rumah tangga dan hunian;
		C	Masih rendahnya jaringan sanitasi rumah tangga dan hunian;
		D	Jumlah jaringan jalan lingkungan dalam kondisi baik yang belum memadai;

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Permasalahan	
		E	Pencapaian SPM di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman belum optimal;
5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	A	Kabupaten Pesisir Barat sebagai daerah yang rawan bencana: tsunami, gempa, banjir, angin kencang, tanah longsor;
		B	Masih minimnya sarana dan prasarana mitigasi dan pasca bencana, termasuk pemadam kebakaran;
		C	Pencapaian SPM di bidang trantibumlinmas yang perlu dipertahankan
6	Sosial	A	Angka kemiskinan daerah yang tinggi dibandingkan dengan Provinsi Lampung;
		B	Angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang tinggi;
		C	Masih rendahnya fasilitas umum yang ramah untuk kaum difabel;
		D	Belum adanya panti anak terlantar, panti jompo dan panti sosial lainnya;
		E	Pencapaian SPM di bidang sosial belum optimal;
II	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**		
1	Tenaga Kerja	A	Kurangnya lapangan kerja yang ada di daerah;
		B	Belum optimalnya pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dengan skill khusus untuk menciptakan masyarakat wirausaha yang mandiri;
		C	Belum optimalnya pelaksanaan fasilitasi dan evaluasi hubungan industrial
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	A	Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga;
		B	Masih adanya kasus kekerasaan terhadap anak dalam rumah tangga;
3	Pangan	A	Belum banyaknya diversifikasi produk pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat;
		B	Belum optimalnya ketersediaan pangan di lingkungan rumah tangga keluarga;
		C	Masih terjadi kenaikan harga bahan pokok pada hari-hari tertentu disebabkan oleh inflasi.
4	Pertanahan	A	Masih terjadinya konfilik pertanahan atau sengketa kepemilikan lahan di masyarakat;
		B	Masih rendahnya jumlah aset tanah milik pemerintah daerah untuk pembangunan.
5	Lingkungan Hidup	A	Belum optimalnya pengendalian/pengawasan terhadap kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan;
		B	Belum optimalnya penanganan sampah dan limbah dimasyarakat masyarakat;
		C	Minimnya jumlah sarana dan prasarana persampahan
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	A	Belum optimalnya kualitas dan kuantitas pelayanan pada daerah-daerah yang jauh dari pusat pelayanan;
		B	Minimnya sarana dan prasarana pelayanan, khususnya pada daerah-daerah diluar Ibukota Kabupaten.

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Permasalahan	
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	A	Belum optimalnya keikutsertaan masyarakat dalam proses pembangunan desa dan daerah;
		B	Belum optimalnya kualitasnya dokumen perencanaan, penganggaran dan penatausahaan pekon;
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	A	Belum optimalnya persiapan daerah dalam menghadapi bonus demografi daerah;
		B	Belum optimalnya penyuluhan terkait Keluarga Berencana di masyarakat;
9	Perhubungan	A	Minimnya jumlah sarana dan prasarana perhubungan daerah;
		B	Belum tersusunnya moda transportasi di daerah dengan baik yang dapat menguhubungkan simpul-simpul transportasi dengan baik;
10	Komunikasi dan Informatika	A	Masih minimnya sarana dan prasarana komunikasi dan informatika daerah yang merata dari level perangkat daerah hingga seluruh pekon;
		B	Masih belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan/atau pelayanan publik;
11	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	A	Belum optimalnya pembinaan terhadap koperasi, usaha kecil dan menengah yang ditandai dengan masih adanya koperasi yang tidak aktif;
		B	Masih relatif minimnya pengembangan dan pelatihan *softskill* dan *hardskill* pelaku koperasi, usaha kecil dan menengah;
12	Penanaman Modal	A	Kurangnya minat investor untuk berinvestasi di Kabupaten Pesisir Barat;
		B	Masih belum optimalnya promosi dan publikasi investasi dan penanaman modal daerah;
13	Kepemudaan dan Olah Raga	A	Keterbatasan jumlah sarana prasarana olahraga yang ada di masyarakat;
		B	Keterbatasan fasilitasi dan pembinaan kepemudaan dan olahraga di masyarakat
14	Statistik	A	Masih sulitnya melakukan penghitungan data statistik di daerah oleh Perangkat Daerah serta kurangnya pembinaan oleh BPS;
		B	Masih terbatasnya ketersediaan data sektoral pada perangkat daerah dan kurangnya pemahaman perangkat daerah akan kebutuhan penyediaan data sektoral;
		C	Masih belum sinergis dan sinkron terkait dengan pengelola dan penyediaan data daerah dan perangkat daerah;
15	Persandian	A	Belum optimalnya kegiatan persandian daerah dan perangkat daerah;
		B	Belum lengkapnya sarana dan prasarana persandian daerah dan perangkat daerah;
		C	Belum adanya SDM yang menguasai persandiaann sesuai dengan kebutuhan daerah dan perangkat daerah;
16	Kebudayaan	A	Masih belum ditetapkannya cagar budaya daerah dalam peraturan daerah;

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Permasalahan	
17	Perpustakaan	A	Masih belum optimalnya manajemen pengembangan dan pengelolaan perpustakaan;
		B	Belum adanya pustakawan daerah;
		C	Masih sedikitnya jumlah koleksi judul buku;
		D	Masih rendahnya minat baca masyarakat;
18	Kearsipan	A	Masih belum adanya gedung Arsip Daerah Kabupaten Pesisir Barat;
		B	Masih belum optimalnya manajemen pengembangan dan pengelolaan kearsipan;
		C	Belum ada arsiparis daerah;
III	**Urusan Pilihan**		
1	Kelautan dan Perikanan	A	Masih rendahnya produktivitas perikanan tangkap bila dibandingkan dengan luasan lahan;
		B	Masih rendahnya produktivitas perikanan budidaya bila dibandingkan dengan luasan lahan;
		C	Masih rendahnya penggunaan sarana dan prasarana modern dalam proses produksi dan distribusi Perikanan tangkap, Perikanan budidaya dan pengelolaan hasil perikanan;
2	Pariwisata	A	Masih belum memadai sarana dan prasarana serta akomodasi di lokasi wisata;
		B	Masih terbatasnya lokasi tujuan wisata daerah yang telah dikelola dengan baik;
3	Pertanian	A	Masih rendahnya produktivitas pertanian bila dibandingkan luasan lahan;
		B	Masih rendahnya produktivitas perkebunan bila dibandingkan luasan lahan;
		C	Masih rendahnya produktivitas peternakan bila dibandingkan luasan lahan;
		D	Masih adanya alih fungsi lahan pertanian;
4	Perdagangan	A	Masih rendahnya kualitas sarana dan prasarana pasar-pasar tradisional;
		B	Masih rendahnya kesadaran pedagang untuk berdagang pada lokasi pasar yang telah ditentukan;
5	Perindustrian	A	Belum adanya industri sekala besar di daerah;
		B	Kondisi daerah yang belum sesuai untuk pengembangan industri skala besar, dengan catatan: ▪ belum meratanya ketersediaan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan; ▪ letak geografis daerah yang berbatasan dengan Samudera Hindia dan TNBBS; ▪ kondisi daerah yang masuk daerah tinggi resiko/rawan bencana; ▪ fokus pengembangan industri pada kawasan tengah dan timur Provinsi Lampung
6	Transmigrasi	A	Masih relatif belum berkembangan secara signifikan kehidupan masyarakat transmigran;
		B	Masih belum optimalnya pembinaan masyarakat transmigran dalam rangka perbaikan kualitas hidup;

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Permasalahan	
IV	**Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan**		
1	Sekretariat Daerah	A	Belum Optimalnya proses pelayanan terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah;
		B	Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana untuk kepala daerah dan wakil kepala daerah;
		C	Belum optimalnya proses pengkoordinasian dan pengendalian antar perangkat daerah;
			Masih adanya tumpang tindih pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan;
2	Sekretariat DPRD	A	Belum optimalnya proses pelayanan kepada anggota DPRD
		B	Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana untuk anggota DPRD;
V	**Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan**		
1	Perencanaan	A	Masih belum optimalnya proses perencanaan daerah menjadi penganggaran daerah;
		B	Masih lemahnya pengendalian dan koordinasi dengan Perangkat Daerah;
2	Keuangan	A	Masih belum optimalnya pembinaan dan pengendalian dalam proses penataanusahaan dan pelaporan keuangan daerah;
		B	Masih belum optimalnya pendataan aset daerah;
		C	Rendahnya kapasitas fiskal daerah yang sangat bergantung pada pendapatan transfer dari pusat dan Provinsi
		D	Masih rendahnya nilai pajak daerah terhadap Pendapatan Daerah;
		E	Masih rendahnya nilai retribusi daerah terhadap Pendapatan Daerah;
3	Kepegawaian	A	Belum optimalnya pembinaan dan pendataan pegawai ASN;
		B	Belum optimalnya merit sistem dalam proses jenjang karir jabatan;
4	Pendidikan dan Pelatihan	A	Belum optimalnya sistem pendidikan dan pelatihan bagi PNS di daerah;
		B	Masih minimnya jumlah PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan;
5	Penelitian dan Pengembangan	A	Masih minimnya jumlah kajian penelitian dan pengembangan daerah sebagai materi teknis perencanaan daerah;
		B	Belum optimalnya hasil kajian penelitian dan pengembangan daerah yang menjadi peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah;
		C	Rendahnya hasil inovasi daerah pada tataran perangkat daerah;
VI	**Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan**		
1	Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	A	Masih belum optimalnya proses reviu dan pengendalian terhadap dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dan penatausahaan;
		B	Masih belum optimalnya pelaksanaan manajemen pengawasan;
VII	**Unsur Kewilayahan**		
1	Kecamatan	A	Masih belum meratanya sarana dan prasana pelayanan umum di kecamatan;

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Permasalahan	
		B	Masih belum adanya sistem pelayanan bagi masyarakat yang terintegrasi dari tingkat pekon, kecamatan hingga kabupaten.
VIII	**Unsur Pemerintahan Umum**		
1	Kesatuan Bangsa dan Politik	A	Masih belum optimalnya pembinaan terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat;
		B	Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum;
		C	Masih terjadinya konflik sosial di masyarakat;

Selanjutnya, bila dirumuskan berdasarkan pada permasalahan daerah berdasarkan (1) prioritas dan sasaran daerah dan (2) urusan pemerintahan daerah maka didapatkan setidaknya 11 (sebelas) Isu Strategis Daerah untuk Tahun 2024, yaitu:

1. Pengembangan Kompetensi Masyarakat Dalam Upaya Pengurangan Jumlah Pengangguran Daerah Dan Pengentasan Kemiskinan;
2. Peningkatan Pertanian Dan Perikanan Dalam Upaya Menjaga Ketahanan Pangan Daerah;
3. Penguatan Dan Pemberdayaan Struktur Perekonomian Masyarakat;
4. Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Publik Dalam Upaya Memperlancar Produksi Dan Distribusi;
5. Pembangunan Kewilayahan dalam upaya pemerataan Pembangunan;
6. Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Pembangunan Berkelanjutan;
7. Pengembangan Pendidikan Serta Penguatan Literasi dan Pelestarian Budaya Masyarakat;
8. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat, Termasuk Pengendalian Covid Dan Stunting Dengan Perspektif Perlindungan Perempuan Dan Anak;
9. Mitigasi Bencana Alam Dan Non Alam;
10. Reformasi Birokrasi Dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja;
11. Penguatan Stabilitas Politik, Hukum Dan Pemerintahan Dalam Pelaksanaan Pemilu Dan Pilkada Serentak Tahun 2024.

2.4. Capaian Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar minimal yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara, berikut pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan pada pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar, yaitu: (1) Pendidikan; (2) Kesehatan; (3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; (4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; (5) Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat; dan (6) Sosial.

Tabel 2.186. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	74.27	73.73	75.01	88.42	82.94
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan Dasar atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan	20.00	20.00	23.00	23.40	52.51
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	70.93	54.92	54.92	44.56	54.00

Sumber : Dinas P dan K, 2023

Tabel di atas menunjukkan capaian SPM pada urusan pendidikan di Kabupaten Pesisir Barat tahun 2018-2022. Berdasarkan pada data di atas, untuk keseluruhan capaian indikator pendidikan belum ada yang mencapai angka 100%. Indikator Pendidikan Dasar pada tahun 2022 baru mencapai 82,49%, atau mengalami penurunan dari tahun 2021. Berikutnya untuk capaian pendidikan kesetaraan masih jauh berada di angka 52,51% walaupun terus meningkat tapi masih jauh dari target. Sementara itu untuk pendidikan tingkat PAUD berada pada angka 54,00% dengen kecenderungan terus meningkat.

Keseluruhan angka capaian dari indikator pendidikan ini tentu saja menjadi catatan penting dalam proses peningkatan kualitas SDM dan pendidikan di daerah yang perlu melakukan akselerasi percepatan pencapaian target-target kinerja. Capaian rendah SPM ini juga memberikan indikasi lemahnya proses penyusunan perencanaan dan penganggaran, dimana perangkat daerah gagal dalam menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan yang mengarah pada pencapaian SPM.

Tabel 2.187. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022

No	Indikator SPM	2018		2019		2020		2021		2022	
		ABS	%	ABS	%	ABS	%	ABS	%	ABS	%
1	Pelayanan Kesehatan Ibu hamil	3484	99,57	3417	99,45	2953	88	3250	98	3115	95
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	3107	93,02	2947	89,85	4519	76	2860	91	2745	87
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	2841	89,26	2978	96,5	2534	84	2839	95	2764	92
4	Pelayanan Kesehatan Balita	9580	74,7	12526	99,18	9895	100	12872	88	10740	74
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Dasar	7429	39,36	7162	37,52	4784	25	2390	51.2	11989	69
6	Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	27261	26,38	10572	10,83	5156	5	16453	17	16102	16
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	1288	11,06	5615	46,12	3923	31	4372	30	8611	57
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	8342	37,08	21203	99,74	2932	14	3849	13	4793	16
9	Pelayanan Kesehatan Penderita *Diabetes Melitus*	2276	30,94	2260	32,51	1319	19	1392	95	997	109
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	182	147,97	159	128,23	119	95,2	262	98	204	76
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga *Tuberculosis*	809	13,42	652	23,54	652	24	528	19	2022	94
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinveksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia *(HIV)*	134	70,16	1.993	64,27	2426	72	2451	30	3.281	100

Sumber : Dinas Kesehatan, 2023

Berdasarkan tabel di atas, dapat terlihat bahwa secara umum telah ada perbaikan kinerja pada pelaksanaan urusan kesehatan. Bahwa capaian kinerja terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, walaupun pada tahun 2022 hanya pelayanan terhadap penderita *Diabetes Melitus* dan Penderita HIV yang telah mencapai 100%. Sementara itu indikator lainnya belum mencapai 100%. Catatan khusus untuk pelayanan terhadap pelayanan pada usia produktif dan penderita penyakit hipertensi.

Capaian rendah SPM ini juga memberikan indikasi lemahnya proses penyusunan perencanaan dan penganggaran, dimana perangkat daerah gagal dalam menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan yang mengarah pada pencapaian SPM.

Tabel 2.188. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator Pencapaian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Air Minum	Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	14	13	15	15.15	18.06
2	Air Limbah	Penyediaan Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	13	14	15	15,55	18.06

Sumber : Dinas Pu dan PR, 2023

Untuk pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang secara umum masih sangat jauh berada di bawah target 100% capaian. Kondisi luasan kewenangan daerah dan pendanaan daerah yang terbatas merupakan hal utama yang menyebabkan belum optimalnya pencapaian SPM. Namun demikian, usaha-usaha perbaikan kinerja dan peningkatan pendanaan terus dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Capaian rendah SPM ini juga memberikan indikasi lemahnya proses penyusunan perencanaan dan penganggaran, dimana perangkat daerah gagal dalam menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan yang mengarah pada pencapaian SPM.

Tabel 2.189. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator Pencapaian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase Rumah Layak Huni	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0
		Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0	100	100	100	100

Sumber : Dinas PR dan KP, 2023

Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terus diupayakan oleh Pemerintah Daerah. Indikator kinerja masih berada di bawah target 100% untuk indikator penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni korban bencana kabupaten/kota atau 0% selama periode 2018-2022. Capaian rendah SPM ini juga memberikan indikasi lemahnya proses penyusunan perencanaan dan penganggaran, dimana perangkat daerah gagal dalam menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan yang mengarah pada pencapaian SPM.

Sementara untuk fasilitasi penyediaan rumah layak huni masyarakat yang terkena program pemerintah dilaksanakan pada tahun 2019-2022 dengan capaian 100%. Program pemerintah yang dimaksud adalah proses pemindahan masyarakat terdampak dari pembangunan perkantoran pemerintahan daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Tabel 2.190. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Ketertiban dan Ketentraman Umum serta Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator Pencapaian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pelayanan Trantibumlinmas	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum perda dan perkada	100	100	100	100	100
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	100	100	100	100
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	100	100	100	89.77	97.65
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	100	100	86.58	90.75

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator Pencapaian	2018	2019	2020	2021	2022
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	100	100	100	100

Sumber : Satpol PP dan Damkar - BPBD, 2023

Pencapaian SPM Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat secara umum telah mencapai target capaian 100% atau berada pada rata-rata capaian 97,65% dengan indikator (i) Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana dan (ii) Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang belum mencapai nilai 100%. Peningkatan kinerja secara berkelanjutan dan konsistensi dalam menjaga capaian indikator perlu terus diupayakan oleh Pemerintah Daerah terlebih Kabupaten Pesisir Barat berada pada daerah rawan bencana.

Tabel 2.191. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Sosial Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator Pencapaian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas sosial di luar panti	n/a	6,39	18,02	4.55	24,77
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	0	0	4,83	0.14	95,65
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah warga negara Lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	n/a	1,76	0,36	9.45	23,07
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah warga negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	0	0	0	0	0
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Sosial, 2023

Data pada pencapaian SPM Urusan Sosial, hanya pada indikator perlindungan sosial bagi korban bencana yang telah mencapai titik optimal. Sementara itu untuk indikator penyandang disabilitas, anak terlantar dan lanjut usia masih jauh dari target yang ditetapkan. Sementara itu untuk rehabilitasi kepada gelandangan belum ada realisasi, hal ini dikarenakan di Kabupaten Pesisir Barat tidak terdapat

gelandangan yang terdata. Peningkatan kinerja, kerja keras dan konsistensi dalam proses pencapaian indikator perlu terus diupayakan oleh Pemerintah Daerah dengan terus melibatkan seluruh *stakeholders* pembangunan. Capaian rendah SPM ini juga memberikan indikasi lemahnya proses penyusunan perencanaan dan penganggaran, dimana perangkat daerah gagal dalam menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan yang mengarah pada pencapaian SPM. Keterbatasan pendanaan dan fokus daerah terhadap permasalahan sosial juga turut memberikan tantangan dalam proses pencapaian indikator bidang sosial ini.

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAERAH
DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi makro daerah Kabupaten Pesisir Barat dan kebijakan Keuangan Daerah dalam RKPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024 mendatang memberi gambaran tentang kondisi serta tantangan ekonomi makro Kabupaten Pesisir Barat serta pengaruh perekonomian regional (Provinsi Lampung), nasional maupun perekonomian global. Pada sisi yang lain, perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial merupakan dasar kebijakan anggaran untuk mengalokasikannya secara efektif dan efisien dengan pendekatan perencanaan anggaran berbasis kinerja dan prinsip *money follow priority*.

Pendekatan perencanaan anggaran berbasis kinerja yang ingin dicapai oleh Kabupaten Pesisir Barat ini disusun dalam suatu kondisi perekonomian daerah yang masih berkembang sehingga perencanaan pembangunan yang terencana, tersusun dan akuntable adalah suatu hal yang mutlak. Bahwa pada dasarnya seluruh perencanaan yang disusun dalam RKPD idealnya dapat direalisasikan dalam penganggaran APBD, sehingga seyogyanya suatu dokumen perencanaan disusun dengan penuh kehati-hatian dalam konteks penyusunan dokumen penganggaran. Berikut adalah beberapa hal yang menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan penganggaran Kabupaten Pesisir Barat berbasis kinerja yang dimaksud.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang stabil di suatu daerah merupakan salah satu indikaor dalam menilai pencapaian kesejahteraan masyarakat. Peran pemerintah daerah dalam mewujudkan hal ini adalah sebagai fasilitator dan juga regulator dalam memberikan kemudahan dan kepastian bagi pelaku ekonomi untuk dapat mengembangkan kegiatan ekonominya. Secara substansial pembangunan daerah pada hakekatnya merupakan upaya terencana dari pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan kemampuan profesional dan proposional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta kemampuan dalam mengelola sumber daya ekonomi secara berdaya guna dan berhasil guna untuk kemajuan perekonomian daerah dan seluas-luasnya kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan daerah yang terencana diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi terwujudnya pemerintahan yang baik dan kinerja pemerintah daerah yang efektif, efisien, partisipatif, terbuka dan akuntabel dalam rangka reformasi birokrasi. Dalam upaya mewujudkan pembangunan yang efektif, efisien

dan berkelanjutan, maka diperlukan perencanaan pembangunan wilayah dengan tetap memperhatikan optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan dengan sedapat mungkin menghindari konflik pemanfaatan sumber daya, mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup, serta meningkatkan keselarasan perkembangan wilayah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pemerataan pertumbuhan, memperkuat integrasi regional dan nasional dan meningkatkan daya dukung lingkungan serta ketahanan terhadap mitigasi bencana.

Kebijakan pembangunan Kabupaten Pesisir Barat diarahkan dalam pencapaian Visi Kepala Daerah Terpilih Periode Tahun 2021-2026 yaitu, Terwujudnya Pesisir Barat yang Amanah, Maju dan Sejahtera. Secara substansial pembangunan daerah pada hakikatnya merupakan upaya terencana untuk mengelola sumberdaya ekonomi daerah secara berdaya guna dan berhasil guna untuk kemajuan daerah yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yaitu pertumbuhan ekonomi yang bersifat inklusif, berkelanjutan dan berkeadilan, yang didukung oleh stabilitas ekonomi yang kokoh dengan berpegang pada pemanfaatan produk-produk unggulan daerah dengan bijaksana dan ramah lingkungan. Untuk itu, sasaran-sasaran terhadap meningkatnya pertumbuhan ekonomi perlu diikuti dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat, mengurangi kesenjangan antar kelompok dan antar wilayah, dengan tetap memperhatikan kelangsungan kualitas lingkungan tempat dimana masyarakat melakukan aktifitas ekonomi.

Perekonomian Kabupaten Pesisir Barat tidak dapat lepas dari pergerakan dan perkembangan dari perekonomian regional, nasional dan global. Ada beberapa faktor-faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan di tingkat daerah, seperti: kebijakan pemerintah yang menyangkut sektor moneter maupun kebijakan ekonomi sektor fiskal, serta pengaruh perekonomian global seperti pengaruh naik turunnya harga minyak dunia, naik turunnya nilai tukar mata uang asing, maupun pengaruh krisis ekonomi dan keuangan global yang akan berdampak pada kelesuan pasar di dalam dan ke luar daerah.

Sejalan dengan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2005-2025, arah kebijakan perekonomian Kabupaten Pesisir Barat dalam RKPD Tahun 2024 ini akan menjadi bagian dari target yang telah ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026 yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi (*pro growth*) melalui pengembangan potensi dan keunggulan daerah dengan memperhatikan dan memperkuat investasi (*pro investment*) diberbagai sektor dan ekonomi yang berbasis kerakyatan dengan kemitraan. Pertumbuhan ekonomi yang kuat ditandai juga oleh upaya pemerataan dengan *trickle down effect* yang tinggi serta peningkatan nilai tambah produk dan kemandirian daerah. Penguatan kemandirian daerah diindikasikan oleh kapasitas fiskal daerah yang tinggi terutama dicirikan oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup untuk membiayai pembangunan dan mengurangi ketergantungan pada dana transnfer dan/atau bagi hasil yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Lampung.

Upaya memperkuat dan mengembangkan perekonomian daerah dilakukan dengan fokus pada pengembangan potensi dan keunggulan yang dimiliki dengan orientasi kepada ekonomi nasional dan global. Di lain sisi ekonomi berbasis pertanian dan perikanan serta pariwisata dan ekonomi kreatif juga akan terus dimantapkan dan diperkuat, kemudian ditransformasikan ke ekonomi berbasis industri, perdagangan, dan jasa dengan dukungan penguasaan teknologi dan informasi pasar. Selain itu kebijakan ekonomi daerah akan diarahkan pada peningkatan investasi baru baik dalam dan luar negeri yang dipacu untuk memperluas kesempatan kerja. Pembangunan ekonomi dan pemerataannya juga diorientasikan untuk (i) Menciptakan kesempatan kerja yang tinggi untuk mengurangi kemiskinan; (ii) Meningkatkan kapasitas perekonomian masyarakat daerah, baik pada sisi produksi, distribusi dan konsumsi; (iii) Meningkatkan pendapatan perkapita dan daya beli masyarakat; (iv) Menciptakan kondisi perekonomian daerah yang stabil; (v) Pemerataan distribusi pendapatan.

Secara lebih rinci kondisi ini sejalan dengan target yang ingin dicapai melalui penetapan kebijakan ekonomi makro yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, antara lain:

1. Menciptakan Kesempatan Kerja yang Tinggi untuk Mengurangi Kemiskinan; Kebijakan perekonomian daerah yang bertujuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang tinggi diarahkan sebagai upaya untuk mengatasi masalah pengangguran yang terjadi dan memiliki kompleksitas yang tinggi serta berpengaruh kepada kondisi sosial, politik maupun budaya daerah. Melalui kebijakan ini, diharapkan terjadi penurunan jumlah/tingkat pengangguran sampai dengan titik *full employment* dalam pengertian bahwa lapangan pekerjaan yang yang disediakan oleh Pemerintah dan swasta dapat dipenuhi oleh para pencari kerja. Semakin banyak penduduk yang memiliki pekerjaan, akan semakin banyak penduduk yang memiliki penghasilan; pada keadaan tersebut secara kuantitaif diharapkan dapat berdampak pada pengurangan jumlah penduduk miskin dan pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

2. Meningkatkan Kapasitas Produksi pada sektor pertanian dan perikanan serta koperasi dan UMKM; Peningkatan kapasitas produksi merupakan suatu keharusan. Namun demikian di sisi lain peningkatan ini erat kaitannya dengan peningkatan investasi maupun saving yang dilakukan oleh masyarakat dan/atau pemerintah. Sedangkan investasi dan saving akan terjadi ketika masyarakat memiliki tingkat pendapatan perkapita yang juga tinggi melalui peningkatan produktivitasnya maupun penggunaan dan pengembangan teknologi yang tepat guna.

3. Meningkatkan Pendapatan Perkapita dan Daya Beli Masyarakat; Pendapatan perkapita secara umum diartikan sebagai perbandingan antara jumlah pendapatan dengan jumlah penduduk. Namun satu hal yang lebih berarti adalah jika meningkatnya pendapatan masyarakat terjadi sebagai akibat dari meningkatnya produktivitas barang dan jasa yang dihasilkan. Meningkatnya pendapatan perkapita tersebut pada akhirnya akan mendorong peningkatan

daya beli masyarakat yang berarti meningkatkan sisi konsumsi pada sisi permintaan sekaligus mendorong pergerakan pada sisi penawaran.

4. Menciptakan Kondisi Perekonomian Daerah yang Stabil; Kestabilan yang diharapkan meliputi 3 (tiga) hal yaitu peningkatan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja serta ketersedian barang dengan tingkat harga yang wajar. Kestabilan ekonomi yang diharapkan adalah kondisi dimana nilai fluktuatif variabel ekonomi yang terjadi tidak bersifat musiman namun bergerak dalam kondisi dan batas yang wajar yang masih mampu ditoleransi oleh sektor ekonomi produktif.

5. Pemerataan Distribusi Pendapatan. Pertumbuhan ekonomi telah menjadi salah satu ukuran utama makro ekonomi dalam mengukur keberhasilan pembangunan yang telah dijalankan sepanjang periode waktu tertentu. Namun ukuran kinerja perekonomian daerah tersebut akan semakin lebih baik jika dilengkapi dengan menurunnya disparitas pendapatan (*equality of income*). Tujuan yang ingin dicapai adalah semakin mengecilnya angka rasio gini daerah.

Sementara itu kebijakan fiskal dapat dibedakan menjadi 4 (empat), yang pembagiannnya berdasarkan pada:

1. Pengelolaan Anggaran (*the managed budget approach*); Menghendaki hubungan langsung antara pengeluaran pemerintah dan perpajakan selalu dipertahankan, tetapi penyesuaian dalam anggaran selalu dibuat guna memperkecil ketidakstabilan ekonomi, sehingga pada suatu saat terjadi defisit maupun surplus;

2. Stabilisasi anggaran otomatis (*the stabilizing budget*); Terdapat penyesuaian secara otomatis terhadap penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang akan menyebabkan perekonomian menjadi stabil tanpa adanya campur tangan pemerintah. Pengeluaran pemerintah akan ditentukan berdasarkan pada perkiraan manfaat dan biaya relatif dari berbagai program, sedang pajak akan ditentukan sehingga dapat menimbulkan surplus dalam periode kesempatan kerja penuh;

3. Anggaran belanja seimbang (*Balance approach*); Adanya keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran pemerintah dalam jangka panjang agar terjadi keterkaitan dalam perekonomian sehingga memperoleh kepercayaan masyarakat. Kebijakan fiskal dapat diartikan sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam bidang anggaran belanja negara dengan maksud untuk mempengaruhi jalannya perekonomian;

4. Pembiayaan fungsional (*functional finance*); Dalam pendekatan ini pengeluaran pemerintah ditentukan dengan melihat akibat-akibat tidak langsung terhadap pendapatan terutama untuk meningkatkan kesempatan kerja. Pajak berfungsi mengatur pengeluaran swasta sedang pinjaman sebagai

alat untuk menekan inflasi lewat pengurangan dana yang tersedia dalam masyarakat.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah daerah senantiasa berupaya merumuskan kebijakan fiskal yang berorientasi pada *pro growth, pro poor, pro job, dan pro environment*. Hal ini dilakukan dalam rangka percepatan pengentasan kemiskinan sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai indikator utama keberhasilan pembangunan ekonomi. Tentunya, agar kebijakan fiskal bisa berjalan efektif dan efisien, diperlukan peran dan partisipasi aktif dari seluruh komponen masyarakat khususnya para pelaku usaha dan pemodal sebagai pembayar pajak. Penerapan kebijakan fiskal yang baik dan sehat pada gilirannya juga akan menciptakan keberlanjutan kebijakan fiskal yang merupakan modal utama dalam pelaksanaan pembangunan daerah jangka panjang menuju pada kemandirian ekonomi.

Strategi-strategi di atas perlu ditindaklanjuti dalam politik anggaran, mulai dari perencanaan, implementasi dan pertanggungjawaban kebijakan fiskal. Hal ini kemudian diikat dalam tanggung jawab sosial oleh pemerintah yang perlu dibahas dalam pembahasan dokumen yang lebih detail, termasuk hal yang sangat penting adalah soal realisasi penyerapan anggaran serta akuntabilitas anggaran melalui laporan–laporan pelaksanaan APBD. Selain daripada itu sistem *rewards and punishment* perlu diterapkan bagi Perangkat Daerah yang memiliki kinerja baik ataupun buruk, sehingga diharapkan mereka akan lebih bersemangat dalam mencapai tujuan pembangunan serta bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugas dan kewajiban yang sudah masuk dalam agenda kegiatan dimasing-masing Perangkat Daerahnya.

3.1.1 Kinerja Makro Ekonomi Daerah

3.1.1.1 Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai indikator untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi suatu daerah merupakan alat kontrol dan evaluasi dalam penilaian hasil pembangunan yang pada akhirnya akan menentukan dalam pengambilan kebijakan pembangunan daerah tersebut. PDRB nominal (harga berlaku) dan PDRB riil (harga konstan), masing-masing mempunyai peran masing-masing. Seperti halnya dalam PDB (Produk Domestik Bruto), PDRB mempunyai tiga pendekatan dalam menghitungnya yaitu pendekatan produksi atau lebih dikenal dengan PDRB Sektoral atau PDRB menurut Lapangan Usaha, pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan.

Pada tahun 2020 sampai dengan 2021, sektor ekonomi terguncang dengan adanya Pandemi Covid-19. Dimana pada tahun 2022 daerah masih berada pada posisi untuk merestrukturisasi efek dari pandemi dimaksud, Hal ini tentunya sangat mempengaruhi Pertumbuhan PDRB Kabupaten Kabupaten Pesisir Barat

Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB). Pada tahun 2022, PDRB ADHB tercatat pada angka 5.349,44 (dalam miliar rupiah) atau naik sebesar 452,888 (dalam miliar rupiah). Tahun 2021, PDRB ADHB Kabupaten Pesisir Barat berada pada angka 4.896,56 (dalam miliar rupiah) atau naik 219,02 (dalam miliar rupiah) dibandingkan pada data tahun 2020. Pada tahun 2020 PDRB ADHB berada pada angka 4.687,39 (dalam miliar rupiah), capaian ini meningkat dibandingkan dengan data pada tahun 2019 PDRB ADHB Kabupaten Pesisir Barat berada pada angka 4.687,39 (dalam miliar rupiah) atau meningkat 405,01 (dalam miliar rupiah) dibandingkan data tahun 2018 yang berada pada angka 4.282,37 (dalam miliar rupiah).

Selanjutnya pertumbuhan PDRB Kabupaten Kabupaten Pesisir Barat Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) pada tahun 2019 berada pada angka 3.106,10 (dalam miliar rupiah) atau mengalami pertumbuhan sebesar 5,47% dari tahun 2018 yang tercatat sebesar 4.944,88 (dalam miliar rupiah). Berikutnya pada tahun 2020 PDRB ADHK mengalami penurunan (1,18%) dengan capaian menjadi 3.069,60 (dalam miliar rupiah). Penurunan pada tahun 2020 dari tahun 2019 adalah sebesar 36,5 (dalam miliar rupiah). Berikutnya, pada tahun 2021 capaian PDRB ADHK sebesar 3.133,19 (dalam miliar rupiah) atau mengalami peningkatan 2,07% dibandingkan tahun 2020. Capaian pada tahun 2022 tercatat pada angka 3.223,12 (dalam miliar rupiah) atau naik 89.93 (dalam miliar rupiah).

Pada tahun 2023 ini PDRB ADHB diproyeksi dapat meningkat menjadi 5.531,32 (dalam miliar rupiah) dan untuk tahun 2024 mendatang proyeksi kenaikan diharapkan akan berada pada angka 5.730,44 (dalam miliar rupiah). Sementara itu untuk PDRB ADHK diproyeksikan pada tahun 2022 ini dapat tetap meningkat menjadi 3.332,70 (dalam miliar rupiah). Untuk proyeksi tahun 2024 ini diharapkan meningkat menjadi 3.452,67 (dalam miliar rupiah). Proyeksi ini berkaca dari perhitungan selama kurun waktu 2015-2019 dimana perkembangan PDRB ADHB dan ADHK yang masih mampu berkembang 4,0-5,0% pertahunnya, namun terjadi perubahan perkembangan nilai mulai tahun 2020-2021 berkembang pada kisaran (-1,0) - 2,0% pertahunnya.

Optimisme pertumbuhan diharapkan dari perbaikan ekonomi global, nasional dan regional yang dibarengi dengan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dan perubahan pola hidup masyarakat daerah secara umum akibat pandemi covid-19 yang menyebabkan perilaku masyarakat yang mulai teratur serta beraktivitas dengan lebih efektif dan efisien.

Tabel 3.1 PDRB ADHB dan PDRB ADHK Kabupaten Pesisir Barat Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022 (dalam miliar rupiah)

PDRB Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021*	2022**
ADHB	4.282,38	4.687,39	4.677,54	4.896,56	5.439,44
ADHK	2.944,88	3.106,11	3.069,60	3.133,19	3.223,12

Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Barat, 2023
**Angka Sementara*
***Angka Sangat Sementara*

3.1.1.2 Struktur Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Lapangan Usaha

PDRB harga berlaku suatu daerah digunakan untuk menunjukkan kemampuan sumber-sumber ekonomi dalam suatu wilayah daerah tersebut. Dalam konteks PDRB yang sangat familiar (menurut lapangan usaha), sumber-sumber ekonomi/sektor-sektor/lapangan usaha tersebut terdiri dari 17 (tujuh belas) kategori. Besar kecilnya PDRB dalam 17 (tujuh belas) kategori tersebut di atas sangat mungkin dipengaruhi oleh kondisi geografis, ketersediaan SDA, Infrastruktur, SDM yang memadai dan lain sebagainya. 17 kategori tersebut adalah sebagai berikut: (1) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; (2) Pertambangan dan Penggalian; (3) Industri Pengolahan; (4) Pengadaan Listrik dan Gas; (5) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; (6) Konstruksi; (7) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; (8) Transportasi dan Pergudangan; (9) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; (10) Informasi dan Komunikasi; (11) Jasa Keuangan dan Asuransi; (12) Real Estate; (13) Jasa Perusahaan; (14) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; (15) Jasa Pendidikan; (16) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan (17) Jasa Lainnya.

Walaupun kondisi laju pertumbuhan berfluktuasi, namun dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir tidak ada kecenderungan pergeseran peran masing-masing sector sebagai penyumbang pertumbuhan PDRB. Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan masih menjadi penyumbang terbesar PDRB, dengan sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tetap menjadi primadona sebagai penyumbang PDRB. Persentase kontribusi sektor-sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 selama 5 (lima) tahun terakhir cukup seimbang artinya dari nilai kontribusi masing-masing sektor terhadap PDRB.

Dari 9 (sembilan) sektor yang ada dalam komponen perhitungan PDRB, sektor Primer, kelompok Sektor Sekunder dan kelompok Sektor Tersier. Kelompok Sektor Primer terdiri dari 3 (tiga) sektor yaitu: (1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, (2) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, dan (3) Konstruksi; kelompok sektor sekunder terdiri dari 5 (lima) sektor, yaitu: (1) Pertambangan dan Penggalian, (2) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, (3) Industri Pengolahan, (4) Jasa Pendidikan dan (5) Real Estate. Sementara untuk sektor tersier terdiri dari 9 (sembilan) kelompok, yaitu: (1) Informasi dan Komunikasi, (2) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, (3) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, (4) Jasa Keuangan dan Asuransi, (5) Transportasi dan Pergudangan, (6) Jasa lainnya, (7) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, (8) Pengadaan Listrik dan Gas dan (9) Jasa Perusahaan.

Pada tahun 2018 sektor yang memberikan kontribusi terbesar pada PDRB ADHB adalah sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan persentase 51,00% disusul dengan Sektor Perdagangan Besar, Eceran, Reparasi Mobil dan Reparasi Motor dengan persentase 11,30%. Berikutnya pada tahun 2019 sektro

yang memberikan kontribusi paling tinggi terhadap PDRB ADHB kembali sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yaitu sebesar 48,47% dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 12,96%. Pada tahun 2020 sektor yang memberikan kontribusi paling tinggi terhadap PDRB ADHB tetap pada sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yaitu sebesar 49,29% dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 12,54%. Kembali pada tahun 2021 sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan memberikan kontribusi sebesar 48,86% dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 12,86%. Tahun 2022, PDRB ADHB Kabupaten Pesisir Barat disumbang sebesar 46,41% dari sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan disusul oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan kontribusi sebesar 14,68%.

Penurunan kontribusi dari sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dipengaruhi oleh mulai meningkatnya perkembangan sektor-sektor lainnya, khususnya sektor Konstruksi dan pertambangan. Peningkatan kontribusi dari beberapa sektor lainnya. Sektor utama yang mengalami peningkatan dari tahun 2018 hingga tahun 2022 adalah sektor Konstruksi yang pada tahun 2018 kembali naik menjadi 5,80% pada tahun 2019 berada pada angka 7,01% dan dan pada tahun 2020 memberikan kontribusi sebesar 6,83% dan 7.53% pada tahun 2021. Tahun 2022, sektor konstruksi memberikan kontribusi sebesar 8,04%. Pesatnya perkembangan sektor konstruksi disebabkan pembangunan daerah yang membutuhkan banyak bangunan baru, baik dari sisi pemerintah dan/atau swasta.

Sementara itu untuk sektor pertambangan dan penggalian juga terus memberikan kontribusi signifikan pada distribusi PDRB ADHB. Di mulai pada tahun 2018 berada pada angka 5,80%. Pada tahun 2019 sempat mengalami penurunan menjadi 5,64% dan data pada tahun 2020 menjadi 5,74% serta pada tahun 2021 berada pada angka 5,21% dan 5,22% pada tahun 2022. Perkembangan sektor konstruksi dan pertambangan dan penggalian ini dipengaruhi oleh pembangunan fisik di segala bidang yang terus digalakkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.

Sedangkan sektor lain yang kontribusinya terhadap PDRB ADHB dinilai masih relatif kecil akan terus ditingkatkan karena pada dasarnya semua sektor penunjang PDRB Kabupaten Pesisir Barat merupakan potensi yang layak dikembangkan dan menjadi penunjang perekonomian daerah Kabupaten Pesisir Barat. Sektor terkecil adalah sektor pengadaan listik dan gas yang pada tahun 2018 sebesar 0,01% dan pada tahun 2019-2022 tercatat dengan nilai 0,02. Berikutnya sektor pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang dengan nilai kontribusi tetap pada angka 0,05% (tahun 2018-2022) serta sektor jasa Perusahaan yang dari tahun 2018-2022 masih berada pada angka 0,15% dari keseluruhan PDRB ADHB serta sektor.

Keseluruhan gambaran distribusi PDRB ADHB ini menunjukkan bahwa sebagai daerah pemekaran baru Kabupaten Pesisir Barat masyarakatnya masih berorientasi pada agraris, sektor-sektor industri dan jasa belum sepenuhnya berkembang dan perlu dukungan investasi dan intervensi kebijakan dari pemerintah daerah.

Tabel 3.2 Distribusi PDRB ADHB Kabupaten Pesisir Barat Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2018-2022 (dalam %)

No	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021*	2022**
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	51,00	48,47	49,29	48,86	46,41
2	Pertambangan dan Penggalian	5,80	5,64	5,74	5,21	5,22
3	Industri Pengolahan	4,88	4,49	3,98	4,11	3,76
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
6	Konstruksi	5,90	7,01	6,83	7,53	8,04
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11,30	12,96	12,54	12,86	14,68
8	Transportasi dan Pergudangan	1,01	1,00	0,97	0,96	1,25
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,73	2,03	1,95	1,81	1,98
10	Informasi dan Komunikasi	2,24	2,24	2,29	2,38	2,27
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,45	1,39	1,38	1,43	1,38
12	Real Estate	3,74	3,69	3,61	3,58	3,62
13	Jasa Perusahaan	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,12	5,11	5,23	5,12	5,17
15	Jasa Pendidikan	3,52	3,62	3,79	3,78	3,73
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,07	1,07	1,18	1,19	1,15
17	Jasa lainnya	1,04	1,06	1,00	0,95	1,13
	PDRB ADHB	**100.00**	**100.00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Barat, 2023
**Angka Sementara*
***Angka Sangat Sementara*

3.1.1.3 Struktur Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Pengeluaran

PDRB menurut Pengeluaran digunakan sebagai indikator untuk menilai kondisi ekonomi suatu daerah melihat dari sisi pengeluaran dan peranan kelembagaan dalam menggunakan barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh berbagasi sektor perekonomian suatu daerah yang terdiri dari 7 (tujuh) komponen, sebagai berikut: (1) Konsumsi Rumah Tangga; (2) Konsumsi LNPRT; (3) Konsumsi Pemerintah; (4) PMTB; (5) Perubahan Inventori; (6) Ekspor; (7) Impor.

Berdasarkan pada data PDRB ADHB menurut Pengeluaran yang berfungsi untuk mengukur laju pertumbuhan konsumsi akhir, investasi dan perdagangan baik antar wilayah dan luar negeri. Data pada tahun 2019 sebesar 4.687,39 (dalam miliar rupiah) dari sebelumnya diangka 4.282,38 (dalam miliar rupiah) pada tahun

2018 atau naik 336,79 (dalam miliar rupiah). Pada tahun 2020 PDRB ADHB menurut pengeluaran tercatat sebesar 4.692,20 (dalam miliar rupiah) dan kembali naik menjadi 4.919,53 (dalam miliar rupiah) pada tahun 2021. Pada tahun 2022, PDRB ADHB menurut jenis pengeluaran naik sebesar 429,91 (dalam miliar rupiah) menjadi sebesar 5.449,44 (dalam miliar rupiah).

Sementara itu untuk data PDRB ADHK menurut Pengeluaran pada tahun 2019 adalah sebesar 3.106,11 (dalam miliar rupiah) dari sebelumnya pada tahun 2018 adalah 2.944,88 (dalam miliar rupiah) atau meningkat sebesar 161,23 (dalam miliar rupiah). PDRB ADHK menurut Pengeluaran pada tahun 2020 adalah sebesar 3.069,60 (dalam miliar rupiah) atau mengalami penurunan sebesar (36,51 dalam miliar rupiah). Berikutnya ada peningkatan menjadi 3.133,19 (dalam miliar rupiah) pada tahun 2021 atau naik 63,59 (dalam miliar rupiah). Data PDRB ADHK menurut Jenis Pengeluaran berada pada angka 3.223,12 (dalam miliar rupiah) atau berhasil naik sebanyak 89,93 (dalam miliar rupiah).

Pada tahun 2023, PDRB ADHB menurut pengeluaran diproyeksikan akan berada pada angka 5.531,32 (dalam miliar rupiah) dan pada tahun 2024 diproyeksikan akan meningkat menjadi sebesar 5.730,44 (dalam miliar rupiah). Selanjutnya untuk PDRB ADHK menurut pengeluaran pada tahun 2023 diproyeksikan akan berada pada angka 3.332,70 (dalam miliar rupiah) dan diproyeksikan meningkat menjadi 3.452.67 (dalam miliar rupiah) pada tahun 2024 mendatang.

Baik pada nilai PDRB ADHB maupun PDRB ADHK menurut pengeluaran, sektor terbesar tetap ada pada: (1) Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga; (2) Pembentukan Modal Tetap Bruto; (3) Pengeluaran Konsumsi Pemerintah; (4) Pengeluaran Konsumsi LNPRT; (5) Net Ekspor Barang dan Jasa; (6) Perubahan Inventori.

Berikutnya disampaikan PDRB ADHB Menurut Jenis Pengeluaran Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022 sebagai berikut:

Tabel 3.3 PDRB ADHB Menurut Jenis Pengeluaran Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022 (dalam Miliar rupiah)

No	Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021*	2022**
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	3.009,36	3.285,05	3.283,83	3.373,76	3.717,25
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	75,19	84,65	87,02	90,20	96,19
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintahan	142,73	147,14	146,50	149.45	147,23
4	PMTB	933,61	1.068,19	1.017,88	1.110,62	1.205,95
5	Perubahan Inventori	63,79	18,96	11,08	7,17	7,46

6	Net Ekspor Barang dan Jasa	57,70	83,40	145,88	188,33	175,36
	Total PDRB	**4.282,38**	**4.687,39**	**4.692,20**	**4.919,53**	**5.349,44**

Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Barat, 2023
**angka sementara*
***angka sangat sementara*

Lebih lanjut, disajikan PDRB ADHK Menurut Jenis Pengeluaran Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022 sebagai berikut:

Tabel 3.4 PDRB ADHK Menurut Jenis Pengeluaran Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022 (dalam Miliar Rupiah)

No	Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021*	2022**
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	2.112,13	2.237,12	2.195,72	2.206,58	2.310,06
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	46.45	51,49	51,90	52,63	53,55
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	96.50	98,57	96,10	96,69	93,89
4	Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	652.79	727,03	670,11	702,02	732,58
5	Perubahan Inventori	37.13	8,29	14,61	4,29	4,40
6	Net Ekspor Barang dan Jasa	(0,11)	(16,40)	41,17	70,98	28,64
	PDRB	**2.944,88**	**3.106,11**	**3.069,60**	**3.133,19**	**3.223,12**

Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Barat, 2023
**angka sementara*
***angka sangat sementara*

3.1.1.4 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesisir Barat pada tahun 2023 diperkirakan berada pada kisaran 3,6-4,10% atau menyesuaikan dengan kondisi perekonomian nasional dan Provinsi Lampung dan perekonomian daerah dengan tetap melihat pada kondisi fiskal daerah dalam proses pemabngunan. Angka ini dinilai cukup realistis dan moderat bila melihat pada tantangan dan juga proyeksi pembangunan ekonomi pada tahun 2023 dan 2024 mendatang. Terlebih pada tahun 2024 mendatang sebagai tahun terakhir pemerintahan Kabinet Indonesia Maju. Target pada tahun 2024 sebesar 3,6-4,10% juga melihat dari proyeksi pada tahun 2023 ini yang diperkirakan berada pada angka pertumbuhan 3,4-3,9%. Angka ini berdasarkan pada data series tahun 2015-2019 yang berada pada kisaran 4,9-5,3% sebelum menjadi minus pada tahun 2020 diangka -1,18%. Perbaikan capaian kinerja pertumbuhan ekonomi terjadi pada tahun 2021 yang berada pada angka 2.07% dan tahun 2022 sebesar 2,88%.

Diproyeksikan sumbangan terbesar perekonomian daerah masih berasal dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor serta sektor konstruksi dengan sumbangan ±46-50% dari total PDRB Kabupaten Pesisir Barat. Pada tahun 2024 ini diproyeksikan bahwa pendorong utama pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesisir Barat masih ada pada sektor-sektor yang langsung berhubungan dengan konsumsi masyarakat dan juga konsumsi Pemerintah Daerah. Proyeksi tersebut merupakan suatu hal yang wajar mengingat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesisir Barat selama tahun 2021-2022 telah kembali ke arah pertumbuhan meningkat yang stabil dengan catatan signifikannya peningkatan belanja modal pemerintah daerah dalam infrastruktur dan penyediaan fasilitas publik.

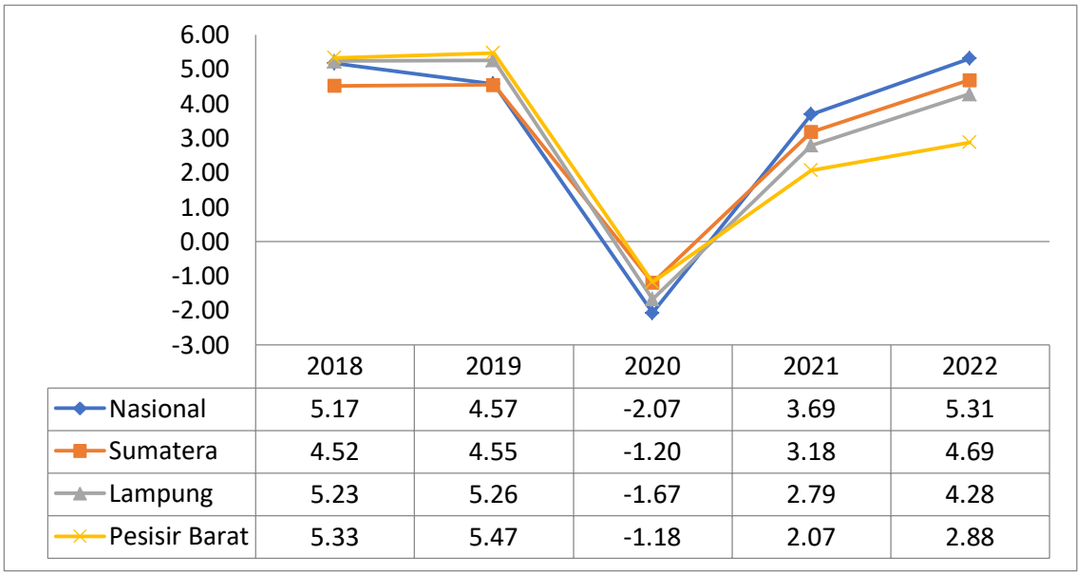
Target pertumbuhan ekonomi ini juga sejalan dengan kondisi ekonomi nasional dan Provinsi Lampung, Ekonomi Provinsi Lampung triwulan I-2022 tumbuh sebesar 2,96%, menguat dibanding triwulan yang sama tahun sebelumnya yang tercatat mengalami kontraksi sebesar 1,99% (y-on-y). Pertumbuhan positif dicapai oleh hampir seluruh lapangan usaha, terutama lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan yang tumbuh sebesar 17,03%. Selanjutnya lapangan usaha Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Kendaraan Mobil-Sepeda Motor serta Jasa Perusahaan juga tumbuh signifikan masing-masing mencapai 15,11% dan 15,01%. Sementara itu, beberapa lapangan usaha mengalami kontraksi terutama pada lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian, serta Informasi dan Komunikasi yang terkontraksi masing- masing sebesar 4,86% dan 2,55%.

Ekonomi Provinsi Lampung triwulan I-2022 dibandingkan dengan triwulan IV-2021 mengalami pertumbuhan sebesar 0,96% (q to q), menguat dibanding capaian triwulan sebelumnya yang mengalami kontraksi sebesar 6,37%. Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang tumbuh sebesar 15,10%. Hal ini disebabkan oleh kenaikan produksi tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan. Selanjutnya, lapangan usaha Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Kendaraan Mobil-Sepeda Motor tumbuh sebesar 4,47%, Jasa Lainnya tumbuh sebesar 4,32% dan Jasa Perusahaan tumbuh sebesar 3,32%.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesisir Barat dalam 5 tahun terakhir dapat digambarkan sebagai berikut: Ekonomi Kabupaten Pesisir Barat pada tahun 2018 berada pada angka 5,33% atau stagnan dari tahun 2017. Data pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi berada pada 5.47% atau naik 0,14. Pada tahun 2020 mengalami penurunan secara signifikan dan terkoreksi minus sebanyak (1.18). Perbaikan mulai terjadi pada tahun 2021 yang menempatkan perekonomian Pesisir Barat pada angka 2.07%. Tahun 2022, pertumbuhan ekonomi daerah berhasil naik menjadi sebesar 2,88%.

Capaian pertumbuhan ekonomi sebesar 2.88% tersebut masih berada di bawah Provinsi Lampung yang mencatatkan nilai 4.28% serta regional Sumatera dengan capaian pertumbuhan 4.69%. Selanjutnya bila dilihat dari sisi nasional, maka capaian Pesisir Barat memiliki selisih 2.43% dari nasional yang tercatat sebesar 5.31%.

Gambar 3.1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022

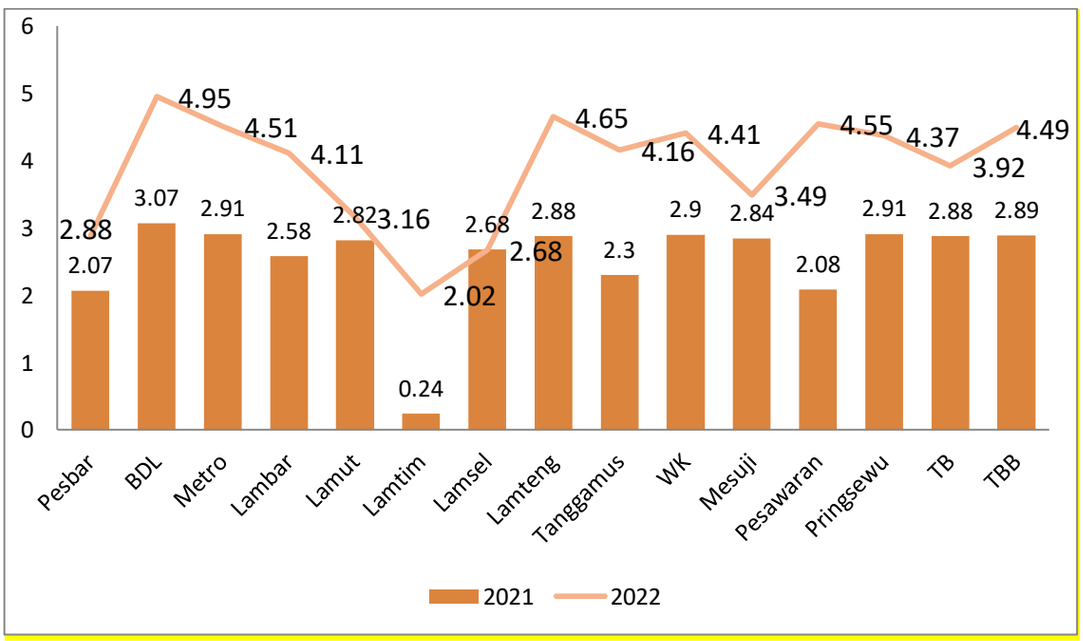


	2018	2019	2020	2021	2022
Nasional	5.17	4.57	-2.07	3.69	5.31
Sumatera	4.52	4.55	-1.20	3.18	4.69
Lampung	5.23	5.26	-1.67	2.79	4.28
Pesisir Barat	5.33	5.47	-1.18	2.07	2.88

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2023

Lebih lanjut, bila melihat pada capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesisir Barat diantara Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung berada pada urutan ke-13 di atas Kabupaten Lampung Timur yang mencatatkan pertumbuhan sebesar 2.02% dan Kabupaten Lampung Selatan sebesar 2.68%. Capaian tertinggi pada 15 kabupaten/kota se-Provinsi Lampung oleh Kota Bandar Lampung dengan nilai 4.95% dan Kabupaten Lampung Tengah dengan nilai 4.65%. Daerah yang lebih maju seperti Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Tengah yang telah mengandalkan perdagangan dan jasa (sektor ekonomi modern daerah perkotaan) sebagai penyumbang PDRB dirasakan lebih cepat melakukan *recovery* dan kembali menghidupkan perekonomian daerahnya pasca Pandemi Covid-19.

Gambar 3.2 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung Tahun 2021-2022



Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2023

Pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi diproyeksi akan berada pada angka 3,4-3,9%. Sementara itu, untuk RKPD Tahun 2024 pertumbuhan ekonomi daerah dinilai akan mampu berada pada angka 3,6-4,1%. Kenaikan dinilai masih dalam tahapan moderat optimis, dimana dasar perhitungan adalah data series daerah yang meningkat secara konsisten sebesar 0,10-0,80.

3.1.1.5 Pertumbuhan Ekonomi menurut Lapangan Usaha

Secara konstan selama kurun waktu tahun (2018-2022) PDRB tumbuh antara 0,20 hingga 0,30%. Kuatnya (i) sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, (ii) sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, (iii) sektor konstruksi, sektor pertambangan dan penggalian serta (iv) sektor Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib dalam struktur perekonomian Kabupaten Pesisir Barat merupakan indikasi bahwa sektor ini merupakan sektor yang sangat layak dikembangkan menjadi strategi pembangunan Kabupaten Pesisir Barat. Sementara itu sektor jasa pendidikan dan sektor real estate perlahan namun pasti diprediksi akan semakin menguat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kabupaten Pesisir Barat.

Ada tiga kelompok sektor dalam PDRB menurut lapangan usaha, yaitu kelompok sektor Primer, kelompok Sektor Sekunder dan kelompok Sektor Tersier. Kelompok Sektor Primer terdiri dari 2 (dua) sektor, yaitu sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan serta sektor Pertambangan, Kelompok sektor Sekunder terdiri dari 3 (tiga) sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih serta sektor konstruksi, sedangkan kelompok sektor tersier terdiri dari 4 (empat) sektor lainnya yaitu sektor perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan serta sektor jasa-jasa lainnya.

Ketimpangan dalam perkembangan sektor primer dengan sektor sekunder dan tersier pada dasarnya mengindikasikan adanya pertumbuhan ekonomi yang riil di Kabupaten Pesisir Barat. Secara umum dapat dikatakan bahwa efisiensi dan produktivitas lebih dominan terjadi pada sektor primer dan sekunder. Kelompok sektor Primer memegang dominasi paling kuat dalam struktur ekonomi Kabupaten Pesisir Barat atau dapat dikatakan struktur ekonomi daerah adalah struktur ekonomi yang masih pada sektor tradisional, pada urutan kedua penyumbang terbesar ada pada sektor Tersier dan menunjukan angka yang stabil. Ini merupakan potensi bagi daerah untuk meningkatkan perekonomian di sektor Tersier dan mulai mengembangkan potensi ekonomi modern yang tidak lagi berbasis atau mengandalkan sektor Primer atau Tradisional.

Tabel 3.5 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pesisir Barat Menurut Lapangan Usaha (PDRB ADHK) Tahun 2018-2022

No	Lapangan Usaha	2018	2019	2020*	2021*	2022**
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,99	0,71	0,02	-0,03	-0,03
2	Pertambangan dan Penggalian	7,66	6,37	0,00	-5,76	-5,76
3	Industri Pengolahan	1.54	-0,10	-12,49	2,32	2,32
4	Pengadaan Listrik dan Gas	17,60	26,56	5,08	7,99	7,99
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,59	1,71	5,02	5,94	5,94
6	Konstruksi	13,85	28,50	-2,03	9,63	9,63
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,86	9,11	-4,01	6,97	6,97
8	Transportasi dan Pergudangan	6,45	7,50	-4,73	2,56	2,56
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,81	26,89	-4,54	-3,32	-3,32
10	Informasi dan Komunikasi	8,64	9,09	2,99	10,78	10,78
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,24	2,98	0,29	3,69	3,69
12	Real Estate	6,15	6,25	-3,80	3,44	3,44
13	Jasa Perusahaan	3,87	8,47	-1,81	1,30	1,30
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8,83	8,90	1,34	3,22	3,22
15	Jasa Pendidikan	8,94	9,48	4,09	3,42	3,42
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,20	8,60	9,53	3,89	3,89
17	Jasa lainnya	9,96	8,20	-4,49	-1,09	-1,09
	PDRB ADHK	**5,33**	**5,47**	**-1,18**	**2,07**	**2,88**

Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Barat, 2023
**Angka Sementara*
***Angka Sangat Sementara*

3.1.1.6 PDRB Per Kapita

Dilihat dari jumlah PDRB Per Kapita Kabupaten Pesisir Barat mengalami pertumbuhan yang cukup baik, pada tahun 2018 tercatat sebesar 27.85 (dalam juta rupiah). Pada tahun 2019 PDRB Perkapita berada pada angka 30,25 (dalam juta rupiah). Pada tahun 2020, PDRB Perkapita turun mengikuti pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesisir Barat yang berada pada minus 1,18% dengan nilai 28.89 (dalam juta rupiah). Tahun 2021, seiring dengan perbaikan kinerja ekonomi daerah, PDRB perkapita berhasil naik 1,30% sehingga menjadi sebesar 30.06 (dalam juta rupiah). Pada tahun 2022, PDRB Perkapita Kabupaten Pesisir Barat tercatat pada angka 32,64 (dalam juta rupiah).

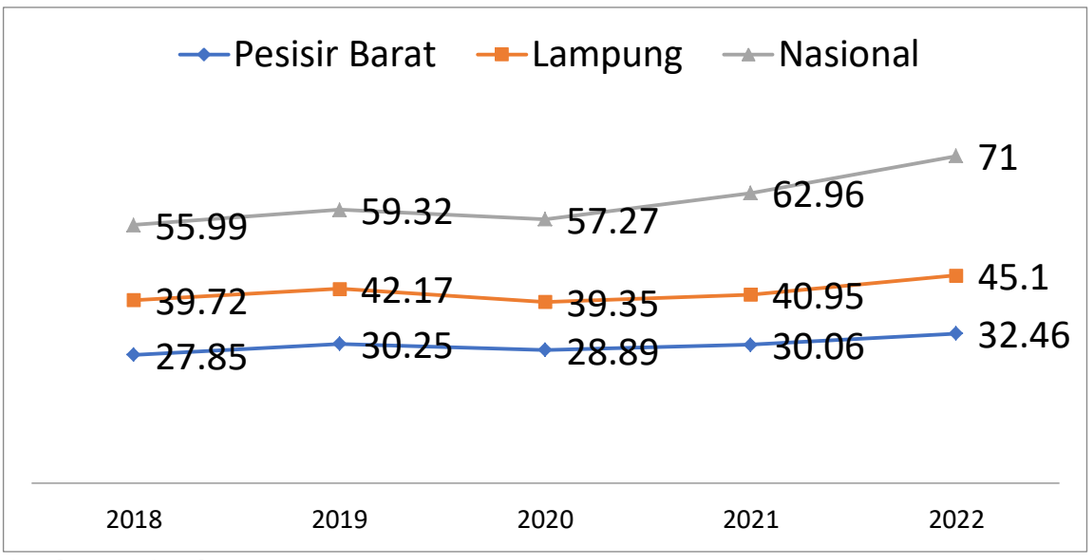
Tabel 3.6 Produk Domestik Regional Bruto Perkapita Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022

Tahun	PDRB ADHB	Jumlah Penduduk (berdasarkan BPS)	PDRB Perkapita (PPK)
2018	4,282.37	153,743	27.85
2019	4,687.38	154,973	30.25
2020	4,692.20	162,419	28.89
2021*	4,919.52	163,641	30.06
2022**	5,349.44	164,810	32,64

Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Barat, 2023
**angka sementara*
**angka sangat sementara*

Pada tahun 2023 PDRB Perkapita diproyeksikan akan mengalami kenaikan dan berada pada angka 31.60-32.60 (dalam juta rupiah). sementara untuk target pada tahun 2024 mendatang diproyeksikan sebesar 33.60-34.10 (dalam juta rupiah). Walaupun melihat tantangan perekonomian nasional dan provinsi yang semakin berat, optimisme akan terjadinya pertumbuhan ekonomi juga masih diharapkan.

Gambar 3.3 PDRB Per Kapita ADHB Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022 (dalam juta rupiah)

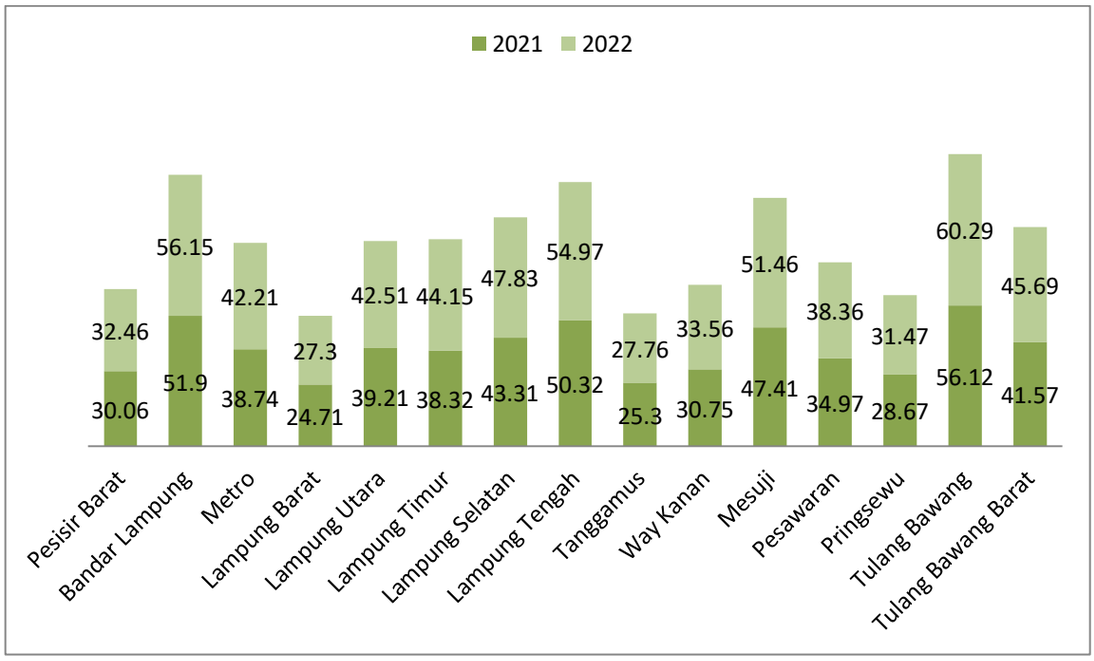


Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Barat, 2023

PDRB Perkapita berdasarkan nilai ADHB untuk Kabupaten Pesisir Barat untuk tahun 2022 sebesar 32.46 (juta rupiah) masih berada di bawah Provinsi Lampung senilai 45.10 (juta rupiah) dan nasional yang mencatatkan hampir dua kali lipat pada angka 7100 (juta rupiah). Sementara itu, bila melihat dengan capaian dari 15 Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, data PDRB Perkapita kabupaten Pesisir Barat berada pada urutan 11, dengan Kabupaten Tulang Bawang sebagai daerah tertinggi senilai 60.29 (juta rupiah) dan Kota Bandar Lampung dengan nilai 56.15 (juta rupiah). Sementara itu, Kabupaten Lampung Barat dengan capaian terendah

senilai 27.30 (juta rupiah) disusul oleh Kabupaten Tanggamus dengan nilai 27,76 (dalam juta rupiah). Rendahnya nilai PDRB Perkapita di Kabupaten Pesisir Barat disebabkan pada masih rendahnya struktur perekonomian daerah, dan hanya mengandalkan pada sektor-sektor tradisional seperti pertanian, kehutanan dan perikanan.

Gambar 3.4 PDRB Perkapita Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung Tahun 2021-2022



Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2023

3.1.1.7 Inflasi Daerah

Perubahan harga barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga merupakan hal yang tidak dapat dielakkan dalam sebuah perekonomian. Perubahan harga tersebut dapat berupa kenaikan dan juga penurunan. Rata-rata tertimbang perubahan harga tersebut pada kurun waktu tertentu dalam suatu wilayah itulah yang kita kenal dengan inflasi. Laju inflasi akan mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan laju inflasi ekonomi nasional dan inflasi regional, sehingga perlu adanya kebijakan khusus untuk menjaga stabilitas harga.

Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks (inflasi) kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau 5,18 persen; kelompok pakaian dan alas kaki 4,70 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar rumah tangga 1,57 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga 3,14 persen; kelompok kesehatan 3,77 persen; kelompok transportasi 11,93 persen; kelompok rekreasi, olahraga dan budaya 4,03 persen; kelompok pendidikan 9,23 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran 2,94 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya 5,34 persen. Sementara kelompok

pengeluaran yang mengalami penurunan indeks (deflasi) yaitu kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 1,19 persen.

Pada April 2023, terjadi inflasi years on years (yoy) gabungan dua kota di Lampung sebesar 5,00 persen, dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 116,19. Inflasi yoy Kota Bandar Lampung sebesar 5,15 persen, dengan IHK sebesar 116,19 dan inflasi yoy Kota Metro sebesar 3,89 persen dengan IHK sebesar 116,25.

Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks (inflasi) kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau 5,18 persen; kelompok pakaian dan alas kaki 4,70 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar rumah tangga 1,57 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga 3,14 persen; kelompok kesehatan 3,77 persen; kelompok transportasi 11,93 persen; kelompok rekreasi, olahraga dan budaya 4,03 persen; kelompok pendidikan 9,23 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran 2,94 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya 5,34 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks (deflasi) yaitu kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 1,19 persen.

Komoditas utama penyumbang inflasi yoy pada April 2023, antara lain bensin, rokok kretek filter, beras, sekolah menengah atas, angkutan udara, angkutan dalam kota dan telur ayam ras. Tingkat inflasi month to month (mtm) April 2023 tercatat inflasi sebesar 0,30 persen dan tingkat inflasi year to date (ytd) April 2023 sebesar 1,32 persen.

Perkembangan harga berbagai komoditas pada April 2023 di dua kota IHK Lampung secara umum menunjukkan adanya kenaikan. Berdasarkan hasil pemantauan BPS, pada April 2023 terjadi inflasi yoy sebesar 5,00 persen atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 110,65 pada April 2022 menjadi 116,19 pada April 2023. Tingkat inflasi mtm tercatat inflasi sebesar 0,30 persen dan tingkat inflasi ytd sebesar 1,32 persen.

Inflasi years on years (yoy) terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks (inflasi) kelompok pengeluaran, yaitu kelompok transportasi memberikan andil sebesar 1,59 persen; kelompok makanan, minuman dan tembakau memberikan andil sebesar 1,57 persen; kelompok pendidikan memberikan andil sebesar 0,46 persen; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya memberikan andil sebesar 0,29 persen; kelompok pakaian dan alas kaki memberikan andil sebesar 0,28 persen; kelompok perumahan, air, listrik, bahan bakar rumah tangga memberikan andil sebesar 0,27 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran memberikan andil sebesar 0,25 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga memberikan andil sebesar 0,17 persen; kelompok kesehatan memberikan andil sebesar 0,09 persen; dan kelompok rekreasi, olahraga dan budaya memberikan andil sebesar 0,08 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks , yaitu kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan yang memberikan andil deflasi sebesar 0,05 persen.

Perkembangan inflasi di Kabupaten Pesisir Barat mengikuti perkembangan tingkat inflasi Provinsi Lampung dan juga Kotamadya Metro. Penekanan dan pengendalian inflasi perlu dilakukan oleh berbagai pihak yang yang memiliki kewenangan dan sebagai *stakeholder* di semua sektor kehidupan masyarakat.

3.1.2. Kinerja Sosial Ekonomi Daerah

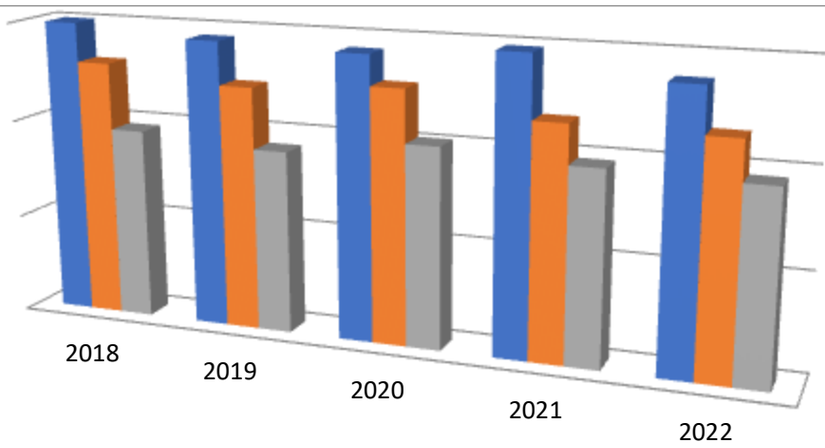
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan diimbangi dengan pemerataan hasil-hasil pembangunan kepada seluruh lapisan masyarakat, baik antar penduduk dan antar wilayah. Beberapa indikator dalam peningkatan kinerja sosial ekonomi daerah Kabupaten Pesisir Barat antara lain adalah Persentase penduduk miskin, tingkat pengangguran terbuka dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

3.1.2.1 Tingkat Kemiskinan

Perkembangan penduduk miskin di Kabupaten Pesisir Barat diharapkan terus menurun, hal ini sejalan dengan peningkatan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan juga meningkatnya angka pertumbuhan ekonomi daerah. Berdasarkan pada data tahun-tahun sebelumnya, Pada tahun 2018 tingkat kemiskinan sebesar 14,98% atau sebanyak 22.980 penduduk miskin. Berikutnya berdasakan pada data tahun 2019 terdapat 22.380 jiwa penduduk miskin dengan angka persentase sebesar 14,48%. Data pada tahun 2020, tingkat kemiskinan berada pada angka 14,29% dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 22.241 jiwa. Pada tahun 2021, angka kemiskinan daerah Kabupaten Pesisir Barat sebesar 14.81% atau sebanyak 23.230 jiwa penduduk miskin daerah. Kenaikan sebanyak 0.52% dipengaruhi dari efek pandemi Covid-19 yang menyebabkan penduduk marginal kesulitan dalam berusaha. Capaian pada tahun 2022 sebesar 13,84% penduduk miskin di daerah atau sebanyak 21.500 orang. Data keparahan kemiskinan Kabupaten Pesisir Barat pada tahun 2018-2022 berada pada indeks 0,40-0,50%.

Untuk tahun 2023 diproyeksi tingkat kemiskinan mampu turun menjadi 13,65% atau sebanyak 22.300 jiwa penduduk miskin. Untuk tahun 2024 mendatang tingkat kemiskinan diproyeksi akan berada pada angka 13,34% dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 22.000 jiwa atau turun 0,31% dari tahun sebelumnya. Proyeksi jumlah penduduk miskin yang naik dari sisi jumlah dilakukan dengan tetap memperhatikan kenaikan jumlah penduduk. Angka proyeksi ini diambil dari perkembangan angka kemiskinan di Kabupaten Pesisir Barat selama 5 (lima) tahun dari 2018-2022 yang secara rata-rata turun sebanyak 0,30-0,50% pertahunnya walaupun terkoreksi pada tahun 2021.

Gambar 3.5 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022

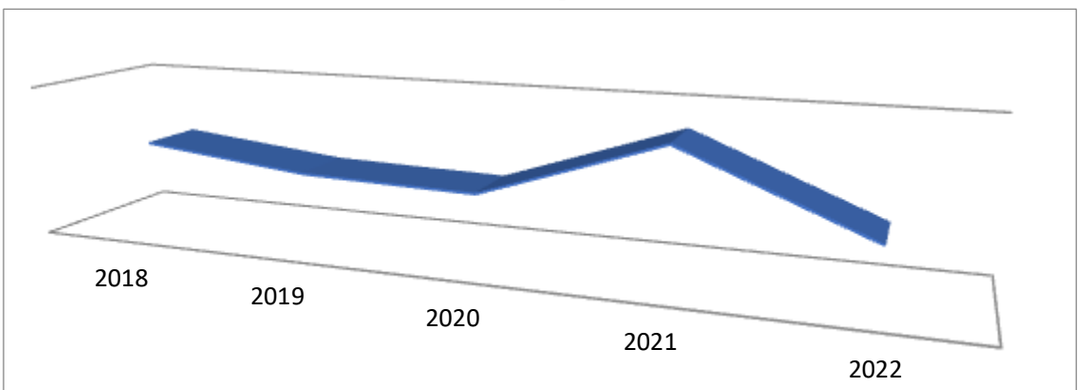


	2018	2019	2020	2021	2022
PESISIR BARAT	14.98	14.48	14.29	14.81	13.84
LAMPUNG	13.01	12.3	12.76	11.67	11.57
NASIONAL	9.66	9.22	10.11	9.71	9.57

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2023

Untuk tahun 2022, tingkat kemiskinan daerah Kabupaten Pesisir Barat tercatat sebesar 13.84%, jauh melebihi data Provinsi Lampung pada angka 11,57%. Angka capaian Kabupaten Pesisir Barat dan Provinsi Lampung ini masih diatas dari Nasional yang mencatat sebanyak 9,54% jumlah penduduk miskin di Indonesia.

Gambar 3.6 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022

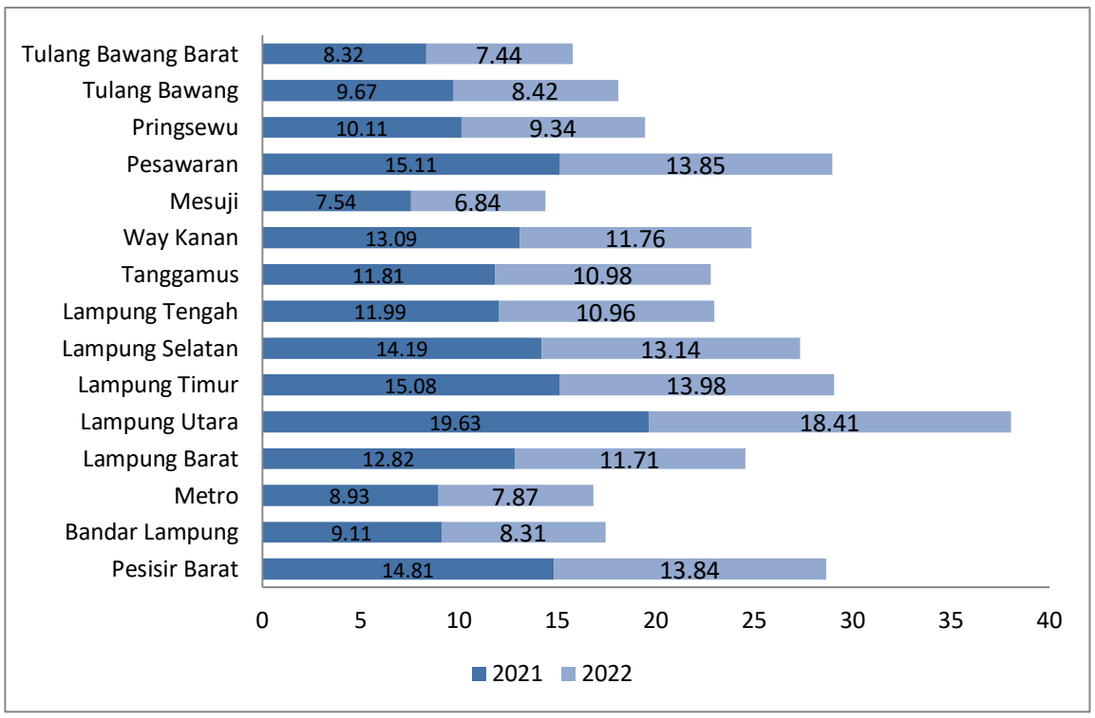


	2018	2019	2020	2021	2022
PESISIR BARAT	22980	22380	22241	24235	21850

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2023

Apabila dibandingkan dengan data 15 kabupaten/kota se-Provinsi Lampung, Kabupaten Pesisir Barat dengan capaian 13,84% berada pada urutan ke 12, capaian terendah oleh Kabupaten Lampung Utara dengan persentase 18,41%. Sementara itu, Kabupaten Mesuji merupakan daerah terbaik dalam sisi tingkat kemiskinan untuk tahun 2022 dengan persentase penduduk miskin hanya sebanyak 6.84%. Masih tingginya tingkat kemiskinan di Kabupaten Pesisir Barat lebih disebabkan pada belum meratanya sumber-sumber produksi, distribusi dan konsumsi di masyarakat dan kemampuan masyarakat dalam mengakses pekerjaan yang juga terbatas. Keterbatasan sarana dan prasarana masyarakat juga merupakan salah satu penyebab masih tingginya angka kemiskinan.

Gambar 3.7 Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung Tahun 2021-2022



Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2023

3.1.2.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Perkembangan IPM yang selama lima tahun terakhir tentunya tidak terlepas dari hasil kinerja pemerintah yang menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu dan juga peningkatan anggaran bagi sektor-sektor yang mendukung dalam peningkatan angka IPM. Hal ini tercermin dari peningkatan tiga komponen utama IPM dengan metode baru yaitu, Angka Harapan Hidup (AHH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Pengeluaran Riil per Kapita (PRK) secara rinci terdapat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.7 Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022

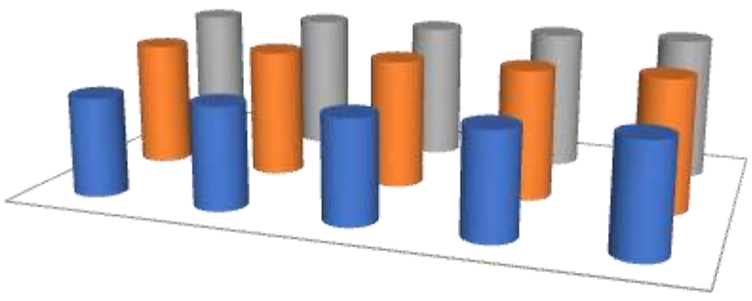
No	Komponen	2018	2019	2020	2021	2022
1	Angka Harapan Hidup (tahun)	62,85	63,27	63,50	63,66	63,99
2	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	7,59	7,82	8,01	8,19	8,53
3	Harapan Lama Sekolah (tahun)	11,97	11,98	11,99	12,00	12,13
4	Pengeluaran Riil per Kapita (000 Rp.)	8.355	8.652	8.672	8.533	8.663

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2023

Perkembangan IPM Kabupaten Pesisir Barat dari tahun 2018 sebesar 62,96 poin. Untuk tahun 2019 meningkat menjadi 63,79 poin atau naik 0,83 poin dan pada tahun 2020 berada pada angka 63.91 poin atau naik 0,18 poin. Tahun 2021, IPM Kabupaten Pesisir Barat berada pada angka 64.30 poin atau berhasil mengalami perbaikan kinerja sebanyak 0.39 poin. Capaian pada tahun 2022 sebesar 65,14 poin atau berhasil naik sebanyak 0.84 poin.

Selanjutnya pada tahun 2023 mendatang diharapkan akan naik menjadi 64,30-65,30 poin serta pada tahun 2024 mendatang diproyeksikan akan mencapai 65,44 poin. Angka proyeksi ini didapatkan dari perkembangan rata-rata peningkatan nilai poin IPM Kabupaten Pesisir Barat sebesar 0,60-0,80 pertahunnya. Namun demikian, melihat pada tantangan tahun 2023 serta 2024 yang masih berjuang dalam memulihkan perekonomian maka target dirasionalkan. Proyeksi juga memperhatikan kemampuan fiskal daerah dalam pembangunan sektor ekonomi, pendidikan dan kesehatan.

Gambar 3.8 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022

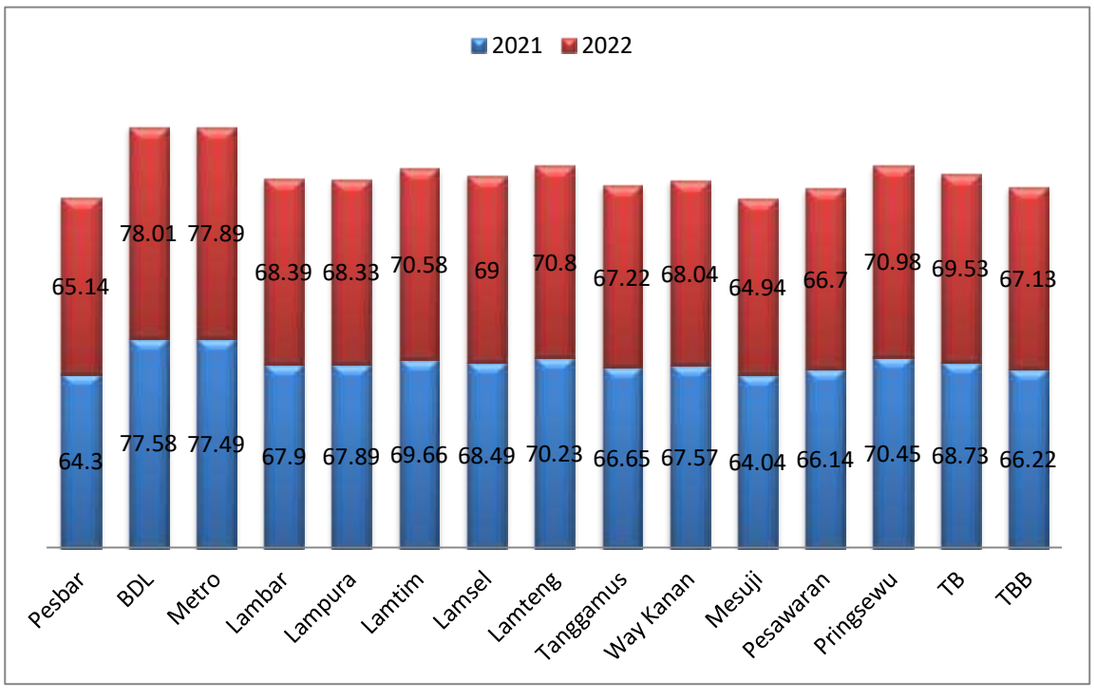


	2018	2019	2020	2021	2022
PESISIR BARAT	62.96	63.79	63.91	64.30	65.14
LAMPUNG	69.02	69.57	69.69	69.90	70.45
NASIONAL	71.39	71.92	71.94	72.29	72.91

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2023

Capaian data IPM untuk Kabupaten Pesisir Barat senilai 65,14 masih berada dibawah Provinsi Lampung yang tercatat 70,45 dan nasional dengan nilai 72,91. Sementara itu bila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung untuk tahun 2022 Kabupaten Pesisir Barat masih berada pada urutan ke-14 dengan Kabupaten Mesuji sebagai daerah terendah dengan nilai 64,94. Daerah terbaik untuk IPM di Provinsi Lampung adalah Kota Bandar Lampung dengan nial 78,01 dan Kota Metro dengan nilai 77,89. Masih rendahnya nilai IPM Kabupaten Pesisir Barat menunjukkan masih rendahnya derajat status pendidikan dan kesehatan masyarakat. Kurangnya akses pendidikan dan kesehatan merupakan faktor utamanya. Ketersediaan infrastruktur serta kondisi geografis daerah turut mempengaruhi kesulitan masyarakat dalam mengakses pendidikan dan kesehatan. Terlebih dari sisi kemampuan daya beli masyarakat yang belum bisa bersaing dengan daerah lain.

Gambar 3.9 IPM Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung Tahun 2021-2022



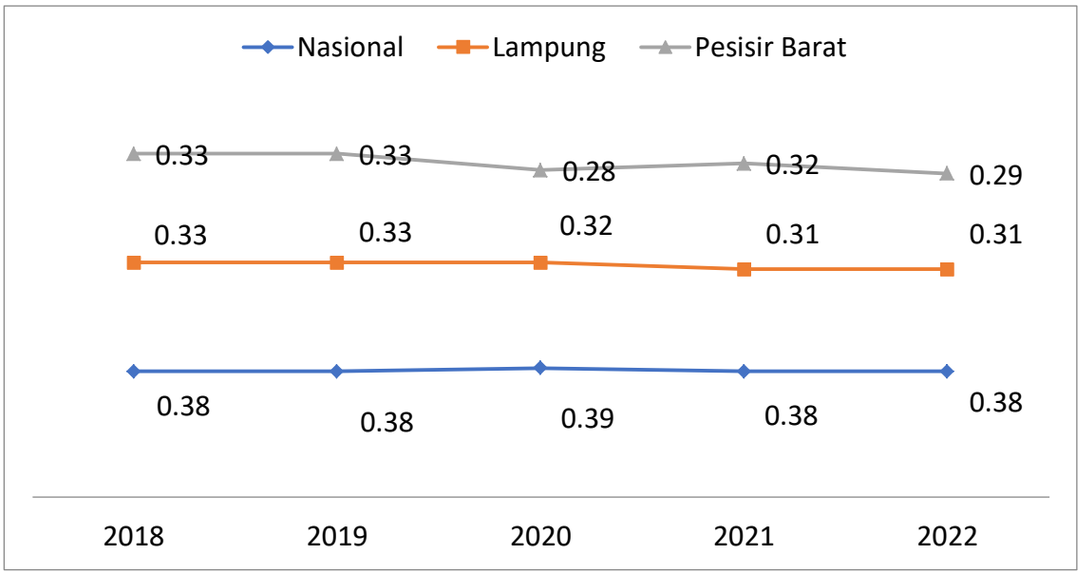
Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2023

3.1.2.3 Indeks Gini

Perkembangan indeks gini (gini ratio) di Kabupaten Pesisir Barat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ini terus mengalami perbaikan. Hal ini erat kaitannya dengan perkembangan PDRB Perkapita penduduk dan juga persebaran jumlah tenaga kerja. Kabupaten Pesisir Barat yang juga terus mengalami perbaikan dari tahun ke tahun. Ketimpangan pendapatan di antara penduduk Kabupaten Pesisir Barat pada tahun 2018 sebesar 0,33 poin dan tetap pada angka 0,33 pada tahun 2019. Selanjutnya pada tahun 2020 capaian mengalami perbaikan kinerja dan berada pada angka 0,28. Pada tahun 2021 yang lalu, angka ini kembali mengalami koreksi dan berada pada angka 0,32. Tahun 2022 ada perbaikan kinerja daerah, sehingga indeks gini turun menjadi 0,29 atau menurun 0,03.

Berikutnya proyeksi pada tahun 2023 ini diharapkan akan berada pada angka 0,29-0,32 poin dan pada tahun perencanaan untuk RKPD Tahun 2024 bertahan dengan perbaikan pada angka 0,30-0,29. Angka proyeksi ini didapatkan dari perhitungan rata-rata dari penurunan gini ratio daerah yang cenderung turun stagnan dikisaran angka (0,00-0,20) poin pertahunnya.

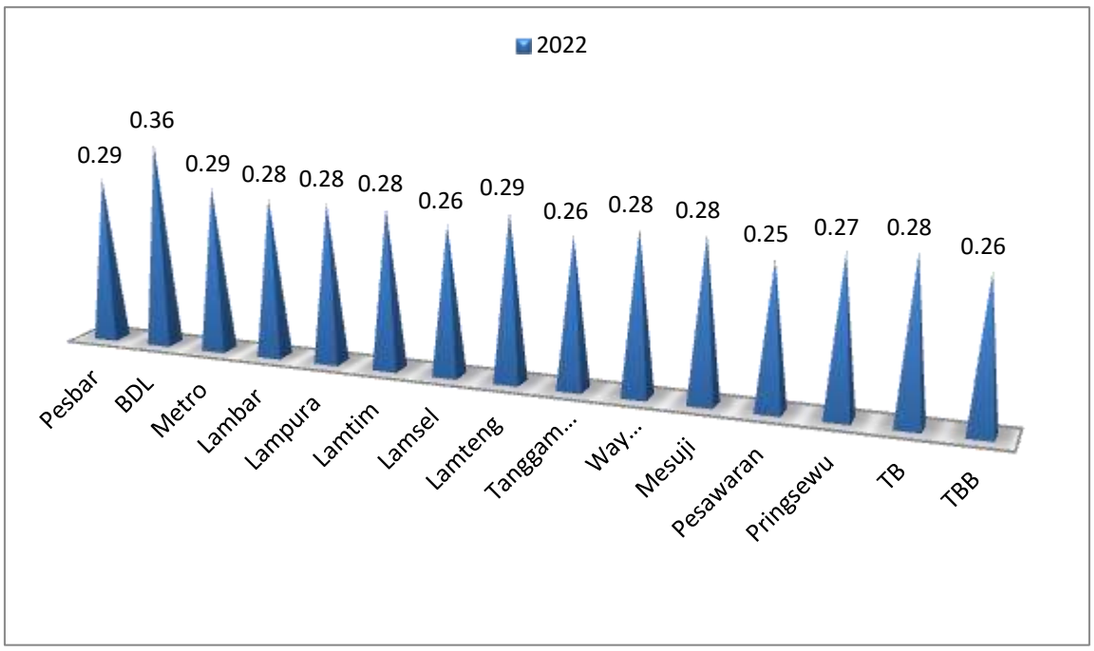
Gambar 3.10 Indeks Gini Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022



Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2023

Gini rasio Kabupaten Pesisir Barat pada tahun 2022 tercatat sebesar 0.29. Nilai tersebut masih lebih baik bila dibandingkan dengan capaian kinerja provinsi dan nasional dengan nilai Provinsi Lampung dengan nilai capaian 0.31 dan nasional yang berada pada angka 0.38. Capain pada tahun 2022, untuk perbandingan dengan 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung, Kabupaten Pesisir Barat berada pada urutan ke 12, dengan Kabupaten Pesawaran menjadi kabupaten dengan capaian terbaik 0,25. Sementara itu, Kota Bandar Lampung merupakan Kota dengan nilai terendah dengan capaian 0.36. Ketimpangan pendapatan di daerah lebih disebabkan pada kondisi struktur ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya merata. Jumlah penduduk miskin dan juga jumlah pengangguran turut mempengaruhi capaian ini.

Gambar 3.11 Indeks Gini Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung Tahun 2022



Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2023

3.1.2.4 Distribusi dan Ketimpangan Ekonomi Daerah

Struktur ekonomi di Kabupaten Pesisir Barat selain dapat dilihat dari nilai pertumbuhan ekonomi, nilai PDRB dan PDRB Perkapita juga perlu dilihat dari sisi sumbangan kontribusi PDRB daerah terhadap pembentukan total PDRB Provinsi Lampung. Pada tahun 2021, secara struktur PDRB Kabupaten Pesisir Barat merupakan daerah dengan kontributor terendah di Provinsi Lampung atau berada pada urutan 15. Kontribusi daerah walaupun stagnan pada tahun 2018-2022 dengan nilai 1,28-1,30% dan masih terus terendah. Hal ini sejalan dengan capaian dari Kabupaten Lampung Barat yang berada pada urutan ke-13, bahwa Kabupaten Lampung Barat merupakan kabupaten induk. Sementara Kabupaten Lampung tengah adalah kontributor tertinggi dari tahun 2018-2022.

Berikut adalah data kontribusi PDRB ADHB 15 Kabupaten/Kota terhadap total PDRB Provinsi Lampung:

Tabel 3.8 Kontribusi PDRB ADHB Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung terhadap Total PDRB Tahun 2018-2022 (persen)

No	Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
1	Lampung Barat	1,96	1,97	1,99	1,99	1,99
2	Tanggamus	4,33	4,33	4,31	4,34	4,35
3	Lampung Selatan	12,40	12,40	12,36	12,33	12,41
4	Lampung Timur	11,73	11,55	11,35	11,65	11,95
5	Lampung Tengah	19,70	19,71	19,82	19,74	19,78
6	Lampung Utara	6,60	6,60	6,63	6,60	6,48
7	Way Kanan	3,89	3,88	3,90	3,89	3,88

8	Tulang Bawang	6,40	6,40	6,44	6,42	6,24
9	Pesawaran	4,50	4,50	4,52	4,47	4,48
10	Pringsewu	3,10	3,10	3,11	3,10	3,08
11	Mesuji	2,89	2,89	2,90	2,89	2,87
12	Tulang Bawang Barat	3,18	3,18	3,19	3,18	3,17
13	Pesisir Barat	1,28	1,30	1,30	1,30	1,28
14	Bandar Lampung	16,28	16,43	16,42	16,34	16,30
15	Metro	1,76	1,75	1,75	1,75	1,73
	Jumlah	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

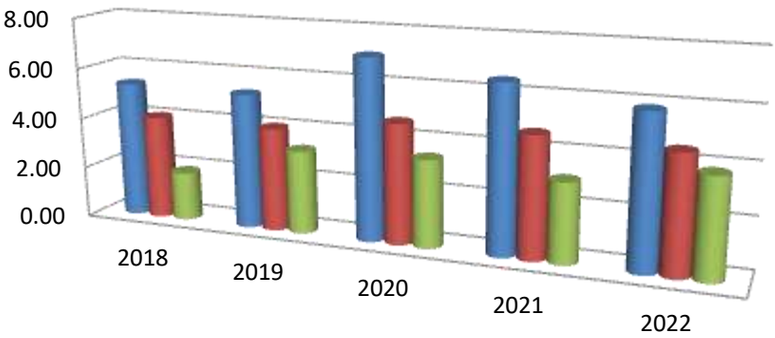
Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2023

3.1.2.5 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Capaian indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pesisir Barat mengalami kinerja perbaikan dalam 5 (lima) tahun terakhir. Hal ini berkaca dari persentase pada tahun 2018 dengan nilai 1.90%. Namun demikian, pada tahun 2019 dan 2020 mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2019 TPT Kabupaten Pesisir Barat berada pada 3,25% dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 3.41%. Capaian kinerja indikator TPT pada tahun 2021, kembali mengalami perbaikan menjadi 3,08%. Senada dengan terkoreksinya angka kemiskinan daerah. faktor utama efek domino dari Pandemi Covid-19 yang mempengaruhi roda perekonomian daerah khususnya akibat pembatasan orang dan barang dan jasa yang beredar membuat beberapa jenis pekerjaan/usaha mengalami kemunduran yang berakibat pengurangan jumlah tenaga kerja. Capaian pada tahun 2022 adalah sebesar 3.73% atau mengalami kenaikan 0,65%.

Selanjutnya untuk proyeksi pada tahun 2023 nilai TPT akan berada pada angka 2,80-3,20% dan untuk tahun 2023 mendatang diproyeksikan dapat turun mencapai nilai 2,60%. Proyeksi ini melihat pada kondisi dalam 5 (lima) tahun perkembangan penurunan TPT yang berada pada kisaran 0,10-0,30%. Diharapkan pada tahun-tahun mendatang Kabupaten Pesisir Barat dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menciptakan banyak lapangan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakatnya sehingga jumlah pengangguran terbuka dapat terus ditekan dan diminimalisir.

Gambar 3.12 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022

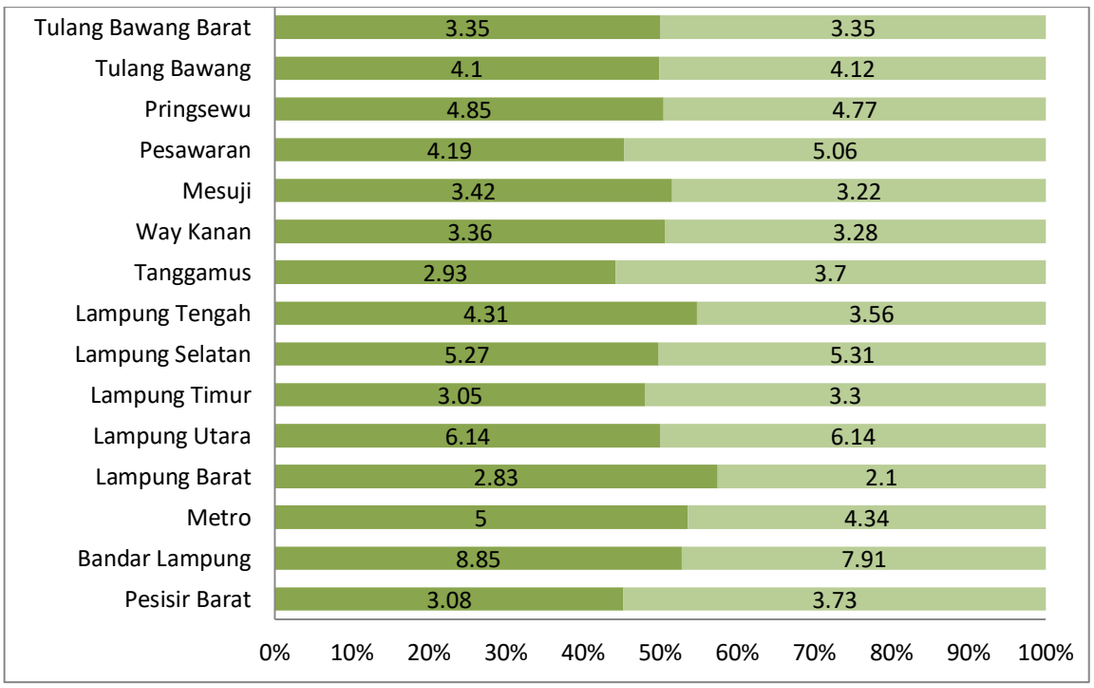


	2018	2019	2020	2021	2022
Nasional	5.34	5.28	7.07	6.49	5.86
Lampung	4.06	4.03	4.67	4.69	4.52
Pesisir Barat	1.90	3.25	3.41	3.08	3.84

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2023

Capaian dari TPT Kabupaten Pesisir Barat senilai 3,73% berada lebih rendah atau lebih baik dari Provinsi Lampung dengan nilai 4,52%. Capaian 3,73% dan 4,52% tersebut juga lebih baik dibandingkan dengan capaian nasional yang berada pada angka 5,86%. Sementara itu, untuk level Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung nilai Kabupaten Pesisir Barat berada pada urutan ke-7. Dengan Kabupaten Lampung Barat sebagai daerah terbaik dengan nilai 2.10% serta Kota Bandar Lampung dengan nilai TPT tertinggi senilai 7,91%.

Gambar 3.13 TPT Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung Tahun 2021-2022



Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2023

3.1.3 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah

Sebagai bagian dari salah satu mata rantai perekonomian global, nasional dan regional maka tantangan dan prospek perekonomian Kabupaten Pesisir Barat akan sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian daerah, kabupaten/kota tetangga, Provinsi Lampung, nasional dan juga dunia.

3.1.3.1 Tantangan Perekonomian Nasional

Pada tahun 2024 mendatang, kondisi ekonomi dunia ke depan diperkirakan masih belum kondusif normal sebagaimana kondisi sebelum pandemi Covid-19, Pertumbuhan ekonomi global 2022 dan 2023 diproyeksikan tumbuh terbatas, setelah mengalami koreksi di tahun 2020 dan 2021. Beberapa lembaga internasional merevisi ke bawah pertumbuhan ekonomi global dan nasional tahun 2022 ini sejalan dengan perkembangan perekonomian terkini. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi diperkirakan kembali meningkat di tahun 2023 setelah mengalami perbaikan pada tahun 2021 dan 2022. Inflasi di negara-negara berkembang diperkirakan akan meningkat namun dengan perhitungan batas-batas yang moderat. Selain itu inflasi global yang berdampak pada naiknya suku bunga bank sentral di beberapa negara berpotensi menghambat ekonomi negara-negara berkembang untuk tumbuh. Inflasi di Amerika Serikat sebesar 7,5% bisa mendorong kenaikan suku bunga dan pengetatan likuiditas. Begitu pula negara-negara lain seperti Argentina, Brasil, Rusia, Turki, hingga Meksiko yang mengalami inflasi. Kenaikan inflasi yang tinggi tentu bisa mengancam pemulihan ekonomi karena daya beli masyarakat tergerus.

Perekonomian global masih dihadapkan pada berbagai ketidakpastian. Pada tahun 2022 dampak dari konflik perang antara Rusia dengan Ukraina yang berkepanjangan dan melibatkan beberapa negara lainnya akan mempengaruhi investasi seiring dengan ketatnya likuiditas global. Sementara itu, harga komoditas yang naik diperkirakan akan tetap mendorong pertumbuhan tinggi pada sektor ekspor dan pendapatan negara meskipun terdapat resiko tekanan inflasi yang semakin tinggi di beberapa negara. Tantangan dunia semakin diperberat dengan adanya konflik antara beberapa negara terkait dengan batas wilayah dan politik dalam negeri yang sedikit banyak membayangi gerak langkah geopolitik dan ekonomi dunia.

Kondisi perekonomian global diperkirakan relatif baik pada tahun 2023. Meskipun pertumbuhannya lebih lambat dibandingkan tahun sebelum pandemi Covid-19. Tantangan pada tahun 2022 dan tahun 2023 antara lain adalah kenaikan harga pangan dan energi yang lebih tinggi, potensi kenaikan suku bunga, ancaman varian Covid-19 yang baru, gangguan rantai pasokan, bencana alam akibat perubahan iklim, dan meningkatnya ketegangan geopolitik. Di 2023 dan 2024, pandemi sudah masuk ke periode endemi. Ini akan menjadi salah satu hal yang diharapkan mengurangi beban dan tekanan terhadap masyarakat dan perekonomian. Guna mengatasi persoalan itu, negara-negara maju akhirnya memperketat kebijakan moneter baik dari sisi likuiditas maupun suku bunga yang

kemudian menimbulkan potensi volatilitas arus modal dan juga nilai tukar serta tekanan pada sektor keuangan.

Perekonomian Indonesia berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku triwulan I-2023 mencapai Rp5.071,7 triliun dan atas dasar harga konstan Rp2.961,2 triliun. Ekonomi Indonesia triwulan I-2023 terhadap triwulan I-2022 tumbuh sebesar 5,03 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha transportasi dan Pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 15,93 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 11,68 persen.

Ekonomi Indonesia triwulan I-2023 terhadap triwulan sebelumnya terkontraksi sebesar 0,92 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi pada Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 14,56 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 45,38 persen.

Kelompok provinsi di Pulau Jawa pada triwulan I-2023 mencatat dominasi struktur ekonomi Indonesia secara spasial dengan peranan sebesar 57,17 persen dengan kinerja ekonomi yang mengalami perlambatan pertumbuhan sebesar 4,96 persen dibanding triwulan I-2022 (y-on-y).

Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I-2023 Terhadap Triwulan I-2022 (y-on-y) Ekonomi Indonesia triwulan I-2023 terhadap triwulan I-2022 (y-on-y) tumbuh sebesar 5,03 persen. Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha. Lapangan usaha yang tumbuh signifikan adalah Transportasi dan Pergudangan sebesar 15,93 persen, diikuti Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 11,55 persen, Jasa lainnya sebesar 8,90 persen, Informasi dan Komunikasi sebesar 7,19 persen, serta Jasa Perusahaan sebesar 6,37 persen. Sementara itu,Industri Pengolahan yang memiliki peran dominan tumbuh sebesar 4,43 persen.

Struktur PDB Indonesia menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada triwulan I-2023 tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian Indonesia masih didominasi oleh Industri Pengolahan sebesar 18,57 persen; diikuti oleh Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 12,95 persen; Pertambangan dan Penggalian sebesar 11,85 persen; Pertanian, Kehutanan, dan perikanan sebesar 11,77 persen; serta Konstruksi sebesar 9,88 persen. Peranan kelima lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Indonesia mencapai 65,02 persen.

Provinsi-provinsi di Pulau Jawa pada triwulan I-2023 mencatat dominasi struktur ekonomi Indonesia secara spasial dengan peranan sebesar 57,17 persen terhadap PDB, diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 21,82 persen, Pulau Kalimantan sebesar 9,00 persen, Pulau Sulawesi sebesar 6,87 persen, Pulau Bali dan Nusa Tenggara sebesar 2,68 persen, serta Pulau Maluku dan Papua sebesar 2,46 persen.

Sementara itu dengan dihapusnya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada 30 Desember 2022, pertumbuhan ekonomi di sebagian besar provinsi menunjukkan penguatan. Pada triwulan I-2023, penguatan pertumbuhan (y-on-y) tercatat pada kelompok provinsi di Pulau Sulawesi sebesar 7,00 persen, disusul Pulau Kalimantan sebesar 5,79 persen, Pulau Sumatera sebesar 4,79 persen, serta Pulau Bali dan Nusa Tenggara sebesar 4,74 persen. Kelompok provinsi di Pulau Jawa serta Pulau Maluku dan Papua mengalami perlambatan pertumbuhan masing-masing sebesar 4,96 persen dan 1,95 persen.

Disisi internal, tantangan terhadap permasalahan ekonomi/keterbatasan fiskal daerah yang masih terus berlanjut setiap tahun adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan ekspor, dan mengurangi kemiskinan, serta mempersempit celah kesenjangan. Beberapa tantangan yang diperkirakan akan dihadapi oleh Pemerintah Pusat untuk tahun mendatang adalah sebagai berikut:

a. Pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah persoalan ketersediaan infrastruktur yang belum cukup memadai. Masih terbatasnya daya dukung infrastruktur ini merupakan penghambat utama bagi investasi dan menyebabkan inefisiensi perekonomian karena tingginya biaya logistik. Selain itu, ketimpangan yang masih terjadi antar wilayah tidak terlepas dari faktor dukungan ketersediaan infrastruktur yang masih belum seimbang. Pada gilirannya ketimpangan ini menyebabkan perekonomian nasional terkonsentrasi pada daerah-daerah tertentu.

b. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat, pada saat penanganan Pandemi Covid-19 terlebih jelas kondisi sarana dan prasarana Kesehatan di Indonesia belum merata dan terbatas. Hal ini tentu saja merupakan pekerjaan rumah bagi Pemerintah Pusat dan juga Pemerintah Daerah. Bagaimana sarana dan prasarana kesehatan harus mampu menjangkau seluruh pelosok daerah dan murah bahkan gratis. Penyediaan SDM Kesehatan juga masih perlu ditingkatkan, sehingga memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan.

c. Ketahanan pangan adalah salah satu program utama pemerintah. Saat ini, ketahanan pangan Indonesia relatif masih rendah, terutama dari sisi kualitas daya beli masyarakat. Lebih lanjut, stabilisasi harga pangan domestik perlu dipertahankan; terutama beras, daging, bawang merah, cabai, dan telur sangat berpengaruh terhadap tingkat inflasi yang berasal dari bahan makanan dan tingkat inflasi secara umum. Dari sisi produksi, jumlah dan kapasitas produksi pangan semakin terbatas, terutama terkendala oleh keterbatasan input faktor produksi, diantaranya terkait dengan berkurangnya lahan pertanian akibat alih fungsi lahan yang tidak diimbangi dengan peningkatan produktivitas pertanian dan teknologi.

d. Ketahanan Bencana, Indonesia yang hampir sebagian besar daerahnya berada pada kawasan rawan bencana perlu meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana mitigasi bencana, baik untuk tataran bencana alam dan juga

bencana non-alam. Pembangunan berkelanjutan yang menerapkan kajian lingkungan hidup strategis sudah wajib untuk diterapkan dalam setiap pembangunan infrastruktur daerah, hal ini juga perlu didukung dengan penerapan Peraturan tentang Penataan Ruang.

e. Ekspor Indonesia masih mengandalkan komoditas SDA, tantangan terhadap kecenderungan menurunya harga komoditas dunia pada periode terakhir perlu disikapi dengan reorientasi pasar ekspor khususnya mengurangi ketergantungan terhadap komoditas, percepatan hilirisasi industri dan pengembangan pasar negara tujuan ekspor. Liberalisasi Ekonomi, menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) pemerintah perlu meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia dan berbenah agar mampu menarik investasi asing.

3.1.3.2 Prospek Perekonomian Nasional

IMF memproyeksikan ekonomi Indonesia sebagai salah satu yang paling solid di tengah perlambatan global. Dalam laporan World Economic Outlook edisi April 2023 yang dirilis Selasa, 11 April 2023, IMF merevisi ke atas pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk tahun 2023 dari 4,8% menjadi 5,0% (naik 0,2 pp), dan outlook untuk tahun 2024 cukup sehat di tingkat 5,1%. Kenaikan proyeksi pertumbuhan ekonomi oleh IMF ini menunjukkan bahwa Indonesia masih menjadi salah satu bright spot di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian.

Sejalan dengan proyeksi IMF, perekonomian Indonesia terus menunjukkan resiliensi dan penguatan. Sampai dengan Maret 2023, PMI Manufaktur Indonesia konsisten berada di level ekspansif selama 19 bulan berturut-turut, di saat PMI Manufaktur global masih di zona kontraktif. Di sisi konsumsi, indeks penjualan ritel dan keyakinan konsumen masih tinggi, dengan inflasi yang relatif moderat di tingkat 5,0% (yoy). Posisi eksternal Indonesia juga tetap sehat, didukung neraca perdagangan yang membukukan surplus dalam 35 bulan berturut-turut. Sejalan dengan perputaran roda ekonomi yang positif, penerimaan negara tumbuh baik dibarengi dengan belanja negara yang lebih berkualitas. Pemerintah terus berupaya menjaga momentum pemulihan dan stabilitas perekonomian nasional. Dengan kontribusi permintaan domestik yang besar, berbagai upaya untuk mengendalikan inflasi agar tetap berada pada level moderat menjadi sangat krusial untuk terus menjaga momentum pemulihan ekonomi dan daya beli masyarakat.

Sementara itu, IMF memperkirakan perekonomian global melambat dari 3,4% pada tahun 2022 menjadi 2,8% pada tahun 2023 (turun 0,1 poin persentase/pp dibanding proyeksi Januari), kemudian membaik ke level 3,0% di 2024 (turun 0,1 pp). Momentum penguatan pemulihan yang sempat terjadi di awal tahun, kini meredup seiring terjadinya gejolak sektor keuangan di Amerika Serikat dan Eropa serta tekanan inflasi yang persisten tinggi. Proyeksi inflasi global 2023-2024 naik 0,4 pp dan 0,6 pp menjadi 7,0% dan 4,9%.

Proyeksi pertumbuhan ekonomi untuk beberapa negara maju dan berkembang utama secara umum menunjukkan perlambatan di tahun 2023 dan kembali membaik di tahun 2024. Negara-negara maju seperti Amerika Serikat diproyeksi tumbuh 1,6% (2023) dan 1,1% (2024), sedangkan Eropa diproyeksikan tumbuh 0,8% (2023) dan 1,4% (2024). Kegagalan sistem perbankan AS dan Eropa menambah ketidakpastian terhadap outlook kedua kawasan yang sudah mendapat tekanan berat dari inflasi dan pengetatan moneter yang agresif. Sementara itu, India diproyeksikan tumbuh 5,9% (2023) dan 6,3% (2024), serta Tiongkok diproyeksikan tumbuh 5,2% (2023) dan 4,5% (2024). Pembukaan kembali Tiongkok memberi daya dorong pemulihan ekonomi domestiknya di tahun 2023, tetapi tekanan struktural termasuk krisis sektor properti masih membayangi prospek Tiongkok di tahun-tahun berikutnya.

Ke depan, IMF melihat berbagai risiko perekonomian global masih dominan dengan potensi hard landing jika risiko semakin ekskalatif. Risiko utama berasal dari tekanan sektor keuangan, tekanan utang, ekskalasi perang di Ukraina yang dapat memicu kenaikan harga komoditas, tingkat inflasi inti yang persisten tinggi, serta fragmentasi geoekonomi. Beberapa rekomendasi kebijakan dari IMF untuk negara-negara dalam menavigasi perekonomian global yang semakin menantang antara lain: (1) Kebijakan pengetatan moneter dapat berlanjut dengan tetap menjaga stabilitas keuangan; (2) Dukungan fiskal terus diprioritaskan untuk melindungi kelompok paling rentan dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal; (3) Pentingnya penguatan kebijakan struktural dan kerja sama multilateral demi mewujudkan perekonomian global yang lebih resilien.

Dalam menghadapi berbagai ketidakpastian, Pemerintah Indonesia memiliki komitmen yang tinggi untuk melanjutkan berbagai kebijakan yang pruden namun tetap suportif dalam penguatan pondasi ekonomi. Di tahun 2022, defisit fiskal Indonesia telah kembali ke level di bawah 3% terhadap PDB, satu tahun lebih cepat dibanding rencana awal, yang menunjukkan sikap kehati-hatian dan kredibilitas di tengah peningkatan risiko global. Meski demikian, APBN masih tetap memberi perhatian utama pada area-area vital seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan perlindungan sosial, akselerasi infrastruktur, peningkatan efektivitas desentralisasi fiskal, serta reformasi birokrasi. Ke depan, Pemerintah Indonesia akan terus menjalankan kebijakan yang antisipatif dalam menghadapi turbulensi perekonomian global dengan tetap mengawal rencana pembangunan jangka menengah-panjang antara lain melalui melalui reformasi struktural.

Berdasarkan pada penjabaran tentang tantangan dari perekonomian nasional yang telah disebutkan di atas, beberapa prospek perkembangan perekonomian nasional adalah sebagai berikut:

a. Pemerintah untuk tahun 2024 mendatang akan terus mendorong pemulihan kondisi ekonomi. Tentunya hal ini akan dibarengi dengan menggelontorkan berbagai paket kebijakan ekonomi yang dimulai pada, kesemuanya ditujukan untuk mempertahankan daya beli masyarakat, mendorong tumbuhnya investasi dan bergeraknya ekonomi riil;

b. Bauran kebijakan BI pada tahun 2024 akan terus disinergikan dan sebagai bagian dari arah kebijakan ekonomi nasional untuk mengakselerasi pemulihan sekaligus menjaga stabilitas perekonomian. Bauran kebijakan tersebut mencakup 5 instrumen kebijakan, yaitu:

   i) Kebijakan Moneter, Sejalan dengan risiko meningkatnya tekanan instabilitas pasar keuangan global dari normalisasi kebijakan moneter the Fed dan sejumlah negara *Advanced Economies* (AEs), kebijakan moneter BI pada tahun 2023-2024 akan lebih diarahkan untuk menjaga stabilitas (*pro-stability*), baik pencapaian sasaran inflasi dan stabilitas nilai tukar, maupun stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Normalisasi kebijakan moneter akan dilakukan secara sangat hati-hati dan terukur agar tidak mengganggu proses pemulihan ekonomi nasional.

   ii) Sementara itu, 4 instrumen kebijakan lainnya pada tahun 2023-2024 akan terus diarahkan untuk dan sebagai bagian dari upaya bersama untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional (*pro-growth*), yaitu:

      a) Kebijakan Makroprudensial: Kebijakan makroprudensial longgar akan tetap dilanjutkan dan bahkan diperluas untuk mendorong kredit dan pembiayaan perbankan pada sektor-sektor prioritas dan UMKM guna percepatan pemulihan ekonomi nasional, sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan dan mengembangkan ekonomi dan keuangan hijau.

      b) Kebijakan Sistem Pembayaran: Digitalisasi sistem pembayaran terus diperluas untuk mengakselerasi ekonomi dan keuangan digital nasional, antara lain melalui penguatan konsolidasi industri, pengembangan infrastruktur sistem pembayaran yang modern (QRIS, SNAP, BI FAST), termasuk perluasan QRIS dengan target 15 juta pengguna, kerja sama QRIS antarnegara, dan melanjutkan Elektronifikasi Transaksi Keuangan Pemerintah Daerah, bansos G2P 4.0, moda transportasi, serta digitalisasi UMKM dan pariwisata.

      c) Kebijakan Pengembangan Pasar Uang: Akselerasi pendalaman pasar uang dan pasar valas sesuai Blueprint Pendalaman Pasar Uang (BPPU) 2025 juga ditempuh untuk memperkuat efektivitas transmisi kebijakan, pembangunan infrastruktur pasar uang yang modern dan berstandar internasional, serta pengembangan instrumen pembiayaan termasuk pengembangan keuangan berkelanjutan.

      d) Kebijakan UMKM dan Ekonomi Keuangan Syariah: Program-program pengembangan ekonomi-keuangan inklusif pada UMKM dan ekonomi-keuangan syariah juga terus diperluas, termasuk dengan digitalisasi serta perluasan akses pasar domestik dan ekspor.

c. Berlanjutnya sejumlah rencana pembangunan infrastruktur dan besarnya pasar domestik akan menjadi faktor penting bagi meningkatnya aliran investasi di Indonesia. Investasi di sektor riil, infrastruktur dan sektor

pengolahan tidak hanya berguna bagi meningkatnya nilai tambah nasional tetapi juga penting untuk meningkatkan lapangan pekerjaan;

d. Komitmen, kebijakan dan regulasi yang responsif, koordinasi dan sinergi kelembagaan di tingkat pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, di sisi perencanaan pembangunan hingga implementasinya akan mendorong kepercayaan publik dan pelaku dunia usaha;

e. Dalam upaya mengatasi permasalahan kenaikan harga kebutuhan masyarakat, pemerintah mengupayakan distribusi belanja bantuan sosial bagi masyrakat yang terdampak seiring dengan peningkatan pendapatan Negara yang didorong oleh peningkatan beberapa harga komoditas;

f. Tahun 2024 sebagai tahun pelaksanaan pemilu dan pemilukada serentak menjadi tantangan tersendiri bagi pelaksanaan pembangunan, dimana penganggaran pemerintah diarahkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dimaksud. Dimana proses penganggaranya telah disusun sejak tahun 2023.

g. Pemerintah telah menetapkan target pertumbuhan ekonomi Tahun 2024 mencapai 5,3% hingga 5,7 %. Dengan mempertimbangankan Ekonomi global 2024 diprakirakan tumbuh lebih baik, didorong oleh perbaikan rantai pasok global dan inflasi yang mengalami normalisasi. Sasaran makro pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan meningkatkan Investasi dan Ekspor yang menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi sisi Permintaan melalui:

   i) Peningkatan Pertumbuhan Investasi (PMTB) 6,2% - 7,0%

   ii) Realisasi PMA dan PMDN Rp1450 T – Rp1650 T

   iii) Pertumbuhan Ekspor Non-Migas 4,5% - 6,8%

   Selanjutnya juga melalui Peningkatan Produktivitas UMKM, Pertanian, dan Industri Manufaktur sehingga mengungkit pertumbuhan ekonomi sisi Produksi:

   i) Pertumbuhan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 3,4% – 3,8%

   ii) Pertumbuhan Industri Manufaktur 5,4% - 5,8%

   iii) Share-Industri Manufaktur meningkat menjadi 19,5%-20,6%

h. Arah Kebijakan RKP Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

   i) Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;

   ii) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan;

   iii) Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;

   iv) Penguatan daya saing usaha;

v) Pembangunan rendah karbon dan transisi energi;

vi) Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas;

vii) Percepatan pembangunan Ibu kota Nusantara;

viii) Pelaksanaan Pemilu 2024.

i. Beberapa target ekonomi makro yang telah ditetapkan dalam RKP Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,3 – 5,7%;
2. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,0 – 5,7%;
3. Rasio Gini sebesar 0,374 – 0,377;
4. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,99 – 74,02;
5. Tingkat Kemiskinan sebesar 6,5 – 7,5 %;
6. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sebesar 27,27%;
7. Nilai Tukar Petani/NTP sebesar 105 - 108;
8. Nilai Tukar Nelayan/NTN sebesar 107 - 110;

3.1.3.3 Tantangan Perekonomian Provinsi Lampung

Trend positif pertumbuhan ekonomi Lampung sepanjang tahun 2022 tentunya akan menjadi momentum untuk mendorong keberlanjutan ekonomi daerah di tahun 2023 dan tahun 2024 mendatang. Keadaan tersebut turut pula didukung dengan optimisme perekonomian global dan nasional yang terus menuju perbaikan pasca Covid-19 di tahun 2020. Bank Indonesia (BI) memprakirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2024 akan mencapai 5,5-5,7% yang akan didorong oleh berlanjutnya perbaikan ekonomi global yang berdampak pada kinerja ekspor Indonesia yang tetap kuat, serta meningkatnya permintaan domestik dari kenaikan konsumsi dan investasi. Selain itu keberhasilan program vaksinasi, pengendalian atas pelonggaran sektor ekonomi dan aktifitas sosial, dan stimulus lanjutan kebijakan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di tahun 2022 menjadi modal untuk semakin bangkitnya pemulihan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 dan optimisme yang lebih baik di tahun 2023.

Kinerja perekonomian Provinsi Lampung pada triwulan IV 2022 meningkat. Peningkatan kinerja perekonomian Provinsi Lampung pada triwulan laporan didorong oleh peningkatan kinerja investasi, defisit neraca perdagangan yang lebih rendah dibandingkan triwulan yang sama di tahun sebelumnya, dan konsumsi rumah tangga (RT) yang tetap tumbuh positif. Perkembangan tersebut tercermin pada peningkatan kinerja Lapangan Usaha (LU) Pertanian, Kehutanan, dan

Perkikanan; LU Perdagangan Besar dan Eceran; dan LU Transportasi dan Pergudangan.

Dari sisi pengeluaran, peningkatan kinerja perekonomian Lampung pada triwulan laporan didorong oleh meningkatnya kinerja investasi serta kinerja Konsumsi RT yang terjaga. Dari sisi permintaan domestik, peningkatan kinerja perekonomian Lampung pada triwulan IV 2022 didorong oleh peningkatan kinerja investasi seiring dengan perbaikan kinerja investasi swasta. Konsumsi RT tetap tumbuh dengan kuat meski melambat, ditopang oleh akselerasi permintaan menjelang Hari Besar dan Keagamaan Nasional (HBKN) Nataru tahun 2022, yang disertai dengan peningkatan jumlah wisatawan dan Tingkat Penghunian Kamar (TPK) seiring dengan pelonggaran kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat. Adapun kinerja sektor eksternal termoderasi akibat melambatnya ekspor batu bara dan bungkil inti kelapa sawit.

Dari sisi Lapangan Usaha (LU), kinerja lapangan usaha yang memiliki keterkaitan dengan mobilitas masyarakat menjadi penopang utama akselerasi kinerja perekonomian Lampung pada triwulan IV 2022. Kinerja LU Perdagangan Besar dan Eceran tercatat meningkat jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, didorong oleh kenaikan penjualan kendaraan motor. Selain itu, kinerja LU Transportasi dan Pergudangan tercatat meningkat jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya seiring dengan peningkatan jumlah penumpang penyebarang Bakauheni – Merak dan sebaliknya. Dari sisi LU Primer, kinerja LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tercatat tumbuh 6,16% (yoy), di mana pertumbuhan tersebut merupakan yang tertinggi sejak triwulan II 2021 yang tumbuh 7,79% (yoy).

Perekonomian Lampung memerlukan tingkat pertumbuhan yang tinggi dan berkelanjutan, dengan ditopang oleh basis ekonomi yang tangguh. Derajat kesejahteraan masyarakat, kualitas sumber daya manusia, dan penyediaan infrastruktur yang handal serta perbaikan kualitas lingkungan harus terus ditingkatkan. Di samping itu, peningkatan kualitas layanan publik dan layanan birokrasi tetap perlu terus dilakukan, yang diikuti dengan pengelolaan alokasi fiskal pembangunan secara lebih disiplin dan produktif. Untuk menjawab tantangan ke depan, dibutuhkan sinergi, inovasi, penguasaan teknologi dan sikap antisipatif.

Beberapa tantangan yang kemungkinan dihadapi oleh Provinsi Lampung antara lain adalah sebagai berikut:

a. Dalam rangka pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi yang tinggi, permasalahan terbatasnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar seperti jalan maupun energi listrik menjadi penghambat utama bagi tumbuhnya investasi. Masih banyaknya kerusakan jalan dan minimnya ketersediaan sumber energi listrik menyebabkan inefisiensi perekonomian karena tingginya biaya logistik dan operasional. Lebih lanjut, ketidakseimbangan tersedianya infrastruktur antar wilayah di Lampung menyebabkan perekonomian daerah hanya berkembang pada wilayah tertentu;

b. Daya saing SDM Lampung tergolong rendah. Kualitas penduduk Lampung yang diukur berdasar indikator IPM telah menunjukkan perbaikan dari tahun ke tahun. Namun, bila dibanding dengan daerah lain (ditingkat regional Sumatera maupun pada lingkup nasional) tampak bahwa capaian pembangunan SDM di Lampung masih cukup tertinggal;

c. Ketahanan pangan merupakan isu strategis pembangunan yang terkait dengan pembangunan sektor pertanian dan menjadi perhatian pemerintah. Data statistik ketenagakerjaan menunjukkan bahwa hampir separuh dari penduduk yang bekerja di Provinsi Lampung bekerja pada lapangan usaha pertanian. Namun, tingkat pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian pada lima tahun terakhir menggambarkan kecenderungan tingkat pertumbuhan yang menurun. Terdapat banyak aspek yang perlu pembenahan, baik disisi SDM pelaku pertanian, infrastruktur pertanian, intensifikasi dan ekstensifikasi lahan, pemanfaatan teknologi, pengembangan pasar; memerlukan dukungan lintas bidang secara berkelanjutan. Lebih lanjut, stabilisasi harga produk pangan perlu terus dikawal mengingat bahwa tingkat harga pangan sangat terkait dengan tingkat inflasi (*volatile food*) dan stabilitas perekonomian secara umum. Kenaikan harga beras, kedelai, daging, bawang merah, cabai, dan telur dapat menjadi faktor menurunnya tingkat konsumsi dan gizi masyarakat terutama penduduk berpenghasilan rendah;

d. Hingga tahun terakhir pengamatan data statitik, tingkat pengangguran terbuka dan persentase penduduk miskin di Lampung masih di atas angka rata-rata nasional. Pengangguran berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kemiskinan, kriminalitas dan masalah-masalah sosial lainnya. Terbukanya lapangan pekerjaan merupakan indikator penting tingkat kesejahteraan masyarakat dan sekaligus menjadi indikator keberhasilan penyelenggaraan perekonomian dalam mengurangi angka kemiskinan yang ada;

e. Kecenderungan menurunnya ekspor Lampung pada beberapa periode tahun terakhir memerlukan upaya-upaya menuju reorientasi produk ekspor khususnya mengurangi ketergantungan terhadap komoditas SDA, peningkatan daya saing dan nilai tambah produk, dan pengembangan pasar negara tujuan ekspor;

f. Ketergantungan daerah terhadap pusat masih tinggi karena belum optimalnya penerimaan dari PAD. Sampai saat ini potensi pendapatan asli daerah masih menitik beratkan pada perolehan pajak dan retibusi daerah. Untuk membangun kemandirian fiskal daerah (yang diindikasikan dengan indikator rasio pajak) dalam membiayai anggaran pengeluaran belanja daerah yang ditujukan untuk mendorong pembangunan daerah masih membutuh waktu. Sampai saat ini ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat melalui dana perimbangan masih cukup besar. Meskipun terbatas, pemerintah daerah terus melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak untuk mendorong kemandirian fiskal. Ditengah kondisi

ekonomi yang masih mengalami tekanan, target-target penerimaan daerah akan diproyeksikan secara lebih realistis;

g. Lampung memiliki objek wisata yang telah cukup dikenal oleh wisatawan domestik maupun mancanegara. Jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara pada periode empat tahun terakhir menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Agar tak kehilangan momentum, strategi dan fokus pengembangan pariwisata daerah terus dilanjutkan dengan memperbaiki infrastruktur (sarana dan prasarana) disekitar lokasi objek wisata, serta mendorong tumbuhnya investasi dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal dan daerah, ditengah kelesuan ekonomi nasional dan global yang sedang berlangsung.

h. Dalam rangka menghadapi globalisasi ekonomi masyarakat ekonomi ASEAN (MEA), pemerintah daerah secara konsisten perlu mempersiapkan dan meningkatkan kualitas SDM (pendidikan dan kesehatan) yang akan memasuki pasar tenaga kerja agar dapat bersaing dan menjadi pelaku ekonomi di negeri sendiri. Untuk mampu menarik investasi, pembenahan SDM tersebut perlu disertai pula dengan pembenahan berbagai faktor pendukung seperti infrastruktur, penyediaan lahan dan perbaikan iklim investasi yang kondusif;

i. Dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, maka pemanfaatan sumber daya alam yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sedapat mungkin menghindari konflik sosial, mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup, serta mengurangi kesenjangan/ketimpangan. Selain upaya-upaya penegakan hukum, perencanaan pembangunan perlu disosialisasikan kepada masyarakat secara lebih dini dan intensif, sehingga pelaksanaan dan hasil-hasil pembangunan merupakan tanggung jawab bersama dari seluruh pemangku kepentingan.

3.1.3.4 Prospek Perekonomian Provinsi Lampung

Ditengah kondisi perekonomian global yang tidak menentu, ketahanan sektor rumah tangga sebagai penopang perekonomian Lampung relatif terjaga seiring pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang tetap tinggi didukung oleh keyakinan konsumen. Sejalan dengan hal tersebut, kinerja korporasi di Provinsi Lampung juga cukup stabil, tercermin dari pertumbuhan kegiatan usaha di beberapa sektor usaha meski ketahanan korporasi sedikit menurun seiring dengan peningkatan rasio kredit bermasalah dan diikuti dengan turunnya tingkat profitabilitas. Ke depan, optimisme masyarakat terhadap prospek ekonomi enam bulan mendatang diperkirakan masih tetap tinggi didukung keyakinan masyarakat akan peningkatan penghasilan dan ketersediaan lapangan kerja.

Kinerja perekonomian Lampung dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan perkuatan momentum pertumbuhan dengan stabilitas yang terus terjaga di tengah gejolak ketidakpastian perekonomian global. Disisi lain, perekonomian Lampung masih memiliki ketergantungan fiskal yang cukup tinggi

dan belum memiliki sektor yang signifikan dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung. Namun, Pemerintah Provinsi Lampung tetap berupaya dan optimis untuk mewujudkan peningkatan pertumbuhan yang lebih berkualitas dan inklusif agar peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat lebih adil dan merata.

Selain terus berusaha mendongkrak pertumbuhan ekonomi, di saat yang sama, Pemerintah Provinsi Lampung juga fokus untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan kesejahteraan masyarakat, sehingga bisa menekan angka pengangguran dan kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan. Kualitas pembangunan manusia akan berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap tingkat pengangguran dan kemiskinan, permasalahan sosial, hingga masalah produktifitas ekonomi daerah.

Ekonomi Provinsi Lampung triwulan I-2023 dibanding triwulan IV-2022 mengalami pertumbuhan sebesar 0,79 persen (q-to-q), menguat dibanding capaian triwulan sebelumnya yang mengalami kontraksi sebesar 5,34 persen. Pertumbuhan ekonomi terutama disebabkan oleh kenaikan produksi Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang merupakan sektor dominan penopang perekonomian Provinsi Lampung. Tercatat pertumbuhannya sebesar 8,13 persen. Selanjutnya, lapangan usaha yang juga mengalami pertumbuhan cukup pesat adalah Jasa Keuangan yang tumbuh sebesar 6,09 persen.

Sementara itu beberapa lapangan usaha mengalami kontraksi pertumbuhan. Kontraksi terdalam terjadi pada lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 12,54 persen, serta lapangan usaha Real Estate mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 9,15 persen.

Permintaan domestik diprakirakan semakin kuat Perkembangan ini didukung oleh Indeks Ekspektasi Konsumen terhadap kondisi kegiatan usaha, penghasilan, dan ketersediaan lapangan kerja untuk tahun 2023 meningkat sejalan dengan kenaikan UMP Lampung sebesar 7 90 dan pencabutan PPKM Hal ini juga mendorong kenaikan ekspektasi pelaku usaha liaison BI Lampung terhadap peningkatan penjualan, tingkat upah, dan harga jual. Selain itu, pagu belanja Pemerintah Pusat dan Daerah untuk peningkatan kesejahteraan pegawai serta investasi mengalami peningkatan pada tahun 2023 didukung dengan prospek pendapatan yang lebih baik Investasi swasta dan pembangunan PSN diprakirakan juga mengalami perbaikan. Di sisi lain, kinerja sektor eksternal diprakirakan termoderasi akibat normalisasi harga komoditas ekspor Lampung, perbaikan hub Geopolitik Tiongkok Australia, serta melambatnya global demand.

Inflasi gabungan kota di Provinsi Lampung pada tahun 2024 diperkirakan kembali ke sasaran inflasi 3±1% pada semester II 2024. Laju inflasi gabungan kota di Provinsi Lampung pada tahun 2024 diprakirakan lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, didukung oleh harga bahan pangan yang lebih terkendali seiring dengan sinergi Pusat dan Daerah melalui TPIP – TPID yang semakin intensif. Selain itu, imported inflation untuk harga komoditas pangan dan

energi diprakirakan mengalami penurunan seiring dengan melambatnya permintaan global dan berlanjutnya pemulihan produksi pangan di sisi hulu negara sentra. Adapun beberap hal yang berisiko menjadi faktor pendorong tekanan inflasi di tahun 2024 di antaranya bersumber dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau khususnya pada periode tanam komoditas hortikultura, libur hari besar dan kegamaan nasional, serta menjelang akhir tahun. Adapun kenaikan pendapatan dan prospek meningkatnya aktivitas konsumsi pada tahun 2024 berisiko mendorong realisasi kenaikan harga barang dan jasa secara umum oleh pelaku usaha.

Beberapa hal yang dapat digambarkan sebagai prospek dalam peningkatan perekonomian Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:

a. Pengeluaran konsumsi rumah tangga masih mendominasi pertumbuhan ekonomi di Lampung. Hal ini didorong oleh masih adanya pendapatan siap pakai (*disposable income*) yang bersumber dari sektor keuangan sebagaimana tercermin dari meningkatnya dana pihak ketiga yang dihimpun oleh perbankan dan terjaganya inflasi pada tingkat yang rendah;

b. Pelaksanaan pemilu dan pemilukada serentak diasumsikan akan meningkatkan konsumsi masyarakat dan juga pemerintah daerah dinilai akan mempengaruhi produksi dan konsumsi terhadap barang/jasa;

c. Kegiatan investasi yang diperkirakan masih akan tumbuh cukup tinggi di 2023 dan berpotensi tumbuh tinggi di tahun 2024. Beroperasinya Bandar Udara Radin Inten II dan Bandar Udara M. Taufik Kiemas, Sebaliknya, investasi non-bangunan dalam bentuk mesin-mesin diperkirakan belum mengalami peningkatan yang berarti sejalan dengan kondisi dunia usaha yang saat ini sedang fokus pada konsolidasi internal menghadapi lesunya perkonomian. Hal ini terkonfirmasi dari hasil liaison yang dilakukan oleh Kantor Perwakilan BI Provinsi Lampung di mana sebagian besar pelaku usaha belum melakukan ekspansi usaha dan hanya melakukan investasi dalam bentuk pemeliharaan mesin rutin. Langkah Pemerintah Provinsi Lampung untuk mendorong penerapan program pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) diharapkan dapat mendorong minat dunia usaha untuk memperluas usahanya di Provinsi Lampung;

d. Dari sisi ekspor, masih relatif lambatnya pemulihan ekonomi di negara tujuan utama ekspor Lampung seperti Amerika Serikat, Tiongkok, India dan Hongkong berdampak terhadap masih lemahnya permintaan dunia sehingga pertumbuhan volume eskpor di Provinsi Lampung belum membaik secara signifikan. Namun demikian, mulai stabilnya beberapa harga komoditas ekspor khususnya komoditas perkebunan yang merupakan komoditas unggulan Lampung memberikan prospek perbaikan kinerja ekspor ke depan. Sementara itu, kinerja impor diperkirakan tumbuh lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya sejalan dengan percepatan proyek infrastruktur dan pengembangan kawasan industri di Provinsi Lampung;

e. Meningkatnya kinerja impor juga didorong oleh masih tumbuhnya konsumsi rumah tangga dan kinerja di sektor industri pengolahan, hal ini dapat dilihat dari jenis impor non migas antara lain binatang hidup, gula dan kembang gula serta pupuk;

f. Secara sektoral, penggerak ekonomi Lampung masih bertumpu pada 3 (tiga) sektor utama yakni sektor Pertanian, sektor Industri Pengolahan, serta sektor Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Namun demikian, sektor pertanian diperkirakan akan tumbuh lebih lambat dibandingkan tahun sebelumnya. Komoditas unggulan Lampung seperti singkong (share terhadap sektor pertanian mencapai sekitar 40%) mengalami penurunan harga yang cukup tajam mencapai sekitar 62% dari tahun sebelumnya berdampak signifikan terhadap penurunan daya beli petani/pengusaha singkong. Berdasarkan hal tersebut, sektor Pertanian di tahun 2019 diperkirakan tumbuh melambat. Namun demikian, sejalan dengan upaya Pemerintah Provinsi Lampung untuk menstabilkan harga singkong dan pangan nasional maka pada tahun 2019, meski terbatas sektor Pertanian diperkirakan akan tetap tumbuh;

g. Sektor Industri Pengolahan akan tetap tumbuh cukup tinggi sejalan dengan masih kuatnya permintaan domestik terhadap subsektor makanan dan minuman yang menjadi basis industri pengolahan di Lampung. Jika dibandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya, sektor industri penolahan cenderung sedikit melambat;

h. Menghadapi risiko inflasi pada tahun 2024, strategi yang dilakukan dalam rangka menjaga laju inflasi agar berada dalam range 3,0 ±1% yaitu memenuhi 4K (ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi dan komunikasi yang efektif), antara lain sebagai berikut (i) Memperkuat ketersediaan database surplus defisit pangan masing-masing kabupaten/kota guna memastikan ketersediaan pasokan dan mengoptimalkan pemanfaatan informasi harga komoditas pangan yang ada di Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) sebagai referensi untuk merumuskan kebijakan stabilisasi harga (ii) Memperkuat koordinasi antara TPID, BULOG, dan Satgas Pangan dalam memastikan ketersediaan cadangan serta keterjangkauan harga di pasar, mengawasi kelancaran dan keamanan distribusi komoditas pangan dan BBM;

i. Tahun 2024 sebagai tahun pelaksanaan pemilu dan pemilukada serentak menjadi tantangan tersendiri bagi pelaksanaan pembangunan, dimana penganggaran pemerintah diarahkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dimaksud. Dimana proses penganggaranya telah disusun sejak tahun 2023 hingga tahun 2025 mendatang untuk tataran pemerintah provinsi/kabupaten/kota;

j. Target sasaran ekonomi makro Provinsi Lampung pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Target Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,0 – 5,5%;
2. Target Tingkat Kemiskinan 10,9 – 10,4%;
3. Target Tingkat Pengangguran Terbuka 4,0 – 3,8%;
4. Target PDRB Perkapita Rp.45 - 46 juta;
5. Target IPM 70,6 – 71,1;
6. Target Rasio Gini 0,293 - 0,314;
7. Target Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 7,29%;
8. Target Inflasi 3 ± 1%;
9. Nilai Tukar Petani 105-106.

3.1.3.5 Tantangan Perekonomian Kabupaten Pesisir Barat

Pertumbuhan ekonomi yang ada di Kabupaten Pesisir Barat tidak terlepas dari pertumbuhan ekonomi secara nasional dan regional. Pertumbuhan ekonomi secara nasional diantaranya dipengaruhi oleh arah kebijakan umum fiskal yang terdapat pada RKP tahun 2024 dan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2024, dalam hal ini diarahkan untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi, pembangunan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan tingkat pengggangguran dan kemiskinan, serta pembangunan yang berwawasan lingkungan yang bertujuan untuk menjaga kesinambungan *(sustainabilitas)* fiskal.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi secara nasional dipengaruhi pula oleh arah kebijakan umum belanja yang terdiri dari kebijakan umum belanja negara, kebijakan umum belanja pegawai, kebijakan belanja barang dan jasa, kebijakan belanja modal, kebijakan belanja subsidi, kebijakan bantuan sosial, dan kebijakan belanja transfer pada Tahun 2024.

Disatu sisi, perekonomian suatu daerah tidak dapat terlepas dari perekonomian regional, perekonomian nasional bahkan perekonomian global. Sementara itu di sisi lain terdapat berbagai faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti menyangkut kebijakan pemerintah pusat di sektor moneter fiskal maupun sektor riil. Selain itu, perekonomian daerah juga dipengaruhi perekonomian global seperti naik turunnya harga minyak dunia yang berpengaruh pada naiknya harga BBM (Bahan Bakar Minyak), harga-harga kebutuhan bahan pokok dan nilai tukar mata uang asing, serta pengaruh krisis keuangan global yang telah berdampak pada meningkatnya pemutusan hubungan kerja dan kelesuan pasar ekspor dan yang perlu terus dijaga adalah tingkat inflasi daerah.

Dampak yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19 juga menjadi tantangan pencapaian sasaran ekonomi tahun 2023-2024. Akibat pandemi Covid-19, sebagian dunia usaha telah bangkrut dan menutup permanen usahanya. Perusahaan yang bertahan mengalami tekanan dari sisi neraca keuangan. Konsumsi rumah tangga juga tertekan karena pendapatannya menurun secara signifikan, bahkan tidak sedikit yang kehilangan pekerjaan dan sumber pendapatan. Kelas menengah juga masih menahan konsumsi, seiring dengan tingkat keyakinan konsumen yang masih pada zona pesimis. Tanpa adanya upaya untuk mengembalikan kondisi dunia usaha dan rumah tangga kembali ke tingkat sebelum krisis, pemulihan ekonomi akan berjalan lambat. Tahun 2023-2024, usaha yang mampu bertahan adalah usaha yang dapat mengedepankan efisiensi dan efektivitas operasional.

Perekonomian Kabupaten Pesisir Barat pada tahun 2023-2024 diproyeksi masih akan menghadapi sejumlah tantangan-tantangan akibat dari pengaruh lingkungan perekonomian global dan regional. Tantangan-tantangan yang diperkirakan masih akan dihadapi adalah, antara lain:

a. Keterbatasan fiskal daerah yang lebih banyak bergantung dengan Dana Transfer diperkirakan akan sedikit banyak mempengaruhi percepatan pembangunan di daerah;

b. Pada tahun 2024 mendatang, tantangan perekonomian daerah dengan melakukan percepatan pembangunan infrastruktur yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dalam kaitanya dengan memperlancar proses produksi, distribusi dan konsumsi masyarakat;

c. Meningkatkan keberdayaan masyarakat dari sisi ekonomi dan sosial, bagaimana pemerintah daerah mampu memberikan stimulan bagi masyarakat, baik dari sisi bantuan uang, sembako, dan atau modal usaha UMKM. Penciptaan lapangan pekerjaan di sektor riil (baik untuk pekerjaan penggunaan dana desa) juga diharapkan mampu menjadi solusi bagi usaha mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial.

d. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dengan mengembangkan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi dominan tanpa melupakan dukungan dari sektor-sektor lainnya, yang bertumpu pada peran ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Pertumbuhan ekonomi dengan percepatan yang lebih tinggi, terjaganya stabilitas ekonomi makro. Dengan pembenahan yang sungguh-sungguh pada sektor riil, diharapkan akan dapat mendorong peningkatan investasi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dengan fokus utama untuk menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Dalam hal ini diperlukan strategi kebijakan yang tepat dengan menempatkan prioritas pengembangan pada sektor-sektor yang mempunyai efek pengganda tinggi dalam menciptakan kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;

e. Menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif merupakan tantangan yang cukup berat karena ini menyangkut beberapa peraturan baik tingkat pusat maupun daerah. Perbaikan iklim investasi perlu dilakukan pemerintah daerah dengan menyikapi atas perbaikan di bidang peraturan perundang-undangan di daerah, perbaikan pelayanan dan penyederhanaan birokrasi untuk proses investasi dan perizinannya melalui reformasi regulasi;

f. Menyediakan infrastruktur dan fasilitas pelayanan publik yang cukup dan berkualitas. Hal ini merupakan prasyarat agar dapat mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan. Ketersediaan infrastruktur yang tidak memadai akan menjadi kendala bagi masuknya investasi;

g. Meningkatkan partisipasi swasta dan seluruh *stakeholder* melalui kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta (*public-private partnership*). Tantangan ini menjadi cukup penting karena terbatasnya sumber daya pemerintah dalam pembiayaan pembangunan, terutama terkait dengan efisiensi pembiayaan investasi dan penyediaan infrastruktur yang bervariasi dan berkualitas;

h. Meningkatkan pelayanan dan penyediaan fasilitas ekonomi seperti pasar dan kawasan khusus PKL (pedagang kaki lima) secara memadai bagi pelaku ekonomi dan masyarakat luas untuk mendukung kegiatan bisnis di Kabupaten Pesisir Barat, disamping menciptakan lapangan kerja;

i. Mengembangkan program-program bagi perusahaan yang berskala mikro dengan menyediakan modal umpan *(seed capital)* melalui pendekatan pemberian pinjaman kelompok *(a group lending approach)* dalam rangka membangun modal sosial kolektif serta meningkatkan kepemilikan dan pembentukan modal lokal di Kabupaten Pesisir Barat;

j. Memfasilitasi pengembangan koperasi diberbagai bidang dan lokasi usaha di Kabupaten Pesisir Barat sebagai bentuk bisnis yang dimiliki dan dikelola bersama-sama oleh pekerja untuk meningkatkan kemampuan menciptakan kesempatan kerja dan pendapatan melalui sumber daya bersama; dan

k. Membangun promosi bersama *(joint marketing)* dalam memasarkan potensi daerah dengan melalui kerjasama pemerintah dengan pemerintah dan pemerintah dengan swasta serta masyarakat.

Tantangan yang diproyeksikan tersebut di atas seyogyanya adalah hal yang hampir sama dirasakan oleh daerah dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Namun demikian, melihat kondisi di lapangan berdasarkan pada kondisi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat yang saat ini masih dalam fokus penguatan kelembagaan maka tantangan-tantangan tersebut akan terasa lebih berat. Diharapkan pada tahun-tahun mendatang tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat tidak lagi bersifat teknis dari dalam daerah, namun lebih kepada kondisi eksternal.

3.1.3.6 Prospek Perekonomian Kabupaten Pesisir Barat

Prospek dan perkembangan kondisi perekonomian makro Kabupaten Pesisir Barat pada tahun 2024 diperkirakan tidak jauh berbeda dengan tahun 2020-2022 walaupun dengan beberapa catatan. Sejalan dengan kecenderungan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dan sebagai peranan dari sektor tersier seperti sektor listrik, gas dan air bersih, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, sektor jasa-jasa, serta sektor pertanian berpengaruh signifikan dalam perekonomian Kabupaten Pesisir Barat.

Perkembangan ekonomi daerah, bila dilihat dari PDRD untuk 2024 masih akan bergantung pada sektor pertanian, perikanan dan kehutanan sebagai sektor yang paling banyak memberikan kontribusi. Terlepas selama kurun waktu 5 tahun terakhir cenderung mengalami penurunan, namun tidak dapat dipungkiri bahwa sektor pertanian masih menjadi tulang punggung ekonomi daerah dengan capaian 45% dan penyumbang lapangan pekerjaan terluas di daerah. Harapan untuk peningkatan sektor Konstruksi untuk PDRB, dimana selama 5 tahun terakhir terus meningkat dan memberikan kontribusi hampir 8% dari total PDRB. Terlebih dengan kebijakan pembangunan infrastruktur daerah, harapannya sektor konstruksi dapat terus tumbuh positif.

Berikutnya, perkembangan pada sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang stabil naik dan memberikan kontribusi 15% dari total PDRB juga akan terus berkembang. Dimana dengan kenaikan jumlah penduduk dan juga kehadiran wisatawan dapat menjadi salah satu faktor pendorong kenaikan sektor ini berikut dengan sektor jasa.

Dalam konteks makro regional, dengan memperhatikan latar belakang kondisi ekonomi tahun-tahun sebelumnya maupun kondisi umum perekonomian nasional dan regional Lampung, diestimasikan perekonomian daerah Pesisir Barat masih mampu berkembang dan bertumbuh secara dinamis dalam kerangka pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Walaupun mungkin akan melambat dibandingkan tahun sebelumnya akibat lesunya pertumbuhan ekonomi secara global yang berimbas pada berbagai negara belahan dunia termasuk kawasan Asia. Kondisi ini memerlukan sikap hati-hati dan sedikit konservatif utamanya dalam mengatasi eksesnya pada sektor riil dan imbasnya pada kelompok-kelompok masyarakat yang rentan (keluarga miskin dan kelompok marjinal).

Tahun 2023 dan 2024, dimana jumlah penduduk miskin dan kondisi kemiskinan daerah masih harus dikelola dengan proposional dan profesional dalam kaitannya menjadikan masyarakat marjinal sebagai subjek pembangunan dengan pemberdayaan. Tujuan jangka panjangnya adalah dengan menurunnya angka kemiskinan juga akan menurunkan beban pemerintah daerah dalam penganggaran hibah dan bantuan sosial. Sehingga pendanaan dapat dialihkan pada sektor lainnya.

Agar proyeksi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesisir Barat pada tahun 2024 tidak jauh berbeda bahkan meningkat pada tahun 2022, maka perlu ditunjang dengan nilai investasi yang tinggi serta peningkatan angka PDRB dari sektor-sektor. Kondisi ekonomi global, selain berpengaruh terhadap ekonomi nasional dan regional juga akan berpengaruh terhadap kondisi perekonomian Kabupaten Pesisir Barat. Diperlukan strategi regulasi dengan ditunjang dengan nilai investasi yang tinggi serta peningkatan angka PDRB dari sektor-sektor unggulan.

Prospek perekonomian Kabupaten Pesisir Barat pada Tahun 2024 dipengaruhi antara lain:

a. Letak Kabupaten Pesisir Barat yang cukup strategis yang berada di perbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bengkulu memberikan peluang sebagai daerah penghubung sehingga bisa meningkatkan perekonomian dalam sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi serta sektor jasa-jasa lainnya;

b. Mulai menurunnya produktivitas pertanian dibarengi dengan kenaikan pada sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, serta sektor pertambangan dan penggalian serta administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib;

c. Mulai berkembangnya jumlah sektor industri, khususnya industri skala kecil dan menengah (IKM) dan industri kreatif yang langsung bersentuhan dengan masyarakat diharapkan dapat menjadi pendorong dalam menopang perekonomian Kabupaten Pesisir Barat dimasa yang akan datang;

d. Sebagai daerah penunjang, peranan sektor tersier seperti sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, sektor Jasa Keuangan dan Asuransidan Jasa Lainnya diharapakan dapat terus berkembang dan memberikan bpengaruh signifikan terhadap perekonomian Kabupaten Pesisir Barat;

e. Kebijakan dari Pemerintah untuk memberikan bantuan dan/atau jaring pengaman sosial dan ekonomi bagi masyarakat terdampak pandemic Covid-19 diharapkan dapat memberikan impact pada kondisi ekonomi masyarakat. Diharapkan daya beli masyarakat dapat meningkat, sehingga sector riil dapat kembali hidup. Kemudahan dalam pengajuan kredit bagi UMKM juga merupakan salah satu upaya yang diharapkan mampu memperbaikki sektor usaha.

f. Kebijakan dari Pemerintah untuk memberikan bantuan dan/atau jaring pengaman sosial dan ekonomi bagi masyarakat terdampak pandemic Covid-19 diharapkan dapat memberikan impact pada kondisi ekonomi masyarakat. Diharapkan daya beli masyarakat dapat meningkat, sehingga sector riil dapat kembali hidup. Kemudahan dalam pengajuan kredit bagi UMKM juga merupakan salah satu upaya yang diharapkan mampu memperbaikki sektor usaha.

g. Tahun 2024 sebagai tahun pelaksanaan pemilu dan pemilukada serentak menjadi tantangan tersendiri bagi pelaksanaan pembangunan, dimana penganggaran pemerintah diarahkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dimaksud. Dimana proses penganggaranya telah disusun sejak tahun 2023 hingga tahun 2025 mendatang untuk tataran pemerintah provinsi/kabupaten/kota.

h. Target ekonomi makro Kabupaten Pesisir Barat pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Target Pertumbuhan Ekonomi sebesar 3,6-4,1%;
2. Target Tingkat Kemiskinan sebesar 13,34%;
3. Target Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 2,60%;
4. Target PDRB Perkapita sebesar Rp.33,60-34.10 juta;
5. Target IPM sebesar 65,44;
6. Target Rasio Gini sebesar 0,30-0,29;
7. Target Nilai Tukar Petani sebesar 100.77;

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Sebagai pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah (Urusan Wajib, Urusan Pilihan, Urusan Fungsi Penunjang dan Urusan Fungsi Pendukung), daerah harus mampu mengelola keuangan daerah dengan optimal demi pemenuhan anggaran untuk pelaksanaan urusan pemerintahan tersebut di atas. Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian tidak terpisahkan dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Menurut UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), RKPD merupakan penjabaran dari RPJMN dan RPJMD, yang memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro, serta program/kegiatan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Selanjutnya dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dipertegas kembali bahwa RKPD yang disusun mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah dan Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Sementara, UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan bahwa penyusunan rancangan keuangan daerah (RAPBD) berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara dan daerah.

Dalam pengelolaan keuangan daerah tersebut, penyelenggara pemerintahan daerah memiliki kewajiban untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel; di mana alokasi pemanfaatan anggaran pembangunan harus berorientasi terhadap pelayanan kepada masyarakat; menjadi alat untuk memelihara dan mendorong perekonomian daerah; serta ditujukan untuk pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah yang selaras dengan pembangunan nasional. Dengan demikian, terdapat keterkaitan antara kebijakan sisi perencanaan dengan kebijakan pada sisi penganggaran, yang terintegrasi dan dikendalikan oleh sasaran dan tujuan yang akan dicapai.

Secara umum, pengelolaan keuangan daerah yang disusun dan mengacu pada ketentuan perundangan, antara lain UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri pada setiap tahun anggaran.

Untuk itu pada tahun 2023, sebagai tahun kedua pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026. Kebijakan keuangan tahun 2023 diarahkan untuk "MELANJUTKAN PEMULIHAN EKONOMI DAN MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA SERTA MEMANTAPKAN INFRASTRUKTUR DAERAH" dengan prioritas daerah sebagai berikut : 1) Pembangunan Sumber Daya Manusia, baik dari sisi kualitas dan kuantitas; 2) Pembangunan Ekonomi Daerah; 3) Pembangunan Infrastruktur dan Aksesbilitas Daerah; 4) Harmonisasi kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat; 5) Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik.

Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Pesisir Barat harus sesuai dengan prosedur, dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Barat dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang salah satunya diwujudkan dalam bentuk APBD.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah demi terlaksananya pelayanan publik akan berfungsi optimal, efektif dan efisien apabila penyelenggaran urusan pemerintahan didukung dengan instrumen-instrumen yang sudah dirumuskan dalam kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen-dokumen perencanaan yang disusun setiap tahun. Untuk melaksanakan instrumen-intrumen tersebut tentunya didukung dengan pendanaan/sumber-sumber penerimaan yang cukup berdasarkan peraturan perundang-undangan (*money follow priority*). Dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan guna mencapai tujuan serta mengenai sasaran yang yang diinginkan maka harus didukung dengan penganggaran untuk memenuhi

kebutuhan belanja pembangunan tersebut. Dalam rangka mendukung kebutuhan belanja pembangunan daerah tidak bisa terlepas dengan kapasitas fiskal (kemampuan keuangan daerah) yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah tersebut, karena kapasitas fiskal merupakan penopang utama dan sumber pembiayaan pembangunan daerah tersebut, meskipun sumber pembiayaan pembangunan bisa juga diperoleh dari sumber-sumber dana Non APBD, seperti dana hibah dari pusat maupun dari daerah lain, dana kemitraan dengan masyarakat maupun pihak ketiga, swadaya masyarakat, serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Perencanaan pembangunan daerah yang dinamis, yang telah diseimbangkan dengan prioritas pembangunan, sinkronisasi dan integrasi kebijakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi serta sesuai dengan realita di lapangan kemudian dituangkan dalam RKPD dimana sebelumnya telah melalui proses yang cukup panjang mulai dari Pemerintah Daerah menjaring aspirasi kegiatan dan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dengan cara melakukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang), evaluasi pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan tahun sebelumnya sampai dengan verifikasi dan penyelarasan kegiatan-kegiatan yang relevan dengan program, tujuan dan sasaran yang akan dicapainya.

Langkah selanjutnya setelah RKPD ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah, dokumen tersebut dipergunakan sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Dari kedua dokumen inilah Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Daerah (RAPBD) disusun melalui berbagai proses dan mekanisme sesuai aturan-aturan yang berlaku dengan melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk kemudian ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang disetujui oleh DPRD.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas guna mendukung upaya percepatan pertumbuhan ekonomi dan pemantapan stabilitas ekonomi daerah, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta pelayanan umum kepada masyarakat, maka kebijakan anggaran keuangan daerah dalam RKPD Tahun 2023 diarahkan untuk:

1. Memantapkan kondisi ketahanan fiskal daerah yang berkelanjutan dengan cara antara lain: (a) melanjutkan langkah-langkah konsolidasi fiskal dengan menjaga tingkat defisit anggaran yang terkendali dari aspek pembiayaan daerah; dan (b) peningkatan manajemen keuangan daerah yang lebih efektif dan efisien serta akuntabel;

2. Peningkatan kinerja pengelolaan belanja daerah agar lebih produktif dan fokus pada layanan dasar kepada masyarakat dan *mandatory spending* sehingga terjadi akselerasi pemerataan kualitas layanan publik dan kesejahteraan di daerah, dengan langkah-langkah:

a. Fokus Belanja Daerah: difokuskan untuk layanan dasar publik guna pencapaian SPM;

b. *Mandatory Spending*: disiplin pengalokasian belanja yang diwajibkan peraturan perundang-undangan seperti pendidikan dan kesehatan;

c. Pengendalian Belanja Pegawai: batasan belanja pegawai (maksimal 30% dari APBD tidak termasuk tunjangan guru yang berasal dari TKD) dengan masa transisi penyesuain porsi belanja pegawai dalam 5 tahun kedepan serta fleksibilitas dalam penyesuaian pasca transisi;

d. Penguatan Belanja Infrastruktur pada Pelayana Publik: minimal 40% dari APBD di luar transfer ke daerah bawahan dan desa, masa transisi penyesuaian porsi belanja infrastruktur dalam 5 tahun kedepan serta fleksibilitas dalam penyesuaian pasca transisi;

e. Silpa Berbasis Kinerja: Optimalisasi penggunaan SiLPA non-earmarked untuk belanja daerah berdasarkan kinerja pelayanan publik daerah dengan catatan (1) jika kinerja layanan sudah tinggi, dapat diinvestasikan dan/atau pembentukan dana cadangan; (2) jika kinerja layanan masih rendah, diarahkan untuk belanja infrastruktur pelayanan publik;

3. Implementasi prinsip-prinsip keuangan daerah, antara lain:

   a. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;

   b. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

   c. Dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

4. Mengatasi masalah-masalah mendasar yang menjadi prioritas pembangunan tahun 2024, antara lain:

   a. Sampai dengan tahun 2022 capaian pertumbuhan ekonomi mulai bangkit setelah pandemi covid-19 pada angka 2.88% dari sebelumnya 2.07%. Capaian ini memang masih rendah bila dibandingkan dengan capaian dari kabupaten/kota di provinsi lampung, provinsi lampung dan nasional. Namun setidaknya memberikan sinyal positif bagi perkembangan perekonomian daerah;

   b. PDRB Perkapita tahun 2022 sebesar 32.46 juta rupiah, angka ini didapatkan dari perhitungan PDRB ADHB dibagi dengan jumlah penduduk. Capaian kabupaten masih lebih rendah bila dibandingkan dengan provinsi lampung dan nasional namun lebih baik bila dibandingkan dengan beberapa daerah di provinsi lampung;

c. IPM belum bergerak dari urutan ke-14 dari 15 kabupaten/kota di provinsi lampung dengan nilai 65.14. Secara umum telah ada perbaikan dari sisi angka harapan hidup, rata-rata dan harapan lama sekolah serta pengeluaran riil perkapita masyarakat. Namun kenaikannya memang masih jauh tertinggal dari daerah lainnya;

d. TPT tahun 2022 mengalami kemunduran dan berada pada posisi 3.78% dari sebelumnya 3.08%. Bertambahnya jumlah pengangguran menunjukan kenaikan angkatan kerja daerah yang tidak terserap di dunia kerja;

e. Tingkat kemiskinan daerah mengalami penurunan bila dibandingkan tahun 2021, realisasi tahun 2022 sebesar 13.84% berada pada urutan ke-12 diantara kabupaten/kota di provinsi lampung. Perhitungan 13.84% berada di bawah provinsi lampung dan nasional. Kabupaten pesisir barat yang masih mengandalkan sektor pertanian, perkebunan dan perikanan sebagai penopang ekonomi daerah disatu sisi memberikan peluang lapangan pekerjaan daerah yang luas, namun disatu sisi juga sektor tersebut tidak banyak memberikan feedback atau kesejahteraan secara ekonomi bagi pelakunya;

f. Tingkat kemantapan jalan daerah yang baru mencapai 39.53% tentu saja merupakan salah satu indikator yang dapat memberikan gambaran tentang kondisi infrastruktur daerah secara umum masih perlu penanganan dan peningkatan;

g. Akses terhadap Sumber Daya Air yang Sehat dan Aman sebesar 18.06% menunjukkan kondisi kualitas permukiman daerah yang berada di bawah standar;

h. Panjang jaringan irigasi sebesar 56.10% belum mampu memenuhi kebutuhan seluruh wilayah persawahan. Hal ini disebabkan kondisi jaringan irigasi yang tidak seluruhnya dalam kondisi baik;

i. Indeks Desa Membangun hingga tahun 2022 adalah 0.6636 atau masuk status berkembang. Dengan hanya 3 dari 11 Kecamatan yang masuk dalam kategori Maju, yaitu Kecamatan Pesisir Tengah, Krui Selatan dan Karya Penggawa;

j. Kabupaten Pesisir Barat merupakan daerah dengan resiko bencana yang berada pada zona merah. Hampir seluruh skor indeks resiko per ancaman berada pada kelas resiko tinggi, seperti banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, tanah longsor, gelombang ekstrim dan abrasi. Bahkan pada ancaman bencana cuaca ekstrim Kabupaten Pesisir Barat merupakan salah satu Kabupaten dengan skor indeks resiko tertinggi di Indonesia dengan nilai capaian tahun 2022 sebesar 189.70;

l. Nilai SAKIP pada tahun 2022 adalah CC, yang menunjukkan masih belum efektif dan efisiennya penganggaran daerah bila dibandingkan dengan rencana dalam pencapaian target kinerja (outcomes);

m. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik berada pada 79.95%, nilai capaian ini tentu saja memberikan gambaran masih belum meratanya pelayanan kepada masyarakat;m. Belum optimalnya kinerja pelaksanaan pembangunan dan penyerapan anggaran pada beberapa program pembangunan;

n. Belum optimalnya kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah, bahkan memiliki kecenderungan turun;

3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan sub sistem dari sistem pengelolaan keuangan Negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk itu, arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Pesisir Barat akan mengacu pada regulasi pusat dan pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana yang telah diuraikan pada sub bab sebelumnya.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pemerintah Daerah berfungsi melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dibidang pendapatan daerah. Otonomi daerah dan desentralisasi berimplikasi pada semakin luasnya kewenangan daerah untuk mengatur dan mengelola pendapatan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka secara bertahap terus dilakukan upaya meningkatkan kemandirian pendapatan daerah dengan mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan yang dimiliki.

Beberapa kebijakan umum dalam penyusunan proyeksi keuangan dan pendanaan daerah memperhatikan beberapa hal, antara lain:

a. Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD;

b. Penerimaan daerah merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yang terdiri atas pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah;

c. Pengeluaran daerah merupakan rencana pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dan harus memiliki dasar hukum yang melandasinya, yang terdiri atas belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah;

d. Seluruh penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil;

e. APBD sebagai dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keuangan negara, merupakan satu kesatuan yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Berdasarkan hasil analisis kondisi ekonomi Kabupaten Pesisir Barat dan kajian terhadap tantangan dan prospek perekonomian daerah, selanjutnya dilakukan analisis dan proyeksi sumber-sumber pendapatan daerah baik yang berasal dari dalam daerah maupun dari luar daerah.

Pendapatan Daerah yang ada dalam struktur APBD dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori:

a. Pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah dari sumber-sumber di luar pemerintah daerah (*external source*); Pendapatan ini merupakan pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber yang berasal dari pihak luar dan tidak secara langsung ditangani sendiri oleh pemerintah daerah. Yang dimaksud dengan pihak luar disini adalah pihak-pihak yang berada di luar pemerintah daerah yang bersangkutan (selain pemerintah daerah beserta perangkatnya) dan bukan merupakan penduduk daerah yang bersangkutan, seperti pemerintah pusat, tingkatan pemerintahan yang ada di atas pemerintahan daerah yang bersangkutan, negara asing, pihak swasta dan pihak ketiga;

b. Pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah dari sumber-sumber yang dikelola oleh pemerintah daerah itu sendiri (*local source*); Kategori pendapatan yang kedua ini merupakan pendapatan yang digali dan ditangani sendiri oleh pemerintah daerah dari sumber-sumber pendapatan yang terdapat dalam wilayah yurisdiksinya. Pendapatan yang termasuk ke dalam kategori pendapatan ini adalah pajak daerah (*local tax, subnational tax*), retribusi daerah (*local retribution, fees, local licence*) dan hasil-hasil badan usaha (*local owned enterprises*) yang dimiliki oleh daerah. Pajak daerah, sebagai salah satu komponen PAD, merupakan pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada penduduk yang mendiami wilayah yurisdiksinya, tanpa langsung memperoleh kontraprestasi yang diberikan oleh pemerintah daerah yang memungut pajak daerah yang dibayarkannya. Retribusi daerah, komponen lain yang juga termasuk komponen PAD, merupakan penerimaan yang diterima oleh pemerintah daerah setelah memberikan pelayanan tertentu kepada penduduk mendiami wilayah yurisdiksinya.

Pendapatan daerah merupakan komponen yang sangat penting dan strategis dalam struktur APBD, mengingat peranannya dalam membiayai anggaran belanja daerah, pemberian pelayanan kepada publik, mengendalikan defisit anggaran dan meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah (KUD), yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah. Ada 2 (dua) sumber pendapatan daerah di Kabupaten Pesisir Barat yang memegang peranan penting dalam proses pengelolaan keuangan daerah; (i) sumber pendapatan yang berasal dari APBN Pemerintah Pusat yang di dalamnya terakomodasi Dana Dekonsentrasi, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Tugas Perbantuan, Dana Bagi Hasil Cukau Hasil Tembakau (DBHCHT) dan dari Lain-lain Pendapatan yang Sah; (ii) sumber pendapatan yang berasal dari APBD Kabupaten Pesisir Barat, yang pelaksanaannya ditetapkan melalui pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat dalam setiap tahunnya.

Dari semua pendapatan tersebut, yang memberikan kontribusi cukup besar berasal dari instansi yang lebih tinggi atau bantuan dari pemerintah pusat, sedangkan sumber pendapatan daerah yang berasal dari PAD masih terlalu kecil dibandingkan dengan bantuan dari Pemerintah Pusat. Hal ini menunjukkan bahwa, Kabupaten Pesisir Barat selama ini dalam pembiayaan administrasi pemerintahan dan pembangunannya masih sangat tergantung dari pemerintah pusat, terutama untuk membiayai belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan.

Dari kondisi tersebut maka pengelolaan pendapatan daerah harus dioptimalkan kinerjanya dalam meningkatkan penerimaan, khususnya yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna kelangsungan pendanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di Kabupaten Pesisir Barat. Konsekuensi logis dengan pembentukan Kabupaten Pesisir Barat dan pelaksanaan otonomi daerah adalah daerah diberi kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari APBD, selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi. Sejalan dengan kewenangan tersebut, pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan didaerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tuntutan peningkatan Pendapatan Daerah semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintah yang dilimpahkan kepada daerah disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi (P3D) ke daerah dalam jumlah besar. Selama ini Pemerintah daerah masih mengandalkan dana perimbangan yang merupakan transfer keuangan oleh pusat kepada daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah, namun daerah harus lebih kreatif dalam meningkatkan PAD-nya untuk meningkatkan akuntabilitas dan keleluasaan dalam pembelanjaan APBD-nya. Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal, namun tentu saja di dalam koridor

peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang memang telah sejak lama menjadi unsur PAD yang utama.

Perbedaan yang tegas antara pajak daerah dan retribusi daerah terletak pada kontra prestasi yang diberikan oleh pemerintah daerah. Jika pada pajak daerah kontra prestasi tidak diberikan secara langsung, maka pada retribusi daerah kontribusi diberikan secara langsung oleh pemerintah daerah kepada penduduk yang membayar retribusi tersebut. Baik pajak daerah maupun retribusi daerah, keduanya diatur dalam peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan disetujui oleh lembaga perwakilan rakyat serta dipungut oleh lembaga yang berada di dalam struktur pemerintah daerah yang bersangkutan.

Optimalisasi sumber-sumber PAD perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Untuk itu diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi subyek dan obyek pendapatan. Dalam jangka pendek kegiatan yang paling mudah dan dapat segera dilakukan adalah dengan melakukan intensifikasi terhadap obyek atau sumber pendapatan daerah yang sudah ada terutama melalui pemanfaatan teknologi informasi. Dengan melakukan efektivitas dan efisiensi sumber atau obyek pendapatan daerah, maka akan meningkatkan produktivitas PAD tanpa harus melakukan perluasan sumber atau obyek pendapatan baru yang memerlukan studi, proses dan waktu yang panjang. Dukungan teknologi informasi secara terpadu guna mengintensifkan pajak mutlak diperlukan karena sistem pemungutan pajak yang dilaksanakan selama ini cenderung tidak optimal. Masalah ini tercermin pada sistem dan prosedur pemungutan yang masih konvensional dan masih banyaknya sistem berjalan secara parsial, sehingga besar kemungkinan informasi yang disampaikan tidak konsisten, versi data yang berbeda dan data tidak *up-to-date*. Permasalahan pada sistem pemungutan pajak cukup banyak, misalnya : baik dalam hal data wajib pajak/retribusi, penetapan jumlah pajak, jumlah tagihan pajak dan target pemenuhan pajak yang tidak optimal.

Selanjutnya pemerintah daerah harus terus melakukan upaya-upaya untuk mengoptimalkan intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, antara lain dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Memperluas Basis Penerimaan; Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan antara lain yaitu mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan;

2. Memperkuat Proses Pemungutan; Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, yaitu antara lain mempercepat penyusunan Peraturan-peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah, mengubah tarif, khususnya tarif retribusi dan peningkatan SDM yang melaksanakan pemungutan dan pengelolaan pajak dan retribusi tersebut;

3. Meningkatkan Pengawasan; Pengawasan dapat ditingkatkan yaitu antara lain dengan melakukan pemeriksaan secara insidentil/tiba-tiba tanpa pemberitahuan terlebih dahulu (dadakan) dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pembayar pajak;

4. Meningkatkan Efisiensi Administrasi dan Menekan Biaya Pemungutan; Tindakan yang dapat dilakukan antara lain memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan;

5. Meningkatkan Kapasitas Penerimaan Melalui Perencanaan yang Lebih Baik; Hal ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait khususnya instansi yang menangani pemungutan dan pengelolaan pajak-pajak dan retribusi;

6. Dalam merencanakan target pendapatan daerah dari kelompok Pendapatan Asli Daerah ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu, potensi, dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi terhadap masing-masing jenis penerimaan, obyek penerimaan serta rincian obyek penerimaan;

7. Optimalisasi pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terutama berkenaan dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah dikelola secara langsung oleh daerah;

8. Menyelenggarakan pelayanan prima melalui pengadaan sarana dan prasarana yang dapat memberikan kenyamanan dan keamanan serta pelayanan yang cepat dan sederhana dengan didukung oleh teknologi informasi yang memadai;

9. Meningkatkan sistem insentif bagi pejabat dan seluruh personil yang terkait dalam pelayanan publik yang dilakukan.

Pemerintah daerah dapat menetapkan dan memungut beragam jenis pajak daerah sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Hal ini sangat dimungkinkan jika pemerintah daerah memiliki kemampuan untuk menetapkan sendiri jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang dapat dipungutnya, tanpa ada intervensi dari tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi. Agar pemerintah daerah memiliki kemampuan optimal untuk memungut pajak daerah yang ada didaerahnya, perlu kiranya mempertimbangkan pajak-pajak daerah yang memang sesuai untuk dijadikan sumber pendapatan agar tercipta efisiensi dan efektivitas dalam pemungutan pajak daerah. Jenis-jenis pajak yang dipungut di daerah sangat beragam. Pemungutan daerah ini harus mengindahkan ketentuan bahwa “lapangan pajak” yang akan dipungut belum diusahakan oleh tingkatan pemerintahan yang ada diatasnya.

Tabel 3.9 Realisasi Pendapatan Daerah dalam APBD Kabupaten Pesisir Barat TA 2018-2022

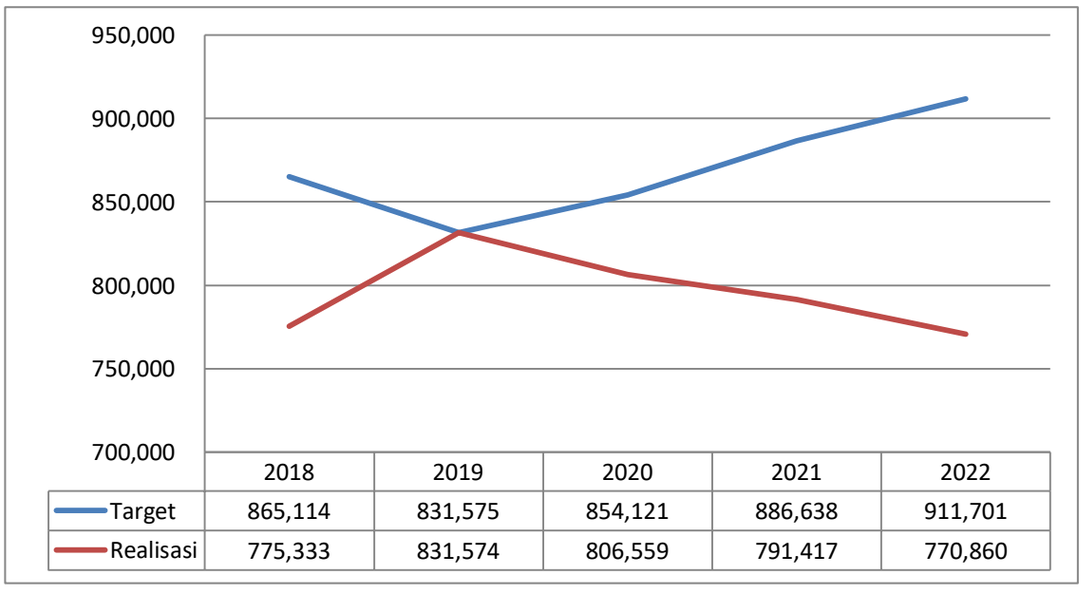
No	Uraian	Realisasi TA 2018	Realisasi TA 2019	Realisasi TA 2020	No	Uraian	Realisasi TA 2021	Realisasi TA 2022
A	**PENDAPATAN DAERAH**	**775.333.888.138,57**	**831.574.978.358,39**	**806.559.354.257,62**	**A**	**PENDAPATAN DAERAH**	**791.417.205.888,45**	**769..761.549.332,99**
1	**Pendapatan Asli Daerah**	**23.481.041.773,29**	**29.323.369.726,21**	**27.813.379.281,65**	**1**	**Pendapatan Asli Daerah**	**28.360.235.945,45**	**29.045.920.662,99**
1.1	Pajak daerah	6.415.256.314,00	7.189.278.671,00	7.140.880.419,00	1.1	Pajak daerah	9.431.317.364,00	9.977.052.361,00
1.2	Retribusi Daerah	2.880.782.306,00	3.245.153.503,00	3.020.413.607,13	1.2	Retribusi Daerah	934.137.375,00	1.328.688.256,00
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	0,00	0,00	1.929.479.534,70	1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	2.901.458.894,30	2.406.970.133,00
1.4	Lain-lain PAD yang Sah	14.185.003.153,29	18.879.973.552,21	15.722.605.721,82	1.4	Lain-lain PAD yang Sah	15.093.322.312,15	15.333.209.912,99
2	**Pendapatan Transfer**	**573.283.931,025,00**	**587.653.782.034,00**	**578.256.314.977,00**	**2**	**Pendapatan Transfer**	**737.827.416.943,00**	**740.715.628.670,00**
2.1	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	22.151.402.963,00	13.260.928.984,00	16.261.616.870,00	2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	686.024.586.474,00	677.4607974.296,00
2.2	DAU	417.316.170.000,00	435.029.435.000,00	404.769.066.000,00	2.1.1	Dana Perimbangan	557.757.654.474,00	553.406.514.269,00
2.3	DAK	133.816.358.062,00	139.363.418.050,00	142.779.101.107,00	2.1.2	DID	8.511.835.000,00	27.002.655.000,00
2.4	DID	0,00	0,00	14.446.531.000,00	2.1.3	Dana Desa	119.755.097.000,00	97.051.628.000,00
3	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah**	**178.568.915.340,28**	**214.597.826.598,18**	**200.489.659.999,97**	2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	51.802.830.469,00	63.254.831.374,00
3.1	Hibah	21.440.640.000,00	24.512.160.000,00	24.737.150.000,00	2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	51.802.830.469,00	63.254.831.374,00
3.2	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	**3**	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**25.229.553.000,00**	**0,00**
3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	47.783.898.569,28	69.068.458.502,18	55.972.412.999,97	3.1	Lain-lain Pendapatan	25.229.553.000,00	0,00
3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00				
3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	10.000.000.000,00	0,00	0,00				
3.6	Pendapatan Lainnya	0,00	8.500.000.000,00	25.000.000,00				
3.7	Dana Desa	98.950.576.096,00	121.008.708.096,00	119.755.097.000,00				

Sumber : Bapenda, 2023

Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Barat pada periode 2015 hingga 2022 secara umum mengalami peningkatan, dimulai dari Rp.570.272.841.584,57 (tahun 2015) dan naik menjadi Rp.738.458.213.718,74 (tahun 2016) kembali naik menjadi Rp.813.113.164.459,07 (tahun 2017) dan turun menjadi Rp.775.333.888.138,57 (tahun 2018) dan sebesar Rp.831.574.978.358,39 (tahun 2019). Tahun 2020 sebesar Rp.806.559.354.257,62 dan pada capaian tahun 2021 berada pada angka Rp.791.417.205.888,45. Realisasi pendapatan daerah pada tahun 2022 berada apada angka sebesar Rp.769.761.549.332,99.

Secara lengkap data perkembangan pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

Gambar 3.14 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022 (dalam juta rupiah)



	2018	2019	2020	2021	2022
Target	865,114	831,575	854,121	886,638	911,701
Realisasi	775,333	831,574	806,559	791,417	770,860

Sumber : Bapenda, 2023

Gambaran pengelolaan Pendapatan Daerah di Kabupaten Pesisir Barat adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, daerah dalam pengelolaannya harus memperhatikan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, beserta peraturan pendukung lainnya dalam menentukan Peraturan daerah yang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah berasal dari: (a) Pajak Daerah; (b) Retribusi Daerah; (c) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan (d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Terkait dengan Pendapatan Asli Daerah, telah diterbitkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam UU Nomor 28 Tahun 2009, khususnya Pasal 2, ayat (2) dijelaskan bahwa jenis Pajak Daerah kabupaten/kota terdiri atas: (a) Pajak Hotel; (b) Pajak Restoran; (c) Pajak Hiburan;

(d) Pajak Reklame; (e) Pajak Penerangan Jalan; (f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; (g) Pajak Parkir; (h) Pajak Air Tanah; (i) Pajak Sarang Burung Walet; (j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan (k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Hal ini memberikan pemahaman kepada daerah, bahwa daerah diberi kewenangan dan hak untuk merancang dan mempersiapkan peraturan daerah/peraturan bupati yang terkait dengan peraturan perundangan tersebut, termasuk juga di Kabupaten Pesisir Barat. Guna menyikapi hal tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat telah menerbitkan beberapa daerah dan peraturan bupati terkait pajak dan retribusi daerah sebagai berikut:

a. Perda Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah;

b. Perda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 20 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Umum;

c. Perda Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha;

d. Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 22 Tahun 2016 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

e. Perbup Nomor 41 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Jasa Umum di Pelayanan Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat;

f. Perbup Nomor 43 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Sewa Rumah Dinas di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat;

g. Perbup Nomor 45 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 25 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Restoran;

h. Perbup Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 41 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Hotel;

i. Perbup Nomor 121 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga di Kabupaten Pesisir Barat;

j. Perbup Nomor 122 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Berupa Tanah untuk Usaha di Kawasan Wisata;

k. Perbup Nomor 123 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Gedung Serba Guna;

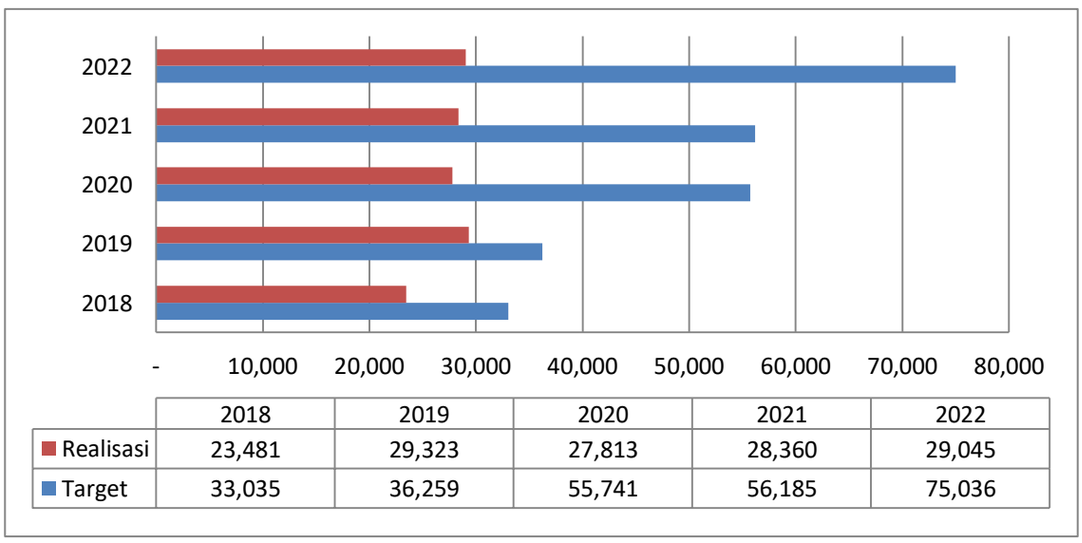
l. Perbup Nomor 124 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kendaraan Pick Up;

m. Perbup Nomor 125 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Tempat Penginapan, Pesanggrahan/Villa Milik Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pesisir Barat pada periode 2015 hingga 2022 secara umum juga mengalami peningkatan sebagaimana pada Pendapatan Daerah, dimulai dari Rp.11.597.895.328,57 (tahun 2015) dan naik menjadi Rp.20.710.860.362,74 (tahun 2016) dan naik kembali menjadi 42.895.150.220,64 (tahun 2017), mengalami penurunan menjadi 23.481.041.77,29 (tahun 2018) kembali naik menjadi Rp.29.323.369.726,21 (tahun 2019) dan meningkat menjadi Rp.27.813.379.280,65 (tahun 2020) dan data terakhir nilai realisasi PAD naik minor menjadi Rp.28.360.235.945,45 (tahun 2021). Capaian pada tahun 2022 kembali naik dengan data Rp.29.045.920.662,99 (tahun 2022).

Secara lengkap data perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebagai berikut:

Gambar 3.15 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022 (dalam juta rupiah)



	2018	2019	2020	2021	2022
Realisasi	23,481	29,323	27,813	28,360	29,045
Target	33,035	36,259	55,741	56,185	75,036

Sumber : Bapenda, 2023

Mengingat pentingnya peranan pajak dan retribusi daerah dalam membiayai pembangunan di Kabupaten Pesisir Barat, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat harus terus melakukan upaya-upaya untuk mengoptimalkan intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, upaya-upaya yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut:

a. Pengggalian potensi Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta memperhatikan prinsip-prinsip: realistis dan elastis (artinya dapat/mudah naik turun mengikuti naik/turunnya tingkat pendapatan masyarakat) serta adil dan merata secara vertikal dan horizontal (vertikal artinya sesuai dengan tingkatan kelompok masyarakat dan horizontal artinya berlaku sama bagi setiap anggota kelompok masyarakat sehingga tidak ada yang kebal pajak);

b. Melakukan perluasan basis penerimaan pajak dan retribusi. Upaya-upaya yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan antara lain yaitu mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan;

c. Melakukan Penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat tentang arti pentingnya pajak bagi pembangunan daerah sehingga secara politis dapat diterima oleh masyarakat, yang kemudian akan menimbulkan motivasi dan kesadaran pribadi untuk membayar pajak;

d. Memperkuat proses pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah. Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, yaitu antara lain mempercepat penyusunan peraturan-peraturan di daerah, mengubah tarif, khususnya tarif retribusi dan peningkatan SDM yang melaksanakan pemungutan dan pengelolaan pajak dan retribusi tersebut;

e. Melaksanakan tertib administrasi pungutan pajak dan retribusi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Pelaksanaan administrasi harus fleksibel artinya sederhana dan mudah dihitung;

f. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik secara profesional melalui peningkatan kompetensi aparatur daerah (meningkatkan kualitas kinerja layanan lembaga/satuan kerja pemungut dan pengelola pajak dan retribusi daerah) sehingga akan memberikan pelayanan yang memuaskan bagi si wajib pajak;

g. Menyederhanakan prosedur pengelolaan pajak dan retribusi menuju terpenuhinya kepuasan pelayanan publik/wajib pajak;

h. Meningkatkan pengawasan, pengawasan dapat ditingkatkan yaitu antara lain dengan melakukan pemeriksaan secara insidentil/tiba-tiba tanpa pemberitahuan terlebih dahulu (dadakan) dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pembayar pajak;

i. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan pajak. Tindakan yang dapat dilakukan antara lain memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan; dan

j. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik. Hal ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait khususnya instansi yang menangani pemungutan dan pengelolaan pajak-pajak dan retribusi di Kabupaten Pesisir Barat.

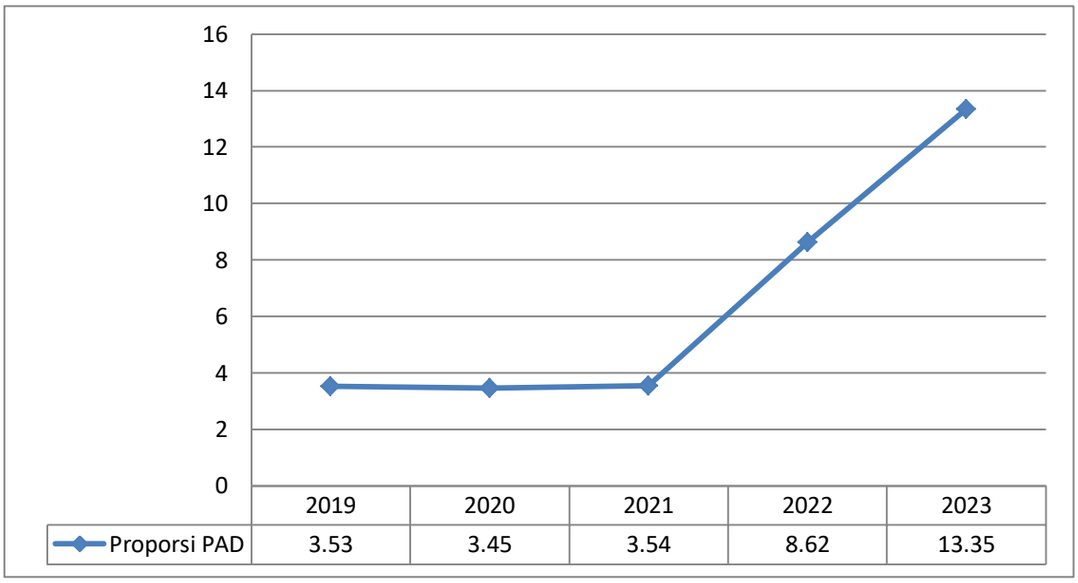
Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dalam melakukan penggalian potensi dan penetapan obyek-obyek pajak baru juga harus selalu memperhatikan kondisi sosial, ekonomi dan politik saat ini, disarankan agar pengadaan pajak dan retribusi baru perlu dipertimbangkan secara hati-hati sehingga tidak menimbulkan gejolak di masyarakat yang pada gilirannya akan mendistorsi kegiatan perekonomian di Kabupaten Pesisir Barat. Penciptaan suatu jenis pajak selain mempertimbangkan kriteria-kriteria perpajakan yang berlaku secara umum juga perlu mempertimbangkan ketepatan suatu jenis pajak sebagai pajak daerah, karena pajak daerah yang baik akan mendorong peningkatan pelayanan publik yang pada gilirannya akan meningkatkan kegiatan perekonomian daerah. Langkah-langkah optimalisasi pendapatan daerah dalam beberapa tahun terakhir telah menunjukkan arah yang cukup positif. Walaupun sumbangan PAD setiap tahunnya mengalami peningkatan, namun kenaikannya masih relatif kecil dibandingkan dengan kebutuhan pendanaan yang dibutuhkan dalam APBD secara keseluruhan.

Tabel 3.10 Perkembangan PAD dan Proporsinya terhadap Pendapatan APBD Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2015-2023

No	Tahun	PAD (Rp)	Pendapatan APBD (Rp)	Proporsi PAD thd Pendapatan APBD (%)
1	2015	5.950.540.540	570.949.750.118	1.04
2	2016	20.710.860.362	738.441.026.058	2.80
3	2017	42.895.150.220	813.113.164.459	5.28
4	2018	23.481.041.773	775.333.888.138	3.03
5	2019	29.323.369.720	831.574.978.358	3.53
6	2020	27.813.379.280	806.559.354.257	3.45
7	2021	27.978.745.605	791.035.715.547	3.54
8	2022	29.045.920.662	769.761.549.332	3.77
9	2023	29.093.444.521	839.107.656.766	13.35

Sumber : Bapenda, 2023

Gambar 3.16 Persentase Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2012-2023



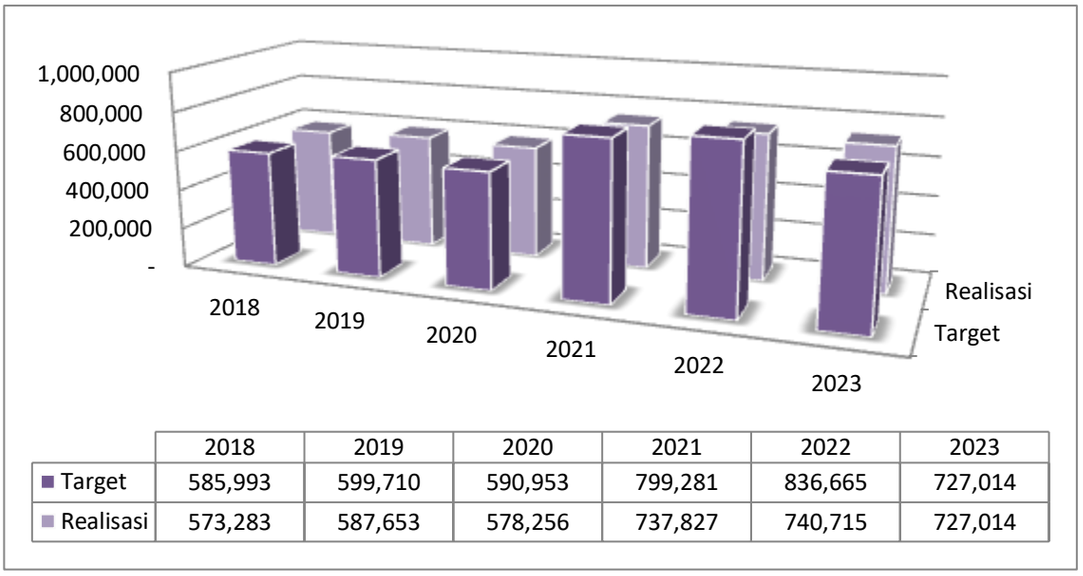
Sumber : Bapenda, 2023

Ditinjau dari komponen Pendapatan Daerah, tren kenaikan peran atau konstribusi dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sampai dengan tahun 2020 diperkirakan akan terus meningkat, akan tetapi posisi terbesar dalam struktur pendapatan daerah masih didominasi oleh sumber pendapatan dari Dana Perimbangan, sehingga dalam rangka membentuk landasan yang kuat bagi proses konsolidasi fiskal daerah, khususnya dalam mendorong peningkatan kemandirian dalam pembiayaan pembangunan daerah, maka Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat selalu berupaya untuk mengembangkan dan menggali potensi pendapatan yang ada. Proporsi pendapatan terbesar memang masih berasal dari pos Dana Perimbangan.

Pada tahun 2015 total pendapatan transfer sebesar Rp.523.986.472.745,00 dengan capaian Rp.519.341.816.656,00. Pada tahun 2016 sebesar Rp.674.325.620.971,00 dengan realisasi mencapai Rp.645.549.523.696,00, selanjutnya pada tahun 2017 turun menjadi Rp.640.128.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.628.776.506.574,00. Berikutnya pada tahun 2018 kembali turun menjadi sebesar Rp.573.283.931.025,00 dengan angka target sebesar Rp.585.993.098.018,00. Angka pendapatan transfer kembali naik pada tahun 2019 berada pada angka Rp.599.710.106.696,00 dan dapat teralisasi sebesar Rp.587.653.782.034,00 pada tahun 2020 target sebesar Rp.590.953.077.954,00 dengan capaian realisasi Rp.578.256.314.977,00.

Untuk tahun 2021, pos pendapatan transfer dianggarkan sebesar Rp.799.281.829.527,00 dan terealisasi sebesar Rp.737.827.416.943,00 (mulai tahun anggaran 2021, APBD Kabupaten Pesisir Barat mempergunakan struktur berdasarkan pada PP Nomor 12 Tahun 2019). Tahun 2022 pendapatan transfer dianggarkan sebesar Rp.836.665.450.739,00 dengan perhitungan realisasi pada angka Rp.740.715.628.670,00. Pada tahun 2023, pendapatan transfer ditargetkan pada angka Rp.727.014.212.245,00.

Gambar 3.17 Perkembangan Pendapatan Transfer Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2023 (dalam juta rupiah)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Target	585,993	599,710	590,953	799,281	836,665	727,014
Realisasi	573,283	587,653	578,256	737,827	740,715	727,014

Sumber : Bapenda, 2023

Tabel 3.11 Struktur Pendapatan pada APBD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2015-2022 (data realisasi)

No	Tahun	PAD (Rp)	Dana Perimbangan/ Pendapatan Transfer (Rp)	Lain-lain Pendapatan yang Sah (Rp)	Pendapatan Daerah (Rp)
1	2015	5.950.540.540	442.016.962.291	122.982.247.287	570.949.750.118
2	2016	20.710.860.362	645.549.523.696	72.180.642.000	738.441.026.058
3	2017	42.895.150.220	628.776.506.574	141.441.507.664	813.113.164.459
4	2018	23.481.041.773	573.283.931.025	178.568.915.340	775.333.888.138
5	2019	29.323.369.726	587.653.782.034	214.597.826.598	831.574.978.358
6	2020	27.813.379.280	578.256.314.977	200.489.659.999	806.559.354.257
7	2021	28.360.235.945	737.827.416.943	25.229.553.000	791.417.205.888
8	2022	29.045.920.662	740.715.628.670	0	769.761.549.332
9	2023*	112.093.444.521	727.014.212.245	0	839.107.656.766

Sumber : Bapenda, 2023
**data target*

Peran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Pesisir Barat terhadap PAD idealnya semakin tahun semakin meningkat, karena seyogyanya Kabupaten Pesisir Barat sebagai daerah perkotaan yang berkembang mengandalkan jasa sebagai salah satu sumber penghasil PAD. Lebih detail jika dilihat dari kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD Kabupaten Pesisir Barat, selama tahun 2015-2022 cenderung naik walaupun tidak terlalu signifikan. Gambaran selengkapnya kondisi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.12 Kontribusi Pajak dan Retribusi Terhadap PAD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2015-2023 (data realisasi)

No	Tahun	Pajak (Rp.)	Retribusi (Rp.)	PAD (Rp.)
1	2015	2.926.927.031	965.056.213	5.950.540.540
2	2016	3.856.121.890	2.499.888.783	20.710.860.362
3	2017	5.101.054.614	2.880.782.306	42.895.150.220
4	2018	6.415.256.314	2.880.782.306	23.481.041.773
5	2019	7.189.278.671	3.254.153.503	29.323.369.726
6	2020	7.140.880.419	3.020.413.607	27.813.379.280
7	2021	9.431.317.364	934.137.375	28.360.235.945
8	2022	9.977.052.361	1.328.688.256	29.045.920.662
9	2023*	13.041.500.000	1.717.429.680	112.093.444.521

Sumber : Bapenda, 2023
**data target*

2. Pendapatan Transfer

Sumber pembiayaan bagi daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah dan lain-lain penerimaan yang sah. Pajak daerah dan retribusi daerah, yang merupakan salah satu komponen PAD, seharusnya merupakan sumber penerimaan utama bagi daerah, sehingga ketergantungan daerah kepada Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan) semakin berkurang, yang pada gilirannya daerah diharapkan akan memiliki akuntabilitas yang tinggi kepada masyarakat lokal. Akan tetapi, sampai saat ini Dana Perimbangan masih merupakan "andalan" bagi daerah sebagai salah satu sumber Penerimaan Daerah.

Dana Perimbangan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan antara Pemerintah Daerah. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). DBH bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Sedangkan DAU dialokasikan untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota. Untuk besaran DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN. DAK dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional. DAU suatu daerah dialokasikan berdasarkan formula yang terdiri atas celah fiskal dan alokasi dasar. Data yang digunakan dalam penghitungan DAU diperoleh dari lembaga statistik Pemerintah dan/atau lembaga Pemerintah yang berwenang menerbitkan data yang dapat dipertanggungjawabkan (BPS). DAU suatu daerah otonomi baru dialokasikan setelah undang-undang pembentukan disahkan.

Dalam kenyataannya, Dana Perimbangan/Pendapatan Transfer dalam APBD secara umum berasal dari: Dana Bagi Hasil (Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Perimbangan dari Pemerintah Provinsi. Bagi Hasil Pajak meliputi: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 21, Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25/29. Sedang Bagi Hasil Bukan Pajak terdiri dari: Provisi Sumber Daya Hutan, Iuran Eksplorasi dan

Eksploitasi. Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan serta Dana Desa.

Selanjutnya untuk Transfer Antar Daerah terdiri dari : Pendapatan Bagi Hasil dari Pemerintah Daerah lainnya serta Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah lainnya.

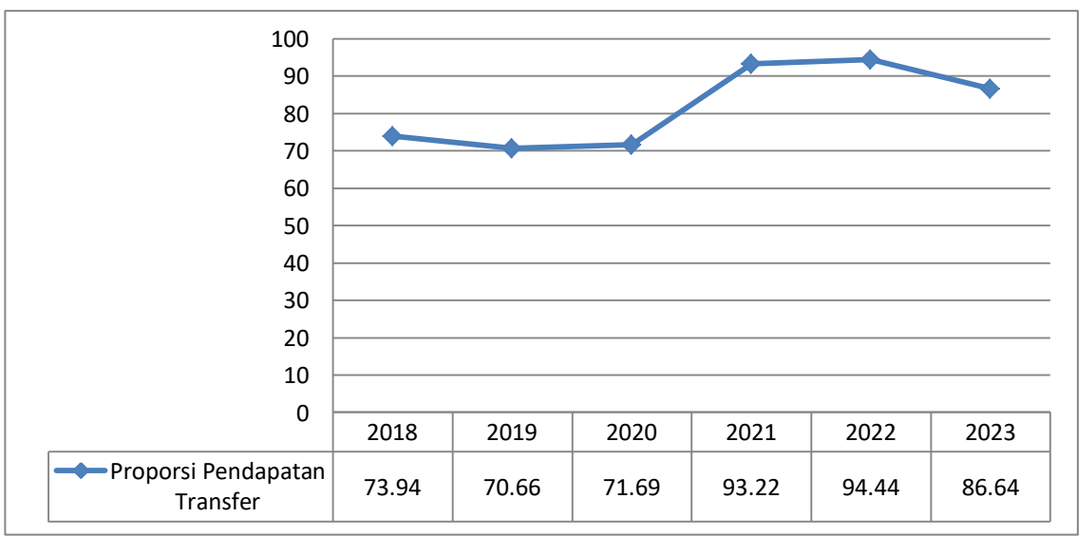
Proporsi Dana Perimbangan terhadap APBD masih relatif besar (lebih dari 70%), hal ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Pesisir Barat dalam pendanaan daerah masih sangat tergantung kepada dana transfer dari pemerintah pusat. Proporsi dana perimbangan terhadap pendapatan APBD Kabupaten Pesisir Barat selama kurun waktu (2015-2023) secara umum terus mengalami kenaikan. Namun demikian, yang perlu menjadi catatan bahwa kenaikan dari pendapatan transfer tersebut juga diiringi oleh kewajiban belanja daerah yang telah ditentukan. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.13 Dana Perimbangan dan Proporsinya terhadap Pendapatan APBD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2015-2023 (data realisasi)

No	Tahun	Pendapatan Transfer (Rp.)	Pendapatan Daerah APBD (Rp.)	Proporsi Pendapatan Transfer thd Pendapatan APBD (%)
1	2015	442.016.962.291	570.949.750.118	77,41
2	2016	645.549.523.696	738.441.026.058	87,42
3	2017	628.776.506.574	813.113.164.459	77,32
4	2018	573.283.931.025	775.333.888.138	73,94
5	2019	587.653.782.034	831.574.978.358	70,66
6	2020	578.256.314.977	806.559.354.257	71,69
7	2021	737.827.416.943	791.417.205.888	93,22
8	2022	740,715.628.670	769.761.549.332	94,44
9	2023*	727.014.212.245	839.107.656.766	86,64

Sumber : Bapenda, 2023
**data target*

Gambar 3.18 Persentase Pendapatan Transfer Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2023



Sumber : BPKAD, 2023

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Proporsi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang diterima Pemerintah Daerah meskipun kecil, akan tetapi keberadaannya sangat menunjang/mendukung kemampuan pendanaan bagi daerah tersebut. Beberapa kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sebagai bentuk sinkronisasi penyelarasan program dan kegiatan yang harus disesuaikan dan dilaksanakan oleh daerah dalam Belanja Transfer kepada Daerah seperti pemberian bantuan keuangan provinsi dan alokasi dana penyesuaian/kontijensi serta penerimaan lain-lain daerah yang sah dalam bentuk bagi hasil pajak, retribusi dan sumbangan pihak ketiga dari provinsi yang dapat dipergunakan oleh daerah untuk kebutuhan belanja sesuai dengan prioritas daerah tanpa diarahkan dan ditetapkan pengukurannya oleh provinsi. Pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam APBD bersumber dari:

a. Pendapatan Hibah (Pendapatan Hibah dari Pemerintah);

b. Dana Darurat

c. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Proporsi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang diterima Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat terhadap Total Pendapatan Daerah relatif kecil. Selama kurun waktu tahun 2015–2020 proporsinya mengalami kenaikan tiap tahun. Namun mulai tahun 2021 dikarenakan penggunaan Struktur APBD yang berdasarkan pada PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebabkan pergeseran beberapa pos pendapatan. Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten Pesisir Barat tergantung sesuai dengan pembagian dari pusat, adapun gambaran selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.14 Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah dan Proporsinya terhadap Pendapatan APBD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2015-2021

No	Tahun	Lain-lain Pendapatan yang Sah (Rp)	Pendapatan APBD (Rp)	Proporsi Lain-lain Pendapatan yg Sah terhadap Pendapatan APBD (%)
01	2015	122.982.247.287	570.949.750.118	21,53
02	2016	72.180.642.000	738.441.026.058	9,76
03	2017	141.441.507.664	813.113.164.459	17,39
04	2018	178.568.915.340	775.333.888.138	23,03
05	2019	214.597.826.598	831.574.978.358	25,80
06	2020	200.489.659.999	806.559.354.257	24,85
07	2021	25.229.553.000	791.417.205.888	3,18
08	2022	0	769.761.549.332	0,00
9	2023*	0	839.107.656.766	0,00

Sumber : Bapenda, 2023
**data target*

3.2.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Memperhatikan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah yang terus meningkat, intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan harus terus dilakukan baik terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan yang bersumber dari pusat (Dana Perimbangan). Sampai saat ini sumber pendapatan dari PAD masih relatif kecil dibandingkan dengan dana perimbangan. Kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui mobilisasi pendapatan asli daerah dan penerimaan daerah lainnya dengan kebijakan yang tetap memperhatikan kemampuan masyarakat secara umum, sekaligus menjaga stabilitas dan kesinambungan fiskal daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka secara bertahap terus dilakukan upaya meningkatkan kemandirian pendapatan daerah dengan mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan yang dimiliki, antara lain:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi (i) Peningkatan pelayanan pajak dan retribusi kepada masyarakat; (ii) Peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah; (iii) Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah; (iv) Operasionalisasi, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah

2. Dana Perimbangan yang meliputi : (i) Peningkatan koordinasi antara instansi pengelola pajak pemerintah dan pajak daerah; (ii) Peningkatan koordinasi dengan Kementerian yang mengelola Dana Alokasi Khusus (DAK); (iii) Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus, pencapaian prestasi kinerja untuk Dana Insentif Daerah (DID) serta Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya serta Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya dikoordinasikan sesuai dengan kewenangan;

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, yang meliputi Hibah, Dana Darurat serta Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Untuk menyikapi kondisi pendapatan daerah di Kabupaten Pesisir Barat selama kurun waktu pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026 mendatang, maka kebijakan yang akan diimplementasikan dalam pengelolaan Pendapatan Daerah antara lain sebagai berikut:

1. Menyusun kebijakan di bidang pendapatan daerah dengan memperhatikan faktor yang mempengaruhi potensi sumber penerimaan daerah yaitu kondisi awal daerah, peningkatan cakupan atau ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan, perkembangan PDRB per kapita riil, pertumbuhan penduduk, tingkat inflasi, penyesuaian tarif, pembangunan fasilitas baru, sumber pendapatan baru, dan perubahan peraturan dan perundang-undangan. Implementasi penyusunan kebijakan ini antara lain dengan adanya Penetapan

dasar hukum Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain yang Sah;

2. Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi subyek dan obyek pendapatan. Dalam jangka pendek kegiatan yang paling mudah dan dapat segera dilakukan adalah dengan melakukan intensifikasi terhadap objek atau sumber pendapatan daerah yang sudah ada terutama melalui pemanfaatan teknologi informasi. Dengan melakukan efektivitas dan efisiensi sumber atau obyek pendapatan daerah, maka akan meningkatkan produktivitas PAD tanpa harus melakukan perluasan sumber atau objek pendapatan baru yang memerlukan studi, proses dan waktu yang panjang. Dukungan teknologi informasi secara terpadu guna mengintensifkan pajak mutlak diperlukan karena sistem pemungutan pajak yang dilaksanakan selama ini cenderung tidak optimal. Masalah ini tercermin pada sistem dan prosedur pemungutan yang masih konvensional dan masih banyaknya sistem berjalan secara parsial, sehingga besar kemungkinan informasi yang disampaikan tidak konsisten, versi data yang berbeda dan data tidak *up-to-date*. Permasalahan pada sistem pemungutan pajak cukup banyak, misalnya: baik dalam hal data wajib pajak/retribusi, penetapan jumlah pajak, jumlah tagihan pajak dan target pemenuhan pajak yang tidak optimal;

3. Mengupayakan Hasil (*Yield*) Pajak dan Retribusi Daerah seoptimal mungkin berdasarkan azas keadilan (*Equity*) dengan memperhatikan Efisiensi Ekonomi, Kemampuan melaksanakan (*Ability to Implement*) dan Kecocokan sebagai sumber Penerimaan Daerah (*Suitability as Local Revenue Source*);

4. Melaksanakan tertib administrasi penerimaan pajak secara efektif dan efisien. Pengadministrasian penerimaan pendapatan daerah harus dilakukan secara efisien yaitu mengukur hubungan antara hasil pungut suatu pajak dengan potensi pajak yang ada. Pengadministrasian penerimaan pendapatan meliputi menentukan wajib pajak, menetapkan nilai kena pajak, memungut pajak, menegaskan sistem pajak, dan membukukan pajak.

5. Penerimaan. Dalam usaha mencapai efesiensi ini, tiga faktor yang mengancam yang patut diperhatikan adalah penghindaran pajak oleh wajib pajak, kolusi antara wajib pajak dengan petugas pajak, dan penipuan oleh petugas pajak;

6. Mendukung upaya-upaya peningkatkan kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Pesisir Barat antara lain dengan:

    a. Meningkatkan Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pesisir Barat. Secara bertahap kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD) secara proporsional akan terus ditingkatkan;

    b. Mengoptimalkan perolehan PAD sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Upaya ini antara lain akan ditempuh dengan cara:

(i) Menindaklanjuti Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan menerbitkan beberapa Peraturan Daerah terkait Pajak dan Retribusi di Kabupaten Pesisir Barat yaitu: (a) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah; (b) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 20 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Umum; (c) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha; (d) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 22 Tahun 2016 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

(ii) Mulai tahun 2014 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sudah masuk menjadi Pajak Daerah dalam PAD, setelah secara bertahap dilakukan alih ketrampilan dan teknologi dalam pengelolaan PBB;

(iii) Melakukan program-program untuk mendukung intensifikasi dan ekstensifikasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Pesisir Barat dengan cara:

a) Mengadakan pendataan ulang terhadap berbagai objek dan jenis-jenis pendapatan yang baru (Pajak dan Retribusi Daerah yang sudah ditetapkan dengan Perbup-perbup dan nantinya Perda di Kabupaten Pesisir Barat);

b) Penyesuaian besaran tarif dengan melakukan revisi terhadap berbagai peraturan daerah/peraturan bupati yang sudah tidak sesuai, baik terkait dengan kondisi saat ini maupun kebutuhan penyesuaiannya dengan peraturan perundangan yang berlaku;

c) Terus mengupayakan penggalian potensi Pajak dan Retribusi Daerah dengan tidak memberatkan masyarakat Kabupaten Pesisir Barat dan tetap diusahakan bisa mendorong perkembangan investasi di Kabupaten Pesisir Barat;

d) Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pelayanan pajak dan retribusi daerah;

e) Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pembayar Pajak dan Retribusi Daerah salah satunya dengan cara Peningkatan kompetensi aparatur pemungut pendapatan serta melakukan membina hubungan yang baik dengan Wajib Pajak;

f) Melakukan penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah serta manajemen pengelolaan guna memberikan kemudahan akses Wajib Pajak (WP) dan Wajib Retribusi (WR);

g) Menegakkan hukum/*law enforcement* dalam upaya membangun ketaatan Wajib Pajak Daerah (WPD) dan Wajib Retribusi Daerah (WRD);

h) Meningkatkan kualitas dan kuantitas aparatur pemungut pajak, meningkatkan peran aktif SKPD yang terkait dalam rangka penegakan hukum di bidang perpajakan;

i) Melakukan peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan asli daerah untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi yang dibarengi dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan dengan biaya yang terjangkau;

j) Mendukung implementasi teknologi informasi secara terpadu/terintegrasi guna mengintensifkan dan mengoptimalkan hasil pajak dan retribusi di Kabupaten Pesisir Barat.

Adapun beberapa asumsi yang digunakan sebagai dasar dalam menetapkan proyeksi kemampuan keuangan Kabupaten Pesisir Barat pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. Kenaikan pada pos pendapatan pajak dan retribusi daerah; Pajak restoran diperkirakan akan naik dengan bertambahnya jumlah restoran ataupun warung makan baru yang mulai menjamur seiring dengan adanya pusat-pusat kuliner baru; Pajak hiburan diperkirakan akan naik dengan bertambahnya jumlah tempat-tempat hiburan baru yang mulai menjalar di sepanjang kota; Pajak reklame diperkirakan akan naik dengan bertambahnya produsen dan pengusaha yang memanfaatkan media promosi yang terus ditambah, khususnya di tempat-tempat strategis; Pajak penerangan jalan diperkirakan akan naik dengan asumsi akan adanya kenaikan tarif dasar listrik oleh PLN; BPHTB diperkirakan akan naik dengan adanya pengalihan alih fungsi lahan yang semakin meningkat seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan perumahan dan sarana prasarana pendukung lain yang menunjang tumbuh dan berkembangnya wilayah perkotaan; Pajak bumi dan bangunan diperkirakan akan naik dengan adanya pengalihan PBB Perkotaan ke daerah sehingga memungkinkan Kabupaten Pesisir Barat untuk menggali dan menambah obyek pajak baru di sektor bumi dan bangunan;

b. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan diproyeksikan naik minor.

c. Lain-lain PAD yang sah diterima dari penerimaan jasa giro meliputi jasa giro kas daerah dan jasa giro kas SKPD, pendapatan dan pengembalian, serta pendapatan dana kapitasi JKN diproyeksikan tetap;

d. Dana Alokasi Umum diproyeksikan naik dengan perhitungan kenaikan gaji pegawai dan penambahan jumlah PNS dan atau PPPK.

e. Dana Transfer dari Pemerintah Pusat, termasuk untuk Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus, Dana Insentif Daerah, Dana Desa diprediksi naik sesuai dengan perkembangan daerah dan kemampuan keuangan nasional;

f. Dana Transfer dari Pemerintah Provinsi diproyeksikan naik minor, berkaca dari kondisi keuangan daerah yang cenderung stagnan;

Dari berbagai pertimbangan serta melihat gambaran tiga tahun kebelakang atas realisasi pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah yang terjadi di Kabupaten Pesisir Barat seperti yang telah diuraikan di atas, maka prediksi Pendapatan Daerah di Kabupaten Pesisir Barat selama kurun waktu 2024-2025, akan diperkirakan sebagai berikut seperti yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.15 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022 s.d. Tahun 2025

No	Uraian	Tahun				
		Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target 2023	Proyeksi 2024	Proyeksi 2025
4.	**PENDAPATAN DAERAH**	**791.417.205.588,45**	**769.761.549.332,99**	**839.107.656.766**	**929,603,096,460**	**923.719.539.232**
4.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**28.360.235.945,45**	**29.045.920.662,99**	**112.093.444.521**	**108,642,198,887**	**99.446.161.078**
4.1.1	Pajak daerah	9.431.317.364,00	9.977.052.361,00	13.041.500.000	13,882,490,847	12.795.838.506
4.1.2	Retribusi Daerah	934.137.375,00	1.328.688.256,00	1.717.429.680	2,116,319,700	4.126.823.415
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	2.901.458.894,30	2.406.970.133,00	2.929.479.534	2,931,409,014	1.937.209.037
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	15.075.515.151,94	15.333.209.912,99	94.405.035.307	89,711,979,326	80.586.290.121
4.2	**Pendapatan Transfer**	**737.827.416.943,00**	**740.715.628.670,00**	**727.014.212.245**	**820,960,897,573**	**824.273.378.154**
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	686.024.586.474,00	677.460.797.296,00	668.193.875.000	750,966,290,379	595.788.217.115
4.2.1.1	Dana Perimbangan	557.757.654.474,00	553.406.514.296,00	555.307.183.000	618,472,903,289	475.072.201.383
4.2.1.2	Dana Insentif Daerah	8.511.835.000,00	27.002.655.000,00	21.751.813.000	23,926,994,300	20.000.000.000
4.2.1.3	Dana Desa	119.755.097.000,00	97.051.628.000,00	91.134.879.000	108,566,392,790	100.716.015.732
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	51.802.830.469,00	63.254.831.374,00	58.820.337.245	69,994,607,194	99.223.211.861
4.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	51.802.830.469,00	63.254.831.374,00	58.820.337.245	69,994,607,194	99.223.211.861
4.3	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah**	**25.229.553.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
4.3.3	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	25.229.553.000,00	0,00	0	0	0
4.3.3.1	Lain-lain Pendapatan	25.229.553.000,00	0,00	0	0	0

Sumber : Bapenda – Bappelitbangda, 2023 dan RPJMD Tahun 2021-2026 (data diolah)

3.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan komponen pengeluaran yang digunakan untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik. Belanja daerah pada hakekatnya diarahkan pada pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, fungsi Urusan Penunjang dan Fungsi Urusan Pendukung yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan seperti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwijudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak.

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut, dimana terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam menentukan besaran belanja yang dianggarkan senantiasa akan berlandaskan pada prinsip disiplin anggaran, yaitu prinsip kemandirian yang selalu mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan sesuai dengan potensi daerah, prinsip prioritas yang diartikan bahwa pelaksanaan anggaran selalu mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah, prinsip efisiensi dan efektifitas anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas.

Kebijakan belanja daerah memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai, belanja hibah, belanja bagi hasil kepada pemerintahan kelurahan, belanja bantuan keuangan kepada pemerintahan desa dan partai politik, belanja barang dan jasa, belanja modal pada tahun yang bersangkutan. Belanja penyelenggaraan pembangunan hendaknya diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Berikut adalah kebijakan Belanja Daerah yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat:

a. Belanja daerah disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan capaian kinerja RKPD tahun lalu yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan secara terukur. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

b. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan pilihan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah terutama yang berkaitan dengan pertanian, kelautan dan perikanan, pariwisata, perindustrian dan perdagangan.

c. Dana alokasi umum ditujukan untuk mendanai kebutuhan belanja pegawai negeri sipil daerah dan urusan wajib dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum;

d. Dana alokasi khusus (DAK) dialokasikan untuk mendanai kebutuhan fisik, sarana dan prasarana dasar yang menjadi urusan daerah antara lain program dan kegiatan pendidikan, kesehatan dan lain-lain sesuaidengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh menteri teknis terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penganggaran belanja yang bersumber dari DAK dianggarkan pada SKPD yang berkenaan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Belanja Daerah pada dasarnya merupakan perwujudan dari kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang berbentuk kuantitatif. Dari besaran dan kebijakan yang berkesinambungan dari program-program yang dilaksanakan dapat dibaca ke arah mana pembangunan di suatu daerah akan digerakkan. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk memenuhi tingkat kesejahteraan masyarakat dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional maupun daerah. Upaya-upaya tersebut antara lain dengan penyediaan fasilitas dasar, fasilitas publik, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta penyediaan infrastruktur untuk mendorong tumbuhnya perekonomian di masyarakat.

Era otonomi daerah telah membawa konsekuensi dalam pengeluaran publik pemerintah untuk lebih memfokuskan pada pembenahan manajemen dan administrasi birokrasi, sehingga menyebabkan peningkatan belanja administrasi baik belanja kegiatan pelayanan dasar, belanja bidang prioritas nasional maupun belanja penunjang yaitu belanja prioritas masing-masing Unit Kerja di Pemerintahan.

Peningkatan Belanja Administrasi Pemerintahan guna mendukung Reformasi Birokrasi akhir-akhir ini dirasakan semakin membuat ketidakseimbangan (proporsinya tidak sebanding) antara belanja kegiatan pelayanan dasar, belanja bidang prioritas nasional maupun belanja penunjang di masing-masing SKPD. Kondisi yang terjadi sekarang pertumbuhan belanja kegiatan dasar lebih besar daripada belanja tidak mengikat. Di satu sisi belanja yang sifatnya mengikat belum dilakukan secara efisien salah satunya pada pos belanja perjalanan dinas yang

“membengkak“ baik dari segi waktu perjalanan maupun volume perjalanannya/jumlah orang yang melakukan perjalanan.

Kebijakan dalam pengelolaan APBD memegang peranan yang sangat strategis dalam mencapai sasaran pembangunan daerah karena APBD merupakan salah satu instrumen penting kebijakan fiskal daerah. Dimana kebijakan fiskal adalah kebijaksanaan pemerintah untuk mengubah pengeluaran dan penerimaan pemerintah guna mencapai kestabilan ekonomi suatu daerah. Kebijaksanaan fiskal pada umumnya bertujuan untuk mencapai kestabilan dalam perekonomian. Sedangkan tiga fungsi utama kebijakan fiskal, adalah: (a) sebagai alat stabilisasi ekonomi, alat distribusi pendapatan dan alat alokasi anggaran; (b) sebagai alat stabilisasi ekonomi, kebijakan fiskal memainkan perannya dalam menjaga stabilitas nilai tukar dan laju inflasi yang pada gilirannya berpengaruh positif dalam pencapaian ekspansi ekonomi tinggi; dan (3) sebagai alat distribusi pendapatan, fungsi kebijakan fiskal tercermin sebagai media dalam penarikan pajak dari masyarakat dimana orang kaya akan membayar pajak lebih tinggi dibandingkan orang miskin. Sedangkan, fungsi kebijakan fiskal sebagai alat alokasi anggaran tercermin dari besaran-besaran belanja dalam APBD.

Tabel 3.16 Realisasi Belanja Daerah dalam APBD Kabupaten Pesisir Barat TA 2018-2022

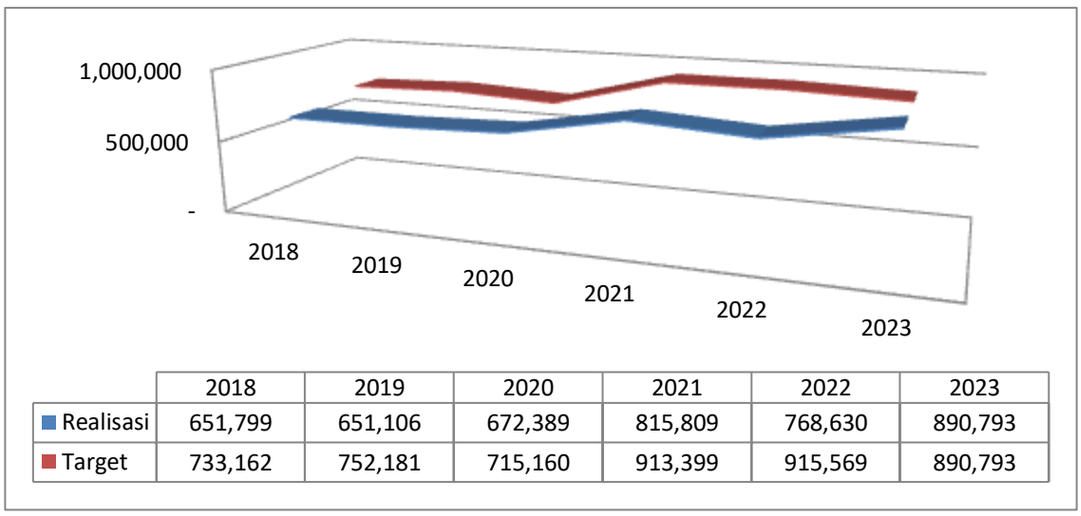
No	Uraian	Realisasi TA 2018	Realisasi TA 2019	Realisasi TA 2020	No	Uraian	Realisasi TA 2021	Realisasi TA 2022
B	**Belanja Daerah**	**797.058.152.359,06**	**818.269.505.936,24**	**837.530.914.781,18**	**B**	**Belanja Daerah**	**815.809.495.189,76**	**768.630.116.995,29**
1	**Belanja Tidak Langsung**	**353.159.255.351,00**	**400.271.319.721,00**	**425.855.469.548,00**	**1**	**Belanja Operasi**	**444.646.760.975,97**	**421.755.335.654,00**
1.1	Belanja Pegawai	189.415.710.881,00	209.123.552.806,00	213.485.448.258,00	1.1	Belanja Pegawai	145.475.390.431,00	218.850.761.941,00
1.2	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	1.2	Belanja Barang Jasa	201.110.390.985,19	190.302.016.983,00
1.3	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	1.3	Belanja Hibah	10.267.287.130,00	8.538.637.130,00
1.4	Belanja Hibah	9.989.355.000,00	15.407.253.421,00	40.831.248.160,00	1.4	Belanja Bantuan Sosial	5.105.389.500,00	4.063.919.600,00
1.5	Belanja Bantuan Sosial	7.610.893.500,00	7.352.036.050,00	2.343.601.000,00	**2**	**Belanja Modal**	**206.773.867.591,79**	**217.250.297.659,00**
1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Prov/Kab/Kota/ dan Pemerintahan Desa	1.063.495.200,00	748.183.200,00	0,00	2.1	Belanja Modal Tanah	5.658.514.820,00	9.651.896.350,00
1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa	143.863.694.400,00	166.083.346.194,00	164.807.343.000,00	2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.385.171.074,00	8.770.687.238,00
1.8	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	331.106.370,00	331.948.050,00	333.637.130,00	2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	62.402.548.286,00	97.613.890.520,00
1.9	Belanja Tidak Terduga	885.000.000,00	1.225.000.000,00	4.054.192.000,00	2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	115.356.179.449,79	97.251.294.210,00
2	**Belanja Langsung**	**443,381.357.008,06**	**417.998.186.215,24**	**411.675.445.233,18**	2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.971.453.962,00	3.962.529.341,00
2.1	Belanja Pegawai	61.326.754.932,00	63.465.961.167,40	61.847.639.108,55	**3**	**Belanja Tidak Terduga**	**2.213.824.000,00**	**8.171.030,94**
2.2	Belanja Barang dan Jasa	152.353.156.217,00	177.481.191.112,60	164.792.991.727,91	3.1	Belanja Tidak Terduga	2.213.824.000,00	8.171.030,94
2.3	Belanja Modal	229.701.445.859,06	177.051.033.935,24	185.034.814.399,73	**4**	**Belanja Transfer**	**162.175.042.622,00**	**129.616.312.652,00**
					4.1	Belanja Bagi Hasil	820.561.622.00	0,00
					4.2	Belanja Bantuan Keuangan	161.354.481.000,00	129.616.312.652,00

Sumber : BPKAD, 2023

Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Barat pada periode 2015 hingga tahun 2022 terus secara umum mengalami peningkatan, dimulai dari Rp.479.564.893.423,00 (tahun 2015) naik menjadi Rp.732.750.194.932,50 (tahun 2016) dan menjadi Rp.811.738.309.194,74 (tahun 2017) dan turun menjadi Rp.651.799.865.389,06 (tahun 2018) serta sebesar Rp.651.106.028.494,24 (tahun 2019). Tahun 2020 realisasi Belanja Daerah mencapai Rp.672.389.934.651,18 (tahun 2020) dan sebesar Rp.815.809.495.189,76 (2021). Realisasi pada tahun 2022 sebesar Rp.769.735.089.555,50 (2022)

Sementara itu bila melihat pada pertumbuhan Belanja Daerah dari tahun ke tahun dapat dilihat bahwa persentase meningkat dari 50,92% (tahun 2016); sebesar 12,16% (tahun 2017); dan turun (1,87%) (tahun 2018) berikutnya kembali meningkat 2,73% (tahun 2019). Pada tahun 2020, pertumbuhan belanja daerah terealisasi pada angka 3,26% (tahun 2020). Tahun 2021, pertumbuhan capaian belanja daerah naik dengan capaian sebesar 21,32%. Tahun 2022 mengalami penurunan capaian sebesar (5,64%).

Gambar 3.19 Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2023 (dalam juta rupiah)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Realisasi	651,799	651,106	672,389	815,809	768,630	890,793
Target	733,162	752,181	715,160	913,399	915,569	890,793

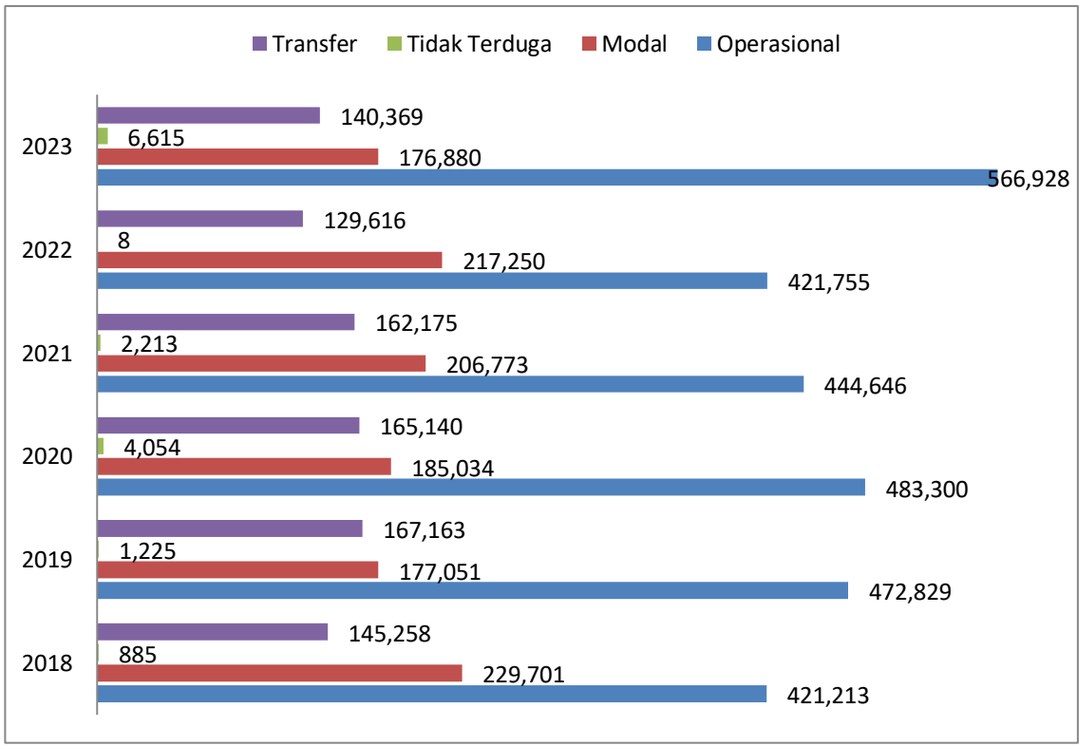
Sumber : BPKAD, 2023

Tabel 3.17 Struktur Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-2023

No	Tahun	Operasi (Rp)	Modal (Rp)	Tidak Terduga (Rp)	Transfer (Rp)
1	2016	401.627.964.183	330.560.839.622	84.784.000	476.607.127
2	2017	496.591.335.682	314.242.247.261	361.765.750	542.960.501
3	2018	421.213.410.530	229.701.445.859	885.000.000	145.258.295.970
4	2019	472.829.994.557	177.051.033.935	1.225.000.000	167.163.477.444
5	2020	483.300.928.252	185.034.814.398	4.054.192.000	165.140.980.130
6	2021	444.646.760.975	206.773.867.591	2.213.824.000	162.175.042.622
7	2022	421.755.335.654	217.250.297.659	8.171.030	129.616.312.652
8	2023	566.928.827.379	176.880.145.187	6.615.000.000	140.369.956.200

Sumber : BPKAD, 2023

Gambar 3.20 Struktur Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2023 (dalam juta rupiah)



Sumber : BPKAD, 2023

Selanjutnya untuk proporsi belanja pegawai pada periode tahun 2015-2017 cukup proposional terhadap total belanja (25-30%) dan atau kurang dari 35% dari total pengeluaran daerah. Namun demkian, pada kurun waktu 2018-2023 proporsi belanja pegawai mengalami peningkatan walaupun masih berada pada ambang dibawah 30%/ Hal ini disebabkan karena kemampuan pendanaan yang terbatas tidak dapat mengimbangi kebijakan kenaikan belanja pegawai baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Proporsi belanja pegawai terhadap total belanja dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.18 Proporsi Belanja Pegawai Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2015-2023 (data realisasi)

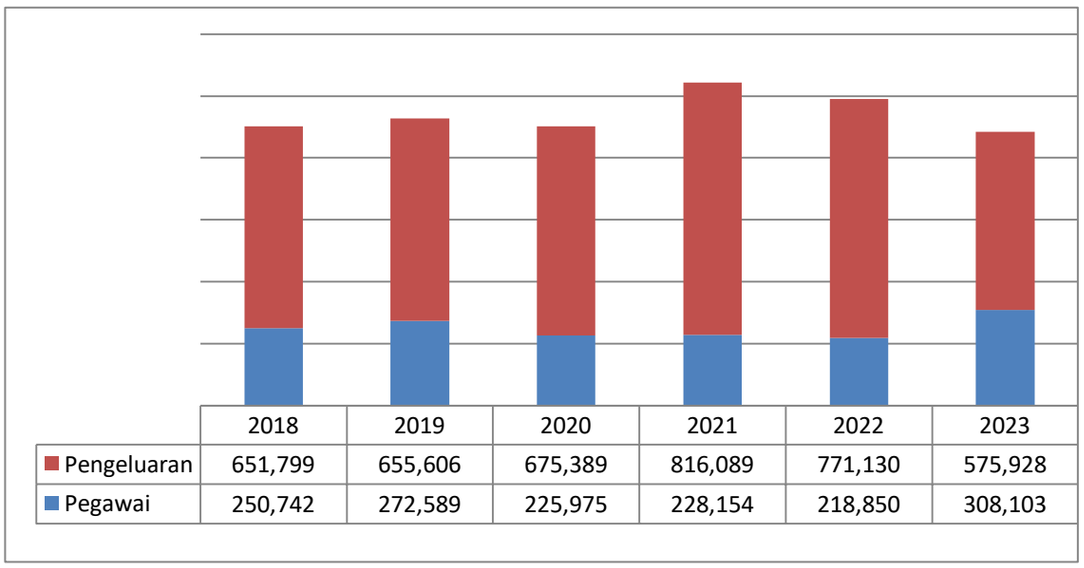
Tahun	Belanja Pegawai (Rp.)	Belanja Daerah (Rp.)	Pengeluaran Pembiayaan (Rp.)	Total Pengeluaran (Rp.)	Proporsi Belanja Pegawai (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	6=(2)/(5)
2015	158.956.793.488	550.986.272.803	0	550.986.272.803	28,85
2016	197.151.294.389	732.750.194.933	500.000.000	733.250.194.933	26,89
2017	210.998.233.664	811.738.309.195	4.500.000.000	816.238.309.195	25,85
2018	250.742.465.813	651.799.856.389	0	651.799.856.389	38,47
2019	272.589.513.973	651.106.028.492	4.500.000.000	655.606.028.492	41,58
2020	225.975.894.173	672.389.934.651	3.000.000.000	675.389.934.651	33,46
2021	228.154.693.360	815.809.495.189	1.000.000.000	816.809.495.189	27,93
2022	218.850.761.941	768.630.116.995	2.500.000.000	771.130.116.995	28,38
2023*	308.103.452.752	566.928.827.379	9.000.000.000	575.928.827.379	53,50

Sumber: BPKAD, 2023
**data target*

Berdasarkan pada data di atas, dapat dilihat bahwa rata-rata proporsi belanja pegawai aparatur Kabupaten Pesisir Barat tahun 2015-2023 sebesar 35,9% (dengan catatan pada tahun 2023 belum ada realisasi) dari keseluruhan total pengeluaran. Tahun 2015 belanja pegawai sebesar Rp.158.956.793.488,00 dari total pengeluaran Rp.550.986.272.803,00, angka tersebut meningkat pada tahun 2016 dengan belanja pegawai Rp.197.151.294.389,00 dari total pengeluaran Rp.733.250.194.933,00. Pada tahun 2017 belanja pegawai terealsasi sebesar Rp.210.998.233.664 dari keseluruhan pengeluaran diangka sebesar Rp.816.238.309.195,00.

Tahun 2018 belanja pegawai kembali naik menjadi Rp.250.742.465.813,00 dari total Rp.651.799.856.389,00. Pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi Rp.272.589.513.973,00 dari total pengeluaran pemerintah diangka Rp.655.606.028.492,00. Berikutnya pada tahun 2020 belanja pegawai mengalami penurunan sehingga berada pada angka Rp.225.975.894.173,00 dari total pengeluaran sebesar Rp.675.389.934.651,00. Sementara pada tahun 2021 dengan jumlah realiasasi Rp.228.154.693.360,00 dan total seluruh pengeluaran APBD sebesar Rp.816.809.495.189,00 dan data pada tahun 2022 belanja pegawai direalisasikan sebesar Rp.218.850.761.941,00 dari keseluruhan pengeluaran daerah sebesar Rp.771.130.116.995,00.

Gambar 3.21 Perbandingan Belanja Pegawai dengan Total Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2023 (dalam juta rupiah)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pengeluaran	651,799	655,606	675,389	816,089	771,130	575,928
Pegawai	250,742	272,589	225,975	228,154	218,850	308,103

Sumber : BPKAD, 2023

Pengelolaan Belanja Daerah di Kabupaten Pesisir Barat diarahkan pada pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari masukan (*input*) yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan bidang kewenangan/urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang

direncanakan oleh setiap Perangkat Daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Arah kebijakan pengelolaan Belanja Daerah di Kabupaten Pesisir Barat selama kurun waktu RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026 akan diarahkan kepada hal-hal sebagai berikut:

1. *Efisiensi dan Efektivitas Anggaran.* Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat yang harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.

2. *Prioritas*. Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, ketersediaan bahan pangan, peningkatan infrastruktur, energi dan pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesisir Barat dan diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan serta penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih;

3. *Tolok Ukur dan Target Kinerja*. Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan Tugas dan Fungsi setiap Perangkat Daerah;

4. *Optimalisasi Belanja Daerah,* Belanja Daerah khususnya pada Belanja Operasi dan Belanja Modal diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja operasi dan belanja modal disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Optimalisasi belanja modal untuk pembangunan infrastruktur publik yang memungkinkan dapat dikerjasamakan dengan pihak swasta; dan

5. *Transparan dan Akuntabel*. Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasilnya.

Selain arah kebijakan pengelolaan Belanja Daerah di Kabupaten Pesisir Barat secara umum seperti yang disebutkan di atas, selama kurun waktu pelaksanaan RKPD Tahun 2024 akan ditempuh kebijakan belanja daerah sebagai berikut:

1. Belanja Daerah di Kabupaten Pesisir Barat akan dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel;

2. Pos belanja gaji ini untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, gaji ke 13 dan 14 (THR), tunjangan keluarga, mutasi dan penambahan PNS dan PPPK. Besarnya penganggaran gaji pokok dan tunjangan PNSD disesuaikan dengan rekonsiliasi jumlah pegawai dan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

3. Belanja Bantuan Keuangan diperkirakan akan meningkat untuk memenuhi amanat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (pelaksanaan alokasi dana desa);

4. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial kepada organisasi/lembaga dan/atau masyarakat dianggarkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta setelah memprioritaskan pemenuhan Belanja Urusan Wajib terlebih dahulu.

   Kenaikan belanja hibah kepada penyelenggara dan pengawasan pemilu dan pemilukada serentak tahun 2024 diperkirakan naik menyesuaikan dengan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

5. Belanja Tidak Terduga diasumsikan tetap dibandingkan dengan tahun sebelumnya;

6. Belanja Operasi akan selalu disesuaikan dengan ketersediaan anggaran setiap tahun, dan akan diupayakan secara merata pada semua sektor; Belanja operasi diutamakan untuk mendukung program pelayanan dasar kepada masyarakat, khususnya bidang pendidikan, kesehatan, ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sosial;

7. Menguatkan program–program penanggulangan kemiskinan serta pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan, khususnya dalam upaya mencapai target 0% kemiskinan ekstrem;

8. Melanjutkan proyek-proyek infrastruktur yang strategis dan mempunyai manfaat luas bagi masyarakat;

9. Dalam upaya untuk memacu pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik, belanja daerah diharapkan dapat lebih diarahkan dalam mendukung peningkatan nilai tambah sektor-sektor ekonomi yang akan memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan penyerapan tenaga kerja sebagai upaya untuk turut meningkatkan perluasan lapangan kerja guna menurunkan angka kemiskinan. Beberapa sektor tersebut adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor industri pengolahan (pendukung sektor jasa), sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor jasa-jasa dan sektor konstruksi.

10. Mengupayakan penghematan, efisiensi, efektifitas anggaran belanja daerah secara proporsional akan dilakukan melalui:

    a. Memprioritaskan alokasi belanja daerah pada program dan kegiatan yang memiliki dampak kuat terhadap pencapaian visi dan misi dalam

Kabupaten Pesisir Barat dan berdampak luas terhadap kepentingan masyarakat.

b. Mengefektifkan mekanisme Musrenbang guna menghasilkan rencana program dan kegiatan yang mampu memecahkan berbagai permasalahan dan isu terkini pelayanan masyarakat.

Selanjutnya urusan wajib, urusan pilihan, unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawasan, unsur kewilayahan dan unsur pemerintahan umum dijabarkan dalam bentuk Program dan Indikasi Kegiatan serta sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah selama kurun waktu 2023-2024. Gambaran Prediksi Belanja Daerah di Kabupaten Pesisir Barat selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.19 Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021 s.d. Tahun 2025

No	Uraian	Tahun				
		Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target 2023	Proyeksi 2024	Proyeksi 2025
5	**Belanja Daerah**	**815,809,495,189,76**	**767.630.116.995,29**	**839.107.656.766**	**938.603.096.460**	**933.815.619.233**
5.1	**Belanja Operasi**	**444.646.760.975,97**	**421.755.335.654,00**	**566.928.827.379**	**611,127,096,460.00**	**555.370.871.935**
5.1.1	Belanja Pegawai	228.154.693.360,78	218.850.761.941,00	308.103.452.752	314,265,521,808.00	256.634.075.835
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	201.110.390.985,19	190.302.016.983,00	235.722.504.497	241,427,774,652.00	283.509.720.197
5.1.3	Belanja Bunga	0,00	0,00	1.000.000.000	0.00	0
5.1.4	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0	0.00	0
5.1.5	Belanja Hibah	10.276.287.130,00	8.538.637.130,00	14.853.670.130	44,560,000,000.00	11.884.752.792
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	5.150.389.500,00	4.063.919.600,00	7.249.200.000	10,873,800,000.00	4.342.323.110
5.2	**Belanja Modal**	**206.773.867.591,79**	**217.250.297.659,00**	**176.880.145.187**	**187,200,000,000.00**	**207.468.090.990**
5.2.1	Belanja Modal Tanah	5.658.514.820,00	9.651.896.350,00	3.786.391.000	3,000,000,000.00	6.000.000.000
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.385.171.074,00	8.770.687.238,00	11.153.075.904	10,500,000,000.00	30.000.000.000
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	62.402.548.286,00	97.613.890.520,00	83.652.181.099	83,500,000,000.00	70.000.000.000
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	115.356.179.449,79	97.251.294.210,00	78.050.467.184	90,000,000,000.00	100.000.000.000
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.971.453.962,00	3.962.529.341,00	160.000.000	200,000,000.00	1.000.000.000
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	78.030.000	0.00	468.090.990
5.3	**Belanja Tidak Terduga**	**2.213.824.000,00**	**8.171.030,94**	**6.615.000.000**	**1,000,000,000.00**	**1.000.000.000**
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	2.213.824.000,00	8.171.030,94	6.615.000.000	1,000,000,000.00	1.000.000.000
5.4	**Belanja Transfer**	**162.175.042.622**	**129.616.312.652,00**	**140.369.956.200**	**139,276,000,000.00**	**166.976.656.308**
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	820.561.622	0,00	3.492.249.000,00	2,138,500,000.00	2.181.858.766
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	161.355.481.000	129.616.312.652,00	136.877.707.200,00	137,137,500,000.00	164.794.797.542

Sumber : BPKAD-Bappelitbangda 2023 dan RPJMD Tahun 2021-2026 (data diolah)

Dari perkembangan yang terjadi selama pelaksanaan otonomi daerah, sistem dan mekanisme APBD menggunakan sistem anggaran kinerja. Pelaksanaan tersebut membawa implikasi kepada struktur belanja daerah. Berpedoman pada regulasi yang ada, belanja daerah bisa dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi daerah, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja. Sedangkan belanja menurut kelompok belanja terdiri dari: (i) Belanja Operasi; (ii) Belanja Modal; (iii) Belanja Tidak Terduga; dan (iv) Belanja Transfer.

3.2.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik yang berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah yang dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara APBD. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

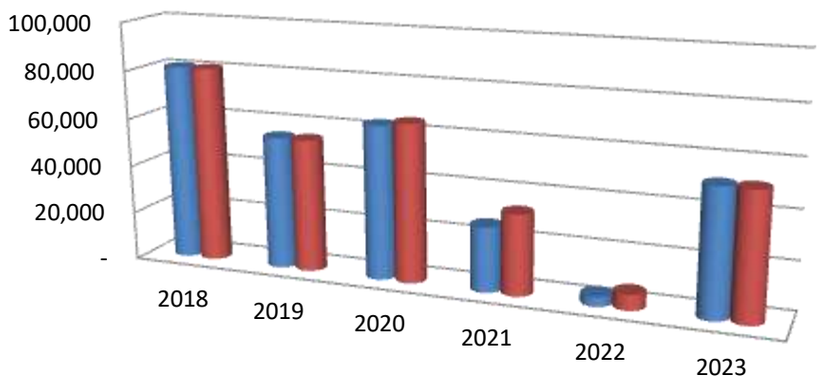
Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Penerimaan pembiayaan mencakup: (1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA); (2) Pencairan Dana Cadangan; (3) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; (4) Penerimaan Pinjaman Daerah; (5) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; (6) Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pengeluaran Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran pembiayaan terdiri dari: (1) Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo; (2) Penyertaan Modal Daerah; (3) Pembentukan Dana Cadangan; (4) Pemberian Pinjaman Daerah; dan (5) Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembiayaan Daerah Kabupaten Pesisir Barat cenderung menurun dari tahun ke tahun, hal ini menunjukkan kemampuan pengelolaan keuangan daerah yang semakin efektif dan efisien setiap tahunnya. Pada kurun waktu 2017 pembiayaan daerah berada pada angka Rp.79.796.752.551,10 (2017), sempat naik pada tahun

2018 ke angka Rp.81.130.752.613,38 (2018). Pada tahun 2019 pembiayaan daerah secara total turun menjadi sebesar Rp.54.906.488.392,89 (2019) dan naik lagi menjadi sebesar Rp.65.232.030.209,61 (2020). Pada tahun 2021 capaian menurun menjadi hanya sebesar Rp.33.260.469.686,05 (2021). Sementara untuk data capaian pada tahun 2022 pembiayaan daerah turun drastis dan tercataat sebesar Rp.6.368.180.384,74.

Gambar 3.22 Perkembangan Pembiayaan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2023 (dalam juta rupiah)

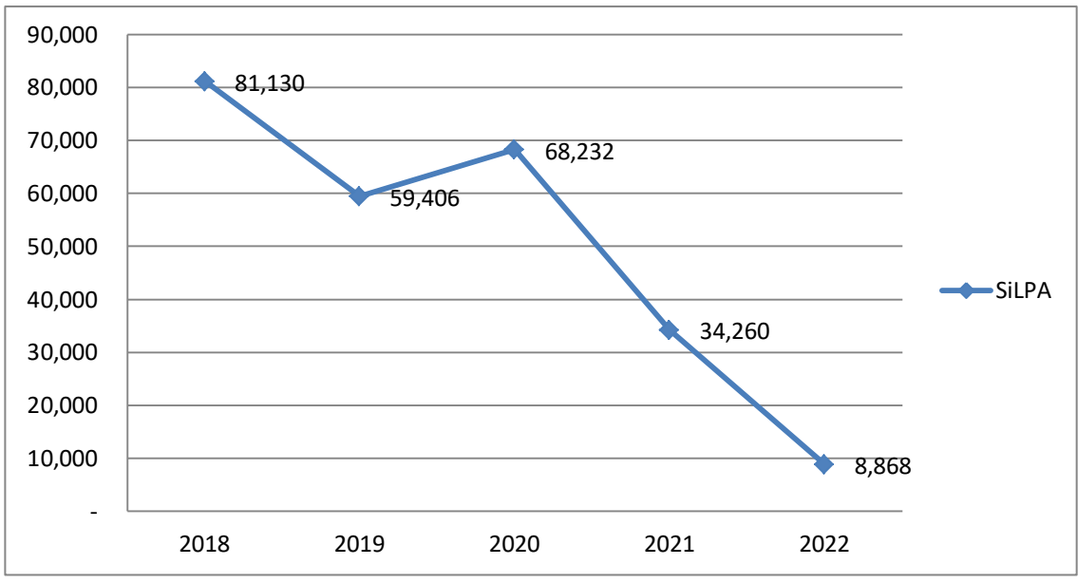


	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Target	81,171	54,940	63,511	26,760	3,868	51,686
Realisasi	81,130	54,906	65,232	33,260	6,368	51,686

Sumber : BPKAD, 2023

Perkembangan SiLPA Kabupaten Pesisir Barat pada tahun 2015 sebesar Rp.59.778.533.241,00. Angka pada tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi Rp.79.065.102.023,00; tahun 2017 dengan angka Rp.84.296.752.551,00 dan tahun 2018 sebesar Rp.81.130.752.613,38. Sementara itu pada tahun 2019 SiLPA menurun pada angka Rp.59.406.488.392,89. Pada tahun 2020, SiLPA dari APBD tercatat sebesar Rp.68.232.030.209,61 atau kembali naik dibandingkan dengan data pada tahun 2019. Tahun 2021, nilai SiLPA mengalami penurunan dan berada pada angka Rp.34.260.469.686,05. Catatan SiLPA pada tahun 2022 sebesar Rp.8.868.180.385,74.

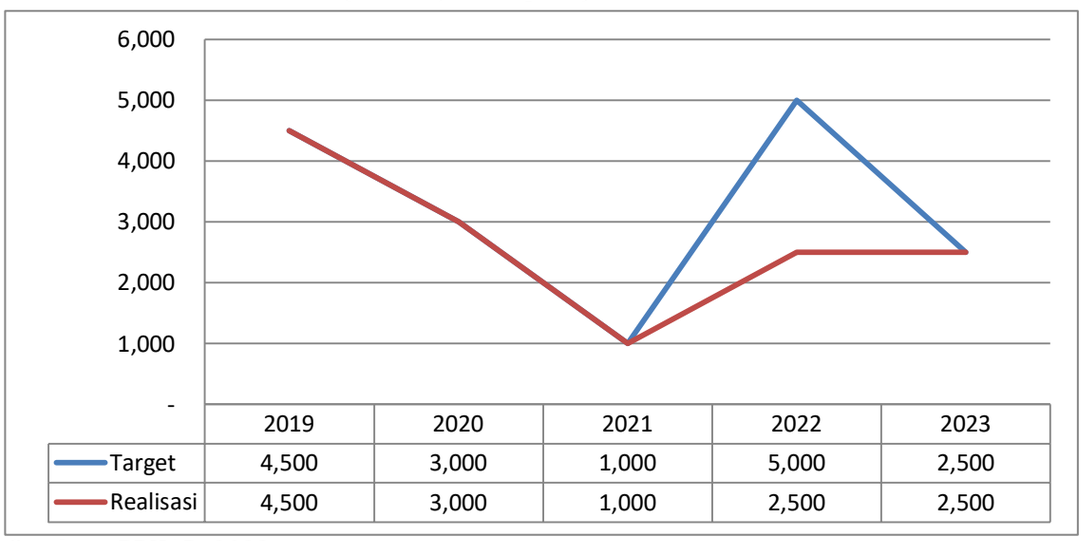
Gambar 3.23 Perkembangan SiLPA Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022 (dalam juta rupiah)



Sumber : BPKAD, 2023

Berikutnya, terkait pengeluaran pembiayaan daerah yang dianggarkan oleh Kabupaten Pesisir Barat secara umum untuk penyertaan modal pada PT. Bank Lampung dan juga BUMD PT. Krui Sukses Mandiri. Penyertaan modal melihat pada kemampuan keuangan daerah pada tahun penganggaran. Perkembangan penyertaan modal pada tahun 2017 dengan angka Rp.4.500.000.000,00 dan tahun 2018 tidak dianggarkan atau Rp.0,00. Sementara itu pada tahun 2019 dianggarkan pada angka Rp.4.500.000.000,00. Namun angka pada tahun 2019 ini turun kembali pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp.3.000.000.000,00. Tahun 2021 kembali turun ke angka sebesar Rp.1.000.000.000,00. Pada tahun 2022 pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal sebesar Rp.2.500.000.000,00.

Gambar 3.24 Perkembangan Penyertaan Modal Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022 (dalam juta rupiah)



	2019	2020	2021	2022	2023
Target	4,500	3,000	1,000	5,000	2,500
Realisasi	4,500	3,000	1,000	2,500	2,500

Sumber : BPKAD, 2023

Tabel 3.20 Realisasi Pembiayaan Daerah Dalam APBD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022

No	Uraian	Realisasi TA 2018	Realisasi TA 2019	Realisasi TA 2020	Realisasi TA 2021	Realisasi TA 2022
C	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**81.130.752.613,38**	**54.906.488.392,89**	**65.232.030.209,61**	**33.260.469.686,05**	**6.368.180.384,74**
1	**Penerimaan Pembiayaan**	**81.130.752.613,38**	**59.406.488.392,89**	**68.232.030.209,61**	**34.260.469.686,05**	**8.868.180.385,74**
1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	81.130.752.613,38	59.406.488.392,89	68.232.030.209,61	34.260.469.686,05	8.868.180.385,74
1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman/Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**0,00**	**4.500.000.000,00**	**3.000.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	**2.500.000.000,00**
1.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Penyertaan Modal	0,00	4.500.000.000,00	3.000.000.000,00	1.000.000.000,00	2.500.000.000,00
2.3	Pembayaran Pokok Hutang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber : BPKAD, 2023

Kebijakan pembiayaan daerah Kabupaten Pesisir Barat pada RKPD Tahun 2024 secara umum diarahkan tidak berbeda dengan kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun sebelumnya. Kebijakan pembiayaan daerah diarahkan untuk pengamanan sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, dan akan dipergunakan secara efisien untuk membiayai kegiatan strategis dan bernilai ekonomis tinggi, maupun cadangan penguatan modal atau dana cadangan daerah.

Sebagaimana tercantum dalam RPJMD Tahun 2021-2026, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat kedepan juga tidak menutup kemungkinan untuk melakukan pinjaman daerah bila berdasarkan pada perkembangan tahun berjalan terdapat kondisi-kondisi yang menyebabkan hal tersebut. Kondisi-kondisi dimaksud secara umum adalah ketika sumber-sumber pendapatan daerah tidak mampu menutupi defisit dari belanja daerah. Sehingga daerah melalui kajian-kajian khusus dan tematik merasa perlu membuka peluang untuk mendapatkan pendanaan melalui sumber-sumber diluar pendapatan daerah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kejian-kajian dimaksud untuk menegaskan perhitungan yang riil dan sesuai dengan kondisi terkini. Pembiayaan dimaksud bisa dalam bentuk pinjaman daerah yang diarahkan untuk membiayai pembangunan daerah dalam rangka pencapaian target-target kinerja sasaran dalam RPJMD serta program-program kerja strategis dari kepala daerah.

Pada pos pembiayaan daerah, pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk penyertaan Modal pada PT. Bank Lampung. Seluruh pengeluaran pembiayaan dimaksud juga tetap harus melalui proses pengkajian dan analisis yang sistematis dan terukur. Terkait dengan rencana penerimaan pembiayaan dari penerimaan utang untuk tahun anggaran 2023, maka pada perencanaan tahun 2024 seyogianya wajib dianggarkan juga untuk pembayaran dari utang dimaksud pada pos belanja pengeluaran pembiayaan. Namun demikian, berdasarkan pada perkembangan terkini hingga Triwulan I Tahun Anggaran 2023, rencana penerimaan pembiayaan dari utang daerah tersebut dibatalkan. Sehingga tidak ada kewajiban untuk pembayaran cicilan pokok utang.

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup: sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA); pencairan dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan pinjaman daerah; penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan penerimaan piutang daerah.

Selanjutnya dalam rangka mendukung sumber-sumber pembiayaan dan pendanaan pembangunan, maka arah kebijakan Kabupaten Pesisir Barat terhadap dana masyarakat dan mitra yang merupakan potensi daerah perlu terus dikembangkan dan didorong untuk mendukung proses pembangunan daerah. Melalui upaya menjalin kerjasama yang lebih luas dan meningkatkan partisipasi swasta/masyarakat untuk menarik investasi yang lebih besar ke Kabupaten Pesisir Barat, maka upaya yang dilakukan untuk meningkatkan investasi daerah adalah: (i) Deregulasi peraturan daerah untuk dapat meningkatkan minat berinvestasi di Kabupaten Pesisir Barat; (ii) Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Pesisir

Barat dengan pihak swasta atau dengan pihak pemerintah lain dengan perjanjian yang disepakati; (iii) Kegiatan investasi diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, di mana investasi ditujukan pada kegiatan-kegiatan yang dapat melibatkan peran masyarakat luas seperti sektor tanaman pangan dan hortikultura, kehutanan, perkebunan, peternakan, dan perikanan kemudian pengembangan industri hilir dan pengolahan yang berbasis pertanian dan kelautan, perkebunan, listrik, pariwisata, dan industri manufaktur; (iv) Mendorong investasi masyarakat yaitu investasi non-fasilitas yang banyak dilakukan oleh masyarakat terutama masyarakat lokal.

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya, mencakup: pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah. Kebijakan pengeluaran pembiayaan Kabupaten Pesisir Barat adalah: (i) Pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk pembayaran penyertaaan modal investor daerah; (ii) Mengantisipasi terjalinnya kerjasama pelaksanaan proyek pembangunan daerah, maka pengeluaran pembiayaan daerah diarahkan pada pembayaran pokok utang; (iii) Dalam hal perhitungan penyusunan RAPBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, pemerintah daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan. dalam hal perhitungan SILPA Tahun Berjalan negatif, pemerintah daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah utama daerah untuk dipenuhi, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.

Gambaran Prediksi Pembiayaan di Kabupaten Pesisir Barat selama kurun waktu 2024-2025 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.21 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020 s.d. Tahun 2025

Uraian	Tahun				
	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target 2023	Proyeksi 2024	Proyeksi 2025
PEMBIAYAAN DAERAH	**33.260.469.686,05**	**6.368.180.384,74**	**51.686.272.000**	**9.000.000.000**	**22.500.000.000**
Penerimaan Pembiayaan	**34.260.469.686,05**	**8.868.180.384,74**	**60.686,000,000**	**10.000.000.000**	**23.500.000.000**
Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)	34.260.469.686,05	8.868.180.385,74	10.686.272.000	10.000.000.000	23.500,000,000
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0	0	0
Hasil Penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan	0,00	0,00	0	0	0
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	50.000.000.000	0	0
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0	0	0
Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan	0,00	0,00	0	0	0
Pengeluaran Pembiayaan	**1.000.000.000,00**	**2.500.000.000,00**	**9.000,000,000**	**1.000.000.000**	**1.000.000.000**
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00	0,00	6.500.000.000	0	0
Penyertaan Modal Daerah	1.000.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0	0	0
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0	0	0
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan	0,00	0,00	0	0	0

Sumber : BPKAD – Bappelitbangda, 2023 dan RPJMD Tahun 2021-2026 (data diolah)

Berikuatnya, untuk mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal Daerah yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minima daerah diberikan tanggung jawab melalui pelaksanaan 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar. Untuk Kabupaten Pesisir Barat, pelaksanaan SPM dilaksanakan oleh 7 (tujuh) Perangkat Daerah di Kabupaten Pesisir Barat didapatkan asumsi perhitungan sebagai berikut:

Tabel 3.22 Kebijakan Keuangan Daerah yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat yang berkaitan dengan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2024

No	Urusan Pemerintahan	Pagu Urusan	Kegiatan Prioritas	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
1	Pendidikan	58,921,342,204	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Dasar	35,605,440,227	Dinas P dan K
			Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	18,264,500,000	Dinas P dan K
			Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	4,842,361,977	Dinas P dan K
			Kegiatan Pengelolaan Non formal/ Kesetaraan	209,040,000	Dinas P dan K
2	Kesehatan	61,360,329,708	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	43,889,952,308	Dinas Kesehatan
			Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	17,470,377,400	Dinas Kesehatan
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4,250,605,640	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan SPAM di Daerah Kabupaten/Kota	2,275,402,820	Dinas PU dan PR

			Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik di Daerah Kabupaten/Kota	1,975,202,820	Dinas PU dan PR
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1,200,000,000	Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	250,000,000	Dinas PR dan KP
			Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	950,000,000	Dinas PR dan KP
5	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	4,059,245,232	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota	2,208,744,778	Satpol PP dan Damkar
			Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	125,000,000	Satpol PP dan Damkar
			Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	738,036,704	Satpol PP dan Damkar
			Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/kota	79,522,000	BPBD

			Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	677,170,750	BPBD
			Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	230,771,000	BPBD
6	Sosial	3,692,833,955	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	412,463,270	Dinas Sosial
			Kegiatan Rehabilitasi Sosial PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	2,989,000,000	Dinas Sosial
			Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	151,370,685	Dinas Sosial
			Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	140,000,000	Dinas Sosial
	Total			**133,484,356,739**	

Sumber: Bappelitbangda, 2023

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH

Prioritas Pembangunan Daerah yaitu tema atau agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi benang merah/tonggak capaian antara (*milestones*) menuju sasaran 5 (lima) tahunan dalam RPJMD melalui rencana program pembangunan daerah tahunan RKPD. Suatu prioritas pembangunan merupakan jawaban atau target atas sasaran pembangunan daerah dalam suatu pernyataan yang mengandung komponen program prioritas dan/atau gabungan beberapa program prioritas. Suatu prioritas pembangunan daerah pada dasarnya (berisi) program-program unggulan Perangkat Daerah (terpilih) yang paling tinggi relasinya (*leading indicators*) bagi tercapainya target sasaran pembangunan daerah tahun rencana.

Dalam menentukan prioritas pembangunan, terlebih dahulu dilakukan identifikasi permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis daerah yang bersifat internal maupun eksternal. Setelah diketahui faktor penyebab atau pemicu secara internal maupun eksternal kemudian dapat disusun prioritas dan sasaran pembangunan beserta program prioritas serta kegiatan-kegiatan pembangunan yang mendukung tercapainya program tersebut.

Dengan demikian, suatu program pembangunan daerah merupakan program atau sekumpulan program unggulan kepala daerah yang berhubungan dengan perencanaan pembangunan daerah dan hasil perumusan teknokratis terkait/naskah akedemik. Tidak semua program prioritas dapat menjadi prioritas pembangunan daerah, menyangkut keterbatasan anggaran dan identifikasi masalah serta perubahan-perubahan kondisi di lapangan pada saat tahun berjalan. Suatu prioritas pembangunan dimasa lalu yang telah berhasil dicapai, tidak lagi diprioritaskan dimasa berikutnya, walau tetap harus dijaga kesinambungannya *(performance maintenance).*

Suatu prioritas pembangunan daerah juga dapat dikategorikan sebagai operasionalisasi dari tujuan strategis (rencana strategis) daerah mengingat urgensi daya ungkit pada kesejahteraan masyarakat dan cakupan pembangunannya. Sebagai suatu *strategic*, pengelolaan kinerja menjadi faktor utama bagi kepemimpinan daerah. Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta indikasi prioitas kegiatannya, juga memperhatikan apa yang diusulkan oleh Perangkat Daerah berdasarkan prakiraan maju pada RKPD tahun sebelumnya.

Metodologi penyusunan prioritas, dengan memperhatikan beberapa kriteria, antara lain:

a. Korelasinya terhadap pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan pemerintah provinsi, seperti terhadap (*Sustainable Development Goals*) SDGs, (SPM) Standar Pelayanan Minimal, program-program dalam upaya untuk pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja;

b. Korelasinya terhadap pengembangan sektor/bidang yang terkait dengan keunggulan kompetitif daerah dibandingkan dengan daerah lain (produk unggulan);

c. Korelasinya dengan usulan dari masyarakat (*stakeholders*) yang terangkum dalam Musrenbang kabupaten; dan

d. Korelasinya terhadap isu-isu strategis daerah.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

RKPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024 merupakan penjabaran dari pelaksanaan tahun ketiga RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026, yaitu tahun perencanaan 2023 untuk dilaksanakan di tahun 2024. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan tahun ketiga RPJMD, tujuan dan sasaran pembangunan di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2023 disusun berdasarkan pada: (i) Evaluasi RKPD Tahun 2022 (n-1 dari tahun perencanaan); (ii) Evaluasi Kinerja Renja Perangkat Daerah Tahun 2022; (iii) rancangan program dan pendanaan indikatif di tahun 2024 yang bersifat lintas wilayah dan lintas waktu (*multiyears*) dari RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026; (iv) telaah tujuan dan tahapan dari RPJPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2005-2025; (v) telaah arahan strategis pengembangan kewilayahan dalam RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2005-2025; (vi) telaah prioritas RPJMN Tahun 2020-2024 dan isu-isu kebijakan nasional; (vii) telaah RKPD Provinsi Lampung Tahun 2024; serta (viii) telaah RKP Nasional Tahun 2024.

Selanjutnya dalam rangka menjaga konsistensi dan sinergi demi percepatan target dan sasaran pembangunan daerah, provinsi dan nasional tujuan dan sasaran pembangunan di Kabupaten Pesisir Barat harus dapat mendukung target-target yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Pusat. Namun demikian, penyusunan tujuan dan sasaran pembangunan daerah tetap harus berpedoman pada kewenangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dalam UU No. 23 Tahun 2014 berikut aturan perubahannya dan PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana yang telah diubah dengan PP 72 Tahun 2019 sehingga dalam menyusun Program, Kegiatan dan sub kegiatan dari Perangkat Daerah harus berdasarkan pada pembagian urusan pemerintahan daerah.

Lebih lanjut, penggunaan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan wajib mengikuti Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang telah disesuaikan kembali dengan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Menyesuaikan, menyelaraskan dan mensinergikan dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Lampung Tahun 2005-2025, Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, Visi dari pembangunan Kabupaten Pesisir Barat yang terangkum dalam Visi RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026 adalah "**Terwujudnya Pesisir Barat yang Amanah, Maju dan Sejahtera**". Penjelasan secara umum dari visi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pesisir Barat yang Amanah

Pesisir Barat yang Amanah mengandung makna setiap kebijakan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah akan selalu dilandasi dan berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintahan yang amanah adalah pemerintahan yang senantiasa mampu menciptakan dan menjaga solidaritas, kepercayaan, kejujuran, kerjasama, dan komitmen yang baik dalam usaha-usaha untuk menyejahterakan masyarakat.

b. Pesisir Barat Maju

Pesisir Barat yang maju mengandung makna bahwa Pemerintah Daerah akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing daerah. Dalam artian sumber daya manusia yang kompetitif, terampil dan menguasai teknologi informasi. Sumber daya manusia yang sehat, produktif, mandiri, dinamis, kreatif dan inovatif. Sumber daya manusia yang sejahtera, jujur, beretika dan mempunyai integritas. Dengan demikian, maka akan dapat memenangkan persaingan, sehingga dapat meningkatkan nilai tambah (value added) dan rantai nilai (value chain) dari produk daerah dan sumber daya alam.

c. Pesisir Barat Sejahtera

Setelah Pesisir Barat mampu menjalankan pemerintahan yang amanah dan mampu meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia serta daya saing daerah, maka diharapkan secara bertahap Pesisir Barat akan sejahtera. Secara ekonomi, sejahtera adalah kondisi terpenuhinya berbagai kebutuhan hidup masyarakat. Dalam konteks sosial, kesejahteraan menunjuk ke jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sejahtera adalah suatu kondisi yang bersifat multidimensi yang mencakup terpenuhinya kebutuhan konsumsi dasar (pangan, sandang dan papan), tersedianya akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya, ketersediaan jaminan masa depan, tingginya kualitas sumber daya manusia serta keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan ekonomi, sosial dan bermasyarakat.

Visi tersebut diarahkan pencapaiannya dengan misi-misi pembangunan daerah dalam Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. **Misi 1: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Secara Berkeadilan, Maju Dan Berdaya Saing**

   Peningkatan kualitas dan daya saing SDM yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui: (1) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan; (2) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial; (3) Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan; (4) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan dasar berkualitas; (5) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda; (6) Pengentasan kemiskinan; dan (7) Peningkatan produktivitas dan daya saing dari angkatan kerja.

2. **Misi 2: Mengembangkan Infrastruktur Wilayah Dengan Konsep Pembangunan Inklusif Untuk Konektivitas Antar Wilayah Dengan Memperhatikan Aspek Mitigasi Bencana Dan Berwawasan Lingkungan**

   Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan melalui: (1) Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar secara bertahap dan merata, khususnya gedung pelayanan pemerintahan daerah; (2) Pembangunan infrastruktur perkotaan; (3) Pembangunan konektivitas multimoda transportasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi; (4) Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur Teknologi informasi untuk transformasi digital; (5) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan daya dukung lingkungan; (6) Peningkatan Ketahanan Bencana daerah dan Perubahan Iklim.

3. **Misi 3: Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan Melalui Peningkatan Produktivitas Sektor Pertanian Dan Perikanan**

   Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui: (1) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan perikanan dan peternakan (2) Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, industri kecil dan menengah, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital; (3) Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah; (4) Penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang; (5) Penguatan kemampuan SDM dan Iptek berbasis keunggulan wilayah.

4. **Misi 4: Mengembangkan Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah Yang Berpijak Pada Kearifan Lokal**

   Pariwisata daerah diharapkan menjadi lokomotif peningkatan ekonomi daerah, yaitu dengan konsep pembangunan inklusif seluruh sektor yang akan mendukung pariwisata daerah, melalui (1) Pembangunan destinasi pariwisata

daerah; (2) Pemajuan dan pelestarian kebudayaan; (3) Penguatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.

5. **Misi 5: Menyelenggarakan Pelayanan Publik Yang Berkualitas Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Dan Produktif Serta Penguatan Sinergitas Antar Lembaga**

   Pelayanan publik yang dekat, murah dan mudah bagi masyarakat merupakan indikator keberhasilan pengelolaan pemerintahan daerah usaha menuju kea rah ini dicapai melalui: (1) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas; (2) Penataan regulasi dan tata kelola proses perizinan dan investasi daerah; (3) Peningkatan rasa aman, ketentraman dan ketertiban di masyarakat.

Visi dan Misi, tujuan serta Sasaran Pembangunan merupakan rangkaian upaya dalam merealisasikan Visi dan Misi menjadi program dan kegiatan yang dapat direalisasikan. Dengan kata lain, merealisasikan suatu hal yang abstrak menjadi riil dan konkret. Visi dan Misi dimaksudkan untuk memberikan gambaran besar mengenai keadaan yang ingin diwujudkan dari/melalui pembangunan daerah. Gambaran besar ini harus diperjelas dalam penetapan tujuan. Tujuan dimaksudkan untuk memberi uraian tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi. Selanjutnya, hal-hal yang perlu dan harus dilakukan tersebut haruslah mengarah secara jelas terhadap sasaran yang hendak dicapai. Penetapan sasaran dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam pencapai target dan hasil yang ingin dicapai.

Sebagai kesinambungan perencanaan pembangunan jangka panjang dan jangka menengah, maka memasuki periode tahun ketiga RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026 dan periode Kedua RPJPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2005-2025, perencanaan yang harus dilalui pada tahap ini adalah tahapan perencanaan pembangunan yang ditujukan untuk mengembangkan dan meningkatkan dan/atau mempertahankan capaian-capaian dari kinerja yang telah dicapai pada periode RPJMD Tahun 2016-2021 dan pelaksanaan tahun ketiga dari RPJMD Tahun 2021-2026 dengan mensinergikan pencapaian target dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Lampung.

Pada tahapan ini pembangunan difokuskan untuk kemajuan dan kesejahteraan semua aspek, utamanya dengan peningkatan capaian dari urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar atau pelaksanaan dari Standar Pelayanan Minimal (SPM), yaitu dengan peningkatan pelayanan publik pada akses pendidikan dasar, kesehatan, peningkatan sarana dan prasarana pemerintahan, infrastruktur dan fasilitas umum penunjang di seluruh sektor, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) baik aparatur maupun SDM masyarakat, pemerataan pembangunan dengan pemberdayaan masyarakat secara aktif secara integratif dengan mengembangkan potensi lokal daerah sebagai penggerak roda perekonomian. Pemanfaatan teknologi untuk membangun perekonomian daerah melalui sumber daya manusia yang berkarakter mandiri serta berdaya saing.

Pelaksanaan pembangunan secara menyeluruh dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip *sustainable development* untuk kualitas kehidupan daerah yang lebih baik.

Dari penjelasan-penjelasan pada visi dan misi di Kabupaten Pesisir Barat sebagaimana dalam RPJMD Tahun 2021-2026 di atas terlihat adanya keterkaitan pada masing-masing poin dimana untuk mencapai sebuah cita-cita pembangunan ditetapkan melalui visi pembangunan. Selanjutnya untuk mencapai visi tersebut dituangkan melalui misi pembangunan sebagai tahapan atau tatacara untuk mencapainya. Berdasarkan misi yang ditetapkan kemudian diterjemahkan secara lebih rinci melalui sasaran pembangunan yang dideskripsikan lebih rinci pada kebijakan pembangunan. Adanya keterkaitan pada masing-masing poin tersebut dapat dilihat melalui gambar berikut :

Gambar 4.1 Hubungan Visi, Misi serta Sasaran dan Arah Kebijakan Pembangunan



Sumber : Permendagri No 86 Tahun 2017 (diolah)

Selanjutnya, di bawah ini adalah penjabaran dan uraian dari Misi dan Tujuan, Sasaran pembangunan daerah pada RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026 sebagaimana diuraikan dalam Tabel di bawah ini:

Tabel 4.1 Matrik Hubungan Antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026

Visi: **Terwujudnya Pesisir Barat yang Amanah, Maju dan Sejahtera**			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Misi I: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Secara Berkeadilan, Maju dan Berdaya Saing			
1 Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	1 Terwujudnya Sumber Daya Manusia Daerah yang Berkualitas	1 Peningkatan Akses dan Mutu Layanan Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1 Meningkatkan Layanan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Anak Usia Dini yang Terjangkau dan Bermutu bagi Penduduk
			2 Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap Fasilitas Kesehatan yang Terjangkau dan Berkualitas
			3 Peningkatan Pembinaan dan Layanan Keluarga Berencana
2 Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Pemuda dan Penduduk Usia Kerja	1 Menurunnya Jumlah Pengangguran Daerah	1 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Pemuda dan Penduduk Usia Kerja	1 Pemberdayaan dan Pengembangan Kompetensi Pemuda dan Organisasi Kepemudaan
			2 Peningkatan Kompetensi dan Ketrampilan Kerja, serta Pelayanan Penempatan Kerja bagi Penduduk Usia Kerja
3 Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak	1 Terwujudnya Kesetaraan gender dan Perlindungan Anak yang Berkualitas	1 Pengarusutamaan Gender, Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan serta Pemenuhan dan Perlindungan Anak	1 Penurunan Diskriminasi dan Peningkatan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak untuk Meningkatkan Kualitas Hidup Keluarga
Misi II: Mengembangkan Infrastruktur Wilayah dengan Konsep Pembangunan Inklusif untuk Konektivitas Antar Wilayah dengan Memperhatikan Aspek Mitigasi Bencana dan Berwawasan Lingkungan			
1 Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Daerah dan Kewilayahan	1 Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Transportasi Daerah	1 Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Jaringan Jalan dan Sarana Perhubungan Daerah	1 Penyelenggaraan Infrastruktur Jaringan Jalan

			2 Mengembangan Moda Transportasi yang Aman, Murah, Terjangkau dan Berkualitas
	2 Tersedianya Pemukiman Penduduk yang Sehat dan Berkualitas	1 Peningkatan Ketersediaan, Kualitas, dan Kapasitas Prasarana dan Sarana Jaringan Air Minum, Air Limbah, Sanitasi, Persampahan serta Pengelolaan Bangunan dan Lingkungannya	1 Pembangunan Fasilitas Layanan Permukiman dan Perumahan yang Layak dan Berkualitas dengan Memperhatikan Penataan Ruang
	3 Tersedianya Sumber Daya Air untuk Mendukung Kedaulatan Pangan	1 Peningkatan Ketersediaan, Kualitas, dan Kapasitas Prasarana dan Sarana pada Sistem Jaringan Irigasi Daerah	1 Pengembangan Jaringan Irigasi Daerah dari Hulu hingga Hilir
	4 Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Ramah Lingkungan	1 Pengendalian Lingkungan dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Udara, Air, Lahan	1 Perencanaan, Pencegahan, Penanggulangan, dan Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Kualitas Udara, Air dan Lahan
	5 Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Pencegahan dan Penyelamatan Bencana Daerah	1 Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Pencegahan dan Penyelamatan Bencana Daerah termasuk Pemadam Kebakaran	1 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pencegahan dan Penyelematan Bencana yang Efektif, Efisien dan Tepat Guna termasuk Pemadam Kebakaran
Misi III: Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan Melalui Peningkatan Produktivitas Sektor Pertanian dan Perikanan			
1 Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Daerah dengan Fokus pada Potensi Lokal	1 Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Daerah	1 Pengembangan Sektor-sektor Ekonomi Cepat Tumbuh	1 Peningkatan Produktivitas Industri Cepat Tumbuh
			2 Peningkatan Ketersediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Pendukung Perdagangan Barang dan Jasa
			3 Peningkatan dan Pengembangan Iklim investasi yang Kondusif, Stabil, dan Berdaya Saing

	2 Meningkatnya Pendapatan Perkapita Masyarakat	1 Peningkatan Produktifitas Ekonomi Masyarakat	1 Pengembangan Kewirausahaan Masyarakat yang Terintegrasi dengan Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal
	3 Meningkatnya Kontribusi Pertanian terhadap Perekonomian Masyarakat	1 Peningkatan Produksi, Produktivitas, Mutu, dan Nilai Tambah Produk Pertanian dan Perikanan	1 Optimalisasi Pengelolaan Pertanian, Perkebunan dan Peternakan
			2 Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Penyuluh dan Petani
			3 Optimalisasi Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Budidaya
			4 Optimalisasi Penyediaan, Penyaluran, dan Pengendalian Pangan di Masyarakat sesuai dengan Kebutuhan Daerah
	4 Pemerataan Distribusi Pendapatan Masyarakat	1 Penguatan Peran Koperasi dan UMKM sebagai Pengungkit Pendapatan Masyarakat Berpenghasilan Rendah	1 Peningkatan Kapasitas, Kualitas dan Kuantitas Koperasi dan UMKM
	5 Menurunnya Jumlah Penduduk Miskin Daerah	1 Mengurangi Beban Pengeluaran Penduduk Miskin dan Mempermudah Akses Mendapatkan Pelayanan	1 Penguatan dan Perluasan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial serta Penanggulangan Kemiskinan
Misi IV: Mengembangkan Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah yang Berpijak Pada Kearifan Lokal			
1 Meningkatkan Pariwisata Daerah yang Berdaya Saing	1 Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan	1 Pengembangan Destinasi Wisata, Aksesibilitas serta Atraksi dan Amenitas Pariwisata Daerah dengan Peningkatan Promosi dan Pembangunan Sumber Daya Manusia Pariwisata	1 Peningkatan Pengelolaan Pariwisata yang Terintegrasi dengan Pengelolaan Kebudayaan Daerah dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Masyarakat

Misi V: Menyelenggarakan Pelayanan Publik yang Berkualitas Melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Produktif Serta Penguatan Sinergitas Antar Lembaga			
1 Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Berkualitas	1 Terwujudnya Pelayanan Publik yang Berkualitas	1 Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Responsif, Murah, Mudah dan Cepat serta Berdaya Saing sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik serta Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	1 Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik
	2 Terwujudnya Kinerja Instansi Pemerintah Daerah yang Berkualitas	1 Penguatan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam Pemerintahan Daerah	1 Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pengendalian, Pengawasan dan evaluasi pembangunan daerah dengan berpedoman pada Penggunaan Data dan Teknologi Informasi
			2 Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Manajemen ASN yang Profesional dan Proposional
			3 Peningkatan Dukungan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah serta Peningkatan Layanan kepada Kepala Daerah dan Anggota DPRD
			4 Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Penyelenggaraan Unsur Pemerintahan Umum
			5 Penguatan Tata Kelola Informasi dan Komunikasi Publik
			6 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pimpinan dan Pemerintah Daerah

	3	Terwujudnya Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang Berkualitas	1	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah	1 Membangun Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan
	4	Meningkatnya Pembangunan di Desa/Pekon	1	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	1 Peningkatanan Pembangunan Desa dan Masyarakatnya termasuk pada Kawasan Transmigrasi

Sumber : RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026

Berikutnya, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026 sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.2 Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024

Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja Sasaran		Target Capaian				
					2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	1	Terwujudnya Sumber Daya Manusia Daerah yang Berkualitas	1	Indeks Pembangunan Manusia	64.17	64.31	65.44	65.58	65.71
Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Pemuda dan Penduduk Usia Kerja	2	Menurunnya Jumlah Pengangguran Daerah	1	Tingkat Pengangguran Terbuka	3.00	2.80 - 3.20	2.60	2.41	2.21
Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak	3	Terwujudnya Kesetaraan gender dan Perlindungan Anak yang Berkualitas	1	Indeks Pembangunan Gender	93.82	94.29	94.76	95.24	95.71
Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Daerah dan Kewilayahan	1	Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Transportasi Daerah	1	Tingkat Kemantapan Jalan	41.00	41.50	42.00	42.50	43.00
	2	Tersedianya Pemukiman Penduduk yang Sehat dan Berkualitas	1	Persentase Penduduk Yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Daya Air Yang Sehat Dan Aman	37.50	40.00	42.50	43.50	45.00
	3	Tersedianya Sumber Daya Air untuk Mendukung Kedaulatan Pangan	1	Rasio Jaringan Irigasi	52.00	53.00	57.50	57.50	60.00

	4	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Ramah Lingkungan	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	73.54	73.87	74.20	74.53	74.86
	5	Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Pencegahan dan Penyelamatan Bencana Daerah	1	Indeks Resiko Bencana	180.94	180.71	180.47	180.24	180.00
Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Daerah dengan Fokus pada Potensi Lokal	1	Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Daerah	1	Pertumbuhan Ekonomi	3.20-3.70	3.40-3.90	3.60-4.10	3.80-4.30	4,00-4.50
	2	Meningkatnya Pendapatan Perkapita Masyarakat	1	PDRB Perkapita	28.20 - 28.81	28.60 - 29.04	33.60 - 34.10	34.00 - 34.56	34.20 - 35.85
	3	Meningkatnya Kontribusi Pertanian terhadap Perekonomian Masyarakat	1	Nilai Tukar Petani	97.25	100.51	100.77	101.04	102.30
	4	Pemerataan Distribusi Pendapatan Masyarakat	1	Indeks Gini	0.32	0.32	0.30 – 0.29	0.29	0.29
	5	Menurunnya Jumlah Penduduk Miskin Daerah	1	Tingkat Kemiskinan Daerah	13.95	13.65	13.34	13.04	12.73
Meningkatkan Pariwisata Daerah yang Berdaya Saing	1	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan	1	Pertumbuhan Wisatawan Nusantara dan Mancanegara	20.00	21.00	25.00	25.00	25.00
Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Berkualitas	1	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Berkualitas	1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	76.00	77.00	80.00	80.00	80.00
	2	Terwujudnya Kinerja Instansi Pemerintah Daerah yang Berkualitas	1	Nilai SAKIP	CC	CC	CC	B	B
	3	Terwujudnya Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang Berkualitas	1	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	4	Meningkatnya Pembangunan di Desa/Pekon	1	Indeks Desa Membangun	0.6600	0.6700	0.6800	0.6900	0.7000

Sumber : RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024

Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Barat sebagaimana terangkum dalam RPJMD Tahun 2021-2026 selanjutnya akan diwujudkan ke dalam program kerja Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Barat sebagai berikut:

Tabel 4.3 Program Kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026

Misi		Program Kerja
Misi 1	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Secara Berkeadilan, Maju dan Berdaya Saing	Pembangunan sumberdaya manusia yang berkualitas yang meliputi program pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kependudukan, kepemudaan, kesetaraan gender dan perlindungan anak.
Misi 2	Mengembangkan Infrastruktur Wilayah dengan Konsep Pembangunan Inklusif untuk Konektivitas Antar Wilayah dengan Memperhatikan Aspek Mitigasi Bencana dan Berwawasan Lingkungan	Pembangunan Infrastruktur wilayah yang berkualitas yang meliputi program pembangunan bidang prasarana dan sarana transportasi, permukiman dan perumahan, air minum, sumber daya air dan irigasi, penanggulangan bencana. Lingkungan hidup dan penataan ruang.
Misi 3	Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan Melalui Peningkatan Produktivitas Sektor Pertanian dan Perikanan	Pembangunan ekonomi kerakyatan yang berkualitas yang meliputi program pembangunan bidang pertanian, perdagangan, perindustrian, investasi, dan pembangunan sektor ekonomi lainnya serta penanggulangan kemiskinan daerah.
Misi 4	Mengembangkan Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah yang Berpijak Pada Kearifan Lokal	Pembangunan pariwisata yang berkualitas dan berdaya saing yang meliputi program pembangunan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai sektor unggulan daerah.
Misi 5	Menyelenggarakan Pelayanan Publik yang Berkualitas Melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Produktif Serta Penguatan Sinergitas Antar Lembaga	Penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas meliputi program pembangunan bidang pelayanan publik, tata kelola keuangan dan aset daerah, penyelenggaraan pemerintahan dan otonomi daerah, aparatur sipil negara, dan pembangunan Desa/Pekon.

Sumber : RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026

Tema dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Pesisir Barat pada tahun 2024 secara umum masih dalam upaya pemulihan dan pembangunan ekonomi dan pembangunan daerah, kaitanya dengan usaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta pembangunan infrastruktur dan aksesbilitas daerah untuk peningkatan perekonomian daerah. Prioritas pembangunan pada tahun 2024 diarahkan pada upaya untuk melanjutkan upaya pemulihan ekonomi daerah melalui pemberdayaan masyarakat, pembangunan sektor pendidikan dan kesehatan masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas kualitas sumber daya manusia. Prioritas pembangunan pada tahun 2024 juga masih terfokus pada peningkatan kualitas perlindungan sosial, pengembangan pangan (pertanian dan perikanan), infrastruktur dan fasilitas layanan publik, pariwisata, UMKM dan sektor unggulan daerah lainnya serta reformasi birokrasi yang dilakukan dalam koridor harmonisasi kehidupan masyarakat yang berbudaya. Pada tahun 2024 arah pembangunan juga diarahkan pada penyelesaian beberapa proyek strategis daerah dalam menunjang pelayanan umum kepada masyarakat.

Lebih lanjut, *outlook* perencanaan nasional pada tahun 2024 mendatang dan diharapkan menjadi panduan bagi daerah antara lain:

a. Potensi penurunan inflasi yang lebih cepat dengan menjaga risiko tekanan inflasi yang persisten;

b. Terjaganya daya beli sejalan dengan tingkat tabungan (saving) yang tinggi;

c. Kenaikan permintaan seiring dengan pembukaan aktivitas (reopening) Tiongkok pasca kebijakan Zero Covid Policy;

d. Ekskalasi perang di Ukraina dan Fragmentasi geopolitik;

e. Resiko perubahan harga di pasar keuangan;

f. Investasi dan ekspor perlu menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi sisi permintaan;

g. Peningkatan produktivitas UMKM, pertanian dan industry manufaktur sehingga pengungkit pertumbuhan ekonomi sisi produksi;

Tema Pembangunan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024 adalah "**Pemulihan Ekonomi, Meningkatkan Sumber Daya Manusia serta Pembangunan Infrastruktur Daerah**" ditetapkan untuk mewujudkan pencapaian Visi Kabupaten Pesisir Barat "Terwujudnya Pesisir Barat yang Amanah, Maju dan Sejahtera". Berikutnya diperlukan penegasan terhadap upaya-upaya umum yang akan dilaksanakan serta akan mendasari gerak langkah Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat selama satu tahun kedepan yaitu pada tahun 2024.

Untuk menunjang pelaksanaan Tema Pembangunan tersebut, ditetapkan 5 (lima) Prioritas Pembangunan Kabupaten Pesisir Barat untuk tahun 2023 dalam pelaksanaan roda pemerintahan daerah dan perencanaan pembangunan untuk

peningkatan penjaminan terlaksananya pelayanan pembangunan daerah, sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia, dengan arah kebijakan:

    a. Meningkatkan layanan pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dina yang terjangkau dan bermutu bagi penduduk;

    b. Meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan yang terjangkau dan berkualitas;

    c. Peningkatan pembinaan dan akses layanan keluarga berencana;

    d. Penurunan diskriminasi dan peningkatan perlindungan terhadap perempuan dan anak untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga;

    e. Pemberydaan dan pengembangan kompetensi pemuda dan organisasi kepemudaan;

    f. Peningkatan kompetensi dan keterampilan kerja, serta pelayanan penempatan kerja bagi penduduk usia kerja;

2. Pembangunan Infrastruktur daerah yang berkelanjutan, dengan arah kebijakan:

    a. Penyelenggaraan infrastruktur jaringan jalan;

    b. Mengembangkan moda transportasi yang aman, murah dan terjangkau dan berkualitas;

    c. Pembangunan failitas layanan permukiman dan perumahan yang layak dan berkualitas dengan memperhatikan penataan ruang;

    d. Pengembangan jaringan irigasi daerah dari hulu hingga hilir;

    e. Perencanaan, pencegahan, penanggulangan dan pemulihan, pencemaran dan kerusakan kualitas udara, air dan lahan;

    f. Penyediaan sarana dan prasarana pencegahan dan penyelamatan bencana yang efektif, efisien dan tepat guna termasuk pemadam kebakaran;

3. Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat, dengan arah kebijakan:

    a. Peningkatan produktivitas industri cepat tumbuh;

    b. Peningkatan ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas pendukung perdagannngan barang dan jasa;

    c. Peningkatan dan pengembangan iklim investasi yang kondusif, stabil dan berdaya saing;

    d. Optimalisas pengelolaan pertanian, perkebunan dan peternakan;

e. Peningkatan dan pengembangan kapasitas kelembagaan penyuluh dan petani;

f. Optimalisasi pengelolaan Perikanan tangkap dan budidaya;

g. Optimalisasi penyediaan, penyaluran dan pengendalian pangan di Masyarakat sesuai dengan kebutuhan daerah;

h. Peningkatan kapasitas, kualitas dan kuantitas koperasi dan UMKM;

i. Penguatan dan perluasan pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial serta penanggulangan kemiskinan;

j. Peningkatan pengelolaan pariwisata yang terintegrasi dengan pengelolaan kebudayaan daerah dan pengembangan ekonomi kreatif masyarakat;

4. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas, dengan arah kebijakan:

a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pelayanan publik;

b. Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi pembangunan daerah dengan berpedoman pada penggunaan data dan teknologi informasi;

c. Peningkatan kualitas penyelenggaraan manajemen ASN yang profesional proposional;

d. Peningkatan dukungan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan perangkat daerah serta peningkatan layanan kepada kepala daerah dan anggota DPRD;

e. Peningkatan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;

f. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pimpinan dan pemerintan daerah;

g. Membangun tata kelola keuangan dan aset daerah sesuai peraturan perundang-undangan;

4. Harmonisasi kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat dengan arah kebijakan:

a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pelayanan publik;

b. Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik;

c. Peningkatan pembangunan desa dan masyarakatnya termasuk pada kawasan transmigrasi;

Tabel 4.4 Matrik Sandingan Antara Tema dan Prioritas Pembangunan Tahun 2024 dengan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026

Tema RKPD 2024	Prioritas RKPD 2024	Arah Kebijakan RKPD 2024	Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2024
Pemulihan Ekonomi, meningkatkan sumber daya manusia serta pembangunan infrastruktur daerah	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia	Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan terhadap Masyarakat	Meningkatkan Layanan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Anak Usia Dini yang Terjangkau dan Bermutu bagi Penduduk
		Peningkatan Minat Baca pada masyarakat khususnya pelajar	
		Pengelolaan Arsip daerah yang berkelanjutan	
		Pembangunan sarana dan prasarana kesehatan yang dekat dengam masyarakat termasuk keluarga berencana	Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap Fasilitas Kesehatan yang Terjangkau dan Berkualitas
			Peningkatan Pembinaan dan Akses Layanan Keluarga Berencana
		Pemberdayaan Masyarakat, termasuk keluarga, perempuan dan anak	Penurunan Diskriminasi dan Peningkatan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak untuk Meningkatkan Kualitas Hidup Keluarga
		Peningkatan kapasitas pemuda dan olahraga	Pemberdayaan dan Pengembangan Kompetensi Pemuda dan Organisasi Kepemudaan
	Pembangunan Infrastruktur daerah yang Berkelanjutan	Penyediaan sarana dan prasarana Pemerintahan Daerah	Pembangunan Fasilitas Layanan Permukiman dan Perumahan yang Layak dan Berkualitas dengan Memperhatikan Penataan Ruang
		Penyediaan sarana dan prasarana pada perumahan dan permukiman masyarakat	
		Pembangunan jaringan jalan dan jembatan	Penyelenggaraan Infrastruktur Jaringan Jalan
		Pengembangan jaringan transportasi	Mengembangkan Moda Transportasi yang Aman, Murah, Terjangkau dan Berkualitas

		Pembangunan jaringan irigasi	Pengembangan Jaringan Irigasi Daerah dari Hulu hingga Hilir
		Pengendalian banjir pada daerah sungai dan pantai	
		Pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam	Perencanaan, Pencegahan, Penanggulangan, dan Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Kualitas Udara, Air dan Lahan
		Menjaga stabilitas pemerintahan dan masyarakat	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pencegahan dan Penyelematan Bencana yang Efektif, Efisien dan Tepat Guna termasuk Pemadam Kebakaran
		Peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban	
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Kebencanaan termasuk pemadam kebakaran	
	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	Peningkatan akses dan kapasitas pencari kerja	Peningkatan Kompetensi dan Ketrampilan Kerja, serta Pelayanan Penempatan Kerja bagi Penduduk Usia Kerja
		Penyediaan lapangan pekerjaan	
		Peningkatan invenstasi di daerah	Peningkatan Produktivitas Industri Cepat Tumbuh
		Menciptakan kemudahan iklim investasi yang mudah, murah dan ramah investor	Peningkatan dan Pengembangan Iklim Investasi yang Kondusif, Stabil, dan Berdaya Saing
		Pengembangan pertanian, perikanan dan perkebunan serta peternakan masyarakat	Optimalisasi Pengelolaan Pertanian, Perkebunan dan Peternakan
		Pemberdayaan petani dan nelayan	Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Penyuluh dan Petani
		Penyediaan bantuan sarana dan prasarana Perikanan	Optimalisasi Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Budidaya
		Mempertahankan cadangan pangan masyarakat	Optimalisasi Penyediaan, Penyaluran, dan Pengendalian Pangan di Masyarakat sesuai dengan Kebutuhan Daerah

		Pemulihan sektor pariwisata sebagai salah satu potensi unggulan daerah	Peningkatan Pengelolaan Pariwisata yang Terintegrasi dengan Pengelolaan Kebudayaan Daerah dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Masyarakat
		Fasilitasi pengembangan koperasi dan UMKM	Peningkatan Kapasitas, Kualitas dan Kuantitas Koperasi dan UMKM
		Pengendalian inflasi dan harga sembako	Peningkatan Ketersediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Pendukung Perdagangan Barang dan Jasa
		Pengembangan pasar dengan meningkatkan industri kecil dan kreatif	Peningkatan Ketersediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Pendukung Perdagangan Barang dan Jasa
		Pengembangan promosi perdagangan dan perindustrian	Pengembangan Kewirausahaan Masyarakat yang Terintegrasi dengan Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal
		Pengembangan nilai-nilai luhur budaya masyarakat dan daerah dalam kehidupan	Peningkatan Pengelolaan Pariwisata yang Terintegrasi dengan Pengelolaan Kebudayaan Daerah dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Masyarakat
		Perluasan bantuan sosial kepada masyarakat	Penguatan dan Perluasan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial serta Penanggulangan Kemiskinan
	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Peningkatan pelayanan publik dan masyarakat yang mudah dan murah	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik
		Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Aparatur	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Manajemen ASN yang Profesional dan Proposional

		Peningkatan kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian serta pengawasan Pembangunan termasuk pengembangan Inovasi dalam Pembangunan	Membangun Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan
		Peningkatan pelayanan kepada Kepala Daerah dan Anggota DPRD	Peningkatan Dukungan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah serta Peningkatan Layanan kepada Kepala Daerah dan Anggota DPRD
		Pengelolaan persandian daerah yang terintegrasi	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pimpinan dan Pemerintah Daerah
		Meningkatkan nilai-nilai wawasan kebangsaan serta partisipasi masyarakat dalam pemilu	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Penyelenggaraan Unsur Pemerintahan Umum
	Harmonisasi kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat	Penyelenggaraan pemerintahan dengan berbasis SPBE	Penguatan Tata Kelola Informasi dan Komunikasi Publik
		Pemberdayaan masyarakat pekon dan kawasan transmigrasi Pengelolaan keuangan, perencanaan dan penganggaran pekon	Peningkatanan Pembangunan Desa dan Masyarakatnya termasuk pada Kawasan Transmigrasi

Sumber : RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026 (data diolah)

Prioritas pembangunan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024 dalam RKPD yang telah ditetapkan di atas disusun sebagai kesinambungan pembangunan daerah dan pusat baik melalui sistem *bottom up* maupun *top down planning* dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan pada tingkat Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Pusat Tahun 2024, sehingga pelaksanaan pembangunan ke depan dapat selaras dan berkesinambungan baik pada tingkat daerah sampai dengan tingkat pusat sesuai dengan Visi dan Misi pembangunan yang ditetapkan.

Tema Pembangunan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024 yaitu "PEMULIHAN EKONOMI, MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA SERTA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAERAH". Sedangkan Tema Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2024 adalah "PEMANTAPAN TRANSFORMASI EKONOMI DAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA MENUJU RAKYAT LAMPUNG BERJAYA" dan Tema Pembangunan Nasional Tahun 2024 adalah "MEMPERCEPAT TRANSFORMASI EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN". Berdasarkan pada masing-masing rumusan Tema Pembangunan pada Tahun 2024 tersebut di atas, dapat dilihat bahwa rumusan Tema Pembangunan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024 tersebut telah sejalan dengan RPJMN Tahun 2005-2025, RKP Tahun 2024 dan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2024 dengan titik berat pembangunan ada pada Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berkelanjutan. Tema yang ditetapkan juga telah disusun dengan memprioritaskan pembangunan infrastruktur daerah dan pelayanan publik masyarakat.

Sejalan dengan Tema dan Prioritas Pembangunan Provinsi Lampung dan Nasional yang pada utamanya adalah untuk meningkatkan pembangunan segala bidang, khususnya pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar, sehingga dengan demikian telah dapat diterangkan bahwa rumusan Tema dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Pesisir Barat telah selaras dengan target dan sasaran dari Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Pusat. Keselarasan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.5 Tema dan Prioritas Pembangunan Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung dan Pemerintah Pusat

Tema Pembangunan dan Prioritas Pembangunan					
Kabupaten Pesisir Barat		**Provinsi Lampung**		**Nasional**	
I	**Tema**	**I**	**Tema**	**I**	**Tema**
	Pemulihan Ekonomi, Meningkatkan Sumber Daya Manusia serta Pembangunan Infrastruktur Daerah		Pemantapan Transformasi Ekonomi dan Kualitas Sumber Daya Manusia menuju Rakyat Lampung Berjaya		Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan
II	**Prioritas**	**II**	**Prioritas**	**II**	**Prioritas**
1	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	1	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2	Pembagunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	2	Meningkatkan Kualitas SDM	2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	3	Pembangunan Infrastruktur	3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

4	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	4	Reformasi Birokrasi	4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5	Harmonisasi kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat	5	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya	5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
		6	Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana	6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
				7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Bila dilakukan sinkronisasi tema dan prioritas pembangunan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Lampung dan Kabupaten Pesisir Barat tahun 2024, maka akan diperoleh padanan sebagai berikut:

Tabel 4.6 Sinkronisasi Tema dan Prioritas Pembangunan Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung dan Pemerintah Pusat

Tema Pembangunan dan Prioritas Pembangunan					
Kabupaten Pesisir Barat		**Provinsi Lampung**		**Nasional**	
I	**Tema**	**I**	**Tema**	**I**	**Tema**
	Pemulihan Ekonomi, Meningkatkan **Kualitas Sumber Daya Manusia** Serta Pembangunan Infrastruktur Daerah		Pemantapan **Transformasi Ekonomi** dan **Kualitas Sumber Daya Manusia** Menuju Rakyat Lampung Berjaya		Mempercepat **Transformasi Ekonomi** yang Inklusif dan Berkelanjutan
II	**Prioritas**	**II**	**Prioritas**	**II**	**Prioritas**
1	Meningkatkan **Sumber Daya Manusia**	2	Meningkatkan Kualitas **Sumber Daya Manusia**	3	Meningkatkan **Sumber Daya Manusia** Berkualitas dan Berdaya Saing
3	Peningkatan Kualitas **Ekonomi** Masyarakat	1	Meningkatkan **Investasi** dan **Nilai Tambah Produk Unggulan**	1	Memperkuat Ketahanan **Ekonomi** untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2	Pembangunan **Infrastruktur** Daerah yang Berkelanjutan	3	Pembangunan **Infrastruktur**	2	Mengembangkan **Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan** dan Menjamin Pemerataan

		6	Pengelolaan **Lingkungan yang Berkelanjutan** dan Mitigasi Bencana	5	Memperkuat **Infrastruktur** untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
				6	Membangun **Lingkungan Hidup**, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
5	Harmonisasi kehidupan **Sosial dan Budaya** Masyarakat	5	Kehidupan Masyarakat yang **Religius**, **Aman** dan **Berbudaya**	4	**Revolusi Mental** dan Pembangunan **Kebudayaan**
4	**Reformasi Birokrasi** dan **Pelayanan Publik** Berkualitas	4	**Reformasi Birokrasi**	7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan **Transformasi Pelayanan Publik**

Tema dan prioritas pembangunan tahun 2024 tersebut juga menetapkan target sasaran makro pembangunan. Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat berusaha untuk bersinergi dalam mencapai target kinerja dimaksud dalam upaya pelaksanaan sistem pembangunan nasional yang terintegrasi dari pusat hingga daerah. Target kinerja ini dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 4.7 Keselarasan Target Sasaran Makro Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024

No	Indikator	Pemerintah Pusat	Provinsi Lampung	Kabupaten Pesisir Barat
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3 - 5,7	5,0 – 5,5	3,6 – 4,1
2	Inflasi (%)	-	3 ± 1	-
3	PDRB Perkapita (juta rupiah)	-	45 – 46	33.60 – 34.10
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,0 - 5,7	4,0 – 3,8	2,6
5	Tingkat Kemiskinan (%)	6,5 – 7,5	10,9 – 10,4	13,34
6	Indeks Pembangunan Manusia (Nilai)	73,99 – 74,02	70,6 – 71,1	65,44
7	Indeks Gini (Nilai)	0,374 – 0,377	0,293 – 0,314	0,30 - 0,29
8	Nilai Tukar Petani (Nilai)	105 – 108	105 – 106	100,77
9	Nilai Tukar Nelayan (Nilai)	107 – 110	-	-
10	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%)	27,27	7.29	11,00

Sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pembangunan daerah diharapkan mampu bersinergi dengan perencanaan pembangunan tingkat provinsi dan pusat. Berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024 serta Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional yang menjelaskan bahwa Proyek Strategis Nasional dilaksanakan sesuai dengan kebijakan pembangunan nasional dan skala prioritas yang mempertimbangkan kebutuhan, kemanfaatan, dan daya dukung atas kelancaran Proyek Strategsi Nasional, serta konektivitas antar infrastruktur dan/atau pusat kegiatan ekonomi, sehingga pelaksaaan Proyek Strategis Nasional menjadi tepat sasaran dalam mewujudkan tercapainya pertumbuhan perekonomian nasional yang meningkat dan stabil, serta terealisasinya secara konkret pemerataan hasil pembangunan nasional ke seluruh lapisan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Berikut Daftar Proyek Strategis Nasional yang berada di Provinsi Lampung, sebagai berikut:

Tabel 4.8 Daftar Proyek Strategis Nasional di Provinsi Lampung

No	Daftar Proyek Startegis Nasional	Lokasi
I	**Sektor Kereta**	
A	Kereta Api Logistik Lahat – Muara Enim – Prabumulih – Tarahan – Lampung dan Prabumulih – Kertapati/Palembang	Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Lampung
II	**Sektor Kawasan**	
A	Kawasan Industri Tanggamus	Provinsi Lampung
B	Kawasan Terintegrasi Bakauheni	Provinsi Lampung
III	**Sektor Bendungan dan Irigasi**	
A	Bendungan Way Sekampung	Provinsi Lampung
B	Bendungan Marga Tiga	Provinsi Lampung
IV	**Sektor Air Bersih dan Sanitasi**	
A	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kota Bandar Lampung	Provinsi Lampung

Berdasarkan pada data di atas, Kabupaten Pesisir Barat memiliki kesempatan untuk mengembangkan wilayah dengan memanfaatkan pada potensi pengembangan Proyek Strategis Nasional Kawasan Industri Tanggamus. Direncanakan Kawasan Industri ini akan dibangun diatas milik PT. Pertamina seluas 802 hektar, dengan infrastruktur penunjang diantaranya Dermaga/Pelabuhan milik Kementerian Perhubungan, Industri Air Baku melalui PDAM Way Agung Tanggamus, akses jalan Provinsi Lampung dan jaringan listrik PT. perusahaan Listrik Negara (PLN).

Beberapa hal yang dapat dilakukan dan juga didapatkan manfaatnya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat sebagai kabupaten tetangga dalam peluang pengembangan wilayah, antara lain:

a. Pengembangan KI Tanggamus akan semakin mengembangkan wilayah Kabupaten Tanggamus dan harapannya juga kepada Kabupaten Pesisir Barat (sebagai daerah yang berbatasan dengan Provinsi Bengkulu dan Sumatera Selatan) bila melihat pada pengembangan jalan nasional;

b. Pemanfaatan pengembangan jaringan listik PLN untuk daerah-daerah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Tanggamus;

c. Mempermudah akses terhadap Distribusi Logistik sumatera bagian Barat termasuk Pesisir Barat;

d. Memberikan peluang daerah untuk membangun industri-industri penunjang yang dibutuhkan dalam proses pembangunan hingga berjalannya KI Tanggamus;

e. Membuka lapangan pekerjaan, bagaimana Kabupaten Pesisir Barat mampu menyediakan tenaga kerja terampil yang dibutuhkan dalam proses pembangunan kawasan industri hingga nantinya kawasan tersebut selesai pembangunannya;

Sebagai tindak lanjut dan implementasi Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026 serta Visi dan Misi Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 dan sinergitas dengan Visi dan Misi Nasional (Rencana Kerja Pemerintah), maka Arah Kebijakan Umum pembangunan di Provinsi Lampung selama kurun waktu 2005-2025 akan dilakukan melalui 2 (dua) pendekatan, yakni:

1. Pendekatan Pengembangan Wilayah

Pendekatan pembangunan melalui Pengembangan Wilayah merupakan cara pendekatan pembangunan yang sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah Pusat. Dengan demikian, pendekatan kewilayahan merupakan metode pendekatan yang memungkinkan terjadinya sinergi dan kompatibilitas antara kebijakan Pemerintah Pusat dengan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung. Pengembangan Wilayah dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Pengembangan Ekonomi Wilayah, Tata Ruang, Kawasan, dan Pelestarian Lingkungan Hidup

   Perekonomian wilayah dikembangkan berdasarkan ekonomi kerakyatan yang bertumpu kepada agribisnis dan pertanian secara umum. Dengan demikian sektor pertanian akan direvitalisasi sehingga mampu kembali berkembang sebagai titik tumpu perekonomian rakyat. Pertanian yang telah mengalami revitalisasi dikembangkan pada kawasan tertentu sesuai dengan tata ruang dan kawasan tersebut dikembangkan menjadi lahan pertanian abadi.

Revitalisasi Pertanian tersebut akan memungkinkan pengembangan dan transformasi dari agribisnis menjadi agroindustri. Pengembangan agroindustri diharapkan mampu mempertahankan ketahanan pangan, menyerap tenaga kerja, dan mendorong pertumbuhan industri bioenergi serta pada akhirnya membantu meningkatkan sektor-sektor penunjang lainnya.

Pengembangan pertanian secara simultan dilakukan dengan tetap menjaga lingkungan hidup, serta telah mengantisipasi adanya perubahan iklim dan pemanasan global dengan tindakan adaptasi dan mitigasi yang baik. Dengan demikian, apa yang dilakukan akan memungkinkan terjadinya keseimbangan dinamis antara pemenuhi kebutuhan pangan dan terciptanya ketahanan pangan dengan pelestarian lingkungan hidup dan ketahanan air.

Lingkungan hidup yang terpelihara, mulai dari pantai, sampai ke gunung, teluk, dan kepulauan dioptimalkan sebagai objek wisata. Kegiatan pelestarian alam, baik berupa proses pelestarian maupun hasilnya, juga dapat dikembangkan sebagai objek wisata baru. Dengan demikian pariwisata diharapkan dapat tumbuh sebagai sumber pendapatan baru yang melibatkan masyarakat secara langsung, sehingga menjadi implementasi konkret dari konsep ekonomi kerakyatan.

b. Pengembangan Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Sosial

Infrastruktur berskala tinggi yang akan dikembangkan selain bersifat visioner dan monumental, juga bersifat fungsional dan mampu berperan sebagai lokomotif pengembangan perekonomian daerah secara keseluruhan. Infrastruktur tersebut antara lain: pengembangan Bandara Krui (Bandara M Taufik Kemas);

Sifat visioner dan monumental diperlukan sebagai daya tarik investasi, sehingga infrastruktur yang dikembangkan juga dapat tumbuh sebagai kawasan wisata baru. Sementara sifat dasar fungsional dari infrastruktur tetap dikembangkan sebagai *core* utama, sehingga kombinasi dari berbagai karakter ini diharapkan mampu mengundang investor. Dengan adanya investor, maka infrastruktur dapat tumbuh dan berkembang sebagai lokomotif yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan. Selain infrastruktur berskala tinggi juga dikembangkan infrastruktur mikro yang mampu membuka secara luas daerah yang masih terisolir. Infrastuktur mikro meliputi antara lain: jalan tembus; listrik perdesaan; air bersih perdesaan; energi matahari; dan jaringan komunikasi.

c. Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Pengembangan Budaya

Pembangunan daerah direncanakan dan akan dilaksanakan oleh seluruh sumberdaya manusia (SDM) yang berada di Provinsi Lampung. Dengan demikian, pengembangan SDM menjadi fokus penting pembangunan dalam periode RPJMD 2019-2024. Pengembangan SDM terkait dengan kemampuan,

keahlian, dan kapasitas SDM setempat, sehingga penyiapan SDM dilakukan sejak dini melalui berbagai proses pendidikan baik, baik dalam ilmu umum maupun keagamaan, kemudian diikuti dengan berbagai pelatihan peningkatan keahlian. Kondisi ini menuntut adanya penyiapan berbagai sarana, prasara, tenaga kependidikan, serta kepelatihan yang baik. Pada beberapa daerah tertentu akan dikembangkan fasilitas pendidikan dasar dan sistem pendidikan yang berskala internasional.

Penyiapan SDM didukung dengan penyiapan gizi berkualitas dan pelayanan kesehatan yang baik. Penyiapan gizi akan terkait dengan pengediaan bahan makanan lengkap (secara nutrisi) dan berkualitas, namun terjangkau. Sedangkan pelayanan kesehatan akan berkaitan dengan penyediaan kemudahan layanan kesehatan, serta tersedianya tenaga kesehatan dan obat-obatan yang mencukupi. Pelayanan kesehatan tidak saja bersifat kuratif, namun lebih penting yang bersifat preventif, terutama terhadap berbagai penyakit yang bersifat pandemik dan berbahaya seperti Covid-19 dan sejenisnya.

Pengembangan SDM Lampung dilakukan dengan tidak melepaskan aspek budaya lokal. Pengembangan budaya dilakukan dengan menggali, memperkuat, dan akhirnya mengembangkan lebih lanjut budaya lokal dalam segala bentuk manifestasinya, baik berupa tata nilai, sistem hidup, arsitektur, gerak tari, maupun pertanian, dan cara bercocok tanam. Dengan demikian, proses penyiapan SDM akan menghasilkan generasi yang unggul tanpa kehilangan jati diri.

Pada sisi lain, pengembangan budaya lokal beserta kreasinya akan mampu mendukung pengembangan pariwisata budaya. Dengan demikian pengembangan budaya lokal pada akhirnya mampu berkembang sebagai sumber pendapatan baru, sebagai pendukung ekonomi kerakyatan yang sedang dibangun dan dikembangkan.

2. Pendekatan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pendekatan pembangunan melalui Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan cara pendekatan pembangunan yang menempatkan daerah sebagai perencanan, pelaksana, pengawas dan yang mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan tersebut. Pendekatan pengelolaan keuangan daerah merupakan metode pendekatan yang memungkinkan terjadinya sinergi dan kompatibilitas antara kebijakan pengelolaan keuangan Pemerintah Pusat dengan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung. Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Optimalisasi dan Efisiensi Keuangan Daerah

Arah kebijakan umum berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Daerah yang pertama adalah melalui optimalisasi semua potensi sumber keuangan daerah dan digunakan secara efisien untuk biaya pembangunan. Optimalisasi keuangan daerah diikuti dengan tertib administrasi melalui penggunaan sistem informasi, sehingga memungkinkan terjadinya transparansi dan akuntabilitas anggaran.

b. Pengembangan Sumber Pendapatan Baru

Arah kebijakan umum berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Daerah yang kedua adalah melalui pengembangan sumber pendapatan baru secara kreatif dan inovatif, seperti pengembangan BUMD; pengembangan wisata alam berbasis pulau terpencil, wisata kuliner, serta wisata konservasi, dll. Dengan demikian pengembangan sumber pendapatan baru tersebut selaras dan sinergis dengan pengembangan perekonomian daerah yang berbasis ekonomi kerakyatan.

Prioritas-prioritas serta metode pendekatan diatas diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan sesuai kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan yang diorientasikan melalui pencapaian strategi pembangunan yang *pro-growth, pro-job, pro-poor,* dan *pro-environment*. Masih berkaitan dengan prioritas tersebut di atas, pada Kabupaten Pesisir Barat prioritas-prioritas pembangunan untuk tahun 2023 tersebut dibebankan kepada Perangkat Daerah di Kabupaten Pesisir Barat dengan langkah-langkah kebijakan disusun dalam urusan pemerintahan daerah sebagai berikut:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, Baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas, diprioritaskan pada pelaksanaan Urusan Pendidikan, Urusan Kesehatan, Urusan Tenaga Kerja, Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Urusan Pemuda dan Olahraga, Urusan Perpustakaan, Urusan Kearsipan, Urusan Transmigrasi;

2. Pembangunan Ekonomi Daerah, difokuskan pada pelaksanaan Urusan Pangan, Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Urusan Penanaman Modal, Urusan Kelautan dan Perikanan, Urusan Pariwisata, Urusan Pertanian, Urusan Perdagangan, Urusan Perindustrian;

3. Pembangunan Infrastruktur dan Aksesbilitas Daerah, difokuskan pada pelaksanaan Urusan Lingkungan Hidup, Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Urusan Pertanahan, Urusan Perhubungan;

4. Harmonisasi kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat, difokuskan pada pelaksanaan urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Urusan Sosial, Urusan Kebudayaan, Unsur Kesatuan Bangsa dan Politik; dan

5. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, difokuskan pada pelaksanaan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Statistik, Urusan Persandian, Unsur Sekretariat Daerah, Unsur Sekretariat DPRD, Unsur Perencanaan, Unsur Keuangan, Unsur Kepegawaian, Unsur Pendidikan dan Pelatihan, Unsur Penelitian dan Pengembangan, Unsur Inspektorat Daerah, Unsur Kecamatan.

Berikutnya di bawah ini adalah hubungan antara Misi dan Arah Kebijakan RPJMD periode Tahun 2021-2026 dengan Prioritas dalam RKPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024, sebagai berikut:

Tabel 4.9 Hubungan antara Misi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026 dengan Prioritas RKPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024

No	Misi RPJMD	Arah Kebijakan	Prioritas RKPD
1	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Secara Berkeadilan, Maju Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Layanan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Anak Usia Dini yang Terjangkau dan Bermutu bagi Penduduk	Meningkatkan Sumber Daya Manusia
		Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap Fasilitas Kesehatan yang Terjangkau dan Berkualitas	
		Peningkatan Pembinaan dan Layanan Keluarga Berencana	
		Pemberdayaan dan Pengembangan Kompetensi Pemuda dan Organisasi Kepemudaan	
		Peningkatan Kompetensi dan Keterampilan Kerja, serta Pelayananan Penempatan Kerja bagi Penduduk Usia Kerja	
		Penurunan Diskriminasi dan Peningkatan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak untuk Meningkatkan Kualitas Hidup Keluarga	
2	Mengembangkan Infrastruktur Wilayah Dengan Konsep Pembangunan Inklusif Untuk Konektivitas Antar Wilayah Dengan Memperhatikan Aspek Mitigasi Bencana Dan Berwawasan Lingkungan	Penyelenggaraan Infrastruktur Jeringan Jalan	Pembangunan Infrastruktur Daerah
		Mengembangkan Moda Transportasi yang Aman, Murah, Terjangkau dan Berkualitas	
		Pembangunan Fasilitas Layanan Pemukiman dan Perumahan yang Layak dan Berkualitas dengan Memperhatikan Penataan Ruang	

		Pengembangan Jaringan Irigasi Daerah dari Hulu hingga Hilir	
		Perencanaan, Pencegahan, Penanggulangan dan Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Kualitas Udara, Air dan Lahan	
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pencegahan dan Penyelematan Bencana yang Efektif, Efisien dan Tepat Guna termasuk Pemadam Kebakaran	
3	Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan Melalui Peningkatan Produktivitas Sektor Pertanian Dan Perikanan	Peningkatan Produktivitas Industri Cepat Tumbuh	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat
		Peningkatan Ketersediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Pendukung Perdagangan Barang dan Jasa	
		Peningkatan dan Pengembangan Iklim Investasi yang Kondusif, Stabil dan Berdaya Saing	
		Pengembangan Kewirausahaan Masyarakat yang Terintegrasi dengan Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal	
		Optimalisasi Pengelolaan Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	
		Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Penyuluh dan Petani	
		Optimalisasi Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Budidaya	
		Optimalisasi Penyediaan, Penyaluran dan Pengendalian Pangan di Masyarakat sesuai dengan Kebutuhan Daerah	
		Peningkatan Kapasitas, Kualitas dan Kuantitas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
		Penguatan dan Perluasan Pelaksanaan Perlidungan dan Jaminan Sosial serta Penanggulangan Kemiskinan	
4	Mengembangkan Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah Yang Berpijak Pada Kearifan Lokal	Peningkatan Pengelolaan Pariwisata yang Terintegrasi dengan Pengelolaan Kebudayaan Daerah dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Masyarakat	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat
5	Menyelenggarakan Pelayanan Publik Yang Berkualitas Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Dan Produktif Serta Penguatan Sinergitas Antar Lembaga	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	1. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas
		Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pengendalian, Pengaawasan dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan Berpedoman pada Penggunaan Data dan Tekonologi Informasi	

		Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Manajemen ASN yang Profesional dan Proposional	2. Harmonosisai Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat
		Peningkatan Dukungan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah serta Peningkatan Layanan kepada Kepala Daerah dan Anggota DPRD	
		Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Penyelenggaraan Unsur Pemerintahan Umum	
		Penguatan Tata Kelola Informasi dan Komunikasi Publik	
		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pimpinan dan Pemerintah Daerah	
		Membangun Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan	
		Peningkatan Pembangunan Desa dan Masyarakatnya termasuk pada Kawasan Transmigrasi	

Selain berpedomanan pada Tema Pembangunan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024 yang merupakan tema pentahapan pencapaian Visi dan Misi Bupati Pesisir Barat, Prioritas pembangunan daerah ditetapkan berdasarkan isu-isu strategis pembangunan daerah yang teridentifikasi berdasarkan hasil evaluasi/pengendalian dan reviu yang telah dilakukan sebagaimana diuraikan dalam Bab II dokumen ini serta memperhatikan RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026. Selain itu, penentuan prioritas pembangunan daerah juga mempertimbangkan beberapa hal lain seperti kebijakan pembangunan provinsi dan nasional serta perkembangan ekonomi regional serta global.

Rencana Arah kebijakan yang akan diambil oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat pada tahun 2024 ini pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan arah kebijakan yang diambil pada tahun-tahun sebelumnya, atau masih dalam arah kebijakan yang sebagaimana diarahkan pada RPJPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2005-2026 dan RPJMD Tahun 2021-2026. Hal utama yang mendasarinya adalah Kabupaten Pesisir Barat sebagai daerah termuda di Provinsi Lampung baru berdiri pada tahun 2013 yang lalu dan sebagai daerah yang tergolong minim dalam ketersediaan sarana dan parasarana serta pusat pelayanan publik.

Kabupaten Pesisir Barat juga masih tergolong daerah tertinggal berdasarkan pada Perpres Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024 bersama-sama dengan 62 daerah lainnya di Indonesia dan satu-satunya daerah di Provinsi Lampung (untuk perencanaan tahun 2024 hal ini dinilai masih relevan). Arah kebijakan diambil berdasarkan pada isu strategis daerah Kabupaten Pesisir Barat, sebagai berikut:

Tabel 4.10Isu Strategis dan Strategi Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024

No	Isu Strategis RKPD Tahun 2024	Strategi RKPD Tahun 2024
1	Pengembangan Kompetensi Masyarakat Dalam Upaya Pengurangan Jumlah Pengangguran Daerah Dan Pengentasan Kemiskinan	1. Penguatan Lembaga Ekonomi Masyarakat Yang Masih Kurang Optimal; 2. Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Publik di Pedesaan; 3. Optimalisasi Kelembagaan Dan Kualitas Aparatur Desa; 4. Pemberian stimulant/bantuan sosial tepat sasaran; 5. Fasilitasi Kegiatan-kegiatan Sosial dan Kemasyarakatan; 6. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam PelestarianBudaya Lokal
2	Peningkatan Pertanian Dan Perikanan Dalam Upaya Menjaga Ketahanan Pangan Daerah	1. Peningkatan Produksi Padi Dengan Perluasan Lahan Sawah (Cetak Sawah); 2. Pengembangan Pertanian Dengan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Serta Penyediaan Alat Pertanian Dan Bibit Unggul; 3. Pengembangan Peternakan Dengan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Serta Penyediaan Bibit Unggul Ternak; 4. Penguatan Dan Peningkatan Produktivitas Perikanan Tangkap Dan Perikanan Budidaya; 5. Diversifikasi Produk Pertanian, Peternakan Dan Perikanan; 6. Menjaga stabilitas harga bahan pokok daerah; 7. Peningkatan cadangan pangan daerah;
3	Penguatan Dan Pemberdayaan Struktur Perekonomian Masyarakat	1. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Pariwisata ; 2. Meningkatkan Pengelolaan Kepariwisataan Dengan Peningkatan Kualitas Sarana Dan Prasarana Pariwisata; 3. Memfasilitasi Pemasaran Produk UMKM
4	Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Publik Dalam Upaya Memperlancar Produksi Dan Distribusi	1. Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Publik di Pedesaan; 2. Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan termasuk pengembangan pasar pekon
5	Pembangunan Kewilayahan dalam upaya pemerataan Pembangunan	1. Pembangunan Perkantoran Pemerintah Daerah Dan Pembangunan Fasilitas Umum; 2. Pembangunan Jalan – Jalan Kabupaten Dan/Atau Jalan Yang Menghubungkan Antar Pekon; 3. Pembangunan Irigasi Pertanian Dan Jaringannya; 4. Pembangunan Infrastruktur Perhubungan Darat, Laut Dan Udara
6	Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Pembangunan Berkelanjutan	1. Pembangunan Ramah Lingkungan; 2. Pembangunan sesuai dengan tata ruang daerah

7	Pengembangan Pendidikan Serta Penguatan Literasi dan Pelestarian Budaya Masyarakat	1. Melaksanakan Wajib Belajar 12 Tahun Dengan Melanjutkan Upaya Untuk Memenuhi Hak Seluruh Penduduk Mendapatkan Layanan Pendidikan Dasar, Dan Memperluas Dan Meningkatkan Pemerataan Pendidikan Menengah Berkualitas; 2. Meningkatkan Kualitas Pembelajaran, Melalui Penguatan Jaminan Kualitas (Quality Assurance) Pelayanan Pendidikan Dasar; 3. Pemerataan Tenaga Pendidik di Kabupaten Pesisir Barat
8	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat, Termasuk Pengendalian Covid Dan Stunting Dengan Perspektif Perlindungan Perempuan Dan Anak	1. Peningkatan Akses Layanan Kesehatan Masyarakat; 2. Pemerataan Tenaga Kesehatan di Kabupaten Pesisir Barat; 3. Pengembangan kabupaten layak anak; 4. Pengembangan lembaga-lembaga perlindungan terhadap perempuan dan anak; 5. Peningkatan peran perempuan dalam pembangunan;
9	Mitigasi Bencana Alam Dan Non Alam	1. Penyediaan sarana dan prasarana kebencanaan; 2. Pengembangan kampung siaga bencana
10	Reformasi Birokrasi Dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	1. Optimalisasi Pelaksanaan Good Goverment Dan Clean Governance; 2. Peningkatan Pelayanan Publik yang sesuai Harapan Masyarakat; 3. Perlunya Sinkronisasi Impelementasi Peraturan Antara Tingkat Pusat Dan Daerah; 4. Peningkatan kualitas SDM Aparatur Baik Secara Kuantitas Dan Kualitas; 5. Penyusunan Peraturan Daerah Dan/Atau Peraturan Kepala Daerah Yang Berkualitas Dan Bersinggungan Langsung Dengan Kebutuhan Masyarakat; 6. Peningkatan Inovasi Daerah
11	Penguatan Stabilitas Politik, Hukum Dan Pemerintahan Dalam Pelaksanaan Pemilu Dan Pilkada Serentak Tahun 2024	1. Pengembangan wawasan kebangsaan; 2. Pendeteksian secara dini konflik sosial di masyarakat; 3. Penyediaan pendanaan pemilu dan pemilukada tahun 2024; 4. Penegakan netralitas ASN; 5. Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dengan aparat yang humanis

UU Nomor 25 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah, sesuai dengan kewenangannya; dimana SPPN bertujuan untuk: (i) mendukung koordinasi antar

pelaku pembangunan; (ii) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; (iii) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; (iv) mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan (v) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien,efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Berikutnya berdasarkan Pasal 260 Ayat (1) UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diamanatkan pula bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Wujud dari seluruh rangkaian proses-tahapan perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh masing-masing hirarki penyelenggara negara menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Menengah Nasional (RPJMN) yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden, dan dilaksanakan secara tahunan melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Demikian pula halnya ditingkat pemerintah daerah, menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah, dan dilaksanakan secara tahunan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Pada Pasal 75 Ayat (2) Permendagri No. 86 Tahun 2017 mengatur bahwa: “Rancangan Awal RKPD kabupaten/kota disusun berpedoman pada RPJMD kabupaten/kota, Rancangan Awal RKPD provinsi, RKP, program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD”. Dengan memperhatikan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, pokok-pokok kebijakan pembangunan kabupaten/kota diarahkan pada:

1. Dalam rangka sinkronisasi kebijakan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah, substansi dokumen RKPD Pemerintah Kabupaten/kota diminta untuk mengintegrasikan program/kegiatan pendukung pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai PP Nomor 2 Tahun 2018, dan mendukung kebijakan pembangunan global yang terkait dengan *Sustainable Development Goals* (SDG’s) sesuai dengan PP Nomor 59 Tahun 2018.

2. Penyusunan rencana program/kegiatan pembangunan yang akan ditetapkan dalam RKPD Kabupaten/Kota perlu memperhatikan konsistensi dan keselarasan dengan RPJMD Kabupaten/Kota, prioritas pembangunan daerah dalam RKPD Provinsi Lampung, dan prioritas pembangunan nasional dalam RKP yang disesuaikan dengan lingkup kewenangan masing-masing pemerintah daerah.

3. RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat:

    a. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan

Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;

b. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);

c. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta Pemerintah Daerah yang menjadi tanggung jawab masing- masing kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja PD; dan

d. Secara faktual, menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

4. Prioritas & Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2024:

No	Prioritas	Sasaran Makro
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,3 – 5,7 % 2. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,0 – 5,7 % 3. Rasio Gini sebesar 0,374 – 0,377 4. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,99 – 74,02 5. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sebesar 27,27 % 6. Nilai Tukar Petani/NTP sebesar 105 – 108 7. Nilai Tukar Nelayan/NTN sebesar 107 – 110 8. Tingkat Kemiskinan sebesar 6,5 – 7,5 %
2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	
5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	

5. Prioritas & Sasaran Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2024:

No	Prioritas	Sasaran Makro
1	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,0 – 5,5 % 2. Inflasi sebebesar 3 ± 1 3. Tingkat Kemiskinan sebesar 10,4 – 10,9 % 3. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,0 – 3,8 % 4. Pendapatan Perkapita sebesar Rp.45 - 46 juta 5. Indek Pembangunan Manusia sebesar 70,6 – 71,1 6. Rasio Gini sebesar 0,293 - 0,314 7. Emisi Gas Rumah Kaca 7,29; 8. Nilai Tukar Petani sebesar 105 -106; 9. Pertumbuhan PAD sebesar 8,47%; 10. Kemantapan Jalan Provinsi sebesar 78%
2	Meningkatkan Kualitas SDM	
3	Pembangunan Infrastruktur	
4	Reformasi Birokrasi	
5	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya	
6	Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana	

6. Dalam rangka peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan serta untuk menjamin konsistensi dan keterpaduan antar dokumen perencanaan (RKPD dan RPJMD) serta menjamin kepatuhan terhadap kaidah-kaidah perencanaan; Bupati/Walikota selaku Kepala Daerah menugaskan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagai *quality assurance* untuk melakukan reviu atas dokumen perencanaan, yakni reviu atas dokumen RKPD/Perubahan RKPD dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah/Perubahan Renja Perangkat Daerah.

   Berdasarkan uraian-uraian tersebut, jelaslah bahwa dalam kerangka mewujudkan tujuan bernegara, pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional yang tercantum dalam dokumen perencanaan perlu dijabarkan oleh seluruh tingkatan pemerintahan daerah, sebaliknya dapat pula dinyatakan bahwa pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional akan tercapai apabila terdapat kontribusi dari daerah; yang dimulai dari adanya keselarasan antardokumen perencanaan pusat dan daerah.

   Terkait dengan sasaran dan target makro pembangunan nasional dan Provinsi Lampung pada tahun 2024 yang terangkum dalam dokumen perencanaan RKP dan RKPD Tahun 2024 sebagaimana disebutkan diatas, maka dalam rangka pencapaiannya terdapat pula target dan sasaran makro pembangunan pada lingkup pemerintah Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2023 untuk Penyusunan RKPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024, yaitu:

No	Prioritas	Sasaran Makro
1	Meningkatkan Sumber Daya Manusia	1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 3,6 – 4,1 % 2. Tingkat Kemiskinan sebesar 13,34 % 3. Tingkat Pengangguran Terbuka 2,60 % 4. PDRB Perkapita sebesar Rp. 33,60 – 34,10 juta 5. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 65,44 6. Rasio Gini sebesar 0,30 – 0,29 7. Nilai Tukar Petani sebesar 100,77
2	Pembangunan Infrastruktur daerah	
3	Peningkatan kualitas ekonomi masyarakat	
4	Reformasi birokrasi dan pelayanan publik berkualitas	
5	Harmonisasi kehidupan sosial dan budaya masyarakat	

4.2.1 Program Prioritas Daerah

Pelaksanaan program prioritas daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat diarahkan untuk melaksanakan pencapaian dari misi, tujuan dan sasaran dari RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026 untuk tahun perencanaan 2024. selanjutnya akan dijelaskan gambaran prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2024 disandingkan dengan program dari perangkat daerah penanggung jawab berdasarkan pada pembagian pelaksanaan Urusan Wajib (Urusan Wajib Pelayanan Dasar dan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar), Urusan Pilihan, Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan, Unsur Pendukung, Unsur Penunjang, Unsur Pengawasan, Unsur Kewilayahan, serta Unsur Pemerintahan Umum berdasarkan pada Visi, Misi dan Program Kerja Kepala Daerah terpilih Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026 sebagaimana dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.11 Program Prioritas RKPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024 sesuai RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026

No	Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Prioritas RPJMD	Indikator	Target	Perangkat Daerah Pelaksana	Prioritas RKPD Tahun 2024
Misi I	**Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Secara Berkeadilan, Maju Dan Berdaya Saing**				
Tuj 1	**Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas**	**Indeks Pembangunan Manusia (Angka)**	**65.44**		**Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia**
Sas 1	**Terwujudnya Sumber Daya Manusia Daerah Yang Berkualitas**	**Indeks Pembangunan Manusia (Angka)**	**65.44**		**Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia**

	Program Pengelolaan Pendidikan	Cakupan Pemenuhan SPM Bidang Pendidikan (Persen)	100	Dinas P dan K	
	Program Pembinaan Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan Daerah yang dikelola (Lokasi)	1	Sekretariat Daerah	
	Program Pengelolaan Arsip	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara Baku (Persen)	25	Sekretariat Daerah	
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan (Persen)	100	Dinas Kesehatan	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan (Persen)	100	Dinas Kesehatan	
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Tingkat Pengawasan dan Tindak Lanjut terhadap Perizinan Usaha (Persen)	100	Dinas Kesehatan	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Puskesmas/Fasilitas Kesehatan yang Melaksanakan Kegiatan Promotif dan Preventif (Persen)	100	Dinas Kesehatan	
	Program Pengendalian Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (Persen)	0.95	Dinas PP PA dan KB	
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Total Fertility Rate (Angka)	2.17	Dinas PP PA dan KB	
	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Indeks Pembangunan Keluarga (Angka)	61.00	Dinas PP PA dan KB	
Tuj 2	**Meningkatkan Produktivitas Dan Daya Saing Pemuda Dan Penduduk Usia Kerja**	**Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)**	**2.60**		**Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia**
Sas 2	**Menurunnya Jumlah Pengangguran Daerah**	**Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)**	**2.60**		**Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia**
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Cakupan Pemenuhan Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan (Persen)	55.00	Dinas Pora	
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Cakupan Pemenuhan Pengembangan kapasitas Daya Saing Keolahragaan (Persen)	50.00	Dinas Pora	

	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)	2.60	Dinas Trans Naker dan Perindustrian	
	Program Penempatan Tenaga Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (Persen)	73.88	Dinas Trans Naker dan Perindustrian	
	Program Hubungan Industrial	Cakupan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Persen)	70.00	Dinas Trans Naker dan Perindustrian	
Tuj 3	**Meningkatkan Kesetaraan Gender Dan Perlindungan Anak**	**Indeks Pembangunan Gender (Angka)**	**94.29**		**Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia**
Sas 3	**Terwujudnya Kesetaraan Gender Dan Perlindungan Anak Yang Berkualitas**	**Indeks Pembangunan Gender (Angka)**	**94.29**		**Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia**
	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan Perencanaan Pembangunan yang Responsif Gender (Persen)	100	Dinas PP PA dan KB	
	Program Perlindungan Perempuan	Cakupaan Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan (Persen)	100	Dinas PP PA dan KB	
	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Cakupan Perempuan sebagai Tenaga Profesional (Persen)	35.00	Dinas PP PA dan KB	
	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Cakupan Lembaga Penyedia Layanan Terhadap Anak (Persen)	33.33	Dinas PP PA dan KB	
	Program Perlindungan Khusus Anak	Cakupan Pendampingan Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (Persen)	100	Dinas PP PA dan KB	
Misi II	**Mengembangkan Infrastruktur Wilayah Dengan Konsep Pembangunan Inklusif Untuk Konektivitas Antar Wilayah Dengan Memperhatikan Aspek Mitigasi Bencana Dan Berwawasan Lingkungan**				
Tuj 1	**Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Daerah Dan Kewilayahan**	**Indeks Kualitas Infrastruktur (Angka)**	**60.00**		**Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan**

Sas 1	**Tersedianya Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Transportasi Daerah**	**Tingkat Kemantapan Jalan (Persen)**	**42.00**		**Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan**
	Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan (Persen)	42.00	Dinas Pu dan PR	
	Program Pengembangan Permukiman	Persentase Jalan Desa Strategis dengan kondisi baik (Persen)	30.00	Dinas PU dan PR	
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Pelayanan Angkutan Darat (Persen)	72.50	Dinas Perhubungan	
	Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase Cakupan Wilayah yang terlayani Angkutan Laut (Persen)	60.00	Dinas Perhubungan	
Sas 2	**Tersedianya Pemukiman Penduduk Yang Sehat Dan Berkualitas**	**Persentase Penduduk yang Memiliki Akses terhadap Sumber Daya Air yang Sehat dan Aman (Persen)**	**42.50**		**Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan**
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Penduduk yang Memiliki Akses terhadap Sumber Daya Air yang Sehat dan Aman (Persen)	42.50	Dinas PU dan PR	
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (Persen)	74.76	Dinas PU dan PR	
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Pelayanan Sanitasi Sub Sektor Drainase Lingkungan (Persen)	35.00	Dinas PU dam PR	
	Program Pengembangan Perumahan	Rasio Rumah Layak Huni (Persen)	88.00	Dinas PR dan KP	
	Program Kawasan Permukiman	Rasio Permukiman Layak Huni (Persen)	42.50	Dinas PR dan KP	
	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Permukiman yang Tertata (Persen)	50.00	Dinas PR dan KP	
Sas 3	**Tersedianya Sumber Daya Air Untuk Mendukung Kedaulatan Pangan**	**Rasio Jaringan Irigasi (Persen)**	**55.00**		**Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan**
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Cakupan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air Daerah (Persen)	45.00	Dinas PU dan PR	

Sas 4	**Pembangunan Infrastruktur Daerah Yang Ramah Lingkungan**	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Angka)**	**74.20**		**Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan**
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang Didukung dengan Prasarana Sarana Umum (Persen)	45.00	Dinas PR dan KP	
	Program Penataan Bangunan Gedung	Rasio Prasarana, Sarana dan Utilitas Dasar (PSU) Perkantoran Pemerintahan Daerah dalam Skala Mantap (Persen)	70.00	Dinas PU dan PR	
	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Rasio Kawasan yang Memiliki Ruang Terbuka Hijau (RTH) (Persen)	5.00	Dinas PU dan PR	
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Jasa Kontruksi yang Handal dan dapat Diandalkan (Persen)	3500	Dinas PU dan PR	
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Cakupan Informasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten beserta Rinciannya melalui Peta Digital dan Peta Analog (Persen)	30.00	Dinas PU dan PR	
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Cakupan Dokumen Perencanaan Lingkungan hidup (Persen)	100	Dinas LH	
	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Angka)	74.20	Dinas LH	
	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Cakupan Area Pelayanan Persampahan (Persen)	54.70	Dinas LH	
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH) per Satuan Luas Wilayah (Persen)	5.00	Dinas LH	
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Cakupan Pengendalian terhadap Izin Lingkungan, Izin Perlindungan dan Pengengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Izin Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Berbasis Lingkungan Hidup (PUU LH) (Persen)	100	Dinas LH	

	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan Pplh	Persentase Penetapan Hak Masyarakat Hukum Adat (Persen)	35.00	Dinas LH	
	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Jumlah Kepala Keluarga Penerima Akses Reformasi Agraria (Kepala Keluarga)	5.000	Dinas PR dan KP	
	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Rasio Luas Tanah yang Disediakan bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Kepentingan Lainnya (Ha)	11.00	Dinas PR dan KP	
	Program Pengelolaan Tanah Kosong	Cakupan Pemanfaatan Tanah Kosong (Persen)	2.90	Dinas PR dan KP	
Sas 5	**Tersedianya Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Pencegahan Dan Penyelamatan Bencana Daerah**	**Indeks Resiko Bencana (Angka)**	**180.47**		**Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan**
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Peresentase Pelayanan Pemadam dan Penyelamatan Kebakaran (Persen)	100	Satpol PP dan Damkar	
	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat Diselesaikan (Persen)	100	Satpol PP dan Damkar	
	Program Penanggulangan Bencana	Cakupan Penanggulangan Bencana Daerah (Persen)	100	BPBD	
Misi III	**Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan Melalui Peningkatan Produktivitas Sektor Pertanian Dan Perikanan**				
Tuj 1	**Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Daerah Dengan Fokus Pada Potensi Lokal**	**Pertumbuhan Ekonomi (persen)**	**3,60 s/d 4,10**		**Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat**
Sas 1	**Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Daerah**	**Pertumbuhan Ekonomi (persen)**	**3,60 s/d 4,10**		**Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat**
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB (Persen)	11.56	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	

	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan harga Barang Kebutuhan Pokok (Persen)	50.00%	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	
	Program Pengembangan Ekspor	Net Ekspor Barang dan Jasa	43.141	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Investor Berskala Nasional baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) (Perusahaan/ Perorangan)	750	Dinas PM dan PTSP	
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rasio Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha terhadap Ketentuan Perizinan (Persen)	80.00	Dinas PM dan PTSP	
	Program Promosi Penanaman Modal	Pertumbuhan Nilai Investasi PMA (Persen)	6.05	Dinas PM dan PTSP	
	Program Pelayanan Penanaman Modal	Pertumbuhan Nilai Investasi PMDN (Persen)	16.99	Dinas PM dan PTSP	
	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah Data Laporan Perizinan dan Non Perizinan (Laporan)	5	Dinas PM dan PTSP	
Sas 2	**Meningkatnya Pendapatan Perkapita Masyarakat**	**PDRB Perkapita (juta)**	**28,60 s/d 29,04**		**Pembangunan Ekonomi Daerah**
	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin (Persen)	40.00	Dinas Trans Naker dan Perindustrian	
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Kontribusi sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (Persen)	3.99	Dinas Trans Naker dan Perindustrian	
Sas 3	**Meningkatnya Kontribusi Pertanian Terhadap Perekonomian Masyarakat**	**Nilai Tukar Petani (Angka)**	**100.77**		**Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat**
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Nilai Tukar Petani (Angka)	100.77	Dinas KP dan Pertanian	
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Produksi Sektor Pertanian (Ton)	148.340	Dinas KP dan Pertanian	
	Program Penyuluhan Pertanian	Cakupan Bina Kelompok Tani (Poktan)	975	Dinas KP dan Pertanian	

	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis (Persen)	86.00	Dinas KP dan Pertanian	
	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) (Persen)	86.00	Dinas KP dan Pertanian	
	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Ketersediaan Pangan Utama (Ton)	28,000	Dinas KP dan Pertanian	
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Peresentase Daerah Rentan Rawan Pangan (Persen)	4.50	Dinas KP dan Pertanian	
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar asal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan (Persen)	60.00	Dinas KP dan Pertanian	
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	14.419	Dinas Perikanan	
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	19.209	Dinas Perikanan	
	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Proporsi Tangkapan Ikan yang Berada dalam Batas Biologis yang Aman (Angka)	0.032	Dinas Perikanan	
	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Nilai Tukar Nelayan (Angka)	104	Dinas Perikanan	
Sas 4	**Pemerataan Distribusi Pendapatan Masyarakat**	**Indeks Gini (Angka)**	**0.30 – 0.29**		**Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat**
	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif (Persen)	52.50	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	
	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase Pengurus Koperasi Berkompeten (Persen)	50.00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Kontribusi UMKM terhadap PDRB (Persen)	2.08	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	
Sas 5	**Menurunnya Jumlah Penduduk Miskin Daerah**	**Tingkat Kemiskinan Daerah (Persen)**	**13.34**		**Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat**

	Program Pemberdayaan Sosial	Terdatanya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (Persen)	100	Dinas Sosial	
	Program Rehabilitasi Sosial	Cakupan Pemenuhan SPM bidang Sosial (Persen)	100	Dinas Sosial	
	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Cakupan Perlindungan dan Jaminan Perlindungan Sosial Daerah (Persen)	100	Dinas Sosial	
	Program Penanganan Bencana	Cakupan Pemenuhan pasca Bencana (Persen)	100	Dinas Sosial	
Misi IV	**Mengembangkan Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah Yang Berpijak Pada Kearifan Lokal**				
Tuj 1	**Meningkatkan Pariwisata Daerah Yang Berdaya Saing**	**Kontribusi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB (Persen)**	**1.76**		**Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat**
Sas 1	**Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan**	**Pertumbuhan Wisatawan Nusantara dan Mancanegara (persen)**	**25.00**		**Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat**
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Kontribusi PAD Sektor Pariwisata (Persen)	2.98	Dinas Pariwisata	
	Program Pemasaran Pariwisata	Kunjungan Wisatawan (Orang)	494.527	Dinas Pariwisata	
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Cakupan Fasilitasi Pengembangan Sunber Daya Manusia Pariwisata (Persen)	30.00	Dinas Pariwisata	
	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Direvitalisasi dan Invetarisasi (Persen)	30.00	Dinas P dan K	
	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Penduduk Usia 10 tahun keatas yang Terlibat Pertunjukan Seni (Persen)	25.00	Dinas P dan K	
Misi V	**Menyelenggarakan Pelayanan Publik Yang Berkualitas Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Dan Produktif Serta Penguatan Sinergitas Antar Lembaga**				

Tuj 1	**Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Berkualitas**	**Indeks Reformasi Birokrasi (Angka)**	**C**		**Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas**
Sas 1	**Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Berkualitas**	**Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik (Angka)**	**80.00**		**Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas**
	Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan Penerbitan Kartu Identitas (Persen)	100	Dinas Capil	
	Program Pencatatan Sipil	Cakupan Penerbitan Akta Pencatatan Sipil (Persen)	100	Dinas Capil	
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan (Persen)	100	Dinas Capil	
	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase Data Kependudukan Skala Kabupaten dalam 1 Tahun (Persen)	100	Dinas Capil	
	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase Peningkatan Desiminasi Informasi dan Komunikasi Publik (Persen)	82.50	Dinas Kominfo Statistik dan Persandian	
	Program Aplikasi Informatika	Persentase Peningkatan Layanan Informasi dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan komunikasi (TIK) (Persen)	80.00	Dinas Kominfo Statistik dan Persandian	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Persen)	100	Kecamatan Bangkunat; Krui Selatan; Lemong; Ngambur; Ngaras; Pulau Pisang; Pesisir Selatan; Pesisir Utara	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Persen)	100	Kecamatan Pesisir Tengah	
Sas 2	**Terwujudnya Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Yang Berkualitas**	**Nilai SAKIP (Huruf/Predikat)**	**CC**		**Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas;** **Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat;**

	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	92.50	Seluruh Perangkat Daerah	
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Data dan Informasi Statistik Daerah yang Tersusun dengan Baik (Dokumen)	2	Dinas Kominfo Statistik dan Persandian	
	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Pengamanan Informasi Daerah yang Terselenggara baik (Persen)	100	Dinas Kominfo Statistik dan Persandian	
	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Cakupan Konsistensi Dokumen Perencanaan terhadap Dokumen Penganggaran (Persen)	100	Bappelitbangda	
	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan Konsistensi Keselarasan Program Prioritas Daerah terhadap Program Prioritas Pusat (Persen)	90.00	Bappelitbangda	
	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Indeks Inovasi daerah (Angka)	Sangat Inovatif	Bappelitbangda	
	Program Kepegawaian Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian (Persen)	73.54	BKPSDM	
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase pejabat ASN telah yang mengikuti pelatihan kepemimpinan (Persen)	22.42	BKPSDM	
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Cakupan Konsistensi Perencanan, Pengelolaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Anggaran terhadap Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan (Persen)	100	Inspektorat	
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Cakupan Konsistensi Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi terhadap Kepatuhan Peraturan perundang-undangan (Persen)	100	Inspektorat	
	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Cakupan Penyelenggaraan Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Persen)	85.00	Sekretariat Daerah	

	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Cakupan penyelenggaraan Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan (Persen)	85.00	Sekretariat Daerah	
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Tersusun dan Terintegrasinya Program-program kerja DPRD untuk Melaksanakan fungsi Pengawasan, fungsi Pembentukan perda, dan Fungsi anggaran dalam Dokumen Rencana lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) (Persen)	100	Sekretariat DPRD	
	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Wawasan Kebangsaan (Persen)	49.00`	Badan Kesbangpol	
	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu (Persen)	84.92	Badan Kesbangpol	
	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Masyarakat yang Aktif (Persen)	75.00	Badan Kesbangpol	
	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya (Persen)	67.50	Badan Kesbangpol	
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Koordinasi dan Peran Lembaga dan Elemen Masyarakat dalam Pencegahan terjadinya Konflik Sosial (Persen)	75.00	Badan Kesbangpol	
Sas 3	**Terwujudnya Tata Kelola Keuangan Dan Aset Daerah Yang Berkualitas**	**Opini BPK (Huruf/Predikat)**	**WTP**		**Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik**
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Cakupan Tata Kelola Keuangan Daerah sesuai Aturan (Persen)	100	BPKAD	

	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Cakupan Tata Kelola Barang Milik Daerah sesuai Aturan (Persen)	100	BPKAD	
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rasio PAD Terhadap Pendapatan Daerah (Persen)	4.20	Bapenda	
Sas 4	**Meningkatnya Pembangunan Desa**	**Indeks Desa Membangun (Angka)**	**0.6800**		**Pembangunan SDM, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas**
	Program Penataan Desa	Jumlah Desa Berkembang (Pekon)	60	Dinas PMP	
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Cakupan Pekon Tertib Administrasi (Pekon)	100	Dinas PMP	
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Cakupan Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat (Pekon)	100	Dinas PMP	
	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Nilai Rata-rata Indeks Perkembangan 100 Kawasan Transmigrasi Prioritas Kementerian yang direvitalisasi (Angka)	42.53	Dinas Trans Naker dan Perindustrian	
	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang dibina (Lokasi)	1	Dinas Trans Naker dan Perindustrian	

Sumber : RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026 (data diolah)

4.2.2 Dukungan terhadap Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* (TPB/*SDGs*)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs), menggantikan program sebelumnya *Millennium Development Goals* (MDGs) yang selesai pada akhir tahun 2015. SDGs tersebut akan otomatis berlaku bagi negara-negara maju dan berkembang untuk 15 tahun ke depan di mulai pada tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2030. Pembangunan Berkelanjutan didefinisikan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi masa mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.

Adapun elemen dari pembangunan berkelanjutan yaitu bidang sosial ekonomi dan lingkungan hidup. Agenda SDGs disusun berdasarkan capaian MDGs, dengan target dan sasaran yang diperluas. SDGs jauh lebih komprehensif dan transformatif dibandingkan dengan MDGs. Komprehensif karena melibatkan negara maju dan berkembang dengan tujuan yang lebih luas, mencakup tujuan sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta menetapkan mekanisme untuk mengimplementasikan 17 tujuannya tersebut, yaitu melalui perangkat implementasi (*means of implementations*). Kemudian, transformatif karena tidak meninggalkan siapapun di

belakang. Mereka yang miskin, rentan, ataupun difabel didorong untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan berkelanjutan, dan menikmati manfaat sebesar-besarnya dari SDGs. Indonesia siap dan berkomitmen penuh untuk melaksanakan SDGs karena sejalan dengan visi pembangunan Indonesia dan sudah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJPN) 2005-2025. Indonesia memiliki 119 target yang sesuai dengan 169 target SDGs.

Kabupaten Pesisir Barat juga berkomitmen untuk mewujudkan pelaksanaan seluruh sektor 17 Tujuan TPB, yaitu: (1) Mengentaskan Segala Bentuk Kemiskinan; (2) Menghentikan Kelaparan, Meningkatkan Ketahanan Pangan dan Nutrisi, Serta Mempromosikan Pertanian Berkelanjutan; (3) Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Mempromosikan Kesejahteraan Bagi Semua Penduduk dalam Segala Usia; (4) Menjamin Kualitas Pendidikan Dasar yang Inklusif dan Merata serta Mempromosikan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat bagi Semua; (5) Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Semua Perempuan dan Anak Perempuan; (6) Menjamin Ketersediaan dan Manajemen Air Bersih Serta Sanitasi yang Berkelanjutan Untuk Semua; (7) Energi bersih dan terjangkau untuk semua; (8) Mempromosikan Keberlanjutan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan , Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh Serta Pekerjaan Yang Layak; (9) Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Mempromosikan Industri yang Inklusif dan Berkelanjutan serta Mendorong Inovasi; (10) Mengurangi Kesenjangan dalam Negara dan Antar Negara; (11) Membangunan Kota dan Permukiman yang Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan; (12) Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan; (13) Penanganan Perubahan Iklim dan Dampaknya; (14) Konservasi dan Pemanfaatan Sumber Daya Laut, Samudera dan Maritim; (15) Pelestarian dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Darat; (16) Perdamaian, Kelembagaan dan Keadilan yang Kokoh; (17) Kemitraan untuk Semua Tujuan Pembangunan serta memastikan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.

Berikutnya, dalam upaya pencapaian TPB/SDGs Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan pada kewenangan daerah disajikan sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 4.12 Sinkronisasi RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026 terhadap Pencapaian Tujuan SDGs Kabupaten Pesisir Barat

Misi RPJMD	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD		TPB/SDGs
Misi I Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Secara Berkeadilan, Maju dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	1	Terwujudnya **Sumber Daya Manusia** Daerah yang Berkualitas	Tujuan 3 Menjamin **Kehidupan yang Sehat** dan Mempromosikan **Kesejahteraan** bagi **Semua Penduduk** dalam segala Usia

				Tujuan 4 Menjamin Kualitas **Pendidikan** yang Inklusif dan Merata serta Mempromosikan Kesempatan Belajar sepanjang Hayat bagi Semua
	Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Pemuda dan Penduduk Usia Kerja	2	Menurunnya Jumlah **Pengangguran Daerah**	Tujuan 8 Mempromosikan Keberlanjutan Pertumbuhan EKonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, **Kesempatan Kerja** yang Produktif dan Menyeluruh serta **Pekerjaan yang Layak**
	Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak	3	Terwujudnya **Kesetaraan gender dan Perlindungan Anak** yang Berkualitas	Tujuan 5 Mencapai **Kesetaraan Gender** dan Memberdayakan Semua **Perempuan dan Anak Perempuan**
Misi II Mengembangkan Infrastruktur Wilayah dengan Konsep Pembangunan Inklusif untuk Konektivitas Antar Wilayah dengan Memperhatikan Aspek Mitigasi Bencana dan Berwawasan Lingkungan	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Daerah dan Kewilayahan	1	Tersedianya **Prasarana, Sarana, dan Utilitas** Transportasi Daerah	Tujuan 9 Mempromosikan **Infrastruktur** yang Tangguh, Mempromosikan Industri yang Inklusif dan Berkelanjutan serta Mendorong Inovasi
		2	Tersedianya **Pemukiman Penduduk** yang Sehat dan Berkualitas	Tujuan 11 Membangun Kota dan **Permukiman** yang Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan
		3	Tersedianya **Sumber Daya Air** untuk Mendukung Kedaulatan Pangan	Tujuan 6 Menjamin Ketersediaan dan **Manajemen Air Bersih serta Sanitasi** yang Berkelanjutan untuk Semua
		4	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang **Ramah Lingkungan**	Tujuan 7 **Energi Bersih** dan Terjangkau untuk Semua Tujuan 14 Pelestarian dan Pemanfaatan Berkelanjutan **Ekosistem Darat**

		5	Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Pencegahan dan Penyelamatan **Bencana Daerah**	Tujuan 13 Penanganan **Perubahan Iklim dan Dampaknya** Tujuan 14 **Konservasi** dan Pemanfaatan Sumber Daya Laut, Samudera dan Maritim
Misi III Mengembangk an Ekonomi Kerakyatan Melalui Peningkatan Produktivitas Sektor Pertanian dan Perikanan	Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Daerah dengan Fokus pada Potensi Lokal	1	Meningkatnya Laju **Pertumbuhan Ekonomi** Daerah	Tujuan 8 Mempromosikan Keberlanjutan **Pertumbuhan EKonomi** yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh serta Pekerjaan yang Layak Tujuan 9 Mempromosikan Infrastruktur yang Tangguh, Mempromosikan **Industri** yang Inklusif dan Berkelanjutan serta Mendorong Inovasi
		2	Meningkatnya **Pendapatan Perkapita** Masyarakat	Tujuan 12 Menjamin **Pola Produksi dan Konsumsi** yang Berkelanjutan
		3	Meningkatnya Kontribusi **Pertanian** terhadap Perekonomian Masyarakat	Tujuan 2 Menghentikan Kelaparan, Meningkatkan **Ketahanan Pangan** dan Nutrisi serta Mempromosikan **Pertanian** Berkelanjutan
		4	Pemerataan **Distribusi Pendapatan** Masyarakat	Tujuan 10 Mengurangi **Kesenjangan** dalam Negara dan Antar Negara
		5	Menurunnya Jumlah **Penduduk Miskin** Daerah	Tujuan 1 Mengentaskan Segala Bentuk **Kemiskinan**
Misi IV Mengembangkan Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah yang Berpijak Pada Kearifan Lokal	Meningkatkan Pariwisata Daerah yang Berdaya Saing	1	Meningkatnya Jumlah **Kunjungan Wisatawan**	Tujuan 8 Mempromosikan Keberlanjutan **Pertumbuhan EKonomi** yang Inklusif dan Berkelanjutan, **Kesempatan Kerja** yang Produktif dan Menyeluruh serta **Pekerjaan yang Layak**

Misi V Menyelenggarakan Pelayanan Publik yang Berkualitas Melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Produktif Serta Penguatan Sinergitas Antar Lembaga	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Berkualitas	1	Terwujudnya **Pelayanan Publik** yang Berkualitas	Tujuan 17 **Kemitraan untuk Semua** Tujuan Pembangunan
		2	Terwujudnya **Kinerja Instansi** Pemerintah Daerah yang Berkualitas	Tujuan 17 **Kemitraan untuk Semua** Tujuan Pembangunan
		3	Terwujudnya **Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah** yang Berkualitas	**Tujuan 17 Kemitraan untuk Semua** Tujuan Pembangunan
		4	Meningkatnya **Pembangunan di Desa/ Pekon**	Tujuan 16 Perdamaian, **Kelembagaan** dan Keadilan yang Kokoh

Upaya untuk pencapaian SDGs di Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung dan juga Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung termasuk Kabupaten Pesisir Barat hendakya dimulai dari area-area prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya bidang pendidikan dan kesehatan. Bahwa aspek pendidikan dan kesehatan, terutama pendidikan usia dini dan pendidikan dasar (sesuai dengan kewenangan daerah) merupakan hal yang harus diprioritaskan dalam pencapaian target SDGs. Oleh karena itu, agenda pembangunan sebaiknya difokuskan pada penyediaan layanan pendidikan minimal di tingkat menengah dan penguasaan IPTEK. Sementara itu, target utama pembangunan SDM dibidang kesehatan adalah tersedianya akses universal terhadap jaminan kesehatan, terutama bagi kalangan perempuan dan anak-anak. Aspek pencegahan dan hidup sehat menjadi lebih utama dibandingkan dengan aspek kuratif. Penting untuk segera mewujudkan akses universal jaminan kesehatan yang berkelanjutan, termasuk dari sisi kualitas pelayanan dan pembiayaannya.

2. Tersedianya infrastruktur dasar secara penuh, terutama air bersih dan sanitasi yang baik di daerah perdesaan maupun perkotaan. Pemerintah daerah dituntut agar dapat berinovasi dalam penyediaan infrastruktur dasar tersebut mengingat air bersih merupakan kebutuhan dasar manusia.

3. Penguatan konektivitas antar wilayah melalui tersedianya infrastruktur-infrastruktur yang dapat memperkuat konektivitas antar wilayah termasuk ke dalam prioritas pembangunan. Kehadiran infrastruktur multi-moda yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan ekonomi, seperti jalan darat, kereta api, pesawat terbang dan kapal laut merupakan salah satu komponen penting untuk peningkatan PDRB di masing-masing daerah. Sekaligus hal ini dapat menjadi jalan untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah.

4. Penghidupan yang layak melalui ketersediaan lapangan kerja yang layak. Penciptaan lapangan kerja yang layak dapat didorong dengan menggali potensi-potensi ekonomi yang baru dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

5. Penggunaan institusi dan tata kelola (*good governance*) yang baik akan menjamin tercapainya berbagai target dalam SDGs dengan lebih cepat dan tepat sasaran. Hal ini dikarenakan, kehadiran peran pemerintah dibutuhkan di seluruh pelaksanaan dan pencapaian SDGs. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik secara tidak langsung juga akan menimbulkan kepercayaan kepada masyarakat pada pemerintah dan akhirnya meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan.

   Adapun karakteristrik dari tata kelola pemerintahan yang baik dan perlu mendapatkan jaminan untuk dilaksanakan oleh instansi pemerintah adalah sebagai berikut:

   a. Partisipasi masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung;

   b. Kerangka hukum yang adil dan merata;

   c. Pelayanan public yang responsif;

   d. Menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan semua program dan kegiatan pelayanan publik.

   e. Berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

   f. Kesempatan yang sama untuk memperoleh kesetaraan dan keadilan;

   g. Sumber Daya Publik dikelola secara efektif dan efisien.

4.2.3 Dukungan terhadap Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar pelayanan minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah hak seluruh individu. Pemerintah wajib menjamin pemenuhannya. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan hal tersebut, bahkan menjadikan SPM sebagai bagian dari urusan pemerintahan wajib terkait dengan pelayanan dasar yang harus menjadi prioritas anggaran daerah. Penyelenggaraan pelayanan dasar merupakan bagian dari

pelaksanaan urusan wajib pemerintah daerah. SPM diposisikan untuk menjawab hal-hal penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam penyediaan pelayanan dasar yang bermuara pada penciptaan kesejahteraan rakyat. Karena kesejahteraan rakyat merupakan tujuan bernegara yang dijamin oleh konstitusi.

Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari pemerintah daerah sesuai dengan indikator-indikator yang ditetapkan oleh pemerintah. Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal ditambah pula dengan peraturan terkait masing-masing kementerian. Peraturan kementerian teknis SPM di atas menjadi rujukan pemerintah daerah dalam menyusun program/kegiatan/sub kegiatan pelaksanaan SPM di daerahnya masing-masing. maka pemerintah daerah melalui prangkat daerah harus menerapkan SPM secara efektif dan efisien.

Penerapan SPM sendiri merupakan pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pemanuhan pelayanan dasar, dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar. Dalam konteks pelaksanaan tahap penerapan SPM ini, pemerintah daerah harus memastikan akses pelayanan dasar bagi seluruh warga negara, di samping juga harus memperhatikan penyediaan jenis dan mutu pelayanan dasar secara minimal agar warga negaranya dapat hidup secara layak.

Dalam konteks penerapan SPM, pemerintah daerah sebagai pelaksana pemenuhan SPM harus melakukan serangkaian tahapan, mulai dari pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar, dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar. Integrasi pelayanan dasar dalam dokumen perencaan dan penganggaran menjadi bagian integral dari pelaksanaan tahap penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar. SPM menjadi dasar dari pelaksanaan dan pencapaian target pemenuhan layanan dasar di daerah.

Saat ini SPM urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri dari Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Serta Sosial dengan berbagai indikatornya. Untuk itu, dalam melaksanakan SPM yang merupakan bagian dari pelayanan dasar dalam urusan wajib pemerintahan daerah, selain sosialisasi konsep penetapan dan petunjuk teknis pelaksanaannya yang dilakukan, juga diperlukan pemetaan kondisi awal SPM, khususnya pada perangkat daerah terkait untuk menentukan penetapan target pencapaian sasaran SPM pada tahun berjalan dan tahun berikutnya hingga memenuhi standar capaian SPM secara nasional.

Mengingat SPM sudah diterapkan secara efektif mulai pada tahun 2019 maka perangkat daerah wajib:

1. Melakukan pengintegrasian SPM kedalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, terutama dalam dokumen RKPD dan Renja, sebagai acuan dalam penyusunan RKA untuk penyusunan RAPBD;

2. Menyampaikan pelaporan capaian SPM setiap akhir tahun anggaran yang bersinergi dengan materi muatan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD);

3. Diharapkan kedepannya SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran dan ketepatan sasaran.

4. Untuk itu diharapkan seluruh perangkat daerah untuk bersama sama melakukan satu kesatuan gerak langkah untuk mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah untuk peningkatan kinerja organisasi dan melaksanakan tugas pokok serta fungsi sebagaimana telah diamanahkan kepada masing-masing perangkat daerah.

Berikutnya, dalam upaya pencapaian SPM Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan pada kewenangan daerah disajikan sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 4.13 Sinkronisasi RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026 terhadap Pencapaian SPM Kabupaten Pesisir Barat

Misi RPJMD	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD		Jenis SPM
Misi I Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Secara Berkeadilan, Maju dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	1	Terwujudnya **Sumber Daya Manusia** Daerah yang Berkualitas	1. Pendidikan Anak Usia Dini (usia 5-6 Tahun); 2. Pendidikan Dasar (Usia 7-15 Tahun); 3. Pendidikan Kesetaraan (usia 7-18 Tahun);
				1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil; 2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin; 3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir; 4. Pelayanan Kesehatan Balita; 5. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar; 6. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif; 7. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut; 8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi;

				9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus; 10. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Juwa Berat; 11. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis; 12. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV);
Misi II Mengembangkan Infrastruktur Wilayah dengan Konsep Pembangunan Inklusif untuk Konektivitas Antar Wilayah dengan Memperhatikan Aspek Mitigasi Bencana dan Berwawasan Lingkungan	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Daerah dan Kewilayahan	2	Tersedianya **Pemukiman Penduduk** yang Sehat dan Berkualitas	1. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota; 2. Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
		3	Tersedianya **Sumber Daya Air** untuk Mendukung Kedaulatan Pangan	1. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari; 2. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik;
		5	Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Pencegahan dan Penyelamatan **Bencana Daerah**	1. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum; 2. Pelayanan Informasi Rawan Bencana; 3. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana; 4. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana; 5. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran
Misi III Mengembangk an Ekonomi Kerakyatan Melalui Peningkatan Produktivitas Sektor Pertanian dan Perikanan	Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Daerah dengan Fokus pada Potensi Lokal	5	Menurunnya Jumlah **Penduduk Miskin** Daerah	1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar; 2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar; 3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar;

				4. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial, Khususnya Gelandangan dan Pengemis; 5. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana;

4.3 Pembangunan Kewilayahan Kabupaten Pesisir Barat

Selain pendekatan yang bersifat sektoral, rencana pembangunan daerah pada tahun 20219 ini juga menggunakan pendekatan kewilayahan. Pendekatan kewilayahan tersebut dilakukan guna mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah, dengan penanganan secara lintas sektoral pada setiap wilayahnya.

Dalam Penataan Ruang dikenal kawasan strategis, yaitu suatu wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena memiliki pengaruh sangat penting bagi perkembangan wilayah dalam aspek ekonomi, sosial, budaya pertahanan keamanan, teknologi dan kelestarian lingkungan hidup. Arah kebijakan Pembangunan Kewilayahan Provinsi Lampung tahun 2021, selain mengaju pada RPJPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2005–2025, juga mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan sebagaimana diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 dan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2017-2037.

Kawasan strategis nasional dan provinsi yang berada di Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam RTRW meliputi:

a. kawasan strategis nasional ditinjau dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan, Kawasan perbatasan negara ini terdapat di Pulau Batu Kecil, atau dalam bahasa lokal disebut sebagai Pulau Betuah, berada di Kecamatan Bangkunat yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia. Pulau Betuah ini merupakan salah satu pulau terluar di Wilayah Barat Indonesia.
b. kawasan strategis provinsi, meliputi
    1) Kawasan Agro Minapolitan, lokasi agrominapolitan yang dimaksud berada di Kecamatan Ngambur, Ngaras dan Bangkunat.
    2) Taman Nasional Bukit Barisan Selatan/TNBBS. Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati dan aset nasional (Kawasan Lindung Nasional) yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan dilestarikan. Sebagian besar sungai-sungai yang mengalir di Provinsi Lampung berhulu di TNBBS dan hutan yang masih termasuk kategori primer juga hanya terdapat di TNBBS.

c. Kawasan Strategis Kabupaten meliputi:

1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi, meliputi :

a. Kawasan Ekowisata Pulau Pisang di Kecamatan Pulau Pisang;

b. Kawasan Labuhan Jukung di Kecamatan Pesisir Tengah;

c. Kawasan Tanjung Setia di Kecamatan Pesisir Selatan; dan

d. Kawasan perkotaan krui di Kecamatan Pesisir Tengah.

2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan adalah Kawasan Hutan Tanam Rakyat (HTR) tersebar di wilayah kabupaten.

Untuk mencapai tujuan pembangunan kewilayahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, menempuh kebijakan dan strategi sebagai berikut:

1. Kebijakan penataan ruang Kabupaten Pesisir Barat, terdiri atas:

a. pengembangan pariwisata berbasis wisata alam dan budaya dengan pembangunan pariwisata yang terintegrasi dan berkelanjutan.

1) meningkatkan sinergitas pariwisata dengan sektor potensial dengan konsep agrowisata, minawisata dan ekowisata;

2) mengembangkan daya tarik wisata potensial dengan meningkatkan aspek pemasaran pariwisata bagi wisatawan domestik maupun mancanegara;

3) mengembangkan kapasitas masyarakat dalam mendukung pengembangan kawasan pariwisata yang bertumpu pada pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat; dan

4) membangun dan meningkatkan infrastruktur pendukung bagi kawasan wisata potensial.

b. pengembangan sistem permukiman yang berhirarki dan terpadu antara sistem perdesaan dan perkotaan dan pengembangan sistem prasarana wilayah.

1) mengembangkan pusat pelayanan yang seimbang dan berjenjang antar wilayah dengan mengutamakan pada kawasan prioritas sesuai dengan potensi wilayah;

2) membangun dan meningkatkan sistem prasarana wilayah yang meliputi prasarana utama dan prasarana lainnya secara terpadu untuk medorong pertumbuhan wilayah; dan

3) Meningkatkan instrumen tata ruang yang mempertimbangkan daya dukung wilayah.

c. pengembangan kawasan minapolitan dengan pengelolaan sumber daya lokal berbasis pengelolaan komoditas unggulan melalui proses industrialisasi modern yang ramah lingkungan.
    1) mengembangkan sektor kelautan dan perikanan berbasis wilayah;
    2) memanfaatkan potensi lahan non produktif secara lebih bijaksana bagi industri perikanan dan kelautan;
    3) mengembangkan dan memanfaatkan teknologi modern dalam pengelolaan industri perikanan dan kelautan dalam rangka peningkatan produktivitas dan memiliki nilai ekonomi tinggi;
    4) menguatkan pemasaran hasil perikanan dan kelautan melalui peningkatan sumber daya; dan
    5) meningkatkan instrumen ruang untuk pengendalian lingkungan bagi industri perikanan dan kelautan.
d. pengembangan kawasan pertanian dalam mewujudkan agroindustri yang kompetitif dan terintegrasi antar sektor.
    1) mengoptimalkan kapasitas produksi sektor pertanian melalui peningkatan komoditas unggulan; dan
    2) mengembangkan infrastruktur pertanian dalam rangka kemandirian dan katahanan pangan.
e. perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup melalui pengembangan kawasan lindung sesuai dengan fungsi masing-masing dengan memperhatikan kearifan lokal.
    1) mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup serta mengurangi resiko bencana;
    2) meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun kualitasnya dengan upaya reboisasi dan penghijauan dengan penerapan teknologi modern;
    3) mengoptimalkan kearifan lokal daerah dalam upaya untuk pelestarian lingkungan;
    4) melakukan pencegahan penurunan kualitas lingkungan dan kerusakan lingkungan hidup melalui pengembangan instrumen perizinan, insentif dan disinsentif dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang; dan
    5) mengembangkan jaringan kerjasama dengan berbagai pihak dalam pemanfaatan sumber daya alam bagi konservasi kawasan.
f. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan negara.
    1) mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsim khusus pertahanan dan keamanan;
    2) mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi dan peruntukannya; dan

3) mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan.

Sementara itu, berdasarkan pada Perda No 8 Tahun 2017, arahan pemanfatan ruang untuk perencanaan Tahun 2023 diarahkan untuk pembangunan sebagai berikut:

Tabel 4.14 Arah Pemanfaatan Ruang dan Indikasi Program Pembangunan RTRW Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017-2037

No	Arah Pemanfaatan Ruang		Lokasi	Tahun Pelaksanaan			Program	Perangkat Daerah
	Indikasi Program	Kegiatan		Tahap I		Tahap II		
				2021	2022			
A	Pengembangan Struktur Ruang							
A1	Pemantapan Rencana Pusat-Pusat Pelayanan							
A1.1	Peningkatan fungsi PKL Krui	Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Kantor Pemerintah Kabupaten	Pesisir Tengah				Penataan Bangunan Gedung	Dinas PU dan PR
		Pembangunan dan Peningkatan Pusat Perdagangan Barang dan Jasa	Pesisir Tengah				Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Koperindag
		Pengembangan Kawasan pariwisata	Pesisir Barat				Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
		Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah	Pesisir Tengah				Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		Pengembangan Infrastruktur Perikanan dan Kelautan	Pesisir Tengah				Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
		Pengembangan SPAM Perpipaan dan Berbasis Masyarakat	Pesisir Tengah				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas PU dan PR
		Pengembangan Kawasan Permukiman	Pesisir Tengah				Pengembangan Permukiman; Kawasan Permukiman	Dinas PU dan PR; Dinas PR dan KP
A1.2	Peningkatan Fungsi PKLp Kota Jawa	Pengembangan Pusat Perdagangan dan Jasa	Bangkunat				Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Koperindag
		Pengembangan Kawasan Pariwisata	Bangkunat				Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata

No	Arah Pemanfaatan Ruang		Lokasi	Tahun Pelaksanaan			Program	Perangkat Daerah
	Indikasi Program	Kegiatan		Tahap I		Tahap II		
				2021	2022			
		Pengembangan Infrastruktur Perikanan dan Kelautan	Bangkunat				Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan
		Pengembangan Infrastruktur dan Komoditas Pertanian	Bangkunat				Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian; Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian
		Pengembangan Kawasan Industri	Bangkunat				Perencanaan dan Pembangunan Industri	Dinas Koperindag
A1.3	Peningkatan Fungsi PKLp Biha	Penyusunan Rencana Detail/Rinci Kawasan Perkotaan Biha	Pesisir Selatan				Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas PU dan PR
		Pengembangan Pusat Perdagangan dan Jasa	Pesisir Selatan				Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Koperindag
		Pengembangan kawasan pariwisata	Pesisir Selatan				Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
		Pengembangan Infrastruktur Perikanan dan Kelautan	Pesisir Selatan				Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan
		Pengembangan Infrastruktur dan Komoditas pertanian	Pesisir Selatan				Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian; Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian
		Pengembangan Kawasan Industri	Pesisir Selatan				Perencanaan dan Pembangunan Industri	Dinas Koperindag
		Pengembangan Jaringan Irigasi Teknis	Pesisir Selatan				Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas PU dan PR
A1.4	Peningkatan Fungsi PKLp Lemong	Penyusunan Rencana Detail/Rinci Kawasan Perkotaan Lemong	Lemong				Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas PU dan PR

No	Arah Pemanfaatan Ruang		Lokasi	Tahun Pelaksanaan			Program	Perangkat Daerah
	Indikasi Program	Kegiatan		Tahap I		Tahap II		
				2021	2022			
		Pengembangan Pusat Perdagangan dan Jasa	Lemong				Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Koperindag
		Pengembangan kawasan pariwisata	Lemong				Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
		Pengembangan Infrastruktur Perikanan dan Kelautan	Lemong				Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan
		Pengembangan Infrastruktur dan Komoditas pertanian	Lemong				Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian; Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian
A1.5	Peningkatan Fungsi PPK Negeri Ratu Ngambur	Pengembangan kawasan pariwisata	Ngambur				Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
		Pengembangan Infrastruktur dan Komoditas pertanian	Ngambur				Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian; Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian
A1.6	Peningkatan Fungsi PPK Way Napal	Pengembangan kawasan pariwisata	Krui Selatan				Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
		Pengembangan Infrastruktur dan Komoditas pertanian	Krui Selatan				Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian; Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian
		Pengembangan Pusat Pelayanan Kesehatan	Krui Selatan				Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
A1.7	Peningkatan Fungsi PPK Gunung Kemala	Pengembangan kawasan pariwisata	Way Krui				Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata

No	Arah Pemanfaatan Ruang		Lokasi	Tahun Pelaksanaan			Program	Perangkat Daerah
	Indikasi Program	Kegiatan		Tahap I		Tahap II		
				2021	2022			
		Pengembangan Infrastruktur dan Komoditas pertanian	Way Krui				Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian; Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian
A1.8	Peningkatan Fungsi PPK Kebuayan	Pengembangan kawasan pariwisata	Karya Penggawa				Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
		Pengembangan Infrastruktur dan Komoditas pertanian	Karya Penggawa				Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian; Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian
A1.9	Peningkatan Fungsi PPL Parda Suka	Pengembangan kawasan Pariwisata	Ngaras				Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
		Pengembangan Infrastruktur Perikanan dan Kelautan	Ngaras				Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan
		Pengembangan Infrastruktur dan Komoditas pertanian	Ngaras				Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian; Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian
A1.10	Peningkatan Fungsi PPL Kuripan	Pengembangan kawasan pariwisata	Pesisir Utara				Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
		Pengembangan Infrastruktur dan Komoditas pertanian	Pesisir Utara				Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian; Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian
A1.11	Peningkatan Fungsi PPL Pasar Pulau Pisang	Pengembangan Kawasan Pariwisata	Pulau Pisang				Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata

No	Arah Pemanfaatan Ruang		Lokasi	Tahun Pelaksanaan			Program	Perangkat Daerah
	Indikasi Program	Kegiatan		Tahap I		Tahap II		
				2021	2022			
		Pengembangan Infrastruktur Perikanan dan Kelautan	Pulau Pisang				Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
		Pengembangan Infrastruktur dan Komoditas pertanian	Pulau Pisang				Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian; Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian
		Pengembangan Kawasan Industri Kecil	Pulau Pisang				Perencanaan dan Pembangunan Industri	Dinas Koperindag
A2	Sistem Prasarana Utama							
A2.1	Pengembangan Sistem Prasarana Transportasi Darat	Peningkatan Kapasitas Pelayanan Sistem Jaringan Jalan Kolektor Primer	Pesisir Barat				Penyelenggaraan Jalan	Dinas PU dan PR
		Pembangunan dan Peningkatan Jalan Kabupaten	Pesisir Barat				Penyelenggaraan Jalan	Dinas PU dan PR
		Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan	Pesisir Barat				Penyelenggaraan Jalan	Dinas PU dan PR
		Rehabilitasi Jaringan Jalan Kabupaten dan Jalan Lingkungan	Pesisir Barat				Penyelenggaraan Jalan	Dinas PU dan PR
		Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Terminal Tipe C	Bangkunat, Lemong				Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
		Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Pesisir Barat				Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
		Pengembangan Jaringan Pelayanan Lalu Lintas	Pesisir Barat				Pengelolaan Pelayaran	Dinas Perhubungan
A2.2	Pengembangan Sistem Prasarana Transportasi Laut	Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Laut Pengumpan Lokal	Pesisir Barat				Pengelolaan Pelayaran	Dinas Perhubungan
		Pembangunan dan pengembangan Pelabuhan Khusus Perikanan	Pesisir Barat				Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan

No	Arah Pemanfaatan Ruang		Lokasi	Tahun Pelaksanaan			Program	Perangkat Daerah
	Indikasi Program	Kegiatan		Tahap I		Tahap II		
				2021	2022			
		Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan	Pesisir Barat				Pengelolaan Pelayaran	Dinas Perhubungan
A3	Sistem Prasarana lainnya							
A3.1	Pengembangan Sistem Jaringan Telekomunikasi	Pembangunan Sistem Jaringan Telekomunikasi (Komunikasi, Data dan Informasi)	Pesisir Barat				Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas Kominfo
		Pembangunan jaringan Hotspot di Kawasan Wisata	Pesisir Barat				Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas Kominfo
		Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Untuk Kegiatan Pemerintahan dan Dunia Usaha	Pesisir Barat				Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Kominfo
A3.2	Pengembangan Sistem Prasarana Sumber Daya Air	Peningkatan dan Pemeliharaan Sumberdaya Air Berskala Regional Guna Menjaga Kelestarian Lingkungan Dilakukan pada Seluruh Sungai yang Berhulu di TNBBS	Pesisir Barat				Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas PU dan PR
		Pembangunan dan Peningkatan Daerah Irigasi	Pesisir Barat				Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA); Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas PU dan PR; Dinas Pertanian
		Pemeliharaan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi yang Tersebar di Seluruh Kecamatan di Pesisir Barat	Pesisir Barat				Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA); Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas PU dan PR; Dinas Pertanian
		Pembangunan Prasarana Pengendalian Banjir di Seluruh Wilayah	Pesisir Barat				Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas PU dan PR

No	Arah Pemanfaatan Ruang		Lokasi	Tahun Pelaksanaan			Program	Perangkat Daerah
	Indikasi Program	Kegiatan		Tahap I		Tahap II		
				2021	2022			
		Pembangunan dan Rehabilitasi System Drainase Primer, Sekunder dan Tersier	Pesisir Barat				Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas PU dan PR
		Pengamanan Abrasi Pantai	Pesisir Barat				Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas PU dan PR
A3.3	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Lingkungan							
A3.3.1	Pengembangan Sistem Jaringan Air Minum	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Berbasis Masyarakat	Pesisir Barat				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas PU dan PR
		Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perpipaan	Pesisir Barat				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas PU dan PR
		Pembangunan dan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Air Minum	Pesisir Barat				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas PU dan PR
A3.3.2	Pengembangan Sistem Jaringan Persampahan	Pembangunan Dan Peningkatan TPA	Ngaras, Krui Selatan dan Pesisir Utara				Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan	Dinas PU dan PR
		Pembangunan TPST	Pesisir Barat				Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan	Dinas PU dan PR
		Pembanguunan TPS	Pesisir Barat				Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan	Dinas PU dan PR
		Pengembangan Sarana Dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Pesisir Tengah				Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan	Dinas PU dan PR
A3.3.3	Pengembangan Sistem Jaringan Air Limbah	Pembangunan Dan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Air Limbah di Pusat Pelayanan Kesehatan	Pesisir Barat				Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan

No	Arah Pemanfaatan Ruang		Lokasi	Tahun Pelaksanaan			Program	Perangkat Daerah
	Indikasi Program	Kegiatan		Tahap I		Tahap II		
				2021	2022			
		Pembangunan IPLT	Pesisir Barat				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas PU dan PR
		Pembangunan sarana dan prasarana air limbah di pedesaan	Pesisir Barat				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas PU dan PR
		Pengembangan Sarana dan Prasarana pengelolaan Air Limbah	Pesisir Barat				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas PU dan PR
B	Pengembangan Pola Ruang							
B1	Pengembangan Kawasan Budidaya							
B1.1	Pengelolaan Kawasan Peruntukan Pertanian	Pengembangan Lahan Padi Sawah Beririgasi Teknis pada Areal-areal Potensial	Pesisir Barat				Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian
		Pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Pesisir Barat				Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian
		Peningkatan Produktivitas Budidaya Tanaman Pangan dan Holtikultura	Pesisir Barat				Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian; Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian
		Pengembangan Budidaya Perkebunan	Pesisir Barat				Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian; Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian
		Pengembangan Budidaya Peternakan	Pesisir Barat				Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian; Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian

No	Arah Pemanfaatan Ruang		Lokasi	Tahun Pelaksanaan			Program	Perangkat Daerah
	Indikasi Program	Kegiatan		Tahap I		Tahap II		
				2021	2022			
		Peningkatan Produktivitas Produksi Perkebunan melalui Intensifikasi Lahan dan Peningkatan Keterampilan Petani Kebun	Pesisir Barat				Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian; Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian; Penyuluhan Pertanian	Dinas Pertanian
		Pengembangan Kawasan Pertanian melalui Pendekatan Agropolitan pada Kawasan-kawasan Potensial	Pesisir Barat				Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian; Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian
B1.2	Pengembangan Kawasan Peruntukan Perikanan	Pengembangan Perikanan Tangkap	Pesisir Barat				Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
		Pengembangan Pelabuhan Perikanan	Pesisir Barat				Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
		Pengembangan Sarana dan Prasaranan Perikanan Nelyanan	Pesisir Barat				Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
		Optimalisasi TPI	Pesisir Barat				Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
		Pengembangan Sentra Budidaya Perikanan Laut (udang, kerapu, dan rumput laut)	Pesisir Barat				Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan
		Pengembangan Sentra Budidaya Perikanan Air Tawar	Pesisir Barat				Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan
		Pengembangan Kegiatan Minapolitan	Pesisir Barat				Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan
		Pengembangan Industri Pengolahan Perikanan	Pesisir Barat				Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan
B1.3	Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri	Pembangunan Kawasan Industri	Pesisir Selatan, Bangkunat				Perencanaan dan Pembangunan Industri	Dinas Koperindag

No	Arah Pemanfaatan Ruang		Lokasi	Tahun Pelaksanaan			Program	Perangkat Daerah
	Indikasi Program	Kegiatan		Tahap I		Tahap II		
				2021	2022			
		Pengendalian Lingkungan pada Kawasan Industri	Pesisir Barat				Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas LH
		Pengembangan Sarana dan Prasarana di Kawasan Industri	Pesisir Selatan, Bangkunat				Perencanaan dan Pembangunan Industri	Dinas Koperindag
		Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM)	Pesisir Barat				Perencanaan dan Pembangunan Industri	Dinas Koperindag
B1.4	Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata	Pengembangan Kawasan Pariwisata Berkelanjutan	Pesisir Barat				Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
		Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata	Pesisir Barat				Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
		Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana Pariwisata	Pesisir Barat				Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
		Pengembangan Promosi Destinasi Pariwisata Berkelanjutan	Pesisir Barat				Pemasaran Pariwisata	Dinas Pariwisata
B1.5	Pengembangan Kawasan Peruntukan Permukiman	Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan	Pesisir Barat				Pengembangan Permukiman; Kawasan Permukiman	Dinas PU dan PR; Dinas PR dan KP
		Pengembangan Kawasan Permukiman Pedesaan	Pesisir Barat				Kawasan Permukiman	Dinas PR dan KP
		Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasaran Permukiman	Pesisir Barat				Pengembangan Permukiman; Kawasan Permukiman	Dinas PU dan PR; Dinas PR dan KP
		Pengembangan Perumahan Rakyat	Pesisir Barat				Pengembangan Perumahan	Dinas PR dan KP
		Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Permukiman	Pesisir Barat				Pengembangan Permukiman; Kawasan Permukiman	Dinas PU dan PR; Dinas PR dan KP
		Pembangunan dan Peningkatan Penyehatan Lingkungan Permukiman	Pesisir Barat				Pengembangan Permukiman; Kawasan Permukiman	Dinas PU dan PR; Dinas PR dan KP

No	Arah Pemanfaatan Ruang		Lokasi	Tahun Pelaksanaan			Program	Perangkat Daerah
	Indikasi Program	Kegiatan		Tahap I		Tahap II		
				2021	2022			
		Pengembangan Prasarana dan Sarana Kawasan Cepat Tumbuh Perkotaan	Pesisir Barat				Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Dinas PU dan PR
C	Pengembangan Kawasan Strategis							
C1	Pengembangan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Ekonomi	Pengembangan Kawasan Pulau Pisang	Pulau Pisang				Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
		Pengembangan Kawasan Tanjung Setia	Pesisir Selatan				Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
		Pengembangan Kawasan Perkotaan	Pesisir Tengah				Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Dinas PU dan PR

Sumber : RTRW Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017-2037

BAB V
RENCANA KERJA
DAN PENDANAAN DAERAH

Dengan mengusung tema pembangunan daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024 adalah "**Pemulihan Ekonomi, Meningkatkan Sumber Daya Manusia serta Pembangunan Infrastruktur Daerah**" tema tersebut ditetapkan untuk mewujudkan percepatan pencapaian Visi Kabupaten Pesisir Barat "**Terwujudnya Pesisir Barat yang Amanah, Maju dan Sejahtera**". Berikutnya diperlukan penegasan terhadap upaya-upaya umum yang akan dilaksanakan serta akan mendasari gerak langkah Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat selama satu tahun kedepan yaitu pada tahun 2024.

Untuk menunjang pelaksanaan Tema Pembangunan tersebut, ditetapkan 5 (lima) Prioritas Pembangunan Kabupaten Pesisir Barat untuk tahun 2024 dalam pelaksanaan roda pemerintahan daerah dan perencanaan pembangunan untuk peningkatan penjaminan terlaksananya pelayanan pembangunan, sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia;
2. Pembagunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan;
3. Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat;
4. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas;
5. Harmonisasi kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat

Berdasarkan pada 5 (lima) prioritas pembangunan Kabupaten Pesisir Barat tersebut di atas, penganggaran Belanja Daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat melalui program pembangunan Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.1 Pagu Indikatif Urusan Daerah dan Program Prioritas Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024

No	Urusan Pemerintah Daerah	Program	Pagu Anggaran (Rp.)	Perangkat Daerah
I	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar**		**449,587,992,585**	
1	**Pendidikan**		**186,082,741,297**	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	**126,958,119,093**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Pengelolaan Pendidikan	**59,124,622,204**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

2	**Kesehatan**		**103,815,980,684**	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota	34,963,420,870	Dinas Kesehatan
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	61,778,931,631	Dinas Kesehatan
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	4,918,705,636	Dinas Kesehatan
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	351,980,965	Dinas Kesehatan
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1,802,941,582	Dinas Kesehatan
3	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**		**134,524,594,526**	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerahkabupaten/Kota	5,348,238,701	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	7,184,286,394	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	2,275,402,820	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1,975,202,820	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	2,544,820,052	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Pengembangan Permukiman	1,641,144,895	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Penataan Bangunan Gedung	96,818,073,298	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	3,678,831,711	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Penyelenggaraan Jalan	12,269,910,459	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	473,880,948	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	314,802,428	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

4	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**		**10,112,756,606**	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerahkabupaten/Kota	2,283,109,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Program Pengembangan Perumahan	1,643,820,052	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Program Kawasan Permukiman	1,164,129,345	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	3,844,401,966	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	1,177,296,243	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5	**Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**		**8,354,196,969**	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerahkabupaten/Kota	2,301,302,814	Satpol-PP dan Kemadam Kebakaran
		Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	2,373,744,778	Satpol-PP dan Kemadam Kebakaran,
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	738,036,704	Satpol-PP dan Kemadam Kebakaran
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerahkabupaten/Kota	1,773,000,923	BPBD
		Program Penanggulangan Bencana	1,168,111,750	BPBD
6	**Sosial**		**6,697,722,503**	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota	2,237,394,511	Dinas Sosial
		Program Pemberdayaan Sosial	312,848,941	Dinas Sosial
		Program Rehabilitasi Sosial	3,401,463,270	Dinas Sosial

		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	454,645,096	Dinas Sosial
		Program Penanganan Bencana	291,370,685	Dinas Sosial
II	**Urusan Wajib Tidak Pelayanan Dasar**		**78,670,746,081**	
1	**Tenaga Kerja**		**2,677,044,091**	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota	1,990,955,081	Dinas Trans, Naker dan Perindustrian
		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	259,190,649	Dinas Trans, Naker dan Perindustrian
		Program Penempatan Tenaga Kerja	221,520,704	Dinas Trans, Naker dan Perindustrian
		Program Hubungan Industrial	205,377,657	Dinas Trans, Naker dan Perindustrian
2	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**		**1,136,012,101**	
		Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	207,568,766	Dinas PPPA dan KB
		Program Perlindungan Perempuan	124,175,456	Dinas PPPA dan KB
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	223,797,979	Dinas PPPA dan KB
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	387,030,849	Dinas PPPA dan KB
		Program Perlindungan Khusus Anak	193,439,051	Dinas PPPA dan KB
3	**Pangan**		**7,956,573,313**	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerahkabupaten/Kota	6,650,524,300	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	929,136,880	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	270,039,584	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	106,872,549	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
4	**Pertanahan**		**5,854,329,407**	
		Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	92,391,704	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

		Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	5,463,757,704	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Program Pengelolaan Tanah Kosong	298,179,999	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5	**Lingkungan Hidup**		**6,612,324,336**	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerahkabupaten/Kota	3,267,704,529	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	493,738,650	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	311,715,209	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	202,476,679	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	125,139,419	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan Pplh	106,816,815	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Persampahan	2,104,733,035	Dinas Lingkungan Hidup
6	**Kependudukan dan Pencatatan Sipil**		**5,142,916,875**	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerahkabupaten/Kota	4,507,625,600	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Pendaftaran Penduduk	335,363,433	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Pencatatan Sipil	108,507,804	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	92,897,209	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Pengelolaan Profil Kependudukan	98,522,829	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**		**8,139,472,190**	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerahkabupaten/Kota	2,263,797,064	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Penataan Desa	1,302,601,300	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	1,750,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	2,823,073,826	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
8	**Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana**		**9,306,952,620**	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerahkabupaten/Kota	4,556,653,452	Dinas PPPA dan KB
		Program Pengendalian Penduduk	113,638,330	Dinas PPPA dan KB
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	4,338,479,550	Dinas PPPA dan KB
		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	298,181,288	Dinas PPPA dan KB
9	**Perhubungan**		**6,201,111,894**	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerahkabupaten/Kota	2,608,051,200	Dinas Perhubungan
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	2,940,519,400	Dinas Perhubungan
		Program Pengelolaan Pelayaran	652,541,294	Dinas Perhubungan

10	**Komunikasi dan Informatika**		**8,846,019,769**	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerahkabupaten/Kota	5,002,041,300	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
		Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	2,555,591,900	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1,288,386,569	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
11	**Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**		**3,731,353,336**	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerahkabupaten/Kota	2,702,155,039	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	93,545,599	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	532,707,739	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	402,944,959	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
12	**Penanaman Modal**		**5,527,740,677**	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerahkabupaten/Kota	2,803,476,742	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	344,409,399	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Promosi Penanaman Modal	742,684,517	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

		Program Pelayanan Penanaman Modal	635,250,009	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	677,916,651	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	324,003,359	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
13	**Kepemudaan dan Olahraga**		**6,503,726,404**	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerahkabupaten/Kota	2,343,684,086	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	2,167,564,804	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	1,992,477,514	Dinas Pemuda dan Olahraga
14	**Statistik**		**112,207,375**	
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	112,207,375	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
15	**Persandian**		**106,021,325**	
		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	106,021,325	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
16	**Kebudayaan**		**438,358,847**	
		Program Pengembangan Kebudayaan	346,443,502	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	91,915,345	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
17	**Perpustakaan**		**320,000,000**	
		Program Pembinaan Perpustakaan	320,000,000	Sekretariat Daerah
18	**Kearsipan**		**58,581,521**	
		Program Pengelolaan Arsip	58,581,521	Sekretariat Daerah

III	**Urusan Pilihan**		**35,022,196,956**	
1	**Perikanan**		**5,058,925,795**	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerahkabupaten/Kota	3,205,408,358	Dinas Perikanan
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	618,386,706	Dinas Perikanan
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	598,020,651	Dinas Perikanan
		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	162,266,807	Dinas Perikanan
		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	474,843,273	Dinas Perikanan
2	**Pariwisata**		**21,999,701,700**	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerahkabupaten/Kota	3,649,701,700	Dinas Pariwisata
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	4,100,000,000	Dinas Pariwisata
		Program Pemasaran Pariwisata	11,450,000,000	Dinas Pariwisata
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	2,800,000,000	Dinas Pariwisata
3	**Pertanian**		**6,226,962,026**	
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	2,336,903,374	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	2,368,805,929	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	239,616,243	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	400,273,913	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Program Penyuluhan Pertanian	881,362,567	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
4	**Perdagangan**		**696,971,927**	
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	103,918,299	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	329,179,609	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		Program Pengembangan Ekspor	263,874,019	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan

5	**Perindustrian**		**647,613,352**	
		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	446,332,868	Dinas Trans, Naker dan Perindustrian
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	201,280,484	Dinas Trans, Naker dan Perindustrian
6	**Transmigrasi**		**392,022,156**	
		Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	99,651,202	Dinas Trans, Naker dan Perindustrian
		Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	292,370,954	Dinas Trans, Naker dan Perindustrian
IV	**Unsur Pendukung**		**93,706,176,270**	
1	**Sekretariat Daerah**		**59,464,832,261**	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	45,665,574,245	Sekretariat Daerah
		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	9,970,144,764	Sekretariat Daerah
		Program Perekonomian Dan Pembangunan	3,829,113,252	Sekretariat Daerah
2	**Sekretariat DPRD**		**34,241,344,009**	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerahkabupaten/Kota	20,420,263,022	Sekretariat DPRD
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	13,821,080,987	Sekretariat DPRD
V	**Unsur Penunjang**		**222,625,392,008**	
1	**Perencanaan**		**10,152,174,063**	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerahkabupaten/Kota	3,866,833,917	Bappelitbangda
		Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	3,155,165,031	Bappelitbangda
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	3,130,175,115	Bappelitbangda
2	**Keuangan**		**203,966,793,768**	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerahkabupaten/Kota	11,921,630,049	BPKAD
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	182,614,083,973	BPKAD
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	2,373,990,797	BPKAD
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	3,956,775,142	Bapenda

		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	3,100,313,807	Bapenda
3	**Kepegawaian**		**4,317,648,916**	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	2,583,313,341	BKPSDM
		Program Kepegawaian Daerah	1,734,335,575	BKPSDM
4	**Pendidikan dan Pelatihan**		**2,648,176,820**	
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	2,648,176,820	BKPSDM
5	**Penelitian dan Pengembangan**		**1,540,598,441**	
		Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	1,540,598,441	Bappelitbangda
VI	**Unsur Pengawasan**		**8,813,620,900**	
1	**Inspektorat**		**8,813,620,900**	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerahkabupaten/Kota	5,053,620,900	Inspektorat
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	2,260,000,000	Inspektorat
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	1,500,000,000	Inspektorat
VII	**Unsur Kewilayahan**		**9,810,417,700**	
1	**Kecamatan**		**9,810,417,700**	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerahkabupaten/Kota	8,847,377,140	11 Kecamatan
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	330,240,560	Kecamatan Bangkunat, Krui Selatan, Lemong, Ngambur, Ngaras, Pulau Pisang, Pesisir Selatan, Pesisir Utara
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	632,800,000	Kecamatan Pesisir Tengah
VIII	**Unsur Pemerintahan Umum**		**40,366,553,960**	
1	**Kesatuan bangsa dan politik**		**40,366,553,960**	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	2,773,644,407	Badan Kesbangpol

		Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	1,256,985,542	Badan Kesbangpol
		Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	32,390,266,865	Badan Kesbangpol
		Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1,274,406,134	Badan Kesbangpol
		Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	670,286,948	Badan Kesbangpol
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	2,000,964,064	Badan Kesbangpol
	Jumlah		**938,603,096,460**	

No	Urusan Pemerintah Daerah	Pagu Anggaran (Rp.)	Persentase (%)
I	Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	449,587,992,585	47.90
II	Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	78,670,746,081	8.38
III	Urusan Pilihan	35,022,196,956	3.73
IV	Unsur Pendukung	93,706,176,270	9.98
V	Unsur Penunjang	222,625,392,008	23.72
VI	Unsur Pengawasan	8,813,620,900	0.94
VII	Unsur Kewilayahan	9,810,417,700	1.05
VIII	Unsur Pemerintahan Umum	40,366,553,960	4.30
	Jumlah	**938,603,096,460**	100.00

Berdasarkan pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa pada RKPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024, penganggaran untuk Belanja per Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan pada urutan persentase terbesar adalah sebagai berikut: (1) Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar memiliki porsi terbesar dengan persentase 47,90%, (2) Pelaksanaan Unsur Penunjang dengan persentase 23,72% (3) Pelaksanaan Unsur Pendukung dengan persentase 9,98%, (4) Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dengan persentase 8,38%, (5) Pelaksanaan urusan Pemerintahan Umum dengan persentase 4,30%, (6) Urusan Pilihan dengan persentase 3,73%, (7) Pelaksanaan Unsur Kewilayahan dengan persentase 1,05% dan (8) Pelaksanaan Unsur Pengawasan dengan persentase 0,94%.

Selanjutnya adalah bagaimana Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat pada Tahun 2024 melakukan sinkronisasi dan dukungan terhadap program-program Prioritas Nasional dalam RKP Tahun 2024 berdasarkan pada kewenangan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah.

Tabel 5.2 Sinkronisasi Program Kabupaten Pesisir Barat dengan Program Prioritas Nasional Tahun 2024

Prioritas Nasional		Urusan Pemerintahan Daerah		Pagu Anggaran (Rp.)	Perangkat Daerah
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	1	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3,731,353,336	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		2	Penanaman Modal	5,527,740,677	Dinas PM dan PTSP
		3	Perikanan	5,058,925,795	Dinas Perikanan
		4	Pariwisata	21,999,701,700	Dinas Pariwisata
		5	Pertanian	6226962026	Dinas KP dan Pertanian
		6	Perdagangan	696,971,927	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		7	Perindustrian	647,613,352	Dinas Trans, Naker dan Perindustrian
2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	1	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	8,139,472,190	Dinas PMP
		2	Perhubungan	6,201,111,894	Dinas Perhubungan
		3	Transmigrasi	392,022,156	Dinas Trans, Naker dan Perindustrian
		4	Kecamatan	9,810,417,700	11 Kecamatan
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	1	Pendidikan	186,082,741,297	Dinas P dan K
		2	Kesehatan	103,815,980,684	Dinas Kesehatan
		3	Tenaga Kerja	2,677,044,091	Dinas Trans, Naker dan Perindustrian
		4	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1,136,012,101	Dinas PP PA dan KB
		5	Pangan	7,956,573,313	Dinas KP dan Pertanian
		6	Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana	9,306,952,620	Dinas PP PA dan KB
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	1	Sosial	6,697,722,503	Dinas Sosial
		2	Kepemudaan dan Olahraga	6,503,726,404	Dinas Pora
		3	Kebudayaan	438,358,847	Dinas P dan K

		4	Kesatuan Bangsa dan Politik	40,366,553,960	Badan Kesbangpol
5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	1	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	134,524,594,526	Dinas PU dan PR
		2	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	10,112,756,606	Dinas PR dan KP
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	1	Lingkungan Hidup	6,612,324,336	Dinas LH
		2	Pertanahan	5,854,329,407	Dinas PR dan KP
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	1	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	8,354,196,969	Satpol PP dan Damkar – BPBD
		2	Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5,142,916,875	Dinas Duk dan Capil
		3	Komunikasi dan Informatika	8,846,019,769	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian
		4	Statistik	112,207,375	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian
		5	Persandian	106,021,325	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian
		6	Perpustakaan	320,000,000	Sekretariat Daerah
		7	Kearsipan	58,581,521	Sekretariat Daerah
		8	Sekretariat Daerah	59,464,832,261	Sekretariat Daerah
		9	Sekretariat DPRD	34,241,344,009	Sekretariat DPRD
		10	Perencanaan	10,152,174,063	Bappelitbangda
		11	Keuangan	203,966,793,768	BPKAD
		12	Kepegawaian	4,317,648,916	BKPSDM
		13	Pendidikan dan Pelatihan	2,648,176,820	BKPSDM
		14	Penelitian dan Pengembangan	1,540,598,441	Bappelitbangda
		15	Inspektorat	8,813,620,900	Inspektorat
				938,603,096,460	

Pemerintah pusat telah menetapkan target 0% untuk kemiskinan sktrem pada tahun 2024. Kemiskinan Ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan akses informasi terhadap pendapatan dan layanan sosial. Seseorang dikategorikan miskin ekstrem jika biaya kebutuhan hidup sehari-harinya berada di bawah garis kemiskinan esktrem; setara dengan USD 1.9 PPP (*Purchasing Power Parity*). PPP ditentukan menggunakan "*absolute poverty measure*" yang konsisten antar negara dan antar waktu. Atau dengan kata lain, seseorang dikategorikan miskin ekstrem jika pengeluarannya di bawah Rp.10.739/orang/hari atau Rp. 322.170/orang/bulan. Sehingga misalnya dalam 1 keluarga terdiri dari 4 orang (ayah, ibu, dan 2 anak), memiliki kemampuan untuk memenuhi pengeluarannya setara atau di bawah Rp.1.288.680 per keluarga per bulan.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat memiliki kewajiban untuk turun mendukung pencapaian target 0% kemiskinan ekstrem dimaksud, dimana kerangka kebijakan pokok dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem dapat dilakukan dengan:

a. Menurunkan beban pengeluaran; dan

b. Meningkatkan pendapatan.

Dibawah ini adalah perencanaan pengentasan kemiskinan ekstrem Kabupaten Pesis Barat pada Tahun 2024, sebagai berikut:

Tabel 5.3 Sinkronisasi Program Kabupaten Pesisir Barat untuk Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2024

No	Kebijakan	Program	Perangkat Daerah
I	**Menurunkan Beban Pengeluaran**		
a)	Program Keluarga Harapan	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
b)	Akses Pangan	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Dinas KP dan Pertanian
c)	Akses Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
d)	Akses Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
II	**Meningkatkan Pendapatan**		
a)	Akses Pembiayaan	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kdecil dan Usaha Mikro	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan

b)	Pendampingan Usaha Sektoral	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas KP dan Pertanian
c)	Pengembangan Ekonomi Lokal	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas PMP
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD

Berikutnya Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat pada Tahun 2024 juga telah melakukan sinkronisasi dan dukungan terhadap program-program Prioritas Provinsi Lampung dalam RKPD Tahun 2024 untuk pencapaian Tema Penguatan Ekonomi yang Inklusif untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah berdasarkan pada kewenangan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah sebagai berikut:

Tabel 5.4 Sinkronisasi Program Kabupaten Pesisir Barat dengan Program Prioritas Provinsi Lampung Tahun 2024

Prioritas Provinsi		**Urusan Pemerintahan Daerah**		**Pagu Anggaran (Rp.)**	**Perangkat Daerah**
1	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	1	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3,731,353,336	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		2	Penanaman Modal	5,527,740,677	Dinas PM dan PTSP
		3	Perikanan	5,058,925,795	Dinas Perikanan
		4	Pariwisata	21,999,701,700	Dinas Pariwisata
		5	Pertanian	6,226,962,026	Dinas KP dan Pertanian
		6	Perdagangan	696,971,927	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		7	Perindustrian	647,613,352	Dinas Trans, Naker dan Perindustrian
2	Meningkatkan Kualitas SDM	1	Pendidikan	186,082,741,297	Dinas P dan K
		2	Kesehatan	103,815,980,684	Dinas Kesehatan
		3	Tenaga Kerja	2,677,044,091	Dinas Trans, Naker dan Perindustrian
		4	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1,136,012,101	Dinas PP PA dan KB
		5	Pangan	7,956,573,313	Dinas KP dan Pertanian

		6	Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana	9,306,952,620	Dinas PP PA dan KB
3	Pembangunan Infrastruktur	1	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	134,524,594,526	Dinas PU dan PR
		2	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	10,112,756,606	Dinas PR dan KP
		3	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	8,139,472,190	Dinas PMP
		4	Perhubungan	6,201,111,894	Dinas Perhubungan
		5	Transmigrasi	392,022,156	Dinas Trans, Naker dan Perindustrian
4	Reformasi Birokrasi	1	Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5,142,916,875	Dinas Duk dan Capil
		2	Komunikasi dan Informatika	8,846,019,769	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian
		3	Statistik	112,207,375	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian
		4	Persandian	106,021,325	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian
		5	Perpustakaan	320,000,000	Sekretariat Daerah
		6	Kearsipan	58,581,521	Sekretariat Daerah
		7	Sekretariat Daerah	59,464,832,261	Sekretariat Daerah
		8	Sekretariat DPRD	34,061,344,009	Sekretariat DPRD
		9	Perencanaan	10,152,174,063	Bappelitbangda
		10	Keuangan	203,966,793,768	BPKAD
		11	Kepegawaian	4,317,648,916	BKPSDM
		12	Pendidikan dan Pelatihan	2,648,176,820	BKPSDM
		13	Penelitian dan Pengembangan	1,540,598,441	Bappelitbangda
		14	Inspektorat	8,813,620,900	Inspektorat
		15	Kecamatan	9,810,417,700	11 Kecamatan
5	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya	1	Sosial	6,697,722,503	Dinas Sosial
		2	Kepemudaan dan Olahraga	6,503,726,404	Dinas Pora
		3	Kebudayaan	438,358,847	Dinas P dan K
		4	Kesatuan bangsa dan politik	40,366,553,960	Badan Kesbangpol

6	Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana	1	Lingkungan Hidup	6,612,324,336	Dinas LH
		2	Pertanahan	5,854,329,407	Dinas PR dan KP
		3	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	8,354,196,969	Satpol PP dan Damkar – BPBD
				938,603,096,460	

5.1 Program dan Kegiatan Prioritas Daerah

Dalam mendukung pencapaian sasaran Prioritas Pembangunan, dirumuskan Program dan Kegiatan Prioritas RKPD Tahun 2024 untuk mendukung Prioritas pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.5 Program dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024

No	Prioritas RKPD	Sasaran RPJMD	Program	Indikator Program (Target)	Kegiatan	Indikator Kegiatan (Target)	Perangkat Daerah
1	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Terwujudnya SDM Daerah yang berkualitas	Program Pengelolaan Pendidikan	Cakupan Pemenuhan SPM Bidang Pendidikan (100 Persen)	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar SD (70.00 Persen)	Dinas P dan K
					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar SMP (70.00 Persen)	Dinas P dan K
			Program Pembinaan Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan Daerah yang dikelola (1 Lokasi)	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Pertahun (150 Orang)	Sekretariat Daerah
			Program Pengelolaan Arsip	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara Baku (25.00 Persen)	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kab/Kota	Jumlah Arsip Terjaga dan Arsip Dinamis sebagai Warisan Budaya yang Preservasi (21.000 Arsip)	Sekretariat Daerah
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan (100 Persen)	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kab/Kota	Persentase Fasilitas Kesehatan dengan Sarana dan Prasarana Kondisi Baik (100 Persen)	Dinas Kesehatan
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Puskesmas/ Fasilitas Kesehatan yang Melaksanakan Kegiatan Promotif dan Preventif (100 Persen)	Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kab/Kota	Persentase Masyarakat yang Mengetahui PHBS (100 Persen)	Dinas Kesehatan

		Menurunnya Jumlah Penganguran Daerah	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Cakupan Pemenuhan Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan (55.00 Persen)	Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kab/Kota, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kab/Kota	Persentase Wirausaha Muda (1.10 Persen)	Dinas Pora
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Cakupan Pemenuhan Pengembangan kapasitas Daya Saing Keolahragaan (50.00 Persen)	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kab/Kota	Persentase Lomba Kejuaraan Olahraga yang Dilaksanakan (100 Persen)	Dinas Pora
			Program Penempatan Tenaga Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (73.88 Persen)	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kab/Kota	Cakupan Pemerataan Tenaga Kerja (30.00 Persen)	Dinas Trans, Naker dan Perindustrian
		Terwujudnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak yang Berkualitas	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan Perencanaan Pembangunan yang Responsif Gender (100 Persen)	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kab/Kota	Persentase Peserta yang Menerima Pembinaan P3KSS dan GSI (100 Persen)	Dinas PP PA dan KB

			Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Cakupan Lembaga Penyedia Layanan Terhadap Anak (33.33 Persen)	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	Persentase Meningkatnya Pengetahuan tentang Pemenuhan Hak-hak Anak Meniuju Kabupaten Layak Anak (100 Persen)	Dinas PP PA dan KB
			Program Pengendalian Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (0.95 Persen)	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kab/Kota dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Cakupan Koordinasi Integrasi Program Bangga Kencana dalam Kebijakan Pembangunan Daerah (11 Kecamatan)	Dinas PP PA dan KB
2	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Tersedianya Prasarana, Sarana dan Utilitas Transportasi Daerah	Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan (42.50 Persen)	Penyelenggaraan Jalan Kab/Kota	Persentase Kondisi Mantap Jalan Kabupaten/Kota (41.00 Persen)	Dinas PU dan PR
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Pelayanan Angkutan Darat (72.50 Persen)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kab/Kota	Persentase Peningkatan Jumlah Perlengkapan Jalan (10.00 Persen)	Dinas Perhubungan

			Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase Cakupan Wilayah yang terlayani Angkutan Laut (60.00 Persen)	Penetapan Lintas Penyebrangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Kab/Kota yang terletak pada Jaringan Jalan Kab/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kab/Kota	Persentase Sarana Transportasi Laut yang Layak (70.00 Persen)	Dinas Perhubungan
		Tersedianya Pemukiman Penduduk yang Sehat dan Berkualitas	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Penduduk yang Memiliki Akses terhadap Sumber Daya Air yang Sehat dan Aman (42.50 Persen)	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kab/Kota	Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Perdesaan (37.50 Persen)	Dinas PU dan PR
			Program Pengembangan Perumahan	Rasio Rumah Layak Huni (88.00 Persen)	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Cakupan Pengelolaan Rumah Susun (86.00 Persen)	Dinas PR dan KP
		Tersedianya SDA untuk Mendukung Kedaulatan Pangan	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Air (SDA)	Cakupan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air Daerah (42.50 Persen)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai dalam 1 Daerah Kab/Kota	Persentase Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (30.00 Persen)	Dinas PU dan PR

		Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Ramah Lingkungan	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Cakupan Informasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten beserta Rinciannya melalui Peta Digital dan Peta Analog (30.00 Persen)	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kab/Kota	Penyelesaian Materi Teknis dari Bantuan Teknis RDTR (100 Persen)	Dinas PU dan PR
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang Didukung dengan Prasarana Sarana Umum (45.00 Persen)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU (20.00 Persen)	Dinas PR dan KP
			Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Rasio Luas Tanah yang Disediakan bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Kepentingan Lainnya (11.00 Ha)	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Cakupan Penyelesaian Kerugian (10 Lokasi)	Dinas PR dan KP
			Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (74.20 Angka)	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota	Cakupan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup (100 Persen)	Dinas LH

		Tersedianya Prasarana, Sarana dan Utilitas Pencegahan dan Penyelematan Bencana Daerah	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Peresentase Pelayanan Pemadam dan Penyelamatan Kebakaran (100 Persen)	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kab/Kota	Tingkat Waktu Tanggap (respon time rate) daerah layanan wilayah Manajemen Kebakaran (15 Menit)	Satpol PP dan Damkar
			Program Penanggulangan Bencana	Cakupan Penanggulangan Bencana Daerah (100 Persen)	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Cakupan Penanggulangan Bencana Daerah (100 Persen)	BPBD
3	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Program Pelayanan Penanaman Modal	Pertumbuhan Nilai Investasi PMDN (16.99 Persen)	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota	Rasio Izin yang Diterbitkan (80.00 Persen)	Dinas PM dan PTSP
			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap (14.419 Ton)	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	Cakupan Area Penangkapan Ikan (80.00 Persen)	Dinas Perikanan

		Meningkatnya Pendapatan Perkapita Masyarakat	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Kontribusi UMKM terhadap PDRB (2.08 Persen)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase Usaha Mikro dan Kecil yang Mendapatkan Kemitraan, Kemudahan dan Penguatan Kelembagaan serta Terdata di Database (60.00 Persen)	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB (11.56 Persen)	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang Terfasilitasi (60.00 Persen)	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		Meningkatnya Kontribusi Pertanian terhadap Perekonomian Masyarakat	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Nilai Tukar Petani (100.77 Angka)	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan Produktivitas Pertanian (0.30 Persen)	Dinas KP dan Pertanian
			Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Ketersediaan Pangan Utama (28.000 Ton)	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kab/Kota dalam Rangka Stabilitasi Pasokan dan Harga Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (84.95 Angka)	Dinas KP dan Pertanian

		Pemerataan Distribusi Pendapatan Masyarakat Menurunnya Jumlah Penduduk Miskin Daerah	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin (40.00 Persen)	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kab/Kota	Persentase Terealisasinya Rencana Pembangunan Industri (100 Persen)	Dinas Trans, Naker dan Perindustrian
			Program Rehabilitasi Sosial	Cakupan Pemenuhan SPM bidang Sosial (100 Persen)	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase PMKS yang Menerima Bantuan (100 Persen)	Dinas Sosial
			Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Cakupan Perlindungan dan Jaminan Perlindungan Sosial Daerah (100 Persen)	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota	Persentase Daerah yang Aktif Melakukan Pemutakhiran dan Data Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (100 Persen)	Dinas Sosial
		Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Penduduk Usia 10 tahun keatas yang Terlibat Pertunjukan Seni (25.00 Persen)	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kab/Kota	Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke atas yang Menonton secara Langsung Pertjunjukan Senin (60 Orang)	Dinas P dan K
			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Kontribusi PAD Sektor Pariwisata (2.98 Persen)	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kab/Kota	Lamanya Kunjungan Wisatawan (8 Hari)	Dinas Pariwisata

4	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Berkualitas	Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan Penerbitan Kartu Identitas (100 Persen)	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Pelayanan Pendaftaran Penduduk (100 Persen)	Dinas Duk dan Capil
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (100 Persen)	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Pengembangan Pemuda (100 Persen)	11 Kecamatan
		Terwujudnya Kinerja Instansi Pemerintah Daerah yang Berkualitas	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Data dan Informasi Statistik Daerah yang Tersusun dengan Baik (2 Dokumen)	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kab/Kota	Cakupan Pengelolaan Data Statistik Sektoral (100 Persen)	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian
			Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase Pengamanan Informasi Daerah yang Terselenggara Baik (100 Persen)	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kab/kota	Persentase Layanan Keamanan Informasi Daerah (100 Persen)	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian
			Program Penyelenggaraan Pengawasan	Cakupan Konsistensi Perencanan, Pengelolaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Anggaran terhadap Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan (100 Persen)	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Penjabaran konsistensi Perencanan,Pengelolaan, Pelaksanaan dan Pelaporan anggaran terhadap kepatuhan Peraturan peundang-undangan (100 Persen)	Inspektorat

			Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Cakupan Konsistensi Dokumen Perencanaan terhadap Dokumen Penganggaran (100 Persen)	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD (100 Persen)	Bappelitbangda
			Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Indeks Inovasi Daerah (Sangkat Inovatif Predikat)	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan SIDA (100 Persen)	Bappelitbangda
			Program Kepegawaian Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian (73.54 Persen)	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Cakupan Pemenuhan ASN (50.00 Persen)	BKPSDM
			Program Pengembangan Pengawasan	Cakupan Konsistensi Perencanaan, Pengelolaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Anggaran terhadap Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan (100 Persen)	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan (20 Jam Pelajaran)	BKPSDM
			Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Cakupan Penyelenggaraan Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (85.00 Persen)	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase pelaporan administrasi tata pemerintahan Tepat Waktu (100 Persen)	Sekretariat Daerah

			Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Tersusun dan Terintegrasinya Program-program kerja DPRD untuk Melaksanakan fungsi Pengawasan, fungsi Pembentukan perda, dan Fungsi anggaran dalam Dokumen Rencana lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) (100 Persen)	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Cakupan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD Yang sesuai regulasi (100 Persen)	Sekretariat DPRD
		Terwujudnya Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang Berkualitas	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Cakupan Tata Kelola Keuangan Daerah sesuai Aturan (100 Persen)	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Cakupan Dokumen penganggaran daerah tepat waktu (100 Persen)	BPKAD
			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Cakupan Tata Kelola Barang Milik Daerah sesuai Aturan (100 Persen)	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Cakupan Pencatatan Aset Daerah (100 Persen)	BPKAD
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rasio PAD Terhadap Pendapatan Daerah (4.20 Persen)	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Peningkatan PAD (2.50 Persen)	Bapenda

		Terwujudnya Kinerja Instansi Pemerintah Daerah yang Berkualitas	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Koordinasi dan Peran Lembaga dan Elemen Masyarakat dalam Pencegahan terjadinya Konflik Sosial (75.00 Persen)	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase koordinasi, pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial (100 Persen)	Badan Kesbangpol
5	Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Berkualitas	Program Aplikasi Informatika	Persentase Peningkatan Layanan Informasi dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan komunikasi (TIK) (82.50 Persen)	Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kab/Kota	Cakupan Penyediaan Informasi Digital di Lingkup Pemerintah Daerah (100 Persen)	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian
		Meningkatnya Pembangunan di Desa/Pekon	Program Penataan Desa	Jumlah Desa Berkembang (60 Pekon)	Penyelenggaraan Penataan Desa	Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Desa (65.00 Persen)	Dinas PMP
			Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang dibina (1 Lokasi)	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Cakupan Pengembangan Daerah Transmigran (80.00 Persen)	Dinas Trans, Naker dan Perindustrian

5.2 Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pendandaan

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024 dapat dikelompokkan berdasarkan urusan pemerintahan daerah untuk mencapai prioritas dan sasaran daerah tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.6 Prioritas Daerah, Sasaran Daerah dan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Urusan Pemerintahan Daerah
1	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (P1)	1. Terwujudnya Sumber Daya Manusia Daerah yang Berkualitas (S1) 2. Menurunnya Jumlah Pengangguran Daerah (S2) 3. Terwujudnya Kesetaraan gender dan Perlindungan Anak yang Berkualitas (S3)	a. Pendidikan b. Kesehatan c. Tenaga Kerja d. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak e. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana f. Pemuda dan Olahraga g. Perpustakaan h. Kearsipan
2	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan (P2)	1. Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Transportasi Daerah (S4) 2. Tersedianya Pemukiman Penduduk yang Sehat dan Berkualitas (S5) 3. Tersedianya Sumber Daya Air untuk Mendukung Kedaulatan Pangan (S6) 4. Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Ramah Lingkungan (S7) 5. Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Pencegahan dan Penyelamatan Bencana Daerah (S8)	a. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang b. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman c. Pertanahan d. Lingkungan Hidup e. Perhubungan f. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
3	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat (P3)	1. Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Daerah (S9) 2. Meningkatnya Pendapatan Perkapita Masyarakat (S10) 3. Meningkatnya Kontribusi Pertanian terhadap Perekonomian Masyarakat (S11) 4. Pemerataan Distribusi Pendapatan Masyarakat (S12)	a. Pangan b. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah c. Penanaman Modal d. Kelautan dan Perikanan e. Pariwisata f. Pertanian g. Perdagangan h. Perindustrian i. Sosial

		5. Menurunnya Jumlah Penduduk Miskin Daerah (S13) 6. Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan (S14)	j. Pariwisata k. Kebudayaan
4	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas (P4)	1. Terwujudnya Pelayanan Publik yang Berkualitas (S15) 2. Terwujudnya Kinerja Instansi Pemerintah Daerah yang Berkualitas (S16) 3. Terwujudnya Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang Berkualitas (S17)	a. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil b. Statistik c. Persandian d. Sekretariat Daerah e. Sekretariat DPRD f. Perencanaan g. Keuangan h. Kepegawaian i. Pendidikan dan Pelatihan j. Penelitian dan Pengembangan k. Inspektorat l. Kecamatan m. Kesatuan Bangsa dan Politik
5	Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat (P5)	1. Terwujudnya Kinerja Instansi Pemerintah Daerah yang Berkualitas (S16) 2. Meningkatnya Pembangunan di Desa/Pekon (S18)	a. Komunikasi dan Informatika b. Pemberdayaan Masyarakat c. Transmigrasi

Rencana disusun dengan berpedoman pada dokumen perencanaan daerah, provinsi dan pusat juga memperhatikan Program Kerja Kepala Daerah dan Pokok Pikiran dari DPRD Kabupaten Pesisir Barat:

Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Barat tersebut selanjutnya akan diwujudkan ke dalam program kerja Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Barat sebagai berikut:

Tabel 5.7 Program Kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024

Misi	Program Kerja
Misi 1 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Secara Berkeadilan, Maju dan Berdaya Saing	Pembangunan sumberdaya manusia yang berkualitas yang meliputi program pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kependudukan, kepemudaan, kesetaraan gender dan perlindungan anak.
Misi 2 Mengembangkan Infrastruktur Wilayah dengan Konsep Pembangunan Inklusif untuk	Pembangunan Infrastruktur wilayah yang berkualitas yang meliputi program pembangunan bidang prasarana dan sarana transportasi, permukiman dan perumahan, air

Misi	Program Kerja
Konektivitas Antar Wilayah dengan Memperhatikan Aspek Mitigasi Bencana dan Berwawasan Lingkungan	minum, sumber daya air dan irigasi, penanggulangan bencana. Lingkungan hidup dan penataan ruang.
Misi 3 Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan Melalui Peningkatan Produktivitas Sektor Pertanian dan Perikanan	Pembangunan ekonomi kerakyatan yang berkualitas yang meliputi program pembangunan bidang pertanian, perdagangan, perindustrian, investasi, dan pembangunan sektor ekonomi lainnya serta penanggulangan kemiskinan daerah.
Misi 4 Mengembangkan Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah yang Berpijak Pada Kearifan Lokal	Pembangunan pariwisata yang berkualitas dan berdaya saing yang meliputi program pembangunan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai sektor unggulan daerah.
Misi 5 Menyelenggarakan Pelayanan Publik yang Berkualitas Melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Produktif Serta Penguatan Sinergitas Antar Lembaga	Penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas meliputi program pembangunan bidang pelayanan publik, tata kelola keuangan dan aset daerah, penyelenggaraan pemerintahan dan otonomi daerah, aparatur sipil negara, dan pembangunan Desa/Pekon.

Sumber : RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026

Selanjutnya, rencana kerja perangkat daerah beserta tolok ukur kinerja dan pagu indikatif sesuai Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024 disampaikan secara lebih lengkap pada tabel di bawah ini.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) RANCANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**449.588.010.585,00**							**606.005.053.762,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**186.082.741.297,00**							**365.320.252.516,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)***	***92,5***			***92,50***	**126.958.119.093,00**			**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas**			**300.014.375.330,00**	***DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN***
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu (%)*				*100*	15.000.000,00	*(Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*100*	15.000.000,00	*DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN*
	1.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*2.00*	10.000.000,00	*(Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*2.00*	10.000.000,00	*DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN*
	1.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)*		*2*	*2*	*2*	5.000.000,00	*(Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*2*	5.000.000,00	*DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN*
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tercapainya Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu (%)*				*100*	119.157.038.093,00	*(Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*100*	298.862.317.330,00	*DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						119.151.538.093,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			298.856.817.330,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		*14.00*	*14.00*	*14.00*		*(Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*14.00*		*DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN*
	1.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						2.500.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.500.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		*1*	*1*	*1*		*(Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN*
	1.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						2.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat			2.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		*2.00*	*2.00*	*2.00*		*(Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*2.00*		*DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN*
	1.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						1.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)		*1*	*1*	*1*		*(Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN*
	1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						100.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			100.000.000,00	
			Terlaksananya Pendataan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (%)				*100*		*(Kecamatan di Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN*
	1.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						100.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat			100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kecamatan di Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN*
	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						6.622.333.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			-	
			Terlaksananya Jenis Bidang Urusan yang dilaksanakan (Jenis)				*2*		*(KAB. PESISIR BARAT)*					*2*		*DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN*
	1.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						61.600.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			-	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*70*		*(Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*70*		*DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN*
	1.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						6.560.733.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat			-	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)		*0*	*0*										*DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN*
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						493.516.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			493.516.000,00	
			Tercapainya Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja (%)				*100*		*(Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN*
	1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						2.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat			2.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		*1*	*1*	*1*		*(Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN*
	1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						9.500.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			9.500.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)*		*1*	*1*	*1*	85.000.000,00	*(Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur dan masyarakat*	*1*	85.000.000,00	*DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN*
	1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)*		*12*	*12*	*12*	96.016.000,00	*(Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*12*	96.016.000,00	*DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN*
	1.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)*		*0.00*	*30*	*30*	30.000.000,00	*(Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*30*	30.000.000,00	*DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN*
	1.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)*		*11*	*11*	*11*	11.000.000,00	*(Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur dan Masyarakat*	*11*	11.000.000,00	*DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN*
	1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)*		*12*	*12*	*12*	260.000.000,00	*(Kabupaten Pesisir Barat dan di Luar Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*12*	260.000.000,00	*DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN*
	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terpenuhi Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)*				*100*	254.000.000,00	*(Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*100*	254.000.000,00	*DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN*
	1.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						80.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			80.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)		*0*	*0*	*2*		*(Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*2*		*DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN*
	1.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						174.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			174.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		*0.00*	*0.00*	*14*		*(Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur dan Masyarakat*	*14*		*DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN*
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						204.542.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			204.542.000,00	
			Tercapainya Persentase pemenuhan Layanan Pendukung (%)				*100*		*(Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN*
	1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						42.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			42.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN*
	1.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						157.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			157.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN*
	1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						5.542.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			5.542.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN*
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						111.690.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			85.000.000,00	
			Tercapainya Persentase Barang Milik Daerah yang dalam kondisi baik (%)				*100*		*(Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)*		*2*	*2*	*2*	85.000.000,00	*(Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*2*	85.000.000,00	*DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN*
	1.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)*		*0*	*0*		26.690.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*		-	*DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN*
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	***cakupan pemenuhan SPM Bidang Pendidikan (%)***				***100***	**59.124.622.204,00**			**Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing**	**Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**65.305.877.186,00**	***DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN***
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka partispasi Kasar SD (%)*				*92.57*	35.605.440.227,00	*(Seluruh Kecamatan Yang ada di Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia		*93.07*	40.103.562.186,00	*DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN*
	1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi (Unit)*		*0.00*	*0.00*	*21*	7.623.160.227,00	*(SD Yang menerima manfaat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	*Guru, Murid, dan Masyarakat*	*21*	8.516.694.186,00	*DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN*
	1.01.02.2.01.17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	*Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Unit)*		*17963*	*0*	*17772*	1.080.000.000,00	*(SD Yang mendapat bantuan perlengkapan siswa, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	*Siswa SD*	*17772*	1.965.260.000,00	*DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN*
	1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar						8.460.300.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			9.306.330.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)		*0.00*	*0.00*	*14098*		*(SD Yang mendapat Bantuan Biaya Personil Peserta Didik, KAB. PESISIR BARAT)*				*Siswa SD*	*14098*		*DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN*
	1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar						280.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			308.000.000,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)		*0.00*	*60*	*70*		*(Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Pendidik dan Tenaga Kependidikan*	*80*		*DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN*
	1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						17.986.980.000,00		DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			19.785.578.000,00	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)		*127*	*127*	*128*		*(SD yang Mengelola Dana BOS, KAB. PESISIR BARAT)*				*Pendidik, Tenaga Pendidik, dan Peserta Didik*	*128*		*DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN*
	1.01.02.2.01.38	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan						125.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			161.700.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)		*0*	*4*	*4*		*(Kecamatan di Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur, Pendidik, Tenaga Pendidik dan Peserta Didik*	*4*		*DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN*
	1.01.02.2.01.39	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan						50.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			60.000.000,00	
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*5*		*(SD Yang menjadi tempat sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan, KAB. PESISIR BARAT)*				*Peserta Didik SD*	*5*		*DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN*
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						18.264.500.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			19.806.253.000,00	
			Angka partispasi kasar SMP (%)				*92.12*		*(Seluruh Kecamatan Yang Ada di Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*92.14*		*DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN*
	1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						4.359.110.000,00		DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			4.359.110.000,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)		*0.00*	*12*	*12*		*(Satuan Pendidikan SMP Yang menerima manfaat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Pendidik, Tenaga Pendidik, Peserta Didik, dan Masyarakat*	*12*		*DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.02.28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	*Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia (Paket)*		*6364*	*0.00*	*6129*	388.740.000,00	*(Sataun Pendidikan SMP Yang mendapat bantuan siswa, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Peserta Didik SMP*	*6129*	427.614.000,00	*DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN*
	1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	*Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)*		*0.00*	*0.00*	*5274*	5.275.500.000,00	*(Satuan Pendidikan SMP Yang Menerima Bantuan Biaya Personil Peserta Didik, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Peserta Didik SMP*	*5274*	427.614.000,00	*DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN*
	1.01.02.2.02.35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	*Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia (Paket)*		*0.00*	*0.00*	*20*	20.000.000,00	*(Satuan Pendidikan SMP Yang menerima Bantuan Alat Praktik dan Peraga Siswa, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	*Peserta Didik SMP*	*20*	5.803.050.000,00	*DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN*
	1.01.02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)*		*0*	*0*		130.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	*Pendidik dan Tenaga Kependidikan*		-	*DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN*
	1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	*Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)*		*36*	*36*	*36*	7.817.150.000,00	*(Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	*Peserta Didik SMP*	*36*	8.598.865.000,00	*DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN*
	1.01.02.2.02.51	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)*		*0*	*0*		94.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	*Pendidik, Tenaga Pendidik, dan Peserta Didik*		-	*DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.02.52	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan						50.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			60.000.000,00	
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)		*0.00*	*4*	*4*		*(Satuan Pendidikan SMP Yang menjadi lokasi kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan, KAB. PESISIR BARAT)*				*Peserta Didik SMP*	*4*		*DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN*
	1.01.02.2.02.53	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan						130.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			130.000.000,00	
			Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)		*0.00*	*0.00*	*40*		*(Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Pendidik dan Tenaga Pendidik*	*40*		*DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN*
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)						4.842.361.977,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			4.942.510.000,00	
			Angka partispasi Kasar PAUD (%)				*73*		*(Seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*74*		*DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN*
	1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD						1.318.151.977,00		DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.500.000.000,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun (Unit)		*0.00*	*4*	*4*		*(Satuan PAUD Yang menerima manfaat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Pendidik, Tenaga Pendidik, Peserta Didik dan Masyarakat*	*4*		*DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN*
	1.01.02.2.03.10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD						996.700.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.000.000.000,00	
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia (Paket)		*0.00*	*6600.00*	*3239*		*(Satuan Pendidikan PAUD yang menerima Bantuan Perlengkapan Peserta Didik, KAB. PESISIR BARAT)*				*Peserta Didik PAUD*	*3239*		*DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN*
	1.01.02.2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD						130.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			150.000.000,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)		*0.00*	*0.00*	*40*		*(Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Pendidik dan Tenaga Pendidik*	*40*		*DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	*Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)*		*118*	*118*	*118*	2.192.510.000,00	*(Satuan PAUD yang Mengelola Dana BOP, KAB. PESISIR BARAT)*	DAK Non Fisik-BOP PAUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	*Pendidik, Tenaga Pendidik, dan Peserta Didik*	*118*	2.192.510.000,00	*DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN*
	1.01.02.2.03.25	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*4*	80.000.000,00	*(PAUD di Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*Pendidik, Tenaga Pendidik dan Peserta Didik*	*4*	100.000.000,00	*DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN*
	1.01.02.2.03.26	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	*Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)*		*0*	*0*		125.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	*Pendidik, Tenaga Pendidik, dan Peserta Didik PAUD*		-	*DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN*
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*Jumlah Warga Negara Dalam Pendidikan Kesetaraan (Orang)*				*325*	412.320.000,00	*(Satuan Pendidikan Kesetaraan Yang Ada di Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia		*325*	453.552.000,00	*DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN*
	1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	*Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)*		*4*	*4*	*4*	412.320.000,00	*(Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	*Pendidik, Tenaga Pendidik, dan Peserta Didik*	*4*	453.552.000,00	*DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN*
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**103.815.980.684,00**							**103.815.980.684,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)***	***92,5***			***92,5***	**34.963.420.870,00**				**Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas**			**34.963.420.870,00**	***DINAS KESEHATAN***
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						61.449.600,00				Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			61.449.600,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Dinas Kesehatan (%)				*92.5*		*(Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, Serai, Kec. Pesisir Tengah)*					*95*		*DINAS KESEHATAN*
	1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						19.220.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					19.220.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)		*2.00*	*2.00*	*3.00*		*(Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, Serai, Kec. Pesisir Tengah)*				*Aparatur*	*3.00*		*DINAS KESEHATAN*
	1.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						9.610.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					9.610.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, Serai, Kec. Pesisir Tengah)*				*Aparatur*	*1*		*DINAS KESEHATAN*
	1.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						9.610.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					9.610.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, Serai, Kec. Pesisir Tengah)*				*Aparatur*	*1.00*		*DINAS KESEHATAN*
	1.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						6.752.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					6.752.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, Serai, Kec. Pesisir Tengah)*				*Aparatur*	*1.00*		*DINAS KESEHATAN*
	1.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						16.257.600,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					16.257.600,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		*4*	*4*	*2*		*(Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, Serai, Kec. Pesisir Tengah)*				*Aparatur*	*2*		*DINAS KESEHATAN*
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						32.839.360.900,00							32.839.360.900,00	
			Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Dinas Kesehatan (%)				*92.5*		*(Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, Serai, Kec. Pesisir Tengah)*					*95*		*DINAS KESEHATAN*
	1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						32.827.310.900,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					32.827.310.900,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		*438*	*438*	*438*		*(Kecamatan Lemong, Kecamatan Pesisir Utara, Kecamatan Pulau Pisang, Kecamatan Karya Penggawa, Kecamatan Way Krui, Kecamatan Pesisir Tengah, Kecamatan Krui Selatan, Kecamatan Pesisir Selatan, Kecamatan Ngambur, Kecamatan Bengkunat, Kecamatan Bengkunat Belimbing, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*438*		*DINAS KESEHATAN*
	1.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						4.750.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					4.750.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		*1*	*1*	*1*		*(Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, Serai, Kec. Pesisir Tengah)*				*Aparatur*	*1*		*DINAS KESEHATAN*
	1.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						4.200.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					4.200.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		*2*	*2*	*2*		*(Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, Serai, Kec. Pesisir Tengah)*				*Aparatur*	*2*		*DINAS KESEHATAN*
	1.02.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						3.100.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					3.100.000,00	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)		*1*	*1*	*1*		*(Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, Serai, Kec. Pesisir Tengah)*				*Aparatur*	*1*		*DINAS KESEHATAN*
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						692.742.510,00							692.742.510,00	
			Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Dinas Kesehatan (%)				*92.5*		*(Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, Serai, Kec. Pesisir Tengah)*					*95*		*DINAS KESEHATAN*
	1.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						35.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					35.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)		*0*	*0*	*1*		*(Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, Serai, Kec. Pesisir Tengah)*				*Aparatur*	*1*		*DINAS KESEHATAN*
	1.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						657.742.510,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					657.742.510,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)		*0.00*	*0.00*	*50.00*		*(Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, Serai, Kec. Pesisir Tengah)*				*Aparatur*	*50.00*		*DINAS KESEHATAN*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						688.278.860,00							688.278.860,00	
			Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Dinas Kesehatan (%)				*92.5*		*(Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, Serai, Kec. Pesisir Tengah)*					*95*		*DINAS KESEHATAN*
	1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						6.122.600,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					6.122.600,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		*1.00*	*1.00*	*12*		*(Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, Serai, Kec. Pesisir Tengah)*				*Aparatur*	*12*		*DINAS KESEHATAN*
	1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						8.671.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					8.671.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		*1.00*	*1.00*	*12*		*(Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, Serai, Kec. Pesisir Tengah)*				*Aparatur*	*12*		*DINAS KESEHATAN*
	1.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						10.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					10.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, Serai, Kec. Pesisir Tengah)*				*Aparatur*	*12*		*DINAS KESEHATAN*
	1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						44.636.760,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					44.636.760,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		*1.00*	*1.00*	*12*		*(Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, Serai, Kec. Pesisir Tengah)*				*Aparatur*	*12*		*DINAS KESEHATAN*
	1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						75.798.500,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					75.798.500,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*2.00*	*2.00*	*12*		*(Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, Serai, Kec. Pesisir Tengah)*				*Aparatur*	*12*		*DINAS KESEHATAN*
	1.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						185.950.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					185.950.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		*2*	*2*	*1*		*(Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, Serai, Kec. Pesisir Tengah)*				*Aparatur*	*1*		*DINAS KESEHATAN*
	1.02.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material						25.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					25.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Lapangan Sepakbola (Lokasi Krui Fair), Pelita Jaya, Kec. Pesisir Selatan)*				*Aparatur*	*1*		*DINAS KESEHATAN*
	1.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu						12.100.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					12.100.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)		*1.00*	*1.00*	*11*		*(Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, Serai, Kec. Pesisir Tengah)*				*Aparatur*	*11*		*DINAS KESEHATAN*
	1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						320.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					320.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*2.00*	*2.00*	*12*		*(Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, Serai, Kec. Pesisir Tengah)*				*Aparatur*	*12*		*DINAS KESEHATAN*
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						167.000.000,00							167.000.000,00	
			Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Dinas Kesehatan (%)				*92.5*		*(Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, Serai, Kec. Pesisir Tengah)*					*95*		*DINAS KESEHATAN*
	1.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						42.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					42.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, Serai, Kec. Pesisir Tengah)*				*Aparatur*	*1*		*DINAS KESEHATAN*
	1.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel						15.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					15.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)		*48*	*75*	*5*		*(Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, Serai, Kec. Pesisir Tengah)*				*Aparatur*	*10*		*DINAS KESEHATAN*
	1.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						55.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					55.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		*0.00*	*3*	*10*		*(Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, Serai, Kec. Pesisir Tengah)*				*Aparatur*	*10*		*DINAS KESEHATAN*
	1.02.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						55.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					55.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, Serai, Kec. Pesisir Tengah)*				*Aparatur*	*2*		*DINAS KESEHATAN*
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						108.960.000,00							108.960.000,00	
			Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Dinas Kesehatan (%)				*92.5*		*(Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, Serai, Kec. Pesisir Tengah)*					*95*		*DINAS KESEHATAN*
	1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						12.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					12.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		*1.00*	*1.00*	*12*		*(Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, Serai, Kec. Pesisir Tengah)*				*Aparatur*	*12*		*DINAS KESEHATAN*
	1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						96.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					96.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*1.00*	*1.00*	*12*		*(Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, Serai, Kec. Pesisir Tengah)*				*Aparatur*	*12*		*DINAS KESEHATAN*
	1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						960.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					960.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, Serai, Kec. Pesisir Tengah)*				*Aparatur*	*12*		*DINAS KESEHATAN*
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						405.629.000,00							405.629.000,00	
			Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Dinas Kesehatan (%)				*92.5*		*(Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, Serai, Kec. Pesisir Tengah)*					*95*		*DINAS KESEHATAN*
	1.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						27.229.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					27.229.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		*8*	*8*	*8*		*(Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, Serai, Kec. Pesisir Tengah)*				*Aparatur*	*8*		*DINAS KESEHATAN*
	1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						281.800.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					281.800.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		*8*	*8*	*8*		*(Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, Serai, Kec. Pesisir Tengah)*				*Aparatur*	*8*		*DINAS KESEHATAN*
	1.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						56.600.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					56.600.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		*19.00*	*19.00*	*30.00*		*(Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, Serai, Kec. Pesisir Tengah)*				*Aparatur*	*30.00*		*DINAS KESEHATAN*
	1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						40.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					40.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*0.00*	*1*	*2*		*(Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, Serai, Kec. Pesisir Tengah)*				*Aparatur*	*2*		*DINAS KESEHATAN*
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**61.778.931.631,00**				**Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**61.778.931.631,00**	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Cakupan Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan (%)				***100***									***DINAS KESEHATAN***
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan (%)*				*100*	43.889.952.308,00	*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*	43.889.952.308,00	*DINAS KESEHATAN*
	1.02.02.2.01.05	Pengembangan Rumah Sakit	*Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 (Unit)*		*0.00*	*0.00*	*3*	7.000.000.000,00	*(Lahan RSUD KH Muhammad Thohir, Way Suluh, Kec. Krui Selatan)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*Aparatur dan Masyarakat*	*2*	7.000.000.000,00	*DINAS KESEHATAN*
	1.02.02.2.01.06	Pengembangan Puskesmas	*Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)*		*3.00*	*2.00*	*2.00*	5.000.000.000,00	*(Puskesmas Way Krui dan Puskesmas Krui Selatan, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*Aparatur dan Masyarakat*	*2.00*	5.000.000.000,00	*DINAS KESEHATAN*
	1.02.02.2.01.08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit (Unit)*		*0.00*	*1*	*1*	2.000.000.000,00	*(Lahan RSUD KH Muhammad Thohir, Way Suluh, Kec. Krui Selatan)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*Aparatur dan Masyarakat*	*1*	2.000.000.000,00	*DINAS KESEHATAN*
	1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas (Unit)*		*3*	*1*	*3*	5.000.000.000,00	*(Puskesmas Pugung Tampak, Puskesmas Ngambur, dan Puskesmas Bengkunat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*Aparatur dan Masyarakat*	*3*	5.000.000.000,00	*DINAS KESEHATAN*
	1.02.02.2.01.10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	*Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya (Unit)*		*0.00*	*0.00*	*7*	5.000.000.000,00	*(Kecamatan Krui Selatan, Ngambur, Pesisir Utara, Lemong, dan Pesisir Selatan, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*Aparatur dan Masyarakat*	*7*	5.000.000.000,00	*DINAS KESEHATAN*
	1.02.02.2.01.11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan (Unit)*		*0.00*	*0.00*	*7*	5.000.000.000,00	*(Puskesmas Bengkunat, Puskesmas Ngambur, dan Puskesmas Pulau Pisang, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*Aparatur*	*7*	5.000.000.000,00	*DINAS KESEHATAN*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan						5.000.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					5.000.000.000,00	
			Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)		*6*	*0.00*	*11*		*(Semua Puskesmas di 11 Kecamatan, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur dan Masyarakat*	*55*		*DINAS KESEHATAN*
	1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan						5.000.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					5.000.000.000,00	
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)		*3*	*3*	*3*		*(Semua Puskesmas Di Kabupaten, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur dan Masyarakat*	*3*		*DINAS KESEHATAN*
	1.02.02.2.01.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi						246.868.108,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					246.868.108,00	
			Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center (Unit)		*11*	*11*	*11*		*(Seluruh Puskesmas di Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur dan Masyarakat*	*11*		*DINAS KESEHATAN*
	1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin						3.037.696.200,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					3.037.696.200,00	
			Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan (Paket)		*12.00*	*12.00*	*12.00*		*(RSUD dan Seluruh Puskesmas di Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Masyarakat*	*12.00*		*DINAS KESEHATAN*
	1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai						1.527.448.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.527.448.000,00	
			Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan (Paket)		*12*	*12*	*12*		*(RSUD dan Seluruh Puskesmas di Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Masyarakat*	*12*		*DINAS KESEHATAN*
	1.02.02.2.01.21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya						77.940.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					77.940.000,00	
			Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya (Paket)		*12*	*12*	*12*		*(RSUD dan Seluruh Puskesmas di Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur dan Masyarakat*	*12*		*DINAS KESEHATAN*
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						17.470.377.400,00							17.470.377.400,00	
			Cakupan Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan (%)				*100*		*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS KESEHATAN*
	1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						100.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*45*		*(Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, Serai, Kec. Pesisir Tengah)*				*Aparatur dan Masyarakat*	*45*		*DINAS KESEHATAN*
	1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						82.065.600,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					82.065.600,00	
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*45*	*45*	*45*		*(Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, Serai, Kec. Pesisir Tengah)*				*Aparatur dan Masyarakat*	*45*		*DINAS KESEHATAN*
	1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir						100.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					100.000.000,00	
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*45*		*(Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, Serai, Kec. Pesisir Tengah)*				*Aparatur*	*45*		*DINAS KESEHATAN*
	1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita						70.705.400,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					70.705.400,00	
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*22*	*22*	*33*		*(Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, Serai, Kec. Pesisir Tengah)*				*Aparatur*	*33*		*DINAS KESEHATAN*
	1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						100.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					100.000.000,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*45*		*(Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, Serai, Kec. Pesisir Tengah)*				*Aparatur*	*45*		*DINAS KESEHATAN*
	1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						100.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					100.000.000,00	
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*33*		*(Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, Serai, Kec. Pesisir Tengah)*				*Aparatur*	*33*		*DINAS KESEHATAN*
	1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut						209.400.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					209.400.000,00	
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*24*		*(Bapelkes Provinsi Lampung, Luar Wilayah)*				*Aparatur*	*24*		*DINAS KESEHATAN*
	1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi						100.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					100.000.000,00	
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*33*		*(Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, Serai, Kec. Pesisir Tengah)*				*Aparatur*	*33*		*DINAS KESEHATAN*
	1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus						100.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*33*		*(Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, Serai, Kec. Pesisir Tengah)*				*Aparatur*	*33*		*DINAS KESEHATAN*
	1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						75.207.600,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					75.207.600,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)		*22*	*22*	*22*		*(Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, Serai, Kec. Pesisir Tengah)*				*Aparatur*	*22*		*DINAS KESEHATAN*
	1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						116.724.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					116.724.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)		*48*	*48*	*48*		*(Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, Serai, Kec. Pesisir Tengah)*				*Aparatur*	*48*		*DINAS KESEHATAN*
	1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						101.876.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					101.876.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)		*48*	*48*	*48*		*(Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, Serai, Kec. Pesisir Tengah)*				*Aparatur*	*48*		*DINAS KESEHATAN*
	1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)						100.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					100.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, Serai, Kec. Pesisir Tengah)*				*Aparatur*	*1*		*DINAS KESEHATAN*
	1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana						71.467.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					71.467.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, Serai, Kec. Pesisir Tengah)*				*Masyarakat*	*1*		*DINAS KESEHATAN*
	1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						126.560.300,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					126.560.300,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)		*1*	*1*	*1*		*(Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, Serai, Kec. Pesisir Tengah)*				*Masyarakat*	*1*		*DINAS KESEHATAN*
	1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga						20.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					20.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, Serai, Kec. Pesisir Tengah)*				*Aparatur*	*1*		*DINAS KESEHATAN*
	1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						189.945.500,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					189.945.500,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)		*1*	*1*	*1*		*(Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, Serai, Kec. Pesisir Tengah)*				*Masyarakat*	*1*		*DINAS KESEHATAN*
	1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan						101.423.800,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					101.423.800,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)		*1*	*1*	*1*		*(Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, Serai, Kec. Pesisir Tengah)*				*Masyakarat*	*1*		*DINAS KESEHATAN*
	1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya						97.115.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					97.115.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, Serai, Kec. Pesisir Tengah)*				*Masyarakat*	*1*		*DINAS KESEHATAN*
	1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						52.970.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					52.970.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, Serai, Kec. Pesisir Tengah)*				*Aparatur*	*1.00*		*DINAS KESEHATAN*
	1.02.02.2.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)						100.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					100.000.000,00	
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)		*0.00*	*0.00*	*33*		*(Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, Serai, Kec. Pesisir Tengah)*				*Aparatur*	*33*		*DINAS KESEHATAN*
	1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA						100.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					100.000.000,00	
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)		*0.00*	*0.00*	*33*		*(Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, Serai, Kec. Pesisir Tengah)*				*Aparatur*	*33*		*DINAS KESEHATAN*
	1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus						231.118.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					231.118.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus (Dokumen)		*2*	*2*	*3*		*(Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, Serai, Kec. Pesisir Tengah)*				*Masyarakat*	*3*		*DINAS KESEHATAN*
	1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						400.870.200,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					400.870.200,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)		*3*	*3*	*3*		*(Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, Serai, Kec. Pesisir Tengah)*				*Aparatur*	*3*		*DINAS KESEHATAN*
	1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat						8.932.168.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					8.932.168.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)		*5.00*	*5*	*5*		*(Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, Serai, Kec. Pesisir Tengah)*				*Aparatur dan Masyarakat*	*5*		*DINAS KESEHATAN*
	1.02.02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit						5.100.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					5.100.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen)		*1*	*1*	*1*		*(RSUD KH Muhammad Thohir, Way Suluh, Kec. Krui Selatan)*				*Aparatur dan Masyarakat*	*1*		*DINAS KESEHATAN*
	1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas						213.624.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					213.624.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)		*11.00*	*11*	*11*		*(Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, Serai, Kec. Pesisir Tengah)*				*Aparatur*	*11*		*DINAS KESEHATAN*
	1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya						25.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					25.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)		*1*	*1*	*1*		*(Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, Serai, Kec. Pesisir Tengah)*				*Aparatur*	*1*		*DINAS KESEHATAN*
	1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota						243.891.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					243.891.000,00	
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota (Unit)		*4*	*5*	*6*		*(Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, Serai, Kec. Pesisir Tengah)*				*Aparatur dan Masyarakat*	*5*		*DINAS KESEHATAN*
	1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah						43.270.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					43.270.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah (Dokumen)		*1*	*1*	*1*		*(Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, Serai, Kec. Pesisir Tengah)*				*Aparatur*	*1*		*DINAS KESEHATAN*
	1.02.02.2.02.38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)						64.976.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					64.976.000,00	
			Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) (Unit)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, Serai, Kec. Pesisir Tengah)*				*Aparatur dan Masyarakat*	*1*		*DINAS KESEHATAN*
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi						418.601.923,00							418.601.923,00	
			Cakupan Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan (%)				*100*		*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS KESEHATAN*
	1.02.02.2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan						178.408.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					178.408.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan (Dokumen)		*3*	*3*	*3*		*(Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, Serai, Kec. Pesisir Tengah)*				*Aparatur dan Masyarakat*	*3*		*DINAS KESEHATAN*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)*		*1*	*1*	*1*	240.193.923,00	*(Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, Serai, Kec. Pesisir Tengah)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*Aparatur dan Masyarakat*	*1*	240.193.923,00	*DINAS KESEHATAN*
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	***Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan (%)***				***100***	**4.918.705.636,00**				**Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**4.918.705.636,00**	***DINAS KESEHATAN***
	1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	*Persentase Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Kesehatan (%)*				*100*	66.134.800,00	*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*	66.134.800,00	*DINAS KESEHATAN*
	1.02.03.2.01.01	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Dokumen)*		*1*	*1*	*1*	41.134.800,00	*(Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, Serai, Kec. Pesisir Tengah)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*Aparatur*	*1*	41.134.800,00	*DINAS KESEHATAN*
	1.02.03.2.01.02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Dokumen)*		*1*	*0*	*1*	25.000.000,00	*(Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, Serai, Kec. Pesisir Tengah)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*Aparatur*	*1*	25.000.000,00	*DINAS KESEHATAN*
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	*Persentase Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Kesehatan (%)*				*100*	4.812.570.836,00	*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*	4.812.570.836,00	*DINAS KESEHATAN*
	1.02.03.2.02.01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)*		*1*	*1*	*1*	4.709.760.236,00	*(Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, Serai, Kec. Pesisir Tengah)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*Aparatur*	*1*	4.709.760.236,00	*DINAS KESEHATAN*
	1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	*Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)*		*95*	*95*	*95*	62.810.600,00	*(Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, Serai, Kec. Pesisir Tengah)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*Aparatur*	*95*	62.810.600,00	*DINAS KESEHATAN*
	1.02.03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan						40.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					40.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)		*1*	*1*	*1*		*(Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, Serai, Kec. Pesisir Tengah)*				*Organasasi PPN dan IBI*	*1*		*DINAS KESEHATAN*
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Kesehatan (%)*				*100*	40.000.000,00	*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*	40.000.000,00	*DINAS KESEHATAN*
	1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Orang)*		*0*	*0*	*9*	40.000.000,00	*(Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, Serai, Kec. Pesisir Tengah)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*Aparatur*	*9*	40.000.000,00	*DINAS KESEHATAN*
4.	**1.02.04**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	***Tingkat Pengawasan dan tindak Lanjut Terhadap Perizinan Usaha (%)***				***100***	**351.980.965,00**							**351.980.965,00**	***DINAS KESEHATAN***
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	*Capaian Tingkat Pengawasan dan Tindak Lanjut Terhadap Perizinan Usaha (%)*				*100*	94.419.165,00	*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*	94.419.165,00	*DINAS KESEHATAN*
	1.02.04.2.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	*Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (Dokumen)*		*1*	*1*	*1*	94.419.165,00	*(Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, Serai, Kec. Pesisir Tengah)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*Apotik dan Toko Obat*	*1*	94.419.165,00	*DINAS KESEHATAN*
	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	*Capaian Tingkat Pengawasan dan Tindak Lanjut Terhadap Perizinan Usaha (%)*				*100*	56.071.800,00	*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*	56.071.800,00	*DINAS KESEHATAN*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	*Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga (Dokumen)*		*1*	*0.00*	*1*	56.071.800,00	*(Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, Serai, Kec. Pesisir Tengah)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*UMKM Masyarakat*	*1*	56.071.800,00	*DINAS KESEHATAN*
	1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	*Capaian Tingkat Pengawasan dan Tindak Lanjut Terhadap Perizinan Usaha (%)*				*100*	201.490.000,00	*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*	201.490.000,00	*DINAS KESEHATAN*
	1.02.04.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	*Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) (Dokumen)*		*1*	*1*	*1*	201.490.000,00	*(Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, Serai, Kec. Pesisir Tengah)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*Masyarakat*	*1*	201.490.000,00	*DINAS KESEHATAN*
5.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	***Persentase Puskesmas/Fasilitas Kesehatan yang Melaksanakan Kegiatan Promotif dan Preventif (%)***				***100***	**1.802.941.582,00**				**Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**1.802.941.582,00**	***DINAS KESEHATAN***
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase puskesmas/fasilitas kesehatan yang melaksanakan kegiatan promotif dan preventif (%)*				*100*	1.792.234.782,00	*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*	1.792.234.782,00	*DINAS KESEHATAN*
	1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (Dokumen)*		*1*	*1*	*1*	1.792.234.782,00	*(Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, Serai, Kec. Pesisir Tengah)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*Aparatur dan Masyarakat*	*1*	1.792.234.782,00	*DINAS KESEHATAN*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase puskesmas/fasilitas kesehatan yang melaksanakan kegiatan promotif dan preventif (%)*				*100*	10.706.800,00	*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*	10.706.800,00	*DINAS KESEHATAN*
	1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*1*	10.706.800,00	*(Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, Serai, Kec. Pesisir Tengah)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*Aparatur dan Masyarakat*	*1*	10.706.800,00	*DINAS KESEHATAN*
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**134.524.594.526,00**							**111.196.890.529,00**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)***	***92,5***			***92,50***	**5.348.238.701,00**			**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas**			**5.722.916.551,00**	***DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG***
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu (%)*				*100*	23.100.000,00	*(Dinas PUPR, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*100*	25.434.079,00	*DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG*
	1.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)*		*2.00*	*2.00*	*2.00*	12.100.000,00	*(Kantor DPUPR, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*2.00*	13.310.000,00	*DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG*
	1.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)*		*1*	*1*	*1*	11.000.000,00	*(Kantor DPUPR, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*1*	12.124.079,00	*DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.289.800.000,00				Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			3.358.141.000,00	
			Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu (%)				*100*		*(Kantor DPUPR, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG*
	1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						3.276.300.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			3.343.500.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		*448*	*448*	*448*		*(Kantor DPUPR, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*448*		*DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG*
	1.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						6.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			6.655.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		*1*	*1*	*1*		*(Kantor DPUPR, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG*
	1.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						5.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			5.324.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		*2*	*2*	*2*		*(Kantor DPUPR, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*2*		*DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG*
	1.03.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						2.500.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.662.000,00	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)		*1*	*1*	*1*		*(Kantor DPUPR, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG*
	1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						95.000.000,00				Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			180.752.462,00	
			Persentase Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (%)				*100*		*(Kantor DPUPR, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG*
	1.03.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD						95.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					180.752.462,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		*1*	*1*	*1*		*(Kantor DPUPR, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG*
	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						100.000.000,00				Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana kepegawaian dan sumber daya manusia (%)				*100*		*(Kantor DPUPR, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG*
	1.03.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						100.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			100.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)		*5*	*5*	*5*		*(Kantor DPUPR, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*5*		*DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG*
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						441.828.701,00				Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			538.031.010,00	
			Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja (%)				*100*		*(Kantor DPUPR, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG*
	1.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						10.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			10.821.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		*11.00*	*11.00*	*11.00*		*(Kantor DPUPR, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*11.00*		*DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG*
	1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						97.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			106.575.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		*41.00*	*41.00*	*41.00*		*(Kantor DPUPR, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*41.00*		*DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG*
	1.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						115.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			133.100.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		*1*	*1*	*1*		*(Kantor DPUPR, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG*
	1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						75.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			127.429.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*8*	*8*	*8*		*(Kantor DPUPR, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*8*		*DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG*
	1.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						30.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			30.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		*2*	*2*	*2*		*(Kantor DPUPR, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*2*		*DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG*
	1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						114.828.701,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			130.106.010,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*2.00*	*2.00*	*2.00*		*(Luar dan Dalam Wilayah Kab. Pesisir Barat, Luar Wilayah)*				*Aparatur*	*2.00*		*DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG*
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						249.100.000,00				Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			272.800.000,00	
			Persentase pemenuhan prasarana pendukung kinerja (%)				*100*		*(Kantor DPUPR, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG*
	1.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						249.100.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			272.800.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		*15*	*20*	*20*		*(Kantor DPUPR, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*20*		*DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG*
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						457.940.000,00				Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			522.458.000,00	
			Persentase Pemenunan layanan pendukung kantor (%)				*100*		*(Kantor DPUPR, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG*
	1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						84.700.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			93.170.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*3*	*3*	*3*		*(Kantor DPUPR, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*3*		*DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG*
	1.03.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						300.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			348.722.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)		*3*	*3*	*3*		*(Kantor DPUPR, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*3*		*DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG*
	1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						73.240.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			80.566.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		*1*	*1*	*1*		*(Kantor DPUPR, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG*
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						691.470.000,00				Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			725.300.000,00	
			Persentase Barang Milik Daerah yang dalam kondisi baik (%)				*100*		*(Kantor PUPR, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG*
	1.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						359.370.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			395.300.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		*9*	*9*	*9*		*(Kantor DPUPR, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*9*		*DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG*
	1.03.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar						332.100.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			330.000.000,00	
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)		*5*	*5*	*5*		*(Kantor DPUPR, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*5*		*DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG*
2.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**						**7.184.286.394,00**				**Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan**			**10.058.000.951,00**	
			Cakupan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air Daerah (%)				***45***									***DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG***
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						3.592.143.197,00				Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			5.029.000.475,00	
			persentase pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai (%)				*100*		*(Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG*
	1.03.02.2.01.10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing						1.172.143.197,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			2.367.000.475,00	
			Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun (KM)		*1*	*1*	*1*		*(Seluruh Kecamatan, KAB. PESISIR BARAT)*				*Masyarakat*	*1*		*DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG*
	1.03.02.2.01.18	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya						1.210.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			1.331.000.000,00	
			Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun (KM)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Masyarakat*	*1*		*DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG*
	1.03.02.2.01.46	Normalisasi/Restorasi Sungai						1.210.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			1.331.000.000,00	
			Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi (KM)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Masyarakat*	*1*		*DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG*
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						3.592.143.197,00				Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			5.029.000.476,00	
			Cakupan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air Daerah (%)				*100*		*(Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG*
	1.03.02.2.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan						1.777.143.197,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			3.032.500.476,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi (KM)		*1*	*3.6*	*1*		*(kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Masyarakat*	*1.2*		*DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG*
	1.03.02.2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan						1.815.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			1.996.500.000,00	
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)		*0.00*	*0.5*	*1*		*(kab. pesisir barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Masyarakat*	*2*		*DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG*
3.	**1.03.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**						**2.275.402.820,00**				**Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan**			**3.413.104.229,00**	
			Persentase Penduduk yang memiliki akses terhadap sumber daya air yang sehat dan aman (%)				***42,5***									***DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG***
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota						2.275.402.820,00				Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			3.413.104.229,00	
			Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan (%)				*100*		*(Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG*
	1.03.03.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM						275.402.820,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			413.104.229,00	
			Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun (Dokumen)		*1*	*1*	*1*		*(kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Masyarakat*	*1*		*DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG*
	1.03.03.2.01.04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan						2.000.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			3.000.000.000,00	
			Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat (SR)		*375*	*600*	*900*		*(kab.Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Masyarakat*	*1000*		*DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG*
4.	**1.03.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**						**1.975.202.820,00**				**Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan**			**2.962.804.229,00**	
			cakupan pelayanan sanitasi sub sektor air limbah domestik (%)				***74,76***									***DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG***
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota						1.975.202.820,00				Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			2.962.804.229,00	
			Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air Limbah Domestik) Layak dan aman (%)				*100*		*(Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG*
	1.03.05.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota						484.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			512.804.229,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)		*1*	*1*	*1*		*(kab. pesisir barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Masyarakat*	*1*		*DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG*
	1.03.05.2.01.03	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	*Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota (Rumah Tangga)*		*475*	*250*	*300*	1.491.202.820,00	*(kab. pesisir barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	*Masyarakat*	*350*	2.450.000.000,00	*DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG*
5.	**1.03.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	***Persentase pelayanan sanitasi sub sektor drainase lingkungan (%)***				***35***	**2.544.820.052,00**				**Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan**			**3.308.266.068,00**	***DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG***
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat (%)*				*100*	2.544.820.052,00	*(Kab. pesisir barat, KAB. PESISIR BARAT)*			Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan		*100*	3.308.266.068,00	*DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG*
	1.03.06.2.01.12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	*Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun (M)*		*500*	*500*	*1000*	2.544.820.052,00	*(kab. pesisir barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	*Masyarakat*	*2000*	3.308.266.068,00	*DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG*
6.	**1.03.07**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**	***Persentase Jalan Desa Strategis dengan kondisi baik (%)***				***30***	**1.641.144.895,00**				**Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan**			**2.133.488.364,00**	***DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG***
	1.03.07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase kawasan pemukiman yang dapat dilalui kendaraan roda 4(empat) (%)*				*100*	1.641.144.895,00	*(kawasan strategis daerah, KAB. PESISIR BARAT)*			Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan		*100*	2.133.488.364,00	*DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG*
	1.03.07.2.01.01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Sistem Jaringan)*		*0.00*	*0.00*	*3*	1.641.144.895,00	*(kab. pesisir barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	*Masyarakat*	*4*	2.133.488.364,00	*DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7.	**1.03.08**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**						**96.818.073.298,00**				**Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan**			**64.362.953.003,00**	
			tersedianya prasaran, sarana dan utilitas dasar (PSU) perkantoran pemerintah daerah kabupaten dalam skala mantap (%)				***70***									***DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG***
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung						96.818.073.298,00				Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			64.362.953.003,00	
			Persentase Ketersediaannya Gedung Pemerintah (%)				*70*		*(kab. pesisir barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*80*		*DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG*
	1.03.08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota						96.818.073.298,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			64.362.953.003,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)		*14*	*2*	*1*		*(Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur dan masyarakat*	*1*		*DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG*
8.	**1.03.09**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**						**3.678.831.711,00**				**Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan**			**4.009.926.566,00**	
			Rasio Kawasan yang Memiliki Ruang Terbuka Hijau (RTH) (%)				***5***									***DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG***
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota						3.678.831.711,00				Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			4.009.926.566,00	
			Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan (%)				*5*		*(kab. pesisir barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*5.3*		*DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG*
	1.03.09.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota						500.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			500.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota (Dokumen)		*3*	*0.00*	*1*		*(kab. pesisir barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Masyarakat*	*1*		*DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG*
	1.03.09.2.01.03	Penataan Bangunan dan Lingkungan						3.178.831.711,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			3.509.926.566,00	
			Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya (Kawasan)		*3*	*0.00*	*3*		*(kab. pesisir barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Masyarakat*	*3*		*DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**						**12.269.910.459,00**				**Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan**			**14.275.765.688,00**	
			Tingkat Kemantapan Jalan (%)				***42***									***DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG***
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota						12.269.910.459,00				Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			14.275.765.688,00	
			Persentase kondisi mantap jalan kabupaten/kota (%)				*42*		*(Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*42.5*		*DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG*
	1.03.10.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan						847.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			931.700.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian (Dokumen)		*12*	*6*	*8*		*(kab. pesisir barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Masyarakat*	*10*		*DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG*
	1.03.10.2.01.05	Pembangunan Jalan						2.872.910.459,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			3.160.065.688,00	
			Panjang Jalan yang Dibangun (KM)		*5.1*	*0.6*	*1.3*		*(kab. pesisir barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Masyarakat*	*1.5*		*DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG*
	1.03.10.2.01.08	Rekonstruksi Jalan						3.000.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			4.000.000,00	
			Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan (KM)		*34.5*	*0.75*	*1.5*		*(kab. pesisir barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Masyarakat*	*2*		*DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG*
	1.03.10.2.01.10	Pemeliharaan Berkala Jalan						2.000.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			3.000.000.000,00	
			Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala (KM)		*14*	*0.83*	*1*		*(kab. pesisir barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Masyarakat*	*1.5*		*DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG*
	1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan						550.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			550.000.000,00	
			Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin (KM)		*0.00*	*0.00*	*1.1*		*(kab.pesisir barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Masyarakat*	*1.1*		*DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG*
	1.03.10.2.01.12	Pembangunan Jembatan						2.000.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			3.000.000.000,00	
			Panjang Jembatan yang Dibangun (M)		*0*	*7.50*	*10.00*		*(kab. pesisir barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Masyarakat*	*15.00*		*DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.10.2.01.18	Rehabilitasi Jembatan	*Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi (M)*		*60*	*0*	*5*	1.000.000.000,00	*(kab. Pesisir barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	*Masyarakat*	*18*	3.630.000.000,00	*DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG*
10.	**1.03.11**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	***Persentase Jasa Konstruksi yang handal dan dapat diandalkan (%)***				***35***	**473.880.948,00**				**Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan**			**606.530.233,00**	***DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG***
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	*Persentase terlatihnya tenaga terampil kontruksi (%)*				*35*	80.000.000,00	*(Kantor DPUPR, KAB. PESISIR BARAT)*			Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan		*42.5*	170.000.000,00	*DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG*
	1.03.11.2.01.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	*Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan (Orang)*		*30*	*50*	*50*	80.000.000,00	*(kab. pesisir barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	*Masyarakat atau Tenaga Konstruksi*	*50*	170.000.000,00	*DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG*
	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase tersedianya sistem informasi jasa konstruksi (%)*				*100*	250.000.000,00	*(Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*			Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan		*100*	275.000.000,00	*DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG*
	1.03.11.2.02.07	Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	*Jumlah Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan (Dokumen)*		*2*	*1*	*1*	120.000.000,00	*(kab. pesisir barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	*Aparatur*	*1*	120.000.000,00	*DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG*
	1.03.11.2.02.08	Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	*Jumlah Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi (Dokumen)*		*1.00*	*0*	*1.00*	130.000.000,00	*(kab. pesisir barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	*Aparatur*	*1.00*	155.000.000,00	*DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG*
	1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	*Persentase pengawasan dan evaluasi pekerjaan fisik (%)*				*100*	143.880.948,00	*(kab. pesisir barat, KAB. PESISIR BARAT)*			Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan		*100*	161.530.233,00	*DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.11.2.04.03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	*Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi (Laporan)*		*1*	*1*	*1*	143.880.948,00	*(kab. pesisir barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	*Aparatur*	*1*	161.530.233,00	*DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG*
11.	**1.03.12**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	***Cakupan informasi Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten beserta rinciannya melalui peta digital dan peta analog (%)***				***30***	**314.802.428,00**				**Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan**			**343.134.647,00**	***DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG***
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	*Penyelesaian materi teknis dari bantuan teknis RDTR (%)*				*100*	78.000.000,00	*(Kantor DPUPR, KAB. PESISIR BARAT)*			Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan		*100*	85.783.661,00	*DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG*
	1.03.12.2.01.04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	*Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang (Dokumen)*		*1*	*1*	*1*	78.000.000,00	*(kab. pesisir barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	*Aparatur*	*1*	85.783.661,00	*DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG*
	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	*Penyelesaian materi teknis dari bantuan teknis RDTR (%)*				*100*	78.000.000,00	*(kab. pesisir barat, KAB. PESISIR BARAT)*			Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan		*100*	85.783.661,00	*DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG*
	1.03.12.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota (Dokumen)*		*1*	*1*	*1*	78.000.000,00	*(kab. pesisir barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	*Masyarakat*	*1*	85.783.661,00	*DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG*
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Koordinasi dan sinkronisasi Pemanfaatan Ruang (%)*				*100*	80.000.000,00	*(kab. pesisir barat, KAB. PESISIR BARAT)*			Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan		*100*	85.783.664,00	*DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG*
	1.03.12.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah						40.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			42.891.832,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah (Dokumen)		*1*	*1*	*1*		*(kab. pesisir barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG*
	1.03.12.2.03.02	Sistem Informasi Penataan Ruang						40.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			42.891.832,00	
			Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang (Dokumen)		*1*	*1*	*1*		*(kab. pesisir barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG*
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota						78.802.428,00				Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			85.783.661,00	
			Ketaatan terhadap RTRW (%)				*100*		*(kab. pesisir barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG*
			Ketaatan terhadap RTRW (%)				*100*		*(kab. pesisir barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG*
	1.03.12.2.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang						78.802.428,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			85.783.661,00	
			Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang (Dokumen)		*1*	*1*	*1*		*(kab. pesisir barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Masyarakat*	*1*		*DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG*
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**						**10.112.756.606,00**							**10.112.756.606,00**	
1.	**1.04.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)***	***92,5***			***92.50***	**2.283.109.000,00**			**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas**			**2.283.109.000,00**	***DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN***
	1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Dokumen Perencanaan, Pengangaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu (%)*				*100*	4.398.000,00	*(Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*100*	4.398.000,00	*DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN*
	1.04.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						898.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			898.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)		*2*	*2*	*2*		*(Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*2*		*DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN*
	1.04.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						3.500.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			3.500.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		*4*	*4*	*4*		*(Kantor Dinas Perumahan Rakyat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*4*		*DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN*
	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.771.177.400,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.771.177.400,00	
			Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu (%)				*100*		*(Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN*
	1.04.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.764.877.400,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.764.877.400,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		*14*	*14*	*14*		*(Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*14*		*DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN*
	1.04.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						2.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		*1*	*1*	*1*		*(KANTOR DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN*
	1.04.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						3.500.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			3.500.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(KANTOR DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN, KAB. PESISIR BARAT)*				*APARATUR*	*12*		*DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN*
	1.04.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						800.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			800.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)		*1*	*1*	*1*		*(KANTOR DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN*
	1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						20.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			20.000.000,00	
			Persentase Aparatur yang Berkinerja Baik (%)				*100*		*(Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN*
	1.04.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						20.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			20.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)		*4*	*4*	*4*		*(Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*4*		*DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN*
	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						275.369.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			275.369.600,00	
			Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja (%)				*100*		*(Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN*
	1.04.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						4.809.600,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			4.809.600,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		*12*	*12*	*12*		*(Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN*
	1.04.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						25.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			25.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		*1*	*1*	*1*		*(Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN*
	1.04.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						50.160.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			50.160.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*12*	*12*	*12*		*(Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						14.400.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			14.400.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		*12.00*	*12.00*	*12.00*		*(Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12.00*		*DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN*
	1.04.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu						11.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			11.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)		*11*	*11*	*11*		*(Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*11*		*DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN*
	1.04.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						170.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			170.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*50*	*50*	*50*		*(Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*50*		*DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN*
	1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						56.400.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			56.400.000,00	
			Persentase Pemenuhan Prasarana dan Sarana Pendukung Kinerja (%)				*100*		*(Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN*
	1.04.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						56.400.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			56.400.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		*4.00*	*9.00*	*8*		*(Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*8*		*DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN*
	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						65.774.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			65.774.000,00	
			Persentase Pemenuhan Layanan Pendukung (%)				*100*		*(Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN*
	1.04.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						57.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			57.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)		*3*	*3*	*2*		*(Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*0.00*		*DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN*
	1.04.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						8.774.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			8.774.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN*
	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						89.990.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			89.990.000,00	
			Persentase Barang milik Daerah yang dalam Kondisi Baik (%)				*100*		*(Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN*
	1.04.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						64.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			64.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		*2*	*2*	*2*		*(Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*2*		*DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN*
	1.04.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel						1.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.000.000,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)		*10*	*10*	*5*		*(Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*5*		*DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN*
	1.04.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						24.990.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			24.990.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*12*	*12*	*12*		*(Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN*
2.	**1.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**						**1.643.820.052,00**			**Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar**	**Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan**			**1.643.820.052,00**	
			Rasio Rumah Layak Huni (%)				***88***									***DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN***

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.02.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota (%)*				*100*	250.000.000,00	*(Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan		*100*	250.000.000,00	*DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN*
	1.04.02.2.02.03	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	*Jumlah orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP (Orang)*		*100*	*100*	*100*	150.000.000,00	*(Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Masyarakat/Pengembang Perumahan*	*100*	150.000.000,00	*DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN*
	1.04.02.2.02.04	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	*Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih (Orang)*		*20*	*20*	*20*	100.000.000,00	*(Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	*Masyarakat/Fasilitator*	*20*	100.000.000,00	*DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN*
	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	*Cakupan Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kab/Kota (Bulan)*				*12*	950.000.000,00	*(Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan		*12*	950.000.000,00	*DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN*
	1.04.02.2.03.01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	*Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi (Unit Rumah)*		*5*	*5*	*5*	100.000.000,00	*(Rumah bagi Korban Bencana yang di Rehabilitasi Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	*Masyarakat*	*5*	100.000.000,00	*DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN*
	1.04.02.2.03.04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana						850.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			850.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun (Unit Rumah)		*25*	*25*	*25*		*(Rumah bagi Korban Bencana yang Terbangun di Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Masyarakat*	*25*		*DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN*
	1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus						150.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			150.000.000,00	
			Cakupan Pengelolaan Rumah Susun (%)				*20*		*(Kec. Pesisir Tengah, Kec. Lemong, Kec. Bangkunat, KAB. PESISIR BARAT)*					*20*		*DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN*
	1.04.02.2.05.01	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun						150.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			150.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(Kec. Pesisir Tengah, Kec. Lemong, Kec. Bangkunat Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur/Rusun ASN*	*12*		*DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN*
	1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan						293.820.052,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			293.820.052,00	
			Cakupan Penerbitan Izin Site Plan (Laporan)				*12*		*(Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*12*		*DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN*
	1.04.02.2.06.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan						293.820.052,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			293.820.052,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur dan Masyarakat*	*12*		*DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN*
3.	**1.04.03**	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**						**1.164.129.345,00**			**Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar**	**Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan**			**1.164.129.345,00**	
			Rasio Permukiman Layak Huni (%)				***42,50***									***DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN***

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.03.2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	*Terlaksananya Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman (Bulan)*				*12*	300.000.000,00	*(Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*12*	300.000.000,00	*DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN*
	1.04.03.2.01.02	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	*Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang Tersusun dan/atau Tereview serta Terlegalisasi (Dokumen)*		*1*	*1*	*1*	300.000.000,00	*(Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	*Aparatur / Masyarakat*	*1*	300.000.000,00	*DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN*
	1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	*Luas Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani (Ha)*				*0.5*	630.129.345,00	*(Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan		*0.5*	630.129.345,00	*DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN*
	1.04.03.2.02.01	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	*Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh (Dokumen)*		*6*	*6*	*6*	160.000.000,00	*(Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	*Aparatur / Masyarakat*	*6*	160.000.000,00	*DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN*
	1.04.03.2.02.02	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	*Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Dokumen)*		*2*	*2*	*2*	200.129.345,00	*(Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	*Aparatur/ Masyarakat / RP2PK*	*2*	200.129.345,00	*DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN*
	1.04.03.2.02.03	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh						120.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			120.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh (Laporan)		*2*	*2*	*2*		*(Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur / Masyarakat*	*2*		*DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN*
	1.04.03.2.02.04	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh						150.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			150.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur / Masyarakat*	*12*		*DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN*
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha						234.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			234.000.000,00	
	1.04.03.2.03.01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh						234.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			234.000.000,00	
			Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh (Dokumen)		*1*	*1*	*1*		*(Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur / Masyarakat/ Data DED*	*1*		*DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN*
4.	**1.04.04**	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**						**3.844.401.966,00**			**Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar**	**Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan**			**3.844.401.966,00**	
			Persentase Permukiman yang Tertata (%)				***50***									***DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN***
	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota						3.844.401.966,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			3.844.401.966,00	
			Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh (%)				*15*		*(Database Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*15*		*DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN*
	1.04.04.2.01.01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha						3.844.401.966,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			3.844.401.966,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki (Unit Rumah)		*0*	*8*	*182*		*(Database Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Masyarakat*	*182*		*DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN*
5.	**1.04.05**	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	***Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana sarana umum (%)***				***45***	**1.177.296.243,00**				**Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan**			**1.177.296.243,00**	***DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN***
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	*Persentase Perumahan Yang Sudah dilengkapi PSU (%)*				*20*	1.177.296.243,00	*(Rusun ASN dan Perumahan Lioh Buntor Kec. Pesisir Tengah, Water Meter di Kec. Lemong dan Kec. Ngaras, KAB. PESISIR BARAT)*			Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan		*20*	1.177.296.243,00	*DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN*
	1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	*Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian (Lokasi)*		*8*	*8*	*8*	1.177.296.243,00	*(Rusun ASN dan Perumahan Lioh Buntor Kec. Pesisir Tengah, Water Meter di Kec. Lemong dan Kec. Ngaras, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*Masyarakat dan Aparatur*	*8*	1.177.296.243,00	*DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN*
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**8.354.214.969,00**							**8.191.678.673,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)***	***92,5***			***92,50***	**4.074.321.737,00**			**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas**			**4.093.500.923,00**	***SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN***
			Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)				***92.50***									***BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH***
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						7.800.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			7.800.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Presentase penyediaan dokumen perencanaan dan evaluasi tepat waktu (%)				*100*		*(Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH*
			Persentase dokumen perencanaan , penganggaran & evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu (%)				*100*		*(Kantor Satpol PP dan Damkar Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN*
	1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						3.500.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			3.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)		*2.00*	*2.00*	*2.00*		*(Kantor Satpol PP dan Damkar, KAB. PESISIR BARAT)*				*aparatur*	*2.00*		*SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN*
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)		*2*	*2*	*2*		*(Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*2*		*BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH*
	1.05.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						700.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			700.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1.00*		*BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH*
	1.05.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						700.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			700.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)		*1*	*1*	*1*		*(Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH*
	1.05.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						700.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			700.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)		*1*	*1*	*1*		*(Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH*
	1.05.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						700.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			700.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)		*1*	*1*	*1*		*(Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH*
	1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						1.500.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.500.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		*2*	*2*	*2*		*(Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*2*		*BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH*
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.913.313.923,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.913.313.923,00	
			Persentase dokumen perencanaan , penganggaran & evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu (%)				*92.50*		*(Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, KAB. PESISIR BARAT)*					*92.50*		*SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN*
			Presentase layanan keuangan perangkat daerah sesuai peraturan yang ada (%)				*100*		*(Kantor Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH*
	1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2.904.313.923,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.904.313.923,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		*14*	*14*	*14*		*(Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*14*		*BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH*
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		*364.00*	*364.00*	*364.00*		*(Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, KAB. PESISIR BARAT)*				*aparatur*	*364.00*		*SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN*
	1.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						3.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			3.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		*1*	*1*	*1*		*(Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH*
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		*1*	*1*	*1*		*(Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, KAB. PESISIR BARAT)*				*aparatur*	*1*		*SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						3.500.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			3.500.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		*18*	*18*	*18*		*(Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*18*		*BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH*
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		*14*	*14*	*12*		*(Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, KAB. PESISIR BARAT)*				*aparatur*	*0.00*		*SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN*
	1.05.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						2.500.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)		*1*	*1*	*1*		*(Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH*
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)		*2*	*2*	*2*		*(Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, KAB. PESISIR BARAT)*				*aparatur*	*2*		*SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN*
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						10.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			10.000.000,00	
			Presentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah tepat waktu (%)				*100*		*(DKI Jakarta, Bandar Lampung, Yogyakarta, Luar Wilayah)*					*100*		*BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH*
	1.05.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						10.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)		*0.00*	*10.00*	*5.00*		*(Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*5.00*		*BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH*
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						349.909.814,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			375.089.000,00	
			persentase administrasi umum perangkat daerah yang tersedia (%)				*92.50*		*(Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, KAB. PESISIR BARAT)*					*92.50*		*SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Presentase layanan administrasi umum perangkat daerah tepat waktu (%)				*100*		*(Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH*
	1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						3.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			3.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, KAB. PESISIR BARAT)*				*aparatur*	*1*		*SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN*
	1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						15.326.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			15.326.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		*1*	*1*	*1*		*(Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH*
	1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						50.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			50.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		*1*	*1*	*1*		*(Pekon Pelita Jaya, Kec. Pesisir Selatan, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur, Masyarakat*	*1*		*BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH*
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		*1*	*1*	*1*		*(Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, KAB. PESISIR BARAT)*				*aparatur*	*1*		*SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN*
	1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						34.583.814,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			34.763.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*1*	*1*	*1*		*(Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH*
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*1*	*1*	*1*		*(Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, KAB. PESISIR BARAT)*				*aparatur*	*1*		*SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN*
	1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						24.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			24.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		*10*	*10*	*10*		*(Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*10*		*BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*120*		*(Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, KAB. PESISIR BARAT)*				*aparatur*	*120*		*SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN*
	1.05.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu						23.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			23.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, KAB. PESISIR BARAT)*				*aparatur*	*12*		*SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN*
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)		*11*	*11*	*11*		*(Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*11*		*BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH*
	1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						200.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			225.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(Kabupaten Pesisir Barat, Wilayah Indonesia di Luar Kabupaten Pesisir Barat, Luar Wilayah)*				*Aparatur*	*12*		*BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH*
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, KAB. PESISIR BARAT)*				*aparatur*	*12*		*SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN*
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						50.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			50.000.000,00	
			persentase tersedia barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah (%)				*92.50*		*(Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaaran, KAB. PESISIR BARAT)*					*92.50*		*SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN*
			Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)				*100*		*(Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH*
	1.05.01.2.07.05	Pengadaan Mebel						30.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			30.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)		*0*	*0*	*10*		*(Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*10*		*BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH*
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, KAB. PESISIR BARAT)*				*aparatur*	*5.00*		*SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						20.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			20.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		*0*	*0*	*2*		*(Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*2*		*BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH*
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						278.940.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			276.940.000,00	
			persentase tersedia jasa penunjang urusan pemerintah daerah (%)				*92.50*		*(Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN*
			Presentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)				*100*		*(Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH*
	1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						28.440.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			28.440.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH*
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, KAB. PESISIR BARAT)*				*aparatur*	*12*		*SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN*
	1.05.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						225.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			225.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)		*3.00*	*3.00*	*3.00*		*(Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, KAB. PESISIR BARAT)*				*aparatur*	*3.00*		*SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN*
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)		*3*	*3*	*3*		*(Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*3*		*BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH*
	1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						25.500.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			23.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		*2*	*2*	*2*		*(Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, KAB. PESISIR BARAT)*				*aparatur*	*2*		*SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH*
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						464.358.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			460.358.000,00	
			persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah (%)				*100*		*(Kec. Bengkunat, Kec. Ngaras, Kec. Ngambur, Kec. Pesisir Selatan, Kec. Krui Selatan, Kec. Pesisir Tengah, Kec. Way Krui, Kec. Karya Penggawa, Kec. Pesisir Utara, Kec. Lemong, Kec. Pulau Pisang, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN*
			Presentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara (%)				*100*		*(Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH*
	1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						249.358.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			249.358.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		*1*	*1*	*1*		*(Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Kendaraan Dinas Jabatan*	*1*		*BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH*
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		*6.00*	*6.00*	*6.00*		*(Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, KAB. PESISIR BARAT)*				*aparatur*	*6.00*		*SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN*
	1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						156.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			156.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		*11*	*12*	*12*		*(Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan*	*12*		*BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH*
	1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						29.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			25.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		*2*	*10*	*10*		*(Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Peralatan dan Mesin Lainnya*	*10*		*BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		*0*	*0*							*aparatur*			*SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN*
	1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)*		*1*	*1*	*1*	30.000.000,00	*(Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Gedung Kantor*	*1*	30.000.000,00	*BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH*
2.	**1.05.02**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan (%)***				***100***	**2.373.744.778,00**			**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas**			**2.262.000.000,00**	***SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN***
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*perserntase gangguan trantibum yang tertangani (%)*				*100*	2.208.744.778,00	*(Kec. Bengkunat, Kec. Ngaras, Kec. Ngambur, Kec. Pesisir Selatan, Kec. Krui Selatan, Kec. Pesisir Tengah, Kec. Way Krui, Kec. Karya Penggawa, Kec. Pesisir Utara, Kec. Lemong, Kec. Pulau Pisang, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*100*	2.097.000.000,00	*SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN*
	1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	*Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan (Kasus)*		*8*	*8*	*8*	2.075.000.000,00	*(kec. bengkunat, kec ngaras, kec ngambur, kec. pesisir selatan, kec krui selatan, kec. pesisir tengah, kec. way krui, kec. karya penggawa, kec. pesisir utara, kec. lemong, kec. pulau pisang, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*aparatur*	*8*	2.075.000.000,00	*SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN*
	1.05.02.2.01.02	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa						5.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan (Kasus)		*0.00*	*0.00*	*4.00*		*(Kec. Bengkunat, Kec. Ngaras , Kec. Pesisir Selatan, Kec. Krui Selatan, Kec. Pesisir Tengah, Kec. Way Krui, Kec. Karya Penggawa, Kec. Pesisir Utara, Kec. Lemong, Kec. Pulau Pisang, KAB. PESISIR BARAT)*				*aparatur*	*4.00*		*SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN*
	1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum						106.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			-	
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kec. Bengkunat, Kec. Ngaras, Kec. Ngambur, Kec. Pesisir Selatan, Kec. Krui Selatan, Kec. Pesisir Tengah, Kec. Way Krui, Kec. Karya Penggawa, Kec. Pesisir Utara, Kec.Lemong, Kec. Pulau Pisang, KAB. PESISIR BARAT)*				*aparatur*	*0.00*		*SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN*
	1.05.02.2.01.06	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum						12.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			12.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (Dokumen)		*2.00*	*2.00*	*2.00*		*(Kec. Bengkunat, Kec. Ngaras, Kec. Pesisir Selatan, Kec. Krui Selatan, Kec. Pesisir Tengah, Kec. Way Krui, Kec. Karya Penggawa, Kec. Pesisir Utara, Kec. Lemong, Kec. Pulau Pisang, KAB. PESISIR BARAT)*				*aparatur*	*2.00*		*SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN*
	1.05.02.2.01.07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum						5.744.778,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			-	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia (Unit)		*0.00*	*0.00*	*8*		*(Kec. Bengkunat, Kec. Ngaras, Kec. Pesisir Selatan, Kec. Krui Selatan, Kec. Pesisir Tengah, Kec. Way Krui, Kec. Karya Penggawa, Kec. Pesisir Utara, Kec. Lemong, Kec. Pulau Pisang, KAB. PESISIR BARAT)*				*aparatur*	*0.00*		*SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN*
	1.05.02.2.01.09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada						5.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani (Laporan)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(Kec. Bengkunat, Kec. Ngaras, KEc. Ngambur, Kec. Pesisir Selatan, Kec. Krui Selatan, Kec. Pesisir Tengah, Kec. Way Krui, Kec. Karya Penggawa, Kec. Pesisir Utara, Kec.Lemong, Kec. Pulau Pisang, KAB. PESISIR BARAT)*				*aparatur*	*1.00*		*SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN*
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	*persentase penegakan perda dan perbub yang terlaksama (%)*				*100*	125.000.000,00	*(Kec. Bengkunat, Kec. Ngaras, Kec. Ngambur, Kec. Pesisir Selatan, Kec. Krui Selatan, Kec, Pesisir Tengah, Kec. Way krui, Kec. karya Penggawa, Kec. Pesisir Utara, Kec. Lemong, Kec. Pulau Pisang, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*100*	125.000.000,00	*SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN*
	1.05.02.2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/ (Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*3*	30.000.000,00	*(Kec. Bengkunat, Kec. Ngaras, Kec. Ngambur, Kec. Pesisir Selatan, Kec. Krui Selatan, Kec. Pesisir Tengah, Kec. Way Krui, Kec. Karya Penggawa, Kec. Pesisir Utara, Kec. Lemong, Kec. Pulau Pisang, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*aparatur*	*0.00*	30.000.000,00	*SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN*
	1.05.02.2.02.02	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota (Laporan)*		*12*	*12*	*12*	95.000.000,00	*(Kec. Bengkunat, Kec. Ngaras, Kec. Ngambur, Kec. Pesisir Selatan, Kec. Krui Selatan, Kec. Pesisir Tengah, Kec. Way Krui, Kec. Karya Penggawa, Kec. Pesisir Utara, Kec. Lemong, Kec. Pulau Pisang, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*aparatur*	*12*	95.000.000,00	*SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN*
	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota						40.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			40.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			pesrsentasi pembinaan ppns kabupaten (%)				*100*		*(Kec. Bengkunat, Kec. Ngaras, Kec. Ngambur, Kec. Pesisir Selatan, Kec. Krui Selatan, Kec. Pesisir Tengah, Kec. Way Krui, Kec. Karya Penggawa, Kec. Pesisir Utara, Kec. Lemong, Kec. Pulau Pisang, KAB. PESISIR BARAT)*				*100*		*SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN*
	1.05.02.2.03.01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada (Laporan)*		*12*	*12*	*12*	40.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*aparatur*	*12*	40.000.000,00	*SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN*
3.	**1.05.03**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	***Cakupan Penanggulangan Bencana Daerah (%)***				***100***	**1.168.111.750,00**			**Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim**	**Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan**			**1.168.141.750,00**	***BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH***
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	*Presentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota (%)*				*100*	79.522.000,00	*(Kecamatan Lemong, Kecamatan Pesisir Selatan, Kecamatan Pesisir Utara, KAB. PESISIR BARAT)*		Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan		*100*	79.552.000,00	*BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH*
	1.05.03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya (Orang)*		*0*	*90*	*90*	79.522.000,00	*(Kec. Lemong, Kec. Pesisir Utara, Kec. Pesisir Selatan, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	*Masyarakat*	*90*	79.552.000,00	*BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana						677.170.750,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			677.170.750,00	
			Presentase Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana (%)				*100*		*(Seluruh Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH*
	1.05.03.2.02.01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota						258.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			258.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi (Dokumen)		*0*	*0*	*1*		*(Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Pesisir Barat*	*0*		*BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH*
	1.05.03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota						54.500.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			54.500.000,00	
			Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana (Orang)		*0*	*0*	*90*		*(Kec. Bangkunat, Kec. Ngaras, Kec. Ngambur, KAB. PESISIR BARAT)*				*Masyarakat*	*90*		*BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH*
	1.05.03.2.02.06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan						215.559.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			215.559.000,00	
			Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana (Kawasan)		*10.00*	*10.00*	*10.00*		*(Kec. Way Krui, Kec. Pesisir Tengah, Kec. Pesisir Utara, Kec. Lemong, Kec. Ngaras, Kec. Ngambur, Kec. Bangkunat, Kec. Pulau Pisang, KAB. PESISIR BARAT)*				*Masyarakat*	*10.00*		*BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH*
	1.05.03.2.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota						49.111.750,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			49.111.750,00	
			Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya (Orang)		*0*	*0*	*25*		*(Kec. Pesisir Tengah, KAB. PESISIR BARAT)*				*Anggota TRC*	*25*		*BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH*
	1.05.03.2.02.09	Penyusunan Rencana Kontijensi						100.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi (Dokumen)		*0*	*0*	*1*		*(Seluruh Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*BPBD Pesisir Barat*	*1*		*BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH*
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	*Presentase Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (%)*				*100*	230.771.000,00	*(Seluruh Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*		Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan		*100*	230.771.000,00	*BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH*
	1.05.03.2.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana (Orang)*		*10*	*10*	*10*	108.271.000,00	*(Seluruh Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	*Anggota TRC*	*10*	108.271.000,00	*BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH*
	1.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Orang)*		*16*	*16*	*16*	122.500.000,00	*(Seluruh Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	*Masyarakat*	*16*	122.500.000,00	*BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH*
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	*Presentase Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanganan Bencana (%)*				*100*	180.648.000,00	*(Seluruh Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*		Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan		*100*	180.648.000,00	*BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH*
	1.05.03.2.04.06	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) (Dokumen)*		*1*	*1*	*1*	180.648.000,00	*(Seluruh Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	*Masyarakat*	*1*	180.648.000,00	*BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.	**1.05.04**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	***Persentase Pelayanan Pemadam dan penyelamatan kebakaran (%)***				***100***	**738.036.704,00**			**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas**			**668.036.000,00**	***SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN***
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	*persentase pelayanan pemadaman kebakaran dan penyelamatan kebakaran (%)*				*100*	738.036.704,00	*(Kec. Bengkunat, Kec. Ngaras, Kec. Ngambur, Kec. Pesisir Selatan, Kec. Krui Selatan, Kec. Pesisir Tengah, Kec. Way Krui, Kec. Karya Penggawa, Kec. Pesisir Utara, Kec. Lemong, Kec. Pulau Pisang, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*100*	668.036.000,00	*SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN*
	1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)*		*12.00*	*12.00*	*12.00*	668.036.000,00	*(Kec. Bengkunat, Kec. Ngaras, Kec. Ngambur, Kec. Pesisir Selatan, Kec. Krui Selatan, Kec. Pesisir Tengah, Kec. Way Krui, Kec. Karya Penggawa, Kec. Pesisir Utara, Kec. Lemong, Kec. Pulau Pisang, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*aparatur*	*12.00*	668.036.000,00	*SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN*
	1.05.04.2.01.03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran (Dokumen)*		*0*	*0*		10.000.704,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	*aparatur*		-	*SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN*
	1.05.04.2.01.07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran						60.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			-	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (Orang)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kec. Bengkunat, Kec. Ngaras, Kec. Ngambur, Kec. Pesisir Selatan, Kec. Krui Selatan, Kec. Pesisir Tengah, Kec. Way Krui, Kec. Karya Penggawa, Kec. Pesisir Utara, Kec. Lemong, Kec. Pulau Pisang, KAB. PESISIR BARAT)*				*aparatur*	*2*		*SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN*
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**						**6.697.722.503,00**							**7.367.494.754,00**	
1.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)***	***92,5***			***92,50***	**2.237.394.511,00**			**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas**			**2.461.133.962,00**	***DINAS SOSIAL***
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu (%)*				*100*	6.400.000,00	*(Kantor Dinas Sosial, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*100*	7.040.000,00	*DINAS SOSIAL*
	1.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)*		*2*	*2*	*2.00*	1.400.000,00	*(Kantor Dinas sosial, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*aparatur*	*2.00*	1.540.000,00	*DINAS SOSIAL*
	1.06.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)*		*2*	*2*	*2.00*	5.000.000,00	*(kantor dinas sosial, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*aparatur*	*2.00*	5.500.000,00	*DINAS SOSIAL*
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu (%)*				*100*	1.700.369.004,00	*(kantor dinas sosial, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*100*	1.870.405.904,00	*DINAS SOSIAL*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)*		*18*	*18*	*18.00*	1.694.869.004,00	*(kantor dinas sosial, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*18.00*	1.864.355.904,00	*DINAS SOSIAL*
	1.06.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)*		*1*	*1*	*1.00*	2.500.000,00	*(Dinas Sosial, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*1.00*	2.750.000,00	*DINAS SOSIAL*
	1.06.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)*		*1*	*1*	*1.00*	2.000.000,00	*(Kantor Dinas Sosial, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*1.00*	2.200.000,00	*DINAS SOSIAL*
	1.06.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)*		*1*	*1*	*1.00*	1.000.000,00	*(Kantor Dinas Sosial, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*1.00*	1.100.000,00	*DINAS SOSIAL*
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja (%)*				*100*	191.755.507,00	*(kantor dinas sosial, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*100*	210.931.058,00	*DINAS SOSIAL*
	1.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)*		*1*	*1*	*1.00*	25.000.000,00	*(Krui, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*aparatur*	*1.00*	27.500.000,00	*DINAS SOSIAL*
	1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)*		*1*	*1*	*1.00*	43.755.507,00	*(Dinas Sosial, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*aparatur*	*1.00*	48.131.058,00	*DINAS SOSIAL*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						12.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			13.200.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		*10*	*10*	*10.00*		*(Kantor Dinas Sosial, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*10.00*		*DINAS SOSIAL*
	1.06.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu						11.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			12.100.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)		*11*	*11*	*11.00*		*(Kantor Dinas Sosial, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*11.00*		*DINAS SOSIAL*
	1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						100.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			110.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*12*	*12*	*12.00*		*(Kantor Dinas Sosial, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12.00*		*DINAS SOSIAL*
	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						100.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			110.000.000,00	
			Persentase pemenuhan Prasarana dan prasarana pendukung kinerja (%)				*100*		*(kantor dinas sosial, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS SOSIAL*
	1.06.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						100.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			110.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		*2*	*6*	*10.00*		*(Dinas Sosial, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*10.00*		*DINAS SOSIAL*
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						112.720.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			123.992.000,00	
			Persentase pemenuhan Layanan Pendukung (%)				*100*		*(kantor dinas sosial, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS SOSIAL*
	1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						15.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			16.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*12*	*12*	*12.00*		*(Kantor Dinas Sosial, KAB. PESISIR BARAT)*				*aparatur*	*12.00*		*DINAS SOSIAL*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)*		*4*	*4*	*4.00*	97.000.000,00	*(Kantor Dinas Sosial, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Penyediaan Jasa Peralatandan Perlengkapan Kantoryang Disediakan*	*4.00*	106.700.000,00	*DINAS SOSIAL*
	1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*12*	720.000,00	*(Kantor Dinas Sosial, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*aparatur*	*12*	792.000,00	*DINAS SOSIAL*
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah yang dalam kondisi baik (%)*				*100*	126.150.000,00	*(kantor dinas sosial, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*100*	138.765.000,00	*DINAS SOSIAL*
	1.06.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)*		*2*	*2*	*2.00*	58.400.000,00	*(Kantor Dinas Sosial, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*aparatur*	*2.00*	64.240.000,00	*DINAS SOSIAL*
	1.06.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)*		*4*	*4*	*4.00*	58.000.000,00	*(Dinas sosial, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*4.00*	63.800.000,00	*DINAS SOSIAL*
	1.06.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)*		*10*	*14*	*14*	9.750.000,00	*(Dinas Sosial, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*14*	10.725.000,00	*DINAS SOSIAL*
2.	**1.06.02**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**						**312.848.941,00**			**Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar**	**Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat**			**344.133.835,00**	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Terdatanya Potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) (%)				***100***									***DINAS SOSIAL***
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota						312.848.941,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			344.133.835,00	
			Peningkatan kapasitas bagi PSKS (%)				*100*		*(kantor dinas sosial, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS SOSIAL*
	1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota						312.848.941,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			344.133.835,00	
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(kantor dinas sosial, KAB. PESISIR BARAT)*				*Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial*	*1.00*		*DINAS SOSIAL*
3.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**						**3.401.463.270,00**			**Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar**	**Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat**			**3.741.609.597,00**	
			Cakupan Pemenuhan SPM bidang Sosial (%)				***100***									***DINAS SOSIAL***
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial						412.463.270,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			453.709.597,00	
			Persentase PMKS yang menerima bantuan (%)				*100*		*(kantor dinas sosial, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS SOSIAL*
	1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan						215.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			236.500.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		*26.00*	*119.00*	*300*		*(11 kecamatan kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial*	*300*		*DINAS SOSIAL*
	1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu						146.463.270,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			161.109.597,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		*12*	*70*	*60.00*		*(11 Kecamatan Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial*	*60.00*		*DINAS SOSIAL*
	1.06.04.2.01.12	Pemberian Layanan Rujukan						51.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			56.100.000,00	
			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		*10.00*	*10.00*	*25*		*(kantor dinas sosial, KAB. PESISIR BARAT)*				*ODGJ, orang terlantar, lansia terlantar*	*25*		*DINAS SOSIAL*
	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial						2.989.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			3.287.900.000,00	
			Persentase PMKS yang tertangani (%)				*100*		*(kantor dinas sosial, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS SOSIAL*
	1.06.04.2.02.01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan						79.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			86.900.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		*1000.00*	*1000.00*	*1000.00*		*(Kantor Dinas Sosial, KAB. PESISIR BARAT)*				*Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)*	*1000.00*		*DINAS SOSIAL*
	1.06.04.2.02.02	Pemberian Layanan Kedaruratan						10.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			11.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		*1000*	*1000*	*1000*		*(11 kecamatan kabupaten pesisir barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*pmks*	*1000*		*DINAS SOSIAL*
	1.06.04.2.02.14	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota						2.900.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			3.190.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota (Dokumen)		*2.00*	*2.00*	*2.00*		*(11 Kecamatan Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Lembaga dan Individu*	*2.00*		*DINAS SOSIAL*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.	**1.06.05**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**						**454.645.096,00**			**Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar**	**Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat**			**500.109.606,00**	
			cakupan perlindungan dan jaminan perlindungan sosial daerah (%)				***100***									***DINAS SOSIAL***
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						454.645.096,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			500.109.606,00	
			Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran dan data terpadu penangulangan kemiskinan (%)				*100*		*(dikantor dinas sosial, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS SOSIAL*
	1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						170.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			187.000.000,00	
			Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata (Orang)		*117000*	*117000*	*117000*		*(11 Kecamatan Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Fakir Miskin*	*117000*		*DINAS SOSIAL*
	1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						134.645.096,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			148.109.606,00	
			Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota (Keluarga)		*0.00*	*0.00*	*60.00*		*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota*	*60.00*		*DINAS SOSIAL*
	1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan KeluargaÃ‚Â						150.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			165.000.000,00	
			Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)		*11687*	*11687*	*11687*		*(11 kecamatan kabupaten pesisir barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan*	*11687*		*DINAS SOSIAL*
5.	**1.06.06**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**						**291.370.685,00**			**Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar**	**Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat**			**320.507.754,00**	
			Cakupan pemenuhan pasca Bencana (%)				***100***									***DINAS SOSIAL***

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	*Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar (%)*				*100*	151.370.685,00	*(dikantor dinas sosial, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat		*100*	166.507.754,00	*DINAS SOSIAL*
	1.06.06.2.01.04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)*		*117000*	*117000*	*117000*	151.370.685,00	*(Rumah Singgah Kabupaten pesisir barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	*PMKS*	*117000*	166.507.754,00	*DINAS SOSIAL*
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	*jumlah warga masyarakat rawan bencana alam yang mendapatkan kesiapsiagaan dan mitigasi (%)*				*100*	140.000.000,00	*(dikantor dinas sosial, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat		*100*	154.000.000,00	*DINAS SOSIAL*
	1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	*Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)*		*30*	*44*	*50*	140.000.000,00	*(11 kecamatan kabupaten pesisir barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	*tagana*	*50*	154.000.000,00	*DINAS SOSIAL*
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**78.670.746.081,00**							**63.189.545.880,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**						**2.677.044.091,00**							**2.677.044.091,00**	
1.	**2.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)***	***92,5***			***92,50***	**1.990.955.081,00**			**Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan**	**Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas**			**1.990.955.081,00**	***DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN***
	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						8.500.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			8.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (%)				*92.50*		*(Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN*
	2.07.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						3.500.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			3.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)		*2*	*2*	*2.00*		*(Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*2.00*		*DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN*
	2.07.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						5.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		*2*	*2*	*2.00*		*(Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*2.00*		*DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN*
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.508.950.900,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.508.950.900,00	
			Pemenuhan Pelaporan Keuangan Tepat Waktu (%)				*92.50*		*(Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian, KAB. PESISIR BARAT)*					*92.50*		*DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN*
	2.07.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.498.450.900,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik				1.498.450.900,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		*14*	*14*	*14.00*		*(Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*14.00*		*DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN*
	2.07.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						3.500.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			3.500.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		*1*	*1*	*1*		*(Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN*
	2.07.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						3.500.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			3.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		*1*	*1*	*1*		*(Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN*
	2.07.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						3.500.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			3.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)		*1*	*1*	*1.00*		*(Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1.00*		*DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN*
	2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						20.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			20.000.000,00	
			Persentase Aparatur yang Berkinerja Baik (%)				*92.50*		*(Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian, KAB. PESISIR BARAT)*					*92.50*		*DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN*
	2.07.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						20.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			20.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)		*2*	*3*	*3.00*		*(Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur Sipil Negara*	*3.00*		*DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN*
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						240.504.181,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			240.504.181,00	
			Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja (%)				*92.50*		*(Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian, KAB. PESISIR BARAT)*					*92.50*		*DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN*
	2.07.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						6.504.181,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			6.504.181,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		*12*	*12*	*12*		*(Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN*
	2.07.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						30.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			30.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		*1*	*1*	*1.00*		*(Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1.00*		*DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN*
	2.07.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						30.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			30.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*12*	*12*	*12*		*(Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN*
	2.07.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						20.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			20.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		*10*	*10*	*10.00*		*(Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*10.00*		*DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN*
	2.07.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu						15.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			15.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)		*11*	*11*	*11*		*(Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*11*		*DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN*
	2.07.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						139.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			139.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN*
	2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						20.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			20.000.000,00	
			Pemenuhan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja (%)				*92.50*		*(Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian, KAB. PESISIR BARAT)*					*92.50*		*DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN*
	2.07.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya						20.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)		*4*	*4*	*3.00*		*(Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*3.00*		*DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN*
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						125.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			125.000.000,00	
			Pemenuhan Layanan Pendukung Penunjang Kegiatan Urusan Kantor (%)				*92.50*		*(Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian, KAB. PESISIR BARAT)*					*92.50*		*DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN*
	2.07.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						20.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			20.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*12*	*12*	*12.00*		*(Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12.00*		*DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN*
	2.07.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						100.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN*
	2.07.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						5.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		*12*	*12*	*12.00*		*(Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12.00*		*DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN*
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						68.000.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			68.000.000,00	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Kegiatan Dalam Kondisi Baik (%)				*92.50*		*(Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian, KAB. PESISIR BARAT)*					*92.50*		*DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN*
	2.07.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						57.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			57.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		*2*	*2*	*2.00*		*(Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian, KAB. PESISIR BARAT)*				*Kendaraan Dinas*	*2.00*		*DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN*
	2.07.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						6.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			6.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		*12*	*12*	*12*		*(Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian, KAB. PESISIR BARAT)*				*Peralatan dan Mesin Kantor*	*12*		*DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN*
	2.07.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						5.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			5.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*12*	*12*	*12*		*(Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian, KAB. PESISIR BARAT)*				*Gedung Kantor*	*12*		*DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN*
2.	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**						**259.190.649,00**			**Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing**	**Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**259.190.649,00**	
			Tingkat Pengangguran Terbuka (%)				***2,60***									***DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN***
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi						212.190.649,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			212.190.649,00	
			Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi (Orang)				*30*		*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*30*		*DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN*
	2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi						212.190.649,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			212.190.649,00	
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (Orang)		*30*	*30*	*30.00*		*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Masyarakat*	*30.00*		*DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN*
	2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						47.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			47.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan (Laporan)				*1*		*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*1*		*DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN*
	2.07.03.2.05.01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja						47.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			47.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah (Dokumen)		*1*	*1*	*1.00*		*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Masyarakat*	*1.00*		*DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN*
3.	**2.07.04**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**						**221.520.704,00**			**Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing**	**Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**221.520.704,00**	
			Tingkat Partisipasi Anga Kerja (%)				***73,88***									***DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN***
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota						146.520.704,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			146.520.704,00	
			Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat (Orang)				*200*		*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*35*		*DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN*
	2.07.04.2.01.03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja						146.520.704,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			146.520.704,00	
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan (Orang)		*150*	*150*	*200.00*		*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Masyarakat*	*200.00*		*DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN*
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja						75.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			75.000.000,00	
			Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan (Orang)				*1.000*		*(Kecamatan Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*1.000*		*DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN*
	2.07.04.2.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online						75.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			75.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) (Orang)		*803*	*900*	*1000.00*		*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Masyarakat*	*1000.00*		*DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN*
4.	**2.07.05**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	***Cakupan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri (%)***				***70***	**205.377.657,00**			**Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing**	**Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**205.377.657,00**	***DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN***
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (%)*				*70*	85.172.485,00	*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia		*70*	85.172.485,00	*DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN*
	2.07.05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	*Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan (Laporan)*		*1*	*1*	*1.00*	85.172.485,00	*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	*Masyarakat*	*1.00*	85.172.485,00	*DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN*
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (%)*				*70*	120.205.172,00	*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia		*70*	120.205.172,00	*DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN*
	2.07.05.2.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Perselisihan yang Dicegah (Perkara)*		*2*	*2*	*2*	60.000.000,00	*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	*Masyarakat*	*2*	60.000.000,00	*DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN*
	2.07.05.2.02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota						60.205.172,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			60.205.172,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah LKS Tripartit yang Dibina (Lembaga)		*1*	*1*	*1.00*		*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Masyarakat*	*1.00*		*DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN*
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**						**1.136.012.101,00**							**-**	
1.	**2.08.02**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	***Persentase Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Perencanaan Pembangunan yang Responsif Gender (%)***				***100***	**207.568.766,00**			**Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing**	**Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**-**	***DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA***
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	*Meningkatnya Pengetahuan Peserta dalam Penyusunan GAP/GBS (Gender Analysis Pathway/Gender Budget Statement) di Kabupaten Pesisir Barat (Kali)*				*1*	130.000.000,00	*(Krui Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia		*1*	-	*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
	2.08.02.2.01.04	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	*Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota (Perangkat Daerah)*		*0.00*	*0.00*	*25*	130.000.000,00	*(Kabupaten pesisir barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	*Perencanaan pada OPD, Bagian Sekretariat Daerah dan Kecamatan*	*25*	-	*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Meningkatnya Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi di Kabupaten Pesisir Barat (Kali)*				*1*	77.568.766,00	*(Krui Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*1*	-	*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
	2.08.02.2.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi						77.568.766,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					-	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)		*0*	*0*							*OPD, Peserta Rapat, Narasumber*			*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
2.	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	***Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan (%)***				***100***	**124.175.456,00**			**Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing**	**Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**-**	***DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA***
			Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana dan Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota (%)				***100***									***DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA***
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	*Terdampinginya 5 Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (%)*				*100*	27.351.000,00	*(Krui Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia		*100*	-	*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
	2.08.03.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota (Layanan)*		*0.00*	*0.00*	*10*	27.351.000,00	*(Krui Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	*Konselor, Korban, OPD, Perempuan Korban Kekerasan, Peserta*	*10*	-	*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya Kinerja UPTD PPA (%)*				*100*	96.824.456,00	*(Krui Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia		*100*	-	*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Meningkatnya Sumber Daya Manusia dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Kode Etik (Kali)				*2*		*(Krui Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*2*		*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
			Meningkatnya Pengetahuan Lembaga Forum PUSPAGA (%)				*100*		*(Krui Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
	2.08.03.2.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota						20.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					-	
			Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*10*		*(10 Kecamatan Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*OPD, Peserta*	*10*		*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
	2.08.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota						46.283.856,00		DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	
			Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas (Orang)		*0.00*	*0.00*	*50*						*OPD, Peserta Kegiatan*	*50*		*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
	2.08.03.2.03.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota						30.540.600,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					-	
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)		*0*	*0*							*OPD, Peserta Kegiatan*			*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
3.	**2.08.04**	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**						**223.797.979,00**			**Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing**	**Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**-**	
			Cakupan Perempuan sebagai Tenaga Profesional (%)				***35.00***									***DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA***

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya Pengetahuan Perempuan Kepala Keluarga dalam Peningkatan Ekonomi bagi Keluarga (%)*				*100*	125.527.000,00	*(Krui Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia		*100*	-	*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
	2.08.04.2.01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*10*	125.527.000,00	*(Kecamatan Lemong, Pesisir Utara, Pulau Pisang, Karya Penggawa, Way Krui, Krui Selatan, Pesisir Selatan, Ngambur, Ngaras, Bangkunat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	*Perempuan Kepala Keluarga*	*0.00*	-	*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
	2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Tersedianya Data Pilah dari 11 Kecamatan (Kecamatan)*				*11*	98.270.979,00	*(Krui Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia		*11*	-	*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
	2.08.04.2.02.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan (Lembaga)*		*0.00*	*0.00*	*11*	98.270.979,00	*(Kecamatan Lemong, Pesisir Utara, Pulau Pisang, Karya Penggawa, Way Krui, Pesisir Tengah, Krui Selatan, Pesisir Selatan, Ngambur, Ngaras, Bangkunat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	*Masyarakat di 11 Kecamatan*	*11*	-	*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
4.	**2.08.06**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	***Cakupan Lembaga Penyedia Layanan terhadap Anak (%)***				***33.33***	**387.030.849,00**			**Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing**	**Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**-**	***DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA***

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	*Meningkatnya Pengetahuan Pemerhati Anak tentang hak-hak anak (%)*				*100*	57.700.000,00	*(Krui Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia		*100*	-	*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
	2.08.06.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)*		*0*	*0*		57.700.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	*OPD, Peserta Kegiatan*		-	*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	*Terwujudnya Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Pesisir Barat (poin)*				*800*	329.330.849,00	*(Krui Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*			Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia		*800*	-	*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
	2.08.06.2.02.01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)*		*0*	*0*		329.330.849,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*OPD, Peserta Kegiatan*		-	*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
5.	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	***Cakupan Pendampingan anak yang membutuhkan Perlindungan Khusus (%)***				***100***	**193.439.051,00**			**Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing**	**Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**-**	***DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA***
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota						59.700.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat tentang Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (%)				*100*		*(Krui Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
	2.08.07.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)*		*0*	*0*		59.700.000,00		DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	*OPD*		-	*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Terdampinginya kasus-kasus anak yang memerlukan perlindungan khusus (%)*				*100*	103.739.051,00	*(Krui Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia		*100*	-	*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
			Meningkatnya Pengetahuan Anak tentang Kekerasan Terhadap Anak di Sekolah (%)				*100*		*(Krui Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
	2.08.07.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota (Layanan)*		*0.00*	*0.00*	*40*	63.739.051,00		DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	*Masyarakat*	*40*	-	*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
	2.08.07.2.02.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*1*	40.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*OPD*	*1*	-	*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatkan Kinerja UPTD PPA (%)*				*100*	30.000.000,00	*(Krui Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia		*100*	-	*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
	2.08.07.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)*		*0*	*0*		30.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	*OPD, Peserta Kegiatan*		-	*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**						**7.956.573.313,00**							**8.677.612.897,00**	
1.	**2.09.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)***				***92.50***	**6.650.524.300,00**			**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas**			**6.690.524.300,00**	***DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN***
	2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu (%)*				*100*	10.000.000,00	*(Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*100*	10.000.000,00	*DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN*
	2.09.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)*		*2*	*2*	*2.00*	5.000.000,00	*(Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*2*	5.000.000,00	*DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN*
	2.09.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						3.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			3.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		*2*	*2*	*2.00*		*(Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*2*		*DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN*
	2.09.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						2.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		*1*	*1*	*1.00*		*(Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN*
	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						5.624.724.300,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			5.624.724.300,00	
			Persentase Pelaporan Keuangan tepat waktu (%)				*100*		*(Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN*
	2.09.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						5.618.724.300,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			5.618.724.300,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		*50*	*50*	*50.00*		*(Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*50*		*DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN*
	2.09.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						2.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		*1*	*1*	*1.00*		*(Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN*
	2.09.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						2.500.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.500.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		*2*	*2*	*2.00*		*(Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*2*		*DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN*
	2.09.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						1.500.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)		*1*	*1*	*1.00*		*(Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN*
	2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						145.500.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			145.500.000,00	
			Aparatur Yang Berkinerja Baik (%)				*100*		*(Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN*
	2.09.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						45.500.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			45.500.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)		*0*	*0*	*65.00*		*(Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*65*		*DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN*
	2.09.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						100.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			100.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)		*0.00*	*0.00*	*10.00*		*(Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*10*		*DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN*
	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						419.800.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			459.800.000,00	
			Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja (%)				*100*		*(Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN*
	2.09.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						1.800.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.800.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		*1*	*1*	*1.00*		*(Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN*
	2.09.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						40.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			80.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		*1*	*1*	*2.00*		*(Kabupaten Pesisir Barat dan Bandar Lampung, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*2*		*DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						55.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			55.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*1*	*1*	*1.00*		*(Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN*
	2.09.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						12.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			12.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		*10*	*10*	*10.00*		*(Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*10*		*DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN*
	2.09.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu						11.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			11.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)		*11*	*11*	*11.00*		*(Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*0.00*		*DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN*
	2.09.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						300.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			300.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*2*	*2*	*2.00*		*(Kabupaten Pesisir Barat dan Luar Daerah Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*2*		*DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN*
	2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						90.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			90.000.000,00	
			Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana kantor (%)				*100*		*(Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN*
	2.09.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						90.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			90.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		*0.00*	*0.00*	*17.00*		*(Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*17*		*DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN*
	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						171.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			171.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase Pemenuhan Layanan Pendukung (%)				*100*		*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN*
	2.09.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						60.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			60.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*1*	*1*	*1.00*		*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN*
	2.09.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						107.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			107.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)		*1*	*1*	*1.00*		*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN*
	2.09.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						4.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			4.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		*1*	*1*	*1.00*		*(Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN*
	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						189.500.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			189.500.000,00	
			Persentase Barang Milik Daerah yang dalam kondisi baik (%)				*100*		*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN*
	2.09.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						40.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			40.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		*1*	*1*	*1*		*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN*
	2.09.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						128.500.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			128.500.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		*29*	*29*	*29.00*		*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*29*		*DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN*
	2.09.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						21.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			21.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*30*	*30*	*30.00*		*(Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*30*		*DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN*
2.	**2.09.03**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**						**929.136.880,00**			**Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**	**Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat**			**1.415.136.880,00**	
			Ketersediaan Pangan Utama (Ton)				***28000***									***DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN***
			Ketersediaan Pangan Utama (Ton)	***28.000***			***28000***									***DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN***
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan						408.636.880,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			483.636.880,00	
			Skor Pola Pangan Harapan (PPH Ketersediaan) (%)				*85.10*		*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*85.20*		*DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN*
	2.09.03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan						75.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			150.000.000,00	
			Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan (Laporan)		*2*	*2*	*2*		*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur, Aparatur, Pedagang, Petani dan Pengusaha Penggilingan Beras*	*2*		*DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN*
	2.09.03.2.01.02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal						301.200.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			301.200.000,00	
			Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Kelompok Wanita Tani, TPPKK, Masyarakat*	*1*		*DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN*
	2.09.03.2.01.05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan						32.436.880,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			32.436.880,00	
			Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan (Unit)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur dan KelompokTani*	*2*		*DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN*
	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota						260.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			260.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah (%)				*20*		*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*20*		*DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN*
	2.09.03.2.02.03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota						240.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			240.000.000,00	
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Ton)		*0.00*	*0.00*	*20*		*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur, Bulog dan Masyarakat*	*9*		*DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN*
	2.09.03.2.02.04	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota						20.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			20.000.000,00	
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara (Ton)		*0.00*	*34*	*34*		*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur dan Bulog*	*34*		*DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN*
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi						260.500.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			671.500.000,00	
			Skor Pola Pangan Harapan (Konsumsi) (%)				*87.80*		*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*87.90*		*DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN*
	2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal						205.500.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			616.500.000,00	
			Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Laporan)		*3*	*3*	*3*		*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur dan TPPKK, KWT, TPPKK, TPPKK, Dharma Wanita, Masyarakat*	*3*		*DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN*
	2.09.03.2.04.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun						55.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			55.000.000,00	
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun (Laporan)		*1*	*1*	*1*		*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Rumah Tangga Konsumsi*	*1*		*DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN*
3.	**2.09.04**	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**						**270.039.584,00**			**Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**	**Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat**			**465.079.168,00**	
			Peresentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)				***5***									***DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN***

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan						75.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			75.000.000,00	
			Cakupan Informasi Daearah Rawan Pangan (%)				*100*		*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN*
	2.09.04.2.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan						75.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			75.000.000,00	
			Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan (Dokumen)		*1*	*1*	*1*		*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN*
	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota						195.039.584,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			390.079.168,00	
			Penanganan Daerah Rawan Pangan (Lokasi)				*1*		*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*1*		*DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN*
	2.09.04.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota						195.039.584,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			390.079.168,00	
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota (Laporan)		*1.00*	*2*	*2.00*		*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur, Masyarakat*	*2.00*		*DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN*
4.	**2.09.05**	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**						**106.872.549,00**			**Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**	**Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat**			**106.872.549,00**	
			Persentase Pangan Segar asal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan (%)				***60***									***DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN***
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota						106.872.549,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			106.872.549,00	
			Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan (%)				*100*		*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.05.2.01.01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota						20.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			20.000.000,00	
			KelembagaanKeamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur, Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan*	*1*		*DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN*
	2.09.05.2.01.03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota						30.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			30.000.000,00	
			Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)		*1*	*1*	*1*		*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Pelaku Usaha dan Produsen Pangan Segar Asal Tumbuhan*	*1*		*DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN*
	2.09.05.2.01.04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota						25.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			25.000.000,00	
			Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)		*1*	*1*	*1*		*(Kabupaten Pesisir Barat, Pesisir Tengah)*				*Pelaku Usaha dan Produsen Pangan Segar Asal Tumbuhan*	*1*		*DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN*
	2.09.05.2.01.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota						31.872.549,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			31.872.549,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)		*1*	*1*	*1*		*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Pelaku Usaha dan Produsen Pangan Segar Asal Tumbuhan*	*1*		*DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN*
	2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**						**5.854.329.407,00**							**5.814.329.407,00**	
1.	**2.10.04**	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**						**92.391.704,00**			**Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar**	**Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan**			**52.391.704,00**	
			Jumlah Kepala Keluarga Penerima Akses Reformasi Agraria (Ha)				***0,5***									***DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN***

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota						92.391.704,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			52.391.704,00	
			Cakupan Penyelesaian Sengketa Tanah (Bulan)				*12*		*(Sengketa Tanah Garapan di semua Wilayah Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*12*		*DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN*
	2.10.04.2.01.01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						40.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			-	
			Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)		*12*	*12*	*12*		*(Sengketa Tanah Garapan di semua Wilayah Kabupaten Pesisir Barat)*				*Masyarakat*	*12*		*DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN*
	2.10.04.2.01.02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						52.391.704,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			52.391.704,00	
			Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Berita Acara)		*12*	*12*	*12*		*(Sengketa Tanah Garapan di semua Wilayah Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Masyarakat*	*12*		*DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN*
2.	**2.10.05**	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**						**5.463.757.704,00**			**Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar**	**Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan**			**5.463.757.704,00**	
			Rasio Luas Tanah yang disediakan bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan kepentingan lainnya (Ha)				***11***									***DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN***
	2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						5.463.757.704,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			5.463.757.704,00	
			Cakupan Penyelesaian Kerugian (Bulan)				*12*		*((Kalurahan Pasar Kota Krui, Kec. Pesisir Tengah dan Kabupaten Pesisir Barat), KAB. PESISIR BARAT)*					*12*		*DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN*
	2.10.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						5.463.757.704,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			5.463.757.704,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)		*12*	*12*	*12*		*((Kelurahan Pasar Kota Krui, Kec. Pesisir Tengah dan Kabupaten Pesisir Barat), KAB. PESISIR BARAT)*				*Masyarakat*	*12*		*DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN*
3.	**2.10.08**	**PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG**	***Cakupan pemanfaatan tanah kosong (%)***				***100***	**298.179.999,00**			**Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar**	**Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan**			**298.179.999,00**	***DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN***
	2.10.08.2.02	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	*Persentase Luas Lahan Bersertifikat (%)*				*100*	298.179.999,00	*(Lokasi Tanah Aset Pemda Kabupaten Pesisir Barat yang Belum di Sertifikasi, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan		*100*	298.179.999,00	*DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN*
	2.10.08.2.02.01	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	*Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi. (Laporan)*		*64.00*	*80.00*	*81.00*	298.179.999,00	*(Lokasi Tanah Aset Pemda Kabupaten Pesisir Barat yang Belum di Sertifikasi, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	*Aset Tanah Pemda*	*81*	298.179.999,00	*DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN*
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**						**6.612.324.336,00**							**6.328.910.612,00**	
1.	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)***	***92,5***			***92,50***	**3.267.704.529,00**			**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas**			**3.186.767.569,00**	***DINAS LINGKUNGAN HIDUP***
	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Presentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Tepat Waktu (Belanja ATK, Belanja Fotocopy) (%)*				*100*	12.533.600,00	*(Dinas Lingkungan Hidup, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*100*	12.533.600,00	*DINAS LINGKUNGAN HIDUP*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)*		*2*	*2*	*2*	2.360.000,00	*(Kantor Dinas Lingkungan Hidup, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*2*	2.360.000,00	*DINAS LINGKUNGAN HIDUP*
	2.11.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)*		*1.00*	*1.00*	*1.00*	2.100.000,00	*(di Kantor Dinas Lingkungan Hidup, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*1.00*	2.100.000,00	*DINAS LINGKUNGAN HIDUP*
	2.11.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)*		*1.00*	*1.00*	*1.00*	639.600,00	*(di Kantor Dinas Lingkungan Hidup, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*1.00*	639.600,00	*DINAS LINGKUNGAN HIDUP*
	2.11.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)*		*1.00*	*1.00*	*1.00*	1.500.000,00	*(di Kantor Dinas Lingkungan Hidup, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*1.00*	1.500.000,00	*DINAS LINGKUNGAN HIDUP*
	2.11.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)*		*1.00*	*1.00*	*1.00*	614.000,00	*(di Kantor Dinas Lingkungan Hidup, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*1.00*	614.000,00	*DINAS LINGKUNGAN HIDUP*
	2.11.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)*		*2.00*	*2.00*	*2.00*	5.320.000,00	*(di Kantor Dinas Lingkungan Hidup, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*2.00*	5.320.000,00	*DINAS LINGKUNGAN HIDUP*
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.845.640.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.165.856.169,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Presentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Tepat Waktu (%)				*92.50*		*(Dinas lingkungan Hidup, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS LINGKUNGAN HIDUP*
			Presentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Tepat Waktu (%)				*92.50*		*(Dinas lingkungan Hidup, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS LINGKUNGAN HIDUP*
	2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.839.100.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.159.316.169,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		*14.00*	*13.00*	*14.00*		*(di Kantor Dinas Lingkungan Hidup, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*14.00*		*DINAS LINGKUNGAN HIDUP*
	2.11.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						2.540.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik				2.540.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(di Kantor Dinas Lingkungan Hidup, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1.00*		*DINAS LINGKUNGAN HIDUP*
	2.11.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						3.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			3.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		*2*	*2*	*2*		*(di Kantor Dinas Lingkungan Hidup, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*2*		*DINAS LINGKUNGAN HIDUP*
	2.11.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						1.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)		*1*	*1*	*1*		*(di Kantor Dinas Lingkungan Hidup, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*DINAS LINGKUNGAN HIDUP*
	2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						200.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			200.000.000,00	
	2.11.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						150.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			150.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)		*0.00*	*1*	*1*		*(di Kantor Dinas Lingkungan Hidup, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur dan Masyarakat*	*1*		*DINAS LINGKUNGAN HIDUP*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)*		*0.00*	*0.00*	*2*	50.000.000,00	*(Luar Wilayah Pesisir Barat, Luar Wilayah)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*2*	50.000.000,00	*DINAS LINGKUNGAN HIDUP*
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						360.707.929,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			109.747.800,00	
	2.11.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)*		*0*	*0*		1.537.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*		-	*DINAS LINGKUNGAN HIDUP*
	2.11.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)*		*1*	*1*	*1*	25.000.000,00	*(Kecamatan Pesisir Tengah, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*1*	25.000.000,00	*DINAS LINGKUNGAN HIDUP*
	2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)*		*1.00*	*1.00*	*1.00*	61.747.800,00	*(di Kantor Dinas Lingkungan Hidup, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*1.00*	61.747.800,00	*DINAS LINGKUNGAN HIDUP*
	2.11.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)*		*11.00*	*11.00*	*11.00*	12.000.000,00	*(di Kantor Dinas Lingkungan Hidup, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur dan Masyarakat*	*11.00*	12.000.000,00	*DINAS LINGKUNGAN HIDUP*
	2.11.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)*		*0.00*	*0.00*		11.000.000,00	*(di Kantor Dinas Lingkungan Hidup, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur dan Masyarakat*	*0.00*	11.000.000,00	*DINAS LINGKUNGAN HIDUP*
	2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						249.423.129,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			-	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*0*	*0*							*Aparatur*			*DINAS LINGKUNGAN HIDUP*
	2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						100.392.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			-	
	2.11.01.2.07.05	Pengadaan Mebel						50.392.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			-	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)		*0*	*0*							*Aparatur*			*DINAS LINGKUNGAN HIDUP*
	2.11.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						50.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			-	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		*0*	*0*							*Aparatur*			*DINAS LINGKUNGAN HIDUP*
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						136.301.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			86.500.000,00	
			Presentase Pemenuhan Layanan Pendukng (%)				*92.50*		*(Kecamatan Pesisir Tengah, KAB. PESISIR BARAT)*					*92.50*		*DINAS LINGKUNGAN HIDUP*
			Presentase Pemenuhan Layanan Pendukng (%)				*92.50*		*(Kecamatan Pesisir Tengah, KAB. PESISIR BARAT)*					*92.50*		*DINAS LINGKUNGAN HIDUP*
	2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						12.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			12.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(di Kantor Dinas Lingkungan Hidup, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*DINAS LINGKUNGAN HIDUP*
	2.11.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						114.500.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			74.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)		*12.00*	*12.00*	*12.00*		*(di Kantor Dinas Lingkungan Hidup, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12.00*		*DINAS LINGKUNGAN HIDUP*
	2.11.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						9.801.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			-	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*0.00*							*Aparatur*	*0.00*		*DINAS LINGKUNGAN HIDUP*
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						612.130.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			612.130.000,00	
	2.11.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)*		*2*	*2*	*2*	50.400.000,00	*(di Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*2*	50.400.000,00	*DINAS LINGKUNGAN HIDUP*
	2.11.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)*		*10*	*10*	*10*	419.480.000,00	*(di Kab.Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*10*	419.480.000,00	*DINAS LINGKUNGAN HIDUP*
	2.11.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	*Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)*		*0*	*0*		114.004.000,00	*(di Kantor Dinas Lingkungan Hidup, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*0*	114.004.000,00	*DINAS LINGKUNGAN HIDUP*
	2.11.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)*		*0.00*	*0.00*		18.246.000,00	*(di Kantor Dinas Lingkungan Hidup, KAB. PESISIR BARAT)*	DANA UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*0.00*	18.246.000,00	*DINAS LINGKUNGAN HIDUP*
	2.11.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)*		*2*	*2*	*2*	10.000.000,00	*(di Kantor Dinas Lingkungan Hidup, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*2*	10.000.000,00	*DINAS LINGKUNGAN HIDUP*
2.	**2.11.02**	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	***Cakupan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup (%)***				***100***	**493.738.650,00**			**Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim**	**Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas**			**493.738.650,00**	***DINAS LINGKUNGAN HIDUP***

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	*Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pengembangan Kabupaten/Kota (%)*				*92.50*	93.738.650,00	*(Seluruh Kecamatan Di Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*		Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan		*92.50*	93.738.650,00	*DINAS LINGKUNGAN HIDUP*
	2.11.02.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	*Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)*		*0.00*	*1.00*	*1.00*	93.738.650,00	*(di Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	*Aparatur dan Masyarakat*	*1.00*	93.738.650,00	*DINAS LINGKUNGAN HIDUP*
	2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota						400.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			400.000.000,00	
	2.11.02.2.02.01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	*Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)*		*1.00*	*1.00*	*1.00*	200.000.000,00	*(di Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	*Aparatur dan Masyarakat*	*1.00*	200.000.000,00	*DINAS LINGKUNGAN HIDUP*
	2.11.02.2.02.02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	*Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)*		*1*	*1*	*1*	200.000.000,00	*(seluruh Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	*Aparatur dan Masyarakat*	*1*	200.000.000,00	*DINAS LINGKUNGAN HIDUP*
3.	**2.11.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	***indeks kualitas lingkungan hidup (Angka)***				***74,20***	**311.715.209,00**			**Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim**	**Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan**			**311.715.209,00**	***DINAS LINGKUNGAN HIDUP***
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota						311.715.209,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			311.715.209,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	*Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (Dokumen)*		*1.00*	*1.00*	*1.00*	253.416.209,00	*(Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	*Aparatur, Masyarakat dan Pelaku usaha dan/atau kegiatan*	*1.00*	253.416.209,00	*DINAS LINGKUNGAN HIDUP*
	2.11.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)*		*1*	*1*	*1*	58.299.000,00	*(Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	*Aparatur, Masyarakat dan Pelaku usaha dan/atau kegiatan*	*1*	58.299.000,00	*DINAS LINGKUNGAN HIDUP*
4.	**2.11.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	***Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH) Per satuan luas wilayah (%)***				***5***	**202.476.679,00**			**Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim**	**Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan**			**-**	***DINAS LINGKUNGAN HIDUP***
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota						202.476.679,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			-	
	2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	*Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)*		*0.00*	*0.00*	*1*	202.476.679,00	*(Kecamatan Pesisir Tengah, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	*di Kab, Pesisir Barat*	*1*	-	*DINAS LINGKUNGAN HIDUP*
5.	**2.11.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	***Cakupan pengendalian terhadap izin lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) dan izin ketentuan peraturan perundang-undangan yang berbasis lingkungan hidup (PUU LH) (%)***				***100***	**125.139.419,00**			**Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim**	**Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan**			**125.139.419,00**	***DINAS LINGKUNGAN HIDUP***

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH, dan PUU LH yang diterbitkan (%)*				*92.50*	125.139.419,00	*(Seluruh Kecamatan, KAB. PESISIR BARAT)*		Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan		*92.50*	125.139.419,00	*DINAS LINGKUNGAN HIDUP*
	2.11.06.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	*Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan (Dokumen)*		*0.00*	*1.00*	*1.00*	125.139.419,00	*(di Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	*Aparatur dan Masyarakat*	*1.00*	125.139.419,00	*DINAS LINGKUNGAN HIDUP*
6.	**2.11.07**	**PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH**	***Persentase Penetapan Hak Masyarakat Hukum Adat (%)***				***35***	**106.816.815,00**			**Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim**	**Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan**			**106.816.815,00**	***DINAS LINGKUNGAN HIDUP***
	2.11.07.2.01	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	*Presentase Ketersediaan Data dan Informasi Keberadaan MHA (%)*				*92.50*	106.816.815,00	*(Seluruh Kecamatan, KAB. PESISIR BARAT)*		Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan		*92.50*	106.816.815,00	*DINAS LINGKUNGAN HIDUP*
	2.11.07.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH (Dokumen)*		*0.00*	*1.00*	*1.00*	106.816.815,00	*(di Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	*Aparatur dan Masyarakat*	*1.00*	106.816.815,00	*DINAS LINGKUNGAN HIDUP*
7.	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**						**2.104.733.035,00**			**Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim**	**Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan**			**2.104.732.950,00**	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persenatase Cakupan Area Pelayanan Persampahan (%)				***54,70***									***DINAS LINGKUNGAN HIDUP***
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah						2.104.733.035,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			2.104.732.950,00	
	2.11.11.2.01.02	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	*Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali (Laporan)*		*1.00*	*1.00*	*1.00*	121.178.335,00	*(di Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	*Aparatur dan Masyarakat*	*1.00*	121.178.250,00	*DINAS LINGKUNGAN HIDUP*
	2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	*Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota (Ton)*		*3297.00*	*3297.00*	*3297.00*	1.983.554.700,00	*(di Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	*Aparatur dan Masyarakat*	*3297.00*	1.983.554.700,00	*DINAS LINGKUNGAN HIDUP*
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**						**5.142.916.875,00**							**5.921.208.562,00**	
1.	**2.12.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)***	***92,5***			***92,50***	**4.507.625.600,00**				**Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas**			**5.222.388.160,00**	***DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL***
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu (%)*				*100*	705.995.000,00	*(KABUPATEN PESISIR BARAT, KAB. PESISIR BARAT)*			Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*100*	776.594.500,00	*DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL*
	2.12.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)*		*2*	*2*	*2*	4.800.000,00	*(Pasar Mulya Timur 01 Kelurahan Pasar Krui, Pesisir Tengah)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*aparatur*	*2*	5.280.000,00	*DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL*
	2.12.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						2.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.200.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		*2*	*2*	*2*		*(Pasar Mulya Timur 01 Kelurahan Pasar Krui, Pesisir Tengah)*				*aparatur*	*2*		*DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL*
	2.12.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						699.195.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					769.114.500,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(SELURUH KECAMATAN DAN PEKON/KELURAHAN DI KABUPATEN PESISIR BARAT, KAB. PESISIR BARAT)*				*aparatur*	*1.00*		*DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL*
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.034.306.400,00				Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.237.737.040,00	
			Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu (%)				*100*		*(KABUPATEN PESISIR BARAT, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL*
	2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2.028.806.400,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.231.687.040,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		*15*	*15*	*15*		*(Pasar Mulya Timur 01 Kelurahan Pasar Krui, Pesisir Tengah)*				*aparatur*	*15*		*DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL*
	2.12.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						2.500.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.750.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		*1*	*1*	*1*		*(Pasar Mulya Timur 01 Kelurahan Pasar Krui, Pesisir Tengah)*				*aparatur*	*1*		*DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL*
	2.12.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						2.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.200.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		*4*	*4*	*4*		*(Pasar Mulya Timur 01 Kelurahan Pasar Krui, Pesisir Tengah)*				*aparatur*	*4*		*DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL*
	2.12.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						1.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.100.000,00	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)		*2*	*2*	*2*		*(Pasar Mulya Timur 01 Kelurahan Pasar Krui, Pesisir Tengah)*				*aparatur*	*2*		*DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL*
	2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						391.933.000,00				Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			431.126.300,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase aparatur yang berkinerja baik (%)				*100*		*(LUAR WILAYAH SERTA DALAM KABUPATEN PESISIR BARAT, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL*
	2.12.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						96.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					105.600.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*80*		*(KABUPATEN PESISIR BARAT, KAB. PESISIR BARAT)*				*aparatur*	*100*		*DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL*
	2.12.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						60.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					66.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)		*0.00*	*0.00*	*16*		*(luar wilayah kabupaten pesisir barat, Luar Wilayah)*				*aparatur*	*16*		*DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL*
	2.12.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						235.933.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					259.526.300,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)		*59*	*0*	*134*		*(kabupaten pesisir barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*aparatur*	*134*		*DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL*
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						339.045.000,00				Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			636.949.500,00	
			Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja (%)				*100*		*(KABUPATEN PESISIR BARAT, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL*
	2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						3.745.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					4.119.500,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		*12.00*	*12.00*	*12.00*		*(KANTOR DISDUKCAPIL PASAR MULYA TIMUR 01 KELURAHAN PASAR KRUI KECAMATAN PESISIR TENGAH, Pesisir Tengah)*				*aparatur*	*12.00*		*DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL*
	2.12.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						25.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					27.500.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		*1*	*1*	*1*		*(KABUPATEN PESISIR BARAT, KAB. PESISIR BARAT)*				*aparatur*	*1*		*DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL*
	2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						47.300.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					52.030.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*12.00*	*12.00*	*12.00*		*(kabupaten pesisir barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*aparatur*	*12.00*		*DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)*		*10*	*10*	*10*	12.000.000,00	*(KANTOR DISDUKCAPIL PASAR MULYA TIMUR 01 KELURAHAN PASAR KRU KABUPATEN PESISIR BARAT, Pesisir Tengah)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*aparatur*	*10*	13.200.000,00	*DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL*
	2.12.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)*		*11*	*11*	*11*	11.000.000,00	*(KABUPATEN PESISIR BARAT, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*aparatur*	*11*	12.100.000,00	*DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL*
	2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)*		*12.00*	*12.00*	*12.00*	240.000.000,00	*(KABUPATEN PESISIR BARAT DAN LUAR WILAYAH KABUPATEN PESISIR BARAT, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*aparatur*	*12.00*	528.000.000,00	*DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL*
	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase pemenuhan Layanan Pendukung (%)*				*100*	600.200.000,00	*(KABUPATEN PESISIR BARAT, KAB. PESISIR BARAT)*			Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*100*	660.220.000,00	*DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL*
	2.12.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)*		*0.00*	*7.00*	*10*	600.200.000,00	*(KANTOR DISDUKCAPIL PASAR MULYA TIMUR 01 KELURAHAN PASAR KRUI, Pesisir Tengah)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*aparatur*	*11*	660.220.000,00	*DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL*
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemenuhan Layanan Pendukung (%)*				*100*	229.966.200,00	*(KABUPATEN PESISIR BARAT, KAB. PESISIR BARAT)*			Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*100*	252.962.820,00	*DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL*
	2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)*		*12*	*12*	*12*	94.966.200,00	*(KANTOR DISDUKCAPIL PASAR MULYA TIMUR 01 KELURAHAN PASAR KRUI, Pesisir Tengah)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*aparatur*	*12*	104.462.820,00	*DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL*
	2.12.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						129.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					141.900.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(KANTOR DISDUKCAPIL PASAR MULYA TIMUR 01 KELURAHAN PASAR KRUI, Pesisir Tengah)*				*aparatur*	*12*		*DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL*
	2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						6.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					6.600.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(KANTOR DISDUKCAPIL PASAR MULYA TIMUR 01 KELURAHAN PASAR KRUI, Pesisir Tengah)*				*aparatur*	*12*		*DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL*
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						206.180.000,00				Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			226.798.000,00	
			Persentase Barang Milik Daerah yang dalam kondisi baik (%)				*100*		*(KABUPATEN PESISIR BARAT, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL*
	2.12.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						79.800.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					87.780.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		*2*	*2*	*2*		*(kantor disdukcapil pasar mulya timur 01 kelurahan pasar krui, Pesisir Tengah)*				*aparatur*	*2*		*DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL*
	2.12.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						62.900.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					69.190.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		*2*	*2*	*2*		*(KANTOR DISDUKCAPIL PASAR MULYA TIMUR 01 KELURAHAN PASAR KRUI, Pesisir Tengah)*				*aparatur*	*2*		*DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL*
	2.12.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						63.480.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					69.828.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*12*	*12*	*12*		*(KANTOR DISDUKCAPIL PASAR MULYA TIMUR 01 KELURAHAN PASAR KRUI, Pesisir Tengah)*				*aparatur*	*12*		*DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL*
2.	**2.12.02**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**						**335.363.433,00**				**Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat**			**368.899.776,00**	
			Cakupan Penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan (%)				***100***									***DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL***
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk						59.877.433,00				Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat			65.865.176,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Presentase Pelayanan Pendaftaran Penduduk (%)				*100*		*(kabupaten pesisir barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL*
	2.12.02.2.01.05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan						59.877.433,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					65.865.176,00	
			Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan (Dokumen)		*1.00*	*1.00*	*169945.00*		*(KABUPATEN PESISIR BARAT, KAB. PESISIR BARAT)*				*aparatur*	*169945.00*		*DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL*
	2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk						166.990.000,00				Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat			183.689.000,00	
			Persentase Penataan Pendaftaran Penduduk (%)				*100*		*(kabupaten pesisir barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL*
	2.12.02.2.02.02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan						166.990.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					183.689.000,00	
			Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia (Dokumen)		*1*	*1*	*1*		*(KANTOR DISDUKCAPIL PASAR MULYA TIMUR 01 KELURAHAN PASAR KRUI, Pesisir Tengah)*				*Masyarakat*	*1*		*DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL*
	2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk						108.496.000,00				Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat			119.345.600,00	
			Terselenggaranya Pendaftaran Penduduk (%)				*100*		*(KABUPATEN PESISIR BARAT, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL*
	2.12.02.2.03.02	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk						55.600.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					61.160.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk (Dokumen)		*1*	*1*	*169945*		*(kantor disdukcapil pasar mulya timur 01 kelurahan pasar krui, Pesisir Tengah)*				*masyarakat*	*169945*		*DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL*
	2.12.02.2.03.05	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk						52.896.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					58.185.600,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk (Laporan)		*1*	*1*	*1*		*(kabupaten pesisir barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*aparatur*	*1*		*DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL*
3.	**2.12.03**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**						**108.507.804,00**				**Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat**			**119.358.584,00**	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Cakupan Penertiban Angka Pencatatan Sipil (%)				***100***									***DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL***
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	*Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil (%)*				*100*	53.014.804,00	*(KABUPATEN PESISIR BARAT, KAB. PESISIR BARAT)*			Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat		*100*	58.316.284,00	*DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL*
	2.12.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	*Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting (Dokumen)*		*1.00*	*1.00*	*169945.00*	53.014.804,00	*(kabupaten pesisir barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*masyarakat*	*169945.00*	58.316.284,00	*DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL*
	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	*Terselenggaranya Pencatatan Sipil (%)*				*100*	55.493.000,00	*(KABUPATEN PESISIR BARAT, KAB. PESISIR BARAT)*			Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat		*100*	61.042.300,00	*DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL*
	2.12.03.2.02.06	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil (Laporan)*		*1*	*1*	*12*	55.493.000,00	*(KABUPATEN PESISIR BARAT, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*Masyarakat*	*12*	61.042.300,00	*DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL*
4.	**2.12.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	***Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan (%)***				***100***	**92.897.209,00**				**Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat**			**102.186.930,00**	***DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL***
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	*Terselenggaranya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (%)*				*100*	92.897.209,00	*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*			Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat		*100*	102.186.930,00	*DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL*
	2.12.04.2.03.05	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	*Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)*		*1.00*	*1.00*	*1.00*	49.189.209,00	*(KABUPATEN PESISIR BARAT, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*aparatur*	*1.00*	54.108.130,00	*DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.04.2.03.08	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	*Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan (Dokumen)*		*1*	*1*	*1*	43.708.000,00	*(KABUPATEN PESISI BARAT, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*aparatur*	*1*	48.078.800,00	*DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL*
5.	**2.12.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	***Persentase Data Kependudukan Skala Kabupaten dalam 1 tahun (%)***				***100***	**98.522.829,00**				**Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat**			**108.375.112,00**	***DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL***
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	*Tersedianya Profil Kependudukan (%)*				*100*	98.522.829,00	*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*			Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat		*100*	108.375.112,00	*DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL*
	2.12.05.2.01.01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	*Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota (Dokumen)*		*75.00*	*75.00*	*75.00*	54.385.329,00	*(KABUPATEN PESISIR BARAT, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*aparatur*	*75.00*	59.823.862,00	*DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL*
	2.12.05.2.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	*Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun (Dokumen)*		*50*	*50*	*50*	44.137.500,00	*(KABUPATEN PESISIR BARAT, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*aparatur*	*50*	48.551.250,00	*DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL*
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**						**8.139.472.190,00**							**9.516.271.433,00**	
1.	**2.13.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)***	***92,5***			***92,50***	**2.263.797.064,00**			**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas**			**2.988.596.307,00**	***DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON***
	2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						7.744.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.694.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu (%)				*100*		*(Kantor Dinas Pemberdaytaan Masyarakat dan Pekon, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON*
	2.13.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						1.694.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.694.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon, KAB. PESISIR BARAT)*					*1.00*		*DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON*
	2.13.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						6.050.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					-		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan pekon, KAB. PESISIR BARAT)*					*1.00*		*DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON*
	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.667.380.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.308.100.047,00	
			presentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu (%)				*100*		*(Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON*
	2.13.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.661.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.301.445.047,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		*14.00*	*14.00*	*14.00*		*(Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*14.00*		*DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON*
	2.13.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						2.750.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik				3.025.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1.00*		*DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON*
	2.13.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						2.420.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.420.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		*2.00*	*2.00*	*2.00*		*(Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pekon, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*2.00*		*DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)*		*1.00*	*1.00*	*1.00*	1.210.000,00	*(Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*Aparatur*	*1.00*	1.210.000,00	*DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON*
	2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*presentase aparatur yang berkinerja baik (%)*				*100*	20.000.000,00	*(dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*	20.000.000,00	*DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON*
	2.13.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)*		*2.00*	*0.00*	*4.00*	20.000.000,00	*(Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pekon, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*Aparatur*	*4.00*	20.000.000,00	*DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON*
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja (%)*				*100*	299.779.760,00	*(dinas pemberdayaan Masyarakat dan Pekon, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*100*	343.889.760,00	*DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON*
	2.13.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)*		*12.00*	*12.00*	*12.00*	3.939.760,00	*(dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*12.00*	3.939.760,00	*DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON*
	2.13.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)*		*0.00*	*1.00*	*1.00*	25.000.000,00	*(dinas pemberdayaan masyarakat dan pekon, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*1.00*	30.250.000,00	*DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON*
	2.13.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)*		*12.00*	*12.00*	*12.00*	30.390.000,00	*(dinas pemberdayaan masyarakat dan pekon, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*12.00*	39.390.000,00	*DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON*
	2.13.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						15.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			15.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		*10.00*	*10.00*	*10.00*		*(Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon, KAB. PESISIR BARAT)*				*aparatur*	*10.00*		*DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON*
	2.13.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu						13.200.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			13.310.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)		*11.00*	*11.00*	*11.00*		*(dinas pemberdayaan masyarakat dan pekon, KAB. PESISIR BARAT)*				*aparatur*	*11.00*		*DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON*
	2.13.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						212.250.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			242.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*12.00*	*12.00*	*12.00*		*(dinas pemberdayaan masyarakat dan pekon, KAB. PESISIR BARAT)*				*aparatur*	*12.00*		*DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON*
	2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						36.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			72.000.000,00	
			Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja (%)				*100*		*(Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON*
	2.13.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						36.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			72.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		*6.00*	*2.00*	*3.00*		*(dinas pemberdayaan masyarakat dan pekon, KAB. PESISIR BARAT)*				*aparatur*	*4.00*		*DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON*
	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						154.534.804,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			153.554.000,00	
			Persentase Pemenuhan Layanan Pendukung (%)				*100*		*(Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON*
	2.13.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						39.204.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			39.204.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*12.00*	*12.00*	*12.00*		*(dinas pemberdayaan masyarakat dan pekon, KAB. PESISIR BARAT)*				*aparatur*	*12.00*		*DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)*		*12.00*	*12.00*	*12.00*	105.000.000,00	*(dinas pemberdayaan masyarakat dan pekon, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*aparatur*	*12.00*	105.000.000,00	*DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON*
	2.13.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)*		*12.00*	*12.00*	*12.00*	10.330.804,00	*(dinas pemberdayaan masyarakat dan pekon, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*aparatur*	*12.00*	9.350.000,00	*DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON*
	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah yang dalam kondisi baik (%)*				*100*	78.358.500,00	*(Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*100*	89.358.500,00	*DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON*
	2.13.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)*		*2.00*	*2.00*	*2.00*	67.329.500,00	*(dinas pemberdayaan masyarakat dan pekon, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*aparatur*	*2.00*	71.329.500,00	*DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON*
	2.13.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)*		*12.00*	*12.00*	*12.00*	11.029.000,00	*(dinas pemberdayaan masyarakat dan pekon, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*aparatur*	*12.00*	18.029.000,00	*DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON*
2.	**2.13.02**	**PROGRAM PENATAAN DESA**	***Jumlah Desa berkembang (%)***				***100***	**1.302.601.300,00**			**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas**			**1.302.601.300,00**	***DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON***
	2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa						1.302.601.300,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.302.601.300,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			jumlah desa berkembang (%)				*92.50*		*(Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon, KAB. PESISIR BARAT)*					*92.50*		*DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON*
	2.13.02.2.01.06	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	*Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi (Unit)*		*1*	*1*	*1.00*	1.302.601.300,00	*(dinas pemberdayaan ,masyarakat dan pekon, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Masyarakat*	*1.00*	1.302.601.300,00	*DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON*
3.	**2.13.04**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	***cangkupan pekon tertib administrasi (Persentase)***				***100%***	**1.750.000.000,00**			**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas**			**2.402.000.000,00**	***DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON***
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	*Cangkupan Pekon Tertib Administrasi (%)*				*100*	1.750.000.000,00	*(Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*100*	2.402.000.000,00	*DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON*
	2.13.04.2.01.01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	*Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (Dokumen)*		*12.00*	*12.00*	*12.00*	-	*(Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Masyarakat*	*12.00*	1.182.693.480,00	*DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON*
	2.13.04.2.01.02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*116.00*	330.500.000,00	*(dinas pemberdayaan masyarakat dan pekon, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*masyarakat*	*116.00*	180.000.000,00	*DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON*
	2.13.04.2.01.03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (Dokumen)*		*116.00*	*0.00*	*116.00*	300.500.000,00	*(dinas pemberdayaan Masyarkat dan pekon, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Masyarakat*	*116.00*	135.000.000,00	*DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.04.2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa (Dokumen)*		*4.00*	*116.00*	*116.00*	356.000.000,00	*(dinas pemberdayaan masyarakat dan pekon, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*masyarakat*	*116.00*	196.000.000,00	*DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON*
	2.13.04.2.01.08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa (Dokumen)*		*84.00*	*0.00*	*27.00*	306.000.000,00	*(Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*masyarakat*	*27.00*	280.000.000,00	*DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON*
	2.13.04.2.01.10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	*Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*116.00*	185.000.000,00	*(dinas pemberdayaan Masyarakat dan pekon, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Masyarakat*	*116.00*	156.306.520,00	*DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON*
	2.13.04.2.01.13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*116*	272.000.000,00	*(dinas pemberdayaan masyarakat dan pekon, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Masyarakat*	*116*	272.000.000,00	*DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON*
4.	**2.13.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	***Cangkupan Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat (%)***				***100***	**2.823.073.826,00**			**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas**			**2.823.073.826,00**	***DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON***
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Cangkupan Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat (%)*				*92.50*	2.823.073.826,00	*(Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*92.50*	2.823.073.826,00	*DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)*		*900.00*	*900.00*	*900.00*	1.230.000.000,00	*(dinas pemberdayaan masyarakat dan pekon, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*masyarakat*	*900.00*	1.230.000.000,00	*DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON*
	2.13.05.2.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)*		*0*	*0*	*12.00*	253.073.826,00	*(dinas pemberdayaan masyarakat dan pekon, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*masyarakat*	*12.00*	253.073.826,00	*DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON*
	2.13.05.2.01.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (Laporan)*		*0*	*0*	*12.00*	240.000.000,00	*(dinas pemberdayaan masyarakat dan pekon, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*masyarakat*	*12.00*	240.000.000,00	*DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON*
	2.13.05.2.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Dokumen)*		*12*	*12*	*12.00*	1.100.000.000,00	*(dinas pemberdayaan masyarakat dan pekon, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Masyarakat*	*12.00*	1.100.000.000,00	*DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON*
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**						**9.306.952.620,00**							**5.506.000,00**	
1.	**2.14.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)***	***92,5***			***92.50***	**4.556.653.452,00**			**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas**			**5.506.000,00**	***DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA***

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						22.824.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			5.506.000,00	
			Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu (%)				*100*		*(krui pesisir barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
	2.14.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						1.400.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.400.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(krui, pesisir barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*2*		*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
	2.14.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						4.106.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			4.106.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(krui pesisir barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*1.00*		*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
	2.14.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						4.106.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			-	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(krui pesisir barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*1*		*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
	2.14.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						4.106.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			-	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(krui pesisir barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*1*		*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*1*	4.106.000,00	*(krui pesisir barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*1*	-	*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
	2.14.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*2*	5.000.000,00	*(krui pesisir barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*2*	-	*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
	2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu (%)*				*100*	3.941.250.252,00	*(krui pesisir barat, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*100*	-	*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
	2.14.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)*		*0.00*	*0.00*	*14*	3.935.750.252,00	*(krui pesisir barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Pegawai*	*14*	-	*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
	2.14.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*1*	2.500.000,00	*(krui pesisir barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*1*	-	*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						2.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			-	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*18*		*(krui pesisir barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*18*		*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
	2.14.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						1.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			-	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(krui pesisir barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*1*		*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
	2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						277.591.200,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			-	
			Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja (%)				*100*		*(Krui Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
	2.14.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						4.225.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			-	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*			*(krui pesisir barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*0*		*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
	2.14.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						25.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			-	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(krui pesisir barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*1*		*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)*		*0*	*0*		25.366.200,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			-	*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
	2.14.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)*		*0*	*0*		12.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			-	*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
	2.14.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)*		*0*	*0*		11.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			-	*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
	2.14.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)*		*0*	*0*		200.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Pemerintah Daerah*		-	*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
	2.14.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja (%)*				*100*	15.000.000,00	*(Krui Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*100*	-	*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)*		*0.00*	*0.00*	*1*	15.000.000,00	*(Krui Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*OPD*	*1*	-	*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
	2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemenuhan Layanan Pendukung (%)*				*100*	94.888.000,00	*(Krui Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*100*	-	*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
	2.14.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)*		*0*	*0*		19.200.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			-	*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
	2.14.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)*		*0.00*	*0.00*		72.000.000,00	*(Krui Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*0.00*	-	*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
	2.14.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)*		*0.00*	*0.00*		3.688.000,00	*(Krui Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*0.00*	-	*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah yang dalam kondisi baik (%)*				*100*	205.100.000,00	*(Krui Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*100*	-	*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
	2.14.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)*		*0*	*0*		198.100.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			-	*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
	2.14.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)*		*0*	*0*		7.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			-	*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
2.	**2.14.02**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	***Laju Pertumbuhan Penduduk (%)***				***0.95***	**113.638.330,00**			**Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing**	**Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**-**	***DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA***
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	*Persentase Terbentuknya SSK di SMP, SLTA (SMP 1 Pesisir Tengah, SMP 2 Pesisir Tengah, SMK Ngambur, SMA Pesisir Selatan, SMP 18 Karya Penggawa) (%)*				*100*	25.000.000,00	*(Krui Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia		*100*	-	*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase Terbinanya SSK di SMP/SLTA (SMA Pesisir Tengah, SMA Karya Penggawa, SMP Marang Pesisir Selatan, SMP 1 Pesisir Tengah, SMP 2 Pesisir Tengah) *(%)*				*100*		*(krui pesisir barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
	2.14.02.2.01.05	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal						12.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	
			Jumlah Dokumen Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal *(Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*5*		*(KAB. PESISIR BARAT)*				*OPD, Sekolah*	*5*		*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
	2.14.02.2.01.09	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal						13.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal *(Satuan Pendidikan)*		*0.00*	*0.00*	*5*						*OPD*	*5*		*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						88.638.330,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	
			Persentase Kecamatan yang mendapatkan Data Kependudukan *(%)*				*100*		*(Krui Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
			Persentase Rumah Data Kependudukan *(%)*				*100*		*(Krui Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
			Persentase yang mendapatkan data dan informasi keluarga *(%)*				*100*		*(Krui Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase Kader IMP dan Faskes yang melaksanakan pemutakhiran data kependudukan pada New Siga (%)				*100*		*(Krui Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
			Persentase yang mendapatkan data dan informasi keluarga (%)				*100*		*(Krui Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
	2.14.02.2.02.02	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan						14.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	
			Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*11*						*11 Kecamatan*	*11*		*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
	2.14.02.2.02.08	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain						15.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					-	
			Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang Dibentuk (Unit)		*0.00*	*0.00*	*11*						*Peserta*	*11*		*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
	2.14.02.2.02.09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga						15.638.330,00		DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB					-	
			Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*11*						*OPD, Peserta Kegiatan*	*11*		*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
	2.14.02.2.02.11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga						15.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					-	
			Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*11*						*OPD*	*11*		*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
	2.14.02.2.02.12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga						14.000.000,00		DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB					-	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*11*						*Kampung KB*	*11*		*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
	2.14.02.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	*Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB (Dokumen)*		*0*	*0*		15.000.000,00		DAK Non Fisik-BOKKB-BO KB			*OPD*		-	*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
3.	**2.14.03**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	***Total Fertility Rate (Angka)***				***2.17***	**4.338.479.550,00**			**Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing**	**Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**-**	***DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA***
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	*Persentase Pengetahuan Masyarakat tentang Program BANGGA KENCANA (%)*				*100*	1.627.500.000,00	*(Krui Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia		*100*	-	*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
			Persentase Percepatan Penurunan Stunting (%)				*100*		*(Krui Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
			Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat tentang Program KKBPK (%)				*100*		*(Krui Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
			Ditemukannya Sasaran dan Penyebab Kasus Stunting dan Rencana Tindak Lanjut dari Tim Pakar (%)				*100*		*(Krui Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.03.2.01.01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	*Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja (Organisasi)*		*0.00*	*0.00*	*11*	320.000.000,00	*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB			*OPD*	*11*	-	*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
	2.14.03.2.01.04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	*Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*11*	300.000.000,00	*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	*OPD*	*11*	-	*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
	2.14.03.2.01.06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	*Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) (Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*11*	286.000.000,00	*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	*OPD*	*11*	-	*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
	2.14.03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	*Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*10*	481.500.000,00	*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	*Peserta Penyuluhan*	*10*	-	*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
	2.14.03.2.01.08	Pengendalian Program KKBPK	*Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK (Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*11*	240.000.000,00	*(Kabupaten pesisir barat, KAB. PESISIR BARAT)*	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	*Masyarakat*	*11*	-	*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)						540.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	
			Persentase Kader IMP yang mendapatkan pembinaan serta dana pendukung (%)				*100*		*(Krui Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
	2.14.03.2.02.01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB						304.000.000,00		DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB (Organisasi)		*0.00*	*0.00*	*76*		*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Masyarakat*	*76*		*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
	2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)						236.000.000,00		DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	
			Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (Orang)		*0.00*	*0.00*	*118*		*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Kader IMP*	*118*		*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota						1.382.979.550,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	
			Tersedianya Alat dan Obat Kontrasepsi di 12 Fasyankes (%)				*100*		*(Krui Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
			Terlayaninya Akseptor MKJP di 11 Kecamatan melalui Kegiatan Pelayanan KB dengan Alat Kontrasepsi yang tersedia (%)				*100*		*(Krui Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan KB dengan adanya VTP Kit, IUD Kit dan Implant Kit yang tersedia di 9 Fasyankes (%)				*100*		*(Krui Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat tentang Program Keluarga Berencana untuk Pelayanan KB yang berkualitas serta pencatatan dan pelaporan form F2KB dari Faskes/Klinik (%)				*100*		*(Krui Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
			Terlayaninya Akseptor di 4 Pekon Daerah Terpencil (%)				*100*		*(Krui Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
	2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya						206.890.550,00		DAK Non Fisik-BOKKB-BO KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia		-		
			Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12*						*Tenaga Pelayanan Umum*	*12*		*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
	2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)						529.948.000,00		DAK Non Fisik-BOKKB-BO KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia		-		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Orang)		*0.00*	*0.00*	*1000*		*(KAB. PESISIR BARAT)*				*OPD, Peserta Pelayanan*	*1000*		*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
	2.14.03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB						246.913.000,00		DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia		-		
			Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB (Unit)		*0.00*	*0.00*	*9*						*Faskes*	*9*		*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
	2.14.03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya						270.000.000,00		DAK Non Fisik-BOKKB-BO KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia		-		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*11*		*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Bantuan Transport Peserta*	*11*		*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.03.2.03.11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak						129.228.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	
			Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*4.00*		*(Kec. Bangkunat (Pekon way haru, way tias), Kec. Lemong (Pedukuhan Lintik sukamulya, Pedukuhan rindu alam penengahan), KAB. PESISIR BARAT)*				*Masyarakat Daerah Terpencil Kec. Bangkunat (Pekon way haru, way tias), Kec. Lemong (Pedukuhan Lintik sukamulya, Pedukuhan rindu alam penengahan)*	*4*		*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB						788.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	
			Meningkatnya Pengetahuan Kader POKTAN dan POKJA di Kampung Keluarga Berkualitas dalam rangka mendukung program BANGGA KENCANA dan Percepatan Penurunan Stunting (%)				*100*		*(Krui Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
			Meningkatnya Pembangunan Lintas Sektor di Kampung Keluarga Berkualitas dalam rangka percepatan penurunan stunting dan Program BANGGA KENCANA (%)				*100*		*(Krui Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
			Meningkatnya Pembangunan Lintas Sektor di Kampung Keluarga Berkualitas dalam rangka percepatan penurunan stunting dan Program BANGGA KENCANA (%)				*100*		*(Krui Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
	2.14.03.2.04.01	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB						434.000.000,00		DAK Non Fisik-BOKKB-BO KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB (Organisasi)		*0.00*	*0.00*	*28*						*Peserta*	*28*		*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
	2.14.03.2.04.02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB						18.000.000,00		DAK Non Fisik-BOKKB-BO KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*3*		*(KAB. PESISIR BARAT)*				*Peserta*	*3*		*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
	2.14.03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB						336.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	
			Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB (Kampung)		*0.00*	*0.00*	*28*						*OPD, Peserta Kegiatan*	*28*		*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
4.	**2.14.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**						**298.181.288,00**			**Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing**	**Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**-**	
			Indeks Pembangunan Keluarga (Angka)				***61.00***									***DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA***
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga						214.781.288,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	
			Meningkatnya Pengetahuan Kader GenRe dan BKB-HI dalam melakukan KIE dalam rangka percepatan penurunan stunting (%)				*100*		*(Krui Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
			Meningkatnya Pengetahuan Kader BKB dalam melakukan KIE dalam rangka percepatan penurunan stunting (%)				*100*		*(Krui Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
			Meningkatnya Pengetahuan Kader UPPKA dalam Pelaksanaan Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga dalam rangka percepatan penurunan stunting (%)				*100*		*(Krui Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
			Meningkatnya Kinerja Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam rangka percepatan penurunan stunting (%)				*100*		*(Krui Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Meningkatnya Sumber Daya Manusia pada Kelompok BKB dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting (%)				*100*		*(Krui Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
	2.14.04.2.01.01	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)					40.400.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	
			Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk (Kelompok)		*0.00*	*0.00*	*22*		*(Krui Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*			*Forum Gendre, Kader BKB-HI*	*22*		*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
	2.14.04.2.01.02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)						40.000.000,00		DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	
			Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Unit)		*0*	*0*							*Kelompok BKB*			*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
	2.14.04.2.01.04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)						50.181.288,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	
			Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Orang)		*0.00*	*0.00*	*88*		*(Krui pesisir barat, KAB. PESISIR BARAT)*			*Kader UPPKA*	*88*		*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
	2.14.04.2.01.05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)						44.200.000,00		DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB					-	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Orang)		*0.00*	*0.00*	*42*		*(Krui Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Tim Pendamping Keluarga*	*42*		*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
	2.14.04.2.01.06	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)						40.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	
			Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Kelompok)		*0.00*	*0.00*	*11*		*(Krui Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Kelompok BKB dan Tim TPPS Kabupaten*	*11*		*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga						83.400.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	
			Persentase Pekon, Kecamatan yang mengikuti Lomba Kesra, serta Kader Perempuan yang mendapat Pembinaan P3KSS dan GSI (%)				*100*		*(Krui Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
	2.14.04.2.02.03	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)						40.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Organisasi)		*0.00*	*0.00*	*11*		*(Krui Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Pekon dan Kecamatan*	*11*		*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
	2.14.04.2.02.04	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja						43.400.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja (Laporan)		*0*	*0*							*Kader Perempuan*			*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**						**6.201.111.894,00**							**6.201.112.094,00**	
1.	**2.15.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)***				***92,50***	**2.608.051.200,00**			**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas**			**2.608.051.200,00**	***DINAS PERHUBUNGAN***
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu (%)*				*100*	6.400.000,00	*(kantor dinas perhubungan, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*100*	6.400.000,00	*DINAS PERHUBUNGAN*
	2.15.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)*		*2.00*	*2.00*	*2.00*	1.400.000,00	*(kantor dinas perhubungan, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*2.00*	1.400.000,00	*DINAS PERHUBUNGAN*
	2.15.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)*		*2.00*	*2.00*	*2.00*	5.000.000,00	*(Kantor Dinas Perhubungan, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*2.00*	5.000.000,00	*DINAS PERHUBUNGAN*
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu (%)*				*100*	2.090.391.200,00	*(Kantor Dinas Perhubungan, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*100%*	2.090.391.200,00	*DINAS PERHUBUNGAN*
	2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)*		*14*	*14*	*14*	2.084.891.200,00	*(kantor dinas perhubungan, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*14*	2.084.891.200,00	*DINAS PERHUBUNGAN*
	2.15.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						2.500.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		*1*	*1*	*1*		*(kantor dinas perhubungan, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*DINAS PERHUBUNGAN*
	2.15.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						2.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		*2*	*2*	*2*		*(kantor dinas perhubungan, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*2*		*DINAS PERHUBUNGAN*
	2.15.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						1.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)		*1*	*1*	*1*		*(kantor dinas perhubungan, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*DINAS PERHUBUNGAN*
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						55.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			55.000.000,00	
			Persentase Aparatur yang Berkinerja Baik (%)				*100*		*(Kantor Dinas Perhubungan, KAB. PESISIR BARAT)*					*100%*		*DINAS PERHUBUNGAN*
	2.15.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						55.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			55.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)		*6*	*6*	*6*		*(kantor dinas perhubungan, KAB. PESISIR BARAT)*				*aparatur*	*6*		*DINAS PERHUBUNGAN*
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						170.960.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			170.960.000,00	
			Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung kinerja (%)				*100*		*(Kantor Dinas Perhubungan, KAB. PESISIR BARAT)*					*100%*		*DINAS PERHUBUNGAN*
	2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						3.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			3.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		*12*	*12*	*12*		*(kantor dinas perhubungan, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*DINAS PERHUBUNGAN*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						25.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			25.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		*1*	*1*	*1*		*(kantor dinas perhubungan, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*DINAS PERHUBUNGAN*
	2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						25.130.800,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			25.130.800,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*12*	*12*	*12*		*(kantor dinas perhubungan, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*DINAS PERHUBUNGAN*
	2.15.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						12.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			12.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		*10*	*10*	*10*		*(kantor dinas perhubungan, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*10*		*DINAS PERHUBUNGAN*
	2.15.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu						11.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			11.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)		*11*	*11*	*11*		*(kantor dinas perhubungan, KAB. PESISIR BARAT)*				*aparatur*	*11*		*DINAS PERHUBUNGAN*
	2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						94.829.200,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			94.829.200,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(kantor dinas perhubungan, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*DINAS PERHUBUNGAN*
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						117.300.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			117.300.000,00	
			Persentase Pemenuhan Layanan Pendukung (%)				*100*		*(Kantor Dinas Perhubungan, KAB. PESISIR BARAT)*					*100%*		*DINAS PERHUBUNGAN*
	2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						19.800.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			19.800.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(kantor dinas perhubungan, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*DINAS PERHUBUNGAN*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)*		*6*	*6*	*6*	92.500.000,00	*(kantor dinas perhubungan, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*6*	92.500.000,00	*DINAS PERHUBUNGAN*
	2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)*		*12*	*12*	*12*	5.000.000,00	*(kantor dinas perhubungan, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*12*	5.000.000,00	*DINAS PERHUBUNGAN*
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah yang Dalam Kondisi Baik (%)*				*100*	168.000.000,00	*(Kantor Dinas Perhubungan, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*100%*	168.000.000,00	*DINAS PERHUBUNGAN*
	2.15.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)*		*5*	*5*	*5*	163.000.000,00	*(kantor dinas perhubungan, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*5*	163.000.000,00	*DINAS PERHUBUNGAN*
	2.15.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)*		*1*	*1*	*1*	5.000.000,00	*(kantor dinas perhubungan, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*1*	5.000.000,00	*DINAS PERHUBUNGAN*
2.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	***Persentase Pelayanan Angkutan Darat (%)***	***72,5***			***72,50***	**2.940.519.400,00**			**Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar**	**Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan**			**2.940.519.600,00**	***DINAS PERHUBUNGAN***
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	*persentase peningkatan Jumlah perlengkapan jalan (%)*				*10*	993.920.000,00	*(krui, pesisir barat, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan		*10*	993.920.000,00	*DINAS PERHUBUNGAN*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	*Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)*		*20*	*20*	*20*	120.000.000,00	*(seluruh kecamatan pesisir barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	*Masyarakat*	*20*	120.000.000,00	*DINAS PERHUBUNGAN*
	2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	*Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit)*		*20*	*20*	*20*	873.920.000,00	*(seluruh kecamatan pesisir barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	*Masyarakat*	*20*	873.920.000,00	*DINAS PERHUBUNGAN*
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	*Persentase layanan angkutan darat (%)*				*100*	151.599.000,00	*(Kabupaten Pesisit Barat, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan		*100*	151.599.600,00	*DINAS PERHUBUNGAN*
	2.15.02.2.06.01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)*		*3*	*3*	*3*	151.599.000,00	*(seluruh kecamatan pesisir barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	*Masyarakat*	*3*	151.599.600,00	*DINAS PERHUBUNGAN*
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Transportasi Pedesaan (Unit)*				*7*	295.000.400,00	*(Seluruh Kecamatan, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan		*7*	295.000.000,00	*DINAS PERHUBUNGAN*
	2.15.02.2.09.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)*		*7*	*7*	*7*	295.000.400,00	*(seluruh kecamatan pesisir barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	*Masyarakat*	*7*	295.000.000,00	*DINAS PERHUBUNGAN*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.2.16	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						1.500.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			1.500.000.000,00	
			Jumlah Penerima Bantuan Sosial Angkutan Orang (Orang)				*1140*		*(Seluruh Kecamatan, KAB. PESISIR BARAT)*					*1140 Orang*		*DINAS PERHUBUNGAN*
	2.15.02.2.16.03	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						1.500.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			1.500.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)		*1140*	*1140*	*1140*		*(seluruh kecamatan pesisir barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*Masyarakat*	*1140*		*DINAS PERHUBUNGAN*
3.	**2.15.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**						**652.541.294,00**			**Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar**	**Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan**			**652.541.294,00**	
			Persentase Cakupan Wilayah yang terlayani Angkutan Laut (%)				***60,00***									***DINAS PERHUBUNGAN***
	2.15.03.2.06	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota						652.541.294,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			652.541.294,00	
			Jumlah Angkutan Laut (Unit)				*5*		*(Seluruh Kecamatan, KAB. PESISIR BARAT)*					*5*		*DINAS PERHUBUNGAN*
	2.15.03.2.06.02	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota						652.541.294,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			652.541.294,00	
			Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)		*5*	*5*	*5*		*(seluruh kecamatan pesisir barat, KAB. PESISIR BARAT)*			*Masyarakat*	*5*			*DINAS PERHUBUNGAN*
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**						**8.846.019.769,00**							**8.846.019.769,00**	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**2.16.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**5.002.041.300,00**			**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas**			**5.002.041.300,00**	
			Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	***92,5***			***92,5***									***DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN***
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						6.400.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			6.400.000,00	
			Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu (%)				*92.5*		*(Kantor Diskominfotiksan Kab. Pesisir barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*92.5*		*DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN*
	2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						1.400.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.400.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)		*2.00*	*2.00*	*2.00*		*(Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*2.00*		*DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN*
	2.16.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						5.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		*2.00*	*2.00*	*2.00*		*(Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*2.00*		*DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN*
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.598.901.700,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.598.901.700,00	
			Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu (%)				*92.5*		*(Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*92.5*		*DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN*
	2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.595.705.300,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.595.705.300,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		*15.00*	*15.00*	*15.00*		*(Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*15.00*		*DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						1.200.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.200.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		*2*	*2.00*	*2*		*(Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*2*		*DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN*
	2.16.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						1.350.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.350.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		*2.00*	*2.00*	*2.00*		*(Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*2.00*		*DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN*
	2.16.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						646.400,00		Dana Otonomi Khusus-Kabupaten/Kota pada Provinsi Papua Barat-Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			646.400,00	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)		*2.00*	*2.00*	*2.00*		*(Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*2.00*		*DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN*
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						1.796.885.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.796.885.600,00	
			Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja (%)				*92.5*		*(Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*92.5*		*DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN*
	2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						67.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			67.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		*2.00*	*3.00*	*3.00*		*(Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*aparatur*	*3.00*		*DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN*
	2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						25.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			25.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1.00*		*DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						259.348.600,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			259.348.600,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*4.00*	*4.00*	*4.00*		*(Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*4.00*		*DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN*
	2.16.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						1.212.960.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.212.960.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1.00*		*DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN*
	2.16.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu						33.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			33.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)		*11*	*11*	*11*		*(Kab Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*11*		*DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN*
	2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						199.577.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			199.577.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*100.00*	*100.00*	*100.00*		*(Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*100.00*		*DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN*
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						198.298.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			198.298.000,00	
			Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja (%)				*92.5*		*(Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*92.5*		*DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN*
	2.16.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						198.298.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			198.298.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		*0.00*	*34.00*	*24.00*		*(Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*24.00*		*DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemenuhan Layanan Pendukung (%)*				*92.5*	1.305.556.000,00	*(Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*92.5*	1.305.556.000,00	*DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN*
	2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)*		*12.00*	*12.00*	*12.00*	1.300.000.000,00	*(Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*12.00*	1.300.000.000,00	*DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN*
	2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)*		*12.00*	*12.00*	*12*	5.556.000,00	*(Kab. Pesisir Tengah, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*12*	5.556.000,00	*DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN*
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Miliki Daerah yang dalam Koindisi Baik (%)*				*92.5*	96.000.000,00	*(Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*92.5*	96.000.000,00	*DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN*
	2.16.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)*		*2.00*	*2.00*	*2.00*	52.500.000,00	*(Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*aparatur*	*2.00*	52.500.000,00	*DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN*
	2.16.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)*		*3.00*	*3.00*	*3.00*	37.500.000,00	*(Kab. Pesisir Barat., KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*3.00*	37.500.000,00	*DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)*		*12.00*	*12.00*	*12.00*	6.000.000,00	*(Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*12.00*	6.000.000,00	*DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN*
2.	**2.16.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	***Persentase Peningkatan Desiminasi Informasi dan Komunikasi Publik (%)***				***80***	**2.555.591.900,00**			**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas**			**2.555.591.900,00**	***DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN***
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Peningkatan Desiminasi Informasi dan Komunikasi Publik (%)*				*80*	2.555.591.900,00	*(Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*80*	2.555.591.900,00	*DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN*
	2.16.02.2.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	*Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik (Dokumen)*		*12.00*	*12.00*	*12.00*	122.677.500,00	*(Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Masyarakat*	*12.00*	122.677.500,00	*DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN*
	2.16.02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik (Dokumen)*		*12.00*	*12.00*	*12.00*	370.803.000,00	*(Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Masyarakat*	*12.00*	370.803.000,00	*DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN*
	2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik (Dokumen)*		*12.00*	*12.00*	*12.00*	72.800.000,00	*(Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Masyarakat*	*12.00*	72.800.000,00	*DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik* *(Dokumen)*		*2.00*	*2.00*	*2.00*	730.299.400,00	*(Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Masyarakat*	*2.00*	730.299.400,00	*DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN*
	2.16.02.2.01.07	Layanan Hubungan Media	*Jumlah Layanan Hubungan Media (Layanan)*		*100.00*	*100.00*	*100.00*	1.259.012.000,00	*(Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Masyarakat*	*100.00*	1.259.012.000,00	*DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN*
3.	**2.16.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	***Persentase Peningkatan Layanan Informasi dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) (%)***				***82,5***	**1.288.386.569,00**			**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas**			**1.288.386.569,00**	***DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN***
	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*cakupan penyediaan informasi digital di lingkup pemerintah daerah (%)*				*82.5*	104.192.569,00	*(Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*82.5*	104.192.569,00	*DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN*
	2.16.03.2.01.01	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota (Domain)*		*13.00*	*13.00*	*13.00*	7.200.000,00	*(Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Masyarakat*	*13.00*	7.200.000,00	*DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN*
	2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	*Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah (Unit)*		*1.00*	*1.00*	*1.00*	96.992.569,00	*(Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Masyarakat*	*1.00*	96.992.569,00	*DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Layanan Pemerintah Secara digital (%)*				*82.5*	1.184.194.000,00	*(Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*82.5*	1.184.194.000,00	*DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN*
	2.16.03.2.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)*		*1*	*1*	*1*	30.000.000,00	*(Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Masyarakat*	*1*	30.000.000,00	*DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN*
	2.16.03.2.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	*Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola (Unit)*		*4.00*	*5.00*	*6.00*	258.753.500,00	*(Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Masyarakat*	*6.00*	258.753.500,00	*DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN*
	2.16.03.2.02.06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	*Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik (Perangkat Daerah)*		*39.00*	*39.00*	*39.00*	396.162.200,00	*(Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*masyarakat*	*39.00*	396.162.200,00	*DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN*
	2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	*Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan (Unit)*		*2.00*	*2.00*	*2.00*	204.000.000,00	*(Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*masyarakat*	*2.00*	204.000.000,00	*DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN*
	2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	*Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah (Dokumen)*		*2.00*	*2.00*	*2.00*	59.387.300,00	*(Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*2.00*	59.387.300,00	*DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.03.2.02.12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	*Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE (Dokumen)*		*2*	*2*	*2*	235.891.000,00	*(Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*masyarakat*	*2*	235.891.000,00	*DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN*
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**						**3.731.353.336,00**							**-**	
1.	**2.17.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)***				***92,50***	**2.702.155.039,00**			**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas**			**-**	***DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN***
	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu (%)*				*100*	10.000.000,00	*(Kantor Diskopdag Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*100*	-	*DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN*
	2.17.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)*		*2*	*2*	*2.00*	5.000.000,00	*(Kantor Diskopdag, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*0.00*	-	*DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN*
	2.17.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*2.00*	5.000.000,00	*(Kantor Diskopdag, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*0.00*	-	*DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN*
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu (%)*				*100*	1.756.316.600,00	*(Kantor Diskopdag, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*100*	-	*DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)*		*12*	*12*	*12.00*	1.749.316.600,00	*(Kantor Diskopdag, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*12*	-	*DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN*
	2.17.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)*		*1*	*1*	*1.00*	2.500.000,00	*(Kantor Diskopdag, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*1*	-	*DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN*
	2.17.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)*		*18*	*18*	*18.00*	2.500.000,00	*(Kantor Diskopdag, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*18*	-	*DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN*
	2.17.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)*		*1*	*1*	*1.00*	2.000.000,00	*(Kantor Diskopdag, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*1*	-	*DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN*
	2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase aparatur yg berkinerja baik (%)*				*100*	50.000.000,00	*(Nasional, Luar Wilayah)*		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*100*	-	*DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN*
	2.17.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)*		*12*	*12*	*12.00*	50.000.000,00	*(Nasional, Luar Wilayah)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*12*	-	*DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN*
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						423.338.439,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			-	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja (%)				*100*		*(Kantor Diskopdag, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN*
	2.17.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						2.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			-	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		*1*	*1*	*1.00*		*(Kantor Diskopdag, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN*
	2.17.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						25.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			-	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		*1*	*1*	*1.00*		*(Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN*
	2.17.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						65.338.439,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			-	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*10*	*10*	*10.00*		*(Kantor Diskopdag, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*10*		*DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN*
	2.17.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						20.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			-	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		*10*	*10*	*20.00*		*(Kantor Diskopdag, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*20*		*DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN*
	2.17.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu						11.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			-	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)		*11*	*11*	*11.00*		*(Kantor Diskopdag, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*11*		*DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN*
	2.17.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						300.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			-	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*24*		*(Luar Wilayah)*				*Aparatur*	*0.00*		*DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja (%)*				*100*	45.000.000,00	*(Kantor Diskopdag, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*100*	-	*DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN*
	2.17.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)*		*6.00*	*6.00*	*6.00*	45.000.000,00	*(Kantor Diskodag, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*6.00*	-	*DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN*
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemenuhan Layanan Pendukung (%)*				*100*	99.500.000,00	*(Kantor Diskopdag, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*100*	-	*DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN*
	2.17.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)*		*12*	*12*	*12.00*	25.000.000,00	*(Kantor Diskopdag, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*12*	-	*DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN*
	2.17.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)*		*12*	*12*	*12.00*	72.000.000,00	*(Kantor Diskopdag, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*12*	-	*DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN*
	2.17.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)*		*12*	*12*	*12.00*	2.500.000,00	*(Kantor Diskopdag, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*12*	-	*DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN*
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						318.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			-	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase Barang Milik Daerah yang dalam kondisi baik (%)				*100*		*(Kantor Diskopdag, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN*
	2.17.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						168.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			-	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		*6*	*6*	*10.00*		*(Kantor Diskodag, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*10*		*DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN*
	2.17.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						150.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			-	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*2*	*2*	*2.00*		*(Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*2*		*DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN*
2.	**2.17.03**	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**						**93.545.599,00**			**Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**	**Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat**			**-**	
			Persentase Koperasi Aktif (%)				***52,5***									***DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN***
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota						93.545.599,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			-	
			Persentase Koperasi yang diawasi (%)				*100*		*(Seluruh Kecamatan, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN*
	2.17.03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota						93.545.599,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			-	
			Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota (Unit Usaha)		*30*	*30*	*30.00*		*(11 kecamatan, KAB. PESISIR BARAT)*				*Masyarakat*	*30*		*DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	**2.17.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**						**532.707.739,00**			**Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**	**Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat**			**-**	
			Persentase Pengurus Koperasi Berkompeten (%)				***55***									***DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN***
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota						532.707.739,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			-	
			Persentase Koperasi dan Pelaku UKM yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas (%)				*100*		*(Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN*
	2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi						532.707.739,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			-	
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (Orang)		*100*	*100*	*100.00*		*(Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Masyarakat*	*100*		*DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN*
4.	**2.17.07**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**						**402.944.959,00**			**Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**	**Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat**			**-**	
			Kontribusi UMKM terhadap PDRB (%)				***2,08***									***DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN***
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan						402.944.959,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			-	
			Persentase Usaha Mikro dan Kecil yang Mendapatkan Kemitraan, Kemudahan dan Penguatan Kelembagaan, serta terdata di database (%)				*100*		*(Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN*
	2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro						200.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			-	
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro (Unit Usaha)		*1*	*1*	*1.00*		*(Kantor Diskopdag, KAB. PESISIR BARAT)*				*Masyarakat*	*1*		*DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.07.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	*Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro (Orang)*		*50*	*50*	*50.00*	202.944.959,00	*(Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	*Masyarakat*	*50*	-	*DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN*
	2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**						**5.527.740.677,00**							**2.200.994.390,00**	
1.	**2.18.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)***	***92,5***			***92,50***	**2.803.476.742,00**			**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas**			**2.200.994.390,00**	***DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU***
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu (%)*				*100*	10.400.000,00	*(Kantor DPMPTSP, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*100*	5.400.000,00	*DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU*
	2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)*		*2*	*2*	*2*	5.400.000,00	*(Kantor DPMPTSP, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*2*	5.400.000,00	*DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU*
	2.18.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)*		*2*	*2*	*2*	5.000.000,00	*(Dinas DPMPTSP, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*APARATUR*	*2*	-	*DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU*
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.994.494.900,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.195.594.390,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase Ketertiban Administrasi Keuangan (%)				*100*		*(Kantor DPMPTSP, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU*
	2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.988.494.900,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.187.344.390,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		*14*	*14*	*14*		*(Kantor DPMPTSP, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*14*		*DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU*
	2.18.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						2.500.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.750.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		*1*	*1*	*1*		*(Kantor DPMPTSP, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU*
	2.18.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						2.500.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.750.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		*18*	*18*	*18*		*(Kantor DPMPTSP, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*18*		*DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU*
	2.18.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						1.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.750.000,00	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)		*1*	*1*	*1*		*(Kantor DPMPTSP, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU*
	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						50.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			-	
			Terciptanya peningkatan SDM yang berdaya saing (%)				*100*		*(Provinsi Lampung, Luar Wilayah)*					*100*		*DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU*
	2.18.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						50.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)		*2.00*	*2.00*	*2.00*		*(sebagian wilayah indonesia, Luar Wilayah)*				*Aparatur*	*2.00*		*DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU*
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja (%)*				*100*	563.481.842,00	*(Kantor DPMPTSP, KAB. PESISIR BARAT)*			Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*100*	-	*DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU*
	2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)*		*0.00*	*1*	*1*	25.000.000,00	*(KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*Masyarakat*	*1*	-	*DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU*
	2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)*		*12*	*12*	*12*	65.481.842,00	*(KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*Aparatur*	*12*	-	*DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU*
	2.18.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)*		*10*	*10*	*10*	12.000.000,00	*(KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*Aparatur*	*10*	-	*DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU*
	2.18.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)*		*11*	*11*	*11*	11.000.000,00	*(KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*Aparatur dan Masyarakat*	*11*	-	*DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU*
	2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)*		*0.00*	*12*	*12*	450.000.000,00	*(KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*Aparatur*	*12*	-	*DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU*
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja (%)*				*100*	45.000.000,00	*(Kantor DPMPTSP, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*	-	*DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)*		*0.00*	*2*	*3*	45.000.000,00	*(KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*Aparatur*	*3*	-	*DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU*
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase permenuhan layanan pendukung (%)*				*100*	62.500.000,00	*(Kantor DPMPTSP, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*	-	*DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU*
	2.18.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)*		*0.00*	*3*	*2*	60.000.000,00	*(KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*Aparatur*	*2*	-	*DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU*
	2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)*		*0.00*	*12*	*12*	2.500.000,00	*(KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*Aparatur*	*12*	-	*DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU*
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik (%)*				*100*	77.600.000,00	*(Kantor DPMPTSP, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*	-	*DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU*
	2.18.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)*		*0.00*	*4*	*4*	75.000.000,00	*(KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*Aparatur*	*4*	-	*DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU*
	2.18.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)*		*0.00*	*4*	*4*	2.600.000,00	*(KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*Aparatur*	*4*	-	*DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU*
2.	**2.18.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**						**344.409.399,00**				**Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat**			**-**	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah investor berskala nasional baik PMDN maupun PMA (Perusahaan/UKM/IKM)				***750***									***DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU***
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)*				*1*	150.000.000,00	*(KAB. PESISIR BARAT)*					*1*	-	*DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU*
	2.18.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	*Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*1*	150.000.000,00	*(KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*Masyarakat*	*0.00*	-	*DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU*
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Peta Potensi Investasi (Peta)*				*1*	194.409.399,00	*(KAB. PESISIR BARAT)*					*1*	-	*DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU*
	2.18.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*1*	194.409.399,00	*(Kantor DPMPTSP, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*Masyarakat*	*0.00*	-	*DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU*
3.	**2.18.03**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	***Pertumbuhan Nilai Investasi PMA (%)***				***6,05***	**742.684.517,00**				**Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat**			**-**	***DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU***
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Peningkatan Persentase Nilai Investasi (%)*				*10*	742.684.517,00	*(Sebagian wilayah indonesia, Luar Wilayah)*			Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat		*10*	-	*DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU*
	2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota						742.684.517,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					-	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)		*0.00*	*2*	*2*		*(sebagian wilayah indonesia, Luar Wilayah)*				*Masyarakat*	*2*		*DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU*
4.	**2.18.04**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	***Pertumbuhan Nilai Investasi PMDN (%)***				***16,99***	**635.250.009,00**				**Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat**			**-**	***DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU***
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	*Rasio izin yang diterbitkan (%)*				*80*	635.250.009,00	*(Kantor DPMPTSP, KAB. PESISIR BARAT)*			Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat		*80*	-	*DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU*
	2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	*Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Pelaku Usaha)*		*0.00*	*600*	*600*	505.078.500,00	*(KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*Masyarakat*	*600*	-	*DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU*
	2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	*Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan (Orang)*		*0.00*	*10*	*10*	130.171.509,00	*(KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*Masyarakat*	*10*	-	*DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU*
5.	**2.18.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	***Rasio Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha terhadap Ketentuan Perizinan (%)***				***80***	**677.916.651,00**				**Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat**			**-**	***DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU***
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						677.916.651,00							-	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah laporan kegiatan (Laporan)				*3*		*(seluruh wilayah Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*3*		*DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU*
	2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal						147.916.651,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					-	
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal (Kegiatan Usaha.)		*0.00*	*1.00*	*12.00*		*(KAB. PESISIR BARAT)*				*Masyarakat*	*12.00*		*DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU*
	2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal						350.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					-	
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal (Pelaku Usaha)		*0.00*	*1*	*189*		*(KAB. PESISIR BARAT)*				*Masyarakat*	*189*		*DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU*
	2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal						180.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					-	
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan (Kegiatan Usaha)		*0.00*	*1*	*12*		*(KAB. PESISIR BARAT)*				*Masyarakat*	*12*		*DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU*
6.	**2.18.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**						**324.003.359,00**				**Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat**			**-**	
			Jumlah Data Laporan Perizinan dan Non Perizinan (Laporan)				***5***									***DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU***
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						324.003.359,00							-	
			tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan (Dokumen)				*5*		*(kantor DPMPTSP, KAB. PESISIR BARAT)*					*5*		*DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU*
	2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik						324.003.359,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					-	
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)		*0*	*0*							*Masyarakat*			*DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**						**6.503.726.404,00**							**6.403.726.404,00**	
1.	**2.19.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.343.684.086,00**			**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas**			**2.343.684.086,00**	
			Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	***92,5***			***92,50***									***DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA***
	2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						6.400.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			6.400.000,00	
			Persentase Dokumen Perencanaan, Pengganggaran,dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu (%)				*100*		*(DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA*
			Persentase Dokumen Perencanaan,Penganggaran,dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu (%)				*100*		*(Dinas Pemuda dan Olahraga, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA*
	2.19.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						1.400.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.400.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)		*2*	*2*	*2*		*(DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA, KAB. PESISIR BARAT)*				*aparatur*	*2*		*DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA*
	2.19.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						5.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		*2*	*2*	*2*		*(Dinas Pemuda dan Olahraga, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*2*		*DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA*
	2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.838.671.086,00				Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.838.671.086,00	
			Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu (%)				*100*		*(Dinas Pemuda dan Olahraga, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA*
	2.19.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.822.038.886,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.822.038.886,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		*14*	*14*	*14*		*(DInas Pemuda dan Olahraga, KAB. PESISIR BARAT)*				*aparatur*	*14*		*DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA*
	2.19.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						11.132.200,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					11.132.200,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)		*12*	*12*	*12*		*(Dinas Pemuda dan Olahraga, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA*
	2.19.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						2.500.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.500.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		*1*	*1*	*1*		*(Dinas Pemuda dan Olahraga, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA*
	2.19.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						2.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		*18*	*18*	*18*		*(Dinas Pemuda dan Olahraga, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*18*		*DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA*
	2.19.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						1.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)		*1*	*1*	*1*		*(Dinas Pemuda dan Olahraga, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA*
	2.19.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						13.500.000,00							13.500.000,00	
			Persentase Aparatur yang berkinerja baik (%)				*100*		*(Dinas Pemuda dan Olahraga, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA*
	2.19.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						13.500.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					13.500.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)		*2*	*2*	*2*		*(Dinas Pemuda dan Olahraga, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*2*		*DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA*
	2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						219.143.000,00							219.143.000,00	
			Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja (%)				*100*		*(Dinas Pemuda dan Olahraga, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA*
	2.19.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						5.004.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					5.004.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		*50*	*50*	*50*		*(Dinas Pemuda dan Olahraga, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*50*		*DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA*
	2.19.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						20.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					20.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		*2*	*2*	*2*		*(Dinas Pemuda dan Olahraga, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*2*		*DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA*
	2.19.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						25.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		*1*	*1*	*1*		*(Dinas Pemuda dan Olahraga, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA*
	2.19.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						14.451.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					14.451.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*12*	*12*	*12*		*(Dinas Pemuda dan Olahraga, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA*
	2.19.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						12.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					12.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		*12*	*12*	*12*		*(Dinas Pemuda dan Olahraga, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA*
	2.19.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu						12.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					12.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)		*11*	*11*	*11*		*(Dinas Pemuda dan Olahraga, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*11*		*DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA*
	2.19.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						130.688.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					130.688.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(Dinas Pemuda dan Olahraga, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA*
	2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						144.748.000,00							144.748.000,00	
			Persentase Pemenuhan layanan pendukung (%)				*100*		*(Dinas Pemuda dan Olahraga, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA*
	2.19.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						42.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					42.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(Dinas Pemuda dan Olahraga, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA*
	2.19.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						97.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					97.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)		*6*	*6*	*6*		*(Dinas Pemuda dan Olahraga, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*6*		*DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA*
	2.19.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						5.748.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					5.748.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(Dinas Pemuda dan Olahraga, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA*
	2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						121.222.000,00							121.222.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase Barang Milik Daerah yang dalam kondisi baik (%)				*100*		*(Dinas Pemuda dan Olahraga, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA*
	2.19.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						68.672.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					68.672.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		*3*	*3*	*3*		*(Dinas Pemuda dan Olahraga, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*3*		*DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA*
	2.19.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						13.950.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					13.950.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		*2*	*2*	*2*		*(Dinas Pemuda dan Olahraga, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*2*		*DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA*
	2.19.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						27.600.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					27.600.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		*12*	*12*	*12*		*(Dinas Pemuda dan Olahraga, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA*
	2.19.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						5.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					5.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*12*	*12*	*12*		*(Dinas Pemuda dan Olahraga, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA*
	2.19.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						6.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					6.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*12*	*12*	*12*		*(DInas Pemuda dan Olahraga, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA*
2.	**2.19.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**						**2.167.564.804,00**				**Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**2.167.564.804,00**	
			Cakupan Pemenuhan Pengembngan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan (%)				***55,00***									***DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA***
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD (%)	***55***			***100***									***DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA***
	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota						650.000.000,00							650.000.000,00	
			Rata - rata capaian kinerja bidang pemerintahan dan Pembangunan Manusia (%)				*70*		*(DInas Pemuda dan Olahraga, KAB. PESISIR BARAT)*					*70*		*DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA*
	2.19.02.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor						151.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					151.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya (Orang)		*2*	*2*	*2*		*(Dinas Pemuda dan Olahraga, KAB. PESISIR BARAT)*				*Masyarakat*	*2*		*DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA*
	2.19.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula						117.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					117.000.000,00	
			Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya (Orang)		*10*	*10*	*10*		*(Dinas Pemuda dan Olahraga, KAB. PESISIR BARAT)*				*Masyarakat*	*10*		*DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA*
	2.19.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota						382.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					382.000.000,00	
			Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya (Orang)		*20*	*20*	*20*		*(Dinas Pemuda dan Olahraga, KAB. PESISIR BARAT)*				*Masyarakat*	*20*		*DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA*
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						1.517.564.804,00							1.517.564.804,00	
			Rata- rata capaian kinerja bidang pemerintahan dan Pembangunan manusia (%)				*70*		*(Dinas Pemuda dan Olahraga, KAB. PESISIR BARAT)*					*70*		*DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA*
	2.19.02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota						1.517.564.804,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.517.564.804,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan (Dokumen)		*31*	*31*	*31*		*(Dinas Pemuda dan Olahraga, KAB. PESISIR BARAT)*				*Masyarakat*	*31*		*DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA*
3.	**2.19.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**						**1.992.477.514,00**				**Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**1.892.477.514,00**	
			Cakupan Pemenuhan Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolaragaan (%)				***50,00***									***DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA***
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						100.000.000,00							-	
			Persentase penyediaan sarana dan prasarana olahraga (%)				*100*		*(Dinas Pemuda dan Olahraga, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA*
	2.19.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota						100.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					-	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan (Unit)		*0*	*0*							*Masyarakat*			*DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA*
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						161.112.011,00							161.112.011,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase lomba/kejuaraan olahraga yang di laksanakan (%)				*100*		*(Dinas Pemuda dan Olahraga, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA*
	2.19.03.2.02.02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)*		*2*	*2*	*2*	161.112.011,00	*(Dinas Pemuda dan Olahraga, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*Masyarakat*	*2*	161.112.011,00	*DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA*
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	*Persentase pelaksanaan kegiatan kejuaraan/perlombaan olahraga diluar daerah (%)*				*80*	154.285.954,00	*(Dinas Pemuda dan Olahraga, KAB. PESISIR BARAT)*					*80*	154.285.954,00	*DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA*
	2.19.03.2.03.03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	*Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan (Orang)*		*10*	*10*	*10*	154.285.954,00	*(Dinas Pemuda dan Olahraga, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*Masyarakat*	*10*	154.285.954,00	*DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA*
	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	*Persentase pelaksanaan kegiatan pembinaan dan bantuan operasional organisasi keolahragaan (%)*				*100*	1.526.696.229,00	*(Dinas Pemuda dan Olahraga, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*	1.526.696.229,00	*DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA*
	2.19.03.2.04.02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan (Organisasi)*		*26*	*26*	*26*	1.526.696.229,00	*(Dinas Pemuda dan Olahraga, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*masyarakat*	*26*	1.526.696.229,00	*DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA*
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	*Persentase penyelenggaraan pengembangan dan pemasarana festival dan olahraga rekreasi yang difasilitasi pemda (%)*				*80*	50.383.320,00	*(Dinas Pemuda dan Olahraga, KAB. PESISIR BARAT)*					*80*	50.383.320,00	*DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA*
	2.19.03.2.05.01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi (Dokumen)*		*50*	*50*	*50*	50.383.320,00	*(DInas Pemuda dan Olahraga, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*masyarakat*	*50*	50.383.320,00	*DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA*
	2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**						**112.207.375,00**							**112.207.375,00**	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**2.20.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	***Data dan informasi statistik Daerah Yang Tersusun Dengan Baik (Dokumen)***				***2,00***	**112.207.375,00**			**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas**			**112.207.375,00**	***DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN***
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Data dan Informasi Statistik Daerah yang Tersusun dengan Baik (Dokumen)*				*2*	112.207.375,00	*(Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*2*	112.207.375,00	*DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN*
	2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral (Dokumen)*		*1.00*	*1.00*	*1.00*	52.311.719,00	*(kab. pesisir barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*masyarakat*	*1.00*	52.311.719,00	*DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN*
	2.20.02.2.01.02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	*Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi (Orang)*		*50*	*50*	*50*	59.895.656,00	*(kab. pesisir barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*masyarakat*	*50*	59.895.656,00	*DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN*
	2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**						**106.021.325,00**							**106.021.325,00**	
1.	**2.21.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	***Persentase Pengamanan Informasi Daerah yang Terselenggara baik (%)***				***100***	**106.021.325,00**			**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas**			**106.021.325,00**	***DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN***
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						50.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase Layanan Keamanan Informasi Daerah (%)				*100*		*(Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN*
	2.21.02.2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						50.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			50.000.000,00	
			Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi (Perangkat Daerah)		*39*	*39*	*39.00*		*(kab. pesisir barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*masyarakat*	*39.00*		*DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN*
	2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota						56.021.325,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			56.021.325,00	
			Terselenggaranya Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (Bulan)				*12*		*(Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*12*		*DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN*
	2.21.02.2.02.01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						56.021.325,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			56.021.325,00	
			Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi (Perangkat Daerah)		*39.00*	*39.00*	*39.00*		*(kab. pesisir barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*masyarakat*	*39.00*		*DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN*
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**438.358.847,00**							**-**	
1.	**2.22.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**						**346.443.502,00**			**Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan**	**Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat**			**-**	
			Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Keatas yang terlibat Pertujukan seni (%)				***30***									***DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN***
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota						346.443.502,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat			-	
	2.22.02.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan						346.443.502,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan (Objek)		*0.00*	*0.00*	*7*		*(Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Masyarakat*	*3*		*DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**2.22.05**	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	***Jumlah cagar budaya dan warisan budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi (%)***				***100***	**91.915.345,00**				**Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat**			**-**	***DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN***
	2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	*Jumlah Obje Terdaftar (Objek)*				*2*	91.915.345,00	*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*			Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat		*2*	-	*DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN*
	2.22.05.2.01.02	Penetapan Cagar Budaya	*Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan (Objek)*		*0.00*	*0.00*	*3*	91.915.345,00	*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*Masyarakat*	*0.00*	-	*DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN*
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**						**320.000.000,00**							**320.000.000,00**	
1.	**2.23.02**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	***Jumlah Perpustakaan Daerah yang Dikelola (Lokasi)***				***1***	**320.000.000,00**			**Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan**	**Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat**			**320.000.000,00**	***SEKRETARIAT DAERAH***
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Perpustakaan Daerah yang dikelola (Lokasi)*				*1*	125.000.000,00	*(Di Kantor Sekretariat Daerah dan Di Luar Daerah, KAB. PESISIR BARAT)*		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat		*1*	125.000.000,00	*SEKRETARIAT DAERAH*
	2.23.02.2.01.04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	*Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan (Perpustakaan)*		*116*	*116*	*116*	50.000.000,00	*(Di Seluruh Kecamatan Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat	*Aparatur*	*116*	50.000.000,00	*SEKRETARIAT DAERAH*
	2.23.02.2.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	*Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan (Eksemplar)*		*1*	*1*	*1*	75.000.000,00	*(Di Kantor Sekretariat Daerah, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat	*Aparatur*	*1*	75.000.000,00	*SEKRETARIAT DAERAH*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Gemar Membaca (%)*				*100*	195.000.000,00	*(seluruh kecamatan di kabupaten pesisir barat, KAB. PESISIR BARAT)*		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat		*100*	195.000.000,00	*SEKRETARIAT DAERAH*
	2.23.02.2.02.04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	*Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan (Perpustakaan)*		*194.00*	*194.00*	*194.00*	195.000.000,00	*(Di Kantor Sekretariat Daerah, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat	*Aparatur*	*194.00*	195.000.000,00	*SEKRETARIAT DAERAH*
	2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**						**58.581.521,00**							**58.581.521,00**	
1.	**2.24.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	***Persentase Perangakat Daerah yang Mengelola Asip secara Baku (%)***				***25***	**58.581.521,00**			**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas**			**58.581.521,00**	***SEKRETARIAT DAERAH***
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	*Indeks pembangunan manusia (%)*				*100*	48.581.521,00	*(Di Kantor Sekretariat Daerah, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*100*	48.581.521,00	*SEKRETARIAT DAERAH*
	2.24.02.2.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	*Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan (Berkas)*		*8*	*8*	*8*	28.699.549,00	*(Di Kantor Sekretariat Daerah, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*8*	28.699.549,00	*SEKRETARIAT DAERAH*
	2.24.02.2.01.03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)*		*1*	*1*	*1*	19.881.972,00	*(Di Seluruh Kecamatan Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*0.00*	19.881.972,00	*SEKRETARIAT DAERAH*
	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	*Indeks pembangunan manusia (%)*				*100*	10.000.000,00	*(Di Kantor Sekretariat Daerah, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*100*	10.000.000,00	*SEKRETARIAT DAERAH*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.24.02.2.03.01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	*Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN (Pengguna)*		*1*	*1*	*1*	10.000.000,00	*(Di Kantor Sekretariat Daerah, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*1*	10.000.000,00	*SEKRETARIAT DAERAH*
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**35.022.196.956,00**							**24.662.670.532,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**5.058.925.795,00**							**4.356.289.549,00**	
1.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)***	***92,5***			***92,5***	**3.205.408.358,00**				**Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas**			**3.197.249.175,00**	***DINAS PERIKANAN***
	3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)*				*2*	6.729.042,00	*(Komplek PPI Kuala Stabas, Krui, KAB. PESISIR BARAT)*					*2*	6.729.042,00	*DINAS PERIKANAN*
	3.25.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)*		*2.00*	*2.00*	*2.00*	1.555.400,00	*(Kantor Dinas Perikanan, Pasar Kota Krui, Kec. Pesisir Tengah)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*Aparatur*	*2.00*	1.555.400,00	*DINAS PERIKANAN*
	3.25.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)*		*2.00*	*2.00*	*2.00*	5.173.642,00	*(Komplek PPI Kuala Stabas, Krui, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*Aparatur*	*3.00*	5.173.642,00	*DINAS PERIKANAN*
	3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)*				*90*	2.272.395.455,00	*(KAB. PESISIR BARAT)*					*91*	2.272.395.455,00	*DINAS PERIKANAN*
	3.25.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)*		*15*	*15*	*15*	2.262.063.155,00	*(Jl. Komplek PPI Kuala Stabas Kec. Pesisir Tengah, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*Aparatur*	*15*	2.262.063.155,00	*DINAS PERIKANAN*
	3.25.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						2.777.500,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.777.500,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)		*1*	*1*	*1*		*(Jl. Komplek PPI Kuala Stabas Kec. Pesisir Tengah, Pasar Kota Krui, Kec. Pesisir Tengah)*				*Aparatur*	*1*		*DINAS PERIKANAN*
	3.25.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						3.666.300,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					3.666.300,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		*2*	*2*	*2.00*		*(Komplek PPI Kuala Stabas, Krui, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*2.00*		*DINAS PERIKANAN*
	3.25.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						2.222.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.222.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		*3*	*3*	*3*		*(Jl. Komplek PPI Kuala Stabas Kec. Pesisir Tengah, Pasar Kota Krui, Kec. Pesisir Tengah)*				*Aparatur*	*3*		*DINAS PERIKANAN*
	3.25.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						1.666.500,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.666.500,00	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)		*2*	*2*	*2.00*		*(Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*2*		*DINAS PERIKANAN*
	3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						58.139.943,00							58.139.943,00	
			Persentase Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)				*90*		*(KAB. PESISIR BARAT)*					*91*		*DINAS PERIKANAN*
	3.25.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						58.139.943,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					58.139.943,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)		*2*	*2*	*2.00*		*(Jl. Komplek PPI Kuala Stabas Kec. Pesisir Tengah, Pasar Kota Krui, Kec. Pesisir Tengah)*				*Aparatur*	*3*		*DINAS PERIKANAN*
	3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						353.982.094,00							345.822.911,00	
			Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)				*90*		*(KAB. PESISIR BARAT)*					*91*		*DINAS PERIKANAN*
	3.25.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						4.421.780,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					4.421.780,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		*12.00*	*12.00*	*12.00*		*(Jl. Komplek PPI Kuala Stabas Kec. Pesisir Tengah, Pasar Kota Krui, Kec. Pesisir Tengah)*				*Aparatur*	*12*		*DINAS PERIKANAN*
	3.25.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						27.775.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					27.775.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		*12.00*	*12.00*	*12.00*		*(Jl. Komplek PPI Kuala Stabas Kec. Pesisir Tengah, Pasar Kota Krui, Kec. Pesisir Tengah)*				*Aparatur*	*12*		*DINAS PERIKANAN*
	3.25.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						35.166.404,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					35.166.404,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*12.00*	*12.00*	*12.00*		*(Jl. Komplek PPI Kuala Stabas Kec. Pesisir Tengah, Pasar Kota Krui, Kec. Pesisir Tengah)*				*Aparatur*	*12*		*DINAS PERIKANAN*
	3.25.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						12.239.988,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					12.239.988,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		*12.00*	*12.00*	*12.00*		*(Jl. Komplek PPI Kuala Stabas Kec. Pesisir Tengah, Pasar Kota Krui, Kec. Pesisir Tengah)*				*Aparatur*	*12*		*DINAS PERIKANAN*
	3.25.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu						11.219.989,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					11.219.989,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)		*11.00*	*11.00*	*11.00*		*(Jl. Komplek PPI Kuala Stabas Kec. Pesisir Tengah, Pasar Kota Krui, Kec. Pesisir Tengah)*				*Aparatur*	*11*		*DINAS PERIKANAN*
	3.25.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						263.158.933,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					254.999.750,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*12.00*	*12.00*	*12.00*		*(Jl. Komplek PPI Kuala Stabas Kec. Pesisir Tengah, Pasar Kota Krui, Kec. Pesisir Tengah)*				*Aparatur*	*12*		*DINAS PERIKANAN*
	3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						74.783.603,00							74.783.603,00	
			Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)				*90*		*(KAB. PESISIR BARAT)*					*91*		*DINAS PERIKANAN*
	3.25.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						41.819.959,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					41.819.959,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)		*3*	*3*	*3*		*(Jl. Komplek PPI Kuala Stabas, Pasar Kota Krui, Kec. Pesisir Tengah)*				*Aparatur*	*3*		*DINAS PERIKANAN*
	3.25.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						32.963.644,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					32.963.644,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)		*5*	*5*	*5*		*(Jl. Komplek PPI Kuala Stabas, Pasar Kota Krui, Kec. Pesisir Tengah)*				*Aparatur*	*5*		*DINAS PERIKANAN*
	3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						77.854.985,00							77.854.985,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)				*90*		*(KAB. PESISIR BARAT)*					*91*		*DINAS PERIKANAN*
	3.25.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						15.299.985,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					15.299.985,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(Jl. Komplek PPI Kuala Stabas, Pasar Kota Krui, Kec. Pesisir Tengah)*				*Aparatur*	*12*		*DINAS PERIKANAN*
	3.25.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						57.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					57.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(Jl. Komplek PPI Kuala Stabas, Pasar Kota Krui, Kec. Pesisir Tengah)*				*Aparatur*	*12*		*DINAS PERIKANAN*
	3.25.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						5.555.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					5.555.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(Jl. Komplek PPI Kuala Stabas, Pasar Kota Krui, Kec. Pesisir Tengah)*				*Aparatur*	*12*		*DINAS PERIKANAN*
	3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						361.523.236,00							361.523.236,00	
			Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)				*90*		*(KAB. PESISIR BARAT)*					*91*		*DINAS PERIKANAN*
	3.25.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						21.419.979,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					21.419.979,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		*1*	*1*	*1*		*(Jl. Komplek PPI Kuala Stabas, Pasar Kota Krui, Kec. Pesisir Tengah)*				*Aparatur*	*1*		*DINAS PERIKANAN*
	3.25.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						280.394.077,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					280.394.077,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		*11*	*11*	*11*		*(Jl. Komplek PPI Kuala Stabas, Pasar Kota Krui, Kec. Pesisir Tengah)*				*Aparatur*	*11*		*DINAS PERIKANAN*
	3.25.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						30.360.600,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					30.360.600,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*1*	*1*	*1*		*(Jl. Komplek PPI Kuala Stabas, Pasar Kota Krui, Kec. Pesisir Tengah)*				*Aparatur*	*1*		*DINAS PERIKANAN*
	3.25.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						29.348.580,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					29.348.580,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*21*	*21*	*21*		*(Jl. Komplek PPI Kuala Stabas, Pasar Kota Krui, Kec. Pesisir Tengah)*				*Aparatur*	*21*		*DINAS PERIKANAN*
2.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	***Produksi Perikanan Tangkap (Ton)***				***14.419***	**618.386.706,00**			**Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**	**Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat**			**512.686.706,00**	***DINAS PERIKANAN***
	3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	*Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap di Danau Sungai Waduk Atau Genangan Air Lainnya (Ton)*				*14.419*	412.686.706,00	*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat		*14.420*	412.686.706,00	*DINAS PERIKANAN*
	3.25.03.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	*Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)*		*10*	*10*	*10.00*	34.241.422,00	*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	*KUB*	*10.00*	34.241.422,00	*DINAS PERIKANAN*
	3.25.03.2.01.02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	*Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia (Unit)*		*30*	*30*	*30.00*	173.353.675,00	*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	*Kelompok Usaha Bersama*	*30.00*	173.353.675,00	*DINAS PERIKANAN*
	3.25.03.2.01.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	*Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia (Unit)*		*60*	*60*	*60.00*	205.091.609,00	*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	*Kelompok Usaha Bersama*	*60.00*	205.091.609,00	*DINAS PERIKANAN*
	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap di Danau Sungai Waduk Atau Genangan Air Lainnya (Ton)*				*14.419*	205.700.000,00	*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*14.419*	100.000.000,00	*DINAS PERIKANAN*
	3.25.03.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil						100.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya (Orang)		*0.00*	*0.00*	*100*		*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Kelompok Usaha Bersama*	*0.00*		*DINAS PERIKANAN*
	3.25.03.2.02.02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil						105.700.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					-	
			Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya (Kelompok)		*0.00*	*0*	*10*		*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Kelompok Usaha Bersama*	*10*		*DINAS PERIKANAN*
3.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**						**598.020.651,00**				**Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat**			**168.853.668,00**	
			Produksi Perikanan Budidaya (Ton)				***19.209***									***DINAS PERIKANAN***
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil						154.100.780,00							168.853.668,00	
			Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya (Ton)				*214*		*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*214*		*DINAS PERIKANAN*
	3.25.04.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil						53.853.668,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					53.853.668,00	
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas (Kelompok)		*5*	*5*	*5.00*		*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Kelompok Pembudidaya Ikan*	*5.00*		*DINAS PERIKANAN*
	3.25.04.2.02.02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil						100.247.112,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					115.000.000,00	
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan (Kelompok)		*20*	*30*	*30*		*(Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Kelompok Pembudidaya Ikan*	*30*		*DINAS PERIKANAN*
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan						443.919.871,00							-	
	3.25.04.2.04.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						443.919.871,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					-	
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)		*0*	*0*							*Kelompok Pembudidaya Ikan*			*DINAS PERIKANAN*
4.	**3.25.05**	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**162.266.807,00**							**164.000.000,00**	
			Proporsi Tangkapan Ikan yang Berada dalam Batas Biologis yang Aman (Angka)				***0,032***									***DINAS PERIKANAN***
	3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota						162.266.807,00							164.000.000,00	
			Terawasinya Sumberdaya Perikanan (Dokumen)				*5*		*(Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*6*		*DINAS PERIKANAN*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.05.2.01.01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)*		*2*	*2*	*2*	81.133.403,00	*(Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*Masyarakat Perikanan*	*2*	82.000.000,00	*DINAS PERIKANAN*
	3.25.05.2.01.02	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)*		*2*	*2*	*5*	81.133.404,00	*(Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*Masyarakat Pembudidaya Ikan*	*5*	82.000.000,00	*DINAS PERIKANAN*
5.	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	***Nilai Tukar Nelayan (Angka)***				***104***	**474.843.273,00**							**313.500.000,00**	***DINAS PERIKANAN***
	3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	*Peningkatan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Unit Usaha)*				*5*	106.493.491,00	*(Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*5*	106.500.000,00	*DINAS PERIKANAN*
	3.25.06.2.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	*Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko (Unit Usaha)*		*5.00*	*5.00*	*5.00*	106.493.491,00	*(Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*Kelompok Pengolah dan Pemasar Ikan*	*5.00*	106.500.000,00	*DINAS PERIKANAN*
	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota						368.349.782,00							207.000.000,00	
	3.25.06.2.03.01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Ton)*		*0.00*	*0.00*	*6000*	161.832.093,00	*(Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*Kelompok Pengolah dan Pemasar Ikan*	*6000*	-	*DINAS PERIKANAN*
	3.25.06.2.03.02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						206.517.689,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					207.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi (Pelaku Usaha)		*15.00*	*15.00*	*20.00*		*(Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Kelompok Pengolah dan Pemasar Ikan*	*20.00*		*DINAS PERIKANAN*
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**						**21.999.701.700,00**							**5.954.422.315,00**	
1.	**3.26.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)***	***92,5***			***92,50***	**3.649.701.700,00**			**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas**			**3.654.422.315,00**	***DINAS PARIWISATA***
	3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (%)*				*100*	18.468.000,00	*(Dinas Pariwisata, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*100*	23.188.615,00	*DINAS PARIWISATA*
	3.26.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)*		*6931780*	*8060280*	*2.00*	7.400.000,00	*(Dinas Pariwisata, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*2.00*	10.733.800,00	*DINAS PARIWISATA*
	3.26.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)*		*7797815*	*7356815*	*1.00*	6.068.000,00	*(Dinas Pariwisata, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik		*Aparatur*	*1*	7.454.815,00	*DINAS PARIWISATA*
	3.26.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)*		*5000000*	*5000000*	*2.00*	5.000.000,00	*(Dinas Pariwisata, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik		*Aparatur*	*2*	5.000.000,00	*DINAS PARIWISATA*
	3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.908.887.100,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.908.887.100,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)				*90*		*(Dinas Pariwisata, KAB. PESISIR BARAT)*					*90*		*DINAS PARIWISATA*
	3.26.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.878.044.100,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik				1.878.044.100,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		*1561540800*	*1962108800*	*14.00*		*(Dinas Pariwisata, KAB. PESISIR BARAT)*					*14*		*DINAS PARIWISATA*
	3.26.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						25.343.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik				25.343.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)		*24755030*	*30255030*	*12*		*(Dinas Pariwisata, KAB. PESISIR BARAT)*					*12*		*DINAS PARIWISATA*
	3.26.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						2.500.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik				2.500.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		*2500000*	*2500000*	*1.00*		*(Dinas Pariwisata, KAB. PESISIR BARAT)*					*1*		*DINAS PARIWISATA*
	3.26.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						2.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik				2.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		*2000000*	*2000000*	*18*		*(Dinas Pariwisata, KAB. PESISIR BARAT)*					*18*		*DINAS PARIWISATA*
	3.26.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						1.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik				1.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)		*1000000*	*1000000*	*1.00*		*(Dinas Pariwisata, KAB. PESISIR BARAT)*					*1*		*DINAS PARIWISATA*
	3.26.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						75.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			75.000.000,00	
			Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)				*90*		*(Dinas Pariwisata, KAB. PESISIR BARAT)*					*90*		*DINAS PARIWISATA*
	3.26.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						75.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik				75.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)		*33000000*	*33000000*	*12.00*		*(Dinas Pariwisata, KAB. PESISIR BARAT)*					*12*		*DINAS PARIWISATA*
	3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						544.143.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			544.143.600,00	
			Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)				*90*		*(Dinas Pariwisata, KAB. PESISIR BARAT)*					*90*		*DINAS PARIWISATA*
	3.26.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						2.500.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik				2.500.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		*1577000*	*2000000*	*12*		*(Dinas Pariwisata, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*DINAS PARIWISATA*
	3.26.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						25.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik				25.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		*25000000*	*25000000*	*1.00*		*(Dinas pariwisata, KAB. PESISIR BARAT)*					*1*		*DINAS PARIWISATA*
	3.26.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						135.643.600,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik				135.643.600,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*203948000*	*135643600*	*12*		*(Dinas Pariwisata, KAB. PESISIR BARAT)*					*12*		*DINAS PARIWISATA*
	3.26.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						12.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik				12.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		*12000000*	*12000000*	*12*		*(Dinas Pariwisata, KAB. PESISIR BARAT)*					*12*		*DINAS PARIWISATA*
	3.26.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu						19.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik				19.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)		*16500000*	*16500000*	*11.00*		*(Dinas Pariwisata, KAB. PESISIR BARAT)*					*11*		*DINAS PARIWISATA*
	3.26.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						350.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik				350.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*503365160.00*	*230000000.00*	*12.00*		*(Dinas Pariwisata, KAB. PESISIR BARAT)*					*12*		*DINAS PARIWISATA*
	3.26.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						112.980.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik				112.980.000,00	
			Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)				*90*		*(Dinas Pariwisata, KAB. PESISIR BARAT)*					*90*		*DINAS PARIWISATA*
	3.26.01.2.07.05	Pengadaan Mebel						52.980.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik				52.980.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)		*40980000.00*	*50980000.00*	*7.00*		*(Dinas Pariwisata, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*7*		*DINAS PARIWISATA*
	3.26.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya						60.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik				60.000.000,00	
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)		*35959535*	*50250000*	*5.00*		*(Dinas Pariwisata, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*5*		*DINAS PARIWISATA*
	3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						764.893.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik				764.893.000,00	
			Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)				*90*		*(Dinas Pariwisata, KAB. PESISIR BARAT)*					*90*		*DINAS PARIWISATA*
	3.26.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						111.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik				111.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*135000000*	*152400000*	*12.00*		*(Dinas Pariwisata, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*DINAS PARIWISATA*
	3.26.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						67.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik				67.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)		*67000000*	*67000000*	*12*		*(Dinas Pariwisata, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*DINAS PARIWISATA*
	3.26.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						586.893.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik				586.893.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		*335142000*	*586893000*	*12.00*		*(Dinas Pariwisata, KAB. PESISIR BARAT)*				*Perangkat*	*12*		*DINAS PARIWISATA*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						225.330.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik				225.330.000,00	
			Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)				*90*		*(Dinas Pariwisata, KAB. PESISIR BARAT)*					*90*		*DINAS PARIWISATA*
	3.26.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						134.870.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik				134.870.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		*123970226*	*134870000*	*5.00*		*(Dinas Pariwisata, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*5*		*DINAS PARIWISATA*
	3.26.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						90.460.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik				90.460.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*59250000*	*84250000*	*12.00*		*(Dinas Pariwisata, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12.00*		*DINAS PARIWISATA*
2.	**3.26.02**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**						**4.100.000.000,00**			**Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**	**Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat**			**-**	
			Kontribusi PAD Sektor Pariwisata (%)	***2,98***			***2,98***									***DINAS PARIWISATA***
	3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota						1.850.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			-	
			Kontribusi PAD Sektor Pariwisata (%)				*2.98*		*(Dinas Pariwisata, KAB. PESISIR BARAT)*					*3.18*		*DINAS PARIWISATA*
	3.26.02.2.01.01	Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota						450.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan				-	
			Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota (Lokasi)		*0.00*	*0.00*	*6*		*(Dinas Pariwisata, KAB. PESISIR BARAT)*				*Destinasi Wisata*	*0.00*		*DINAS PARIWISATA*
	3.26.02.2.01.02	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota						600.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan				-	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*3*		*(Dinas Pariwisata, KAB. PESISIR BARAT)*				*Daya Tarik Wisata*	*0.00*		*DINAS PARIWISATA*
	3.26.02.2.01.03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota						800.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan				-	
			Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) (Lokasi)		*0.00*	*0.00*	*4*		*(Dinas Pariwisata, KAB. PESISIR BARAT)*				*Daya Tarik Wisata*	*0.00*		*DINAS PARIWISATA*
	3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota						500.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			-	
			Kontribusi PAD Sektor Pariwisata (%)				*2.98*		*(Dinas Pariwisata, KAB. PESISIR BARAT)*					*3.18*		*DINAS PARIWISATA*
	3.26.02.2.02.05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota						500.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan				-	
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Dinas Pariwisata, KAB. PESISIR BARAT)*				*Usaha Pariwisata*	*0.00*		*DINAS PARIWISATA*
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota						1.750.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			-	
			Kontribusi PAD Sektor Pariwisata (%)				*2.98*		*(Dinas Pariwisata, KAB. PESISIR BARAT)*					*3.18*		*DINAS PARIWISATA*
	3.26.02.2.03.02	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota						800.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan				-	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*4*		*(Dinas Pariwisata, KAB. PESISIR BARAT)*				*Destinasi Pariwisata*	*0.00*		*DINAS PARIWISATA*
	3.26.02.2.03.03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota						700.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan				-	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) (Lokasi)		*0.00*	*0.00*	*3*		*(Dinas Pariwisata, KAB. PESISIR BARAT)*				*Destinasi Pariwisata*	*0.00*		*DINAS PARIWISATA*
	3.26.02.2.03.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota						250.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan				-	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara (Unit)		*0.00*	*0.00*	*5*		*(Dinas Pariwisata, KAB. PESISIR BARAT)*				*Destinasi Pariwisata*	*0.00*		*DINAS PARIWISATA*
3.	**3.26.03**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**						**11.450.000.000,00**			**Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**	**Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas**			**2.300.000.000,00**	
			Kunjungan Wisatawan (%)				***494527***									***DINAS PARIWISATA***
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota						11.450.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			2.300.000.000,00	
			Kunjungan Wisatawan (Orang)				*494.527*		*(Dinas Pariwisata, KAB. PESISIR BARAT)*					*494.527*		*DINAS PARIWISATA*
	3.26.03.2.01.01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri						750.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan				850.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur dan Masyarakat*	*0.00*		*DINAS PARIWISATA*
	3.26.03.2.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota						9.500.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan				-	
			Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Dinas Pariwisata, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur dan Masyarakat*	*0.00*		*DINAS PARIWISATA*
	3.26.03.2.01.03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri						350.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan				600.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Dinas Pariwisata, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur dan masyarakat*	*0.00*		*DINAS PARIWISATA*
	3.26.03.2.01.04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri						450.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan				450.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Dinas Pariwisata, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur dan Masyarakat*	*0.00*		*DINAS PARIWISATA*
	3.26.03.2.01.05	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata						400.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan				400.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Dinas Pariwisata, KAB. PESISIR BARAT)*				*Masyarakat*	*0.00*		*DINAS PARIWISATA*
4.	**3.26.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**						**2.800.000.000,00**			**Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing**	**Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**-**	
			Cakupan Fasilitasi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata (%)				***30.00***									***DINAS PARIWISATA***
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar						2.800.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	
	3.26.05.2.01.02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata						1.000.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing				-	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata (Orang)		*0.00*	*0.00*	*50*		*(Dinas Pariwisata, KAB. PESISIR BARAT)*				*Masyarakat*	*0.00*		*DINAS PARIWISATA*
	3.26.05.2.01.03	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)						650.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing				-	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa) (Orang)		*0.00*	*0.00*	*80*		*(Dinas Pariwisata, KAB. PESISIR BARAT)*				*Masyarakat*	*0.00*		*DINAS PARIWISATA*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.05.2.01.04	Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	*Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata (Orang)*		*0.00*	*0.00*	*50*	300.000.000,00	*(Dinas Pariwisata, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		*Masyarakat*	*0.00*	-	*DINAS PARIWISATA*
	3.26.05.2.01.05	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif (Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*3*	850.000.000,00	*(Dinas Pariwisata, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		*Masyarakat*	*0.00*	-	*DINAS PARIWISATA*
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**6.226.962.026,00**							**13.312.323.160,00**	
1.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	***Nilai Tukar Petani (Angka)***				***99,77***	**2.336.903.374,00**			**Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**	**Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat**			**7.351.039.374,00**	***DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN***
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	*Persentase Peningkatan Produktivitas Pertanian (%)*				*0.3*	1.215.555.374,00	*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat		*0.3*	5.255.555.374,00	*DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN*
	3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	*Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)*		*1*	*0.00*	*5*	1.010.000.000,00	*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	*Kelompok Tani, Kelompok Tani / Gabungan Kelompok Tani, Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani*	*5*	5.050.000.000,00	*DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN*
	3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	*Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)*		*2*	*2*	*2*	205.555.374,00	*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	*Distributor Pupuk Bersubsidi*	*2*	205.555.374,00	*DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota						487.068.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			1.461.204.000,00	
			Persentase Peningkatan Produksi Komoditi Pertanian (%)				*0.5*		*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*0.5*		*DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN*
	3.27.02.2.02.03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman						487.068.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			1.461.204.000,00	
			Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)		*1*	*1*	*3*		*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Kelompok Tani/Gapoktan/Kelompok Wanita Tani, Kelompok Tani/Gapoktan/KWT, Kelompok Wanita Tani/ Kelompok Tani*	*3*		*DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN*
	3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota						259.780.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			259.780.000,00	
			Peningkatan Populasi Ternak yang bersumber dari dalam daerah (%)				*3*		*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*3*		*DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN*
	3.27.02.2.05.05	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak						259.780.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			259.780.000,00	
			Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia (Ton)		*0.00*	*0.00*	*2.6*		*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Petani/Peternak*	*2.6*		*DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN*
	3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain						374.500.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			374.500.000,00	
			Peningkatan Populasi Ternak (%)				*3*		*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*3*		*DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN*
	3.27.02.2.06.01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain						374.500.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			374.500.000,00	
			Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain (Ekor)		*0.00*	*55*	*99*		*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Petani/Peternak*	*99*		*DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**						**2.368.805.929,00**			**Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**	**Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat**			**2.368.805.929,00**	
			Produksi Sektor Pertanian (Ton)				***148340***									***DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN***
			Produksi Sektor Pertanian (Ton)				***148340***									***DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN***
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian						150.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			150.000.000,00	
			Cakupan data, informasi dan kajian lingkup pertanian (%)				*100*		*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN*
	3.27.03.2.01.01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B						90.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			90.000.000,00	
			Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola (Dokumen)		*0.00*	*1*	*1*		*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Kelompok Tani/Masyarakat/Aparatur*	*1*		*DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN*
	3.27.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya						60.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			60.000.000,00	
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)		*1*	*0.00*	*2*		*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur, Kelompok Tani*	*2*		*DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN*
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian						2.218.805.929,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			2.218.805.929,00	
			Persentase Prasarana Pertanian yang terbangun dan berkondisi baik (%)				*83*		*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*84*		*DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN*
	3.27.03.2.02.01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani						440.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			440.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi , dan Dipelihara (Unit)		*0.00*	*2*	*2*		*(Pekon Biha Kecamatan Pesisir SelatanPekon Balai Kencana Kecamatan Krui Selatan, KAB. PESISIR BARAT)*				*Kelompok Tani/Gapoktan*	*2*		*DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN*
	3.27.03.2.02.02	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian						440.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			440.000.000,00	
			Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Pekon Sumur Jaya Kecamatan Pesisir Selatan Pekon Pardasuka Kecamatan Ngaras., KAB. PESISIR BARAT)*				*Kelompok Tani/Gapoktan*	*2*		*DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN*
	3.27.03.2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani						440.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			440.000.000,00	
			Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Pekon Marang Kec. Pesisir Selatan dan Pekon Pekonmon Kec. Ngambur, KAB. PESISIR BARAT)*				*Kelompok Tani/Gapoktan*	*2*		*DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN*
	3.27.03.2.02.04	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit						250.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			250.000.000,00	
			Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Pekon Sukamarga Kecamatan BangkunatPekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan, KAB. PESISIR BARAT)*				*Kelompok Tani / Gapoktan*	*2*		*DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN*
	3.27.03.2.02.05	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Long Storage						250.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			250.000.000,00	
			Jumlah Long Storage yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Pekon Marang Kecamatan Pesisir SelatanPekon Pakunegara Kecamatan Pesisir Selatan, KAB. PESISIR BARAT)*				*Kelompok Tani/Gapoktan*	*2*		*DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN*
	3.27.03.2.02.06	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air						80.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			80.000.000,00	
			Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Pekon Pekon Mon Kecamatan Ngambur, Ngambur)*				*Kelompok Tani/Gapoktan*	*2*		*DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.03.2.02.08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	*Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)*		*0.00*	*0.00*	*1*	318.805.929,00	*(Kecamatan Pesisir Selatan, Pesisir Selatan)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	*Aparatur*	*1*	318.805.929,00	*DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN*
3.	**3.27.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	***Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis (%)***				***86***	**239.616.243,00**			**Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**	**Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat**			**239.616.243,00**	***DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN***
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Terproteksinya ternak dan HPR dari penyakit hewan menular (%)*				*86*	164.466.243,00	*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat		*88*	164.466.243,00	*DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN*
	3.27.04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	*Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis (Laporan)*		*1*	*1*	*1*	164.466.243,00	*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	*Petani/Peternak*	*1*	164.466.243,00	*DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN*
	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	*Persentase Terjaminnya Keamanan Daging yang beredar di Masyarakat (%)*				*100*	75.150.000,00	*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat		*100*	75.150.000,00	*DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN*
	3.27.04.2.04.02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	*Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan (Laporan)*		*1*	*1*	*1*	75.150.000,00	*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	*Produsen Produk Hewan*	*1*	75.150.000,00	*DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.	**3.27.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**						**400.273.913,00**			**Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**	**Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat**			**400.273.913,00**	
			Persentase Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Organisme Pengganggu Tumbuhan (%)				***86***									***DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN***
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota						400.273.913,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			400.273.913,00	
			Penurunan persentase gangguan OPT/Kegagalan panen pada komoditi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan (%)				*10*		*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*10*		*DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN*
	3.27.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan						400.273.913,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			400.273.913,00	
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)		*8*	*6*	*50*		*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Petani*	*50*		*DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN*
5.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**						**881.362.567,00**			**Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**	**Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat**			**2.952.587.701,00**	
			Cakupan Bina Kelompok Tani (Kelompok Tani)				***975***									***DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN***
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian						881.362.567,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			2.952.587.701,00	
	3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa						410.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			2.050.000.000,00	
			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)		*11*	*11*	*11*		*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur/Penyuluh Pertanian*	*11*		*DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN*
	3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa						270.612.567,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			811.837.701,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)		*11*	*11*	*11*		*(Kabupaten Pesisi Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur/Penyuluh Pertanian/Kelompok Tani/Gapoktan/KWT/ Lembaga Pertanian, Kelompok Tani/Gapoktan/KWT/ Penyuluh Pertanian, KTNA dan Perhiptani*	*11*		*DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN*
	3.27.07.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian						90.750.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			90.750.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (Unit)		*0.00*	*0.00*	*11*		*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur/Penyuluh Pertanian*	*11*		*DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN*
	3.27.07.2.01.05	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota						110.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			-	
			Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi (Unit)		*0*	*0*							*Kelompok Tani/Gapoktan*			*DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN*
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**						**696.971.927,00**							**-**	
1.	**3.30.03**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**						**103.918.299,00**			**Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**	**Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat**			**-**	
			Kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB (%)				***11,58***									***DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN***
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan						103.918.299,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			-	
			Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang Terfasilitasi (%)				*100*		*(Pasar Way Batu, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN*
	3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan						50.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			-	
			Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)		*1*	*1*	*1.00*		*(Pasar Way Batu, KAB. PESISIR BARAT)*				*Masyarakat*	*1*		*DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	*Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)*		*0.00*	*0.00*	*2*	53.918.299,00	*(KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	*Masyarakat*	*0.00*	-	*DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN*
2.	**3.30.04**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	***Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan harga Barang Kebutuhan Pokok (%)***				***60***	**329.179.609,00**			**Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**	**Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat**			**-**	***DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN***
	3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	*Persentase Monitoring Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok (%)*				*100*	50.000.000,00	*(11 Kecamatan, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat		*100*	-	*DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN*
	3.30.04.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	*Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (Laporan)*		*48*	*48*	*48.00*	50.000.000,00	*(11 kecamatan, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	*Masyarakat*	*48*	-	*DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN*
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	*Persentase Pengendalian Harga dan Stok Barang (%)*				*100*	254.179.609,00	*(11 kecamatan, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat		*100*	-	*DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN*
	3.30.04.2.02.01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota						40.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			-	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)		*52*	*52*	*52.00*		*(11 kecamatan, KAB. PESISIR BARAT)*				*Masyarakat*	*52*		*DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN*
	3.30.04.2.02.03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota						214.179.609,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			-	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)		*4*	*4*	*4.00*		*(4 Lokasi, KAB. PESISIR BARAT)*				*Masyarakat*	*4*		*DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN*
	3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						25.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			-	
			Persentase Pengawasan Pupuk dan Pestisida (%)				*100*		*(11 kecamatan, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN*
	3.30.04.2.03.03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi						25.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			-	
			Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% (Laporan)		*12*	*12*	*12.00*		*(11 kecamatan, KAB. PESISIR BARAT)*				*Masyarakat*	*12*		*DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN*
3.	**3.30.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**						**263.874.019,00**			**Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**	**Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat**			**-**	
			Net Ekspor Barang dan Jasa (Juta Rupiah/Tenaga Kerja)				***43,184***									***DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN***
	3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						263.874.019,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			-	
			Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang Terfasilitasi (%)				*100*		*(Nasional, Luar Wilayah)*					*100*		*DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.05.2.01.02	Pameran Dagang Nasional	*Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang (Pelaku Usaha)*		*20*	*20*	*20.00*	263.874.019,00	*(Nasional, Luar Wilayah)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	*Masyarakat*	*20*	-	*DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN*
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**						**647.613.352,00**							**647.613.352,00**	
1.	**3.31.02**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	***Cakupan Bina Kelompok Pengrajin (%)***				***40***	**446.332.868,00**			**Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**	**Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat**			**446.332.868,00**	***DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN***
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	*Cakupan Bina Kelompok Pengrajin (%)*				*40*	446.332.868,00	*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat		*40*	446.332.868,00	*DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN*
	3.31.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen)*		*1*	*1*	*1.00*	150.012.000,00	*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	*Masyarakat*	*1.00*	150.012.000,00	*DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN*
	3.31.02.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Dokumen)*		*1.00*	*1.00*	*1.00*	80.000.000,00	*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	*Masyarakat*	*1.00*	80.000.000,00	*DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)*		*1*	*1*	*1.00*	97.320.868,00	*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	*Masyarakat*	*1.00*	97.320.868,00	*DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN*
	3.31.02.2.01.06	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	*Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)*		*1*	*1*	*1.00*	119.000.000,00	*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	*Masyarakat*	*1.00*	119.000.000,00	*DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN*
2.	**3.31.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	***Kontribusi sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (%)***				***3,99***	**201.280.484,00**			**Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**	**Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat**			**201.280.484,00**	***DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN***
	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Website yang Dikelola Dengan Baik (Situs)*				*1*	201.280.484,00	*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat		*1*	201.280.484,00	*DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN*
	3.31.04.2.01.02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	*Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas (Dokumen)*		*1.00*	*1.00*	*1.00*	201.280.484,00	*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	*Masyarakat*	*1.00*	201.280.484,00	*DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN*
	3.32	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**						**392.022.156,00**							**392.022.156,00**	
1.	**3.32.03**	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**						**99.651.202,00**			**Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing**	**Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**99.651.202,00**	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Nilai Rata-rata Indeks Perkembangan 100 Kawasan Transmigrasi Prioritas Kementerian yang direvitalisasi (Angka)	***42,53***			***44***									***DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN***
	3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Kelompok Usaha (Kelompok)*				*4*	99.651.202,00	*(Kecamata Ngambur, KAB. PESISIR BARAT)*		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia		*4*	99.651.202,00	*DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN*
	3.32.03.2.01.06	Pelatihan Transmigrasi	*Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan (Orang)*		*40*	*40*	*40.00*	99.651.202,00	*(Kecamatan Ngambur, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	*Masyarakat*	*40.00*	99.651.202,00	*DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN*
2.	**3.32.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	***Jumlah Kawasan Transmigrasi yang dibina (Lokasi)***				***1***	**292.370.954,00**			**Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing**	**Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**292.370.954,00**	***DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN***
	3.32.04.2.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	*Jumlah Kawasan Transmigrasi yang Dibina (Lokasi) (Lokasi)*				*1*	292.370.954,00	*(Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia		*1*	292.370.954,00	*DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN*
	3.32.04.2.01.01	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	*Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina (Kepala Keluarga)*		*30*	*30*	*30.00*	92.379.954,00	*(Kecamatan Ngambur, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	*Masyarakat*	*30.00*	92.379.954,00	*DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN*
	3.32.04.2.01.02	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman						199.991.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			199.991.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan (Satuan Permukiman)		*1*	*1*	*1.00*		*(Kecamatan Ngambur, KAB. PESISIR BARAT)*				*Masyarakat*	*1.00*		*DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN*
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**93.706.176.270,00**							**96.929.966.660,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**59.464.832.261,00**							**59.734.841.261,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)***				***92,50***	**45.665.574.245,00**			**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas**			**45.935.583.245,00**	***SEKRETARIAT DAERAH***
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu (%)*				*100*	146.585.600,00	*(Di Kantor Sekretariat Daerah, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*100*	416.585.600,00	*SEKRETARIAT DAERAH*
	4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)*		*1.00*	*1.00*	*1.00*	29.083.200,00	*(Di Kantor Sekretariat Daerah, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*aparatur*	*1.00*	29.083.200,00	*SEKRETARIAT DAERAH*
	4.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)*		*1.00*	*1.00*	*1.00*	29.573.800,00	*(Di Kantor Sekretariat Daerah, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*1.00*	29.573.800,00	*SEKRETARIAT DAERAH*
	4.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)*		*1.00*	*1.00*	*1.00*	29.646.800,00	*(Di Kantor Sekretariat Daerah, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*1.00*	29.646.800,00	*SEKRETARIAT DAERAH*
	4.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						29.077.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			29.077.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(Di Kantor Sekretariat Daerah, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1.00*		*SEKRETARIAT DAERAH*
	4.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						29.204.800,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			299.204.800,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(Di Kantor Sekretariat Daerah, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1.00*		*SEKRETARIAT DAERAH*
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						22.094.237.550,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			22.094.237.550,00	
			Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Sekretariat Daerah (%)				*100*		*(Di Kantor Sekretariat Daerah, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*SEKRETARIAT DAERAH*
	4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						22.089.485.550,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			22.089.485.550,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		*53*	*53*	*53*		*(di kantor sekretariat daerah, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*53*		*SEKRETARIAT DAERAH*
	4.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						1.584.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.584.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		*1*	*1*	*1*		*(Di Kantor Sekretariat Daerah, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*SEKRETARIAT DAERAH*
	4.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						1.584.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.584.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		*1*	*1*	*1*		*(Di Kantor Sekretariat Daerah, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*SEKRETARIAT DAERAH*
	4.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						1.584.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.584.000,00	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)		*1*	*1*	*1*		*(Di Kantor Sekretariat Daerah, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*SEKRETARIAT DAERAH*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Sekretariat Daerah (%)*				*100*	620.000.000,00	*(Di Kantor Sekretariat Daerah, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*100*	620.000.000,00	*SEKRETARIAT DAERAH*
	4.01.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	*Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)*		*12*	*12*	*12*	620.000.000,00	*(Di Kantor Sekretariat Daerah, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*12*	620.000.000,00	*SEKRETARIAT DAERAH*
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Sekretariat Daerah (%)*				*100*	631.292.400,00	*(Di Kantor Sekretariat Daerah, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*100*	631.292.400,00	*SEKRETARIAT DAERAH*
	4.01.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	*Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)*		*0*	*0*	*1.00*	21.936.400,00	*(Di Kantor Sekretariat Daerah, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*1.00*	21.936.400,00	*SEKRETARIAT DAERAH*
	4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)*		*290*	*290*	*290*	411.356.000,00	*(di kantor sekretariat daerah, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*290*	411.356.000,00	*SEKRETARIAT DAERAH*
	4.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)*		*50*	*50*	*50*	198.000.000,00	*(di luar Kab. Pesisir Barat, Luar Wilayah)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Peserta*	*50*	198.000.000,00	*SEKRETARIAT DAERAH*
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja (%)*				*100*	2.531.216.386,00	*(Di Kantor Sekretariat Daerah, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*100*	2.531.225.386,00	*SEKRETARIAT DAERAH*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						29.834.200,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			29.843.200,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		*1*	*1*	*1*		*(Di Kantor Sekretariat Daerah, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*SEKRETARIAT DAERAH*
	4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						361.524.240,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			361.524.240,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		*3*	*3*	*3*		*(Di Kantor Sekretariat Daerah, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*3*		*SEKRETARIAT DAERAH*
	4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						50.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			50.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		*12*	*12*	*12*		*(Dikantor Sekretariat Daerah, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*SEKRETARIAT DAERAH*
	4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						302.511.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					302.511.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*12*	*12*	*12*		*(Di Kantor Sekretariat Daerah, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*SEKRETARIAT DAERAH*
	4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu						1.155.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.155.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(Dikantor Sekretariat Daerah, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*SEKRETARIAT DAERAH*
	4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						632.346.946,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			632.346.946,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(Didalam Kabapaten Pesisir Barat dan Di Luar Daerah, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*SEKRETARIAT DAERAH*
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						3.574.584.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			3.574.584.000,00	
			Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja (%)				*100*		*(Dikantor Sekretariat Daerah, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*SEKRETARIAT DAERAH*
	4.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						500.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)		*1*	*1*	*1*		*(Dikantor Sekretariat Daearah, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*SEKRETARIAT DAERAH*
	4.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						2.140.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.140.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)		*10*	*10*	*10*		*(Dikantor Sekretariat Daerah, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*10*		*SEKRETARIAT DAERAH*
	4.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel						306.078.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			306.078.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)		*0*	*0*	*10.00*		*(Dikantor Sekretaraiat Daerah, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*10.00*		*SEKRETARIAT DAERAH*
	4.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						514.078.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			514.078.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		*40*	*40*	*42*		*(Dikantor Sekretariat Daerah, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*45*		*SEKRETARIAT DAERAH*
	4.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						5.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			5.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)		*1*	*1*	*1*		*(Dikantor Sekretariat Daerah, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*SEKRETARIAT DAERAH*
	4.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						109.428.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			109.428.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)		*12*	*12*	*12*		*(Dikantor Sekretariat Daerah, KAB. PESISIR BARAT)*				*aparatur*	*12*		*SEKRETARIAT DAERAH*
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						6.466.640.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			6.466.640.000,00	
			persentase pemenuhan Layanan Pendukung (%)				*100*		*(dikantor sekretariat daerah, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*SEKRETARIAT DAERAH*
	4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						1.465.640.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.465.640.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(di kantor sekretariat daerah, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*SEKRETARIAT DAERAH*
	4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						1.001.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.001.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(seluruh wilayah Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*SEKRETARIAT DAERAH*
	4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						4.000.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			4.000.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(dikantor sekretariat daerah, KAB. PESISIR BARAT)*				*aparatur*	*12*		*SEKRETARIAT DAERAH*
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						3.027.500.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			3.027.500.000,00	
			persentase barang milik daerah dalam kondisi baik (%)				*100*		*(dikantor sekretariat daerah, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*SEKRETARIAT DAERAH*
	4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						964.480.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			964.480.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		*18*	*18*	*18*		*(dikantor sekretariat daerah, KAB. PESISIR BARAT)*				*aparatur*	*18*		*SEKRETARIAT DAERAH*
	4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						1.178.320.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.178.320.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		*86*	*86*	*86*		*(dikantor sekretariat daerah, KAB. PESISIR BARAT)*				*aparatur*	*86*		*SEKRETARIAT DAERAH*
	4.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel						2.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.000.000,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)		*0*	*0*	*1.00*		*(dikantor sekretariat daerah, KAB. PESISIR BARAT)*				*aparatur*	*1.00*		*SEKRETARIAT DAERAH*
	4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						370.700.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			370.700.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		*12*	*12*	*12*		*(dikantor sekretariat daerah, KAB. PESISIR BARAT)*				*aparatur*	*12*		*SEKRETARIAT DAERAH*
	4.01.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya						2.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.000.000,00	
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)		*0*	*0*	*1.00*		*(dikantor sekretariat daerah, KAB. PESISIR BARAT)*				*aparatur*	*1.00*		*SEKRETARIAT DAERAH*
	4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						500.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			500.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*3*	*3*	*3*		*(dikantor sekretariat daerah, KAB. PESISIR BARAT)*				*aparatur*	*3*		*SEKRETARIAT DAERAH*
	4.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						5.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			5.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*1*	*1*	*1*		*(dikantor sekretariat, KAB. PESISIR BARAT)*				*aparatur*	*1*		*SEKRETARIAT DAERAH*
	4.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						5.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			5.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*1*	*1*	*1*		*(dikantor sekretariat daerah, KAB. PESISIR BARAT)*				*aparatur*	*1*		*SEKRETARIAT DAERAH*
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						588.789.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			588.789.500,00	
			jumlah bulan penyediaan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepada daerah (%)				*100*		*(dikantor sekretariat daerah, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*SEKRETARIAT DAERAH*
	4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						168.089.500,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			168.089.500,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)		*12*	*12*	*12*		*(dikantor sekretariat daerah, KAB. PESISIR BARAT)*				*orang*	*12*		*SEKRETARIAT DAERAH*
	4.01.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						95.700.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			95.700.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)		*32*	*32*	*32*		*(di kantor sekretariat daerah, KAB. PESISIR BARAT)*				*aparatur*	*32*		*SEKRETARIAT DAERAH*
	4.01.01.2.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						25.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			25.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang)		*2.00*	*2.00*	*2.00*		*(dikantor sekretariat daerah, KAB. PESISIR BARAT)*				*Orang*	*2.00*		*SEKRETARIAT DAERAH*
	4.01.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						300.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			300.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)		*2*	*2*	*2*		*(di kantor sekretariat daerah, KAB. PESISIR BARAT)*				*aparatur*	*2*		*SEKRETARIAT DAERAH*
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah						1.773.850.738,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.773.850.738,00	
			jumlah bulan fasilitasi kerumahtanggaan sekretariat daerah yang disediakan (%)				*100*		*(dikantor sekretariat daerah, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*SEKRETARIAT DAERAH*
	4.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah						813.680.120,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			813.680.120,00	
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)		*1*	*1*	*1*		*(di rumah dinas kepala daerah, KAB. PESISIR BARAT)*				*aparatur*	*1*		*SEKRETARIAT DAERAH*
	4.01.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah						626.680.120,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			626.680.120,00	
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)		*1*	*1*	*1*		*(dirumah dinas wakil kepala daerah, KAB. PESISIR BARAT)*				*aparatur*	*1*		*SEKRETARIAT DAERAH*
	4.01.01.2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah						333.490.498,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			333.490.498,00	
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan (Paket)		*1*	*1*	*1*		*(di kantor sekretariat daerah, KAB. PESISIR BARAT)*				*aparatur*	*1*		*SEKRETARIAT DAERAH*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	*cakupan pengelolaan organisasi perangkat daerah yang tertata dengan baik (%)*				*100*	791.220.000,00	*(dikantor sekretariat daerah, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*100*	791.220.000,00	*SEKRETARIAT DAERAH*
	4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	*Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen)*		*50*	*50*	*50*	135.000.000,00	*(dikantor sekretariat daerah, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*aparatur*	*50*	135.000.000,00	*SEKRETARIAT DAERAH*
	4.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Laporan)*		*50*	*50*	*50*	355.408.000,00	*(dikantor sekretariat daerah, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*50*	355.408.000,00	*SEKRETARIAT DAERAH*
	4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	*Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dokumen)*		*55*	*55*	*55*	180.812.000,00	*(dikantor sekretariat daerah, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*aparatur*	*55*	180.812.000,00	*SEKRETARIAT DAERAH*
	4.01.01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	*Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Dokumen)*		*55*	*55*	*55*	75.000.000,00	*(dikantor sekretariat daerah, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*55*	75.000.000,00	*SEKRETARIAT DAERAH*
	4.01.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (Dokumen)*		*1*	*1*	*1*	45.000.000,00	*(dikantor sekretariat daerah, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*aparatur*	*1*	45.000.000,00	*SEKRETARIAT DAERAH*
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	*Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Sekretariat Daerah (%)*				*100*	3.419.658.071,00	*(Di Kantor Sekretariat Daerah, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*100*	3.419.658.071,00	*SEKRETARIAT DAERAH*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan (Laporan)*		*1*	*1*	*1*	1.586.653.155,00	*(Di Kantor Sekretariat Daerah, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*1*	1.586.653.155,00	*SEKRETARIAT DAERAH*
	4.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Laporan)*		*1*	*1*	*1*	1.388.095.720,00	*(Di Kantor Sekretariat Daerah, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*1*	1.388.095.720,00	*SEKRETARIAT DAERAH*
	4.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	*Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan (Laporan)*		*1*	*1*	*1*	444.909.196,00	*(Di Kantor Sekretariat Daerah, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*1*	444.909.196,00	*SEKRETARIAT DAERAH*
2.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	***Cakupan penyelenggaraan kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat (%)***	***85***			***85***	**9.970.144.764,00**			**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas**			**9.970.144.764,00**	***SEKRETARIAT DAERAH***
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	*Persentase pelaporan administrasi tata pemerintahan Tepat Waktu (%)*				*100*	1.420.382.130,00	*(Di Lingkungan Kantor Pemerintahan Daerah, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*100*	1.420.382.130,00	*SEKRETARIAT DAERAH*
	4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	*Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan (Dokumen)*		*1*	*1*	*1*	927.737.800,00	*(Di Lingkungan Kantor Pemerintahan Daerah, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*1*	927.737.800,00	*SEKRETARIAT DAERAH*
	4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan (Dokumen)*		*4*	*4*	*4*	318.314.306,00	*(Di Kantor Sekretariat Daerah, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*4*	318.314.306,00	*SEKRETARIAT DAERAH*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah						174.330.024,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			174.330.024,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah (Dokumen)		*20*	*20*	*20*		*(Di Kantor Sekretariat Daerah, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*20*		*SEKRETARIAT DAERAH*
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat						5.955.419.560,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			5.955.419.560,00	
			Persentase pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat (%)				*100*		*(Di Kantor Sekretariat Daerah, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*SEKRETARIAT DAERAH*
	4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual						2.526.871.680,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.526.871.680,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Dokumen)		*4*	*4*	*4*		*(Di Kantor Sekretariat Daerah, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*4*		*SEKRETARIAT DAERAH*
	4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial						3.308.540.280,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			3.308.540.280,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB (Dokumen)		*2*	*2*	*2*		*(Di Kantor Sekretariat Daerah, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*2*		*SEKRETARIAT DAERAH*
	4.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat						120.007.600,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			120.007.600,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas (Dokumen)		*1*	*1*	*1*		*(Di Kantor Sekretariat Daerah, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*SEKRETARIAT DAERAH*
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum						2.135.933.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.135.933.600,00	
			Cakupan fasilitasi dan koordinasi hukum (%)				*100*		*(Di Kantor Sekretariat Daerah, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*SEKRETARIAT DAERAH*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	*Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun (Dokumen)*		*3*	*3*	*3*	889.146.200,00	*(Di Kantor Sekretariat Daerah, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*3*	889.146.200,00	*SEKRETARIAT DAERAH*
	4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	*Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum (Kasus)*		*1*	*1*	*1*	637.539.000,00	*(Di Kantor Sekretariat Daerah, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*1*	637.539.000,00	*SEKRETARIAT DAERAH*
	4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	*Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi (Dokumen)*		*2*	*2*	*2*	609.248.400,00	*(Di Kantor Sekretariat Daerah, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*2*	609.248.400,00	*SEKRETARIAT DAERAH*
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	*Cakupan pelaksanaan fasilitasi kerjasama daerah (%)*				*100*	458.409.474,00	*(Di Kantor Sekretariat Daerah, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*100*	458.409.474,00	*SEKRETARIAT DAERAH*
	4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri (Dokumen)*		*2*	*2*	*2*	458.409.474,00	*(Di Kantor Sekretariat Daerah, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*2*	458.409.474,00	*SEKRETARIAT DAERAH*
3.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	***cakupan penyelenggaraan kebijakan perekonomian dan pembangunan (%)***				***85,00***	**3.829.113.252,00**			**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas**			**3.829.113.252,00**	***SEKRETARIAT DAERAH***
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	*Persentase pelaksaan kebijakan perekonomian (%)*				*100*	1.223.934.984,00	*(Di Kantor Sekretariat Daerah, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*100*	1.223.934.984,00	*SEKRETARIAT DAERAH*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD (Dokumen)*		*1*	*1*	*1*	115.686.296,00	*(Di Kantor Sekretariat Daerah, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*1*	115.686.296,00	*SEKRETARIAT DAERAH*
	4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	*Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian (Laporan)*		*3*	*3*	*3*	832.255.028,00	*(Di Kantor Sekretariat Daerah, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*3*	832.255.028,00	*SEKRETARIAT DAERAH*
	4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	*Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil (Dokumen)*		*1*	*1*	*1*	196.493.660,00	*(Di Kantor Sekretariat Daerah, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*Aparatur*	*1*	196.493.660,00	*SEKRETARIAT DAERAH*
	4.01.03.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD (Dokumen)*		*1*	*1*	*1*	79.500.000,00	*(Di Kantor Sekretariat Daerah, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*1*	79.500.000,00	*SEKRETARIAT DAERAH*
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	*Cakupan Penyelenggaraan Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan (%)*				*100*	1.328.825.600,00	*(Di Luar Daerah, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*100*	1.328.825.600,00	*SEKRETARIAT DAERAH*
	4.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah (Dokumen)*		*1*	*1*	*1*	309.931.000,00	*(Di Luar Daerah, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*1*	309.931.000,00	*SEKRETARIAT DAERAH*
	4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	*Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (Laporan)*		*1*	*1*	*1*	551.279.000,00	*(Di Seluruh Kecamatan dan Di Luar Daerah, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*1*	551.279.000,00	*SEKRETARIAT DAERAH*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	*Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)*		*4*	*4*	*4*	467.615.600,00	*(Di Luar Daerah, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*4*	467.615.600,00	*SEKRETARIAT DAERAH*
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	*Cakupan Penyelenggaraan Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan (%)*				*100*	1.125.155.500,00	*(Di Kantor Sekretariat Daerah dan Di Luar Daerah, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*100*	1.125.155.500,00	*SEKRETARIAT DAERAH*
	4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)*		*150.00*	*150.00*	*150.00*	305.145.000,00	*(Di Kantor Sekretariat Daerah dan Di Luar Daerah, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*150.00*	305.145.000,00	*SEKRETARIAT DAERAH*
	4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	*Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Dokumen)*		*150.00*	*150.00*	*150.00*	557.573.000,00	*(Di Kantor Sekretariat Daerah dan Di Luar Daerah, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*150.00*	557.573.000,00	*SEKRETARIAT DAERAH*
	4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (Orang)*		*4.00*	*4.00*	*4.00*	262.437.500,00	*(Di Kantor Sekretariat Daerah dan Di Luar Daerah, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Peserta*	*4.00*	262.437.500,00	*SEKRETARIAT DAERAH*
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	*Cakupan Penyelenggaraan Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan (%)*				*100*	151.197.168,00	*(Di Kantor Sekretariat Daerah, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*100*	151.197.168,00	*SEKRETARIAT DAERAH*
	4.01.03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan						37.926.988,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			37.926.988,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja (Dokumen)		*1*	*1*	*1*		*(Di Kantor Sekretariat Daerah, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*SEKRETARIAT DAERAH*
	4.01.03.2.04.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup						34.593.988,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			34.593.988,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian (Dokumen)		*1*	*1*	*1*		*(Di Kantor Sekretariat Daerah, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*SEKRETARIAT DAERAH*
	4.01.03.2.04.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air						78.676.192,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			78.676.192,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan (Dokumen)		*1*	*1*	*1*		*(Di Kantor Sekretariat Daerah dan Di Luar Daerah, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*SEKRETARIAT DAERAH*
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**						**34.241.344.009,00**							**37.195.125.399,00**	
1.	**4.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**20.420.263.022,00**			**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas**			**21.991.936.313,00**	
			Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	***92,5***			***92,50***									***SEKRETARIAT DPRD***
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						6.400.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			7.040.000,00	
			Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Ealuasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu (%)				*100*		*(Sekretariat DPRD, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*SEKRETARIAT DPRD*
	4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						1.400.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.540.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)		*2.00*	*2.00*	*2.00*		*(Sekretariat DPRD, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*2.00*		*SEKRETARIAT DPRD*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)*		*2.00*	*2.00*	*2.00*	5.000.000,00	*(Sekretariat DPRD, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik		*Aparatur*	*2.00*	5.500.000,00	*SEKRETARIAT DPRD*
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu (%)*				*100*	1.745.556.900,00	*(Sekretariat DPRD, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*100*	1.920.112.590,00	*SEKRETARIAT DPRD*
	4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)*		*12.00*	*16.00*	*16.00*	1.740.056.900,00	*(Sekretariat DPRD, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik		*Aparatur*	*18.00*	1.914.062.590,00	*SEKRETARIAT DPRD*
	4.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)*		*1.00*	*1.00*	*1.00*	2.500.000,00	*(Sekretariat DPRD, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik		*Aparatur*	*1.00*	2.750.000,00	*SEKRETARIAT DPRD*
	4.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)*		*2.00*	*2.00*	*2.00*	2.000.000,00	*(Sekretariat DPRD, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik		*Aparatur*	*2.00*	2.200.000,00	*SEKRETARIAT DPRD*
	4.02.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)*		*1.00*	*1.00*	*1.00*	1.000.000,00	*(Sekretariat DPRD, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik		*Aparatur*	*1.00*	1.100.000,00	*SEKRETARIAT DPRD*
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						500.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			550.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase aparatur yg berkinerja baik (%)				*100*		*(Di Luar Pesisir Barat, Luar Wilayah)*					*100*		*SEKRETARIAT DPRD*
	4.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)*		*12.00*	*16.00*	*16.00*	500.000.000,00	*(Sekretariat DPRD, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik		*Aparatur*	*18.00*	550.000.000,00	*SEKRETARIAT DPRD*
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja (%)*				*100*	1.654.606.663,00	*(Di Dalam dan di Luar Pesisir Barat, Luar Wilayah)*		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*100*	1.304.714.318,00	*SEKRETARIAT DPRD*
	4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)*		*12.00*	*12.00*	*12.00*	32.590.400,00	*(Sekretariat DPRD, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik		*Aparatur*	*12.00*	35.849.440,00	*SEKRETARIAT DPRD*
	4.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)*		*12.00*	*12.00*	*12.00*	21.780.000,00	*(Sekretariat DPRD, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik		*Aparatur*	*12.00*	23.958.000,00	*SEKRETARIAT DPRD*
	4.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)*		*11.00*	*11.00*	*11.00*	45.680.000,00	*(Sekretariat DPRD, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik		*Aparatur*	*11.00*	50.248.000,00	*SEKRETARIAT DPRD*
	4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)*		*12.00*	*12.00*	*12.00*	231.497.263,00	*(Sekretariat DPRD, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik		*Aparatur*	*12.00*	254.646.989,00	*SEKRETARIAT DPRD*
	4.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)*		*12.00*	*12.00*	*12.00*	700.000.000,00	*(Sekretariat DPRD, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik		*Aparatur*	*12.00*	254.646.989,00	*SEKRETARIAT DPRD*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)*		*11.00*	*11.00*	*11.00*	347.500.000,00	*(Sekretariat DPRD, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik		*Aparatur*	*11.00*	382.250.000,00	*SEKRETARIAT DPRD*
	4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)*		*12.00*	*12.00*	*12.00*	275.559.000,00	*(Di Dalam dan di Luar Pesisir Barat, Luar Wilayah)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik		*Aparatur*	*12.00*	303.114.900,00	*SEKRETARIAT DPRD*
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase pemenuhan Prasarana dan prasarana pendukung kinerja (%)*				*100*	469.280.000,00	*(Sekretariat DPRD, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*100*	516.208.000,00	*SEKRETARIAT DPRD*
	4.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)*		*32.00*	*32.00*	*32.00*	229.780.000,00	*(Sekretariat DPRD, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik		*Aparatur*	*32.00*	252.758.000,00	*SEKRETARIAT DPRD*
	4.02.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	*Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)*		*2.00*	*2.00*	*2.00*	239.500.000,00	*(Sekretariat DPRD, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik		*Aparatur*	*2.00*	263.450.000,00	*SEKRETARIAT DPRD*
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemenuhan prasarana dan prasarana pendukung kinerja (%)*				*100*	652.223.000,00	*(Sekretariat DPRD, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*100*	717.445.300,00	*SEKRETARIAT DPRD*
	4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)*		*12.00*	*12.00*	*12.00*	288.000.000,00	*(Sekretariat DPRD, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik		*Aparatur*	*12.00*	316.800.000,00	*SEKRETARIAT DPRD*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)*		*12.00*	*12.00*	*12.00*	57.000.000,00	*(Sekretariat DPRD, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik		*Aparatur*	*12.00*	62.700.000,00	*SEKRETARIAT DPRD*
	4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)*		*12.00*	*12.00*	*12.00*	307.223.000,00	*(Sekretariat DPRD, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik		*Aparatur*	*12.00*	337.945.300,00	*SEKRETARIAT DPRD*
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase barang milik daerah yang dalam kondisi baik (%)*				*100*	957.967.819,00	*(Sekretariat DPRD, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*100*	1.098.764.601,00	*SEKRETARIAT DPRD*
	4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)*		*7.00*	*7.00*	*7.00*	215.700.000,00	*(Sekretariat DPRD, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik		*Aparatur*	*7.00*	237.270.000,00	*SEKRETARIAT DPRD*
	4.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)*		*1.00*	*1.00*	*1.00*	580.126.019,00	*(Sekretariat DPRD, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik		*Aparatur*	*1.00*	683.138.621,00	*SEKRETARIAT DPRD*
	4.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)*		*1.00*	*1.00*	*1.00*	162.141.800,00	*(Sekretariat DPRD, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik		*Aparatur*	*1.00*	178.355.980,00	*SEKRETARIAT DPRD*
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	*Persentase layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD (%)*				*100*	14.135.336.800,00	*(Di Dalam dan di Luar Pesisir Barat, Luar Wilayah)*		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*100*	15.548.870.480,00	*SEKRETARIAT DPRD*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	*Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD (Orang/Bulan)*		*26.00*	*26.00*	*26.00*	13.564.836.800,00	*(Sekretariat DPRD, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik		*Aparatur*	*26.00*	14.921.320.480,00	*SEKRETARIAT DPRD*
	4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	*Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan (Paket)*		*300.00*	*300.00*	*125.00*	300.000.000,00	*(Sekretariat DPRD, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik		*Aparatur*	*125.00*	330.000.000,00	*SEKRETARIAT DPRD*
	4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	*Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD (Orang)*		*25.00*	*25.00*	*25.00*	270.500.000,00	*(Sekretariat DPRD, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik		*Aparatur*	*25.00*	297.550.000,00	*SEKRETARIAT DPRD*
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	*Persentase layanan administrasi DPRD yang terpenuhi (%)*				*100*	298.891.840,00	*(Sekretariat DPRD, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*100*	328.781.024,00	*SEKRETARIAT DPRD*
	4.02.01.2.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD (Laporan)*		*34.00*	*34.00*	*34.00*	66.420.850,00	*(Sekretariat DPRD, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik		*Aparatur*	*34.00*	73.062.935,00	*SEKRETARIAT DPRD*
	4.02.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD (Laporan)*		*60.00*	*60.00*	*60.00*	232.470.990,00	*(Sekretariat DPRD, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik		*Aparatur*	*60.00*	255.718.089,00	*SEKRETARIAT DPRD*
2.	**4.02.02**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	***tersusun dan terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen rencana lima tahun (RPJM) maupun dokumen rencana tahunan (RKPD) (%)***				***100***	**13.821.080.987,00**			**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas**			**15.203.189.086,00**	***SEKRETARIAT DPRD***

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	*Tersusun dan terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen Rencana lima tahunan (RPJM) Maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) (%)*				*100*	576.455.720,00	*(Sekretariat DPRD, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*100*	634.101.292,00	*SEKRETARIAT DPRD*
	4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Dokumen)*		*1.00*	*1.00*	*1.00*	16.355.720,00	*(Sekretariat DPRD, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik		*Aparatur*	*1.00*	17.991.292,00	*SEKRETARIAT DPRD*
	4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Dokumen)*		*4.00*	*4.00*	*4.00*	560.100.000,00	*(Sekretariat DPRD, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik		*Aparatur*	*4.00*	616.110.000,00	*SEKRETARIAT DPRD*
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	*Tersusun dan terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen Rencana lima tahunan (RPJM) Maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) (%)*				*100*	405.350.000,00	*(Sekretariat DPRD, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*100*	445.885.000,00	*SEKRETARIAT DPRD*
	4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	*Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS (Dokumen)*		*0.00*	*6.00*	*6.00*	62.898.000,00	*(Sekretariat DPRD, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik		*Aparatur*	*6.00*	69.187.800,00	*SEKRETARIAT DPRD*
	4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	*Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS (Dokumen)*		*0.00*	*6.00*	*6.00*	62.898.000,00	*(Sekretariat DPRD, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik		*Aparatur*	*6.00*	69.187.800,00	*SEKRETARIAT DPRD*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	*Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD (Dokumen)*		*0.00*	*6.00*	*6.00*	91.286.000,00	*(Sekretariat DPRD, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik		*Aparatur*	*6.00*	100.414.600,00	*SEKRETARIAT DPRD*
	4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	*Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan (Dokumen)*		*0.00*	*6.00*	*6.00*	91.286.000,00	*(Sekretariat DPRD, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*Aparatur*	*6.00*	100.414.600,00	*SEKRETARIAT DPRD*
	4.02.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	*Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD (Dokumen)*		*0.00*	*6.00*	*6.00*	96.982.000,00	*(Sekretariat DPRD, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik		*Aparatur*	*6.00*	106.680.200,00	*SEKRETARIAT DPRD*
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	*Tersusun dan terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen Rencana lima tahunan (RPJM) Maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) (%)*				*100*	103.750.000,00	*(Sekretariat DPRD, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*100*	114.125.000,00	*SEKRETARIAT DPRD*
	4.02.02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum (Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*10.00*	20.750.000,00	*(Sekretariat DPRD, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik		*Aparatur*	*10.00*	22.825.000,00	*SEKRETARIAT DPRD*
	4.02.02.2.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur (Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*10.00*	20.750.000,00	*(Sekretariat DPRD, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik		*Aparatur*	*10.00*	22.825.000,00	*SEKRETARIAT DPRD*
	4.02.02.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat						20.750.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik				22.825.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*10.00*		*(Sekretariat DPRD, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*10.00*		*SEKRETARIAT DPRD*
	4.02.02.2.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian						20.750.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik				22.825.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*10.00*		*(Sekretariat DPRD, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*10.00*		*SEKRETARIAT DPRD*
	4.02.02.2.03.05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam						20.750.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik				22.825.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*10.00*		*(Sekretariat DPRD, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*10.00*		*SEKRETARIAT DPRD*
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD						2.754.835.437,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			3.030.318.981,00	
			Tersusun dan terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen Rencana lima tahunan (RPJM) Maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) (%)				*100*		*(Di Dalam dan di Luar Pesisir Barat, Luar Wilayah)*					*100*		*SEKRETARIAT DPRD*
	4.02.02.2.04.01	Orientasi DPRD						300.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik				330.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Di Luar Pesisir Barat, Luar Wilayah)*				*Aparatur*	*0.00*		*SEKRETARIAT DPRD*
	4.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD						1.912.564.937,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik				2.103.821.431,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD (Dokumen)		*12.00*	*12.00*	*12.00*		*(Diluar Pesisir Barat, Luar Wilayah)*				*Aparatur*	*12.00*		*SEKRETARIAT DPRD*
	4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli						195.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik				214.500.000,00	
			Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli (Orang)		*4.00*	*4.00*	*4.00*		*(Sekretariat DPRD, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*4.00*		*SEKRETARIAT DPRD*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	*Jumlah Tenaga Ahli Fraksi (Orang)*		*6.00*	*6.00*	*6.00*	347.270.500,00	*(Sekretariat DPRD, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik		*Aparatur*	*6.00*	381.997.550,00	*SEKRETARIAT DPRD*
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	*Tersusun dan terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen Rencana lima tahunan (RPJM) Maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) (%)*				*100*	1.100.875.350,00	*(Semua Wilayah Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*100*	1.210.962.885,00	*SEKRETARIAT DPRD*
	4.02.02.2.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD (Laporan)*		*36.00*	*36.00*	*36.00*	130.000.000,00	*(Semua Wilayah Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik		*Aparatur, Masyarakat*	*36.00*	143.000.000,00	*SEKRETARIAT DPRD*
	4.02.02.2.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	*Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun (Dokumen)*		*1.00*	*1.00*	*1.00*	27.152.750,00	*(Sekretariat DPRD, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik		*Aparatur, Masyarakat*	*1.00*	29.868.025,00	*SEKRETARIAT DPRD*
	4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	*Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses (Dokumen)*		*3.00*	*3.00*	*3.00*	943.722.600,00	*(Semua Wilayah Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik		*Aparatur, Masyarakat*	*3.00*	1.038.094.860,00	*SEKRETARIAT DPRD*
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	*Tersusun dan terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen Rencana lima tahunan (RPJM) Maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) (%)*				*100*	8.879.814.480,00	*(Di Dalam dan di Luar Pesisir Barat, Luar Wilayah)*		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*100*	9.767.795.928,00	*SEKRETARIAT DPRD*
	4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD						8.850.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik				9.735.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD (Dokumen)		*28.00*	*28.00*	*28.00*		*(Di Luar Pesisir Barat, Luar Wilayah)*				*Aparatur*	*28.00*		*SEKRETARIAT DPRD*
	4.02.02.2.08.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah						29.814.480,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik				32.795.928,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah (Dokumen)		*12.00*	*12.00*	*12.00*		*(Sekretariat DPRD, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12.00*		*SEKRETARIAT DPRD*
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**222.625.392.008,00**							**25.711.687.189,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**						**10.152.174.063,00**							**10.152.174.063,00**	
1.	**5.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)***	***90***			***92,50***	**3.866.833.917,00**			**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas**			**3.866.833.917,00**	***BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH***
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)*				*100*	28.693.000,00	*(Krui, Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*100*	28.693.000,00	*BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH*
	5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*2*	4.025.000,00	*(Krui, Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*2*	4.025.000,00	*BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH*
	5.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)*		*1*	*1*	*1*	4.106.000,00	*(Kantor Bappelitbangda, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*1*	4.106.000,00	*BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)*		*1*	*1*	*1*	4.106.000,00	*(Kantor Bappelitbangda, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*1*	4.106.000,00	*BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH*
	5.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)*		*1*	*1*	*1*	4.106.000,00	*(Kantor Bappelitbangda, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*1*	4.106.000,00	*BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH*
	5.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)*		*1*	*1*	*1*	4.106.000,00	*(Kantor Bappelitbangda, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*1*	4.106.000,00	*BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH*
	5.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)*		*1*	*1*	*1*	4.152.000,00	*(Kantor Bappelitbangda, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*1*	4.152.000,00	*BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH*
	5.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)*		*1*	*1*	*1*	4.092.000,00	*(Kantor Bappelitbangda, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*1*	4.092.000,00	*BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH*
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.673.722.917,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.673.722.917,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu (%)				*100*		*(Krui, Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH*
	5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)*		*20*	*19*	*19*	2.659.686.917,00	*(Kantor Bappelitbangda, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*19*	2.659.686.917,00	*BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH*
	5.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)*		*1*	*1*	*1*	4.130.000,00	*(Kantor Bappelitbangda, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*1*	4.130.000,00	*BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH*
	5.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)*		*2*	*2*	*2*	5.834.000,00	*(Kantor Bappelitbangda, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*2*	5.834.000,00	*BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH*
	5.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)*		*1*	*1*	*1*	4.072.000,00	*(Kantor Bappelitbangda, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*1*	4.072.000,00	*BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH*
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Aparatur yang berkinerja Baik (%)*				*100*	125.000.000,00	*(Krui, Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*100*	125.000.000,00	*BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)*		*20*	*20*	*19*	125.000.000,00	*(Diluar Wilayah Kabupaten Pesisir Barat, Luar Wilayah)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*19*	125.000.000,00	*BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH*
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja (%)*				*100*	634.648.000,00	*(Krui, Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*100*	634.648.000,00	*BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH*
	5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)*		*1*	*1*	*1*	25.000.000,00	*(Lokasi Pameran di Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*1*	25.000.000,00	*BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH*
	5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)*		*12*	*12*	*12*	114.648.000,00	*(Kantor Bappelitbangda, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*12*	114.648.000,00	*BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH*
	5.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)*		*12*	*12*	*12*	84.000.000,00	*(Kantor Bappelitbangda, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*12*	84.000.000,00	*BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH*
	5.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu						11.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			11.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)		*11*	*11*	*11*		*(Kantor Bappelitbangda, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*11*		*BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH*
	5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						400.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			400.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(Didalam Wilayah Kab. Pesisir Barat dan diluar Wilayah Kab. Pesisir Barat, Luar Wilayah)*				*Aparatur*	*12*		*BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH*
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						20.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			20.000.000,00	
			Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja (%)				*100*		*(Kantor Bappelitbangda, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH*
	5.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						20.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			20.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		*2*	*1*	*1*		*(Kantor Bappelitbangda, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH*
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						216.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			216.000.000,00	
			Persentase Pemenuhan Pelayanan Pendukung (%)				*100*		*(Krui, Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH*
	5.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						216.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			216.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(Krui, Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dalam Kondisi Baik (%)*				*100*	168.770.000,00	*(Krui, Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*100*	168.770.000,00	*BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH*
	5.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)*		*5*	*5*	*5*	135.250.000,00	*(Krui, Kab Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*5*	135.250.000,00	*BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH*
	5.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)*		*12*	*12*	*12*	8.520.000,00	*(Kantor Bappelitbangda, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*12*	8.520.000,00	*BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH*
	5.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)*		*0.00*	*0.00*	*12*	25.000.000,00	*(Kantor Bapppelitbangda, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*12*	25.000.000,00	*BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH*
2.	**5.01.02**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	***Cakupan Konsistensi Dokumen Perencanaan Terhadap Dokumen Penganggaran (%)***				***100***	**3.155.165.031,00**			**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas**			**3.155.165.031,00**	***BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH***
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan						2.150.294.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.150.294.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke Dalam APBD (%)				*100*		*(Krui, Kab Ppesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH*
	5.01.02.2.01.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah						348.574.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			348.574.000,00	
			Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) (Dokumen)		*1*	*2*	*2*		*(Krui, Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*2*		*BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH*
	5.01.02.2.01.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya						200.808.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			200.808.000,00	
			Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah (Dokumen)		*1*	*1*	*1*		*(Krui, Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH*
	5.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik						175.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			175.000.000,00	
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (Berita Acara)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Krui, Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH*
	5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah						125.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			125.000.000,00	
			Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (Berita Acara)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Krui, Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH*
	5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota						514.807.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			514.807.000,00	
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Berita Acara)		*1*	*1*	*2*		*(Krui, Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.02.2.01.06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	*Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan (Usulan)*		*1*	*1*	*1*	154.263.000,00	*(Krui, Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*1*	154.263.000,00	*BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH*
	5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen)*		*2*	*2*	*3*	631.842.000,00	*(Krui, Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*2*	631.842.000,00	*BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH*
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	*Cakupan data dan Informasi Pembangunan Daerah (%)*				*100*	435.778.000,00	*(Krui, Kab Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*100*	435.778.000,00	*BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH*
	5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) (Dokumen)*		*1*	*2*	*1*	263.042.000,00	*(Krui, Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*1*	263.042.000,00	*BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH*
	5.01.02.2.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	*Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi (Orang)*		*39*	*39*	*39*	172.736.000,00	*(Krui, Kab Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*39*	172.736.000,00	*BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH*
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah						569.093.031,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			569.093.031,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Penjabaran Konsistensi rogram RPJMD kedalam RKPD (%)				*100*		*(Krui, Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH*
	5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota						224.089.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			224.089.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)		*1*	*1*	*1*		*(Krui, Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH*
	5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah						345.004.031,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			345.004.031,00	
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)		*2*	*4*	*2*		*(Krui, Kab Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*2*		*BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH*
3.	**5.01.03**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**						**3.130.175.115,00**			**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas**			**3.130.175.115,00**	
			Cakupan Konsistensi Keselarasan Program Prioritas Daerah Terhadap Program Prioritas Pusat (%)				***85***									***BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH***
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia						1.589.255.115,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.589.255.115,00	
			Rata-rata capaian kinerja bidang pemerintahan dan pembangunan manusia (%)				*70*		*(Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*70*		*BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH*
	5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						218.604.115,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			218.604.115,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)		*1*	*1*	*1*		*(Krui, Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.03.2.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	*Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)*		*1*	*1*	*1*	191.139.000,00	*(Krui, Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*1*	191.139.000,00	*BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH*
	5.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	*Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)*		*1*	*1*	*1*	194.017.000,00	*(Krui, Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*1*	194.017.000,00	*BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH*
	5.01.03.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	*Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan (Laporan)*		*1*	*1*	*1*	193.075.000,00	*(Krui, Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*1*	193.075.000,00	*BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH*
	5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*1*	196.656.000,00	*(Krui, Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*1*	196.656.000,00	*BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH*
	5.01.03.2.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	*Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*1*	196.656.000,00	*(Krui, Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*1*	196.656.000,00	*BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH*
	5.01.03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia						189.335.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			189.335.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)		*1*	*1*	*1*		*(Krui, Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH*
	5.01.03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia						209.773.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			209.773.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)		*1*	*1*	*1*		*(Krui, Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH*
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)						771.714.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			771.714.000,00	
			Rata-rata capaian kinerja bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) (%)				*70*		*(Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*70*		*BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH*
	5.01.03.2.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian						190.460.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			190.460.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Krui, Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH*
	5.01.03.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian						190.062.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			190.062.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian (Laporan)		*0.00*	*1*	*1*		*(Krui, Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH*
	5.01.03.2.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA						190.460.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			190.460.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Krui, Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.03.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA						200.732.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			200.732.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA (Laporan)		*0.00*	*1*	*1*		*(Krui, Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH*
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan						769.206.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			769.206.000,00	
			Rata-rata capaian kinerja bidang infrastruktur dan kewilayahan (%)				*70*		*(Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*70*		*BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH*
	5.01.03.2.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur						190.460.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			190.460.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)		*1*	*1*	*1*		*(Krui, Kab Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH*
	5.01.03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur						201.218.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			201.218.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur (Laporan)		*1*	*1*	*1*		*(Krui, Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH*
	5.01.03.2.03.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan						186.491.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			186.491.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)		*1*	*1*	*1*		*(Krui, Kab Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH*
	5.01.03.2.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan						191.037.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			191.037.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan (Laporan)		*1*	*1*	*1*		*(Krui, Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH*
	5.02	**KEUANGAN**						**203.966.793.768,00**							**7.053.088.949,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**15.878.405.191,00**			**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas**			**3.952.775.142,00**	
			Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)				***92.50***									***BADAN PENDAPATAN DAERAH***
			Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)				***92,50***									***BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH***
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						28.650.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			15.150.500,00	
			Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu (%)				*100*		*(Kantor BPKAD Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH*
			Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu (%)				*100*		*(Kantor BAPENDA Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*BADAN PENDAPATAN DAERAH*
	5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						9.703.250,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			9.703.250,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)		*2*	*2*	*2*		*(Kantor BPKAD Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*2*		*BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH*
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)		*2.00*	*2.00*	*2.00*		*(Kantor BAPENDA, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*2.00*		*BADAN PENDAPATAN DAERAH*
	5.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						2.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					-	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)		*1*	*1*	*1*		*(Kantor BPKAD Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH*
	5.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						2.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					-	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)		*1*	*1*	*1*		*(Kantor BPKAD Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH*
	5.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						2.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					-	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)		*1*	*1*	*1*		*(Kantor BPKAD Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH*
	5.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						2.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					-	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)		*1*	*1*	*1*		*(Kantor BPKAD Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH*
	5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						8.947.250,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			5.447.250,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		*1.00*	*2.00*	*2.00*		*(Kantor BAPENDA, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*2.00*		*BADAN PENDAPATAN DAERAH*
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		*1*	*1*	*1*		*(Kantor BPKAD Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH*
	5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						2.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					-	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		*1*	*1*	*1*		*(Kantor BPKAD Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH*
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						13.085.871.711,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.859.287.142,00	
			Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu (%)				*100*		*(Kantor BPKAD Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH*
			Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)				*100*		*(Kantor BAPENDA Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*BADAN PENDAPATAN DAERAH*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						13.064.423.561,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.848.838.992,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		*14.00*	*14.00*	*14.00*		*(Kantor BAPENDA, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*14.00*		*BADAN PENDAPATAN DAERAH*
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		*14*	*14*	*14*		*(Kantor BPKAD Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*14*		*BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH*
	5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						7.628.200,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.628.200,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		*1*	*1*	*1*		*(Kantor BPKAD Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH*
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(Kantor BAPENDA, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1.00*		*BADAN PENDAPATAN DAERAH*
	5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						7.436.200,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.436.200,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		*1.00*	*2.00*	*2.00*		*(Kantor BAPENDA, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*2.00*		*BADAN PENDAPATAN DAERAH*
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		*2*	*2*	*2*		*(Kantor BPKAD Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*2*		*BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH*
	5.02.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						6.383.750,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					5.383.750,00	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(Kantor BAPENDA, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1.00*		*BADAN PENDAPATAN DAERAH*
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)		*1*	*1*	*1*		*(Kantor BPKAD Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH*
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						360.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase aparatur yang berkinerja baik (%)				*100*		*(Kantor BPKAD Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH*
			Persentase Aparatur yang Berkinerja Baik (%)				*100*		*(Kantor BAPENDA KAbupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*BADAN PENDAPATAN DAERAH*
	5.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						60.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					-	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)		*60*	*0.00*	*60*		*(Kabupaten Pesisir Barat atau luar daerah, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*60*		*BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH*
	5.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						300.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			100.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)		*10.00*	*12.00*	*12.00*		*(Bandar Lampung, Pulau Jawa, Luar Wilayah)*				*Aparatur*	*12.00*		*BADAN PENDAPATAN DAERAH*
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)		*22*	*22*	*23*		*(Kabupaten Pesisir Barat atau luar daerah, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*23*		*BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH*
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						1.402.512.980,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			509.827.500,00	
			Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja (%)				*100*		*(Kantor BAPENDA Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*BADAN PENDAPATAN DAERAH*
			Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja (%)				*100*		*(Kabupaten Pesisir Barat atau luar daerah, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH*
	5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						50.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			25.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(Kecamatan Pesisir Tengah, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1.00*		*BADAN PENDAPATAN DAERAH*
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		*1*	*1*	*1*		*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH*
	5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						490.827.500,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			100.827.500,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*12.00*	*12.00*	*12.00*		*(Kantor BAPENDA, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12.00*		*BADAN PENDAPATAN DAERAH*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*12*	*12*	*12*		*(Kabupaten Pesisir Barat dan luar daerah, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH*
	5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						84.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			12.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		*12*	*12*	*12*		*(Kabupaten Pesisir Barat atau luar daerah, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH*
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		*10.00*	*10.00*	*12.00*		*(Kantor BAPENDA, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12.00*		*BADAN PENDAPATAN DAERAH*
	5.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu						172.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			22.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)		*11.00*	*12.00*	*11.00*		*(Kantor BAPENDA, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*11.00*		*BADAN PENDAPATAN DAERAH*
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)		*11*	*11*	*11*		*(Kabupaten Pesisir Barat atau luar daerah, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*11*		*BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH*
	5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						605.685.480,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			350.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(Kabupaten Pesisir Barat atau luar daerah, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH*
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*12.00*	*12.00*	*12.00*		*(Seluruh Kecamatan di Pesisir Barat dan Wilayah di luar Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12.00*		*BADAN PENDAPATAN DAERAH*
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						215.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			150.000.000,00	
			Persentase ketersediaan peralatan dan mesin (%)				*100*		*(Kabupaten Pesisir Barat atau luar daerah, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH*
			Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja (%)				*100*		*(Kantor BAPENDA KAbupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*BADAN PENDAPATAN DAERAH*
	5.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						215.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		*0.00*	*15*	*5*		*(Kabupaten Pesisir Barat atau luar daerah, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*5*		*BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH*
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		*0.00*	*0.00*	*12.00*		*(Kantor BAPENDA, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12.00*		*BADAN PENDAPATAN DAERAH*
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						452.420.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			185.760.000,00	
			Persentase Pemenuhan Layanan Pendukung (%)				*100*		*(Kantor BAPENDA KAbupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*BADAN PENDAPATAN DAERAH*
			Persentase pemenuhan Layanan Pendukung (%)				*100*		*(Kabupaten Pesisir Barat atau luar daerah, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH*
	5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						37.500.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					-	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(Kabupaten Pesisir Barat atau luar daerah, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH*
	5.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						401.160.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			180.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(Kabupaten Pesisir Barat atau luar daerah, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH*
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)		*12.00*	*12.00*	*12.00*		*(Kantor BAPENDA, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12.00*		*BADAN PENDAPATAN DAERAH*
	5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						13.760.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			5.760.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(Kabupaten Pesisir Barat atau luar daerah, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH*
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		*12.00*	*12.00*	*12.00*		*(Kantor BAPENDA, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12.00*		*BADAN PENDAPATAN DAERAH*
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						333.950.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			132.750.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase Barang Milik Daerah yang Dalam Kondisi Baik (%)				*100*		*(Kantor BAPENDA Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*BADAN PENDAPATAN DAERAH*
	5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						253.100.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			112.750.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		*7*	*7*	*7*		*(Kabupaten Pesisir Barat atau luar daerah, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*7*		*BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH*
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		*12.00*	*8.00*	*8.00*		*(Kantor BAPENDA, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*8.00*		*BADAN PENDAPATAN DAERAH*
	5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						10.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			10.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		*0.00*	*0.00*	*10*		*(Kantor BAPENDA, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*10*		*BADAN PENDAPATAN DAERAH*
	5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						10.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			10.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(Kantor BAPENDA, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1.00*		*BADAN PENDAPATAN DAERAH*
	5.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						60.850.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					-	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*85*	*85*	*85*		*(Kabupaten Pesisir Barat atau luar daerah, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*85*		*BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH*
2.	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**						**182.614.083.973,00**				**Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas**			**-**	
			Cakupan Tata Kelola Keuangan Daerah sesuai Aturan (%)				***100***									***BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH***
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah						3.376.150.000,00				Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			-	
			Cakupan Dokumen penganggaran daerah tepat waktu (%)				*100*		*(Kabupaten Pesisir Barat atau luar daerah, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH*
	5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS						357.549.960,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					-	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Dokumen)		*2*	*2*	*2*		*(Kabupaten Pesisir Barat atau luar daerah, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*0.00*		*BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH*
	5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS						358.632.800,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					-	
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dokumen)		*2*	*2*	*2*		*(Kabupaten Pesisir Barat atau luar daerah, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*2*		*BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH*
	5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD						103.285.060,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					-	
			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)		*1*	*1*	*1*		*(Kabupaten Pesisir Barat atau luar daerah, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH*
	5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD						101.785.060,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					-	
			Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)		*1*	*1*	*1*		*(Kabupaten Pesisir Barat atau luar daerah, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH*
	5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD						89.268.620,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					-	
			Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)		*1*	*1*	*1*		*(Kabupaten Pesisir Barat atau luar daerah, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH*
	5.02.02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD						90.292.500,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					-	
			Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)		*1*	*1*	*1*		*(Kabupaten Pesisir Barat atau luar daerah, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH*
	5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD						896.990.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					-	
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dokumen)		*2*	*2*	*2*		*(Kabupaten Pesisir Barat atau luar daerah, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*2*		*BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH*
	5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD						901.818.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					-	
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Dokumen)		*2*	*2*	*2*		*(Kabupaten Pesisir Barat atau luar daerah, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*2*		*BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH*
	5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran						476.528.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					-	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Dokumen)		*3*	*3*	*3*		*(Kabupaten Pesisir Barat atau luar daerah, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*3*		*BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH*
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah						3.223.748.520,00				Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			-	
			Cakupan Dokumen penatausahaan keuangan daerah tepat waktu (%)				*100*		*(Kabupaten Pesisir Barat atau luar daerah, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH*
	5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah						1.553.929.400,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					-	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dokumen)		*36*	*36*	*36*		*(Kabupaten Pesisir Barat atau luar daerah, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*36*		*BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH*
	5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD						181.606.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					-	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD (Dokumen)		*2*	*2*	*2*		*(Kabupaten Pesisir Barat atau luar daerah, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*2*		*BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH*
	5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya						424.909.120,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					-	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya (Dokumen)		*12*	*12*	*12*		*(Kabupaten Pesisir Barat atau luar daerah, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH*
	5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait						421.506.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					-	
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait (Dokumen)		*12*	*12*	*12*		*(Kabupaten Pesisir Barat atau luar daerah, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH*
	5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota						641.798.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					-	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)		*0*	*0*	*78*		*(Kabupaten Pesisir Barat atau luar daerah, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*78*		*BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH*
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah						837.460.400,00				Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			-	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Cakupan Laporan Keuangan daerah tepat waktu (%)				*100*		*(Kabupaten Pesisir Barat atau luar daerah, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH*
	5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran						90.431.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					-	
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran (Laporan)		*2*	*2*	*2*		*(Kabupaten Pesisir Barat atau luar daerah, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*2*		*BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH*
	5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah						523.494.400,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					-	
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (Laporan)		*1*	*1*	*1*		*(Kabupaten Pesisir Barat atau luar daerah, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH*
	5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota						188.535.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					-	
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Dokumen)		*2*	*2*	*2*		*(Kabupaten Pesisir Barat atau luar daerah, KAB. PESISIR BARAT)*			*Aparatur*	*2*		*BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH*
	5.02.02.2.03.07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah						35.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					-	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah (Dokumen)		*0*	*0*	*1*		*(Kabupaten Pesisir Barat atau luar daerah, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH*
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah						174.480.119.053,00				Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			-	
			Cakupan pemenuhan penunjang pengelolaan keuangan daerah (%)				*100*		*(Kabupaten Pesisir Barat atau luar daerah, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH*
	5.02.02.2.04.04	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah						1.500.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					-	
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah (Laporan)		*0.00*	*1*	*1*		*(Kabupaten Pesisir Barat atau luar daerah, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	*Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Laporan)*		*12*	*12*	*12*	6.615.000.000,00	*(Kabupaten Pesisir Barat atau luar daerah, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*Aparatur*	*12*	-	*BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH*
	5.02.02.2.04.10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota (Laporan)*		*12*	*12*	*12*	166.365.119.053,00	*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*Aparatur*	*12*	-	*BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH*
	5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	*Cakupan penggunaan SIPD dalam keuangan daerah (%)*				*100*	696.606.000,00	*(Kabupaten Pesisir Barat atau luar daerah, KAB. PESISIR BARAT)*			Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*100*	-	*BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH*
	5.02.02.2.05.03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)*		*0.00*	*60*	*60*	696.606.000,00	*(Kabupaten Pesisir Barat atau luar daerah, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*Aparatur*	*60*	-	*BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH*
3.	**5.02.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	***Cakupan Tata kelola barang milik daerah sesuai aturan (%)***				***100***	**2.373.990.797,00**				**Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas**			**-**	***BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH***
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	*Cakupan pencatatan aset daerah (%)*				*100*	2.373.990.797,00	*(Kabupaten Pesisir Barat atau luar daerah, KAB. PESISIR BARAT)*			Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*100*	-	*BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH*
	5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	*Jumlah Standar Harga yang Disusun (Dokumen)*		*1*	*1*	*1*	306.051.600,00	*(Kabupaten Pesisir Barat atau luar daerah, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*Aparatur*	*1*	-	*BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH*
	5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (Laporan)*		*2*	*2*	*2*	757.925.197,00	*(Kabupaten Pesisir Barat atau luar daerah, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*Aparatur*	*2*	-	*BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah (Laporan)*		*1*	*1*	*1*	444.214.000,00	*(Kabupaten Pesisir Barat atau luar daerah, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*Aparatur*	*1*	-	*BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH*
	5.02.03.2.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah (Laporan)*		*1*	*1*	*1*	459.800.000,00	*(Kabupaten Pesisir Barat atau luar daerah, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*Aparatur*	*1*	-	*BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH*
	5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Dokumen)*		*0.00*	*1*	*1*	406.000.000,00	*(Kabupaten Pesisir Barat atau luar daerah, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*Aparatur*	*1*	-	*BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH*
4.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	***Rasio PAD terhadap pendapatan daerah (%)***				***4,26***	**3.100.313.807,00**			**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas**			**3.100.313.807,00**	***BADAN PENDAPATAN DAERAH***
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	*Terlaksananya Pengelolaan Pendapatan Daerah (%)*				*100*	3.100.313.807,00	*(Seluruh Pekon, Keliurahan, dan Kecamatan di Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*100*	3.100.313.807,00	*BADAN PENDAPATAN DAERAH*
	5.02.04.2.01.01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	*Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah (Dokumen)*		*2.00*	*0.00*	*2.00*	150.000.000,00	*(Seluruh Pekon, Kelurahan, dan Kecamatan di Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparat*	*2.00*	150.000.000,00	*BADAN PENDAPATAN DAERAH*
	5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dokumen)*		*0.00*	*1.00*	*8.00*	287.274.000,00	*(Kantor BAPENDA, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur dan Masyarakat*	*8.00*	287.274.000,00	*BADAN PENDAPATAN DAERAH*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan)*		*0.00*	*1.00*	*12.00*	398.605.000,00	*(Seluruh Kelurahan dan Kecamatan di Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Masyarakat*	*12.00*	398.605.000,00	*BADAN PENDAPATAN DAERAH*
	5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Unit)*		*0.00*	*0.00*	*20*	230.000.000,00	*(Seluruh Kecamatan di Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Masyarakat*	*20*	230.000.000,00	*BADAN PENDAPATAN DAERAH*
	5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)*		*12.00*	*12.00*	*12.00*	122.905.600,00	*(Seluruh Kecamatan di Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur dan Masyarakat*	*12.00*	122.905.600,00	*BADAN PENDAPATAN DAERAH*
	5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan)*		*12.00*	*12.00*	*12.00*	676.974.000,00	*(Kantor BAPENDA dan Seluruh Kecamatan di Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparat dan Masyarakat*	*12.00*	676.974.000,00	*BADAN PENDAPATAN DAERAH*
	5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	*Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*12*	110.000.000,00	*(Kantor BAPENDA, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*12*	110.000.000,00	*BADAN PENDAPATAN DAERAH*
	5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen)*		*12.00*	*12.00*	*12.00*	245.888.447,00	*(Seluruh Kelurahan dan Kecamatan di Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Masyarakat*	*12.00*	245.888.447,00	*BADAN PENDAPATAN DAERAH*
	5.02.04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah						120.711.960,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			120.711.960,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Seluruh Kelurahan dan Kecamatan di Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Masyarakat*	*12*		*BADAN PENDAPATAN DAERAH*
	5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah						400.350.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			400.350.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dokumen)		*1.00*	*0.00*	*12.00*		*(Kantor BAPENDA dan Seluruh Kecamatan di Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur dan Masyarakat*	*12.00*		*BADAN PENDAPATAN DAERAH*
	5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah						150.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			150.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)		*12.00*	*1.00*	*4.00*		*(Seluruh Kecamatan di Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Masyarakat dan OPD Terkait*	*4.00*		*BADAN PENDAPATAN DAERAH*
	5.02.04.2.01.15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah						207.604.800,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			207.604.800,00	
			Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Laporan)		*0.00*	*1.00*	*12.00*		*(Seluruh Kecamatan di Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Masyarakat*	*12.00*		*BADAN PENDAPATAN DAERAH*
	5.03	**KEPEGAWAIAN**						**4.317.648.916,00**							**4.317.648.916,00**	
1.	**5.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.583.313.341,00**				**Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas**			**2.583.313.341,00**	
			Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	***92,5***			***92.50***									***BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA***
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						7.000.000,00				Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			7.000.000,00	
			Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu (%)				*100*		*(Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA*
	5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						2.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)		*2.00*	*2.00*	*2.00*		*(Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*2.00*		*BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA*
	5.03.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						2.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.000.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*2*		*BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA*
	5.03.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						1.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.000.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*2*		*BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA*
	5.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						2.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		*4*	*4*	*4*		*(Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*4*		*BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA*
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.961.068.200,00				Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.961.068.200,00	
			Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu (%)				*100*		*(Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA*
	5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.955.568.200,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.955.568.200,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		*14*	*14*	*14*		*(Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*14*		*BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA*
	5.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						2.500.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		*1*	*1*	*1*		*(Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA*
	5.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						2.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA*
	5.03.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						1.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)		*1*	*1*	*1*		*(Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA*
	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						30.000.000,00				Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			30.000.000,00	
			Persentase aparatur yang berkinerja baik (%)				*100*		*(Diluar Wilayah Kabupaten Pesisir Barat, Luar Wilayah)*					*100*		*BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA*
	5.03.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						30.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			30.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)		*1*	*1*	*3*		*(Luar Kabupaten Pesisir Barat, Luar Wilayah)*				*Aparatur*	*3*		*BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA*
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						301.583.141,00				Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			301.583.141,00	
			Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah (%)				*100*		*(Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA*
	5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						25.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		*1*	*1*	*1*		*(Didalam Wilayah Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA*
	5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						49.870.400,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			49.870.400,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*1.00*	*1.00*	*12.00*		*(Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA*
	5.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						12.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			12.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		*10*	*10*	*10*		*(Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*10*		*BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA*
	5.03.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu						11.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			11.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)		*11*	*11*	*11*		*(Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*11*		*BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA*
	5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						203.712.741,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			203.712.741,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*12.00*	*12.00*	*12.00*		*(Didalam dan Diluar Wilayah Kabupaten Pesisir Barat, Luar Wilayah)*				*Aparatur*	*12.00*		*BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA*
	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						81.980.000,00				Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			81.980.000,00	
			Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah (%)				*100*		*(Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA*
	5.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						81.980.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			81.980.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		*7.00*	*0.00*	*6.00*		*(Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*6.00*		*BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA*
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang (%)*				*100*	131.642.000,00	*(Didalam Wilayah Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*			Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*100*	131.642.000,00	*BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA*
	5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)*		*12*	*12*	*12.00*	2.400.000,00	*(Didalam Wilayah Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*12.00*	2.400.000,00	*BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA*
	5.03.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)*		*12*	*12*	*12*	127.000.000,00	*(Didalam Wilayah Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*12*	127.000.000,00	*BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA*
	5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)*		*12*	*12*	*12*	2.242.000,00	*(Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*12*	2.242.000,00	*BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA*
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah yang dalam kondisi baik (%)*				*100*	70.040.000,00	*(Didalam Wilayah Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*			Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*100*	70.040.000,00	*BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA*
	5.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						60.100.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			60.100.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		*2*	*2*	*2*		*(Didalam Wilayah Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*2*		*BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA*
	5.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						9.940.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			9.940.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		*13*	*13*	*14*		*(Didalam Wilayah Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*14*		*BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA*
2.	**5.03.02**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**						**1.734.335.575,00**				**Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas**			**1.734.335.575,00**	
			Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian (%)				***73.54***									***BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA***
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN						797.481.800,00				Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			797.481.800,00	
			Persentase Pemenuhan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian (%)				*100*		*(Didalam dan Diluar Wilayah Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA*
	5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK						556.040.800,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			556.040.800,00	
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK (Dokumen)		*1*	*1*	*2*		*(Didalam dan Diluar Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*2*		*BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA*
	5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian						48.889.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			48.889.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian (Dokumen)		*1*	*1*	*2*		*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*2*		*BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA*
	5.03.02.2.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN						71.344.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			71.344.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi (Lembaga)		*1*	*1*	*1*		*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA*
	5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian						96.974.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			96.974.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)		*2.00*	*1*	*2.00*		*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*2.00*		*BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA*
	5.03.02.2.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian						24.234.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			24.234.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian (Dokumen)		*1*	*1*	*2*		*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*2*		*BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA*
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN						630.374.400,00				Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			630.374.400,00	
			Persentase Pemenuhan Mutasi dan Promosi ASN (%)				*100*		*(Didalam dan Diluar Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA*
	5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN						220.498.800,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			220.498.800,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah (Dokumen)		*2*	*3*	*3*		*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*3*		*BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA*
	5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN						409.875.600,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			409.875.600,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN (Dokumen)		*1*	*2*	*2*		*(Diluar dan Didalam Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*2*		*BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA*
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur						306.479.375,00				Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			306.479.375,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase Pemenuhan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (%)				*100*		*(Didalam dan Diluar Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA*
	5.03.02.2.04.03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	*Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Laporan)*		*12*	*1*	*12*	79.677.000,00	*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*12*	79.677.000,00	*BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA*
	5.03.02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	*Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan (Orang)*		*1259*	*1000*	*1000*	146.483.000,00	*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*1000*	146.483.000,00	*BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA*
	5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	*Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan (Orang)*		*5*	*5*	*5*	80.319.375,00	*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*5*	80.319.375,00	*BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA*
	5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**						**2.648.176.820,00**							**2.648.176.820,00**	
1.	**5.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	***Persentase Pejabat ASN telah yang mengikuti Pelatihan Kepemimpinan (%)***				***22.42***	**2.648.176.820,00**				**Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas**			**2.648.176.820,00**	***BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA***
	5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	*Persentase Pemenuhan Pengembangan Kompetensi Teknis (%)*				*100*	260.770.000,00	*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*			Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*100*	260.770.000,00	*BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.04.02.2.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	*Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi (Orang)*		*80.00*	*0.00*	*160*	260.770.000,00	*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*160*	260.770.000,00	*BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA*
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	*Persentase Pemenuhan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional (%)*				*100*	2.387.406.820,00	*(Diluar Kabupaten Pesisir Barat, Luar Wilayah)*			Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*100*	2.387.406.820,00	*BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA*
	5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	*Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan (Laporan)*		*2.00*	*3.00*	*3.00*	2.387.406.820,00	*(Didalam dan Diluar Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*3.00*	2.387.406.820,00	*BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA*
	5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**						**1.540.598.441,00**							**1.540.598.441,00**	
1.	**5.05.02**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	***Indeks Inovasi Daerah (Angka)***				***Sangat Inovatif***	**1.540.598.441,00**			**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas**			**1.540.598.441,00**	***BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH***
	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	*Persentase Pemanfaatan hasil kelitbangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan (%)*				*80*	490.598.441,00	*(Krui, kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*80*	490.598.441,00	*BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.05.02.2.01.02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum (Laporan)*		*0.00*	*1*	*1*	125.598.441,00	*(Krui, Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*1*	125.598.441,00	*BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH*
	5.05.02.2.01.04	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi (Laporan)*		*0.00*	*1*	*1*	125.000.000,00	*(Krui, Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*1*	125.000.000,00	*BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH*
	5.05.02.2.01.05	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi (Laporan)*		*0.00*	*4*	*1*	120.000.000,00	*(Krui, Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*1*	120.000.000,00	*BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH*
	5.05.02.2.01.12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	*Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik (Laporan)*		*1*	*1*	*1*	120.000.000,00	*(Krui, Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*1*	120.000.000,00	*BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH*
	5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	*Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan bidang sosial dan kependudukan (%)*				*80*	120.000.000,00	*(Krui, Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*80*	120.000.000,00	*BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH*
	5.05.02.2.02.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial						120.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			120.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial (Dokumen)		*0.00*	*1*	*1*		*(Krui, Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH*
	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	*Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan bidang ekonomi dan pembangunan (%)*				*80*	930.000.000,00	*(Krui, Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*80*	930.000.000,00	*BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH*
	5.05.02.2.03.07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	*Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*1*	310.000.000,00	*(Krui, Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*1*	310.000.000,00	*BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH*
	5.05.02.2.03.10	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	*Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*1*	310.000.000,00	*(Krui, Kab.Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*1*	310.000.000,00	*BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH*
	5.05.02.2.03.12	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	*Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*1*	310.000.000,00	*(Krui, Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*1*	310.000.000,00	*BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH*
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**						**8.813.620.900,00**							**9.694.982.990,00**	
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**						**8.813.620.900,00**							**9.694.982.990,00**	
1.	**6.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**5.053.620.900,00**			**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas**			**5.558.982.990,00**	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)				***92,5***									***INSPEKTORAT***
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu (%)*				*100*	7.400.000,00	*(Kantor Inspektorat Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*100*	8.140.000,00	*INSPEKTORAT*
	6.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)*		*2.00*	*2.00*	*2.00*	1.900.000,00	*(Kantor Inspektorat Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*2.00*	2.090.000,00	*INSPEKTORAT*
	6.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)*		*1.00*	*1.00*	*1.00*	5.500.000,00	*(Kantor Inspektorat Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*1.00*	6.050.000,00	*INSPEKTORAT*
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu (%)*				*100*	3.253.420.900,00	*(KAB. PESISIR BARAT)*			Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*110*	3.578.762.990,00	*INSPEKTORAT*
	6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)*		*19.00*	*19.00*	*19.00*	3.247.370.900,00	*(Kantor Inspektorat Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*Aparatur*	*19.00*	3.572.107.990,00	*INSPEKTORAT*
	6.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)*		*1*	*1*	*1*	2.750.000,00	*(Kantor Inspektorat Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*Aparatur*	*1*	3.025.000,00	*INSPEKTORAT*
	6.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						2.200.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.420.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		*2*	*2*	*2*		*(Kantor Inspektorat Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*2*		*INSPEKTORAT*
	6.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						1.100.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.210.000,00	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)		*1*	*1*	*1*		*(Kantor Inspektorat Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*INSPEKTORAT*
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						400.000.000,00				Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			440.000.000,00	
			Persentase Aparatur yang Berkinerja Baik (%)				*100*		*(KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*INSPEKTORAT*
	6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						300.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					330.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)		*12*	*12*	*12*		*(Luar Wilayah Kabupaten Pesisir Barat (menyesuaikan agenda penyelenggara diklat), Luar Wilayah)*				*Aparatur*	*19*		*INSPEKTORAT*
	6.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						100.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					110.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)		*12*	*12*	*19*		*(Luar Wilayah Kabupaten Pesisir Barat dan dalam wilayah Kab. Pesisir Barat (untuk Pelatihan Kantor Sendiri/PKS), Luar Wilayah)*				*Aparatur*	*19*		*INSPEKTORAT*
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						562.000.000,00				Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			618.200.000,00	
			Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja (%)				*100*		*(KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*INSPEKTORAT*
	6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						3.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					3.300.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		*12*	*12*	*12*		*(Kantor Inspektorat Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*INSPEKTORAT*
	6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						150.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					165.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*12*	*12*	*12*		*(Kantor Inspektorat Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*INSPEKTORAT*
	6.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						12.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					13.200.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		*12*	*12*	*12*		*(Kantor Inspektorat Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*INSPEKTORAT*
	6.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu						22.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					24.200.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)		*11*	*11*	*11*		*(Kantor Inspektorat Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*11*		*INSPEKTORAT*
	6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						375.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					412.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(Kantor Inspektorat Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*INSPEKTORAT*
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						120.000.000,00				Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			132.000.000,00	
			Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja (%)				*100*		*(KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*INSPEKTORAT*
	6.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel						20.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					22.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)		*19*	*2*	*2*		*(Kantor Inspektorat Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*2*		*INSPEKTORAT*
	6.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						100.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					110.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		*10*	*44*	*6*		*(Kantor Inspektorat Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*6*		*INSPEKTORAT*
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						362.500.000,00				Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			398.750.000,00	
			Persentase Pemenuhan Layanan Pendukung (%)				*100*		*(KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*INSPEKTORAT*
	6.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						324.500.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					356.950.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(Kantor Inspektorat Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*INSPEKTORAT*
	6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						38.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					41.800.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(Kantor Inspektorat Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*INSPEKTORAT*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						348.300.000,00				Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			383.130.000,00	
			Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik (%)				*100*		*(KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*INSPEKTORAT*
	6.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						39.800.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					43.780.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		*1*	*1*	*1*		*(Kantor Inspektorat Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*INSPEKTORAT*
	6.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						288.500.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					317.350.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		*8*	*8*	*8*		*(Kantor Inspektorat Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*8*		*INSPEKTORAT*
	6.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						20.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					22.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		*12*	*22*	*28*		*(Kantor Inspektorat Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*28*		*INSPEKTORAT*
2.	**6.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**						**2.260.000.000,00**							**2.486.000.000,00**	
			Cakupan Konsistensi Perencanaan, Pengelolaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Anggaran terhadap Kepatuhan Peraturan Perundang - Undangan (%)				***100***									***INSPEKTORAT***
			Cakupan Konsistensi Perencanaan, Pengelolaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Anggaran terhadap Kepatuhan Peraturan Perundang - Undangan (%)	***100***			***100***									***INSPEKTORAT***
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal						1.570.000.000,00							1.727.000.000,00	
			Penjabaran Konsistensi Perencanaan, Pengelolaan, Pelaksanaan, dan Pelaporan Anggaran terhadap Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan (%)				*100*		*(KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*INSPEKTORAT*
	6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah						200.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					220.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)		*100.00*	*100.00*	*100.00*		*(Objek Pemeriksaan di Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*100.00*		*INSPEKTORAT*
	6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah						200.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					220.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)		*100*	*100*	*100*		*(Objek pemeriksaan yang ada di Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*100*		*INSPEKTORAT*
	6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja						150.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					165.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)		*1*	*3*	*3*		*(OPD di Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*OPD di Kabupaten Pesisir Barat*	*3*		*INSPEKTORAT*
	6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan						150.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					165.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)		*5*	*8*	*8*		*(OPD di Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*8*		*INSPEKTORAT*
	6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa						220.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					242.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa (Laporan)		*116*	*116*	*116*		*(Pekon di Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*116*		*INSPEKTORAT*
	6.01.02.2.01.06	Kerja Sama Pengawasan Internal						350.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					385.000.000,00	
			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk (Kesepakatan)		*1.00*	*1.00*	*2.00*		*(Objek pemeriksaan/pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*2.00*		*INSPEKTORAT*
	6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP						300.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					330.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen)		*12*	*12*	*12*		*(Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dan Satker terkait yang berada di Luar Wilayah Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*INSPEKTORAT*
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu						690.000.000,00							759.000.000,00	
	6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah						240.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					264.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Laporan)		*4*	*4*	*4*		*(Objek Pemeriksaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dan Satker Terkait di Luar Wilayah Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*4*		*INSPEKTORAT*
	6.01.02.2.02.02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu						450.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					495.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Laporan)		*15*	*20*	*30*		*(Objek Pengawasan di wilayah Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*30*		*INSPEKTORAT*
3.	**6.01.03**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**						**1.500.000.000,00**							**1.650.000.000,00**	
			Cakupan Konsistensi Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi terhadap Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang - undangan (%)				***100***									***INSPEKTORAT***
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan						400.000.000,00							440.000.000,00	
			Penjabaran Konsistensi Perumusan Kebijakan Teknis terhadap Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan (%)				*100*		*(KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*INSPEKTORAT*
			Penjabaran Konsistensi Perumusan Kebijakan Teknis terhadap Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan (%)				*100*		*(KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*INSPEKTORAT*
	6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan						200.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					220.000.000,00	
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)		*12*	*12*	*12*		*(Kantor Inspektorat Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*INSPEKTORAT*
	6.01.03.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan						200.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					220.000.000,00	
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)		*12*	*12*	*12*		*(Kantor Inspektorat Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*INSPEKTORAT*
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi						1.100.000.000,00							1.210.000.000,00	
	6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah						350.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					385.000.000,00	
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (perangkat daerah)		*39*	*39*	*39*		*(Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat (belanja ATK, penggandaan dan penjilidan, makanan dan minuman rapat, honorarium narasumber dan moderator, honorarium tim pelaksana kegiatan, bantuan transportasi, dan perjalanan*	*39*		*INSPEKTORAT*
	6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi						250.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					275.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (perangkat daerah)		*0*	*0*	*39*		*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat*	*39*		*INSPEKTORAT*
	6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi						250.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					275.000.000,00	
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)		*12.00*	*12.00*	*12.00*		*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12.00*		*INSPEKTORAT*
	6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas						250.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					275.000.000,00	
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (perangkat daerah)		*12*	*12*	*39*		*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*39*		*INSPEKTORAT*
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**9.810.399.700,00**							**9.767.039.940,00**	
	7.01	**KECAMATAN ADMINISTRASI**						**9.810.399.700,00**							**9.767.039.940,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**8.847.359.140,00**			**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas**			**8.803.999.380,00**	
			Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	***90***			***92,50***									***KECAMATAN BANGKUNAT***
			Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)				***92,50***									***KECAMATAN LEMONG***
			Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)				***92,50***									***KECAMATAN PESISIR UTARA***
			Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)				***92,50***									***KECAMATAN PULAU PISANG***
			Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)				***92,50***									***KECAMATAN KARYA PENGGAWA***
			Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)				***92,50***									***KECAMATAN WAY KRUI***
			Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)				***92,50***									***KECAMATAN PESISIR TENGAH***

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)				***92,50***									***KECAMATAN KRUI SELATAN***
			Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)				***92,50***									***KECAMATAN PESISIR SELATAN***
			Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)				***92,50***									***KECAMATAN NGAMBUR***
			Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)				***92,50***									***KECAMATAN NGARAS***
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						48.213.800,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			48.213.800,00	
			Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, & Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu (%)				*100*		*(Kecamatan Ngambur, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*KECAMATAN NGAMBUR*
			Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, & Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu (%)				*100*		*(kecamatan pesisir selatan, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*KECAMATAN PESISIR SELATAN*
			Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, & Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu (%)				*100*		*(Kecamatan Krui Selatan, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*KECAMATAN KRUI SELATAN*
			Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, & Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu (%)				*100*		*(Kecamatan Pesisir Tengah, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*KECAMATAN PESISIR TENGAH*
			Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, & Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu (%)				*100*		*(Kecamatan Way Krui, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*KECAMATAN WAY KRUI*
			Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, & Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu (%)				*100*		*(Kecamatan Karya Penggawa, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*KECAMATAN KARYA PENGGAWA*
			Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, & Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu (%)				*100*		*(Kecamatan pesisir utara, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*KECAMATAN PESISIR UTARA*
			Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, & Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu (%)				*100*		*(Kecamatan Lemong, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*KECAMATAN LEMONG*
			Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, & Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu (%)				*100*		*(Kecamatan Pulau Pisang, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*KECAMATAN PULAU PISANG*
			Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, & Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu (%)				*100*		*(Kecamatan Ngaras, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*KECAMATAN NGARAS*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, & Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu (%)				*100*		*(Kecamatan Bangkunat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*KECAMATAN BANGKUNAT*
	7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						48.213.800,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			48.213.800,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		*1*	*1*	*1*		*(Kecamatan Bangkunat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*KECAMATAN BANGKUNAT*
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		*1*	*1*	*1*		*(kecamatan pesisir selatan, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*KECAMATAN PESISIR SELATAN*
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		*1*	*1*	*1*		*(Kecamatan Krui Selatan, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*KECAMATAN KRUI SELATAN*
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		*1*	*1*	*1*		*(Kecamatan Pesisir Tengah, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*KECAMATAN PESISIR TENGAH*
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		*1*	*1*	*1*		*(Kecamatan Way Krui, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*KECAMATAN WAY KRUI*
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		*1*	*1*	*1*		*(Kecamatan Karya Penggawa, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*KECAMATAN KARYA PENGGAWA*
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		*1*	*1*	*1*		*(Kecamatan pesisir utara, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*KECAMATAN PESISIR UTARA*
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		*1*	*1*	*1*		*(Kecamatan Lemong, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*KECAMATAN LEMONG*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		*1*	*1*	*1*		*(Kecamatan Pulau Pisang, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*KECAMATAN PULAU PISANG*
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		*1*	*1*	*1*		*(Kecamatan Ngambur, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*KECAMATAN NGAMBUR*
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		*1*	*1*	*1*		*(kecamatan ngaras, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*KECAMATAN NGARAS*
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						5.818.482.300,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			5.813.123.500,00	
			Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu (%)				*100*		*(kecamatan ngaras, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*KECAMATAN NGARAS*
			Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu (%)				*100*		*(Kecamatan Bangkunat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*KECAMATAN BANGKUNAT*
			Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu (%)				*100*		*(Kecamatan Ngambur, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*KECAMATAN NGAMBUR*
			Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu (%)				*100*		*(kecamatan ppesisir selatan, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*KECAMATAN PESISIR SELATAN*
			Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu (%)				*100*		*(Kecamatan Krui Selatan, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*KECAMATAN KRUI SELATAN*
			Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu (%)				*100*		*(kecamatan pesisir tengah, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*KECAMATAN PESISIR TENGAH*
			Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu (%)				*100*		*(Kecamatan Way Krui, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*KECAMATAN WAY KRUI*
			Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu (%)				*100*		*(Kecamatan Karya Penggawa, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*KECAMATAN KARYA PENGGAWA*
			Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu (%)				*100*		*(Kecamatan Pesisir Utara, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*KECAMATAN PESISIR UTARA*
			Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu (%)				*100*		*(Kecamatan Lemong, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*KECAMATAN LEMONG*
			Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu (%)				*100*		*(Kecamatan Pulau Pisang, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*KECAMATAN PULAU PISANG*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						5.748.600.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			5.748.600.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		*14*	*14*	*14*		*(Kecamatan Way Krui, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*14*		*KECAMATAN WAY KRUI*
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		*14*	*14*	*14*		*(Kecamatan Karya Penggawa, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*14*		*KECAMATAN KARYA PENGGAWA*
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		*14*	*14*	*14*		*(kecamatan pesisir utara, KAB. PESISIR BARAT)*				*aparatur*	*14*		*KECAMATAN PESISIR UTARA*
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		*14*	*14*	*14*		*(Kecamatan Lemong, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*14*		*KECAMATAN LEMONG*
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		*14*	*14*	*14*		*(Kecamatan Pulau Pisang, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*14*		*KECAMATAN PULAU PISANG*
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		*14*	*14*	*14*		*(Kecamatan pesisir tengah, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*14*		*KECAMATAN PESISIR TENGAH*
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		*14*	*14*	*14*		*(Kecamatan Bangkunat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*14*		*KECAMATAN BANGKUNAT*
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		*14*	*14*	*14*		*(Kecamatan Ngaras, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*14*		*KECAMATAN NGARAS*
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		*14*	*14*	*14*		*(Kecamatan Ngambur, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*14*		*KECAMATAN NGAMBUR*
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		*14*	*14*	*14*		*(kecamatan pesisir selatan, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*14*		*KECAMATAN PESISIR SELATAN*
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		*14*	*14*	*14*		*(Kecamatan Krui Selatan, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*14*		*KECAMATAN KRUI SELATAN*
	7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						28.906.400,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			28.906.400,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		*1*	*1*	*1*		*(Kecamatan Lemong, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*KECAMATAN LEMONG*
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		*1*	*1*	*1*		*(kecamatan pesisir utara, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*KECAMATAN PESISIR UTARA*
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		*1*	*1*	*1*		*(Kecamatan Karya Penggawa, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*KECAMATAN KARYA PENGGAWA*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		*1*	*1*	*1*		*(Kecamatan Way Krui, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*KECAMATAN WAY KRUI*
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		*1*	*1*	*1*		*(kecamatan pesisir tengah, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*KECAMATAN PESISIR TENGAH*
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		*1*	*1*	*1*		*(Kecamatan Pulau Pisang, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*KECAMATAN PULAU PISANG*
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		*1*	*1*	*1*		*(kecamatan pesisir selatan, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*KECAMATAN PESISIR SELATAN*
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		*1*	*1*	*1*		*(Kecamatan Bangkunat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*KECAMATAN BANGKUNAT*
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		*1*	*1*	*1*		*(Kecamatan Ngaras, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*KECAMATAN NGARAS*
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		*1*	*1*	*1*		*(Kecamatan Ngambur, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*KECAMATAN NGAMBUR*
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		*1*	*1*	*1*		*(Kecamatan Krui Selatan, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*KECAMATAN KRUI SELATAN*
	7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						24.399.300,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			24.399.300,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		*2*	*2*	*2*		*(Kecamatan Ngaras, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*2*		*KECAMATAN NGARAS*
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		*2*	*2*	*2*		*(Kecamatan Ngambur, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*2*		*KECAMATAN NGAMBUR*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		*2*	*2*	*2*		*(kecamatan pesisir selatan, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*2*		*KECAMATAN PESISIR SELATAN*
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		*2*	*2*	*2*		*(Kecamatan Krui Selatan, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*2*		*KECAMATAN KRUI SELATAN*
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		*2*	*2*	*2*		*(Kecamatan pesisir Tengah, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*2*		*KECAMATAN PESISIR TENGAH*
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		*2*	*2*	*2*		*(Kecamatan Way Krui, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*2*		*KECAMATAN WAY KRUI*
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		*2*	*2*	*2*		*(Kecamatan Karya Penggawa, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*2*		*KECAMATAN KARYA PENGGAWA*
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		*2*	*2*	*2*		*(Kecamatan pesisir utara, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*2*		*KECAMATAN PESISIR UTARA*
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		*2*	*2*	*2*		*(Kecamatan Lemong, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*2*		*KECAMATAN LEMONG*
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		*2*	*2*	*2*		*(Kecamatan Pulau Pisang, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*2*		*KECAMATAN PULAU PISANG*
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		*2*	*2*	*2*		*(Kecamatan Bangkunat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*2*		*KECAMATAN BANGKUNAT*
	7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						16.576.600,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			11.217.800,00	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)		*1*	*1*	*1*		*(Kecamatan Bangkunat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*KECAMATAN BANGKUNAT*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(Kecamatan Ngaras, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1.00*		*KECAMATAN NGARAS*
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)		*1*	*1*	*1*		*(Kecamatan Ngambur, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*KECAMATAN NGAMBUR*
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)		*1*	*1*	*1*		*(kecamatan pesisir selatan, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*KECAMATAN PESISIR SELATAN*
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)		*1*	*1*	*1*		*(Kecamatan Krui Selatan, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*KECAMATAN KRUI SELATAN*
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)		*0*	*0*							*Aparatur*			*KECAMATAN PULAU PISANG*
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)		*0*	*0*							*Aparatur*			*KECAMATAN WAY KRUI*
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)		*1*	*1*	*1*		*(Kecamatan Karya Penggawa, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*KECAMATAN KARYA PENGGAWA*
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)		*1*	*1*	*1*		*(kecamatan pesisir utara, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*KECAMATAN PESISIR UTARA*
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)		*1*	*1*	*1*		*(Kecamatan Lemong, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*KECAMATAN LEMONG*
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)		*1*	*1*	*1*		*(kecamatan pesisir tengah, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*KECAMATAN PESISIR TENGAH*
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						1.633.068.040,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.595.067.080,00	
			Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja (%)				*100*		*(Kecamatan Lemong, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*KECAMATAN LEMONG*
			Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja (%)				*100*		*(Kecamatan Bangkunat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*KECAMATAN BANGKUNAT*
			Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja (%)				*100*		*(Kecamatan ngaras, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*KECAMATAN NGARAS*
			Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja (%)				*100*		*(Kecamatan Pulau Pisang, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*KECAMATAN PULAU PISANG*
			Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja (%)				*100*		*(Kecamatan Ngambur, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*KECAMATAN NGAMBUR*
			Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja (%)				*100*		*(kecamatan pesisir selatan, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*KECAMATAN PESISIR SELATAN*
			Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja (%)				*100*		*(Kecamatan Krui Selatan, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*KECAMATAN KRUI SELATAN*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja (%)				*100*		*(kecamatan pesisir tengah, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*KECAMATAN PESISIR TENGAH*
			Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja (%)				*100*		*(Kecamatan Way Krui, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*KECAMATAN WAY KRUI*
			Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja (%)				*100*		*(Kecamatan Karya Penggawa, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*KECAMATAN KARYA PENGGAWA*
			Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja (%)				*100*		*(Kecamatan Pesisir Utara, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*KECAMATAN PESISIR UTARA*
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						74.324.200,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			74.324.200,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		*1*	*1*	*1*		*(kecamatan pesisir utara, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*KECAMATAN PESISIR UTARA*
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		*1*	*1*	*1*		*(Kecamatan Bangkunat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*KECAMATAN BANGKUNAT*
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		*1*	*1*	*1*		*(Kecamatan ngaras, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*KECAMATAN NGARAS*
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		*1*	*1*	*1*		*(Kecamatan Ngambur, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*KECAMATAN NGAMBUR*
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		*1*	*1*	*1*		*(kecamatan pesisir selatan, KAB. PESISIR BARAT)*				*aparatur*	*1*		*KECAMATAN PESISIR SELATAN*
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		*1*	*1*	*1*		*(Kecamatan Krui Selatan, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*KECAMATAN KRUI SELATAN*
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		*1*	*1*	*1*		*(kecamatan pesisir tengah, KAB. PESISIR BARAT)*				*aparatur*	*1*		*KECAMATAN PESISIR TENGAH*
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		*1*	*1*	*1*		*(Kecamatan Way Krui, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*KECAMATAN WAY KRUI*
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		*12*	*12*	*12*		*(Kecamatan Karya Penggawa, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*KECAMATAN KARYA PENGGAWA*
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		*1*	*1*	*1*		*(Kecamatan Lemong, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*KECAMATAN LEMONG*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		*1*	*1*	*1*		*(Kecamatan Pulau Pisang, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*KECAMATAN PULAU PISANG*
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						260.391.540,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			260.390.580,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		*12*	*12*	*12*		*(Kecamatan Karya Penggawa, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*KECAMATAN KARYA PENGGAWA*
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		*1*	*1*	*1*		*(Kecamatan Way Krui, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*KECAMATAN WAY KRUI*
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		*12*	*12*	*12*		*(kecamatan pesisir tengah, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*KECAMATAN PESISIR TENGAH*
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		*12*	*12*	*12*		*(Kecamatan Krui Selatan, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*KECAMATAN KRUI SELATAN*
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		*1*	*1*	*1*		*(kecamatan pesisir selatan, KAB. PESISIR BARAT)*				*aparatur*	*1*		*KECAMATAN PESISIR SELATAN*
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		*12*	*12*	*12*		*(Kecamatan Ngambur, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*KECAMATAN NGAMBUR*
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		*12*	*12*	*12*		*(Kecamatan Ngaras, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*KECAMATAN NGARAS*
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		*12*	*12*	*12*		*(Kecamatan Bangkunat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*KECAMATAN BANGKUNAT*
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		*1*	*1*	*1*		*(Kecamatan Lemong, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*KECAMATAN LEMONG*
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		*12*	*12*	*12*		*(Kecamatan Pesisir utara, KAB. PESISIR BARAT)*				*aparatur*	*12*		*KECAMATAN PESISIR UTARA*
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		*2*	*2*	*2*		*(Kecamatan Pulau Pisang, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*2*		*KECAMATAN PULAU PISANG*
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						276.950.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			276.950.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		*1*	*1*	*1*		*(Krui, Kab. Pesisir barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*KECAMATAN NGAMBUR*
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		*1*	*1*	*1*		*(krui, pesisir barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*aparatur*	*1*		*KECAMATAN PESISIR SELATAN*
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		*1*	*1*	*1*		*(Krui, Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*KECAMATAN KRUI SELATAN*
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		*1*	*1*	*1*		*(kecamatan pesisir tengah, KAB. PESISIR BARAT)*				*aparatur*	*1*		*KECAMATAN PESISIR TENGAH*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		*1*	*1*	*1*		*(Kecamatan Way Krui, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*KECAMATAN WAY KRUI*
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		*1*	*1*	*1*		*(Krui, Kab Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*KECAMATAN KARYA PENGGAWA*
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		*1*	*1*	*1*		*(kecamatan pesisir utara, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*KECAMATAN PESISIR UTARA*
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		*1*	*1*	*1*		*(Kecamatan Lemong, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*KECAMATAN LEMONG*
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		*1*	*1*	*1*		*(Krui, Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*KECAMATAN PULAU PISANG*
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		*1*	*1*	*1*		*(Kecamatan Bangkunat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*KECAMATAN BANGKUNAT*
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		*1*	*1*	*1*		*(Krui, Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*KECAMATAN NGARAS*
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						299.602.300,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			299.602.300,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*12*	*12*	*12*		*(Kecamatan Lemong, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*KECAMATAN LEMONG*
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*12*	*12*	*12*		*(kecamatan pesisir utara, KAB. PESISIR BARAT)*				*aparatur*	*12*		*KECAMATAN PESISIR UTARA*
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*12*	*12*	*12*		*(Kecamatan Karya Penggawa, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*KECAMATAN KARYA PENGGAWA*
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*12*	*12*	*12*		*(Kecamatan Way Krui, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*KECAMATAN WAY KRUI*
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*12*	*12*	*12*		*(kecamatan pesisir tengah, KAB. PESISIR BARAT)*				*aparatur*	*12*		*KECAMATAN PESISIR TENGAH*
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*12*	*12*	*12*		*(Kecamatan Pulau Pisang, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*KECAMATAN PULAU PISANG*
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*12*	*12*	*12*		*(kecamatan pesisir selatan, KAB. PESISIR BARAT)*				*aparatur*	*12*		*KECAMATAN PESISIR SELATAN*
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*12*	*12*	*12*		*(Kecamatan Ngaras, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*KECAMATAN NGARAS*
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*12*	*12*	*12*		*(Kecamatan Ngambur, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*KECAMATAN NGAMBUR*
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*12*	*12*	*12*		*(Kecamatan Bangkunat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*KECAMATAN BANGKUNAT*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*12*	*12*	*12*		*(Kecamatan Krui Selatan, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*KECAMATAN KRUI SELATAN*
	7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						127.800.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			127.800.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		*12*	*12*	*12*		*(Kecamatan Ngaras, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*KECAMATAN NGARAS*
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		*12*	*12*	*12*		*(Kecamatan Bangkunat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*KECAMATAN BANGKUNAT*
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		*12*	*12*	*12*		*(Kecamatan Ngambur, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*KECAMATAN NGAMBUR*
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		*12*	*12*	*12*		*(kecamatan pesisir selatan, KAB. PESISIR BARAT)*				*aparatur*	*12*		*KECAMATAN PESISIR SELATAN*
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		*12*	*12*	*12*		*(Kecamatan Krui Selatan, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*KECAMATAN KRUI SELATAN*
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		*12*	*12*	*12*		*(kecamatan pesisir tengah, KAB. PESISIR BARAT)*				*aparatur*	*12*		*KECAMATAN PESISIR TENGAH*
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		*12*	*12*	*12*		*(Kecamatan Way Krui, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*KECAMATAN WAY KRUI*
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		*12*	*12*	*12*		*(Kecamatan Karya Penggawa, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*KECAMATAN KARYA PENGGAWA*
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		*12*	*12*	*12*		*(kecamatan pesisir utara, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*KECAMATAN PESISIR UTARA*
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		*12*	*12*	*12*		*(Kecamatan Lemong, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*KECAMATAN LEMONG*
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		*12.00*	*12.00*	*12.00*		*(Kecamatan Pulau Pisang, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*KECAMATAN PULAU PISANG*
	7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu						201.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			201.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)		*11*	*11*	*11*		*(kecamatan pesisir selatan, KAB. PESISIR BARAT)*				*aparatur*	*11*		*KECAMATAN PESISIR SELATAN*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)		*11*	*11*	*11*		*(Kecamatan Krui Selatan, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*11*		*KECAMATAN KRUI SELATAN*
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)		*11*	*11*	*11*		*(kecamatan pesisir tengah, KAB. PESISIR BARAT)*				*aparatur*	*11*		*KECAMATAN PESISIR TENGAH*
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)		*11*	*11*	*11*		*(Kecamatan Way Krui, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*11*		*KECAMATAN WAY KRUI*
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)		*11*	*11*	*11*		*(Kecamatan Karya Penggawa, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*11*		*KECAMATAN KARYA PENGGAWA*
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)		*11*	*11*	*11*		*(kecamatan pesisir utara, KAB. PESISIR BARAT)*				*aparatur*	*11*		*KECAMATAN PESISIR UTARA*
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)		*11*	*11*	*11*		*(Kecamatan lemong, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*11*		*KECAMATAN LEMONG*
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)		*11*	*11*	*11*		*(Kecamatan Pulau Pisang, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*11*		*KECAMATAN PULAU PISANG*
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)		*11*	*11*	*11*		*(Kecamatan ngaras, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*11*		*KECAMATAN NGARAS*
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)		*11*	*11*	*11*		*(Kecamatan Ngambur, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*11*		*KECAMATAN NGAMBUR*
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)		*11*	*11*	*11*		*(Kecamatan Bangkunat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*11*		*KECAMATAN BANGKUNAT*
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						393.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			355.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(kab pesisir barat dan luar kab. pesisir barat, Luar Wilayah)*				*aparatur*	*12*		*KECAMATAN PESISIR TENGAH*
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(Krui, Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*KECAMATAN PULAU PISANG*
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*0*	*0*							*Aparatur*			*KECAMATAN LEMONG*
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(kecamatan pesisir utara, KAB. PESISIR BARAT)*				*aparatur*	*12*		*KECAMATAN PESISIR UTARA*
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(Kecamatan Karya Penggawa, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*KECAMATAN KARYA PENGGAWA*
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(Kecamatan Way Krui, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*KECAMATAN WAY KRUI*
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*12.00*	*12.00*	*12.00*		*(Kecamatan Krui Selatan, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12.00*		*KECAMATAN KRUI SELATAN*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(kecamatan pesisir selatan, KAB. PESISIR BARAT)*				*aparatur*	*12*		*KECAMATAN PESISIR SELATAN*
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*12.00*	*12.00*	*12.00*		*(Dalam Kab. Pesisir Barat dan Di Luar Kab Pesisir Barat, Luar Wilayah)*				*Aparatur*	*12.00*		*KECAMATAN NGAMBUR*
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(Kecamatan ngaras, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*KECAMATAN NGARAS*
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(Kecamatan Bangkunat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*KECAMATAN BANGKUNAT*
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						203.928.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			203.928.000,00	
			Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja (%)				*100*		*(kecamatan pesisir tengah, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*KECAMATAN PESISIR TENGAH*
	7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						203.928.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			203.928.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)		*1*	*1*	*1*		*(kecamatan pesisir tengah, KAB. PESISIR BARAT)*		Pelayanan Publik		*aparatur*	*1*		*KECAMATAN PESISIR TENGAH*
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						358.750.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			358.750.000,00	
			Persentase pemenuhan Layanan Pendukung (%)				*100*		*(kecamatan pesisir tengah, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*KECAMATAN PESISIR TENGAH*
			Persentase pemenuhan Layanan Pendukung (%)				*100*		*(Kecamatan Way Krui, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*KECAMATAN WAY KRUI*
			Persentase pemenuhan Layanan Pendukung (%)				*100*		*(Kecamatan Karya Penggawa, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*KECAMATAN KARYA PENGGAWA*
			Persentase pemenuhan Layanan Pendukung (%)				*100*		*(Kecamatan Pesisir Utara, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*KECAMATAN PESISIR UTARA*
			Persentase pemenuhan Layanan Pendukung (%)				*100*		*(Kecamatan Lemong, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*KECAMATAN LEMONG*
			Persentase pemenuhan Layanan Pendukung (%)				*100*		*(Kecamatan Pulau Pisang, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*KECAMATAN PULAU PISANG*
			Persentase pemenuhan Layanan Pendukung (%)				*100*		*(Kecamatan ngaras, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*KECAMATAN NGARAS*
			Persentase pemenuhan Layanan Pendukung (%)				*100*		*(Kecamatan Bangkunat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*KECAMATAN BANGKUNAT*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase pemenuhan Layanan Pendukung (%)				*100*		*(kecamatan pesisir selatan, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*KECAMATAN PESISIR SELATAN*
			Persentase pemenuhan Layanan Pendukung (%)				*100*		*(Kecamatan Krui Selatan, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*KECAMATAN KRUI SELATAN*
			Persentase pemenuhan Layanan Pendukung (%)				*100*		*(Kecamatan Ngambur, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*KECAMATAN NGAMBUR*
	7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						37.945.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			37.945.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		*1*	*1*	*1*		*(Kecamatan lemong, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*KECAMATAN LEMONG*
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		*1*	*1*	*1*		*(kecamatan pesisir utara, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*KECAMATAN PESISIR UTARA*
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		*1*	*1*	*1*		*(Kecamatan Karya Penggawa, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*KECAMATAN KARYA PENGGAWA*
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(Kecamatan Way Krui, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*KECAMATAN WAY KRUI*
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		*1*	*1*	*1*		*(Kecamatan Krui Selatan, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*KECAMATAN KRUI SELATAN*
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		*1*	*1*	*1*		*(kecamatan pesisir selatan, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*KECAMATAN PESISIR SELATAN*
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		*1*	*1*	*1*		*(Kecamatan Ngambur, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*KECAMATAN NGAMBUR*
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		*1*	*1*	*1*		*(Kecamatan Ngaras, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*KECAMATAN NGARAS*
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		*1*	*1*	*1*		*(Kecamatan Bangkunat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*KECAMATAN BANGKUNAT*
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		*2*	*2*	*2*		*(Kecamatan Pulau Pisang, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*2*		*KECAMATAN PULAU PISANG*
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						99.600.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			99.600.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(Kecamatan Bangkunat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*KECAMATAN BANGKUNAT*
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(Kecamatan Ngaras, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*KECAMATAN NGARAS*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(Kecamatan Ngambur, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*KECAMATAN NGAMBUR*
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(kecamatan pesisir selatan, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*KECAMATAN PESISIR SELATAN*
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(Kecamatan Krui Selatan, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*KECAMATAN KRUI SELATAN*
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(kecamatan pesisir tengah, KAB. PESISIR BARAT)*				*aparatur*	*12*		*KECAMATAN PESISIR TENGAH*
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(Kecamatan Way Krui, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*KECAMATAN WAY KRUI*
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(Kecamatan Karya Penggawa, KAB. PESISIR BARAT)*				*aparatur*	*12*		*KECAMATAN KARYA PENGGAWA*
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(Kecamatan pesisir utara, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*KECAMATAN PESISIR UTARA*
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(Kecamatan lemong, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*KECAMATAN LEMONG*
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(Kecamatan Pulau Pisang, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*KECAMATAN PULAU PISANG*
	7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						125.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			125.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)		*1*	*1*	*1*		*(kecamatan pesisir selatan, KAB. PESISIR BARAT)*				*aparatur*	*1*		*KECAMATAN PESISIR SELATAN*
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)		*1*	*1*	*1*		*(Kecamatan Krui Selatan, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*KECAMATAN KRUI SELATAN*
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)		*1*	*1*	*1*		*(kecamatan pesisir tengah, KAB. PESISIR BARAT)*				*aparatur*	*1*		*KECAMATAN PESISIR TENGAH*
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)		*1*	*1*	*1*		*(Kecamatan Way Krui, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*KECAMATAN WAY KRUI*
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)		*1*	*1*	*1*		*(kecamatan pesisir utara, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*KECAMATAN PESISIR UTARA*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)		*1*	*1*	*1*		*(Kecamatan lemong, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*KECAMATAN LEMONG*
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)		*2*	*2*	*2*		*(Kecamatan Pulau Pisang, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*2*		*KECAMATAN PULAU PISANG*
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)		*1*	*1*	*1*		*(Kecamatan Bangkunat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*KECAMATAN BANGKUNAT*
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)		*1*	*1*	*1*		*(Kecamatan Ngambur, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*KECAMATAN NGAMBUR*
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)		*1*	*1*	*1*		*(Kecamatan Ngaras, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*KECAMATAN NGARAS*
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						96.205.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			96.205.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		*1*	*1*	*1*		*(Kecamatan Ngaras, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*KECAMATAN NGARAS*
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		*2*	*2*	*2*		*(Kecamatan Pulau Pisang, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*2*		*KECAMATAN PULAU PISANG*
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		*1*	*1*	*1*		*(Kecamatan Lemong, KAB. PESISIR BARAT)*				*aparatur*	*1*		*KECAMATAN LEMONG*
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		*1*	*1*	*1*		*(kecamatan pesisir utara, KAB. PESISIR BARAT)*				*aparatur*	*1*		*KECAMATAN PESISIR UTARA*
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(Kecamatan Karya Penggawa, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*KECAMATAN KARYA PENGGAWA*
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(Kecamatan Way Krui, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*KECAMATAN WAY KRUI*
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		*1*	*1*	*1*		*(Kecamatan Krui Selatan, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*KECAMATAN KRUI SELATAN*
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(kecamatan pesisir selatan, KAB. PESISIR BARAT)*				*aparatur*	*12*		*KECAMATAN PESISIR SELATAN*
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(Kecamatan Ngambur, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*KECAMATAN NGAMBUR*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		*1*	*1*	*1*		*(Kecamatan Bangkunat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*KECAMATAN BANGKUNAT*
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						784.917.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			784.917.000,00	
			Persentase Barang Milik Daerah yang dalam kondisi baik (%)				*100*		*(Kecamatan Pulau Pisang, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*KECAMATAN PULAU PISANG*
			Persentase Barang Milik Daerah yang dalam kondisi baik (%)				*100*		*(Kecamatan Bangkunat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*KECAMATAN BANGKUNAT*
			Persentase Barang Milik Daerah yang dalam kondisi baik (%)				*100*		*(Kecamatan ngaras, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*KECAMATAN NGARAS*
			Persentase Barang Milik Daerah yang dalam kondisi baik (%)				*100*		*(Kecamatan Ngambur, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*KECAMATAN NGAMBUR*
			Persentase Barang Milik Daerah yang dalam kondisi baik (%)				*100*		*(kecamatan pesisir selatan, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*KECAMATAN PESISIR SELATAN*
			Persentase Barang Milik Daerah yang dalam kondisi baik (%)				*100*		*(Kecamatan Krui Selatan, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*KECAMATAN KRUI SELATAN*
			Persentase Barang Milik Daerah yang dalam kondisi baik (%)				*100*		*(kecamatan pesisir tengah, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*KECAMATAN PESISIR TENGAH*
			Persentase Barang Milik Daerah yang dalam kondisi baik (%)				*100*		*(Kecamatan Way Krui, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*KECAMATAN WAY KRUI*
			Persentase Barang Milik Daerah yang dalam kondisi baik (%)				*100*		*(Kecamatan Karya Penggawa, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*KECAMATAN KARYA PENGGAWA*
			Persentase Barang Milik Daerah yang dalam kondisi baik (%)				*100*		*(Kecamatan Pesisir Utara, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*KECAMATAN PESISIR UTARA*
			Persentase Barang Milik Daerah yang dalam kondisi baik (%)				*100*		*(Kecamatan Lemong, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*KECAMATAN LEMONG*
	7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						530.920.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			530.920.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		*3*	*3*	*3*		*(kecamatan pesisir utara, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*3*		*KECAMATAN PESISIR UTARA*
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		*4*	*4*	*4*		*(Kecamatan Karya Penggawa, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*4*		*KECAMATAN KARYA PENGGAWA*
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		*4*	*4*	*4*		*(Kecamatan Way Krui, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*4*		*KECAMATAN WAY KRUI*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		*1*	*1*	*1*		*(kecamatan pesisir tengah, KAB. PESISIR BARAT)*				*aparatur*	*1*		*KECAMATAN PESISIR TENGAH*
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		*4*	*4*	*4*		*(kecamatan lemong, KAB. PESISIR BARAT)*				*aparatur*	*4*		*KECAMATAN LEMONG*
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		*4*	*4*	*4*		*(Kecamatan Bangkunat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*4*		*KECAMATAN BANGKUNAT*
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		*4*	*4*	*4*		*(Kecamatan Ngaras, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*4*		*KECAMATAN NGARAS*
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		*3*	*3*	*3*		*(Kecamatan Ngambur, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*3*		*KECAMATAN NGAMBUR*
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		*3*	*3*	*3*		*(kecamatan pesisir selatan, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*3*		*KECAMATAN PESISIR SELATAN*
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		*2*	*2*	*2*		*(Kecamatan Krui Selatan, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*2*		*KECAMATAN KRUI SELATAN*
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		*4*	*4*	*4*		*(Kecamatan Pulau Pisang, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*4*		*KECAMATAN PULAU PISANG*
	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						204.399.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			204.399.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*1*	*1*	*1*		*(kecamatan pesisir selatan, KAB. PESISIR BARAT)*				*aparatur*	*1*		*KECAMATAN PESISIR SELATAN*
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*1*	*1*	*1*		*(Kecamatan Ngambur, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*KECAMATAN NGAMBUR*
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*1*	*1*	*1*		*(Kecamatan Ngaras, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*KECAMATAN NGARAS*
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*1*	*1*	*1*		*(Kecamatan Bangkunat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*KECAMATAN BANGKUNAT*
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*1*	*1*	*1*		*(Kecamatan Way Krui, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*KECAMATAN WAY KRUI*
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*1*	*1*	*1*		*(Kecamatan Krui Selatan, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*KECAMATAN KRUI SELATAN*
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*1*	*1*	*1*		*(Kecamatan Pulau Pisang, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*KECAMATAN PULAU PISANG*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*1*	*1*	*1*		*(kecamatan lemong, KAB. PESISIR BARAT)*				*aparatur*	*1*		*KECAMATAN LEMONG*
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*1*	*1*	*1*		*(kecamatan pesisir utara, KAB. PESISIR BARAT)*				*aparatur*	*1*		*KECAMATAN PESISIR UTARA*
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*1*	*1*	*1*		*(Kecamatan Karya Penggawa, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*KECAMATAN KARYA PENGGAWA*
	7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						43.658.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			43.658.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*1*	*1*	*1*		*(Kecamatan Ngaras, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*KECAMATAN NGARAS*
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*1*	*1*	*1*		*(kecamatan pesisir selatan, KAB. PESISIR BARAT)*				*aparatur*	*1*		*KECAMATAN PESISIR SELATAN*
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*1*	*1*	*1*		*(kecamatan pesisir utara, KAB. PESISIR BARAT)*				*aparatur*	*1*		*KECAMATAN PESISIR UTARA*
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*1*	*1*	*1*		*(kecamatan lemong, KAB. PESISIR BARAT)*				*aparatur*	*1*		*KECAMATAN LEMONG*
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*5*	*5*	*5*		*(Kecamatan Pulau Pisang, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*5*		*KECAMATAN PULAU PISANG*
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*1*	*1*	*1*		*(Kecamatan Bangkunat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*KECAMATAN BANGKUNAT*
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*1*	*1*	*1*		*(Kecamatan Ngambur, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*KECAMATAN NGAMBUR*
	7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						5.940.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			5.940.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*2*	*2*	*2*		*(Kecamatan Krui Selatan, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*2*		*KECAMATAN KRUI SELATAN*
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**330.240.560,00**			**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas**			**330.240.560,00**	
			Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)				***100***									***KECAMATAN PULAU PISANG***

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)				***100***									***KECAMATAN LEMONG***
			Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)				***100***									***KECAMATAN PESISIR UTARA***
			Cakupan Pemenuhan Pengembngan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan (%)				***100***									***KECAMATAN KRUI SELATAN***
			Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)				***100***									***KECAMATAN PESISIR SELATAN***
			Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)				***100***									***KECAMATAN NGAMBUR***
			Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)				***100***									***KECAMATAN NGARAS***
			Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)	***100***			***100***									***KECAMATAN BANGKUNAT***
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						330.240.560,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			330.240.560,00	
			persentase pengembangan pemuda (%)				*100*		*(kecamatan pesisir selatan, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*KECAMATAN PESISIR SELATAN*
			persentase pengembangan pemuda (%)				*100*		*(Kecamatan Ngambur, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*KECAMATAN NGAMBUR*
			persentase pengembangan pemuda (%)				*100*		*(Kecamatan Ngaras, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*KECAMATAN NGARAS*
			persentase pengembangan pemuda (%)				*100*		*(Kecamatan Bangkunat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*KECAMATAN BANGKUNAT*
			persentase pengembangan pemuda (%)				*100*		*(Kecamatan Krui Selatan, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*KECAMATAN KRUI SELATAN*
			persentase pengembangan pemuda (%)				*100*		*(Kecamatan pesisir Utara, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*KECAMATAN PESISIR UTARA*
			persentase pengembangan pemuda (%)				*100*		*(Kecamatan Lemong, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*KECAMATAN LEMONG*
			Persentase Pengembangan Pemuda (%)				*100*		*(Kecamatan Pulau Pisang, Pulaupisang)*					*100*		*KECAMATAN PULAU PISANG*
	7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						330.240.560,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			330.240.560,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)		*1*	*1*	*1*		*(Kecmatan Pulau pisang, KAB. PESISIR BARAT)*				*Siswa*	*1*		*KECAMATAN PULAU PISANG*
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)		*1*	*1*	*1*		*(Kecamatan Lemong, KAB. PESISIR BARAT)*				*Siswa*	*1*		*KECAMATAN LEMONG*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)		*1*	*1*	*1*		*(kecamatan pesisir utara, KAB. PESISIR BARAT)*				*siswa*	*1*		*KECAMATAN PESISIR UTARA*
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)		*1*	*1*	*1*		*(Kecamatan Krui Selatan, KAB. PESISIR BARAT)*				*Siswa*	*1*		*KECAMATAN KRUI SELATAN*
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)		*1*	*1*	*1*		*(kecamatan pesisir selatan, KAB. PESISIR BARAT)*				*Siswa*	*1*		*KECAMATAN PESISIR SELATAN*
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)		*1*	*1*	*1*		*(Kecamatan Ngambur, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*KECAMATAN NGAMBUR*
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)		*1*	*1*	*1*		*(Kecamatan Ngaras, KAB. PESISIR BARAT)*				*Siswa*	*1*		*KECAMATAN NGARAS*
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)		*1*	*1*	*1*		*(Kecamatan Bangkunat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Siswa*	*1*		*KECAMATAN BANGKUNAT*
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**632.800.000,00**			**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas**			**632.800.000,00**	
			Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (%)				***100***									***KECAMATAN PESISIR TENGAH***
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						632.800.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			632.800.000,00	
			jumlah kelurahan (Desa/Kelurahan)				*2*		*(kecamatan pesisir tengah, kelurahan pasar krui dan kelurahan kota krui, KAB. PESISIR BARAT)*					*2*		*KECAMATAN PESISIR TENGAH*
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						632.800.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			632.800.000,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)		*2*	*2*	*2*		*(kelurahan pasar krui dan kelurahan kota krui, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*2*		*KECAMATAN PESISIR TENGAH*
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**						**40.366.553.960,00**							**44.175.128.283,00**	
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**						**40.366.553.960,00**							**44.175.128.283,00**	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**8.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)***				***92.5***	**2.773.644.407,00**			**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas**			**3.051.008.848,00**	***BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK***
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu (%)*				*92.5*	4.612.042,00	*(Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*92.5*	5.073.246,00	*BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK*
	8.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)*		*2.00*	*2.00*	*2.00*	2.612.042,00	*(Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*2.00*	2.873.246,00	*BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK*
	8.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)*		*2.00*	*2.00*	*2.00*	2.000.000,00	*(Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*2.00*	2.200.000,00	*BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK*
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu (%)*				*92.5*	1.503.708.900,00	*(Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*92.5*	1.654.079.790,00	*BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK*
	8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)*		*13.00*	*13.00*	*13.00*	1.498.208.900,00	*(Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*13.00*	1.648.029.790,00	*BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK*
	8.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						2.500.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.750.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1.00*		*BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK*
	8.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						2.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.200.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		*18.00*	*18.00*	*18.00*		*(Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*18.00*		*BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK*
	8.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						1.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.100.000,00	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1.00*		*BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK*
	8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						25.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			27.500.000,00	
			Persentase aparatur yang berkinerja baik (%)				*92.5*		*(Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, KAB. PESISIR BARAT)*					*92.5*		*BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK*
	8.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						25.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			27.500.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)		*0.00*	*0.00*	*5.00*		*(Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*5.00*		*BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK*
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						383.617.820,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			421.979.602,00	
			Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja (%)				*92.5*		*(Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, KAB. PESISIR BARAT)*					*92.5*		*BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK*
	8.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						11.758.400,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			12.934.240,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1.00*		*BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						55.600.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			61.160.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1.00*		*BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK*
	8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						87.259.420,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			95.985.362,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1.00*		*BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK*
	8.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						24.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			26.400.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		*20.00*	*20.00*	*10.00*		*(Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*10.00*		*BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK*
	8.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu						55.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			60.500.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)		*11.00*	*11.00*	*11.00*		*(Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*11.00*		*BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK*
	8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						150.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			165.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*12.00*	*12.00*	*12.00*		*(Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12.00*		*BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK*
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						32.500.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			35.750.000,00	
			Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja (%)				*92.5*		*(Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, KAB. PESISIR BARAT)*					*92.5*		*BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK*
	8.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel						14.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			15.400.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)		*0.00*	*0.00*	*3.00*		*(Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*5.00*		*BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK*
	8.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						18.500.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			20.350.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		*0.00*	*0.00*	*3.00*		*(Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*5.00*		*BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK*
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						621.012.835,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			683.114.119,00	
			Persentase Pemenuhan Layanan Pendukung (%)				*92.5*		*(Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, KAB. PESISIR BARAT)*					*92.5*		*BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK*
	8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						346.392.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			381.031.200,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*12.00*	*12.00*	*12.00*		*(Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12.00*		*BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK*
	8.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						259.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			284.900.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)		*12.00*	*12.00*	*12.00*		*(Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12.00*		*BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK*
	8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						15.620.835,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			17.182.919,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		*12.00*	*12.00*	*12.00*		*(Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12.00*		*BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK*
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						203.192.810,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			223.512.091,00	
			Persentase Barang Milik Daerah yang dalam kondisi baik (%)				*92.5*		*(Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, KAB. PESISIR BARAT)*					*92.5*		*BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)*		*3.00*	*3.00*	*3.00*	99.459.750,00	*(Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*3.00*	109.405.725,00	*BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK*
	8.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)*		*5.00*	*5.00*	*5.00*	103.733.060,00	*(Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*5.00*	114.106.366,00	*BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK*
2.	**8.01.02**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	***Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengembangan wawasan kebangsaan (%)***				***49***	**1.256.985.542,00**			**Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing**	**Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**1.154.603.021,00**	***BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK***
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	*Persentase pelaksanaan pemantapan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan (%)*				*49*	1.256.985.542,00	*(Dalam Daerah, KAB. PESISIR BARAT)*		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia		*51*	1.154.603.021,00	*BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK*
	8.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)*		*50.00*	*100.00*	*150.00*	1.049.639.110,00	*(Dalam Daerah, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	*Masyarakat*	*200.00*	1.154.603.021,00	*BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK*
	8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)*		*50.00*	*100.00*	*150.00*	207.346.432,00	*(Dalam Daerah, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	*Masyarakat*	*200.00*	-	*BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	**8.01.03**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	***Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu (%)***				***84.92***	**32.390.266.865,00**			**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**35.629.293.552,00**	***BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK***
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	*Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik (%)*				*84.92*	32.390.266.865,00	*(Dalam Daerah, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia		*84.92*	35.629.293.552,00	*BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK*
	8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)*		*50.00*	*100.00*	*150.00*	32.161.774.568,00	*(Dalam Daerah, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	*Masyarakat dan Partai Politik yang mendapat kursi di pemilihan legislatif*	*200.00*	35.377.952.025,00	*BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK*
	8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)*		*50.00*	*100.00*	*150.00*	86.859.977,00	*(Dalam Daerah, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	*Masyarakat*	*200.00*	95.545.975,00	*BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Laporan)*		*2.00*	*2.00*	*2.00*	141.632.320,00	*(Dalam Daerah, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	*Masyarakat*	*2.00*	155.795.552,00	*BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK*
4.	**8.01.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	***Persentase Organisasi Masyarakat yang aktif (%)***				***75***	**1.274.406.134,00**			**Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing**	**Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**1.401.846.748,00**	***BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK***
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	*Persentase Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (%)*				*75*	1.274.406.134,00	*(Dalam Daerah, KAB. PESISIR BARAT)*		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia		*75*	1.401.846.748,00	*BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK*
	8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)*		*50.00*	*100.00*	*150.00*	1.197.391.195,00	*(Dalam Daerah, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	*Organisasi Masyarakat*	*200.00*	1.317.130.315,00	*BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK*
	8.01.04.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)*		*50.00*	*100.00*	*150.00*	77.014.939,00	*(Dalam Daerah, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	*Organisasi Masyarakat*	*200.00*	84.716.433,00	*BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK*
5.	**8.01.05**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**						**670.286.948,00**			**Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan**	**Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat**			**737.315.643,00**	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya (%)				***67.5***									***BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK***
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	*Persentase Pemantapan pelaksanaan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama (%)*				*67.5*	670.286.948,00	*(Dalam Daerah, KAB. PESISIR BARAT)*		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat		*67.5*	737.315.643,00	*BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK*
	8.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)*		*50.00*	*100.00*	*150.00*	270.122.866,00	*(Dalam Daerah, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat	*Masyarakat*	*200.00*	297.135.153,00	*BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK*
	8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)*		*50.00*	*100.00*	*150.00*	400.164.082,00	*(Dalam Daerah, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat	*Masyarakat*	*200.00*	440.180.490,00	*BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK*
6.	**8.01.06**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	***Persentase koordinasi dan peran lembaga dan elemen masyarakat dalam pencegahan terjadinya konflik sosial (%)***				***75***	**2.000.964.064,00**			**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**2.201.060.471,00**	***BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK***
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	*Persentase koordinasi, pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial (%)*				*75*	2.000.964.064,00	*(Dalam Daerah, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia		*75*	2.201.060.471,00	*BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.06.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)*		*50.00*	*100.00*	*150.00*	550.095.795,00	*(Dalam Daerah, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	*Masyarakat*	*200.00*	605.105.375,00	*BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK*
	8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)*		*50.00*	*100.00*	*150.00*	850.864.468,00	*(Dalam Daerah, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	*Masyarakat*	*200.00*	935.950.915,00	*BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK*
	8.01.06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Laporan)*		*12.00*	*12.00*	*12.00*	600.003.801,00	*(Dalam Daerah, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	*Masyarakat*	*12.00*	660.004.181,00	*BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK*

	J U M L A H	**938.603.096.460,00**		880.136.075.236,00	

BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, termasuk juga isu strategis nasional yang sedang berkembang. Untuk perencanaan pada tahun 2024 sebagaimana pemenuhan *mandatory spending* pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), pencapaian target-target sasaran dalam visi dan misi kepala daerah, serta program kerja kepala daerah.

Dengan demikian RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat:

1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun perencanaan dan penganggaran;

2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);

3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta Pemerintah Daerah yang menjadi tanggung jawab masing- masing kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah; dan

4. Secara faktual, menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai upaya merealisasikan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan RKPD berpedoman pada arah kebijakan pembangunan nasional, arah kebijakan pembangunan daerah, tahapan dan tata cara penyusunan, tahapan dan tata cara penyusunan perubahan, pengendalian dan evaluasi, serta konsistensi perencanaan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6.1 Indikator Kinerja Utama

Penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat dalam bentuk kinerja nyata dari seluruh perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi wewenang pemerintah daerah kabupaten. Dalam menyelenggaran pemerintahan daerah, perlu dilakukan penetapan kinerja. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan tolok ukur kinerja yang harus dicapai dalam pembangunan jangka menengah selama 5 (lima) tahun.

RKPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024 yang notabennya merupakan tahun ketiga pada RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026 menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) atau IKU Kepala Daerah. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang target keberhasilan mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2021-2026 yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah.

Tabel 6.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024

Misi/ Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ Indikator KinerjaUtama (IKU)	Satuan	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD 2020 (n 0)	Target Tahun Ke-						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
					2021*	2022	2023	2024	2025	2026	
					(n)	(n 1)	(n 2)	(n 3)	(n 4)	(n 5)	
Misi I **Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia secara Berkeadilan, Maju dan Berdaya Saing**											
Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	1. Terwujudnya Sumber Daya Manusia Daerah yang Berkualitas	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	63.91	65.24	64.17	64.31	65.44*	64.58	64.71	64.71
Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saig Pemuda dan Penduduk Usia Kerja	2. Menurunnya Jumlah Pengangguran Daerah	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	3.41	1.70	3.00	2.80-3.20	2.60	2.41	2.21	2.21
Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak	3. Terwujudnya Kesetaraan gender dan Perlindungan Anak yang Berkualitas	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	93.21	93.50	93.82	94.29	94.76	95.24	95.71	95.71
Misi II **Mengembangkan Infrastruktur Wilayah dengan Konsep Pembangunan Inklusif untuk Konektivitas Antar Wilayah dengan Memperhatikan Aspek Mitigasi Bencana dan Berwawasan Lingkungan**											
Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Daerah dan Kewilayahan	1. Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Transportasi Daerah	Tingkat Kemantapan Jalan	Persen	39.03	70	41.00	41.50	42.00	42.50	43.00	43.00

	2. Tersedianya Pemukiman Penduduk yang Sehat dan Berkualitas	Persentase Penduduk Yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Daya Air Yang Sehat Dan Aman	Persen	35.00	100	37.50	40.00	42.50	43.50	45.00	45.00
	3. Tersedianya Sumber Daya Air untuk Mendukung Kedaulatan Pangan	Rasio Jaringan Irigasi	Persen	50.94	70	52.00	53.00	55.00	57.50	60.00	60.00
	4. Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Ramah Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	68.50	66.50	73.54	73.87	74.20	74.53	74.86	74.86
	5. Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Pencegahan dan Penyelamatan Bencana Daerah	Indeks Resiko Bencana	Angka	181.41	n/a	180.94	180.71	180.47	180.24	180.00	180.00
Misi III **Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan Melalui Peningkatan Produktivitas Sektor Pertanian dan Perikanan**											
Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Daerah dengan Fokus pada Potensi Lokal	1. Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	-1.17	47.5-5.4	3.20-3.70	3.40-3.90	3.60-4.10	3.80-4.30	4.00-4.50	4.00-4.50
	2. Meningkatnya Pendapatan Perkapita Masyarakat	PDRB Perkapita	Juta Rupiah	28.45	31.75	28.20-28.81	28,60-29.04	30.00-30.10*	30.10-30.20	30.20-30.30	29.20-29.85
	3. Meningkatnya Kontribusi Pertanian terhadap Perekonomian Masyarakat	Nilai Tukar Petani (NTP)	Angka	94.73	101.22	97.25	100.51	100.77*	101.04	102.30	102.30

	4. Pemerataan Distribusi Pendapatan Masyarakat	Indeks Gini	Angka	0.34	0.33-0.34	0.32	0.32	0.31	0.30	0.29	0.29
	5. Menurunnya Jumlah Penduduk Miskin Daerah	Tingkat Kemiskinan Daerah	Persen	14.29	14.23	13.95	13.65	13.34	13.04	12.73	12.73
Misi IV **Mengembangkan Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah yang Berpijak Pada Kearifan Lokal**											
Meningkatkan Pariwisata Daerah yang Berdaya Saing	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan	Pertumbuhan Wisatawan Nusantara dan Mancanegara	Persen	-75.03	10	20.00	21.00	22.00	23.00	25.00	25.00
Misi V **Menyelenggarakan Pelayanan Publik yang Berkualitas Melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Produktif Serta Penguatan Sinergitas Antar Lembaga**											
Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Berkualitas	1. Terwujudnya Pelayanan Publik yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Angka	75.00	n/a	76.00	77.00	78.00	79.00	80.00	80.00
	2. Terwujudnya Kinerja Instansi Pemerintah Daerah yang Berkualitas	Nilai SAKIP	Huruf/ Predikat	CC	B	CC	CC	CC	B	B	B
	3. Terwujudnya Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang Berkualitas	Opini BPK	Huruf/ Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	4. Meningkatnya Pembangunan di Desa/Pekon	Indeks Desa Membangun	Angka	0.6100	n/a	0.6600	0.6700	0.6800	0.6900	0.7000	0.7000

Sumber : RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026
**RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun*
***Penyesuaian berdasarkan hasil capaian n-2*

6.2 Indikator Kinerja Daerah

RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah wajib diikuti dengan penetapan Renstra Perangkat Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah. Target kinerja dari Perangkat Daerah atau Indikator Kinerja Daerah (IKD) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah berdasarkan pada kewenangan konkuren daerah yang diatur oleh UU Nomor 23 Tahun 2014 dan peraturan turunannya. IKD dicapai melalui pelaksaan program, kegiatan dan sub kegiatan secara langsung akan menjadi pijakan dalam pencapaian target kinerja Kepala Daerah dalam RPJMD.

IKD yang disajikan merupakan tindak lanjut dari Permendagri Nomor 17 Tahun 2021, sebagai bagian upaya dari pemerintah daerah mendukung sinkronisasi dan sinergitas pencapaian target-target kinerja dari Pemerintah Pusat oleh Pemerintah Daerah. Nomenklatur kinerja pada IKD yang ditetapkan menyesuaikan dengan ketersediaan data di daerah. IKD dimaksud juga terangkum dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026 serta Renstra Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir barat sebagaimana pada tabel dibawah ini:

Tabel 6.2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH			SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD 2020 (n 0)	TARGET CAPAIAN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
					2022	2023	2024	2025	2026	
					(n 1)	(n 2)	(n 3)	(n 4)	(n 5)	
I	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**									
I.1	**Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi**									
	1	Pertumbuhan Ekonomi *TPB	Persen	-1.17	3.20-3.70	3.40-3.90	3.60-4.10	3.80-4.30	4.00-4.50	4.00-4.50
	2	PDRB per Kapita *TPB	Juta Rupiah	28.45	28.20-28.81	28.60-29.04	30.00-30.10	30.10-30.20	30.20-30.30	29.20-29.85
	3	Indeks Gini *TPB	Angka	0.34	0.32	0.32	0.31	0.30	0.29	0.29
	4	Nilai Tukar Petani	Angka	94.73	97.25	100.51	100.77	101.04	102.30	102.30
I.2	**Fokus Kesejahteraan Sosial**									
	1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) *TPB	Angka	63,91	64.17	64.31	65.44	64.58	64.71	64.71
	2	Tingkat Kemiskinan Daerah *TPB	Persen	14.29	13.95	13.65	13.34	13.04	12.73	12.73
	3	Angka Rata-Rata Lama Sekolah *TPB **SPM	Tahun	8.01	8.05	8.07	8.10	8.12	8.14	8.14
	4	Angka Harapan Lama Sekolah *TPB **SPM	Tahun	11.99	12.03	12.05	12.06	12.08	12.10	12.10
	5	Angka Harapan Hidup *TPB *SPM	Tahun	63.50	63.62	63.68	63.73	63.79	63.80	63.80
	6	Prevalensi Stunting pada Anak Baduta (Bawah Dua Tahun) *TPB **SPM	Persen	6.60	6.50	6.40	6.30	6.20	6.20	6.20
	7	Persentase Ruang Terbuka Lahan Hijau *TPB	Persen	4.52	4.50	4.60	4.70	4.80	5.00	5.00
	8	Jumlah Titik Kawasan Kumuh	Lokasi	61	60	60	55	55	50	50
	9	Indeks Pembangunan Gender *TPB	Angka	93.21	93.82	94.29	94.76	95.24	95.71	95.71
	10	Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Predikat	Madya	Madya	Madya	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya
	11	Indeks Desa Membangun (IDM) *TPB	Angka	0.6100	0.6600	0.6700	0.6800	0.6900	0.7000	0.7000

I.3	**Fokus Seni Budaya dan Olahraga**									
	1	Persentase Kesenian Budaya yang Dilestarikan	Persen	7.00	7.50	8.00	8.50	9.00	10.00	10.00
	2	Jumlah Atlet Berpestasi Tingkat Provinsi	Orang	2	4	5	7	8	10	10
I.4	**Fokus Reformasi Birokrasi**									
	1	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	n/a	C	C	C	C	C	C
	2	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Angka	75.00	76.00	77.00	78.00	79.00	80.00	80.00
	3	Nilai SAKIP	Huruf/ Predikat	CC	CC	CC	CC	B	B	B
	4	Indeks Inovasi Pemerintah daerah	Predikat	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif
II	**ASPEK PELAYANAN UMUM**									
II.1	**Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib**									
	II.1.1	**Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**								
	1	**Pendidikan**								
	1	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD *TPB **SPM	Persen	70.00	71.00	72.00	73.00	74.00	75.00	75.00
	2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP *TPB **SPM	Persen	92.08	92.08	92.10	92.12	92.14	92.16	92.16
	3	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP *TPB **SPM	Persen	70.25	70.25	70.25	70.50	70.50	70.75	70.75
	4	Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan dasar *TPB **SPM	Persen	79.77	80.27	80.77	81.27	81.77	82.27	82.27
	5	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Dasar *TPB **SPM	Persen	91.07	91.57	92.07	92.57	93.07	93.57	93.57
	6	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam PAUD *TPB **SPM	Persen	54.92	57.70	59.14	60.62	62.14	63.69	63.69
	7	Tingkat Partisipasi Anak Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan SD *TPB **SPM	Persen	97.38	98.36	98.85	99.34	100.00	100.00	100.00

	8	Tingkat Partisipasi Anak Usia 13-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan SMP *TPB **SPM	Persen	84.55	88.83	91.05	93.33	95.66	98.05	98.05
	9	Angka Putus Sekolah *TPB **SPM	Persen	0.22	0.22	0.22	0.21	0.21	0.20	0.20
	10	Angke Melek Huruf (AMH) *TPB **SPM	Persen	90.24	92.05	92.97	93.90	94.84	95.79	95.79
	11	Rasio Guru SD terhadap Siswa *TPB **SPM	Rasio	1 : 13	1 : 13	1 : 13	1 : 13	1 : 13	1 : 13	1 : 13
	12	Rasio Guru SMP terhadap Siswa *TPB **SPM	Rasio	1 : 13	1 : 13	1 : 13	1 : 13	1 : 13	1 : 13	1 : 13
	2	**Kesehatan**								
	1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup *TPB **SPM	Kasus	5,71 (17 kasus)	4,37 (13 kasus)	4,03 (12 kasus)	3,69 (11 kasus)	3,02 (9 kasus)	2,35 (7 kasus)	2,35 (7 kasus)
	2	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup *TPB **SPM	Kasus	235 (7 kasus)	202 (6 kasus)	168 (5 kasus)	134 (4 kasus)	101 (3 kasus)	67 (2 kasus)	67 (2 kasus)
	3	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) *TPB **SPM	Kasus	615	212	210	205	200	195	195
	4	Rasio daya tampung Rumah Sakit terhadap Jumlah Penduduk **SPM	Rasio	1 : 8.969	1 : 1.689	1 : 6.407	1 : 6.042	1 : 5.773	1 : 5.526	1 : 5.526
	5	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil *TPB **SPM	Persen	88.00	100	100	100	100	100	100
	6	Pelayanan Kesehatan Balita *TPB **SPM	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	7	Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan *TPB	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	8	Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar **SPM	Persen	36.36	36.36	45.45	45.45	54.55	54.55	54.55
	9	Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Apotek dan Toko Obat) yang Memenuhi Standar dan Persyaratan Perizinan	Persen	35.71	42.86	57.14	71.43	85.71	100	100
	10	Angka Kematian Ibu (AKI) *TPB **SPM	Kasus	7	7	6	5	4	3	2
	11	Angka Kematian Bayi (AKB) *TPB **SPM	Kasus	17	13	12	11	9	7	7
	12	Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan *TPB *SPM	Persen	85.08	85.08	90.00	90.00	95.00	100	100
	13	Prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada Balita *TPB **SPM	Persen	53.00	45.00	40.00	35.00	30.00	20.00	20.00

	14	Insidensi TB per 100.000 penduduk *TPB **SPM	Persen	22.85	21.16	20.11	19.10	18.15	17.24	17.24
	15	Temuan kasus TB baru menggunakan indikator SPM (terduga TB) *TPB **SPM	Persen	22.85	23.00	23.20	23.40	23.80	24.00	24.00
	16	*Treatment coverage* pada pasien TB *TPB **SPM	Persen	24	100	100	100	100	100	100
	17	Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan *TPB **SPM	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	18	Jumlah Puskesmas melaksanakan layanan Upaya Berhenti Merokok (UBM) *TPB **SPM	Unit	11	11	11	11	11	11	11
	19	Implementasi KTR pada 9 tempat (pendidikan, transportasi, kesehatan, dll) *TPB	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	20	Persentase Sarana Produksi UKOT	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	21	Rasio Dokter Umum per 100.000 penduduk *TPB **SPM	Angka	1.32	1.33	1.34	1.36	1.37	1.38	1.38
	22	Rasio Perawat per 100.000 penduduk *TPB **SPM	Angka	11.02	11.13	11.24	11.35	11.47	11.58	11.58
	23	Rasio Bidan per 100.000 penduduk *TPB **SPM	Angka	12.02	12.13	12.24	12.35	12.47	12.58	12.58
	3	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**								
	1	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk *TPB	Km	644.08	644.08	654.08	664.08	674.08	684.08	684.08
	2	Persentase rumah tinggal bersanitasi *TPB **SPM	Persen	65.30	67.50	70.00	72.50	75.00	77.50	77.50
	3	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	Persen	40.00	40.00	40.00	50.00	60.00	70.00	70.00
	4	Persentase penduduk berakses air minum *TPB **SPM	Persen	35.00	37.50	40.00	42.50	43.50	45.00	45.00
	5	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan *TPB **SPM	Persen	35.00	37.50	40.00	42.50	43.50	45.00	45.00

	6	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman *TPB **SPM	Persen	65.30	65.30	69.87	74.76	78.50	80.00	80.00
	7	Panjang jaringan irigasi primer kewenangan daerah yang dibangun	Km	30.20	35.00	40.00	45.00	50.00	55.00	55.00
	8	Luas jaringan daerah irigasi permukaan kewenangan daerah yang direhabilitasi	Persen	59.47	60.00	63.00	65.00	68.00	70.00	70.00
	9	Panjang Infrastruktur pengendali banjir wilayah sungai kewenangan daerah yang dibangun	Persen	n/a	0.00	5.00	7.00	12.00	15.00	15.00
	10	Rasio Prasarana, Sarana dan Utilitas Dasar (PSU) Perkantoran pemerintahan Daerah dalam Skala Mantap	Persen	51.00	55.00	60.00	70.00	80.00	90.00	90.00
	11	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak *TPB **SPM	Persen	35.00	37.50	40.00	42.50	43.50	45.00	45.00
	12	Persentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan *TPB **SPM	Persen	21.52	25.00	35.00	45.00	50.00	60.00	60.00
	13	Ketersediaan Dokumen Tata Ruang Wilayah (RTRW) melalui Peta Analog dan Peta Digital *TPB	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1
	14	Ketersediaan dokumen RDTR Kecamatan	Dokumen	0	0	0	1	1	1	3
	4	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**								
	1	Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan Prasarana Sarana Umum	Persen	n/a	35.00	40.00	45.00	50.00	60.00	60.00
	2	Persentase Rumah Susun Sewa Terpelihara	Persen	0.00	0.00	100	100	100	100	100
	3	Persentase warga negara korban bencana kabupaten yang memperoleh rumah layak huni **SPM	Persen	100	100	100	100	100	100	100

	4	Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) *TPB	Persen	14.03	14.00	13.00	12.00	11.33	10.00	10.00
	5	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni **SPM	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	6	Luas Kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	Ha	n/a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	2.5
	7	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana Sarana Umum	Persen	33.00	39.60	41.32	42.50	43.20	45.96	45.96
	5	**Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**								
	1	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) **SPM	Persen	24.00	100	100	100	100	100	100
	2	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan **SPM	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	3	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) **SPM	Menit	15	15	15	15	15	15	15
	4	Persentase pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran **SPM	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	5	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana *TPB **SPM	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	6	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana *TPB **SPM	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	7	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban Bencana **SPM	Persen	100	100	100	100	100	100	100

	8	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran **SPM	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	9	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan akibat Penegakan Hukum Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Daerah **SPM	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	6	**Sosial**								
	1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti *TPB **SPM	Persen	18.02	22.53	28.16	35.20	43.99	54.99	54.99
	2	Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti *TPB **SPM	Persen	4.83	6.04	7.55	9.43	11.79	14.74	14.74
	3	Persentase (%) Lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti *TPB **SPM	Persen	0.36	100	100	100	100	100	100
	4	Jumlah Warga Negara/Gelandangan dan Pengemis yang memperoleh Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial di Luar Panti *TPB **SPM	Persen	0	100	100	100	100	100	100
	5	Persentase (%) korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat *TPB **SPM	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	6	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani *TPB **SPM	Persen	84.10	84.94	85.79	86.65	87.51	88.39	88.39
	II.1.2	**Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**								
	1	**Tenaga Kerja**								
	1	Persentase sengketa pengusaha-pekerja per tahun yang tertangani	Persen	44.00	50.00	70.00	80.00	100	100	100
	2	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Persen	0.25	0.30	0.35	0.40	0.50	0.60	0.60

	3	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenaga kerjaan)	Persen	58.00	60.00	62.00	64.00	67.00	70.00	70.00
	4	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	Persen	0.011	0.015	0.015	0.016	0.018	0.018	0.018
	2	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**								
	1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah *TPB	Persen	0.92	1.01	1.11	1.22	1.34	1.47	1.47
	2	Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta *TPB	Persen	0.032	0.035	0.039	0.043	0.047	0.052	0.052
	3	Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang Tertangani *TPB	Persen	46.09	46.84	47.02	47.3	48.21	48.75	48.75
	4	Partisipasi angkatan kerja perempuan *TPB	Persen	0.078	0.086	0.095	0.1	0.11	0.12	0.12
	5	Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan *TPB	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	6	Cakupan Anak korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan *TPB	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	7	Persentase ARG pada Belanja APBD	Persen	0.009	0.011	0.011	0.012	0.013	0.015	0.015
	8	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif *TPB	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	3	**Pangan**								
	1	Skor Pola Pangan Harapan *TPB	Skor (Angka)	84.92	84.95	84.98	85.10	85.20	85.40	85.40
	2	Ketersediaan Pangan Utama *TPB	Ton	27.752,48	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	3	Ketersedian Energi per kapita *TPB	(kkal/ kap/hari)	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00

	4	Ketersedian Protein per kapita *TPB	(gr/kap/ hari)	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00
	5	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	Persen	n/a	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
	4	**Pertanahan**								
	1	Persentase luas lahan bersertifikat	Persen	44.88	50.00	53.00	55.00	57.00	60.00	60.00
	2	Persentase penerbitan Izin lokasi	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	3	Jumlah Kepala Keluarga penerima akses Reformasi Agraria	Kepala Keluarga	n/a	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
	4	Realisasi Luas Tanah yang disediakan bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Kepentingan Lainnya	Ha	9.43	10.00	10.50	11.00	11.20	11.50	11.50
	5	**Lingkungan Hidup**								
	1	Hasil pengukuran Indeks Kualitas Air	Angka	65.6	87.47	87.57	87.67	87.77	87.87	87.87
	2	Hasil pengukuran Indeks Kualitas Udara	Angka	86.11	58.44	58.54	58.64	58.74	58.84	58.84
	3	hasil pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Angka	68.2	73.7	74.86	76.02	77.18	78.34	78.34
	4	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persen	n/a	10.00	10.50	11.00	11.50	12.00	12.00
	5	RPPLH dalam Rencana Pembangunan Kab/Kota yang Terintegrasi	Dokumen	4	6	7	8	9	10	40
	6	Persentase ketersediaan Dokumen KLHS terhadap K/R/P	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	7	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persen	71.43	100	100	100	100	100	100
	8	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota	Persen	n/a	3.00	3.00	2.00	1.00	1.00	1.00
	9	Persentase cakupan area pelayanan persampahan	Persen	45.00	49.61	52.09	54.70	57.43	60.30	60.30

	10	Persentase jumlah pengurangan timbulan sampah	Persen	3.00	5.00	5.30	5.60	6.00	6.00	6.00
	11	Persentase jumlah penanganan timbulan sampah	Persen	14.45	18.23	19.23	20.48	21.37	22.98	22.98
	12	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah	Persen	4.52	4.70	5.00	5.00	5.30	5.50	5.50
	6	**Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil**								
	1	Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	2	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Status	sudah	sudah	sudah	sudah	Sudah	sudah	sudah
	3	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) *TPB	Persen	95.54	97.00	98.00	99.00	100	100	100
	4	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun *TPB	Persen	92.11	93.00	94.00	95.00	96.00	97.00	97.00
	5	Persentase penduduk yang ber-Kartu Keluarga (KK) *TPB	Persen	51.08	60.00	70.00	80.00	90.00	98.00	98.00
	6	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Persen	16.09	30.00	40.00	50.00	60.00	70.00	70.00
	7	**Pemberdayaan Masyarakat Desa**								
	1	Persentase PKK Aktif	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	2	Persentase Posyandu Aktif	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	3	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Aktif	BUMDes	85	88	91	94	97	100	100
	4	Persentase desa yang mendapatkan fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	5	Persentase Desa/Pekon yang muatan RPJMDes-nya sesuai dengan RPJMD Kabupaten	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	6	Persentase Desa Tertinggal *TPB	Persen	51.04	45.94	41.34	37.21	33.49	30.14	30.14
	7	Persentase Desa Mandiri *TPB	Persen	0.86	1.72	2.59	3.45	4.31	5.17	5.17

	8	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**								
	1	Total Fertility Rate (TFR)	Persen	2.26	2.21	2.19	2.17	2.13	2.10	2.10
	2	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	Persen	76.49	76.53	76.57	76.64	76.77	76.81	76.81
	3	Persentase tingkat putus pakai pemakaian kontrasepsi (Drop Out KB)	Persen	18.45	18.45	16.00	14.00	12.00	10.00	10.00
	4	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	Persen	81.55	81.73	81.78	81.89	81.92	81.94	81.94
	5	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Angka	51.11	54.38	56.29	58.00	60.10	61.10	61.10
	6	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	1.06	1.01	0.98	0.95	0.95	0.92	0.92
	7	Indeks Pembangunan Keluarga	Angka	53.57	56.50	58.00	61.00	62.50	64.00	64.00
	8	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persen	76.40	76.40	76.40	76.40	76.40	76.40	76.40
	9	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persen	13.09	11.09	9.30	7.40	7.00	6.50	6.50
	10	Persentase masyarakat yang terjangkau program bangga kencana	Persen	30.00	40.00	50.00	60.00	70.00	75.00	75.00
	11	Angka Kelahiran Remaja umur 15-49 tahun (age spicific fertility rate /ASFR 15-19)	Angka	30	25	24	23	22	21	21
	12	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	Tahun	21.90	22.00	22.00	22.50	22.50	22.90	22.90
	13	Persentase Bayi Umur Dua Tahun yang Stunting *TPB	Persen	30.00	25.00	23.00	21.00	18.00	16.00	16.00
	14	Persentase Keluarga Balita dan Anak yang Ikuti BKB	Persen	23.00	25.00	27.00	29.00	31.00	33.00	33.00
	9	**Perhubungan**								
	1	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik sektor transportasi	Predikat	sangat baik	sangat baik	sangat baik	sangat baik	sangat baik	sangat baik	sangat baik
	2	Jumlah rekomendasi uji KIR angkutan umum	Jumlah	50	55	60	65	70	75	75

	3	Persentase prasarana yang memenuhi standar dalam kondisi baik	Persen	70.00	75.00	80.00	85.00	90.00	95.00	95.00
	4	Persentase Penggunaan Moda Transportasi Umum *TPB	Persen	66.00	70.00	72.50	75.00	77.50	80.00	80.00
	5	Persentase sarana perhubungan dalam kondisi baik	Persen	30.00	35.00	40.00	45.00	50.00	55.00	55.00
	6	Rasio konektivitas kabupaten/kota	Persen	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
	7	Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan Roda 4	Persen	16.25	17.00	18.00	19.00	20.00	21.00	21.00
	10	**Komunikasi dan Informatika**								
	1	Persentase Informasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah yang Terpublikasi	Persen	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00
	2	Presentase aplikasi IT dan aplikasi E - government yang mendukung smart city dan layanan publik yang berfungsi baik	Persen	80.00	80.00	80.00	85.00	85.00	85.00	85.00
	3	Persentase Infrastruktur IT yang Berfungsi Baik	Persen	90.00	90.00	90.00	90.00	95.00	95.00	95.00
	4	Persentase OPD yang memiliki akses internet dan terhubung dengan jaringan intra pemerintah	Persen	0.00	0.00	20.00	25.00	25.00	30.00	30.00
	5	Persentase layanan publik (G2B) yang diselenggarakan secara online dan terhubung dengan sistem penghubung layanan	Persen	n/a	70.00	70.00	70.00	70.00	75.00	75.00
	6	Persentase layanan administrasi pemerintahan (G2G) yang diimplementasikan	Persen	n/a	70.00	70.00	70.00	70.00	75.00	75.00
	11	**Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah**								
	1	Jumlah UKM non BPR/LKM aktif	Jumlah	251	270	300	330	350	370	370
	12	**Penanaman Modal**								
	1	Jumlah/nilai investasi PMA dan PMDN	Juta Rupiah (Rp)	344.371	361.589	379.669	398.652	418.585	439.514	439.514
	2	Rasio daya serap tenaga kerja	Orang/ Perusahaan	186 orang/ perusahaan	186 orang/ perusahaan	190 orang/ perusahaan	190 orang/ perusahaan	192 orang/ perusahaan	196 orang/ perusahaan	196 orang/ perusahaan

	3	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	Persen	20.52	20.50	20.50	20.50	21.00	21.00	21.00
	4	Rasio tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan perizinan	Persen	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
	5	Persentase terpenuhinya regulasi/kebijakan penanaman modal dan pelayanan perizinan serta penerapan Online Single Submission (OSS)	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	6	Persentase penerbitan persetujuan bangunan gedung (PBG)	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	7	Persentase penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman berakohol (SIUP MB)	Persen	n/a	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
	8	Rasio jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	9	Jumlah data laporan perizinan dan non perizinan	Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	25 Laporan
	13	**Kepemudaan dan Olahraga**								
	1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	Persen	29	33	34	38	42	46	46
	2	Persentase wirausaha muda	Persen	1.03	1.10	1.24	1.32	1.39	1.47	1.47
	3	Peningkatan pelatih yang Bersertifikasi	Persen	14.28	14.57	14.86	15.15	15.46	15.77	15.77
	4	Atlet Berprestasi	Jumlah	22	22	22	25	25	25	25
	5	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen	1.03	1.10	1.24	1.32	1.39	1.47	1.47
	6	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persen	39.75	42.74	44.29	45.07	45.85	46.62	46.62
	7	Jumlah Wirausahan Muda Mandiri	Jumlah	133	140	150	160	170	180	180
	8	Peningkatan prestasi olahraga	Persen	6.67	6.80	7.00	7.00	7.10	7.20	7.20
	14	**Statistik**								
	1	Data dan Infirmasi Statistik Daerah yang Tersusun dengan Baik	Dokumen	2	2	2	2	2	2	10

	2	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	3	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	15	**Persandian**								
	1	Presentase Pengamanan Informasi Daerah yang Terselenggara Baik	Persen	n/a	100	100	100	100	100	100
	16	**Kebudayaan**								
	1	Jumlah cagar budaya dan warisan budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Persen	n/a	100	100	100	100	100	100
	17	**Perpustakaan**								
	1	Rasio Pengunjung Perpustakaan per Tahun	Angka	0.02	0.04	0.05	0.06	0.07	0.07	0.07
	2	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	Rasio	2.06	2.27	2.38	2.50	2.62	2.76	2.76
	3	Jumlah Pengunjung Perpustakaan per tahun	Jumlah	150	156	164	174	186	199	199
	18	**Kearsipan**								
	1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	Persen	20.00	20.00	25.00	25.00	35.00	50.00	50.00
	2	Jumlah arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi	Arsip	51	51	51	55	55	55	55
	3	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Persen	70.00	70.00	70.00	75.00	75.00	80.00	80.00

	4	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Persen	70.00	80.00	80.00	85.00	90.00	100	100
II.2	**Fokus Layanan Urusan Pilihan**									
	1	**Kelautan dan Perikanan**								
	1	Produksi perikanan tangkap	Ton	10.980	13.859	14.136	14.419	14.708	15.002	15.002
	2	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	18.370	18.646	18.925	19.209	19.497	19.790	19.790
	3	Angka konsumsi ikan	Kg/kap/Th	33.05	40.05	40.85	41.66	42.50	43.35	43.35
	4	Cakupan bina kelompok nelayan	Jumlah	246	220	245	270	310	360	360
	2	**Pariwisata**								
	1	Lama kunjungan Wisata	Hari	8	8	8	9	9	10	10
	2	Kontribusi PAD sektor pariwisata	Persen	2.38	2.58	2.78	2.98	3.18	3.38	3.38
	3	Rata-rata Belanja Wisatawan Domestik	Rupiah/ Kunjungan	1.300.000	1.300.000	1.350.000	1.350.000	1.400.000	1.500.000	1.500.000
	4	Rata-rata Belanja Wisatawan Mancanegara	Rupiah/ Kunjungan	8.000.000	8.000.000	8.200.000	8.250.000	8.350.000	8.400.000	8.400.000
	5	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	Orang	230	276	334	407	501	626	626
	6	Jumlah wisatawan domestic	Orang	50.500	286.100	394.041	494.120	614.788	780.122	780.122
	7	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan domestic	Persen	-99.44	20.00	21.00	22.00	23.00	25.00	25.00
	8	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara	Persen	-68.84	20.00	21.00	22.00	23.00	25.00	17.00
	9	Jumlah akomodasi pariwisata (hotel/losmen)	Jumlah	68	68	69	70	70	75	75
	3	**Pertanian**								
	1	Presentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT	Persen	80.00	82.00	84.00	86.00	88.00	90.00	90.00
	2	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	Persen	80.00	82.00	84.00	86.00	88.00	90.00	90.00
	3	Jumlah Produksi Tanaman Pangan	Ton/Tahun	108.721	109.808	110.906	112.015	113.136	114.267	114.267
	4	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan	Ton/Tahun	35.257	35.610	35.966	36.325	36.689	37.055	37.055

	5	Jumlah Produksi Hewan Ternak	Ekor/ Tahun	104.992	106.042	107.102	108.173	109.255	110.348	110.348
	4	**Perdagangan**								
	1	Persentase Jumlah UTTP Yang Ditera/Tera Ulang	Persen	69.54	70.00	70.00	71.00	71.00	72.00	72.00
	2	Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB	Persen	11.53	11.54	11.55	11.56	11.58	11.59	11.59
	5	**Perindustrian**								
	1	Cakupan bina kelompok pengrajin	Persen	35.00	35.00	37.00	40.00	42.00	45.00	45.00
	2	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	Persen	3.98	3.98	3.99	3.99	4.00	4.00	4.00
	3	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam yang ditetapkan dalam RPIK	Persen	n/a	20.00	20.00	25.00	25.00	30.00	30.00
	4	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri	Persen	1.95	1.95	1.95	1.96	1.96	1.96	1.96
	5	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Persen	65.00	70.00	70.00	75.00	75.00	80.00	80.00
	6	**Transmigrasi**								
	1	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang Dibina	Lokasi	1	1	1	1	1	1	1
	7	**Energi**								
	1	Rasio Elektrifikasi *TPB	Persen	80.00	82.00	85.00	85.00	85.00	90.00	90.00
	2	Persentase Desa Teraliri Listrik *TPB	Persen	97.59	98.00	100	100	100	100	100
II.3	**Fokus Layanan Unsur Pendukung**									
	1	**Sekretariat Daerah**								
	1	Tingkat Layanan Administrasi Umum	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	2	Persentase Produk Hukum dan Informasi Hukum Daerah yang Berkualitas	Persen	100	100	100	100	100	100	100

	2	**Sekretariat DPRD**								
	1	Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Rencana Tahunan (RKPD) yang Terintegrasi dengan Program- Program Kerja DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda dan Anggaran	Status	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	2	Perencanaan dan Anggaran Setwan DPRD yang Terintegrasi dengan Program-Program DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda dan Anggaran	Status	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	3	Tersedianya Rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD Kabupaten	Status	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
II.4	**Fokus Layanan Unsur Penunjang**									
	1	**Perencanaan**								
	1	RPJPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah	Status	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	2	RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah	Status	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	3	RKPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah	Status	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	4	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	Persen	87.43	100	100	100	100	100	100
	5	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	Persen	89.57	100	100	100	100	100	100
	6	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	7	Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan (RPJMD, RKPD, Renstra)	Persen	85.00	100	100	100	100	100	100
	8	Persentase pencapaian target program pembangunan daerah	Persen	77.78	100	100	100	100	100	100

	2	**Keuangan**								
	1	Persentase ketepatan waktu penyusunan RAPBD dan Perubahan RAPBD	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	2	Persentase Kesesuaian Data Rincian Total BMD dengan Aktiva Tetap di Neraca Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	3	Persentase ketercapaian target pendapatan daerah	Persen	94.43	95.37	96.33	97.29	97.39	97.49	97.49
	4	Rasio PAD terhadap Pendapatan daerah	Persen	2.65	3.18	3.50	4.20	4.62	5.08	5.08
	5	Rasio belanja modal terhadap total belanja Daerah	Persen	27.52	30.27	30.88	31.19	31.78	32.10	32.10
	3	**Kepegawaian**								
	1	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis	Persen	8.32	9.15	9.15	10.07	11.07	12.18	12.18
	2	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pelatihan kepemimpinan	Persen	21.76	21.98	22.20	22.42	22.64	22.87	22.87
	3	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Persen	n/a	70.00	71.75	73.54	75.38	77.27	77.27
	4	**Pendidikan dan pelatihan**								
	1	Persentase CASN yang Lulus Pelatihan Dasar Formasi Umum	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	5	**Penelitian dan Pengembangan**								
	1	Persentase Implementasi Rencana kelitbangan	Persen	85.70	85.70	85.70	90.00	95.00	100	100
	2	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	Persen	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
	3	Persentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	4	Persentase kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah	Persen	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00

II.5	**Fokus Layanan Unsur Pengawas**									
	1	**Inspektorat**								
	1	Persentase Tindak Lanjut Temuan	Persen	80.00	90.00	90.00	90.00	100	100	100
	2	Persentase Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan pada objek pemeriksaan	Persen	70.00	75.00	80.00	85.00	90.00	100	100
	3	Persentase Pendampingan dan Asistensi APIP	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	4	Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti	persen	100	100	100	100	100	100	100
II.6	**Fokus Layanan Unsur Kewilayahan**									
	1	**Kecamatan**								
	1	Presentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat serta Pelayanan Administrasi di tingkat Kecamatan dan Kelurahan/Pekon	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	2	Presentase Peran dan Partisipasi Lembaga dan Organisasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan/Pekon	Persen	80.00	80.00	80.00	85.00	85.00	85.00	85.00
	3	Presentase Linmas (Perlindungan Masyarakat) dan Masyarakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal	Persen	100	100	100	100	100	100	100
II.7	**Fokus Layanan Unsur Pemerintahan Umum**									
	1	**Kesatuan Bangsa dan Politik**								
	1	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persen	n/a	46.00	48.00	49.00	51.00	53.00	53.00
	2	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu	Persen	84.08	84.08	84.08	84.92	84.92	84.92	84.92
	3	Persentase SDM yang Mempunyai Kemampuan Deteksi Dini, Cegah Dini dan Tangkal Dini terhadap Kerawanan Konflik Sosial	Persen	67.00	70.00	75.00	75.00	80.00	80.00	80.00

III	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**									
III.1	**Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah**									
	1	Opini BPK	Huruf/ Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	2	Pertumbuhan Nilai Investasi (PMDN)	Persen	14.99	15.99	16.49	16.99	17.49	17.49	17.49
	3	Pertumbuhan Nilai Investasi (PMA)	Persen	4.05	5.05	5.55	6.05	6.55	6.55	6.55
	4	Kontribusi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB	Persen	1.71	1.73	1.74	1.76	1.78	1.80	1.80
	5	Pertumbuhan Wisatawan Nusantara dan Mancanegara	Persen	-75.03	20.00	21.00	22.00	23.00	25.00	25.00
	6	Persentase Koperasi Akfif	Persen	49.00	50.00	50.00	52.50	52.50	55.00	55.00
III.2	**Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur**									
	1	Indeks Kualitas Infrastruktur	Angka	53.46	55.00	55.00	60.00	60.00	65.00	65.00
	2	Tingkat Kemantapan Jalan	Persen	39.03	41.00	41.50	42.00	42.50	43.00	43.00
	3	Persentase Penduduk yang Memiliki Akses terhadap Sumber Daya Air yang Sehat dan Aman **SPM	Persen	35.00	37.50	40.0	42.50	43.50	45.00	45.00
	4	Rasio Jaringan Irigasi	Persen	50.94	52.00	53.00	55.00	57.50	60.00	60.00
	5	Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai RTRW	Persen	53.24	54.65	55.15	55.65	56.20	56.20	56.2
	6	Indeks Resiko Bencana **SPM	Angka	181.41	180.94	180.71	180.47	180.24	180.00	180.00
	7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	68.50	73.54	73.87	74.20	74.53	74.86	74.86
III.3	**Fokus Iklim Berinvestasi**									
	1	Persentase Konflik Sosial, Keagamaan dan RAS yang Tertangani	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	2	Persentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persen	75.00	100	100	100	100	100	100

III.4	**Fokus Sumber Daya Manusia**									
	1	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) *TPB	Persen	3.41	3.00	2.80 – 3.20	2.60	2.41	2.21	2.21
	2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) *TPB	Persen	70.54	72.71	73.04	73.88	74.71	75.54	75.54

Sumber : RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026

Keterangan :
** Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)*
*** Standar Pelayanan Minimal (SPM)*

RKPD Tahun 2024 ini juga mengakomodir usaha daerah dalam proses pencapaian dari Rencana Aksi Daerah *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020-2025 sebagaimana pada Tabel dibawah ini:

Tabel 6.3 Indikator Kinerja *Sustainable Development Goals* Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020-2025

Kode Target / Indikator	Target /Indikator	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target Pencapaian					
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Target 1.2	Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional									
1.2.1	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Pesisir Barat	BPS	Persen	14.48	14.67	14.86	15.05	14.86	14.71	14.55
Target 1.3	Menerapkan sistem perlindungan sosial nasional yang tepat bagi semua, dan pada tahun 2030 tercapai cakupan bermakna bagi kelompok miskin dan rentan.									
1.3.1 (a)	Proporsi penduduk penerima bantuan iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS)	Dinas Kesehatan	Persen	89.00	87.63	87.63	87.63	83.25	79.09	75.13
1.3.1. (b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	Disnakertrans	Jiwa	15,513	16,289	17,103	17,958	18,856	19,799	20,789
1.3.1. (c)	Jumlah Penyandang Masalah KesejahteraanSosial (PMKS) yang ditangani	Dinas Sosial	Persen	60	66.00	72.60	79.86	87.85	96.63	97.60
1.3.1. (d)	Proporsi Rumah Tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat	Dinas Sosial	RT	8,989	8,540	8,113	7,707	7,322	6,956	6,608
Target 1.4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro									
1.4.1. (a)	Persentase Perempuan pernah kawin berusia 15-49 tahun yang proses kelahiran terakhirnya di fasilitas kesehatan	Dinas Kesehatan	Persen	87.50	88.38	89.26	90.15	91.05	91.96	92.88
1.4.1. (b)	Persentase anak berusia 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	Dinas Kesehatan	Persen	112.40	113.5	114.7	115.8	117.0	118.1	119.3
1.4.1. (c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada pasangan Usia Subur (PUS) usia 15 - 49 tahun yang berstatus kawin. (kelompok penduduk 40 % terbawah)	Dinas Kesehatan	Persen	75.50	76.80	76.85	76.94	77.00	77.20	77.20

1.4.1. (d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan	Dinas Permukiman dan PR	Persen	76.62	77.39	78.16	78.94	79.73	80.53	81.33
1.4.1. (e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	Dinas Permukiman dan PR	Persen	76.67	78.59	80.55	82.57	84.63	86.75	88.91
1.4.1. (h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat	Dinas Dikbud	Persen	78.81	82.75	86.89	91.23	95.79	98.19	100.00
1.4.1. (i)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/ MTs/ sederajat	Dinas Dikbud	Persen	68.65	72.08	75.69	79.47	83.44	87.62	92.00
1.4.1. (j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran	Disdukcapil	Persen	91.43%	93%	95%	97%	99%	100%	100%
Target 1.5.	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.									
1.5.1. (a)	Jumlah Desa Tangguh Bencana	BPBD	Desa	15	3	3	3	3	3	3
1.5.1. (b)	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam	Dinas Sosial	Persen	100	100	100	100	100	100	100
1.5.3.	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah	BPBD	Persen	100	100	100	100	100	100	100
Target 2.1	Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.									
2.1.1 (a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita	Dinas Kesehatan	Persen	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003
2.1.2	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawananan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan	Persen	13	12.13	11.25	10.36	9.47	8.56	7.65
2.1.2. (a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari	Dinas Ketahanan Pangan	Persen	87.00	87.87	88.75	89.64	90.53	91.44	92.35
Target 2.2.	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia lima tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula									
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun (balita)	Dinas Kesehatan	Persen	0.008	0.008	0.007	0.007	0.007	0.006	0.006

2.2.1 (a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun (baduta)	Dinas Kesehatan	Persen	0.008	0.008	0.007	0.007	0.007	0.006	0.006
2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil	Dinas Kesehatan	Persen	1	1	1	1	1	1	1
Target 2.3.	Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan non pertanian									
2.3.1	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja)	Dinas Pertanian	Persen	50.88	52.15	53.46	54.79	56.16	57.57	59.01
Target 2.5.	Pada tahun 2020, mengelola keragaman genetik benih, tanaman budidaya dan hewan ternak dan peliharaan dan spesies liar terkait, termasuk melalui bank benih dan tanaman yang dikelola dan dianekaragamkan dengan baik di tingkat nasional, regional dan internasional, serta meningkatkan akses terhadap pembagian keuntungan yang adil dan merata, hasil dari pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait, sebagaimana yang disepakati secara internasional.									
2.5.1 (a)	Meningkatnyakontribusi sub sektor Perikanan terhadap PDRB	Dinas Perikanan	Persen	8.45	8.66	8.88	9.10	9.33	9.56	9.80
2.5.1 (b)	Meningkatnya kontribusi sub sektor Peternakan terhadap PDRB	Dinas Pertanian	Persen	1.11	1.14	1.17	1.20	1.23	1.26	1.29
Target 3.1.	Pada tahun 2030 mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 Kelahiran Hidup									
3.1.1.	Angka Kematian Ibu (AKI)	Dinas Kesehatan	Kasus	4	3	3	2	2	1	1
3.1.2.	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses kelahiran terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih	Dinas Kesehatan	Persen	91.10	92.01	92.93	93.86	94.80	95.75	96.70
Target 3.2.	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan angka kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 Kelahiran Hidup dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000 Kelahiran Hidup.									
3.2.1	Angka kematian Balita (AKBa) per 1.000 kelahiran hidup	Dinas Kesehatan	Kasus	11	10	10	9	9	8	8
3.2.2	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 Kelahiran Hidup	Dinas Kesehatan	Kasus	14	0	0	0	0	0	0
3.2.2 (a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup	Dinas Kesehatan	Kasus	0	0	0	0	0	0	0

Target 3.3.	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, Malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan dan memerangi Hepatitis, Penyakit Bersumber Air serta penyakit menular lainnya									
3.3.2.	Angka TB Paru	Dinas Kesehatan	Kasus	161	153	145	138	131	125	118
3.3.3.	Kejadian Malaria per 1.000 penduduk	Dinas Kesehatan	Kasus	0.4	0.38	0.361	0.34	0.33	0.31	0.29
3.3.4.	Insiden hepatitis berdasarkan diagnosis dokter	Dinas Kesehatan	Kasus	0	0	0	0	0	0	0
3.3.5.*	Suspect Covid 19	Dinas Kesehatan	Suspect	0	3	1	1	1	1	1
Target 3.4.	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan									
3.4.1. (b)	Prevalensi hipertensi berdaarkan diagnosis dokter pada penduduk umur > 18 tahun	Dinas Kesehatan	Jiwa	23	22	21	20	19	18	17
Target 3.5.	Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan									
3.5.1. ©	Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA	Dinas Sosial	Kasus	0	0	0	0	0	0	0
Target 3.7	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional									
3.7.1 (a)	Jumlah peserta KB Aktif	Dinas PP dan KB	PUS	29,398	29,518	29,638	29,758	29,878	2,998	2,998
3.7.1 (b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern	Dinas PP dan KB	Persen	13,087	13,147	13,207	13,267	13,327	13,387	13,387
3.7.2.(a)	Total Fertility Rate	Dinas PP dan KB	Jiwa	2.45	-	-	-	-	-	-
Target 3.8	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat - obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang									
3.8.2 (a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Dinas Kesehatan	Persen	100.56	102.57	104.62	106.72	108.85	100	100
Target 3.9	Pada tahun 2030, secara bermakna mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat dari bahan kimia berbahaya,serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah									
3.9.1. (a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	Dinas Kesehatan	%	85.3	89.565	94	99	104	109	114

3.c	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan	Dinas Kesehatan	Rasio / per 100.000 pddk	307.30	310.38	313.48	316.62	319.78	322.98	326.21
3.c.1	Rasio dokter per 100.000 penduduk	Dinas Kesehatan	Rasio / per 100.000 pddk	16.80	16.97	17.14	17.31	17.48	17.66	17.83
3.c.2	Rasio Perawat per 100.000 penduduk	Dinas Kesehatan	Rasio / per 100.000 pddk	124.60	125.85	127.10	128.38	129.66	130.96	132.27
3.c.3	Rasio Apoteker per 100.000 penduduk	Dinas Kesehatan	Rasio / per 100.000 pddk	7.10	7.17	7.24	7.32	7.39	7.46	7.54
Target 4.1	Pada tahun 2030, memastikan bahwa semua anak perempuan dan anak laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, adil, dan berkualitas, yang mengarah pada pembelajaran yang relevan dan efektif									
4.1.1. (a)	Persentase SD berakreditasi minimal B	Dinas Dikbud	Persen	37.10	37.35	39.22	41.18	43.24	45.40	47.67
4.1.1. (b)	Persentase SMP berakreditasi minimal B	Dinas Dikbud	Persen	43.20	45.36	47.63	50.01	52.51	55.14	57.89
4.1.1. (d)	APK SD/sederajat	Dinas Dikbud	Persen	118.80	119.99	121.19	122.40	123.62	124.86	126.11
4.1.1. (e)	APK SMP/Sederajat	Dinas Dikbud	Persen	107.30	108.37	109.46	110.55	111.66	112.77	100.00
Target 4.2	Pada tahun 2030, memastikan bahwa semua anak perempuan dan anak laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan pendidikan pra sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar									
4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Dinas Dikbud	Persen	70.93	74.48	78.20	82.11	86.22	90.53	95.05
Target 4.6	Pada tahun 2030, menjamin bahwa bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi									
4.6.1.(a)	Angka Melek Huruf penduduk umur ≥ 15 tahun	RPJMD	Persen	98.20	99.18	100.17	101.18	102.19	103.21	104.24
4.c.1	Persentase guru TK, SD, dan SMP yang bersertifikat pendidik	RPJMD	Persen	27.15	27.42	27.70	27.97	28.25	28.53	28.82

Target 4.c	Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.									
4.c.1.	Persentase guru TK, SD, dan SMP yang bersertifikat pendidik	RPJMD	Persen	92.90	93.83	94.77	95.71	96.67	97.64	98.62
Target 5.1.	Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun									
5.1.1. (b)	Indeks Pembangunan Gender	Dinas PP dan PA	Persen	93.22	94.15	95.09	96.04	97.01	97.98	98.95
Target 5.2.	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.									
5.2.1	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan	Dinas PP dan PA	Persen	0	0	0	0	0	0	0
Target 6.1	Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua									
6.1.1 (a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Dinas PU PE	Persen	76.62	77.39	78.16	78.94	79.73	80.53	81.33
Target 6.2	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.									
6.2.1 (b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	Dinas PU PE	Persen	76.67	77.44	78.21	78.99	79.78	80.58	81.39
6.2.1 (c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Dinas PU PE	Persen	76.82	77.59	78.36	79.15	79.94	80.74	81.55
Target 6.5	Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat									
6.5.1(d)	Jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) yang meningkat jumlah mata airnya dan jumlah DAS yang memiliki Memorandum of Understanding (MoU) lintas Negara.	Dinas LH	Paket	0	0	1	1	1	1	1
Target 7.1.	Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern									
7.1.1	Rasio elektrofikasi rumah tangga	BPS / RAD PPDT	%	98.95	99.94	100.94	101.95	102.97	104.00	105.04
Target 8.1	Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.									
8.1.1 (a)	PDRB Perkapita	BPS / RPJMD	Rp juta	2,994.2	2,943.3	2,910.9	2,940.0	2,972.4	3,002.1	3,032

Target 8.3	Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan									
8.3.1. ©	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan	Dinas	persen	100	100	100	100	100	100	100
Target 8.6.	Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.									
8.6.1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	RPJMD / BPS	persen	67.3	65.95	64.63	66.25	67.91	69.60	71.34
Target 9.1	Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua									
9.1.1. (a)	Kondisi mantap jalan kabupaten (nasional)	Dinas Pekerjaan Umum	Persen	43.08	56.00	58.80	61.74	64.83	68.07	71.48
Target 9.3	Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke alam rantai nilai pasar									
9.3.1	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	Dinas	Persen	5.37	5.32	5.26	5.32	5.37	5.42	5.48
9.3.2	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Dinas	Persen	11.97	11.85	11.73	11.85	11.97	12.09	12.21
Target 9.c	Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi dan mengusahakan penyediaan akses universal internet negaranegara kurang berkembang pada tahun 2020									
9.c. 1 (b)	Proporsi individu yang menggunakan internet	Diskominfo	Persen	59.78	62.77	65.91	69.20	72.66	76.30	80.11
Target 10.1	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi padatingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional									
10.1.1 ©	Jumlah desa tertinggal	Dinas PM & Pekon	Pekon	23	22	21	20	19	18	17
10.1.1 (d)	Jumlah Desa Mandiri	Arahan Gubernur Musrenbang RKPD 2021	Pekon	-	2	3	4	4	5	6
Target 11.1	Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh									
11.1.1 (a)	Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	Dinas PR dan KP	Persen	36	42	50	57	64	72	72

Target 11.4	Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia									
11.4.1. (a)	Jumlah belanja publik (anggaran) untuk kepentingan perlindungan warisan budaya	Dinas Pariwisata	Rp Juta	768.13	806.54	846.86	889.21	933.67	980.35	980.36
Target 11.6	Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara dan penanganan sampah kota									
11.6.1. (a)	Cakupan layanan persampahan (persen)	Dinas LH	Persen	90	90.90	91.81	92.73	93.65	94.59	95.54
Target 12.5	Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali									
12.5.1 (a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	Dinas LH	M3	0	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00
Target 16.2	Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.									
16.2.1 (b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan	BPS	Kasus	0	0	0	0	0	0	0
Target 16.7	Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.									
16.7.1(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	Setwan	Persen	4	4	4	4	4	7	7
Target 16.9	Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran									
16.9.1	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran	Dinas Catatan Sipil	Persen	92.27	93	95	97	99	100	100
Target 17.1	Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya									
17.1.1*	Total Pendapatan Pemerintah Daerah Provinsi sebagai proporsi terhadap PDRB menurut sumbernya	BPS / Keuangan	Persen	28.17	27.89	27.61	27.89	28.17	28.45	28.73
17.1.1(a)	Total Pendapatan Daerah (APBD Kabupaten) sebagai proporsi terhadap PDRB Kabupaten menurut sumbernya	BPS / Keuangan	Persen	28.17	27.89	27.61	27.89	28.17	28.45	28.73
17.1.1(b)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDRB Kabupaten (tax ratio).	BPS / Keuangan	Persen	0.24	0.23	0.23	0.23	0.24	0.24	0.24
Target 17.8	Mengoperasionalisasikan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi									
17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet	Diskominfo	Persen	59.78	62.77	65.91	69.20	72.66	76.30	76.30

Sumber : SDGs Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020-2026

6.3 Inovasi Daerah

6.3.1Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pemerintah Desa berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan Desa melalui proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa. Perencanaan pembangunan Desa tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) untuk jangka waktu 6 tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun.

Inspektorat Kabupaten Pesisir Barat sebagai apparat pengawas internal pemerintah daerah (APIP) yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagaimana yang di manatkan dalam Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat, peran dan tanggung jawab strategis inspektorat daerah dalam mewujudkan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan sangat diharapkan dapat berjalan optimal khususnya terkait pengawasan perencanaan pembangunan pemerintahan Desa/Pekon (di Kabupaten Pesisir Barat disebut Pekon).

Belum adanya standar operasional prosedur dan petunjuk tentang tata cara pengawasan perencanaan pembangunan Desa/Pekon yang jelas, sehingga mengakibatkan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) belum dapat berbuat maksimal dalam melaksanakan tupoksinya khususnya terhadap pengawasan preventif terhadap perencanaan pembangunan pemerintahan Desa/Pekon. Selain itu ketidakseimbangan antara beban kerja dengan ketersediaan Sumber Daya Manusia di lingkungan Inspektorat Kabupaten Pesisir Barat juga menjadi masalah yang cukup berarti dalam pencapaian kinerja, disamping pola dan sistem kerja yang dilaksanakan masih bersifat konvesional yaitu turun langsung ke desa-desa/pekon, yang mana Desa/Pekon disebagian wilayah Kabupaten Pesisir Barat memiliki topografi berupa perbukitan dan pegunungan, sehingga membutuhkan waktu yang tidak sedikit, hal ini akhirnya berdampak pada pencapaian kinerja yang diharapkan tidak berjalan optimal.

Untuk itu perlu langkah-langkah terobosan dan inovasi dalam rangka mengatasi segala keterbatasan *recourse* di lingkungan Inspektorat Kabupaten Pesisir Barat. Sejalan dengan perkembangan Revolusi Industri 4.0, Inspektorat Kabupaten Pesisir Barat dituntut selalu *well inform dan adaptif* dengan lahirnya distruptif teknologi dan perkembangan teknologi yang begitu cepat dan massif. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan kinerja pengawasan APIP dalam melaksanakan pengawasan preventif terhadap perencanaan pembangunan

pemerintahan Desa/Pekon yang didukung dengan teknologi informasi Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat melalui Inspektorat Kabupaten Pesisir Barat telah mengembangan sistem aplikasi PITIT CUPING. Dimana aplikasi PITIT CUPING ini adalah merupakan aplikasi pelaporan dan pengawasan pelaksanaan perencanaan pembangunan pemerintahan Desa/Pekon yang dilakukan oleh para aparat Desa/Pekon. Diharapkan melalui aplikasi ini pelaksanaan perencanaan pemerintahan Desa/Pekon dapat dilaksanakan secara real dan akuntabel, dan dapat terpantau sepenuhnya oleh APIP.

6.3.2 Keterkaitan Inovasi yang dikembangkan dengan Tema RKP 2024

Adapun keterkaitan inovasi yang dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat melalui Inspektorat Kabupaten Pesisir Barat dengan Tema RKP 2024 "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" dengan Prioritas Nasional ke 7 Memperkuat Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik dengan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas adalah dengan diterapkannya inovasi PITIT CUPING, maka masalah ketidakseimbangan antara beban kerja dengan ketersediaan Sumber Daya Manusia yang dimiliki Inspektorat dalam mengawasi perencanaan pembangunan pemerintah Desa/Pekon, yang Sebagian wilayahnya memiliki topografi berupa perbukitan dan pegunungan yang mengakibatkan tidak efektif dan efisienya pelaksanaan kinerja pengawasan dapat tertatasi sehingga kinerja APIP dalam hal ini adalah Inspektorat Kabupaten Pesisir Barat dapat berjalan lebih optimal.

6.3.3 Relevansi dengan Konsep Perencanaan Berbasis Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS)

Terkait dengan Konsep Perencanaan Berbasis Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS), penerapan AplikasI PITIT CUPING pada Inspektorat Kabupaten Pesisir Barat sudah sangat relevan dengan konsep tersebut, hal ini dapat dilihat pada pengawasan yang terfokus pada visi Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten yang baik melalui fungsi Pengawasan yang Efektif, Akuntabel, Profesional serta bersinergi dengan Inspektorat Provinsi dan Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP) lainya (tematik), dan aplikasi ini juga dapat dilakukan dan diakses oleh semua masyarakat/apparat Desa/Pekon (holistik), serta dilakukan melalui pemanfaatan teknologi berbasis jaringan internet yang terintegrasi dengan web induk pemerintah daerah (integratif), selain itu ruang/lokasi kerja sudah sangat jelas yaitu pada wilayah Kabupaten Pesisir Barat (spasial).

6.3.4Ruang Lingkup Inovasi

Ruang lingkup dalam pengembangan Aplikasi PITIT CUPING ini adalah pengawasan preventif terhadap perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh seluruh Pemerintahan Desa/Pekon di Kabupaten Pesisir Barat yang dilaksanakan dan dikelola oleh Inspektorat Kabupaten Pesisir Barat dengan melibatkan Kecamatan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pekon.

6.3.5Tujuan dan Sasaran

Tujuan dari pengembangan Aplikasi PITIT CUPING pada Inspektorat Kabupaten Pesisir Barat ini antara lain:

1. Meningkatkan kinerja APIP terhadap pengawasan preventif perencanaan pembangunan desa yang dilaksanakan oleh Peratin / perangkat desa.
2. Terlaksananya pengawasan intern Inspektorat Kabupaten Pesisir Barat secara cepat, transparan dan akuntabel;
3. Memberikan jaminan atas pelaksanaan pengawasan intern Inspektorat Kabupaten Pesisir Barat kepada Pekon/Desa;
4. Mewujudkan tertib administrasi dan teknis dalam proses pengawasan intern Inspektorat Kabupaten Pesisir Barat;
5. Meminimalisir terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan Dana Desa di Kabupaten Pesisir Barat;

Sedangkan yang menjadi sasaran dari pengembangan Aplikasi PITIT CUPING ini sebagai upaya dalam peningkatan pelayanan publik di Kabupaten Pesisir Barat adalah para Kepala Pekon (Peratin) dan Perangkat Pekon se-Kabupaten Pesisir Barat.

6.3.6Kebaruan Inovasi (*novelty*) dari inovasi yang Dikembangkan

Pada Inspektorat Kabupaten Pesisir Barat sebelumnya dalam melakukan pengawasan preventif terhadap perencanaan pembangunan pemerintahan Desa/Pekon dilakukan dengan turun langsung ke pekon, yang mana Pekon disebagian wilayah Kabupaten Pesisir Barat memiliki topografi berupa perbukitan dan pegunungan, sehingga membutuhkan waktu yang tidak sedikit, hal ini akhirnya berdampak pada pencapaian kinerja yang diharapkan tidak berjalan optimal, dan sejak Tahun 2021 (dan akan terus dikembangkan pada tahun-tahun mendatang) Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat melalui Inspektorat secara efektif telah menggunakan media aplikasi Aplikasi PITIT CUPING dalam melakukan

pengawasan perencanaan pembangunan pemerintahan Desa di Kabupaten Pesisir Barat.

6.3.7 Rencana Inovasi

Rencana inovasi dalam Aplikasi PITIT CUPING pada Inspektorat ini adalah sebagaimana yang tertuang dalam Tabel Kerangka Kerja Logis (KKL) di bawah ini.

Tabel 6.4 Kerangka Kerja Logis Aplikasi PITIT CUPING Inspektorat Kabupaten Pesisir Barat

Uraian	Kriteria Keberhasilan (Ciri-ciri yang Relevan)	Indikator Kinerja
Dampak: 1. Meningkatkan kinerja APIP terhadap pengawasan preventif perencanaan pembangunan desa yang dilaksanakan oleh Peratin/perangkat pekon; 2. Penyusunan RKP Desa dan APB Desa dilakukan dengan tertib dan disiplin serta melibatkan patisipasi masyarakat; 3. Berkurangnya penyimpangan anggaran dana desa saat pelaksanaan karena proses Perencanaan RKP Desa dan APB Desa dilakukan dengan benar dan melibatkan masyarakat;	1. Terwujudnya transparansi dalam penyusunan RKP Desa dan APB Desa; 2. Penyusunan RKP Desa dan APB Desa tidak terlambat; 3. Berkurangnya pengaduan masyarakat terhadap penyimpangan penggunaan anggaran Dana Desa	1. Optimalnya pelaksanaan pengawasan preventif yang dilaksanakan oleh Inspektorat; 2. Meningkatkan disiplin dan tertib administrasi dalam Penyusunan RKP Desa dan APB Desa di Kabupaten Pesisir Barat.
Outcome Antara: Terlaksananya optimaliasi kinerja APIP dalam melaksanakan pengawasan Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten yang baik melalui fungsi pengawasan yang efektif, efisien, akuntabel, profesional dan transparan		
Outcome Langsung: 1. Terlaksanakan pengawasan preventif terhadap perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa/Pekon di Kabupaten Pesisir Bara secara efektif, efisien dan transparan;		

Uraian	Kriteria Keberhasilan (Ciri-ciri yang Relevan)	Indikator Kinerja
2. Musyawarah Desa dilakukan tepat waktu sesuai dengan tahapan-tahapan penyusunan RKP Desa dan APB Desa.		
Output : Adapun output utama dengan tersedianya Aplikasi PITIT CUPING Kabupaten Pesisir Barat ini adalah berupa laporan hasil pemeriksaan proses perencanaan RKP Desa dan APB Desa		
Kegiatan/Proses : Standar Operasional Prosedur (SOP) atau alur pelaksanaan inovasi Aplikasi PITIT CUPING: 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan teknis; 2. Staf admin melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan; 3. Kepala Seksi yang membidangi memeriksa kesesuaian standar teknis dan permohonan persetujuan teknis; 4. Kepala Bidang yang membidangi memverifikasi berkas permohonan persetujuan teknis; 5. Kepala Dinas menerbitkan surat persetujuan teknis; 6. Staf admin mengupload persetujuan teknis melalui portal untuk diteruskan kepada pemohon; 7. Pemohon mengunduh hasil persetujuan dimaksud;		
Input : 1. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Aplikasi Pitit Cuping dalam Rangka Pengawasan Preventif Aparat Pengawas Internal Pemerintah Terhadap Dana Desa di Kabupaten Pesisir Barat;		

Uraian	Kriteria Keberhasilan (Ciri-ciri yang Relevan)	Indikator Kinerja
2. Anggaran dalam pelaksanaan Aplikasi PITIT CUPING dibiayai oleh APBD Kabupaten Pesisir Barat melalui DPA Inspektorat; 3. Sumber Daya Manusia yang terlibat dalam Aplikasi PITIT CUPING Kabupaten Pesisir Barat sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 38 Tahun 2021; 4. Inisiator dan penanggung jawab pelaksanaan inovasi adalah Kepala Inspektorat; 5. Institusi yang terlibat dalam Aplikasi PITIT CUPING ini meliputi unsur instansi pemerintah yaitu Inspektorat sebagai APIP, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pekon, Kecamatan dan aparat desa; 6. Teknologi yang digunakan dalam Aplikasi PITIT CUPING ini menggunakan teknologi elektronik berbasis jaringan internet; 7. Sarana dan prasarana yang diperlukan berupa perangkat komputer dan jaringan internet, dan untuk si pengguna layanan sarana yang diperlukan dapat berupa *handphone*/PC/laptop dan jaringan internet		
Permasalahan dan Penyebab Permasalahan : 1. Banyaknya pengaduan masyarakat terhadap penyimpangan penggunaan anggaran Dana Desa yang diduga terjadi karena proses perencanaan RKP Desa dan APB Desa yang tidak dilakukan dengan benar dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan RKP Desa dan APB Desa;		

Uraian	Kriteria Keberhasilan (Ciri-ciri yang Relevan)	Indikator Kinerja
2. Pengawasan yang dilakukan dengan turun langsung ke seluruh pekon, dirasakan kurang efektif dan efisien, dikarenakan waktu yang dibutuhkan tidak sedikit, mengingat wilayah Kabupaten Pesisir Barat memiliki topografi berupa perbukitan dan pegunungan, sehingga mengakibatkan pelaksanaan kinerja pengawasan APIP tidak optimal; 3. Kurangnya SDM APIP dalam melakukan pengawasan juga menjadi masalah yang cukup berarti dalam pencapaian kinerja pengawasan yang optimal.		

Sumber : Inspektorat Kabupaten Pesisir Barat, 2023

BAB VII
PENUTUP

RKPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024 merupakan penjabaran dari hasil Musrenbang Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2023 yang telah disinergikan dan disesuaikan dengan RPJPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2005-2025, RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026, RKP Nasional Tahun 2024, RPJMN Tahun 2020-2024, RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 dan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2024. RKPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024 ini memuat Tema, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Pemerintah Daerah berupa kebijakan umum dan prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah, rencana kerja dan pendanaannya yang bersifat indikatif serta kebijakan perbaikan kinerja ekonomi masyarakat dan daerah.

RKPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024 ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun KUA-PPAS APBD Kabupaten Pesisir Barat TA 2024 dan RAPBD Kabupaten Pesisir Barat TA 2024, dokumen ini sekaligus sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum sesuai dengan kewenangan daerah yang merupakan penjabaran dari pelaksanaan urusan wajib (wajib pelayanan dasar dan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar), urusan pilihan, unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawasan, unsur kewilayahan dan unsur pemerintahan umum. RKPD ini juga telah disesuai dengan usulan program/kegiatan/sub kegiatan yang diajukan oleh masing-masing Perangkat Daerah berdasarkan pada Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, sehingga selain pembiayaannya diusulkan ke APBD Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat TA 2024, juga diusulkan ke APBD Provinsi Lampung TA 2024 dan APBN Pemerintah Pusat TA 2024.

Dalam rangka menjamin terlaksananya program, kegiatan dan sub kegiatan pada TA 2024 tersebut serta demi terwujudnya sinergitas dan sinkronisasi kinerja pembangunan dari semua pemangku kepentingan, maka perlu dirumuskan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. RKPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024 sebagai acuan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja - Perangkat Daerah) Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024;

2. RKPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024 sebagai landasan penyusunan KUA-PPAS APBD Kabupaten Pesisir Barat TA 2024 dan untuk menyusun RAPBD Kabupaten Pesisir Barat TA 2024;

3. Masyarakat dan dunia usaha (investor) wajib berperan serta secara aktif dalam pembangunan, baik sebagai pelaksana maupun sebagai mitra ataupun

sebagai pengawas dalam pelaksanaan kebijakan dan program, kegiatan dan sub kegiatan;

4. Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, setiap Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat wajib melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan baik secara program, kegiatan dan sub kegiatan melalui upaya koreksi dan melaporkannya secara triwulan kepada Bupati Pesisir Barat melalui Kepala Bappelitbangda;

5. Kepala Bappelitbangda melakukan evaluasi terhadap laporan triwulanan hasil pemantauan dan pengendalian dari Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, dan apabila dari hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bupati Pesisir Barat melalui Kepala Bappelitbangda menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Perangkat Daerah dimaksud;

6. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnan kepada Bupati Pesisir Barat melalui Kepala Bappelitbangda;

7. Pada akhir tahun anggaran 2024, setiap Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat wajib melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan baik secara program, kegiatan, sub kegiatan tahun 2024 kepada Bupati Pesisir Barat melalui Kepala Bappelitbangda; dan

8. Kepala Bappelitbangda menyusun rencana pembangunan tahun 2025 mendatang berdasarkan pada hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023, dan hasil evaluasi tersebut akan menjadi bahan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025.

Kabupaten Pesisir Barat menyadari berbagai tantangan pembangunan yang akan dihadapi tahun 2024 semakin beragam, terlebih dalam proses mencapai sasaran dan target kinerja pada tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026 yang mengacu pada kondisi sosial dan ekonomi nasional, regional hingga lokal masih sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi pemulihan ekonomi daerah dan masyarakat serta proses Pemilu dan Pemilukada Serentak Tahun 2024 yang sedikit banyak mempengaruhi pendanaan daerah. Perencanaan dan penganggaran daerah diharapkan mampu mensinergikan hal tersebut diatas dengan tetap memperhatikan sinergitas dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Lampung.

Oleh karena itu dibutuhkan komitmen bersama antara Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, DPRD Kabupaten Pesisir Barat dan seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah untuk bersama-sama melaksanakan perencanaan dan penganggaran sesuai dengan tujuan akhir pembangunan daerah yaitu kesejahteraan masyarakat. Sehingga cita-cita masyarakat Kabupaten Pesisir Barat sesuai Visi dan Misi yang tertuang dalam dokumen RPJMD yaitu Pesisir Barat yang Amanah, Maju dan Sejahtera dapat terwujud sesuai dengan periodesasi waktu yang telah ditentukan.

Demikianlah, RKPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024 ini disusun sebagai bentuk penjabaran tahun ketiga RPJMD Tahun 2021-2026 dan juga sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan dan/atau Penganggaran pada Tahun 2024.

BUPATI PESISIR BARAT,

ttd

AGUS ISTIQLAL

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR : 28 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

Bahwa pada Bab V, sub bab 5.2 Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pendanaan pada Lampiran I Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 28 Tahun 2023 tentang RKPD Tahun 2024 telah disajikan Rekapitulasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Bahwa sebagaimana diatur pada Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang SIPD, penyusunan dokumen perencanaan daerah wajib menggunakan aplikasi SIPD. Pada tahun 2023 untuk penyusunan dokumen perencanaan tahun 2024, aplikasi yang dipergunakan pada alamat sipd.go.id yang nantinya akan dimigrasikan ke alamat sipd.ri untuk proses penyusunan dokumen penganggarannya. Salah satu syarat migrasi tersebut adalah melakukan pemutakhiran program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan pada Rancangan Kepmendagri Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dalam upaya menjaga konsistensi dokumen perencanaan dan penganggaran, maka pada Lampiran II Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 28 Tahun 2023 tentang RKPD Tahun 2024 ini kami sajikan hasil pemutakhiran program, kegiatan, sub kegiatan sebagaimana dimaksud. Dimana, hasil pemutakhiran tersebut yang akan dipergunakan dalam dokumen penganggaran untuk tahun anggaran 2024.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) FINAL
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**449.588.010.585,00**							**602.165.709.398,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**186.082.741.297,00**							**365.320.252.516,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)***	***92,5***			***92,50***	**126.958.119.093,00**			**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas**			**300.014.375.330,00**	***DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN***
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu (%)*				*100*	15.000.000,00	*(Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*100*	15.000.000,00	*DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN*
	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*2.00*	10.000.000,00	*(Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*2.00*	10.000.000,00	*DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN*
	1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)*		*2*	*2*	*2*	5.000.000,00	*(Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*2*	5.000.000,00	*DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN*
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tercapainya Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu (%)*				*100*	119.157.038.093,00	*(Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*100*	298.862.317.330,00	*DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)*		*14.00*	*14.00*	*14.00*	119.151.538.093,00	*(Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*14.00*	298.856.817.330,00	*DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN*
	1.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)*		*1*	*1*	*1*	2.500.000,00	*(Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*1*	2.500.000,00	*DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN*
	1.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)*		*2.00*	*2.00*	*2.00*	2.000.000,00	*(Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat	*Aparatur*	*2.00*	2.000.000,00	*DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN*
	1.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)*		*1*	*1*	*1*	1.000.000,00	*(Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*1*	1.000.000,00	*DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN*
	1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terlaksananya Pendataan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (%)*				*100*	100.000.000,00	*(Kecamatan di Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*100*	100.000.000,00	*DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN*
	1.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						100.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat			100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kecamatan di Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN*
	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terlaksananya Jenis Bidang Urusan yang dilaksanakan (Jenis)*				*2*	6.622.333.000,00	*(KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*2*	-	*DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN*
	1.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)*		*0.00*	*0.00*	*70*	61.600.000,00	*(Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*70*	-	*DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN*
	1.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)*		*0*	*0*		6.560.733.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat			-	*DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN*
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tercapainya Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja (%)*				*100*	493.516.000,00	*(Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*100*	493.516.000,00	*DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN*
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)*		*1*	*1*	*1*	2.000.000,00	*(Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat	*Aparatur*	*1*	2.000.000,00	*DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN*
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)*		*0.00*	*0.00*	*1*	9.500.000,00	*(Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*1*	9.500.000,00	*DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)*		*1*	*1*	*1*	85.000.000,00	*(Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur dan masyarakat*	*1*	85.000.000,00	*DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN*
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)*		*12*	*12*	*12*	96.016.000,00	*(Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*12*	96.016.000,00	*DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN*
	1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)*		*0.00*	*30*	*30*	30.000.000,00	*(Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*30*	30.000.000,00	*DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN*
	1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)*		*11*	*11*	*11*	11.000.000,00	*(Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur dan Masyarakat*	*11*	11.000.000,00	*DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN*
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)*		*12*	*12*	*12*	260.000.000,00	*(Kabupaten Pesisir Barat dan di Luar Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*12*	260.000.000,00	*DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN*
	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terpenuhi Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)*				*100*	254.000.000,00	*(Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*100*	254.000.000,00	*DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN*
	1.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						80.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			80.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)		*0*	*0*	*2*		*(Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*2*		*DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN*
	1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						174.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			174.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		*0.00*	*0.00*	*14*		*(Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur dan Masyarakat*	*14*		*DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN*
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						204.542.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			204.542.000,00	
			Tercapainya Persentase pemenuhan Layanan Pendukung (%)				*100*		*(Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN*
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						42.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			42.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN*
	1.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						157.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			157.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN*
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						5.542.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			5.542.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN*
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						111.690.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			85.000.000,00	
			Tercapainya Persentase Barang Milik Daerah yang dalam kondisi baik (%)				*100*		*(Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)*		*2*	*2*	*2*	85.000.000,00	*(Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*2*	85.000.000,00	*DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN*
	1.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)*		*0*	*0*		26.690.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*		-	*DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN*
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	***cakupan pemenuhan SPM Bidang Pendidikan (%)***				***100***	**59.124.622.204,00**			**Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing**	**Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**65.305.877.186,00**	***DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN***
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka partispasi Kasar SD (%)*				*92.57*	35.605.440.227,00	*(Seluruh Kecamatan Yang ada di Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia		*93.07*	40.103.562.186,00	*DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN*
	1.01.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	*Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)*		*0.00*	*0.00*	*14098*	8.460.300.000,00	*(SD Yang mendapat Bantuan Biaya Personil Peserta Didik, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	*Siswa SD*	*14098*	9.306.330.000,00	*DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN*
	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)*		*0.00*	*60*	*70*	280.000.000,00	*(Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	*Pendidik dan Tenaga Kependidikan*	*80*	308.000.000,00	*DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN*
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						17.986.980.000,00		DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			19.785.578.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)		*127*	*127*	*128*		*(SD yang Mengelola Dana BOS, KAB. PESISIR BARAT)*				*Pendidik, Tenaga Pendidik, dan Peserta Didik*	*128*		*DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN*
	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan						125.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			161.700.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)		*0*	*4*	*4*		*(Kecamatan di Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur, Pendidik, Tenaga Pendidik dan Peserta Didik*	*4*		*DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN*
	1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan						50.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			60.000.000,00	
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*5*		*(SD Yang menjadi tempat sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan, KAB. PESISIR BARAT)*				*Peserta Didik SD*	*5*		*DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN*
	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik						1.080.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.965.260.000,00	
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)		*17963*	*0*	*17772*		*(SD Yang mendapat bantuan perlengkapan siswa, KAB. PESISIR BARAT)*				*Siswa SD*	*17772*		*DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN*
	1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						7.623.160.227,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			8.516.694.186,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)		*0.00*	*0.00*	*21*		*(SD Yang menerima manfaat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Guru, Murid, dan Masyarakat*	*21*		*DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN*
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						18.264.500.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			19.806.253.000,00	
			Angka partispasi kasar SMP (%)				*92.12*		*(Seluruh Kecamatan Yang Ada di Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*92.14*		*DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN*
	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						4.359.110.000,00		DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			4.359.110.000,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)		*0.00*	*12*	*12*		*(Satuan Pendidikan SMP Yang menerima manfaat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Pendidik, Tenaga Pendidik, Peserta Didik, dan Masyarakat*	*12*		*DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama						5.275.500.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			427.614.000,00	
			Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)		*0.00*	*0.00*	*5274*		*(Satuan Pendidikan SMP Yang Menerima Bantuan Biaya Personil Peserta Didik, KAB. PESISIR BARAT)*				*Peserta Didik SMP*	*5274*		*DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN*
	1.01.02.2.02.0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa						20.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			5.803.050.000,00	
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia (Paket)		*0.00*	*0.00*	*20*		*(Satuan Pendidikan SMP Yang menerima Bantuan Alat Praktik dan Peraga Siswa, KAB. PESISIR BARAT)*				*Peserta Didik SMP*	*20*		*DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN*
	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						130.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)		*0*	*0*							*Pendidik dan Tenaga Kependidikan*			*DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN*
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama						7.817.150.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			8.598.865.000,00	
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)		*36*	*36*	*36*		*(Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS, KAB. PESISIR BARAT)*				*Peserta Didik SMP*	*36*		*DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN*
	1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan						94.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)		*0*	*0*							*Pendidik, Tenaga Pendidik, dan Peserta Didik*			*DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN*
	1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan						50.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			60.000.000,00	
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)		*0.00*	*4*	*4*		*(Satuan Pendidikan SMP Yang menjadi lokasi kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan, KAB. PESISIR BARAT)*				*Peserta Didik SMP*	*4*		*DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan						130.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			130.000.000,00	
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)		*0.00*	*0.00*	*40*		*(Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Pendidik dan Tenaga Pendidik*	*40*		*DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN*
	1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik						388.740.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			427.614.000,00	
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)		*6364*	*0.00*	*6129*		*(Sataun Pendidikan SMP Yang mendapat bantuan siswa, KAB. PESISIR BARAT)*				*Peserta Didik SMP*	*6129*		*DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN*
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)						4.842.361.977,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			4.942.510.000,00	
			Angka partispasi Kasar PAUD (%)				*73*		*(Seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*74*		*DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN*
	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD						1.318.151.977,00		DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.500.000.000,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun (Unit)		*0.00*	*4*	*4*		*(Satuan PAUD Yang menerima manfaat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Pendidik, Tenaga Pendidik, Peserta Didik dan Masyarakat*	*4*		*DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN*
	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD						130.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			150.000.000,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)		*0.00*	*0.00*	*40*		*(Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Pendidik dan Tenaga Pendidik*	*40*		*DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN*
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD						2.192.510.000,00		DAK Non Fisik-BOP PAUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			2.192.510.000,00	
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)		*118*	*118*	*118*		*(Satuan PAUD yang Mengelola Dana BOP, KAB. PESISIR BARAT)*				*Pendidik, Tenaga Pendidik, dan Peserta Didik*	*118*		*DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN*
	1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan						80.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*4*		*(PAUD di Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Pendidik, Tenaga Pendidik dan Peserta Didik*	*4*		*DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN*
	1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan						125.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)		*0*	*0*							*Pendidik, Tenaga Pendidik, dan Peserta Didik PAUD*			*DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN*
	1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik						996.700.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.000.000.000,00	
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)		*0.00*	*6600.00*	*3239*		*(Satuan Pendidikan PAUD yang menerima Bantuan Perlengkapan Peserta Didik, KAB. PESISIR BARAT)*				*Peserta Didik PAUD*	*3239*		*DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN*
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						412.320.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			453.552.000,00	
			Jumlah Warga Negara Dalam Pendidikan Kesetaraan (Orang)				*325*		*(Satuan Pendidikan Kesetaraan Yang Ada di Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*325*		*DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN*
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan						412.320.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			453.552.000,00	
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)		*4*	*4*	*4*		*(Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP, KAB. PESISIR BARAT)*				*Pendidik, Tenaga Pendidik, dan Peserta Didik*	*4*		*DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN*
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**103.815.980.684,00**							**102.110.124.684,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**34.963.420.870,00**				**Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas**			**34.963.420.870,00**	
			Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	***92,5***			***92,5***									***DINAS KESEHATAN***
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						61.449.600,00				Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			61.449.600,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Dinas Kesehatan (%)				*92.5*		*(Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, Serai, Kec. Pesisir Tengah)*					*95*		*DINAS KESEHATAN*
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						19.220.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					19.220.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)		*2.00*	*2.00*	*3.00*		*(Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, Serai, Kec. Pesisir Tengah)*				*Aparatur*	*3.00*		*DINAS KESEHATAN*
	1.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						9.610.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					9.610.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, Serai, Kec. Pesisir Tengah)*				*Aparatur*	*1*		*DINAS KESEHATAN*
	1.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						9.610.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					9.610.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, Serai, Kec. Pesisir Tengah)*				*Aparatur*	*1.00*		*DINAS KESEHATAN*
	1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						6.752.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					6.752.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, Serai, Kec. Pesisir Tengah)*				*Aparatur*	*1.00*		*DINAS KESEHATAN*
	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						16.257.600,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					16.257.600,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		*4*	*4*	*2*		*(Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, Serai, Kec. Pesisir Tengah)*				*Aparatur*	*2*		*DINAS KESEHATAN*
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						32.839.360.900,00							32.839.360.900,00	
			Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Dinas Kesehatan (%)				*92.5*		*(Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, Serai, Kec. Pesisir Tengah)*					*95*		*DINAS KESEHATAN*
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						32.827.310.900,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					32.827.310.900,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		*438*	*438*	*438*		*(Kecamatan Lemong, Kecamatan Pesisir Utara, Kecamatan Pulau Pisang, Kecamatan Karya Penggawa, Kecamatan Way Krui, Kecamatan Pesisir Tengah, Kecamatan Krui Selatan, Kecamatan Pesisir Selatan, Kecamatan Ngambur, Kecamatan Bengkunat, Kecamatan Bengkunat Belimbing, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*438*		*DINAS KESEHATAN*
	1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						4.750.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					4.750.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		*1*	*1*	*1*		*(Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, Serai, Kec. Pesisir Tengah)*				*Aparatur*	*1*		*DINAS KESEHATAN*
	1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						4.200.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					4.200.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		*2*	*2*	*2*		*(Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, Serai, Kec. Pesisir Tengah)*				*Aparatur*	*2*		*DINAS KESEHATAN*
	1.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						3.100.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					3.100.000,00	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)		*1*	*1*	*1*		*(Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, Serai, Kec. Pesisir Tengah)*				*Aparatur*	*1*		*DINAS KESEHATAN*
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						692.742.510,00							692.742.510,00	
			Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Dinas Kesehatan (%)				*92.5*		*(Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, Serai, Kec. Pesisir Tengah)*					*95*		*DINAS KESEHATAN*
	1.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						35.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					35.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)		*0*	*0*	*1*		*(Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, Serai, Kec. Pesisir Tengah)*				*Aparatur*	*1*		*DINAS KESEHATAN*
	1.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						657.742.510,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					657.742.510,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)		*0.00*	*0.00*	*50.00*		*(Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, Serai, Kec. Pesisir Tengah)*				*Aparatur*	*50.00*		*DINAS KESEHATAN*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Dinas Kesehatan (%)*				*92.5*	688.278.860,00	*(Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, Serai, Kec. Pesisir Tengah)*					*95*	688.278.860,00	*DINAS KESEHATAN*
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)*		*1.00*	*1.00*	*12*	6.122.600,00	*(Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, Serai, Kec. Pesisir Tengah)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*Aparatur*	*12*	6.122.600,00	*DINAS KESEHATAN*
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)*		*1.00*	*1.00*	*12*	8.671.000,00	*(Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, Serai, Kec. Pesisir Tengah)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*Aparatur*	*12*	8.671.000,00	*DINAS KESEHATAN*
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)*		*0.00*	*0.00*	*12*	10.000.000,00	*(Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, Serai, Kec. Pesisir Tengah)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*Aparatur*	*12*	10.000.000,00	*DINAS KESEHATAN*
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)*		*1.00*	*1.00*	*12*	44.636.760,00	*(Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, Serai, Kec. Pesisir Tengah)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*Aparatur*	*12*	44.636.760,00	*DINAS KESEHATAN*
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)*		*2.00*	*2.00*	*12*	75.798.500,00	*(Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, Serai, Kec. Pesisir Tengah)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*Aparatur*	*12*	75.798.500,00	*DINAS KESEHATAN*
	1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)*		*2*	*2*	*1*	185.950.000,00	*(Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, Serai, Kec. Pesisir Tengah)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*Aparatur*	*1*	185.950.000,00	*DINAS KESEHATAN*
	1.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)*		*0.00*	*0.00*	*1*	25.000.000,00	*(Lapangan Sepakbola (Lokasi Krui Fair), Pelita Jaya, Kec. Pesisir Selatan)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*Aparatur*	*1*	25.000.000,00	*DINAS KESEHATAN*
	1.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						12.100.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					12.100.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)		*1.00*	*1.00*	*11*		*(Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, Serai, Kec. Pesisir Tengah)*				*Aparatur*	*11*		*DINAS KESEHATAN*
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						320.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					320.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*2.00*	*2.00*	*12*		*(Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, Serai, Kec. Pesisir Tengah)*				*Aparatur*	*12*		*DINAS KESEHATAN*
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						167.000.000,00							167.000.000,00	
			Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Dinas Kesehatan (%)				*92.5*		*(Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, Serai, Kec. Pesisir Tengah)*					*95*		*DINAS KESEHATAN*
	1.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						42.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					42.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, Serai, Kec. Pesisir Tengah)*				*Aparatur*	*1*		*DINAS KESEHATAN*
	1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						15.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					15.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)		*48*	*75*	*5*		*(Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, Serai, Kec. Pesisir Tengah)*				*Aparatur*	*10*		*DINAS KESEHATAN*
	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						55.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					55.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		*0.00*	*3*	*10*		*(Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, Serai, Kec. Pesisir Tengah)*				*Aparatur*	*10*		*DINAS KESEHATAN*
	1.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						55.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					55.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, Serai, Kec. Pesisir Tengah)*				*Aparatur*	*2*		*DINAS KESEHATAN*
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						108.960.000,00							108.960.000,00	
			Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Dinas Kesehatan (%)				*92.5*		*(Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, Serai, Kec. Pesisir Tengah)*					*95*		*DINAS KESEHATAN*
	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						12.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					12.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		*1.00*	*1.00*	*12*		*(Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, Serai, Kec. Pesisir Tengah)*				*Aparatur*	*12*		*DINAS KESEHATAN*
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						96.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					96.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*1.00*	*1.00*	*12*		*(Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, Serai, Kec. Pesisir Tengah)*				*Aparatur*	*12*		*DINAS KESEHATAN*
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						960.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					960.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, Serai, Kec. Pesisir Tengah)*				*Aparatur*	*12*		*DINAS KESEHATAN*
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						405.629.000,00							405.629.000,00	
			Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Dinas Kesehatan (%)				*92.5*		*(Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, Serai, Kec. Pesisir Tengah)*					*95*		*DINAS KESEHATAN*
	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						27.229.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					27.229.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		*8*	*8*	*8*		*(Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, Serai, Kec. Pesisir Tengah)*				*Aparatur*	*8*		*DINAS KESEHATAN*
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						281.800.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					281.800.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		*8*	*8*	*8*		*(Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, Serai, Kec. Pesisir Tengah)*				*Aparatur*	*8*		*DINAS KESEHATAN*
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						56.600.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					56.600.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		*19.00*	*19.00*	*30.00*		*(Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, Serai, Kec. Pesisir Tengah)*				*Aparatur*	*30.00*		*DINAS KESEHATAN*
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						40.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					40.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*0.00*	*1*	*2*		*(Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, Serai, Kec. Pesisir Tengah)*				*Aparatur*	*2*		*DINAS KESEHATAN*
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**61.778.931.631,00**				**Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**60.073.075.631,00**	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Cakupan Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan (%)				***100***									***DINAS KESEHATAN***
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan (%)*				*100*	43.889.952.308,00	*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*	42.362.504.308,00	*DINAS KESEHATAN*
	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	*Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)*		*3.00*	*2.00*	*2.00*	5.000.000.000,00	*(Puskesmas Way Krui dan Puskesmas Krui Selatan, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*Aparatur dan Masyarakat*	*2.00*	5.000.000.000,00	*DINAS KESEHATAN*
	1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	*Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)*		*6*	*0.00*	*11*	5.000.000.000,00	*(Semua Puskesmas di 11 Kecamatan, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*Aparatur dan Masyarakat*	*55*	5.000.000.000,00	*DINAS KESEHATAN*
	1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit (Unit)*		*0.00*	*1*	*1*	2.000.000.000,00	*(Lahan RSUD KH Muhammad Thohir, Way Suluh, Kec. Krui Selatan)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*Aparatur dan Masyarakat*	*1*	2.000.000.000,00	*DINAS KESEHATAN*
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas (Unit)*		*3*	*1*	*3*	5.000.000.000,00	*(Puskesmas Pugung Tampak, Puskesmas Ngambur, dan Puskesmas Bengkunat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*Aparatur dan Masyarakat*	*3*	5.000.000.000,00	*DINAS KESEHATAN*
	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	*Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya (Unit)*		*0.00*	*0.00*	*7*	5.000.000.000,00	*(Kecamatan Krui Selatan, Ngambur, Pesisir Utara, Lemong, dan Pesisir Selatan, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*Aparatur dan Masyarakat*	*7*	5.000.000.000,00	*DINAS KESEHATAN*
	1.02.02.2.01.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan (Unit)*		*0.00*	*0.00*	*7*	5.000.000.000,00	*(Puskesmas Bengkunat, Puskesmas Ngambur, dan Puskesmas Pulau Pisang, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*Aparatur*	*7*	5.000.000.000,00	*DINAS KESEHATAN*
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan						5.000.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					5.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)		*3*	*3*	*3*		*(Semua Puskesmas Di Kabupaten, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur dan Masyarakat*	*3*		*DINAS KESEHATAN*
	1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi						246.868.108,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					246.868.108,00	
			Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center (Unit)		*11*	*11*	*11*		*(Seluruh Puskesmas di Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur dan Masyarakat*	*11*		*DINAS KESEHATAN*
	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit						7.000.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					7.000.000.000,00	
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit (Unit)		*0.00*	*0.00*	*3*		*(Lahan RSUD KH Muhammad Thohir, Way Suluh, Kec. Krui Selatan)*				*Aparatur dan Masyarakat*	*2*		*DINAS KESEHATAN*
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan						4.565.144.200,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					3.037.696.200,00	
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)		*12.00*	*12.00*	*12.00*		*(RSUD dan Seluruh Puskesmas di Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Masyarakat*	*12.00*		*DINAS KESEHATAN*
	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan						77.940.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					77.940.000,00	
			Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan (Paket)		*12*	*12*	*12*		*(RSUD dan Seluruh Puskesmas di Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur dan Masyarakat*	*12*		*DINAS KESEHATAN*
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						17.470.377.400,00							17.470.377.400,00	
			Cakupan Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan (%)				*100*		*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS KESEHATAN*
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						100.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					100.000.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*45*		*(Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, Serai, Kec. Pesisir Tengah)*				*Aparatur dan Masyarakat*	*45*		*DINAS KESEHATAN*
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						82.065.600,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					82.065.600,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*45*	*45*	*45*		*(Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, Serai, Kec. Pesisir Tengah)*				*Aparatur dan Masyarakat*	*45*		*DINAS KESEHATAN*
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir						100.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					100.000.000,00	
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*45*		*(Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, Serai, Kec. Pesisir Tengah)*				*Aparatur*	*45*		*DINAS KESEHATAN*
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita						70.705.400,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					70.705.400,00	
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*22*	*22*	*33*		*(Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, Serai, Kec. Pesisir Tengah)*				*Aparatur*	*33*		*DINAS KESEHATAN*
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						100.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					100.000.000,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*45*		*(Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, Serai, Kec. Pesisir Tengah)*				*Aparatur*	*45*		*DINAS KESEHATAN*
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						100.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					100.000.000,00	
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*33*		*(Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, Serai, Kec. Pesisir Tengah)*				*Aparatur*	*33*		*DINAS KESEHATAN*
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut						209.400.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					209.400.000,00	
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*24*		*(Bapelkes Provinsi Lampung, Luar Wilayah)*				*Aparatur*	*24*		*DINAS KESEHATAN*
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi						100.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					100.000.000,00	
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*33*		*(Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, Serai, Kec. Pesisir Tengah)*				*Aparatur*	*33*		*DINAS KESEHATAN*
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus						100.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					100.000.000,00	
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)		*0.00*	*0.00*	*33*		*(Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, Serai, Kec. Pesisir Tengah)*				*Aparatur*	*33*		*DINAS KESEHATAN*
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						75.207.600,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					75.207.600,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)		*22*	*22*	*22*		*(Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, Serai, Kec. Pesisir Tengah)*				*Aparatur*	*22*		*DINAS KESEHATAN*
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						116.724.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					116.724.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)		*48*	*48*	*48*		*(Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, Serai, Kec. Pesisir Tengah)*				*Aparatur*	*48*		*DINAS KESEHATAN*
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						101.876.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					101.876.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)		*48*	*48*	*48*		*(Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, Serai, Kec. Pesisir Tengah)*				*Aparatur*	*48*		*DINAS KESEHATAN*
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)						100.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					100.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, Serai, Kec. Pesisir Tengah)*				*Aparatur*	*1*		*DINAS KESEHATAN*
	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana						71.467.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					71.467.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, Serai, Kec. Pesisir Tengah)*				*Masyarakat*	*1*		*DINAS KESEHATAN*
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						126.560.300,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					126.560.300,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)		*1*	*1*	*1*		*(Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, Serai, Kec. Pesisir Tengah)*				*Masyarakat*	*1*		*DINAS KESEHATAN*
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga						20.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					20.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, Serai, Kec. Pesisir Tengah)*				*Aparatur*	*1*		*DINAS KESEHATAN*
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						189.945.500,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					189.945.500,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)		*1*	*1*	*1*		*(Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, Serai, Kec. Pesisir Tengah)*				*Masyarakat*	*1*		*DINAS KESEHATAN*
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan						101.423.800,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					101.423.800,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)		*1*	*1*	*1*		*(Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, Serai, Kec. Pesisir Tengah)*				*Masyakarat*	*1*		*DINAS KESEHATAN*
	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya						97.115.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					97.115.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, Serai, Kec. Pesisir Tengah)*				*Masyarakat*	*1*		*DINAS KESEHATAN*
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						52.970.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					52.970.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, Serai, Kec. Pesisir Tengah)*				*Aparatur*	*1.00*		*DINAS KESEHATAN*
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)						100.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					100.000.000,00	
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)		*0.00*	*0.00*	*33*		*(Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, Serai, Kec. Pesisir Tengah)*				*Aparatur*	*33*		*DINAS KESEHATAN*
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA						100.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					100.000.000,00	
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)		*0.00*	*0.00*	*33*		*(Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, Serai, Kec. Pesisir Tengah)*				*Aparatur*	*33*		*DINAS KESEHATAN*
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						400.870.200,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					400.870.200,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)		*3*	*3*	*3*		*(Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, Serai, Kec. Pesisir Tengah)*				*Aparatur*	*3*		*DINAS KESEHATAN*
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat						8.932.168.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					8.932.168.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)		*5.00*	*5*	*5*		*(Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, Serai, Kec. Pesisir Tengah)*				*Aparatur dan Masyarakat*	*5*		*DINAS KESEHATAN*
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit						5.100.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					5.100.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen)		*1*	*1*	*1*		*(RSUD KH Muhammad Thohir, Way Suluh, Kec. Krui Selatan)*				*Aparatur dan Masyarakat*	*1*		*DINAS KESEHATAN*
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						213.624.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					213.624.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)		*11.00*	*11*	*11*		*(Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, Serai, Kec. Pesisir Tengah)*				*Aparatur*	*11*		*DINAS KESEHATAN*
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya						25.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					25.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)		*1*	*1*	*1*		*(Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, Serai, Kec. Pesisir Tengah)*				*Aparatur*	*1*		*DINAS KESEHATAN*
	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota						243.891.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					243.891.000,00	
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota (Unit)		*4*	*5*	*6*		*(Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, Serai, Kec. Pesisir Tengah)*				*Aparatur dan Masyarakat*	*5*		*DINAS KESEHATAN*
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)						231.118.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					231.118.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan)		*2*	*2*	*3*		*(Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, Serai, Kec. Pesisir Tengah)*				*Masyarakat*	*3*		*DINAS KESEHATAN*
	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah						43.270.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					43.270.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah (Dokumen)		*1*	*1*	*1*		*(Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, Serai, Kec. Pesisir Tengah)*				*Aparatur*	*1*		*DINAS KESEHATAN*
	1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)						64.976.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					64.976.000,00	
			Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) (Unit)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, Serai, Kec. Pesisir Tengah)*				*Aparatur dan Masyarakat*	*1*		*DINAS KESEHATAN*
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi						418.601.923,00							240.193.923,00	
			Cakupan Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan (%)				*100*		*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS KESEHATAN*
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan						418.601.923,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					240.193.923,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)		*1*	*1*	*1*		*(Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, Serai, Kec. Pesisir Tengah)*				*Aparatur dan Masyarakat*	*1*		*DINAS KESEHATAN*
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**						**4.918.705.636,00**				**Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**4.918.705.636,00**	
			Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan (%)				***100***									***DINAS KESEHATAN***

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	*Persentase Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Kesehatan (%)*				*100*	66.134.800,00	*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*	66.134.800,00	*DINAS KESEHATAN*
	1.02.03.2.01.0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Dokumen)*		*1*	*1*	*1*	41.134.800,00	*(Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, Serai, Kec. Pesisir Tengah)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*Aparatur*	*1*	41.134.800,00	*DINAS KESEHATAN*
	1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Dokumen)*		*1*	*0*	*1*	25.000.000,00	*(Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, Serai, Kec. Pesisir Tengah)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*Aparatur*	*1*	25.000.000,00	*DINAS KESEHATAN*
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	*Persentase Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Kesehatan (%)*				*100*	4.812.570.836,00	*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*	4.812.570.836,00	*DINAS KESEHATAN*
	1.02.03.2.02.0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)*		*1*	*1*	*1*	4.709.760.236,00	*(Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, Serai, Kec. Pesisir Tengah)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*Aparatur*	*1*	4.709.760.236,00	*DINAS KESEHATAN*
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	*Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)*		*95*	*95*	*95*	62.810.600,00	*(Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, Serai, Kec. Pesisir Tengah)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*Aparatur*	*95*	62.810.600,00	*DINAS KESEHATAN*
	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)*		*1*	*1*	*1*	40.000.000,00	*(Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, Serai, Kec. Pesisir Tengah)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*Organasasi PPN dan IBI*	*1*	40.000.000,00	*DINAS KESEHATAN*
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Kesehatan (%)*				*100*	40.000.000,00	*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*	40.000.000,00	*DINAS KESEHATAN*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Orang)*		*0*	*0*	*9*	40.000.000,00	*(Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, Serai, Kec. Pesisir Tengah)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*Aparatur*	*9*	40.000.000,00	*DINAS KESEHATAN*
4.	**1.02.04**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	***Tingkat Pengawasan dan tindak Lanjut Terhadap Perizinan Usaha (%)***				***100***	**351.980.965,00**							**351.980.965,00**	***DINAS KESEHATAN***
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	*Capaian Tingkat Pengawasan dan Tindak Lanjut Terhadap Perizinan Usaha (%)*				*100*	94.419.165,00	*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*	94.419.165,00	*DINAS KESEHATAN*
	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	*Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (Dokumen)*		*1*	*1*	*1*	94.419.165,00	*(Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, Serai, Kec. Pesisir Tengah)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*Apotik dan Toko Obat*	*1*	94.419.165,00	*DINAS KESEHATAN*
	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	*Capaian Tingkat Pengawasan dan Tindak Lanjut Terhadap Perizinan Usaha (%)*				*100*	56.071.800,00	*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*	56.071.800,00	*DINAS KESEHATAN*
	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	*Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga (Dokumen)*		*1*	*0.00*	*1*	56.071.800,00	*(Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, Serai, Kec. Pesisir Tengah)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*UMKM Masyarakat*	*1*	56.071.800,00	*DINAS KESEHATAN*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	*Capaian Tingkat Pengawasan dan Tindak Lanjut Terhadap Perizinan Usaha (%)*				*100*	201.490.000,00	*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*	201.490.000,00	*DINAS KESEHATAN*
	1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	*Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) (Dokumen)*		*1*	*1*	*1*	201.490.000,00	*(Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, Serai, Kec. Pesisir Tengah)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*Masyarakat*	*1*	201.490.000,00	*DINAS KESEHATAN*
5.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	***Persentase Puskesmas/Fasilitas Kesehatan yang Melaksanakan Kegiatan Promotif dan Preventif (%)***				***100***	**1.802.941.582,00**				**Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**1.802.941.582,00**	***DINAS KESEHATAN***
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase puskesmas/fasilitas kesehatan yang melaksanakan kegiatan promotif dan preventif (%)*				*100*	1.792.234.782,00	*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*	1.792.234.782,00	*DINAS KESEHATAN*
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (Dokumen)*		*1*	*1*	*1*	1.792.234.782,00	*(Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, Serai, Kec. Pesisir Tengah)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*Aparatur dan Masyarakat*	*1*	1.792.234.782,00	*DINAS KESEHATAN*
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase puskesmas/fasilitas kesehatan yang melaksanakan kegiatan promotif dan preventif (%)*				*100*	10.706.800,00	*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*	10.706.800,00	*DINAS KESEHATAN*
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						10.706.800,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					10.706.800,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, Serai, Kec. Pesisir Tengah)*				*Aparatur dan Masyarakat*	*1*		*DINAS KESEHATAN*
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**134.524.594.526,00**							**109.063.402.165,00**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)***	***92,5***			***92,50***	**5.348.238.701,00**			**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas**			**5.722.916.551,00**	***DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG***
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu (%)*				*100*	23.100.000,00	*(Dinas PUPR, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*100*	25.434.079,00	*DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG*
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)*		*2.00*	*2.00*	*2.00*	12.100.000,00	*(Kantor DPUPR, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*2.00*	13.310.000,00	*DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG*
	1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)*		*1*	*1*	*1*	11.000.000,00	*(Kantor DPUPR, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*1*	12.124.079,00	*DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG*
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu (%)*				*100*	3.289.800.000,00	*(Kantor DPUPR, KAB. PESISIR BARAT)*			Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*100*	3.358.141.000,00	*DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG*
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)*		*448*	*448*	*448*	3.276.300.000,00	*(Kantor DPUPR, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*448*	3.343.500.000,00	*DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						6.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			6.655.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		*1*	*1*	*1*		*(Kantor DPUPR, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG*
	1.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						5.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			5.324.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		*2*	*2*	*2*		*(Kantor DPUPR, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*2*		*DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG*
	1.03.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						2.500.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.662.000,00	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)		*1*	*1*	*1*		*(Kantor DPUPR, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG*
	1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						95.000.000,00				Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			180.752.462,00	
			Persentase Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (%)				*100*		*(Kantor DPUPR, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG*
	1.03.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD						95.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					180.752.462,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		*1*	*1*	*1*		*(Kantor DPUPR, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG*
	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						100.000.000,00				Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			100.000.000,00	
			Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana kepegawaian dan sumber daya manusia (%)				*100*		*(Kantor DPUPR, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG*
	1.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						100.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			100.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)		*5*	*5*	*5*		*(Kantor DPUPR, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*5*		*DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG*
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						441.828.701,00				Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			538.031.010,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja (%)				*100*		*(Kantor DPUPR, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG*
	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)*		*11.00*	*11.00*	*11.00*	10.000.000,00	*(Kantor DPUPR, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*11.00*	10.821.000,00	*DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG*
	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)*		*41.00*	*41.00*	*41.00*	97.000.000,00	*(Kantor DPUPR, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*41.00*	106.575.000,00	*DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG*
	1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)*		*1*	*1*	*1*	115.000.000,00	*(Kantor DPUPR, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*1*	133.100.000,00	*DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG*
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)*		*8*	*8*	*8*	75.000.000,00	*(Kantor DPUPR, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*8*	127.429.000,00	*DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG*
	1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)*		*2*	*2*	*2*	30.000.000,00	*(Kantor DPUPR, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*2*	30.000.000,00	*DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG*
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)*		*2.00*	*2.00*	*2.00*	114.828.701,00	*(Luar dan Dalam Wilayah Kab. Pesisir Barat, Luar Wilayah)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*2.00*	130.106.010,00	*DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG*
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase pemenuhan prasarana pendukung kinerja (%)*				*100*	249.100.000,00	*(Kantor DPUPR, KAB. PESISIR BARAT)*			Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*100*	272.800.000,00	*DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG*
	1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						249.100.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			272.800.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		*15*	*20*	*20*		*(Kantor DPUPR, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*20*		*DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG*
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						457.940.000,00				Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			522.458.000,00	
			Persentase Pemenunan layanan pendukung kantor (%)				*100*		*(Kantor DPUPR, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG*
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						84.700.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			93.170.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*3*	*3*	*3*		*(Kantor DPUPR, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*3*		*DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG*
	1.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						300.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			348.722.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)		*3*	*3*	*3*		*(Kantor DPUPR, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*3*		*DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG*
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						73.240.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			80.566.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		*1*	*1*	*1*		*(Kantor DPUPR, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG*
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						691.470.000,00				Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			725.300.000,00	
			Persentase Barang Milik Daerah yang dalam kondisi baik (%)				*100*		*(Kantor PUPR, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG*
	1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						359.370.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			395.300.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		*9*	*9*	*9*		*(Kantor DPUPR, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*9*		*DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG*
	1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar						332.100.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			330.000.000,00	
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)		*5*	*5*	*5*		*(Kantor DPUPR, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*5*		*DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG*
2.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**						**7.184.286.394,00**				**Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan**			**10.058.000.951,00**	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Cakupan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air Daerah (%)				***45***									***DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG***
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*persentase pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai (%)*				*100*	3.592.143.197,00	*(Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*			Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan		*100*	5.029.000.475,00	*DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG*
	1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai	*Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi (KM)*		*0.00*	*0.00*	*1*	1.210.000.000,00	*(kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	*Masyarakat*	*1*	1.331.000.000,00	*DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG*
	1.03.02.2.01.0109	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	*Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun (KM)*		*1*	*1*	*1*	1.172.143.197,00	*(Seluruh Kecamatan, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	*Masyarakat*	*1*	2.367.000.475,00	*DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG*
	1.03.02.2.01.0117	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	*Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun (KM)*		*0.00*	*0.00*	*1*	1.210.000.000,00	*(Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	*Masyarakat*	*1*	1.331.000.000,00	*DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG*
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air Daerah (%)*				*100*	3.592.143.197,00	*(Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*			Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan		*100*	5.029.000.476,00	*DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG*
	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	*Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi (KM)*		*1*	*3.6*	*1*	1.777.143.197,00	*(kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	*Masyarakat*	*1.2*	3.032.500.476,00	*DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG*
	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	*Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)*		*0.00*	*0.5*	*1*	1.815.000.000,00	*(kab. pesisir barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	*Masyarakat*	*2*	1.996.500.000,00	*DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG*
3.	**1.03.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**						**2.275.402.820,00**				**Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan**			**3.413.104.229,00**	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase Penduduk yang memiliki akses terhadap sumber daya air yang sehat dan aman (%)				***42,5***									***DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG***
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	*Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan (%)*				*100*	2.275.402.820,00	*(Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*			Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan		*100*	3.413.104.229,00	*DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG*
	1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	*Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun (Dokumen)*		*1*	*1*	*1*	275.402.820,00	*(kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	*Masyarakat*	*1*	413.104.229,00	*DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG*
	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	*Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun (Liter/Detik)*		*375*	*600*	*900*	2.000.000.000,00	*(kab.Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	*Masyarakat*	*1000*	3.000.000.000,00	*DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG*
4.	**1.03.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	***cakupan pelayanan sanitasi sub sektor air limbah domestik (%)***				***74,76***	**1.975.202.820,00**				**Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan**			**2.962.804.229,00**	***DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG***
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air Limbah Domestik) Layak dan aman (%)*				*100*	1.975.202.820,00	*(Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*			Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan		*100*	2.962.804.229,00	*DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG*
	1.03.05.2.01.0025	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	*Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun (MÂ³/Hari)*		*475*	*250*	*300*	1.491.202.820,00	*(kab. pesisir barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	*Masyarakat*	*350*	2.450.000.000,00	*DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG*
	1.03.05.2.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	*Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun (Dokumen)*		*1*	*1*	*1*	484.000.000,00	*(kab. pesisir barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	*Masyarakat*	*1*	512.804.229,00	*DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.	**1.03.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	***Persentase pelayanan sanitasi sub sektor drainase lingkungan (%)***				***35***	**2.544.820.052,00**				**Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan**			**3.308.266.068,00**	***DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG***
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat (%)*				*100*	2.544.820.052,00	*(Kab. pesisir barat, KAB. PESISIR BARAT)*			Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan		*100*	3.308.266.068,00	*DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG*
	1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	*Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun (M)*		*500*	*500*	*1000*	2.544.820.052,00	*(kab. pesisir barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	*Masyarakat*	*2000*	3.308.266.068,00	*DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG*
6.	**1.03.08**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	***tersedianya prasaran, sarana dan utilitas dasar (PSU) perkantoran pemerintah daerah kabupaten dalam skala mantap (%)***				***70***	**96.818.073.298,00**				**Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan**			**64.362.953.003,00**	***DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG***
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	*Persentase Ketersediaannya Gedung Pemerintah (%)*				*70*	96.818.073.298,00	*(kab. pesisir barat, KAB. PESISIR BARAT)*			Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan		*80*	64.362.953.003,00	*DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG*
	1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)*		*14*	*2*	*1*	96.818.073.298,00	*(Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	*Aparatur dan masyarakat*	*1*	64.362.953.003,00	*DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG*
7.	**1.03.09**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	***Rasio Kawasan yang Memiliki Ruang Terbuka Hijau (RTH) (%)***				***5***	**3.678.831.711,00**				**Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan**			**4.009.926.566,00**	***DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG***
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota						3.678.831.711,00				Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			4.009.926.566,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan (%)				*5*		*(kab. pesisir barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*5.3*		*DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG*
	1.03.09.2.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya						3.178.831.711,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			3.509.926.566,00	
			Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata (Kawasan)		*3*	*0.00*	*3*		*(kab. pesisir barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Masyarakat*	*3*		*DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG*
	1.03.09.2.01.0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota						500.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			500.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)		*3*	*0.00*	*1*		*(kab. pesisir barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Masyarakat*	*1*		*DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG*
8.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	***Tingkat Kemantapan Jalan (%)***				***42***	**13.911.055.354,00**				**Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan**			**14.275.765.688,00**	***DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG***
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota						13.911.055.354,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			14.275.765.688,00	
			Persentase kondisi mantap jalan kabupaten/kota (%)				*42*		*(Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*42.5*		*DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG*
	1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan						847.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			931.700.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun (Dokumen)		*12*	*6*	*8*		*(kab. pesisir barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Masyarakat*	*10*		*DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG*
	1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan						4.514.055.354,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			3.160.065.688,00	
			Panjang Jalan yang Dibangun (KM)		*5.1*	*0.6*	*1.3*		*(kab. pesisir barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Masyarakat*	*1.5*		*DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG*
	1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan						3.000.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			4.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jalan yang Direkonstruksi (KM)		*34.5*	*0.75*	*1.5*		*(kab. pesisir barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Masyarakat*	*2*		*DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG*
	1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan						2.000.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			3.000.000.000,00	
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (KM)		*14*	*0.83*	*1*		*(kab. pesisir barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Masyarakat*	*1.5*		*DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG*
	1.03.10.2.01.0039	Rehabilitasi Jembatan						1.000.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			3.630.000.000,00	
			Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi (Jembatan)		*60*	*0*	*5*		*(kab. Pesisir barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Masyarakat*	*18*		*DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG*
	1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan						2.000.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			3.000.000.000,00	
			Jumlah Jembatan yang Dibangun (Jembatan)		*0*	*7.50*	*10.00*		*(kab. pesisir barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Masyarakat*	*15.00*		*DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG*
	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan						550.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			550.000.000,00	
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (KM)		*0.00*	*0.00*	*1.1*		*(kab.pesisir barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Masyarakat*	*1.1*		*DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG*
9.	**1.03.11**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**						**473.880.948,00**				**Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan**			**606.530.233,00**	
			Persentase Jasa Konstruksi yang handal dan dapat diandalkan (%)				***35***									***DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG***
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi						80.000.000,00				Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			170.000.000,00	
			Persentase terlatihnya tenaga terampil kontruksi (%)				*35*		*(Kantor DPUPR, KAB. PESISIR BARAT)*					*42.5*		*DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG*
	1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis						80.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			170.000.000,00	
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih (Orang)		*30*	*50*	*50*		*(kab. pesisir barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Masyarakat atau Tenaga Konstruksi*	*50*		*DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG*
	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						250.000.000,00				Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			275.000.000,00	
			Persentase tersedianya sistem informasi jasa konstruksi (%)				*100*		*(Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan (Dokumen)*		*2*	*1*	*1*	120.000.000,00	*(kab. pesisir barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	*Aparatur*	*1*	120.000.000,00	*DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG*
	1.03.11.2.02.0015	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	*Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan (Layanan Informasi)*		*1.00*	*0*	*1.00*	130.000.000,00	*(kab. pesisir barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	*Aparatur*	*1.00*	155.000.000,00	*DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG*
	1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	*Persentase pengawasan dan evaluasi pekerjaan fisik (%)*				*100*	143.880.948,00	*(kab. pesisir barat, KAB. PESISIR BARAT)*			Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan		*100*	161.530.233,00	*DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG*
	1.03.11.2.04.0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	*Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha (Badan Usaha)*		*1*	*1*	*1*	143.880.948,00	*(kab. pesisir barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	*Aparatur*	*1*	161.530.233,00	*DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG*
10.	**1.03.12**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	***Cakupan informasi Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten beserta rinciannya melalui peta digital dan peta analog (%)***				***30***	**314.802.428,00**				**Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan**			**343.134.647,00**	***DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG***
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	*Penyelesaian materi teknis dari bantuan teknis RDTR (%)*				*100*	78.000.000,00	*(Kantor DPUPR, KAB. PESISIR BARAT)*			Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan		*100*	85.783.661,00	*DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG*
	1.03.12.2.01.0012	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang	*Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi (Orang)*		*1*	*1*	*1*	78.000.000,00	*(kab. pesisir barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	*Aparatur*	*1*	85.783.661,00	*DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG*
	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	*Penyelesaian materi teknis dari bantuan teknis RDTR (%)*				*100*	78.000.000,00	*(kab. pesisir barat, KAB. PESISIR BARAT)*			Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan		*100*	85.783.661,00	*DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.12.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota						78.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			85.783.661,00	
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota (Dokumen)		*1*	*1*	*1*		*(kab. pesisir barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Masyarakat*	*1*		*DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG*
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota						80.000.000,00				Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			85.783.664,00	
			Persentase Koordinasi dan sinkronisasi Pemanfaatan Ruang (%)				*100*		*(kab. pesisir barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG*
	1.03.12.2.03.0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang						40.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			42.891.832,00	
			Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang (Dokumen)		*1*	*1*	*1*		*(kab. pesisir barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG*
	1.03.12.2.03.0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang						40.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			42.891.832,00	
			Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang (Dokumen)		*1*	*1*	*1*		*(kab. pesisir barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG*
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota						78.802.428,00				Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			85.783.661,00	
			Ketaatan terhadap RTRW (%)				*100*		*(kab. pesisir barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG*
			Ketaatan terhadap RTRW (%)				*100*		*(kab. pesisir barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG*
	1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang						78.802.428,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			85.783.661,00	
			Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang (Dokumen)		*1*	*1*	*1*		*(kab. pesisir barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Masyarakat*	*1*		*DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG*
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**						**10.112.756.606,00**							**10.112.756.606,00**	
1.	**1.04.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.283.109.000,00**			**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas**			**2.283.109.000,00**	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	***92,5***			***92.50***									***DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN***
	1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Dokumen Perencanaan, Pengangaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu (%)*				*100*	4.398.000,00	*(Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*100*	4.398.000,00	*DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN*
	1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)*		*2*	*2*	*2*	898.000,00	*(Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*2*	898.000,00	*DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN*
	1.04.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)*		*4*	*4*	*4*	3.500.000,00	*(Kantor Dinas Perumahan Rakyat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*4*	3.500.000,00	*DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN*
	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu (%)*				*100*	1.771.177.400,00	*(Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*100*	1.771.177.400,00	*DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN*
	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)*		*14*	*14*	*14*	1.764.877.400,00	*(Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*14*	1.764.877.400,00	*DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN*
	1.04.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						2.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		*1*	*1*	*1*		*(KANTOR DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN*
	1.04.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						3.500.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			3.500.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(KANTOR DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN, KAB. PESISIR BARAT)*				*APARATUR*	*12*		*DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN*
	1.04.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						800.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			800.000,00	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)		*1*	*1*	*1*		*(KANTOR DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN*
	1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						20.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			20.000.000,00	
			Persentase Aparatur yang Berkinerja Baik (%)				*100*		*(Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN*
	1.04.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						20.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			20.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)		*4*	*4*	*4*		*(Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*4*		*DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN*
	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						275.369.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			275.369.600,00	
			Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja (%)				*100*		*(Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN*
	1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						4.809.600,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			4.809.600,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		*12*	*12*	*12*		*(Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN*
	1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						25.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			25.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		*1*	*1*	*1*		*(Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN*
	1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						50.160.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			50.160.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*12*	*12*	*12*		*(Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN*
	1.04.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						14.400.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			14.400.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		*12.00*	*12.00*	*12.00*		*(Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12.00*		*DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN*
	1.04.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						11.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			11.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)		*11*	*11*	*11*		*(Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*11*		*DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN*
	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						170.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			170.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*50*	*50*	*50*		*(Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*50*		*DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN*
	1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						56.400.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			56.400.000,00	
			Persentase Pemenuhan Prasarana dan Sarana Pendukung Kinerja (%)				*100*		*(Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)*		*4.00*	*9.00*	*8*	56.400.000,00	*(Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*8*	56.400.000,00	*DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN*
	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemenuhan Layanan Pendukung (%)*				*100*	65.774.000,00	*(Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*100*	65.774.000,00	*DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN*
	1.04.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)*		*3*	*3*	*2*	57.000.000,00	*(Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*0.00*	57.000.000,00	*DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN*
	1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)*		*12*	*12*	*12*	8.774.000,00	*(Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*12*	8.774.000,00	*DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN*
	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang milik Daerah yang dalam Kondisi Baik (%)*				*100*	89.990.000,00	*(Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*100*	89.990.000,00	*DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN*
	1.04.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)*		*2*	*2*	*2*	64.000.000,00	*(Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*2*	64.000.000,00	*DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN*
	1.04.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						1.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)		*10*	*10*	*5*		*(Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*5*		*DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN*
	1.04.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						24.990.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			24.990.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*12*	*12*	*12*		*(Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN*
2.	**1.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**						**1.643.820.052,00**			**Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar**	**Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan**			**1.643.820.052,00**	
			Rasio Rumah Layak Huni (%)				***88***									***DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN***
	1.04.02.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota						250.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			250.000.000,00	
			Terlaksananya Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota (%)				*100*		*(Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN*
	1.04.02.2.02.0004	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator						100.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			100.000.000,00	
			Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih (Orang)		*20*	*20*	*20*		*(Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Masyarakat/Fasilitator*	*20*		*DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN*
	1.04.02.2.02.0009	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan						150.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			150.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan (Orang)		*100*	*100*	*100*		*(Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Masyarakat/Pengembang Perumahan*	*100*		*DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota						950.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			950.000.000,00	
			Cakupan Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kab/Kota (Bulan)				*12*		*(Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*12*		*DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN*
	1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana						100.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			100.000.000,00	
			Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi (Unit Rumah)		*5*	*5*	*5*		*(Rumah bagi Korban Bencana yang di Rehabilitasi Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Masyarakat*	*5*		*DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN*
	1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana						850.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			850.000.000,00	
			Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun (Unit Rumah)		*25*	*25*	*25*		*(Rumah bagi Korban Bencana yang Terbangun di Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Masyarakat*	*25*		*DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN*
	1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus						150.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			150.000.000,00	
			Cakupan Pengelolaan Rumah Susun (%)				*20*		*(Kec. Pesisir Tengah, Kec. Lemong, Kec. Bangkunat, KAB. PESISIR BARAT)*					*20*		*DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN*
	1.04.02.2.05.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun						150.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			150.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(Kec. Pesisir Tengah, Kec. Lemong, Kec. Bangkunat Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur/Rusun ASN*	*12*		*DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN*
	1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan						293.820.052,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			293.820.052,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Cakupan Penerbitan Izin Site Plan (Laporan)				*12*		*(Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*12*		*DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN*
	1.04.02.2.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan						293.820.052,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			293.820.052,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur dan Masyarakat*	*12*		*DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN*
3.	**1.04.03**	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**						**1.164.129.345,00**			**Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar**	**Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan**			**1.164.129.345,00**	
			Rasio Permukiman Layak Huni (%)				***42,50***									***DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN***
	1.04.03.2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman						300.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			300.000.000,00	
			Terlaksananya Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman (Bulan)				*12*		*(Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, KAB. PESISIR BARAT)*					*12*		*DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN*
	1.04.03.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman						300.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			300.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman (Laporan)		*1*	*1*	*1*		*(Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur / Masyarakat*	*1*		*DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN*
	1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha						630.129.345,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			630.129.345,00	
			Luas Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani (Ha)				*0.5*		*(Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, KAB. PESISIR BARAT)*					*0.5*		*DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.03.2.02.0004	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh (Laporan)*		*12*	*12*	*12*	150.000.000,00	*(Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	*Aparatur / Masyarakat*	*12*	150.000.000,00	*DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN*
	1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	*Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi (Dokumen)*		*2*	*2*	*2*	200.129.345,00	*(Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	*Aparatur/ Masyarakat / RP2PK*	*2*	200.129.345,00	*DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN*
	1.04.03.2.02.0012	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	*Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina (Kelompok Masyarakat)*		*2*	*2*	*2*	120.000.000,00	*(Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	*Aparatur / Masyarakat*	*2*	120.000.000,00	*DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN*
	1.04.03.2.02.0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	*Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh (Dokumen)*		*6*	*6*	*6*	160.000.000,00	*(Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	*Aparatur / Masyarakat*	*6*	160.000.000,00	*DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN*
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha						234.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			234.000.000,00	
	1.04.03.2.03.0007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	*Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi (Dokumen)*		*1*	*1*	*1*	234.000.000,00	*(Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	*Aparatur / Masyarakat/ Data DED*	*1*	234.000.000,00	*DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.	**1.04.04**	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**						**3.844.401.966,00**			**Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar**	**Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan**			**3.844.401.966,00**	
			Persentase Permukiman yang Tertata (%)				***50***									***DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN***
	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh (%)*				*15*	3.844.401.966,00	*(Database Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan		*15*	3.844.401.966,00	*DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN*
	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	*Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki (Unit Rumah)*		*0*	*8*	*182*	3.844.401.966,00	*(Database Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	*Masyarakat*	*182*	3.844.401.966,00	*DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN*
5.	**1.04.05**	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**						**1.177.296.243,00**				**Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan**			**1.177.296.243,00**	
			Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana sarana umum (%)				***45***									***DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN***
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	*Persentase Perumahan Yang Sudah dilengkapi PSU (%)*				*20*	1.177.296.243,00	*(Rusun ASN dan Perumahan Lioh Buntor Kec. Pesisir Tengah, Water Meter di Kec. Lemong dan Kec. Ngaras, KAB. PESISIR BARAT)*			Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan		*20*	1.177.296.243,00	*DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN*
	1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian						1.177.296.243,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.177.296.243,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian (Lokasi)		*8*	*8*	*8*		*(Rusun ASN dan Perumahan Lioh Buntor Kec. Pesisir Tengah, Water Meter di Kec. Lemong dan Kec. Ngaras, KAB. PESISIR BARAT)*				*Masyarakat dan Aparatur*	*8*		*DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN*
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**8.354.214.969,00**							**8.191.678.673,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)***	***92,5***			***92,50***	**4.074.321.737,00**			**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas**			**4.093.500.923,00**	***SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN***
			Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)				***92.50***									***BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH***
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						7.800.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			7.800.000,00	
			Presentase penyediaan dokumen perencanaan dan evaluasi tepat waktu (%)				*100*		*(Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH*
			Persentase dokumen perencanaan , penganggaran & evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu (%)				*100*		*(Kantor Satpol PP dan Damkar Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN*
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						3.500.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			3.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)		*2*	*2*	*2*		*(Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*2*		*BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH*
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)		*2.00*	*2.00*	*2.00*		*(Kantor Satpol PP dan Damkar, KAB. PESISIR BARAT)*				*aparatur*	*2.00*		*SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN*
	1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						700.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			700.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1.00*		*BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH*
	1.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						700.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			700.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)		*1*	*1*	*1*		*(Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH*
	1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						700.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			700.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)		*1*	*1*	*1*		*(Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH*
	1.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						700.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			700.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)		*1*	*1*	*1*		*(Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH*
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						1.500.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.500.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		*2*	*2*	*2*		*(Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*2*		*BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH*
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.913.313.923,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.913.313.923,00	
			Presentase layanan keuangan perangkat daerah sesuai peraturan yang ada (%)				*100*		*(Kantor Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH*
			Persentase dokumen perencanaan , penganggaran & evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu (%)				*92.50*		*(Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, KAB. PESISIR BARAT)*					*92.50*		*SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2.904.313.923,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.904.313.923,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		*14*	*14*	*14*		*(Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*14*		*BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH*
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		*364.00*	*364.00*	*364.00*		*(Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, KAB. PESISIR BARAT)*				*aparatur*	*364.00*		*SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN*
	1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						3.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			3.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		*1*	*1*	*1*		*(Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH*
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		*1*	*1*	*1*		*(Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, KAB. PESISIR BARAT)*				*aparatur*	*1*		*SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN*
	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						3.500.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			3.500.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		*14*	*14*	*12*		*(Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, KAB. PESISIR BARAT)*				*aparatur*	*0.00*		*SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN*
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		*18*	*18*	*18*		*(Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*18*		*BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH*
	1.05.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						2.500.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)		*2*	*2*	*2*		*(Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, KAB. PESISIR BARAT)*				*aparatur*	*2*		*SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN*
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)		*1*	*1*	*1*		*(Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						10.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			10.000.000,00	
			Presentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah tepat waktu (%)				*100*		*(DKI Jakarta, Bandar Lampung, Yogyakarta, Luar Wilayah)*					*100*		*BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH*
	1.05.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						10.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)		*0.00*	*10.00*	*5.00*		*(Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*5.00*		*BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH*
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						349.909.814,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			375.089.000,00	
			Presentase layanan administrasi umum perangkat daerah tepat waktu (%)				*100*		*(Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH*
			persentase administrasi umum perangkat daerah yang tersedia (%)				*92.50*		*(Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, KAB. PESISIR BARAT)*					*92.50*		*SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN*
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						3.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			3.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, KAB. PESISIR BARAT)*				*aparatur*	*1*		*SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN*
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						15.326.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			15.326.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		*1*	*1*	*1*		*(Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH*
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						50.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			50.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		*1*	*1*	*1*		*(Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, KAB. PESISIR BARAT)*				*aparatur*	*1*		*SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		*1*	*1*	*1*		*(Pekon Pelita Jaya, Kec. Pesisir Selatan, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur, Masyarakat*	*1*		*BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH*
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						34.583.814,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			34.763.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*1*	*1*	*1*		*(Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, KAB. PESISIR BARAT)*				*aparatur*	*1*		*SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN*
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*1*	*1*	*1*		*(Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH*
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						24.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			24.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		*10*	*10*	*10*		*(Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*10*		*BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH*
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*120*		*(Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, KAB. PESISIR BARAT)*				*aparatur*	*120*		*SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN*
	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						23.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			23.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)		*11*	*11*	*11*		*(Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*11*		*BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH*
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, KAB. PESISIR BARAT)*				*aparatur*	*12*		*SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN*
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						200.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			225.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(Kabupaten Pesisir Barat, Wilayah Indonesia di Luar Kabupaten Pesisir Barat, Luar Wilayah)*				*Aparatur*	*12*		*BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH*
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, KAB. PESISIR BARAT)*				*aparatur*	*12*		*SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						50.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			50.000.000,00	
			persentase tersedia barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah (%)				*92.50*		*(Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaaran, KAB. PESISIR BARAT)*					*92.50*		*SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN*
			Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)				*100*		*(Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH*
	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						30.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			30.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)		*0*	*0*	*10*		*(Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*10*		*BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH*
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, KAB. PESISIR BARAT)*				*aparatur*	*5.00*		*SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN*
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						20.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			20.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		*0*	*0*	*2*		*(Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*2*		*BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH*
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						278.940.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			276.940.000,00	
			persentase tersedia jasa penunjang urusan pemerintah daerah (%)				*92.50*		*(Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN*
			Presentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)				*100*		*(Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH*
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						28.440.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			28.440.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, KAB. PESISIR BARAT)*				*aparatur*	*12*		*SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH*
	1.05.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						225.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			225.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)		*3.00*	*3.00*	*3.00*		*(Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, KAB. PESISIR BARAT)*				*aparatur*	*3.00*		*SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN*
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)		*3*	*3*	*3*		*(Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*3*		*BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH*
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						25.500.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			23.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		*2*	*2*	*2*		*(Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, KAB. PESISIR BARAT)*				*aparatur*	*2*		*SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN*
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH*
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						464.358.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			460.358.000,00	
			persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah (%)				*100*		*(Kec. Bengkunat, Kec. Ngaras, Kec. Ngambur, Kec. Pesisir Selatan, Kec. Krui Selatan, Kec. Pesisir Tengah, Kec. Way Krui, Kec. Karya Penggawa, Kec. Pesisir Utara, Kec. Lemong, Kec. Pulau Pisang, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN*
			Presentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara (%)				*100*		*(Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH*
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						249.358.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			249.358.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		*6.00*	*6.00*	*6.00*		*(Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, KAB. PESISIR BARAT)*				*aparatur*	*6.00*		*SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		*1*	*1*	*1*		*(Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Kendaraan Dinas Jabatan*	*1*		*BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH*
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						156.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			156.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		*11*	*12*	*12*		*(Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan*	*12*		*BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH*
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						29.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			25.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		*0*	*0*							*aparatur*			*SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN*
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		*2*	*10*	*10*		*(Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Peralatan dan Mesin Lainnya*	*10*		*BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH*
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						30.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			30.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*1*	*1*	*1*		*(Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Gedung Kantor*	*1*		*BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH*
2.	**1.05.02**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**2.373.744.778,00**			**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas**			**2.262.000.000,00**	
			Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan (%)				***100***									***SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN***
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						2.208.744.778,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.097.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			perserntase gangguan trantibum yang tertangani (%)				*100*		*(Kec. Bengkunat, Kec. Ngaras, Kec. Ngambur, Kec. Pesisir Selatan, Kec. Krui Selatan, Kec. Pesisir Tengah, Kec. Way Krui, Kec. Karya Penggawa, Kec. Pesisir Utara, Kec. Lemong, Kec. Pulau Pisang, KAB. PESISIR BARAT)*				*100*		*SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN*
	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*2*	106.000.000,00	*(Kec. Bengkunat, Kec. Ngaras, Kec. Ngambur, Kec. Pesisir Selatan, Kec. Krui Selatan, Kec. Pesisir Tengah, Kec. Way Krui, Kec. Karya Penggawa, Kec. Pesisir Utara, Kec.Lemong, Kec. Pulau Pisang, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*aparatur*	*0.00*	-	*SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN*
	1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan* *dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (Dokumen)*		*2.00*	*2.00*	*2.00*	12.000.000,00	*(Kec. Bengkunat, Kec. Ngaras, Kec. Pesisir Selatan, Kec. Krui Selatan, Kec. Pesisir Tengah, Kec. Way Krui, Kec. Karya Penggawa, Kec. Pesisir Utara, Kec. Lemong, Kec. Pulau Pisang, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*aparatur*	*2.00*	12.000.000,00	*SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN*
	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	*Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan (laporan)*		*8*	*8*	*8*	2.075.000.000,00	*(kec. bengkunat, kec ngaras, kec ngambur, kec. pesisir selatan, kec krui selatan, kec. pesisir tengah, kec. way krui, kec. karya penggawa, kec. pesisir utara, kec. lemong, kec. pulau pisang, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*aparatur*	*8*	2.075.000.000,00	*SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN*
	1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa						5.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*4.00*		*(Kec. Bengkunat, Kec. Ngaras , Kec. Pesisir Selatan, Kec. Krui Selatan, Kec. Pesisir Tengah, Kec. Way Krui, Kec. Karya Penggawa, Kec. Pesisir Utara, Kec. Lemong, Kec. Pulau Pisang, KAB. PESISIR BARAT)*				*aparatur*	*4.00*		*SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN*
	1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah						5.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani (Laporan)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(Kec. Bengkunat, Kec. Ngaras, KEc. Ngambur, Kec. Pesisir Selatan, Kec. Krui Selatan, Kec. Pesisir Tengah, Kec. Way Krui, Kec. Karya Penggawa, Kec. Pesisir Utara, Kec.Lemong, Kec. Pulau Pisang, KAB. PESISIR BARAT)*				*aparatur*	*1.00*		*SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN*
	1.05.02.2.01.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum						5.744.778,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			-	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia (Unit)		*0.00*	*0.00*	*8*		*(Kec. Bengkunat, Kec. Ngaras, Kec. Pesisir Selatan, Kec. Krui Selatan, Kec. Pesisir Tengah, Kec. Way Krui, Kec. Karya Penggawa, Kec. Pesisir Utara, Kec. Lemong, Kec. Pulau Pisang, KAB. PESISIR BARAT)*				*aparatur*	*0.00*		*SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN*
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota						125.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			125.000.000,00	
			persentase penegakan perda dan perbub yang terlaksama (%)				*100*		*(Kec. Bengkunat, Kec. Ngaras, Kec. Ngambur, Kec. Pesisir Selatan, Kec. Krui Selatan, Kec, Pesisir Tengah, Kec. Way krui, Kec. karya Penggawa, Kec. Pesisir Utara, Kec. Lemong, Kec. Pulau Pisang, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN*
	1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						30.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			30.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*3*		*(Kec. Bengkunat, Kec. Ngaras, Kec. Ngambur, Kec. Pesisir Selatan, Kec. Krui Selatan, Kec. Pesisir Tengah, Kec. Way Krui, Kec. Karya Penggawa, Kec. Pesisir Utara, Kec. Lemong, Kec. Pulau Pisang, KAB. PESISIR BARAT)*				*aparatur*	*0.00*		*SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN*
	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						95.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			95.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(Kec. Bengkunat, Kec. Ngaras, Kec. Ngambur, Kec. Pesisir Selatan, Kec. Krui Selatan, Kec. Pesisir Tengah, Kec. Way Krui, Kec. Karya Penggawa, Kec. Pesisir Utara, Kec. Lemong, Kec. Pulau Pisang, KAB. PESISIR BARAT)*				*aparatur*	*12*		*SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN*
	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota						40.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			40.000.000,00	
			pesrsentasi pembinaan ppns kabupaten (%)				*100*		*(Kec. Bengkunat, Kec. Ngaras, Kec. Ngambur, Kec. Pesisir Selatan, Kec. Krui Selatan, Kec. Pesisir Tengah, Kec. Way Krui, Kec. Karya Penggawa, Kec. Pesisir Utara, Kec. Lemong, Kec. Pulau Pisang, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN*
	1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS						40.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			40.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda (Laporan)		*12*	*12*	*12*						*aparatur*	*12*		*SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN*
3.	**1.05.03**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**						**1.168.111.750,00**			**Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim**	**Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan**			**1.168.141.750,00**	
			Cakupan Penanggulangan Bencana Daerah (%)				***100***									***BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH***

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	*Presentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota (%)*				*100*	79.522.000,00	*(Kecamatan Lemong, Kecamatan Pesisir Selatan, Kecamatan Pesisir Utara, KAB. PESISIR BARAT)*		Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan		*100*	79.552.000,00	*BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH*
	1.05.03.2.01.0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	*Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun (Orang)*		*0*	*90*	*90*	79.522.000,00	*(Kec. Lemong, Kec. Pesisir Utara, Kec. Pesisir Selatan, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	*Masyarakat*	*90*	79.552.000,00	*BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH*
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	*Presentase Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana (%)*				*100*	677.170.750,00	*(Seluruh Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*		Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan		*100*	677.170.750,00	*BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH*
	1.05.03.2.02.0006	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	*Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana (Kawasan)*		*10.00*	*10.00*	*10.00*	215.559.000,00	*(Kec. Way Krui, Kec. Pesisir Tengah, Kec. Pesisir Utara, Kec. Lemong, Kec. Ngaras, Kec. Ngambur, Kec. Bangkunat, Kec. Pulau Pisang, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	*Masyarakat*	*10.00*	215.559.000,00	*BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH*
	1.05.03.2.02.0008	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya (Orang)*		*0*	*0*	*25*	49.111.750,00	*(Kec. Pesisir Tengah, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	*Anggota TRC*	*25*	49.111.750,00	*BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.03.2.02.0009	Penyusunan Rencana Kontijensi	*Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi (Dokumen)*		*0*	*0*	*1*	100.000.000,00	*(Seluruh Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	*BPBD Pesisir Barat*	*1*	100.000.000,00	*BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH*
	1.05.03.2.02.0014	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal (Dokumen)*		*0*	*0*	*1*	258.000.000,00	*(Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	*Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Pesisir Barat*	*0*	258.000.000,00	*BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH*
	1.05.03.2.02.0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana (Kawasan)*		*0*	*0*	*90*	54.500.000,00	*(Kec. Bangkunat, Kec. Ngaras, Kec. Ngambur, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	*Masyarakat*	*90*	54.500.000,00	*BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH*
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	*Presentase Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (%)*				*100*	230.771.000,00	*(Seluruh Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*		Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan		*100*	230.771.000,00	*BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH*
	1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana (Orang)*		*10*	*10*	*10*	108.271.000,00	*(Seluruh Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	*Anggota TRC*	*10*	108.271.000,00	*BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH*
	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota						122.500.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			122.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Orang)		*16*	*16*	*16*		*(Seluruh Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Masyarakat*	*16*		*BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH*
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana						180.648.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			180.648.000,00	
			Presentase Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanganan Bencana (%)				*100*		*(Seluruh Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH*
	1.05.03.2.04.0013	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota						180.648.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			180.648.000,00	
			Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)		*1*	*1*	*1*		*(Seluruh Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Masyarakat*	*1*		*BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH*
4.	**1.05.04**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**						**738.036.704,00**			**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas**			**668.036.000,00**	
			Persentase Pelayanan Pemadam dan penyelamatan kebakaran (%)				***100***									***SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN***
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota						738.036.704,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			668.036.000,00	
			persentase pelayanan pemadaman kebakaran dan penyelamatan kebakaran (%)				*100*		*(Kec. Bengkunat, Kec. Ngaras, Kec. Ngambur, Kec. Pesisir Selatan, Kec. Krui Selatan, Kec. Pesisir Tengah, Kec. Way Krui, Kec. Karya Penggawa, Kec. Pesisir Utara, Kec. Lemong, Kec. Pulau Pisang, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN*
	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota						668.036.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			668.036.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)		*12.00*	*12.00*	*12.00*		*(Kec. Bengkunat, Kec. Ngaras, Kec. Ngambur, Kec. Pesisir Selatan, Kec. Krui Selatan, Kec. Pesisir Tengah, Kec. Way Krui, Kec. Karya Penggawa, Kec. Pesisir Utara, Kec. Lemong, Kec. Pulau Pisang, KAB. PESISIR BARAT)*				*aparatur*	*12.00*		*SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN*
	1.05.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran						10.000.704,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			-	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran (Dokumen)		*0*	*0*							*aparatur*			*SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN*
	1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran						60.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			-	
			Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (Orang)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kec. Bengkunat, Kec. Ngaras, Kec. Ngambur, Kec. Pesisir Selatan, Kec. Krui Selatan, Kec. Pesisir Tengah, Kec. Way Krui, Kec. Karya Penggawa, Kec. Pesisir Utara, Kec. Lemong, Kec. Pulau Pisang, KAB. PESISIR BARAT)*				*aparatur*	*2*		*SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN*
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**						**6.697.722.503,00**							**7.367.494.754,00**	
1.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.237.394.511,00**			**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas**			**2.461.133.962,00**	
			Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	***92,5***			***92,50***									***DINAS SOSIAL***
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						6.400.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			7.040.000,00	
			Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu (%)				*100*		*(Kantor Dinas Sosial, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS SOSIAL*
	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						1.400.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.540.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)		*2*	*2*	*2.00*		*(Kantor Dinas sosial, KAB. PESISIR BARAT)*				*aparatur*	*2.00*		*DINAS SOSIAL*
	1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						5.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			5.500.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		*2*	*2*	*2.00*		*(kantor dinas sosial, KAB. PESISIR BARAT)*				*aparatur*	*2.00*		*DINAS SOSIAL*
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.700.369.004,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.870.405.904,00	
			Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu (%)				*100*		*(kantor dinas sosial, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS SOSIAL*
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.694.869.004,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.864.355.904,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		*18*	*18*	*18.00*		*(kantor dinas sosial, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*18.00*		*DINAS SOSIAL*
	1.06.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						2.500.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.750.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		*1*	*1*	*1.00*		*(Dinas Sosial, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1.00*		*DINAS SOSIAL*
	1.06.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						2.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.200.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		*1*	*1*	*1.00*		*(Kantor Dinas Sosial, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1.00*		*DINAS SOSIAL*
	1.06.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						1.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.100.000,00	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)		*1*	*1*	*1.00*		*(Kantor Dinas Sosial, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1.00*		*DINAS SOSIAL*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja (%)*				*100*	191.755.507,00	*(kantor dinas sosial, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*100*	210.931.058,00	*DINAS SOSIAL*
	1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)*		*1*	*1*	*1.00*	25.000.000,00	*(Krui, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*aparatur*	*1.00*	27.500.000,00	*DINAS SOSIAL*
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)*		*1*	*1*	*1.00*	43.755.507,00	*(Dinas Sosial, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*aparatur*	*1.00*	48.131.058,00	*DINAS SOSIAL*
	1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)*		*10*	*10*	*10.00*	12.000.000,00	*(Kantor Dinas Sosial, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*10.00*	13.200.000,00	*DINAS SOSIAL*
	1.06.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)*		*11*	*11*	*11.00*	11.000.000,00	*(Kantor Dinas Sosial, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*11.00*	12.100.000,00	*DINAS SOSIAL*
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)*		*12*	*12*	*12.00*	100.000.000,00	*(Kantor Dinas Sosial, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*12.00*	110.000.000,00	*DINAS SOSIAL*
	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase pemenuhan Prasarana dan prasarana pendukung kinerja (%)*				*100*	100.000.000,00	*(kantor dinas sosial, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*100*	110.000.000,00	*DINAS SOSIAL*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						100.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			110.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		*2*	*6*	*10.00*		*(Dinas Sosial, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*10.00*		*DINAS SOSIAL*
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						112.720.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			123.992.000,00	
			Persentase pemenuhan Layanan Pendukung (%)				*100*		*(kantor dinas sosial, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS SOSIAL*
	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						15.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			16.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*12*	*12*	*12.00*		*(Kantor Dinas Sosial, KAB. PESISIR BARAT)*				*aparatur*	*12.00*		*DINAS SOSIAL*
	1.06.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						97.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			106.700.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)		*4*	*4*	*4.00*		*(Kantor Dinas Sosial, KAB. PESISIR BARAT)*				*Penyediaan Jasa Peralatandan Perlengkapan Kantoryang Disediakan*	*4.00*		*DINAS SOSIAL*
	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						720.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			792.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kantor Dinas Sosial, KAB. PESISIR BARAT)*				*aparatur*	*12*		*DINAS SOSIAL*
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						126.150.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			138.765.000,00	
			Persentase Barang Milik Daerah yang dalam kondisi baik (%)				*100*		*(kantor dinas sosial, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS SOSIAL*
	1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						58.400.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			64.240.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		*2*	*2*	*2.00*		*(Kantor Dinas Sosial, KAB. PESISIR BARAT)*				*aparatur*	*2.00*		*DINAS SOSIAL*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						58.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			63.800.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		*4*	*4*	*4.00*		*(Dinas sosial, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*4.00*		*DINAS SOSIAL*
	1.06.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						9.750.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			10.725.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*10*	*14*	*14*		*(Dinas Sosial, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*14*		*DINAS SOSIAL*
2.	**1.06.02**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**						**312.848.941,00**			**Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar**	**Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat**			**344.133.835,00**	
			Terdatanya Potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) (%)				***100***									***DINAS SOSIAL***
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota						312.848.941,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			344.133.835,00	
			Peningkatan kapasitas bagi PSKS (%)				*100*		*(kantor dinas sosial, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS SOSIAL*
	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota						312.848.941,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			344.133.835,00	
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(kantor dinas sosial, KAB. PESISIR BARAT)*				*Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial*	*1.00*		*DINAS SOSIAL*
3.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**						**3.401.463.270,00**			**Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar**	**Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat**			**3.741.609.597,00**	
			Cakupan Pemenuhan SPM bidang Sosial (%)				***100***									***DINAS SOSIAL***

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial						412.463.270,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			453.709.597,00	
			Persentase PMKS yang menerima bantuan (%)				*100*		*(kantor dinas sosial, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS SOSIAL*
	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan						215.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			236.500.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		*26.00*	*119.00*	*300*		*(11 kecamatan kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial*	*300*		*DINAS SOSIAL*
	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu						146.463.270,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			161.109.597,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		*12*	*70*	*60.00*		*(11 Kecamatan Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial*	*60.00*		*DINAS SOSIAL*
	1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan						51.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			56.100.000,00	
			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		*10.00*	*10.00*	*25*		*(kantor dinas sosial, KAB. PESISIR BARAT)*				*ODGJ, orang terlantar, lansia terlantar*	*25*		*DINAS SOSIAL*
	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial						2.989.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			3.287.900.000,00	
			Persentase PMKS yang tertangani (%)				*100*		*(kantor dinas sosial, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS SOSIAL*
	1.06.04.2.02.0001	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan						79.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			86.900.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		*1000.00*	*1000.00*	*1000.00*		*(Kantor Dinas Sosial, KAB. PESISIR BARAT)*				*Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)*	*1000.00*		*DINAS SOSIAL*
	1.06.04.2.02.0002	Pemberian Layanan Kedaruratan						10.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			11.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		*1000*	*1000*	*1000*		*(11 kecamatan kabupaten pesisir barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*pmks*	*1000*		*DINAS SOSIAL*
	1.06.04.2.02.0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota						2.900.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			3.190.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota (Dokumen)		*2.00*	*2.00*	*2.00*		*(11 Kecamatan Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Lembaga dan Individu*	*2.00*		*DINAS SOSIAL*
4.	**1.06.05**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**						**454.645.096,00**			**Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar**	**Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat**			**500.109.606,00**	
			cakupan perlindungan dan jaminan perlindungan sosial daerah (%)				***100***									***DINAS SOSIAL***
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						454.645.096,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			500.109.606,00	
			Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran dan data terpadu penangulangan kemiskinan (%)				*100*		*(dikantor dinas sosial, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS SOSIAL*
	1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						170.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			187.000.000,00	
			Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata (Orang)		*117000*	*117000*	*117000*		*(11 Kecamatan Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Fakir Miskin*	*117000*		*DINAS SOSIAL*
	1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						134.645.096,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			148.109.606,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota (Keluarga)		*0.00*	*0.00*	*60.00*		*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota*	*60.00*		*DINAS SOSIAL*
	1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga						150.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			165.000.000,00	
			Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)		*11687*	*11687*	*11687*		*(11 kecamatan kabupaten pesisir barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan*	*11687*		*DINAS SOSIAL*
5.	**1.06.06**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**						**291.370.685,00**			**Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar**	**Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat**			**320.507.754,00**	
			Cakupan pemenuhan pasca Bencana (%)				***100***									***DINAS SOSIAL***
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota						151.370.685,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			166.507.754,00	
			Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar (%)				*100*		*(dikantor dinas sosial, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS SOSIAL*
	1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan						151.370.685,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			166.507.754,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		*117000*	*117000*	*117000*		*(Rumah Singgah Kabupaten pesisir barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*PMKS*	*117000*		*DINAS SOSIAL*
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota						140.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			154.000.000,00	
			jumlah warga masyarakat rawan bencana alam yang mendapatkan kesiapsiagaan dan mitigasi (%)				*100*		*(dikantor dinas sosial, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS SOSIAL*
	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana						140.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			154.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		*30*	*44*	*50*		*(11 kecamatan kabupaten pesisir barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*tagana*	*50*		*DINAS SOSIAL*
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**78.670.746.081,00**							**63.189.545.880,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**						**2.677.044.091,00**							**2.677.044.091,00**	
1.	**2.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)***	***92,5***			***92,50***	**1.990.955.081,00**			**Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan**	**Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas**			**1.990.955.081,00**	***DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN***
	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (%)*				*92.50*	8.500.000,00	*(Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*100*	8.500.000,00	*DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN*
	2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)*		*2*	*2*	*2.00*	3.500.000,00	*(Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*2.00*	3.500.000,00	*DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN*
	2.07.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)*		*2*	*2*	*2.00*	5.000.000,00	*(Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*2.00*	5.000.000,00	*DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN*
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Pemenuhan Pelaporan Keuangan Tepat Waktu (%)*				*92.50*	1.508.950.900,00	*(Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*92.50*	1.508.950.900,00	*DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)*		*14*	*14*	*14.00*	1.498.450.900,00	*(Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik		*Aparatur*	*14.00*	1.498.450.900,00	*DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN*
	2.07.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)*		*1*	*1*	*1*	3.500.000,00	*(Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*1*	3.500.000,00	*DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN*
	2.07.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)*		*1*	*1*	*1*	3.500.000,00	*(Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*1*	3.500.000,00	*DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN*
	2.07.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)*		*1*	*1*	*1.00*	3.500.000,00	*(Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*1.00*	3.500.000,00	*DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN*
	2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Aparatur yang Berkinerja Baik (%)*				*92.50*	20.000.000,00	*(Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*92.50*	20.000.000,00	*DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN*
	2.07.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)*		*2*	*3*	*3.00*	20.000.000,00	*(Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur Sipil Negara*	*3.00*	20.000.000,00	*DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja (%)*				*92.50*	240.504.181,00	*(Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*92.50*	240.504.181,00	*DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN*
	2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)*		*12*	*12*	*12*	6.504.181,00	*(Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*12*	6.504.181,00	*DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN*
	2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)*		*1*	*1*	*1.00*	30.000.000,00	*(Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*1.00*	30.000.000,00	*DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN*
	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)*		*12*	*12*	*12*	30.000.000,00	*(Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*12*	30.000.000,00	*DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN*
	2.07.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)*		*10*	*10*	*10.00*	20.000.000,00	*(Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*10.00*	20.000.000,00	*DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN*
	2.07.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)*		*11*	*11*	*11*	15.000.000,00	*(Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*11*	15.000.000,00	*DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)*		*12*	*12*	*12*	139.000.000,00	*(Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*12*	139.000.000,00	*DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN*
	2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Pemenuhan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja (%)*				*92.50*	20.000.000,00	*(Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*92.50*	20.000.000,00	*DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN*
	2.07.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	*Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)*		*4*	*4*	*3.00*	20.000.000,00	*(Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*3.00*	20.000.000,00	*DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN*
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pemenuhan Layanan Pendukung Penunjang Kegiatan Urusan Kantor (%)*				*92.50*	125.000.000,00	*(Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*92.50*	125.000.000,00	*DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN*
	2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)*		*12*	*12*	*12.00*	20.000.000,00	*(Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*12.00*	20.000.000,00	*DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN*
	2.07.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)*		*12*	*12*	*12*	100.000.000,00	*(Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*12*	100.000.000,00	*DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)*		*12*	*12*	*12.00*	5.000.000,00	*(Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*12.00*	5.000.000,00	*DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN*
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Kegiatan Dalam Kondisi Baik (%)*				*92.50*	68.000.000,00	*(Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian, KAB. PESISIR BARAT)*		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*92.50*	68.000.000,00	*DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN*
	2.07.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)*		*2*	*2*	*2.00*	57.000.000,00	*(Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Kendaraan Dinas*	*2.00*	57.000.000,00	*DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN*
	2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)*		*12*	*12*	*12*	6.000.000,00	*(Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Peralatan dan Mesin Kantor*	*12*	6.000.000,00	*DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN*
	2.07.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)*		*12*	*12*	*12*	5.000.000,00	*(Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Gedung Kantor*	*12*	5.000.000,00	*DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN*
2.	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	***Tingkat Pengangguran Terbuka (%)***				***2,60***	**259.190.649,00**			**Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing**	**Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**259.190.649,00**	***DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN***
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi						212.190.649,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			212.190.649,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi (Orang)				*30*		*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*30*		*DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN*
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi						212.190.649,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			212.190.649,00	
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (Orang)		*30*	*30*	*30.00*		*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Masyarakat*	*30.00*		*DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN*
	2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						47.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			47.000.000,00	
			Jumlah Laporan (Laporan)				*1*		*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*1*		*DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN*
	2.07.03.2.05.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja						47.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			47.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah (Dokumen)		*1*	*1*	*1.00*		*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Masyarakat*	*1.00*		*DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN*
3.	**2.07.04**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**						**221.520.704,00**			**Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing**	**Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**221.520.704,00**	
			Tingkat Partisipasi Anga Kerja (%)				***73,88***									***DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN***
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota						146.520.704,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			146.520.704,00	
			Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat (Orang)				*200*		*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*35*		*DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN*
	2.07.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja						146.520.704,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			146.520.704,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan (Orang)		*150*	*150*	*200.00*		*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Masyarakat*	*200.00*		*DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN*
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	*Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan (Orang)*				*1.000*	75.000.000,00	*(Kecamatan Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia		*1.000*	75.000.000,00	*DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN*
	2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	*Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) (Orang)*		*803*	*900*	*1000.00*	75.000.000,00	*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	*Masyarakat*	*1000.00*	75.000.000,00	*DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN*
4.	**2.07.05**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	***Cakupan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri (%)***				***70***	**205.377.657,00**			**Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing**	**Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**205.377.657,00**	***DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN***
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (%)*				*70*	85.172.485,00	*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia		*70*	85.172.485,00	*DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN*
	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	*Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan (Laporan)*		*1*	*1*	*1.00*	85.172.485,00	*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	*Masyarakat*	*1.00*	85.172.485,00	*DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN*
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota						120.205.172,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			120.205.172,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Cakupan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (%)				*70*		*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*70*		*DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN*
	2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						60.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			60.000.000,00	
			Jumlah Perselisihan yang Dicegah (Perkara)		*2*	*2*	*2*		*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Masyarakat*	*2*		*DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN*
	2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota						60.205.172,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			60.205.172,00	
			Jumlah LKS Tripartit yang Dibina (Lembaga)		*1*	*1*	*1.00*		*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Masyarakat*	*1.00*		*DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN*
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**						**1.136.012.101,00**							**-**	
1.	**2.08.02**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	***Persentase Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Perencanaan Pembangunan yang Responsif Gender (%)***				***100***	**207.568.766,00**			**Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing**	**Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**-**	***DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA***
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	*Meningkatnya Pengetahuan Peserta dalam Penyusunan GAP/GBS (Gender Analysis Pathway/Gender Budget Statement) di Kabupaten Pesisir Barat (Kali)*				*1*	130.000.000,00	*(Krui Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia		*1*	-	*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
	2.08.02.2.01.0004	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG						130.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota (Perangkat Daerah)		*0.00*	*0.00*	*25*		*(Kabupaten pesisir barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Perencanaan pada OPD, Bagian Sekretariat Daerah dan Kecamatan*	*25*		*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Meningkatnya Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi di Kabupaten Pesisir Barat (Kali)*				*1*	77.568.766,00	*(Krui Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*1*	-	*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
	2.08.02.2.02.0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	*Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*1.00*	77.568.766,00	*(KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*OPD, Peserta Rapat, Narasumber*	*0.00*	-	*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
2.	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	***Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan (%)***				***100***	**124.175.456,00**			**Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing**	**Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**-**	***DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA***
			Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana dan Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota (%)				***100***									***DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA***
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	*Terdampinginya 5 Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (%)*				*100*	27.351.000,00	*(Krui Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia		*100*	-	*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota (Layanan)*		*7.00*	*10.00*	*10.00*	27.351.000,00	*(Krui Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	*Konselor, Korban, OPD, Perempuan Korban Kekerasan, Peserta*	*10.00*	-	*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya Kinerja UPTD PPA (%)*				*100*	96.824.456,00	*(Krui Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia		*100*	-	*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
			Meningkatnya Sumber Daya Manusia dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Kode Etik (Kali)				*2*		*(Krui Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*2*		*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
			Meningkatnya Pengetahuan Lembaga Forum PUSPAGA (%)				*100*		*(Krui Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
	2.08.03.2.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*10*	20.000.000,00	*(10 Kecamatan Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*OPD, Peserta*	*10*	-	*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
	2.08.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota						46.283.856,00		DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas (Orang)		*50.00*	*50.00*	*50.00*		*(KAB. PESISIR BARAT)*				*OPD, Peserta Kegiatan*	*50.00*		*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
	2.08.03.2.03.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota						30.540.600,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					-	
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*11.00*		*(KAB. PESISIR BARAT)*				*OPD, Peserta Kegiatan*	*0.00*		*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
3.	**2.08.04**	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**						**223.797.979,00**			**Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing**	**Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**-**	
			Cakupan Perempuan sebagai Tenaga Profesional (%)				***35.00***									***DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA***
	2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						125.527.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	
			Meningkatnya Pengetahuan Perempuan Kepala Keluarga dalam Peningkatan Ekonomi bagi Keluarga (%)				*100*		*(Krui Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
	2.08.04.2.01.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota						125.527.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*10*		*(Kecamatan Lemong, Pesisir Utara, Pulau Pisang, Karya Penggawa, Way Krui, Krui Selatan, Pesisir Selatan, Ngambur, Ngaras, Bangkunat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Perempuan Kepala Keluarga*	*0.00*		*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
	2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota						98.270.979,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Tersedianya Data Pilah dari 11 Kecamatan (Kecamatan)				*11*		*(Krui Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*11*		*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
	2.08.04.2.02.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan (Lembaga)*		*0.00*	*0.00*	*11*	98.270.979,00	*(Kecamatan Lemong, Pesisir Utara, Pulau Pisang, Karya Penggawa, Way Krui, Pesisir Tengah, Krui Selatan, Pesisir Selatan, Ngambur, Ngaras, Bangkunat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	*Masyarakat di 11 Kecamatan*	*11*	-	*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
4.	**2.08.06**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	***Cakupan Lembaga Penyedia Layanan terhadap Anak (%)***				***33.33***	**387.030.849,00**			**Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing**	**Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**-**	***DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA***
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	*Meningkatnya Pengetahuan Pemerhati Anak tentang hak-hak anak (%)*				*100*	57.700.000,00	*(Krui Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia		*100*	-	*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
	2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*1.00*	57.700.000,00	*(KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	*OPD, Peserta Kegiatan*	*1.00*	-	*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota						329.330.849,00				Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Terwujudnya Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Pesisir Barat (poin)				*800*		*(Krui Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*800*		*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
	2.08.06.2.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)*		*0.00*	*0.00*	*150.00*	329.330.849,00	*(KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*OPD, Peserta Kegiatan*	*0.00*	-	*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
5.	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	***Cakupan Pendampingan anak yang membutuhkan Perlindungan Khusus (%)***				***100***	**193.439.051,00**			**Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing**	**Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**-**	***DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA***
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat tentang Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (%)*				*100*	59.700.000,00	*(Krui Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia		*100*	-	*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
	2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	*Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA (Orang)*		*1.00*	*1.00*	*1.00*	59.700.000,00	*(KAB. PESISIR BARAT)*	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	*OPD*	*1.00*	-	*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						103.739.051,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Terdampinginya kasus-kasus anak yang memerlukan perlindungan khusus (%)				*100*		*(Krui Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
			Meningkatnya Pengetahuan Anak tentang Kekerasan Terhadap Anak di Sekolah (%)				*100*		*(Krui Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
	2.08.07.2.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						40.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					-	
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan (Orang)		*0.00*	*0.00*	*1*						*OPD*	*1*		*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
	2.08.07.2.02.0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK						63.739.051,00		DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan (Orang)		*40.00*	*40.00*	*40.00*						*Masyarakat*	*40.00*		*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						30.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	
			Meningkatkan Kinerja UPTD PPA (%)				*100*		*(Krui Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
	2.08.07.2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/						30.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	
			Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK (Orang)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(KAB. PESISIR BARAT)*				*OPD, Peserta Kegiatan*	*0.00*		*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**						**7.956.573.313,00**							**8.677.612.897,00**	
1.	**2.09.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)***				***92.50***	**6.650.524.300,00**			**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas**			**6.690.524.300,00**	***DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN***
	2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu (%)*				*100*	10.000.000,00	*(Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*100*	10.000.000,00	*DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN*
	2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)*		*2*	*2*	*2.00*	5.000.000,00	*(Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*2*	5.000.000,00	*DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN*
	2.09.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)*		*2*	*2*	*2.00*	3.000.000,00	*(Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*2*	3.000.000,00	*DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN*
	2.09.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)*		*1*	*1*	*1.00*	2.000.000,00	*(Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*1*	2.000.000,00	*DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN*
	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Pelaporan Keuangan tepat waktu (%)*				*100*	5.624.724.300,00	*(Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*100*	5.624.724.300,00	*DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)*		*50*	*50*	*50.00*	5.618.724.300,00	*(Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*50*	5.618.724.300,00	*DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN*
	2.09.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)*		*1*	*1*	*1.00*	2.000.000,00	*(Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*1*	2.000.000,00	*DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN*
	2.09.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)*		*2*	*2*	*2.00*	2.500.000,00	*(Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*2*	2.500.000,00	*DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN*
	2.09.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)*		*1*	*1*	*1.00*	1.500.000,00	*(Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*1*	1.500.000,00	*DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN*
	2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Aparatur Yang Berkinerja Baik (%)*				*100*	145.500.000,00	*(Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*100*	145.500.000,00	*DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN*
	2.09.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)*		*0*	*0*	*65.00*	45.500.000,00	*(Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*65*	45.500.000,00	*DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN*
	2.09.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						100.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)		*0.00*	*0.00*	*10.00*		*(Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*10*		*DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN*
	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						419.800.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			459.800.000,00	
			Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja (%)				*100*		*(Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN*
	2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						1.800.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.800.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		*1*	*1*	*1.00*		*(Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN*
	2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						40.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			80.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		*1*	*1*	*2.00*		*(Kabupaten Pesisir Barat dan Bandar Lampung, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*2*		*DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN*
	2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						55.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			55.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*1*	*1*	*1.00*		*(Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN*
	2.09.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						12.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			12.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		*10*	*10*	*10.00*		*(Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*10*		*DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN*
	2.09.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						11.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			11.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)		*11*	*11*	*11.00*		*(Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*0.00*		*DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)*		*2*	*2*	*2.00*	300.000.000,00	*(Kabupaten Pesisir Barat dan Luar Daerah Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*2*	300.000.000,00	*DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN*
	2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana kantor (%)*				*100*	90.000.000,00	*(Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*100*	90.000.000,00	*DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN*
	2.09.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)*		*0.00*	*0.00*	*17.00*	90.000.000,00	*(Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*17*	90.000.000,00	*DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN*
	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemenuhan Layanan Pendukung (%)*				*100*	171.000.000,00	*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*100*	171.000.000,00	*DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN*
	2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)*		*1*	*1*	*1.00*	60.000.000,00	*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*1*	60.000.000,00	*DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN*
	2.09.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)*		*1*	*1*	*1.00*	107.000.000,00	*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*1*	107.000.000,00	*DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN*
	2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						4.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			4.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		*1*	*1*	*1.00*		*(Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN*
	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						189.500.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			189.500.000,00	
			Persentase Barang Milik Daerah yang dalam kondisi baik (%)				*100*		*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN*
	2.09.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						40.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			40.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		*1*	*1*	*1*		*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN*
	2.09.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						128.500.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			128.500.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		*29*	*29*	*29.00*		*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*29*		*DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN*
	2.09.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						21.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			21.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*30*	*30*	*30.00*		*(Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*30*		*DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN*
2.	**2.09.03**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**						**929.136.880,00**			**Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**	**Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat**			**1.415.136.880,00**	
			Ketersediaan Pangan Utama (Ton)				***28000***									***DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN***
			Ketersediaan Pangan Utama (Ton)	***28.000***			***28000***									***DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN***
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan						408.636.880,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			483.636.880,00	
			Skor Pola Pangan Harapan (PPH Ketersediaan) (%)				*85.10*		*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*85.20*		*DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.03.2.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	*Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia (Laporan)*		*0.00*	*0.00*		301.200.000,00	*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	*Kelompok Wanita Tani, TPPKK, Masyarakat*	*1*	301.200.000,00	*DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN*
	2.09.03.2.01.0010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	*Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan (Unit)*		*0.00*	*0.00*	*2*	32.436.880,00	*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	*Aparatur dan KelompokTani*	*2*	32.436.880,00	*DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN*
	2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	*Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) (Dokumen)*		*2*	*2*	*2*	75.000.000,00	*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	*Aparatur, Aparatur, Pedagang, Petani dan Pengusaha Penggilingan Beras*	*2*	150.000.000,00	*DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN*
	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	*Persentase Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah (%)*				*20*	260.000.000,00	*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat		*20*	260.000.000,00	*DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN*
	2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	*Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Ton)*		*0.00*	*0.00*	*20*	240.000.000,00	*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	*Aparatur, Bulog dan Masyarakat*	*9*	240.000.000,00	*DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN*
	2.09.03.2.02.0004	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	*Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara (Ton)*		*0.00*	*34*	*34*	20.000.000,00	*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	*Aparatur dan Bulog*	*34*	20.000.000,00	*DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN*
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi						260.500.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			671.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Skor Pola Pangan Harapan (Konsumsi) (%)				*87.80*		*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*87.90*		*DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN*
	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal						205.500.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			616.500.000,00	
			Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Laporan)		*3*	*3*	*3*		*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur dan TPPKK, KWT, TPPKK, TPPKK, Dharma Wanita, Masyarakat*	*3*		*DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN*
	2.09.03.2.04.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun						55.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			55.000.000,00	
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun (Laporan)		*1*	*1*	*1*		*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Rumah Tangga Konsumsi*	*1*		*DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN*
3.	**2.09.04**	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**						**270.039.584,00**			**Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**	**Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat**			**465.079.168,00**	
			Peresentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)				***5***									***DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN***
	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan						75.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			75.000.000,00	
			Cakupan Informasi Daearah Rawan Pangan (%)				*100*		*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN*
	2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan						75.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			75.000.000,00	
			Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan (Dokumen)		*1*	*1*	*1*		*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN*
	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota						195.039.584,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			390.079.168,00	
			Penanganan Daerah Rawan Pangan (Lokasi)				*1*		*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*1*		*DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	*Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota (Laporan)*		*1.00*	*2*	*2.00*	195.039.584,00	*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	*Aparatur, Masyarakat*	*2.00*	390.079.168,00	*DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN*
4.	**2.09.05**	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	***Persentase Pangan Segar asal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan (%)***				***60***	**106.872.549,00**			**Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**	**Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat**			**106.872.549,00**	***DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN***
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	*Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan (%)*				*100*	106.872.549,00	*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat		*100*	106.872.549,00	*DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN*
	2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)*		*1*	*1*	*1*	25.000.000,00	*(Kabupaten Pesisir Barat, Pesisir Tengah)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	*Pelaku Usaha dan Produsen Pangan Segar Asal Tumbuhan*	*1*	25.000.000,00	*DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN*
	2.09.05.2.01.0006	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	*Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan (Dokumen)*		*1*	*1*	*1*	30.000.000,00	*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	*Pelaku Usaha dan Produsen Pangan Segar Asal Tumbuhan*	*1*	30.000.000,00	*DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN*
	2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota (Dokumen)*		*1*	*1*	*1*	31.872.549,00	*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	*Pelaku Usaha dan Produsen Pangan Segar Asal Tumbuhan*	*1*	31.872.549,00	*DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.05.2.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	*Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Dokuman)*		*0.00*	*0.00*	*1*	20.000.000,00	*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	*Aparatur, Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan*	*1*	20.000.000,00	*DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN*
	2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**						**5.854.329.407,00**							**5.814.329.407,00**	
1.	**2.10.04**	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	***Jumlah Kepala Keluarga Penerima Akses Reformasi Agraria (Ha)***				***0,5***	**92.391.704,00**			**Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar**	**Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan**			**52.391.704,00**	***DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN***
	2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan Penyelesaian Sengketa Tanah (Bulan)*				*12*	92.391.704,00	*(Sengketa Tanah Garapan di semua Wilayah Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan		*12*	52.391.704,00	*DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN*
	2.10.04.2.01.0001	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)*		*12*	*12*	*12*	40.000.000,00	*(Sengketa Tanah Garapan di semua Wilayah Kabupaten Pesisir Barat)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	*Masyarakat*	*12*	-	*DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN*
	2.10.04.2.01.0002	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Berita Acara)*		*12*	*12*	*12*	52.391.704,00	*(Sengketa Tanah Garapan di semua Wilayah Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	*Masyarakat*	*12*	52.391.704,00	*DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**2.10.05**	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**						**5.463.757.704,00**			**Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar**	**Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan**			**5.463.757.704,00**	
			Rasio Luas Tanah yang disediakan bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan kepentingan lainnya (Ha)				***11***									***DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN***
	2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						5.463.757.704,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			5.463.757.704,00	
			Cakupan Penyelesaian Kerugian (Bulan)				*12*		*((Kalurahan Pasar Kota Krui, Kec. Pesisir Tengah dan Kabupaten Pesisir Barat), KAB. PESISIR BARAT)*					*12*		*DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN*
	2.10.05.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						5.463.757.704,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			5.463.757.704,00	
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)		*12*	*12*	*12*		*((Kelurahan Pasar Kota Krui, Kec. Pesisir Tengah dan Kabupaten Pesisir Barat), KAB. PESISIR BARAT)*				*Masyarakat*	*12*		*DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN*
3.	**2.10.08**	**PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG**						**298.179.999,00**			**Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar**	**Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan**			**298.179.999,00**	
			Cakupan pemanfaatan tanah kosong (%)				***100***									***DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN***
	2.10.08.2.02	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong						298.179.999,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			298.179.999,00	
			Persentase Luas Lahan Bersertifikat (%)				*100*		*(Lokasi Tanah Aset Pemda Kabupaten Pesisir Barat yang Belum di Sertifikasi, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.10.08.2.02.0001	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	*Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi. (Laporan)*		*64.00*	*80.00*	*81.00*	298.179.999,00	*(Lokasi Tanah Aset Pemda Kabupaten Pesisir Barat yang Belum di Sertifikasi, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	*Aset Tanah Pemda*	*81*	298.179.999,00	*DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN*
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**						**6.612.324.336,00**							**6.328.910.612,00**	
1.	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)***	***92,5***			***92,50***	**3.267.704.529,00**			**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas**			**3.186.767.569,00**	***DINAS LINGKUNGAN HIDUP***
	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Presentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Tepat Waktu (Belanja ATK, Belanja Fotocopy) (%)*				*100*	12.533.600,00	*(Dinas Lingkungan Hidup, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*100*	12.533.600,00	*DINAS LINGKUNGAN HIDUP*
	2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)*		*2.00*	*2.00*	*2.00*	2.360.000,00	*(Kantor Dinas Lingkungan Hidup, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*2.00*	2.360.000,00	*DINAS LINGKUNGAN HIDUP*
	2.11.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)*		*1.00*	*1.00*	*1.00*	2.100.000,00	*(di Kantor Dinas Lingkungan Hidup, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*1.00*	2.100.000,00	*DINAS LINGKUNGAN HIDUP*
	2.11.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)*		*1.00*	*1.00*	*1.00*	639.600,00	*(di Kantor Dinas Lingkungan Hidup, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*1.00*	639.600,00	*DINAS LINGKUNGAN HIDUP*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						1.500.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.500.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(di Kantor Dinas Lingkungan Hidup, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1.00*		*DINAS LINGKUNGAN HIDUP*
	2.11.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						614.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			614.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(di Kantor Dinas Lingkungan Hidup, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1.00*		*DINAS LINGKUNGAN HIDUP*
	2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						5.320.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			5.320.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		*2.00*	*2.00*	*2.00*		*(di Kantor Dinas Lingkungan Hidup, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*2.00*		*DINAS LINGKUNGAN HIDUP*
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.845.640.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.165.856.169,00	
			Presentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Tepat Waktu (%)				*92.50*		*(Dinas lingkungan Hidup, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS LINGKUNGAN HIDUP*
			Presentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Tepat Waktu (%)				*92.50*		*(Dinas lingkungan Hidup, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS LINGKUNGAN HIDUP*
	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.839.100.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.159.316.169,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		*14.00*	*13.00*	*14.00*		*(di Kantor Dinas Lingkungan Hidup, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*14.00*		*DINAS LINGKUNGAN HIDUP*
	2.11.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						2.540.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik				2.540.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(di Kantor Dinas Lingkungan Hidup, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1.00*		*DINAS LINGKUNGAN HIDUP*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)*		*2*	*2*	*2*	3.000.000,00	*(di Kantor Dinas Lingkungan Hidup, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*2*	3.000.000,00	*DINAS LINGKUNGAN HIDUP*
	2.11.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)*		*1.00*	*1.00*	*1.00*	1.000.000,00	*(di Kantor Dinas Lingkungan Hidup, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*1.00*	1.000.000,00	*DINAS LINGKUNGAN HIDUP*
	2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						200.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			200.000.000,00	
	2.11.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)*		*0.00*	*0.00*	*1.00*	150.000.000,00	*(di Kantor Dinas Lingkungan Hidup, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur dan Masyarakat*	*1.00*	150.000.000,00	*DINAS LINGKUNGAN HIDUP*
	2.11.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)*		*2.00*	*2.00*	*2.00*	50.000.000,00	*(Luar Wilayah Pesisir Barat, Luar Wilayah)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*2.00*	50.000.000,00	*DINAS LINGKUNGAN HIDUP*
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						360.707.929,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			109.747.800,00	
	2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)*		*1.00*	*1.00*	*1.00*	1.537.000,00	*(KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*1.00*	-	*DINAS LINGKUNGAN HIDUP*
	2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						25.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		*1*	*1*	*1*		*(Kecamatan Pesisir Tengah, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*DINAS LINGKUNGAN HIDUP*
	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						61.747.800,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			61.747.800,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*12.00*	*12.00*	*12.00*		*(di Kantor Dinas Lingkungan Hidup, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12.00*		*DINAS LINGKUNGAN HIDUP*
	2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						12.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			12.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		*11.00*	*11.00*	*11.00*		*(di Kantor Dinas Lingkungan Hidup, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur dan Masyarakat*	*11.00*		*DINAS LINGKUNGAN HIDUP*
	2.11.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						11.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			11.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)		*11.00*	*11.00*	*11.00*		*(di Kantor Dinas Lingkungan Hidup, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur dan Masyarakat*	*11.00*		*DINAS LINGKUNGAN HIDUP*
	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						249.423.129,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			-	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*12.00*	*12.00*	*12.00*		*(Luar Wilayah)*				*Aparatur*	*12.00*		*DINAS LINGKUNGAN HIDUP*
	2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						100.392.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			-	
	2.11.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						50.392.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			-	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)		*33.00*	*33.00*	*33.00*		*(KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*0.00*		*DINAS LINGKUNGAN HIDUP*
	2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						50.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			-	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		*5.00*	*5.00*	*5.00*						*Aparatur*	*0.00*		*DINAS LINGKUNGAN HIDUP*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						136.301.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			86.500.000,00	
			Presentase Pemenuhan Layanan Pendukng (%)				*92.50*		*(Kecamatan Pesisir Tengah, KAB. PESISIR BARAT)*					*92.50*		*DINAS LINGKUNGAN HIDUP*
			Presentase Pemenuhan Layanan Pendukng (%)				*92.50*		*(Kecamatan Pesisir Tengah, KAB. PESISIR BARAT)*					*92.50*		*DINAS LINGKUNGAN HIDUP*
	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						12.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			12.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(di Kantor Dinas Lingkungan Hidup, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*DINAS LINGKUNGAN HIDUP*
	2.11.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						114.500.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			74.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)		*12.00*	*12.00*	*12.00*		*(di Kantor Dinas Lingkungan Hidup, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12.00*		*DINAS LINGKUNGAN HIDUP*
	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						9.801.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			-	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		*4.00*	*4.00*	*4.00*		*(KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*4.00*		*DINAS LINGKUNGAN HIDUP*
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						612.130.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			612.130.000,00	
	2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						50.400.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			50.400.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		*2*	*2*	*2*		*(di Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*2*		*DINAS LINGKUNGAN HIDUP*
	2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						419.480.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			419.480.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		*10.00*	*10.00*	*10.00*		*(di Kab.Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*10.00*		*DINAS LINGKUNGAN HIDUP*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	*Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)*		*1.00*	*1.00*	*1.00*	114.004.000,00	*(di Kantor Dinas Lingkungan Hidup, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*1.00*	114.004.000,00	*DINAS LINGKUNGAN HIDUP*
	2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)*		*12.00*	*12.00*	*12.00*	18.246.000,00	*(di Kantor Dinas Lingkungan Hidup, KAB. PESISIR BARAT)*	DANA UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*0.00*	18.246.000,00	*DINAS LINGKUNGAN HIDUP*
	2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)*		*2*	*2*	*2*	10.000.000,00	*(di Kantor Dinas Lingkungan Hidup, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*2*	10.000.000,00	*DINAS LINGKUNGAN HIDUP*
2.	**2.11.02**	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	***Cakupan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup (%)***				***100***	**493.738.650,00**			**Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim**	**Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas**			**493.738.650,00**	***DINAS LINGKUNGAN HIDUP***
	2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	*Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pengembangan Kabupaten/Kota (%)*				*92.50*	93.738.650,00	*(Seluruh Kecamatan Di Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*		Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan		*92.50*	93.738.650,00	*DINAS LINGKUNGAN HIDUP*
	2.11.02.2.01.0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	*jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi (Dokuman)*		*0.00*	*1.00*	*1.00*	93.738.650,00	*(di Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	*Aparatur dan Masyarakat*	*1.00*	93.738.650,00	*DINAS LINGKUNGAN HIDUP*
	2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota						400.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			400.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.02.2.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	*Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)*		*1.00*	*1.00*	*1.00*	200.000.000,00	*(seluruh Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	*Aparatur dan Masyarakat*	*1.00*	200.000.000,00	*DINAS LINGKUNGAN HIDUP*
	2.11.02.2.02.0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	*Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)*		*1.00*	*1.00*	*1.00*	200.000.000,00	*(di Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	*Aparatur dan Masyarakat*	*1.00*	200.000.000,00	*DINAS LINGKUNGAN HIDUP*
3.	**2.11.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	***indeks kualitas lingkungan hidup (Angka)***				***74,20***	**311.715.209,00**			**Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim**	**Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan**			**311.715.209,00**	***DINAS LINGKUNGAN HIDUP***
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota						311.715.209,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			311.715.209,00	
	2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	*Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (Dokumen)*		*1.00*	*1.00*	*1.00*	253.416.209,00	*(Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	*Aparatur, Masyarakat dan Pelaku usaha dan/atau kegiatan*	*1.00*	253.416.209,00	*DINAS LINGKUNGAN HIDUP*
	2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)*		*1*	*1*	*1*	58.299.000,00	*(Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	*Aparatur, Masyarakat dan Pelaku usaha dan/atau kegiatan*	*1*	58.299.000,00	*DINAS LINGKUNGAN HIDUP*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.	**2.11.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**						**202.476.679,00**			**Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim**	**Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan**			**-**	
			Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH) Per satuan luas wilayah (%)				***5***									***DINAS LINGKUNGAN HIDUP***
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota						202.476.679,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			-	
	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)						202.476.679,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			-	
			Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kecamatan Pesisir Tengah, KAB. PESISIR BARAT)*				*di Kab, Pesisir Barat*	*1*		*DINAS LINGKUNGAN HIDUP*
5.	**2.11.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**						**125.139.419,00**			**Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim**	**Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan**			**125.139.419,00**	
			Cakupan pengendalian terhadap izin lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) dan izin ketentuan peraturan perundang-undangan yang berbasis lingkungan hidup (PUU LH) (%)				***100***									***DINAS LINGKUNGAN HIDUP***
	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						125.139.419,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			125.139.419,00	
			Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH, dan PUU LH yang diterbitkan (%)				*92.50*		*(Seluruh Kecamatan, KAB. PESISIR BARAT)*					*92.50*		*DINAS LINGKUNGAN HIDUP*
	2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH						125.139.419,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			125.139.419,00	
			Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan (Dokumen)		*0.00*	*1.00*	*1.00*		*(di Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur dan Masyarakat*	*1.00*		*DINAS LINGKUNGAN HIDUP*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6.	**2.11.07**	**PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH**	***Persentase Penetapan Hak Masyarakat Hukum Adat (%)***				***35***	**106.816.815,00**			**Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim**	**Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan**			**106.816.815,00**	***DINAS LINGKUNGAN HIDUP***
	2.11.07.2.01	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	*Presentase Ketersediaan Data dan Informasi Keberadaan MHA (%)*				*92.50*	106.816.815,00	*(Seluruh Kecamatan, KAB. PESISIR BARAT)*		Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan		*92.50*	106.816.815,00	*DINAS LINGKUNGAN HIDUP*
	2.11.07.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH (Dokumen)*		*0.00*	*1.00*	*1.00*	106.816.815,00	*(di Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	*Aparatur dan Masyarakat*	*1.00*	106.816.815,00	*DINAS LINGKUNGAN HIDUP*
7.	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	***Persenatase Cakupan Area Pelayanan Persampahan (%)***				***54,70***	**2.104.733.035,00**			**Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim**	**Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan**			**2.104.732.950,00**	***DINAS LINGKUNGAN HIDUP***
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah						2.104.733.035,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			2.104.732.950,00	
	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	*Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Kelompok)*		*1.00*	*1.00*	*1.00*	121.178.335,00	*(di Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	*Aparatur dan Masyarakat*	*1.00*	121.178.250,00	*DINAS LINGKUNGAN HIDUP*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	*jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional (Ton)*		*3297.00*	*3297.00*	*3297.00*	1.983.554.700,00	*(di Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	*Aparatur dan Masyarakat*	*3297.00*	1.983.554.700,00	*DINAS LINGKUNGAN HIDUP*
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**						**5.142.916.875,00**							**5.921.208.562,00**	
1.	**2.12.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)***	***92,5***			***92,50***	**4.507.625.600,00**				**Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas**			**5.222.388.160,00**	***DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL***
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu (%)*				*100*	705.995.000,00	*(KABUPATEN PESISIR BARAT, KAB. PESISIR BARAT)*			Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*100*	776.594.500,00	*DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL*
	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)*		*2*	*2*	*2*	4.800.000,00	*(Pasar Mulya Timur 01 Kelurahan Pasar Krui, Pesisir Tengah)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*aparatur*	*2*	5.280.000,00	*DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL*
	2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)*		*2*	*2*	*2*	2.000.000,00	*(Pasar Mulya Timur 01 Kelurahan Pasar Krui, Pesisir Tengah)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*aparatur*	*2*	2.200.000,00	*DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL*
	2.12.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)*		*1.00*	*1.00*	*1.00*	699.195.000,00	*(SELURUH KECAMATAN DAN PEKON/KELURAHAN DI KABUPATEN PESISIR BARAT, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*aparatur*	*1.00*	769.114.500,00	*DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL*
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.034.306.400,00				Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.237.737.040,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu (%)				*100*		*(KABUPATEN PESISIR BARAT, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL*
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2.028.806.400,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.231.687.040,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		*15*	*15*	*15*		*(Pasar Mulya Timur 01 Kelurahan Pasar Krui, Pesisir Tengah)*				*aparatur*	*15*		*DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL*
	2.12.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						2.500.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.750.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		*1*	*1*	*1*		*(Pasar Mulya Timur 01 Kelurahan Pasar Krui, Pesisir Tengah)*				*aparatur*	*1*		*DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL*
	2.12.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						2.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.200.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		*4*	*4*	*4*		*(Pasar Mulya Timur 01 Kelurahan Pasar Krui, Pesisir Tengah)*				*aparatur*	*4*		*DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL*
	2.12.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						1.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.100.000,00	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)		*2*	*2*	*2*		*(Pasar Mulya Timur 01 Kelurahan Pasar Krui, Pesisir Tengah)*				*aparatur*	*2*		*DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL*
	2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						391.933.000,00				Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			431.126.300,00	
			Persentase aparatur yang berkinerja baik (%)				*100*		*(LUAR WILAYAH SERTA DALAM KABUPATEN PESISIR BARAT, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL*
	2.12.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						96.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					105.600.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)		*0.00*	*0.00*	*80*		*(KABUPATEN PESISIR BARAT, KAB. PESISIR BARAT)*				*aparatur*	*100*		*DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL*
	2.12.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						60.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					66.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)		*0.00*	*0.00*	*16*		*(luar wilayah kabupaten pesisir barat, Luar Wilayah)*				*aparatur*	*16*		*DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)*		*59*	*0*	*134*	235.933.000,00	*(kabupaten pesisir barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*aparatur*	*134*	259.526.300,00	*DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL*
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja (%)*				*100*	339.045.000,00	*(KABUPATEN PESISIR BARAT, KAB. PESISIR BARAT)*			Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*100*	636.949.500,00	*DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL*
	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)*		*12.00*	*12.00*	*12.00*	3.745.000,00	*(KANTOR DISDUKCAPIL PASAR MULYA TIMUR 01 KELURAHAN PASAR KRUI KECAMATAN PESISIR TENGAH, Pesisir Tengah)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*aparatur*	*12.00*	4.119.500,00	*DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL*
	2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)*		*1*	*1*	*1*	25.000.000,00	*(KABUPATEN PESISIR BARAT, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*aparatur*	*1*	27.500.000,00	*DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL*
	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)*		*12.00*	*12.00*	*12.00*	47.300.000,00	*(kabupaten pesisir barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*aparatur*	*12.00*	52.030.000,00	*DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL*
	2.12.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)*		*10*	*10*	*10*	12.000.000,00	*(KANTOR DISDUKCAPIL PASAR MULYA TIMUR 01 KELURAHAN PASAR KRU KABUPATEN PESISIR BARAT, Pesisir Tengah)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*aparatur*	*10*	13.200.000,00	*DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL*
	2.12.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)*		*11*	*11*	*11*	11.000.000,00	*(KABUPATEN PESISIR BARAT, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*aparatur*	*11*	12.100.000,00	*DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL*
	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						240.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					528.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*12.00*	*12.00*	*12.00*		*(KABUPATEN PESISIR BARAT DAN LUAR WILAYAH KABUPATEN PESISIR BARAT, KAB. PESISIR BARAT)*				*aparatur*	*12.00*		*DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL*
	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						600.200.000,00				Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			660.220.000,00	
			Persentase pemenuhan Layanan Pendukung (%)				*100*		*(KABUPATEN PESISIR BARAT, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL*
	2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						600.200.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					660.220.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		*0.00*	*7.00*	*10*		*(KANTOR DISDUKCAPIL PASAR MULYA TIMUR 01 KELURAHAN PASAR KRUI, Pesisir Tengah)*				*aparatur*	*11*		*DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL*
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						229.966.200,00				Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			252.962.820,00	
			Persentase pemenuhan Layanan Pendukung (%)				*100*		*(KABUPATEN PESISIR BARAT, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL*
	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						94.966.200,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					104.462.820,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(KANTOR DISDUKCAPIL PASAR MULYA TIMUR 01 KELURAHAN PASAR KRUI, Pesisir Tengah)*				*aparatur*	*12*		*DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL*
	2.12.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						129.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					141.900.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(KANTOR DISDUKCAPIL PASAR MULYA TIMUR 01 KELURAHAN PASAR KRUI, Pesisir Tengah)*				*aparatur*	*12*		*DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL*
	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						6.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					6.600.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(KANTOR DISDUKCAPIL PASAR MULYA TIMUR 01 KELURAHAN PASAR KRUI, Pesisir Tengah)*				*aparatur*	*12*		*DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL*
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						206.180.000,00				Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			226.798.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase Barang Milik Daerah yang dalam kondisi baik (%)				*100*		*(KABUPATEN PESISIR BARAT, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL*
	2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						79.800.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					87.780.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		*2*	*2*	*2*		*(kantor disdukcapil pasar mulya timur 01 kelurahan pasar krui, Pesisir Tengah)*				*aparatur*	*2*		*DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL*
	2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						62.900.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					69.190.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		*2*	*2*	*2*		*(KANTOR DISDUKCAPIL PASAR MULYA TIMUR 01 KELURAHAN PASAR KRUI, Pesisir Tengah)*				*aparatur*	*2*		*DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL*
	2.12.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						63.480.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					69.828.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*12*	*12*	*12*		*(KANTOR DISDUKCAPIL PASAR MULYA TIMUR 01 KELURAHAN PASAR KRUI, Pesisir Tengah)*				*aparatur*	*12*		*DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL*
2.	**2.12.02**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**						**335.363.433,00**				**Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat**			**368.899.776,00**	
			Cakupan Penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan (%)				***100***									***DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL***
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk						59.877.433,00				Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat			65.865.176,00	
			Presentase Pelayanan Pendaftaran Penduduk (%)				*100*		*(kabupaten pesisir barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL*
	2.12.02.2.01.0005	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan						59.877.433,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					65.865.176,00	
			Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan (Dokumen)		*1.00*	*1.00*	*169945.00*		*(KABUPATEN PESISIR BARAT, KAB. PESISIR BARAT)*				*aparatur*	*169945.00*		*DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL*
	2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk						166.990.000,00				Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat			183.689.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase Penataan Pendaftaran Penduduk (%)				*100*		*(kabupaten pesisir barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL*
	2.12.02.2.02.0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan						166.990.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					183.689.000,00	
			Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia (Dokumen)		*1*	*1*	*1*		*(KANTOR DISDUKCAPIL PASAR MULYA TIMUR 01 KELURAHAN PASAR KRUI, Pesisir Tengah)*				*Masyarakat*	*1*		*DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL*
	2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk						108.496.000,00				Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat			119.345.600,00	
			Terselenggaranya Pendaftaran Penduduk (%)				*100*		*(KABUPATEN PESISIR BARAT, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL*
	2.12.02.2.03.0002	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk						55.600.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					61.160.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk (Dokumen)		*1*	*1*	*169945*		*(kantor disdukcapil pasar mulya timur 01 kelurahan pasar krui, Pesisir Tengah)*				*masyarakat*	*169945*		*DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL*
	2.12.02.2.03.0005	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk						52.896.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					58.185.600,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk (Laporan)		*1*	*1*	*1*		*(kabupaten pesisir barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*aparatur*	*1*		*DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL*
3.	**2.12.03**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**						**108.507.804,00**				**Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat**			**119.358.584,00**	
			Cakupan Penertiban Angka Pencatatan Sipil (%)				***100***									***DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL***
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil						53.014.804,00				Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat			58.316.284,00	
			Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil (%)				*100*		*(KABUPATEN PESISIR BARAT, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL*
	2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting						53.014.804,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					58.316.284,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting (Dokumen)		*1.00*	*1.00*	*169945.00*		*(kabupaten pesisir barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*masyarakat*	*169945.00*		*DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL*
	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	*Terselenggaranya Pencatatan Sipil (%)*				*100*	55.493.000,00	*(KABUPATEN PESISIR BARAT, KAB. PESISIR BARAT)*			Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat		*100*	61.042.300,00	*DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL*
	2.12.03.2.02.0006	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil (Laporan)*		*1*	*1*	*12*	55.493.000,00	*(KABUPATEN PESISIR BARAT, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*Masyarakat*	*12*	61.042.300,00	*DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL*
4.	**2.12.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	***Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan (%)***				***100***	**92.897.209,00**				**Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat**			**102.186.930,00**	***DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL***
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	*Terselenggaranya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (%)*				*100*	92.897.209,00	*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*			Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat		*100*	102.186.930,00	*DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL*
	2.12.04.2.03.0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	*Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)*		*1.00*	*1.00*	*1.00*	49.189.209,00	*(KABUPATEN PESISIR BARAT, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*aparatur*	*1.00*	54.108.130,00	*DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL*
	2.12.04.2.03.0008	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	*Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan (Dokumen)*		*1*	*1*	*1*	43.708.000,00	*(KABUPATEN PESISI BARAT, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*aparatur*	*1*	48.078.800,00	*DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL*
5.	**2.12.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	***Persentase Data Kependudukan Skala Kabupaten dalam 1 tahun (%)***				***100***	**98.522.829,00**				**Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat**			**108.375.112,00**	***DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL***

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	*Tersedianya Profil Kependudukan (%)*				*100*	98.522.829,00	*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*			Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat		*100*	108.375.112,00	*DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL*
	2.12.05.2.01.0001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	*Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota (Dokumen)*		*75.00*	*75.00*	*75.00*	54.385.329,00	*(KABUPATEN PESISIR BARAT, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*aparatur*	*75.00*	59.823.862,00	*DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL*
	2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	*Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun (Dokumen)*		*50*	*50*	*50*	44.137.500,00	*(KABUPATEN PESISIR BARAT, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*aparatur*	*50*	48.551.250,00	*DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL*
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**						**8.139.472.190,00**							**9.516.271.433,00**	
1.	**2.13.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)***	***92,5***			***92,50***	**2.263.797.064,00**			**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas**			**2.988.596.307,00**	***DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON***
	2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu (%)*				*100*	7.744.000,00	*(Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*100*	1.694.000,00	*DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON*
	2.13.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)*		*1.00*	*1.00*	*1.00*	1.694.000,00	*(Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*1.00*	1.694.000,00	*DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON*
	2.13.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						6.050.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					-	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan pekon, KAB. PESISIR BARAT)*					*1.00*		*DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON*
	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.667.380.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.308.100.047,00	
			presentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu (%)				*100*		*(Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON*
	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.661.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.301.445.047,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		*14.00*	*14.00*	*14.00*		*(Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*14.00*		*DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON*
	2.13.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						2.750.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik				3.025.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1.00*		*DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON*
	2.13.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						2.420.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.420.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		*2.00*	*2.00*	*2.00*		*(Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pekon, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*2.00*		*DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON*
	2.13.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						1.210.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.210.000,00	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1.00*		*DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON*
	2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						20.000.000,00							20.000.000,00	
			presentase aparatur yang berkinerja baik (%)				*100*		*(dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON*
	2.13.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						20.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)		*2.00*	*0.00*	*4.00*		*(Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pekon, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*4.00*		*DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON*
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja (%)*				*100*	299.779.760,00	*(dinas pemberdayaan Masyarakat dan Pekon, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*100*	343.889.760,00	*DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON*
	2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)*		*12.00*	*12.00*	*12.00*	3.939.760,00	*(dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*12.00*	3.939.760,00	*DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON*
	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)*		*0.00*	*1.00*	*1.00*	25.000.000,00	*(dinas pemberdayaan masyarakat dan pekon, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*1.00*	30.250.000,00	*DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON*
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)*		*12.00*	*12.00*	*12.00*	30.390.000,00	*(dinas pemberdayaan masyarakat dan pekon, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*12.00*	39.390.000,00	*DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON*
	2.13.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)*		*10.00*	*10.00*	*10.00*	15.000.000,00	*(Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*aparatur*	*10.00*	15.000.000,00	*DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON*
	2.13.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)*		*11.00*	*11.00*	*11.00*	13.200.000,00	*(dinas pemberdayaan masyarakat dan pekon, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*aparatur*	*11.00*	13.310.000,00	*DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)*		*12.00*	*12.00*	*12.00*	212.250.000,00	*(dinas pemberdayaan masyarakat dan pekon, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*aparatur*	*12.00*	242.000.000,00	*DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON*
	2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja (%)*				*100*	36.000.000,00	*(Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*100*	72.000.000,00	*DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON*
	2.13.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)*		*6.00*	*2.00*	*3.00*	36.000.000,00	*(dinas pemberdayaan masyarakat dan pekon, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*aparatur*	*4.00*	72.000.000,00	*DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON*
	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemenuhan Layanan Pendukung (%)*				*100*	154.534.804,00	*(Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*100*	153.554.000,00	*DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON*
	2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)*		*12.00*	*12.00*	*12.00*	39.204.000,00	*(dinas pemberdayaan masyarakat dan pekon, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*aparatur*	*12.00*	39.204.000,00	*DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON*
	2.13.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)*		*12.00*	*12.00*	*12.00*	105.000.000,00	*(dinas pemberdayaan masyarakat dan pekon, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*aparatur*	*12.00*	105.000.000,00	*DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON*
	2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						10.330.804,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			9.350.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		*12.00*	*12.00*	*12.00*		*(dinas pemberdayaan masyarakat dan pekon, KAB. PESISIR BARAT)*				*aparatur*	*12.00*		*DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON*
	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah yang dalam kondisi baik (%)*				*100*	78.358.500,00	*(Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*100*	89.358.500,00	*DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON*
	2.13.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)*		*2.00*	*2.00*	*2.00*	67.329.500,00	*(dinas pemberdayaan masyarakat dan pekon, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*aparatur*	*2.00*	71.329.500,00	*DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON*
	2.13.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)*		*12.00*	*12.00*	*12.00*	11.029.000,00	*(dinas pemberdayaan masyarakat dan pekon, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*aparatur*	*12.00*	18.029.000,00	*DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON*
2.	**2.13.02**	**PROGRAM PENATAAN DESA**	***Jumlah Desa berkembang (%)***				***100***	**1.302.601.300,00**			**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas**			**1.302.601.300,00**	***DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON***
	2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	*jumlah desa berkembang (%)*				*92.50*	1.302.601.300,00	*(Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*92.50*	1.302.601.300,00	*DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON*
	2.13.02.2.01.0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	*Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi (Unit)*		*1*	*1*	*1.00*	1.302.601.300,00	*(dinas pemberdayaan ,masyarakat dan pekon, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Masyarakat*	*1.00*	1.302.601.300,00	*DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	**2.13.04**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	***cangkupan pekon tertib administrasi (Persentase)***				***100%***	**1.750.000.000,00**			**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas**			**2.402.000.000,00**	***DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON***
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	*Cangkupan Pekon Tertib Administrasi (%)*				*100*	1.750.000.000,00	*(Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*100*	2.402.000.000,00	*DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON*
	2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	*Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (Dokumen)*		*12.00*	*12.00*	*12.00*	-	*(Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Masyarakat*	*12.00*	1.182.693.480,00	*DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON*
	2.13.04.2.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*116.00*	330.500.000,00	*(dinas pemberdayaan masyarakat dan pekon, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*masyarakat*	*116.00*	180.000.000,00	*DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON*
	2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (Dokumen)*		*116.00*	*0.00*	*116.00*	300.500.000,00	*(dinas pemberdayaan Masyarkat dan pekon, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Masyarakat*	*116.00*	135.000.000,00	*DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON*
	2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa (Dokumen)*		*4.00*	*116.00*	*116.00*	356.000.000,00	*(dinas pemberdayaan masyarakat dan pekon, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*masyarakat*	*116.00*	196.000.000,00	*DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON*
	2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa						306.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			280.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa (Dokumen)		*84.00*	*0.00*	*27.00*		*(Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon, KAB. PESISIR BARAT)*				*masyarakat*	*27.00*		*DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON*
	2.13.04.2.01.0010	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa						185.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			156.306.520,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*116.00*		*(dinas pemberdayaan Masyarakat dan pekon, KAB. PESISIR BARAT)*				*Masyarakat*	*116.00*		*DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON*
	2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa						272.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			272.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*116*		*(dinas pemberdayaan masyarakat dan pekon, KAB. PESISIR BARAT)*				*Masyarakat*	*116*		*DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON*
4.	**2.13.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**						**2.823.073.826,00**			**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas**			**2.823.073.826,00**	
			Cangkupan Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat (%)				***100***									***DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON***
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota						2.823.073.826,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.823.073.826,00	
			Cangkupan Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat (%)				*92.50*		*(Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon, KAB. PESISIR BARAT)*					*92.50*		*DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON*
	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat						1.230.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.230.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)		*900.00*	*900.00*	*900.00*		*(dinas pemberdayaan masyarakat dan pekon, KAB. PESISIR BARAT)*				*masyarakat*	*900.00*		*DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)*		*0*	*0*	*12.00*	253.073.826,00	*(dinas pemberdayaan masyarakat dan pekon, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*masyarakat*	*12.00*	253.073.826,00	*DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON*
	2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (Laporan)*		*0*	*0*	*12.00*	240.000.000,00	*(dinas pemberdayaan masyarakat dan pekon, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*masyarakat*	*12.00*	240.000.000,00	*DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON*
	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Dokumen)*		*12*	*12*	*12.00*	1.100.000.000,00	*(dinas pemberdayaan masyarakat dan pekon, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Masyarakat*	*12.00*	1.100.000.000,00	*DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON*
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**						**9.306.952.620,00**							**5.506.000,00**	
1.	**2.14.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)***	***92,5***			***92.50***	**4.556.653.452,00**			**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas**			**5.506.000,00**	***DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA***
	2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu (%)*				*100*	22.824.000,00	*(krui pesisir barat, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*100*	5.506.000,00	*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)*		*2.00*	*2.00*	*2.00*	1.400.000,00	*(krui, pesisir barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*2.00*	1.400.000,00	*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
	2.14.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)*		*0.00*	*1.00*	*1.00*	4.106.000,00	*(krui pesisir barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*1.00*	4.106.000,00	*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
	2.14.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)*		*0.00*	*1.00*	*1.00*	4.106.000,00	*(krui pesisir barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*1.00*	-	*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
	2.14.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)*		*0.00*	*1.00*	*1.00*	4.106.000,00	*(krui pesisir barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*1.00*	-	*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
	2.14.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)*		*0.00*	*1.00*	*1.00*	4.106.000,00	*(krui pesisir barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*1.00*	-	*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)*		*2.00*	*2.00*	*2.00*	5.000.000,00	*(krui pesisir barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*2.00*	-	*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
	2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu (%)*				*100*	3.941.250.252,00	*(krui pesisir barat, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*100*	-	*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
	2.14.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)*		*14.00*	*13.00*	*14.00*	3.935.750.252,00	*(krui pesisir barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Pegawai*	*14.00*	-	*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
	2.14.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)*		*1.00*	*1.00*	*1.00*	2.500.000,00	*(krui pesisir barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*1.00*	-	*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
	2.14.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)*		*18.00*	*18.00*	*18.00*	2.000.000,00	*(krui pesisir barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*18.00*	-	*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)*		*1.00*	*1.00*	*1.00*	1.000.000,00	*(krui pesisir barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*1.00*	-	*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
	2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja (%)*				*100*	277.591.200,00	*(Krui Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*100*	-	*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
	2.14.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)*		*12.00*	*12.00*	*12.00*	4.225.000,00	*(krui pesisir barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*12.00*	-	*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
	2.14.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)*		*1.00*	*1.00*	*1.00*	25.000.000,00	*(krui pesisir barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*1.00*	-	*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
	2.14.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)*		*12.00*	*12.00*	*12.00*	25.366.200,00	*(KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*12.00*	-	*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)*		*12.00*	*12.00*	*12.00*	12.000.000,00	*(KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*12.00*	-	*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
	2.14.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)*		*11.00*	*11.00*	*11.00*	11.000.000,00	*(KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*11.00*	-	*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
	2.14.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)*		*12.00*	*12.00*	*12.00*	200.000.000,00	*(KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Pemerintah Daerah*	*12.00*	-	*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
	2.14.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja (%)*				*100*	15.000.000,00	*(Krui Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*100*	-	*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
	2.14.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)*		*0.00*	*21.00*	*1.00*	15.000.000,00	*(Krui Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*OPD*	*1.00*	-	*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemenuhan Layanan Pendukung (%)*				*100*	94.888.000,00	*(Krui Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*100*	-	*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
	2.14.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)*		*12.00*	*12.00*	*12.00*	19.200.000,00	*(KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*12.00*	-	*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
	2.14.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)*		*3.00*	*3.00*	*3.00*	72.000.000,00	*(Krui Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*3.00*	-	*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
	2.14.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)*		*12.00*	*12.00*	*12.00*	3.688.000,00	*(Krui Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*12.00*	-	*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
	2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah yang dalam kondisi baik (%)*				*100*	205.100.000,00	*(Krui Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*100*	-	*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)*		*28.00*	*28.00*	*28.00*	198.100.000,00	*(KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*28.00*	-	*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
	2.14.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)*		*0.00*	*0.00*	*30.00*	7.000.000,00	*(KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*30.00*	-	*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
2.	**2.14.02**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	***Laju Pertumbuhan Penduduk (%)***				***0.95***	**113.638.330,00**			**Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing**	**Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**-**	***DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA***
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	*Persentase Terbentuknya SSK di SMP, SLTA (SMP 1 Pesisir Tengah, SMP 2 Pesisir Tengah, SMK Ngambur, SMA Pesisir Selatan, SMP 18 Karya Penggawa) (%)*				*100*	25.000.000,00	*(Krui Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia		*100*	-	*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
			Persentase Terbinanya SSK di SMP/SLTA (SMA Pesisir Tengah, SMA Karya Penggawa, SMP Marang Pesisir Selatan, SMP 1 Pesisir Tengah, SMP 2 Pesisir Tengah) (%)				*100*		*(krui pesisir barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
	2.14.02.2.01.0009	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal						13.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal (Satuan Pendidikan)		*0.00*	*0.00*	*5*						*OPD*	*5*		*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
	2.14.02.2.01.0021	Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal						12.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	
			Jumlah Kerjasama Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal yang dilaksanakan (Kegiatan)		*0.00*	*0.00*	*5*		*(KAB. PESISIR BARAT)*				*OPD, Sekolah*	*5*		*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						88.638.330,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	
			Persentase Kecamatan yang mendapatkan Data Kependudukan (%)				*100*		*(Krui Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
			Persentase Rumah Data Kependudukan (%)				*100*		*(Krui Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
			Persentase yang mendapatkan data dan informasi keluarga (%)				*100*		*(Krui Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
			Persentase Kader IMP dan Faskes yang melaksanakan pemutakhiran data kependudukan pada New Siga (%)				*100*		*(Krui Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
			Persentase yang mendapatkan data dan informasi keluarga (%)				*100*		*(Krui Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.02.2.02.0002	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	*Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*11*	14.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	*11 Kecamatan*	*11*	-	*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
	2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	*Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga (Laporan)*		*0.00*	*12.00*	*11.00*	15.638.330,00	*(KAB. PESISIR BARAT)*	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB			*OPD, Peserta Kegiatan*	*11.00*	-	*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
	2.14.02.2.02.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	*Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya (Dokumen)*		*0.00*	*11.00*	*11.00*	15.000.000,00	*(KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*OPD*	*11.00*	-	*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	*Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga (Laporan)*		*0.00*	*11.00*	*11.00*	14.000.000,00	*(KAB. PESISIR BARAT)*	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB			*Kampung KB*	*11.00*	-	*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	*Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB (Dokumen)*		*11.00*	*10.00*	*11.00*	15.000.000,00	*(KAB. PESISIR BARAT)*	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB			*OPD*	*11.00*	-	*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
	2.14.02.2.02.0015	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain						15.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					-	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk (Unit)		*0.00*	*0.00*	*11*						*Peserta*	*11*		*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
3.	**2.14.03**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	***Total Fertility Rate (Angka)***				***2.17***	**4.338.479.550,00**			**Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing**	**Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**-**	***DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA***
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	*Persentase Pengetahuan Masyarakat tentang Program BANGGA KENCANA (%)*				*100*	1.627.500.000,00	*(Krui Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia		*100*	-	*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
			Persentase Percepatan Penurunan Stunting (%)				*100*		*(Krui Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
			Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat tentang Program KKBPK (%)				*100*		*(Krui Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
			Ditemukannya Sasaran dan Penyebab Kasus Stunting dan Rencana Tindak Lanjut dari Tim Pakar (%)				*100*		*(Krui Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
	2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK						240.000.000,00		DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK (Laporan)		*11.00*	*11.00*	*11.00*		*(Kabupaten pesisir barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Masyarakat*	*11.00*		*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana						481.500.000,00		DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Laporan)		*10.00*	*10.00*	*10.00*		*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Peserta Penyuluhan*	*10.00*		*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)						286.000.000,00		DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	
			Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) (Laporan)		*11.00*	*11.00*	*11.00*		*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*OPD*	*11.00*		*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang						300.000.000,00		DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	
			Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (Dokumen)		*11.00*	*11.00*	*11.00*		*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*OPD*	*11.00*		*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja						320.000.000,00		DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB					-	
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja (Organisasi)		*2.00*	*2.00*	*11.00*		*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*OPD*	*11.00*		*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)						540.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase Kader IMP yang mendapatkan pembinaan serta dana pendukung (%)				*100*		*(Krui Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)						236.000.000,00		DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	
			Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (Orang)		*118.00*	*118.00*	*118.00*		*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Kader IMP*	*118.00*		*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
	2.14.03.2.02.0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB						304.000.000,00		DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB (Organisasi)		*0.00*	*76.00*	*76.00*		*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Masyarakat*	*76.00*		*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota						1.382.979.550,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	
			Tersedianya Alat dan Obat Kontrasepsi di 12 Fasyankes (%)				*100*		*(Krui Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
			Terlayaninya Akseptor MKJP di 11 Kecamatan melalui Kegiatan Pelayanan KB dengan Alat Kontrasepsi yang tersedia (%)				*100*		*(Krui Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan KB dengan adanya VTP Kit, IUD Kit dan Implant Kit yang tersedia di 9 Fasyankes (%)				*100*		*(Krui Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat tentang Program Keluarga Berencana untuk Pelayanan KB yang berkualitas serta pencatatan dan pelaporan form F2KB dari Faskes/Klinik (%)				*100*		*(Krui Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
			Terlayaninya Akseptor di 4 Pekon Daerah Terpencil (%)				*100*		*(Krui Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya						206.890.550,00		DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia		-	
			Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)		*12.00*	*12.00*	*12.00*		*(KAB. PESISIR BARAT)*				*Tenaga Pelayanan Umum*	*12.00*		*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)						529.948.000,00		DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia		-	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Orang)		*1000.00*	*1000.00*	*1000.00*		*(KAB. PESISIR BARAT)*				*OPD, Peserta Pelayanan*	*1000.00*		*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
	2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB						246.913.000,00		DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia		-	
			Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB (Unit)		*9.00*	*9.00*	*9.00*		*(KAB. PESISIR BARAT)*				*Faskes*	*9.00*		*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya						270.000.000,00		DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia		-	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)		*11.00*	*11.00*	*11.00*		*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Bantuan Transport Peserta*	*11.00*		*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.03.2.03.0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak						129.228.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	
			Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak (Laporan)		*0.00*	*4.00*	*4.00*		*(Kec. Bangkunat (Pekon way haru, way tias), Kec. Lemong (Pedukuhan Lintik sukamulya, Pedukuhan rindu alam penengahan), KAB. PESISIR BARAT)*				*Masyarakat Daerah Terpencil Kec. Bangkunat (Pekon way haru, way tias), Kec. Lemong (Pedukuhan Lintik sukamulya, Pedukuhan rindu alam penengahan)*	*4.00*		*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB						788.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	
			Meningkatnya Pengetahuan Kader POKTAN dan POKJA di Kampung Keluarga Berkualitas dalam rangka mendukung program BANGGA KENCANA dan Percepatan Penurunan Stunting (%)				*100*		*(Krui Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
			Meningkatnya Pembangunan Lintas Sektor di Kampung Keluarga Berkualitas dalam rangka percepatan penurunan stunting dan Program BANGGA KENCANA (%)				*100*		*(Krui Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
			Meningkatnya Pembangunan Lintas Sektor di Kampung Keluarga Berkualitas dalam rangka percepatan penurunan stunting dan Program BANGGA KENCANA (%)				*100*		*(Krui Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
	2.14.03.2.04.0001	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB						434.000.000,00		DAK Non Fisik-BOKKB-BO KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB (Organisasi)		*0.00*	*28.00*	*28.00*		*(KAB. PESISIR BARAT)*				*Peserta*	*28.00*		*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
	2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB						18.000.000,00		DAK Non Fisik-BOKKB-BO KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB (Dokumen)		*0.00*	*3.00*	*3.00*		*(KAB. PESISIR BARAT)*				*Peserta*	*3.00*		*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas						336.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	
			Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kampung)		*28.00*	*0.00*	*28.00*		*(KAB. PESISIR BARAT)*				*OPD, Peserta Kegiatan*	*28.00*		*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
4.	**2.14.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**						**298.181.288,00**			**Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing**	**Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**-**	
			Indeks Pembangunan Keluarga (Angka)				***61.00***									***DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA***
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga						214.781.288,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	
			Meningkatnya Pengetahuan Kader GenRe dan BKB-HI dalam melakukan KIE dalam rangka percepatan penurunan stunting (%)				*100*		*(Krui Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
			Meningkatnya Pengetahuan Kader BKB dalam melakukan KIE dalam rangka percepatan penurunan stunting (%)				*100*		*(Krui Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
			Meningkatnya Pengetahuan Kader UPPKA dalam Pelaksanaan Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga dalam rangka percepatan penurunan stunting (%)				*100*		*(Krui Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
			Meningkatnya Kinerja Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam rangka percepatan penurunan stunting (%)				*100*		*(Krui Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Meningkatnya Sumber Daya Manusia pada Kelompok BKB dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting (%)				*100*		*(Krui Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)						40.000.000,00		DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	
			Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia (Unit)		*0.00*	*20.00*	*11.00*		*(KAB. PESISIR BARAT)*			*Kelompok BKB*	*11.00*		*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
	2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)						50.181.288,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	
			Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) (Orang)		*0.00*	*0.00*	*88*		*(Krui pesisir barat, KAB. PESISIR BARAT)*			*Kader UPPKA*	*88*		*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
	2.14.04.2.01.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)						44.200.000,00		DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB					-	
			Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan (Orang)		*130.00*	*402.00*	*402.00*		*(Krui Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*			*Tim Pendamping Keluarga*	*402.00*		*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
	2.14.04.2.01.0026	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)						40.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	
			Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan (Kelompok)		*0.00*	*0.00*	*11.00*		*(Krui Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*			*Kelompok BKB dan Tim TPPS Kabupaten*	*11.00*		*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.04.2.01.0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	*Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk (Kelompok)*		*0.00*	*0.00*	*22*	40.400.000,00	*(Krui Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	*Forum Gendre, Kader BKB-HI*	*22*	-	*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	*Persentase Pekon, Kecamatan yang mengikuti Lomba Kesra, serta Kader Perempuan yang mendapat Pembinaan P3KSS dan GSI (%)*				*100*	83.400.000,00	*(Krui Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia		*100*	-	*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
	2.14.04.2.02.0003	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	*Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Organisasi)*		*0.00*	*0.00*	*11*	40.000.000,00	*(Krui Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	*Pekon dan Kecamatan*	*11*	-	*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
	2.14.04.2.02.0004	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	*Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja (Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*11.00*	43.400.000,00	*(KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	*Kader Perempuan*	*11.00*	-	*DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA*
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**						**6.201.111.894,00**							**6.201.112.094,00**	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**2.15.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)***				***92,50***	**2.608.051.200,00**			**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas**			**2.608.051.200,00**	***DINAS PERHUBUNGAN***
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu (%)*				*100*	6.400.000,00	*(kantor dinas perhubungan, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*100*	6.400.000,00	*DINAS PERHUBUNGAN*
	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)*		*2.00*	*2.00*	*2.00*	1.400.000,00	*(kantor dinas perhubungan, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*2.00*	1.400.000,00	*DINAS PERHUBUNGAN*
	2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)*		*2.00*	*2.00*	*2.00*	5.000.000,00	*(Kantor Dinas Perhubungan, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*2.00*	5.000.000,00	*DINAS PERHUBUNGAN*
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu (%)*				*100*	2.090.391.200,00	*(Kantor Dinas Perhubungan, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*100%*	2.090.391.200,00	*DINAS PERHUBUNGAN*
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)*		*14*	*14*	*14*	2.084.891.200,00	*(kantor dinas perhubungan, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*14*	2.084.891.200,00	*DINAS PERHUBUNGAN*
	2.15.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						2.500.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		*1*	*1*	*1*		*(kantor dinas perhubungan, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*DINAS PERHUBUNGAN*
	2.15.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						2.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		*2*	*2*	*2*		*(kantor dinas perhubungan, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*2*		*DINAS PERHUBUNGAN*
	2.15.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						1.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)		*1*	*1*	*1*		*(kantor dinas perhubungan, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*DINAS PERHUBUNGAN*
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						55.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			55.000.000,00	
			Persentase Aparatur yang Berkinerja Baik (%)				*100*		*(Kantor Dinas Perhubungan, KAB. PESISIR BARAT)*					*100%*		*DINAS PERHUBUNGAN*
	2.15.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						55.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			55.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)		*6*	*6*	*6*		*(kantor dinas perhubungan, KAB. PESISIR BARAT)*				*aparatur*	*6*		*DINAS PERHUBUNGAN*
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						170.960.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			170.960.000,00	
			Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung kinerja (%)				*100*		*(Kantor Dinas Perhubungan, KAB. PESISIR BARAT)*					*100%*		*DINAS PERHUBUNGAN*
	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						3.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			3.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		*12*	*12*	*12*		*(kantor dinas perhubungan, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*DINAS PERHUBUNGAN*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)*		*1*	*1*	*1*	25.000.000,00	*(kantor dinas perhubungan, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*1*	25.000.000,00	*DINAS PERHUBUNGAN*
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)*		*12*	*12*	*12*	25.130.800,00	*(kantor dinas perhubungan, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*12*	25.130.800,00	*DINAS PERHUBUNGAN*
	2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)*		*10*	*10*	*10*	12.000.000,00	*(kantor dinas perhubungan, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*10*	12.000.000,00	*DINAS PERHUBUNGAN*
	2.15.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)*		*11*	*11*	*11*	11.000.000,00	*(kantor dinas perhubungan, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*aparatur*	*11*	11.000.000,00	*DINAS PERHUBUNGAN*
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)*		*12*	*12*	*12*	94.829.200,00	*(kantor dinas perhubungan, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*12*	94.829.200,00	*DINAS PERHUBUNGAN*
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemenuhan Layanan Pendukung (%)*				*100*	117.300.000,00	*(Kantor Dinas Perhubungan, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*100%*	117.300.000,00	*DINAS PERHUBUNGAN*
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)*		*12*	*12*	*12*	19.800.000,00	*(kantor dinas perhubungan, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*12*	19.800.000,00	*DINAS PERHUBUNGAN*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						92.500.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			92.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)		*6*	*6*	*6*		*(kantor dinas perhubungan, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*6*		*DINAS PERHUBUNGAN*
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						5.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(kantor dinas perhubungan, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*DINAS PERHUBUNGAN*
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						168.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			168.000.000,00	
			Persentase Barang Milik Daerah yang Dalam Kondisi Baik (%)				*100*		*(Kantor Dinas Perhubungan, KAB. PESISIR BARAT)*					*100%*		*DINAS PERHUBUNGAN*
	2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						163.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			163.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		*5*	*5*	*5*		*(kantor dinas perhubungan, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*5*		*DINAS PERHUBUNGAN*
	2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						5.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			5.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*1*	*1*	*1*		*(kantor dinas perhubungan, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*DINAS PERHUBUNGAN*
2.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**						**2.940.519.400,00**			**Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar**	**Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan**			**2.940.519.600,00**	
			Persentase Pelayanan Angkutan Darat (%)	***72,5***			***72,50***									***DINAS PERHUBUNGAN***
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota						993.920.000,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			993.920.000,00	
			persentase peningkatan Jumlah perlengkapan jalan (%)				*10*		*(krui, pesisir barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*10*		*DINAS PERHUBUNGAN*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	*Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)*		*20*	*20*	*20*	120.000.000,00	*(seluruh kecamatan pesisir barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	*Masyarakat*	*20*	120.000.000,00	*DINAS PERHUBUNGAN*
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	*Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit)*		*20*	*20*	*20*	873.920.000,00	*(seluruh kecamatan pesisir barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	*Masyarakat*	*20*	873.920.000,00	*DINAS PERHUBUNGAN*
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	*Persentase layanan angkutan darat (%)*				*100*	151.599.000,00	*(Kabupaten Pesisit Barat, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan		*100*	151.599.600,00	*DINAS PERHUBUNGAN*
	2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	*Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi (Laporan)*		*3*	*3*	*3*	151.599.000,00	*(seluruh kecamatan pesisir barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	*Masyarakat*	*3*	151.599.600,00	*DINAS PERHUBUNGAN*
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Transportasi Pedesaan (Unit)*				*7*	295.000.400,00	*(Seluruh Kecamatan, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan		*7*	295.000.000,00	*DINAS PERHUBUNGAN*
	2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)*		*7*	*7*	*7*	295.000.400,00	*(seluruh kecamatan pesisir barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	*Masyarakat*	*7*	295.000.000,00	*DINAS PERHUBUNGAN*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.2.16	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Penerima Bantuan Sosial Angkutan Orang (Orang)*				*1140*	1.500.000.000,00	*(Seluruh Kecamatan, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan		*1140 Orang*	1.500.000.000,00	*DINAS PERHUBUNGAN*
	2.15.02.2.16.0003	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)*		*1140*	*1140*	*1140*	1.500.000.000,00	*(seluruh kecamatan pesisir barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	*Masyarakat*	*1140*	1.500.000.000,00	*DINAS PERHUBUNGAN*
3.	**2.15.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	***Persentase Cakupan Wilayah yang terlayani Angkutan Laut (%)***				***60,00***	**652.541.294,00**			**Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar**	**Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan**			**652.541.294,00**	***DINAS PERHUBUNGAN***
	2.15.03.2.06	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	*Jumlah Angkutan Laut (Unit)*				*5*	652.541.294,00	*(Seluruh Kecamatan, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan		*5*	652.541.294,00	*DINAS PERHUBUNGAN*
	2.15.03.2.06.0004	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)*		*5*	*5*	*5*	652.541.294,00	*(seluruh kecamatan pesisir barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	*Masyarakat*	*5*	652.541.294,00	*DINAS PERHUBUNGAN*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**						**8.846.019.769,00**							**8.846.019.769,00**	
1.	**2.16.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)***	***92,5***			***92,5***	**5.002.041.300,00**			**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas**			**5.002.041.300,00**	***DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN***
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu (%)*				*92.5*	6.400.000,00	*(Kantor Diskominfotiksan Kab. Pesisir barat, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*92.5*	6.400.000,00	*DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN*
	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)*		*2.00*	*2.00*	*2.00*	1.400.000,00	*(Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*2.00*	1.400.000,00	*DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN*
	2.16.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)*		*2.00*	*2.00*	*2.00*	5.000.000,00	*(Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*2.00*	5.000.000,00	*DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN*
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu (%)*				*92.5*	1.598.901.700,00	*(Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*92.5*	1.598.901.700,00	*DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN*
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.595.705.300,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.595.705.300,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		*15.00*	*15.00*	*15.00*		*(Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*15.00*		*DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN*
	2.16.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						1.200.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.200.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		*2*	*2.00*	*2*		*(Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*2*		*DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN*
	2.16.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						1.350.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.350.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		*2.00*	*2.00*	*2.00*		*(Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*2.00*		*DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN*
	2.16.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						646.400,00		Dana Otonomi Khusus-Kabupaten/Kota pada Provinsi Papua Barat-Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			646.400,00	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)		*2.00*	*2.00*	*2.00*		*(Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*2.00*		*DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN*
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						1.796.885.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.796.885.600,00	
			Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja (%)				*92.5*		*(Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*92.5*		*DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN*
	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						67.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			67.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		*2.00*	*3.00*	*3.00*		*(Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*aparatur*	*3.00*		*DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN*
	2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						25.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1.00*		*DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN*
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						259.348.600,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			259.348.600,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*4.00*	*4.00*	*4.00*		*(Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*4.00*		*DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN*
	2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						1.212.960.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.212.960.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1.00*		*DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN*
	2.16.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						33.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			33.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)		*11*	*11*	*11*		*(Kab Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*11*		*DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN*
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						199.577.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			199.577.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*100.00*	*100.00*	*100.00*		*(Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*100.00*		*DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN*
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						198.298.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			198.298.000,00	
			Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja (%)				*92.5*		*(Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*92.5*		*DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN*
	2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						198.298.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			198.298.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		*0.00*	*34.00*	*24.00*		*(Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*24.00*		*DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN*
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemenuhan Layanan Pendukung (%)*				*92.5*	1.305.556.000,00	*(Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*92.5*	1.305.556.000,00	*DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN*
	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)*		*12.00*	*12.00*	*12.00*	1.300.000.000,00	*(Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*12.00*	1.300.000.000,00	*DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN*
	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)*		*12.00*	*12.00*	*12*	5.556.000,00	*(Kab. Pesisir Tengah, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*12*	5.556.000,00	*DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN*
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Miliki Daerah yang dalam Koindisi Baik (%)*				*92.5*	96.000.000,00	*(Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*92.5*	96.000.000,00	*DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN*
	2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)*		*2.00*	*2.00*	*2.00*	52.500.000,00	*(Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*aparatur*	*2.00*	52.500.000,00	*DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN*
	2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						37.500.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			37.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		*3.00*	*3.00*	*3.00*		*(Kab. Pesisir Barat., KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*3.00*		*DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN*
	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						6.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			6.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		*12.00*	*12.00*	*12.00*		*(Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12.00*		*DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN*
2.	**2.16.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**						**2.555.591.900,00**			**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas**			**2.555.591.900,00**	
			Persentase Peningkatan Desiminasi Informasi dan Komunikasi Publik (%)				***80***									***DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN***
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						2.555.591.900,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.555.591.900,00	
			Persentase Peningkatan Desiminasi Informasi dan Komunikasi Publik (%)				*80*		*(Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*80*		*DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN*
	2.16.02.2.01.0002	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik						122.677.500,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			122.677.500,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik (Dokumen)		*12.00*	*12.00*	*12.00*		*(Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Masyarakat*	*12.00*		*DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN*
	2.16.02.2.01.0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik						370.803.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			370.803.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik (Dokumen)		*12.00*	*12.00*	*12.00*		*(Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Masyarakat*	*12.00*		*DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN*
	2.16.02.2.01.0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik						72.800.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			72.800.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik (Dokumen)		*12.00*	*12.00*	*12.00*		*(Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Masyarakat*	*12.00*		*DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN*
	2.16.02.2.01.0006	Pelayanan Informasi Publik						730.299.400,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			730.299.400,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik (Dokumen)		*2.00*	*2.00*	*2.00*		*(Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Masyarakat*	*2.00*		*DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN*
	2.16.02.2.01.0007	Layanan Hubungan Media						1.259.012.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.259.012.000,00	
			Jumlah Layanan Hubungan Media (Layanan)		*100.00*	*100.00*	*100.00*		*(Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Masyarakat*	*100.00*		*DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN*
3.	**2.16.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**						**1.288.386.569,00**			**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas**			**1.288.386.569,00**	
			Persentase Peningkatan Layanan Informasi dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) (%)				***82,5***									***DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN***
	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						104.192.569,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			104.192.569,00	
			cakupan penyediaan informasi digital di lingkup pemerintah daerah (%)				*82.5*		*(Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*82.5*		*DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN*
	2.16.03.2.01.0001	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota						7.200.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			7.200.000,00	
			Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota (Domain)		*13.00*	*13.00*	*13.00*		*(Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Masyarakat*	*13.00*		*DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN*
	2.16.03.2.01.0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah						96.992.569,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			96.992.569,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah (Unit)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Masyarakat*	*1.00*		*DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN*
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Layanan Pemerintah Secara digital (%)*				*82.5*	1.184.194.000,00	*(Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*82.5*	1.184.194.000,00	*DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN*
	2.16.03.2.02.0001	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)*		*1*	*1*	*1*	30.000.000,00	*(Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Masyarakat*	*1*	30.000.000,00	*DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN*
	2.16.03.2.02.0003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	*Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola (Unit)*		*4.00*	*5.00*	*6.00*	258.753.500,00	*(Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Masyarakat*	*6.00*	258.753.500,00	*DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN*
	2.16.03.2.02.0006	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	*Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik (Perangkat Daerah)*		*39.00*	*39.00*	*39.00*	396.162.200,00	*(Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*masyarakat*	*39.00*	396.162.200,00	*DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN*
	2.16.03.2.02.0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	*Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan (Unit)*		*2.00*	*2.00*	*2.00*	204.000.000,00	*(Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*masyarakat*	*2.00*	204.000.000,00	*DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN*
	2.16.03.2.02.0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah						59.387.300,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			59.387.300,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah (Dokumen)		*2.00*	*2.00*	*2.00*		*(Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*2.00*		*DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN*
	2.16.03.2.02.0012	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE						235.891.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			235.891.000,00	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE (Dokumen)		*2*	*2*	*2*		*(Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*masyarakat*	*2*		*DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN*
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**						**3.731.353.336,00**							**-**	
1.	**2.17.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)***				***92,50***	**2.702.155.039,00**			**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas**			**-**	***DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN***
	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu (%)*				*100*	10.000.000,00	*(Kantor Diskopdag Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*100*	-	*DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN*
	2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)*		*2*	*2*	*2.00*	5.000.000,00	*(Kantor Diskopdag, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*0.00*	-	*DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN*
	2.17.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*2.00*	5.000.000,00	*(Kantor Diskopdag, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*0.00*	-	*DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu (%)*				*100*	1.756.316.600,00	*(Kantor Diskopdag, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*100*	-	*DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN*
	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)*		*12*	*12*	*12.00*	1.749.316.600,00	*(Kantor Diskopdag, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*12*	-	*DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN*
	2.17.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)*		*1*	*1*	*1.00*	2.500.000,00	*(Kantor Diskopdag, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*1*	-	*DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN*
	2.17.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)*		*18*	*18*	*18.00*	2.500.000,00	*(Kantor Diskopdag, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*18*	-	*DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN*
	2.17.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)*		*1*	*1*	*1.00*	2.000.000,00	*(Kantor Diskopdag, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*1*	-	*DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN*
	2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase aparatur yg berkinerja baik (%)*				*100*	50.000.000,00	*(Nasional, Luar Wilayah)*		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*100*	-	*DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN*
	2.17.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						50.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			-	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)		*12*	*12*	*12.00*		*(Nasional, Luar Wilayah)*				*Aparatur*	*12*		*DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN*
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja (%)*				*100*	423.338.439,00	*(Kantor Diskopdag, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*100*	-	*DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN*
	2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)*		*1*	*1*	*1.00*	2.000.000,00	*(Kantor Diskopdag, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*1*	-	*DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN*
	2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)*		*1*	*1*	*1.00*	25.000.000,00	*(Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*1*	-	*DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN*
	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)*		*10*	*10*	*10.00*	65.338.439,00	*(Kantor Diskopdag, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*10*	-	*DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN*
	2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)*		*10*	*10*	*20.00*	20.000.000,00	*(Kantor Diskopdag, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*20*	-	*DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN*
	2.17.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)*		*11*	*11*	*11.00*	11.000.000,00	*(Kantor Diskopdag, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*11*	-	*DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*24*	300.000.000,00	*(Luar Wilayah)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*0.00*	-	*DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN*
	2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja (%)*				*100*	45.000.000,00	*(Kantor Diskopdag, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*100*	-	*DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN*
	2.17.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)*		*6.00*	*6.00*	*6.00*	45.000.000,00	*(Kantor Diskodag, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*6.00*	-	*DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN*
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemenuhan Layanan Pendukung (%)*				*100*	99.500.000,00	*(Kantor Diskopdag, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*100*	-	*DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN*
	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)*		*12*	*12*	*12.00*	25.000.000,00	*(Kantor Diskopdag, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*12*	-	*DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN*
	2.17.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)*		*12*	*12*	*12.00*	72.000.000,00	*(Kantor Diskopdag, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*12*	-	*DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN*
	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						2.500.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			-	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		*12*	*12*	*12.00*		*(Kantor Diskopdag, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN*
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah yang dalam kondisi baik (%)*				*100*	318.000.000,00	*(Kantor Diskopdag, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*100*	-	*DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN*
	2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)*		*6*	*6*	*10.00*	168.000.000,00	*(Kantor Diskodag, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*10*	-	*DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN*
	2.17.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)*		*2*	*2*	*2.00*	150.000.000,00	*(Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*2*	-	*DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN*
2.	**2.17.03**	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	***Persentase Koperasi Aktif (%)***				***52,5***	**93.545.599,00**			**Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**	**Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat**			**-**	***DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN***
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	*Persentase Koperasi yang diawasi (%)*				*100*	93.545.599,00	*(Seluruh Kecamatan, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat		*100*	-	*DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN*
	2.17.03.2.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	*Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi (Unit Usaha)*		*30*	*30*	*30.00*	93.545.599,00	*(11 kecamatan, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	*Masyarakat*	*30*	-	*DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	**2.17.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**						**532.707.739,00**			**Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**	**Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat**			**-**	
			Persentase Pengurus Koperasi Berkompeten (%)				***55***									***DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN***
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota						532.707.739,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			-	
			Persentase Koperasi dan Pelaku UKM yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas (%)				*100*		*(Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN*
	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi						532.707.739,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			-	
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (Orang)		*100*	*100*	*100.00*		*(Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Masyarakat*	*100*		*DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN*
4.	**2.17.07**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**						**402.944.959,00**			**Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**	**Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat**			**-**	
			Kontribusi UMKM terhadap PDRB (%)				***2,08***									***DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN***
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan						402.944.959,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			-	
			Persentase Usaha Mikro dan Kecil yang Mendapatkan Kemitraan, Kemudahan dan Penguatan Kelembagaan, serta terdata di database (%)				*100*		*(Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN*
	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro						200.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			-	
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro (Unit Usaha)		*1*	*1*	*1.00*		*(Kantor Diskopdag, KAB. PESISIR BARAT)*				*Masyarakat*	*1*		*DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.07.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	*Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro (Orang)*		*50*	*50*	*50.00*	202.944.959,00	*(Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	*Masyarakat*	*50*	-	*DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN*
	2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**						**5.527.740.677,00**							**2.200.994.390,00**	
1.	**2.18.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)***	***92,5***			***92,50***	**2.803.476.742,00**			**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas**			**2.200.994.390,00**	***DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU***
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu (%)*				*100*	10.400.000,00	*(Kantor DPMPTSP, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*100*	5.400.000,00	*DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU*
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)*		*2*	*2*	*2*	5.400.000,00	*(Kantor DPMPTSP, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*2*	5.400.000,00	*DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU*
	2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)*		*2*	*2*	*2*	5.000.000,00	*(Dinas DPMPTSP, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*APARATUR*	*2*	-	*DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU*
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.994.494.900,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.195.594.390,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase Ketertiban Administrasi Keuangan (%)				*100*		*(Kantor DPMPTSP, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU*
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.988.494.900,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.187.344.390,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		*14*	*14*	*14*		*(Kantor DPMPTSP, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*14*		*DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU*
	2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						2.500.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.750.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		*1*	*1*	*1*		*(Kantor DPMPTSP, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU*
	2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						2.500.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.750.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		*18*	*18*	*18*		*(Kantor DPMPTSP, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*18*		*DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU*
	2.18.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						1.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.750.000,00	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)		*1*	*1*	*1*		*(Kantor DPMPTSP, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU*
	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						50.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			-	
			Terciptanya peningkatan SDM yang berdaya saing (%)				*100*		*(Provinsi Lampung, Luar Wilayah)*					*100*		*DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU*
	2.18.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						50.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)		*2.00*	*2.00*	*2.00*		*(sebagian wilayah indonesia, Luar Wilayah)*				*Aparatur*	*2.00*		*DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU*
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja (%)*				*100*	563.481.842,00	*(Kantor DPMPTSP, KAB. PESISIR BARAT)*			Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*100*	-	*DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU*
	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)*		*0.00*	*1*	*1*	25.000.000,00	*(KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*Masyarakat*	*1*	-	*DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU*
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)*		*12*	*12*	*12*	65.481.842,00	*(KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*Aparatur*	*12*	-	*DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU*
	2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)*		*10*	*10*	*10*	12.000.000,00	*(KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*Aparatur*	*10*	-	*DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU*
	2.18.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)*		*11*	*11*	*11*	11.000.000,00	*(KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*Aparatur dan Masyarakat*	*11*	-	*DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU*
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)*		*0.00*	*12*	*12*	450.000.000,00	*(KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*Aparatur*	*12*	-	*DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU*
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja (%)*				*100*	45.000.000,00	*(Kantor DPMPTSP, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*	-	*DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)*		*0.00*	*2*	*3*	45.000.000,00	*(KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*Aparatur*	*3*	-	*DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU*
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase permenuhan layanan pendukung (%)*				*100*	62.500.000,00	*(Kantor DPMPTSP, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*	-	*DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU*
	2.18.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)*		*0.00*	*3*	*2*	60.000.000,00	*(KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*Aparatur*	*2*	-	*DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU*
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)*		*0.00*	*12*	*12*	2.500.000,00	*(KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*Aparatur*	*12*	-	*DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU*
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik (%)*				*100*	77.600.000,00	*(Kantor DPMPTSP, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*	-	*DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU*
	2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)*		*0.00*	*4*	*4*	75.000.000,00	*(KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*Aparatur*	*4*	-	*DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU*
	2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)*		*0.00*	*4*	*4*	2.600.000,00	*(KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*Aparatur*	*4*	-	*DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU*
2.	**2.18.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**						**344.409.399,00**				**Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat**			**-**	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah investor berskala nasional baik PMDN maupun PMA (Perusahaan/UKM/IKM)				***750***									***DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU***
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)*				*1*	150.000.000,00	*(KAB. PESISIR BARAT)*					*1*	-	*DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU*
	2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	*Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*1*	150.000.000,00	*(KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*Masyarakat*	*0.00*	-	*DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU*
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Peta Potensi Investasi (Peta)*				*1*	194.409.399,00	*(KAB. PESISIR BARAT)*					*1*	-	*DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU*
	2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*1*	194.409.399,00	*(Kantor DPMPTSP, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*Masyarakat*	*0.00*	-	*DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU*
3.	**2.18.03**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	***Pertumbuhan Nilai Investasi PMA (%)***				***6,05***	**742.684.517,00**				**Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat**			**-**	***DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU***
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Peningkatan Persentase Nilai Investasi (%)*				*10*	742.684.517,00	*(Sebagian wilayah indonesia, Luar Wilayah)*			Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat		*10*	-	*DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU*
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota						742.684.517,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					-	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)		*0.00*	*2*	*2*		*(sebagian wilayah indonesia, Luar Wilayah)*				*Masyarakat*	*2*		*DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU*
4.	**2.18.04**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	***Pertumbuhan Nilai Investasi PMDN (%)***				***16,99***	**635.250.009,00**				**Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat**			**-**	***DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU***
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	*Rasio izin yang diterbitkan (%)*				*80*	635.250.009,00	*(Kantor DPMPTSP, KAB. PESISIR BARAT)*			Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat		*80*	-	*DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU*
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	*Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)*		*0.00*	*600*	*600*	505.078.500,00	*(KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*Masyarakat*	*600*	-	*DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU*
	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	*Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)*		*0.00*	*10*	*10*	130.171.509,00	*(KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*Masyarakat*	*10*	-	*DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU*
5.	**2.18.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	***Rasio Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha terhadap Ketentuan Perizinan (%)***				***80***	**677.916.651,00**				**Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat**			**-**	***DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU***
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah laporan kegiatan (Laporan)*				*3*	677.916.651,00	*(seluruh wilayah Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*3*	-	*DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	*Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha.)*		*0.00*	*1.00*	*12.00*	147.916.651,00	*(KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*Masyarakat*	*12.00*	-	*DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU*
	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	*Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)*		*0.00*	*1*	*189*	350.000.000,00	*(KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*Masyarakat*	*189*	-	*DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU*
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	*Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha)*		*0.00*	*1*	*12*	180.000.000,00	*(KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*Masyarakat*	*12*	-	*DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU*
6.	**2.18.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	***Jumlah Data Laporan Perizinan dan Non Perizinan (Laporan)***				***5***	**324.003.359,00**				**Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat**			**-**	***DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU***
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan (Dokumen)*				*5*	324.003.359,00	*(kantor DPMPTSP, KAB. PESISIR BARAT)*					*5*	-	*DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU*
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	*Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)*		*0*	*0*		324.003.359,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*Masyarakat*		-	*DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU*
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**						**6.503.726.404,00**							**6.403.726.404,00**	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**2.19.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.343.684.086,00**			**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas**			**2.343.684.086,00**	
			Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	***92,5***			***92,50***									***DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA***
	2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						6.400.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			6.400.000,00	
			Persentase Dokumen Perencanaan, Pengganggaran,dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu (%)				*100*		*(DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA*
			Persentase Dokumen Perencanaan,Penganggaran,dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu (%)				*100*		*(Dinas Pemuda dan Olahraga, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA*
	2.19.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						1.400.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.400.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)		*2*	*2*	*2*		*(DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA, KAB. PESISIR BARAT)*				*aparatur*	*2*		*DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA*
	2.19.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						5.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		*2*	*2*	*2*		*(Dinas Pemuda dan Olahraga, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*2*		*DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA*
	2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.838.671.086,00				Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.838.671.086,00	
			Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu (%)				*100*		*(Dinas Pemuda dan Olahraga, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA*
	2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.822.038.886,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.822.038.886,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		*14*	*14*	*14*		*(DInas Pemuda dan Olahraga, KAB. PESISIR BARAT)*				*aparatur*	*14*		*DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA*
	2.19.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						11.132.200,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					11.132.200,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)		*12*	*12*	*12*		*(Dinas Pemuda dan Olahraga, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA*
	2.19.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						2.500.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.500.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		*1*	*1*	*1*		*(Dinas Pemuda dan Olahraga, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA*
	2.19.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						2.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		*18*	*18*	*18*		*(Dinas Pemuda dan Olahraga, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*18*		*DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA*
	2.19.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						1.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)		*1*	*1*	*1*		*(Dinas Pemuda dan Olahraga, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA*
	2.19.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						13.500.000,00							13.500.000,00	
			Persentase Aparatur yang berkinerja baik (%)				*100*		*(Dinas Pemuda dan Olahraga, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA*
	2.19.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						13.500.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					13.500.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)		*2*	*2*	*2*		*(Dinas Pemuda dan Olahraga, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*2*		*DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA*
	2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						219.143.000,00							219.143.000,00	
			Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja (%)				*100*		*(Dinas Pemuda dan Olahraga, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA*
	2.19.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						5.004.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					5.004.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		*50*	*50*	*50*		*(Dinas Pemuda dan Olahraga, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*50*		*DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA*
	2.19.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						20.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					20.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		*2*	*2*	*2*		*(Dinas Pemuda dan Olahraga, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*2*		*DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA*
	2.19.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						25.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		*1*	*1*	*1*		*(Dinas Pemuda dan Olahraga, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA*
	2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						14.451.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					14.451.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*12*	*12*	*12*		*(Dinas Pemuda dan Olahraga, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA*
	2.19.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						12.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					12.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		*12*	*12*	*12*		*(Dinas Pemuda dan Olahraga, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA*
	2.19.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						12.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					12.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)		*11*	*11*	*11*		*(Dinas Pemuda dan Olahraga, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*11*		*DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA*
	2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						130.688.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					130.688.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(Dinas Pemuda dan Olahraga, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA*
	2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						144.748.000,00							144.748.000,00	
			Persentase Pemenuhan layanan pendukung (%)				*100*		*(Dinas Pemuda dan Olahraga, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA*
	2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						42.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					42.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(Dinas Pemuda dan Olahraga, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA*
	2.19.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						97.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					97.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)		*6*	*6*	*6*		*(Dinas Pemuda dan Olahraga, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*6*		*DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA*
	2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						5.748.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					5.748.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(Dinas Pemuda dan Olahraga, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA*
	2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						121.222.000,00							121.222.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase Barang Milik Daerah yang dalam kondisi baik (%)				*100*		*(Dinas Pemuda dan Olahraga, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA*
	2.19.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						68.672.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					68.672.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		*3*	*3*	*3*		*(Dinas Pemuda dan Olahraga, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*3*		*DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA*
	2.19.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						13.950.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					13.950.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		*2*	*2*	*2*		*(Dinas Pemuda dan Olahraga, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*2*		*DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA*
	2.19.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						27.600.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					27.600.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		*12*	*12*	*12*		*(Dinas Pemuda dan Olahraga, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA*
	2.19.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						5.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					5.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*12*	*12*	*12*		*(Dinas Pemuda dan Olahraga, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA*
	2.19.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						6.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					6.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*12*	*12*	*12*		*(DInas Pemuda dan Olahraga, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA*
2.	**2.19.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**						**2.167.564.804,00**				**Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**2.167.564.804,00**	
			Cakupan Pemenuhan Pengembngan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan (%)				***55,00***									***DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA***
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD (%)	***55***			***100***									***DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA***
	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota						650.000.000,00							650.000.000,00	
			Rata - rata capaian kinerja bidang pemerintahan dan Pembangunan Manusia (%)				*70*		*(DInas Pemuda dan Olahraga, KAB. PESISIR BARAT)*					*70*		*DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA*
	2.19.02.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor						151.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					151.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya (Orang)		*2*	*2*	*2*		*(Dinas Pemuda dan Olahraga, KAB. PESISIR BARAT)*				*Masyarakat*	*2*		*DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA*
	2.19.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula						117.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					117.000.000,00	
			Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya (Orang)		*10*	*10*	*10*		*(Dinas Pemuda dan Olahraga, KAB. PESISIR BARAT)*				*Masyarakat*	*10*		*DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA*
	2.19.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota						382.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					382.000.000,00	
			Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya (Orang)		*20*	*20*	*20*		*(Dinas Pemuda dan Olahraga, KAB. PESISIR BARAT)*				*Masyarakat*	*20*		*DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA*
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						1.517.564.804,00							1.517.564.804,00	
			Rata- rata capaian kinerja bidang pemerintahan dan Pembangunan manusia (%)				*70*		*(Dinas Pemuda dan Olahraga, KAB. PESISIR BARAT)*					*70*		*DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA*
	2.19.02.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota						1.517.564.804,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.517.564.804,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan (Dokumen)		*31*	*31*	*31*		*(Dinas Pemuda dan Olahraga, KAB. PESISIR BARAT)*				*Masyarakat*	*31*		*DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA*
3.	**2.19.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**						**1.992.477.514,00**				**Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**1.892.477.514,00**	
			Cakupan Pemenuhan Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolaragaan (%)				***50,00***									***DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA***
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						100.000.000,00							-	
			Persentase penyediaan sarana dan prasarana olahraga (%)				*100*		*(Dinas Pemuda dan Olahraga, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA*
	2.19.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota						100.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					-	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan (Unit)		*0*	*0*							*Masyarakat*			*DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA*
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						161.112.011,00							161.112.011,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase lomba/kejuaraan olahraga yang di laksanakan (%)				*100*		*(Dinas Pemuda dan Olahraga, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA*
	2.19.03.2.02.0002	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)*		*2*	*2*	*2*	161.112.011,00	*(Dinas Pemuda dan Olahraga, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*Masyarakat*	*2*	161.112.011,00	*DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA*
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	*Persentase pelaksanaan kegiatan kejuaraan/perlombaan olahraga diluar daerah (%)*				*80*	154.285.954,00	*(Dinas Pemuda dan Olahraga, KAB. PESISIR BARAT)*					*80*	154.285.954,00	*DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA*
	2.19.03.2.03.0003	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	*Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan (Orang)*		*10*	*10*	*10*	154.285.954,00	*(Dinas Pemuda dan Olahraga, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*Masyarakat*	*10*	154.285.954,00	*DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA*
	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	*Persentase pelaksanaan kegiatan pembinaan dan bantuan operasional organisasi keolahragaan (%)*				*100*	1.526.696.229,00	*(Dinas Pemuda dan Olahraga, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*	1.526.696.229,00	*DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA*
	2.19.03.2.04.0002	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan (Organisasi)*		*26*	*26*	*26*	1.526.696.229,00	*(Dinas Pemuda dan Olahraga, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*masyarakat*	*26*	1.526.696.229,00	*DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA*
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	*Persentase penyelenggaraan pengembangan dan pemasarana festival dan olahraga rekreasi yang difasilitasi pemda (%)*				*80*	50.383.320,00	*(Dinas Pemuda dan Olahraga, KAB. PESISIR BARAT)*					*80*	50.383.320,00	*DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA*
	2.19.03.2.05.0001	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi (Dokumen)*		*50*	*50*	*50*	50.383.320,00	*(DInas Pemuda dan Olahraga, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*masyarakat*	*50*	50.383.320,00	*DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA*
	2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**						**112.207.375,00**							**112.207.375,00**	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**2.20.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**						**112.207.375,00**			**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas**			**112.207.375,00**	
			Data dan informasi statistik Daerah Yang Tersusun Dengan Baik (Dokumen)				***2,00***									***DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN***
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota						112.207.375,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			112.207.375,00	
			Data dan Informasi Statistik Daerah yang Tersusun dengan Baik (Dokumen)				*2*		*(Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*2*		*DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN*
	2.20.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral						52.311.719,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			52.311.719,00	
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral (Dokumen)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(kab. pesisir barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*masyarakat*	*1.00*		*DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN*
	2.20.02.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi						59.895.656,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			59.895.656,00	
			Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi (Orang)		*50*	*50*	*50*		*(kab. pesisir barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*masyarakat*	*50*		*DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN*
	2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**						**106.021.325,00**							**106.021.325,00**	
1.	**2.21.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**						**106.021.325,00**			**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas**			**106.021.325,00**	
			Persentase Pengamanan Informasi Daerah yang Terselenggara baik (%)				***100***									***DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN***
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						50.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase Layanan Keamanan Informasi Daerah (%)				*100*		*(Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN*
	2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						50.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			50.000.000,00	
			Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi (Perangkat Daerah)		*39*	*39*	*39.00*		*(kab. pesisir barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*masyarakat*	*39.00*		*DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN*
	2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota						56.021.325,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			56.021.325,00	
			Terselenggaranya Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (Bulan)				*12*		*(Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*12*		*DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN*
	2.21.02.2.02.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						56.021.325,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			56.021.325,00	
			Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi (Perangkat Daerah)		*39.00*	*39.00*	*39.00*		*(kab. pesisir barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*masyarakat*	*39.00*		*DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN*
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**438.358.847,00**							**-**	
1.	**2.22.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**						**346.443.502,00**			**Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan**	**Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat**			**-**	
			Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Keatas yang terlibat Pertujukan seni (%)				***30***									***DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN***
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota						346.443.502,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat			-	
	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan						346.443.502,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan (Objek)		*0.00*	*0.00*	*7*		*(Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Masyarakat*	*3*		*DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**2.22.05**	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	***Jumlah cagar budaya dan warisan budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi (%)***				***100***	**91.915.345,00**				**Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat**			**-**	***DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN***
	2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	*Jumlah Obje Terdaftar (Objek)*				*2*	91.915.345,00	*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*			Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat		*2*	-	*DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN*
	2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya	*Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan (Objek)*		*0.00*	*0.00*	*3*	91.915.345,00	*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*Masyarakat*	*0.00*	-	*DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN*
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**						**320.000.000,00**							**320.000.000,00**	
1.	**2.23.02**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	***Jumlah Perpustakaan Daerah yang Dikelola (Lokasi)***				***1***	**320.000.000,00**			**Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan**	**Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat**			**320.000.000,00**	***SEKRETARIAT DAERAH***
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Perpustakaan Daerah yang dikelola (Lokasi)*				*1*	125.000.000,00	*(Di Kantor Sekretariat Daerah dan Di Luar Daerah, KAB. PESISIR BARAT)*		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat		*1*	125.000.000,00	*SEKRETARIAT DAERAH*
	2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	*Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan (Perpustakaan)*		*116*	*116*	*116*	50.000.000,00	*(Di Seluruh Kecamatan Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat	*Aparatur*	*116*	50.000.000,00	*SEKRETARIAT DAERAH*
	2.23.02.2.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	*Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan (Eksemplar)*		*1*	*1*	*1*	75.000.000,00	*(Di Kantor Sekretariat Daerah, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat	*Aparatur*	*1*	75.000.000,00	*SEKRETARIAT DAERAH*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Gemar Membaca (%)*				*100*	195.000.000,00	*(seluruh kecamatan di kabupaten pesisir barat, KAB. PESISIR BARAT)*		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat		*100*	195.000.000,00	*SEKRETARIAT DAERAH*
	2.23.02.2.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	*Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan (Perpustakaan)*		*194.00*	*194.00*	*194.00*	195.000.000,00	*(Di Kantor Sekretariat Daerah, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat	*Aparatur*	*194.00*	195.000.000,00	*SEKRETARIAT DAERAH*
	2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**						**58.581.521,00**							**58.581.521,00**	
1.	**2.24.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	***Persentase Perangakat Daerah yang Mengelola Asip secara Baku (%)***				***25***	**58.581.521,00**			**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas**			**58.581.521,00**	***SEKRETARIAT DAERAH***
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	*Indeks pembangunan manusia (%)*				*100*	48.581.521,00	*(Di Kantor Sekretariat Daerah, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*100*	48.581.521,00	*SEKRETARIAT DAERAH*
	2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	*Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan (Berkas)*		*8*	*8*	*8*	28.699.549,00	*(Di Kantor Sekretariat Daerah, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*8*	28.699.549,00	*SEKRETARIAT DAERAH*
	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)*		*1*	*1*	*1*	19.881.972,00	*(Di Seluruh Kecamatan Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*0.00*	19.881.972,00	*SEKRETARIAT DAERAH*
	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	*Indeks pembangunan manusia (%)*				*100*	10.000.000,00	*(Di Kantor Sekretariat Daerah, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*100*	10.000.000,00	*SEKRETARIAT DAERAH*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	*Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN (Pengguna)*		*1*	*1*	*1*	10.000.000,00	*(Di Kantor Sekretariat Daerah, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*1*	10.000.000,00	*SEKRETARIAT DAERAH*
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**35.022.196.956,00**							**24.412.670.532,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**5.058.925.795,00**							**4.356.289.549,00**	
1.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)***	***92,5***			***92,5***	**3.205.408.358,00**				**Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas**			**3.197.249.175,00**	***DINAS PERIKANAN***
	3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)*				*2*	6.729.042,00	*(Komplek PPI Kuala Stabas, Krui, KAB. PESISIR BARAT)*					*2*	6.729.042,00	*DINAS PERIKANAN*
	3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)*		*2.00*	*2.00*	*2.00*	1.555.400,00	*(Kantor Dinas Perikanan, Pasar Kota Krui, Kec. Pesisir Tengah)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*Aparatur*	*2.00*	1.555.400,00	*DINAS PERIKANAN*
	3.25.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)*		*2.00*	*2.00*	*2.00*	5.173.642,00	*(Komplek PPI Kuala Stabas, Krui, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*Aparatur*	*3.00*	5.173.642,00	*DINAS PERIKANAN*
	3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)*				*90*	2.272.395.455,00	*(KAB. PESISIR BARAT)*					*91*	2.272.395.455,00	*DINAS PERIKANAN*
	3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)*		*15*	*15*	*15*	2.262.063.155,00	*(Jl. Komplek PPI Kuala Stabas Kec. Pesisir Tengah, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*Aparatur*	*15*	2.262.063.155,00	*DINAS PERIKANAN*
	3.25.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						2.777.500,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.777.500,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)		*1*	*1*	*1*		*(Jl. Komplek PPI Kuala Stabas Kec. Pesisir Tengah, Pasar Kota Krui, Kec. Pesisir Tengah)*				*Aparatur*	*1*		*DINAS PERIKANAN*
	3.25.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						3.666.300,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					3.666.300,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		*2*	*2*	*2.00*		*(Komplek PPI Kuala Stabas, Krui, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*2.00*		*DINAS PERIKANAN*
	3.25.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						2.222.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.222.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		*3*	*3*	*3*		*(Jl. Komplek PPI Kuala Stabas Kec. Pesisir Tengah, Pasar Kota Krui, Kec. Pesisir Tengah)*				*Aparatur*	*3*		*DINAS PERIKANAN*
	3.25.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						1.666.500,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.666.500,00	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)		*2*	*2*	*2.00*		*(Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*2*		*DINAS PERIKANAN*
	3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						58.139.943,00							58.139.943,00	
			Persentase Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)				*90*		*(KAB. PESISIR BARAT)*					*91*		*DINAS PERIKANAN*
	3.25.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						58.139.943,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					58.139.943,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)		*2*	*2*	*2.00*		*(Jl. Komplek PPI Kuala Stabas Kec. Pesisir Tengah, Pasar Kota Krui, Kec. Pesisir Tengah)*				*Aparatur*	*3*		*DINAS PERIKANAN*
	3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						353.982.094,00							345.822.911,00	
			Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)				*90*		*(KAB. PESISIR BARAT)*					*91*		*DINAS PERIKANAN*
	3.25.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						4.421.780,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					4.421.780,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		*12.00*	*12.00*	*12.00*		*(Jl. Komplek PPI Kuala Stabas Kec. Pesisir Tengah, Pasar Kota Krui, Kec. Pesisir Tengah)*				*Aparatur*	*12*		*DINAS PERIKANAN*
	3.25.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						27.775.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					27.775.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		*12.00*	*12.00*	*12.00*		*(Jl. Komplek PPI Kuala Stabas Kec. Pesisir Tengah, Pasar Kota Krui, Kec. Pesisir Tengah)*				*Aparatur*	*12*		*DINAS PERIKANAN*
	3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						35.166.404,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					35.166.404,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*12.00*	*12.00*	*12.00*		*(Jl. Komplek PPI Kuala Stabas Kec. Pesisir Tengah, Pasar Kota Krui, Kec. Pesisir Tengah)*				*Aparatur*	*12*		*DINAS PERIKANAN*
	3.25.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						12.239.988,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					12.239.988,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		*12.00*	*12.00*	*12.00*		*(Jl. Komplek PPI Kuala Stabas Kec. Pesisir Tengah, Pasar Kota Krui, Kec. Pesisir Tengah)*				*Aparatur*	*12*		*DINAS PERIKANAN*
	3.25.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						11.219.989,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					11.219.989,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)		*11.00*	*11.00*	*11.00*		*(Jl. Komplek PPI Kuala Stabas Kec. Pesisir Tengah, Pasar Kota Krui, Kec. Pesisir Tengah)*				*Aparatur*	*11*		*DINAS PERIKANAN*
	3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						263.158.933,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					254.999.750,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*12.00*	*12.00*	*12.00*		*(Jl. Komplek PPI Kuala Stabas Kec. Pesisir Tengah, Pasar Kota Krui, Kec. Pesisir Tengah)*				*Aparatur*	*12*		*DINAS PERIKANAN*
	3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						74.783.603,00							74.783.603,00	
			Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)				*90*		*(KAB. PESISIR BARAT)*					*91*		*DINAS PERIKANAN*
	3.25.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						41.819.959,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					41.819.959,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)		*3*	*3*	*3*		*(Jl. Komplek PPI Kuala Stabas, Pasar Kota Krui, Kec. Pesisir Tengah)*				*Aparatur*	*3*		*DINAS PERIKANAN*
	3.25.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						32.963.644,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					32.963.644,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)		*5*	*5*	*5*		*(Jl. Komplek PPI Kuala Stabas, Pasar Kota Krui, Kec. Pesisir Tengah)*				*Aparatur*	*5*		*DINAS PERIKANAN*
	3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						77.854.985,00							77.854.985,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)				*90*		*(KAB. PESISIR BARAT)*					*91*		*DINAS PERIKANAN*
	3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						15.299.985,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					15.299.985,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(Jl. Komplek PPI Kuala Stabas, Pasar Kota Krui, Kec. Pesisir Tengah)*				*Aparatur*	*12*		*DINAS PERIKANAN*
	3.25.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						57.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					57.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(Jl. Komplek PPI Kuala Stabas, Pasar Kota Krui, Kec. Pesisir Tengah)*				*Aparatur*	*12*		*DINAS PERIKANAN*
	3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						5.555.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					5.555.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(Jl. Komplek PPI Kuala Stabas, Pasar Kota Krui, Kec. Pesisir Tengah)*				*Aparatur*	*12*		*DINAS PERIKANAN*
	3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						361.523.236,00							361.523.236,00	
			Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)				*90*		*(KAB. PESISIR BARAT)*					*91*		*DINAS PERIKANAN*
	3.25.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						21.419.979,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					21.419.979,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		*1*	*1*	*1*		*(Jl. Komplek PPI Kuala Stabas, Pasar Kota Krui, Kec. Pesisir Tengah)*				*Aparatur*	*1*		*DINAS PERIKANAN*
	3.25.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						280.394.077,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					280.394.077,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		*11*	*11*	*11*		*(Jl. Komplek PPI Kuala Stabas, Pasar Kota Krui, Kec. Pesisir Tengah)*				*Aparatur*	*11*		*DINAS PERIKANAN*
	3.25.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						30.360.600,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					30.360.600,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*1*	*1*	*1*		*(Jl. Komplek PPI Kuala Stabas, Pasar Kota Krui, Kec. Pesisir Tengah)*				*Aparatur*	*1*		*DINAS PERIKANAN*
	3.25.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						29.348.580,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					29.348.580,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*21*	*21*	*21*		*(Jl. Komplek PPI Kuala Stabas, Pasar Kota Krui, Kec. Pesisir Tengah)*				*Aparatur*	*21*		*DINAS PERIKANAN*
2.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	***Produksi Perikanan Tangkap (Ton)***				***14.419***	**618.386.706,00**			**Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**	**Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat**			**512.686.706,00**	***DINAS PERIKANAN***
	3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	*Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap di Danau Sungai Waduk Atau Genangan Air Lainnya (Ton)*				*14.419*	412.686.706,00	*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat		*14.420*	412.686.706,00	*DINAS PERIKANAN*
	3.25.03.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	*Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)*		*10*	*10*	*10.00*	34.241.422,00	*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	*KUB*	*10.00*	34.241.422,00	*DINAS PERIKANAN*
	3.25.03.2.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	*Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia (Unit)*		*30*	*30*	*30.00*	173.353.675,00	*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	*Kelompok Usaha Bersama*	*30.00*	173.353.675,00	*DINAS PERIKANAN*
	3.25.03.2.01.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	*Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia (Unit)*		*60*	*60*	*60.00*	205.091.609,00	*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	*Kelompok Usaha Bersama*	*60.00*	205.091.609,00	*DINAS PERIKANAN*
	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap di Danau Sungai Waduk Atau Genangan Air Lainnya (Ton)*				*14.419*	205.700.000,00	*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*14.419*	100.000.000,00	*DINAS PERIKANAN*
	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil						100.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya (Orang)		*0.00*	*0.00*	*100*		*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Kelompok Usaha Bersama*	*0.00*		*DINAS PERIKANAN*
	3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil						105.700.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					-	
			Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya (Kelompok)		*0.00*	*0*	*10*		*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Kelompok Usaha Bersama*	*10*		*DINAS PERIKANAN*
3.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**						**598.020.651,00**				**Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat**			**168.853.668,00**	
			Produksi Perikanan Budidaya (Ton)				***19.209***									***DINAS PERIKANAN***
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil						154.100.780,00							168.853.668,00	
			Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya (Ton)				*214*		*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*214*		*DINAS PERIKANAN*
	3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil						53.853.668,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					53.853.668,00	
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas (Kelompok)		*5*	*5*	*5.00*		*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Kelompok Pembudidaya Ikan*	*5.00*		*DINAS PERIKANAN*
	3.25.04.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil						100.247.112,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					115.000.000,00	
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan (Kelompok)		*20*	*30*	*30*		*(Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Kelompok Pembudidaya Ikan*	*30*		*DINAS PERIKANAN*
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan						443.919.871,00							-	
	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						443.919.871,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					-	
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)		*0.00*	*0.00*	*30*		*(KAB. PESISIR BARAT)*				*Kelompok Pembudidaya Ikan*	*0.00*		*DINAS PERIKANAN*
4.	**3.25.05**	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**162.266.807,00**							**164.000.000,00**	
			Proporsi Tangkapan Ikan yang Berada dalam Batas Biologis yang Aman (Angka)				***0,032***									***DINAS PERIKANAN***
	3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota						162.266.807,00							164.000.000,00	
			Terawasinya Sumberdaya Perikanan (Dokumen)				*5*		*(Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*6*		*DINAS PERIKANAN*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.05.2.01.0001	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)*		*2*	*2*	*2*	81.133.403,00	*(Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*Masyarakat Perikanan*	*2*	82.000.000,00	*DINAS PERIKANAN*
	3.25.05.2.01.0002	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)*		*2*	*2*	*5*	81.133.404,00	*(Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*Masyarakat Pembudidaya Ikan*	*5*	82.000.000,00	*DINAS PERIKANAN*
5.	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	***Nilai Tukar Nelayan (Angka)***				***104***	**474.843.273,00**							**313.500.000,00**	***DINAS PERIKANAN***
	3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	*Peningkatan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Unit Usaha)*				*5*	106.493.491,00	*(Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*5*	106.500.000,00	*DINAS PERIKANAN*
	3.25.06.2.02.0001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	*Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko (Unit Usaha)*		*5.00*	*5.00*	*5.00*	106.493.491,00	*(Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*Kelompok Pengolah dan Pemasar Ikan*	*5.00*	106.500.000,00	*DINAS PERIKANAN*
	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota						368.349.782,00							207.000.000,00	
	3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Ton)*		*0.00*	*0.00*	*6000*	161.832.093,00	*(Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*Kelompok Pengolah dan Pemasar Ikan*	*6000*	-	*DINAS PERIKANAN*
	3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						206.517.689,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					207.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi (Pelaku Usaha)		*15.00*	*15.00*	*20.00*		*(Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Kelompok Pengolah dan Pemasar Ikan*	*20.00*		*DINAS PERIKANAN*
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**						**21.999.701.700,00**							**5.954.422.315,00**	
1.	**3.26.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)***	***92,5***			***92,50***	**3.649.701.700,00**			**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas**			**3.654.422.315,00**	***DINAS PARIWISATA***
	3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (%)*				*100*	18.468.000,00	*(Dinas Pariwisata, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*100*	23.188.615,00	*DINAS PARIWISATA*
	3.26.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)*		*2.00*	*2.00*	*2.00*	7.400.000,00	*(Dinas Pariwisata, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*2.00*	10.733.800,00	*DINAS PARIWISATA*
	3.26.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)*		*1.00*	*1.00*	*1.00*	6.068.000,00	*(Dinas Pariwisata, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik		*Aparatur*	*1.00*	7.454.815,00	*DINAS PARIWISATA*
	3.26.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)*		*2.00*	*2.00*	*2.00*	5.000.000,00	*(Dinas Pariwisata, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik		*Aparatur*	*2.00*	5.000.000,00	*DINAS PARIWISATA*
	3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.908.887.100,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.908.887.100,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)				*90*		*(Dinas Pariwisata, KAB. PESISIR BARAT)*					*90*		*DINAS PARIWISATA*
	3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)*		*14.00*	*14.00*	*14.00*	1.878.044.100,00	*(Dinas Pariwisata, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik			*14.00*	1.878.044.100,00	*DINAS PARIWISATA*
	3.26.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)*		*12.00*	*12.00*	*12.00*	25.343.000,00	*(Dinas Pariwisata, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik			*12.00*	25.343.000,00	*DINAS PARIWISATA*
	3.26.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)*		*1.00*	*1.00*	*1.00*	2.500.000,00	*(Dinas Pariwisata, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik			*1.00*	2.500.000,00	*DINAS PARIWISATA*
	3.26.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)*		*18.00*	*18.00*	*18.00*	2.000.000,00	*(Dinas Pariwisata, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik			*18.00*	2.000.000,00	*DINAS PARIWISATA*
	3.26.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)*		*1.00*	*1.00*	*1.00*	1.000.000,00	*(Dinas Pariwisata, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik			*1.00*	1.000.000,00	*DINAS PARIWISATA*
	3.26.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)*				*90*	75.000.000,00	*(Dinas Pariwisata, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*90*	75.000.000,00	*DINAS PARIWISATA*
	3.26.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						75.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik				75.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)		*0.00*	*12.00*	*12.00*		*(Dinas Pariwisata, KAB. PESISIR BARAT)*					*12.00*		*DINAS PARIWISATA*
	3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)*				*90*	544.143.600,00	*(Dinas Pariwisata, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*90*	544.143.600,00	*DINAS PARIWISATA*
	3.26.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)*		*1*	*1*	*1*	2.500.000,00	*(Dinas Pariwisata, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik		*Aparatur*	*1*	2.500.000,00	*DINAS PARIWISATA*
	3.26.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)*		*1.00*	*1.00*	*1.00*	25.000.000,00	*(Dinas pariwisata, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik			*1.00*	25.000.000,00	*DINAS PARIWISATA*
	3.26.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)*		*12.00*	*12.00*	*12.00*	135.643.600,00	*(Dinas Pariwisata, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik			*12.00*	135.643.600,00	*DINAS PARIWISATA*
	3.26.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)*		*12.00*	*12.00*	*12.00*	12.000.000,00	*(Dinas Pariwisata, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik			*12.00*	12.000.000,00	*DINAS PARIWISATA*
	3.26.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)*		*11.00*	*11.00*	*11.00*	19.000.000,00	*(Dinas Pariwisata, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik			*11.00*	19.000.000,00	*DINAS PARIWISATA*
	3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						350.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik				350.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*12.00*	*12.00*	*12.00*		*(Dinas Pariwisata, KAB. PESISIR BARAT)*					*12.00*		*DINAS PARIWISATA*
	3.26.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						112.980.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik				112.980.000,00	
			Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)				*90*		*(Dinas Pariwisata, KAB. PESISIR BARAT)*					*90*		*DINAS PARIWISATA*
	3.26.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						52.980.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik				52.980.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)		*7.00*	*0.00*	*7.00*		*(Dinas Pariwisata, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*7.00*		*DINAS PARIWISATA*
	3.26.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya						60.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik				60.000.000,00	
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)		*0.00*	*5.00*	*5.00*		*(Dinas Pariwisata, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*5.00*		*DINAS PARIWISATA*
	3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						764.893.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik				764.893.000,00	
			Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)				*90*		*(Dinas Pariwisata, KAB. PESISIR BARAT)*					*90*		*DINAS PARIWISATA*
	3.26.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						111.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik				111.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*12.00*	*12.00*	*12.00*		*(Dinas Pariwisata, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12.00*		*DINAS PARIWISATA*
	3.26.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						67.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik				67.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)		*12.00*	*12.00*	*12.00*		*(Dinas Pariwisata, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12.00*		*DINAS PARIWISATA*
	3.26.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						586.893.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik				586.893.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		*12.00*	*12.00*	*12.00*		*(Dinas Pariwisata, KAB. PESISIR BARAT)*				*Perangkat*	*12.00*		*DINAS PARIWISATA*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						225.330.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik				225.330.000,00	
			Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)				*90*		*(Dinas Pariwisata, KAB. PESISIR BARAT)*					*90*		*DINAS PARIWISATA*
	3.26.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						134.870.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik				134.870.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		*5.00*	*5.00*	*5.00*		*(Dinas Pariwisata, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*5.00*		*DINAS PARIWISATA*
	3.26.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						90.460.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik				90.460.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*12.00*	*12.00*	*12.00*		*(Dinas Pariwisata, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12.00*		*DINAS PARIWISATA*
2.	**3.26.02**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**						**4.100.000.000,00**			**Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**	**Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat**			**-**	
			Kontribusi PAD Sektor Pariwisata (%)	***2,98***			***2,98***									***DINAS PARIWISATA***
	3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota						1.850.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			-	
			Kontribusi PAD Sektor Pariwisata (%)				*2.98*		*(Dinas Pariwisata, KAB. PESISIR BARAT)*					*3.18*		*DINAS PARIWISATA*
	3.26.02.2.01.0006	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota						450.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan				-	
			Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota (Lokasi)		*0.00*	*0.00*	*6.00*		*(Dinas Pariwisata, KAB. PESISIR BARAT)*				*Destinasi Wisata*	*0.00*		*DINAS PARIWISATA*
	3.26.02.2.01.0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota						800.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan				-	
			Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan (Orang)		*0.00*	*0.00*	*4*		*(Dinas Pariwisata, KAB. PESISIR BARAT)*				*Daya Tarik Wisata*	*0.00*		*DINAS PARIWISATA*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.02.2.01.0009	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*3*	600.000.000,00	*(Dinas Pariwisata, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan		*Daya Tarik Wisata*	*0.00*	-	*DINAS PARIWISATA*
	3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	*Kontribusi PAD Sektor Pariwisata (%)*				*2.98*	500.000.000,00	*(Dinas Pariwisata, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat		*3.18*	-	*DINAS PARIWISATA*
	3.26.02.2.02.0009	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*1*	500.000.000,00	*(Dinas Pariwisata, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan		*Usaha Pariwisata*	*0.00*	-	*DINAS PARIWISATA*
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	*Kontribusi PAD Sektor Pariwisata (%)*				*2.98*	1.750.000.000,00	*(Dinas Pariwisata, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat		*3.18*	-	*DINAS PARIWISATA*
	3.26.02.2.03.0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*4*	800.000.000,00	*(Dinas Pariwisata, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan		*Destinasi Pariwisata*	*0.00*	-	*DINAS PARIWISATA*
	3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	*Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) (Lokasi)*		*0.00*	*0.00*	*3*	700.000.000,00	*(Dinas Pariwisata, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan		*Destinasi Pariwisata*	*0.00*	-	*DINAS PARIWISATA*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara (Unit)*		*5.00*	*5.00*	*5.00*	250.000.000,00	*(Dinas Pariwisata, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan		*Destinasi Pariwisata*	*0.00*	-	*DINAS PARIWISATA*
3.	**3.26.03**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	***Kunjungan Wisatawan (%)***				***494527***	**11.450.000.000,00**			**Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**	**Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas**			**2.300.000.000,00**	***DINAS PARIWISATA***
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	*Kunjungan Wisatawan (Orang)*				*494.527*	11.450.000.000,00	*(Dinas Pariwisata, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat		*494.527*	2.300.000.000,00	*DINAS PARIWISATA*
	3.26.03.2.01.0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*1*	350.000.000,00	*(Dinas Pariwisata, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan		*Aparatur dan masyarakat*	*0.00*	600.000.000,00	*DINAS PARIWISATA*
	3.26.03.2.01.0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	*Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*1*	450.000.000,00	*(Dinas Pariwisata, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan		*Aparatur dan Masyarakat*	*0.00*	450.000.000,00	*DINAS PARIWISATA*
	3.26.03.2.01.0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	*Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*1*	400.000.000,00	*(Dinas Pariwisata, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan		*Masyarakat*	*0.00*	400.000.000,00	*DINAS PARIWISATA*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	*Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri (Kegiatan)*		*0.00*	*2.00*	*2.00*	9.500.000.000,00	*(Dinas Pariwisata, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan		*Aparatur dan Masyarakat*	*0.00*	-	*DINAS PARIWISATA*
	3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	*Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri (Promosi)*		*1.00*	*1.00*	*1.00*	750.000.000,00	*(Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan		*Aparatur dan Masyarakat*	*0.00*	850.000.000,00	*DINAS PARIWISATA*
4.	**3.26.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	***Cakupan Fasilitasi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata (%)***				***30.00***	**2.800.000.000,00**			**Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing**	**Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**-**	***DINAS PARIWISATA***
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar						2.800.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	
	3.26.05.2.01.0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif (Laporan)*		*0.00*	*1.00*	*3.00*	850.000.000,00	*(Dinas Pariwisata, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		*Masyarakat*	*0.00*	-	*DINAS PARIWISATA*
	3.26.05.2.01.0008	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	*Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI (Orang)*		*0.00*	*0.00*	*80*	650.000.000,00	*(Dinas Pariwisata, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		*masyarakat*	*0.00*	-	*DINAS PARIWISATA*
	3.26.05.2.01.0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	*Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata (Orang)*		*50.00*	*50.00*	*50.00*	1.000.000.000,00	*(Dinas Pariwisata, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		*Masyarakat*	*0.00*	-	*DINAS PARIWISATA*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.05.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	*Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata (Orang)*		*30.00*	*0.00*	*50.00*	300.000.000,00	*(Dinas Pariwisata, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		*Masyarakat*	*0.00*	-	*DINAS PARIWISATA*
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**6.226.962.026,00**							**13.062.323.160,00**	
1.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	***Nilai Tukar Petani (Angka)***				***99,77***	**2.336.903.374,00**			**Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**	**Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat**			**7.351.039.374,00**	***DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN***
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	*Persentase Peningkatan Produktivitas Pertanian (%)*				*0.3*	1.215.555.374,00	*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat		*0.3*	5.255.555.374,00	*DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN*
	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	*Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)*		*1*	*0.00*	*5*	1.010.000.000,00	*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	*Kelompok Tani, Kelompok Tani / Gabungan Kelompok Tani, Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani*	*5*	5.050.000.000,00	*DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN*
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	*Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)*		*2*	*2*	*2*	205.555.374,00	*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	*Distributor Pupuk Bersubsidi*	*2*	205.555.374,00	*DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN*
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	*Persentase Peningkatan Produksi Komoditi Pertanian (%)*				*0.5*	487.068.000,00	*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat		*0.5*	1.461.204.000,00	*DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	*Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)*		*1*	*1*	*3*	487.068.000,00	*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	*Kelompok Tani/Gapoktan/Kelompok Wanita Tani, Kelompok Tani/Gapoktan/KWT, Kelompok Wanita Tani/ Kelompok Tani*	*3*	1.461.204.000,00	*DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN*
	3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Peningkatan Populasi Ternak yang bersumber dari dalam daerah (%)*				*3*	259.780.000,00	*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat		*3*	259.780.000,00	*DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN*
	3.27.02.2.05.0009	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	*Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia (Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*2.6*	259.780.000,00	*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	*Petani/Peternak*	*2.6*	259.780.000,00	*DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN*
	3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	*Peningkatan Populasi Ternak (%)*				*3*	374.500.000,00	*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat		*3*	374.500.000,00	*DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN*
	3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	*Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain (Ekor)*		*0.00*	*55*	*99*	374.500.000,00	*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	*Petani/Peternak*	*99*	374.500.000,00	*DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN*
2.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	***Produksi Sektor Pertanian (Ton)***				***148340***	**2.368.805.929,00**			**Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**	**Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat**			**2.118.805.929,00**	***DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN***
			Produksi Sektor Pertanian (Ton)				***148340***									***DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN***

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian						150.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			150.000.000,00	
			Cakupan data, informasi dan kajian lingkup pertanian (%)				*100*		*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN*
	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya						60.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			60.000.000,00	
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)		*1*	*0.00*	*2*		*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur, Kelompok Tani*	*2*		*DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN*
	3.27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota						90.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			90.000.000,00	
			Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola (Dokumen)		*0.00*	*1*	*1*		*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Kelompok Tani/Masyarakat/Aparatur*	*1*		*DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN*
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian						2.218.805.929,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			1.968.805.929,00	
			Persentase Prasarana Pertanian yang terbangun dan berkondisi baik (%)				*83*		*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*84*		*DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN*
	3.27.03.2.02.0002	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian						440.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			440.000.000,00	
			Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Pekon Sumur Jaya Kecamatan Pesisir Selatan Pekon Pardasuka Kecamatan Ngaras., KAB. PESISIR BARAT)*				*Kelompok Tani/Gapoktan*	*2*		*DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN*
	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani						440.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			440.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Pekon Marang Kec. Pesisir Selatan dan Pekon Pekonmon Kec. Ngambur, KAB. PESISIR BARAT)*				*Kelompok Tani/Gapoktan*	*2*		*DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN*
	3.27.03.2.02.0004	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit						250.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			250.000.000,00	
			Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Pekon Sukamarga Kecamatan BangkunatPekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan, KAB. PESISIR BARAT)*				*Kelompok Tani / Gapoktan*	*2*		*DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN*
	3.27.03.2.02.0006	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air						80.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			80.000.000,00	
			Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Pekon Pekon Mon Kecamatan Ngambur, Ngambur)*				*Kelompok Tani/Gapoktan*	*2*		*DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN*
	3.27.03.2.02.0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya						318.805.929,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			318.805.929,00	
			Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Kecamatan Pesisir Selatan, Pesisir Selatan)*				*Aparatur*	*1*		*DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN*
	3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani						690.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			440.000.000,00	
			Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi (Unit)		*0.00*	*2*	*2*		*(Pekon Biha Kecamatan Pesisir SelatanPekon Balai Kencana Kecamatan Krui Selatan, KAB. PESISIR BARAT)*				*Kelompok Tani/Gapoktan*	*2*		*DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN*
3.	**3.27.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**						**239.616.243,00**			**Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**	**Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat**			**239.616.243,00**	
			Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis (%)				***86***									***DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN***

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota						164.466.243,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			164.466.243,00	
			Persentase Terproteksinya ternak dan HPR dari penyakit hewan menular (%)				*86*		*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*88*		*DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN*
	3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						164.466.243,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			164.466.243,00	
			Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota (Laporan)		*1*	*1*	*1*		*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Petani/Peternak*	*1*		*DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN*
	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner						75.150.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			75.150.000,00	
			Persentase Terjaminnya Keamanan Daging yang beredar di Masyarakat (%)				*100*		*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN*
	3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan						75.150.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			75.150.000,00	
			Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan (Laporan)		*1*	*1*	*1*		*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Produsen Produk Hewan*	*1*		*DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN*
4.	**3.27.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**						**400.273.913,00**			**Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**	**Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat**			**400.273.913,00**	
			Persentase Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Organisme Pengganggu Tumbuhan (%)				***86***									***DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN***
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota						400.273.913,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			400.273.913,00	
			Penurunan persentase gangguan OPT/Kegagalan panen pada komoditi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan (%)				*10*		*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*10*		*DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	*Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)*		*8*	*6*	*50*	400.273.913,00	*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	*Petani*	*50*	400.273.913,00	*DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN*
5.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	***Cakupan Bina Kelompok Tani (Kelompok Tani)***				***975***	**881.362.567,00**			**Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**	**Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat**			**2.952.587.701,00**	***DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN***
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian						881.362.567,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			2.952.587.701,00	
	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	*Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)*		*11*	*11*	*11*	410.000.000,00	*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	*Aparatur/Penyuluh Pertanian*	*11*	2.050.000.000,00	*DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN*
	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	*Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)*		*11*	*11*	*11*	270.612.567,00	*(Kabupaten Pesisi Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	*Aparatur/Penyuluh Pertanian/Kelompok Tani/Gapoktan/KWT/ Lembaga Pertanian, Kelompok Tani/Gapoktan/KWT/ Penyuluh Pertanian, KTNA dan Perhiptani*	*11*	811.837.701,00	*DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN*
	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	*Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (Unit)*		*0.00*	*0.00*	*11*	90.750.000,00	*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	*Aparatur/Penyuluh Pertanian*	*11*	90.750.000,00	*DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi (Unit)*		*0.00*	*0.00*	*11.00*	110.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	*Kelompok Tani/Gapoktan*	*11.00*	-	*DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN*
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**						**696.971.927,00**							**-**	
1.	**3.30.03**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	***Kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB (%)***				***11,58***	**103.918.299,00**			**Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**	**Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat**			**-**	***DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN***
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	*Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang Terfasilitasi (%)*				*100*	103.918.299,00	*(Pasar Way Batu, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat		*100*	-	*DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN*
	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	*Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)*		*1*	*1*	*1.00*	50.000.000,00	*(Pasar Way Batu, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	*Masyarakat*	*1*	-	*DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN*
	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	*Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)*		*0.00*	*0.00*	*2*	53.918.299,00	*(KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	*Masyarakat*	*0.00*	-	*DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN*
2.	**3.30.04**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	***Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan harga Barang Kebutuhan Pokok (%)***				***60***	**329.179.609,00**			**Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**	**Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat**			**-**	***DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN***

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota						50.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			-	
			Persentase Monitoring Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok (%)				*100*		*(11 Kecamatan, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN*
	3.30.04.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat						50.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			-	
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (Laporan)		*48*	*48*	*48.00*		*(11 kecamatan, KAB. PESISIR BARAT)*				*Masyarakat*	*48*		*DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN*
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota						254.179.609,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			-	
			Persentase Pengendalian Harga dan Stok Barang (%)				*100*		*(11 kecamatan, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN*
	3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota						40.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			-	
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)		*52*	*52*	*52.00*		*(11 kecamatan, KAB. PESISIR BARAT)*				*Masyarakat*	*52*		*DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN*
	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota						214.179.609,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			-	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)		*4*	*4*	*4.00*		*(4 Lokasi, KAB. PESISIR BARAT)*				*Masyarakat*	*4*		*DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN*
	3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						25.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			-	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase Pengawasan Pupuk dan Pestisida (%)				*100*		*(11 kecamatan, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN*
	3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi						25.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			-	
			Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% (Laporan)		*12*	*12*	*12.00*		*(11 kecamatan, KAB. PESISIR BARAT)*				*Masyarakat*	*12*		*DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN*
3.	**3.30.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**						**263.874.019,00**			**Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**	**Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat**			**-**	
			Net Ekspor Barang dan Jasa (Juta Rupiah/Tenaga Kerja)				***43,184***									***DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN***
	3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						263.874.019,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			-	
			Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang Terfasilitasi (%)				*100*		*(Nasional, Luar Wilayah)*					*100*		*DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN*
	3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional						263.874.019,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			-	
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang (Pelaku Usaha)		*20*	*20*	*20.00*		*(Nasional, Luar Wilayah)*				*Masyarakat*	*20*		*DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN*
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**						**647.613.352,00**							**647.613.352,00**	
1.	**3.31.02**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**						**446.332.868,00**			**Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**	**Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat**			**446.332.868,00**	
			Cakupan Bina Kelompok Pengrajin (%)				***40***									***DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN***

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota						446.332.868,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			446.332.868,00	
			Cakupan Bina Kelompok Pengrajin (%)				*40*		*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*40*		*DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN*
	3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri						150.012.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			150.012.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen)		*1*	*1*	*1.00*		*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Masyarakat*	*1.00*		*DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN*
	3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri						80.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			80.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Dokumen)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Masyarakat*	*1.00*		*DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN*
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat						97.320.868,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			97.320.868,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)		*1*	*1*	*1.00*		*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Masyarakat*	*1.00*		*DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN*
	3.31.02.2.01.0006	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri						119.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			119.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)		*1*	*1*	*1.00*		*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Masyarakat*	*1.00*		*DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN*
2.	**3.31.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**						**201.280.484,00**			**Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**	**Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat**			**201.280.484,00**	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Kontribusi sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (%)				***3,99***									***DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN***
	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Website yang Dikelola Dengan Baik (Situs)*				*1*	201.280.484,00	*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat		*1*	201.280.484,00	*DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN*
	3.31.04.2.01.0002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	*Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas (Dokumen)*		*1.00*	*1.00*	*1.00*	201.280.484,00	*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	*Masyarakat*	*1.00*	201.280.484,00	*DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN*
	3.32	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**						**392.022.156,00**							**392.022.156,00**	
1.	**3.32.03**	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	***Nilai Rata-rata Indeks Perkembangan 100 Kawasan Transmigrasi Prioritas Kementerian yang direvitalisasi (Angka)***	***42,53***			***44***	**99.651.202,00**			**Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing**	**Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**99.651.202,00**	***DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN***
	3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Kelompok Usaha (Kelompok)*				*4*	99.651.202,00	*(Kecamata Ngambur, KAB. PESISIR BARAT)*		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia		*4*	99.651.202,00	*DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN*
	3.32.03.2.01.0006	Pelatihan Transmigrasi	*Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan (Orang)*		*40*	*40*	*40.00*	99.651.202,00	*(Kecamatan Ngambur, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	*Masyarakat*	*40.00*	99.651.202,00	*DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**3.32.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI**						**292.370.954,00**			**Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing**	**Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**292.370.954,00**	
			Jumlah Kawasan Transmigrasi yang dibina (Lokasi)				***1***									***DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN***
	3.32.04.2.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian						292.370.954,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			292.370.954,00	
			Jumlah Kawasan Transmigrasi yang Dibina (Lokasi) (Lokasi)				*1*		*(Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*1*		*DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN*
	3.32.04.2.01.0001	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman						92.379.954,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			92.379.954,00	
			Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina (Kepala Keluarga)		*30*	*30*	*30.00*		*(Kecamatan Ngambur, KAB. PESISIR BARAT)*				*Masyarakat*	*30.00*		*DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN*
	3.32.04.2.01.0002	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman						199.991.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			199.991.000,00	
			Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan (Satuan Permukiman)		*1*	*1*	*1.00*		*(Kecamatan Ngambur, KAB. PESISIR BARAT)*				*Masyarakat*	*1.00*		*DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN*
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**93.706.176.270,00**							**96.929.966.660,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**59.464.832.261,00**							**59.734.841.261,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**45.665.574.245,00**			**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas**			**45.935.583.245,00**	
			Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)				***92,50***									***SEKRETARIAT DAERAH***
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						146.585.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			416.585.600,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu (%)				*100*		*(Di Kantor Sekretariat Daerah, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*SEKRETARIAT DAERAH*
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						29.083.200,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			29.083.200,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(Di Kantor Sekretariat Daerah, KAB. PESISIR BARAT)*				*aparatur*	*1.00*		*SEKRETARIAT DAERAH*
	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						29.573.800,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			29.573.800,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(Di Kantor Sekretariat Daerah, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1.00*		*SEKRETARIAT DAERAH*
	4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						29.646.800,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			29.646.800,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(Di Kantor Sekretariat Daerah, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1.00*		*SEKRETARIAT DAERAH*
	4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						29.077.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			29.077.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(Di Kantor Sekretariat Daerah, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1.00*		*SEKRETARIAT DAERAH*
	4.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						29.204.800,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			299.204.800,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(Di Kantor Sekretariat Daerah, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1.00*		*SEKRETARIAT DAERAH*
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						22.094.237.550,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			22.094.237.550,00	
			Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Sekretariat Daerah (%)				*100*		*(Di Kantor Sekretariat Daerah, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*SEKRETARIAT DAERAH*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)*		*53*	*53*	*53*	22.089.485.550,00	*(di kantor sekretariat daerah, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*53*	22.089.485.550,00	*SEKRETARIAT DAERAH*
	4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)*		*1*	*1*	*1*	1.584.000,00	*(Di Kantor Sekretariat Daerah, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*1*	1.584.000,00	*SEKRETARIAT DAERAH*
	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)*		*1*	*1*	*1*	1.584.000,00	*(Di Kantor Sekretariat Daerah, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*1*	1.584.000,00	*SEKRETARIAT DAERAH*
	4.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)*		*1*	*1*	*1*	1.584.000,00	*(Di Kantor Sekretariat Daerah, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*1*	1.584.000,00	*SEKRETARIAT DAERAH*
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Sekretariat Daerah (%)*				*100*	620.000.000,00	*(Di Kantor Sekretariat Daerah, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*100*	620.000.000,00	*SEKRETARIAT DAERAH*
	4.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	*Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)*		*12*	*12*	*12*	620.000.000,00	*(Di Kantor Sekretariat Daerah, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*12*	620.000.000,00	*SEKRETARIAT DAERAH*
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						631.292.400,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			631.292.400,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Sekretariat Daerah (%)				*100*		*(Di Kantor Sekretariat Daerah, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*SEKRETARIAT DAERAH*
	4.01.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai						21.936.400,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			21.936.400,00	
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)		*0*	*0*	*1.00*		*(Di Kantor Sekretariat Daerah, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1.00*		*SEKRETARIAT DAERAH*
	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						411.356.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			411.356.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)		*290*	*290*	*290*		*(di kantor sekretariat daerah, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*290*		*SEKRETARIAT DAERAH*
	4.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						198.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			198.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)		*50*	*50*	*50*		*(di luar Kab. Pesisir Barat, Luar Wilayah)*				*Peserta*	*50*		*SEKRETARIAT DAERAH*
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						2.531.216.386,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.531.225.386,00	
			Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja (%)				*100*		*(Di Kantor Sekretariat Daerah, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*SEKRETARIAT DAERAH*
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						29.834.200,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			29.843.200,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		*1*	*1*	*1*		*(Di Kantor Sekretariat Daerah, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*SEKRETARIAT DAERAH*
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						361.524.240,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			361.524.240,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		*3*	*3*	*3*		*(Di Kantor Sekretariat Daerah, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*3*		*SEKRETARIAT DAERAH*
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						50.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		*12*	*12*	*12*		*(Dikantor Sekretariat Daerah, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*SEKRETARIAT DAERAH*
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						302.511.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					302.511.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*12*	*12*	*12*		*(Di Kantor Sekretariat Daerah, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*SEKRETARIAT DAERAH*
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						1.155.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.155.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(Dikantor Sekretariat Daerah, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*SEKRETARIAT DAERAH*
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						632.346.946,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			632.346.946,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(Didalam Kabapaten Pesisir Barat dan Di Luar Daerah, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*SEKRETARIAT DAERAH*
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						3.574.584.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			3.574.584.000,00	
			Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja (%)				*100*		*(Dikantor Sekretariat Daerah, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*SEKRETARIAT DAERAH*
	4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						500.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			500.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)		*1*	*1*	*1*		*(Dikantor Sekretariat Daearah, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*SEKRETARIAT DAERAH*
	4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						2.140.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.140.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)		*10*	*10*	*10*		*(Dikantor Sekretariat Daerah, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*10*		*SEKRETARIAT DAERAH*
	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						306.078.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			306.078.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)		*0*	*0*	*10.00*		*(Dikantor Sekretaraiat Daerah, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*10.00*		*SEKRETARIAT DAERAH*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						514.078.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			514.078.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		*40*	*40*	*42*		*(Dikantor Sekretariat Daerah, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*45*		*SEKRETARIAT DAERAH*
	4.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						5.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			5.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)		*1*	*1*	*1*		*(Dikantor Sekretariat Daerah, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*SEKRETARIAT DAERAH*
	4.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						109.428.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			109.428.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)		*12*	*12*	*12*		*(Dikantor Sekretariat Daerah, KAB. PESISIR BARAT)*				*aparatur*	*12*		*SEKRETARIAT DAERAH*
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						6.466.640.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			6.466.640.000,00	
			persentase pemenuhan Layanan Pendukung (%)				*100*		*(dikantor sekretariat daerah, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*SEKRETARIAT DAERAH*
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						1.465.640.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.465.640.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(di kantor sekretariat daerah, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*SEKRETARIAT DAERAH*
	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						1.001.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.001.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(seluruh wilayah Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*SEKRETARIAT DAERAH*
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						4.000.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			4.000.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(dikantor sekretariat daerah, KAB. PESISIR BARAT)*				*aparatur*	*12*		*SEKRETARIAT DAERAH*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*persentase barang milik daerah dalam kondisi baik (%)*				*100*	3.027.500.000,00	*(dikantor sekretariat daerah, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*100*	3.027.500.000,00	*SEKRETARIAT DAERAH*
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)*		*18*	*18*	*18*	964.480.000,00	*(dikantor sekretariat daerah, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*aparatur*	*18*	964.480.000,00	*SEKRETARIAT DAERAH*
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)*		*86*	*86*	*86*	1.178.320.000,00	*(dikantor sekretariat daerah, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*aparatur*	*86*	1.178.320.000,00	*SEKRETARIAT DAERAH*
	4.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	*Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)*		*0*	*0*	*1.00*	2.000.000,00	*(dikantor sekretariat daerah, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*aparatur*	*1.00*	2.000.000,00	*SEKRETARIAT DAERAH*
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)*		*12*	*12*	*12*	370.700.000,00	*(dikantor sekretariat daerah, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*aparatur*	*12*	370.700.000,00	*SEKRETARIAT DAERAH*
	4.01.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	*Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)*		*0*	*0*	*1.00*	2.000.000,00	*(dikantor sekretariat daerah, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*aparatur*	*1.00*	2.000.000,00	*SEKRETARIAT DAERAH*
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)*		*3*	*3*	*3*	500.000.000,00	*(dikantor sekretariat daerah, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*aparatur*	*3*	500.000.000,00	*SEKRETARIAT DAERAH*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						5.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			5.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*1*	*1*	*1*		*(dikantor sekretariat, KAB. PESISIR BARAT)*				*aparatur*	*1*		*SEKRETARIAT DAERAH*
	4.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						5.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			5.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*1*	*1*	*1*		*(dikantor sekretariat daerah, KAB. PESISIR BARAT)*				*aparatur*	*1*		*SEKRETARIAT DAERAH*
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						588.789.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			588.789.500,00	
			jumlah bulan penyediaan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepada daerah (%)				*100*		*(dikantor sekretariat daerah, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*SEKRETARIAT DAERAH*
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						168.089.500,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			168.089.500,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)		*12*	*12*	*12*		*(dikantor sekretariat daerah, KAB. PESISIR BARAT)*				*orang*	*12*		*SEKRETARIAT DAERAH*
	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						95.700.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			95.700.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)		*32*	*32*	*32*		*(di kantor sekretariat daerah, KAB. PESISIR BARAT)*				*aparatur*	*32*		*SEKRETARIAT DAERAH*
	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						25.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			25.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang)		*2.00*	*2.00*	*2.00*		*(dikantor sekretariat daerah, KAB. PESISIR BARAT)*				*Orang*	*2.00*		*SEKRETARIAT DAERAH*
	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						300.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			300.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)		*2*	*2*	*2*		*(di kantor sekretariat daerah, KAB. PESISIR BARAT)*				*aparatur*	*2*		*SEKRETARIAT DAERAH*
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	*jumlah bulan fasilitasi kerumahtanggaan sekretariat daerah yang disediakan (%)*				*100*	1.773.850.738,00	*(dikantor sekretariat daerah, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*100*	1.773.850.738,00	*SEKRETARIAT DAERAH*
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	*Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)*		*1*	*1*	*1*	813.680.120,00	*(di rumah dinas kepala daerah, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*aparatur*	*1*	813.680.120,00	*SEKRETARIAT DAERAH*
	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	*Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)*		*1*	*1*	*1*	626.680.120,00	*(dirumah dinas wakil kepala daerah, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*aparatur*	*1*	626.680.120,00	*SEKRETARIAT DAERAH*
	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	*Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan (Paket)*		*1*	*1*	*1*	333.490.498,00	*(di kantor sekretariat daerah, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*aparatur*	*1*	333.490.498,00	*SEKRETARIAT DAERAH*
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	*cakupan pengelolaan organisasi perangkat daerah yang tertata dengan baik (%)*				*100*	791.220.000,00	*(dikantor sekretariat daerah, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*100*	791.220.000,00	*SEKRETARIAT DAERAH*
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	*Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen)*		*50*	*50*	*50*	135.000.000,00	*(dikantor sekretariat daerah, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*aparatur*	*50*	135.000.000,00	*SEKRETARIAT DAERAH*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana						355.408.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			355.408.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Laporan)		*50*	*50*	*50*		*(dikantor sekretariat daerah, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*50*		*SEKRETARIAT DAERAH*
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi						180.812.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			180.812.000,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dokumen)		*55*	*55*	*55*		*(dikantor sekretariat daerah, KAB. PESISIR BARAT)*				*aparatur*	*55*		*SEKRETARIAT DAERAH*
	4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana						75.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			75.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Dokumen)		*55*	*55*	*55*		*(dikantor sekretariat daerah, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*55*		*SEKRETARIAT DAERAH*
	4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah						45.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			45.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (Dokumen)		*1*	*1*	*1*		*(dikantor sekretariat daerah, KAB. PESISIR BARAT)*				*aparatur*	*1*		*SEKRETARIAT DAERAH*
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan						3.419.658.071,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			3.419.658.071,00	
			Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Sekretariat Daerah (%)				*100*		*(Di Kantor Sekretariat Daerah, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*SEKRETARIAT DAERAH*
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan						1.586.653.155,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.586.653.155,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan (Laporan)		*1*	*1*	*1*		*(Di Kantor Sekretariat Daerah, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*SEKRETARIAT DAERAH*
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan						1.388.095.720,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.388.095.720,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Laporan)		*1*	*1*	*1*		*(Di Kantor Sekretariat Daerah, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*SEKRETARIAT DAERAH*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	*Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan (Laporan)*		*1*	*1*	*1*	444.909.196,00	*(Di Kantor Sekretariat Daerah, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*1*	444.909.196,00	*SEKRETARIAT DAERAH*
2.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	***Cakupan penyelenggaraan kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat (%)***	***85***			***85***	**9.970.144.764,00**			**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas**			**9.970.144.764,00**	***SEKRETARIAT DAERAH***
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	*Persentase pelaporan administrasi tata pemerintahan Tepat Waktu (%)*				*100*	1.420.382.130,00	*(Di Lingkungan Kantor Pemerintahan Daerah, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*100*	1.420.382.130,00	*SEKRETARIAT DAERAH*
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	*Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan (Dokumen)*		*1*	*1*	*1*	927.737.800,00	*(Di Lingkungan Kantor Pemerintahan Daerah, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*1*	927.737.800,00	*SEKRETARIAT DAERAH*
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan (Dokumen)*		*4*	*4*	*4*	318.314.306,00	*(Di Kantor Sekretariat Daerah, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*4*	318.314.306,00	*SEKRETARIAT DAERAH*
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah (Dokumen)*		*20*	*20*	*20*	174.330.024,00	*(Di Kantor Sekretariat Daerah, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*20*	174.330.024,00	*SEKRETARIAT DAERAH*
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	*Persentase pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat (%)*				*100*	5.955.419.560,00	*(Di Kantor Sekretariat Daerah, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*100*	5.955.419.560,00	*SEKRETARIAT DAERAH*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual						2.526.871.680,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.526.871.680,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Dokumen)		*4*	*4*	*4*		*(Di Kantor Sekretariat Daerah, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*4*		*SEKRETARIAT DAERAH*
	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial						3.308.540.280,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			3.308.540.280,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB (Dokumen)		*2*	*2*	*2*		*(Di Kantor Sekretariat Daerah, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*2*		*SEKRETARIAT DAERAH*
	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat						120.007.600,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			120.007.600,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas (Dokumen)		*1*	*1*	*1*		*(Di Kantor Sekretariat Daerah, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*SEKRETARIAT DAERAH*
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum						2.135.933.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.135.933.600,00	
			Cakupan fasilitasi dan koordinasi hukum (%)				*100*		*(Di Kantor Sekretariat Daerah, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*SEKRETARIAT DAERAH*
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah						889.146.200,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			889.146.200,00	
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun (Dokumen)		*3*	*3*	*3*		*(Di Kantor Sekretariat Daerah, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*3*		*SEKRETARIAT DAERAH*
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum						637.539.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			637.539.000,00	
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum (Kasus)		*1*	*1*	*1*		*(Di Kantor Sekretariat Daerah, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*SEKRETARIAT DAERAH*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	*Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi (Dokumen)*		*2*	*2*	*2*	609.248.400,00	*(Di Kantor Sekretariat Daerah, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*2*	609.248.400,00	*SEKRETARIAT DAERAH*
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	*Cakupan pelaksanaan fasilitasi kerjasama daerah (%)*				*100*	458.409.474,00	*(Di Kantor Sekretariat Daerah, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*100*	458.409.474,00	*SEKRETARIAT DAERAH*
	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri (Dokumen)*		*2*	*2*	*2*	458.409.474,00	*(Di Kantor Sekretariat Daerah, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*2*	458.409.474,00	*SEKRETARIAT DAERAH*
3.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	***cakupan penyelenggaraan kebijakan perekonomian dan pembangunan (%)***				***85,00***	**3.829.113.252,00**			**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas**			**3.829.113.252,00**	***SEKRETARIAT DAERAH***
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	*Persentase pelaksaan kebijakan perekonomian (%)*				*100*	1.223.934.984,00	*(Di Kantor Sekretariat Daerah, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*100*	1.223.934.984,00	*SEKRETARIAT DAERAH*
	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD (Dokumen)*		*1*	*1*	*1*	115.686.296,00	*(Di Kantor Sekretariat Daerah, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*1*	115.686.296,00	*SEKRETARIAT DAERAH*
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	*Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian (Laporan)*		*3*	*3*	*3*	832.255.028,00	*(Di Kantor Sekretariat Daerah, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*3*	832.255.028,00	*SEKRETARIAT DAERAH*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil						196.493.660,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					196.493.660,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil (Dokumen)		*1*	*1*	*1*		*(Di Kantor Sekretariat Daerah, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*SEKRETARIAT DAERAH*
	4.01.03.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD						79.500.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			79.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD (Dokumen)		*1*	*1*	*1*		*(Di Kantor Sekretariat Daerah, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*SEKRETARIAT DAERAH*
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan						1.328.825.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.328.825.600,00	
			Cakupan Penyelenggaraan Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan (%)				*100*		*(Di Luar Daerah, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*SEKRETARIAT DAERAH*
	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan						309.931.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			309.931.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah (Dokumen)		*1*	*1*	*1*		*(Di Luar Daerah, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*SEKRETARIAT DAERAH*
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan						551.279.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			551.279.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (Laporan)		*1*	*1*	*1*		*(Di Seluruh Kecamatan dan Di Luar Daerah, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*SEKRETARIAT DAERAH*
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan						467.615.600,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			467.615.600,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)		*4*	*4*	*4*		*(Di Luar Daerah, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*4*		*SEKRETARIAT DAERAH*
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa						1.125.155.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.125.155.500,00	
			Cakupan Penyelenggaraan Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan (%)				*100*		*(Di Kantor Sekretariat Daerah dan Di Luar Daerah, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*SEKRETARIAT DAERAH*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa						305.145.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			305.145.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)		*150.00*	*150.00*	*150.00*		*(Di Kantor Sekretariat Daerah dan Di Luar Daerah, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*150.00*		*SEKRETARIAT DAERAH*
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik						557.573.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			557.573.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Dokumen)		*150.00*	*150.00*	*150.00*		*(Di Kantor Sekretariat Daerah dan Di Luar Daerah, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*150.00*		*SEKRETARIAT DAERAH*
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa						262.437.500,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			262.437.500,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (Orang)		*4.00*	*4.00*	*4.00*		*(Di Kantor Sekretariat Daerah dan Di Luar Daerah, KAB. PESISIR BARAT)*				*Peserta*	*4.00*		*SEKRETARIAT DAERAH*
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam						151.197.168,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			151.197.168,00	
			Cakupan Penyelenggaraan Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan (%)				*100*		*(Di Kantor Sekretariat Daerah, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*SEKRETARIAT DAERAH*
	4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan						37.926.988,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			37.926.988,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja (Dokumen)		*1*	*1*	*1*		*(Di Kantor Sekretariat Daerah, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*SEKRETARIAT DAERAH*
	4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup						34.593.988,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			34.593.988,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian (Dokumen)		*1*	*1*	*1*		*(Di Kantor Sekretariat Daerah, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*SEKRETARIAT DAERAH*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan (Dokumen)*		*1*	*1*	*1*	78.676.192,00	*(Di Kantor Sekretariat Daerah dan Di Luar Daerah, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*1*	78.676.192,00	*SEKRETARIAT DAERAH*
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**						**34.241.344.009,00**							**37.195.125.399,00**	
1.	**4.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)***	***92,5***			***92,50***	**20.420.263.022,00**			**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas**			**21.991.936.313,00**	***SEKRETARIAT DPRD***
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Ealuasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu (%)*				*100*	6.400.000,00	*(Sekretariat DPRD, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*100*	7.040.000,00	*SEKRETARIAT DPRD*
	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)*		*2.00*	*2.00*	*2.00*	1.400.000,00	*(Sekretariat DPRD, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*2.00*	1.540.000,00	*SEKRETARIAT DPRD*
	4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)*		*2.00*	*2.00*	*2.00*	5.000.000,00	*(Sekretariat DPRD, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik		*Aparatur*	*2.00*	5.500.000,00	*SEKRETARIAT DPRD*
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu (%)*				*100*	1.745.556.900,00	*(Sekretariat DPRD, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*100*	1.920.112.590,00	*SEKRETARIAT DPRD*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)*		*12.00*	*16.00*	*16.00*	1.740.056.900,00	*(Sekretariat DPRD, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik		*Aparatur*	*18.00*	1.914.062.590,00	*SEKRETARIAT DPRD*
	4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)*		*1.00*	*1.00*	*1.00*	2.500.000,00	*(Sekretariat DPRD, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik		*Aparatur*	*1.00*	2.750.000,00	*SEKRETARIAT DPRD*
	4.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)*		*2.00*	*2.00*	*2.00*	2.000.000,00	*(Sekretariat DPRD, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik		*Aparatur*	*2.00*	2.200.000,00	*SEKRETARIAT DPRD*
	4.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)*		*1.00*	*1.00*	*1.00*	1.000.000,00	*(Sekretariat DPRD, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik		*Aparatur*	*1.00*	1.100.000,00	*SEKRETARIAT DPRD*
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase aparatur yg berkinerja baik (%)*				*100*	500.000.000,00	*(Di Luar Pesisir Barat, Luar Wilayah)*		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*100*	550.000.000,00	*SEKRETARIAT DPRD*
	4.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)*		*12.00*	*16.00*	*16.00*	500.000.000,00	*(Sekretariat DPRD, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik		*Aparatur*	*18.00*	550.000.000,00	*SEKRETARIAT DPRD*
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja (%)*				*100*	1.654.606.663,00	*(Di Dalam dan di Luar Pesisir Barat, Luar Wilayah)*		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*100*	1.304.714.318,00	*SEKRETARIAT DPRD*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)*		*12.00*	*12.00*	*12.00*	32.590.400,00	*(Sekretariat DPRD, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik		*Aparatur*	*12.00*	35.849.440,00	*SEKRETARIAT DPRD*
	4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)*		*12.00*	*12.00*	*12.00*	21.780.000,00	*(Sekretariat DPRD, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik		*Aparatur*	*12.00*	23.958.000,00	*SEKRETARIAT DPRD*
	4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)*		*11.00*	*11.00*	*11.00*	45.680.000,00	*(Sekretariat DPRD, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik		*Aparatur*	*11.00*	50.248.000,00	*SEKRETARIAT DPRD*
	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)*		*12.00*	*12.00*	*12.00*	231.497.263,00	*(Sekretariat DPRD, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik		*Aparatur*	*12.00*	254.646.989,00	*SEKRETARIAT DPRD*
	4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)*		*12.00*	*12.00*	*12.00*	700.000.000,00	*(Sekretariat DPRD, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik		*Aparatur*	*12.00*	254.646.989,00	*SEKRETARIAT DPRD*
	4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)*		*11.00*	*11.00*	*11.00*	347.500.000,00	*(Sekretariat DPRD, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik		*Aparatur*	*11.00*	382.250.000,00	*SEKRETARIAT DPRD*
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)*		*12.00*	*12.00*	*12.00*	275.559.000,00	*(Di Dalam dan di Luar Pesisir Barat, Luar Wilayah)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik		*Aparatur*	*12.00*	303.114.900,00	*SEKRETARIAT DPRD*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						469.280.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			516.208.000,00	
			Persentase pemenuhan Prasarana dan prasarana pendukung kinerja (%)				*100*		*(Sekretariat DPRD, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*SEKRETARIAT DPRD*
	4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						229.780.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik				252.758.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		*32.00*	*32.00*	*32.00*		*(Sekretariat DPRD, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*32.00*		*SEKRETARIAT DPRD*
	4.02.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya						239.500.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik				263.450.000,00	
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)		*2.00*	*2.00*	*2.00*		*(Sekretariat DPRD, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*2.00*		*SEKRETARIAT DPRD*
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						652.223.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			717.445.300,00	
			Persentase pemenuhan prasarana dan prasarana pendukung kinerja (%)				*100*		*(Sekretariat DPRD, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*SEKRETARIAT DPRD*
	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						288.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik				316.800.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*12.00*	*12.00*	*12.00*		*(Sekretariat DPRD, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12.00*		*SEKRETARIAT DPRD*
	4.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						57.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik				62.700.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)		*12.00*	*12.00*	*12.00*		*(Sekretariat DPRD, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12.00*		*SEKRETARIAT DPRD*
	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						307.223.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik				337.945.300,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		*12.00*	*12.00*	*12.00*		*(Sekretariat DPRD, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12.00*		*SEKRETARIAT DPRD*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase barang milik daerah yang dalam kondisi baik (%)*				*100*	957.967.819,00	*(Sekretariat DPRD, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*100*	1.098.764.601,00	*SEKRETARIAT DPRD*
	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)*		*7.00*	*7.00*	*7.00*	215.700.000,00	*(Sekretariat DPRD, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik		*Aparatur*	*7.00*	237.270.000,00	*SEKRETARIAT DPRD*
	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)*		*1.00*	*1.00*	*1.00*	580.126.019,00	*(Sekretariat DPRD, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik		*Aparatur*	*1.00*	683.138.621,00	*SEKRETARIAT DPRD*
	4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)*		*1.00*	*1.00*	*1.00*	162.141.800,00	*(Sekretariat DPRD, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik		*Aparatur*	*1.00*	178.355.980,00	*SEKRETARIAT DPRD*
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	*Persentase layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD (%)*				*100*	14.135.336.800,00	*(Di Dalam dan di Luar Pesisir Barat, Luar Wilayah)*		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*100*	15.548.870.480,00	*SEKRETARIAT DPRD*
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	*Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD (Orang/Bulan)*		*26.00*	*26.00*	*26.00*	13.564.836.800,00	*(Sekretariat DPRD, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik		*Aparatur*	*26.00*	14.921.320.480,00	*SEKRETARIAT DPRD*
	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	*Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan (Paket)*		*300.00*	*300.00*	*125.00*	300.000.000,00	*(Sekretariat DPRD, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik		*Aparatur*	*125.00*	330.000.000,00	*SEKRETARIAT DPRD*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	*Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD (Orang)*		*25.00*	*25.00*	*25.00*	270.500.000,00	*(Sekretariat DPRD, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik		*Aparatur*	*25.00*	297.550.000,00	*SEKRETARIAT DPRD*
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	*Persentase layanan administrasi DPRD yang terpenuhi (%)*				*100*	298.891.840,00	*(Sekretariat DPRD, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*100*	328.781.024,00	*SEKRETARIAT DPRD*
	4.02.01.2.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD (Laporan)*		*34.00*	*34.00*	*34.00*	66.420.850,00	*(Sekretariat DPRD, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik		*Aparatur*	*34.00*	73.062.935,00	*SEKRETARIAT DPRD*
	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD (Laporan)*		*60.00*	*60.00*	*60.00*	232.470.990,00	*(Sekretariat DPRD, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik		*Aparatur*	*60.00*	255.718.089,00	*SEKRETARIAT DPRD*
2.	**4.02.02**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	***tersusun dan terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen rencana lima tahun (RPJM) maupun dokumen rencana tahunan (RKPD) (%)***				***100***	**13.821.080.987,00**			**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas**			**15.203.189.086,00**	***SEKRETARIAT DPRD***
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	*Tersusun dan terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen Rencana lima tahunan (RPJM) Maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) (%)*				*100*	576.455.720,00	*(Sekretariat DPRD, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*100*	634.101.292,00	*SEKRETARIAT DPRD*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah						16.355.720,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik				17.991.292,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Dokumen)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(Sekretariat DPRD, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1.00*		*SEKRETARIAT DPRD*
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah						560.100.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik				616.110.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Dokumen)		*4.00*	*4.00*	*4.00*		*(Sekretariat DPRD, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*4.00*		*SEKRETARIAT DPRD*
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran						405.350.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			445.885.000,00	
			Tersusun dan terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen Rencana lima tahunan (RPJM) Maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) (%)				*100*		*(Sekretariat DPRD, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*SEKRETARIAT DPRD*
	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS						62.898.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik				69.187.800,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS (Dokumen)		*0.00*	*6.00*	*6.00*		*(Sekretariat DPRD, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*6.00*		*SEKRETARIAT DPRD*
	4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS						62.898.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik				69.187.800,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS (Dokumen)		*0.00*	*6.00*	*6.00*		*(Sekretariat DPRD, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*6.00*		*SEKRETARIAT DPRD*
	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD						91.286.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik				100.414.600,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD (Dokumen)		*0.00*	*6.00*	*6.00*		*(Sekretariat DPRD, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*6.00*		*SEKRETARIAT DPRD*
	4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan						91.286.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					100.414.600,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan (Dokumen)		*0.00*	*6.00*	*6.00*		*(Sekretariat DPRD, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*6.00*		*SEKRETARIAT DPRD*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	*Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD (Dokumen)*		*0.00*	*6.00*	*6.00*	96.982.000,00	*(Sekretariat DPRD, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik		*Aparatur*	*6.00*	106.680.200,00	*SEKRETARIAT DPRD*
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	*Tersusun dan terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen Rencana lima tahunan (RPJM) Maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) (%)*				*100*	103.750.000,00	*(Sekretariat DPRD, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*100*	114.125.000,00	*SEKRETARIAT DPRD*
	4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum (Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*10.00*	20.750.000,00	*(Sekretariat DPRD, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik		*Aparatur*	*10.00*	22.825.000,00	*SEKRETARIAT DPRD*
	4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur (Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*10.00*	20.750.000,00	*(Sekretariat DPRD, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik		*Aparatur*	*10.00*	22.825.000,00	*SEKRETARIAT DPRD*
	4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	*Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat (Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*10.00*	20.750.000,00	*(Sekretariat DPRD, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik		*Aparatur*	*10.00*	22.825.000,00	*SEKRETARIAT DPRD*
	4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian (Laporan)*		*0.00*	*0.00*	*10.00*	20.750.000,00	*(Sekretariat DPRD, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik		*Aparatur*	*10.00*	22.825.000,00	*SEKRETARIAT DPRD*
	4.02.02.2.03.0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam						20.750.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik				22.825.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*10.00*		*(Sekretariat DPRD, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*10.00*		*SEKRETARIAT DPRD*
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	*Tersusun dan terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen Rencana lima tahunan (RPJM) Maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) (%)*				*100*	2.754.835.437,00	*(Di Dalam dan di Luar Pesisir Barat, Luar Wilayah)*		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*100*	3.030.318.981,00	*SEKRETARIAT DPRD*
	4.02.02.2.04.0001	Orientasi DPRD	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*1.00*	300.000.000,00	*(Di Luar Pesisir Barat, Luar Wilayah)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik		*Aparatur*	*0.00*	330.000.000,00	*SEKRETARIAT DPRD*
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	*Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD (Dokumen)*		*12.00*	*12.00*	*12.00*	1.912.564.937,00	*(Diluar Pesisir Barat, Luar Wilayah)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik		*Aparatur*	*12.00*	2.103.821.431,00	*SEKRETARIAT DPRD*
	4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	*Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli (Orang)*		*4.00*	*4.00*	*4.00*	195.000.000,00	*(Sekretariat DPRD, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik		*Aparatur*	*4.00*	214.500.000,00	*SEKRETARIAT DPRD*
	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	*Jumlah Tenaga Ahli Fraksi (Orang)*		*6.00*	*6.00*	*6.00*	347.270.500,00	*(Sekretariat DPRD, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik		*Aparatur*	*6.00*	381.997.550,00	*SEKRETARIAT DPRD*
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	*Tersusun dan terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen Rencana lima tahunan (RPJM) Maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) (%)*				*100*	1.100.875.350,00	*(Semua Wilayah Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*100*	1.210.962.885,00	*SEKRETARIAT DPRD*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD (Laporan)*		*36.00*	*36.00*	*36.00*	130.000.000,00	*(Semua Wilayah Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik		*Aparatur, Masyarakat*	*36.00*	143.000.000,00	*SEKRETARIAT DPRD*
	4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	*Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun (Dokumen)*		*1.00*	*1.00*	*1.00*	27.152.750,00	*(Sekretariat DPRD, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik		*Aparatur, Masyarakat*	*1.00*	29.868.025,00	*SEKRETARIAT DPRD*
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	*Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses (Dokumen)*		*3.00*	*3.00*	*3.00*	943.722.600,00	*(Semua Wilayah Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik		*Aparatur, Masyarakat*	*3.00*	1.038.094.860,00	*SEKRETARIAT DPRD*
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	*Tersusun dan terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen Rencana lima tahunan (RPJM) Maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) (%)*				*100*	8.879.814.480,00	*(Di Dalam dan di Luar Pesisir Barat, Luar Wilayah)*		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*100*	9.767.795.928,00	*SEKRETARIAT DPRD*
	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD (Dokumen)*		*28.00*	*28.00*	*28.00*	8.850.000.000,00	*(Di Luar Pesisir Barat, Luar Wilayah)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik		*Aparatur*	*28.00*	9.735.000.000,00	*SEKRETARIAT DPRD*
	4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah (Dokumen)*		*12.00*	*12.00*	*12.00*	29.814.480,00	*(Sekretariat DPRD, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik		*Aparatur*	*12.00*	32.795.928,00	*SEKRETARIAT DPRD*
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**222.625.392.008,00**							**25.711.687.189,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**						**10.152.174.063,00**							**10.152.174.063,00**	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**5.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**3.866.833.917,00**			**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas**			**3.866.833.917,00**	
			Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	***90***			***92,50***									***BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH***
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						28.693.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			28.693.000,00	
			Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)				*100*		*(Krui, Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH*
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						4.025.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			4.025.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)		*2*	*2*	*2.00*		*(Krui, Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*2.00*		*BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH*
	5.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						4.106.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			4.106.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)		*1*	*1*	*1*		*(Kantor Bappelitbangda, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH*
	5.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						4.106.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			4.106.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)		*1*	*1*	*1*		*(Kantor Bappelitbangda, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH*
	5.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						4.106.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			4.106.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)		*1*	*1*	*1*		*(Kantor Bappelitbangda, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH*
	5.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						4.106.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			4.106.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)		*1*	*1*	*1*		*(Kantor Bappelitbangda, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH*
	5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						4.152.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			4.152.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		*1*	*1*	*1*		*(Kantor Bappelitbangda, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH*
	5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						4.092.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			4.092.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		*1*	*1*	*1*		*(Kantor Bappelitbangda, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH*
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.673.722.917,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.673.722.917,00	
			Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu (%)				*100*		*(Krui, Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH*
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2.659.686.917,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.659.686.917,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		*20*	*19*	*19*		*(Kantor Bappelitbangda, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*19*		*BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)*		*1*	*1*	*1*	4.130.000,00	*(Kantor Bappelitbangda, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*1*	4.130.000,00	*BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH*
	5.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)*		*2*	*2*	*2*	5.834.000,00	*(Kantor Bappelitbangda, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*2*	5.834.000,00	*BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH*
	5.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)*		*1*	*1*	*1*	4.072.000,00	*(Kantor Bappelitbangda, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*1*	4.072.000,00	*BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH*
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Aparatur yang berkinerja Baik (%)*				*100*	125.000.000,00	*(Krui, Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*100*	125.000.000,00	*BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH*
	5.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)*		*20*	*20*	*19*	125.000.000,00	*(Diluar Wilayah Kabupaten Pesisir Barat, Luar Wilayah)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*19*	125.000.000,00	*BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH*
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						634.648.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			634.648.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja (%)				*100*		*(Krui, Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH*
	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						25.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			25.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		*1*	*1*	*1*		*(Lokasi Pameran di Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH*
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						114.648.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			114.648.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*12*	*12*	*12*		*(Kantor Bappelitbangda, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH*
	5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						84.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			84.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		*12*	*12*	*12*		*(Kantor Bappelitbangda, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH*
	5.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						11.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			11.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)		*11*	*11*	*11*		*(Kantor Bappelitbangda, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*11*		*BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH*
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						400.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			400.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(Didalam Wilayah Kab. Pesisir Barat dan diluar Wilayah Kab. Pesisir Barat, Luar Wilayah)*				*Aparatur*	*12*		*BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						20.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			20.000.000,00	
			Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja (%)				*100*		*(Kantor Bappelitbangda, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH*
	5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						20.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			20.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		*2*	*1*	*1*		*(Kantor Bappelitbangda, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH*
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						216.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			216.000.000,00	
			Persentase Pemenuhan Pelayanan Pendukung (%)				*100*		*(Krui, Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH*
	5.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						216.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			216.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(Krui, Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH*
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						168.770.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			168.770.000,00	
			Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dalam Kondisi Baik (%)				*100*		*(Krui, Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH*
	5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						135.250.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			135.250.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		*5*	*5*	*5*		*(Krui, Kab Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*5*		*BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH*
	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						8.520.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			8.520.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		*12*	*12*	*12*		*(Kantor Bappelitbangda, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH*
	5.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						25.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			25.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*0.00*	*0.00*	*12*		*(Kantor Bapppelitbangda, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH*
2.	**5.01.02**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**						**3.155.165.031,00**			**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas**			**3.155.165.031,00**	
			Cakupan Konsistensi Dokumen Perencanaan Terhadap Dokumen Penganggaran (%)				***100***									***BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH***
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan						2.150.294.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.150.294.000,00	
			Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke Dalam APBD (%)				*100*		*(Krui, Kab Ppesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH*
	5.01.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah						348.574.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			348.574.000,00	
			Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) (Dokumen)		*1*	*2*	*2*		*(Krui, Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*2*		*BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.02.2.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	*Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah (Dokumen)*		*1*	*1*	*1*	200.808.000,00	*(Krui, Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*1*	200.808.000,00	*BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH*
	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	*Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (Berita Acara)*		*0.00*	*0.00*	*1*	175.000.000,00	*(Krui, Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*1*	175.000.000,00	*BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH*
	5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	*Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (Berita Acara)*		*0.00*	*0.00*	*1*	125.000.000,00	*(Krui, Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*1*	125.000.000,00	*BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH*
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	*Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Berita Acara)*		*1*	*1*	*2*	514.807.000,00	*(Krui, Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*1*	514.807.000,00	*BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH*
	5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	*Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan (Usulan)*		*1*	*1*	*1*	154.263.000,00	*(Krui, Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*1*	154.263.000,00	*BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH*
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota						631.842.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			631.842.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan *(RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen)*		*2*	*2*	*3*		*(Krui, Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*2*		*BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH*
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	*Cakupan data dan Informasi Pembangunan Daerah (%)*				*100*	435.778.000,00	*(Krui, Kab Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*100*	435.778.000,00	*BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH*
	5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) (Dokumen)*		*1*	*2*	*1*	263.042.000,00	*(Krui, Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*1*	263.042.000,00	*BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH*
	5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	*Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi (Orang)*		*39*	*39*	*39*	172.736.000,00	*(Krui, Kab Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*39*	172.736.000,00	*BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH*
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	*Penjabaran Konsistensi rogram RPJMD kedalam RKPD (%)*				*100*	569.093.031,00	*(Krui, Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*100*	569.093.031,00	*BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH*
	5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)*		*1*	*1*	*1*	224.089.000,00	*(Krui, Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*1*	224.089.000,00	*BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)*		*2*	*4*	*2*	345.004.031,00	*(Krui, Kab Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*2*	345.004.031,00	*BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH*
3.	**5.01.03**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	***Cakupan Konsistensi Keselarasan Program Prioritas Daerah Terhadap Program Prioritas Pusat (%)***				***85***	**3.130.175.115,00**			**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas**			**3.130.175.115,00**	***BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH***
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	*Rata-rata capaian kinerja bidang pemerintahan dan pembangunan manusia (%)*				*70*	1.589.255.115,00	*(Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*70*	1.589.255.115,00	*BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH*
	5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)*		*1*	*1*	*1*	218.604.115,00	*(Krui, Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*1*	218.604.115,00	*BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH*
	5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	*Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)*		*1*	*1*	*1*	191.139.000,00	*(Krui, Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*1*	191.139.000,00	*BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH*
	5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan						194.017.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			194.017.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)		*1*	*1*	*1*		*(Krui, Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH*
	5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan						193.075.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			193.075.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan (Laporan)		*1*	*1*	*1*		*(Krui, Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH*
	5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						196.656.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			196.656.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Krui, Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH*
	5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia						196.656.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			196.656.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Krui, Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH*
	5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia						189.335.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			189.335.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)		*1*	*1*	*1*		*(Krui, Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH*
	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia						209.773.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			209.773.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)		*1*	*1*	*1*		*(Krui, Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)						771.714.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			771.714.000,00	
			Rata-rata capaian kinerja bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) (%)				*70*		*(Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*70*		*BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH*
	5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian						190.460.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			190.460.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Krui, Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH*
	5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian						190.062.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			190.062.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian (Laporan)		*0.00*	*1*	*1*		*(Krui, Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH*
	5.01.03.2.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA						190.460.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			190.460.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)		*0.00*	*0.00*	*1*		*(Krui, Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH*
	5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA						200.732.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			200.732.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA (Laporan)		*0.00*	*1*	*1*		*(Krui, Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH*
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan						769.206.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			769.206.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Rata-rata capaian kinerja bidang infrastruktur dan kewilayahan (%)				*70*		*(Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*70*		*BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH*
	5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur						190.460.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			190.460.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)		*1*	*1*	*1*		*(Krui, Kab Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH*
	5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur						201.218.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			201.218.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur (Laporan)		*1*	*1*	*1*		*(Krui, Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH*
	5.01.03.2.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan						186.491.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			186.491.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)		*1*	*1*	*1*		*(Krui, Kab Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH*
	5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan						191.037.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			191.037.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan (Laporan)		*1*	*1*	*1*		*(Krui, Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH*
	5.02	**KEUANGAN**						**203.966.793.768,00**							**7.053.088.949,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**15.878.405.191,00**			**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas**			**3.952.775.142,00**	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)				***92.50***									***BADAN PENDAPATAN DAERAH***
			Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)				***92,50***									***BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH***
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						28.650.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			15.150.500,00	
			Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu (%)				*100*		*(Kantor BAPENDA Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*BADAN PENDAPATAN DAERAH*
			Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu (%)				*100*		*(Kantor BPKAD Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH*
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						9.703.250,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			9.703.250,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)		*2*	*2*	*2*		*(Kantor BPKAD Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*2*		*BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH*
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)		*2.00*	*2.00*	*2.00*		*(Kantor BAPENDA, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*2.00*		*BADAN PENDAPATAN DAERAH*
	5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						2.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					-	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)		*1*	*1*	*1*		*(Kantor BPKAD Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH*
	5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						2.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					-	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)		*1*	*1*	*1*		*(Kantor BPKAD Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH*
	5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						2.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					-	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)		*1*	*1*	*1*		*(Kantor BPKAD Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH*
	5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						2.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					-	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)		*1*	*1*	*1*		*(Kantor BPKAD Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH*
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						8.947.250,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			5.447.250,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		*1.00*	*2.00*	*2.00*		*(Kantor BAPENDA, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*2.00*		*BADAN PENDAPATAN DAERAH*
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		*1*	*1*	*1*		*(Kantor BPKAD Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH*
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						2.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					-	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		*1*	*1*	*1*		*(Kantor BPKAD Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH*
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						13.085.871.711,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.859.287.142,00	
			Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu (%)				*100*		*(Kantor BPKAD Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH*
			Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)				*100*		*(Kantor BAPENDA Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*BADAN PENDAPATAN DAERAH*
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						13.064.423.561,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.848.838.992,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		*14.00*	*14.00*	*14.00*		*(Kantor BAPENDA, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*14.00*		*BADAN PENDAPATAN DAERAH*
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		*14*	*14*	*14*		*(Kantor BPKAD Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*14*		*BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH*
	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						7.628.200,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.628.200,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(Kantor BAPENDA, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1.00*		*BADAN PENDAPATAN DAERAH*
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		*1*	*1*	*1*		*(Kantor BPKAD Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH*
	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						7.436.200,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.436.200,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		*1.00*	*2.00*	*2.00*		*(Kantor BAPENDA, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*2.00*		*BADAN PENDAPATAN DAERAH*
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		*2*	*2*	*2*		*(Kantor BPKAD Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*2*		*BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH*
	5.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						6.383.750,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					5.383.750,00	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(Kantor BAPENDA, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1.00*		*BADAN PENDAPATAN DAERAH*
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)		*1*	*1*	*1*		*(Kantor BPKAD Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH*
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						360.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			100.000.000,00	
			Persentase Aparatur yang Berkinerja Baik (%)				*100*		*(Kantor BAPENDA KAbupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*BADAN PENDAPATAN DAERAH*
			Persentase aparatur yang berkinerja baik (%)				*100*		*(Kantor BPKAD Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH*
	5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						60.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					-	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)		*60*	*0.00*	*60*		*(Kabupaten Pesisir Barat atau luar daerah, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*60*		*BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						300.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			100.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)		*10.00*	*12.00*	*12.00*		*(Bandar Lampung, Pulau Jawa, Luar Wilayah)*				*Aparatur*	*12.00*		*BADAN PENDAPATAN DAERAH*
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)		*22*	*22*	*23*		*(Kabupaten Pesisir Barat atau luar daerah, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*23*		*BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH*
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						1.402.512.980,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			509.827.500,00	
			Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja (%)				*100*		*(Kantor BAPENDA Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*BADAN PENDAPATAN DAERAH*
			Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja (%)				*100*		*(Kabupaten Pesisir Barat atau luar daerah, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH*
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						50.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			25.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		*1*	*1*	*1*		*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH*
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(Kecamatan Pesisir Tengah, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1.00*		*BADAN PENDAPATAN DAERAH*
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						490.827.500,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			100.827.500,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*12*	*12*	*12*		*(Kabupaten Pesisir Barat dan luar daerah, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH*
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*12.00*	*12.00*	*12.00*		*(Kantor BAPENDA, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12.00*		*BADAN PENDAPATAN DAERAH*
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						84.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			12.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		*10.00*	*10.00*	*12.00*		*(Kantor BAPENDA, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12.00*		*BADAN PENDAPATAN DAERAH*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		*12*	*12*	*12*		*(Kabupaten Pesisir Barat atau luar daerah, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH*
	5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						172.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			22.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)		*11*	*11*	*11*		*(Kabupaten Pesisir Barat atau luar daerah, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*11*		*BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH*
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)		*11.00*	*12.00*	*11.00*		*(Kantor BAPENDA, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*11.00*		*BADAN PENDAPATAN DAERAH*
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						605.685.480,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			350.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*12.00*	*12.00*	*12.00*		*(Seluruh Kecamatan di Pesisir Barat dan Wilayah di luar Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12.00*		*BADAN PENDAPATAN DAERAH*
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(Kabupaten Pesisir Barat atau luar daerah, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH*
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						215.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			150.000.000,00	
			Persentase ketersediaan peralatan dan mesin (%)				*100*		*(Kabupaten Pesisir Barat atau luar daerah, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH*
			Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja (%)				*100*		*(Kantor BAPENDA KAbupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*BADAN PENDAPATAN DAERAH*
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						215.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			150.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		*0.00*	*15*	*5*		*(Kabupaten Pesisir Barat atau luar daerah, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*5*		*BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH*
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		*0.00*	*0.00*	*12.00*		*(Kantor BAPENDA, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12.00*		*BADAN PENDAPATAN DAERAH*
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						452.420.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			185.760.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase Pemenuhan Layanan Pendukung (%)				*100*		*(Kantor BAPENDA KAbupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*BADAN PENDAPATAN DAERAH*
			Persentase pemenuhan Layanan Pendukung (%)				*100*		*(Kabupaten Pesisir Barat atau luar daerah, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH*
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						37.500.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					-	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(Kabupaten Pesisir Barat atau luar daerah, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH*
	5.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						401.160.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			180.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(Kabupaten Pesisir Barat atau luar daerah, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH*
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)		*12.00*	*12.00*	*12.00*		*(Kantor BAPENDA, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12.00*		*BADAN PENDAPATAN DAERAH*
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						13.760.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			5.760.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		*12.00*	*12.00*	*12.00*		*(Kantor BAPENDA, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12.00*		*BADAN PENDAPATAN DAERAH*
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(Kabupaten Pesisir Barat atau luar daerah, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH*
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						333.950.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			132.750.000,00	
			Persentase Barang Milik Daerah yang Dalam Kondisi Baik (%)				*100*		*(Kantor BAPENDA Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*BADAN PENDAPATAN DAERAH*
	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						253.100.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			112.750.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		*7*	*7*	*7*		*(Kabupaten Pesisir Barat atau luar daerah, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*7*		*BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		*12.00*	*8.00*	*8.00*		*(Kantor BAPENDA, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*8.00*		*BADAN PENDAPATAN DAERAH*
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						10.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			10.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		*0.00*	*0.00*	*10*		*(Kantor BAPENDA, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*10*		*BADAN PENDAPATAN DAERAH*
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						10.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			10.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(Kantor BAPENDA, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1.00*		*BADAN PENDAPATAN DAERAH*
	5.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						60.850.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					-	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*85*	*85*	*85*		*(Kabupaten Pesisir Barat atau luar daerah, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*85*		*BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH*
2.	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**						**182.614.083.973,00**				**Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas**			**-**	
			Cakupan Tata Kelola Keuangan Daerah sesuai Aturan (%)				***100***									***BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH***
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah						3.376.150.000,00				Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			-	
			Cakupan Dokumen penganggaran daerah tepat waktu (%)				*100*		*(Kabupaten Pesisir Barat atau luar daerah, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH*
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS						357.549.960,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					-	
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Dokumen)		*2*	*2*	*2*		*(Kabupaten Pesisir Barat atau luar daerah, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*0.00*		*BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH*
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS						358.632.800,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					-	
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dokumen)		*2*	*2*	*2*		*(Kabupaten Pesisir Barat atau luar daerah, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*2*		*BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	*Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)*		*1*	*1*	*1*	103.285.060,00	*(Kabupaten Pesisir Barat atau luar daerah, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*Aparatur*	*1*	-	*BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH*
	5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)*		*1*	*1*	*1*	101.785.060,00	*(Kabupaten Pesisir Barat atau luar daerah, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*Aparatur*	*1*	-	*BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH*
	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	*Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)*		*1*	*1*	*1*	89.268.620,00	*(Kabupaten Pesisir Barat atau luar daerah, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*Aparatur*	*1*	-	*BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH*
	5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	*Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)*		*1*	*1*	*1*	90.292.500,00	*(Kabupaten Pesisir Barat atau luar daerah, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*Aparatur*	*1*	-	*BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH*
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	*Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dokumen)*		*2*	*2*	*2*	896.990.000,00	*(Kabupaten Pesisir Barat atau luar daerah, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*Aparatur*	*2*	-	*BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH*
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	*Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Dokumen)*		*2*	*2*	*2*	901.818.000,00	*(Kabupaten Pesisir Barat atau luar daerah, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*Aparatur*	*2*	-	*BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH*
	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	*Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Dokumen)*		*3*	*3*	*3*	476.528.000,00	*(Kabupaten Pesisir Barat atau luar daerah, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*Aparatur*	*3*	-	*BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH*
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	*Cakupan Dokumen penatausahaan keuangan daerah tepat waktu (%)*				*100*	3.223.748.520,00	*(Kabupaten Pesisir Barat atau luar daerah, KAB. PESISIR BARAT)*			Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*100*	-	*BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dokumen)*		*36*	*36*	*36*	1.553.929.400,00	*(Kabupaten Pesisir Barat atau luar daerah, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*Aparatur*	*36*	-	*BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH*
	5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	*Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD (Dokumen)*		*2*	*2*	*2*	181.606.000,00	*(Kabupaten Pesisir Barat atau luar daerah, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*Aparatur*	*2*	-	*BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH*
	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya (Dokumen)*		*12*	*12*	*12*	424.909.120,00	*(Kabupaten Pesisir Barat atau luar daerah, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*Aparatur*	*12*	-	*BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH*
	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	*Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait (Dokumen)*		*12*	*12*	*12*	421.506.000,00	*(Kabupaten Pesisir Barat atau luar daerah, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*Aparatur*	*12*	-	*BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH*
	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)*		*0*	*0*	*78*	641.798.000,00	*(Kabupaten Pesisir Barat atau luar daerah, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*Aparatur*	*78*	-	*BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH*
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	*Cakupan Laporan Keuangan daerah tepat waktu (%)*				*100*	837.460.400,00	*(Kabupaten Pesisir Barat atau luar daerah, KAB. PESISIR BARAT)*			Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*100*	-	*BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH*
	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	*Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran (Laporan)*		*2*	*2*	*2*	90.431.000,00	*(Kabupaten Pesisir Barat atau luar daerah, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*Aparatur*	*2*	-	*BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH*
	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah						523.494.400,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					-	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (Laporan)		*1*	*1*	*1*		*(Kabupaten Pesisir Barat atau luar daerah, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH*
	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota						188.535.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					-	
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Dokumen)		*2*	*2*	*2*		*(Kabupaten Pesisir Barat atau luar daerah, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*2*		*BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH*
	5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah						35.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					-	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah (Dokumen)		*0*	*0*	*1*		*(Kabupaten Pesisir Barat atau luar daerah, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH*
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah						174.480.119.053,00				Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			-	
			Cakupan pemenuhan penunjang pengelolaan keuangan daerah (%)				*100*		*(Kabupaten Pesisir Barat atau luar daerah, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH*
	5.02.02.2.04.0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah						1.500.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					-	
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah (Laporan)		*0.00*	*1*	*1*		*(Kabupaten Pesisir Barat atau luar daerah, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH*
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak						6.615.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					-	
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(Kabupaten Pesisir Barat atau luar daerah, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH*
	5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota						166.365.119.053,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					-	
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	*Cakupan penggunaan SIPD dalam keuangan daerah (%)*				*100*	696.606.000,00	*(Kabupaten Pesisir Barat atau luar daerah, KAB. PESISIR BARAT)*			Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*100*	-	*BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH*
	5.02.02.2.05.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)*		*0.00*	*60*	*60*	696.606.000,00	*(Kabupaten Pesisir Barat atau luar daerah, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*Aparatur*	*60*	-	*BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH*
3.	**5.02.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	***Cakupan Tata kelola barang milik daerah sesuai aturan (%)***				***100***	**2.373.990.797,00**				**Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas**			**-**	***BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH***
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	*Cakupan pencatatan aset daerah (%)*				*100*	2.373.990.797,00	*(Kabupaten Pesisir Barat atau luar daerah, KAB. PESISIR BARAT)*			Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*100*	-	*BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH*
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	*Jumlah Standar Harga yang Disusun (Dokumen)*		*1*	*1*	*1*	306.051.600,00	*(Kabupaten Pesisir Barat atau luar daerah, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*Aparatur*	*1*	-	*BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH*
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (Laporan)*		*2*	*2*	*2*	757.925.197,00	*(Kabupaten Pesisir Barat atau luar daerah, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*Aparatur*	*2*	-	*BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH*
	5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah (Laporan)*		*1*	*1*	*1*	444.214.000,00	*(Kabupaten Pesisir Barat atau luar daerah, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*Aparatur*	*1*	-	*BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH*
	5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah (Laporan)*		*1*	*1*	*1*	459.800.000,00	*(Kabupaten Pesisir Barat atau luar daerah, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*Aparatur*	*1*	-	*BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Dokumen)*		*0.00*	*1*	*1*	406.000.000,00	*(Kabupaten Pesisir Barat atau luar daerah, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*Aparatur*	*1*	-	*BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH*
4.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	***Rasio PAD terhadap pendapatan daerah (%)***				***4,26***	**3.100.313.807,00**			**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas**			**3.100.313.807,00**	***BADAN PENDAPATAN DAERAH***
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	*Terlaksananya Pengelolaan Pendapatan Daerah (%)*				*100*	3.100.313.807,00	*(Seluruh Pekon, Keliurahan, dan Kecamatan di Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*100*	3.100.313.807,00	*BADAN PENDAPATAN DAERAH*
	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	*Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah (Dokumen)*		*2.00*	*0.00*	*2.00*	150.000.000,00	*(Seluruh Pekon, Kelurahan, dan Kecamatan di Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparat*	*2.00*	150.000.000,00	*BADAN PENDAPATAN DAERAH*
	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dokumen)*		*0.00*	*1.00*	*8.00*	287.274.000,00	*(Kantor BAPENDA, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur dan Masyarakat*	*8.00*	287.274.000,00	*BADAN PENDAPATAN DAERAH*
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan)*		*0.00*	*1.00*	*12.00*	398.605.000,00	*(Seluruh Kelurahan dan Kecamatan di Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Masyarakat*	*12.00*	398.605.000,00	*BADAN PENDAPATAN DAERAH*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Unit)*		*0.00*	*0.00*	*20*	230.000.000,00	*(Seluruh Kecamatan di Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Masyarakat*	*20*	230.000.000,00	*BADAN PENDAPATAN DAERAH*
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)*		*12.00*	*12.00*	*12.00*	122.905.600,00	*(Seluruh Kecamatan di Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur dan Masyarakat*	*12.00*	122.905.600,00	*BADAN PENDAPATAN DAERAH*
	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan)*		*12.00*	*12.00*	*12.00*	676.974.000,00	*(Kantor BAPENDA dan Seluruh Kecamatan di Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparat dan Masyarakat*	*12.00*	676.974.000,00	*BADAN PENDAPATAN DAERAH*
	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	*Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*12*	110.000.000,00	*(Kantor BAPENDA, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*12*	110.000.000,00	*BADAN PENDAPATAN DAERAH*
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen)*		*12.00*	*12.00*	*12.00*	245.888.447,00	*(Seluruh Kelurahan dan Kecamatan di Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Masyarakat*	*12.00*	245.888.447,00	*BADAN PENDAPATAN DAERAH*
	5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*12*	120.711.960,00	*(Seluruh Kelurahan dan Kecamatan di Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Masyarakat*	*12*	120.711.960,00	*BADAN PENDAPATAN DAERAH*
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah						400.350.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			400.350.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dokumen)		*1.00*	*0.00*	*12.00*		*(Kantor BAPENDA dan Seluruh Kecamatan di Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur dan Masyarakat*	*12.00*		*BADAN PENDAPATAN DAERAH*
	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah						150.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			150.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)		*12.00*	*1.00*	*4.00*		*(Seluruh Kecamatan di Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Masyarakat dan OPD Terkait*	*4.00*		*BADAN PENDAPATAN DAERAH*
	5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah						207.604.800,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			207.604.800,00	
			Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Laporan)		*0.00*	*1.00*	*12.00*		*(Seluruh Kecamatan di Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Masyarakat*	*12.00*		*BADAN PENDAPATAN DAERAH*
	5.03	**KEPEGAWAIAN**						**4.317.648.916,00**							**4.317.648.916,00**	
1.	**5.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.583.313.341,00**				**Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas**			**2.583.313.341,00**	
			Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	***92,5***			***92.50***									***BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA***
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						7.000.000,00				Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			7.000.000,00	
			Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu (%)				*100*		*(Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA*
	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						2.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)		*2.00*	*2.00*	*2.00*		*(Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*2.00*		*BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA*
	5.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						2.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*2*		*BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA*
	5.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						1.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.000.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*2*		*(Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*2*		*BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA*
	5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						2.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		*4*	*4*	*4*		*(Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*4*		*BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA*
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.961.068.200,00				Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.961.068.200,00	
			Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu (%)				*100*		*(Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA*
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.955.568.200,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.955.568.200,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		*14*	*14*	*14*		*(Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*14*		*BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA*
	5.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						2.500.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.500.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		*1*	*1*	*1*		*(Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA*
	5.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						2.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA*
	5.03.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						1.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)		*1*	*1*	*1*		*(Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA*
	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						30.000.000,00				Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			30.000.000,00	
			Persentase aparatur yang berkinerja baik (%)				*100*		*(Diluar Wilayah Kabupaten Pesisir Barat, Luar Wilayah)*					*100*		*BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA*
	5.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						30.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			30.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)		*1*	*1*	*3*		*(Luar Kabupaten Pesisir Barat, Luar Wilayah)*				*Aparatur*	*3*		*BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA*
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						301.583.141,00				Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			301.583.141,00	
			Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah (%)				*100*		*(Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA*
	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						25.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			25.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		*1*	*1*	*1*		*(Didalam Wilayah Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA*
	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						49.870.400,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			49.870.400,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*1.00*	*1.00*	*12.00*		*(Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA*
	5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						12.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			12.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		*10*	*10*	*10*		*(Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*10*		*BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA*
	5.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						11.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			11.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)		*11*	*11*	*11*		*(Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*11*		*BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA*
	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						203.712.741,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			203.712.741,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*12.00*	*12.00*	*12.00*		*(Didalam dan Diluar Wilayah Kabupaten Pesisir Barat, Luar Wilayah)*				*Aparatur*	*12.00*		*BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA*
	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						81.980.000,00				Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			81.980.000,00	
			Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah (%)				*100*		*(Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA*
	5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						81.980.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			81.980.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		*7.00*	*0.00*	*6.00*		*(Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*6.00*		*BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA*
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						131.642.000,00				Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			131.642.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang (%)				*100*		*(Didalam Wilayah Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA*
	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						2.400.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.400.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*12*	*12*	*12.00*		*(Didalam Wilayah Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12.00*		*BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA*
	5.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						127.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			127.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(Didalam Wilayah Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA*
	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						2.242.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.242.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA*
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						70.040.000,00				Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			70.040.000,00	
			Persentase Barang Milik Daerah yang dalam kondisi baik (%)				*100*		*(Didalam Wilayah Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA*
	5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						60.100.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			60.100.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		*2*	*2*	*2*		*(Didalam Wilayah Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*2*		*BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA*
	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						9.940.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			9.940.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		*13*	*13*	*14*		*(Didalam Wilayah Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*14*		*BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA*
2.	**5.03.02**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	***Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian (%)***				***73.54***	**1.734.335.575,00**				**Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas**			**1.734.335.575,00**	***BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA***
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	*Persentase Pemenuhan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian (%)*				*100*	797.481.800,00	*(Didalam dan Diluar Wilayah Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*			Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*100*	797.481.800,00	*BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA*
	5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	*Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK (Dokumen)*		*1*	*1*	*2*	556.040.800,00	*(Didalam dan Diluar Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*2*	556.040.800,00	*BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA*
	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	*Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian (Dokumen)*		*1*	*1*	*2*	48.889.000,00	*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*2*	48.889.000,00	*BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA*
	5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	*Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi (Lembaga)*		*1*	*1*	*1*	71.344.000,00	*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*1*	71.344.000,00	*BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA*
	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian						96.974.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			96.974.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)		*2.00*	*1*	*2.00*		*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*2.00*		*BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA*
	5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian						24.234.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			24.234.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian (Dokumen)		*1*	*1*	*2*		*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*2*		*BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA*
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN						630.374.400,00				Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			630.374.400,00	
			Persentase Pemenuhan Mutasi dan Promosi ASN (%)				*100*		*(Didalam dan Diluar Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA*
	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN						220.498.800,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			220.498.800,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah (Dokumen)		*2*	*3*	*3*		*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*3*		*BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA*
	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN						409.875.600,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			409.875.600,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN (Dokumen)		*1*	*2*	*2*		*(Diluar dan Didalam Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*2*		*BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA*
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur						306.479.375,00				Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			306.479.375,00	
			Persentase Pemenuhan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (%)				*100*		*(Didalam dan Diluar Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA*
	5.03.02.2.04.0003	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur						79.677.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			79.677.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Laporan)		*12*	*1*	*12*		*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA*
	5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai						146.483.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			146.483.000,00	
			Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan (Orang)		*1259*	*1000*	*1000*		*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1000*		*BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA*
	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN						80.319.375,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			80.319.375,00	
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan (Orang)		*5*	*5*	*5*		*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*5*		*BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA*
	5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**						**2.648.176.820,00**							**2.648.176.820,00**	
1.	**5.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	***Persentase Pejabat ASN telah yang mengikuti Pelatihan Kepemimpinan (%)***				***22.42***	**2.648.176.820,00**				**Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas**			**2.648.176.820,00**	***BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA***
	5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis						260.770.000,00				Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			260.770.000,00	
			Persentase Pemenuhan Pengembangan Kompetensi Teknis (%)				*100*		*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA*
	5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum						260.770.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			260.770.000,00	
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi (Orang)		*80.00*	*0.00*	*160*		*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*160*		*BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	*Persentase Pemenuhan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional (%)*				*100*	2.387.406.820,00	*(Diluar Kabupaten Pesisir Barat, Luar Wilayah)*			Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*100*	2.387.406.820,00	*BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA*
	5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	*Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan (Laporan)*		*2.00*	*3.00*	*3.00*	2.387.406.820,00	*(Didalam dan Diluar Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*3.00*	2.387.406.820,00	*BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA*
	5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**						**1.540.598.441,00**							**1.540.598.441,00**	
1.	**5.05.02**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	***Indeks Inovasi Daerah (Angka)***				***Sangat Inovatif***	**1.540.598.441,00**			**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas**			**1.540.598.441,00**	***BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH***
	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	*Persentase Pemanfaatan hasil kelitbangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan (%)*				*80*	490.598.441,00	*(Krui, kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*80*	490.598.441,00	*BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH*
	5.05.02.2.01.0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum (Laporan)*		*0.00*	*1*	*1*	125.598.441,00	*(Krui, Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*1*	125.598.441,00	*BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.05.02.2.01.0004	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi (Laporan)*		*0.00*	*1*	*1*	125.000.000,00	*(Krui, Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*1*	125.000.000,00	*BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH*
	5.05.02.2.01.0005	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi (Laporan)*		*0.00*	*4*	*1*	120.000.000,00	*(Krui, Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*1*	120.000.000,00	*BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH*
	5.05.02.2.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	*Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik (Laporan)*		*1*	*1*	*1*	120.000.000,00	*(Krui, Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*1*	120.000.000,00	*BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH*
	5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	*Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan bidang sosial dan kependudukan (%)*				*80*	120.000.000,00	*(Krui, Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*80*	120.000.000,00	*BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH*
	5.05.02.2.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	*Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial (Dokumen)*		*0.00*	*1*	*1*	120.000.000,00	*(Krui, Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*1*	120.000.000,00	*BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH*
	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan						930.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			930.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan bidang ekonomi dan pembangunan (%)				*80*		*(Krui, Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*80*		*BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH*
	5.05.02.2.03.0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	*Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*1*	310.000.000,00	*(Krui, Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*1*	310.000.000,00	*BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH*
	5.05.02.2.03.0010	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	*Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*1*	310.000.000,00	*(Krui, Kab.Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*1*	310.000.000,00	*BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH*
	5.05.02.2.03.0012	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	*Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan (Dokumen)*		*0.00*	*0.00*	*1*	310.000.000,00	*(Krui, Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*1*	310.000.000,00	*BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH*
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**						**8.813.620.900,00**							**9.694.982.990,00**	
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**						**8.813.620.900,00**							**9.694.982.990,00**	
1.	**6.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)***				***92,5***	**5.053.620.900,00**			**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas**			**5.558.982.990,00**	***INSPEKTORAT***
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						7.400.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			8.140.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu (%)				*100*		*(Kantor Inspektorat Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*INSPEKTORAT*
	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						1.900.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.090.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)		*2.00*	*2.00*	*2.00*		*(Kantor Inspektorat Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*2.00*		*INSPEKTORAT*
	6.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						5.500.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			6.050.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(Kantor Inspektorat Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1.00*		*INSPEKTORAT*
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.253.420.900,00				Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			3.578.762.990,00	
			Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu (%)				*100*		*(KAB. PESISIR BARAT)*					*110*		*INSPEKTORAT*
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						3.247.370.900,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					3.572.107.990,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		*19.00*	*19.00*	*19.00*		*(Kantor Inspektorat Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*19.00*		*INSPEKTORAT*
	6.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						2.750.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					3.025.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		*1*	*1*	*1*		*(Kantor Inspektorat Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*INSPEKTORAT*
	6.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						2.200.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.420.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		*2*	*2*	*2*		*(Kantor Inspektorat Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*2*		*INSPEKTORAT*
	6.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						1.100.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.210.000,00	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)		*1*	*1*	*1*		*(Kantor Inspektorat Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*INSPEKTORAT*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Aparatur yang Berkinerja Baik (%)*				*100*	400.000.000,00	*(KAB. PESISIR BARAT)*			Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*100*	440.000.000,00	*INSPEKTORAT*
	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)*		*12*	*12*	*12*	300.000.000,00	*(Luar Wilayah Kabupaten Pesisir Barat (menyesuaikan agenda penyelenggara diklat), Luar Wilayah)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*Aparatur*	*19*	330.000.000,00	*INSPEKTORAT*
	6.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)*		*12*	*12*	*19*	100.000.000,00	*(Luar Wilayah Kabupaten Pesisir Barat dan dalam wilayah Kab. Pesisir Barat (untuk Pelatihan Kantor Sendiri/PKS), Luar Wilayah)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*Aparatur*	*19*	110.000.000,00	*INSPEKTORAT*
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja (%)*				*100*	562.000.000,00	*(KAB. PESISIR BARAT)*			Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*100*	618.200.000,00	*INSPEKTORAT*
	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)*		*12*	*12*	*12*	3.000.000,00	*(Kantor Inspektorat Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*Aparatur*	*12*	3.300.000,00	*INSPEKTORAT*
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)*		*12*	*12*	*12*	150.000.000,00	*(Kantor Inspektorat Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*Aparatur*	*12*	165.000.000,00	*INSPEKTORAT*
	6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)*		*12*	*12*	*12*	12.000.000,00	*(Kantor Inspektorat Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*Aparatur*	*12*	13.200.000,00	*INSPEKTORAT*
	6.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)*		*11*	*11*	*11*	22.000.000,00	*(Kantor Inspektorat Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*Aparatur*	*11*	24.200.000,00	*INSPEKTORAT*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)*		*12*	*12*	*12*	375.000.000,00	*(Kantor Inspektorat Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*Aparatur*	*12*	412.500.000,00	*INSPEKTORAT*
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja (%)*				*100*	120.000.000,00	*(KAB. PESISIR BARAT)*			Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*100*	132.000.000,00	*INSPEKTORAT*
	6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)*		*19*	*2*	*2*	20.000.000,00	*(Kantor Inspektorat Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*Aparatur*	*2*	22.000.000,00	*INSPEKTORAT*
	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)*		*10*	*44*	*6*	100.000.000,00	*(Kantor Inspektorat Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*Aparatur*	*6*	110.000.000,00	*INSPEKTORAT*
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemenuhan Layanan Pendukung (%)*				*100*	362.500.000,00	*(KAB. PESISIR BARAT)*			Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*100*	398.750.000,00	*INSPEKTORAT*
	6.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)*		*12*	*12*	*12*	324.500.000,00	*(Kantor Inspektorat Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*Aparatur*	*12*	356.950.000,00	*INSPEKTORAT*
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)*		*12*	*12*	*12*	38.000.000,00	*(Kantor Inspektorat Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*Aparatur*	*12*	41.800.000,00	*INSPEKTORAT*
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik (%)*				*100*	348.300.000,00	*(KAB. PESISIR BARAT)*			Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*100*	383.130.000,00	*INSPEKTORAT*
	6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						39.800.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					43.780.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		*1*	*1*	*1*		*(Kantor Inspektorat Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*INSPEKTORAT*
	6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						288.500.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					317.350.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		*8*	*8*	*8*		*(Kantor Inspektorat Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*8*		*INSPEKTORAT*
	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						20.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					22.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		*12*	*22*	*28*		*(Kantor Inspektorat Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*28*		*INSPEKTORAT*
2.	**6.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**						**2.260.000.000,00**							**2.486.000.000,00**	
			Cakupan Konsistensi Perencanaan, Pengelolaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Anggaran terhadap Kepatuhan Peraturan Perundang - Undangan (%)				***100***									***INSPEKTORAT***
			Cakupan Konsistensi Perencanaan, Pengelolaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Anggaran terhadap Kepatuhan Peraturan Perundang - Undangan (%)	***100***			***100***									***INSPEKTORAT***
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal						1.570.000.000,00							1.727.000.000,00	
			Penjabaran Konsistensi Perencanaan, Pengelolaan, Pelaksanaan, dan Pelaporan Anggaran terhadap Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan (%)				*100*		*(KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*INSPEKTORAT*
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah						200.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					220.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)		*100.00*	*100.00*	*100.00*		*(Objek Pemeriksaan di Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*100.00*		*INSPEKTORAT*
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah						200.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					220.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)		*100*	*100*	*100*		*(Objek pemeriksaan yang ada di Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*100*		*INSPEKTORAT*
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja						150.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					165.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)		*1*	*3*	*3*		*(OPD di Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*OPD di Kabupaten Pesisir Barat*	*3*		*INSPEKTORAT*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	*Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)*		*5*	*8*	*8*	150.000.000,00	*(OPD di Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*Aparatur*	*8*	165.000.000,00	*INSPEKTORAT*
	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa (Laporan)*		*116*	*116*	*116*	220.000.000,00	*(Pekon di Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*Aparatur*	*116*	242.000.000,00	*INSPEKTORAT*
	6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal	*Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk (Kesepakatan)*		*1.00*	*1.00*	*2.00*	350.000.000,00	*(Objek pemeriksaan/pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*Aparatur*	*2.00*	385.000.000,00	*INSPEKTORAT*
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	*Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen)*		*12*	*12*	*12*	300.000.000,00	*(Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dan Satker terkait yang berada di Luar Wilayah Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*Aparatur*	*12*	330.000.000,00	*INSPEKTORAT*
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu						690.000.000,00							759.000.000,00	
	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	*Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Laporan)*		*4*	*4*	*4*	240.000.000,00	*(Objek Pemeriksaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dan Satker Terkait di Luar Wilayah Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*Aparatur*	*4*	264.000.000,00	*INSPEKTORAT*
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Laporan)*		*15*	*20*	*30*	450.000.000,00	*(Objek Pengawasan di wilayah Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*Aparatur*	*30*	495.000.000,00	*INSPEKTORAT*
3.	**6.01.03**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	***Cakupan Konsistensi Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi terhadap Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang - undangan (%)***				***100***	**1.500.000.000,00**							**1.650.000.000,00**	***INSPEKTORAT***

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan						400.000.000,00							440.000.000,00	
			Penjabaran Konsistensi Perumusan Kebijakan Teknis terhadap Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan (%)				*100*		*(KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*INSPEKTORAT*
			Penjabaran Konsistensi Perumusan Kebijakan Teknis terhadap Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan (%)				*100*		*(KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*INSPEKTORAT*
	6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan						200.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					220.000.000,00	
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)		*12*	*12*	*12*		*(Kantor Inspektorat Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*INSPEKTORAT*
	6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan						200.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					220.000.000,00	
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)		*12*	*12*	*12*		*(Kantor Inspektorat Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*INSPEKTORAT*
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi						1.100.000.000,00							1.210.000.000,00	
	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah						350.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					385.000.000,00	
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (perangkat daerah)		*39*	*39*	*39*		*(Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat (belanja ATK, penggandaan dan penjilidan, makanan dan minuman rapat, honorarium narasumber dan moderator, honorarium tim pelaksana kegiatan, bantuan transportasi, dan perjalanan*	*39*		*INSPEKTORAT*
	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi						250.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					275.000.000,00	
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (perangkat daerah)		*0*	*0*	*39*		*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat*	*39*		*INSPEKTORAT*
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi						250.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					275.000.000,00	
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)		*12.00*	*12.00*	*12.00*		*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12.00*		*INSPEKTORAT*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	*Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (perangkat daerah)*		*12*	*12*	*39*	250.000.000,00	*(Kabupaten Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			*Aparatur*	*39*	275.000.000,00	*INSPEKTORAT*
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**9.810.399.700,00**							**9.767.039.940,00**	
	7.01	**KECAMATAN ADMINISTRASI**						**9.810.399.700,00**							**9.767.039.940,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**8.847.359.140,00**			**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas**			**8.803.999.380,00**	
			Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)				***92,50***									***KECAMATAN WAY KRUI***
			Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)				***92,50***									***KECAMATAN NGARAS***
			Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)				***92,50***									***KECAMATAN LEMONG***
			Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)				***92,50***									***KECAMATAN NGAMBUR***
			Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)				***92,50***									***KECAMATAN PESISIR SELATAN***
			Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)				***92,50***									***KECAMATAN PULAU PISANG***
			Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)				***92,50***									***KECAMATAN KRUI SELATAN***
			Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)				***92,50***									***KECAMATAN PESISIR TENGAH***
			Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)				***92,50***									***KECAMATAN KARYA PENGGAWA***
			Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)				***92,50***									***KECAMATAN PESISIR UTARA***

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	***90***			***92,50***									***KECAMATAN BANGKUNAT***
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						48.213.800,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			48.213.800,00	
			Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, & Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu (%)				*100*		*(Kecamatan Ngambur, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*KECAMATAN NGAMBUR*
			Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, & Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu (%)				*100*		*(kecamatan pesisir selatan, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*KECAMATAN PESISIR SELATAN*
			Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, & Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu (%)				*100*		*(Kecamatan Krui Selatan, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*KECAMATAN KRUI SELATAN*
			Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, & Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu (%)				*100*		*(Kecamatan Pesisir Tengah, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*KECAMATAN PESISIR TENGAH*
			Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, & Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu (%)				*100*		*(Kecamatan Way Krui, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*KECAMATAN WAY KRUI*
			Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, & Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu (%)				*100*		*(Kecamatan Karya Penggawa, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*KECAMATAN KARYA PENGGAWA*
			Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, & Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu (%)				*100*		*(Kecamatan pesisir utara, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*KECAMATAN PESISIR UTARA*
			Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, & Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu (%)				*100*		*(Kecamatan Lemong, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*KECAMATAN LEMONG*
			Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, & Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu (%)				*100*		*(Kecamatan Pulau Pisang, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*KECAMATAN PULAU PISANG*
			Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, & Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu (%)				*100*		*(Kecamatan Bangkunat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*KECAMATAN BANGKUNAT*
			Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, & Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu (%)				*100*		*(Kecamatan Ngaras, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*KECAMATAN NGARAS*
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						48.213.800,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			48.213.800,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		*1*	*1*	*1*		*(kecamatan ngaras, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*KECAMATAN NGARAS*
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		*1*	*1*	*1*		*(Kecamatan Bangkunat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*KECAMATAN BANGKUNAT*
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		*1*	*1*	*1*		*(Kecamatan Ngambur, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*KECAMATAN NGAMBUR*
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		*1*	*1*	*1*		*(kecamatan pesisir selatan, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*KECAMATAN PESISIR SELATAN*
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		*1*	*1*	*1*		*(Kecamatan Krui Selatan, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*KECAMATAN KRUI SELATAN*
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		*1*	*1*	*1*		*(Kecamatan Pesisir Tengah, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*KECAMATAN PESISIR TENGAH*
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		*1*	*1*	*1*		*(Kecamatan Way Krui, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*KECAMATAN WAY KRUI*
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		*1*	*1*	*1*		*(Kecamatan Karya Penggawa, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*KECAMATAN KARYA PENGGAWA*
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		*1*	*1*	*1*		*(Kecamatan pesisir utara, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*KECAMATAN PESISIR UTARA*
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		*1*	*1*	*1*		*(Kecamatan Lemong, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*KECAMATAN LEMONG*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		*1*	*1*	*1*		*(Kecamatan Pulau Pisang, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*KECAMATAN PULAU PISANG*
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						5.818.482.300,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			5.813.123.500,00	
			Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu (%)				*100*		*(Kecamatan Bangkunat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*KECAMATAN BANGKUNAT*
			Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu (%)				*100*		*(kecamatan ppesisir selatan, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*KECAMATAN PESISIR SELATAN*
			Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu (%)				*100*		*(Kecamatan Krui Selatan, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*KECAMATAN KRUI SELATAN*
			Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu (%)				*100*		*(kecamatan pesisir tengah, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*KECAMATAN PESISIR TENGAH*
			Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu (%)				*100*		*(Kecamatan Ngambur, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*KECAMATAN NGAMBUR*
			Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu (%)				*100*		*(Kecamatan Way Krui, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*KECAMATAN WAY KRUI*
			Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu (%)				*100*		*(Kecamatan Karya Penggawa, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*KECAMATAN KARYA PENGGAWA*
			Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu (%)				*100*		*(Kecamatan Pesisir Utara, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*KECAMATAN PESISIR UTARA*
			Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu (%)				*100*		*(Kecamatan Lemong, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*KECAMATAN LEMONG*
			Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu (%)				*100*		*(Kecamatan Pulau Pisang, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*KECAMATAN PULAU PISANG*
			Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu (%)				*100*		*(kecamatan ngaras, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*KECAMATAN NGARAS*
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						5.748.600.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			5.748.600.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		*14*	*14*	*14*		*(Kecamatan pesisir tengah, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*14*		*KECAMATAN PESISIR TENGAH*
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		*14*	*14*	*14*		*(Kecamatan Pulau Pisang, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*14*		*KECAMATAN PULAU PISANG*
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		*14*	*14*	*14*		*(Kecamatan Lemong, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*14*		*KECAMATAN LEMONG*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		*14*	*14*	*14*		*(kecamatan pesisir utara, KAB. PESISIR BARAT)*				*aparatur*	*14*		*KECAMATAN PESISIR UTARA*
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		*14*	*14*	*14*		*(Kecamatan Karya Penggawa, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*14*		*KECAMATAN KARYA PENGGAWA*
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		*14*	*14*	*14*		*(Kecamatan Way Krui, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*14*		*KECAMATAN WAY KRUI*
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		*14*	*14*	*14*		*(Kecamatan Krui Selatan, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*14*		*KECAMATAN KRUI SELATAN*
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		*14*	*14*	*14*		*(kecamatan pesisir selatan, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*14*		*KECAMATAN PESISIR SELATAN*
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		*14*	*14*	*14*		*(Kecamatan Ngambur, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*14*		*KECAMATAN NGAMBUR*
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		*14*	*14*	*14*		*(Kecamatan Ngaras, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*14*		*KECAMATAN NGARAS*
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		*14*	*14*	*14*		*(Kecamatan Bangkunat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*14*		*KECAMATAN BANGKUNAT*
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						28.906.400,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			28.906.400,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		*1*	*1*	*1*		*(Kecamatan Ngaras, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*KECAMATAN NGARAS*
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		*1*	*1*	*1*		*(Kecamatan Bangkunat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*KECAMATAN BANGKUNAT*
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		*1*	*1*	*1*		*(Kecamatan Pulau Pisang, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*KECAMATAN PULAU PISANG*
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		*1*	*1*	*1*		*(Kecamatan Lemong, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*KECAMATAN LEMONG*
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		*1*	*1*	*1*		*(kecamatan pesisir utara, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*KECAMATAN PESISIR UTARA*
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		*1*	*1*	*1*		*(Kecamatan Karya Penggawa, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*KECAMATAN KARYA PENGGAWA*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		*1*	*1*	*1*		*(Kecamatan Way Krui, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*KECAMATAN WAY KRUI*
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		*1*	*1*	*1*		*(kecamatan pesisir tengah, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*KECAMATAN PESISIR TENGAH*
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		*1*	*1*	*1*		*(Kecamatan Krui Selatan, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*KECAMATAN KRUI SELATAN*
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		*1*	*1*	*1*		*(kecamatan pesisir selatan, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*KECAMATAN PESISIR SELATAN*
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		*1*	*1*	*1*		*(Kecamatan Ngambur, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*KECAMATAN NGAMBUR*
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						24.399.300,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			24.399.300,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		*2*	*2*	*2*		*(Kecamatan Ngambur, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*2*		*KECAMATAN NGAMBUR*
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		*2*	*2*	*2*		*(Kecamatan Bangkunat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*2*		*KECAMATAN BANGKUNAT*
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		*2*	*2*	*2*		*(Kecamatan Ngaras, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*2*		*KECAMATAN NGARAS*
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		*2*	*2*	*2*		*(kecamatan pesisir selatan, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*2*		*KECAMATAN PESISIR SELATAN*
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		*2*	*2*	*2*		*(Kecamatan Krui Selatan, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*2*		*KECAMATAN KRUI SELATAN*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		*2*	*2*	*2*		*(Kecamatan pesisir Tengah, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*2*		*KECAMATAN PESISIR TENGAH*
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		*2*	*2*	*2*		*(Kecamatan Way Krui, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*2*		*KECAMATAN WAY KRUI*
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		*2*	*2*	*2*		*(Kecamatan Karya Penggawa, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*2*		*KECAMATAN KARYA PENGGAWA*
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		*2*	*2*	*2*		*(Kecamatan pesisir utara, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*2*		*KECAMATAN PESISIR UTARA*
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		*2*	*2*	*2*		*(Kecamatan Lemong, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*2*		*KECAMATAN LEMONG*
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		*2*	*2*	*2*		*(Kecamatan Pulau Pisang, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*2*		*KECAMATAN PULAU PISANG*
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						16.576.600,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			11.217.800,00	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)		*1*	*1*	*1*		*(Kecamatan Bangkunat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*KECAMATAN BANGKUNAT*
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(Kecamatan Ngaras, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1.00*		*KECAMATAN NGARAS*
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)		*1*	*1*	*1*		*(Kecamatan Ngambur, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*KECAMATAN NGAMBUR*
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)		*1*	*1*	*1*		*(kecamatan pesisir selatan, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*KECAMATAN PESISIR SELATAN*
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)		*1*	*1*	*1*		*(Kecamatan Krui Selatan, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*KECAMATAN KRUI SELATAN*
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)		*1*	*1*	*1*		*(kecamatan pesisir tengah, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*KECAMATAN PESISIR TENGAH*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)		*0*	*0*							*Aparatur*			*KECAMATAN WAY KRUI*
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)		*1*	*1*	*1*		*(Kecamatan Karya Penggawa, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*KECAMATAN KARYA PENGGAWA*
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)		*1*	*1*	*1*		*(kecamatan pesisir utara, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*KECAMATAN PESISIR UTARA*
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)		*1*	*1*	*1*		*(Kecamatan Lemong, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*KECAMATAN LEMONG*
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)		*0*	*0*							*Aparatur*			*KECAMATAN PULAU PISANG*
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						1.633.068.040,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.595.067.080,00	
			Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja (%)				*100*		*(Kecamatan Lemong, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*KECAMATAN LEMONG*
			Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja (%)				*100*		*(Kecamatan Bangkunat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*KECAMATAN BANGKUNAT*
			Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja (%)				*100*		*(Kecamatan ngaras, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*KECAMATAN NGARAS*
			Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja (%)				*100*		*(Kecamatan Ngambur, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*KECAMATAN NGAMBUR*
			Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja (%)				*100*		*(kecamatan pesisir selatan, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*KECAMATAN PESISIR SELATAN*
			Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja (%)				*100*		*(Kecamatan Krui Selatan, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*KECAMATAN KRUI SELATAN*
			Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja (%)				*100*		*(kecamatan pesisir tengah, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*KECAMATAN PESISIR TENGAH*
			Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja (%)				*100*		*(Kecamatan Way Krui, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*KECAMATAN WAY KRUI*
			Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja (%)				*100*		*(Kecamatan Karya Penggawa, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*KECAMATAN KARYA PENGGAWA*
			Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja (%)				*100*		*(Kecamatan Pesisir Utara, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*KECAMATAN PESISIR UTARA*
			Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja (%)				*100*		*(Kecamatan Pulau Pisang, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*KECAMATAN PULAU PISANG*
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						74.324.200,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			74.324.200,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		*1*	*1*	*1*		*(Kecamatan ngaras, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*KECAMATAN NGARAS*
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		*1*	*1*	*1*		*(Kecamatan Pulau Pisang, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*KECAMATAN PULAU PISANG*
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		*1*	*1*	*1*		*(Kecamatan Lemong, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*KECAMATAN LEMONG*
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		*1*	*1*	*1*		*(kecamatan pesisir utara, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*KECAMATAN PESISIR UTARA*
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		*12*	*12*	*12*		*(Kecamatan Karya Penggawa, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*KECAMATAN KARYA PENGGAWA*
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		*1*	*1*	*1*		*(Kecamatan Way Krui, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*KECAMATAN WAY KRUI*
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		*1*	*1*	*1*		*(kecamatan pesisir tengah, KAB. PESISIR BARAT)*				*aparatur*	*1*		*KECAMATAN PESISIR TENGAH*
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		*1*	*1*	*1*		*(Kecamatan Krui Selatan, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*KECAMATAN KRUI SELATAN*
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		*1*	*1*	*1*		*(kecamatan pesisir selatan, KAB. PESISIR BARAT)*				*aparatur*	*1*		*KECAMATAN PESISIR SELATAN*
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		*1*	*1*	*1*		*(Kecamatan Ngambur, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*KECAMATAN NGAMBUR*
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		*1*	*1*	*1*		*(Kecamatan Bangkunat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*KECAMATAN BANGKUNAT*
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						260.391.540,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			260.390.580,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		*12*	*12*	*12*		*(Kecamatan Krui Selatan, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*KECAMATAN KRUI SELATAN*
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		*12*	*12*	*12*		*(Kecamatan Bangkunat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*KECAMATAN BANGKUNAT*
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		*12*	*12*	*12*		*(Kecamatan Ngaras, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*KECAMATAN NGARAS*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		*12*	*12*	*12*		*(Kecamatan Ngambur, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*KECAMATAN NGAMBUR*
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		*1*	*1*	*1*		*(kecamatan pesisir selatan, KAB. PESISIR BARAT)*				*aparatur*	*1*		*KECAMATAN PESISIR SELATAN*
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		*12*	*12*	*12*		*(kecamatan pesisir tengah, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*KECAMATAN PESISIR TENGAH*
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		*1*	*1*	*1*		*(Kecamatan Way Krui, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*KECAMATAN WAY KRUI*
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		*12*	*12*	*12*		*(Kecamatan Karya Penggawa, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*KECAMATAN KARYA PENGGAWA*
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		*12*	*12*	*12*		*(Kecamatan Pesisir utara, KAB. PESISIR BARAT)*				*aparatur*	*12*		*KECAMATAN PESISIR UTARA*
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		*1*	*1*	*1*		*(Kecamatan Lemong, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*KECAMATAN LEMONG*
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		*2*	*2*	*2*		*(Kecamatan Pulau Pisang, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*2*		*KECAMATAN PULAU PISANG*
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						276.950.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			276.950.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		*1*	*1*	*1*		*(krui, pesisir barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*aparatur*	*1*		*KECAMATAN PESISIR SELATAN*
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		*1*	*1*	*1*		*(Krui, Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*KECAMATAN KRUI SELATAN*
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		*1*	*1*	*1*		*(kecamatan pesisir tengah, KAB. PESISIR BARAT)*				*aparatur*	*1*		*KECAMATAN PESISIR TENGAH*
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		*1*	*1*	*1*		*(Kecamatan Way Krui, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*KECAMATAN WAY KRUI*
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		*1*	*1*	*1*		*(Krui, Kab Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*KECAMATAN KARYA PENGGAWA*
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		*1*	*1*	*1*		*(kecamatan pesisir utara, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*KECAMATAN PESISIR UTARA*
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		*1*	*1*	*1*		*(Kecamatan Lemong, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*KECAMATAN LEMONG*
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		*1*	*1*	*1*		*(Krui, Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*KECAMATAN PULAU PISANG*
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		*1*	*1*	*1*		*(Krui, Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*KECAMATAN NGARAS*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		*1*	*1*	*1*		*(Krui, Kab. Pesisir barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*KECAMATAN NGAMBUR*
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		*1*	*1*	*1*		*(Kecamatan Bangkunat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*KECAMATAN BANGKUNAT*
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						299.602.300,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			299.602.300,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*12*	*12*	*12*		*(Kecamatan Ngaras, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*KECAMATAN NGARAS*
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*12*	*12*	*12*		*(kecamatan pesisir selatan, KAB. PESISIR BARAT)*				*aparatur*	*12*		*KECAMATAN PESISIR SELATAN*
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*12*	*12*	*12*		*(Kecamatan Krui Selatan, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*KECAMATAN KRUI SELATAN*
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*12*	*12*	*12*		*(kecamatan pesisir tengah, KAB. PESISIR BARAT)*				*aparatur*	*12*		*KECAMATAN PESISIR TENGAH*
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*12*	*12*	*12*		*(Kecamatan Way Krui, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*KECAMATAN WAY KRUI*
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*12*	*12*	*12*		*(Kecamatan Karya Penggawa, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*KECAMATAN KARYA PENGGAWA*
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*12*	*12*	*12*		*(Kecamatan Lemong, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*KECAMATAN LEMONG*
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*12*	*12*	*12*		*(Kecamatan Ngambur, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*KECAMATAN NGAMBUR*
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*12*	*12*	*12*		*(kecamatan pesisir utara, KAB. PESISIR BARAT)*				*aparatur*	*12*		*KECAMATAN PESISIR UTARA*
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*12*	*12*	*12*		*(Kecamatan Pulau Pisang, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*KECAMATAN PULAU PISANG*
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*12*	*12*	*12*		*(Kecamatan Bangkunat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*KECAMATAN BANGKUNAT*
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						127.800.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			127.800.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		*12.00*	*12.00*	*12.00*		*(Kecamatan Pulau Pisang, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*KECAMATAN PULAU PISANG*
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		*12*	*12*	*12*		*(Kecamatan Ngambur, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*KECAMATAN NGAMBUR*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		*12*	*12*	*12*		*(kecamatan pesisir selatan, KAB. PESISIR BARAT)*				*aparatur*	*12*		*KECAMATAN PESISIR SELATAN*
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		*12*	*12*	*12*		*(Kecamatan Krui Selatan, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*KECAMATAN KRUI SELATAN*
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		*12*	*12*	*12*		*(kecamatan pesisir tengah, KAB. PESISIR BARAT)*				*aparatur*	*12*		*KECAMATAN PESISIR TENGAH*
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		*12*	*12*	*12*		*(Kecamatan Way Krui, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*KECAMATAN WAY KRUI*
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		*12*	*12*	*12*		*(Kecamatan Karya Penggawa, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*KECAMATAN KARYA PENGGAWA*
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		*12*	*12*	*12*		*(kecamatan pesisir utara, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*KECAMATAN PESISIR UTARA*
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		*12*	*12*	*12*		*(Kecamatan Lemong, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*KECAMATAN LEMONG*
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		*12*	*12*	*12*		*(Kecamatan Ngaras, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*KECAMATAN NGARAS*
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		*12*	*12*	*12*		*(Kecamatan Bangkunat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*KECAMATAN BANGKUNAT*
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						201.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			201.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)		*11*	*11*	*11*		*(Kecamatan Ngambur, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*11*		*KECAMATAN NGAMBUR*
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)		*11*	*11*	*11*		*(kecamatan pesisir selatan, KAB. PESISIR BARAT)*				*aparatur*	*11*		*KECAMATAN PESISIR SELATAN*
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)		*11*	*11*	*11*		*(Kecamatan ngaras, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*11*		*KECAMATAN NGARAS*
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)		*11*	*11*	*11*		*(Kecamatan Pulau Pisang, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*11*		*KECAMATAN PULAU PISANG*
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)		*11*	*11*	*11*		*(Kecamatan lemong, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*11*		*KECAMATAN LEMONG*
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)		*11*	*11*	*11*		*(kecamatan pesisir utara, KAB. PESISIR BARAT)*				*aparatur*	*11*		*KECAMATAN PESISIR UTARA*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)		*11*	*11*	*11*		*(Kecamatan Karya Penggawa, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*11*		*KECAMATAN KARYA PENGGAWA*
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)		*11*	*11*	*11*		*(Kecamatan Way Krui, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*11*		*KECAMATAN WAY KRUI*
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)		*11*	*11*	*11*		*(kecamatan pesisir tengah, KAB. PESISIR BARAT)*				*aparatur*	*11*		*KECAMATAN PESISIR TENGAH*
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)		*11*	*11*	*11*		*(Kecamatan Krui Selatan, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*11*		*KECAMATAN KRUI SELATAN*
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)		*11*	*11*	*11*		*(Kecamatan Bangkunat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*11*		*KECAMATAN BANGKUNAT*
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						393.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			355.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(Krui, Kab. Pesisir Barat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*KECAMATAN PULAU PISANG*
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(Kecamatan Bangkunat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*KECAMATAN BANGKUNAT*
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(Kecamatan ngaras, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*KECAMATAN NGARAS*
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*12.00*	*12.00*	*12.00*		*(Dalam Kab. Pesisir Barat dan Di Luar Kab Pesisir Barat, Luar Wilayah)*				*Aparatur*	*12.00*		*KECAMATAN NGAMBUR*
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(kecamatan pesisir selatan, KAB. PESISIR BARAT)*				*aparatur*	*12*		*KECAMATAN PESISIR SELATAN*
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*12.00*	*12.00*	*12.00*		*(Kecamatan Krui Selatan, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12.00*		*KECAMATAN KRUI SELATAN*
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(kab pesisir barat dan luar kab. pesisir barat, Luar Wilayah)*				*aparatur*	*12*		*KECAMATAN PESISIR TENGAH*
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(Kecamatan Way Krui, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*KECAMATAN WAY KRUI*
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(Kecamatan Karya Penggawa, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*KECAMATAN KARYA PENGGAWA*
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(kecamatan pesisir utara, KAB. PESISIR BARAT)*				*aparatur*	*12*		*KECAMATAN PESISIR UTARA*
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*0*	*0*							*Aparatur*			*KECAMATAN LEMONG*
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						203.928.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			203.928.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja (%)				*100*		*(kecamatan pesisir tengah, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*KECAMATAN PESISIR TENGAH*
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						203.928.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			203.928.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)		*1*	*1*	*1*		*(kecamatan pesisir tengah, KAB. PESISIR BARAT)*				*aparatur*	*1*		*KECAMATAN PESISIR TENGAH*
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						358.750.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			358.750.000,00	
			Persentase pemenuhan Layanan Pendukung (%)				*100*		*(Kecamatan Pulau Pisang, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*KECAMATAN PULAU PISANG*
			Persentase pemenuhan Layanan Pendukung (%)				*100*		*(Kecamatan ngaras, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*KECAMATAN NGARAS*
			Persentase pemenuhan Layanan Pendukung (%)				*100*		*(Kecamatan Bangkunat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*KECAMATAN BANGKUNAT*
			Persentase pemenuhan Layanan Pendukung (%)				*100*		*(kecamatan pesisir selatan, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*KECAMATAN PESISIR SELATAN*
			Persentase pemenuhan Layanan Pendukung (%)				*100*		*(Kecamatan Krui Selatan, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*KECAMATAN KRUI SELATAN*
			Persentase pemenuhan Layanan Pendukung (%)				*100*		*(kecamatan pesisir tengah, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*KECAMATAN PESISIR TENGAH*
			Persentase pemenuhan Layanan Pendukung (%)				*100*		*(Kecamatan Way Krui, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*KECAMATAN WAY KRUI*
			Persentase pemenuhan Layanan Pendukung (%)				*100*		*(Kecamatan Karya Penggawa, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*KECAMATAN KARYA PENGGAWA*
			Persentase pemenuhan Layanan Pendukung (%)				*100*		*(Kecamatan Pesisir Utara, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*KECAMATAN PESISIR UTARA*
			Persentase pemenuhan Layanan Pendukung (%)				*100*		*(Kecamatan Lemong, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*KECAMATAN LEMONG*
			Persentase pemenuhan Layanan Pendukung (%)				*100*		*(Kecamatan Ngambur, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*KECAMATAN NGAMBUR*
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						37.945.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			37.945.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		*2*	*2*	*2*		*(Kecamatan Pulau Pisang, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*2*		*KECAMATAN PULAU PISANG*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		*1*	*1*	*1*		*(Kecamatan Krui Selatan, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*KECAMATAN KRUI SELATAN*
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		*1*	*1*	*1*		*(kecamatan pesisir selatan, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*KECAMATAN PESISIR SELATAN*
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		*1*	*1*	*1*		*(Kecamatan Ngambur, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*KECAMATAN NGAMBUR*
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		*1*	*1*	*1*		*(Kecamatan Ngaras, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*KECAMATAN NGARAS*
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		*1*	*1*	*1*		*(Kecamatan Bangkunat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*KECAMATAN BANGKUNAT*
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		*1*	*1*	*1*		*(Kecamatan Karya Penggawa, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*KECAMATAN KARYA PENGGAWA*
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		*1*	*1*	*1*		*(kecamatan pesisir utara, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*KECAMATAN PESISIR UTARA*
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		*1*	*1*	*1*		*(Kecamatan lemong, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*KECAMATAN LEMONG*
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(Kecamatan Way Krui, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*KECAMATAN WAY KRUI*
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						99.600.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			99.600.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(Kecamatan Karya Penggawa, KAB. PESISIR BARAT)*				*aparatur*	*12*		*KECAMATAN KARYA PENGGAWA*
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(Kecamatan Bangkunat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*KECAMATAN BANGKUNAT*
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(Kecamatan Ngaras, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*KECAMATAN NGARAS*
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(Kecamatan Ngambur, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*KECAMATAN NGAMBUR*
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(kecamatan pesisir selatan, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*KECAMATAN PESISIR SELATAN*
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(Kecamatan Krui Selatan, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*KECAMATAN KRUI SELATAN*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(kecamatan pesisir tengah, KAB. PESISIR BARAT)*				*aparatur*	*12*		*KECAMATAN PESISIR TENGAH*
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(Kecamatan Way Krui, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*KECAMATAN WAY KRUI*
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(Kecamatan pesisir utara, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*KECAMATAN PESISIR UTARA*
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(Kecamatan lemong, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*KECAMATAN LEMONG*
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(Kecamatan Pulau Pisang, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*KECAMATAN PULAU PISANG*
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						125.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			125.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)		*1*	*1*	*1*		*(kecamatan pesisir selatan, KAB. PESISIR BARAT)*				*aparatur*	*1*		*KECAMATAN PESISIR SELATAN*
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)		*1*	*1*	*1*		*(Kecamatan Krui Selatan, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*KECAMATAN KRUI SELATAN*
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)		*1*	*1*	*1*		*(kecamatan pesisir tengah, KAB. PESISIR BARAT)*				*aparatur*	*1*		*KECAMATAN PESISIR TENGAH*
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)		*1*	*1*	*1*		*(Kecamatan Way Krui, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*KECAMATAN WAY KRUI*
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)		*1*	*1*	*1*		*(kecamatan pesisir utara, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*KECAMATAN PESISIR UTARA*
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)		*1*	*1*	*1*		*(Kecamatan lemong, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*KECAMATAN LEMONG*
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)		*2*	*2*	*2*		*(Kecamatan Pulau Pisang, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*2*		*KECAMATAN PULAU PISANG*
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)		*1*	*1*	*1*		*(Kecamatan Bangkunat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*KECAMATAN BANGKUNAT*
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)		*1*	*1*	*1*		*(Kecamatan Ngambur, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*KECAMATAN NGAMBUR*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)		*1*	*1*	*1*		*(Kecamatan Ngaras, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*KECAMATAN NGARAS*
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						96.205.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			96.205.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		*1*	*1*	*1*		*(Kecamatan Ngaras, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*KECAMATAN NGARAS*
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		*2*	*2*	*2*		*(Kecamatan Pulau Pisang, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*2*		*KECAMATAN PULAU PISANG*
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		*1*	*1*	*1*		*(Kecamatan Lemong, KAB. PESISIR BARAT)*				*aparatur*	*1*		*KECAMATAN LEMONG*
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		*1*	*1*	*1*		*(kecamatan pesisir utara, KAB. PESISIR BARAT)*				*aparatur*	*1*		*KECAMATAN PESISIR UTARA*
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(Kecamatan Karya Penggawa, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*KECAMATAN KARYA PENGGAWA*
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(Kecamatan Way Krui, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*KECAMATAN WAY KRUI*
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		*1*	*1*	*1*		*(Kecamatan Krui Selatan, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*KECAMATAN KRUI SELATAN*
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(kecamatan pesisir selatan, KAB. PESISIR BARAT)*				*aparatur*	*12*		*KECAMATAN PESISIR SELATAN*
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		*12*	*12*	*12*		*(Kecamatan Ngambur, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12*		*KECAMATAN NGAMBUR*
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		*1*	*1*	*1*		*(Kecamatan Bangkunat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*KECAMATAN BANGKUNAT*
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						784.917.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			784.917.000,00	
			Persentase Barang Milik Daerah yang dalam kondisi baik (%)				*100*		*(Kecamatan Pulau Pisang, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*KECAMATAN PULAU PISANG*
			Persentase Barang Milik Daerah yang dalam kondisi baik (%)				*100*		*(Kecamatan Bangkunat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*KECAMATAN BANGKUNAT*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase Barang Milik Daerah yang dalam kondisi baik (%)				*100*		*(Kecamatan ngaras, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*KECAMATAN NGARAS*
			Persentase Barang Milik Daerah yang dalam kondisi baik (%)				*100*		*(Kecamatan Ngambur, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*KECAMATAN NGAMBUR*
			Persentase Barang Milik Daerah yang dalam kondisi baik (%)				*100*		*(kecamatan pesisir selatan, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*KECAMATAN PESISIR SELATAN*
			Persentase Barang Milik Daerah yang dalam kondisi baik (%)				*100*		*(Kecamatan Krui Selatan, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*KECAMATAN KRUI SELATAN*
			Persentase Barang Milik Daerah yang dalam kondisi baik (%)				*100*		*(kecamatan pesisir tengah, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*KECAMATAN PESISIR TENGAH*
			Persentase Barang Milik Daerah yang dalam kondisi baik (%)				*100*		*(Kecamatan Way Krui, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*KECAMATAN WAY KRUI*
			Persentase Barang Milik Daerah yang dalam kondisi baik (%)				*100*		*(Kecamatan Karya Penggawa, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*KECAMATAN KARYA PENGGAWA*
			Persentase Barang Milik Daerah yang dalam kondisi baik (%)				*100*		*(Kecamatan Pesisir Utara, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*KECAMATAN PESISIR UTARA*
			Persentase Barang Milik Daerah yang dalam kondisi baik (%)				*100*		*(Kecamatan Lemong, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*KECAMATAN LEMONG*
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Persentase Barang Milik Daerah yang dalam kondisi baik (%)*					530.920.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			530.920.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		*3*	*3*	*3*		*(kecamatan pesisir utara, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*3*		*KECAMATAN PESISIR UTARA*
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		*4*	*4*	*4*		*(Kecamatan Karya Penggawa, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*4*		*KECAMATAN KARYA PENGGAWA*
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		*4*	*4*	*4*		*(Kecamatan Way Krui, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*4*		*KECAMATAN WAY KRUI*
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		*1*	*1*	*1*		*(kecamatan pesisir tengah, KAB. PESISIR BARAT)*				*aparatur*	*1*		*KECAMATAN PESISIR TENGAH*
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		*4*	*4*	*4*		*(kecamatan lemong, KAB. PESISIR BARAT)*				*aparatur*	*4*		*KECAMATAN LEMONG*
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		*4*	*4*	*4*		*(Kecamatan Bangkunat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*4*		*KECAMATAN BANGKUNAT*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		*4*	*4*	*4*		*(Kecamatan Ngaras, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*4*		*KECAMATAN NGARAS*
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		*3*	*3*	*3*		*(Kecamatan Ngambur, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*3*		*KECAMATAN NGAMBUR*
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		*3*	*3*	*3*		*(kecamatan pesisir selatan, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*3*		*KECAMATAN PESISIR SELATAN*
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		*2*	*2*	*2*		*(Kecamatan Krui Selatan, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*2*		*KECAMATAN KRUI SELATAN*
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		*4*	*4*	*4*		*(Kecamatan Pulau Pisang, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*4*		*KECAMATAN PULAU PISANG*
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						204.399.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			204.399.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*1*	*1*	*1*		*(kecamatan pesisir selatan, KAB. PESISIR BARAT)*				*aparatur*	*1*		*KECAMATAN PESISIR SELATAN*
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*1*	*1*	*1*		*(Kecamatan Ngambur, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*KECAMATAN NGAMBUR*
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*1*	*1*	*1*		*(Kecamatan Ngaras, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*KECAMATAN NGARAS*
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*1*	*1*	*1*		*(Kecamatan Bangkunat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*KECAMATAN BANGKUNAT*
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*1*	*1*	*1*		*(Kecamatan Way Krui, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*KECAMATAN WAY KRUI*
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*1*	*1*	*1*		*(Kecamatan Krui Selatan, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*KECAMATAN KRUI SELATAN*
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*1*	*1*	*1*		*(Kecamatan Pulau Pisang, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*KECAMATAN PULAU PISANG*
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*1*	*1*	*1*		*(kecamatan lemong, KAB. PESISIR BARAT)*				*aparatur*	*1*		*KECAMATAN LEMONG*
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*1*	*1*	*1*		*(kecamatan pesisir utara, KAB. PESISIR BARAT)*				*aparatur*	*1*		*KECAMATAN PESISIR UTARA*
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*1*	*1*	*1*		*(Kecamatan Karya Penggawa, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*KECAMATAN KARYA PENGGAWA*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						43.658.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			43.658.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*1*	*1*	*1*		*(Kecamatan Ngaras, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*KECAMATAN NGARAS*
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*1*	*1*	*1*		*(kecamatan pesisir selatan, KAB. PESISIR BARAT)*				*aparatur*	*1*		*KECAMATAN PESISIR SELATAN*
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*1*	*1*	*1*		*(kecamatan pesisir utara, KAB. PESISIR BARAT)*				*aparatur*	*1*		*KECAMATAN PESISIR UTARA*
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*1*	*1*	*1*		*(kecamatan lemong, KAB. PESISIR BARAT)*				*aparatur*	*1*		*KECAMATAN LEMONG*
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*5*	*5*	*5*		*(Kecamatan Pulau Pisang, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*5*		*KECAMATAN PULAU PISANG*
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*1*	*1*	*1*		*(Kecamatan Bangkunat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*KECAMATAN BANGKUNAT*
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*1*	*1*	*1*		*(Kecamatan Ngambur, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*KECAMATAN NGAMBUR*
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						5.940.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			5.940.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		*2*	*2*	*2*		*(Kecamatan Krui Selatan, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*2*		*KECAMATAN KRUI SELATAN*
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**330.240.560,00**			**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas**			**330.240.560,00**	
			Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)				***100***									***KECAMATAN PULAU PISANG***
			Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)				***100***									***KECAMATAN LEMONG***
			Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)				***100***									***KECAMATAN PESISIR UTARA***
			Cakupan Pemenuhan Pengembngan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan (%)				***100***									***KECAMATAN KRUI SELATAN***

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)				***100***									***KECAMATAN PESISIR SELATAN***
			Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)				***100***									***KECAMATAN NGAMBUR***
			Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)				***100***									***KECAMATAN NGARAS***
			Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)	***100***			***100***									***KECAMATAN BANGKUNAT***
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						330.240.560,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			330.240.560,00	
			persentase pengembangan pemuda (%)				*100*		*(kecamatan pesisir selatan, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*KECAMATAN PESISIR SELATAN*
			persentase pengembangan pemuda (%)				*100*		*(Kecamatan Ngambur, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*KECAMATAN NGAMBUR*
			persentase pengembangan pemuda (%)				*100*		*(Kecamatan Ngaras, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*KECAMATAN NGARAS*
			persentase pengembangan pemuda (%)				*100*		*(Kecamatan Bangkunat, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*KECAMATAN BANGKUNAT*
			persentase pengembangan pemuda (%)				*100*		*(Kecamatan Krui Selatan, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*KECAMATAN KRUI SELATAN*
			persentase pengembangan pemuda (%)				*100*		*(Kecamatan pesisir Utara, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*KECAMATAN PESISIR UTARA*
			persentase pengembangan pemuda (%)				*100*		*(Kecamatan Lemong, KAB. PESISIR BARAT)*					*100*		*KECAMATAN LEMONG*
			Persentase Pengembangan Pemuda (%)				*100*		*(Kecamatan Pulau Pisang, Pulaupisang)*					*100*		*KECAMATAN PULAU PISANG*
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						330.240.560,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			330.240.560,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)		*1*	*1*	*1*		*(Kecmatan Pulau pisang, KAB. PESISIR BARAT)*				*Siswa*	*1*		*KECAMATAN PULAU PISANG*
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)		*1*	*1*	*1*		*(Kecamatan Lemong, KAB. PESISIR BARAT)*				*Siswa*	*1*		*KECAMATAN LEMONG*
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)		*1*	*1*	*1*		*(kecamatan pesisir utara, KAB. PESISIR BARAT)*				*siswa*	*1*		*KECAMATAN PESISIR UTARA*
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)		*1*	*1*	*1*		*(Kecamatan Krui Selatan, KAB. PESISIR BARAT)*				*Siswa*	*1*		*KECAMATAN KRUI SELATAN*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)		*1*	*1*	*1*		*(kecamatan pesisir selatan, KAB. PESISIR BARAT)*				*Siswa*	*1*		*KECAMATAN PESISIR SELATAN*
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)		*1*	*1*	*1*		*(Kecamatan Ngambur, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1*		*KECAMATAN NGAMBUR*
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)		*1*	*1*	*1*		*(Kecamatan Ngaras, KAB. PESISIR BARAT)*				*Siswa*	*1*		*KECAMATAN NGARAS*
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)		*1*	*1*	*1*		*(Kecamatan Bangkunat, KAB. PESISIR BARAT)*				*Siswa*	*1*		*KECAMATAN BANGKUNAT*
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (%)***				***100***	**632.800.000,00**			**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas**			**632.800.000,00**	***KECAMATAN PESISIR TENGAH***
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*jumlah kelurahan (Desa/Kelurahan)*				*2*	632.800.000,00	*(kecamatan pesisir tengah, kelurahan pasar krui dan kelurahan kota krui, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		*2*	632.800.000,00	*KECAMATAN PESISIR TENGAH*
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)*		*2*	*2*	*2*	632.800.000,00	*(kelurahan pasar krui dan kelurahan kota krui, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*2*	632.800.000,00	*KECAMATAN PESISIR TENGAH*
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**						**40.366.553.960,00**							**44.175.128.283,00**	
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**						**40.366.553.960,00**							**44.175.128.283,00**	
1.	**8.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)***				***92.5***	**2.773.644.407,00**			**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas**			**3.051.008.848,00**	***BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK***

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						4.612.042,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			5.073.246,00	
			Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu (%)				*92.5*		*(Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, KAB. PESISIR BARAT)*					*92.5*		*BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK*
	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						2.612.042,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.873.246,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)		*2.00*	*2.00*	*2.00*		*(Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*2.00*		*BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK*
	8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						2.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.200.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		*2.00*	*2.00*	*2.00*		*(Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*2.00*		*BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK*
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.503.708.900,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.654.079.790,00	
			Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu (%)				*92.5*		*(Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, KAB. PESISIR BARAT)*					*92.5*		*BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK*
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.498.208.900,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.648.029.790,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		*13.00*	*13.00*	*13.00*		*(Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*13.00*		*BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK*
	8.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						2.500.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.750.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1.00*		*BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK*
	8.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						2.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.200.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		*18.00*	*18.00*	*18.00*		*(Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*18.00*		*BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK*
	8.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						1.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.100.000,00	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1.00*		*BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK*
	8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						25.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			27.500.000,00	
			Persentase aparatur yang berkinerja baik (%)				*92.5*		*(Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, KAB. PESISIR BARAT)*					*92.5*		*BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK*
	8.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						25.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			27.500.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)		*0.00*	*0.00*	*5.00*		*(Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*5.00*		*BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK*
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						383.617.820,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			421.979.602,00	
			Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja (%)				*92.5*		*(Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, KAB. PESISIR BARAT)*					*92.5*		*BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK*
	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						11.758.400,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			12.934.240,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1.00*		*BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK*
	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						55.600.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			61.160.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1.00*		*BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						87.259.420,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			95.985.362,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*1.00*		*BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK*
	8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						24.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			26.400.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		*20.00*	*20.00*	*10.00*		*(Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*10.00*		*BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK*
	8.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						55.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			60.500.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)		*11.00*	*11.00*	*11.00*		*(Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*11.00*		*BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK*
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						150.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			165.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		*12.00*	*12.00*	*12.00*		*(Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12.00*		*BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK*
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						32.500.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			35.750.000,00	
			Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja (%)				*92.5*		*(Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, KAB. PESISIR BARAT)*					*92.5*		*BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK*
	8.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						14.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			15.400.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)		*0.00*	*0.00*	*3.00*		*(Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*5.00*		*BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK*
	8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						18.500.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			20.350.000,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		*0.00*	*0.00*	*3.00*		*(Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*5.00*		*BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK*
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						621.012.835,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			683.114.119,00	
			Persentase Pemenuhan Layanan Pendukung (%)				*92.5*		*(Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, KAB. PESISIR BARAT)*					*92.5*		*BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK*
	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						346.392.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			381.031.200,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		*12.00*	*12.00*	*12.00*		*(Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12.00*		*BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK*
	8.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						259.000.000,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			284.900.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)		*12.00*	*12.00*	*12.00*		*(Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12.00*		*BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK*
	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						15.620.835,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			17.182.919,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		*12.00*	*12.00*	*12.00*		*(Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*12.00*		*BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK*
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						203.192.810,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			223.512.091,00	
			Persentase Barang Milik Daerah yang dalam kondisi baik (%)				*92.5*		*(Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, KAB. PESISIR BARAT)*					*92.5*		*BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK*
	8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						99.459.750,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			109.405.725,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		*3.00*	*3.00*	*3.00*		*(Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, KAB. PESISIR BARAT)*				*Aparatur*	*3.00*		*BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK*

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)*		*5.00*	*5.00*	*5.00*	103.733.060,00	*(Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	*Aparatur*	*5.00*	114.106.366,00	*BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK*
2.	**8.01.02**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	***Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengembangan wawasan kebangsaan (%)***				***49***	**1.256.985.542,00**			**Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing**	**Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**1.154.603.021,00**	***BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK***
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	*Persentase pelaksanaan pemantapan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan (%)*				*49*	1.256.985.542,00	*(Dalam Daerah, KAB. PESISIR BARAT)*		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia		*51*	1.154.603.021,00	*BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK*
	8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)*		*50.00*	*100.00*	*150.00*	1.049.639.110,00	*(Dalam Daerah, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	*Masyarakat*	*200.00*	1.154.603.021,00	*BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK*
	8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)*		*50.00*	*100.00*	*150.00*	207.346.432,00	*(Dalam Daerah, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	*Masyarakat*	*200.00*	-	*BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK*
3.	**8.01.03**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	***Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu (%)***				***84.92***	**32.390.266.865,00**			**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**35.629.293.552,00**	***BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK***

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik						32.390.266.865,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			35.629.293.552,00	
			Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik (%)				*84.92*		*(Dalam Daerah, KAB. PESISIR BARAT)*				*84.92*		*BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK*
	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah						32.161.774.568,00			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia		35.377.952.025,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)		*50.00*	*100.00*	*150.00*		*(Dalam Daerah, KAB. PESISIR BARAT)*		*Masyarakat dan Partai Politik yang mendapat kursi di pemilihan legislatif*	*200.00*		*BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK*
	8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah						86.859.977,00			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia		95.545.975,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)		*50.00*	*100.00*	*150.00*		*(Dalam Daerah, KAB. PESISIR BARAT)*		*Masyarakat*	*200.00*		*BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK*
	8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah						141.632.320,00			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia		155.795.552,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Laporan)		*2.00*	*2.00*	*2.00*		*(Dalam Daerah, KAB. PESISIR BARAT)*			*Masyarakat*	*2.00*		*BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK*
4.	**8.01.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**						**1.274.406.134,00**			**Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing**	**Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**1.401.846.748,00**	
			Persentase Organisasi Masyarakat yang aktif (%)				***75***									***BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK***
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan						1.274.406.134,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.401.846.748,00	
			Persentase Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (%)				*75*		*(Dalam Daerah, KAB. PESISIR BARAT)*					*75*		*BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK*
	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah						1.197.391.195,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.317.130.315,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)		*50.00*	*100.00*	*150.00*		*(Dalam Daerah, KAB. PESISIR BARAT)*			*Organisasi Masyarakat*	*200.00*		*BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK*
	8.01.04.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah						77.014.939,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			84.716.433,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)		*50.00*	*100.00*	*150.00*		*(Dalam Daerah, KAB. PESISIR BARAT)*			*Organisasi Masyarakat*	*200.00*		*BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK*
5.	**8.01.05**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**						**670.286.948,00**			**Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan**	**Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat**			**737.315.643,00**	
			Persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya (%)				***67.5***									***BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK***

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	*Persentase Pemantapan pelaksanaan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama (%)*				*67.5*	670.286.948,00	*(Dalam Daerah, KAB. PESISIR BARAT)*		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat		*67.5*	737.315.643,00	*BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK*
	8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)*		*50.00*	*100.00*	*150.00*	270.122.866,00	*(Dalam Daerah, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat	*Masyarakat*	*200.00*	297.135.153,00	*BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK*
	8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)*		*50.00*	*100.00*	*150.00*	400.164.082,00	*(Dalam Daerah, KAB. PESISIR BARAT)*	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat	*Masyarakat*	*200.00*	440.180.490,00	*BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK*
6.	**8.01.06**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	***Persentase koordinasi dan peran lembaga dan elemen masyarakat dalam pencegahan terjadinya konflik sosial (%)***				***75***	**2.000.964.064,00**			**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**	**Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**2.201.060.471,00**	***BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK***
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	*Persentase koordinasi, pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial (%)*				*75*	2.000.964.064,00	*(Dalam Daerah, KAB. PESISIR BARAT)*		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia		*75*	2.201.060.471,00	*BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK*
	8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah						550.095.795,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			605.105.375,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)		*50.00*	*100.00*	*150.00*		*(Dalam Daerah, KAB. PESISIR BARAT)*			*Masyarakat*	*200.00*		*BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK*
	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah						850.864.468,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			935.950.915,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)		*50.00*	*100.00*	*150.00*		*(Dalam Daerah, KAB. PESISIR BARAT)*			*Masyarakat*	*200.00*		*BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK*
	8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah						600.003.801,00		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			660.004.181,00	
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Laporan)		*12.00*	*12.00*	*12.00*		*(Dalam Daerah, KAB. PESISIR BARAT)*			*Masyarakat*	*12.00*		*BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK*
	J U M L A H							**938.603.096.460,00**							876.046.730.872,00	

Demikianlah, Lampiran II RKPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024 ini disusun sebagai bentuk menjaga konsistensi dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran daerah tahun 2024. Dokumen RKPD ini untuk dapat dijadikan sebagai pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah tahun 2024 dan penganggaran daerah tahun anggaran 2024, baik KUA PPAS, RAPBD dan DPA Perangkat Daerah.

BUPATI PESISIR BARAT,

ttd

AGUS ISTIQLAL